



PELINDO III
Beyond Port of Indonesia

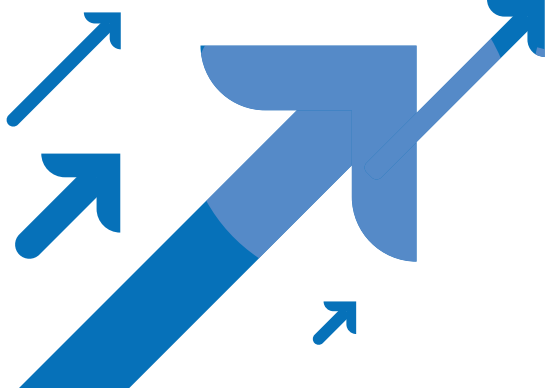
2019

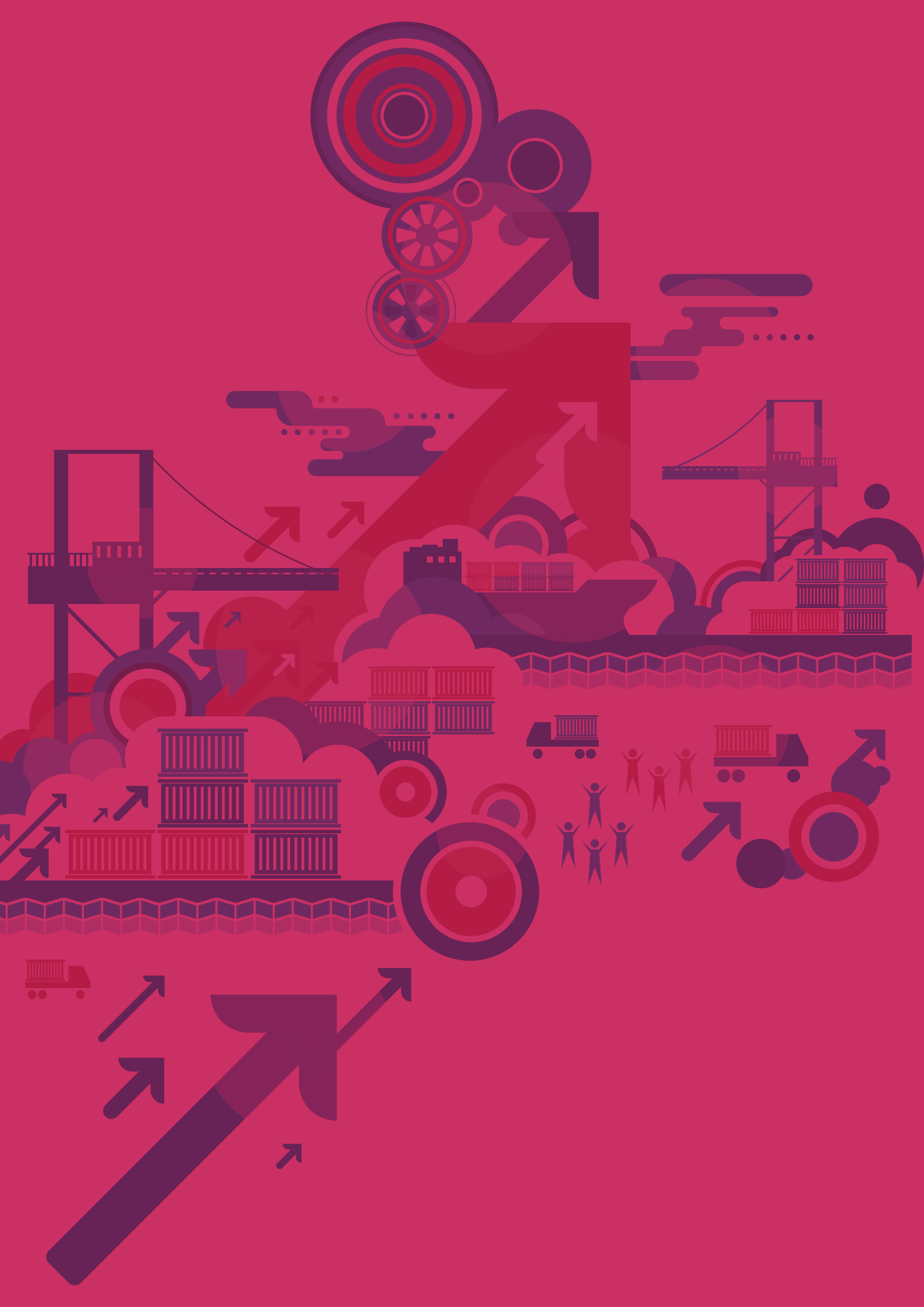
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT



PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

**MEMBERDAYAKAN
PERUBAHAN
MENUJU PERKEMBANGAN**
FOSTERING CHANGE TOWARDS GROWTH





MEMBERDAYAKAN PERUBAHAN MENUJU PERKEMBANGAN

FOSTERING CHANGE TOWARDS GROWTH

Hidup di era yang akrab dengan teknologi yang semakin maju dari tahun ke tahun, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III diharapkan untuk selalu sadar dengan perkembangan saat ini. Dalam mencapai visinya, Perusahaan telah berhasil meningkatkan nilai Perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi serta memiliki daya saing yang kuat untuk memperoleh laba melalui penerapan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Selain itu, ruang lingkup layanan laut Perusahaan telah diperluas tidak hanya ke lingkup nasional tetapi juga regional atau global.

Pelindo III merupakan Perusahaan Induk yang mengelola 6 Anak Perusahaan, 4 Perusahaan Afiliasi, dan 13 Cucu Perusahaan yang bergerak dalam beragam sektor terkait jasa kepelabuhanan. Sebagai penyedia jasa kepelabuhanan terkemuka di Indonesia, beragam inovasi dan peningkatan pelayanan terus dilakukan Pelindo III demi menekan biaya logistik nasional. Tidak hanya itu, Perusahaan selalu ingin berkembang dengan cara memperbarui diri dengan mengikuti perkembangan saat ini, yaitu menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi dan informasi demi terciptanya daya saing nasional dan global.

Existing in an era side by side with an ever-improving technology over the years, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III is expected to always be mindful to the current development. In achieving its vision, the Company has succeeded in improving its values by optimising the existing human resources to produce high-quality products and services whilst possessing strong competitiveness to earn profit through the implementation of Limited Liability Companies' principles. Furthermore, the Company's marine services scope has been expanded not only in national-scale but also regional and global.

Pelindo III is a Parent Company managing six Subsidiaries, four Affiliate Companies, and thirteen Second-Tier Subsidiaries engaging in various port services sectors. As a prominent provider of port services in Indonesia, various innovation and service improvements have been taken by Pelindo III to suppress national logistics costs. Furthermore, the Company strives to develop by adapting itself with the current developments through the presentation of various technology and information-based services to strengthen the Company's national and global competitiveness.

KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT THEME CONTINUITY

2018



2017



MERAIH KEUNGGULAN MELALUI INOVASI, INTEGRASI, KONTRIBUSI ACHIEVING EXCELLENCE THROUGH INNOVATION, INTEGRATION, CONTRIBUTION

Masa depan industri jasa kepelabuhanan tampak menjanjikan seiring dengan terus bertumbuhnya industri transportasi laut, meningkatnya permintaan akan kargo peti kemas dan bulk, serta ekspansi pusat-pusat perdagangan di ranah regional. Meski demikian, pergeseran pada tren ekonomi, arus perdagangan, serta pola demografis global menjadi beberapa faktor yang akan memengaruhi para pelaku bisnis untuk terus beradaptasi dengan perubahan ini. Sebagai salah satu entitas bisnis di sektor bisnis ini, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) telah menetapkan program-program kerja untuk meraih keunggulan di tengah kompetisi industri jasa kepelabuhanan.

Pelaksanaan program kerja ini mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan untuk menjadi "Emerging Industry Leader" dengan melakukan transformasi menjadi "Full-Handling Terminal System & Logistic Integration-Integrated Industrial Port Estate". Upaya-upaya inovasi dan integrasi dalam pelaksanaan program-program kerja di tahun 2018 bukan hanya sebagai dasar pelaksanaan visi dan misi perusahaan, namun juga upaya untuk meningkatkan kontribusi Pelindo III kepada Negara.

The future of the port services industry looks promising along with the growth in the marine transportation industry, surging growth in demand for containerised and bulk cargo, as well as the expansion of regional trade hubs. That being said, shifts in economic trends, trade flow, and global demographic pattern are some of the factors that influence business actors to continuously adapt to the incoming changes. As one of the entities in the business sector, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) has set a number of work programmes to achieve excellence amidst the competitive port services industry.

Implementation of the work programmes is also supporting the achievement of the Company's strategic goal to be the 'Emerging Industry Leader' by transforming into a 'Full-Handling Terminal System & Logistic Integration-Integrated Industrial Port Estate'. The innovation and integration efforts contained within the work program were not only the basis of implementing the corporate vision and mission but also an effort to increase the contribution of Pelindo III to Indonesia.

MEMBANGUN BUDAYA POSITIF MELALUI TRANSFORMASI BUDAYA PERUSAHAAN (SDM, PROSES, DAN TEKNOLOGI) CREATING POSITIVE CHANGES BY CORPORATE CULTURE TRANSFORMATION (PEOPLE, PROCESS, AND TECHNOLOGY)

Seiring dengan perubahan yang berjalan secara dinamis pada aspek sosial, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi dewasa ini, menuntut Perusahaan sebagai entitas bisnis di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Proses bisnis dan konektivitas yang berlangsung cepat dan tanpa batas sangat diperlukan bagi Perusahaan dalam rangka meningkatkan performa layanan serta menyelaraskan aktivitas usaha dengan standar layanan yang berlaku secara global dengan tetap mengusung nilai-nilai bisnis yang berlaku secara nasional sebagai diferensiasi.

Perusahaan percaya, dengan adanya perubahan ke arah yang positif, Perusahaan akan bergerak dinamis dalam melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha yang dijalankan.

Tema "Membangun Perubahan Positif Melalui Transformasi Budaya Perusahaan (SDM, Proses dan Teknologi)" sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam melakukan perubahan dari aspek kecil hingga besar yang membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha Perusahaan. Serta menggambarkan tujuan-tujuan progresif dalam menggapai satu tujuan yang lebih baik.

In line with the changes in social and economic aspect, as well as the dynamic use of technology at present, the Company, as a business entity engaging in port service sector, is required to conduct the necessary adjustments. Rapid business process and unlimited connectivity is needed for the Company to leverage its service performance as well as aligning business activities with the globally applicable service standards, by continuously upholding the national business values as a differentiation.

The Company believes that along with changes towards positive directions, the Company will move dynamically in performing the innovations needed to support its business activities in the future.

The theme "Creating Positive Changes by Corporate Culture Transformation (People, Process and Technology)" describes the efforts made by the Company to bring changes, either in small or great form, to bring positive impact on the Company's business, as well as the progressive objectives of the Company to attain its ultimate target.

2016



TOWARDS ICT BASED ENTERPRISE

Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III diselenggarakan secara komprehensif dan mengacu pada prinsip IT Governance sesuai regulasi dan standar *Best Practice* bidang layanan IT. Hal ini tercermin dari mulai proses perencanaan, pengembangan, operasionalisasi, dan pemeliharaan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan diselenggarakan berbasis kapabilitas, yaitu dengan mengembangkan kapabilitas pelayanan bisnis maupun penguatan kapabilitas internal Teknologi Informasi baik sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Pelindo III Information Technology and Communication Service is conducted comprehensively and refers to the principles of IT Governance according to the regulation and standard of Best Practice in IT service area. This is reflected in all processes, starting from the process of planning, development, operation until maintenance.

The development of Company's Information and Communication Technology is based on capability, by developing business service capability as well as strengthening internal capability of Information Technology both human capital and infrastructure.

2015



MANAGING THE FUTURE

Tahun 2015 merupakan momentum strategis bagi Pelindo III untuk melanjutkan langkah pengembangan Perusahaan dengan visi pencapaian masa depan gemilang. Seluruh upaya yang dilakukan berorientasi kepada kesinambungan manajemen yang solid dan tangguh.

Karena itu, kami terus bekerja keras mendayagunakan segala potensi serta sumber daya yang ada guna menggapai target-target dan harapan Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan yang dapat dipetik hasilnya di masa depan. Sebab, kami tidak hanya bekerja untuk hari ini saja, tetapi mengelola usaha yang hidup berkesinambungan untuk generasi mendatang.

The year of 2015 was a strategic moment for Pelindo III to continue the Company's development measures with the vision of achieving a bright future. The entire efforts conducted was oriented to the solid and resilient management sustainability.

Therefore, we are striving hard to utilizing all potential of the existing resources in order to achieve targets and expectations of Shareholders and all stakeholders that can be fruitful in the future. Because we are not only working for this moment, but managing a sustain business for the future generations.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan <i>Annual Report Theme Continuity</i>	4	Testimoni <i>Testimonials</i>	63
Daftar Isi <i>Table of Content</i>	6	Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certifications</i>	64
Referensi Kriteria ARA 2018 <i>Cross Reference for 2018 Annual Report Award Criteria</i>	12	Peristiwa Penting 2019 <i>Significant Events in 2019</i>	72
Ringkasan Kinerja 2019 <i>2019 Performance Highlight</i>	34	Tim Penyusun Laporan Tahunan 2019 <i>Compilation Team for the 2019 Annual Report</i>	80
Grafik Ikhtisar Keuangan <i>Chart of Financial Highlight</i>	36		
Grafik Ikhtisar Operasional <i>Chart of Operational Highlight</i>	46	 LAPORAN MANAJEMEN <i>MANAGEMENT REPORT</i>	82
Ikhtisar Keuangan <i>Financial Highlight</i>	50	Laporan Dewan Komisaris <i>Report of the Board of Commissioners</i>	85
Ikhtisar Operasional <i>Operational Highlight</i>	53	Laporan Direksi <i>Report of the Board of Directors</i>	93
Ikhtisar Saham <i>Share Highlight</i>	53	Pernyataan Tanggung Jawab <i>Statement of Responsibility</i>	102
Ikhtisar Obligasi <i>Bonds Highlight</i>	54		
Pemeringkat Obligasi <i>Bonds Ratings</i>	56	 PROFIL PERUSAHAAN <i>COMPANY PROFILE</i>	104
Ikhtisar Dividen <i>Dividend Highlight</i>	58	Informasi Perusahaan <i>Company Information</i>	106
Tentang Laporan Tahunan Pelindo III 2019 <i>About the 2019 Annual Report of Pelindo III</i>	59	Riwayat Singkat Perusahaan <i>History of Establishment</i>	108
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab <i>Disclaimer</i>	60	Jejak Langkah Perusahaan <i>Company Milestones</i>	110
Pemenuhan Aspirasi Pemangku Kepentingan <i>Fulfilling Aspirations of the Stakeholders</i>	61	Makna Logo Perusahaan <i>Corporate Logo Meaning</i>	112

Bidang Usaha <i>Business Lines</i>	113	Informasi Lembaga dan Profesi Penunjang <i>Information on Supporting Institutions and Professionals</i>	178
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission, and Corporate Culture</i>	116	Informasi pada Situs Web Perusahaan <i>Information on Company Website</i>	184
Struktur Organisasi <i>Organisational Structure</i>	122	Alamat Kantor Pusat, Entitas Anak, Perwakilan, dan Cabang Perusahaan <i>Address of Head Office, Subsidiaries, Representative Offices, and Branch Offices</i>	186
Profil Dewan Komisaris <i>Profile of the Board of Commissioners</i>	124	Wilayah Operasional Perusahaan <i>Company Operational Area</i>	190
Profil Direksi <i>Profile of the Board of Directors</i>	132		
Daftar dan Profil Pejabat Senior <i>List and Profile of Senior Officers</i>	142		
Daftar dan Profil General Manager <i>List and Profile of General Managers</i>	146		
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham <i>Structure and Composition of Shareholders</i>	152		
Pemegang Saham Utama dan Pengendali <i>Major and Controlling Shareholder</i>	155		
Daftar Entitas Anak dan Asosiasi <i>List of Subsidiaries and Associate Entities</i>	156		
Struktur Grup Perusahaan <i>Company Group Structure</i>	174		
Kronologi Pencatatan Saham <i>Share Listing Chronology</i>	176		
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya <i>Chronology of Other Securities Listing</i>	176		
		TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS <i>REVIEW OF BUSINESS SUPPORT</i>	192
		Sumber Daya Manusia <i>Human Capital</i>	194
		Teknologi Informasi dan Komunikasi <i>Information and Communication Technology</i>	251
		ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN <i>MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS</i>	270
		Tinjauan Umum <i>General Overview</i>	272

Tinjauan Kinerja Operasional <i>Operational Overview</i>	278	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi <i>Information on Material Transaction Containing Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Parties</i>	351
Kinerja Entitas Anak <i>Performance of Subsidiaries</i>	295	Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait <i>Amendment to the Related Laws and Regulations</i>	360
Tinjauan Kinerja Keuangan <i>Financial Overview</i>	312	Perubahan Kebijakan Akuntansi <i>Changes in Accounting Policy</i>	360
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur <i>Capital Structure and Management Policy on Capital</i>	334	Informasi Kelangsungan Usaha <i>Information on Business Continuity</i>	363
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal <i>Material Commitment for Capital Goods Investment</i>	335		
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntansi <i>Information and Material Fact after Balance Sheet</i>	337		
Prospek Usaha <i>Business Prospect</i>	338		
Proyeksi Tahun 2020 <i>Projection for 2020</i>	340		
Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspects</i>	341		
Dividen <i>Dividend</i>	344		
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) <i>Employee Stock Ownership and/or Management Programme (ESOP/MSOP)</i>	346		
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum <i>Realisation of the Use of Proceeds from Public Offering</i>	346		
Informasi Realisasi Investasi Barang Modal <i>Information on Capital Goods Realisation</i>	347		
		 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	366
		Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance</i>	368
		Penilaian Penerapan GCG <i>Assessment on GCG Implementation</i>	380
		Key Performance Indicator (KPI)	392
		Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>	400
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	413
		Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris <i>Committees under the Board of Commissioners</i>	441
		Direksi <i>Board of Directors</i>	470

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	501	Pemenuhan Aspek Kepatuhan <i>Fulfilment on Compliance Aspect</i>	570
Asesmen terhadap Dewan Komisaris dan Direksi <i>Assessment on the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	509	Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa <i>Mechanism of Goods and Services Procurement</i>	573
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Remuneration Policies for the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	511	Kebijakan dan Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Policy and Control</i>	576
Informasi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Information on Affiliations of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	517	Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i>	579
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Policy on Diversity in Board of Commissioners and Board of Directors Compositions</i>	519	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara <i>Report of State Official Assets</i>	584
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	521	Akses dan Informasi Perusahaan <i>Company Access and Information</i>	586
Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Unit</i>	527	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>	588
Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>	534	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial <i>Governance on Corporate Social Responsibility</i>	590
Sistem Pengendalian Intern <i>Internal Control System</i>	538	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia <i>Corporate Social Responsibility on Human Rights</i>	595
Manajemen Risiko Perusahaan <i>Corporate Risk Management</i>	541	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Operasi yang Adil <i>Corporate Social Responsibility on Fair Operations</i>	597
Kode Etik <i>Code of Conduct</i>	559		
Perkara Penting Perusahaan dan Grup di 2019 <i>Legal Case of the Company and Groups in 2019</i>	568		

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan terkait Lingkungan
Hidup

604

*Corporate Social Responsibility
on the Environment*

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan terkait
Ketenagakerjaan, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja

607

*Corporate Social Responsibility
on Employment, Occupational
Health and Safety*

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan terkait Tanggung
Jawab terhadap Pelanggan

623

*Corporate Social Responsibility
on Consumer Responsibility*

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan terkait
Pengembangan Sosial dan
Kemasyarakatan

629

*Corporate Social Responsibility
on Social and Community
Development*



LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENT

640





REFERENSI KRITERIA ARA 2018

CROSS REFERENCE FOR 2018 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
I UMUM		GENERAL	
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	<i>The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English</i>	✓
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	<i>The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts</i>	✓
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	<i>The Annual Report shall present clear identity of the company Company name and the annual report financial year shall be presented on:</i> 1. <i>Front Cover;</i> 2. <i>Side Cover;</i> 3. <i>Back Cover; and</i> 4. <i>Every page</i>	✓
4	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	<i>The Annual Report shall be posted in the company's website Including the latest annual report as well as those for the last four years, at least.</i>	✓
II IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING		KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS	
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali 3. Total laba (rugi) komprehensif a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	<i>Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years</i> <i>Information contains the following:</i> 1. <i>Income;</i> 2. <i>Profit (loss):</i> a. <i>Attributable to equity holders of the parent entity; and</i> b. <i>Attributable to non controlling interest;</i> 3. <i>Total comprehensive profit (loss):</i> a. <i>Attributable to equity holders of the parent entity; and</i> b. <i>Attributable to non controlling interest;</i> 4. <i>Earning (loss) per share.</i> <i>Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.</i>	36, 50

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
2	<p>Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. 	<p><i>Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years</i></p> <p><i>Information contains the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Total investment on associates;</i> 2. <i>Total assets</i> 3. <i>Total liabilities; and</i> 4. <i>Total equity.</i> 	51
3	<p>Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.</p> <p>Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.</p>	<p><i>Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years</i></p> <p><i>Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry</i></p>	52
4	<p>Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: <ol style="list-style-type: none"> a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. <p>Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.</p> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Share price information in tables and charts</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Number of shares outstanding;</i> 2. <i>The table forms contain the following information:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Market capitalization based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed;</i> b. <i>Highest, lowest and closing share price based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and</i> c. <i>Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed.</i> 3. <i>The graph forms contain at least the following information:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The closing price of shares based on share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and</i> b. <i>Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed</i> <p><i>For each quarter in the latest 2 (two) financial years.</i></p> <p><i>Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.</i></p>	53
5	<p>Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Informasi memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years</i></p> <p><i>Information contains:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds;</i> 2. <i>Interest rate/yield;</i> 3. <i>Maturity date; and</i> 4. <i>Rating of bonds/sukuk in 2017 and 2018.</i> <p><i>Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.</i></p>	54

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
III LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI			
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS' REPORT			
1	Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	<i>Board of Commissioners' Report</i> <i>Contain the following:</i> 1. <i>Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation;</i> 2. <i>Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration;</i> 3. <i>Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and</i> 4. <i>Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.</i>	86
2	Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. Kebijakan strategis; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	<i>Board of Directors' report</i> <i>Contain the following:</i> 1. <i>Analysis of the company's performance, covering among others:</i> a. <i>Strategic policies;</i> b. <i>Comparison between targets and achievements; and</i> c. <i>Challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges;</i> 2. <i>Analysis on business prospects;</i> 3. <i>Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and</i> 4. <i>Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes</i>	93
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	<i>Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors</i> <i>Contain the following:</i> 1. <i>Signatures on a separate page;</i> 2. <i>Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report;</i> 3. <i>Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and</i> 4. <i>Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation in separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.</i>	102
IV PROFIL PERUSAHAAN			
COMPANY PROFILE			
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	<i>Name and complete address of the company</i> <i>Information contains, among others, name and address, post code, telephone number, fax, email and website.</i>	106

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
2	Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	<i>Brief history of the company Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name. Note: to be disclosed if the company never had a change of name</i>	108
3	Bidang usaha Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	<i>Line of business Description of, among others: 1. The line of business as stated in the latest Articles of Association; 2. Business activities; and 3. Product and/or services offered.</i>	113
4	Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	<i>Organization structure Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least</i>	122
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	<i>Vision, Mission and Corporate Culture Covers: 1. Vision; 2. Mission; 3. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/Directors in the fiscal year; and 4. Statement on the corporate culture.</i>	116
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	<i>Profiles of members of the Board of Commissioners Contain information on: 1. Name; 2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (study field and education institution); 6. Work experience (position, company, and period in position); and 7. History of assignments (period and position) as member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.</i>	124
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	<i>Profiles of members of the Board of Directors Contain information on: 1. Name; 2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (study field and education institution); 6. Work experience (position, company, and period in position); and 7. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.</i>	132

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
8	<p>Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. 	<p><i>Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization</i></p> <p><i>Information contains, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Number of employees at each level of the organization;</i> <i>Number of employees by education;</i> <i>Number of employees by employment status;</i> <i>Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning position of participants, type of training, and purpose of training; and</i> <i>The costs of employee competence development programs in the fiscal year.</i> 	206-246
9	<p>Komposisi Pemegang saham</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. <p>Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Shareholders composition</i></p> <p><i>Covering among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage;</i> <i>Details of shareholders and shareholding percentage:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Names of shareholders with 5% or more shareholding; and</i> <i>Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each.</i> <i>Names of Director and Commissioner with direct or indirect share-ownership and the percentage of such shareholding.</i> <p><i>Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.</i></p>	152
10	<p>Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi</p> <p>Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama entitas anak dan/atau asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). 	<p><i>List of subsidiaries and/or associated entities</i></p> <p><i>In table form, containing:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Name of subsidiary and/or associated entity;</i> <i>Share-ownership percentage;</i> <i>Line of business of subsidiary and/or associated entity; and</i> <i>Operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/not yet in commercial operation).</i> 	156
11	<p>Struktur grup perusahaan</p> <p>Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i>, dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).</p>	<p><i>Corporate group structure</i></p> <p><i>Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).</i></p>	174

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
12	<p>Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year</i></p> <p><i>Covers, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action; 2. Total number of shares outstanding following the corporate action; and 3. The stock exchange where the shares are listed. <p><i>Note: should be disclosed if the company does not have a chronology of share listing.</i></p>	176
13	<p>Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year</i></p> <p><i>Covers, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date; 2. Offering price of other securities; 3. The stock exchange where the securities are listed; and 4. Rating of securities. <p><i>Note: should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/listing</i></p>	176
14	<p>Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. 	<p><i>Name and address of supporting institutions and/or professionals</i></p> <p><i>Covers, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and address of the company's Share Registrar; 2. Name and address of Public Accountant Firm; and 3. Name and address of rating agencies. 	178
15	<p>Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). 	<p><i>Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels</i></p> <p><i>Covers, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of award and/or certification; 2. Year received/issued; 3. Name of institution that issued the award/certification; and 4. Validity period (certification). 	64
16	<p>Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)</p> <p>Memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan</p>	<p><i>Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any)</i></p> <p><i>Covers information on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and address of subsidiaries; and 2. Name and address of branch/representative office. <p><i>Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.</i></p>	186

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
17	Informasi pada Website Perusahaan Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	<i>Information in the corporate website Covers at the very least:</i> 1. <i>Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder;</i> 2. <i>Contents of the Code of Conduct;</i> 3. <i>Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, and announcement of summary GMS resolutions;</i> 4. <i>Annual financial statements (last 5 years);</i> 5. <i>Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and</i> 6. <i>Board manual/Charter of the BoC, BoD, Committees and Internal Audit Unit.</i>	184
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. Yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	<i>Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit</i> <i>Cover at least information of type of training and participant of:</i> 1. <i>Training and/or education for Board of Commissioners;</i> 2. <i>Training and/or education for Board of Directors;</i> 3. <i>Training and/or education for Audit Committee;</i> 4. <i>Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee;</i> 5. <i>Training and/or education for other Committee(s);</i> 6. <i>Training and/or education for Corporate Secretary; and</i> 7. <i>Training and/or education for Internal Audit Unit.</i> <i>During the fiscal year.</i> <i>Note: should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year</i>	425, 488, 454, 469, 467, 526, 532
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN	MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE COMPANY PERFORMANCE	
1	Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi c. Penjualan/pendapatan usaha d. Profitabilitas	<i>Operation review per business segment Includes analysis on:</i> 1. <i>Elaboration on each business segment.</i> 2. <i>Performance of each business segment, among others:</i> a. <i>Production;</i> b. <i>Increase/Decrease of production capacity;</i> c. <i>Sales/income; and</i> d. <i>Profitability.</i>	278

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
2	<p>Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas. 	<p><i>Description on the Company's financial performance An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Current assets, non-current assets, and total assets;</i> 2. <i>Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;</i> 3. <i>Equity;</i> 4. <i>Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and</i> 5. <i>Cash flows.</i> 	312-330
3	<p>Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan</p> <p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang 	<p><i>Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry</i></p> <p><i>Explanation on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Solvability, both short term and long term; and</i> 2. <i>Level of receivables collectibility.</i> 	331
4	<p>Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)</p> <p>Penjelasan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. 	<p><i>Discussion on capital structure, and management policy on capital structure</i></p> <p><i>Explanation of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Details of capital structure comprising of interest-bearing debts/sukuk and equity;</i> 2. <i>Capital structure policies; and</i> 3. <i>Basis for the determination of capital structure policies.</i> 	334
5	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir</p> <p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p>	<p><i>Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year</i></p> <p><i>Explanation on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Parties in the commitments;</i> 2. <i>Objectives of the commitments;</i> 3. <i>Sources of funds to meet the commitments;</i> 4. <i>Denomination currency of commitments; and</i> 5. <i>Initiatives taken to mitigate exchange rate risk.</i> <p><i>Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment for capital investments in the fiscal year.</i></p>	335

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
6	<p>Bahasan mengenai ikatan investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.</p> <p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Discussion on capital goods investment bond realised at the latest financial year</i></p> <p><i>Explanation on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Type of capital investment;</i> 2. <i>Objectives of capital investment; and</i> 3. <i>Nominal value of capital investment realized in the last fiscal year.</i> <p><i>Note: should be disclosed if there are no capital investment.</i></p>	347
7	<p>Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. 	<p><i>Information on the comparison between initial target at the beginning of financial year and the realization and target or projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered significant target for the company.</i></p> <p><i>Contain information on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and</i> 2. <i>Targets or projections set for the next 1 (one) year.</i> 	340
8	<p>Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan</p> <p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events)</i></p> <p><i>Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future.</i></p> <p><i>Note: should be disclosed if there are no subsequent events.</i></p>	337
9	<p>Uraian tentang prospek usaha perusahaan</p> <p>Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.</p>	<p><i>Business prospects</i></p> <p><i>Description on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources</i></p>	338
10	<p>Uraian tentang aspek pemasaran</p> <p>Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/ atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.</p>	<p><i>Marketing aspects</i></p> <p><i>Description on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares</i></p>	341
11	<p>Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. <p>Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.</p>	<p><i>Description on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years</i></p> <p><i>Contain information on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dividend payout policy;</i> 2. <i>Total dividend disbursement;</i> 3. <i>Total cash dividend per share;</i> 4. <i>Payout ratio; and</i> 5. <i>Announcement date and cash dividend payout for each year.</i> <p><i>Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons.</i></p>	344

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
12.	<p>Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP), yang masih ada sampai tahun buku. Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/ MSOP) still ongoing in the fiscal year</i></p> <p><i>Contain information on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Number of ESOP/MSOP shares and its execution;</i> 2. <i>Period;</i> 3. <i>Eligible employee/management; and</i> 4. <i>Exercise price.</i> <p><i>Note: should be disclosed if there are no such programs</i></p>	346
13.	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report)</i></p> <p><i>Covers the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Total proceeds;</i> 2. <i>Proceeds utilization plan;</i> 3. <i>Proceeds utilization details;</i> 4. <i>Proceeds balance; and</i> 5. <i>The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any).</i> <p><i>Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.</i></p>	346
14.	<p>Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties</i></p> <p><i>Covers the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name of transacting parties and the nature of related parties;</i> 2. <i>Description of the transaction fairness;</i> 3. <i>Transaction background;</i> 4. <i>Transaction realization at the last financial year;</i> 5. <i>Company policy related with transaction review mechanism; and</i> 6. <i>Compliance to relevant regulations and provisions.</i> <p><i>Note: To disclose if there are no transactions.</i></p>	351
15.	<p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company</i></p> <p><i>Covers information on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name of regulations; and</i> 2. <i>The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact</i> <p><i>Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts</i></p>	360

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
16.	<p>Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year</i></p> <p><i>Descriptions include among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Changes in accounting policy;</i> 2. <i>Reasons for the change; and</i> 3. <i>Quantitative impact on the financial statements</i> <p><i>Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year</i></p>	360
17.	<p>Informasi kelangsungan usaha. Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p>	<p><i>Information on business continuity.</i></p> <p><i>Disclosures on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Significant issues on the company business continuity at the last financial year;</i> 2. <i>Management assessment on point 1; and</i> 3. <i>Assumption implemented by the management in conducting the assessment.</i> <p><i>Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year.</i></p>	363
VI. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK		GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
1.	<p>Uraian Dewan Komisaris</p> <p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). 	<p><i>Description on the Board of Commissioners</i></p> <p><i>Covers the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Board of Commissioners responsibilities;</i> 2. <i>Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and</i> 3. <i>Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures)</i> 	413
2.	<p>Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)</p> <p>Meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. 	<p><i>Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners)</i></p> <p><i>Covers the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assignment criteria of Independent Commissioners; and</i> 2. <i>Independency statement of each Independent Commissioner.</i> 	439
3.	<p>Uraian Direksi</p> <p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). 	<p><i>Description on the Board of Directors</i></p> <p><i>Covers information on, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;</i> 2. <i>Assessment of performance of committees under the Board (if any); and</i> 3. <i>Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)</i> 	470

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
4.	<p>Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. <p>Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.</p>	<p><i>GCG implementation assessment for 2015, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors</i></p> <p><i>Covers the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assessment criteria;</i> 2. <i>Assessor;</i> 3. <i>Assessment score on each criteria;</i> 4. <i>Recommendations on results of assessment; and</i> 5. <i>Reasons for the delay or non implementation of such recommendations.</i> <p><i>Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2015</i></p>	380
5.	<p>Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/ atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors</i></p> <p><i>Covers the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors;</i> 3. <i>Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners;</i> 4. <i>Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors;</i> 5. <i>Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and</i> 6. <i>Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any).</i> <p><i>Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.</i></p>	511
6.	<p>Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal rapat 2. Peserta rapat 3. Agenda rapat <p>Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.</p>	<p><i>Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in two months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors (at least once in four months)</i></p> <p><i>Covers among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Date;</i> 2. <i>Attendance; and</i> 3. <i>Agenda.</i> <p><i>Of each of the meetings of Board of Commissioners, Board of Directors, and joint meetings</i></p>	426-433, 488-493, 501

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
7.	<p>Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.</p> <p>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</p>	<p><i>Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder</i> <i>Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders</i></p> <p><i>Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder</i></p>	155
8.	<p>Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority and/or Controlling Shareholders</i> <i>Covers, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors;</i> 2. <i>Affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners;</i> 3. <i>Affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder;</i> 4. <i>Affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and</i> 5. <i>Affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder.</i> <p><i>Note: should be disclosed if there are no affiliation relationship</i></p>	517
9.	<p>Komite Audit Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. 	<p><i>Audit Committee</i> <i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name, position and tenure of audit committee members;</i> 2. <i>Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members;</i> 3. <i>Independency of audit committee members;</i> 4. <i>Duties and responsibilities;</i> 5. <i>Brief report of audit committee activity; and</i> 6. <i>Meeting frequency and attendance of audit committee.</i> 	443-455

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
10.	<p>Komite Nominasi dan/atau Remunerasi</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. 	<p><i>Nomination and/or Remuneration Committee</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee;</i> 2. <i>Independency of Nomination and/or Remuneration Committee;</i> 3. <i>Duties and responsibilities ;</i> 4. <i>Brief report of committee activity in the fiscal year;</i> 5. <i>Meeting frequency and attendance;</i> 6. <i>Statement of committee charter; and</i> 7. <i>Policies on Director succession.</i> 	467-469
11.	<p>Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan</p> <p>Komite Pemantau Manajemen Risiko</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. 	<p><i>Other committees under the Board of Commissioners</i></p> <p><i>Risk Management Monitoring Committees</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name, position and brief profile of members of committee;</i> 2. <i>Independency of committee;</i> 3. <i>Duties and responsibilities ;</i> 4. <i>Committee activity in the fiscal year; and</i> 5. <i>Committee meeting frequency and attendance.</i> 	455-467
12.	<p>Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. 	<p><i>Description of duties and functions of Corporate Secretary</i></p> <p><i>Information on, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name and brief work experience of Corporate Secretary;</i> 2. <i>Domicile;</i> 3. <i>Duties and responsibilities; and</i> 4. <i>Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.</i> 	521
13.	<p>Uraian mengenai unit audit internal</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. 	<p><i>Description on Internal Audit Unit</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name of internal audit unit head;</i> 2. <i>Total employees (internal auditors) in internal audit unit;</i> 3. <i>Certification on internal audit profession;</i> 4. <i>Internal audit unit composition in the company's structure;</i> 5. <i>Brief report on internal audit unit activity implementation; and</i> 6. <i>The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.</i> 	527

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
14.	<p>Akuntan Publik</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Public Accountant</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name and year of public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years;</i> 2. <i>Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years;</i> 3. <i>The amount of fee for each service provided by public accountant in the last financial year; and</i> 4. <i>Other services by the Public Accounting Firm and the Public Accountant besides the annual financial statement audit service in the last financial year.</i> <p><i>Note: to disclose if there are no other services rendered</i></p>	534
15.	<p>Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. 	<p><i>Description on risk management of the company</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Explanation on risk management system implemented by the company;</i> 2. <i>Explanation on risk management system effectiveness evaluation;</i> 3. <i>Explanation on risks faced by the company; and</i> 4. <i>Risk mitigation.</i> 	541
16.	<p>Uraian mengenai sistem pengendalian intern</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. 	<p><i>Description of internal control system</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control;</i> 2. <i>Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO - internal control framework); and</i> 3. <i>Explanation on internal control system effectiveness evaluation.</i> 	538

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
17.	<p>Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial; 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan; 3. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan; 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan; 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban; 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder; 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan; dan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial. 	<p><i>Description of Corporate Social Responsibility related to Social Responsibility Governance Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The commitment to social responsibility;</i> 2. <i>Methods and scope of due diligence on social, economic, and environmental impacts of the company's activities;</i> 3. <i>Important stakeholders impacted or influential to the impacts of the company's activities;</i> 4. <i>Important social, economic, and environmental issues related to the impacts of the company's activities;</i> 5. <i>The scope of corporate social responsibility, both obligatory and beyond;</i> 6. <i>The company's strategies and work programs in handling social, economic, and environmental issues for stakeholder engagement and increasing value for the stakeholders and shareholders;</i> 7. <i>Various programs exceeding the company's minimum responsibility relevant to the business carried out; and</i> 8. <i>The financing and budgeting of corporate social responsibility.</i> 	590
18.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjek Hak Asasi Manusia Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Asasi Manusia; 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Asasi Manusia; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia; dan 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia. 	<p><i>Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The commitment and policies of social responsibility on the core subjects of Human Rights;</i> 2. <i>The social responsibility scope on the Human Rights core subject formulated by the company;</i> 3. <i>Corporate social responsibility planning on Human Rights;</i> 4. <i>The implementation of CSR initiatives on Human Rights; and</i> 5. <i>The achievement and awards on Human Rights CSR initiatives.</i> 	595

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
19.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjek Operasi yang adil</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil; 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil; 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil; dan 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. 	<p><i>Description of corporate social responsibility related to the core subject of Fair Operations</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The commitment and policies of social responsibility on the core subjects of Fair Operations;</i> 2. <i>The social responsibility scope on the Fair Operations core subject formulated by the company;</i> 3. <i>Corporate social responsibility planning on Fair Operations;</i> 4. <i>The implementation of CSR initiatives on Fair Operations; and</i> 5. <i>The achievement and awards on Fair Operations CSR initiatives.</i> 	597
20.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup</p> <p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan; 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan; 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan; 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup; 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain; dan 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. 	<p><i>Description of corporate social responsibility related to the environment</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The commitment and policies of social responsibility on the environment;</i> 2. <i>Environmental impacts and risks directly or indirectly related to the company;</i> 3. <i>Activity targets/plans in 2018 set by the management;</i> 4. <i>Activities that will be carried out related to the environment and the company's operations;</i> 5. <i>The implementation of CSR initiatives related to the environment;</i> 6. <i>The quantitative achievement of the activity and matters such as the use of environmentally friendly and recyclable material and energy, waste processing system, environmental claim mechanism, consideration of environmental aspects in giving credits to customers, and so forth; and</i> 7. <i>Environmental certifications of the company.</i> 	604

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
21.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.</p> <p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjek ketenagakerjaan; 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan; 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. 	<p><i>Description of corporate social responsibility related to employment as well as occupational health and safety.</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Commitment and policies of social responsibility on the core subject of employment;</i> 2. <i>The scope and formulation of social responsibility on employment;</i> 3. <i>Activity targets/plans in 2018 set by the management;</i> 4. <i>Implemented activities and quantitative impacts of the activities; and</i> 5. <i>Practices of employment as well occupational health and safety, such as gender equality and work opportunity, work facilities and safety, employee turnover rate, work accident rate, remuneration, complaint mechanism for employment affairs, and so forth.</i> 	607
22.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. 	<p><i>Description of corporate social responsibility related to the responsibility to customers</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Activity targets/plans in 2018 set by the management;</i> 2. <i>Implemented activities and the impacts of the activities; and</i> 3. <i>Matters related to product responsibility, such as the consumers' health and safety, product information, facilities, the number of consumer complaints and handling mechanisms, and so forth.</i> 	623
23.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan.</p> <p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjek pengembangan sosial dan kemasyarakatan; 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan; 3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan; 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan; 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; 7. Biaya yang dikeluarkan; dan 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. 	<p><i>Description of corporate social responsibility related to social and community development.</i></p> <p><i>Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Policies and commitments of corporate social responsibility on the core subject of social and community development;</i> 2. <i>Social issues relevant to the company;</i> 3. <i>Social risks managed by the company;</i> 4. <i>The scope and formulation of social responsibility on social and community development;</i> 5. <i>Activity targets/plans in 2018 set by the management;</i> 6. <i>Implemented activities and the impact of the activities;</i> 7. <i>The financial cost spent; and</i> 8. <i>Matters related to social and community development, such as employing local human resources, empowering the community around the company, improving social facilities and infrastructure, other forms of donations, communicating anti-corruption policies and procedures, seminars on anti-corruption, and so forth.</i> 	629

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
24.	<p>Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi) <p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Significant litigation currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors that served the position at the annual report period Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The principal litigation/claims;</i> 2. <i>Settlement status of litigation/claims;</i> 3. <i>Impact to the company's condition; and</i> 4. <i>Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged)</i> <p><i>Note: To disclose in the event of no litigation</i></p>	568
25.	<p>Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p>	<p><i>Access to company information and data Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.</i></p>	586
26.	<p>Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Discussion on code of conduct Includes the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Contents of Code of Conduct;</i> 2. <i>Disclosure of code of conduct application in all level of organization;</i> 3. <i>Code of conduct dissemination;</i> 4. <i>Sanctions on code of conduct violations; and</i> 5. <i>Number of violation and sanction in the last fiscal year.</i> <p><i>Note: should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.</i></p>	559
27.	<p>Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p>	<p><i>Disclosure on whistleblowing system</i></p> <p><i>Includes the following mechanism of whistleblowing system:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violations report submission;</i> 2. <i>Whistleblowers protection;</i> 3. <i>Claims handling;</i> 4. <i>Claims managers; and</i> 5. <i>Total claims registered; and</i> 6. <i>Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures.</i> <p><i>Note: if there is no claim submitted and completed in the last financial year, it shall be stated.</i></p>	579

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	<i>Diversity of Directors Composition</i> <i>Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender</i> <i>Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applied</i>	519
VII. INFORMASI KEUANGAN		FINANCIAL INFORMATION	
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	<i>Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements</i> <i>Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility</i>	643
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan	<i>Independent auditor opinion on financial statements</i>	646
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	<i>Independent Auditor Description in the Opinion</i> <i>Description contains the following:</i> 1. <i>Name & signatures;</i> 2. <i>Audit Report date; and</i> 3. <i>License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant</i>	646-647
4.	Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	<i>Comprehensive financial statements</i> <i>Comprehensively covers the financial statements elements:</i> 1. <i>Statements of financial position;</i> 2. <i>Statements of comprehensive income and other comprehensive income;</i> 3. <i>Statements of changes in equity;</i> 4. <i>Statements of cash flows;</i> 5. <i>Notes to financial statements;</i> 6. <i>Comparative information on previous periods; and</i> 7. <i>Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).</i>	642-824
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	<i>Profitability level comparison</i> <i>Comparison of current profit (loss) with the previous year</i>	651-652
6.	Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	<i>Statements of Cash Flows</i> <i>Conformity to the following provisions:</i> 1. <i>Grouping into three category of activities of operations, investment, and financing;</i> 2. <i>Direct method application in the statements of cash flows from operations activity;</i> 3. <i>Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities;</i> 4. <i>Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.</i>	654-655

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	<i>Summary of accounting policies Including at least:</i> 1. <i>Compliance statement to SAK;</i> 2. <i>Basis of measurement and formulation of financial statements;</i> 3. <i>Recognition of income and expense;</i> 4. <i>Employee benefits; and</i> 5. <i>Financial instrument.</i>	679-713
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	<i>Disclosure of related parties transactions The disclosures includes:</i> 1. <i>Name of related parties, and the nature and relationship with related parties;</i> 2. <i>Transaction values and its percentage to total income and expense; and</i> 3. <i>Total balance and its percentage to total assets or liabilities.</i>	724-729
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	<i>Disclosure related to taxes The disclosures shall includes:</i> 1. <i>Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;</i> 2. <i>Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit;</i> 3. <i>Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is use as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return;</i> 4. <i>The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and</i> 5. <i>Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.</i>	698-700, 742-750
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	<i>Disclosure related to fixed assets The disclosures shall includes:</i> 1. <i>Used depreciation method;</i> 2. <i>Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model;</i> 3. <i>Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and</i> 4. <i>Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.</i>	736-739

NO	PENJELASAN KRITERIA	CRITERIA DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
11.	<p>Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi</p> <p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. 	<p><i>Disclosure related to operations segments</i></p> <p><i>The disclosures shall includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>General information covering factors used to identify reported segments;</i> 2. <i>Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities;</i> 3. <i>Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and</i> 4. <i>Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.</i> 	278-294
12.	<p>Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan</p> <p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hierarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. 	<p><i>Disclosure related to Financial Instruments</i></p> <p><i>The disclosures shall includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial instrument classification;</i> 2. <i>Fair value and its hierarchy of financial instrument group;</i> 3. <i>Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk;</i> 4. <i>Risk management policies; and</i> 5. <i>Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.</i> 	700-707, 771-773
13.	<p>Penerbitan laporan keuangan</p> <p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. 	<p><i>Financial statements publication</i></p> <p><i>The disclosures includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Date of financial statements authorized for publication; and</i> 2. <i>Parties responsible to authorize the financial statements.</i> 	643, 645-647

RINGKASAN KINERJA 2019

2019 PERFORMANCE HIGHLIGHT

PRODUKSI ARUS KAPAL SHIP TRAFFIC PRODUCTION

78.267 UNIT
↑ 10.114 UNIT

304.254.594 GT
↑ 29.568.246 GT

PENDAPATAN PELAYANAN KAPAL SHIP SERVICE REVENUE

Rp 1,10 TRILIUN | TRILLION
↓ Rp 391 MILIAR | BILLION

PRODUKSI NONPETI KEMAS PRODUCTION OF NON-CONTAINER

GENERAL CARGO GENERAL CARGO

9.105.734 TON | TONNES
↓ 396.200 TON | TONNES

CURAH KERING DRY BULK

32.619.470 TON | TONNES
↑ 1.501.724 TON | TONNES

CURAH CAIR LIQUID BULK

33.396.870 TON | TONNES
↑ 1.135.156 TON | TONNES

PENDAPATAN PENGUSAHAAN PROPERTI PROPERTY BUSINESS REVENUE

Rp 374 MILIAR | BILLION
↓ Rp 17 MILIAR | BILLION

PENDAPATAN OPERASIONAL OPERATING REVENUES

Rp 9,77 TRILIUN | TRILLION
↓ Rp 399 MILIAR | BILLION

PERINGKAT MOODY'S MOODY'S RATING

BAA3
OUTLOOK STABLE
STABLE OUTLOOK

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Rp 1,84 TRILIUN | TRILLION
↓ Rp 288 MILIAR | BILLION

PERINGKAT FITCH FITCH RATING

BBB-
OUTLOOK STABLE
STABLE OUTLOOK

PERINGKAT S&P S&P RATING

BB+-
OUTLOOK STABLE
STABLE OUTLOOK

**PRODUKSI
ARUS PETI KEMAS**
CONTAINER TRAFFIC
PRODUCTION

4.370.693 BOX

↑ 53.796 BOX

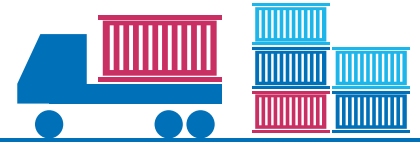
5.427.408 TEUs

↑ 89.735 TEUs

**PENDAPATAN
PELAYANAN PETI KEMAS**
CONTAINER SERVICE
REVENUE

Rp 5,728 TRILIUN | TRILLION

↓ Rp 298 MILIAR | BILLION



ARUS PENUMPANG
PASSENGER TRAFFIC

3.670.116 ORANG | PEOPLE

↑ 582.162 ORANG | PEOPLE

ARUS HEWAN
ANIMAL TRAFFIC

128.561 EKOR | ANIMALS

↓ 14.083 EKOR | ANIMALS

**PENDAPATAN
NONPETI KEMAS**
NON-CONTAINER REVENUE

Rp 1,03 TRILIUN | TRILLION

↑ Rp 73 MILIAR | BILLION



PENCAPAIAN KPI
KPI ACHIEVEMENT

100,11

**TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN**
CORPORATE SOUNDNESS LEVEL

AA

Sehat | Sound

SKOR KPKU
KPKU SCORE

643,75

**SKOR ASESMEN
PELAKSANAAN GCG**
GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

91,107

KATEGORI SANGAT BAIK
EXCELLENT CATEGORY



GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN*

CHART OF FINANCIAL HIGHLIGHT*

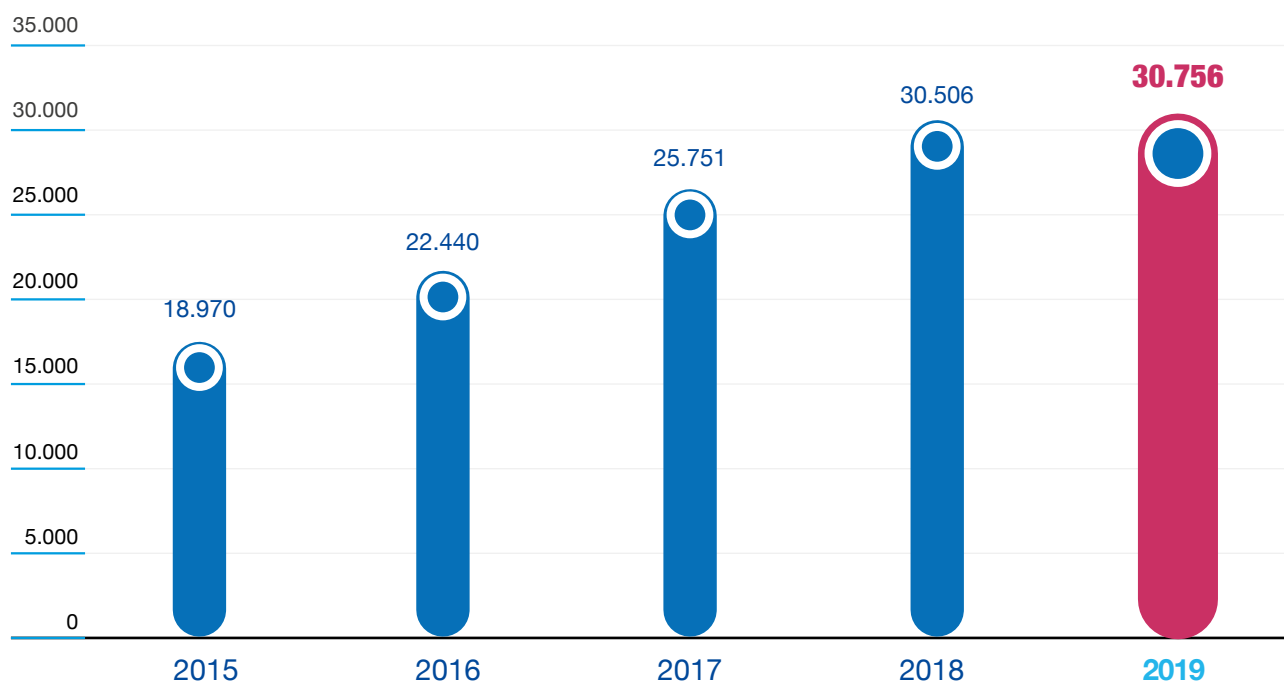
* Disajikan dalam satuan miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

* Presented in billion Rupiah unless stated otherwise

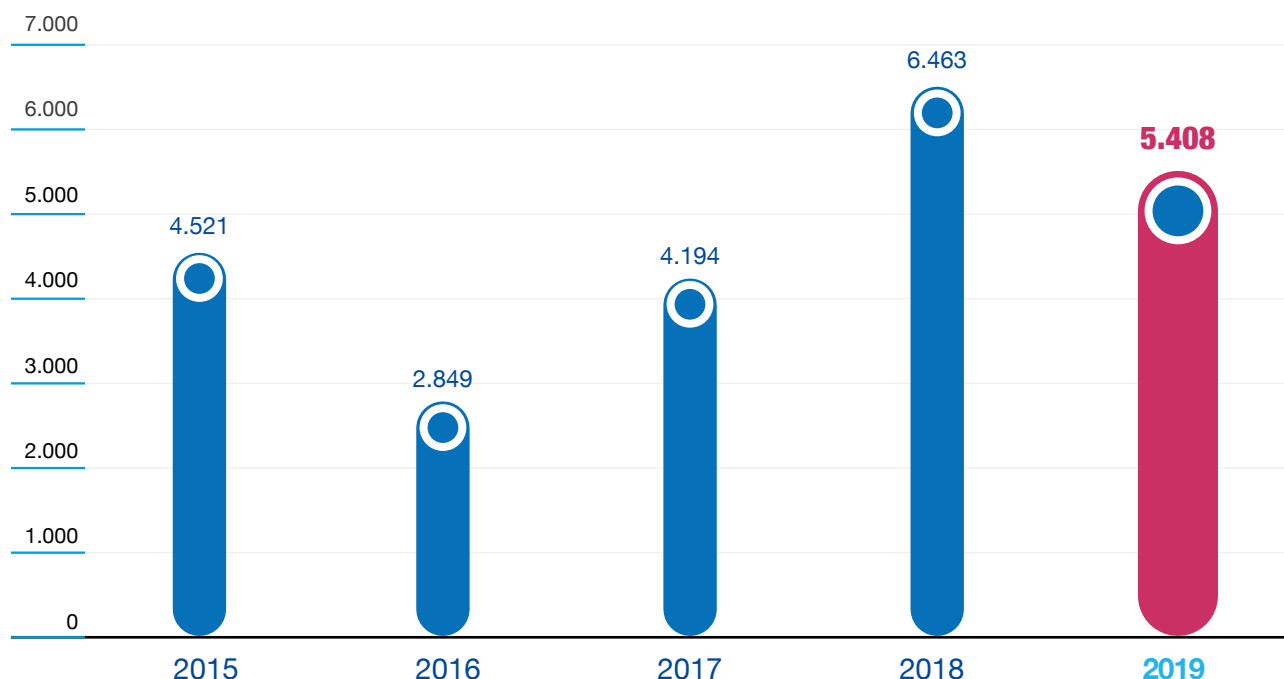
GRAFIK POSISI KEUANGAN

CHARTS OF FINANCIAL POSITION

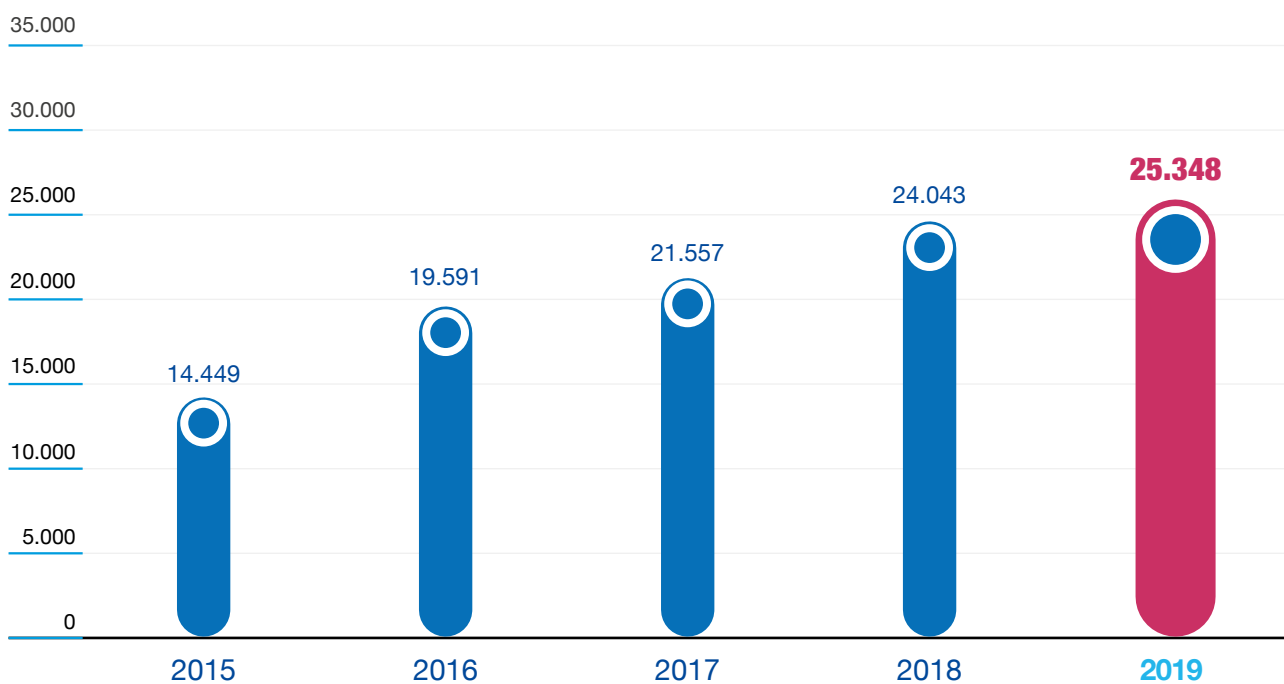
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS



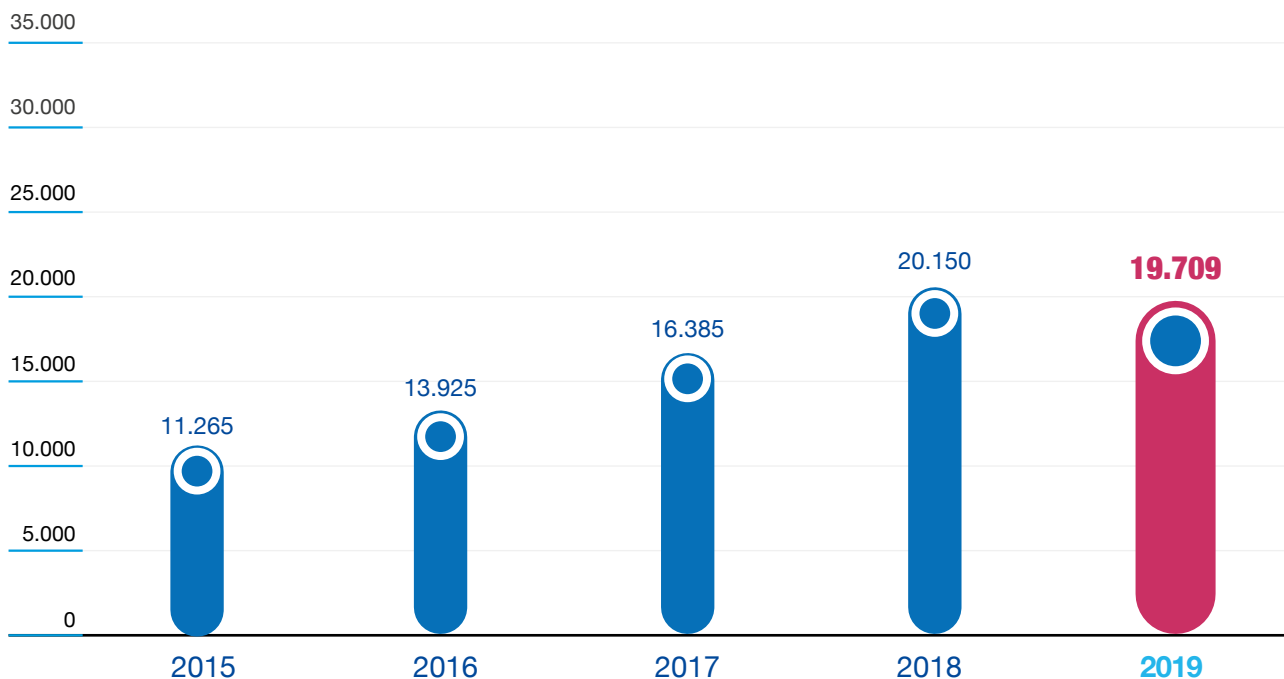
ASET LANCAR CURRENT ASSETS



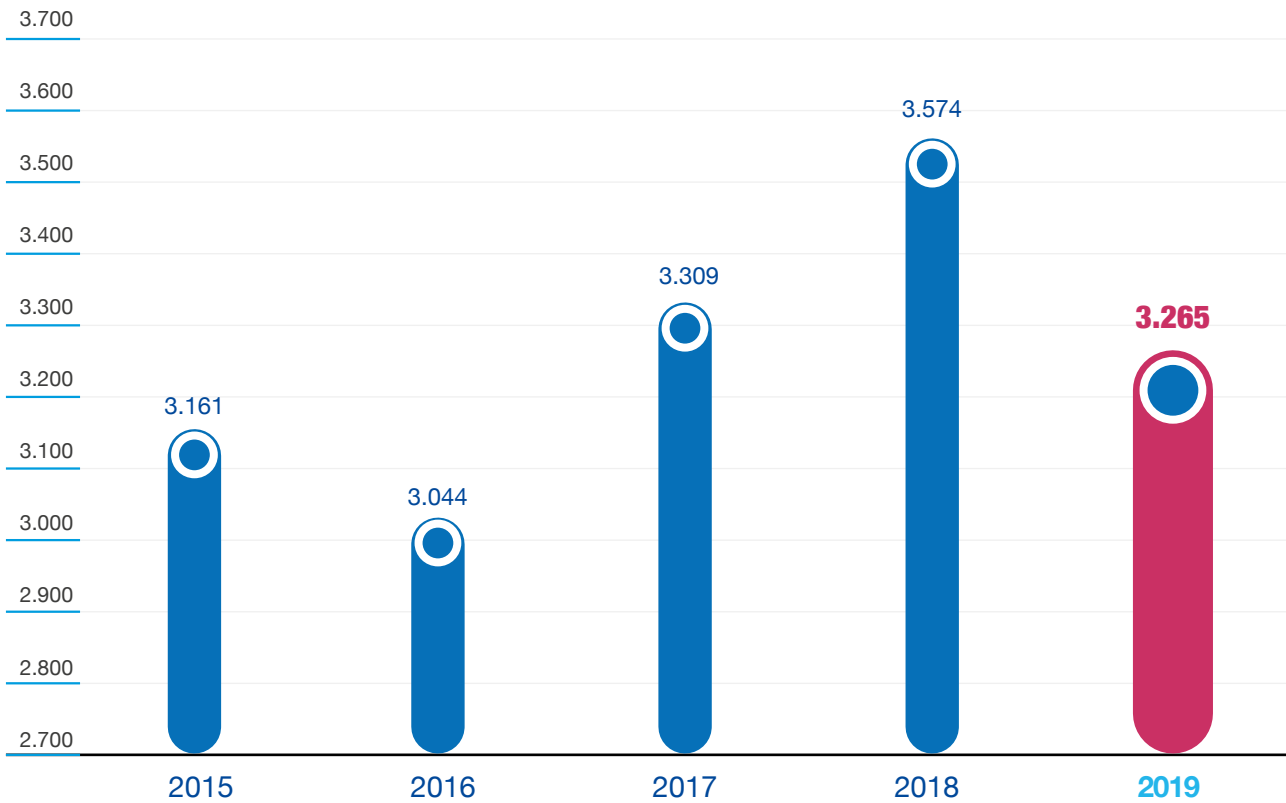
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS



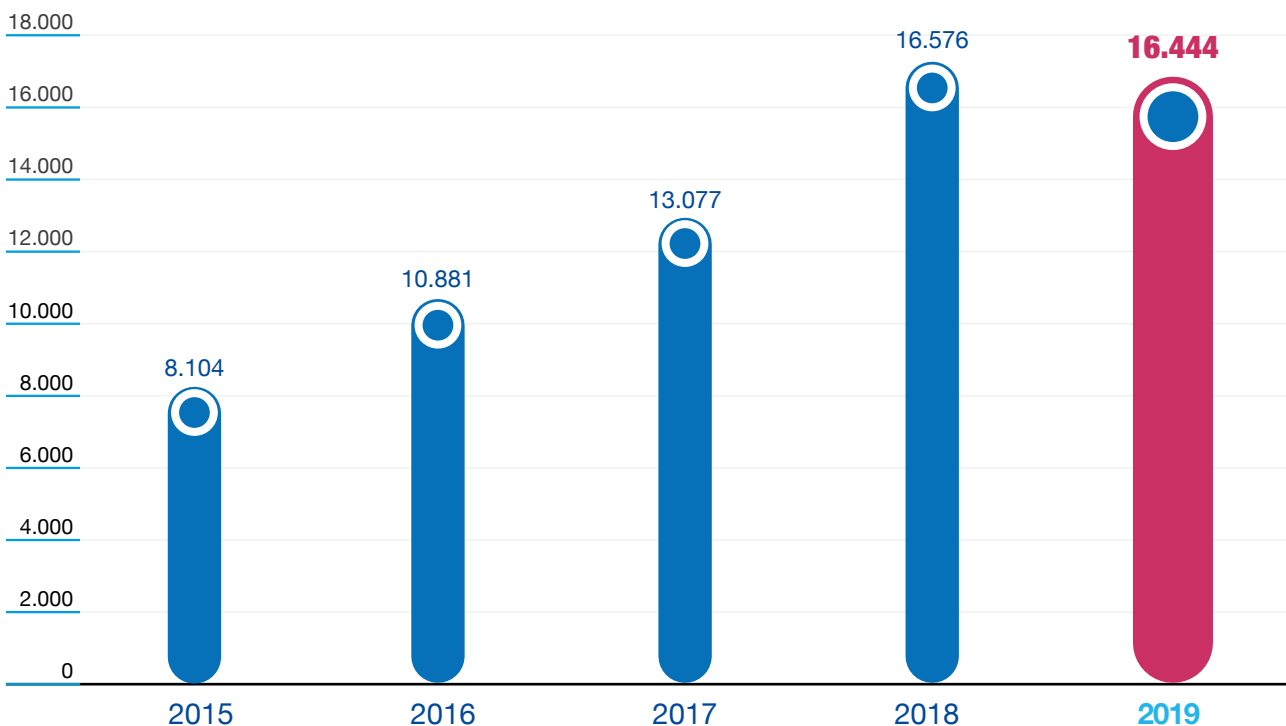
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES



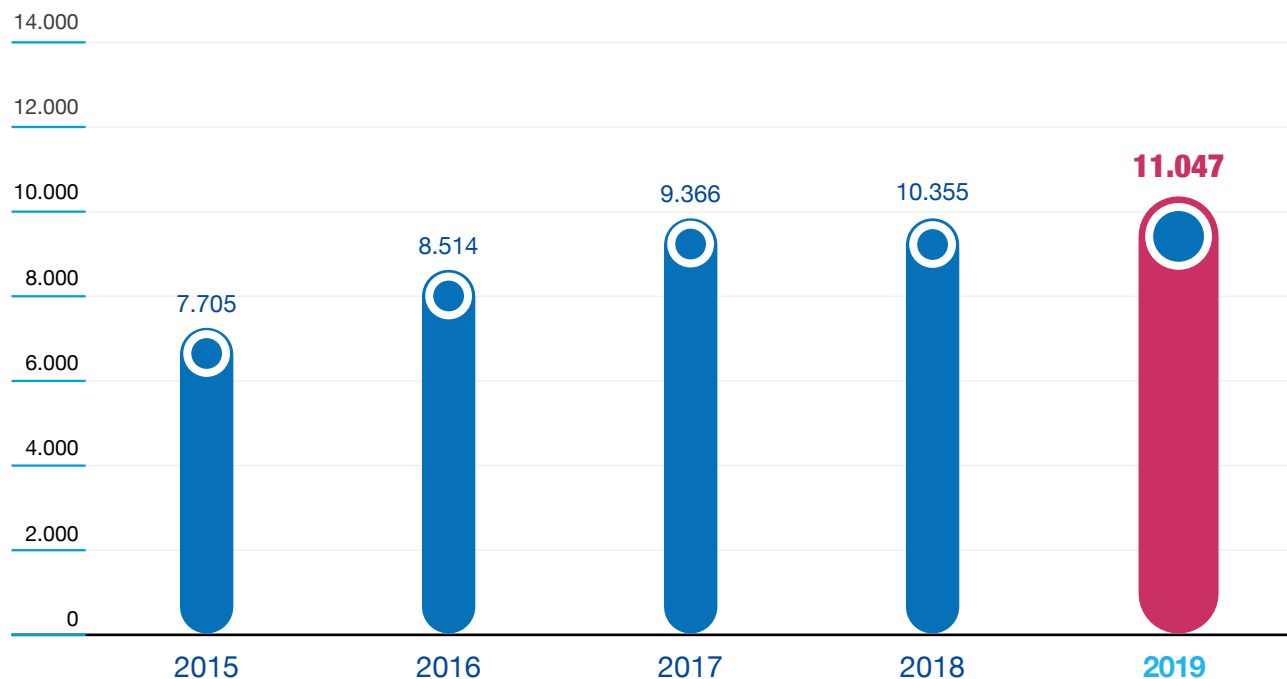
LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT-TERM LIABILITIES



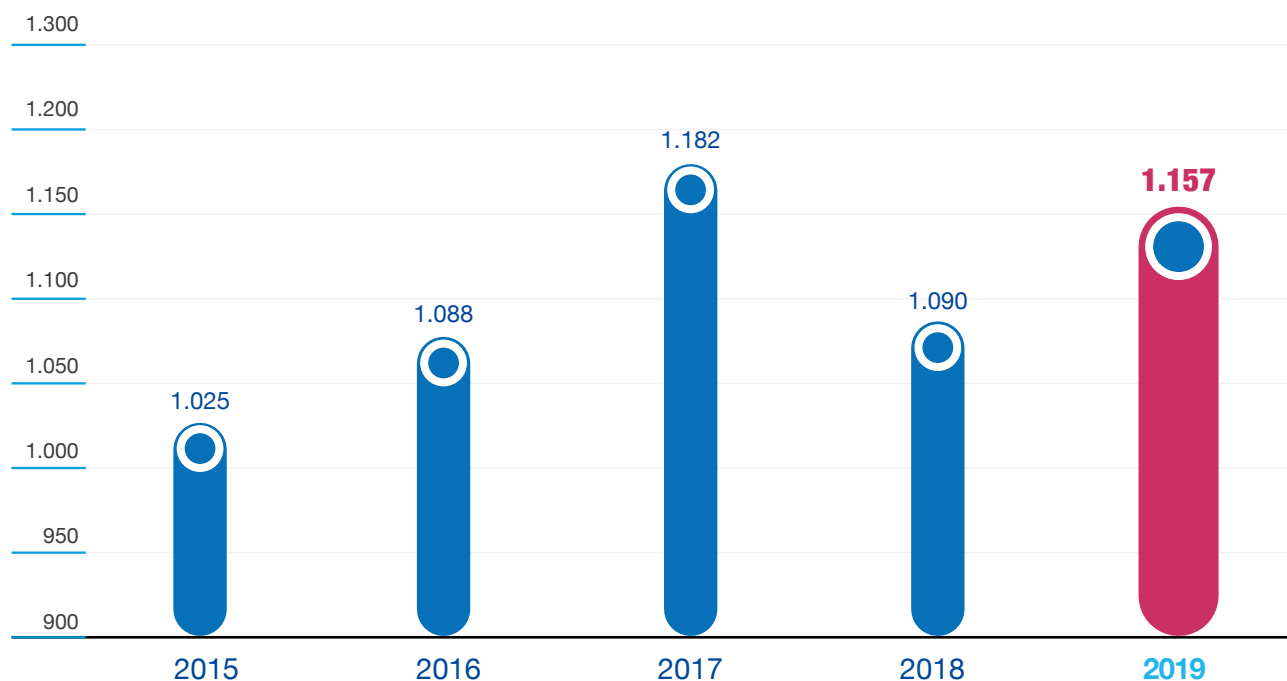
LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG-TERM LIABILITIES



EKUITAS EQUITY



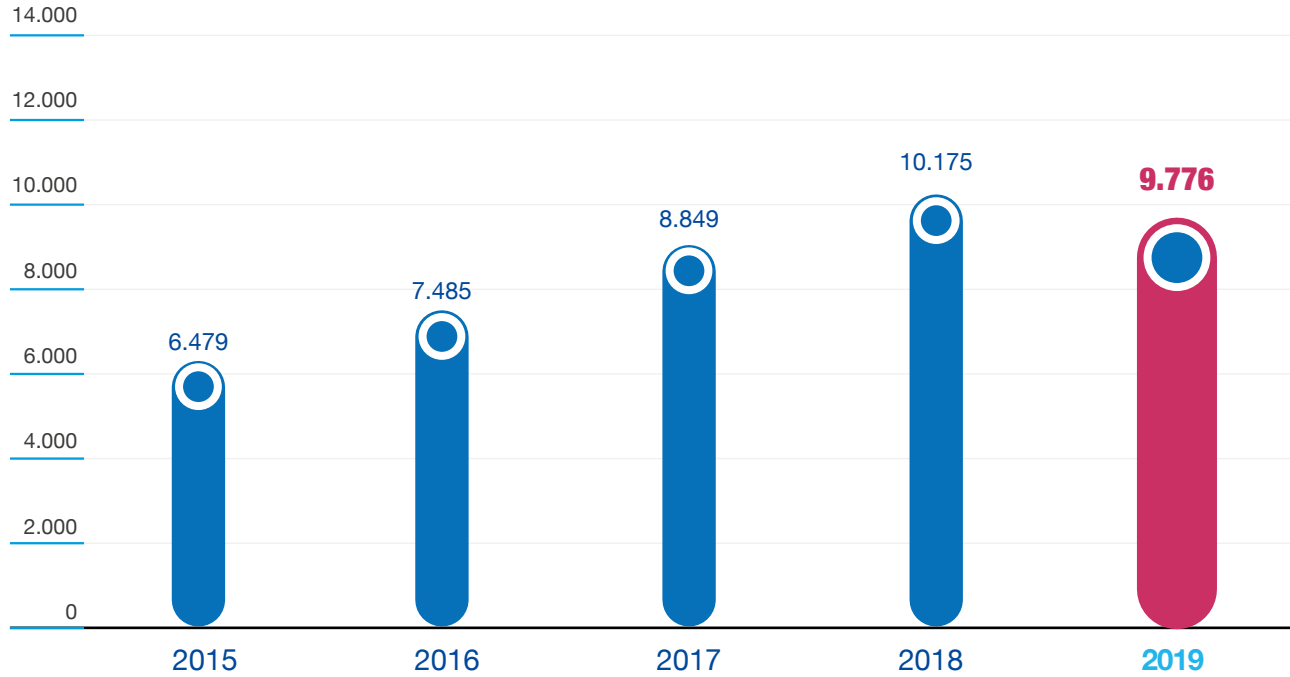
INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI INVESTMENTS IN ASSOCIATES



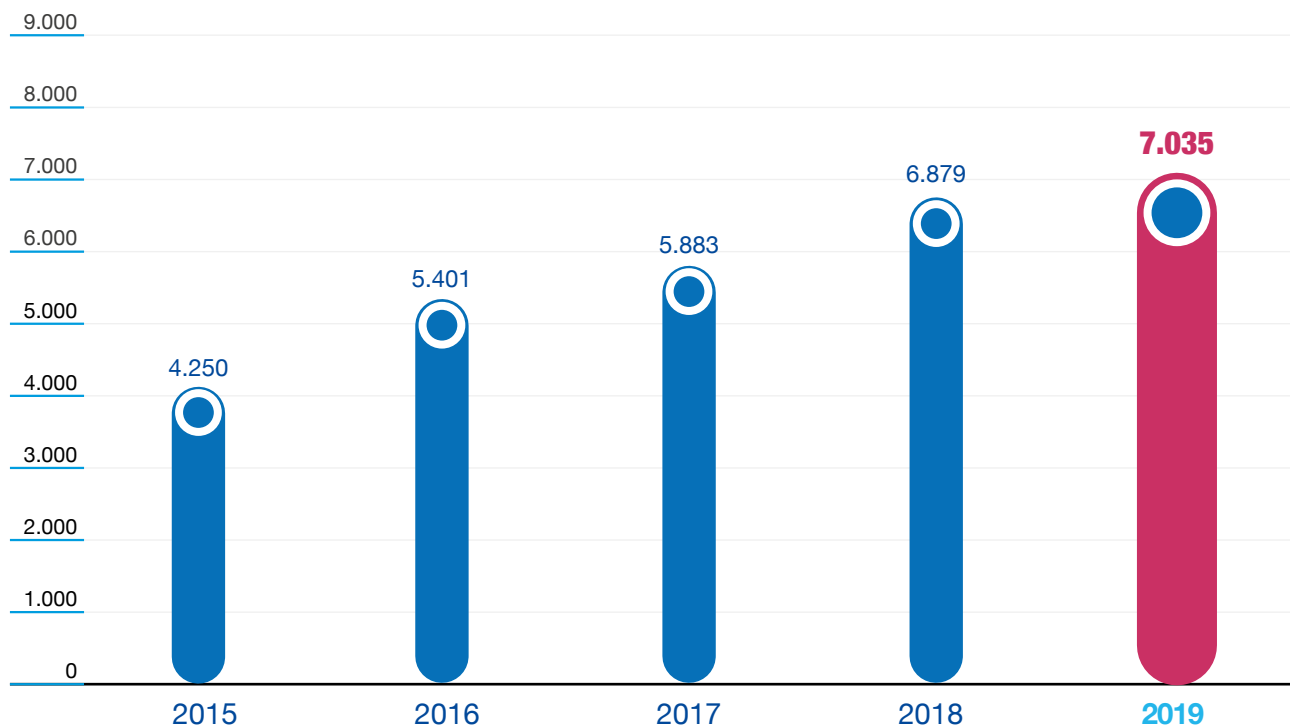
GRAFIK LAPORAN LABA (RUGI)

CHARTS OF STATEMENTS OF PROFIT (LOSS)

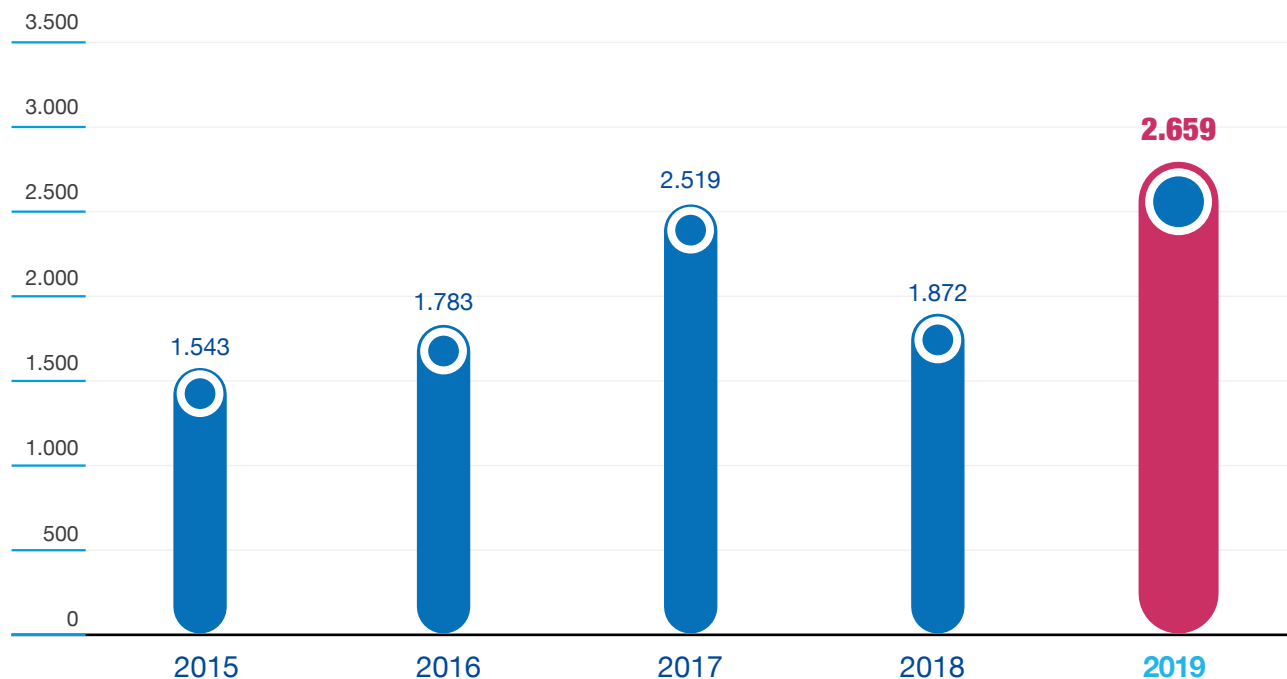
PENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUES



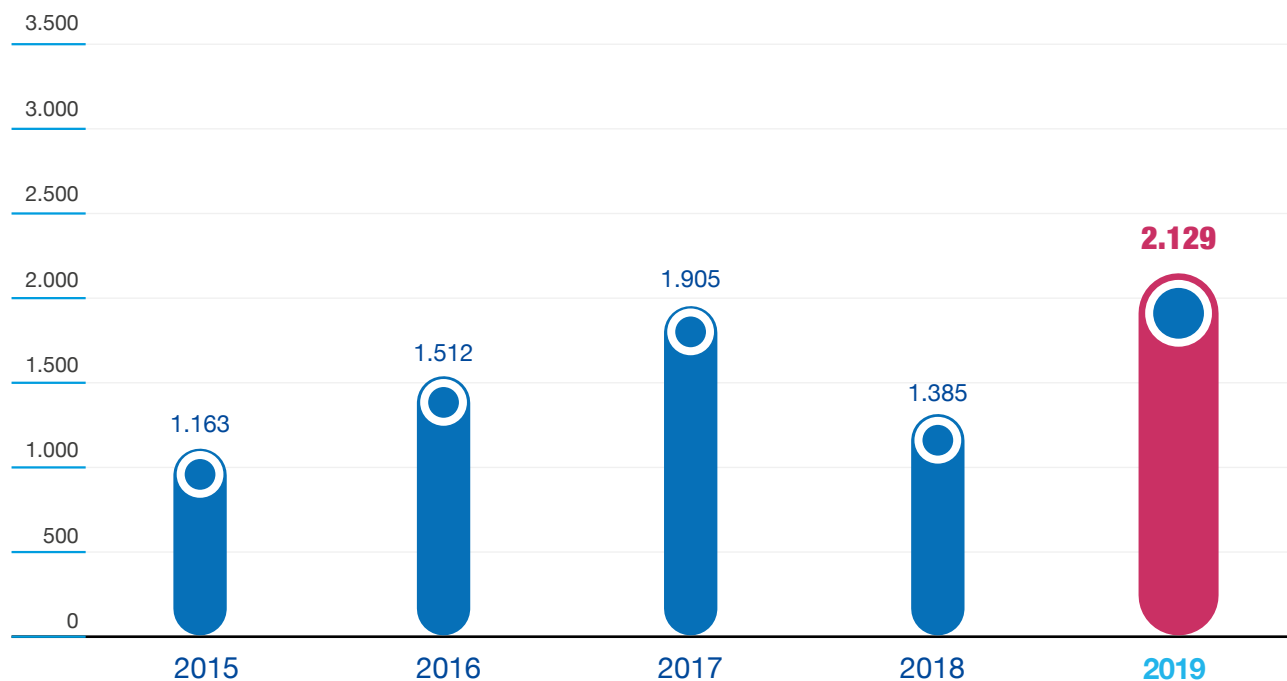
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES



LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE TAX

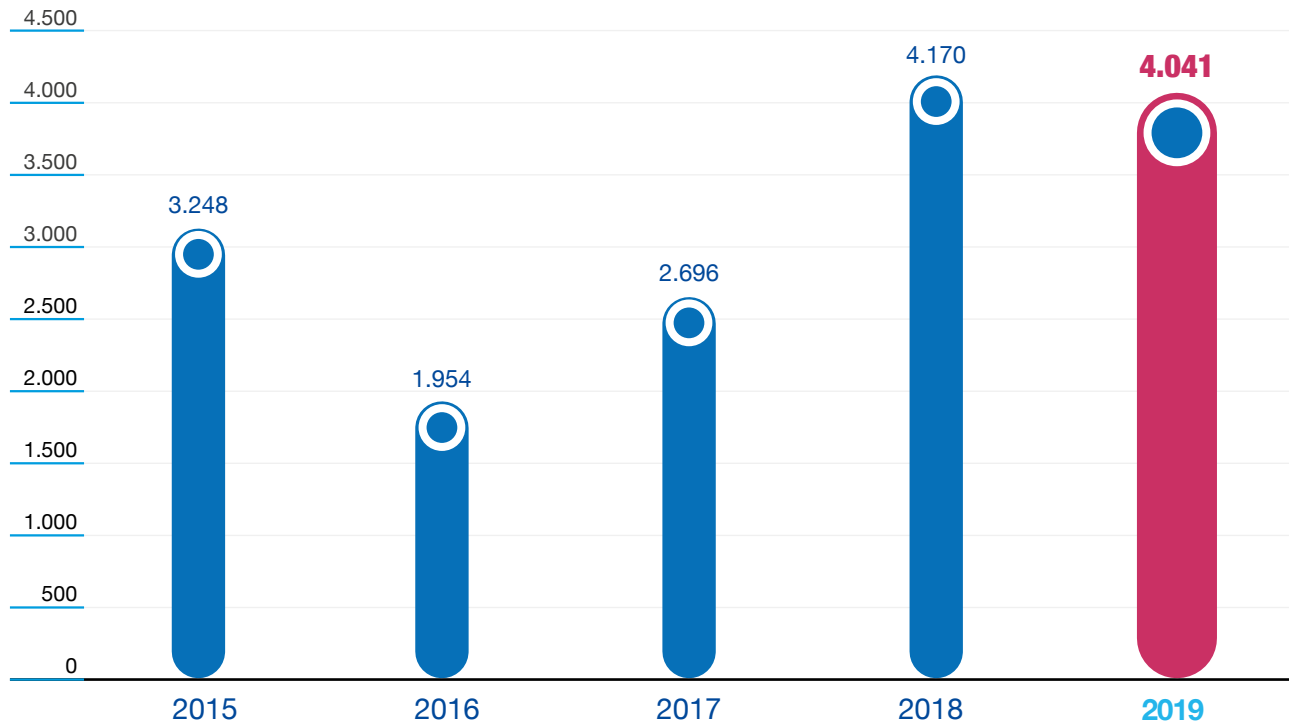
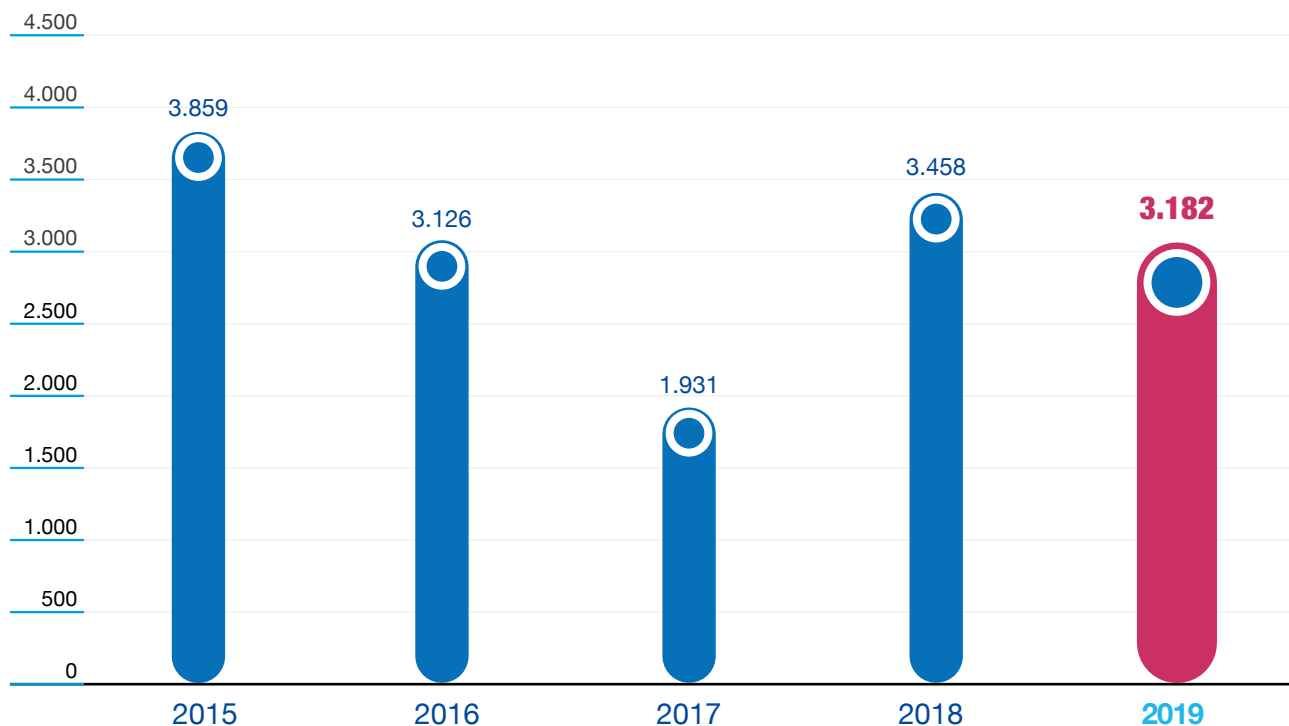


LABA TAHUN BERJALAN NET INCOME FOR THE YEAR

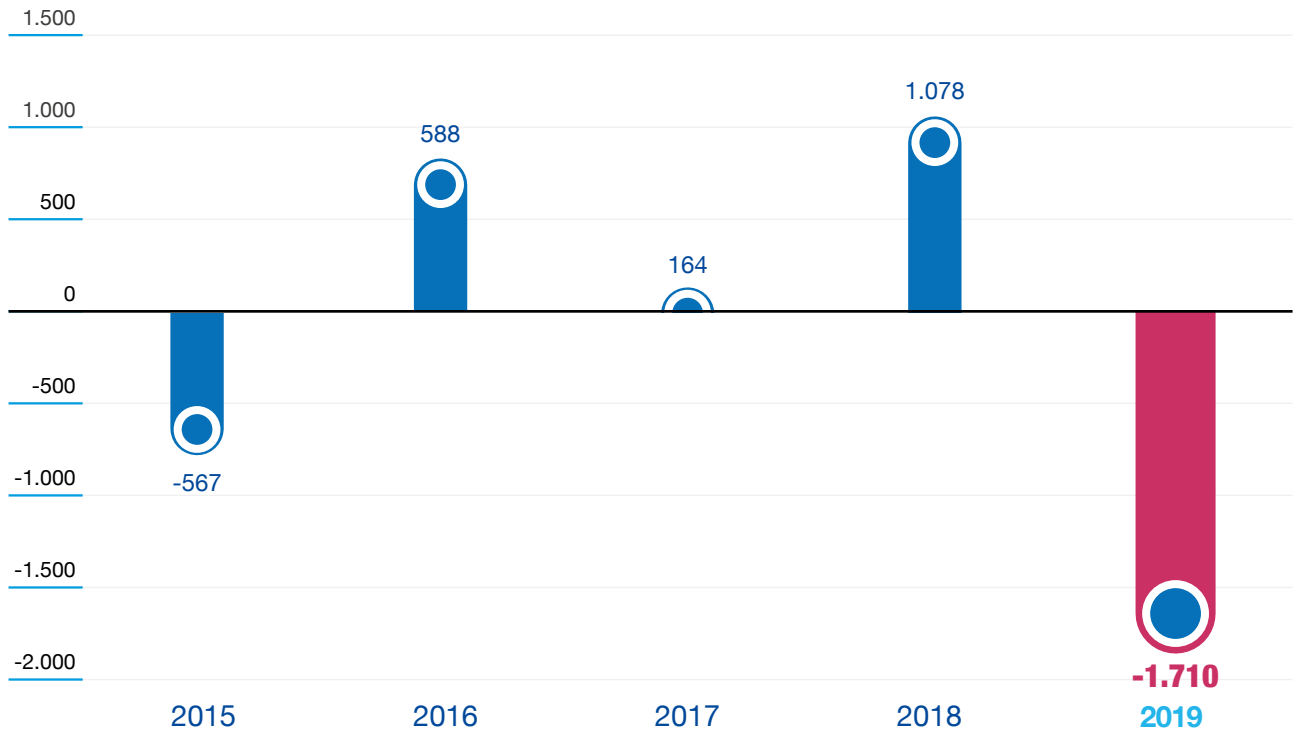


GRAFIK ARUS KAS

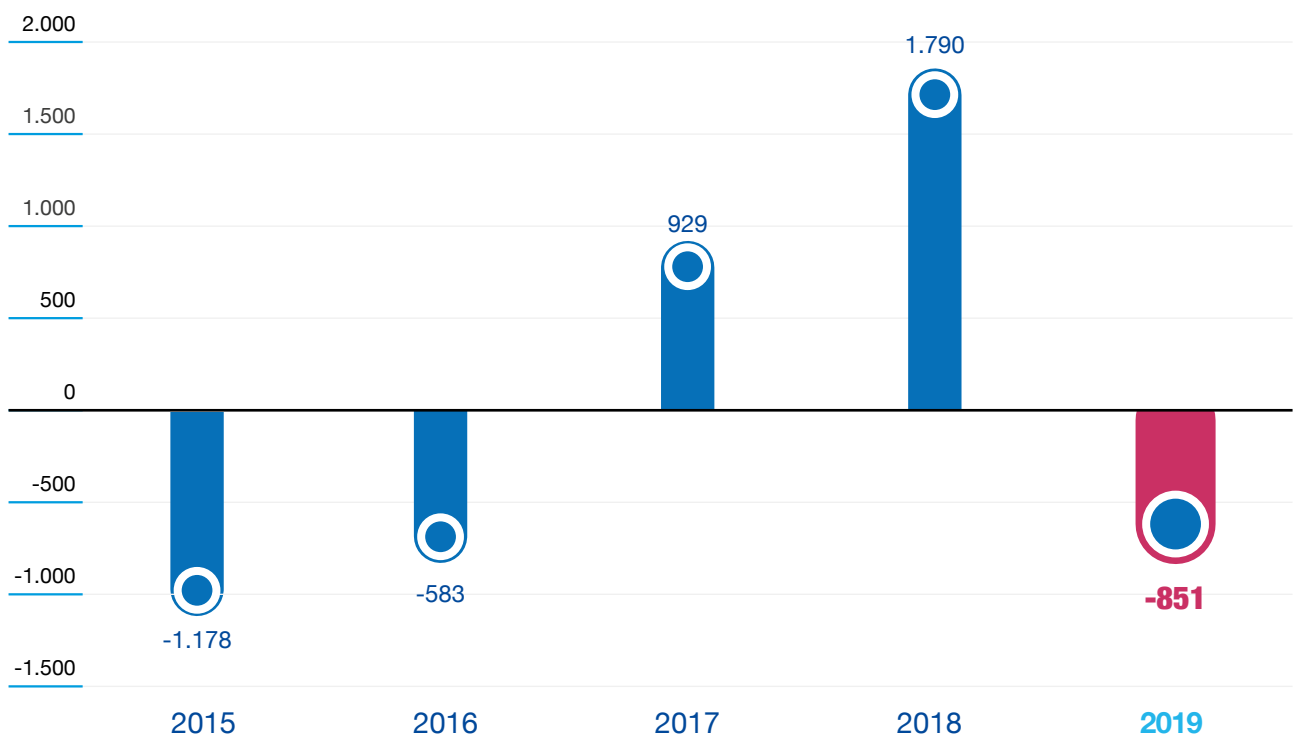
CHARTS OF CASH FLOWS

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIESARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI
NET CASH FLOW FOR INVESTING ACTIVITIES

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

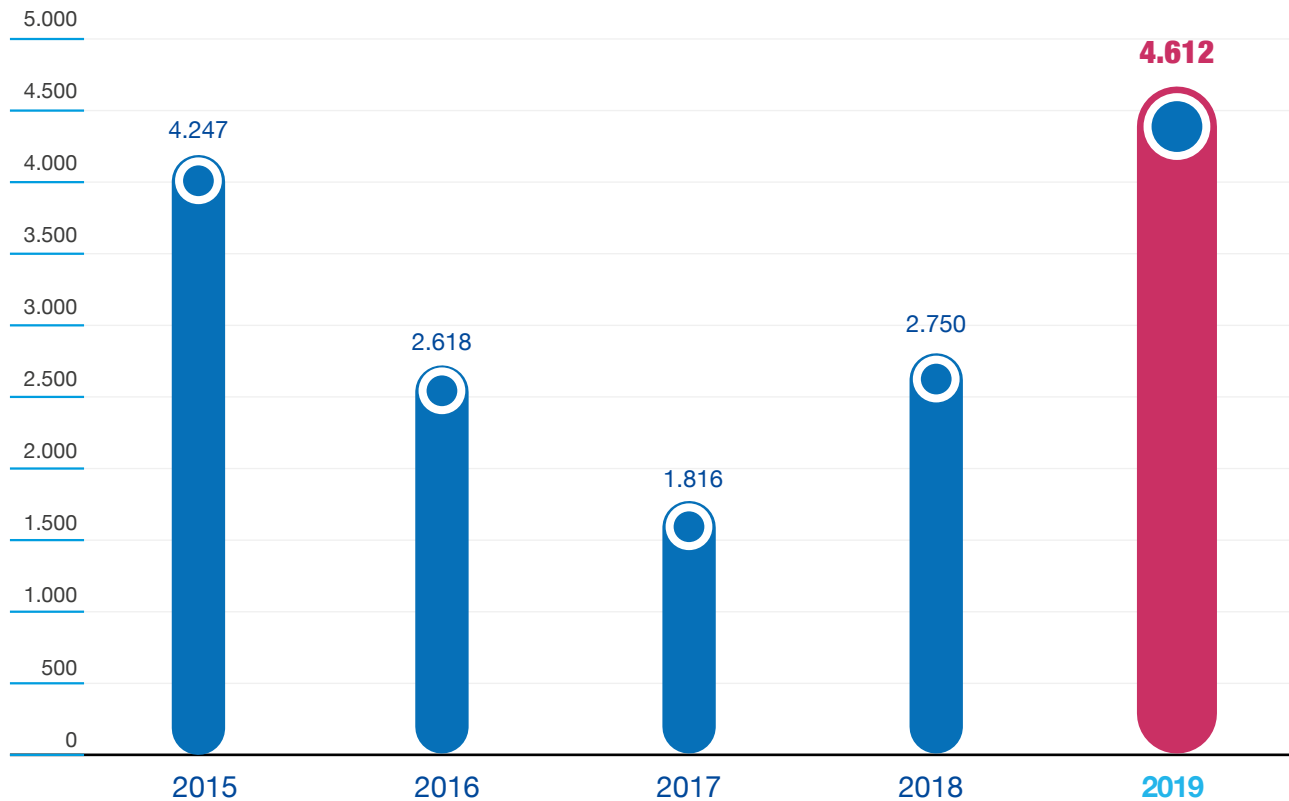


KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS



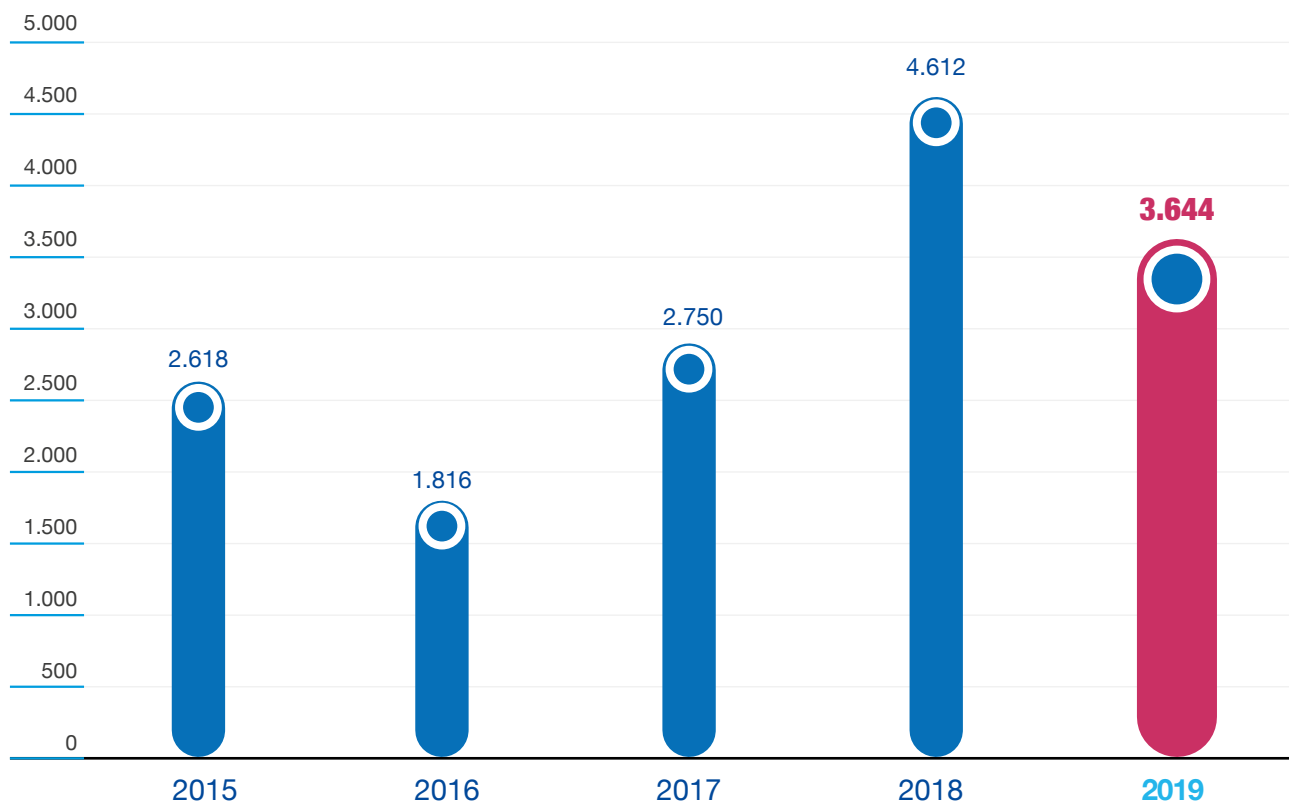
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR



KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR



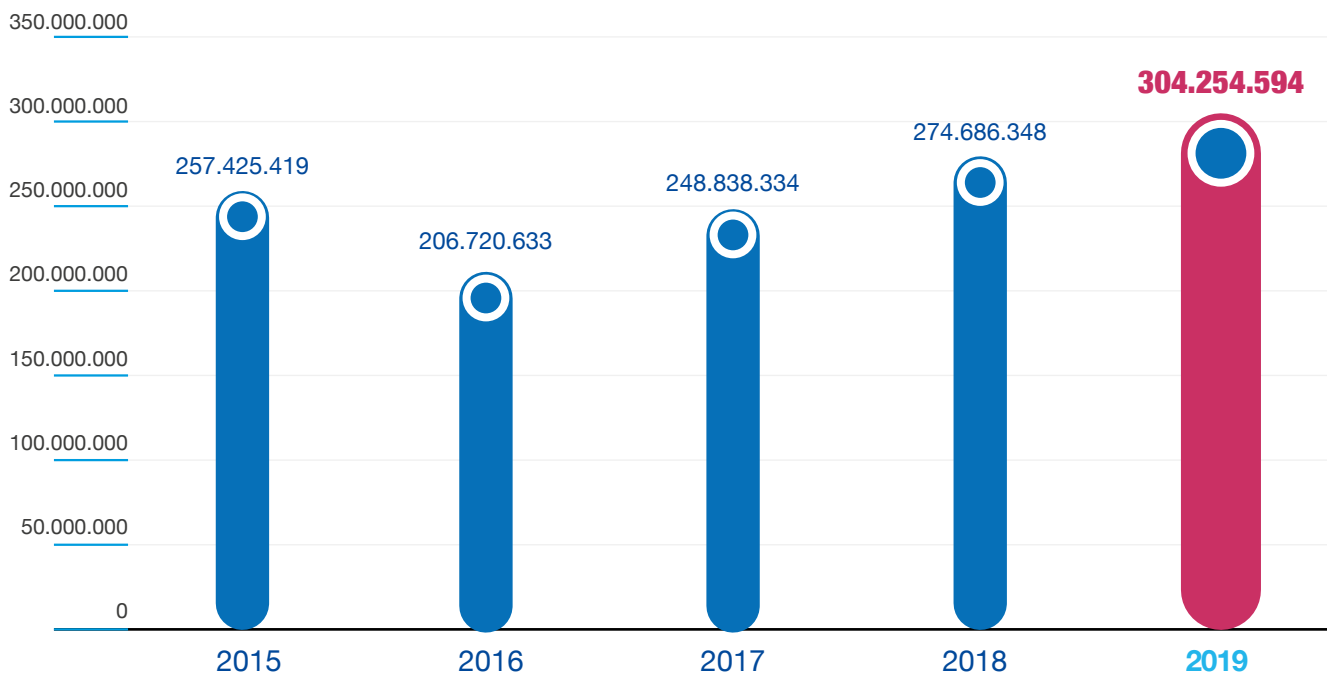


GRAFIK IKHTISAR OPERASIONAL

CHART OF OPERATIONAL HIGHLIGHT

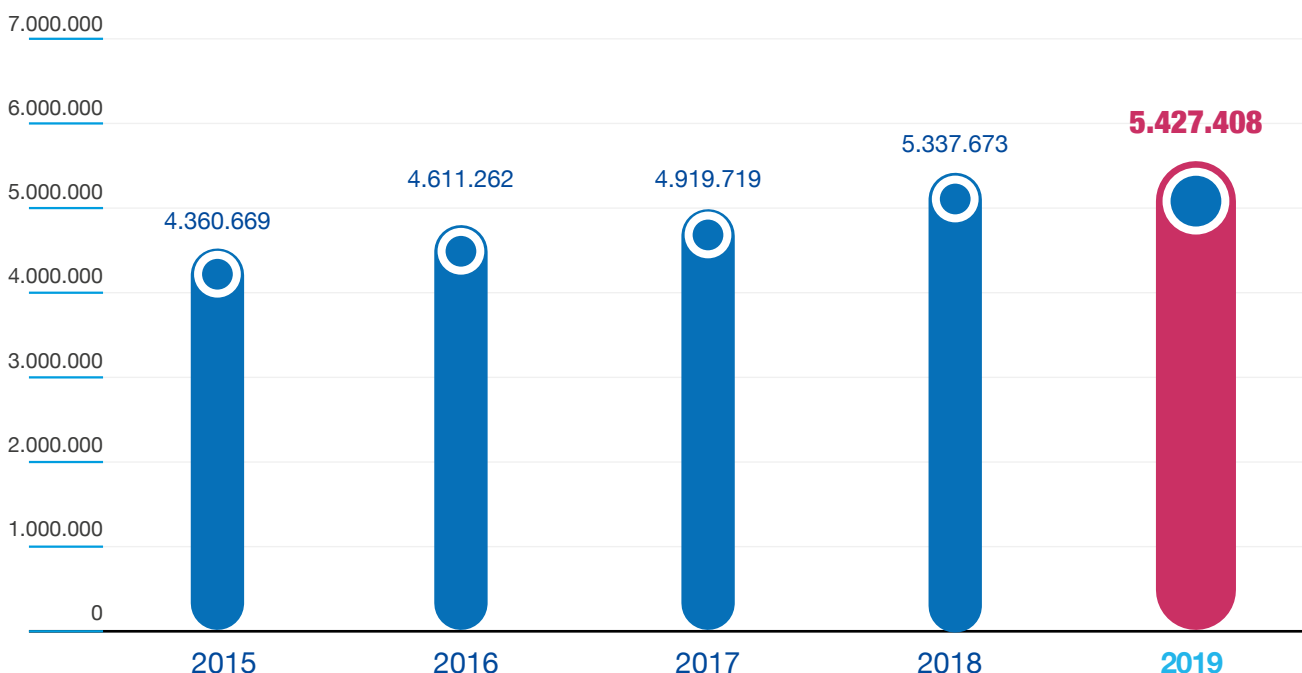
ARUS KAPAL SHIP TRAFFIC

dalam GT | in GT



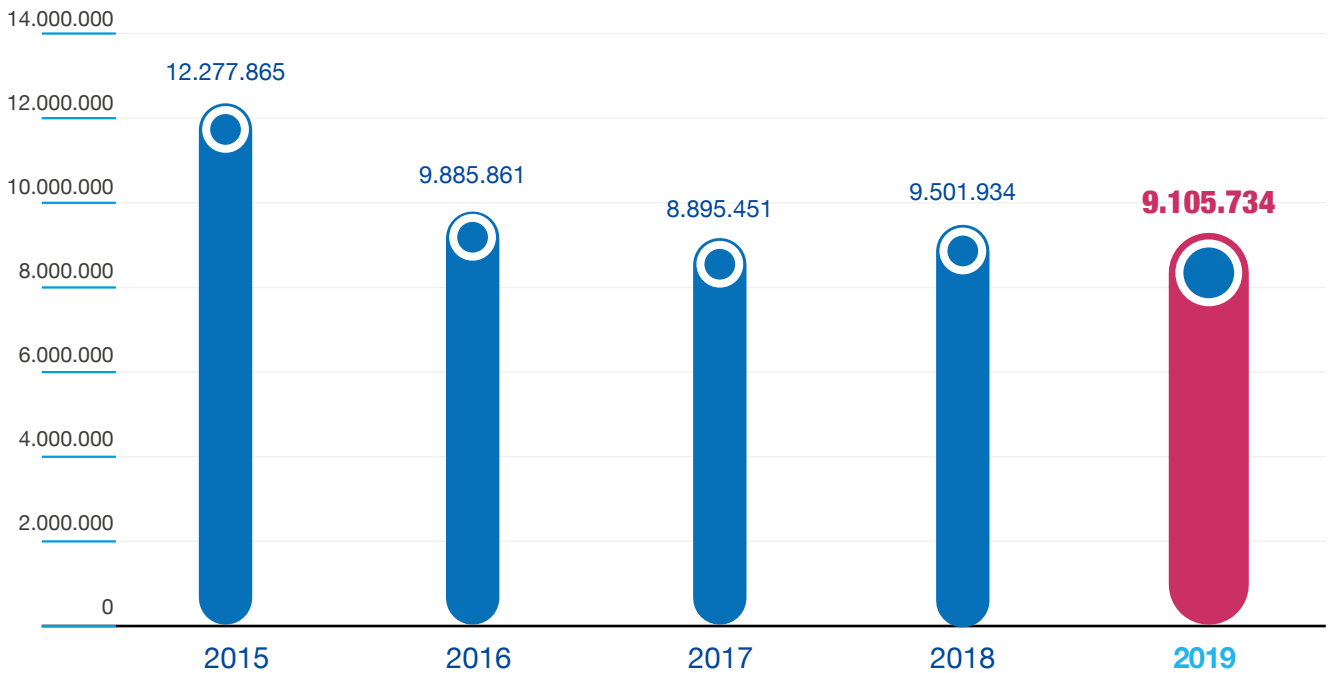
ARUS PETI KEMAS CONTAINER TRAFFIC

dalam TEUs | in TEUs



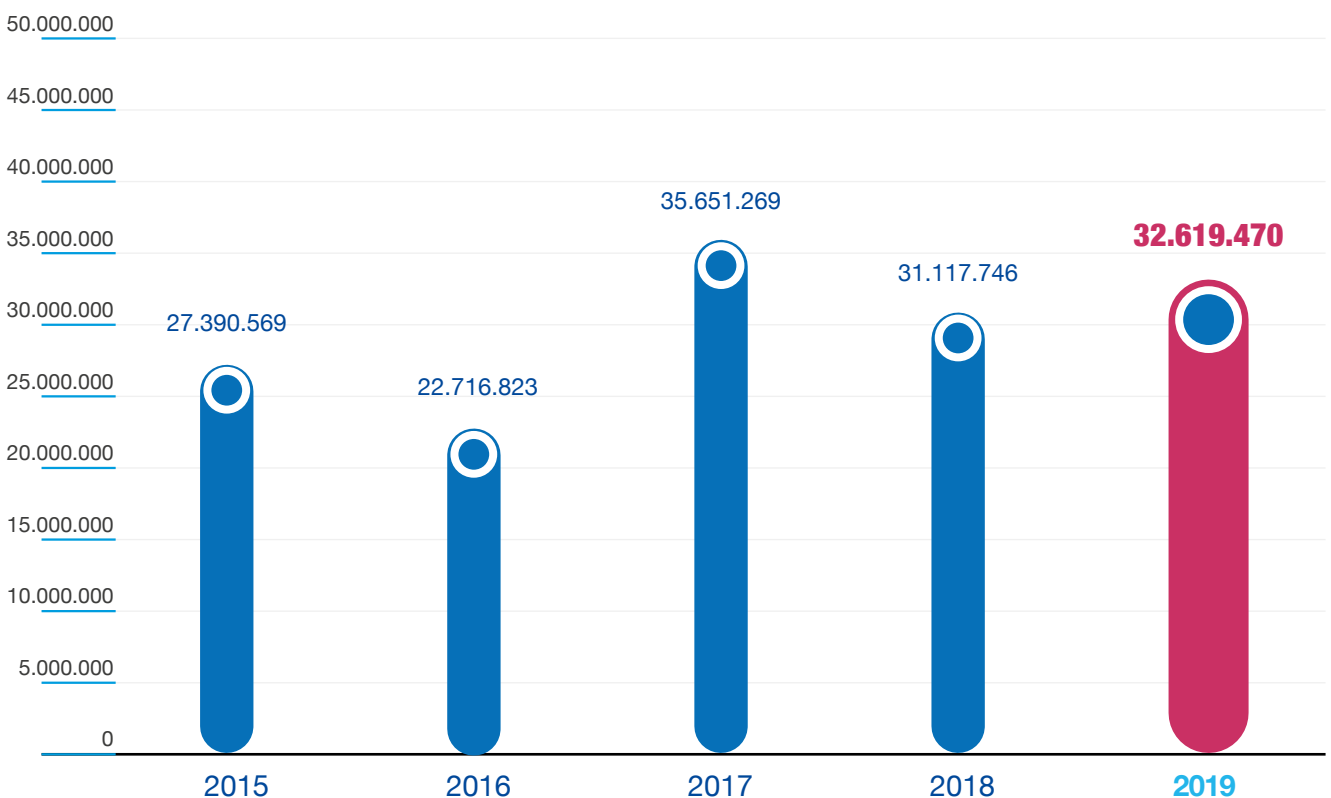
GENERAL CARGO CARGO TRAFFIC

dalam ton | in tonnes



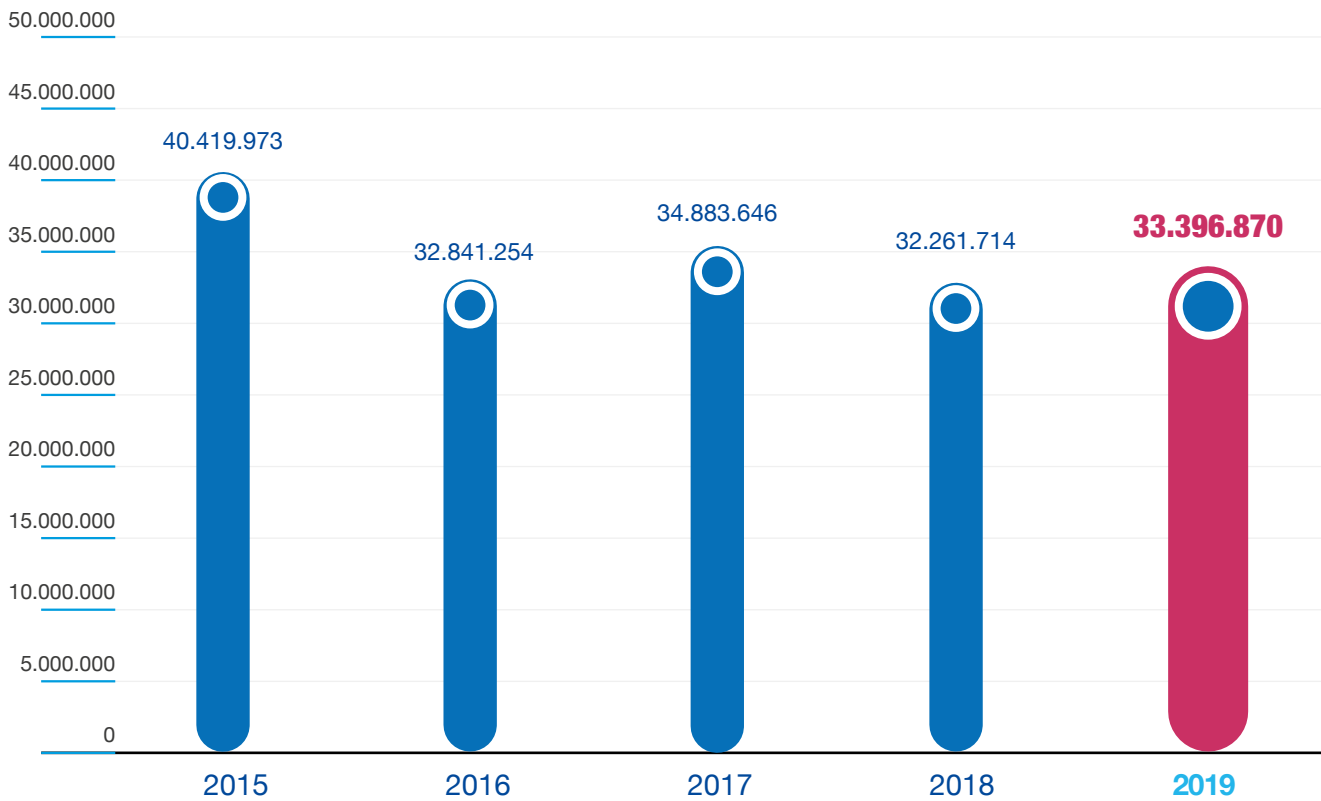
CURAH KERING DRY BULK

dalam ton | in tonnes



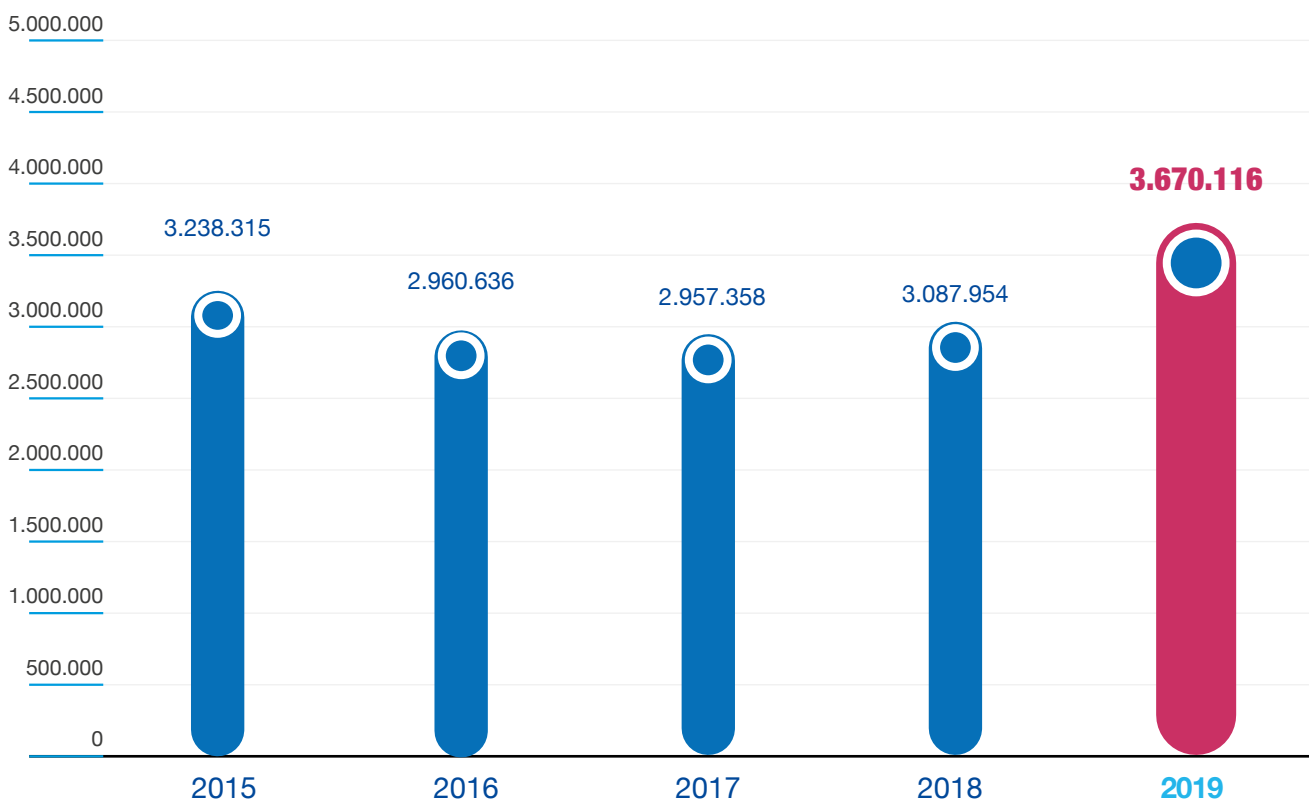
CURAH CAIR LIQUID BULK

dalam ton | in tonnes



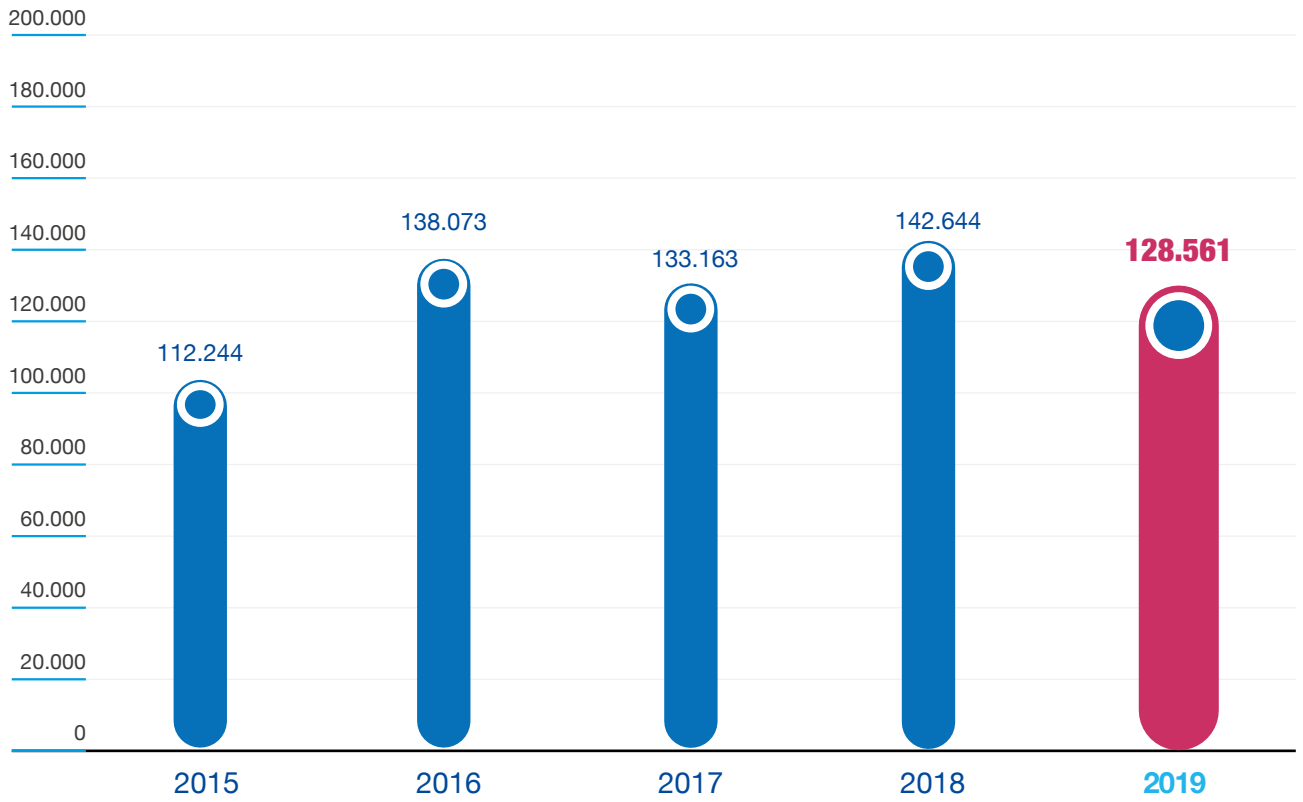
TRAFIK PENUMPANG PASSENGER TRAFFIC

dalam orang | in people



ARUS HEWAN ANIMAL TRAFFIC

dalam ekor | in animals



IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHT

LAPORAN LABA (RUGI)

STATEMENTS OF PROFIT (LOSS)

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	2017	2016	2015
Pendapatan Usaha Operating Revenues	9.776	10.175	8.849	7.485	6.479
Beban Usaha Operating Expenses	7.035	6.879	5.883	5.401	4.250
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Operating Income (Expenses)	633	(616)	130	176	(288)
Beban Bunga Pinjaman Interest Expenses	711	808	600	477	398
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	2.659	1.872	2.519	1.783	1.543
Beban Pajak Tax Expenses	530	487	613	271	380
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Net Income for the Year	2.129	1.385	1.905	1.512	1.163
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)	(292)	740	(409)	1140	1
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	2.129	1.385	1.905	1.512	1.163
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	1.837	2.125	1.496	2.652	1.164
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PROFIT ATTRIBUTABLE TO:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	2.096	760	1.341	1.037	703
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	32	626	563	475	460
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	1.803	1.503	932	2.170	702
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	33	622	564	483	462
Laba Per Saham (dalam ribuan) Basic Earning Per Share (in thousands of Rupiah)	2.058	745	1.316	1.018	689

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	2017	2016	2015
Aset Assets	30.756	30.506	25.751	22.440	18.970
Aset Lancar Current Assets	5.408	6.463	4.194	2.849	4.521
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	25.348	24.043	21.557	19.591	14.449
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments in Associates	1.157	1.090	1.182	1.088	1.025
Liabilitas Liabilities	19.709	20.150	16.385	13.925	11.265
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	3.265	3.574	3.309	3.044	3.161
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	16.444	16.576	13.077	10.881	8.104
Ekuitas Equity	11.047	10.355	9.366	8.514	7.705

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	2017	2016	2015
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi <i>Net Cash Flow from Operating Activities</i>	4.041	4.170	2.696	1.954	3.248
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi <i>Net Cash Flow for Investing Activities</i>	(3.182)	(3.458)	(1.931)	(3.126)	(3.859)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan <i>Net Cash Flow from Financing Activities</i>	(1.710)	1.078	164	588	(567)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas <i>Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents</i>	(851)	1.790	929	(583)	(1.178)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year</i>	4.612	2.750	1.816	2.618	4.247
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Cash Equivalents at End of Year</i>	3.644	4.612	2.750	1.815	2.618

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIOS

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	2017	2016	2015
Rasio Kas <i>Cash Ratio</i>	111,62%	129,03%	92,04%	66,97%	91,45%
Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	165,61%	180,81%	156,07%	170,46%	174,38%
Rasio Liabilitas terhadap Aset <i>Liabilities to Assets Ratio</i>	64,08%	66,05%	56,77%	56,52%	59,38%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas <i>Liabilities to Equity Ratio</i>	148,86%	160,07%	667,11%	129,97%	146,20%
<i>Return on Assets (ROA)</i>	8,91%	10,82%	8,01%	6,82%	6,14%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	19,24%	13,43%	28,52%	23,81%	11,78%
<i>Return on Investment (ROI)</i>	14,16%	13,62%	17,45%	13,98%	13,92%

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL HIGHLIGHT

URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	2017	2016	2015
Arus Kapal Ship Traffic	unit	78.267	68.153	66.547	62.091	66.923
	GT	304.254.594	274.686.348	248.838.334	206.720.633	257.425.419
Arus Peti Kemas Container Traffic	box	4.370.693	4.316.897	3.989.126	3.764.398	3.569.017
	TEUs	5.427.408	5.337.673	4.919.719	4.611.262	4.360.669
General Cargo Cargo Traffic	ton tonnes	9.105.734	9.501.934	8.895.451	9.885.861	12.277.865
	M3	3.215.997	3.299.894	2.458.047	2.961.555	4.011.698
Curah Kering Dry Bulk	ton tonnes	32.619.470	31.117.746	35.651.269	22.716.823	27.390.569
Curah Cair Liquid Bulk	ton tonnes	33.396.870	32.261.714	34.883.646	32.841.254	40.419.973
Trafik Penumpang Passenger Traffic	orang people	3.670.116	3.087.954	2.957.358	2.960.636	3.238.315
Arus Hewan Animal Traffic	ekor animals	128.561	142.644	133.163	138.073	112.244

IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHT

Hingga 31 Desember 2019, kepemilikan saham Perusahaan 100% dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak diperdagangkan di bursa efek manapun. Dengan demikian, informasi mengenai:

- Ikhtisar kinerja perdagangan saham yang terdiri dari jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat dicatatkan, harga saham tertinggi, terendah dan penutupan, serta volume perdagangan;
- Informasi aksi korporasi yang meliputi bentuk-bentuk aksi korporasi, tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan
- Sanksi penghentian saham yang berupa penghentian perdagangan saham dan penghapusan pencatatan saham

tidak dapat disajikan karena tidak sesuai dengan status Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak melaksanakan pencatatan saham di bursa efek.

As of 31 December 2019, 100% shares of the Company are owned by the Government of Republic of Indonesia and are not traded at any stock exchanges. Hence, information on:

- Share trading performance, consisting of several outstanding shares, market capitalisation based on the price at the Stock Exchange on which the shares are listed, highest price, lowest price and closing price, as well as trading volume;
- Corporate action, covering forms of corporate action, date of execution, stock split ratio, number of outstanding shares before and post-corporate action; and
- Suspension sanction, such as trading suspension or delisting,

cannot be provided as they are not in line with the Company's status as a State-Owned Enterprise (SOE) that does not list its shares on a stock exchange.

IKHTISAR OBLIGASI

BONDS HIGHLIGHT

OBLIGASI GLOBAL 2014 2014 GLOBAL BOND

URAIAN DESCRIPTION	INFORMASI INFORMATION
Jenis Sekuritas <i>Types of Securities</i>	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang <i>Currency</i>	U.S. Dollar
Distribusi <i>Distribution</i>	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar <i>Outstanding Amount</i>	USD 500.000.000
Tenor	10 tahun years
Tanggal Terbit <i>Date of Issue</i>	1 Oktober 2014 1 October 2014
Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	1 Oktober 2024 1 October 2024
Tingkat Bunga <i>Interest Rate</i>	4,875% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga <i>Interest Payment Date</i>	31 Maret dan 30 September 31 March and 30 September
Spread to Benchmark	239,5 bps
Oversubscribed	13x melebihi size yang ditawarkan 13x exceeding the size offered
Rating Senior Unsecured	<ul style="list-style-type: none"> • Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan pada 10 September 2014. • BB+ (<i>Outlook Stable</i>) oleh S&P Global Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014. • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014. • Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) by Moody's, issued on 10 September 2014. • BB+ (<i>Outlook Stable</i>) by S&P Global Ratings, issued on 8 September 2014. • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) by Fitch Ratings, issued on 8 September 2014.

OBLIGASI GLOBAL 2018 2018 GLOBAL BOND

URAIAN DESCRIPTION	INFORMASI INFORMATION
Jenis Sekuritas <i>Types of Securities</i>	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang <i>Currency</i>	U.S. Dollar
Distribusi <i>Distribution</i>	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar <i>Outstanding Amount</i>	USD 500.000.000
Tenor	5 tahun <i>years</i>
Tanggal Terbit <i>Date of Issue</i>	2 Mei 2018 <i>2 May 2018</i>
Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	2 Mei 2023 <i>2 May 2023</i>
Tingkat Bunga <i>Interest Rate</i>	4,5% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga <i>Interest Payment Date</i>	2 Mei dan 2 November <i>2 May and 2 November</i>
<i>Spread to Benchmark</i>	239,5 bps
<i>Oversubscribed</i>	2x melebihi <i>size</i> yang ditawarkan <i>2x exceeding the size offered</i>
<i>Rating Senior Unsecured</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan pada 6 Februari 2018. • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 23 April 2018. • Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) by Moody's, issued on 6 February 2018. • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) by Fitch Ratings, issued on 23 April 2018.

PEMERINGKAT OBLIGASI

BONDS RATINGS

STANDARD AND POOR'S (S&P)

Alamat <i>Address</i>	12 Marina Boulevard Level 22, #22-01 MBFC Tower 3 Singapore 018982
Telepon <i>Telephone</i>	+65 65 306401/+65 65 306403
Faksimile <i>Facsimile</i>	-
Surel <i>E-mail</i>	annabelle.teo@spglobal.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III <i>Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III</i>
Imbalan <i>Fee</i>	USD 75.000/tahun <i>USD 75,000/year</i>
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 <i>Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the issuance of Pelindo III Global Bonds dated 1 July 2014</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	September 2019 <i>September 2019</i>

MOODY'S

Alamat <i>Address</i>	Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower, Singapore 048623
Telepon <i>Telephone</i>	+65 6398 8300
Faksimile <i>Facsimile</i>	-
Surel <i>E-mail</i>	daryl.soh@moodys.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III <i>Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III</i>
Imbalan <i>Fee</i>	USD 72.000/tahun <i>USD 72,000/year</i>
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 <i>Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the issuance of Pelindo III Global Bonds dated 1 July 2014</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	September 2019 <i>September 2019</i>

FITCH RATINGS

Alamat <i>Address</i>	One Raffles Quay, South Tower #22-11, Singapore 048583
Telepon <i>Telephone</i>	+65 6796 7200
Faksimile <i>Facsimile</i>	-
Surel <i>E-mail</i>	louis.pang@fitchratings.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III <i>Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III</i>
Imbalan <i>Fee</i>	USD 70.000/tahun <i>USD 70,000/year</i>
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 <i>Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the issuance of Pelindo III Global Bonds dated 1 July 2014</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	Juni 2019 <i>June 2019</i>

IKHTISAR DIVIDEN

DIVIDEND HIGHLIGHT

Perusahaan memberikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perkembangan dividen yang disalurkan Perusahaan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Company distributes dividend to the Government of Republic Indonesia as the Shareholder based on the resolution of a General Meeting of Shareholders (GMS). The following table describes the dividend paid by the Company in the last five years

TAHUN YEAR	DIBAYARKAN TAHUN DISTRIBUTED IN	DIVIDEN (RIBU RUPIAH) DIVIDEND (THOUSAND RUPIAH)	LABA PERUSAHAAN (RIBU RUPIAH) COMPANY PROFIT (THOUSAND RUPIAH)	RISALAH RUPS MINUTES OF GMS	TANGGAL PEMBAYARAN PAYMENT DATE
2015	2016	196.709.330	702.533.323	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 14 <i>Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 14</i>	17 Mei 2016 17 May 2016
2016	2017	311.198.916	1.037.329.721	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 5 <i>Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 5</i>	8 Mei 2017 8 May 2017
2017	2017	311.198.916	1.037.329.721	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 2 <i>Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 2</i>	8 November 2017 8 November 2017
2018	2018	441.147.068	1.470.490.226	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 2 <i>Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 2</i>	3 April 2018 3 April 2018
2019	2019	227.891.712	759.639.040	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 29 <i>Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 29</i>	29 Mei 2019 29 May 2019

TENTANG LAPORAN TAHUNAN PELINDO III 2019

ABOUT THE 2019 ANNUAL REPORT OF PELINDO III

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2019 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III dengan tema “Memberdayakan Perubahan Menuju Perkembangan”. Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis Perusahaan pada 2019 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Laporan Tahunan 2019 Pelindo III menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip GCG.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Sehingga, para Pemegang Saham serta seluruh Pemangku Kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perusahaan pada 2019.

Welcome to the 2019 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III themed “Fostering Change Towards Growth”. The theme is chosen based on the review and facts on the progress of the Company’s business throughout 2019, as well as the future development of the Company’s business.

The primary purpose of this Annual Report is to improve the information disclosure regarding the Company to the related authorities and to be a medium to build pride and solidarity among employees.

The 2019 Annual Report of Pelindo III serves as a comprehensive source of documentation comprising of information on the Company’s performance during the year. The information shall disclose a complete report of the Company’s profile; marketing, operational, and financial performance; and information related to the duties, roles, and structural functions of the Company’s organisation which implements the best practices and principles of GCG.

Furthermore, this Annual Report is also an instrument to build a deep understanding and trust of the Company by providing accurate and relevant information. Therefore, the Company’s Shareholders and Stakeholders will be able to obtain adequate information regarding the policies which have been conducted and will be implemented in the future, as well as the achievements of the Company in 2019.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan" atau "Pelindo III" yang didefinisikan sebagai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang penyedia jasa kepelabuhanan. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) secara umum.

This Annual Report contains the Company's financial condition, operation results, policies, projections, plans, strategies, as well as objectives which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to unknown risks (prospective), uncertainties, and may cause material difference from the reported results.

Prospective statements in this Annual Report are prepared based on numerous assumptions on the current conditions and future events, as well as the business environment where the Company engages in its business. The Company does not guarantee that documents that have their authenticity confirmed will bring specific results as expected.

This Annual Report contains the word "Company" or "Pelindo III", which defines as PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), which engages in the provision of port services as the main business activity. At times, the word "we" is also used simply for the purpose of referring to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in general.

PEMENUHAN ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN

FULFILLING ASPIRATIONS OF THE STAKEHOLDERS

Aspirasi Pemangku Kepentingan merupakan aspirasi atau mandat yang diberikan oleh segenap pihak yang dapat memengaruhi dan memiliki kepentingan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Pelindo III telah melakukan penjabaran mandat Pemangku Kepentingan untuk menentukan arah Perusahaan dalam jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi inti di bidang jasa pelayanan kepelabuhanan, Pelindo III senantiasa berkomitmen untuk memberikan dividen kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN) serta berupaya memperlancar integrasi logistik dalam upaya mendukung pembangunan dalam lingkup makroekonomi. Lebih lanjut, Perusahaan akan berupaya memenuhi keinginan Pemegang Saham yang antara lain:

- Mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi kinerja Perusahaan;
- Pencapaian sasaran kinerja Perusahaan melalui peningkatan produktivitas layanan dan operasional yang unggul berlandaskan kaidah dan norma penyelenggaraan perusahaan yang baik (GCG); dan
- Meningkatkan kesadaran terhadap kontrol dan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan guna menunjang keberhasilan manajemen.

PELANGGAN

Bagi Pelindo III, pelanggan bukan hanya sebagai pengguna jasa kepelabuhanan yang menghasilkan nilai bagi Perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa pelanggan merupakan salah satu aset Perusahaan yang penting. Untuk itu, upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh Perusahaan guna mendapatkan *beyond customer expectation*. Kebutuhan dan keinginan pelanggan antara lain:

- Kenyamanan dan penyederhanaan proses pelayanan untuk menghasilkan pelayanan terbaik;
- Ketepatan waktu pelayanan, sistem informasi yang *real time*, dan tarif jasa pelabuhan yang kompetitif;
- Penyediaan layanan jasa yang terintegrasi guna pemenuhan keinginan pelanggan yang heterogen;
- Kesiapan dan ketersediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan yang andal; dan
- Jaminan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak.

Stakeholders' Aspirations are the aspiration or mandate given by the parties that may influence and have the interest in the achievement of the Company's objectives. Pelindo III has selected the Stakeholders' mandates to determine the long-term direction of the Company contained in the Company's Long-Term Plan (RJPP) of 2015-2019 as follows:

SHAREHOLDERS

As a State-Owned Enterprise (SOE) with the core competence in port services, Pelindo III strives to be committed to distributing dividends to its Shareholders (Ministry of SOE) as well as seeking to facilitate logistic integration in order to support microeconomic development. Furthermore, the Company will strive to fulfil the Shareholders' expectations, among others:

- To promote the use of integrated information and communication technology as an effort to improve efficiency and effectiveness, as well as optimisation, of the Company's performance;*
- To achieve the objectives of the Company's performance through improved service productivity and excellent operations based on the principles and norm of good corporate governance (GCG); and*
- To increase awareness of control and supervision, both internally and externally to support management success.*

CUSTOMERS

For Pelindo III, customers are regarded not only as port service users that generate value for the Company. The Company is also aware that customers are one of its key assets. Hence, continuous improvement is carried out to reach beyond customer expectation. The customers' needs and wishes include:

- Convenience and simplification of service process to produce the best service;*
- Timeliness of service, real-time information system, and competitive port service tariff;*
- Provision of integrated service for the fulfilment of heterogenous customer needs;*
- Readiness and availability of reliable port facilities and equipment; and*
- Guaranteed business continuity in the long term that is mutually beneficial.*

PEGAWAI

Pegawai merupakan entitas yang sentral dalam suatu perusahaan. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan perusahaan/organisasi. Menyadari hal tersebut, Pelindo III senantiasa memenuhi aspirasi pegawai Perusahaan yang antara lain:

- Kejelasan *career path system* sesuai dengan kompetensi, baik *hard skill* maupun *soft skill*, dan minat pegawai;
- Peningkatan kompetensi pegawai berwawasan global sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan organisasi;
- Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif melalui implementasi budaya kerja dan sistem manajemen kinerja yang transparan;
- Peningkatan kesejahteraan berdasarkan prestasi kerja pegawai; dan
- Kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan berperan aktif dalam menentukan arah pengembangan usaha korporasi ke depan.

MASYARAKAT

Perusahaan berupaya memperhatikan kehadiran dan keberadaan masyarakat di sekitarnya melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility-CSR*) dengan harapan agar terbentuk komunitas di lingkungan sekitar Pelabuhan yang menjadi garda terdepan dalam mendukung berbagai upaya pengembangan pelabuhan, khususnya ketika muncul permasalahan yang bersifat sosial di sekitar pelabuhan tersebut. Keinginan masyarakat yang akan dipenuhi oleh Perusahaan antara lain:

- Berwawasan lingkungan dalam segala kegiatan pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan; dan
- Berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Pelabuhan melalui kegiatan CSR yang terdiri dari program kemitraan dan bina lingkungan.

MITRA KERJA

Peran Pemangku Kepentingan yang tidak kalah pentingnya bagi Pelindo III adalah mitra kerja. Mitra kerja merupakan pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, maupun produk yang dibutuhkan Perusahaan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya peranan mitra kerja tersebut, maka Perusahaan berupaya untuk memenuhi keinginan dan aspirasi mitra kerja yang antara lain:

- Transparansi dan adil dalam pelaksanaan kerja sama usaha;
- Penyederhanaan proses untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembayaran; dan
- Keberlangsungan kerja sama usaha dalam jangka panjang.

EMPLOYEES

Employees are a central entity within the company. Regardless of its form and purpose, an organisation is established based on the various vision for the benefit of humans and in the execution of its mission, it is managed and administrated by humans. Hence, humans are a strategic factor in all corporate/organisational activities. In aware of this, Pelindo III strives to fulfil the aspiration of all Company employees, including:

- Clarity of career path system according to the employees' competence, both hard and soft skills, as well as their interest.*
- Improvement of employee competence with global insights in accordance with business development and organisational needs;*
- Creation of a conducive working environment through the implementation of work culture and transparent performance management system.*
- Welfare improvement based on the employee's performance; and*
- The opportunity to voice their opinion and active roles in determining the direction of corporate development in the future.*

COMMUNITY

The Company strives to be continuously aware of the presence of its surrounding communities through various corporate social responsibility (CSR) programmes with the expectation to establishing a community around the Port area to be the front guard in supporting various port development, particularly when social issues arise around the Port area. The community wishes which will be fulfilled by the Company are:

- Environmentally-knowledgeable in all Port development and operational activities; and*
- To participate actively in improving community welfare in the Port area through CSR activities consisting of partnership and community development programmes.*

WORK PARTNERS

Another Stakeholder that is also important for Pelindo III is the work partners. They are third parties who provide materials, materials, and products required by the Company to improve organisational performance as well as achieving the established goals. Considering the significance of their role, the Company strives to fulfil the needs and aspirations of work partners, namely:

- Transparency and fairness in the implementation of business cooperation;*
- Simplification of processes to ensure payment effectiveness and efficiency; and*
- Continuity of business cooperation in the long term.*

TESTIMONI

TESTIMONIALS

BUDI NOVIANTORO

Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero)
President Director of PT Industri Kereta Api (Persero)

Pengiriman kereta api selalu melalui Pelabuhan Tanjung Perak, khususnya pada saat penanganan muatan masuk ke dalam kapal, karena hal tersebut adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pelindo III.

Train shipment always goes through Port of Tanjung Perak, particularly in the goods handling for ship loading since this is a competency of Pelindo III.

STENVEN LESAWENGEN DPC

Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA)
Indonesian National Shipowners' Association (INSA)

Ini hal baik yang dilakukan di tahun 2019. Diskon tarif paket *handling* peti kemas sebesar 35% per boks peti kemas di terminal bongkar maupun di terminal muat dapat mereduksi biaya logistik yang ditanggung oleh pengguna jasa. Kawasan Timur Indonesia (KTI) sedang digenjot pembangunannya oleh Pemerintah, maka volume kargonya luar biasa. Dengan demikian, pemberian diskon tarif paket *handling* peti kemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak merupakan langkah tepat. Karena Tanjung Perak merupakan *handling port* atau pelabuhan muat bagi banyak kargo ke arah KTI.

This is a good thing in 2019, since the 35% discount in container handling package fee per container box in both the unloading and loading terminal may reduce logistics fee borne by service users. The development in the Eastern Area of Indonesia (KTI) is boosted by the Government, hence the outstanding cargo volume. Therefore, discount in domestic container handling package fee in Port of Tanjung Perak is a correct action, considering that Tanjung Perak is a handling port or an unloading port for substantial cargo toward KTI.

SAUT GURNING

Pakar Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
Maritime Expert from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Rencana efisiensi biaya penanganan kontainer tersebut jelas akan memberikan dampak menguatnya preferensi pemilik barang dan pelayaran terhadap sejumlah terminal kontainer di Tanjung Perak, sebagai opsi menarik untuk lokasi alih muat (*transshipment*) kontainer domestik Indonesia.

The plan for container handling fee efficiency will definitely strengthen the preference of goods and shipping line owners to several container terminals in Tanjung Perak; an interesting option for domestic container transshipment in Indonesia.

NICKE WIDYAWATI

Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
President Director of PT Pertamina (Persero)

Pelabuhan merupakan pintu gerbang bisnis dunia yang akan menggerakkan perekonomian nasional. Dengan kerja sama ini, distribusi energi di seluruh pelabuhan akan semakin efektif dan efisien.

Ports are the gate into world business which drives the national economy. Through this cooperation, energy distribution in all ports will be more effective and efficient.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN

Informasi mengenai penghargaan yang berhasil diraih oleh Pelindo III di tahun 2019 tersaji sebagai berikut:

AWARDS

Information on awards achieved by Pelindo III in 2019 is presented as follows:



1



2



3



4



5



6



7



8

NO.	NAMA PENGHARGAAN AWARD TITLE	PENERIMA RECIPIENT	PENYELENGGARA ORGANISER	TANGGAL DATE
1.	Penghargaan Big Corporate CEO Strategic Orientation Terbaik 8 th Anugerah BUMN 2019 kepada Doso Agung <i>Award for the Best Big Corporate CEO Strategic Orientation on the 8th Anugerah BUMN in 2019 to Doso Agung</i>	Pelindo III	BUMN Track	28 Maret 28 March
2.	Penghargaan Gold Winner kategori Annual Report subkategori BUMN pada Public Relations Indonesia Awards 2019 <i>Gold Winner award in the Annual Report category, SOE sub-category in the 2019 Public Relations Indonesia Awards</i>	Pelindo III	Public Relations (PR) Indonesia	28 Maret 28 March
3.	Apresiasi Manajemen Layanan Informasi Arus Mudik 2019 <i>Appreciation for the Information Service Management in the 2019 Homecoming Flow</i>	Pelindo III	Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Komisi Informasi Publik <i>Head of Presidential Staff, Public Information Commission</i>	19 Juli 19 July
4.	Penghargaan 4 Stars pada Top GRC (Governance, Risk & Compliance) 2019 <i>4 Stars Award in the 2019 Top GRC (Governance, Risk & Compliance)</i>	Pelindo III	Top Business	22 Agustus 22 August
5.	Penghargaan The Most Committed GRC Leader 2019 kepada Doso Agung pada Top GRC (Governance, Risk & Compliance) 2019 <i>The 2019 Most Committed GRC Leader award for Doso Agung in the 2019 Top GRC (Governance, Risk & Compliance)</i>	Pelindo III	Top Business	22 Agustus 22 August
6.	Penghargaan Gold Winner pada kategori Best Leader Supporting PR and Communications subkategori BUMN <i>Gold Winner award in the Best Leader Supporting PR and Communications strategy, SOE sub-category</i>	Pelindo III	Anugerah Humas Indonesia (AHI)	30 Agustus 30 August
7.	Penghargaan Gold Winner kategori Website Pelayanan Informasi Publik Terinovatif subkategori BUMN <i>Gold Winner award in the Most Innovative Public Information Service category, SOE sub-category</i>	Pelindo III	Anugerah Humas Indonesia (AHI)	30 Agustus 30 August
8.	Penghargaan Nusantara CSR Awards Kategori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas <i>An award in the Community Economic Empowerment in Nusantara CSR Awards</i>	Pelindo III	The La Tofi School of CSR	18 September 18 September



9



10



12



11



13



14

NO.	NAMA PENGHARGAAN AWARD TITLE	PENERIMA RECIPIENT	PENYELENGGARA ORGANISER	TANGGAL DATE
9.	Predikat Excellent kategori Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara 2018 pada Infobank BUMN Awards 2019 <i>Excellent predicate in the State-Owned Enterprise 2018 Financial Performance category in the 2019 Infobank BUMN Awards</i>	Pelindo III	Infobank	25 Oktober 25 October
10.	Predikat Creative Competition Strategi Terbaik pada kategori Corporate Marketing BUMN Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan pada BUMN Branding and Marketing Award 2019 <i>Best Strategy Creative Competition predicate in SOE Corporate Marketing of the Construction Business and Transportation Infrastructure and Facilities Sector category in the 2019 BUMN Branding and Marketing Award</i>	Pelindo III	BUMN Track	5 November 5 November
11.	Peringkat Perak di kategori Organisasi Menengah dan Besar Jasa pada SNI Award 2019 <i>Silver rank in the Middle and Large Organisation Service in the 2019 SNI Award</i>	Pelindo III	Badan Standardisasi Nasional (BSN) National Standardization Agency (BSN)	20 November 20 November
12.	Predikat Emerging Industry Leader pada Asesmen KPKU BUMN 2019 <i>Emerging Industry Leader predicate in the 2019 KPKU BUMN Assessment</i>	Pelindo III	Forum Ekselen BUMN SOE Excellence Forum	28 November 28 November
13.	Predikat Menuju Informatif dalam Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2019 <i>Towards Informative predicate in the implementation of Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure in the 2019 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik</i>	Pelindo III	Komisi Informasi Publik RI Indonesian Public Information Commission	21 November 21 November
14.	Predikat Trusted Company based on CGPI pada Indonesia Trusted Company Good Corporate Governance Award 2019 <i>Trusted Company based on CGPI predicate in the 2019 Indonesia Trusted Company Good Corporate Governance Award</i>	Pelindo III	ICG & SWA	11 Desember 11 December

SERTIFIKASI

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Pelindo III telah memperoleh sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, mengacu pada SNI ISO 9001:2015 dan sesuai Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 308/KEP/BSN/12/2015. Saat ini, ISO 9001:2015 telah diterapkan pada 17 Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat di lingkungan Perusahaan:

CERTIFICATIONS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Pelindo III has obtained a Certificate of ISO 9001:2015 for the implementation of Quality Management System which refers to SNI ISO 9001:2015 and the Decree from the National Standardization Agency No. 308/KEP/BSN/12/2015. ISO 9001:2015 has been implemented on 17 Port Branches and the Head Office as follows:

SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

NO.	CABANG BRANCH	VERSI VERSION	NO. SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	BADAN SERTIFIKASI CERTIFICATION AGENCY	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD
1.	Kantor Pusat Head Office	2015	01 100 1535145/01	TUV Rheinland	21 Februari 2019 s.d. 9 Februari 2022 21 February 2019 until 9 February 2022
2.	Tanjung Perak	2015	01 100 1535145/02	TUV Rheinland	
3.	Banjarmasin	2015	01 100 1535145/03	TUV Rheinland	
4.	Tanjung Emas	2015	01 100 1535145/04	TUV Rheinland	
5.	TPKS	2015	01 100 1535145/05	TUV Rheinland	
6.	Tanjung Intan	2015	01 100 1535145/06	TUV Rheinland	
7.	Kotabaru	2015	01 100 1535145/07	TUV Rheinland	
8.	Gresik	2015	01 100 1535145/08	TUV Rheinland	
9.	Benoa	2015	01 100 1535145/09	TUV Rheinland	
10.	Kupang	2015	01 100 1535145/10	TUV Rheinland	
11.	Sampit	2015	01 100 1535145/11	TUV Rheinland	
12.	Tanjung Wangi	2015	01 100 1535145/12	TUV Rheinland	
13.	Kumai	2015	01 100 1535145/13	TUV Rheinland	
14.	Lembar	2015	01 100 1535145/14	TUV Rheinland	
15.	Tanjung Tembaga	2015	01 100 1535145/15	TUV Rheinland	
16.	Bima	2015	01 100 1535145/116	TUV Rheinland	
17.	Maumere	2015	01 100 1535145/17	TUV Rheinland	
18.	Celukan Bawang	2015	01 100 1535145/18	TUV Rheinland	

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

Pelindo III telah memperoleh sertifikat penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 mengacu pada SNI ISO 14001:2015 sesuai dengan Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 282/KEP/BSN/12/2015. Saat ini, ISO 14001:2015 telah diterapkan pada 9 Cabang dan 1 Kantor Pusat yaitu:

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

The Company has obtained a Certificate of ISO 14001:2015 for the implementation of Environmental Management System, which refers to SNI ISO 14001:2015 and the Decree from the National Standardization Agency No. 282/KEP/BSN/12/2015. ISO 14001:2015 has been implemented on nine branches and one Head Office as follows:

SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001 ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

NO.	CABANG BRANCH	VERSI VERSION	NO. SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	BADAN SERTIFIKASI CERTIFICATION AGENCY	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD
1.	Kantor Pusat Head Office	2015	01 104 1535145/01	TUV Rheinland	21 Februari 2019 s.d. 9 Februari 2022 20 February 2019 until 9 February 2022
2.	Tanjung Perak	2015	01 104 1535145/02	TUV Rheinland	
3.	Banjarmasin	2015	01 104 1535145/03	TUV Rheinland	
4.	Tanjung Emas	2015	01 104 1535145/04	TUV Rheinland	
5.	TPKS	2015	01 104 1535145/05	TUV Rheinland	
6.	Tanjung Intan	2015	01 104 1535145/06	TUV Rheinland	
7.	Kotabaru	2015	01 104 1535145/07	TUV Rheinland	
8.	Gresik	2015	01 104 1535145/08	TUV Rheinland	
9.	Benoa	2015	01 104 1535145/09	TUV Rheinland	
10.	Kupang	2015	01 104 1535145/10	TUV Rheinland	

SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3)

STANDAR YANG DIMILIKI

Pelindo III berkomitmen melaksanakan secara konsisten pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan efisien dengan cara:

- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Peminimalan terjadinya penyakit akibat kerja dan nihilnya ancaman keamanan dan kecelakaan kerja;
- Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan kaidah-kaidah K3;
- Melibatkan seluruh komponen Perusahaan untuk ikut bertanggung jawab atas terlaksananya program K3 agar tercapainya kinerja usaha yang optimal; dan
- Mematuhi peraturan Perundang-Undangan dan persyaratan lainnya dalam bidang Jasa Kepelabuhanan, terutama yang berkaitan dengan aspek K3.

Dalam rangka pemenuhan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pelindo III memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan secara aman dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Pelindo III No. 37/KPTS.UM.7.03/P.III-1995 tentang Kebijakan K3 di Lingkungan Pelindo III tanggal 28 Agustus 1995.

Perusahaan juga telah menerapkan SMK3 di 17 Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat di lingkungan Perusahaan. Berikut ini adalah daftar Pelabuhan yang telah menerapkan SMK3 beserta nomor sertifikat dan masa berlakunya:

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

STANDARDS

Pelindo III is committed to consistently implementing effective and efficient management of occupational health and safety aspect by:

- Implementing Occupational Health and Safety Management System (SMK3) based on the applicable regulations;*
- Minimising the occurrence of diseases due to work, and promoting zero security threats and occupational accidents;*
- Establishing work awareness that prioritises K3 principles;*
- Engaging all components of the Company to be responsible for the implementation of the K3 program to achieve optimum business performance; and*
- Complying with the laws and regulations, as well as other requirements in Port Services, especially those relating to K3 aspect.*

To comply with the prevailing laws and regulations, Pelindo III ensures that all operational activities are carried out safely by applying high standards to the aspect of Occupational Health and Safety stipulated in the Decree of the BOD of Pelindo III No. 37/KPTS.UM.7.03/P.III-1995 on OHS Policy in Pelindo III dated 28 August 1995.

The Company also implements SMK3 in 17 Port Branches and the Head Office. The following table lists the Ports that have implemented SMK3, along with the certificate number and the validity period:

SERTIFIKAT SMK3

SMK3 CERTIFICATIONS

NO.	CABANG PELABUHAN PORT BRANCHES	AUDITOR SMK3 AUDITOR	NO. SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD	KETERANGAN INFORMATION
1.	Tanjung Perak	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
2.	Tanjung Emas	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
3.	Tanjung Intan	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
4.	Banjarmasin	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 Tahun 2015 No. 357 of 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018 31 August 2015 to 30 August 2018	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
5.	Benoa	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
6.	Tenau Kupang	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
7.	Kotabaru	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 Tahun 2015 No. 357 of 2015	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018 31 August 2015 to 30 August 2018	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
8.	TPKS	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
9.	Gresik	PT Sucofindo Indonesia	No. 168 Tahun 2014 No. 168 of 2014	14 Mei 2014 s.d. 13 Mei 2017 14 May 2014 to 13 May 2017	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
10.	Sampit	TUV Rheinland	No. 168 Tahun 2014 No. 168 of 2014	14 Mei 2014 s.d. 13 Mei 2017 14 May 2014 to 13 May 2017	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
11.	Lembar	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
12.	Tanjung Wangi	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
13.	Celukan Bawang	TUV Rheinland	No. 143 Tahun 2015 No. 143 of 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019 16 May 2016 to 16 May 2019	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
14.	Kumai	TUV Rheinland	No. 143 Tahun 2015 No. 143 of 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019 16 May 2016 to 16 May 2019	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
15.	Kantor Pusat Head Office	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
16.	Bima	TUV Rheinland	No. 201 Tahun 2017 No. 201 of 2017	14 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020 14 July 2017 to 14 July 2020	
17.	Maumere	TUV Rheinland	No. 201 Tahun 2017 No. 201 of 2017	14 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020 14 July 2017 to 14 July 2020	
18.	Tanjung Tembaga	TUV Rheinland	No. 201 Tahun 2017 No. 201 of 2017	14 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020 14 July 2017 to 14 July 2020	

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN PELABUHAN INTERNASIONAL

Pelindo III telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Pelabuhan mengacu pada Amandemen Konvensi *International Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974* Bab XI-2 tentang *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code)* dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 tahun 2003 tentang pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang ISPS Code di Wilayah Indonesia, saat ini ISPS Code telah diterapkan pada 10 Cabang Pelabuhan dan 1 UPP di lingkungan Perusahaan yaitu:

INTERNATIONAL PORT SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

Pelindo III has implemented a Port Security Management System which refers to the Amendment of the International Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) 1974 Chapter XI-2 on International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) and Decree of the Minister of Transportation No. KM. 33 of 2003 on the Implementation of SOLAS Amendment 1974 regarding ISPS Code within the Territory of Indonesia. Currently, the ISPS Code has been applied to ten Port Branches and one UPP within the Company, namely:

SERTIFIKAT ISPS CODE ISPS CODE CERTIFICATES

NO.	CABANG PELABUHAN PORT BRANCHES	BADAN SERTIFIKASI CERTIFICATION AGENCY	NO. SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD	KETERANGAN INFORMATION
1.	Tanjung Perak		002-0096-DN	28 November 2014 s.d. 24 November 2019 28 November 2014 to 24 November 2019	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
2.	Tanjung Emas		002-0075-DN	18 Agustus 2014 s.d. 17 Agustus 2019 18 August 2014 to 17 August 2019	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
3.	Tanjung Intan		002-0163-DN	3 Januari 2016 s.d. 2 Januari 2021 3 January 2016 to 2 January 2021	
4.	Benoa		002-0176-DN	9 Agustus 2017 s.d. 12 Juni 2022 9 August 2017 to 12 June 2022	
5.	Tenau Kupang		02-0345-DN	23 Agustus 2014 s.d. 22 Agustus 2019 23 August 2014 to 22 August 2019	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
6.	Kotabaru	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation	02-0231-DN	29 Desember 2015 s.d. 28 Desember 2020 29 December 2015 to 28 December 2020	
7.	TPKS		02-0074-DN	18 Agustus 2014 s.d. 17 Agustus 2019 18 August 2014 to 17 August 2019	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
8.	Gresik		02-0336-DV	4 Februari 2014 s.d. 3 Februari 2019 4 February 2014 to 3 February 2019	Dalam Proses Pembaruan In the renewal process
9.	Lembar		02-0182-DN	27 Maret 2018 s.d. 27 Maret 2023 27 March 2018 to 27 March 2023	
10.	Tanjung Wangi		02-0256-DN	16 Maret 2018 s.d. 20 Maret 2023 16 March 2018 to 20 March 2023	
12.	Bagendang		02-0467-DV	19 November 2018 s.d. 15 November 2023 19 November 2018 to 15 November 2023	
13.	Celukan Bawang		02-0438-DV	2 Mei 2018 s.d. 25 April 2023 2 May 2018 to 25 April 2023	

PERISTIWA PENTING 2019

SIGNIFICANT EVENTS IN 2019



13 JANUARI
13 JANUARY

Pelindo III Group Meraih 7 Penghargaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pada peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2020, Pelindo III Group mendapat 7 penghargaan sekaligus yakni penghargaan Zero Accident pada Unit Kantor Pusat Pelindo III, Pelabuhan Tanjung Perak Regional Jawa Timur, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), PT Terminal Teluk Lamong (TTL), PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS), serta penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS untuk PT Pelindo Husada Citra (PHC).

Pelindo III Group Seized Seven Awards in the Implementation of Occupational Health and Safety Management System (SMK3)

In commemorating the National K3 Month of 2020, Pelindo III Group seized seven awards, namely Zero Accident Award in Pelindo III Head Office, Port of Tanjung Perak in East Java Region, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), PT Terminal Teluk Lamong (TTL), PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS), and the award for HIV/AIDS Prevention and Management Programme for PT Pelindo Husada Citra (PHC).



14 JANUARI
14 JANUARY

Kerja Sama Pelindo III dengan Perusahaan Pelayaran dalam Memperkuat Konektivitas dan Menyederhanakan Sistem Pembayaran (Single Billing)

Pelindo III akan memberlakukan tarif khusus untuk penanganan *transshipment* peti kemas domestik antarterminal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dengan pemberlakuan tarif khusus ini maka tarif penanganan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi sebesar 65% dari tarif normal (paket penanganan peti kemas domestik).

Pelindo III Cooperates with Shipping Companies to Strengthen Connectivity and Simplify Billing System (Single Billing)

Pelindo III will enact special tariff for domestic container *transshipment* inter-terminal handling in Port of Tanjung Perak Surabaya. By enacting the special tariff, the container handling tariff in Port of Tanjung Perak is 65% of the normal tariff (domestic container handling package).



18 JANUARI
18 JANUARY

Nota Kesepahaman Sinergi Pemanfaatan Sumber Daya BUMN Antara Pelindo III dengan INKA

Pelindo III menjalin kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (INKA) dalam hal penanganan muatan barang milik INKA. BUMN produsen kereta api tersebut memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai lokasi pengiriman gerbong kereta api ke luar negeri.

Memorandum of Understanding for the Synergy in Utilising SOE Resources between Pelindo III and INKA

Pelindo III cooperates with PT Industri Kereta Api (INKA) in handling the cargo of goods owned by INKA. The train-producing SOE utilises Port of Tanjung Perak as a location for delivering train cars overseas.



18 FEBRUARI
18 FEBRUARY

Sinergi Pelindo III dan Pertamina

Penandatanganan kerja sama antara Pelindo III dan PT Pertamina (Persero) dalam integrasi dan pendayagunaan aset pelabuhan untuk bersama mengembangkan bisnis di sektor energi. Pelindo III akan mengerjakan pemeliharaan *jetty* dan alur pelayaran di terminal bahan bakar minyak milik PT Pertamina (Persero). Sementara itu, PT Pertamina (Persero) akan menjadi penyuplai pelumas di pelabuhan-pelabuhan Pelindo III.

The Synergy between Pelindo III and Pertamina

A cooperation signing between Pelindo III and PT Pertamina (Persero) in port assets integration and utilisation to develop business in the energy sector. Pelindo III will work on *jetty* and shipping lines maintenance in fuel oil terminal of PT Pertamina (Persero). Meanwhile, PT Pertamina (Persero) will supply lubricants in Pelindo III ports.



4 MARET
4 MARCH

FGD antara Pelindo III dengan Sinar Mas Group terkait Sinergi Logistik

Pelindo III dan grup usaha Sinarmas menjajaki peluang menjadikan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai salah satu pusat distribusi kertas di Indonesia.

FGD between Pelindo III and Sinar Mas Group in Logistics Synergy

Pelindo III and Sinarmas group explore the opportunity to turn Port of Tanjung Perak Surabaya as one of the paper distribution centres in Indonesia.



23 JANUARI
23 JANUARY

Pelindo III Tanam 50.000 Bibit Bakau di Pelabuhan Bena

Pelindo III bersama institusi maritim Pelabuhan Bena dan warga mengadakan aksi pelestarian lingkungan berupa penanaman 50.000 bibit bakau di kawasan Pelabuhan Bena, Denpasar, Bali.

Pelindo III Plants 50,000 Mangrove Seeds in Port of Bena

Pelindo III and maritime institution, Port of Bena, and the surrounding residents held environmental conservation action in a form of 50,000 mangrove seeds planting in Port of Bena area in Denpasar, Bali.



6 FEBRUARI
6 FEBRUARY

Pelindo III Siapkan Sambungan Listrik Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas

Pelindo III akan menyiapkan fasilitas sambungan listrik dari darat (*shore power connection*) untuk memenuhi kebutuhan listrik pada kapal yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Untuk tahap awal akan dilakukan uji coba dengan penyiapan fasilitas sambungan listrik tersebut di Terminal Dwiwata yang dioperasikan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang memiliki daya sebesar 1 megawatt dengan 1 unit shore power connection.

Pelindo III Prepares Ship Electricity Connection in Port of Tanjung Emas

Pelindo III will prepare land electricity connection facility (shore power connection) to fulfil the electricity needs for ships docking in Port of Tanjung Emas, Semarang. The initial phase will conduct testing by preparing the electrical connection facility in Dwiwata Terminal operates by PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) with a one-megawatt power and one unit of shore power connection.



13 FEBRUARI
13 FEBRUARY

Pelindo III Investasi Fasilitas Pelabuhan Rp6,44 T

Pelindo III menyiapkan rencana investasi sebesar Rp6,44 triliun. Investasi tersebut dialokasikan Perusahaan untuk membiayai sejumlah proyek strategis di seluruh wilayah kerja di 7 provinsi. Beberapa proyek merupakan pekerjaan *multi years* (tahun jamak) dan sejumlah proyek baru.

Pelindo III Invests Rp6.44 T in Port Facilities

Pelindo III prepares an investment plan of Rp6.44 trillion. The investment is allocated by the Company to fund a number of strategic project in all work areas in seven provinces. Several project were multiyear investment along with a number of new projects.



9 MARET
9 March

Pelabuhan Bena Mantapkan Diri Menjadi Home Port Cruise

Pelabuhan Bena Bali yang dikelola oleh Pelindo III telah merampungkan pengerukan dan pendalaman alur dari minus 9 meter LWS (*low water spring/rata-rata muka air laut*) menjadi minus 12 meter LWS. Hal tersebut telah memungkinkan kapal pesiar dengan LOA (*length of all/ukuran panjang*) lebih dari 350 meter untuk sandar di demaga dimana sebelumnya hanya bisa berlabuh di luar pelabuhan.

Port of Bena Established Itself as a Home Port Cruise

Port of Bena Bali managed by Pelindo III has completed the grooves dredging and deepening from minus 9 meters LWS (low water spring or average sea level) into minus 12 meters LWS. This has allowed cruise ships with LOA (length of all) of more than 350 meters for docking in the wharf in which it could only be anchored outside the port.



13 MARET
13 MARCH

Pelindo III Terima Penghargaan Wajib Pajak 2019

Pelindo III menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai wajib pajak yang patuh dan kooperatif dengan melakukan integrasi data dan pertukaran data wajib pajak.

Pelindo III Received 2019 Taxpayer Award

Pelindo III has received an award from the Ministry of Finance as an obedient and cooperative taxpayer through data integration and taxpayer data exchange.



2 APRIL
2 APRIL

Pelindo III dan BNI Kerja Sama Supply Chain Financing

Guna mendukung kelancaran arus logistik nasional, Pelindo III bersinergi dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menyediakan program fasilitas *Supply Chain Financing* (SCF) dalam hal pembiayaan atas invoice pengguna jasa pelabuhan.

Pelindo III and BNI Cooperates in Supply Chain Financing

To support the continuity of national logistics flow, Pelindo III is in synergy with Bank Negara Indonesia (BNI) to provide Supply Chain Financing facility programme in the case of billing on port service user invoice.



2 APRIL
2 APRIL

Workshop Migas Bersama Antara Pelindo III dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Pelindo III bahkan sudah menyiapkan lini usaha khusus, yaitu Pelindo Energi Logistik (PEL), yang akan fokus mengembangkan *integrated services shore-based terminal* atau terminal pelabuhan dengan sejumlah layanan yang siap mendukung logistik pelaku industri migas. Terminal Gresik di Jawa Timur sudah siap dengan *dedicated area* untuk memberikan layanan terintegrasi dari kegiatan di laut, seperti kapal sandar, hingga kegiatan di darat, misalnya untuk lokasi penyimpanan.

Joint Oil and Gas Workshop between Pelindo III and Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas)

Pelindo III has prepared a special business line, Pelindo Energi Logistik (PEL) which will focus on the development of *shore-based integrated terminal services* or the port terminal with a number of services that are ready to support the logistics of oil and gas industry actors. Gresik Terminal in East Java is ready with a *dedicated area* to provide an integrated service for sea activities, such as ship docking, to land activities, such as storage location.



16 MEI
16 MAY

FGD Pelabuhan Tanjung Perak dan Rotterdam Tentang Tren Digitalisasi

Sebagai operator Pelabuhan Tanjung Perak dan beberapa pelabuhan penting lain di Indonesia, Pelindo III menggelar *focus group discussion (FGD)* tentang tren digitalisasi pelabuhan dengan mengundang pengelola Pelabuhan Rotterdam, Belanda. Diskusi tersebut menekankan pentingnya peran pelabuhan dalam mendorong integrasi tidak hanya antarproses bisnis di pelabuhan saja, tetapi hingga di jaringan rantai pasok.

FGD between Port of Tanjung Perak and Rotterdam on Digitalisation Trend

As an operator for Port of Tanjung Perak and other important ports in Indonesia, Pelindo III has held a *focus group discussion (FGD)* on port digitalisation trend by inviting the management of Port of Rotterdam, Netherlands. The discussion emphasises the important role of ports in driving the integration of not only inter-process port businesses, but also to the supply chain network.



31 MEI
31 MAY

Dua Penghargaan Diperoleh Pelindo III di Hari Jadi Kota Surabaya ke-726

Pelindo III meraih dua penghargaan sekaligus di acara gebyar resepsi hari jadi Kota Surabaya. Pelindo III terpilih sebagai penampil terbaik pertama di parade budaya dan pawai bunga 2019 dan sekaligus sebagai BUMN yang memberikan sumbangsih dalam pembangunan Patung Suroboyo.

Pelindo III Received Two Awards in the 726th Anniversary of Surabaya

Pelindo III received two awards in the anniversary celebration of Surabaya. Pelindo III is chosen as the first best performer in the 2019 cultural parade and flower march as well as an SOE with the contribution in the construction of Patung Suroboyo..



26 JUNI
26 JUNE

Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian antara Pelindo III dan PGN tentang Sinergi Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengelolaan Fasilitas Terminal LNG di Terminal Teluk Lamong

Pelindo III melakukan sinergi BUMN dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak perusahaan masing-masing, yaitu PT PGN LNG Indonesia (PLI) dengan PT Pelindo Energi Logistik (PEL), untuk membangun terminal LNG (*liquefied natural gas*) di Terminal Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Agreement Principles Signing between Pelindo III and PGN on Construction, Operation, and Management Synergy of LNG Terminal Facility in Terminal Teluk Lamong

Pelindo III has an SOE synergy with PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) with its respective subsidiaries, namely PT PGN LNG Indonesia (PLI) with PT Pelindo Energi Logistik (PEL) to construct an LNG (*liquefied natural gas*) terminal in Terminal Teluk Lamong, Port of Tanjung Perak, Surabaya.



2 JULI
2 JULY

Topping Off Ceremony Pelindo Place (Tower Poros Maritim)

Pelindo III segera merampungkan pembangunan Tower Poros Maritim yang akan menjadi menara pusat perkantoran urban pertama di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Proyek yang dirancang untuk memusatkan para pelaku bisnis di pelabuhan tersebut kedua di Indonesia tersebut ditargetkan selesai pada 2020. Sekitar 40% dari menara perkantoran setinggi 23 lantai tersebut, atau lantai 16 hingga 23, rencananya akan dipakai untuk grup usaha Pelindo III, sedangkan 16 lantai ke bawah akan disewakan.

Topping Off Ceremony Pelindo Place (Tower Poros Maritim)

Pelindo III is soon to complete the construction of Tower Poros Maritim which will become the first central office tower in Port of Tanjung Perak Surabaya. The project designed to concentrate the business people in the second-busiest port in Indonesia is targeted to finish in 2020. About 40% of the 23-floor office tower, or from the 16th to 23rd floor, is planned to be utilised for Pelindo III business groups, while the 16 floors down will be leased.



4 JULI
4 JULY

Seluruh Terminal Pelindo III Telah Implementasikan DO Online

Pelindo III menerapkan pelayanan pengiriman pesan secara elektronik (*Delivery Order Online-DO Online*) barang impor di seluruh terminal peti kemas yang dikelolanya. Sistem ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan, dengan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia.

All Pelindo III Terminal Has Implemented DO Online

Pelindo III has applied an electronic-based message delivery service (*Delivery Order Online-DO Online*) for imported goods in all container terminals it operated. The system is expected to reduce the logistics fee in ports by improving the ease of business in Indonesia.



14 JUNI
14 JUNE

Sosialisasi Integrated Billing System (IBS) Nasional: Turn Nation Seamless Interconnectivity Into Reality

Empat BUMN operator pelabuhan, Pelindo I, II, III, dan IV mengembangkan *Integrated Billing System (IBS)* atau sistem pembayaran jasa kepelabuhanan yang terintegrasi secara nasional. Pada fase awal dari kerja sama tersebut, masing-masing Pelindo akan menunjuk 1 terminal peti kemas yang akan diintegrasikan, yaitu TPKD Belawan milik Pelindo I, TP 2 Priok milik Pelindo II, TPK Banjarmasin milik Pelindo III, dan TP Tarakan milik Pelindo IV.

The Socialisation of National Integrated Billing System (IBS): Turn Nation Seamless Interconnectivity Into Reality

Four port operator SOEs, Pelindo I, II, III, and IV developed an *Integrated Billing System (IBS)* or a port services billing system integrated nationally. In the initial phase of the cooperation, each Pelindo will appoint one container terminal which will be integrated, namely TPKD Belawan of Pelindo I, TP2 Priok of Pelindo II, TPK Banjarmasin of Pelindo II, and TP Tarakan of Pelindo IV.



20 JUNI
20 JUNE

Pelindo III Siap Terapkan Gate In Online di Tanjung Perak

Pelindo III siap menerapkan fasilitas *gate in online* di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk kapal penumpang dan ro-ro. Fasilitas tersebut membuat penumpang kapal laut yang sudah *check in* dapat memindai *boarding pass*-nya sebelum berjalan dari terminal untuk masuk ke dek kapal, sehingga terdara dengan jelas.

Pelindo III is Ready to Implement Online Gate-In in Tanjung Perak

Pelindo III is ready to apply an online gate-in facility in Port of Tanjung Perak Surabaya for passenger and ro-ro ships. The facility enables ship passengers who have checked-in to scan their boarding pass before walking from the terminal to enter the ship deck, recording their data clearly.



20 JUNI
20 JUNE

Peresmian Fasilitas Layanan Shore Connection untuk Kapal PT Pupuk Indonesia Logistik

Melalui cucu perusahaannya, PT Lamong Energi Indonesia yang bergerak di bidang energi dan sebagai penyedia jasa pelayanan *shore connection*, Pelindo III meresmikan layanan *shore connection* untuk kapal PT Pupuk Indonesia Logistic (PILOG). Saat ini fasilitas daya listrik 1 megawatt tersebut telah tersedia di Terminal Dwimatama, wilayah Pelabuhan Tanjung Emas yang dioperasikan khusus untuk melayani PILOG.

Inauguration of Shore Connection Service Facility for PT Pupuk Indonesia Logistik Ships

Melalui anak perusahaannya, PT Lamong Energi Indonesia yang bergerak di bidang energi dan sebagai penyedia jasa pelayanan *shore connection*, Pelindo III meresmikan layanan *shore connection* untuk kapal PT Pupuk Indonesia Logistic (PILOG). Saat ini fasilitas daya listrik 1 megawatt tersebut telah tersedia di Terminal Dwimatama, wilayah Pelabuhan Tanjung Emas yang dioperasikan khusus untuk melayani PILOG.



11 JULI
11 JULY

Deklarasi Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Pelindo III menyambut positif deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak. Isi deklarasi tersebut yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.

Declaration to Establish an Integration Zone into Corruption-Free Area and Clean Service Bureaucracy Area

Pelindo III positively welcome the declaration to establish an integration into a corruption-free area (WBK) and clean service bureaucracy area (WBBM) in Port of Tanjung Perak area. The content of the declaration is to realise good, clean governance free of corruption, collusion, and nepotism in Port of Tanjung Perak.



17 JULI
17 JULY

Peresmian Terminal Penumpang Pelabuhan Panglima Utar Kumai

Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, meresmikan terminal penumpang kapal laut Panglima Utar Kumai, Kalimantan Tengah. Gedung fasilitas pelayanan publik dari Pelindo III tersebut merupakan pengembangan dari gedung terminal penumpang yang lama. Gedung tersebut memiliki sejumlah fasilitas yang lengkap dan setara dengan bandar udara.

Inauguration of Port of Panglima Utar Kumai Passenger Terminal

Regent of Kotawaringin Barat, Nurhidayah, inaugurates the Panglima Utar Kumai ship passenger terminal in Central Kalimantan. The public service facility building of Pelindo III is a development of the old passenger terminal building. The building has a complete facility that is equal to airports.



19 JULI
19 JULY

Pelindo III Raih Penghargaan Manajemen Informasi Terbaik Mudik 2019

Pelindo III menerima apresiasi untuk manajemen informasi arus mudik yang dikelolanya. Penganugerahan dan apresiasi diberikan berdasarkan hasil Program Pemantauan Layanan Manajemen Informasi Arus Mudik Tahun 2019 yang dimulai sejak April 2019. Program tersebut merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Informasi Publik (KIP), dan Kantor Staf Presiden (KSP). Kemudian juga melibatkan Google Indonesia sebagai pemantau *traffic* dan konten di portal www.infomudik.go.id.

Pelindo III Received the 2019 Best Homecoming Information Management

Pelindo III received an appreciation for homecoming flow information management they managed. The award and appreciation are given based on the results of the 2019 Monitoring Programme for Homecoming Flow Information Management Services started in April 2019. The programme is a cooperation between the Directorate-General of Public Communication Information, Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), Public Information Commission (KIP), and Office of Presidential Staff (KSP). It also involved Google Indonesia as a traffic and content monitor in www.infomudik.go.id portal.



5 AGUSTUS
5 AUGUST

Peresmian Perpanjangan Dermaga Multipurpose Pelabuhan Bagendang

Pelindo III memperpanjang dermaga Pelabuhan Bagendang, di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menjadi 440 meter. BUMN operator pelabuhan tersebut semula sudah mengoperasikan dua dermaga yang masing-masing sepanjang 120 meter.

Inauguration for Extension of Multipurpose Wharf in Port of Bagendang

Pelindo III has extended the wharf in Port of Bagendang in Kotawaringin Timur, Central Kalimantan into 440 meters. The port-operator SOE previously operates two wharves, each 120 meters long.



17 AGUSTUS
17 AUGUST

Agreement Signing Ceremony Between Johor Port – JP Skills Centre & Pelindo III on Training and Education

Pelindo III menjalin kerja sama pendidikan dan pelatihan pegawai operasional dengan Pelabuhan Johor di Malaysia. Pelabuhan Johor gerbang logistik di selatan Negeri Jiran yang merupakan pelabuhan terintegrasi untuk berbagai komoditas (*integrated multi-purpose*), seperti peti kemas, curah cair, dan curah kering.

Agreement Signing Ceremony Between Johor Port – JP Skills Centre & Pelindo III on Training and Education

Pelindo III has established cooperation in education and training for operational employees with Port of Johor in Malaysia. Port of Johor, the logistics gate in the southern part of the neighbouring country, is an integrated multipurpose port for various commodities, such as container, liquid bulk, and dry bulk.



21 AGUSTUS
21 AUGUST

Presiden Joko Widodo Mengunjungi Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Dalam kunjungannya, Presiden meninjau langsung pemuatan 470 hewan ternak sapi menggunakan *gangways* atau fasilitas jembatan hewan dari dermaga ke Kapal Motor Camara Nusantara 3. Kunjungan tersebut di antaranya didampingi oleh Staf Khusus Presiden Gories Mere, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur NTT Victor Laiskodat, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo, Direktur Utama Pelindo III Doso Agung, dan Direktur Teknik Pelindo III Joko Noerhudha.

President Joko Widodo Visited Port of Tenau Kupang, East Nusa Tenggara (NTT)

In his visit, the president directly reviewed the unloading of 470 cattles with *gangways* or a facility to bridge the animal from the wharf to Camara Nusantara 3 Motor Ship. The visit is accompanied by Gories Mere (Special Presidential Staff), Budi Karya Sumadi (Minister of Transportation), Victor Laiskodat (Governor of NTT), Jefri Riwu Kore (Mayor of Kupang), as well as Agus Purnomo (Directorate-General of Sea Transportation), Doso Agung (President Director of Pelindo III), and Joko Noerhudha (Engineering Director of Pelindo III).



16 SEPTEMBER
16 SEPTEMBER

13th APA Sports Meet

Total seribu atlet dan kontingen dari sembilan negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Ports Association telah tiba di tanah air untuk memperkuat solidaritas dan persahabatan melalui ajang kompetisi olahraga, 13th APA Sports Meet. Pelindo II/IPC bersama-sama dengan Pelindo I, III, dan IV menyambut kedatangan para tamu negara di Yogyakarta.

13th APA Sports Meet

A total of 1000 athletes and contingent from nine Southeast Asia countries from ASEAN Ports Association have arrived to strengthen the solidarity and friendship through a sports competition, 13th APA Sports Meet. Pelindo II/IPC along with Pelindo I, III, and IV welcomed the guest arrival in Yogyakarta.



15 OKTOBER
15 OKTOBER

DP3 Raih Penghargaan ADPI Award

Dalam rangka memperingati HUT Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) ke-34, bertempat di Discovery Hotel Jakarta, Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) telah mendapat penghargaan ADPI Award 2019 oleh ADPI, yaitu sebagai Dana Pensiun PPIP Kinerja Terbaik Kedua Tahun 2018 Kategori Total Aktiva Bersih kurang dari atau sama dengan Rp500 miliar.

DP3 Received ADPI Award

In celebrating the 34th anniversary of Indonesian Pension Fund Association (ADPI) in Discovery Hotel Jakarta, Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) has received the 2019 ADPI Award by ADPI as a Second-Best Performing PPIP Pension Fund of 2018 in the Total Net Assets of less than or equal to Rp500 billion category.



16 OKTOBER
16 OKTOBER

Menteri BUMN Tunjuk Irvandi Gustari Jadi Direktur Keuangan Pelindo III

Irvandi Gustari ditunjuk menjadi Direktur Keuangan Pelindo III yang baru. Irvandi menggantikan Direktur Keuangan Pelindo III melalui Keputusan Menteri BUMN Rini M. Soemarno melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Nomor SK-219/MBU/10/2019 tertanggal 16 Oktober 2019.

Minister of SOE Appointed Irvandi Gustari as the Finance Director of Pelindo III

Irvandi Gustari has been appointed as the new Finance Director of Pelindo III. Irvandi succeeded the Finance Director of Pelindo III through a Resolution of Minister of SOE Rini M. Soemarno through a General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 October 2019.



31 AGUSTUS
31 AUGUST

Pelindo III Jadi Juara Umum Anugerah Humas Indonesia 2019

Pelindo III meraih Platinum Winner atau menjadi juara umum untuk Kategori Best BUMN pada ajang Anugerah Humas Indonesia 2019 (AHI 2019). Pada malam penganugerahan tersebut Pelindo III secara total mendapatkan 2 Gold Winner, 1 Silver Winner, dan 1 apresiasi 'BUMN Terpopuler di Media Online 2019'. Direktur Utama Pelindo III Doso Agung dinobatkan sebagai Best Leader Supporting PR & Communications dan mendapatkan Gold Winner.

Pelindo III Becomes the Grand Champion for the 2019 Anugerah Humas Indonesia

Pelindo III is a Platinum Winner or the grand champion for the Best SOE Category in the 2019 Anugerah Humas Indonesia (AHI 2019). In the awarding night, Pelindo III received 2 Gold Winners, 1 Silver Winner, and 1 appreciation for 'Popular SOE in 2019 Online Media'. The President Director of Pelindo III, Doso Agung, is crowned as a Best Leader Supporting PR & Communications and earned a Gold Winner.



2 SEPTEMBER
2 SEPTEMBER

Kegiatan Peti Kemas Domestik Pelindo III Implementasikan DO Online Per 1 September 2019

DO Online untuk layanan ekspor impor di terminal pelabuhan yang telah diterapkan secara bertahap oleh Pelindo III, kini per 1 September menyusul penerapan DO Online di seluruh terminal Pelindo III untuk pelayanan peti kemas domestik yaitu Terminal Bagendang, Bumiharjo, Lembar, Benoa, Batulicin, Kupang, Maumere, Bima, dan Badas.

Domestic Container Activity in Pelindo III Implements DO Online as of 1 September 2019

DO Online for the export-import service applied gradually in port terminals by Pelindo III, as of 1 September has followed the DO Online application in all Pelindo III terminal for domestic container service in Bagendang, Bumiharjo, Lembar, Benoa, Batulicin, Kupang, Maumere, Bima, and Badas Terminal.



2 SEPTEMBER
2 SEPTEMBER

Pelindo III Peduli Lingkungan Penanaman Pohon Mangrove Tahap II di Pelabuhan Benoa

Pelindo III terus mewujudkan komitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan alam Pelabuhan Benoa, Bali. Salah satu kegiatannya yaitu kembali menanam bibit bakau tahap II sejumlah 50 ribu pohon di wilayah pesisir kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Pelindo III Cares for the Second Phase for Mangrove-Tree Planting Environment in Port of Benoa

Pelindo III continues to deliver on commitments to give a positive impact for the community and natural environment in Port of Benoa, Bali. One of the activities is the second phase of mangrove seeds replanting amounting to 50 thousand trees in the shorelines of Port of Benoa, Denpasar.



31 OKTOBER
31 OCTOBER

Dirut Pelindo III Doso Agung Dianugerahi Most Popular Leader on Social Media

Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung, kembali mengukir prestasi dengan dianugerahi penghargaan Most Popular Leader on Social Media untuk kategori BUMN Non-Tbk. Penghargaan ini diberikan oleh Majalah PR INDONESIA melalui ajang Insan PR Indonesia 2019 yang diselenggarakan dalam rangkaian Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) ke-5 di Bali. Proses penilaian kategori Best Leader in Social Media dilakukan dengan cara melakukan monitoring di media sosial.

President Director of Pelindo III, Doso Agung, Awarded the Most Popular Leader on Social Media

The President Director of Pelindo III, Doso Agung, received another achievement with the Most Popular Leader on Social Media award for the SOE Non-Tbk category. The award is given by PR INDONESIA Magazine through Insan PR Indonesia 2019 held in the 5th PR Indonesia Jamboree (JAMPIRO) in Bali. The Best Leader in Social Media category is conducted by social media monitoring.



5 NOVEMBER
5 NOVEMBER

Kapal Pesiar Sun Princess Sandar di Pelabuhan Gili Mas, Lombok

Dermaga di Pelabuhan Gili Mas sepanjang 440 meter telah rampung dibangun oleh Pelindo III dan siap untuk disandari kapal pesiar Sun Princess dengan LOA 261 meter, lebar 32 meter, bobot mati 77.441 GT, membawa 1.988 penumpang dan 862 kru dimana sebelumnya kapal pesiar tidak bisa sandar ke Pelabuhan Lembar saat mengunjungi Pulau Lombok.

Sun Princess Cruise Ship Docked in Port of Gili Mas, Lombok

A 440 meter-long dock in Port of Gili Mas has been completed by Pelindo III and is ready to be docked by Sun Princess cruise ship with 261 meter LOA, 32-meter width, 77,441 GT dead weight, carrying 1,988 passengers and 862 crews that previously could not dock in Port of Lembar when visiting Lombok Island.



20 NOVEMBER
20 NOVEMBER

Pelindo III Terima Penghargaan SNI Awards 2019

Pelindo III korporat, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelindo III Group, TPS dan TTL raih penghargaan SNI Awards 2019 dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) kategori organisasi menengah dan besar jasa. Malam penganugerahan ajang tersebut dihadiri oleh Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro di Balai Kartini Jakarta.

Pelindo III Received Awards in the 2019 SNI Award

Pelindo III corporate, Port of Tanjung Perak and Pelindo III Group, TPS and TTL received awards in the 2019 SNI Awards from the National Standardization Agency (BSN) in the medium and large service organisations category. The awarding night is attended by the Minister of Technology Research and Head of the National Innovation Research Agency, Bambang Brodjonegoro, in Balai Kartini Jakarta.



21 NOVEMBER
21 NOVEMBER

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Pelindo III Menuju BUMN Informatif

Pelindo III menjadi satu-satunya badan publik menuju informatif di ajang penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung II Istana Wakil Presiden.

The Bestowal of Pelindo III Public Information Disclosure Towards Informative SOE

Pelindo III becomes the only public institution towards informative in the 2019 Award for Public Information Openness held by the Central Information Commission. The awarding is given directly by the Chief of Central Information Commission, Gede Narayana, witnessed by the Vice-President, Ma'ruf Amin, in Building II of the Vice Presidential Palace.



25 NOVEMBER
25 NOVEMBER

Pacu Pariwisata Lombok, Giliran Kapal Pesiar AIDAvita Sandar di Pelabuhan Gili Mas Lombok

Keberadaan Pelabuhan Gili Mas diapresiasi oleh operator-operator kapal pesiar internasional, kini giliran kapal AIDAvita dengan LOA 182 meter, bobot mati 42.289 GT yang bersandar dengan membawa 1.238 orang penumpang untuk berwisata di Pulau Lombok, NTB.

Spurring Lombok Tourism, AIDAvita Cruise Ship Docked in Port of Gili Mas Lombok

Existence of Port of Gili Mas is appreciated by international cruise ship operators, now AIDAvita ship, with LOA 182 meter, deadweight 42,289 GT docked while carrying 1,238 passengers to travel in Lombok Island, NTB.



28 NOVEMBER
28 NOVEMBER

Pelabuhan Benoa Ditata Ulang Menjadi Pintu Masuk Wisatawan Berkelas Dunia

Penataan Pelabuhan Benoa, Bali, terus digeber penyelesaiannya untuk menjadi pelabuhan *cruise* yang akan menjadi kawasan wisata berkelas dunia. Selain itu, pengembangan kawasan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali, terutama di sektor pariwisata. Titik terang tersebut makin nyata segera terlaksana setelah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Direktur Utama Pelindo III Doso Agung, mendatangi kawasan pengembangan Pelabuhan Benoa.

Port of Benoa Rearranged into World-Class Tourist Entrance

The arrangement of Port of Benoa, Bali, is continued to be completed as a cruise port to become a world-class tourism area. Moreover, area development will encourage the economic development of the Bali community, particularly in the tourism sector. The goal is close to being realised after the Minister of SOE (Erick Thohir), Governor of Bali (I Wayan Koster), and President Director of Pelindo III (Doso Agung) visited the Port of Benoa development area.





2-3 DESEMBER
2-3 DECEMBER

Wujudkan Indonesia Maju, Pelindo III Gelar Raker Bersama 5 Kementerian dan 8 Gubernur

Usai berhasil capai produksi sebesar 2-5% dari target di tahun 2019, Pelindo III kembali melakukan rapat kerja (raker) untuk mengevaluasi capaian 2019 serta menyusun target dan rencana kerja baru di tahun 2020. Dalam rapat kerja bertajuk sinergi nasional menuju Indonesia maju, Pelindo III turut menghadirkan perwakilan pemerintah daerah dari 8 provinsi yang menjadi wilayah kerja Pelindo III (Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, NTT, dan DIY) serta pemerintah pusat dari 5 Kementerian (ESDM, Pertanian, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Kemenko Kemaritiman) dan Kejaksaan untuk meningkatkan sinergi kerja dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Pelindo III.

Realising Advanced Indonesia, Pelindo III Held a Work Meeting with Five Ministries and Eight Governors

After achieving 2-5% production from the 2019 targets, Pelindo III held another work meeting to evaluate the 2019 achievement as well as developing new targets and work plans for 2020. The work meeting themed national synergy towards advanced Indonesia, Pelindo III participated in bringing together local government representatives from eight provinces of Pelindo III work areas (East Java, Central Java, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bali, NTB, NTT, and DIY) as well as five Ministries (ESDM, Agriculture, Transportation, Maritime Affairs and Fisheries, Coordinating Ministry of Maritime Affairs) from the central government and the Judiciary to improve work synergy with regional governments in Pelindo III work areas.



4 DESEMBER
4 DECEMBER

Malam Penganugerahan Pelanggan Pelindo III Sinergi Bersama Membangun Negeri

Sebagai wujud apresiasi kepada mitra bisnis yang telah berkontribusi kepada perusahaan, Pelindo III menggelar penganugerahan pelanggan di penghujung tahun 2019. Acara bertajuk Malam Penganugerahan Pelanggan Pelindo III Sinergi Bersama Membangun Negeri diselenggarakan di Hotel Shangri-La Surabaya, mengundang 139 perusahaan dari pelayaran, cargo owner, maupun EMKL. Penghargaan diberikan kepada 49 perusahaan yang terdiri dari perusahaan pelayaran dan pemilik barang mulai meliputi curah kering, curah cair, general cargo, ro-ro/penumpang, cruise, peti kemas domestik, dan peti kemas internasional.

Pelindo III Customer Awarding Night Joint Synergy to Build the Country

As a form of appreciation to business partners with a contribution to the company, Pelindo III held a customer award at the end of 2019. The event titled Pelindo III Customer Awarding Night Joint Synergy to Build the Country is held in Hotel Shangri-La Surabaya, inviting 139 companies from shipping lines, cargo owner, and EMKL. The award is given to 49 companies consisted of shipping line companies and goods owners including dry bulk, liquid bulk, general cargo, ro-ro/passenger, cruise, domestic container, and international container.



TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2019

COMPILATION TEAM FOR THE 2019 ANNUAL REPORT

PENGARAH DIRECTOR	Direktur Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Director</i>
KETUA CHIEF EXECUTIVE	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
SEKRETARIS SECRETARY	ASP Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan <i>VP Investor Relation and Corporate Governance</i>

ANGGOTA | MEMBERS

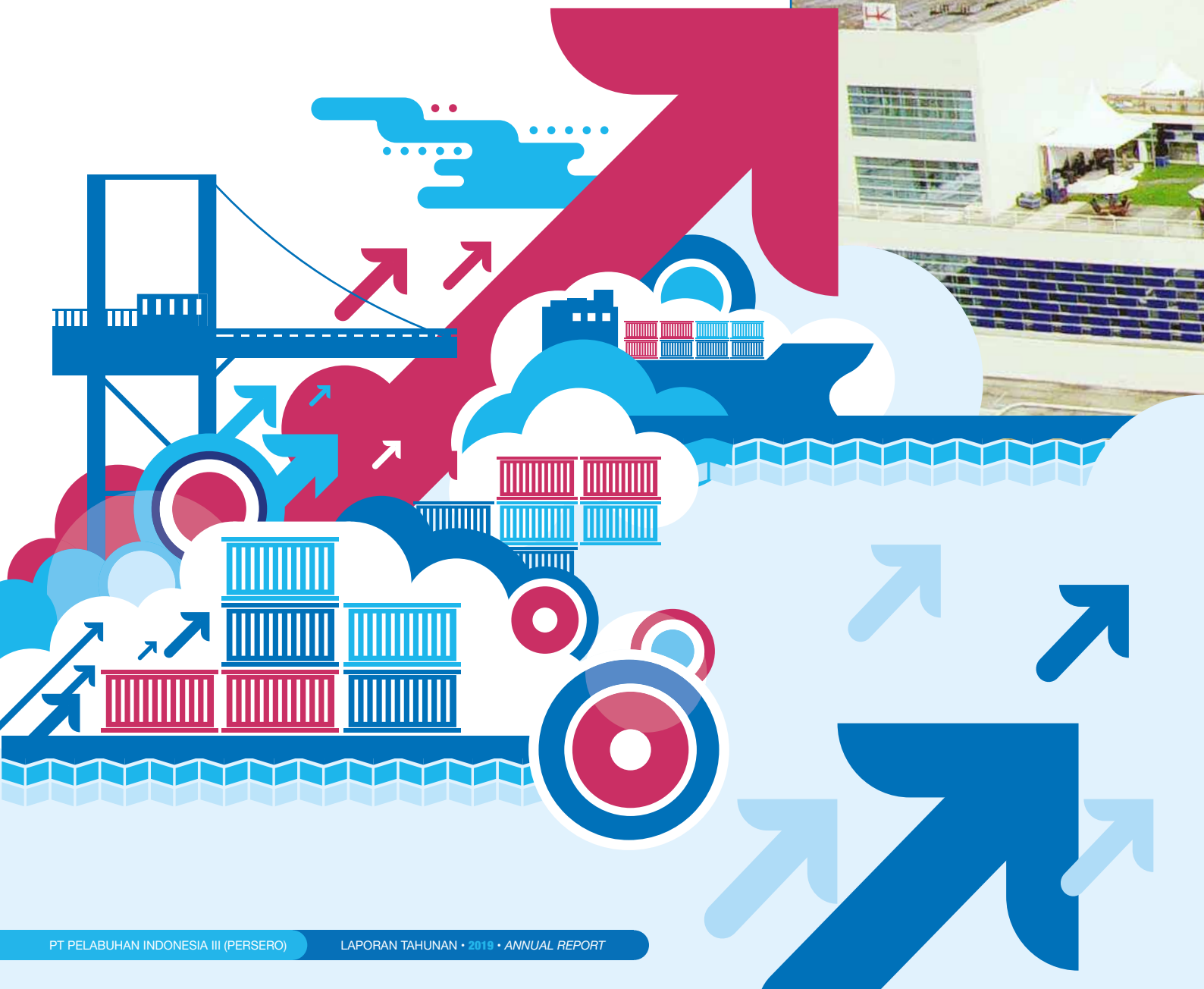
1.	Strategic Planning and Corporate Performance Bureau	
2.	SM Operasi <i>SVP Port Operations</i>	
3.	SM Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko <i>SVP System and Risk Management</i>	
4.	SM Strategis dan Kesisteman SDM <i>SVP Human Capital System and Strategy</i>	
5.	SM Pelayanan SDM dan HSSE <i>SVP Human Capital Services and HSSE</i>	
6.	SM Akuntansi dan Anggaran <i>SVP Accounting and Budget</i>	
7.	SM Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan <i>SVP Finance, Treasury, and Taxation</i>	
8.	SM Pembinaan Anak Perusahaan <i>SVP Subsidiary Management</i>	
9.	SM Pemasaran <i>SVP Marketing</i>	
10.	ASP Hubungan Masyarakat <i>VP Corporate Communication</i>	
11.	ASP Kemitraan dan Bina Lingkungan <i>VP Small Medium-Size Enterprises Partnership and Communication Development</i>	
12.	ASM Pendukung Pemasaran <i>VP Marketing Support</i>	
13.	Nugroho	SPI <i>Internal Audit</i>
14.	Adri Supriyadi	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
15.	Ayuningtyas Dyah Hapsari	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
16.	Fariz Hazmilzam	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
17.	Kharis Fauzi	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
18.	Luqman Firmansyah	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>

ANGGOTA | MEMBERS

19.	Mutia Rizky	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
20.	Mukhammad Saifulloh	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
21.	Rahma Yasinta	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
22.	Enggar Pratiwi	Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Directorate</i>
23.	Irinda Windyanti	Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Directorate</i>
24.	Wahyu Jatmiko	Direktorat Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Directorate</i>
25.	Angga Adi Prabowo	Direktorat Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Directorate</i>
26.	Iftitahur Rokhmah	Direktorat Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Directorate</i>
27.	Handini Wulansari	Direktorat Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Directorate</i>
28.	Adinda Putri Safrini	Direktorat Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Directorate</i>
29.	Listio Margianto	Direktorat Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Directorate</i>
30.	Aprina Kartika Putri	Direktorat Operasi dan Komersial <i>Operation and Commercial Directorate</i>
31.	Intania Destiani Putri	Direktorat Operasi dan Komersial <i>Operation and Commercial Directorate</i>
32.	Laila Nuriyah	Direktorat Operasi dan Komersial <i>Operation and Commercial Directorate</i>
33.	Catur Ade Afrianti	Direktorat Operasi dan Komersial <i>Operation and Commercial Directorate</i>
34.	Cahyo Mursito	Direktorat Operasi dan Komersial <i>Operation and Commercial Directorate</i>
35.	Anak Agung Bagus Dasta Hariwangsa	Direktorat Operasi dan Komersial <i>Operation and Commercial Directorate</i>
36.	Siti Mariyam	Direktorat Teknik <i>Engineering Directorate</i>
37.	Anny Lutfiyah	Direktorat Teknik <i>Engineering Directorate</i>
38.	Afrinur Karya	Direktorat Keuangan <i>Finance Directorate</i>
39.	Dirga Arya F.	Direktorat Keuangan <i>Finance Directorate</i>
40.	Kartika Larasati	Direktorat Keuangan <i>Finance Directorate</i>
41.	Rachmatika Astarini	Direktorat Keuangan <i>Finance Directorate</i>
42.	Rakhmat Affianto	Direktorat Keuangan <i>Finance Directorate</i>
43.	Ranisa Triananda S.	Direktorat Keuangan <i>Finance Directorate</i>
44.	Agung Harmadiyanto Utomo	Direktorat Keuangan <i>Finance Directorate</i>

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT







AHMAD BAMBANG

KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISSIONER

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Kita patut bersyukur sekaligus berbangga pada capaian yang berhasil diraih oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) di tahun 2019. Terlepas dari ketidakpastian ekonomi global yang cukup menantang di 2019, Perusahaan mampu menunjukkan kinerja yang baik dan melewati kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan baik pula. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas disusunnya Laporan Tahunan 2019 ini, yang merupakan bentuk komitmen Pelindo III untuk menyampaikan hasil kinerja dan pencapaian di bidang operasional, keuangan, tata kelola Perusahaan, dan tanggung jawab sosial Perusahaan. Dampak pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia pada khususnya memengaruhi kinerja Pelindo III. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjaga kelangsungan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada masyarakat guna menunjang pembangunan nasional.

IKLIM PEREKONOMIAN TAHUN 2019

Pada tahun 2019, iklim perekonomian berjalan kurang dinamis dan menyebabkan para pelaku usaha dihadapkan dengan situasi ketidakpastian. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Amerika Serikat (AS) memberlakukan 3 putaran tarif untuk barang-barang Tiongkok senilai lebih dari USD 250 miliar sejak tahun 2018. Tarif pajak impor antarnegara yang diberlakukan hingga 25% mencakup berbagai produk yang dikirimkan oleh Tiongkok. Tiongkok membalas dengan memberlakukan tarif pajak impor mulai dari 5% hingga 25% pada USD 110 miliar produk AS termasuk bahan kimia, batu bara, dan peralatan medis.

Akibat kebijakan 2 negara penguasa ekonomi di dunia tersebut, perekonomian di negara berkembang, khususnya Indonesia yang merupakan mitra dagang dari kedua negara tersebut, turut menerima dampak buruknya. Selain itu, adanya inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) yang merupakan suatu strategi pembangunan Tiongkok yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama antara negara-negara Eurasia, sabuk ekonomi jalur sutra berbasis daratan, dan jalur sutra maritim lintas samudra.

Inisiatif OBOR dimulai pada September dan Oktober 2013, dalam 3 tahun terakhir yang berfokusnya pada investasi infrastruktur, material konstruksi, kereta api, serta jalan raya, mobil, *real estate*, jaringan listrik, besi, dan baja. Pada April 2019, Indonesia telah menandatangani 23 kesepakatan kerja sama untuk sejumlah proyek dalam kebijakan luar negeri pemerintah Tiongkok tersebut dengan skema *business to business* (B-to-B). Inisiatif OBOR ini dapat memengaruhi perubahan jalur atau trayek pelayanan komoditi dunia.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

We should be grateful and proud of the achievements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in 2019. Despite the challenging uncertainties in global economics in 2019, the Company is able to show good performance and overcoming the obstacles well. The Board of Commissioners (BOC) gives an appreciation in the creation of this 2019 Annual Report, as it is a form of commitment by Pelindo III to present the results of its performance and achievement in operations, finance, corporate governance, and corporate social responsibility. The impact of world economic growth, particularly in Indonesia, has influenced the performance of Pelindo III. That being said, various measures have been taken by the BOC and Board of Directors (BOD) to maintain the continuity of port services for the society in encouraging national growth.

THE 2019 ECONOMIC CLIMATE

In 2019, the economic climate was less dynamic and caused uncertainty for business actors. This is shown through the fact that the United States of America (USA) has enforced a List 3 tariff for Chinese goods for more than USD 250 billion since 2018. The interstate import tax rate enforced up to 25% includes a variety of products shipped by China. China retaliated by enforcing 5-25% of the import tax rate to USD 110 billion of US goods, including chemical material, coals, and medical equipment.

Due to the policy of the two world economic superpower, the economy in developing countries, particularly Indonesia, which is a trading partner for the two countries, had also gotten the adverse effects. Moreover, there is also the One Belt One Road (OBOR) initiative, a Chinese development strategy focusing on connectivity and cooperation between Eurasian countries, land-based silk road economic belt, and transatlantic maritime silk road.

OBOR initiative was initiated in September and October of 2013 and in the last three years, the focus was on investments in infrastructure, construction material, train, and roads, cars, real estates, electricity network, iron, and steel. In April 2019, Indonesia has signed 23 cooperation agreements on some projects in the foreign policy of the Chinese government with a business-to-business (B-to-B) scheme. The OBOR initiative can influence changes in the shipping lines or routes of world commodities.

Di sisi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,02%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Walaupun menghadapi situasi eksternal tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2019 tetap dapat tumbuh di atas 5% karena terjaganya permintaan domestik, konsumsi pemerintah, serta investasi. Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan program pembangunan juga telah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan, dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah mampu mengendalikan inflasi pada tahun 2019 sehingga hanya mencapai 2,72% pada akhir tahun 2019. Begitu juga dengan kurs dolar, jika dibandingkan dengan tahun 2018 kurs dolar semakin membaik pada tahun 2019 senilai Rp13.901. Dengan demikian, perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara.

Dampak pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia pada khususnya memengaruhi kinerja Pelindo III. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjaga kelangsungan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada masyarakat guna menunjang pembangunan nasional.

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang dihadirkan oleh kondisi makroekonomi, baik global maupun nasional, Pelindo III terus melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkan kesempatan yang ada serta meminimalkan berbagai dampak negatif bagi kinerja perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan melakukan berbagai kerja sama dengan Pemangku Kepentingan untuk meningkatkan arus kunjungan kapal, barang, peti kemas, dan penumpang, serta meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, Pelindo III juga melakukan sinergi dengan Pelindo serta BUMN lainnya, serta melakukan berbagai diversifikasi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Pelindo III juga melakukan ekspansi pasar dengan pengembangan pelabuhan baru diawali dengan adanya kajian-kajian pengembangan pelabuhan baru tersebut agar meminimalkan risiko yang akan berakibat pada keberlangsungan Pelindo III.

STRATEGI DAN KINERJA PERUSAHAAN 2019

Sebagai BUMN yang telah diberi mandat oleh Pemerintah untuk menjadi terminal operator dalam membangun dan mengembangkan pelabuhan di wilayah timur Indonesia, Pelindo III berfokus di wilayah kerja yang diamanatkan dengan senantiasa berinovasi dan bersinergi untuk mengembangkan potensi baru di lingkungan pelabuhan. Hal ini merupakan salah satu langkah Perusahaan untuk mewujudkan Pelindo III sebagai *world-class operator*.

Guna meningkatkan profitabilitas perusahaan, Pelindo III telah melakukan transformasi bisnisnya yaitu dengan

In terms of economic growth, the Indonesian economic growth in 2019 has reached 5.02%. The economic growth realization is slower than that of the 2018 economic growth which reached 5.17%. Even while facing the abovementioned external situation, the Indonesian economy in 2019 grows by more 5% due to the maintained domestic demand, government consumption, and investment. The maintained economic performance and implementation of development programmes have also succeeded in lowering the unemployment rate, reduce inequality, and maintain public welfare.

Moreover, the Government is able to control inflation in 2019 that it only reached 2.72% at the end of 2019. As it is in the dollar exchange rate, when compared to that of 2018, the rate is better in 2019 at Rp13,901. Therefore, the Indonesian economy in 2019 can grow positively amidst the global economic slowdown influenced by the dynamics of trade and geopolitical war, the decline in commodity price, and economic slowdown in many countries.

The impact in the world and the Indonesian economy, in particular, has influenced the performance of Pelindo III. That being said, various measures have been taken by the BOC and BOD to maintain the continuity of port services to the public in encouraging national development.

In facing the various challenges presented by macroeconomic conditions, both globally and nationally, Pelindo III has taken the measures to take advantage of various opportunities and minimise various negative impacts on company performance. This is embodied in various cooperations with the Stakeholders to improve the flow in ship visit, goods, container, and passenger, as well as improving port services by utilising information technology.

Moreover, Pelindo III is also in synergy with the other Pelindo and SOEs while conducting business diversification to increase company revenue. Pelindo III also conducted market expansion by developing new ports, starting by studies of new port development to minimise the risks that can impact the continuity of Pelindo III.

COMPANY STRATEGY AND PERFORMANCE IN 2019

As an SOE with a mandate from the Government to become an operator terminal in constructing and developing ports in eastern areas of Indonesia, Pelindo III is focusing on the mandated work area through innovation and synergy to develop new potentials in the port environment. This is one of the Company's measures to embody the goal of becoming a world-class operator.

To improve profitability, Pelindo III has transformed its business by improving businesses that are related to its

meningkatkan bisnis yang masih berhubungan dengan bisnis utamanya yaitu bisnis jasa kepelabuhanan. Pada tahun 2019, Pelindo III berhasil melaksanakan strategi inovasi bisnis dengan mengembangkan bisnis energi dengan penyediaan *Shore Connection* yang pengelolaan bisnisnya dikelola oleh cucu Perusahaan. Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan layanan operasional, Pelindo III telah melakukan modernisasi alat di beberapa terminal. Manajemen Pelindo III juga telah menyusun kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh karyawan Perusahaan.

Efektivitas pelaksanaan strategi-strategi Perusahaan diukur menggunakan KPI yang ditetapkan oleh RUPS dan disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mendukung pertumbuhannya yang berkelanjutan. Pada tahun 2019, Perusahaan mencapai skor KPI sebesar 101,11% atau telah melampaui target yang telah ditetapkan Pemegang Saham sebesar 100%.

PENILAIAN KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap Direksi, Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan secara konsisten untuk memastikan program-program strategis dan program pendukung lainnya dapat terimplementasi melebihi target yang ditentukan. Bentuk pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan.

Di tahun 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menerapkan langkah strategis serta menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanat RUPS. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Perusahaan, baik dalam kinerja operasional maupun kinerja keuangan. Di sisi kinerja operasional atau trafik, secara keseluruhan relatif mencapai target RKAP 2019 kecuali arus peti kemas yang tidak mencapai target.

Realisasi arus kapal tercapai sebesar 78.267 unit atau sebesar 112% dari anggaran, 304.254.594 GT atau sebesar 110% dari anggaran sedangkan untuk arus barang terealisasi sebesar 75.122.075 ton atau sebesar 103% dari anggaran, 3.215.997 m³ atau sebesar 101% dari anggaran, untuk arus gas terealisasi sebesar 11.592.133 MMBTU atau sebesar 142% dari anggaran, arus kendaraan sebesar 311.571 unit atau sebesar 144% dari anggaran, arus penumpang terealisasi sebesar 3.670.116 penumpang atau sebesar 119% dari anggaran, sedangkan arus hewan terealisasi sebesar 128.561 ekor atau sebesar 105% dari anggaran. Di sisi yang lain arus peti kemas terealisasi sebesar 4.370.693 box dan 5.427.408 TEUs atau sebesar 97% dan 98% dari anggaran.

Dari kinerja keuangan, realisasi laba tahun 2019 mencapai Rp2,129 triliun atau mencapai 102% dari anggaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastiannya kondisi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi yang melambat dibanding periode sebelumnya, dan nilai kurs Dolar AS terhadap Rupiah.

Untuk mengurangi ketergantungan kinerja keuangan dari penurunan jumlah *cargo* sebagai akibat dari ketidakpastian

core business, namely port services. In 2019 Pelindo III has implemented business innovation strategy by developing an energy business of providing Shore Connection in which the management is conducted by a second-tier Subsidiary. Moreover, to optimise operational services, Pelindo III has conducted tools modernisation in some terminal. The management of Pelindo III has also formulated policies to improve employees' welfare.

The effectiveness of Company strategy implementation is measured through KPI set by the GMS and arranged by considering various aspects to encourage continuous growth. In 2019 the Company has achieved a KPI score of 101.11% or has exceeded the target set by the Shareholders at 100%.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

In conducting the duties and supervision on the BOD, the BOC consistently monitor to ensure that the implementation of strategic programmes as well as other supporting programmes can exceed the set target. A form of supervision and advice provided to the BOD is conducted through a BOC-BOD joint meeting conducted at least once a month.

In 2019 the BOC considered that the BOD has implemented strategic measures and carried out its functions properly following the GMS mandate. This can be seen in the achievement of Company performance, both in operational and financial. In terms of operational or traffic performance, the achievement relatively reached the 2019 RKAP targets except for container flow.

Ship flow is realised at 78,267 units or 112% from the target, 304,254,594 GT or 110% from the target; goods flow is realised at 75,122,075 tonnes or 103% from the target, 3,215,997 m³ or 101% from the target; gas flow is realised at 11,592,133 MMBTU or 142% from the target; vehicle flow realised at 311,571 units or 144% from the target; passenger flow is realised at 3,670,116 passengers; while animal flow is realised at 128,561 animals or 105% from the target. On the other hand, container flow is realised at 4,370,693 boxes and 5,427,408 TEUs or 97% and 98% from the targets, respectively.

In terms of financial performance, the profit realisation in 2019 reached Rp2.129 trillion or 102% from the set target. The achievement of financial performance is influenced by the uncertainty in the global economy, the slowdown in economic growth compared to the previous period, and the US Dollar exchange rate against Rupiah.

To lessen the financial performance dependence from the decrease in total cargo as an impact of uncertain economic

kondisi ekonomi, baik dalam skala global maupun nasional, Direksi mengambil langkah untuk mengembangkan bisnis-bisnis lain yang masih ada hubungannya dengan bisnis jasa kepelabuhanan sebagai *core business* Pelindo III, di antaranya bisnis energi dan pengembangan properti dan pariwisata.

Pada tahun 2019, pengembangan Benoa baru melalui sinergi dengan BUMN lain telah direncanakan, yaitu dengan melakukan pengembangan Bali Maritime Tourism Hub yang merupakan kawasan wisata yang terintegrasi satu wilayah dengan wilayah yang lain. Pengembangan Bali Maritime Tourism ini diharapkan akan menjadi titik tonggak pengembangan industri pariwisata secara khusus di Bali dan di Indonesia pada umumnya.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pelindo III memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan. Oleh karenanya, setiap tindakan yang diambil oleh Perusahaan selalu mengacu pada prinsip GCG yang terukur dan akuntabel. Perusahaan juga menerbitkan pedoman etika dan perilaku (*Code of Conduct*) sebagai acuan bagi seluruh insan Pelindo III mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga Pegawai.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan pemberian nasihat kepada Direksi untuk menyempurnakan *Board Manual*, *Code of Corporate Governance*, dan *Code of Conduct*. Selain itu, telah dilakukan pembahasan terkait SOP Pedoman Kerja Sama bersama Direksi untuk memastikan proses kerja sama yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip GCG.

Di sisi lain, Pelindo III berhasil memperoleh predikat "*Trusted Company*" dalam ajang CGPI 2019. Selain itu, dalam pelaksanaan penilaian GCG Pelindo III pada 2019 oleh BPKP, Perusahaan mampu memperoleh skor sebesar 91,107 dengan kategori "Sangat Baik". Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan setiap organ utama Perusahaan telah menjalankan fungsinya secara independen dan profesional untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

Di tahun buku 2019, Dewan Komisaris juga berhasil melaksanakan pengawasan sesuai dengan rencana kerja tanpa hambatan yang berarti. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris juga telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Komite Audit dan Satuan Pengawasan Intern telah bekerja sama dalam mengawasi penerapan pengendalian internal Perusahaan dengan baik.

PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan telah menjalankan program *Whistleblowing System* (WBS) sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.78/HK.03/P.III-2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di Perusahaan

conditions, both globally and nationally, the BOD has taken the measures to develop other businesses related to the port services business as the core business of Pelindo III, namely energy business as well as property and tourism development.

In 2019 the development of new Benoa through synergy with other SOEs have been planned by developing Bali Maritime Tourism Hub, a tourist area integrated with other areas in the same region. The development of Bali Maritime Tourism is expected to become a milestone in the development of the tourism industry in Bali in particular and in Indonesia in general.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelindo III has a strong commitment to realising the Corporate Vision and Mission. Therefore, every Corporate action refers to a measurable and accountable GCG principle. The Company also issued a Code of Conduct as a guideline for all Personnel of Pelindo III, starting from the BOC, BOD, to the employees.

Throughout 2019, the BOC has advised the BOD to improve the Board Manual, Code of Corporate Governance, and Code of Conduct. Moreover, a discussion related to SOP related to Guideline for Collaboration with the BOD is conducted to ensure that the cooperation process is by the prevailing regulation and GCG principles.

On the other hand, Pelindo III has earned the "Trusted Company" predicate in the 2019 CGPI. Moreover, the Company also earned a score of 91.107 and "Excellent" category in the 2019 GCG assessment conducted by BPKP. This has proven that Company management has been done following the GCG principles and every main organ of the Company has conducted their function independently and professionally to improve Company value.

In 2019 the BOC also successfully carried out supervision following the work plan without significant obstacles. Committees under the BOC have also fulfilled their duties according to their responsibilities. The Audit Committee and Internal Audit have been cooperating well in monitoring the implementation of Internal Company control.

IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Company has implemented a Whistleblowing System (WBS) programme by the Regulation of the BOD of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.78/HK.03/P.III-2015 dated 1 October 2015 on the Whistleblowing System. The BOC views that WBS implementation in the Company is effective, supported by continuous socialisation of the

sudah efektif, didukung dengan terus dilakukannya sosialisasi oleh Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP). Pada tahun 2019, tidak terdapat laporan pelanggaran

Integrated Team of Complaint Handling (TTPP). In 2019 there are no violation reports received through WBS.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2019, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu pergantian jabatan Komisaris Utama yang semula dijabat oleh Hari Bowo digantikan oleh saya, Ahmad Bambang, yang disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris menjadi:

Komisaris Utama	: Ahmad Bambang
Komisaris	: Dedi Syarif Usman
Komisaris	: Wahyu Satrio Utomo
Komisaris Independen	: Heddy Lugito
Komisaris Independen	: Zainal Abidin

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

There is a change in the BOC composition, namely a change in the President Commissioner position previously served by Hari Bowo has been succeeded to me, Ahmad Bambang, ratified through the Decree of the Ministry of SOE No. SK-206/MBU/09/2019 dated 13 September 2019. Hence, the current BOC composition is:

President Commissioner	: Ahmad Bambang
Commissioner	: Dedi Syarif Usman
Commissioner	: Wahyu Satrio Utomo
Independent Commissioner	: Heddy Lugito
Independent Commissioner	: Zainal Abidin

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelindo III senantiasa berkomitmen dalam melaksanakan program *community development* diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan pihak masyarakat di sekitar Perusahaan. Di tahun 2019, realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan mencapai sebesar Rp38,08 miliar atau turun 8% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp41,4 miliar, sedangkan rata-rata bantuan yang disalurkan adalah sebesar Rp52,81 juta atau turun 25% dari rata-rata bantuan tahun 2018 sebesar Rp70,28 juta. Bantuan di bidang Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan menjadi bantuan dengan nilai realisasi terbesar yang tersalurkan yaitu sebesar Rp10,92 miliar atau turun 1% dari realisasi triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp10,99 miliar.

Di sisi aspek lingkungan, Pelindo III telah berhasil merealisasikan setiap target/rencana kegiatan CSR di bidang lingkungan yang telah ditetapkan manajemen Perusahaan di tahun 2019. Perusahaan telah merealisasikan penanaman 51.900 bibit bakau di seluruh wilayah kerja Perusahaan serta rehabilitasi terumbu karang di Kabupaten Buleleng.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pelindo III is committed to implementing community development programmes through the Partnership and Community Development Programmes (PKBL) to accommodate the interests of the surrounding communities. In 2019 the realisation of Community Development Programme distribution reached Rp38.08 billion or decreased by 8% compared to that of the 2018 realisation at Rp41.4 billion, while the average aid distributed is Rp52.81 million or decreased by 25% from the average aid in 2018 at Rp70.28 million. Social aid to alleviate poverty becomes the aid with the highest realisation amount distributed at Rp10.91 billion or decreased by 1% from the realisation in the fourth quarter of 2018 at Rp10.99 billion.

In the environmental aspect, Pelindo III has realised every CSR target/activity plan in the environment set by the Company management in 2019. The Company has realised a planting of 51,900 mangrove seeds in all Company areas as well as coral rehabilitation in Kabupaten Buleleng.

PROSPEK BISNIS DAN TARGET 2020

Seiring dengan berjalannya industri 4.0, Dewan Komisaris berharap Pelindo III mampu menyiapkan proses bisnis perusahaan menuju standar pengelolaan dan kompetisi global dalam mencapai industri 4.0. Seiring dengan perkembangan industri jasa kepelabuhanan yang dikelola, Pelindo III memungkinkan dapat melakukan ekspansi wilayah bisnisnya sampai ke luar wilayah Indonesia.

Selain itu, Dewan Komisaris berharap Pelindo III juga memposisikan perusahaan dalam ekosistem pelabuhan

BUSINESS PROSPECTS AND TARGETS IN 2020

Along with the proceeding of the 4.0 Industry, the BOC expects that Pelindo III is able to prepare the company business toward management standards and global competition to reach 4.0 Industry. Along with the development of the managed port services, Pelindo III would be able to expand its business outside of Indonesia.

Moreover, the BOC expects that Pelindo III also position the company in a port and non-port ecosystem to be able

dan nonpelabuhan sehingga Perusahaan dapat melakukan diversifikasi usaha guna menunjang keberlangsungan dari perusahaan. Perusahaan juga perlu meningkatkan sinergi antar BUMN untuk mencari bisnis model baru dan pengembangan bisnis baru dengan memanfaatkan aset Perusahaan.

Harapan Dewan Komisaris kepada Pemerintah dan Pemegang Saham untuk tahun 2020 mendatang adalah meningkatkan laba dan produksi atas pertumbuhan aset yang diinvestasikan sehingga rasio ROA dapat meningkat di atas 5,8%-7% per tahunnya serta meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Selain itu, Dewan Komisaris berharap strategi-strategi yang telah disusun oleh Direksi Pelindo III dalam menghadapi persaingan dan pencapaian target yang akan ditetapkan oleh Pemegang Saham dapat diaplikasikan dengan baik. Strategi dari Pelindo III yaitu; penetrasi dan ekspansi pasar, operasional prima, optimalisasi dan pengembangan bisnis, serta sinergi yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2020-2024. Dengan strategi-strategi tersebut, Pelindo III diharapkan mampu memperluas jaringan bisnisnya, baik domestik maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas Perusahaan dan menjadi *industry leader* di industri jasa kepelabuhanan.

Harapan lainnya, program Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilaksanakan karena program tersebut sesuai dengan arahan Kementerian BUMN.

PENUTUP

Mewakili Dewan Komisaris, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam merealisasikan tujuan dan target di tahun 2019. Apresiasi tertinggi juga kami tujukan kepada Pemegang Saham, Direksi, Manajemen, segenap Karyawan, serta Pemangku Kepentingan lain yang telah memberikan upaya terbaiknya bagi keberlangsungan usaha Pelindo III sepanjang tahun 2019.

Dengan komitmen dan antusiasme yang tinggi, kami meyakini Pelindo III mampu merealisasikan Visi Perusahaan untuk menjadi *smart port operator* kelas dunia.

Atas nama Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),



AHMAD BAMBANG
KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISSIONER

to diversify its business in supporting company continuity. The Company also needs to increase inter-SOE synergy to search for a new business model and new business development by utilising Company assets.

The BOC's expectation to the Government and Shareholders for the upcoming 2020 is to increase profit and production on the invested asset development to increase ROA above 5.8% to 7% per year as well as improving good corporate governance practices.

Furthermore, the BOC expects that the strategies arranged by the BOD in facing competitions and achieving the targets set by the Shareholders may be applied well. Pelindo III strategies are market penetration and expansion, prime operations, business optimisation and development, and synergy contained in the Company Long-Term Plan (RJPP) for 2020-2024. With the strategies, Pelindo III is expected to widen its business network, both in domestic and international level, to increase Company profitability and become the industry leader in the port services industry.

Another expectation is in the Competitive Acceleration programme through Innovation and Human Capital Quality Improvement since the programme is following the directive from the Ministry of SOE.

CLOSING

Representing the BOC, I convey my gratitude to all parties contributing to the objective and target realisation in 2019. The highest appreciation is also directed to the Shareholders, BOD, Management, Employees, as well as other Stakeholders who have given their best efforts for the business continuity of Pelindo III throughout 2019.

With high commitment and enthusiasm, we believe Pelindo III will be able to realise Company Vision to become a world-class smart port operator.

*On behalf of the Board of Commissioners of
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),*





DOSO AGUNG

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

LAPORAN DIREKSI

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena berkat rahmat-Nya, di tahun 2019 Pelindo III telah berhasil mencapai kinerja yang membanggakan. Sebagai Direktur Utama Pelindo III, perkenankanlah saya untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan periode tahun buku 2019.

Disusunnya Laporan Tahunan ini merupakan bentuk komitmen Pelindo III untuk menyampaikan hasil kinerja dan pencapaian Perusahaan di bidang operasional, keuangan, tata kelola Perusahaan, dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

IKLIM PEREKONOMIAN TAHUN 2019

Iklim perekonomian global di tahun 2019 terbilang cukup menantang karena mengakibatkan melemahnya kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu pemicu dari melemahnya kondisi perekonomian Indonesia adalah karena adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Hal tersebut menyebabkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,02%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 yang mencapai 5,17%.

Selain berdampak pada realisasi pertumbuhan ekonomi, situasi tersebut juga berdampak pada nilai inflasi pada tahun 2019. Walaupun berada di tengah kondisi perekonomian yang menantang, Pemerintah mampu mengendalikan nilai inflasi tahun 2019 sehingga hanya mencapai 2,72% pada akhir tahun 2019. Begitu juga dengan kurs Dolar AS yang jika dibandingkan dengan tahun 2018 semakin membaik pada tahun 2019, yaitu senilai Rp13.901.

Di sisi industri kepelabuhanan, Pelindo III terus berupaya menekan biaya logistik agar daya saing produk nasional meningkat. Salah satu cara yaitu dengan melakukan pemasangan *Shore Connection* atau jaringan listrik darat yang dipasang di dermaga dan dipergunakan untuk kapal yang bersandar di pelabuhan di semua wilayah pelabuhan di bawah pengelolaan Pelindo III.

Efektivitas *Shore Connection* tersebut tampak dengan data Pelindo III yang menunjukkan kunjungan kapal pada triwulan tiga tahun 2019 dalam satuan *Gross Tonnage* (GT) mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat arus kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar 15% yang terealisasi sebesar 224.134.856 GT dibanding periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar 195.520.410 GT. Sementara itu, berdasarkan satuan unit, arus kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar

Esteemed Shareholder and Stakeholder,

We offer our gratitude to God Almighty for His blessings that Pelindo III has achieved a remarkable performance in 2019. As the President Director of Pelindo III, allow me to deliver the Annual Report of the Company for the 2019 fiscal year.

The preparation of this Annual Report shows the commitment of Pelindo III to delivering its performance results and achievement in operations, finance, corporate governance, and corporate social responsibility.

THE 2019 ECONOMIC CLIMATE

The 2019 economic climate can be considered to be quite challenging for how it weakened Indonesia's economic condition. One of the triggering factors of the decline was the trade war between the USA and China, impacting Indonesia's economic growth at 5.02% in 2019. The 2019 economic growth was slower than the 2018 growth at 5.17%.

Besides having an impact on economic growth, the condition affected inflation in 2019. Despite the challenging economic condition, the Government was able to control the 2019 inflation to reach only 2.72% at the end of 2019. Similarly, the exchange rate with the US Dollar in 2019 was at Rp13,901, an improvement from that in 2018.

In the port industry, Pelindo III strives to suppress logistics to increase the competitiveness of national products, among other means by installing the Shore Connection or land electricity network at wharves for ships docking at all ports within the port areas managed by Pelindo III.

The effectiveness of the Shore Connection is displayed in Pelindo III's data, with a significant rise in ship visit in Gross Tonnage (GT) in the third quarter of 2019. It is recorded that the ship visit increased by 15%, or 224,134,856 GT compared to 195,520,410 GT in the same period in 2018. Meanwhile, in units, the flow of ship visits increased by 21% in 2019, recorded at 57,151 units compared to 47,178 units in 2018.

21% tercatat di tahun 2019 sebesar 57.151 unit dibanding dengan periode yang sama tahun 2018 tercatat sebesar 47.178 unit.

Di antara 7 (tujuh) provinsi yang menjadi wilayah operasional Pelindo III, ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah operasional lainnya, yaitu mencapai 6,26% pada triwulan III. Dari sisi produksi, sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi NTB adalah sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 29,41%.

Sebaliknya, ekonomi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan terendah dibanding wilayah operasional lainnya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan III-2019 diukur dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp47,55 triliun atau sebesar 4,01%. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 menghadapi tantangan dari tertahannya kinerja ekspor dan pertambangan batu bara terkait perlambatan permintaan dari Tiongkok, yang salah satunya disebabkan oleh masih tingginya cadangan stok negara tersebut.

STRATEGI DAN KINERJA PERUSAHAAN

Guna meraih keunggulan di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan iklim kompetisi di industri jasa kepelabuhanan, Pelindo III telah menetapkan beberapa program kerja. Hal ini mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan untuk menjadi *Emerging Industry Leader* dengan melakukan transformasi menjadi "*Full Handling Terminal System and Logistic Integration Integrated Industrial Port Estate*". Upaya-upaya inovasi dan integrasi dalam pelaksanaan program-program kerja di tahun 2019 bukan hanya sebagai dasar pelaksanaan Visi dan Misi Perusahaan, namun juga upaya untuk meningkatkan kontribusi Pelindo III kepada Negara.

Untuk merealisasikan sasaran strategis tersebut, Pelindo III mengembangkan suatu *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) oleh Pelindo III sebagai acuan utama pengembangan TI di Pelindo III agar TI dapat secara proaktif dan responsif mendukung efektivitas dan efisiensi operasional Pelindo III, sekaligus menjaganya sesuai tata kelola TIK yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013 terkait MPTI pada BUMN.

MPTI menghasilkan 42 inisiatif, baik Inisiatif TIK maupun Inisiatif Unit Bisnis yang terangkum dalam 15 program kerja dan harus ditindaklanjuti serta dilaksanakan dengan target dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2018 dilakukan penyelarasan MPTI periode 2018-2019. Program kerja tersebut terbagi dalam 3 tahapan yaitu: *Systemise and Centralise, Analyse and Promote Business Intelligence*, dan *Continuously Improve*.

Sejalan dengan semakin berkembangnya industri 4.0, penerapan digitalisasi di Pelindo III juga semakin berkembang hampir di masing-masing fungsi, mulai dari SDM sampai dengan pelaksanaan program kerja manajemen dan kinerja manajemen. Pelindo III terus berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan

Among seven provinces of Pelindo III operational areas of, the economy of West Nusa Tenggara experienced the most growth compared to that of other operational areas, which was at 6.26% in the third quarter. In production, the construction sector made a great contribution of 29.41% of the economic growth of West Nusa Tenggara.

On the other hand, the economy of South Kalimantan experienced the least growth compared to that of other operational areas. Based on a release by Statistics Indonesia (BPS) of South Kalimantan, the economy of South Kalimantan in the third quarter or 2019 measured by Gross Regional Domestic Product (GRDP) was Rp47.55 trillion or 4.01%. South Kalimantan economic growth in 2019 faced a challenge of suppressed export and coal-mining performance due to the demand slowdown from China, one reason being its high stock reserves.

CORPORATE STRATEGY AND PERFORMANCE

To achieve excellence in a challenging economy and the competitive climate in the port service industry, Pelindo III has established several work programmes to support the achievement of its strategic targets to be the Emerging Industry Leader by transforming into a "Full Handling Terminal System and Logistic Integration Integrated Industrial Port Estate". The innovation and integration in the 2019 work programmes are implemented not only to achieve the Company's Vision and Mission but also to increase Pelindo III's contribution to Indonesia.

To achieve the strategic targets, Pelindo III has developed an Information Technology Master Plan (MPTI) by Pelindo III as the main guideline of IT development in Pelindo III so that IT can proactively and responsively support the operational effectiveness and efficiency in Pelindo III and maintain its alignment with good ICT governance according to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/2013 on MPTI in SOEs.

The MPTI resulted in 42 initiatives, both ICT and Business Unit Initiatives summarised in 15 work programmes imperative to be followed-up and implemented within a target of 3 years. In 2018, the 2018-2019 MPTI alignment has been conducted. The work programme was divided into three stages, namely Systemise and Centralise, Analyse and Promote Business Intelligence, and Continuously Improve.

Along with the developing 4.0 industry, digitalisation in Pelindo is also growing in each function, from HC to the implementation of management work programmes and performance. Pelindo III continuously strives to advance to improve its excellent service for Stakeholders through its annual innovation awards with the participation of all

pelayanan prima bagi Pemangku Kepentingan dengan adanya *innovation awards* yang dilakukan secara periodik setiap setahun sekali yang diikuti oleh seluruh karyawan Pelindo III dengan masing-masing mengambil tema baik mengenai perbaikan atau inovasi dari segi proses bisnis maupun sistem informasi.

Selain itu, guna menghadapi situasi persaingan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi ini, Direksi Pelindo III telah menyusun strategi-strategi yang tertuang dalam rencana kerja manajemen sebanyak 21 program kerja dengan capaian sebesar 95,88%. Rincian rencana kerja manajemen yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- I. Pemasaran dan Penjualan
 1. Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan
 2. Peningkatan Pangsa Pasar
 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pelabuhan
 4. Rencana Kerja Sama Usaha Baru
- II. Produksi dan Kualitas Produk
 5. Peningkatan Pelayanan terhadap Pelanggan
 6. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan
- III. Teknik dan Teknologi
 7. Pengelolaan *Big Data*
 8. Pengembangan Sistem Pelayanan
- IV. Keuangan dan Akuntansi
 9. Penerapan *Gate Automation*
 10. Peningkatan Nilai Perusahaan
- V. Sistem dan Organisasi
 11. Implementasi *Change Management*
 12. Peningkatan Sistem Manajemen
- VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 13. Implementasi *Knowledge Management*
 14. Peningkatan Kompetensi SDM
 15. Penelitian dan Pengembangan
 16. Program pengembangan CSR
 17. Pelestarian Lingkungan
 18. Penerapan *Green Port*
- VII. Investasi
 19. Investasi *Level of Revenue*
 20. Investasi *Level of Service*
 21. Investasi *Level of Minimum Requirement*

Selain strategi-strategi tersebut, ada beberapa strategi yang diutamakan yaitu 1) penetrasi dan ekspansi pasar; 2) operasional prima; 3) optimalisasi dan pengembangan bisnis; dan 4) sinergi yang tertuang dalam RJPP periode 2020-2024. Masing-masing dari strategi utama tersebut memiliki program strategis guna mencapai Visi menjadi *smart port operator* berskala dunia dengan tujuan untuk menjadi *industry leader* di bisnis jasa kepelabuhanan.

CAPAIAN KINERJA OPERASIONAL

Di sisi kinerja operasional, Perusahaan mencatat realisasi arus kapal yang mencapai 78.267 unit atau sebesar 112% dari anggaran, 304.254.594 GT atau sebesar 110% dari anggaran sedangkan untuk arus barang terealisasi sebesar 75.122.075 ton atau sebesar 103% dari anggaran, 3.215.997 m³ atau sebesar 101% dari anggaran, untuk arus gas terealisasi sebesar 11.592.133 MBBTU atau sebesar 142% dari anggaran, arus kendaraan sebesar 311.571

Pelindo III employees adhering to a theme of improvement or innovation both in business and in the information system.

Furthermore, to face the competition amid the economic uncertainties, the Board of Directors (BOD) of Pelindo has developed strategies stated in the management work plan comprising 21 work programmes with a 95.88% achievement. The management work plans implemented in 2019 are as follows:

- I. *Marketing and Sales*
 1. *Port Services Tariff Adjustment*
 2. *Market Share Increase*
 3. *Optimisation of Port Asset Utilisation*
 4. *New Business Cooperation Plans*
- II. *Production and Product Quality*
 5. *Customer Service Improvement*
 6. *Optimisation of Port Facility Utilisation*
- III. *Engineering and Technology*
 7. *Big Data Management*
 8. *Service System Improvement*
- IV. *Finance and Accounting*
 9. *Gate Automation*
 10. *Corporate Value Improvement*
- V. *System and Organisation*
 11. *Change Management Implementation*
 12. *Management System Improvement*
- VI. *Human Capital Development*
 13. *Knowledge Management Implementation*
 14. *HC Competency Improvement*
 15. *Research and Development*
 16. *CSR Development Programmes*
 17. *Environmental Preservation*
 18. *Green Port Implementation*
- VII. *Investment*
 19. *Level of Revenue Investment*
 20. *Level of Service Investment*
 21. *Level of Minimum Requirement Investment*

Aside from the above-mentioned strategies, several priority strategies include 1) penetration and market expansion; 2) excellent operations; 3) business optimisation and development, and 4) synergy as stated in the 2020-2024 RJPP. Each of the main strategies includes strategic programmes to achieve the Vision to be a global smart port operator with an objective of becoming an industry leader in the port service business.

OPERATIONAL PERFORMANCE ACHIEVEMENT

In operations, the Company recorded ship flows of 78,267 units or 112% of the budget, 304,254,594 GT or 110% of the budget. Meanwhile, the goods flows are 75,122,075 tonnes or 103% of the target, 3,215,997 m³ or 101% of the target. The gas flows are 11,592,133 MBBTU or 142% of the target, the vehicles flow are 311,571 units or 144% of the target, the passenger flows are 3,670,116 passengers or 119% of the target, and the animal flows are 128,561

unit atau sebesar 144% dari anggaran, arus penumpang terealisasi sebesar 3.670.116 penumpang atau sebesar 119% dari anggaran, sedangkan arus hewan terealisasi sebesar 128.561 ekor atau sebesar 105% dari anggaran. Di sisi lain, arus peti kemas terealisasi sebesar 4.370.693 box dan 5.427.408 TEUs atau sebesar 97% dan 98% dari anggaran.

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Di sisi kinerja keuangan, realisasi laba tahun 2019 mencapai Rp2,129 triliun atau mencapai 102% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, hasil tersebut meningkat sebesar 54% yang mana realisasinya tercatat sebesar Rp1,38 triliun.

Di sisi lain, pendapatan usaha bersih tercapai sebesar Rp9,8 triliun atau sebesar 87% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian tersebut turun sebesar 4% yang mana realisasinya tercatat sebesar Rp10,17 triliun.

Sementara itu, realisasi beban usaha tercatat sebesar Rp7 triliun atau sebesar 95% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian tersebut naik sebesar 2% yang mana realisasinya tercatat sebesar Rp7 triliun. Realisasi saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2019 mencapai Rp3,6 triliun atau sebesar 110% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian tersebut turun sebesar 21% yang mana realisasinya tercatat sebesar Rp4,6 triliun.

KENDALA YANG DIHADAPI

Sebagai entitas bisnis, Pelindo III tidak terlepas dari kendala-kendala yang biasanya dihadapi oleh setiap perusahaan. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- Belum terealisasinya penetapan izin Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Kalabahi, Lembar, Celukan Bawang, Waingapu, Ende, dan Ippi oleh Kementerian Perhubungan;
- Permasalahan hukum terkait dengan tanah HPL di lingkungan Pelindo III, baik dengan pihak instansi pemerintah, BUMN, TNI, Swasta, maupun perorangan;
- Pengelolaan Lahan Reklamasi di Pelabuhan Maumere yang dibangun dengan dana APBN, yang mana sesuai draf RIP akan dijadikan area peti kemas belum diserahkan pengelolaannya;
- Kedalaman alur di Tanjung Emas yang masih -10 Mwls sedangkan kolam sudah sedalam -12 Mwls; dan
- Pengurusan izin operasi, konsesi, dan ISPS Code di Terminal Gilimas.

PELUANG

Peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan Pelindo III baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, yaitu:

- Adanya pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada lokasi *hinterland* di wilayah operasional Pelindo III;
- Arah kebijakan nasional yang masih Pro Maritim;
- Adanya potensi segmen pasar *cargo* baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

animals or 105% of the target. On the other side, container flows are 4,370,693 boxes and 5,427,408 TEUs or 97% or 98% of the target.

FINANCIAL PERFORMANCE ACHIEVEMENT

In finance, the profit realisation in 2019 reached Rp2.129 trillion or reached 102% from the set target. Compared to the prior year, the result has increased by 54% with a realisation of Rp1.38 trillion.

On the other hand, the net operating revenues reached Rp9.8 trillion or 87% from the set target. Compared to the prior year, the realisation has decreased by 4% with a realisation of Rp10.17 trillion.

Meanwhile, the operating expenses are recorded at Rp7 trillion or 95% from the set target. Compared to the prior year, the realisation increased by 2% with a realisation of Rp7 trillion. The realisation of cash and cash equivalent as of 31 December 2019 reached Rp3.6 trillion or 110% from the set target. Compared to the prior year, the realisation decreased by 21% with a realisation of Rp4.6 trillion.

OBSTACLES

As a business entity, Pelindo III is inseparable from challenges normally faced by every company. The challenges are:

- *The unestablished permits for Main Port Plans (RIP) of Port of Kalabahi, Lembar, Celukan Bawang, Waingapu, Ende, and Ippi by the Ministry of Transportation;*
- *The legal issues related to HPL land in the area of Pelindo III, be it with government agencies, SOE, the Indonesian National Armed Forces (TNI), private institutions, or individuals;*
- *Reclamation Land Management at the Port of Maumere built with the State Budget (APBN), which according to RIP draft will become container area, has not been transferred;*
- *Channel depth in Tanjung Emas is still -10 Mwls while the pond is already -12 Mwls deep; and*
- *Permit processing for operations, concessions, and ISPS Code at Gilimas Terminal.*

OPPORTUNITIES

The opportunities that Pelindo III can take advantage of in the present and the future are:

- *The Industrial Estate (KI) and Special Economic Zone (KEK) on hinterland locations within Pelindo III's operational areas;*
- *The pro-maritime outlook on national policies thus far;*
- *The new potential in the cargo segment, both domestic and international;*

- Peningkatan distribusi mineral dan batu bara sejalan dengan peningkatan konsumsi energi nasional;
- Potensi kerja sama usaha pemanfaatan fasilitas dan peralatan dengan mitra strategis;
- Potensi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jasa layanan kepelabuhanan;
- Potensi pengembangan bisnis baru Pelindo III; dan
- Tersedianya lembaga penyedia SDM dengan kompetensi khusus di bidang kepelabuhanan.

TANTANGAN

Suatu entitas bisnis tidak akan luput dari tantangan-tantangan yang muncul seiring dengan berkembangnya suatu perusahaan, begitu juga Pelindo III. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pelindo III antara lain:

- Adanya pesaing dengan pelabuhan/terminal umum baru di sekitar wilayah operasional Pelindo III;
- Adanya regulasi tentang TUKS yang mengancam bisnis usaha pelabuhan umum;
- Kompetisi dengan TUKS dan Pelabuhan Umum di sekitar wilayah operasional Pelindo III yang berdampak pada penurunan pangsa pasar, khususnya untuk muatan Nonpeti Kemas;
- Kondisi ekonomi dan politik global yang sulit diprediksi;
- Peralihan moda transportasi untuk penumpang dan barang yang dapat mengurangi arus penumpang dan barang melalui pelabuhan; dan
- Potensi pengembangan TUKS oleh beberapa perusahaan dengan skala produksi besar pada beberapa lokasi *hinterland* wilayah operasional Pelindo III.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Sebagai entitas bisnis, Pelindo III tidak terlepas dari risiko-risiko usaha. Profil risiko yang dihadapi Perusahaan di 2019 antara lain adalah insiden kegiatan operasional dan kecelakaan kerja tingkat *fatality*; penolakan terhadap penyesuaian tarif yang diusulkan Perusahaan; defisit arus kas Perusahaan; sengketa lahan/asset; persaingan bisnis dengan kompetitor; gangguan fungsi teknologi informasi dan komunikasi; bencana alam yang memengaruhi keandalan fasilitas; peningkatan keluhan yang memengaruhi reputasi Perusahaan; keterlambatan penyelesaian proyek investasi; pelanggaran ketentuan/prosedur operasional.

Perusahaan melalui Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko telah melakukan upaya untuk menurunkan tingkat kemungkinan-kejadian dan/atau konsekuensi dari risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan implementasi *Daily Safety Activity*; melaporkan segala hal terkait usaha menaikkan tarif; peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan koordinasi; melaksanakan kegiatan gabungan antarbagian; meningkatkan kegiatan pemasaran melalui perbaikan struktur organisasi pemasaran; menertibkan jadwal *backup* dan pembuatan jadwal pengujian *restore*; pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat; pelaksanaan survei kepuasan pelanggan; peningkatan koordinasi antarbagian; pembaruan prosedur dari perubahan proses bisnis melalui konsultan pendamping independen, dan sebagainya.

- *The increase in mineral and coal distribution along with the increase in national energy consumption;*
- *The potential of business cooperations in facility and equipment utilisation with strategic partners;*
- *The potential of technology utilisation to improve effectiveness and efficiency of port services;*
- *The potential of Pelindo III's new business development; and*
- *The availability of HC provider institutions with special competency in the port sector.*

CHALLENGES

A business entity cannot evade rising challenges accompanying its growth, and neither does Pelindo III. The challenges faced by Pelindo III are:

- *Competition with new public ports/terminal around Pelindo III's operational areas;*
- *The regulation on TUKS that threatens the public port business;*
- *Competition with other TUKS and Public Ports around Pelindo III's operational areas, resulting in decreasing market share, especially for Non-Container goods;*
- *The hardly predictable condition of the global economy and politics;*
- *The change in transportation modes for passengers and goods that can decrease passenger and goods flows through ports; and*
- *The potential of several companies developing TUKS with large production scale on several hinterland locations of Pelindo III's operational areas.*

RISKS FACED BY THE COMPANY

As a business entity, Pelindo III is inseparable from business risks. The Company's risk profile in 2019 comprises operational activity incidents and work accidents in the level of *fatality*; the refusal to the tariff proposed by the Company; the cash flows deficit, asset disputes, business competition with competitors; information and communication technology function disturbances; natural disaster affecting facility reliability; increasing complaints affecting the Company's reputation; lateness in investment project completion; and violations on operational procedures/provisions.

Through the Management System and Risk Management Unit, the Company acts to decrease the level of possibility-incident and/or consequences of the risks. These actions include the improving Daily Safety Activity; reporting every tariff-increasing issue; improving awareness through dissemination and coordinations; carrying out inter-division joint activities; improving marketing by improving the marketing organisation structure; fixing backup schedule and the restore testing schedule; training for emergencies; conducting the customer satisfaction survey; increasing inter-division coordination; renewing procedures of the business process change through independent consultants, and so forth.

PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada aspek tata kelola Perusahaan, implementasi prinsip-prinsip GCG di Pelindo III pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Perusahaan berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan GCG serta wajib diketahui dan dijalankan oleh seluruh Insan Pelindo III mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Pegawai. Hal ini dilakukan guna memenuhi tuntutan Pemangku Kepentingan dalam mencapai target Perusahaan.

Dalam 5 tahun terakhir, skor penilaian GCG Perusahaan terus menunjukkan peningkatan, yang menandai keinginan kuat Perusahaan dalam penerapan GCG. Berdasarkan hasil penilaian GCG di tahun 2019 oleh BPKP, penerapan GCG menurun. Secara keseluruhan, skor GCG yang berhasil diraih Perusahaan di 2019 adalah sebesar 91,107 dari angka maksimum sebesar 100, turun 1,48% dari tahun lalu yang tercatat 92,587. Selain itu, dari sisi tingkat kesehatan perusahaan, berdasarkan penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 maka tingkat kesehatan Perusahaan pada tahun 2019 berada pada posisi Sehat kategori AA dengan skor 91,00.

Di sisi lain, Pelindo III juga berhasil memperoleh penghargaan-penghargaan signifikan selama tahun 2019, seperti predikat Trusted Company dalam ajang CGPI 2019, penghargaan Gold Winner pada kategori Best Leader Supporting PR and Communications subkategori BUMN, serta meraih predikat Excellent kategori Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara 2018 pada Infobank BUMN Awards 2019.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Di tahun 2019, terdapat perubahan komposisi Direksi Perusahaan, yaitu pergantian jabatan Direktur Keuangan yang semula dijabat oleh Iman Rachman digantikan oleh Irvandi Gustari, yang disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-219/MBU/10/2019 16 Oktober 2019. Dengan demikian, komposisi Direksi menjadi:

Direktur Utama	: Doso Agung
Direktur Operasi dan Komersial	: Putut Sri Muljanto
Direktur Teknik	: Joko Noerhudha
Direktur Sumber Daya Manusia	: Toto Heliyanto
Direktur Keuangan	: Irvandi Gustari
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	: Toto Nugroho

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelindo III berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan pihak masyarakat di sekitar Perusahaan. Program yang dijalankan di antaranya berbentuk bantuan permodalan bagi pengusaha kecil dengan pinjaman berbunga rendah,

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

In Corporate governance, the implementation of GCG principles in Pelindo III in 2019 has been carried out well. The Company is committed and consistent in implementing GCG, obligatory to be comprehended and carried out by all Pelindo III Personnel from the BOC, the BOD, the Management, and Employees to fulfil Stakeholders demand in achieving the Corporate targets.

In the last five years, the Company's GCG assessment score has continuously improved, indicating the Company's strong determination to implement GCG. Based on the assessment result by BPKP, the GCG implementation in 2019 has decreased. Overall, the GCG score achieved by the Company in 2019 is 91.107 of a maximum score of 100, a 1.48% decrease from 92.587 in the previous year. Moreover, based on the assessment according to the Decree of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002 on 4 June 2002, the Corporate soundness level in 2019 is Sound under the AA category with a score of 91.00.

Meanwhile, Pelindo III has also achieved noteworthy awards throughout 2019, such as the Trusted Company predicate in CGPI 2019, the Gold Winner award under the category of Best Leader Supporting PR and Communications, SOE sub-category, as well as the Excellent predicate under the category of Financial Performance of State-Owned Enterprises in 2018 on Infobank BUMN Awards 2019.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2019, there was a change in the Company's BOD composition, specifically the positional changes of the Finance Director initially held by Iman Rachman and succeeded by Irvandi Gustari through the Decree of Ministry of SOE No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 October 2019. Therefore, the BOD composition is as follows:

President Director	: Doso Agung
Commercial and Operational Director	: Putut Sri Muljanto
Engineering Director	: Joko Noerhudha
Human Capital Director	: Toto Heliyanto
Finance Director	: Irvandi Gustari
Business Transformation and Development Director	: Toto Nugroho

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pelindo III is committed to carrying out its social responsibilities through the Partnership and Community Development Programme (PKBL) to accommodate the interests of communities around the Company. The programmes include capital assistance for small businesses with a low-interest rate, training programmes

pembinaan seperti pelatihan dan mengikutsertakan Mitra Binaan pada pameran berskala nasional maupun internasional yang bertujuan untuk memajukan usaha Mitra Binaan, sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh publik maupun penyempurnaan infrastruktur yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Hingga 31 Desember 2019, Pelindo III telah menyalurkan pinjaman kepada 6.849 UMKM senilai Rp285,33 miliar sementara realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan mencapai sebesar Rp38,08 miliar atau turun 8% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp41,4 miliar, sedangkan rata-rata bantuan yang disalurkan adalah sebesar Rp52,81 juta atau turun 25% dari rata-rata bantuan tahun 2018 sebesar Rp70,28 juta.

Program PKBL Pelindo III telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa capaian signifikan program PKBL misalnya Kampoeng Lawas Maspati kini menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Surabaya. Gaung Kampoeng Lawas Maspati sebagai kampung yang memiliki sejarah dan kearifan lokal yang terjaga dengan baik telah sampai ke luar negeri, terbukti dengan jumlah kunjungan turis mancanegara yang mencapai 75 kunjungan dengan total 500 orang turis.

PROSPEK DAN TARGET 2019

Direksi menilai prospek bisnis kepelabuhanan di masa mendatang akan cukup menjanjikan. Hal ini didukung dari beberapa faktor seperti membaiknya beberapa fundamental makroekonomi nasional dan atensi Pemerintah dalam mendorong kemajuan sistem konektivitas laut nasional. Manajemen Pelindo III telah merumuskan prospek bisnis di tahun 2019. Prospek industri pelabuhan nasional dan global, di antaranya:

- 1. Perubahan Geopolitik dan Kebangkitan Ekonomi Asia**
Pertumbuhan eksponensial dalam neraca perdagangan intra-Asia dan antar Negara Asia, serta perluasan kepentingan lintas benua, seperti Tiongkok dengan visi *One Belt One Road* (OBOR) akan mengubah peta geopolitik dan perdagangan dunia.
- 2. Strategi Komersial (Merger dan Aliansi)**
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri yang terkait dengan maritim (pelabuhan dan pelayaran) telah terjadi fenomena dimana perusahaan-perusahaan besar melakukan merger dan aliansi. Konsekuensi dari fenomena ini diperkirakan akan meningkatkan kompetisi di sektor pelabuhan maupun sektor pelayaran. Hampir seluruh segmen rantai pasok global berupaya merasionalisasi kegiatan operasinya melalui merger atau aliansi strategis, dimana konsekuensinya pasar akan didominasi oleh sejumlah perusahaan (yang telah bergabung) karena memiliki *bargaining position* yang lebih kuat.
- 3. Digitalisasi dan Otomatisasi**
Perkembangan teknologi yang semakin cepat selain dapat menciptakan pasar baru juga berpotensi mengganggu/merusak pasar yang sudah ada yang akhirnya menggantikan teknologi terdahulu (*disruptive technologies*). Bukan tidak mungkin di sektor

and Development Partner participation in national and international exhibitions to advance their businesses, as well as the provision of facilities and infrastructures available for public and the improvement of infrastructures that can be used by the public. As of 31 December 2019, Pelindo III has distributed Rp285.33 billion of loans to 6,849 micro, small, and medium-sized businesses, while the Community Development Programme has utilised Rp38.08 billion or an 8% decrease from Rp41.4 billion in 2018. Meanwhile, the aid average is Rp52.81 million or a 25% decrease from Rp70.28 million of aid average in 2018.

Pelindo III's PKBL has impacted the community positively. The significant achievements of PKBL include Kampoeng Lawas Maspati, which has become a main tourist destination of Surabaya. The reputation of Kampoeng Lawas Maspati as a historical settlement with well-maintained local culture has made its way internationally, proven by the number of international tourist visits reaching 75 visits with a total of 500 tourists.

2019 PROSPECT AND TARGET

The BOD considers the prospect of port business in the future to be promising, as supported by several factors such as the improvement of some national macroeconomic foundations and the Government's attention in encouraging the system of national sea connectivity. Pelindo III's management has formulated the 2019 business prospect. The prospects of the national and global port industry are:

- 1. Geopolitical Changes and the Economic Rise of Asia**
Exponential growth in the trade scale intra-Asia and between Asian countries, as well as the expansion of inter-continental interests, such as China with its One Belt One Road (OBOR) vision will change the geopolitical and global trade map.
- 2. Commercial Strategy (Merger and Alliance)**
In the last several years, the maritime-related industrial sectors (port and shipping) has experienced a phenomenon in which large companies merge and build alliances. The consequences of this phenomenon are predicted to heighten the competition in both port and shipping sectors. Most of the global supply chain segments strive to rationalise through mergers or strategic alliance, which will result in market domination by several merged or allied companies due to their stronger bargaining position.
- 3. Digitalisation and Automation**
A more rapid technological development will not only create new markets but also potentially disrupt/damage the existing ones, finally replacing the older technologies (disruptive technologies). The rise of this occurrence in the port sector is not an impossibility.

kepelabuhanan juga akan mengalami hal serupa. Diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, digitalisasi dan otomatisasi yang didukung dengan kecerdasan buatan dan *big data* akan menjadi kunci kesuksesan sebuah pelabuhan dalam memenangkan kompetisi.

4. Dekarbonisasi

Beberapa kebijakan global terkait dengan lingkungan telah dikeluarkan dan diratifikasi beberapa negara, termasuk Indonesia. Beberapa kebijakan lingkungan seperti pembatasan emisi berbahaya telah dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO) dan mulai diberlakukan Januari 2020.

5. Pengembangan Profesional Pelabuhan

Pendidikan dan pengembangan profesional di sektor kepelabuhanan di masa depan akan menentukan kesuksesan transformasi industri kepelabuhanan. Kualitas pengembangan keterampilan bertujuan untuk mengubah demografi usia dan gender, dimana saat ini menunjukkan bahwa 89-91% posisi strategis industri kepelabuhanan didominasi oleh laki-laki.

Sementara itu, dalam persiapan menyambut persaingan usaha di tahun-tahun mendatang, beberapa strategi korporat yang dilaksanakan oleh Pelindo III antara lain:

1. Optimalisasi dan Pengembangan Bisnis

Optimalisasi dan pengembangan bisnis merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalisasi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Optimalisasi bisnis dimaksudkan untuk mencapai hasil terbaik dari bisnis *existing* Perusahaan, baik bisnis *core* maupun *non-core*. Sementara itu, pengembangan bisnis diimplementasikan untuk mengintegrasikan bisnis Perusahaan dari hulu ke hilir. Optimalisasi bisnis yang telah ada dan pengembangan bisnis yang terintegrasi dilaksanakan dengan mengedepankan implementasi *Port Industry 4.0*.

2. Operasional Prima

Operasional prima adalah strategi Perusahaan dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) secara konsisten pada inisiatif organisasi di berbagai bidang yang menekankan upaya transformasi pada aspek *people-process-technology*.

3. Sinergi

Sinergi merupakan strategi Perusahaan dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pangsa pasar melalui kerja sama dan hubungan serta koordinasi yang baik antar regional, mitra bisnis, dan Pemerintah.

4. Penetrasi dan Ekspansi Pasar

Penetrasi dan ekspansi pasar merupakan strategi Perusahaan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar baik pada sektor bisnis yang telah dimiliki oleh Perusahaan maupun sektor bisnis baru yang dinilai menguntungkan dengan orientasi tidak saja pada wilayah kerja Pelindo III, melainkan di luar wilayah Pelindo III bahkan hingga luar negeri.

In the several upcoming years, digitalisation and automation supported with artificial intelligence and big data are estimated to be the key to the success of ports in winning the competition.

4. Decarbonisation

Several global environmental policies have been issued and ratified by several countries, including Indonesia. Several environmental policies such as the limitation of hazardous emissions have been issued by the International Maritime Organisation (IMO) to be in effect in January 2020.

5. Professional Development of Ports

In the future, professional education and development in the port industry will determine the success of its transformation. The skill development quality aims to change age and gender demographics, which currently shows that 89-91% strategic positions in the port industry are dominated by males.

Meanwhile, to welcome the business competition in the upcoming year, Pelindo III has applied several corporate strategies, namely:

1. Business Optimisation and Development

Business optimisation and development are the Company's strategy to improve its operational effectiveness and efficiency in its business. Business optimisation aims to achieve the best result out of the Company's existing business, core and non-core. Meanwhile, business development is carried out to integrate the Company's business from upstream to downstream. The existing business optimisation and integrated business development prioritise the implementation of Port Industry 4.0.

2. Excellent Operations

Excellent operations are the Company's strategy to consistently carry out continuous improvement in several aspects of organisational initiatives that emphasise transformation on people-process-technology.

3. Synergy

Synergy is the Company's strategy to improve customer satisfaction, which in time will increase market share through good cooperations, relations, and coordinations among regions, with partners, and with the Government.

4. Market Penetration and Expansion

Market penetration and expansion is the Company's strategy to increase market share both in existing business sectors and new sectors considered to be beneficial, directed to not only within Pelindo III's work area but also outside, and even abroad.

PENUTUP

Sebagai penutup laporan ini, saya mewakili anggota Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam merealisasikan tujuan dan target Perusahaan di tahun 2019. Apresiasi tertinggi juga kami tujukan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, jajaran Manajer, segenap Pegawai/Staf, serta seluruh Pemangku Kepentingan yang telah memberikan upaya terbaiknya bagi keberlangsungan usaha Pelindo III sepanjang tahun 2019.

Direksi mengharapkan dukungan Pemegang Saham dan Pemerintah ke depannya dalam menghadapi setiap perubahan dalam industri migas. Bentuk dukungan tersebut di antaranya: dukungan Pemerintah dalam hal percepatan proses perizinan yang dibutuhkan guna pengembangan dan pembangunan pelabuhan, yang saat ini masih membutuhkan waktu relatif lama; dukungan Pemerintah dalam hal konsesi pelabuhan, kerja sama pemanfaatan, dan antisipasi persaingan dengan TUKS; serta dukungan Pemegang Saham dalam hal persetujuan rencana usaha dan pengembangan bisnis perusahaan beserta rencana sumber pendanaan.

Dengan komitmen dan antusias yang tinggi, kami meyakini Pelindo III akan mampu merealisasikan visinya untuk menjadi *smart port operator* berskala dunia.

Atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),



DOSO AGUNG
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

CLOSING

As a final remark, on behalf of the BOD, I express my gratitude to all parties who have contributed to the Company's objective and target achievements in 2019. We also give the best appreciation to Shareholders, the BOC, Managers, all Employees/Staff, and all Stakeholders who have contributed their best for the business continuity of Pelindo III throughout 2019.

In the future, the BOD counts on the support of Shareholders and the Government in facing every change in the oil and gas industry, including the Government's support for the acceleration of permit processing required for port construction and development which is still relatively lengthy; the Government's support for port concession, utilization cooperations, and anticipating TUKS competition; as well as Shareholders support for the agreement of business plans and development including the plans on funding resources.

With great commitment and enthusiasm, we believe Pelindo III will realise its vision to be a global smart port operator.

*On behalf of the Board of Directors of
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

STATEMENT OF RESPONSIBILITY

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2020

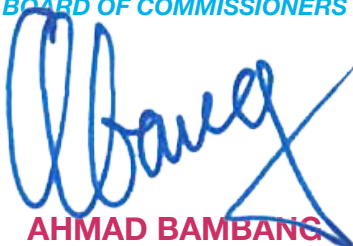
STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS FOR THE 2019 ANNUAL REPORTING OF PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

We the undersigned hereby declare that all the information contained within the 2019 annual report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) has been presented completely and we are thus fully responsible for the truthfulness of the contents of this annual report.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 1 April 2020

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



AHMAD BAMBANG

Komisaris Utama
President Commissioner



WAHJU SATRIO UTOMO

Komisaris
Commissioner



DEDI SYARIF USMAN

Komisaris
Commissioner



HEDDY LUGITO

Komisaris Independen
Independent Commissioner



ZAINAL ABIDIN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 April 2020

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2019 ANNUAL REPORTING OF PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

We the undersigned hereby declare that all the information contained within the 2019 annual report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) has been presented completely and we are thus fully responsible for the truthfulness of the contents of this annual report.

This statement has been made truthfully.

Surabaya, 1 April 2020

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



DOSO AGUNG
Direktur Utama
President Director



PUTUT SRI MULJANTO
Direktur Operasi dan Komersial
Operations and Commercial Director



JOKO NOERHUDHA
Direktur Teknik
Engineering Director



TOTO HELIYANTO
Direktur Sumber Daya Manusia
Human Capital Director



IRVANDI GUSTARI
Direktur Keuangan
Finance Director



TOTO NUGROHO
Direktur Transformasi dan
Pengembangan Bisnis
Business Transformation
and Development Director

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE





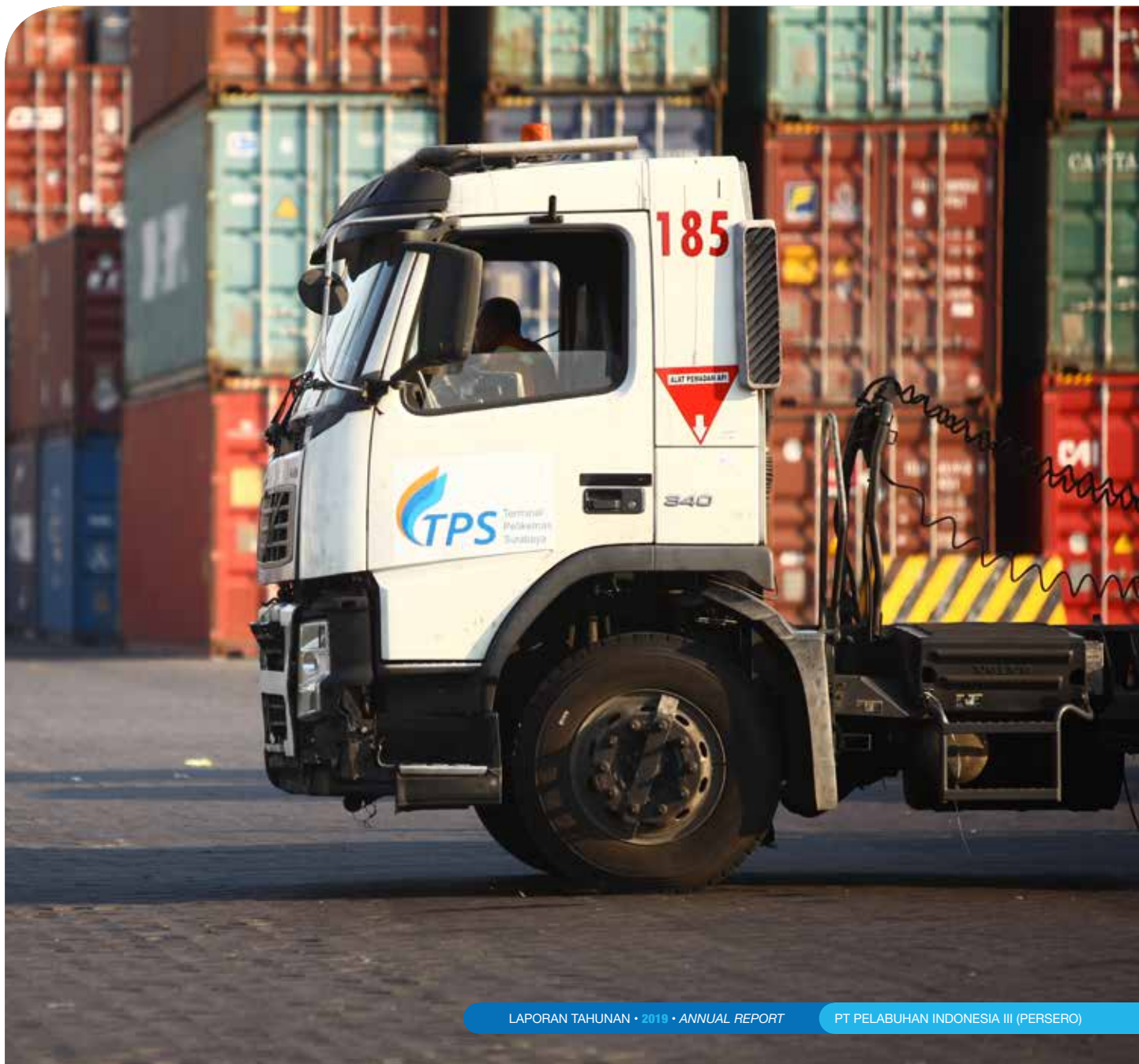
INFORMASI PERUSAHAAN

COMPANY INFORMATION

Nama Lengkap Perusahaan <i>Full Company Name</i>	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Penyebutan Lain <i>Other Names</i>	Pelindo III
Bidang Usaha <i>Business Lines</i>	Penyedia Jasa Kepelabuhanan <i>Port Services Provider</i>
Status Perusahaan <i>Company Status</i>	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <i>State-Owned Enterprise (SOE)</i>
Alamat Kantor Pusat <i>Head Office Address</i>	Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya 60165, Indonesia
Telepon <i>Telephone</i>	+62 31 329 8631-37 – Kantor Pusat <i>Head Office</i> +62 21 2234 6068-69 – Kantor Perwakilan <i>Representative Office</i>
Faksimile <i>Facsimile</i>	+62 31 329 5207 – Kantor Pusat <i>Kantor Pusat</i>
Situs Web <i>Website</i>	www.pelindo.co.id
Surel <i>E-Mail</i>	humas@pelindo.co.id ; info@pelindo.co.id
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	1 Desember 1992 <i>1 December 1992</i>
Tanggal Beroperasi <i>Initial Operating Date</i>	1 Desember 1992 <i>1 December 1992</i>
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 <i>Government Regulation No. 58 of 1991 dated 19 October 1991</i>
Akta Pendirian <i>Deed of Establishment</i>	Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 5 tanggal 1 Desember 1992 tentang Perubahan Perum menjadi Perseroan <i>Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H. No. 5 dated 1 December 1992 on the Amendment of Public Company into Limited Liability Company</i>
Modal Dasar <i>Authorised Capital</i>	Rp3.200.000.000.000
Modal Disetor <i>Paid-Up Capital</i>	Rp1.018.953.000.000
NPWP <i>Tax Identification Number</i>	01.061.000.4-093.000
TDP <i>Registration Number</i>	503/12131.0/436.6.11/2013
SIUP <i>Business License</i>	KP 88 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 <i>KP 88 of 2011 dated 14 February 2011</i>
Jumlah Kantor Pelayanan <i>Number of Service Office</i>	1 Kantor Pusat, 4 Regional, dan 43 Pelabuhan <i>1 Head Office, 4 Regional, and 43 Ports</i>
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	4.573 orang <i>personnel</i> (2019) 4.856 orang <i>personnel</i> (2018) 4.467 orang <i>personnel</i> (2017) 4.114 orang <i>personnel</i> (2016) 4.383 orang <i>personnel</i> (2015)
Pemegang Saham <i>Shareholder</i>	Republik Indonesia (100%) <i>Republic of Indonesia (100%)</i>

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN CHANGES TO THE COMPANY NAME

PERESMIAN OFFICIAL ANNOUNCEMENT	PERUBAHAN NAMA CHANGE OF NAME
1969	Badan Pengusahaan Pelabuhan <i>Port Concession Agency</i>
1983	Perum Pelabuhan <i>Public Port Company</i>
2011	Badan Usaha Pelabuhan <i>Port Business Entity</i>



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

HISTORY OF ESTABLISHMENT



Pelindo III merupakan perusahaan yang berperan dalam mengelola dan membawahi 43 pelabuhan umum di 7 wilayah provinsi Indonesia. Didirikan pada 1 Desember 1992, Perusahaan terus melakukan pengembangan dan memberikan layanan terintegrasi di segmen penyediaan jasa kepelabuhanan. Hingga saat ini, Perusahaan juga berperan sebagai Perusahaan Induk (*holding company*) dari anak usaha yang ada.

Setelah cukup lama berkiprah sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor perhubungan, Perusahaan senantiasa bekerja keras dalam memenuhi segala tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk mengelola 43 pelabuhan umum yang terbagi dalam 4 regional. Tujuh wilayah provinsi tersebut adalah di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai Perusahaan Induk, Perusahaan membawahi 6 Anak Usaha, 4 Perusahaan Afiliasi, dan 13 Cucu Usaha yang bergerak dalam beragam sektor terkait jasa kepelabuhanan seperti logistik, layanan kesehatan, bongkar muat peti kemas, pengelola terminal curah cair dan gas, sarana bantu pemanduan, operator terminal, penyedia tenaga kerja, jasa pemeliharaan, pengelolaan alur pelayaran, kawasan industri, bongkar muat, dan lain sebagainya.

Pelindo III is a company that manages 43 public ports in seven provinces in Indonesia. Established on 1 December 1992, the Company continues to develop and provide integrated services in the segment of port services provision. To the present day, the Company is also a Parent Company (holding company) for several subsidiaries.

In its long service as an SOE engaging in the transportation sector, the Company strives to fulfil all of its duties, authority, and responsibilities in managing 43 public ports within four regions. The seven provinces of the regions are Central Java, East Java, Bali, South Kalimantan, Central Kalimantan, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara. As a Parent Company, the Company manages six Subsidiaries, four Affiliate Companies, and thirteen Second-Tier Subsidiaries engaging in various sectors related to port services such as logistics, health service, container loading and unloading, liquid and gas bulk terminal management, pilotage assistance service, terminal operator, manpower provider, maintenance service, management of shipping channel, industrial area, loading and unloading activities, etc.



Sebagai penyedia jasa kepelabuhanan terkemuka di Indonesia, Perusahaan memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Perusahaan mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan, dan lingkungan maritim. Saat ini, status Perusahaan bukan lagi sebagai regulator melainkan operator pelabuhan yang secara otomatis mengubah bisnis Perusahaan dari *Port Operator* menjadi *Terminal Operator*. Surat dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diterbitkan bulan Februari 2011 menjelaskan tentang penunjukan Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), semakin menegaskan peran Perusahaan sebagai *Terminal Operator*.

As a prominent port service provider in Indonesia, the Company has a key role in ensuring the sustainability and continuity of sea freight. Through the availability of adequate sea transportation infrastructure, the Company may mobilise and stimulate economic activities in the country.

According to Law No. 17 of 2008 on Shipping, the Company is responsible for shipping safety, port operation, water transportation, and maritime environment. The Company's current status is no longer as a regulator but an operator of ports; hence, its business automatically transformed from Port Operator to Terminal Operator. A decree from the Ministry of Transportation, Directorate General of Sea Transportation issued in February 2011 stated the appointment of Pelindo III as a Port Enterprise (BUP), further affirming its role as a Terminal Operator.

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

COMPANY MILESTONES

1960

Pelindo III pada awal berdirinya merupakan sebuah Perusahaan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1960.

Pelindo III was established as Perusahaan Negara (State Enterprise) according to Government Regulation No. 19 of 1960.

1969

Pada kurun waktu 1969-1983, bentuk Perusahaan Negara diubah menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969.

In 1969-1983, the status of State Enterprise was changed into Port Concession Agency (Badan Pengusahaan Pelabuhan-BPP) according to the Government Regulation No. 1 of 1969.

1983

Terjadi perubahan nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1985. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan.

The Company changed its name into Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan (Public Port Company) according to the Government Regulation No. 16 of 1983 and the Government Regulation No. 6 of 1985. This was intended to differentiate the management of Public Ports that were operated by Perum and operated by other Government's institutions..

1992

Perubahan status dari Perum menjadi Perseroan seiring pesatnya perkembangan dunia usaha. Perubahan ini ditetapkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 5 tanggal 1 Desember 1992.

The Company changed its status from Perum into Perseroan (Company) in line with business development. The change was stipulated in the Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H. No. 5 dated 1 December 1992.

2011

Perubahan Anggaran Dasar Desember 2011 tentang Keputusan Menteri BUMN No. 236 tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri BUMN selaku Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan, Perseroan Terbatas, serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Pejabat Eselon BUMN.

The Company amended its Articles of Association in December 2011, regarding the Decree of Minister of SOE No. 236 of 2011 on the Delegation of a Portion of Authority and/or Granting of Authority of the Minister of SOE as the Shareholder to Companies, Limited Liability Companies, and Investors of Public Enterprise to the BOD, BOC, Supervisory Board, and Echelon Officers of SOE.

2017

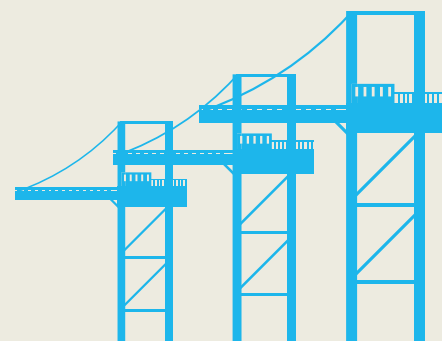
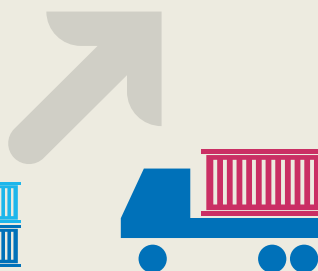
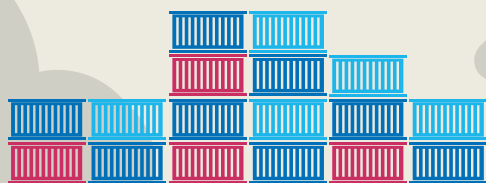
1. Di tahun 2017, Perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp2,03 triliun atau 123% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,65 triliun.
2. Investasi pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp2,45 triliun atau 52% dari RKAP 2017 sebesar Rp4,68 triliun. Realisasi investasi tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Perusahaan sebagai *Emerging Industry Leader* dengan melakukan transformasi menjadi *Full Handling Terminal System and Logistic Integration-Integrated Industrial Port Estate*.

1. In 2017, the Company managed to record a profit of Rp2.03 trillion, 123% of the set target Rp1.65 trillion.
2. Investment in 2017 amounted to Rp2.45 trillion, 52% of the set target at Rp4.68 trillion. This investment realisation was part of the efforts to become an *Emerging Industry Leader* through transformation into a *Full Handling Terminal System and Logistic Integration – Integrated Industrial Port Estate*.

2018

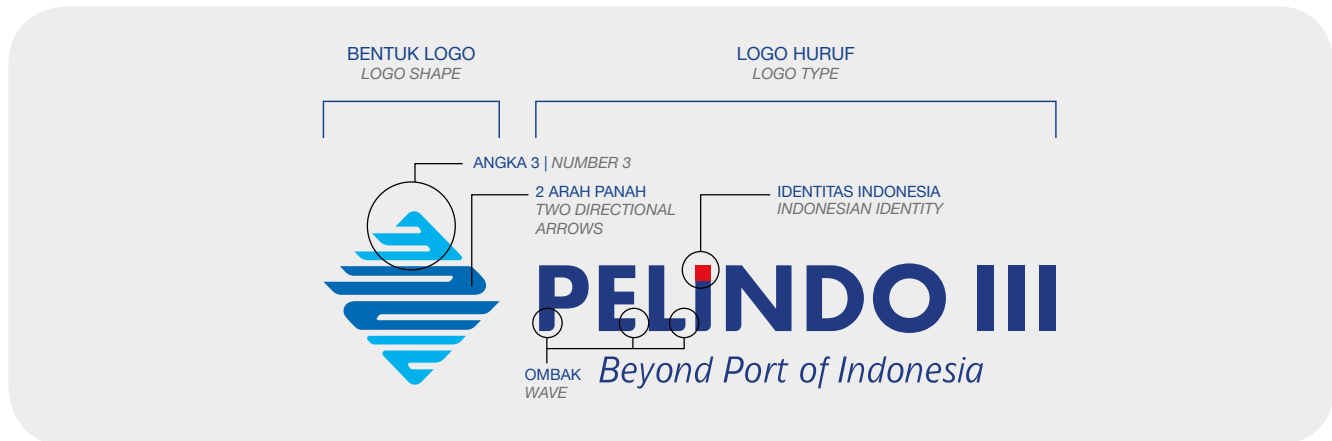
Tahun 2018 menjadi penanda perubahan yang berkesinambungan bagi Pelindo III. Dengan adanya revolusi industri 4.0, Pelindo III menghadirkan aplikasi *Home Terminal Services* (HTS) yang berbasis *mobile app* guna memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi kepelabuhanan. Di sisi lain, ekspansi bisnis juga dilakukan Pelindo III, khususnya pada bisnis energi, properti dan pariwisata, serta logistik. Tujuan dari ekspansi bisnis ini adalah untuk memberikan pelayanan terintegrasi bagi pelanggan dengan menyediakan *integrated beyond port services*.

The year of 2018 becomes a marker of sustainable change for Pelindo III. Along with the 4.0 industrial revolution, Pelindo III presents the mobile app-based Home Terminal Services (HTS) app to facilitate the customers in port transactions. On the other hand, business expansion is also carried out by Pelindo III, particularly in the energy, property and tourism, as well as logistics businesses. The purpose of this business expansion is to provide integrated services for customers by providing integrated beyond port services.



MAKNA LOGO PERUSAHAAN

CORPORATE LOGO MEANING



BENTUK LOGO

1. Pengkinian dan perbaikan terhadap bentuk logo sebelumnya dengan tidak menghilangkan bentuk (*shape*) dasarnya, yaitu dua arah panah bersayap yang merepresentasikan Pelindo III yang selalu bergerak dinamis dan fleksibel, sehingga adaptif terhadap segala perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga membangun hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya.
2. Bentuk angka 3 yang tersamar dalam desain logo dan melambangkan Pelindo III.

LOGO HURUF

Dipilih tipe fon yang lebih tegas melambangkan Perusahaan yang menjunjung integritas, dinamis, dan selalu menjadi yang terdepan. Dilakukan modifikasi dalam bentuk setengah lengkungan pada bagian kaki tipe fon tersebut. Modifikasi ini dimaksudkan untuk membuat perbedaan dan menjadikannya unik, dimana lengkungan tersebut juga melambangkan gelombang lautan.

WARNA

Komposisi warna yang digunakan merupakan kombinasi Bright Cerulean, Ocean Blue, dan Dark Cerulean yang menggambarkan laut dan langit biru; dimana laut merupakan tempat dilakukannya kegiatan bisnis utama dari Pelindo III.

Terdapat elemen warna merah dalam logo huruf Pelindo III, yang menunjukkan Perusahaan yang berasal dari Indonesia, dan sebagai pemisah dari singkatan Pelabuhan Indonesia.

LOGO SHAPE

1. Updating and refining the previous logo shape by retaining its basic shape, namely the two-winged directional arrows, which represents Pelindo III as a company that always moves dynamically and flexibly, adaptive to any changes that will occur in the future while building a close relationship with the surrounding environment.
2. The hidden shape of number 3 in logo design symbolises Pelindo III.

LOGOTYPE

A more assertive font type is chosen to represent the Company that continuously upholds integrity, dynamic, and always be at the forefront. A modification is made in the form of half-arch on the legs of the font type to differentiate and to make it more unique. The half-arch also symbolises the ocean waves.

COLOUR

The colour components used in the logo is a combination of Bright Cerulean, Ocean Blue, and Dark Cerulean colours which depict the sea and blue sky; in which the sea is the location where the main business activity of Pelindo III is conducted.

A red colour element in the logotype of Pelindo III shows the Company's identity as a business enterprise originating from Indonesia and serves as a separator for the abbreviation of Pelabuhan Indonesia.

BIDANG USAHA

BUSINESS LINES

BIDANG USAHA UTAMA

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta meningkatkan nilai Perusahaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/menjejar keuntungan guna menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, *multipurpose* (*general cargo*) barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, *general cargo*, dan kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, *multipurpose*, penumpang, pelayanan rakyat, dan Ro-Ro;
- Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan lahan untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri, dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multimoda;
- Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum; dan
- Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi muatan.

MAIN BUSINESS LINES

In accordance with Article 3 Paragraph 2 of the Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to conduct business in the field of port service operations and management, as well as to increase the values of the Company by optimising the utilisation of its resources in order to produce high-quality goods and/or services with strong competitiveness to gain profit and to support the implementation of Limited Liability Company's principles.

To achieve the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry out the following main business activities:

- *Provision and/or services of water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring;*
- *Provision and/or services related to shipping pilotage and tugging;*
- *Provision and/or services of the wharf and other facilities for the needs of tethering, loading and unloading of container, liquid and dry bulk, multipurpose goods (general cargo) – including animals, and facilities for the flow of passengers;*
- *Provision of services related to loading and unloading of container, liquid and dry bulk, general cargo, and vehicles;*
- *Provision and/or services of the container terminal, liquid and dry bulk, multipurpose, passengers, public sea transport, and Ro-Ro;*
- *Provision and/or services of warehouse and place for hoarding transportation for goods, loading and unloading equipment as well as port equipment;*
- *Provision and/or services of land for various buildings and grounds, industrial, and buildings associated with streamlined sea freight;*
- *Provision and/or services electricity and freshwater facilities; and*
- *Provision and/or services of goods consolidation and distribution.*

BIDANG USAHA PENUNJANG

Selain kegiatan usaha utama sesuai yang dimaksud pada Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, Pelindo III dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Bidang usaha penunjang Perusahaan antara lain:

1. Pelayanan Air
2. Pelayanan Listrik
3. Pengusahaan Peralatan
4. Pelayanan Konsolidasi Muatan
5. Pengusahaan Properti
6. Kawasan Industri
7. Pengusahaan *Docking* Kapal
8. Pengusahaan *Forwarding*
9. Pas Pelabuhan
10. Pelayanan Kesehatan

BIDANG USAHA KEPELABUHANAN

Bidang usaha Pelayanan Kapal meliputi:

- a. Pelayanan labuh, yaitu pelayanan penyediaan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- b. Pelayanan Pemanduan, yaitu kegiatan pelayanan membantu Nahkoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar;
- c. Pelayanan Penundaan, yaitu kegiatan pelayanan menarik, mendorong, atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk tambat ke/untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya yang menggunakan kapal tunda; dan
- d. Pelayanan Penambatan, yaitu kegiatan pelayanan kapal melakukan ikat tali di tambatan/dermaga untuk melakukan bongkar muat barang atau kegiatan lainnya.

Bidang usaha Pelayanan barang, yang meliputi:

- a. Pelayanan Bongkar Muat, yaitu pelayanan pembongkaran/pemuatan muatan dari atau ke kapal;
- b. Pelayanan Gudang Penumpukan, yaitu pelayanan penimbunan sementara muatan setelah dibongkar atau dimuat dari atau ke kapal pada ruangan tertutup; dan
- c. Pelayanan Lapangan Penumpukan, yaitu pelayanan penumpukan sementara muatan setelah dibongkar atau akan dimuat dari/ke kapal pada lapangan penumpukan terbuka.

SUPPORTING BUSINESS LINES

Aside from the main business activities as stipulated in Article 3 Paragraph 2 of the Company's Articles of Association, the Company may carry out other business activities that support the achievement of Company's objectives and the optimisation of the use of Company's resources. Supporting business lines of the Company are:

1. *Water services*
2. *Electrical services*
3. *Equipment operations*
4. *Cargo consolidation services*
5. *Property operations*
6. *Industrial areas*
7. *Ship docking operations*
8. *Forwarding business*
9. *Port pass*
10. *Health services*

PORT BUSINESS

Port service of Pelindo III includes:

- a. *Anchoring service, i.e. provision of water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring;*
- b. *Pilotage service, i.e. provision of activities to assist ship captains to navigate safely, orderly, and smoothly;*
- c. *Tugboat service, i.e. provision of tugging, pushing or holding moving ships to tether or to depart from the wharf, jetty, trestle, pier, buoy, dolphin, ship, and other mooring facilities using tugboat; and*
- d. *Tethering service, i.e. provision of activities to tie vessels to dock/wharf to perform loading or unloading, or other activities.*

Cargo service includes:

- a. *Loading and Unloading Service, i.e. provision of cargo loading and unloading services to or from vessels;*
- b. *Warehousing Service, i.e. provision of temporary cargo stacking service after being loaded or unloaded to or from vessels in a closed space; and*
- c. *Stacking Field Service, i.e. provision of temporary cargo stacking service after being loaded or unloaded to or from vessels on an open field.*

PRODUK DAN LAYANAN

Merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha Perusahaan adalah menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu meliputi pengusahaan:

- Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal;
- Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang maupun hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang;
- Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Lahan untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;
- Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air bersih dan instalasi limbah pembuangan;
- Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang maupun hewan;
- Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- Jasa pelayanan kesehatan;
- Jasa transportasi laut;
- Jasa penyewaan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhanan;
- Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- Properti di lingkungan pelabuhan;
- Kawasan industri di lingkungan pelabuhan;
- Kawasan wisata di lingkungan pelabuhan;
- Depo peti kemas;
- Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan;
- Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhanan; dan
- Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan.

PRODUCTS AND SERVICES

Referring to the Articles of Association, the Company engages in providing and operating port service to support the flow of sea transportation to encourage national development, covering:

- *Water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring;*
- *Services related to pilotage and tugging;*
- *Wharf and other facilities for the tethering, loading, and unloading of goods as well as animals, and facilities for the flow of passengers;*
- *Warehouses and hoarding spot for cargo, loading and unloading equipment as well as port equipment;*
- *Land for various buildings and grounds, industrial and buildings associated with the streamlining of sea freight;*
- *Supply of electricity, fuel, fresh water, and waste installation;*
- *Terminal services, bulk terminal activities, and distribution of goods including animals;*
- *Education and training services related to port business;*
- *Health care services;*
- *Sea transportation services;*
- *Rental for port equipment and facilities;*
- *Repair services for port facilities and equipment;*
- *Property services surrounding the port area;*
- *An Industrial estate in the port area;*
- *Tourism area in the port area;*
- *Container depot;*
- *Port consulting services;*
- *Port communication and information services; and*
- *Port construction services.*

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan aspirasi pemangku kepentingan, jajaran Perusahaan telah menetapkan Visi dan Misi Perusahaan. Visi Pelindo III yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2015-2019 telah disesuaikan dan sejalan dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana status dan posisi Perusahaan selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) telah mengalami perubahan fungsi dari yang sebelumnya sebagai penyelenggara usaha kepelabuhanan menjadi hanya penyelenggara usaha terminal pelabuhan.

VISION AND MISSION

To realise the stakeholders' aspiration, the Company has determined the Corporate Vision and Mission that are contained in the 2015-2019 Company Long-Term Plan (RJPP) and it has been adjusted in line with Law No. 17 of 2008 on Shipping. The law stipulates the change of the Company status and position as a Port Enterprise (BUP) as well as its function and role from port business operator to the port terminal business operator.



Perusahaan telah melakukan penyesuaian pada Visi dan Misi untuk *review* RJPP 2015-2019. Pada RJPP 2015-2019 sebelumnya, Perusahaan berkeinginan untuk menjadi pemain global. Maka, ruang lingkup pelayanan jasa kepelabuhanan diperluas tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga regional/global. Oleh karena itu, ditetapkanlah Visi Perusahaan yaitu “Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang Prima”. Namun Visi tersebut dianggap sudah tercapai di periode 2015-2017. Oleh karena itu, dalam tinjauan RJPP 2015-2019 Perusahaan menetapkan Visi dan Misi baru, Visi Perusahaan sampai dengan tahun 2019 yaitu:

The Company has adjusted its Vision and Mission to review the 2015-2019 RJPP. In the previous 2015-2019 RJPP, the Company wished to become a global player. Thus, the scope of port services was expanded, not only in national scope but also regional/global scope, and the Corporate Vision was determined as “Committed to Encourage the Logistics Integration by Providing Excellent Port Services”. However, this Vision was considered to have been achieved from 2015 through 2017. Therefore, in the review of 2015-2019 RJPP, the Company establishes a brand new vision and mission. The Company Vision until 2019 is as follows:

“MENJADI PEMIMPIN BISNIS DI PELABUHAN”

“To Be the Leader of Business in Port”

Guna merealisasikan Visi Perusahaan tersebut, maka disusunlah Misi Perusahaan sebagai penjabaran dari Visi Perusahaan. Misi yang disusun juga mengakomodasi UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta memperhatikan kondisi objektif yang ada. Misi Perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah:

1. Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan *Stakeholder*;
2. Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa layanan bisnis di pelabuhan melalui prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik; dan
3. Menciptakan solusi bisnis yang cerdas melalui integritas dan kerja sama dengan mitra strategis.

To realise the Vision, the Corporate Mission is prepared as an elaboration of the Vision. The Mission also accommodates Law No. 17 of 2008 on Shipping and takes the existing objective conditions into account. For the next five years, the Company's Missions are:

1. *Creating sustainable added values to increase Stakeholders' satisfaction;*
2. *Providing comfort and convenience port services users through Good Corporate Governance (GCG) principles; and*
3. *Generating smart business solutions through integrity and cooperation with strategic partners.*

PERNYATAAN

Visi dan Misi Perusahaan telah dibahas, dikaji, ditinjau kembali, serta disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam RJPP 2015-2019. Ini dibuktikan dengan telah disetujuinya draf RJPP tahun 2015-2019, untuk kemudian diserahkan kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN) pada tanggal 2 November 2017.

TUJUAN PERUSAHAAN

Untuk memastikan pencapaian Misi Perusahaan tersebut di atas, Perusahaan telah menetapkan 2 tujuan Perusahaan yaitu:

1. Keberlanjutan korporasi melalui layanan bisnis yang efektif dan efisien. Dalam kurun 5 tahun (2015-2019), Perusahaan akan mengembangkan lini usahanya sehingga tidak hanya berfokus pada bisnis intinya sebagai penyedia jasa kepelabuhanan tetapi juga menyediakan berbagai lini usaha di pelabuhan. Mulai dari penyediaan air bersih menggunakan *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) hingga bisnis properti di pelabuhan. Untuk itu, Perusahaan akan memastikan pencapaian *operational service excellence* melalui implementasi inisiatif penyiapan *people-process-technology* guna mendapatkan layanan bisnis yang efektif dan efisien.
2. Tujuan Perusahaan berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul Badan Usaha Milik Negara (KPKU-BUMN) adalah:

STATEMENT

The Corporate Vision and Mission have been jointly discussed, studied, reviewed, and approved by the BOC and BOD in the 2015-2019 RJPP. This is proven through the agreed-upon 2015-2019 RJPP to be submitted to the Shareholder (Ministry of SOE) on 2 November 2017.

COMPANY OBJECTIVES

To ensure the achievement of the Company's mission, the Company has set forth two Company's objectives, namely:

1. *Corporate continuity through effective and efficient business services. In the next five years (2015-2019), the Company will expand its business line, not only by focusing on its core business as a port service provider but also by providing an array of business lines in the port service sector, ranging from Seawater Reverse Osmosis (SWRO) to business property at ports. To that end, the Company will ensure the achievement of operational service excellence through the implementation and preparation of people-process-technology initiatives to be able to obtain effective and efficient business services.*
2. *Company's objectives based on the Assessment Criteria of Excellent State-Owned Enterprise Performance (KPKU-BUMN):*

“MENJADI EMERGING INDUSTRY LEADER PADA TAHUN 2019” “To Become an Emerging Industry Leader by 2019”

Pelindo III sudah mencapai tujuan Perusahaan berdasarkan KPKU-BUMN pada tahun 2017 yaitu **Menjadi Emerging Industry Leader** dengan capaian skor KPKU sebesar 620,25.

*Pelindo III has reached the Company Objective, “**To Become an Emerging Industry Leader**” based on KPKU-BUMN in 2017 with KPKU score achievement at 620.65.*

BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, serta Tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan, manajemen Perusahaan menyadari perlunya dukungan budaya organisasi yang selaras dengan karakteristik bisnis, lingkungan bisnis, dan strategi Perusahaan yang telah terumuskan. Budaya yang dimaksud perlu dimiliki oleh seluruh Insan Pelindo III serta terinternalisasi dengan baik di setiap proses bisnis Perusahaan. Nilai inti perusahaan adalah sebagai berikut:

CUSTOMER FOCUS

Senantiasa menjadikan pengguna jasa sebagai fokus utama dalam penyediaan pelayanan jasa yang prima.

CARE

Senantiasa mewujudkan kepedulian untuk kepentingan Perusahaan baik secara internal maupun eksternal.

CORPORATE CULTURE

In order to actualise the determined Vision, Mission, and Objectives; the management of the Company is aware of the support from a corporate culture that is in line with its business characteristics and environment as well as the set corporate strategies. Such culture must be instilled in all personnel and well-internalised in all business processes of the Company. The core values of the Company are as follows:

CUSTOMER FOCUS

Continuously making service users and customers as the main focus in providing premium service.

CARE

Continuously showing care and concern to the internal and external interests of the Company.

INTEGRITY

Insan Pelindo III menjunjung tinggi integritas diri dalam menjalankan semua kegiatan Perusahaan.

Evaluasi dan *monitoring* dilaksanakan setiap 3 bulan untuk memastikan implementasi budaya Perusahaan telah berjalan dengan baik. Proses tersebut dilaksanakan melalui pembentukan *agent of change* di setiap Unit Kerja (untuk Kantor Pusat) dan di Pelabuhan Cabang. Penyampaian implementasi Budaya Perusahaan tahun berjalan oleh manajemen Pelabuhan Cabang kepada Direksi dilakukan ketika Rapat Kerja Tahunan di tahun berikutnya.

STRATEGI PERUSAHAAN

Perusahaan merumuskan 3 Misi Perusahaan dengan tujuan untuk mencapai Visi Perusahaan; sementara itu, untuk memastikan pencapaian Misi Perusahaan, maka disusun Strategi Perusahaan. Strategi merupakan pola tindakan dan desain alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi terbagi menjadi 3 (tiga) level yaitu strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional.

1. STRATEGI KORPORAT

Strategi Korporat mengidentifikasi serangkaian bisnis, pasar atau industri dimana Perusahaan bersaing, dan distribusi sumber daya di antara bisnis-bisnis tersebut. Berdasarkan analisis strategi formulasi yang telah dijelaskan dalam RJPP 2015-2019, maka terdapat 3 pilihan Perusahaan untuk diterapkan dalam bisnis yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan Perusahaan, yaitu:

Inovasi

Inovasi adalah strategi Perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada Pemangku Kepentingan melalui inovasi berkelanjutan dan kreativitas yang dikembangkan di dalam Organisasi, khususnya di bidang pengembangan bisnis dan Research and Development (R&D).

Operasional Prima

Operasional Prima adalah strategi Perusahaan dalam melakukan perbaikan secara terus menerus (continuous improvement) secara konsisten pada inisiatif organisasi yang menekankan pada perubahan *people-process technology*.

Sinergi

Sinergi adalah strategi Perusahaan dalam meningkatkan pangsa pasar di masing-masing pelabuhan dengan cara meningkatkan hubungan kerjasama baik dengan cabang, mitra, maupun Pemerintah.

INTEGRITY

Pelindo III employees uphold integrity in performing all Company business activities.

Evaluation and monitoring are conducted every three months to ensure the proper corporate culture implementation. Such process is performed through the establishment of an agent of change in each Work Unit (for Head Office), Region, and Port Branch. The reporting of corporate culture implementation in the reporting period by the Management of Regional and Port Branch to the BOD is conducted at the Annual Work Meeting of the next period.

COMPANY STRATEGIES

To achieve the established Vision, the Company formulated three Missions, of which the achievement of such Missions is ensured through the formulation of strategies. The strategy is a pattern of action and design of resource allocation to achieve organisational goals. The Company's strategies are divided into three levels, namely corporate strategy, business strategy, and functional strategy.

1. CORPORATE STRATEGY

The Corporate Strategy identifies a series of businesses, markets, or industries in which the Company competes, as well as the resources distribution to those businesses. Based on the analysis of strategy formulation described in the 2015-2019 RJPP, there are three choices to apply in business that can be utilised to achieve the Company's objectives:

Innovation

Innovation is one of the Company's strategies to deliver added values to Stakeholders through continuous innovation and creativity developed within the organisation, particularly in the areas of business development and research and development (R&D).

Prime Operation

*Prime Operation is the Company's strategy to consistently conduct continuous improvement in organisational initiatives that emphasise changes in *people-process technology*.*

Synergy

Synergy is the Company's strategy to increase market share in each Port by developing cooperation with branches, partners, and government.

2. STRATEGI BISNIS

Strategi bisnis menentukan tindakan utama dimana Perusahaan membangun dan menguatkan posisi persaingannya di pasar. Penjabaran mengenai 7 strategi bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Diferensiasi Produk;
- b. Kedekatan dengan Pelanggan;
- c. Inovasi Proaktif;
- d. Peningkatan Kapasitas Pelabuhan dan Pembelajaran Berkelanjutan;
- e. *Lean Organization*;
- f. Integrasi Horisontal dan Vertikal; dan
- g. Kewajiban Pelayanan Publik.

3. STRATEGI FUNGSIONAL

Strategi fungsional adalah strategi yang diimplementasikan oleh setiap area fungsional untuk mendukung strategi bisnis Perusahaan. Berikut adalah penjabaran strategi fungsional sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di Perusahaan, yaitu:

- a. SDM dan Umum
 - Peningkatan kompetensi pegawai;
 - Penerapan organisasi berbasis *Structure Follow Strategy*;
 - Penerapan *Talent Management System*;
 - Penerapan *Pay for Performance System*; dan
 - Optimalisasi budaya perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- b. Keuangan
 - *Investor relation* dan *investment management*;
 - *Cash Management System*;
 - *Cost focus*;
 - Optimalisasi IT dan implementasi *risk management* dalam bidang keuangan; dan
 - Akuntabilitas laporan keuangan.
- c. Operasi dan Pengembangan Bisnis
 - *Operational excellence*;
 - *Customer focus*;
 - Optimalisasi tarif;
 - Sinergi operasional;
 - Inovasi produk dan layanan jasa;
 - *Risk intelligent*; dan
 - *Green port management system*.
- d. Teknik
 - Pengembangan fasilitas pelabuhan;
 - Modernisasi alat fasilitas pelabuhan; dan
 - *Equipment management system*.
- e. Teknologi Informasi
 - *Full ICT based system*;
 - Pengintegrasian sistem informasi di induk dan anak Perusahaan; dan
 - IT sebagai pendukung keberlanjutan usaha.

2. BUSINESS STRATEGY

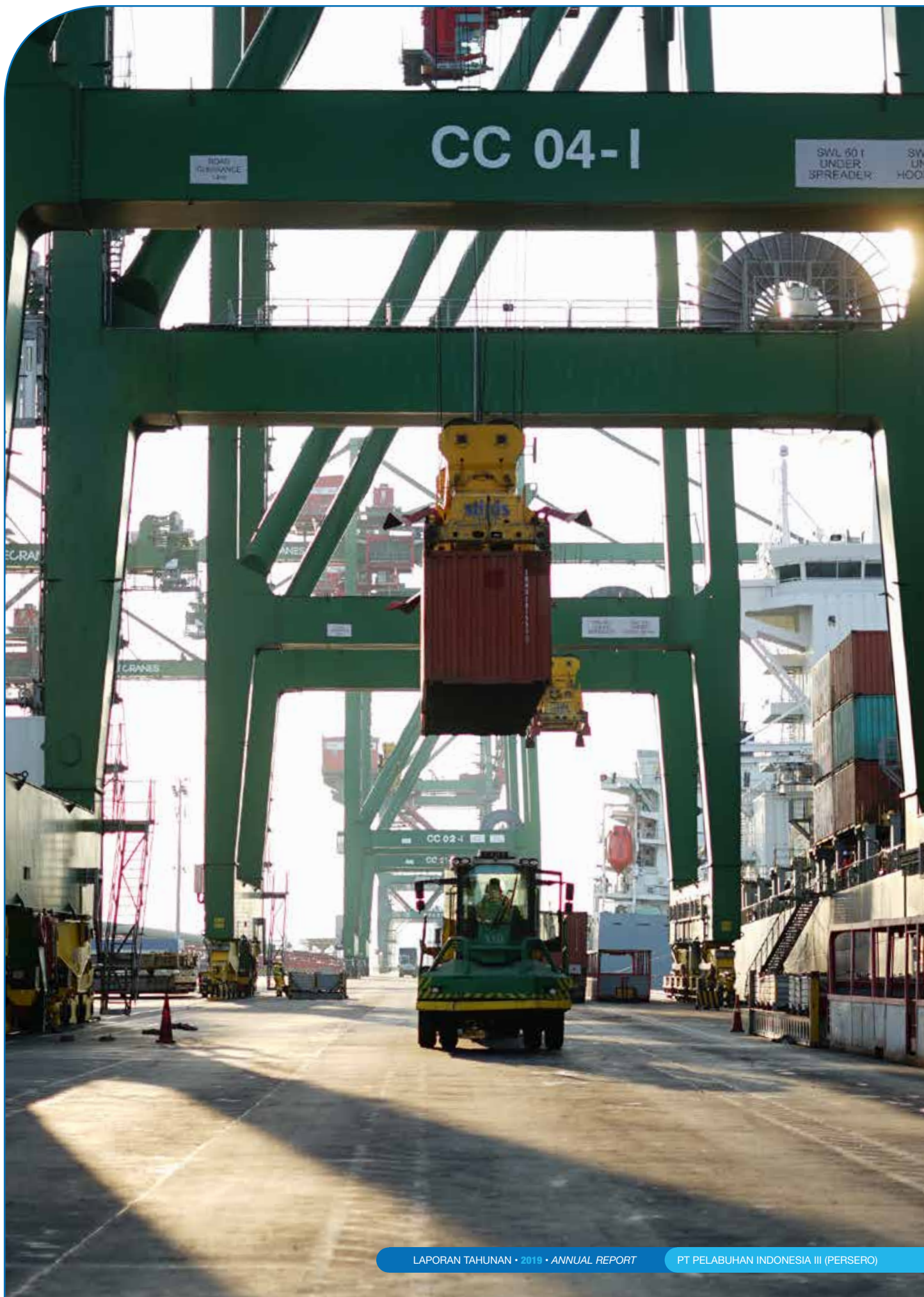
Business strategy determines the main action by which the Company builds and strengthens its competitive position in the market. The seven business strategies are described as follows:

- a. *Product Differentiation*;
- b. *Closeness with Customers*;
- c. *Proactive Innovation*;
- d. *Port Capacity Building and Continuous Learning*;
- e. *Lean Organisation*;
- f. *Horizontal and Vertical Integration*; and
- g. *Public Service Obligations*.

3. FUNCTIONAL STRATEGY

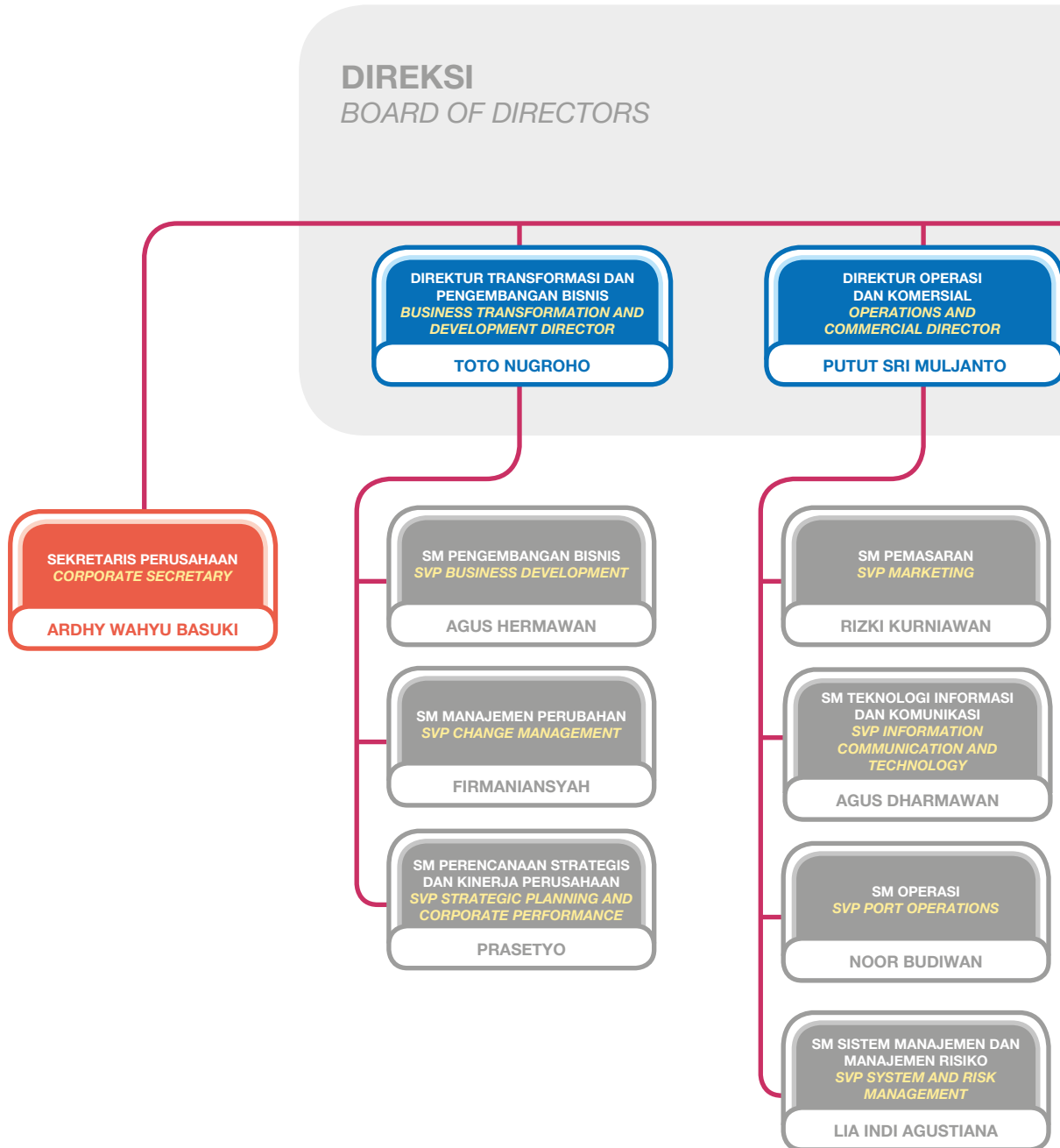
A functional strategy is a strategy implemented by each functional area to support the Company's business strategy. The functional strategy that is based on the functions that exist in the Company shall be described below:

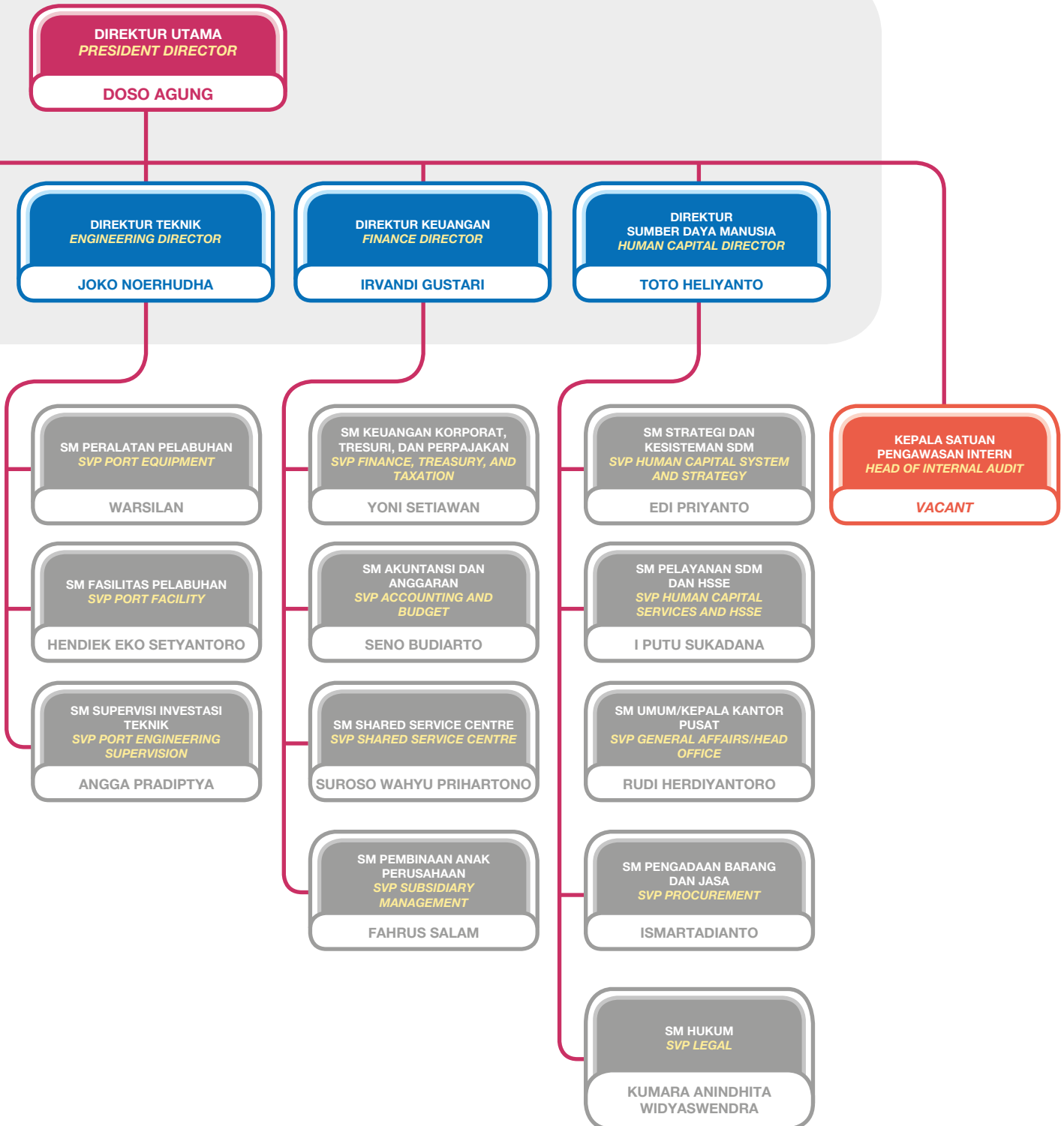
- a. *Human Capital and General Affairs*
 - *Improved employee competence*;
 - *Application of organisation based on Structure Follow Strategy*;
 - *Talent Management System application*;
 - *Pay for Performance System implementation*; and
 - *Optimisation of corporate culture as well as a Partnership and Community Development Programme (PKBL)*.
- b. *Finance*
 - *Investor relation and investment management*;
 - *Cash management system*;
 - *Cost focus*;
 - *IT Optimisation and implementation of risk management in finance*; and
 - *Accountability of financial statements*.
- c. *Business Operations and Development*
 - *Operational excellence*;
 - *Customer focus*;
 - *Tariff optimisation*;
 - *Operational synergy*;
 - *Innovation in product and service*;
 - *Risk intelligent*; and
 - *Green port management system*.
- d. *Engineering*
 - *Development of port facilities*;
 - *Modernisation of port facilities and equipment*; and
 - *Equipment management system*.
- e. *Information Technology*
 - *Full ICT-based system*;
 - *Integration of information system in parent entity and subsidiaries*; and
 - *IT to support business sustainability*.



STRUKTUR ORGANISASI

ORGANISATIONAL STRUCTURE





PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



AHMAD BAMBANG
KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISSIONER

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Kediri, 5 Juli 1962 <i>Kediri, 5 July 1962</i>
Usia <i>Age</i>	57 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Muda Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (1984) • Sarjana (S1) Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (1986) • Magister (S2) Teknik Universitas Indonesia dan Magister (S2) Manajemen Industri (MMI) Queensland University of Technology (<i>Joint Program</i>) (1999) • <i>Diploma in Informatics Engineering, Institut Teknologi Bandung (1984)</i> • <i>Bachelor's Degree in Informatics Engineering, Institut Teknologi Bandung (1986)</i> • <i>Master's Degree in Engineering from Universitas Indonesia and Master's Degree in Industrial Management from Queensland University of Technology (Joint Programme) (1999)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana & Prasarana Perhubungan (KSPP) (2017-sekarang) • Staff Khusus III Menteri BUMN (Bidang Marketing, Branding, Hilirisasi, Digitalisasi, dan Restrukturisasi) (2017) • Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (2016-2017) • Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) (2014-2016) • President Director dan CEO PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) (2012-2014) • Senior Vice President (SVP) Human Resource Development – Direktorat Sumber Daya Manusia (2011-2012) • Senior Vice President (SVP) Corporate Shared Services (CSS)/Chief Information Officer (CIO) Pertamina – Dit. Umum & SDM (2008-2011) • Deputi Direktur (SVP) Distribusi, Dit. Pemasaran & Niaga (2007-2008) • Kepala Divisi (Vice President/VP) Perencanaan Strategis & Pengembangan Usaha, Dit. Pemasaran & Niaga (2006-2007) • Manajer Dukungan Proses Bisnis, Divisi Sistem Bisnis & TI (2004-2006) • Program Training, Staff Pertamina lalu pindah beberapa jabatan di Dit, Pembekalan & Pemasaran Dalam Negeri, Proyek Implementasi SAP hingga menjadi Manager Dukungan Proses Bisnis & TI (1988-2004) • <i>Deputy Minister of SOE in Construction and Transportation Facilities and Infrastructure (KSPP) Field (2017-present)</i> • <i>Special Staff III of the Minister of SOE (Marketing, Branding, Downstreaming, Digitalisation, and Restructuration Field) (2017)</i> • <i>Vice President Director of PT Pertamina (Persero) 2016-2017</i> • <i>Director of Marketing of PT Pertamina (Persero) (2014-2016)</i> • <i>President Director and CEO of Pertamina Trans Kontinental (PKT), a subsidiary of PT Pertamina (Persero) (2012-2014)</i> • <i>Senior Vice President (SVP) of Human Resource Development – Human Resources Directorate (2011-2012)</i> • <i>SVP of Corporate Shared Services (CSS)/Chief Information Officer (CIO) of Pertamina – General and Human Resource Directorate (2008-2011)</i> • <i>Deputy Director (SVP) of Distribution, Marketing & Commerce Directorate (2007-2008)</i> • <i>Vice President (VP) of Strategic Planning & Business Development, Marketing & Commerce Directorate (2006-2007)</i> • <i>Manager of Business Process Support, Business & IT System Division (2004-2006)</i> • <i>Training Programme, Pertamina Staff before transferring to the Domestic Briefing & Marketing Directorate, SAP Implementation Project into becoming the Manager Business & IT Process Support (1988-2004)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 <i>Decree No. SK-206/MBU/09/2019 dated 13 September 2019</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	13 September 2019 - 12 September 2024 <i>13 September 2019 – 12 September 2024</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN <i>Deputy Minister of SOE in Construction and Transportation Facilities and Infrastructure (KSPP) Field</i>



HARI BOWO

KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISSIONER

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Surabaya, 11 Juni 1956 <i>Surabaya, 11 June 1956</i>
Usia <i>Age</i>	63 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Militer Angkatan Laut (1982) • Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas WR Supratman (1998) • Magister (S2) Pertahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada (2010) • <i>Marine Military Academy (1982)</i> • <i>Bachelor's Degree in Economics, Universitas WR Supratman (1998)</i> • <i>Master's Degree in National Defense, Universitas Gadjah Mada (2010)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Kepala Staf Angkatan Laut RI dengan pangkat Laksamana Madya TNI AL (2012-2014) • Gubernur Akademi Angkatan Laut (2010) • <i>Vice of Staff of the Indonesian Navy with the rank of Vice-Admiral (Laksamana Madya) (2012-2014)</i> • <i>Governor of Naval Academy (2010)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-127/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-127/MBU/2014 dated 10 June 2014 on the Dismissal and Appointment of the BOC of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	10 Juni 2014 – 9 Juni 2019 <i>10 June 2014 – 9 June 2019</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III. <i>No concurrent position outside of Pelindo III.</i>



ZAINAL ABIDIN

KOMISARIS
COMMISSIONER

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Palembang, 12 Juli 1947 <i>Palembang, 12 July 1947</i>
Usia <i>Age</i>	72 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Akademi Militer Angkatan Darat (1970) • Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (1985) • Sarjana (S1) Ilmu Politik, Universitas Terbuka (1995) • <i>Armed Forces Military Academy (1970)</i> • <i>Armed Forces Command and Staff College (1985)</i> • <i>Bachelor's Degree in Political Studies, Universitas Terbuka (1995)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Kertanegara Energi Perkasa (2017-2019) • Head of HR & GA PT Toba Sejahtera (2007-2019) • Komisaris Utama PT Smartias Indo Gemilang (2011-2012) • Komisaris Utama PT Kartanegara Energi Perkasa (PLTG Senipah) (2007-sekarang) • Chief of HRD & GA PT Toba Sejahtera (2007-2011) • Kepala Bidang Ideologi Politik dan Keamanan Legiun Veteran Republik Indonesia (2005-2009) • Koordinator Bidang Usaha Yayasan Kartika Ekapaksi Angkatan Darat (YKEP) (2002-2004) • Komisaris Utama PT Wiska (2002-2004) • Komisaris Utama PT International Timber Cooperation Inc. (ITCI) (2002-2004) • <i>President Director of PT Kertanegara Energi Perkasa (2017-2019)</i> • <i>Head of HR & GA PT Toba Sejahtera (2007-2019)</i> • <i>President Commissioner of PT Smartias Indo Gemilang (2011-2012)</i> • <i>President Commissioner of PT Kartanegara Energi Perkasa (PLTG Senipah) (2007-present)</i> • <i>Chief of HRD & GA PT Toba Sejahtera (2007-2011)</i> • <i>Head of Political Ideology and Veteran Legion Safety Department, Republic of Indonesia (2005-2009)</i> • <i>Business Field Coordinator of Yayasan Kartika Ekapaksi, Army (2002-2004)</i> • <i>President Commissioner of PT Wiska (2002-2004)</i> • <i>President Commissioner of PT International Timber Cooperation Inc. (ITCI) (2002-2004)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-198/MBU/09/2017 dated 14 September 2017 on the Dismissal and Appointment of the BOC of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	14 September 2017 – 13 September 2022 <i>14 September 2017 – 13 September 2022</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Komisaris Utama PT Kartanegara Energi Perkasa (PLTG Senipah) <i>President Commissioner of PT Kartanegara Energi Perkasa (PLTG Senipah)</i>



WAHJU SATRIO UTOMO

KOMISARIS
COMMISSIONER

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Magelang, 6 September 1959 <i>Magelang, 6 September 1959</i>
Usia <i>Age</i>	60 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Fakultas Hukum, Universitas Trisakti • Magister (S2) Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Indonesia • Doktor (S3) Fakultas Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta • <i>Bachelor's Degree in Law, Universitas Trisakti</i> • <i>Master's Degree in Public Administration, Universitas Indonesia</i> • <i>Doctorate Degree in Educational Management, Universitas Negeri Jakarta</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor Ahli Utama Kementerian Perhubungan (2019-sekarang) • Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017-2019) • Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (2014-2017) • Staf Ahli Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan (2014) • Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan (2007-2013) • Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan (2004-2007) • Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Perhubungan (2002-2004) • Kabag TU PIMPINAN Kementerian Perhubungan (1999-2002) • <i>Main Expert Auditor of the Ministry of Transportation (2019-present)</i> • <i>Inspector General of the Indonesian Ministry of Transportation (2017-2019)</i> • <i>Head of Human Resources Development Board of Transportation (2014-2017)</i> • <i>Expert Staff in Transportation Law and Bureaucracy Reformation (2014-2017)</i> • <i>Secretary of Human Resources Development Board of Transportation (2007-2013)</i> • <i>Head of Employment and Organisation at the Ministry of Transportation (2004-2007)</i> • <i>Head of General Affairs and Public Relation Bureau at the Ministry of Transportation (2002- 2004)</i> • <i>Head of General Administration Division at the Ministry of Transportation (1999-2002)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-30/MBU/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-30/MBU/02/2016 dated 9 February 2016 on the Dismissal and Appointment of the BOC of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	9 Februari 2016 – 8 Februari 2021 <i>9 February 2016 – 8 February 2021</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor Ahli Utama Kementerian Perhubungan • Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia • <i>Main Expert Auditor of the Ministry of Transportation</i> • <i>Inspector General of the Indonesian Ministry of Transportation</i>



HEDDY LUGITO

KOMISARIS
COMMISSIONER

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Boyolali, 5 Juni 1960 <i>Boyolali, 5 June 1960</i>
Usia <i>Age</i>	59 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Bekasi
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	Sarjana (S1) Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro (1987) <i>Bachelor's Degree in Cultural Studies, Universitas Diponegoro (1987)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Era Media Digital (2013-2018) • Pimpinan Redaksi CARS (2012-2018) • Pimpinan Redaksi GATRANEWS.COM (2012-sekarang) • Pimpinan Redaksi Majalah Gatra (2010-sekarang) • Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Gatra (2003-2006) • Redaktur Eksekutif Majalah Gatra (2003-2006) • Redaktur Kolom Ekonomi Majalah Gatra (2001-2003) • Redaktur Hukum Majalah Gatra (1996-1999) • Kepala Biro Majalah Gatra, Jawa Tengah (1994-1996) • Kepala Biro Majalah Tempo, Jawa Tengah (1990-1994) • Reporter majalah Tempo (1987-1990) • <i>Commissioner at PT Era Media Digital (2013-2018)</i> • <i>Head of Editorial at Cars Magazine (2012-2018)</i> • <i>Head of Editorial at GATRANEWS.COM (2012-present)</i> • <i>Editor in Chief of Gatra Magazine (2010-present)</i> • <i>Deputy Editor in Chief at Gatra Magazine (2003-2006)</i> • <i>Executive Editor at Gatra Magazine (2003-2006)</i> • <i>Editor for Economic Column at Gatra Magazine (2001-2003)</i> • <i>Editor for Law Column at Gatra Magazine (1996-1999)</i> • <i>Bureau Head at Gatra Magazine, Central Java (1994-1996)</i> • <i>Bureau Head at Tempo Magazine, Central Java (1990-1994)</i> • <i>Reporter at Tempo Magazine (1987-1990)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-241/MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-241/MBU/10/2016 dated 19 October 2016 on the Dismissal and Appointment of the BOC of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	19 Oktober 2016 – 18 Oktober 2021 <i>19 October 2016 – 18 October 2021</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan Redaksi GATRANEWS.COM • Pimpinan Redaksi Majalah Gatra • <i>Head of Editorial at GATRANEWS.COM</i> • <i>Editor in Chief of Gatra Magazine</i>



DEDI SYARIF USMAN

KOMISARIS
KOMISARIS

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Bandung, 22 April 1965 <i>Bandung, 22 April 1965</i>
Usia <i>Age</i>	54 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan (1991) • Magister (S2) Ekonomi, University of Colorado (1998) • <i>Bachelor's Degree in Economics, Universitas Katolik Parahyangan (1991)</i> • <i>Master's Degree in Economics, University of Colorado (1998)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Direktur Jendral Kekayaan Negara (2019-sekarang) • Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN (2013-2019) • Direktur Barang Milik Negara, DJKN (2012-2013) • Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, DJKN (2011-2012) • Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DJKN (2007-2011) • Kepala KP2LN Bandung I, DJPLN (2005-2007) • Kepala KP2LN Tegal, DJPLN (2001-2005) • Kepala Seksi Piutang Negara Perbankan, KP3N Jakarta • Staf Biro Piutang Negara Perbankan, BUPLN • <i>Secretary Director General of State Assets (2019-present)</i> • <i>Separated State Asset Director, DJKN (2013-2019)</i> • <i>State-Owned Asset Director, DJKN (2012-2013)</i> • <i>Head of Organisation and Internal Compliance Division, DJKN (2011-2012)</i> • <i>Head of Organisation and Governance Division, DJKN (2007-2011)</i> • <i>Head of KP2LN Bandung I, DJPLN (2005-2007)</i> • <i>Head of KP2LN Tegal, DJPLN (2001-2005)</i> • <i>Head of Banking State Claim KP3N Jakarta</i> • <i>The Staff of Banking State Claim Bureau, BUPLN</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Penetapan Komisaris Independen Pelindo III <i>The Decree of the Minister of SOE No. SK-207/MBU/07/2018 dated 12 July 2018 on the Dismissal and Appointment of the BOC and the Appointment of Independent Commissioner of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	12 Juli 2018 – 11 Juli 2023 <i>12 July 2018 – 11 July 2023</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Direktur Jendral Kekayaan Negara • Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN • <i>Secretary Director General of State Assets</i> • <i>Separated State Asset Director, DJKN</i>



PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

DOSO AGUNG
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR



Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Yogyakarta, 5 Januari 1968 <i>Yogyakarta, 5 January 1968</i>
Usia <i>Age</i>	51 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Komunikasi, Universitas Negeri Sebelas Maret (1991) • Magister (S2) Jurusan Manajemen, Universitas Padjajaran (2003) • <i>Bachelor's Degree in Communication, Universitas Negeri Sebelas Maret (1991)</i> • <i>Master's Degree in Management, Universitas Padjajaran (2003)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (2018-sekarang) • Komisaris Utama PT Terminal Teluk Lamong (2018-2019) • Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (2015) • Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2014) • General Manager Cabang Pelabuhan Panjang (2010) • Direktur Utama/General Manager PT TPK Koja (2009) • Senior Manager Administrasi SDM & Umum (2008) • Pj. Senior Manager Umum (2007) • Sekretaris Dewan Pengawas KSOTPK Koja (2006) • Assistant Corporate Secretary Bidang Hubungan Investor dan Antar Lembaga (2000) • Pj. Assistant Corporate Secretary Bidang Hubungan Investor dan Antar Lembaga (1999) • Staf Analisa dan Evaluasi Media Masa dan Publikasi (1997) • Staf Analisa dan Publikasi Sub-Direktorat Hukum dan Humas (1995) • Staf Junior Subdirektorat Hukum dan Humas (1993) • <i>President Director of PT Pelabuhan Indonesia III (2018-present)</i> • <i>President Commissioner of PT Terminal Teluk Lamong (2018-2019)</i> • <i>President Director of PT Pelabuhan Indonesia IV (2015)</i> • <i>President Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2014)</i> • <i>General Manager of the Port of Panjang (2010)</i> • <i>President Director/General Manager of PT TPK Koja (2009)</i> • <i>Senior Manager of Human Capital Administration and General Affairs (2008)</i> • <i>Acting Senior Manager of General Affairs (2007)</i> • <i>Secretary of the Supervisory Board of KSOTPK Koja (2006)</i> • <i>Assistant Corporate Secretary – Investor Relation and Inter-Institutions Division (2000)</i> • <i>Acting Assistant Corporate Secretary – Investor Relation and Inter-Institutions Division (1999)</i> • <i>The Staff of Analysis and Mass Media Evaluation and Publication (1997)</i> • <i>The Staff of Analysis and Publication on the Sub-Directorate of Legal and Public Relation (1995)</i> • <i>Junior Staff on the Sub-Directorate of Legal and Public Relation (1993)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018 on the Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	19 September 2018 – 18 September 2023 <i>19 September 2018 – 18 September 2023</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Periode</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III. <i>No concurrent position outside of Pelindo III.</i>



PUTUT SRI MULJANTO

DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL
OPERATIONS AND COMMERCIAL DIRECTOR

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Magetan, 11 April 1969 <i>Magetan, 11 April 1969</i>
Usia <i>Age</i>	50 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Surabaya
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1993) • Magister (S2) Manajemen, Universitas Airlangga (2012) • <i>Bachelor's Degree in Management, Universitas Airlangga (1993)</i> • <i>Master's Degree in Management, Universitas Airlangga (2012)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Terminal Teluk Lamong (2019-sekarang) • Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III (November 2018-sekarang) • Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Surabaya (Oktober 2018-November 2018) • Senior Vice President Marketing Kantor Pusat Pelindo III (Juni 2018-September 2018) • Direktur Utama PT Pelindo Marine Service (Februari 2018-Juni 2018) • Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Desember 2013-Februari 2018) • Senior Manajer Pemasaran Kantor Pusat Pelindo III (2011-2013) • Senior Manajer Peningkatan Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2010-2011) • Pjs. Senior Manajer Peningkatan Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2009-2010) • Asisten Senior Manajer Perencanaan dan Kerja Sama Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2008-2009) • Asisten Manajer Pemasaran Pelindo III Cabang Tanjung Perak (2007-2008) • Asisten Manajer Analisa dan Evaluasi Pelindo III Cabang Tanjung Perak (2007) • Asisten Manajer Operasi Terminal Konvensional Kantor Cabang Pelindo III Banjarmasin (2004-2007) • Staf Muda IV Kantor Pusat Pelindo III (2004) • Penata Administrasi Kantor Pusat Pelindo III (2002-2004) • Pelaksana Administrasi I Unit Kerja Kantor Pusat Pelindo III (1999-2001) • <i>President Commissioner of PT Terminal Teluk Lamong (2019-present)</i> • <i>Operations and Commercial Director of Pelindo III (November 2018-present)</i> • <i>President Director of PT Terminal Petikemas Surabaya (October 2018-November 2018)</i> • <i>Senior Vice President Marketing in Pelindo III Head Office (June 2018-September 2018)</i> • <i>President Director of PT Pelindo Marine Service (February 2018-June 2018)</i> • <i>President Director of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (December 2013-February 2018)</i> • <i>Senior Manager of Marketing in Pelindo III Head Office (2011-2013)</i> • <i>Senior Manager of Business Development in Pelindo III Head Office (2010-2011)</i> • <i>Acting Senior Manager of Business Development in Pelindo III Head Office (2009-2010)</i> • <i>Assistant Senior Manager of Business Planning and Cooperation in Pelindo III Head Office (2008-2009)</i> • <i>Assistant Manager of Marketing on Pelindo III Tanjung Perak Branch (2007-2008)</i> • <i>Assistant Manager of Analysis and Evaluation in Pelindo III Tanjung Perak Branch (2007)</i> • <i>Assistant Manager of Conventional Terminal Operation in Pelindo III Banjarmasin Branch (2004-2007)</i> • <i>Junior Staff IV in Pelindo III Head Office (2004)</i> • <i>Administrative Organiser in Pelindo III Head Office (2002-2004)</i> • <i>Administrative Executive I Work Unit in Pelindo III Head Office (1999-2001)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018 on Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	5 November 2018 – 4 November 2023 <i>5 November 2018 – 4 November 2023</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Komisaris Utama PT Terminal Teluk Lamong <i>President Commissioner of PT Terminal Teluk Lamong</i>



JOKO NOERHUDHA

DIREKTUR TEKNIK
ENGINEERING DIRECTOR

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Surabaya, 17 April 1973 <i>Surabaya, 17 April 1973</i>
Usia <i>Age</i>	46 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Surabaya
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh November (1998) <i>Bachelor's Degree in Civil Engineering, Institut Teknologi Sepuluh November (1998)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Teknik Pelindo III (September 2018-sekarang) • Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Surabaya (Desember 2017-September 2018) • General Manager Cabang Tanjung Perak Surabaya (Maret 2016-Desember 2017) • Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan Kantor Pusat (2013-2016) • Senior Manager Rancang Bangun Kantor Pusat (2012-2013) • Manager Teknik Cabang Tanjung Emas Semarang (2011-2012) • Asisten Senior Manager Rancang Bangun Kantor Pusat (2010-2011) • Manager Teknik Cabang Kotabaru (2009-2010) • <i>Engineering Director of Pelindo III (September 2018-present)</i> • <i>President Director of PT Terminal Petikemas Surabaya (December 2017-September 2018)</i> • <i>General Manager of Tanjung Perak Branch Surabaya (March 2016-December 2017)</i> • <i>Head of Strategic Planning and Corporate Performance Bureau on Head Office (2013-2016)</i> • <i>Senior Manager of Design on Head Office (2012-2013)</i> • <i>Manager of Engineering on Tanjung Emas Branch Semarang (2011-2012)</i> • <i>Assistant Senior Manager of Design on Head Office (2010-2011)</i> • <i>Manager of Engineering in Kotabaru Branch (2009-2010)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018 on the Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	19 September 2018 – 18 September 2023 <i>19 September 2018 – 18 September 2023</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III. <i>No concurrent position outside of Pelindo III.</i>



TOTO HELIYANTO

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL DIRECTOR

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Malang, 21 Juli 1964 <i>Malang, 21 July 1964</i>
Usia <i>Age</i>	54 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Sidoarjo
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Hukum Pidana, Universitas Merdeka Malang (1989) • Magister (S2) Hukum Bisnis, Universitas Airlangga (2000) • <i>Bachelor's Degree in Criminal Law, Universitas Merdeka Malang (1989)</i> • <i>Master's Degree in Business Law, Universitas Airlangga (2000)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • General Manager Pelindo III Cabang Banjarmasin • General Manager Pelindo III Cabang Tanjung Perak • <i>General Manager of Pelindo III, Banjarmasin Branch</i> • <i>General Manager of Pelindo III, Tanjung Perak Branch</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-103/MBU/2014 dated 12 May 2014 on the Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	12 Mei 2014 – 13 Mei 2024 <i>12 May 2014 – 13 May 2024</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	2 Periode <i>2 Periods</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III. <i>No concurrent position outside of Pelindo III.</i>



IRVANDI GUSTARI

DIREKTUR KEUANGAN
FINANCE DIRECTOR

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Padang, 11 Agustus 1965 <i>Padang, 11 August 1965</i>
Usia <i>Age</i>	54 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Manajemen, Universitas Parahyangan (1989) • Magister (S2) Bisnis, Prasetya Mulya Business School Jakarta (1991) • Doktor (S3) Change Management, Institut Pertanian Bogor (2013) • <i>Bachelor's Degree in Management, Universitas Parahyangan (1989)</i> • <i>Master's Degree in Business, Prasetya Mulya Business School Jakarta (1991)</i> • <i>Doctorate Degree in Change Management, Institut Pertanian Bogor (2013)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan Pelindo III (2019-sekarang) • Direktur Utama PT BPD Riau kepri (2015-2019) • HR Grup Head (SVP) MNC Bank (2006-2015) • Head Of HR Operations & Quality Assurance (VP) Permata Bank (2004-2006) • Head HR Strategy Policy & Development (VP) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004) • Deputy Head of HRM (SM) Bank Danamon (1992-1999) • <i>Finance Director of Pelindo III (2019-present)</i> • <i>President Director of PT BPD Riau kepri (2015-2019)</i> • <i>HR Group Head (SVP) of MNC Bank (2006-2015)</i> • <i>Head Of HR Operations & Quality Assurance (VP) Permata Bank (2004-2006)</i> • <i>Head HR Strategy Policy & Development (VP) in the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) (1999-2004)</i> • <i>Deputy Head of HRM (SM) of Bank Danamon (1992-1999)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 October 2019 on the Dismissal and Appointment of Company BOD Members in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	16 Oktober 2019 – 15 Oktober 2024 <i>16 October 2019 – 15 October 2024</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III. <i>No concurrent position outside of Pelindo III.</i>



IMAN RACHMAN

DIREKTUR KEUANGAN
FINANCE DIRECTOR

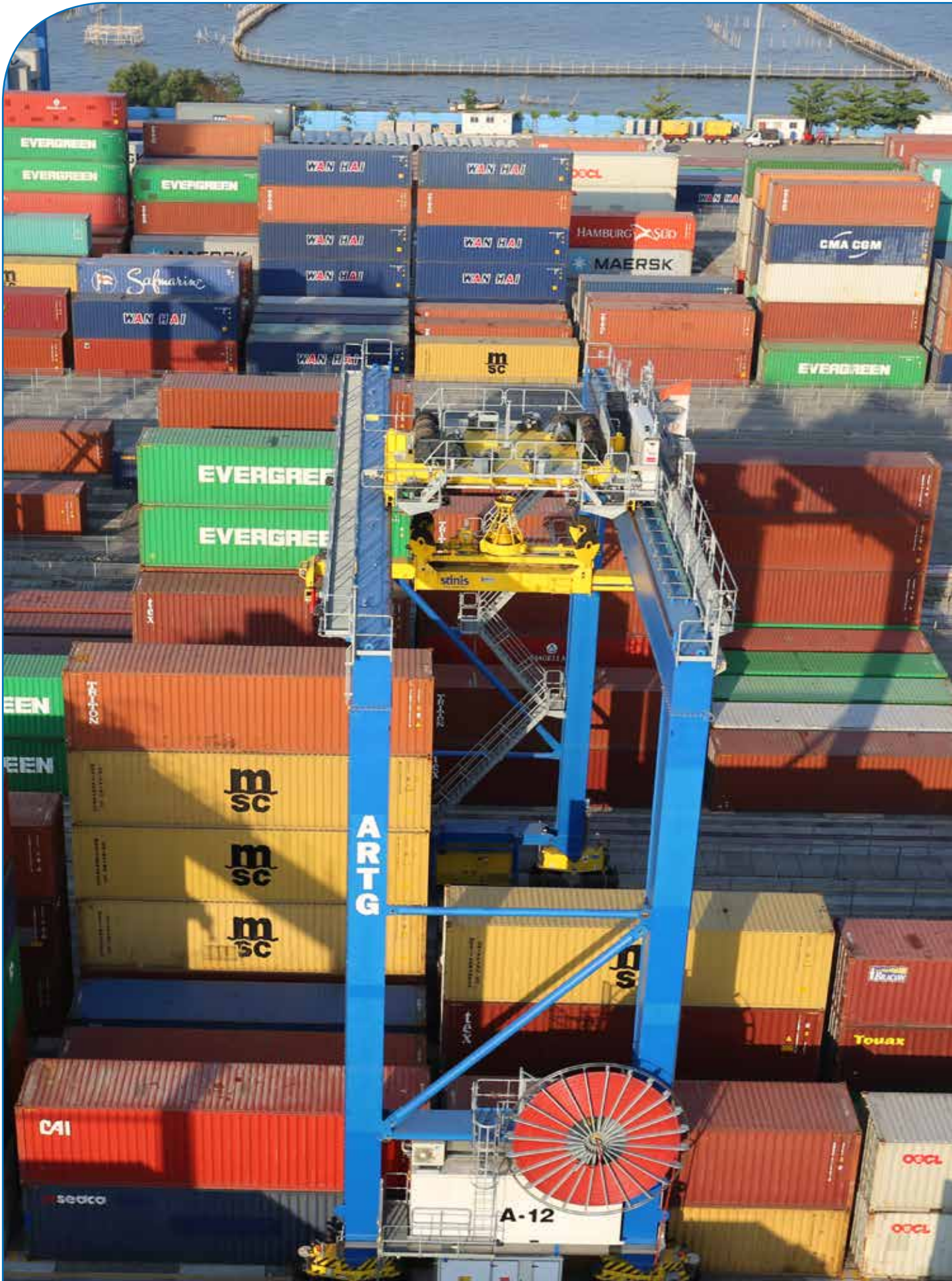
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Jakarta, 31 Mei 1972 <i>Jakarta, 31 May 1972</i>
Usia <i>Age</i>	47 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Padjajaran (1995) • Master of Business Administration (MBA) in Finance, Leeds University Business School (1997) • Bachelor's Degree in Economics, Universitas Padjajaran (1995) • Master of Business Administration (MBA) in Finance, Leeds University Business School (1997)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan Pelindo III (2018-2019) • Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018) • Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2003-2016) • Manager PT Danareksa Sekuritas (1998-2003) • Finance Director of Pelindo III (2018-2019) • Finance Director in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018) • Investment Banking Director in PT Mandiri Sekuritas (2003-2016) • Manager of PT Danareksa Sekuritas (1998-2003)
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018 on the Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	19 September 2018 – 16 Oktober 2019 <i>19 September 2018 – 16 October 2019</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III. <i>No concurrent position outside of Pelindo III.</i>



TOTO NUGROHO PRANATYASTO



DIREKTUR TRANSFORMASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS
BUSINESS TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT DIRECTOR




Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesian</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Sungei Gerong, 27 Juni 1967 <i>Sungei Gerong, 27 June 1967</i>
Usia <i>Age</i>	52 tahun <i>years old</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Teknik Gas dan Petrokimia, Universitas Indonesia (1992) • Magister (S2) Teknik Kimia, University of Texas (2000) • Executive MBA, INSEAD Global Leadership, Singapura (2015) • <i>Bachelor's Degree in Gas and Petrochemical Engineering, Universitas Indonesia (1992)</i> • <i>Master's Degree in Chemical Engineering, University of Texas (2000)</i> • <i>Executive MBA, INSEAD Global Leadership, Singapore (2015)</i>
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan <i>Career History</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III (2018-sekarang) • SVP Integrated Supply Chain, PT Pertamina (Persero) (2017-2018) • Direktur Utama PT Pertamina Gas (2017) • Strategic Advisor to Finance Director, PT Pertamina (Persero) (2016-2017) • Direktur Utama Pertamina Energy Services, Singapore (2015-2016) • Manager New and Renewable Energy Business Development (2012-2015) • Corporate Business Development, PT Pertamina (Persero) (2001-2012) • Process Engineering, Kilang RU VI Balongan (1993-2001) • <i>Business Transformation and Development Director of Pelindo III (2018-present)</i> • <i>SVP Integrated Supply Chain, PT Pertamina (Persero) (2017-2018)</i> • <i>President Director of PT Pertamina Gas (2017)</i> • <i>Strategic Advisor to Finance Director, PT Pertamina (Persero) (2016-2017)</i> • <i>President Director of Pertamina Energy Services, Singapore (2015-2016)</i> • <i>Manager New and Renewable Energy Business Development (2012-2015)</i> • <i>Corporate Business Development, PT Pertamina (Persero) (2001-2012)</i> • <i>Process Engineering, Balongan Refinery Unit IV (1993-2001)</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pelindo III <i>Decree of the Minister of SOE No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018 on Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III</i>
Periode Menjabat <i>Tenure</i>	5 November 2018 – 4 November 2023 <i>5 November 2018 – 4 November 2023</i>
Jumlah Periode Menjabat <i>Total Service Period</i>	1 Periode <i>1 Period</i>
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/Eksternal) <i>Concurrent Position (Internal/External)</i>	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III. <i>No concurrent position outside of Pelindo III.</i>



DAFTAR DAN PROFIL PEJABAT SENIOR

LIST AND PROFILE OF SENIOR OFFICERS

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
1.		vacant	Kepala Satuan Pengawas Intern Head of Internal Audit
2.		Ardhy Wahyu Basuki	Sekretaris Perusahaan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Juni tahun 1968. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2009 pada Bidang Jaminan Mutu dan K3. Pernah menjabat sebagai GM, CEO Regional Jawa Tengah, dan Senior Manager Pemasaran. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Juli 2019. Corporate Secretary <i>Indonesian citizen born in Surabaya in June 1968. Started his career in Pelindo III in 2009 in Quality Assurance and K3. Once served as the GM, CEO of Central Java Region, and SVP Marketing. Has been appointed as the Corporate Secretary since July 2019.</i>
3.		Rizki Kurniawan	Senior Manager Pemasaran Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Jakarta pada bulan September tahun 1979. Mendapatkan gelar sebagai Sarjana Teknik. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2009 pada Bidang Administrasi Logistik. Pernah menjabat sebagai ASM Pemasaran dan Manager di TTL. Diangkat sebagai Senior Manager Pemasaran sejak Agustus 2019. Senior Vice President Marketing <i>Indonesian citizen born in Jakarta in September 1979. Earned his bachelor's degree in Engineering. Started his career at Pelindo III in 2009 in Logistics Administration. Once served as the Assistant of Senior Manager Marketing and Manager in TTL. Has been appointed as the SVP Marketing since August 2019.</i>
4.		Agus Dharmawan	Senior Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Magetan pada bulan Agustus tahun 1976. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2007 pada Bidang Pengembangan dan Penerapan Aplikasi. Menjabat sebagai Senior Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 2018. Senior Vice President Information and Communication Technology <i>Indonesian citizen born in Magetan in August 1976. Started his career at Pelindo III in 2007 in the App Development and Application. Has been serving as SVP Information and Communication Technology since 2018.</i>
5.		Noor Budiwan	Senior Manager Operasi Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Kotabaru pada bulan Oktober tahun 1970. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1998. Pernah menjabat sebagai Manager di Bidang Operasi pada TPS. Menjabat sebagai Senior Manager Operasi sejak bulan Mei 2019. Senior Vice President Port Operation <i>Indonesian citizen born in Kotabaru in October 1970. Started his career at Pelindo III in 1998. Once served as the Manager of Port Operations in TPS. Has been serving as the SVP Port Operation since May 2019.</i>

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
6.		Lia Indi Agustiana	<p>Senior Manager Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Agustus tahun 1982. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2006 pada Bidang Analisa dan Evaluasi Keuangan. Menjabat sebagai Senior Manager Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko sejak 2018.</p> <p>Senior Vice President System and Risk Management <i>Indonesian citizen born in Surabaya in August 1982. She began his career at Pelindo III in 2006 in the Financial Analysis and Evaluation. Has been serving as SVP System and Risk Management since 2018.</i></p>
7.		Warsilan	<p>Senior Manager Peralatan Pelabuhan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Tuban pada bulan April tahun 1974. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Peralatan Pelabuhan sejak Juli 2019.</p> <p>Senior Vice President Port Equipment <i>Indonesian citizen born in Tuban in April 1974. Started his career at Pelindo III in 1999. Has been serving as the SVP Port Equipment since July 2019.</i></p>
8.		Hendiek Eko Setyantoro	<p>Senior Manajer Fasilitas Pelabuhan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Bojonegoro bulan Maret tahun 1972. Memperoleh Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 1997 dan Master's Degree of Port and Coastal Engineering dari UNESCO-IHE Belanda tahun 2014. Bergabung di Pelindo III sejak tahun 1999 pada Bidang Teknik dengan masa kerja 20 tahun. Pernah menjabat sebagai Direksi Cucu Perusahaan Pelindo III Group.</p> <p>Senior Vice President Port Facility <i>Indonesian citizen born in Bojonegoro in March 1972. Earned a Bachelor Degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya in 1997 and a Master's Degree in Port and Coastal Engineering from the UNESCO-IHE Netherlands in 2014. Has joined Pelindo III since 1999 in Engineering with a work period of 20 years. Once served as the Director of a Second-Tier Subsidiary in Pelindo III Group.</i></p>
9.		Angga Pradiptya	<p>Senior Manager Supervisi Investasi Teknik Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan April tahun 1977. Mendapatkan gelar Pascasarjana di Bidang Teknik. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Supervisi Investasi Teknik sejak 2017.</p> <p>Senior Vice President Port Engineering Supervision <i>Indonesian citizen born in Surabaya in April 1977. Earned a Master's Degree in Engineering. Started his career at Pelindo III in 1999. Has been serving as SVP Port Engineering Supervision since 2017.</i></p>
10.		Seno Buidiarto	<p>Senior Manager Akuntansi dan Anggaran Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Berau Kalimantan Timur pada bulan Juni tahun 1979. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2006 di Bidang Keuangan. Menjabat sebagai Senior Manager Akuntansi dan Anggaran sejak 2019.</p> <p>Senior Vice President Accounting and Budget <i>Indonesian citizen born in Berau in June 1979. Started his career at Pelindo III in 2006 in Finance. Has been serving as the SVP Accounting and Budget since 2019.</i></p>

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
11.		Yoni Setiawan	<p>Senior Manager Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Semarang pada bulan Juni tahun 1977. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2006 pada Bidang Perpajakan. Menjabat sebagai Senior Manager Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan sejak 2017.</p> <p>Senior Vice President Finance and Treasury, and Tax <i>Indonesian citizen born in Semarang in June 1977. Started his career at Pelindo III in 2006 in Taxation. Has been serving as SVP Finance and Treasury, and Tax since 2017.</i></p>
12.		Suroso Wahyu Prihar	<p>Senior Manager Shared Service Center Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Februari tahun 1973. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1999 pada Bidang Keuangan. Menjabat sebagai Senior Manager Shared Service Center sejak Mei 2019.</p> <p>Senior Vice President Shared Service Center <i>Indonesian citizen born in Surabaya in February 1973. Started his career at Pelindo III in 1999 in Finance. Has been serving as the SVP Shared Service Center since May 2019.</i></p>
13.		Fahrus Salam	<p>Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Pamekasan pada bulan Februari tahun 1983. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2006 pada Bidang Pengelolaan Lingkungan dan K3. Menjabat sebagai Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan sejak 2016.</p> <p>Senior Vice President Subsidiary Management <i>Indonesian citizen born in Pamekasan in February 1983. Started his career at Pelindo III in 2006 in Environmental Management and K3. Has been serving as SVP Subsidiary Management since 2016.</i></p>
14.		I Putu Sukadana	<p>Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Denpasar pada bulan Juli tahun 1976. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1998 pada Bidang Usaha. Menjabat sebagai Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE sejak Juli 2019.</p> <p>Senior Vice President Human Capital System and Strategy <i>Indonesian citizen born in Denpasar in July 1976. Started his career at Pelindo III in 1998 in Business Segment. Has been serving as SVP Human Capital System and Strategy since July 2019.</i></p>
15.		Edi Priyanto	<p>Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Klaten pada bulan Oktober 1976. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM sejak Juli 2019.</p> <p>Senior Vice President Human Capital Services and HSSE <i>Indonesian citizen born in Klaten in October 1976. Started his career at Pelindo III in 1999. Has been serving as SVP Human Capital Services and HSSE since July 2019.</i></p>







NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
16.		Rudi Herdiyantoro	<p>Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Januari tahun 1983. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2009 pada Bidang Keuangan. Menjabat sebagai Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat sejak Juli 2019.</p> <p>Senior Vice President General Affair/Head Office <i>Indonesian citizen born in Surabaya in January 1983. Started his career at Pelindo III in 2009 in Finance. Has been serving as SVP General Affair/Head Office since July 2019.</i></p>
17.		Ismartadianto	<p>Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Juni 1968. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1998. Menjabat sebagai Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa sejak Juli 2019.</p> <p>Senior Vice President Procurement <i>Indonesian citizen born in Surabaya in June 1968. Started his career at Pelindo III in 1998. Has been serving as the SVP Procurement since July 2019.</i></p>
18.		Kumara Anindhita Widyaswendra	<p>Senior Manager Hukum Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 1984. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 2009 pada Bidang Peraturan Perusahaan dan Bantuan Hukum. Menjabat sebagai Senior Manager Hukum sejak 2017.</p> <p>Senior Vice President Legal <i>Indonesian citizen born in Yogyakarta in August 1984. Started his career at Pelindo III since 2009 in the Corporate Regulation and Legal Aid. Has been serving as SVP Legal since 2017.</i></p>
19.		Agus Hermawan	<p>Senior Manager Pengembangan Bisnis Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Oktober 1973. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1998 pada Bidang Biro Hukum, Human, dan Hubungan Internasional. Menjabat sebagai Senior Manager Pengembangan Bisnis sejak 2018.</p> <p>Senior Vice President Business Development <i>Indonesian citizen born in Surabaya in October 1973. Started his career at Pelindo III since 1998 in the Law, Human and International Relations Bureau. Has been serving as SVP Business Development since 2018.</i></p>
20.		Firmaniansyah	<p>Senior Manager Manajemen Perubahan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Tabalong pada bulan Januari 1968. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1998 di Bidang Teknologi Informasi. Menjabat sebagai Senior Manager Manajemen Perubahan sejak 2019.</p> <p>Senior Vice President Change Management <i>Indonesian citizen born in Tabalong in January 1968. Started his career at Pelindo III in 1998 in Information Technology. Has been serving as SVP Change Management since 2019.</i></p>
21.		Prasetyo	<p>Senior Manager Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Mojokerto pada bulan Mei 1970. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan sejak 2016.</p> <p>Senior Vice President Strategic Planning and Corporate Performance <i>Indonesian citizen born in Mojokerto in May 1970. Started his career at Pelindo III in 1999. Has been serving as SVP Strategic Planning and Corporate Performance since 2016.</i></p>






DAFTAR DAN PROFIL GENERAL MANAGER

LIST AND PROFILE OF GENERAL MANAGERS

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
1.		Onny Djayus	<p>CEO Regional Jawa Timur Warga Negara Indonesia lahir di Ujung Pandang tanggal 12 Desember 1964. Mendapatkan gelar Master Marine tahun 2008. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1999 sebagai pegawai yang diperbantukan pada PT Pelindo Marine Service. Pernah menjadi General Manager Cabang Kota Baru tahun 2013 dan kini menjabat sebagai CEO Regional Jawa Timur sejak tahun 2018.</p> <p>Regional CEO of East Java <i>Indonesian citizen born in Ujung Pandang on 12 December 1964. Earned a Master of Marine degree in 2008. Started his career at Pelindo III in 1999 as an employee seconded to PMS. He was a General Manager of Kota Baru Branch in 2013 and has been serving as the Regional CEO of East Java since 2018.</i></p>
2.		M. Amiroel Koesni	<p>General Manager Terminal Nilam Mirah Warga Negara Indonesia kelahiran Sumenep tanggal 9 Februari 1965. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari STIE Indonesia Malang tahun 2013. Mengawali karirnya di Pelindo III pada tahun 1998 sebagai Pandu Laut di Banjarmasin. Kini menjabat sebagai General Manager Terminal Nilam Mirah mulai tahun 2018.</p> <p>General Manager of Nilam Mirah Terminal <i>Indonesian citizen born in Sumenep on 9 February 1965. Earned his Master's Degree in Management from STIE Indonesia Malang in 2013. Started his career at Pelindo III in 1998 as a Sea Pilot in Banjarmasin. Currently serving as the General Manager of Nilam Mirah Terminal since 2018.</i></p>
3.		Imran Rasidi	<p>General Manager Terminal Jamrud Warga Negara Indonesia kelahiran Denpasar tanggal 26 Mei 1976. Mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Muhammadiyah tahun 2004. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999 pada Dinas Pelayanan Medis pada PHC. Pada 2000 beralih pada Subdinas Administrasi dan Keuangan pada Cabang Pelabuhan Tenau Kupang. Tahun 2010 menjabat sebagai Manager Pelabuhan Badas. Menjabat sebagai General Manager Terminal Jamrud mulai tahun 2018.</p> <p>General Manager of Jamrud Terminal <i>Indonesian citizen born in Denpasar on 26 May 1976. Earned a bachelor's degree from Universitas Muhammadiyah in 2004. Started his career at Pelindo III since 1999 at the Medical Services Office at PHC. In 2000 he transferred to the Administration and Finance Sub-Office at Port of Tenau Kupang Branch. In 2010 he served as Manager of Port of Badas. Has been serving as General Manager of Jamrud Terminal since 2018.</i></p>
4.		Tri Sugiyatno	<p>General Manager Pelabuhan Kalimas Warga Negara Indonesia kelahiran Sukoharjo tanggal 30 Oktober 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Nusantara Pangkalan Bun pada bidang Ekonomi Manajemen tahun 2005. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2000 sebagai Pelaksana Pembantu Administrasi I pada Cabang Kumai. Pada tahun 2007 Menjabat sebagai Asisten Manager Kawasan Sukamara; tahun 2016 menjabat sebagai Manager Pelabuhan Batulicin; dan kini menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kalimas mulai tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Kalimas <i>Indonesian citizen born in Sukoharjo on 30 October 1970. Earned a Bachelor's Degree in Economics from STIE Nusantara Pangkalan Bun in Economics Management in 2005. Started his career at Pelindo III in 2000 as Administrative Assistant I at the Kumai Branch. In 2007 he served as Assistant Manager of the Sukamara Region; in 2016 served as Manager of the Port of Batulicin, and now serving as the General Manager of Kalimas Port since 2018.</i></p>
5.		Yanto	<p>General Manager Pelabuhan Gresik Warga Negara Indonesia kelahiran Sumenep tanggal 4 April 1974. Mendapatkan gelar Sarjana Sosial dengan jurusan Administrasi Negara dari Universitas Wiraraja tahun 2006. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 2000 sebagai Pelaksana Pembantu Administrasi I di Pelabuhan Gresik, tahun 2010 sebagai Pelaksana Senior pada Sub Divisi Treasury. Mulai tahun 2018 menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Gresik.</p> <p>General Manager Port of Gresik <i>Indonesian citizen born in Sumenep on 4 April 1974. Earned a Bachelor's Degree in State Administration from Universitas Wiraraja in 2006. Started his career at Pelindo III in 2000 as the Administrative Assistant I at Port of Gresik, then in 2010 as Senior Implementer in the Treasury Sub-Division. Since 2018 has been serving as the General Manager Port of Gresik.</i></p>

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
6.		Dhany Rachmad Agustian	<p>General Manager Pelabuhan Tanjung Tembaga Warga Negara Indonesia kelahiran Rogo Jampi tanggal 17 Agustus 1974. Mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Dr. Soetomo tahun 1997. Mengawali karirnya di Pelindo III sejak tahun 1999 pada Subdirektorat Administrasi dan Pembinaan Pers Kantor Pusat. Pada tahun 2010 menjabat sebagai Manager Kantor Perwakilan. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Tembaga mulai tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Tanjung Tembaga Indonesian citizen born in Rogo Jampi on 17 August 1974. Earned a Bachelor's Degree in State Administration from Universitas Dr Soetomo in 1997. Started his career at Pelindo III since 1999 at the Administration and Press Development Sub-Directorate at the Head Office. In 2010 he served as Manager of Representative Offices. Has been serving as General Manager Port of Tanjung Tembaga since 2018.</p>
7.		Bheneke Pria Panca	<p>General Manager Pelabuhan Kalianget Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 14 Desember 1975. Mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari STIAMAK Barunawati Surabaya tahun 2008. Memulai karir di Pelindo III tahun 2008 sebagai Staf Pelaksana Junior pada bidang Pemanduan, Penundaan, dan Pengepilan di Pelabuhan Tanjung Perak. Menjabat sebagai Supervisor Bongkar Muat Peti Kemas tahun 2015 pada Cabang Tenau/Kupang. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kalianget tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Kalianget Indonesian citizen born in Surabaya on 14 December 1975. Earned a Bachelor's Degree in Business Administration from STIAMAK Barunawati Surabaya in 2008. Started his career at Pelindo III in 2008 as a Junior Staff in Pilotage, Tugboat, and Mooring in Port of Tanjung Perak. Appointed as Container Lading Unloading Supervisor in 2015 at Tenau/Kupang Branch. Has been serving as General Manager Port of Kalianget since 2018.</p>
8.		Boy Robyanto	<p>CEO Regional Kalimantan Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 28 Desember 1973. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Achmad Yani Banjarmasin tahun 2002. Memulai karir di Pelindo III pada tahun 1999 sebagai Pelaksana Administrasi II pada bidang Perencanaan dan Administrasi Teknik Kantor Pusat, tahun 2011 sebagai Asisten Manajer Perencanaan dan Administrasi Teknik Tanjung Perak, tahun 2016 menduduki posisi sebagai General Manager Cabang Tenau/Kupang dan tahun 2018 menjabat sebagai CEO Regional Kalimantan.</p> <p>Regional CEO of Kalimantan Indonesian citizen born in Surabaya on 28 December 1973. Earned his Bachelor's Degree in Engineering from Universitas Achmad Yani Banjarmasin in 2002. Started his career at Pelindo III in 1999 as the Administrative Executor II in Planning and Technical Administration of Head Office, in 2011 as the Assistant Planning Manager and Engineering Administration in Tanjung Perak, in 2016 he was the General Manager of Tenau/Kupang Branch and has been serving as the Regional CEO of Kalimantan since 2018.</p>
9.		I Nyoman Sudiarta	<p>General Manager Terminal P/K Banjarmasin Warga Negara Indonesia kelahiran Denpasar tanggal 25 Desember 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Dwijendra Denpasar tahun 2003. Memulai Karir di Pelindo III pada tahun 1998 sebagai Pelaksana Pembantu Administrasi I di Pelabuhan Benoa, tahun 2004 menjabat sebagai Teknisi Peralatan Pelabuhan dan Administrasi Teknik, tahun 2014 menjabat sebagai Asisten Manajer Operasi Peti Kemas di Banjarmasin. Menjabat Sebagai General Manager Terminal P/K Banjarmasin sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager of Banjarmasin P/K Terminal Indonesian citizen born in Denpasar on 25 December 1970. Earned his Bachelor's Degree in Laws degree from Universitas Dwijendra Denpasar in 2003. Started his career at Pelindo III in 1998 as the Administrative Assistant I at Port of Benoa, in 2004 served as a Port Equipment Technician and Technical Administration, in 2014 served as Assistant Manager of Container Operations in Banjarmasin. Has been serving as General Manager of Banjarmasin P/K Terminal since 2018.</p>
10.		Jasri	<p>General Manager Pelabuhan Trisakti Warga Negara Indonesia kelahiran Kotabaru tanggal 15 Agustus 1965. Mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik dari STIA Bina Banua tahun 2010. Memulai karir di Pelindo III sebagai Pelaksana Administrasi Keuangan II di tahun 1993, sebagai Kepala Subdinan Pemanduan Kotabaru tahun 2004, Manager Komersial Kotabaru tahun 2014. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Trisakti Sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Trisakti Indonesian citizen born in Kotabaru on 15 August 1965. Earned his Master's Degree in Public Administration from STIA Bina Banua in 2010. Started his career at Pelindo III as the Executive Administration of Finance II in 1993, as the Head of Kotabaru Piloting Sub-Office in 2004, Kotabaru Commercial Manager in 2014. Has been serving as General Manager Port of Trisakti Since 2018.</p>
11.		Marolop Alfred E. T.	<p>General Manager Pelabuhan Kotabaru Warga Negara Indonesia kelahiran Sidikalang Sumatra Utara tanggal 4 November 1969. Mendapatkan gelar Master Marine sebagai Ahli Nautika Tingkat I dari STIP Jakarta tahun 2013. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2002 sebagai Pandu Muda I di Banjarmasin. Tahun 2014 sebagai Asisten Manager Pelayanan Kapal Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Tahun 2015 sebagai Manager Operasi di Pelabuhan Kotabaru. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kotabaru sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Kotabaru Indonesian citizen born in Sidikalang, North Sumatra on 4 November 1969. Earned a Master Marine degree as a Level I Nautical Expert from STIP Jakarta in 2013. Started his career at Pelindo III since 2002 as Junior Pilot I in Banjarmasin. In 2014, served as the Assistant Manager of Ship Service in Port of Tanjung Emas Semarang. In 2015 served as the Operations Manager at Port of Kotabaru. Has been serving as General Manager Port of Kotabaru since 2018.</p>

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
12.		Zainal Abidin	<p>General Manager Pelabuhan Sampit Warga Negara Indonesia kelahiran Kotabaru tanggal 27 Juni 1966. Mendapatkan gelar Magister Sains dari Universitas Darul Ulum tahun 2004. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 1998 pada bidang Keuangan. Tahun 2009 menjadi Manager Keuangan Pelabuhan Tanjung Wangi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Sampit sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Sampit <i>Indonesian citizen born in Kotabaru on 27 June 1966. He earned his Master's Degree in Science from Universitas Darul Ulum in 2004. Started his career at Pelindo III since 1998 in Finance. In 2009 served as the Financial Manager in Port of Tanjung Wangi. Has been serving as General Manager Port of Sampit since 2018.</i></p>
13.		Irsyam Bakri	<p>General Manager Pelabuhan Bagendang Warga Negara Indonesia kelahiran Ujung Pandang tanggal 4 Maret 1971. Meraih gelar Ahli Nautika Tingkat I dari BP3IP Jakarta tahun 2002. Mengawali karir di Pelindo III di bidang Pemanduan pada Subdinas Operasi Pemanduan tahun 2016. Tahun 2016 menjabat sebagai Manager Komersial Cabang Kotabaru. Kini Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bagendang sejak Tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Bagendang <i>Indonesian citizen born in Ujung Pandang on 4 March 1971. Earned a degree as a Level I Nautical Expert from BP3IP Jakarta in 2002. Started his career at Pelindo III in Pilotage in the Pilotage Operations Sub-Office in 2016. He served as the Commercial Manager in Kotabaru Branch. Has been serving as General Manager Port of Bagendang since 2018.</i></p>
14.		Syahrial Murjani	<p>General Manager Pelabuhan Kumai Warga Negara Indonesia kelahiran Banjarmasin tanggal 26 April 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat di bidang Ekonomi Manajemen. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2000 sebagai Pelaksana Administrasi II. Tahun 2010 sebagai Supervisor pada Dinas Pendapatan. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kumai Sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Kumai <i>Indonesian citizen born in Banjarmasin on 26 April 1970. Received a Bachelor's Degree in Economics from Universitas Lambung Mangkurat in Management Economics. Started his career at Pelindo III since 2000 as Administrative Executor II. In 2010 served as a Supervisor at the Revenue Agency. Has been serving as General Manager Port of Kumai since 2018.</i></p>
15.		Marolop Alfred Edward Tampubolon	<p>General Manager Pelabuhan Bumiharjo Warga Negara Indonesia kelahiran Sidikalang Sumatera Utara tanggal 4 November 1969. Meraih gelar Ahli Nautika Tingkat I dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta tahun 2013. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2002 di bidang Pemanduan pada Subdinas Operasi Pemanduan Banjarmasin. Tahun 2015 menjabat sebagai Manager Operasi pada Divisi Operasi Kotabaru. Kini Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bumiharjo sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Bumiharjo <i>Indonesian citizen born in Sidikalang, North Sumatra on 4 November 1969. Earned a degree as a Level I Nautical Expert from STIP Jakarta in 2013. Started his career at Pelindo III since 2002 in Pilotage in Pilotage Operations Sub-Office in Banjarmasin. In 2015 served as the Operations Manager at Kotabaru Operations Division. Has been serving as General Manager Port of Bumiharjo since 2018.</i></p>
16.		Adji Djoko	<p>General Manager Pelabuhan Batulicin Warga Negara Indonesia kelahiran Semarang tanggal 16 Februari 1965. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Wijaya Putra tahun 2002. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 1993 sebagai Operator Head Truck (HT) pada bidang Dinas Peralatan Head Truck Forklift di TPS. Menjabat sebagai Asisten Manajer Pengamanan di Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2016. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Batulicin sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Batulicin <i>Indonesian citizen born in Semarang on 16 February 1965. Earned a Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Universitas Wijaya Putra in 2002. Started his career at Pelindo III since 1993 as a Head Truck (HT) Operator in Head Truck Forklift Equipment Agency in TPS. Served as Assistant Manager of Security at Port of Tanjung Perak in 2016. Has been serving as General Manager Port of Batulicin since 2018.</i></p>
17.		Agus Mulyansyah	<p>General Manager Pelabuhan Pulang Pisau Warga Negara Indonesia kelahiran Kotabaru tanggal 1 Agustus 1969. Mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Universitas Lambung Mangkurat pada bidang Ilmu Pemerintahan. Mengawali karir di Pelindo III pada Bidang Umum tahun 2000. Menjabat sebagai Supervisor Pemasaran dan Aneka Usaha Cabang Kotabaru tahun 2012. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Pulang Pisau sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Pulang Pisau <i>Indonesian citizen born in Kotabaru on 1 August 1969. Earned a Bachelor's Degree in Governmental Science from Universitas Lambung Mangkurat. Started his career at Pelindo III in General Affairs in 2000. Served as Marketing and Multifarious Supervisor of Kotabaru Branch in 2012. Has been serving as General Manager Port of Pulang Pisau since 2018.</i></p>

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
18.		Dody Eko Saputro	<p>General Manager Pelabuhan Mekarputih Warga Negara Indonesia kelahiran Klaten tanggal 14 Desember 1975. Mendapatkan gelar Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I) dari STIP Jakarta tahun 2008. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2010 di bidang Pelayanan Kapal. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Mekar Putih sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Mekarputih Indonesian citizen born in Klaten on 14 December 1975. Earned a degree as a Level I Nautical Expert (ANT-I) from STIP Jakarta in 2008. Started his career at Pelindo III since 2010 in Ship Services. Has been serving as General Manager Port of Mekar Putih since 2018.</p>
19.		Arief Prabowo	<p>CEO Regional Jawa Tengah Warga Negara Indonesia kelahiran Yogyakarta tanggal 3 Mei 1971. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Mengawali Karir di Pelindo III pada tahun 1996 pada bidang Personalia. Menjabat sebagai CEO Regional Jawa Tengah sejak tahun 2018.</p> <p>CEO Regional Jawa Tengah Indonesian citizen born in Yogyakarta on 3 May 1971. Earned a Master's Degree in Management from Universitas Gadjah Mada. Started his career at Pelindo III in 1996 in Personnel. Has been serving as Regional CEO of Central Java since 2018.</p>
20.		Fariz Hariyoso	<p>General Manager Pelabuhan Tanjung Emas Warga Negara Indonesia kelahiran Banyuwangi tanggal 29 Juli 1973. Mendapatkan gelar Master Marine dari STIP Jakarta di 2006. Mengawali karir di Pelindo III pada tahun 2004 pada bidang Pemanduan. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Emas sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Tanjung Emas Indonesian citizen born in Banyuwangi on 29 July 1973. Earned a Master Marine degree from STIP Jakarta in 2006. Started his career at Pelindo III in 2004 in Pilotage. Has been serving as General Manager Port of Tanjung Emas since 2018.</p>
21.		Recky Julius Uruilal	<p>General Manager Terminal P/K Semarang Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta tanggal 29 Desember 1966. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Wijaya Kusuma tahun 2014. Mengawali karir di Pelindo III pada sebagai Pandu Laut tahun 2000. Menjabat sebagai General Manager Terminal P/K Semarang sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager of P/K Terminal Semarang Indonesian citizen born in Jakarta on 29 December 1966. Earned a Master's Degree in Management from Universitas Wijaya Kusuma in 2014. Started his career at Pelindo III as a Marine Pilot in 2000. Has been serving as General Manager of P/K Terminal Semarang since 2018.</p>
22.		Edwardnul Johar	<p>General Manager Pelabuhan Tanjung Intan Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 8 Desember 1971. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 1998 di bidang Biro Data dan Informasi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Intan sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Tanjung Intan Indonesian citizen born in Surabaya on 8 December 1971. Earned a Master's Degree in Management from Universitas Gadjah Mada. Started his career at Pelindo III since 1998 in Data and Information Bureau. Has been serving as General Manager Port of Tanjung Intan since 2018.</p>
23.		Tri Bagus Digdoyo Putro	<p>General Manager Pelabuhan Tegal Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 8 Oktober 1969. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Merdeka Malang tahun 1996 pada bidang Teknik Sipil. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2000 pada bidang Pengembangan SDM. Pernah menjadi Manager Teknik di Pelabuhan Tanjung Wangi tahun 2011. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tegal sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Tegal Indonesian citizen born in Surabaya on 8 October 1969. Earned a Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Merdeka Malang in 1996. Started his career at Pelindo III since 2000 in HR Development. He was a Technical Manager at Port of Tanjung Wangi in 2011. Has been serving as General Manager Port of Tegal since 2018.</p>

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
24.		I Wayan Eka Saputra	<p>CEO Regional Bali Nusra Warga Negara Indonesia kelahiran Bangli tanggal 10 Oktober 1974. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari STIE Bank BPD Jawa Tengah tahun 2017. Memulai karir di Pelindo III pada tahun 1998 pada bidang Tata Usaha Keuangan. Tahun 2016 menjabat sebagai Manager Keuangan di Banjarmasin. Menjabat sebagai CEO Regional Bali Nusra sejak tahun 2018.</p> <p>Regional CEO of Bali Nusra Indonesian citizen born in Bangli on 10 October 1974. Earned a Master's Degree in Management from STIE Bank BPD Jawa Tengah in 2017. Started his career at Pelindo III in 1998 in Financial Administration. In 2016 he served as Finance Manager in Banjarmasin. Has been serving as Regional CEO of Bali Nusra since 2018.</p>
25.		A. A. Gede Mataram	<p>General Manager Pelabuhan Benoa Warga Negara Indonesia kelahiran Denpasar tanggal 25 Juni 1974. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari UPN Denpasar tahun 1998. Memulai karir di Pelindo III pada tahun 2000 pada bidang Pengembangan SDM. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Benoa Sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Benoa Indonesian citizen born in Denpasar on 25 June 1974. Earned a Bachelor's Degree in Law from UPN Denpasar in 1998. Started his career at Pelindo III in 2000 in HR Development. Has been serving as General Manager Port of Benoa since 2018.</p>
26.		Baharuddin	<p>General Manager Pelabuhan Tenau Kupang Warga Negara Indonesia kelahiran Tala tanggal 1 Desember 1966. Mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Universitas Samawa pada bidang Administrasi Negara tahun 2002. Memulai karir di Pelindo III pada tahun 1998 pada bidang Dinas Operasi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tenau Kupang sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Tenau Kupang Indonesian citizen born in Tala on 1 December 1966. Earned a Bachelor's Degree in State Administration from Universitas Samawa in 2002. Started his career in Pelindo III since 1998 in Operations. Has been serving as General Manager Port of Tenau Kupang since 2018.</p>
27.		Made Rusli Suniajaya	<p>General Manager Pelabuhan Lembar Warga Negara Indonesia kelahiran Bandung tanggal 27 September 1967. Mendapatkan gelar Sarjana Pertanian lulusan Universitas Udayana tahun 1991. Memulai karir di Pelindo III pada tahun 1997 pada Subdinas Pemanduan Pelabuhan Benoa. Tahun 2012 menjabat sebagai Manager Terminal Pelabuhan Lembar. Kini menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Lembar sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Lembar Indonesian citizen born in Bandung on 27 September 1967. Earned a Bachelor's Degree in Agriculture from Universitas Udayana in 1991. Started his career at Pelindo III in 1997 at Pilotage Sub-Office in Port of Benoa. In 2012 he served as Terminal Manager Port of Lembar. Has been serving as General Manager Port of Lembar since 2018.</p>
28.		Wahyu Wirawan	<p>General Manager Pelabuhan Bima Warga Negara Indonesia kelahiran Banjarmasin tanggal 8 September 1979. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember tahun 2007. Memulai karir di Pelindo III pada tahun 2009 pada bidang Subdinas DUKS dan Usaha Terminal. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bima sejak akhir tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Bima Indonesian citizen born in Banjarmasin on 8 September 1979. Earned a Bachelor's Degree in Economics from the Institut Teknologi Sepuluh Nopember in 2007. Started his career at Pelindo III in 2009 in the DUKS and Terminal Business Sub-Office. Has been serving as General Manager Port of Bima since the end of 2018.</p>
29.		Moh. Nizar Fauzi	<p>General Manager Pelabuhan Tanjung Wangi Warga Negara Indonesia kelahiran Banyuwangi tanggal 12 Agustus 1971. Lulus dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tahun 2008. Mengawali karir di Pelindo III pada tahun 1997 pada bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga di Tanjung Wangi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Wangi sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Tanjung Wangi Indonesian citizen born in Banyuwangi on 12 August 1971. Graduated from the Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi in 2008. Started his career at Pelindo III in 1997 in the fields of Administration and Households in Tanjung Wangi. Has been serving as General Manager Port of Tanjung Wangi since 2018.</p>

NO.	FOTO PHOTO	NAMA NAME	KETERANGAN DESCRIPTION
30.		Rio Dwi Santoso	<p>General Manager Pelabuhan Celukan Bawang Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya tanggal 30 Januari 1976. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Yos Sudarso Surabaya tahun 2005. Mengawali karir di Pelindo III pada bidang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2008. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Celukan Bawang sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Celukan Bawang Indonesian citizen born in Surabaya on 30 January 1976. He earned a Bachelor's Degree in Economics from Universitas Yos Sudarso Surabaya in 2005. Started his career at Pelindo III in Goods and Services Procurement Planning in 2008. Has been serving as General Manager Port of Celukan Bawang since 2018.</p>
31.		Yuvensius Andri Kartiko	<p>General Manager Pelabuhan Maumere Warga Negara Indonesia kelahiran Ngawi tanggal 1 Juni 1972. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Flores tahun 2012. Mengawali karir di Pelindo III pada bagian Umum tahun 1996. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Maumere sejak tahun 2017.</p> <p>General Manager Port of Maumere Indonesian citizen born in Ngawi on 1 June 1972. Earned a Bachelor's Degree in Economics Management from Universitas Flores in 2012. Started his career at Pelindo III in General Affairs in 1996. Has been serving as General Manager Port of Maumere since 2017.</p>
32.		Hadi Sukamto	<p>General Manager Pelabuhan Ende-Ippi Warga Negara Indonesia kelahiran Jombang tanggal 17 Agustus 1971. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Yos Soedarso tahun 2003. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2000 di bagian Aneka Usaha dan Pemasaran. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Ende-Ippi sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Ende-Ippi Indonesian citizen born in Jombang on 17 August 1971. He received a Bachelor's Degree in Economics in Management from Universitas Yos Soedarso in 2003. Started his career at Pelindo III since 2000 in the Miscellaneous Business and Marketing section. Has been serving as General Manager Port of Ende-Ippi since 2018.</p>
33.		Joko Budi Santoso	<p>General Manager Pelabuhan Waingapu Warga Negara Indonesia kelahiran Boyolali tanggal 25 Oktober 1978. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Mengawali karir di Pelindo III pada bidang Keuangan tahun 2009. Menjabat sebagai General manager Pelabuhan Waingapu sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Waingapu Indonesian citizen born in Boyolali on 25 October 1978. Earned a Bachelor's Degree in Economics Management from Universitas Gadjah Mada in 2003. Started his career at Pelindo III in Finance in 2009. Has been serving as General Manager Port of Waingapu since 2018.</p>
34.		Alief Waliy Akbar	<p>General Manager Pelabuhan Kalabahi Warga Negara Indonesia kelahiran Samarinda tanggal 12 Maret 1975. Mengawali karir di Pelindo III sejak tahun 2008 pada Subdinas Perbendaharaan Pelabuhan Benoa. Tahun 2016 beralih pada Unit Pengendalian Operasi Kapal. Kini Menjabat sebagai General manager Pelabuhan Kalabahi sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Kalabahi Indonesian citizen born in Samarinda on 12 March 1975. Started his career at Pelindo III since 2008 at Treasury Sub-Office in Port of Benoa. In 2016 he transferred to the Ship Operation Control Unit. Has been serving as General Manager Port of Kalabahi since 2018.</p>
35.		Yudha Rizkie Kurniawan	<p>General Manager Pelabuhan Badas Warga Negara Indonesia kelahiran Banjarmasin tanggal 8 September 1979. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Teknologi Surabaya tahun 2008. Mengawali karir di Pelindo III pada Subdinas DUKS dan Usaha Terminal Pelabuhan Sampit tahun 2009. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Badas sejak tahun 2018.</p> <p>General Manager Port of Badas Indonesian citizen born in Banjarmasin on 8 September 1979. Earned a Bachelor's Degree in Economics Management from Universitas Teknologi Surabaya in 2008. Started his career at Pelindo III in the DUKS and Terminal Business Sub-Office in Port of Sampit in 2009. Has been serving as General Manager Port of Badas since 2018.</p>

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pelindo III adalah Negara Republik Indonesia sebesar 100% nilai saham Perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 14 Ayat 1 tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Negara.

SHAREHOLDER STRUCTURE

The Major and Controlling Shareholder of Pelindo III is the Republic of Indonesia with 100% shares of the Company. According to Article 14 Paragraph 1 of Law No. 19 of 2003 regarding SOE, the Minister of SOE acts as the GMS in case all shares of the Company are owned by the Country.



PEMEGANG SAHAM 5 PERSEN ATAU LEBIH

Hingga 31 Desember 2019, kepemilikan saham Perusahaan dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 100% dengan jenis saham Dwiwarna. Dengan persentase tersebut, dapat diinformasikan bahwa Pemegang Saham dengan kepemilikan 5% atau lebih adalah Pemerintah Republik Indonesia.

SHAREHOLDER OF 5% SHARES OR MORE

As of 31 December 2019, the Company shares are fully owned by the Government of Republic of Indonesia with 100% of the shareholding of Dwiwarna shares (golden shares). Hence, it can be stated that the Shareholder of 5% shares or more is the Government of the Republic of Indonesia.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

NO	NAMA NAME	JABATAN POSITION	KETERANGAN KEPEMILIKAN SAHAM (YA/TIDAK) SHARE OWNERSHIP (YES/NO)	JUMLAH LEMBAR SAHAM YANG DIMILIKI NUMBER OF OWNED SHARES	JUMLAH NOMINAL YANG DIMILIKI NOMINAL VALUES OF OWNED SHARES	PERSENTASE PERCENTAGE
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
1.	Ahmad Bambang ¹	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
2.	Zainal Abidin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
3.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris <i>Commissioner</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
4.	Heddy Lugito	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
5.	Dedi Syarif Usman	Komisaris <i>Commissioner</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
6.	Hari Bowo ¹	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors						
1.	Doso Agung	Direktur Utama <i>President Director</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
2.	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial <i>Operations and Commercial Director</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
3.	Joko Noerhudha	Direktur Teknik <i>Engineering Director</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
4.	Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Director</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
5.	Irvandi Gustari ²	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
6.	Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Director</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None
7.	Iman Rachman ²	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Tidak No	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Keterangan:

- Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo berdasarkan Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019.
- Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019 menggantikan Iman Rachman berdasarkan Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019.

Information:

- Ahmad Bambang has been serving as the President Commissioner since 13 September 2019 to succeed Hari Bowo based on the Decree No. SK-206/MBU/09/2019.
- Irvandi Gustari has been serving as the Finance Director since 16 October 2019 to succeed Iman Rachman based on the Decree No. SK-219/MBU/10/2019.

PERNYATAAN

Berdasarkan informasi terkait kepemilikan saham yang telah disampaikan sebelumnya, yang menjelaskan kepemilikan saham mayoritas atau dengan persentase 100% dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, maka informasi terkait:

1. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok Pemegang Saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% dan
2. jumlah kepemilikan saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun dengan klasifikasi kepemilikan institusi lokal dan asing serta kepemilikan individu lokal dan asing

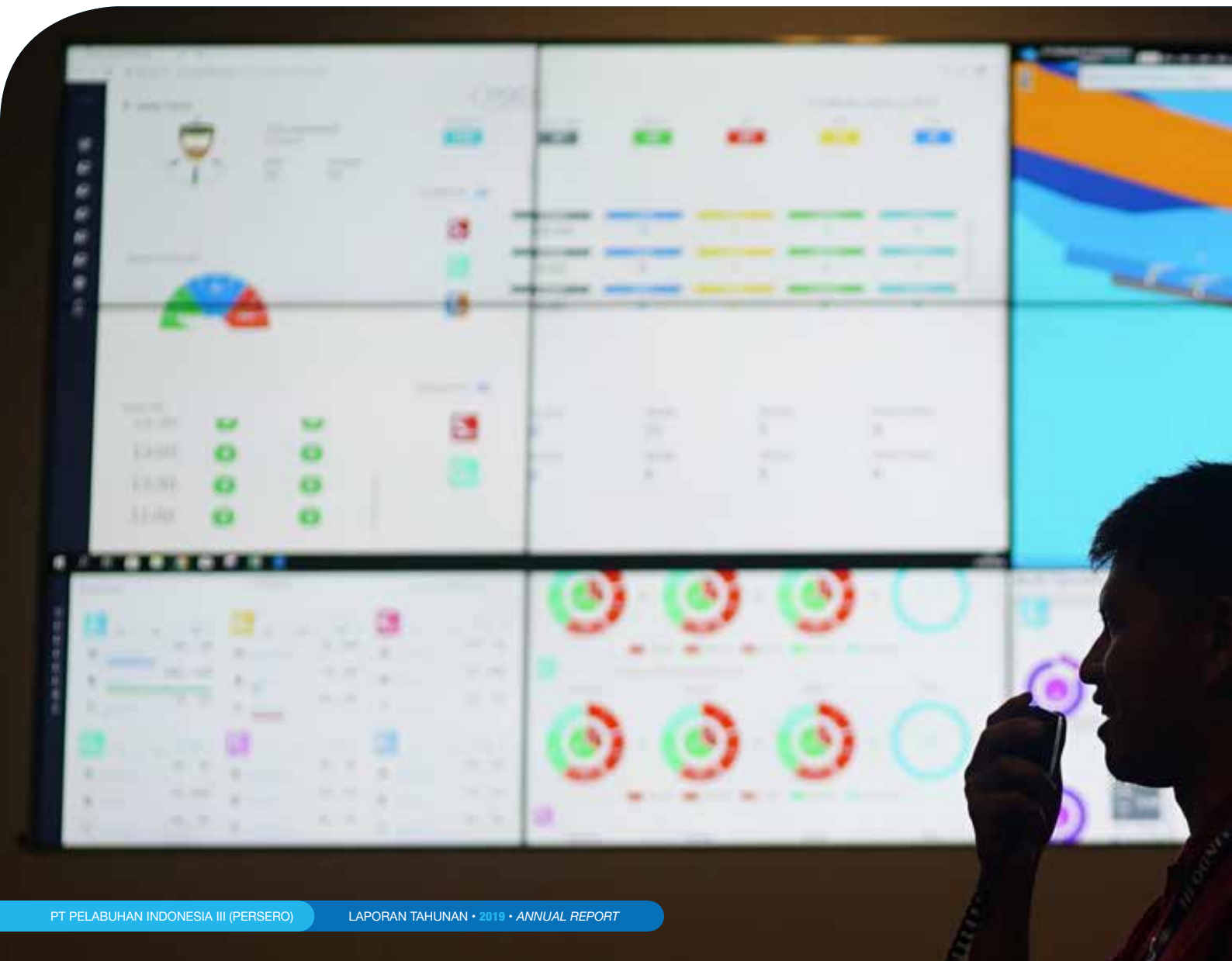
tidak disajikan di dalam laporan tahunan ini karena tidak terdapat kondisi dan data tersebut di Perusahaan.

STATEMENT

Based on the aforementioned information related to shareholding which stated that the majority Shareholder of 100% shares of the Company is owned by the Government of the Republic of Indonesia, information regarding:

- public shareholders, i.e. owners of less than 5% shares and
- number of shareholding and percentage of share ownership at the end of the year, with the classification of the local and foreign individual owner as well as the local and foreign institutional owner

is not presented in this annual report as there is no such condition and data in the Company.

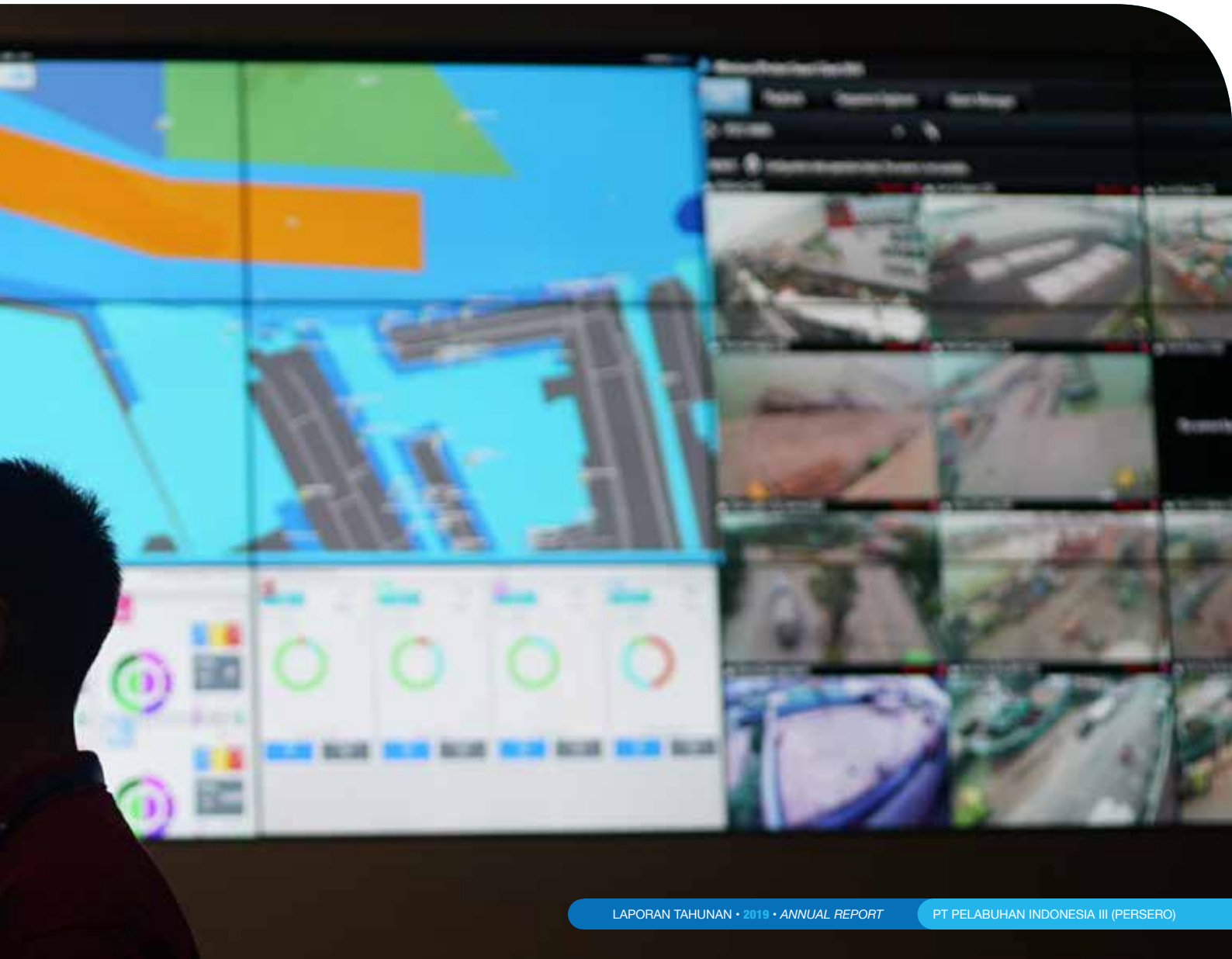


PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDER

Berdasarkan informasi yang disebutkan sebelumnya terkait struktur kepemilikan saham di Perusahaan, Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara langsung adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan komposisi saham sebesar 100%, baik dalam bentuk saham yang dicatatkan maupun portofolio.

Based on the aforementioned information related to the shareholding structure of the Company, the Majority and Controlling Shareholder of the Company is Government of the Republic of Indonesia with 100% ownership of issued shares and shares in the portfolio.



DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE ENTITIES

ANAK PERUSAHAAN

SUBSIDIARIES

PT TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA



OPERATOR TERMINAL PETI KEMAS UNTUK KAPAL INTERNASIONAL DAN DOMESTIK

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: Pelindo III (99,50%), Kopelindo III (0,50%)

Bidang Usaha:

- Penyediaan dan pelaksanaan perusahaan jasa pelayanan operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang, serta penyediaan dan perusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan peti kemas, dan air kapal bagi kapal-kapal peti kemas yang bertambat di terminal peti kemas.
- Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, perusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gedung dan parkir), serta usaha jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal peti kemas.
- Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas.
- Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan logistik untuk terminal peti kemas.
- Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan terminal peti kemas.

CONTAINER TERMINAL OPERATOR FOR INTERNATIONAL AND DOMESTIC SHIPS

Operational Status: Operating
Share Ownership: Pelindo III (99.50%), Kopelindo III (0.50%)

Business Sectors:

- Provision and services of ship operations, yard and warehouse operations, as well as the provision and services of mooring, docking, container stacking, and freshwater for container ships docking at the container terminal.
- Planning and development, management, enterprising and marketing new services, miscellaneous businesses (building and parking space rental), and other services related to container terminals.
- Provision, operations, and maintenance of facilities and equipment for container loading and unloading.
- Financial and logistics planning and management for container terminals.
- Education and training related to container terminal operations.

PT PELINDO HUSADA CITRA



JASA PELAYANAN KESEHATAN (RUMAH SAKIT DAN KLINIK)

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: Pelindo III (98,73%), Kopelindo III (1,27%)

Bidang Usaha:

- Melaksanakan pelayanan kesehatan.
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesehatan.
- Melaksanakan jasa konsultan manajemen kesehatan.
- Melaksanakan pelayanan farmasi dan peralatan kesehatan.
- Melaksanakan pelayanan gizi masyarakat.
- Melaksanakan pelayanan kebugaran kesehatan.
- Melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan lainnya.

HEALTHCARE SERVICES (HOSPITAL AND CLINIC)

Operational Status: Operating
Share Ownership: Pelindo III (98.73%), Kopelindo III (1.27%)

Business Sectors:

- Carrying out healthcare services.
- Carrying out healthcare education and training.
- Carrying out consulting services for healthcare management.
- Carrying out pharmacy and healthcare equipment services.
- Carrying out community nutrition services.
- Carrying out fitness services.
- Carrying out other activities in the field of healthcare.

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA



OPERATOR TERMINAL PETI KEMAS UNTUK KAPAL DOMESTIK DAN TERMINAL CURAH

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: Pelindo III (96,84%), Kopelindo III (3,16%)

Bidang Usaha:

- Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair, curah kering, dan *general cargo*) dan peti kemas.
- Konsolidasi, distribusi dan pengangkutan barang (*trucking*), serta multimoda *transport*.
- Jasa terminal kapal *roll on-roll off* (ro-ro).
- Jasa terminal bahan bakar minyak kapal dan suplai bahan bakar minyak kapal.
- Jasa terminal kapal ikan dan kegiatan pendukung.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, perusahaan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan antara lain:

CONTAINER TERMINAL OPERATOR FOR DOMESTIC SHIPS AND BULK TERMINAL

Operational Status: Operating
Share Ownership: Pelindo III (96.84%), Kopelindo III (3.16%)

Business Sectors:

- Loading-unloading terminal services for cargo (liquid bulk, dry bulk, and general cargo) as well as containers.
- Consolidation, goods distribution and transporting (*trucking*), and intermodal transport.
- Roll-on-roll-off (ro-ro) ship terminal.
- Ship fuel terminal and supply.
- Fishing ship terminal and supporting services.

Besides the main activities stated above, the company also carries out other business supporting the achievement of the company's objectives, namely:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; b. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsolidasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi terminal dan/atau kepelabuhanan; c. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, <i>cleaning</i>, fumigasi, serta pelayanan logistik; d. Jasa timbangan; e. Jasa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat bongkar muat peti kemas; dan f. Usaha-usaha penunjang untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Provision and/or services of warehouses, stacking fields, tankers, port transportation, loading-unloading equipment, and port equipment;</i> b. <i>Provision and management of consolidation, education, and training related to terminal and/or port operation management;</i> c. <i>The business and operations of container depots and repair, cleaning, fumigation, and logistics service;</i> d. <i>Weighing services;</i> e. <i>Maintenance and repair for container loading-unloading equipment; and</i> f. <i>Supporting businesses to achieve the company's goals and objectives.</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PT PELINDO MARINE SERVICE



PENYEDIA SARANA BANTU PELAYANAN PEMANDUAN

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: Pelindo III (98,23%), Kopelindo III (1,77%)

Bidang Usaha:

- a. Jasa angkutan di perairan.
- b. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan/atau jasa penundaan kapal.
- c. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa mendorong dan/atau menarik kapal.
- d. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa berbagai jenis kapal dan tongkang untuk kegiatan spesifik.
- e. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa galangan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal.
- f. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan pemenuhan kebutuhan logistik kapal dan/atau kru kapal.
- g. Penyediaan kru kapal.
- h. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, perusahaan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan, antara lain:

- a. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, *surveyor*, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi perkapalan;
- b. Penyediaan peralatan dan/atau perawatan peralatan di bidang perkapalan; dan
- c. Jasa penyelamatan dan penyelaman (*salvage*).

PILOTAGE SERVICE FACILITY PROVIDER

Operational Status: Operating
Share Ownership: Pelindo III (98.23%), Kopelindo III (1.77%)

Business Sectors:

- a. *Water transportation services.*
- b. *Facility provision and/or services of ship pilotage and/or tugging.*
- c. *Facility provision and/or services of ship tugging and/or towing.*
- d. *Facility provision and/or services of various ship types and barge for specific activities.*
- e. *Facility provision and/or services of shipyards for ship maintenance and/or repair.*
- f. *Facility provision and/or services of ship logistic supplies and/or ship crew.*
- g. *Provision or ship crew.*
- h. *Other facility provision and/or services related to vessel management and operations.*

Besides the main activities stated above, the company carries out other business activities that support the achievement of company objectives, namely:

- a. *Provision and management of consulting services, surveyor, education and training related to vessel operation management;*
- b. *Provision and/or maintenance of ship-related equipment; and*
- c. *Rescue and submersion (salvage) services.*

PT TERMINAL TELUK LAMONG



OPERATOR TERMINAL MULTI GUNA UNTUK KAPAL INTERNASIONAL DAN DOMESTIK

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: Pelindo III (99,50%), Kopelindo III (0,50%)

Bidang Usaha:

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
- Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih.
- Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
- Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, perusahaan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan, antara lain:

- Penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- Penyediaan depo peti kemas;
- Penyediaan pergudangan;
- Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- Instalasi air bersih dan listrik;
- Pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- Penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- Perawatan dan perbaikan kapal;
- Pengemasan dan pelabelan;
- Fumigasi dan pembersihan atau perbaikan peti kemas;
- Angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
- Tempat tunggu kendaraan bermotor;
- Kegiatan industri tertentu;
- Kegiatan perdagangan;
- Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- Jasa periklanan; dan/atau
- Perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi.

MULTIPURPOSE TERMINAL OPERATOR FOR INTERNATIONAL AND DOMESTIC SHIPS

Operational Status: Operating
Share Ownership: Pelindo III (99.50%), Kopelindo III (0.50%)

Business Sectors:

- Wharf provision and/or service for docking.
- Provision and/or service for fuel refill and clean water service.
- Provision and/or service for passengers and/or vehicles to get in and get off.
- Provision of wharf facility and/or service for goods and container loading and unloading activities.
- Provision and/or service of warehousing and hoarding, loading and unloading equipment, and port facilities.
- Terminal provision and/or service for containers, liquid bulk, dry bulk, and ro-ro.
- Provision and/or service for goods loading and unloading.
- Provision and/or service for the distribution centre and goods consolidating.
- Tugboat provision and/or service.

Aside from the above-mentioned main business lines, the Company also conducts supporting business activities, namely:

- Provision of waste storage facilities;
- Provision of container depot;
- Provision of warehousing;
- Service for office cleaning and maintenance;
- Freshwater and electrical installation;
- Freshwater and oil filling service;
- Office provision for port customer's purposes;
- Provision of a cooling storage facility;
- Ship maintenance and repair;
- Packaging and labelling;
- Container fumigation and cleaning/repairing;
- Public transportation to and from the port;
- Waiting area for vehicles;
- Specific industrial activities;
- Trading activities;
- Provision of playground and recreation areas;
- Advertising services; and/or
- Hotel, restaurant, tourism, posting, and telecommunication services

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA



Serve with Safety, Fast, and Quality Excellent

PENYEDIA TENAGA KERJA ALIH DAYA

Status Operasional: Telah Beroperasi

Kepemilikan Saham: Pelindo III (90,00%), Kopelindo III (10,00%)

Bidang Usaha:

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa penerimaan dan penyaluran tenaga kerja (meliputi jasa kebersihan (*cleaning service*), jasa bongkar muat dan jasa kepelabuhanan, serta jasa pengamanan).
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pemberdayaan sumber daya manusia.
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen.
- Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan pekerjaan.
- Menjalankan jasa pendidikan dan pelatihan.

OUTSOURCING WORKFORCE PROVIDER

Operational Status: Operating

Share Ownership: Pelindo III (90.00%), Kopelindo III (10.00%)

Business Sectors:

- Carrying out business in workforce admission and distribution (including cleaning service, loading-unloading and port services, as well as security services).
- Carrying out business in human capital employment.
- Carrying out business consulting and management services.
- Carrying out chartering businesses.
- Carrying out education and training.

CUCU PERUSAHAAN

PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA



PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA

PENGELOLAAN ALUR PELAYARAN BARAT

Status Operasional: Telah Beroperasi

Kepemilikan Saham: PT Pelindo Marine Service (90,00%), Van Oord Dredging and Marine Contractor BV (5,00%), PT Gerbang Samudra Utama (5,00%)

Bidang Usaha:

- Jasa pengerukan dan jasa pemeliharaan kedalaman alur pelayaran.
- Pengembangan dan pengelolaan alur pelayaran.
- Jasa reklamasi.

SECOND-TIER SUBSIDIARIES

MANAGEMENT OF WEST SHIPPING CHANNEL

Operational Status: Operating

Share Ownership: PT Pelindo Marine Service (90,00%), Van Oord Dredging and Marine Contractor BV (5,00%), PT Gerbang Samudra Utama (5,00%)

Business Sectors:

- Ship channel dredging and depth maintenance.
- Ship channel development and management.
- Reclamation services.

PT PELINDO ENERGI LOGISTIK



JASA DISTRIBUSI GAS DAN MINYAK

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: PT Pelindo Marine Service (90,00%), PT Pelindo Energi Logistik (*buyback* saham) (9,00%), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1,00%)

Bidang Usaha:

- a. Logistik, distribusi, dan terminal energi yang mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
- b. Penyediaan dan/atau pelaksanaan perusahaan jasa pelayanan operasi kapal bongkar muat, lapangan penumpukan, dan/atau jasa penimbunan barang termasuk namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal penerimaan termasuk namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.
- d. Penyediaan dan/atau pelayanan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang termasuk namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.
- e. Penyediaan angkutan bandar, alat bongkar muat, peralatan pelabuhan, serta peralatan penunjang lainnya.
- f. Penyediaan pelayanan dan perusahaan jasa transportasi dan distribusi termasuk namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.
- g. Kegiatan perdagangan meliputi kegiatan ekspor dan impor namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya; perencanaan dan pengolahan keuangan dan logistik, distribusi untuk terminal energi.
- h. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.
- i. Pengelolaan, perusahaan, dan pemasaran pembangkit listrik, serta mendistribusikan listrik dan pemasaran zona dan/atau jasa logistik.
- j. Pengelolaan, perusahaan, dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gedung, pas, dan parkir), serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal energi.

GAS AND FUEL OIL DISTRIBUTION SERVICES

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Pelindo Marine Service (90.00%), PT Pelindo Energi Logistik (*shares buyback*) (9.00%), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1.00%)

Business Sectors:

- a. Energy logistics, distribution, and terminal prioritising Good Corporate Governance principles and implementing limited liability principles.
- b. Service provision and/or operations of loading-unloading ships, stacking fields, and/or goods stacking services including but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.
- c. Provision and/or services of reception terminal including but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.
- d. Provision and service of stacking fields and tanker including but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.
- e. Provision of port transportation, loading-unloading equipment, port equipment, and other supporting equipment.
- f. Service and operations of transportation and distribution including but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.
- g. Trade activities including export and import, not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products as well as planning and management of finance, logistics, and distribution for energy terminals.
- h. Provision and/or service of consolidation and distribution but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.
- i. Management, operations, and marketing of power plants as well as electricity distribution and zone marketing and/or logistics services.
- j. Management, operations, and marketing of new services, miscellaneous businesses (*building, pass, and parking space rent*), and other services related to energy terminals.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, perusahaan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan, antara lain:

- a. Jasa angkut;
- b. Penyediaan, pengusahaan, dan/atau pelayanan utilitas tetapi tidak terbatas pada telekomunikasi, listrik, pengolahan dan distribusi air minum/air kapal, instalasi limbah, serta pengolahan limbah dan sampah;
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan;
- d. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan logistik dan jasa energi;
- e. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan logistik untuk terminal energi; dan
- f. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship-to-ship transfer*) termasuk jasa ikutan lainnya.

Besides the main activities stated above, the company carried out other business activities supporting the achievement of the company's objectives, namely:

- a. Transportation services;*
- b. Utility provision, operations, and/or services not limited to telecommunication, electricity, ship freshwater/drinking water distribution management, waste installation, as well as waste and litter management;*
- c. Fuel-filling services for ship and vehicles;*
- d. Service provision and management of consultation, education, and training related to logistics and energy services;*
- e. Financial and logistics planning and management for energy terminals; and*
- f. Ship-to-ship transfer services including other follow-up services*

PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA



OPERATOR TERMINAL CURAH DAN PETI KEMAS DI MANYAR

Status Operasional: Telah Beroperasi

Kepemilikan Saham: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (60,00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (40,00%)

Bidang Usaha:

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
- b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih.
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan.
- d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas.
- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro.
- g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.
- h. Penyediaan dan/atau pelayanan penundaan kapal.
- i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya yang terkait dengan jasa kepelabuhanan.

THE OPERATOR OF BULK AND CONTAINER AT MANYAR

Operational Status: Operating

Share Ownership: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (60.00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (40.00%)

Business Sectors:

- a. Docking wharf provision and/or services.*
- b. Fuel-filling and freshwater provision and/or services.*
- c. Facility provision and/or service for loading and unloading passenger and/or vehicle.*
- d. Wharf provision and/or services for goods and container loading and unloading activities.*
- e. Provision and/or services of warehouse and stacking fields, loading-unloading equipment, and port equipment.*
- f. Provision and/or services of container terminals, liquid and dry bulk, as well as ro-ro.*
- g. Goods loading and unloading provision and/or services.*
- h. Tugging provision and/or services.*
- i. Other provision and/or services related to port services.*

PT PELINDO PROPERTI INDONESIA



PENGEMBANG DAN PENGELOLA PROPERTI

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (99,91%), Kopelindo III (0,09%)

Bidang Usaha:

- a. Menjalankan usaha di bidang pembangunan antara lain:
 1. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
 2. Pendorongan pada umumnya (*General Contractor*) antara lain pembangunan, pengembangan dan pengelolaan termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan di bidang:
 - a) Industri pendukung pelabuhan;
 - b) Kawasan industri (*Industrial Estate*);
 - c) Kawasan Marina dan pendukungnya;
 - d) Bangunan komersial, bisnis, dan perdagangan;
 - e) Perhotelan dan Resort;
 - f) Gedung-gedung apartemen, kondominium, kondotel;
 - g) Kawasan perumahan dan permukiman termasuk *real estate*;
 - h) Fasilitas pariwisata dan pusat rekreasi; dan
 - i) Pusat niaga, perkantoran, pertokoan, dan pusat rekreasi.
 3. Fasilitas-fasilitas pembangunan termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan area;
 4. Pembangunan gedung dan konstruksi lapangan, jalan, jembatan, gudang, pertamanan, dermaga, dan usaha sejenis lainnya; dan
 5. Pembangunan dan pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, *air conditioner*, serta dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin mekanika elektrikal, dan lain sebagainya.
- b. Menjalankan perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate*, yaitu penjualan, pembelian, dan penyewaan bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, gedung komersial dan perdagangan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan condotel, ruangan kantor, ruangan pertokoan.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa kecuai di bidang hukum dan pajak, antara lain:
 1. Jasa konsultasi arsitek;
 2. Jasa telekomunikasi;
 3. Jasa teknologi informasi;
 4. Hiburan, promosi, *agency*, manajemen, dan pengelolaan kegiatan hiburan;
 5. Jasa penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan wisata; dan
 6. Jasa di bidang makanan dan minuman (*catering*) serta usaha sejenis lainnya.

PROPERTY DEVELOPERS AND MANAGERS

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (99,91%), Kopelindo III (0,09%)

Business Sectors:

- a. *Carrying out business in construction including:*
 1. *Acting as developers, undertaking plannings, implementation, and monitoring;*
 2. *General Contractor, including construction, development and management including treatment, maintenance, and repair for buildings in:*
 - a) *Port-supporting industries;*
 - b) *Industrial estates;*
 - c) *Marine area and its supporting estates;*
 - d) *Commercial, business, and trade buildings;*
 - e) *Hotels and resorts;*
 - f) *Apartment, condominium, and condo-hotel buildings;*
 - g) *Residential area and settlements including real estates;*
 - h) *Tourism accommodations and recreational centres; and*
 - i) *Trade centres, offices, stores, and recreational centres.*
 3. *Construction facilities including area clearance, opening, backfilling, and levelling;*
 4. *The construction of buildings, fields, roads, bridges, warehouses, parks, wharves, and other similar businesses; and*
 5. *The construction and installation of electricity, gas, drinking water, telecommunication, air conditioner, as well as civil engineering, electrical engineering, electrical machines, and so forth.*
- b. *Carrying out trade related to real estate business, specifically the sales, purchase, and rental of housing, office buildings, store buildings, commercial and trade buildings, apartment units, condominium rooms, condo-hotel rooms, office rooms, and stores.*
- c. *Carrying out businesses in services other than law and tax, namely:*
 1. *Architecture consultation services;*
 2. *Telecommunication services;*
 3. *Information technology services;*
 4. *Entertainment, promotion, agency, management, and entertainment management;*
 5. *Supporting services for travel and tourism; and*
 6. *Catering and other similar services.*

PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT



PENYEDIA DAN PEMELIHARAAN ALAT BONGKAR MUAT

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (90,00%), Kopelindo III (10,00%)

Bidang Usaha:

- a. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan industri pada umumnya, antara lain:
 1. Melakukan industri pembuatan minyak pelumas;
 2. Melakukan industri pengemasan pelumas;
 3. Melakukan kegiatan produksi *spare parts* untuk alat angkut, alat angkat, dan alat berat; dan
 4. Melakukan kegiatan *manufacturing* industri alat bongkar muat.
- b. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan pada umumnya, antara lain:
 1. Menjadi agen perdagangan bahan bakar minyak;
 2. Melakukan perdagangan teknologi informasi, jaringan komunikasi, penjualan komputer, dan perangkat pendukungnya;
 3. Melakukan perdagangan *spare parts* untuk alat angkut, alat angkat, dan alat berat lainnya; dan
 4. Melakukan perdagangan ekspor pelumas, *grease*, *specialities product*, dan *base oil*.
- c. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa pada umumnya, antara lain:
 1. Melakukan kegiatan pengoperasian alat bongkar muat;
 2. Melakukan kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat bongkar muat dan/atau penunjang;
 3. Melakukan kegiatan penunjang jasa fabrikasi alat bongkar muat, alat angkut, alat angkat, dan alat besar;
 4. Melakukan kegiatan penyewaan alat untuk penanganan *assembling* alat (*rent for equipment handling*);
 5. Melakukan kegiatan penanganan kepengurusan kepabeanan (izin impor) alat bongkar muat;
 6. Melakukan kegiatan jasa transportasi;
 7. Melaksanakan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, penyaluran, distribusi, dan pemasaran pelumas; dan
 8. Melaksanakan kegiatan jasa produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran, distribusi, dan pemasaran pelumas, *grease*, *specialities product*, dan *base oil*.
- d. Menyelenggarakan kegiatan usaha secara langsung maupun tidak langsung terkait atau menunjang kegiatan usaha dari yang tersebut di atas.

PROVIDER OF LOADING AND UNLOADING EQUIPMENT

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (90.00%), Kopelindo III (10.00%)

Business Sectors:

- a. Carrying out general industrial activities, namely:
 1. Lubricant-manufacturing industrial activities;
 2. Lubricant-packaging industrial activities;
 3. Spare-part production for transportation, lifting, and heavy equipment; and
 4. Manufacturing activities for loading and unloading equipment.
- b. Carrying out general trading activities, namely:
 1. Acting as an agent for fuel trade;
 2. Trading in information technology, communication network, computers, and their supporting devices;
 3. Trading spare parts for transportation, lifting equipment, and other heavy equipment; and
 4. Export trading of lubricants, grease, speciality products, and base oil.
- c. Carrying out general service-related activities, namely:
 1. Loading and unloading equipment operations;
 2. Maintenance, treatment, and repair of loading and unloading equipment or supporting equipment;
 3. Supportive activities to assemble loading-unloading, transporting, lifting, and heavy equipment;
 4. Rent for equipment handling;
 5. Customs clearance (import license) for loading and unloading equipment;
 6. Transporting services;
 7. Transporting, storing, transferring, distributing, and marketing lubricants; and
 8. Production, processing, transporting, storing, transferring, distributing, and marketing lubricants, grease, speciality products, and base oil.
- d. Direct and indirect businesses related to or supporting the businesses mentioned above.

PT TANJUNG EMAS DAYA SEJAHTERA



PENYEDIA JASA OUTSOURCING TENAGA TALLY DI SEMARANG

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: PT Pelindo Daya Sejahtera (99,00%),
Kopelindo III (1,00%)

Bidang Usaha: bergerak dalam bidang *tally* pelabuhan dan dermaga yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.

TALLY OUTSOURCING PROVIDER IN SEMARANG

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Pelindo Daya Sejahtera (99.00%),
Kopelindo III (1.00%)

Business Sector: engaging in business port and wharf tally including counting, measuring, weighing, and recording loads for load owners and/or transporters.

PT LAMONG ENERGI INDONESIA



PT LAMONG ENERGI INDONESIA

PENGELOLAAN PEMBANGKIT ENERGI DAN PENYEDIA LISTRIK

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: PT Terminal Teluk Lamong (99,00%);
Kopelindo III (1,00%)

Bidang Usaha:

- Membangun, mendirikan, mengoperasikan, memelihara, memiliki, dan mengembangkan pembangkit listrik serta usaha sejenis.
- Mengusahakan pengadaan dan/atau tersedianya bahan bakar, barang pendukung, fasilitas, dan kebutuhan terkait lainnya untuk keperluan pembangkit listrik dan usaha sejenis, serta utilitas kawasan.
- Melakukan kegiatan usaha pemasaran, penjualan, dan pengembangan produk listrik dan jasa kelistrikan.
- Melakukan pengembangan bisnis pembangkit listrik dan usaha strategis sejenis lainnya.
- Industri Pembangkit Tenaga Listrik, meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, penjualan, penyaluran, dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan.

MANAGEMENT OF ENERGY GENERATORS AND ELECTRIC PROVIDERS

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Terminal Teluk Lamong (99.00%);
Kopelindo III (1.00%)

Business Sectors:

- Constructing, establishing, operating, maintaining, owning, and developing power plants and similar businesses.
- Providing and/or supplying fuel, supporting goods, facilities, and other related necessities for power plant and similar business as well as the sector's utilities.
- Marketing, trading, and developing electrical products and services.
- Developing power plant business and other strategic businesses.
- Power plant industry activities, including electricity generation, transmission, trade, distribution, and other businesses related to electricity.

- f. Industri transmisi telekomunikasi meliputi radio telekomunikasi, *microwave*, dan perangkat sejenisnya.
- g. Industri pengolahan, penjualan, dan distribusi air bersih, air minum, limbah cair, dan limbah padat (sampah).
- h. Pendistribusian gas dan BBM pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur gas dan BBM meliputi perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pipa transmisi dan distribusi gas serta kegiatan bisnis penunjang.
- i. Perdagangan kapasitas pipa transmisi gas dan BBM melakukan kegiatan jual-beli kapasitas penyimpanan serta fasilitas transportasi gas dan BBM lainnya serta kegiatan bisnis penunjang.
- j. Angkutan darat (pipa/pipanisasi) dengan saluran pipa ke tujuan penampungan atau penyaluran ke darat/terminal atau laut.
- k. Jasa penjernihan dan pengelolaan air bersih dan limbah serta usaha terkait.
- l. Jasa pemeliharaan saluran air/pipa serta kegiatan usaha terkait.
- m. Jasa pemeliharaan peralatan alat angkat dan alat angkut.
- n. Penyedia jasa transportasi pengangkutan gas dan BBM.
- o. Penyediaan jasa transportasi angkutan darat dan alat berat.
- p. Pengelolaan dan penyediaan properti kawasan.
- q. Penyedia jasa logistik kebutuhan kawasan pelabuhan dan angkutan laut (kapal) yang meliputi sembako, *money changer*, penyedia persewaan mobil, dan keperluan lainnya.
- r. Membangun, mengoperasikan, serta jasa pemeliharaan fasilitas curah cair dan gas, termasuk fasilitas tangki dan pipanisasi.

PT BERKAH MULTI CARGO



ANGKUTAN MULTIMODA

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham : PT Pelindo Marine Service (99,74%),
Kopelindo III (0,26%)

Bidang Usaha:

- a. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan Internasional (Asing), antara lain akan tetapi tidak terbatas pada pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, dan/atau kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.
- b. Kegiatan penunjang angkutan multimoda antara lain akan tetapi tidak terbatas pada kegiatan penunjang tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi kendaraan bermotor, perkeretaapian, laut, dan/atau udara.

MULTIMODAL TRANSPORTATION

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Pelindo Marine Service (99. 74%),
Kopelindo III (0.26%)

Business Sectors:

- a. National and International (Foreign) Multimodal Transportation Corporation, including but not limited to transportation arrangement, warehousing, load consolidation, storing provision, and/or customs clearance for foreign and domestic multimodal transportation.
- b. Multimodal transportation supporting activities, including but not limited to the stated supporting activities with motor vehicles, trains, sea transportation, and/or air transportation.

PT PELINDO 3 – TERMINAL PETI KEMAS



MELAKUKAN KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN MANYAR

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham : PT Terminal Peti Kemas Surabaya (99,00%), Kopelindo III (1,00%)

Bidang Usaha:

- Stevedoring*, yaitu jasa pelayanan membongkar barang dari dan ke kapal, dermaga, tongkang, truk atau muat dari dan ke dermaga, tongkang, truk ke dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal.
- Cargodoring*, yaitu jasa mengeluarkan dari *sling* dari lambung kapal di atas dermaga, ke dan menyusun di dalam gudang lini atau lapangan penumpukan, atau sebaliknya.
- Receiving/Delivery*, jasa pekerjaan mengambil dari timbunan/tempat penumpukan di gudang lini atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan rapat di pintu darat lapangan penumpukan, atau pekerjaan sebaliknya.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya yang terkait dengan bongkar muat dari dan ke kapal.

LOADING AND UNLOADING AT THE PORT OF MANYAR

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Terminal Petikemas Surabaya (99.00%), Kopelindo III (1.00%)

Business Sectors:

- Stevedoring, or the goods-unloading services from/to the ship, wharf, barges, and trucks or loading from/to the wharf, barges, and trucks into the ship hatch using the ship crane.*
- Cargodoring, or removing goods from the sling from the hull at the wharf and stacking inside the line warehouse or stacking fields, or inversely.*
- Receiving/Delivery, or picking up from the stacks/stacking yards in the line warehouse or stacking fields and delivering until stacked on a compact vehicle at the land gate of stacking fields, or inversely.*
- Other provision and/or services related to loading-unloading from or to the ships.*

PT PRIMA CITRA NUTRINDO



JASA BOGA DAN NUTRISI

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: PT Pelindo Husada Citra (70,00%), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (30,00%).

Bidang Usaha:

- Menjalankan usaha penyediaan makanan dan minuman.
- Menjalankan usaha restoran dan penyediaan makanan keliling.
- Melakukan penyajian makanan dan minuman di restoran.
- Melakukan penyajian makanan dan minuman di kedai makanan.
- Jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*).
- Penyediaan makanan lainnya.

FOOD AND NUTRITION SERVICES

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Pelindo Husada Citra (70.00%), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (30.00%).

Business Sectors:

- Carrying out food and beverages provision business.*
- Carrying out restaurant businesses and mobile food provision.*
- Serving food and beverages in restaurants.*
- Serving food and beverages in food stores.*
- Food services for specific events (event catering).*
- Other food provision.*

PT TERMINAL CURAH SEMARANG



OPERATOR TERMINAL CURAH CAIR DAN GAS DI SEMARANG

Status Operasional: Telah Beroperasi

Kepemilikan Saham: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (51,00%), PT Andahanesa Abadi (49,00%)

Bidang Usaha:

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal curah cair dan gas.
- b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan/atau tempat penyimpanan (*storage tank*), tempat penimbunan barang, pendistribusian, dan penjualan curah cair dan gas.
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang, alat bongkar muat dan pemeliharannya, serta peralatan kepelabuhanan pada umumnya, akan tetapi tidak terbatas pada jasa pelayanan dari dan/ke kapal, yaitu melakukan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
- d. Jasa penyimpanan *storage tank* curah cair dan gas.
- e. Penyediaan jasa angkutan (*Trucking*).
- f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya yang terkait dengan jasa kepelabuhanan.

LIQUID AND GAS BULK TERMINAL OPERATOR IN SEMARANG

Operational Status: Operating

Share Ownership: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (51.00%), PT Andahanesa Abadi (49.00%)

Business Sectors:

- a. *Provision and/or services of liquid bulk and gas terminals.*
- b. *Provision and/or services of warehouse and/or storage tank, goods stacking, distribution, and liquid bulk and gas trading.*
- c. *Wharf provision and/or services for loading and unloading goods, loading-unloading equipment and its maintenance, as well as general port equipment but not limited to transportation from/to ships, namely stevedoring, cargodoring, and receiving/delivery.*
- d. *Storage tank for liquid bulk and gas.*
- e. *Trucking provision.*
- f. *Other provision and/or services related to port services.*

AFILIASI TINGKAT PERTAMA

FIRST-TIER AFFILIATES

PT PORTEK INDONESIA



JASA PEMELIHARAAN DAN PENYEWaan ALAT-ALAT FASILITAS PELABUHAN

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: Pelindo III (49,00%), Portek System and Equipment Ltd. (51,00%)

Bidang Usaha:

- Penerapan manajemen bisnis dalam hal pemeliharaan dan penyewaan alat-alat bongkar muat dan alat fasilitas pelabuhan lainnya.
- Penyediaan, pemasangan, dan pengoperasian alat bongkar muat batu bara dan alat bongkar muat barang curah lainnya.
- Menyediakan, menyewakan, dan mengoperasikan kapal tunda dan kapal lainnya.
- Menyediakan informasi teknologi untuk pelayanan terminal.
- Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal serta penyediaan alat apung.

PORT FACILITY MAINTENANCE AND RENTAL SERVICES

Operational Status: Operating
Share Ownership: Pelindo III (49.00%), Portek System and Equipment Ltd. (51.00%)

Business Sectors:

- Business management in maintenance and rental of loading-unloading equipment and other port facilities.
- Provision, installation, and operation of coal loading-unloading equipment and other bulk loading-unloading equipment.
- Providing, renting, and operating tugboats and other ships.
- Providing technology information for terminal service.
- Ship construction, repair, and maintenance and provision of floating devices.

PT AMBANG BARITO NUSAPERSADA



PENGELOLAAN ALUR PELAYARAN BARITO

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: Pelindo III (40,00%), PT Bangun Banua Kalimantan Selatan (60,00%)

Bidang Usaha:

- Pengerukan alur sungai, muara sungai, dan muara laut.
- Pembuatan bendungan berikut pemeliharaan dan perawatannya.
- Pengelolaan alur pelayaran.

BARITO SHIPPING CHANNEL MANAGEMENT

Operational Status: Operating
Share Ownership: Pelindo III (40.00%), PT Bangun Banua Kalimantan Selatan (60.00%)

Business Sectors:

- Dredging channels on rivers, estuary, and sea estuary.
- Dam construction, maintenance, and treatment.
- Developing ship channels.

PT JASA MARGA BALI TOL



PENGELOLAAN TOL LAUT BALI MANDARA

Status Operasional: Telah Beroperasi

Kepemilikan Saham: Pelindo III (17,58%), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (55,00%), Pemerintah Provinsi Bali (8,01%), Pemerintah Kabupaten Badung (8,01%), PT Angkasa Pura I (Persero) (8,00%), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (1,00%), PT Hutama Karya (Persero) (1,00%), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (1,00%), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (0,40%)

Bidang Usaha:

- Melakukan pekerjaan perencanaan.
- Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan fasilitas jalan tol.
- Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol.
- Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau persetujuan pihak yang berwenang.
- Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d.

BALI MANDARA SEA TOLL MANAGEMENT

Operational Status: Operating

Share Ownership: Pelindo III (17.58%), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (55.00%), Bali Provincial Government (8.01%), Badung Regional Government (8.01%), PT Angkasa Pura I (Persero) (8.00%), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (1.00%), PT Hutama Karya (Persero) (1.00%), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (1.00%), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (0.40%)

Business Sectors:

- Plan work.
- Build roads, bridges, road complementary buildings, and tollway facilities.
- Operate and maintain tollways, including collecting and using tollway money.
- Using tollway reserved spaces for other businesses related to tollway operations, without lessening the authority of the applicable laws and regulations and/or the permission of authorities.
- Carrying out other businesses related to or supporting the businesses mentioned in point a, b, c, and d.

PT TERMINAL PETI KEMAS INDONESIA



OPERATOR TERMINAL PETI KEMAS DI MEDAN, JAKARTA, SURABAYA, DAN MAKASSAR

Status Operasional: Telah Beroperasi

Kepemilikan Saham: Pelindo I (25,00%), Pelindo II (25,00%), Pelindo III (25,00%), Pelindo IV (25,00%)

Bidang Usaha:

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang, meliputi:
 - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

CONTAINER TERMINAL OPERATORS IN MEDAN, JAKARTA, SURABAYA, AND MAKASSAR

Operational Status: Operating

Share Ownership: Pelindo I (25.00%), Pelindo II (25.00%), Pelindo III (25.00%), Pelindo IV (25.00%)

Business Sectors:

- Provision and/or services of ships, passenger, and goods, including:
 - Wharf docking provision and/or services;
 - Wharf provision and/or service for loading and unloading goods and containers;

3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas;
 5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; dan
 6. Penyediaan dan/atau pusat distribusi dan konsolidasi barang.
- b. Jasa berkaitan dengan kepelabuhanan meliputi:
1. Penyediaan depo peti kemas;
 2. Pelayanan dan pengisian air tawar dan minyak;
 3. Penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 4. Pengemasan dan pelabelan; dan
 5. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer.
- c. Perusahaan terminal.
3. *Provision and/or service of warehouses and stacking fields, loading-unloading equipment, and port equipment;*
 4. *Container terminal provision and/or services;*
 5. *Loading and unloading provision and/or services; and*
 6. *Provision and/or centres of goods distribution and consolidation.*
- b. *Port-related services, including:*
1. *Container depot provision;*
 2. *Freshwater and oil services and filling;*
 3. *Refrigerated warehouse facility;*
 4. *Packaging and labelling; and*
 5. *Container fumigation and cleaning/repair.*
- c. *Terminal business.*

AFILIASI TINGKAT KEDUA

SECOND-TIER AFFILIATES

PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA



PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN

Status Operasional: Telah Beroperasi
Kepemilikan Saham: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40,00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (60,00%)

Bidang Usaha:

- a. Bidang Pembangunan
1. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan.
 2. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan konstruksi beserta fasilitasnya, pematangan tanah, dll.
 3. Pendorongan pada umumnya (*general contractor*) yaitu pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, kawasan industri, gedung, perkantoran, dll.
 4. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan kawasan industri, termasuk membangun kawasan berikat, pembangkit dan distribusi tenaga listrik, air, limbah, dll.
 5. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan jembatan, jalan, bandara-dermaga, dan renovasi gedung, lapangan, bendungan, pengairan/irigasi, dll.
 6. Pemasangan instalasi-instalasi yang meliputi mesin, listrik, gas, air minum, perangkat telekomunikasi, limbah, dll.
 7. Pendorongan di bidang pembangunan dan konstruksi pabrik-pabrik.

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ESTATES AND OFFICES

Operational Status: Operating
Share Ownership: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40.00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (60.00%)

Business Sectors:

- a. Construction
1. *Carrying out construction businesses.*
 2. *Acting as developer executing the planning, monitoring construction and its facilities, land maturation, etc.*
 3. *General contractor, specifically the construction of real estates, flats, industrial area, buildings, offices, etc.*
 4. *Carrying out businesses in industrial area construction, including bonded zone, power plant, and the distribution of electricity, water, waste, etc.*
 5. *Carrying out businesses in the construction of bridges, roads, port-wharf, and the renovation of buildings, fields, dams, irrigation, etc.*
 6. *Installing machines, electricity, gas, drinking water, telecommunication devices, waste, etc.*
 7. *Chartering in factory constructions.*

b. Bidang Jasa

1. Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi, pengelolaan parkir dan keamanan (satpam), serta bidang terkait.
2. Jasa agen properti yang meliputi memberikan jasa informasi dan penjualan di bidang *property* serta kegiatan usaha terkait.
3. Pemberian jasa-jasa pengelolaan serta sarana-sarana lainya untuk kawasan industri, lingkungan, kawasan berikat, dll.
4. Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi konsultasi di bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan.
5. Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan *property real estate*.
6. Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri.
7. Jasa persewaan dan pengelolaan *property*.
8. Jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pengelolaan, dan gambar-gambar konstruksi.
9. Jasa konsultasi manajemen *property*.
10. Jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai.

b. Services

1. *The management and rent of office buildings, recreational parks, parking and security management, and related fields.*
2. *Property agency, including providing information and trade of property and other related fields.*
3. *Management services and other facilities for industrial areas, the environment, bonded zone, etc.*
4. *Consultation on construction plan and monitoring, including consulting on planning and monitoring constructions.*
5. *Consultation on managing real estate property operations and maintenance.*
6. *Consultation on managing industrial area operations and maintenance.*
7. *Property rent and management.*
8. *Services of project reporting, managing, and construction drawings.*
9. *Property management consulting.*
10. *Constructing ready-to-use concrete.*



PT TERMINAL NILAM UTARA



OPERATOR TERMINAL CURAH CAIR

Status Operasional: Telah Beroperasi

Kepemilikan Saham : PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40,00%), PT Andahanesa Abadi (60,00%)

Bidang Usaha:

- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
- Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih.
- Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal curah cair dan gas.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang curah cair dan gas.
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya yang terkait dengan jasa kepelabuhanan.

LIQUID BULK TERMINAL OPERATOR

Operational Status: Operating

Share Ownership: PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40.00%), PT Andahanesa Abadi (60.00%)

Business Sectors:

- Wharf docking provision and/or services.
- Fuel and freshwater provision and/or services.
- Provision and/or services for loading and unloading passengers and/or vehicles.
- Wharf provision and/or services for loading and unloading goods.
- Provision and/or services of warehousing and stacking fields, loading-unloading equipment, and port equipment.
- Provision and/or services of liquid bulk and gas terminals.
- Provision and/or services of liquid bulk and gas loading and unloading.
- Other provision and/or services related to port services.



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE



ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES

AFILIASI AFFILIATES

PORTEK
PORTEK INDONESIA

Pelindo III	: 49%
Portek System & Equipment Ltd.	: 51%

Tanggal Pendirian: 21 September 1998
Bidang Usaha: Pemeliharaan Peralatan Bongkar Muat
Established in: 21 September 1998
Business Line: Maintaining Unloading and Loading Equipment

AMBAPERS
AMBANG BARITO NUSAPERSADA

Pelindo III	: 40%
Bangun Banua Kalimantan Selatan	: 60%

Tanggal Pendirian: 26 Maret 2004
Bidang Usaha: Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai Barito
Established in: 26 March 2004
Business Line: Management of Barito River Routes

PT. TPI
TERMINAL PETI KEMAS INDONESIA

Pelindo I	: 25%
Pelindo II	: 25%
Pelindo III	: 25%
Pelindo IV	: 25%

Tanggal Pendirian: 10 April 2013
Bidang Usaha: Layanan Terminal Peti Kemas
Established in: 10 April 2013
Business Line: Container Terminal Services

JASA MARGA BALI TOL

Pelindo III	: 17,58%
Jasa Marga	: 55%
PemProv Bali	: 8,01%
PemProv Badung	: 8,01%
Angkasa Pura I	: 8%
Adhi Karya	: 1%
Hutama Karya	: 1%
Pengembangan Pariwisata Indonesia	: 1%
Wijaya Karya	: 0,40%

Tanggal Pendirian: 23 Agustus 2013
Bidang Usaha: Pengelolaan Tol Bali
Established in: 23 August 2013
Business Line: Management of Bali Toll Road

TPS
TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA

Pelindo III	: 99,50%
Kopelindo III	: 0,50%

Tanggal Pendirian: 29 April 1999
Bidang Usaha: Layanan Terminal Peti Kemas
Established in: 29 April 1999
Business Line: Container Terminal Services

RS PHC SURABAYA
PELINDO HUSADA CITRA

Pelindo	: 98,73%
Kopelindo III	: 1,27%

Tanggal Pendirian: 1 September 1999
Bidang Usaha: Layanan Jasa Kesehatan
Established in: 9 January 2002
Business Line: Health Services

BJTI PORT
BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

Pelindo	: 96,84%
Kopelindo III	: 3,16%

Tanggal Pendirian: 9 Januari 2002
Bidang Usaha: Layanan Terminal Peti Kemas
Established in: 9 January 2002
Business Line: Container Terminal Services

PT PELINDO MARINI SERVICE

Pelindo	: 98,23%
Kopelindo III	: 1,77%

Tanggal Pendirian: 31 Desember 2011
Bidang Usaha: Pengelolaan Alat Apung
Established in: 31 December 2011
Business Line: Floating Tool Management

PT TERMINAL TELUK LAMONG
TERMINAL TELUK LAMONG

Pelindo	: 99,50%
Kopelindo III	: 0,50%

Tanggal Pendirian: 30 Desember 2013
Bidang Usaha: Layanan Terminal Peti Kemas dan Curah Kering
Established in: 30 December 2013
Business Line: Container and Dry Bulk Terminal Services

PDS
PELINDO DAYA SEJAHTERA

Pelindo	: 90%
Kopelindo III	: 10%

Tanggal Pendirian: 19 Maret 2014
Bidang Usaha: Layanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja
Established in: 19 March 2014
Business Line: Provider of Manpower Services

DANA PENSIUN



DANA PENSIUN PERUSAHAAN PELABUHAN & PENERUKAN
Tanggal Pendirian: 26 November 1986
Established in: 26 November 1986



DANA PENSIUN PELINDO PURNAKARYA
Tanggal Pendirian: 4 Juli 2014
Established in: 4 July 2014

CUCU PERUSAHAAN SECOND-TIER SUBSIDIARY



PRIMA CITRA NUTRINDO

P H C : 70%
B J T I : 30%
Tanggal Pendirian: 15 Januari 2016
Bidang Usaha:
Layanan Jasa Boga dan Nutrisi
Established in: 15 January 2016
Business Line: Diet and Nutrition Services



PELINDO 3 - TERMINAL PETI KEMAS

T P S : 99%
U E P N : 01%
Tanggal Pendirian: 23 Januari 2016
Bidang Usaha: Jasa Bongkar Muat
Established in: 23 January 2016
Business Line: Unloading and Loading Services



PELINDO PROPERTI INDONESIA

B J T I : 99,91%
Kopelindo III : 0,09%
Tanggal Pendirian: 5 Desember 2014
Bidang Usaha:
Pengelolaan Properti
Established in: 5 December 2014
Business Line: Property Management



BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

B J T I : 90%
Kopelindo III : 10%
Tanggal Pendirian: 10 November 2015
Bidang Usaha:
Pemeliharaan Alat Bongkar Muat
Established in: 10 November 2015
Business Line: Loading and Unloading Equipment Maintenance



BERLIAN MANYAR STEVEDORE

B J T I : 60%
U E P N : 40%
Tanggal Pendirian: 23 Januari 2016
Bidang Usaha: Jasa Bongkar Muat
Established in: 23 January 2016
Business Line: Marine Services in Manyar JIPE



TERMINAL CURAH SEMARANG

B J T I : 51%
Andahanesa Abadi : 49%
Tanggal Pendirian: 18 Desember 2015
Bidang Usaha: Operator Terminal Curah Cair dan Gas di Semarang
Established in: 18 December 2015
Business Line: Liquid and Gas Bulk Terminal Operator in Semarang



BERLIAN MANYAR SEJAHTERA

B J T I : 60%
U E P N : 40%
Tanggal Pendirian: 12 Juni 2012
Bidang Usaha:
Jasa Kepelabuhan Manyar JIPE
Established in: 18 May 2012
Business Line: Management of JIPE Industrial Area



BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA

B J T I : 40%
U E P N : 60%
Tanggal Pendirian: 18 Mei 2012
Bidang Usaha:
Pengelolaan Kawasan Industri JIPE
Established in: 18 May 2012
Business Line: Management of JIPE Industrial Area



TERMINAL NILAM UTARA

B J T I : 40%
Andahanesa Abadi : 60%
Tanggal Pendirian: 23 Agustus 2013
Bidang Usaha:
Layanan Terminal Curah Cair
Established in: 23 August 2013
Business Line: Liquid Bulk Terminal Services

ENERGI MANYAR SEJAHTERA

B J T I : 30%
U E P N : 45%
Santiniuwansa : 15%
Lestari : 10%
Amanah Indo Invest : 10%
Tanggal Pendirian: 5 Maret 2015
Bidang Usaha: Pembangkit Listrik
Established in: 5 March 2015
Business Line: Power Plants



BERKAH MULTI CARGO

P M S : 99,74%
Kopelindo III : 0,26%
Tanggal Pendirian: 21 Desember 2015
Bidang Usaha: Jasa Angkutan Multimoda
Established in: 21 December 2015
Business Line: Multimodal Transportation Services



ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA

P M S : 90%
Van Oord : 5%
Gerbang Sarana Utama : 5%
Tanggal Pendirian: 21 April 2014
Bidang Usaha: Pengelolaan Alur Pelayaran Surabaya
Established in: 21 April 2014
Business Line: Management of Surabaya Shipping Routes



PELINDO ENERGI LOGISTIK

P M S : 90%
P E L (Buyback) : 9%
B J T I : 1%
Tanggal Pendirian: 9 September 2014
Bidang Usaha:
Layanan Logistik dan Pengelolaan Energi
Established in: 9 September 2014
Business Line: Logistics and Energy Management Services



LAMONG ENERGI INDONESIA

T T L : 99%
Kopelindo III : 1%
Tanggal Pendirian: 8 Desember 2014
Bidang Usaha:
Pengelolaan dan Penyediaan energi
Established in: 8 December 2014
Business Line: Energy Management and Provision



TANJUNG EMAS DAYA SEJAHTERA

P D S : 99%
Kopelindo III : 1%
Tanggal Pendirian: 29 September 2014
Bidang Usaha:
Pengelolaan Tenaga Kerja (Tally)
Established in: 29 September 2014
Business Line: Human Resources (Tally)

PERUSAHAAN PATUNGAN JOINT VENTURE COMPANY

LAMONG NUSANTARA GAS

P G N L N G Indonesia : 51%
P E L : 49%
Tanggal Pendirian: 10 Oktober 2019
Bidang Usaha: Midstream Gas LNG
Established in: 10 October 2019
Business Line: Midstream LNG Gas

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

SHARE LISTING CHRONOLOGY

Hingga 31 Desember 2019, saham Perusahaan masih dipegang secara penuh oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan saham 100% baik dalam bentuk saham ditempatkan maupun portofolio. Dengan demikian, saham Perusahaan tidak diperdagangkan di bursa efek manapun serta informasi terkait kronologi pencatatan saham berupa tanggal penetapan rencana pencatatan saham, korespondensi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan pencatatan saham, dan hasil penilaian dari pihak pemeringkat; jumlah saham; nilai nominal; harga penawaran di awal pencatatan hingga akhir tahun buku; dan nama bursa tempat saham dicatatkan tidak dapat disajikan karena tidak relevan dengan kondisi yang terjadi di Perusahaan saat ini, dimana statusnya sebagai BUMN yang belum melaksanakan pencatatan saham di Bursa Efek.

As of 31 December 2019, the Company shares are fully owned (100%) by the Government of Republic of Indonesia, both in the form of issued shares and portfolio. Hence, the Company's shares are not traded in any stock exchanges and information related to share-listing chronology, covering the date of the share-listing plan, correspondences with related parties to prepare the share listing, and the rating given by rating agencies; the number of shares; nominal value; offering price in the initial listing period until the end of the fiscal year; and name of the stock exchange on which the shares are listed cannot be provided as they are not relevant to the Company's current condition and its status as an SOE that does not list its shares on the stock exchange.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING

Pelindo III menerbitkan obligasi internasional pada tanggal 1 Oktober 2014 senilai USD 500 juta dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat pengembalian bunga 4,875%. Di tahun 2019, Perusahaan telah membayarkan bunga periode Maret 2019 dan September 2019 ada tanggal 29 Maret 2019 dan 30 September 2019 sebesar USD 12.187.575 per periode.

Pelindo III issued international bonds on 1 October 2014 worth USD 500 million with a tenor of 10 years and an interest rate of 4.875%. In 2019 the Company has paid interest for the March 2019 and September 2019 period on 29 March 2019 and 30 September 2019 amounting to USD 12,187,575 per period.

Di tahun 2018 Pelindo III kembali menerbitkan obligasi internasional pada tanggal 2 Mei 2018 senilai USD 500 juta dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat pengembalian bunga 4,5%.

In 2018 Pelindo III reissued international bonds on 2 May 2018 worth USD 500 million with a five-year term and a 4.5% interest rate return.

Selain itu, Perusahaan juga telah membayar dan melaporkan *withholding tax* sebesar USD 3.046 juta per periode. Dana obligasi internasional tersebut digunakan untuk pelunasan *outstanding* utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan, dan keperluan umum korporasi lainnya. Di tahun 2019, Perusahaan bekerja sama dengan 3 lembaga pemeringkatan internasional, yaitu Fitch Ratings, S&P Global Ratings, dan Moody's Investors Service.

In addition, the Company has also paid and reported a withholding tax of USD 3,046 million per period. The international bond funds are used to repay the outstanding debt, funding expansion needs of the Company, and other general corporate needs. In 2019, the Company cooperated with three international rating agencies, namely Fitch Ratings, S&P Global Ratings, and Moody's Investors Service.

OBLIGASI GLOBAL I GLOBAL BOND

URAIAN DESCRIPTION	INFORMASI INFORMATION
Jenis Sekuritas <i>Types of Securities</i>	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang <i>Currency</i>	Dolar Amerika Serikat <i>United States' Dollar</i>
Distribusi <i>Distribution</i>	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar <i>Outstanding Amount</i>	USD 500.000.000
Tenor	10 tahun years
Tanggal Terbit <i>Issue Date</i>	1 Oktober 2014 <i>1 October 2014</i>
Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	1 Oktober 2024 <i>1 October 2024</i>
Tingkat Bunga <i>Interest Rate</i>	4,875% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga <i>Interest Payment Date</i>	31 Maret dan 30 September <i>31 March and 30 September</i>
Spread to Benchmark	239,5 bps
Oversubscribed	13x melebihi size yang ditawarkan <i>13x exceeding the size offered</i>
Rating Senior Unsecured	<ul style="list-style-type: none"> • Baa3 (Outlook Stable) oleh Moody's, diterbitkan pada 10 September 2014. • BB+ (Outlook Stable) oleh S&P Global Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014. • BBB- (Outlook Stable) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014. • Baa3 (Outlook Stable) by Moody's, issued on 10 September 2014. • BB+ (Outlook Stable) by S&P Global Ratings, issued on 8 September 2014. • BBB- (Outlook Stable) by Fitch Ratings, issued on 8 September 2014.

OBLIGASI GLOBAL II GLOBAL BOND II

URAIAN DESCRIPTION	INFORMASI INFORMATION
Jenis Sekuritas <i>Types of Securities</i>	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang <i>Currency</i>	Dolar Amerika Serikat <i>United States' Dollar</i>
Distribusi <i>Distribution</i>	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar <i>Outstanding Amount</i>	USD 500.000.000
Tenor	5 tahun tahun
Tanggal Terbit <i>Issue Date</i>	2 Mei 2018 <i>2 May 2018</i>
Tanggal Jatuh Tempo <i>Due Date</i>	2 Mei 2023 <i>2 May 2023</i>
Tingkat Bunga <i>Interest Rate</i>	4,5% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga <i>Interest Payment Date</i>	2 Mei dan 2 November <i>2 May and 2 November</i>
Spread to Benchmark	239,5 bps
Oversubscribed	2x melebihi size yang ditawarkan <i>2x exceeding the size offered</i>
Rating Senior Unsecured	<ul style="list-style-type: none"> • Baa3 (Outlook Stable) oleh Moody's, diterbitkan pada 6 Februari 2018. • BBB- (Outlook Stable) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 23 April 2018. • Baa3 (Outlook Stable) by Moody's, issued on 6 February 2018. • BBB- (Outlook Stable) by Fitch Ratings, issued on 23 April 2018.

INFORMASI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

INFORMATION ON SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS

LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK RATING AGENCY

STANDARD AND POOR'S (S&P)

Alamat <i>Address</i>	12 Marina Boulevard Level 22, #22-01 MBFC Tower 3 Singapore 018982
Telepon <i>Telephone</i>	+65 65 306401/+65 65 306403
Faksimile <i>Facsimile</i>	-
Surel <i>E-mail</i>	annabelle.teo@spglobal.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III <i>Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III</i>
Imbalan <i>Fee</i>	USD 75.000/tahun <i>USD 75,000/year</i>
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 <i>Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the issuance of Pelindo III Global Bonds dated 1 July 2014</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	September 2019 <i>September 2019</i>

MOODY'S

Alamat <i>Address</i>	Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower, Singapore 048623
Telepon <i>Telephone</i>	+65 6398 8300
Faksimile <i>Facsimile</i>	-
Surel <i>E-mail</i>	daryl.soh@moodys.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III <i>Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III</i>
Imbalan <i>Fee</i>	USD 72.000/tahun <i>USD 72,000/year</i>
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 <i>Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the issuance of Pelindo III Global Bonds dated 1 July 2014</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	September 2019 <i>September 2019</i>

FITCH RATINGS

Alamat <i>Address</i>	One Raffles Quay, South Tower #22-11, Singapore 048583
Telepon <i>Telephone</i>	+65 6796 7200
Faksimile <i>Facsimile</i>	-
Surel <i>E-mail</i>	louis.pang@fitchratings.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III <i>Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III</i>
Imbalan <i>Fee</i>	USD 70.000/tahun <i>USD 70,000/year</i>
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 <i>Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the issuance of Pelindo III Global Bonds dated 1 July 2014</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	Juni 2019 <i>June 2019</i>

KANTOR AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTING FIRM

ERNST & YOUNG (KAP PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA)

Alamat <i>Address</i>	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 – 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia 12190
Telepon <i>Telephone</i>	(021) 5289 5000
Faksimile <i>Facsimile</i>	(021) 5289 4100
Surel <i>E-mail</i>	dudi.muhammad.kurniawan@id.ey.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	<p>a. Melaksanakan Pemeriksaan Umum/General Audit (dengan pelaksanaan interim dan akhir tahun) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Per 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pengujian efektifitas atas sistem pengendalian internal dan sistem teknologi informasi yang berdampak terhadap laporan keuangan.</p> <p>b. Melaksanakan audit atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).</p> <p>c. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Laporan Penilaian KPI.</p> <p>d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.</p> <p>e. Melaksanakan penugasan prosedur yang disepakati atas pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian, dalam pengelolaan utang luar negeri sebagaimana diatur dalam PBI No. 16/22/PBI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</p> <p><i>a. Carry out general checks/General Audit (with interim and end of the year) on the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as per 31 December 2019 and for the year ended on 31 December 2019 in accordance with the applicable Financial Accounting Standards, including and not limited to testing the effectiveness of internal control systems and information technology systems that affect financial statements.</i></p> <p><i>b. Carry out an audit on the Partnership and Community Development Programme (PKBL) Report.</i></p> <p><i>c. Carry out the agreed procedures of the Company's Performance Evaluation Report and KPI Assessment Report.</i></p> <p><i>d. Carry out an audit of compliance with laws and regulations and internal control.</i></p> <p><i>e. Carry out agreed-upon procedure assignments for reporting activities for applying the precautionary principle in managing foreign debt as stipulated in PBI No. 16/22/PBI/2014 as amended by the Regulation of Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</i></p>
Imbalan <i>Fee</i>	Rp3.366.000.000
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	UM.138/08/DK.P.III/2019
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	138 hari kalender sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan No. BA.8197/Ku.03.03/HOFC-2019 tanggal 14 Oktober 2019 <i>138 calendar days since the Record of Work Commencement No. BA.8197/Ku.03.03/HOFC-2019 dated 14 October 2019</i>

KONSULTAN HUKUM LEGAL CONSULTANTS

PRAMONO & PARTNERS

Alamat <i>Address</i>	Jl. Daruf Aisyah III No. 9, Gresik, Jawa Timur
Telepon <i>Telephone</i>	+62 31 395 7678
Faksimile <i>Facsimile</i>	+62 31 395 7678
Surel <i>E-mail</i>	kukuhpramono@yahoo.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Bantuan Jasa Layanan Hukum Eksekusi PT Timur Nusantara <i>Legal Service Assistance for the Execution of PT Timur Nusantara</i>
Imbalan <i>Fee</i>	Rp298.000.000
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Purchase Order</i> No. 420002326
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	Juli - Sekarang <i>July – Present</i>

SIREGAR SETIAWAN MANALU PARTNERSHIP

Alamat <i>Address</i>	ANZ Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta
Telepon <i>Telephone</i>	+62 1-5793 2649 +62 1-5793 2653
Faksimile <i>Facsimile</i>	+62 21 5785 4083
Surel <i>E-mail</i>	ssmp@ssmp.co
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Kasasi <i>Handling of Cassation-Level State Administrative Matters</i>
Imbalan <i>Fee</i>	Rp217.800.000
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Purchase Order</i> No. 4300000650
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	2019

SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATE

Alamat <i>Address</i>	Jl. Raya Darmo No. 135 B
Telepon <i>Telephone</i>	+62 31 567 7511
Faksimile <i>Facsimile</i>	+62 31 568 6614
Surel <i>E-mail</i>	Lawoffice_sidabukke@yahoo.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Pengajuan Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha <i>Filing Objections on the Resolution of the Business Competition Supervisory Commission</i>
Imbalan <i>Fee</i>	Rp1.476.470.600
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Purchase Order</i> No. 4300000874
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	2019

NOTARIS
NOTARIES**HENI YUNIAN TIN S.H., M.KN**

Alamat <i>Address</i>	Jl. Melon Tengah No. 16, Jasmine Park, Pondok Candra, Surabaya
Telepon <i>Telephone</i>	+62 813 3100 0497
Faksimile <i>Facsimile</i>	-
Surel <i>E-mail</i>	heni.yuniantin@gmail.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Pembuatan Akta Notaris Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Direksi Pelindo III Kantor Pusat <i>Notarial Deed for Amendment in Position Nomenclature, Task Transfer and Appointment of Pelindo III BOD in the Head Office</i>
Imbalan <i>Fee</i>	Rp7.500.000
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Purchase Order</i> No. 4200010615
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	2019

EMI SUSILOWATI, S.H.

Alamat <i>Address</i>	Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat
Telepon <i>Telephone</i>	+62 21 3983 2849, +62 811 188 2304
Faksimile <i>Facsimile</i>	+62 21 39832749
Surel <i>E-mail</i>	emi_susilowati@yahoo.com
Jasa yang Diberikan <i>Service Rendered</i>	Pembuatan Akta Berita Acara RUPS <i>Deed for the GMS Minutes of Meeting</i>
Imbalan <i>Fee</i>	Rp8.500.000
Surat Penunjukan <i>Appointment Letter</i>	<i>Purchase Order</i> No. 4800000960
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	2019



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

Pelindo III memiliki situs web sebagai sumber informasi mengenai kinerja Perusahaan yang disajikan secara transparan bagi investor serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Situs web Perusahaan dapat diakses melalui www.pelindo.co.id. Pada situs web tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:

- **Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Terakhir Individu**

Informasi mengenai Pemegang Saham Perusahaan dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "Info Investor" dan subkategori "Pemegang Saham".

- **Isi Kode Etik**

Informasi mengenai Kode Etik Perusahaan dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "Tata Kelola" dan subkategori "Tata Kelola Yang Baik".

- **Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "Informasi Publik" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data.

- **Laporan Keuangan Tahunan Terpisah dan Laporan Tahunan**

Informasi mengenai Laporan Keuangan Tahunan Terpisah dan Laporan Tahunan dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "Info Investor" dan subkategori "Laporan" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data.

Data yang dilampirkan dalam informasi Laporan Keuangan selalu kami perbarui setiap per tiga bulan (triwulan) dengan menyediakan sarana pengunduhan yang dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam memperoleh data tersebut.

The Company has a website as a source of information on the Company's performance that is transparently provided for investors as well as other stakeholders. The website can be accessed on www.pelindo.co.id. On it, all Stakeholders may obtain the following information:

- **Information on Shareholders to Individual Final Shareholder**

Information on Shareholders of the Company is accessible on the Company's website under the "Investor" category and "Shareholder" sub-category.

- **Code of Conduct**

Informasi mengenai Kode Etik Perusahaan dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "Tata Kelola" dan subkategori "Tata Kelola Yang Baik".

- **Separate Annual Financial Statements and Annual Report**

Information on General Meeting of Shareholders (GMS) is accessible on the Company's website under the "Public Information" category by registering at the website to propose the data beforehand.

- **Separate Annual Financial Statements and Annual Report**

Information on Separate Annual Financial Statements and Annual Report is accessible on the Company's website under the "Investor" category and "Reporting" sub-category by registering at the website to propose the data beforehand.

Data provided in the Financial Statements are renewed every three months (quarterly) by providing a download button that can facilitate the stakeholders in obtaining the data.

- **Profil Dewan Komisaris dan Direksi**
Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris dan Direksi secara lengkap beserta legalitas pengangkatannya dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori “Profil Perusahaan” dan subkategori “Manajemen”.
- **Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Unit Audit Internal**
Informasi mengenai piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Unit Audit Internal dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori “Tata Kelola” dan subkategori “Tata Kelola yang Baik”.
- **Pengadaan**
Sebagai media registrasi bagi seluruh mitra dan calon mitra Perusahaan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Selain sebagai media registrasi juga berperan sebagai media informasi terkait dengan pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan baik bagi Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
- **Lapor**
Merupakan media yang disediakan Perusahaan terkait dengan penanganan pengaduan. Media ini tidak hanya dikhususkan bagi karyawan namun juga bagi seluruh masyarakat.
- **Peta Situs**
Merupakan media informasi bagi masyarakat terkait dengan wilayah kerja, kantor jaringan, dan kantor cabang berikut letak koordinatnya.
- **Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors**
Comprehensive information on Profiles of the BOC and BOD, including the legality of their appointment, is accessible on the Company’s website under the “Company Profile” category and “Management” sub-category.
- **Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit**
Information on charters of the BOC, BOD, Committees, and Internal Audit Unit is accessible on the Company’s website under the “Governance” category and “Good Corporate Governance” sub-category.
- **Procurement**
As a registration media for all partners and potential partners of the Company to participate in the goods and services procurement activities. Aside from being a registration media, it also becomes an information media related to the procurement activities required by the Company and Subsidiaries.
- **Reporting**
Reporting is a media facilitated by the Company regarding complaint handling. This media is not only specified for all employees but also the public in general.
- **Sitemap**
A sitemap is a public information media containing the work area, network offices, and branch offices, as well as their coordinates.

ALAMAT KANTOR PUSAT, PERWAKILAN, DAN CABANG PERUSAHAAN

ADDRESS OF HEAD OFFICE, REPRESENTATIVE OFFICES, AND BRACH OFFICES

KANTOR PUSAT

HEAD OFFICE

Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60165

Telepon | *Telephone* : +62 31 329 8631-37
Faksimile | *Facsimile* : +62 31 329 5207
Situs Web | *Website* : www.pelindo.co.id
Surel | *E-mail* : humas@pelindo.co.id;
info@pelindo.co.id

KANTOR ENTITAS ANAK

SUBSIDIARIES' OFFICES

PT TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA

Jl. Tanjung Mutiara 1, Surabaya, Jawa Timur - 60177

Telepon | *Telephone* : +62 31 3283265-70
Faksimile | *Facsimile* : +62 31 3291628
Situs Web | *Website* : www.tps.co.id

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

Jl. Perak Barat No. 379, Surabaya, Jawa Timur

Telepon | *Telephone* : +62 31 3291596-97
Faksimile | *Facsimile* : +62 31 3291598
Situs Web | *Website* : www.bjti.co.id
Surel | *E-mail* : info@bjti.co.id

PT PELINDO MARINE SERVICE

Jl. Prapat Kurung Utara No. 58, Surabaya, Jawa Timur - 60165

Telepon | *Telephone* : +62 31 3282321, 3282278
Faksimile | *Facsimile* : +62 31 3282309
Situs Web | *Website* : www.pelindomarine.com
Surel | *E-mail* : info@pelindomarine.com

REGIONAL JAWA TIMUR

EAST JAVA REGION

PELABUHAN TANJUNG PERAK

PORT OF TANJUNG PERAK

Jl. Perak Timur No. 620, Surabaya, Jawa Timur - 60165

Telepon | *Telephone* : +62 31 3291992-6
Faksimile | *Facsimile* : +62 31 3293994
Surel | *E-mail* : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN KALIANGET

PORT OF KALIANGET

Jl. Raya Pelabuhan No. 6 Kalianget, Sumenep, Jawa Timur - 69471

Telepon | *Telephone* : +62 328 662447 - 661926
Surel | *E-mail* : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN PASURUAN

PORT OF PASURUAN

Jl. Komodor Yos Sudarso No. 150 Pasuruan, Jawa Timur - 67123

Telepon | *Telephone* : +62 343 424725
Surel | *E-mail* : tanjungperak@pelindo.co.id

KANTOR PERWAKILAN

REPRESENTATIVE OFFICE

Tamansari Parama Office Tower, Lantai 7 Jl. K. H. Wahid Hasyim No.

84-86 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon | *Telephone* : +62 21 22346068

PT PELINDO HUSADA CITRA

Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1, Surabaya, Jawa Timur

Telepon | *Telephone* : +62 31 3294801-3
Faksimile | *Facsimile* : +62 31 3294804
IGD 24 Jam | *24-Hour* : +62 31 3294118
Emergency Line
Situs Web | *Website* : www.rsphc.co.id
Surel | *E-mail* : marketing@rsphc.co.id

PT TERMINAL TELUK LAMONG

Jl. Raya Tambak Osowilangun KM 12 Surabaya

Telepon | *Telephone* : +62 31 99001500
Faksimile | *Facsimile* : +62 31 99001480, 99001490
Situs Web | *Website* : www.teluklamong.co.id
Surel | *E-mail* : terminal@teluklamong.co.id

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Gedung Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya

Telepon | *Telephone* : +62 31 51166384-5

PELABUHAN GRESIK

PORT OF GRESIK

Jl. Yos Sudarso No. 1 Gresik, Jawa Timur - 61114

Telepon | *Telephone* : +62 31 3981941, 3974542
Surel | *E-mail* : gresik@pelindo.co.id

PELABUHAN TANJUNG TEMBAGA

PORT OF TANJUNG TEMBAGA

Jl. Tanjung Tembaga Timur No. 10, Probolinggo, Jawa Timur - 67201

Telepon | *Telephone* : +62 335 421363/421385
Faksimile | *Facsimile* : +62 335 427123
Surel | *E-mail* : tanjungtembaga@pelindo.co.id

PELABUHAN PANARUKAN

PORT OF PANARUKAN

Jl. Pelabuhan Panarukan No. 10 Panarukan,
Situbondo, Jawa Timur - 68351

Telepon | *Telephone* : +62 338 672416
Surel | *E-mail* : tanjungperak@pelindo.co.id

REGIONAL BALI NUSA TENGGARA

NUSA TENGGARA REGION

PELABUHAN TANJUNG WANGI

PORT OF TANJUNG WANGI

Jl. Raya Situbondo, Ketapang, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur – 68455

Telepon | *Telephone* : +62 333 510636
Faksimile | *Facsimile* : +62 333 510484
Surel | *E-mail* : tanjungwangi@pelindo.co.id

PELABUHAN CELUKAN BAWANG

PORT OF CELUKAN BAWANG

Jl. Pelabuhan Celukan Bawang No. 35, Buleleng, Bali – 81155

Telepon | *Telephone* : +62 362 92333
Faksimile | *Facsimile* : +62 362 92893
Surel | *E-mail* : celukanbawang@pelindo.co.id

PELABUHAN WAINGAPU

PORT OF WAINGAPU

Jl. Nanga Mesi No. 16 Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara
Timur – 87116

Telepon | *Telephone* : +62 381 21150
Surel | *E-mail* : waingapu@pelindo.co.id

PELABUHAN BIMA

PORT OF BIMA

Jl. RE Martadinata No. 1, Bima, Nusa Tenggara Barat

Telepon | *Telephone* : +62 374 43726
Faksimile | *Facsimile* : +62 374 42353
Surel | *E-mail* : bima@pelindo.co.id

PELABUHAN LEMBAR

PORT OF LEMBAR

Jl. Raya Pelabuhan No. 5, Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat – 83364

Telepon | *Telephone* : +62 370 681260
Faksimile | *Facsimile* : +62 370 681011
Surel | *E-mail* : lembar@pelindo.co.id

PELABUHAN TENAU KUPANG

PORT OF TENAU KUPANG

Jl. Yos Sudarso No.23, Tenau Kupang, Kupang, Nusa Tenggara
Timur – 85351

Telepon | *Telephone* : +62 380 890 071/890 072
Faksimile | *Facsimile* : +62 380 890 072
Surel | *E-mail* : tenaukupang@pelindo.co.id

PELABUHAN BENOA

PORT OF BENOA

Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali – 80222

Telepon | *Telephone* : +62 361 720560
Faksimile | *Facsimile* : +62 361 723351
Surel | *E-mail* : benoa@pelindo.co.id

PELABUHAN ENDE DAN IPPY

PORT OF ENDE AND IPPY

Jl. Hatta No. 1 Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur – 86361

Telepon | *Telephone* : +62 381 21150
Surel | *E-mail* : ende@pelindo.co.id

PELABUHAN KALABAHY

PORT OF KALABAHY

Jl. RE. Martadinata No. 3 Kalabahi, Alor,
Nusa Tenggara Timur – 85813

Telepon | *Telephone* : +62 386 21023
Surel | *E-mail* : ende@pelindo.co.id

PELABUHAN BADAS

PORT OF BADAS

Jl. Labuhan Badas No. 11, Sumbawa, Nusa Tenggara Timur – 84351

Telepon | *Telephone* : +62 371 2629120
Surel | *E-mail* : badas@pelindo.co.id

PELABUHAN MAUMERE

PORT OF MAUMERE

Jl. Kureng No. 2, Maumere, Nusa Tenggara Timur – 86111

Telepon | *Telephone* : +62 382 21054
Faksimile | *Facsimile* : +62 382 21618
Surel | *E-mail* : maumere@pelindo.co.id

REGIONAL JAWA TENGAH

CENTRAL JAVA REGION

PELABUHAN TANJUNG EMAS

PORT OF TANJUNG EMAS

Jl. Coaster No. 10 Semarang, Jawa Tengah – 50116

Telepon | Telephone : +62 24 3545721-4
Faksimile | Facsimile : +62 24 3542649
Surel | E-mail : tanjungemas@pelindo.co.id

PELABUHAN TANJUNG INTAN

PORT OF TANJUNG INTAN

Jl. Laut Jawa, Cilacap, Jawa Tengah – 53213

Telepon | Telephone : +62 282 534651-2
Faksimile | Facsimile : +62 282 534653
Surel | E-mail : tanjungintan@pelindo.co.id

TERMINAL PETI KEMAS SEMARANG (TPKS)

Jl. Coaster No. 10 A, Semarang, Jawa Tengah – 50116

Telepon | Telephone : +62 24 3586219
Faksimile | Facsimile : +62 24 3581242
Surel | E-mail : tpks@pelindo.co.id

PELABUHAN TEGAL

PORT OF TEGAL

Jl. RE Martadinata No. 9 Tegal, Jawa Tengah – 52111

Telepon | Telephone : +62 83 351488
Faksimile | Facsimile : +62 83 353369
Surel | E-mail : tjms-rtgl@pelindo.co.id

REGIONAL KALIMANTAN

KALIMANTAN REGION

PELABUHAN BANJARMASIN

PORT OF BANJARMASIN

Jl. Barito Hilir Trisakti No. 6 Banjarmasin,
Kalimantan Selatan – 70119

Telepon | Telephone : +62 511 3365866
Surel | E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN PULANG PISAU

PORT OF PULANG PISAU

Jl. Samudra No. 1 Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan – 74861

Telepon | Telephone : +62 513 61128
Surel | E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN BAHAU

PORT OF BAHAU

Desa Tanjung Perawan, Kahayan Kuala, Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah – 74872

Telepon | Telephone : +62 513 61128
Surel | E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN BATULICIN

PORT OF BATULICIN

Jl. Pelabuhan Samudera No. 124, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan – 72271

Telepon | Telephone : +62 518 70305
Surel | E-mail : batulicin@pelindo.co.id

PELABUHAN MEKAR PUTIH

PORT OF MEKAR PUTIH

Jl. Pelabuhan Utama Batubara, Mekar Putih, Kotabaru, Kalimantan
Selatan – 72153

Telepon | Telephone : +62 518 38866
Surel | E-mail : mekarputih@pelindo.co.id

PELABUHAN SATUI

PORT OF SATUI

Jl. Pelabuhan Satui No. 06, Satui Barat RT 05 RW 03, Satui, Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan – 72275

Telepon | Telephone : +62 51870305
Surel | E-mail : batulicin@pelindo.co.id

PELABUHAN BASIRIH

PORT OF BASIRIH

Jl. Teluk Mendung No. 22, RT 17, RW 1 Mantuil Raya, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan – 70119

Telepon | Telephone : +62 511 3365866
Surel | E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN KUALA KAPUAS

PORT OF KUALA KAPUAS

Jl. Sudirman No. 3 Selat Hilir, Kapuas, Kalimantan Selatan – 73513

Telepon | Telephone : +62 513 61128
Surel | E-mail : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN KOTABARU

PORT OF KOTABARU

Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Stagen, Kalimantan
Selatan – 72151

Telepon | Telephone : +62 518 21214
Faksimile | Facsimile : +62 518 22136
Surel | E-mail : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN STAGEN

PORT OF STAGEN

Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Kalimantan Selatan –
72151

Telepon | Telephone : +62 518 21214
Surel | E-mail : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN GUNUNG BATU BESAR

PORT OF GUNUNG BATU BESAR

Desa Pa'paan, Sampanahan, Kotabaru,
Kalimantan Selatan – 72166

Surel | E-mail : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN PAGATAN

PORT OF PAGATAN

Jl. Mangkubumi No. 36, Kelurahan Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir,
Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan – 72273

Telepon | Telephone : +62 518 70305
Surel | E-mail : batulicin@pelindo.co.id



PELABUHAN SAMPIT

PORT OF SAMPIT

Jl. Usman Harun No. 2 Sampit, Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah – 74322

Telepon | Telephone : +62 531 21055

Surel | E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN KUMAI

PORT OF KUMAI

Jl. Bendahara No. 248 Kumai, Kotawaringin Barat – 74181

Telepon | Telephone : +62 532 61468

Surel | E-mail : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN PAGATAN MENDAWAI

PORT OF PAGATAN MENDAWAI

Jl. Merdeka No. 4, RT 1 RW 1, Katingan Kuala, Katingan,
Kalimantan Tengah – 74464

Surel | E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN PANGKALAN BUN

PORT OF PANGKALAN BUN

Jl. Pangeran Antasari Gg. Kelapa Sawit, Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah – 74114

Telepon | Telephone : +62 532 61468

Surel | E-mail : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN SAMUDA

PORT OF SAMUDA

Jl. Haji Umar Hasyim Samuda, Mentaya Hikir, Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah – 74363

Surel | E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN BAGENDANG

PORT OF BAGENDANG

Jl. HM Arsyad KM. 23 Sampit, Bagendang, Kalimantan Tengah

Surel | E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN KUALA PEMBUANG

PORT OF KUALA PEMBUANG

Jl. AS. Nasution, Kompleks Pelabuhan, Seruyan, Kuala Pembuang,
Kalimantan Tengah – 74212

Surel | E-mail : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN BUMIHARJO

PORT OF BUMIHARJO

Jl. Pelabuhan CPO RT 18 Tanjung Kalaf, Kumai, Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah – 74181

Telepon | Telephone : +62 532 2074500

Surel | E-mail : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN SUKAMARA

PORT OF SUKAMARA

Jl. Pelabuhan No. 124, RT 01 RW 03, Mendawai Sukamara,
Sukamara, Kalimantan Tengah – 74172

Telepon | Telephone : +62 532 26016

Surel | E-mail : kumai@pelindo.co.id

WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN

COMPANY OPERATIONAL AREA





Wilayah kegiatan operasional Perusahaan tersebar di 7 provinsi yang terbagi ke dalam 4 regional, yaitu:

The operational areas of the Company are spread across seven provinces in Indonesia which are divided into four regions, namely:

01. REGIONAL JAWA TIMUR

EAST JAVA REGION

Tanjung Perak, Gresik, Kalianget, Tanjung Tembaga, Pasuruan, Panarukan.

02. REGIONAL BALI NUSA TENGGARA

BALI NUSA TENGGARA REGION

Tanjung Wangi, Benoa, Celukan Bawang, Ende & Ippi, Waingapu, Kalabahi, Bima, Badas, Lembar, Maumere, Tenau Kupang.

03. REGIONAL JAWA TENGAH

CENTRAL JAVA REGION

Tanjung Emas, TPKS, Tanjung Intan, Tegal.

04. REGIONAL KALIMANTAN

KALIMANTAN REGION

Banjarmasin, Basirih, Pulang Pisau, Kuala Kapuas, Bahaur, Kotabaru, Batulicin, Stagen, Mekar Putih, Gunung Batu Besar, Satui, Pagatan, Sampit, Bagendang, Kumai, Kuala Pembuang, Pagatan-Mendawai, Bumiharjo, Pangkalan Bun, Sukamara, Samuda.

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

REVIEW OF BUSINESS SUPPORT





SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL

Guna memenuhi pencapaian Perusahaan sebagai *Emerging Industry Leader*, Pelindo III senantiasa meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar siap untuk memenuhi pencapaian tersebut. Perusahaan juga selalu berupaya untuk mengelola dan mengembangkan kreativitas serta inovasi berkelanjutan bagi setiap SDM Pelindo III, agar dapat berintegrasi dengan perkembangan dan perubahan bisnis yang cukup pesat.

Pelindo III juga tak luput untuk selalu menyesuaikan kualitas SDM dengan era bisnis yang semakin modern seperti saat ini, dimana penggabungan antara teknologi dengan SDM menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa mempersiapkan dan melakukan pengadaan teknologi mutakhir bersamaan dengan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Perusahaan.

FOKUS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2019

Perusahaan menyadari bahwa Pegawai merupakan faktor strategis dan salah satu modal yang dimiliki oleh Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis Perusahaan, oleh karena itu strategi pengelolaan dan pengembangan SDM yang tepat dapat menentukan laju kinerja Perusahaan. Melalui kebijakan pengelolaan SDM yang berbasis pengelolaan kinerja pegawai, Perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pegawai dari berbagai lini akan mengarah pada pencapaian target bisnis. Penerapan Sistem manajemen talenta dipilih sebagai salah satu strategi yang cukup terintegrasi dan berkesinambungan untuk dapat mengelola kinerja pegawai mulai tahap awal hingga tahap akhir, karena pada setiap tahapnya memfokuskan Perusahaan untuk menyiapkan dan menyediakan Pegawai yang unggul dan andal.

Untuk memperoleh pegawai dengan kinerja yang diharapkan maka dibutuhkan strategi pengembangan (Pendidikan dan Pelatihan) SDM yang tepat, dalam hal ini Perusahaan menerapkan kebijakan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Kompetensi yang dikembangkan di sini meliputi *soft competency* dan *hard competency*. Setiap Pegawai wajib penerapan Pemetaan Kompetensi dan Desain Pembelajaran (Mapping Competency dan Learning Design), Implementasi Talent Development atas Talent Pool yang dimiliki Perusahaan, Knowledge Management System, SAP HCM Strategic Management, dan SAP Fi Enhancement.

Asesmen dilakukan kepada seluruh Pegawai setiap 2 tahun sekali sebagai salah satu langkah untuk memetakan

To fulfil the Company's objective to be an Emerging Industry Leader, Pelindo III strives to increase the Human Capital capacity to be ready to meet the objective. The Company also always strives to manage and develop creativity and continuous innovation for every Pelindo III Human Capital so that it can integrate with the development and rapid business changes.

Pelindo III also continuously adjusting the Human Capital quality with an increasingly modern current business era, where a combination of technology and Human Capital becomes a necessity. Therefore, the Company prepares and procures the latest technology along with education and training for the Human Capital.

THE FOCUS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN 2019

The Company understands that Employees are one of its strategic factors and the capital to address business challenges. Hence, proper Human Capital management and development strategy is required to ensure the Company's performance. Through Human Capital management policy based on employee performance management, the Company can ensure that every activity undertaken by employees of various lines will lead to the achievement of business targets. The talent management system implementation is chosen as one of the relatively integrated and continuous strategies to manage employee performance from the beginning to the final stage since the Company focuses on preparing and providing superior and reliable employees at each stage.

To obtain employees with the expected performance, an appropriate Human Capital development strategy (Education and Training) is required. In this case, the Company then implements the competency-based Human Capital development policy with the competencies to be developed include soft competency and hard competency. Every Employee is obliged to apply Competency & Learning Design Mapping, Talent Development Implementation on Talent Pool owned by the Company, Knowledge Management System, SAP HCM Strategic Management, and SAP Fi Enhancement.

Assessment is conducted on all employees once every two years as a measure to map employee competency.

kompetensi pegawai yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pengembangan terhadap masing-masing pegawai. Dalam hal kebijakan Karir Pegawai, Perusahaan mengaturnya dalam Peraturan Direksi tersendiri. Sama halnya dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja Pelindo III, dimana setiap Pegawai di Perusahaan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam beberapa hal, salah satunya kesempatan dalam berkarir. Setiap Pegawai memiliki jalur pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan bidang jabatannya yang dapat memberikan implikasi terhadap pencapaian strategi bisnis Perusahaan dan hal ini masih merupakan rangkaian dalam sistem manajemen kinerja SDM.

Pegawai yang hendak dipromosikan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kebijakan Karir Pegawai, antara lain hasil asesmen yang baik dan pemenuhan kompetensi dari jabatan yang dituju. Apabila ada beberapa kandidat yang memiliki kualifikasi yang sama, maka Dewan Pertimbangan Jabatan bersama dengan Direksi secara panel akan menentukan kandidat yang paling berkompeten dengan jabatan tersebut.

Pada tahun buku 2019, tercatat telah dilakukan mutasi kepada 914 pegawai dengan rincian promosi kepada 224 pegawai dan rotasi kepada 719 pegawai.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Dalam rangka menetapkan strategi pengelolaan SDM baik dalam konteks Rencana Kerja Perusahaan maupun inisiatif strategis yang dibutuhkan selama berjalannya aktivitas usaha, Perusahaan senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dasar aturan di internal Perusahaan, dan beberapa referensi lainnya. Pedoman-pedoman ini merupakan sebuah landasan yang telah disesuaikan dengan dimensi-dimensi pengelolaan SDM yang dibutuhkan.

Landasan kebijakan pengelolaan SDM yang berlaku di Perusahaan meliputi:

- **Pengelolaan SDM Mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**
Referensi legal-formal utama dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan, yaitu dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam menetapkan kebijakan yang diperlukan, regulasi tersebut telah mengatur banyak aspek yang diperlukan seperti:
 - o Kesetaraan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - o Perencanaan dan informasi tenaga kerja;
 - o Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - o Penempatan tenaga kerja;
 - o Hubungan kerja;
 - o Perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja;

Following the assessment, a development phase is assigned to each employee. Regarding Employee Career, the Company regulates the policy in a separate Regulation of the BOD. Similarly, an agreement has been outlined in the Collective Labour Agreement between the Company and Pelindo III Labour Union, where every employee has equal rights and opportunities in several respects, one of which is an opportunity for career development. Every Employee has a development path tailored to the needs of their field that can provide implications for the realisation of the Company's business strategy. This career path is stipulated in a development series in the Human Capital performance management system.

To be promoted, an employee must meet the requirements specified in Employee Career Policy, such as a good assessment result and competence fulfilment of the intended position. If several candidates share the same qualifications, the Position Advisory Board together with the BOD will determine the most competent candidate for the position.

In the 2019 fiscal year, there were position transfer procedures conducted to 914 employees, consisting of promotion for 224 employees and rotation to 719 employees.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT POLICY

To determine a proper human capital management strategy both in the context of Corporate Work Plan and strategic initiatives that required during business activities, the Company continuously refers to the prevailing laws and regulation in Indonesia, internal corporate regulation, and several other references. These act as the foundation that has been tailored to the human capital management dimensions.

The foundation of Human Capital management policy in the Company includes:

- **Human Capital Management Referring to Law No. 13 of 2003 on Manpower**
The primary legal-formal reference in formulating human capital management policy in the Company is the provisions stipulated in Law No. 13 of 2013 on Manpower. In determining the required policies, this regulation stipulates various aspects, such as:
 - o Equality and fulfilment of human rights;
 - o Manpower planning and information;
 - o Implementation of work training;
 - o Manpower placement;
 - o Work relationship;
 - o Manpower protection, salary, and welfare;

- o Hubungan industrial; dan
 - o Pemutusan hubungan kerja.
- **Pengelolaan SDM Mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan**
Dalam tahapan selanjutnya, dasar kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan juga mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) yang muatannya telah merujuk pada substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan telah dilakukan pengembangan serta penyesuaian kembali dengan kondisi usaha di lingkungan Perusahaan.
 - **Pengelolaan SDM Mengacu pada Rencana Kerja Perusahaan**
Guna menyinergikan arah pengembangan usaha Perusahaan dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan, melalui Direktorat Sumber Daya Manusia, Pelindo III melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan dengan Rencana Kerja Perusahaan. Penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perusahaan diperlukan agar pilar SDM dapat dimaksimalkan untuk mendukung secara penuh atas rencana yang ditetapkan.
 - **Pengelolaan SDM Mengacu pada Referensi Lainnya**
Selain melakukan pemenuhan dasar kebijakan utama dalam melakukan pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan, Pelindo III juga mengadopsi beberapa strategi pengelolaan SDM berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti Konsultan Human Capital, baik yang bersifat umum maupun kajian yang dikhususkan kepada Perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan menjadi lebih tepat dan sesuai pada kebutuhan. Selain itu, pengelolaan SDM di lingkungan Perusahaan juga semakin dekat dengan fenomena-fenomena pengelolaan SDM yang terjadi dewasa ini.
- o *Industrial relationship; and*
 - o *Work termination*
 - **Human Capital Management Referring to the Articles of Association and Bylaws**
In the next stage, policy foundation for human capital management in the Company refers to its Articles of Association and Bylaws, of which the contents have been in line with the substance contained in Law No. 13 of 2003. Such a policy is continuously developed and adjusted according to the recent business conditions in the Company.
 - **Human Capital Management Referring to the Work Plan**
To synergise the Company's business development with its human capital management policies and strategies, Pelindo III conducts various adjustments in line with the set Company Work Plan through its Human Capital Directorate. Such adjustments are necessary to maximise human capital pillars, which shall be able to fully support the plans that have been determined by the Company.
 - **Human Capital Management Referring to Other References**
Aside from fulfilling the basic main policies in managing human capital in the Company, Pelindo III also adopts several human capital management strategies based on reviews, either general or specific to the Company, conducted by external parties, such as Human Capital Consultant. This is implemented so policies related to human capital management in the Company are more accurate and following the needs of the Company. Also, human capital management in the Company will be able to keep abreast of the phenomena occurring in terms of Human Capital Management nowadays.

Referensi dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan SDM Perusahaan tahun 2019 meliputi:

References utilised in formulating human capital management policies in the Company in 2019 include:

REFERENSI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM 2019

REFERENCE OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT FORMULATION IN 2019

PERUMUSAN KEBIJAKAN <i>POLICY FORMULATION</i>	NAMA VENDOR <i>VENDOR NAME</i>
Restrukturisasi Organisasi <i>Organisational Restructuring</i>	PT Dunamis
<i>Learning Design</i>	PPM Management
<i>Remuneration Management</i>	Ahmad Muldiana (Konsultan Independen) <i>Ahmad Muldiana (Independent Consultant)</i>
Asesmen Budaya Perusahaan <i>Corporate Culture Assessment</i>	PT ACT Consulting
Implementasi SMK3L dan ISPS Code <i>SMK3L and ISPS Code Implementation</i>	PT TUV Rheinland Indonesia

PENGELOLAAN SDM

Melihat signifikannya peran SDM bagi kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan, struktur organisasi yang telah ditinjau dan disahkan melalui Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.51/OS.0101/P.III-2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penyempurnaan atas Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.10/OS.0101/P.III-2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.III/OS.0101/P.III-2015 tanggal 1 September 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Pelindo III.

Dalam menjalankan kegiatan di bidang pengelolaan SDM, Direktur Sumber Daya Manusia dibantu oleh 2 pejabat dengan level jabatan SM Strategi dan Kesisteman SDM serta seorang SM Pelayanan SDM dan HSSE.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Understanding the significant role of Human Capital for the Company's business activities, the organisational structure has been reviewed and validated through the Regulation of the BOD No. PER.51/OS.0101/P.III-2017 dated 18 July 2017 on the Improvement to the Regulation of the BOD No. PER.10/OS.0101/P.III-2016 on the Amendment to the Regulation of the BOD No. PER.III/OS.0101/P.III-2015 dated 1 September 2015 on the Organisational Structure and Administration at Pelindo III Head Office.

In carrying out Human Capital management activities, the Human Capital Director is assisted by two officers, namely the SVP Human Capital System and Strategy and SVP Human Capital Services and HSSE.

PROFIL SENIOR MANAGER STRATEGI DAN KESISTEMAN SDM

PROFILE OF SENIOR VICE PRESIDENT HUMAN CAPITAL SYSTEM AND STRATEGY

Nama Name	I Putu Sukadana
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Denpasar, 13 Juli 1976 Denpasar, 13 July 1976
Pendidikan Education	Magister Manajemen Master's Degree in Management
Tahun Aktif Tenure	1 Mei 1999 1 May 1999
Riwayat Jabatan Career History	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM 2. SVP Human Capital System and Strategy 3. General Manager Pelabuhan Kupang 4. Deputi Bidang Operasi 5. Asisten Senior Manager Pelayanan Terminal 6. Manajer Operasi dan Komersial Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap 7. Manajer Operasi dan Komersial Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah 8. Auditor Bidang Operasi 9. Planner di Terminal PKS 10. Pelaksana Pelayanan Kapal, Barang dan Property di Pelabuhan Celukan Bawang <ol style="list-style-type: none"> 1. Senior Vice President of Human Capital System and Strategy 2. SVP Human Capital System and Strategy 3. General Manager Port of Kupang 4. Deputy of Operation Field 5. Vice President of Terminal Services 6. Operation and Commercial Manager Port of Tanjung Intan, Cilacap 7. Operation and Commercial Manager Port of Sampit, Central Kalimantan 8. Operations Auditor 9. The Planner in PKS Terminal 10. Executing Ship Services, Goods and Property in Port of Celukan Bawang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	KEP.37/KP.0403/P.III-2018 tanggal 22 Januari 2018 KEP.37/KP.0403/P.III-2018 dated 22 January 2018

PROFIL SENIOR MANAGER PELAYANAN SDM DAN HSSE

PROFILE OF SENIOR VICE PRESIDENT HUMAN CAPITAL SERVICES AND HSSE

Nama <i>Name</i>	Edi Priyanto
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Klaten, 23 Oktober 1976 <i>Klaten, 23 October 1976</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Magister Manajemen <i>Master's Degree in Management</i>
Tahun Aktif <i>Tenure</i>	1 Mei 1999 <i>1 May 1999</i>
Riwayat Jabatan <i>Career History</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SVP Human Capital System and Strategy 2. Vice President Corporate Communications 3. Asisten Manajer Pemasaran 4. Analis Sistem Manajemen 5. Supervisor Keamanan dan K3 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>SVP Human Capital System and Strategy</i> 2. <i>Vice President of Corporate Communications</i> 3. <i>Assistant to Marketing Manager</i> 4. <i>Management System Analyst</i> 5. <i>Safety and OHS Supervisor</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appoinmnet</i>	KEP.37/KP.0403/P.III-2018 tanggal 22 Januari 2018 <i>KEP.37/KP.0403/P.III-2018 dated 22 January 2018</i>

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SDM ORGANISATIONAL STRUCTURE OF HUMAN CAPITAL DIRECTORATE

Direktur Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Director</i>	Toto Heliyanto
Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM <i>Senior Vice President Human Capital System and Strategy</i>	I Putu Sukadana
Asisten Senior Manager Perencanaan SDM dan Manajemen Talenta <i>Vice President Human Capital Planning and Talent Management</i>	Anjar Sulistyorini
Asisten Senior Manager Pengembangan Organisasi dan Sistem SDM <i>Vice President Organisation Development and Human Capital System</i>	Baiq Nurul Hikmawati
Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE <i>Senior Vice President Human Capital Services and HSSE</i>	I Putu Sukadana
Asisten Senior Manager Administrasi SDM, Kesejahteraan, dan Hubungan Industrial <i>Vice President Human Capital Administration, Compensation, and Industrial Relations</i>	Riza Rosdiana
Asisten Senior Manager Pengembangan SDM <i>Vice President Human Capital Development</i>	Oscar Yogi Yustiano
Asisten Senior Manager Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) <i>Vice President Health, Safety, Security, and Environment (HSSE)</i>	Bondan Winarno
Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat <i>Senior Vice President General Affair/Head Office</i>	Rudi Herdiyantoro
Asisten Senior Manager Administrasi dan Pelayanan Umum <i>Vice President Administration and General Services</i>	I Nengah Nariasa
Supervisor Keuangan Kantor Pusat <i>Supervisor Head Office Finance</i>	Listiyo Ariftiyanto
Supervisor Pemeliharaan Fasilitas Kantor Pusat <i>Supervisor Head Office Facilities Maintenance</i>	Dwi Endriawan Priatna
Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa <i>Senior Vice President Procurement</i>	Ismartadianto
Asisten Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa Regional I <i>Vice President Procurement Region I</i>	Theresia Rury Setyawati
Asisten Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa Regional II <i>Vice President Procurement Region II</i>	Wahju Widyansjah
Asisten Senior Manager Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dan Anak Perusahaan <i>Vice President Procurement System and Subsidiary</i>	Herry Wisanto
Senior Manager Hukum <i>Senior Vice President Legal</i>	Raden Mas Kumara Anindhita Widyaswendra
Asisten Senior Manager Perikatan Perusahaan <i>Vice President Legal Agreement</i>	Muhammad Fitrianto Malik
Asisten Senior Manager Bantuan Hukum dan Peraturan Perusahaan <i>Vice President Legal Counsel and Regulation</i>	Umi Syarifah Ambarwati

VISI DAN MISI SDM

Dalam rangka meningkatkan semangat perubahan positif di lingkungan Perusahaan serta meningkatkan standar layanan di bidang jasa kepelabuhanan dan usaha penunjang yang profesional dan berdedikasi oleh setiap Pegawai, Divisi SDM memiliki visi dan misi yaitu:

VISI SDM

“Menjadikan SDM yang berkompeten, berkinerja andal, dan berbudi pekerti luhur dalam menunjang pencapaian Perusahaan sebagai *Emerging Industry Leader*”

MISI SDM

1. Terwujudnya pemetaan kompetensi dan terimplementasinya program pengembangan pegawai berdasarkan strategi bisnis Perusahaan;
2. Pembentukan organisasi yang sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan sebagai terminal operator;
3. Terwujudnya proses promosi pejabat struktural melalui sistem manajemen talenta;
4. Pemberian remunerasi pegawai sesuai dengan kontribusi pegawai terhadap Perusahaan; dan
5. Peningkatan citra Perusahaan melalui pembentukan budaya Perusahaan menuju profesionalisme serta peningkatan peran dalam komunitas masyarakat.

HUMAN CAPITAL VISION AND MISSION

To maintain the spirit of positive change in the Company as well as standards in professional and devoted port services and supporting businesses, the Human Capital Division has established the following vision and mission:

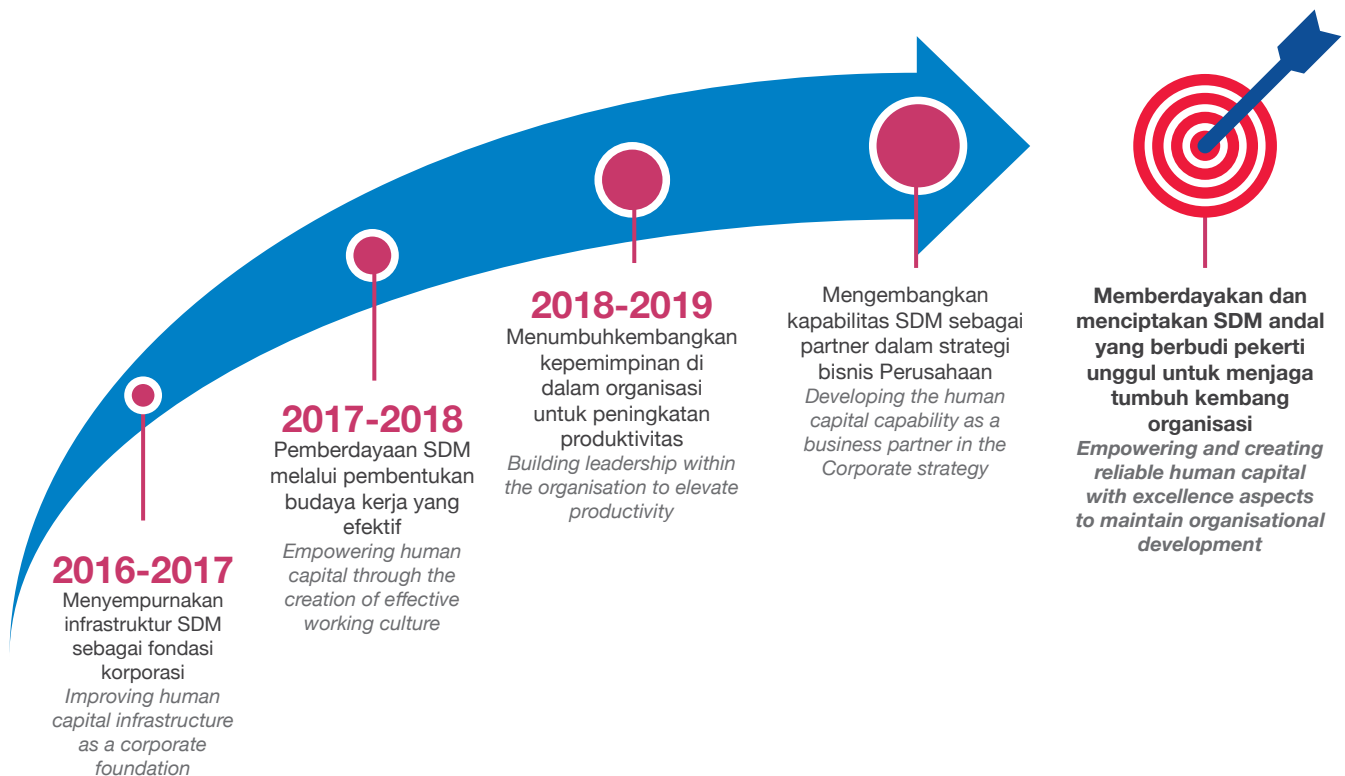
HUMAN CAPITAL VISION

“To establish competent human capital with reliable performance and noble behaviour in supporting the Company’s objective to be an Emerging Industry Leader”

HUMAN CAPITAL MISSION

1. *To realise the competency mapping and implementation of employee development programme based on Company business strategy;*
2. *To establish an organisation that is based on Company business strategy as a terminal operator;*
3. *To realise the promotion process of structural officials through talent management system;*
4. *To provide employee remuneration based on the contribution to the company; and*
5. *To improve the corporate image by creating professionalism within the corporate culture as well as to improve role in the community.*

JEJAK LANGKAH SISTEM PENGEMBANGAN SDM THE MILESTONE OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT SYSTEM



FOKUS PENYEMPURNAAN PENGELOLAAN SDM HUMAN CAPITAL MANAGEMENT FOCUS

1.	Struktur organisasi yang kondusif mendorong pemberdayaan <i>A conducive organisation structure to support the empowerment</i>
2.	Mewujudkan budaya organisasi yang mendukung produktivitas pegawai <i>The realisation of organisational culture supporting employee's productivity</i>
3.	Pengelolaan manajemen kinerja yang efektif <i>Effective performance management</i>
4.	Pelatihan dan pengembangan pegawai <i>Employee training and development</i>
5.	Pola karir berdasarkan pemenuhan standar kompetensi jabatan <i>Career pattern based on the fulfilment of position competency standards</i>
6.	Pengelolaan pegawai bertalenta sebagai strategi <i>retain</i> <i>Talented employee management as a retain strategy</i>
7.	Sistem imbal jasa berkeadilan sesuai kinerja <i>Fair employment benefit system commensurate to performance</i>
8.	Integrasi data dan informasi kepegawaian <i>Integration of employee data and information</i>

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan *Board Manual* yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang *Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual dan Code of Corporate Governance)*, dinyatakan bahwa ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktorat SDM secara umum adalah melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, dan penilaian kinerja pegawai dengan rincian:

- Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan pengembangan organisasi, serta pengelolaan jabatan dan pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi;
- Tersedianya strategi dan kebijakan dalam mengembangkan kesisteman SDM yang terintegrasi;
- Penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan *Coaching Mentoring Counseling*, manajemen talenta terintegrasi, asesmen, dan manajemen karir;
- Melakukan evaluasi kebutuhan SDM;
- Merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan rekrutmen pegawai;
- Merencanakan, menetapkan, melaksanakan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan terkait dengan kesejahteraan SDM sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
- Melaksanakan penilaian kinerja individu dan administrasi data pegawai melalui pengelolaan sistem informasi SDM;
- Menyelenggarakan dan membina kegiatan pembuatan surat keputusan pengangkatan pegawai, kenaikan periodik, penyetaraan jabatan anak perusahaan, serta

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF HUMAN CAPITAL DIRECTORATE

Based on the *Board Manual* stipulated in the Joint Decision of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of Corporate Governance Guide (*Board Manual and Code of Corporate Governance*), it is stated that the scope of duties and responsibilities of the Human Capital Directorate, in general, is to carry out the activities of planning and development of Human Capital, employment and organisation system, welfare, employee administration and employee performance appraisal, with the following details:

- *Planning, establishing, controlling, fostering, analysing, and evaluating the organisational development policies, management of positions and works based on the organisational structure;*
- *Availability of strategies and policies in developing an integrated human capital system;*
- *Organising and implementing Coaching Mentoring Counseling, integrated talent management, assessment, and career management;*
- *Evaluating human capital needs;*
- *Planning, organising, evaluating, and reporting employee recruitment activities;*
- *Planning, establishing, implementing, fostering, analysing, and evaluating activities related to human capital welfare based on the prevailing policies;*
- *Assessing individual performance and administration of employee data through the management of human capital information systems;*
- *Organising and fostering the preparation of employee appointment decree, periodical rise, equalisation of position in the subsidiary, and employees who undergo*

- pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan pegawai pensiun termasuk pensiun dini;
- Melaksanakan kegiatan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyusun, menetapkan, dan menyelenggarakan program-program pengembangan SDM (mulai dari pembuatan analisa kebutuhan *training*, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, terdiri dari kegiatan administrasi, penyediaan fasilitas sampai pengembangan modul, evaluasi dan *review* kegiatan pelatihan, serta tindak lanjut hasil pendidikan dan pelatihan, terpenuhinya kebutuhan cabang atas pengembangan SDM yang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan); dan
 - Pelaporan di bidang kepegawaian secara korporat.

TARGET PENGELOLAAN SDM BERDASARKAN RKAP 2020

Di tahun 2019, Perusahaan telah menetapkan target dalam hal pengelolaan SDM yang terangkum dalam RKAP 2020. Target dan anggaran di bidang SDM diperlukan dalam rangka menyelaraskan rencana-rencana Perusahaan di tahun buku 2020, serta mengingat posisi SDM sebagai salah satu bagian dari pilar inti usaha yang perannya signifikan bagi Perusahaan. Target-target yang ditetapkan meliputi:

1. Implementasi SMK3L dan ISPS Code.
2. Pemetaan kompetensi pegawai dan analisis *gap* kompetensi dengan kebutuhan organisasi.
3. Penerapan sistem IT yang menunjang *Human Capital Managemen System*.
4. Desain remunerasi pegawai yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan motivasi kerja pegawai.

PROGRAM KERJA DIVISI SDM TAHUN 2020

Guna merealisasikan target-target pengelolaan SDM yang diperlukan, Perusahaan menetapkan beberapa program kerja yang telah disetujui dan termuat di dalam RKAP 2020 meliputi:

1. Membuat analisis aplikasi *existing* dan rencana pengembangan aplikasi *web-based* HSSE Korporat.
2. *Build up* aplikasi *web-based* HSSE korporat.
3. Uji coba dan *Go Live* aplikasi.
4. Penyusunan Pelindo III *Contractor Safety Management System* (CSMS).
5. Sosialisasi Pelindo III CSMS kepada Direktorat dan Divisi terkait.
6. *Kick off* Pemberlakuan Pelindo III CSMS.
7. Sistematisasi *database* kompetensi pegawai Pelindo III.
8. Pembangunan aplikasi Learning Management System (LMS).
9. Membuat sistem perhitungan purnabakti imbalan pascakerja.
10. Membuat sistem penyesuaian kenaikan periodik dan pangkat golongan.
11. Melakukan *review* tabel merit dengan memperhatikan UMR dan Peraturan Direksi tentang penghasilan perusahaan.
12. Menyusun laporan hasil kajian remunerasi pegawai.

pension preparation period and pension employee, including early pension;

- *Carrying out industrial relation activities based on the prevailing laws and regulations;*
- *Compiling, establishing, and organising the human capital development programmes (starting from an analysis of training needs, organising educational and training activities comprising administration activities, provision of facilities and module development, evaluating and reviewing training activities, following-up education and training results, fulfilling the needs of branches for human capital development that are based on the established strategies); and*
- *Corporate reporting of personnel affairs.*

HUMAN CAPITAL TARGETS BASED ON 2020 RKAP

In 2019, the Company has set the targets for Human Capital management summarised in the 2018 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). Targets and budgets in the Human Capital sector are necessary to harmonise the Company's plans in the financial year, as well as considering Human Capital as one part of the core business pillar whose role is significant for the Company. The targets set include:

1. *SMK3L and ISPS Code implementation.*
2. *Employee competency mapping and competency gap analysis with the organisation's requirement.*
3. *IT system implementation supporting Human Capital Management System.*
4. *Employee remuneration design oriented on employee performance and increased motivation.*

HUMAN CAPITAL DIVISION WORK PROGRAMMES IN 2020

To realise the Human Capital management targets, the Company has set several work programmes which have been agreed upon and included in the 2020 RKAP, including:

1. *Analysing the existing apps and the plan to develop web-based Corporate HSSE apps.*
2. *Building-up on web-based Corporate HSSE apps.*
3. *App testing and Go Live.*
4. *Drafting of Pelindo III Contractor Safety Management System (CSMS).*
5. *The socialisation of Pelindo III CSMS to related Directorate and Division.*
6. *Pelindo III CSMS Enforcement Kick-off.*
7. *The database system of Pelindo III employee competency.*
8. *Development of the Learning Management System (LMS) app.*
9. *System establishment for calculation of post-retirement honorarium.*
10. *System establishment of periodic rise adjustment and class ranks.*
11. *Reviewing the merit table in consideration of UMR and BOD Regulation on company income.*
12. *Drafting the employee remuneration review report.*

13. Penyusunan sistem Manajemen Karir terintegrasi.
14. *Review* Peraturan Direksi sesuai dengan PKB.
15. Penyusunan Peraturan Direksi terkait hal-hal yang belum diatur dalam sistem kepegawaian.
16. *Review* Kompetensi.
17. Penyusunan proses bisnis terkait Bidang *Human Capital System* dan Strategi.
18. *Review* formasi Kantor Pusat dan regional.
19. *Review* struktur organisasi Kantor Pusat dan regional.

DASAR KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Regulasi tata kelola SDM di internal Perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi yang secara spesifik mengatur kebijakan mengenai aspek-aspek SDM dalam Perusahaan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Setiap Peraturan Direksi tentang SDM yang disusun sangat memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko hukum yang mungkin muncul dari pengelolaan dan penerapan SDM sehingga dapat membantu Perusahaan untuk lebih fokus pada proses bisnis dan target perusahaan di tahun berjalan maupun jangka panjang. Rujukan atas setiap kebijakan meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang terkait, maupun yang menjadi turunannya.

REKRUTMEN

Dalam rangka pencapaian target kinerja Perusahaan dan berdasarkan analisis kebutuhan SDM tahun 2019, beberapa rekrutmen dilakukan dengan memfokuskan pada perekrutan SDM pada fungsi operasional dan bisnis. Pada tahun 2019 dilakukan perekrutan tenaga Pandu sebanyak 7 orang pada bulan Oktober 2019. Dasar kebijakan pelaksanaan perekrutan tenaga pandu ini mengacu pada perencanaan SDM. Pelaksanaan teknis perekrutan berpedoman pada Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.0002/KP.0102/P.III-2018 tentang Penerimaan Pegawai dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 57 tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

Pelaksanaan Rekrutmen tenaga Pandu tahun buku 2019 dilaksanakan di kota Surabaya dengan metode *open recruitment*, sehingga memungkinkan bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga Pandu untuk melamar posisi tersebut. Dari *open recruitment* tersebut, diperoleh sekitar 50 pelamar yang akan diseleksi lebih lanjut mengikuti ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan seleksi tenaga pandu, Perusahaan bekerja sama dengan konsultan untuk pelaksanaan.

13. *Establishment of an integrated Career Management.*
14. *Review on BOD Regulation with PKB.*
15. *Arrangement of BOD Regulation related to matters that have not been regulated in the staffing system.*
16. *Competency Review.*
17. *Establishment of business process related to Human Capital System and Strategy.*
18. *Formation Review on Head Office and Region.*
19. *Organisational structure review on Head Office and Region*

BASIC HUMAN CAPITAL MANAGEMENT POLICY

The policies regarding Human Capital governance within the Company are stipulated in a BOD Regulation, specifically on the Human Capital aspect based on Good Corporate Governance (GCG) principles. Every BOD Regulation concerning human capital fully considers the higher laws and regulations. This is to minimise legal risks that may arise within human capital management and to support the Company to focus more on the business processes and targets of the current year and in the long-term. Policy references include the prevailing labour laws, Government Regulations, related Ministerial Regulations, as well as their derivatives.

RECRUITMENT

To achieve the Company's performance targets and based on the analysis of Human Capital needs in 2019, a few recruitments are carried out by focusing on recruiting Human Capital in operational and business functions. There is a recruitment of seven Pilots in October 2019. The policy basis for implementing pilot recruitment refers to Human Capital planning. The technical implementation of recruitment is guided by the Regulation of the BOD No. PER.0002/KP.0102/P.III-2018 on the Employee Recruitment and Regulation of the Minister of Transportation No. PM 57 of 2015 dated 11 March 2015 concerning Pilotage and Tugboat services.

Implementation of Pilot recruitment in 2019 was carried out in Surabaya with an open recruitment method, making it possible for people who are qualified as Pilot staff to apply for the position. From the open recruitment, around 50 applicants will be selected to further follow the applicable provisions. In selecting the pilot staff, the Company cooperated with consultants during the implementation.

PENGELOLAAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Guna melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai, Perusahaan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) sesuai dengan Peraturan Direksi No. PER.16.1/KP.0302/P.III-2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI). Sejak tahun 2012, penilaian kinerja pegawai dilakukan secara *online* di situs smki.pelindo.co.id. Hal ini dilakukan agar penilaian kinerja pegawai menjadi lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Penilaian kinerja pegawai terbagi dalam 4 tahap, yaitu perencanaan, pemantauan, penilaian, serta penghargaan dan hukuman.

Penanggung jawab penilaian kinerja pegawai adalah Subdirektorat Human Capital Services, di bawah Vice President Human Capital Administration, Compensation, and Industrial Relations. Hasil dari penilaian kinerja pegawai dapat digunakan dalam proses manajemen SDM di lingkungan Perusahaan, misalnya salah satu data pertimbangan promosi pegawai, usulan peserta ibadah keagamaan, kenaikan periodik, perhitungan bonus pegawai, dan data *talent management*.

Berdasarkan hasil *review* dan evaluasi RJPP tahun 2012-2016 tercatat rata-rata pertumbuhan kinerja pegawai setiap tahunnya sebesar 2,6%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan positif antara jumlah pegawai dengan hasil pencapaian produktivitas pegawai dari tahun 2012 hingga 2016. Sementara itu, di 2018 Penilaian Kinerja Pegawai akan dilakukan perhitungan pada Kuartal I tahun 2019 untuk dijadikan dasar perhitungan bonus yang akan dibayarkan kepada Pegawai pada Kuartal II 2019. Di 2020, Penilaian Kinerja Pegawai akan dilakukan menggunakan model dan aplikasi baru yaitu *Portizen Performance* untuk menilai kinerja/SKI dan *Portizen Value* (Budaya) untuk menilai perilaku/PI menggantikan model dan aplikasi SMKI sebelumnya. Akan disusun peraturan direksi untuk SMKI model baru.

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Perusahaan meyakini bahwa agar dapat bertahan di era *disruption* saat ini, Perusahaan harus memiliki kekuatan bisnis yang andal dan SDM yang kompeten. Di samping itu, SDM dituntut untuk mempunyai semangat penuh dalam melakukan inovasi demi kemajuan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan secara berkelanjutan memberikan program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Pegawai, baik dari level staf hingga manajemen puncak. Dengan diberikannya program pendidikan dan pelatihan Pegawai, diharapkan terdapat peningkatan kecepatan, efektivitas, dan efisiensi kerja dalam organisasi di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat.

PERFORMANCE MANAGEMENT

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

To evaluate employee performance, the Company utilises Individual Performance Management System (SMKI) following the Regulation of the BOD No. PER.16.1/KP.0302/P.III-2012 dated 1 February 2012 on the Individual Performance Management System (SMKI). Since 2012, employee performance assessments have been conducted online at smki.pelindo.co.id. This is done so that the assessment of employee performance is more efficient in time and cost. Employee performance assessment is divided into four stages, namely planning, monitoring, evaluation, and rewards and punishments.

The person in charge of employee performance evaluation is the Human Capital Services Sub-Directorate under the Vice President of Human Capital Administration, Compensation, and Industrial Relations. The assessment results can be used in the Human Capital management process within the Company, e.g. to be one of the data for considering employee promotions, proposals for participants in religious worship, periodic increases, calculation of employee bonuses, and talent management data.

Based on the results of the 2012-2016 RJPP review and evaluation, the average annual employee performance growth is 2.6%. This shows that there is a positive relationship between the number of employees and the achievement of employee productivity from 2012 to 2016. Meanwhile, Employee Performance Assessment in 2018 will be calculated in the first quarter of 2019 to become the basis for calculating bonuses that will be paid to employees in the Second Quarter of 2019. In 2020, Employee Performance Assessment will be conducted with a new model and app, namely *Portizen Performance* to assess performance/SKI and *Portizen Value* (Culture) to assess behaviour/PI to replace the previous SMKI model and app. A new BOD Regulation for the new SMKI model will be drafted.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROGRAMME

The Company believes that to survive in the current disruption era, the Company must have a reliable business force and competent Human Capital. Also, Human Capital is required to have full enthusiasm in creating innovations to encourage Company progress. For this reason, the Company continuously provides education and training programmes for all employees from staff level to top management. With the provision of employee education and training programmes, it can further improve the speed, effectiveness, and work of efficiency in organisations, as well as the development of knowledge and technology that continues to grow rapidly.

DASAR DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Dalam proses pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan SDM, Perusahaan berpedoman pada Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.28.1/KP.0301/P.III-2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai.

JENIS PENGEMBANGAN SDM

Program pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap serta mental pegawai melalui berbagai metode pelatihan seperti pendidikan di sekolah formal, *workshop*, seminar, simposium, dan studi banding.

Dalam rangka memberikan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan dan memastikan terlaksananya Diklat secara efektif dan efisien, sejak tahun 2017 Perusahaan telah menyusun beberapa *tools* yang dirancang untuk membantu mendukung pelaksanaan diklat secara profesional, yaitu:

a. Hard Competency

Program untuk melakukan identifikasi kemampuan-kemampuan teknis (*hard competency*) untuk seluruh fungsi di Kantor Pusat Pelindo III meliputi fungsi Operasi dan fungsi *Supporting*.

b. Learning Design

Rancangan proses pembelajaran bagi pegawai dalam organisasi, termasuk di dalamnya perumusan proses dan *content* dari proses belajar yang akan dijalani pegawai. Manfaat *Learning Design* antara lain sebagai berikut:

- 1) Membantu manajemen mengidentifikasi *skill sets* dari fungsi-fungsi jabatan yang dapat mendukung terbentuknya kompetensi inti organisasi guna mencapai sasaran bisnis Perusahaan;
- 2) Menyediakan program pengembangan SDM yang terencana secara sistematis dan mendukung pencapaian sasaran bisnis Perusahaan;
- 3) Menyediakan *grand design* program pembelajaran yang berjenjang dan implementatif, baik untuk kelompok jabatan struktural (manajerial) maupun fungsional;
- 4) Menyediakan *Learning Curriculum* dan *Learning Syllabus* yang berorientasi pada peningkatan kompetensi karyawan dan sesuai dengan *grand design*;
- 5) Menyediakan pedoman bagi karyawan dalam menentukan pelatihan dan pengembangan yang akan diikutinya; dan
- 6) Menyediakan informasi bagi Manajemen dalam merancang rencana pengembangan pegawai.

c. Knowledge Management

Program untuk melakukan identifikasi dan menyusun fondasi kerangka untuk implementasi proses manajemen ilmu pengetahuan di dalam Perusahaan. Penyusunan *Knowledge Management* dilaksanakan dalam periode waktu 2017-2019.

BASIC AND OBJECTIVES OF ORGANISING EDUCATION AND TRAINING

In the process of implementing Human Capital education and training programmes, the Company is guided by the Regulation of BOD No. PER.28.1/KP.0301/P.III-2015 dated 2 February 2015 on employee education and training.

TYPES OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

The education and training programme aims to improve the quality of competencies, knowledge, skills, as well as the formation of employee attitudes and mentality through various training methods e.g. formal school education, workshops, seminars, symposiums, and comparative studies.

To provide an Education and Training programme that is in line with the Vision and Mission and ensures the implementation of Education and Training effectively and efficiently, since 2017 the Company has compiled several tools designed to help support the implementation of professional training, namely:

a. Hard Competency

A programme for identifying technical capabilities (hard competency) for all functions at Pelindo III Headquarters includes the Operations and Supporting functions.

b. Learning Design

The learning process design for employees in the organisation. This includes the formulation of the learning process and content that the employee will undergo. The benefits of Learning Design include the following:

- 1) *Assist the management in identifying skill sets of job functions that can support the formation of organisational core competencies to achieve the Company's business goals;*
- 2) *Provide a systematically planned Human Capital development programme and support the achievement of the Company's business objectives;*
- 3) *Provide a grand design for learning programmes that are tiered and applicable, both for structural (managerial) and functional groups;*
- 4) *Provide Learning Curriculum and Syllabus that is oriented towards improving employee competency and based on the grand design;*
- 5) *Provide guidelines for employees in determining the training and development they will follow; and*
- 6) *Providing information for management in designing employee development plans.*

c. Knowledge Management

A programme to identify and formulate a framework for implementing the knowledge management process within the Company. Knowledge Management preparation is carried out in the 2017-2019 period.

Pada tahun pertama (2018) Knowledge Management Tahap II, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Workshop Knowledge Capture serta pembentukan Knowledge Community (KONCO) dimana telah ditetapkan tiap 2 bulan sekali untuk dilakukan pertemuan. Penerapan Knowledge Management selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dengan mendatangkan Subject Matter Expert (SME).

In the first year (2018) of Knowledge Management Phase II, the Company has carried out Knowledge Capture Workshop activities, the formation of Knowledge Community (KONCO) where it has been agreed upon to hold a meeting every two months. The following of Knowledge Management implementation will be carried out by bringing a Subject Matter Expert (SME).

KEGIATAN PELATIHAN 2019

Dalam rangka menciptakan sumber daya yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri saat ini, Perusahaan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara rutin. Realisasi program Diklat yang telah dilaksanakan di tahun 2019 sebanyak 241 kali pelatihan. Pendidikan dan Pelatihan ini diikuti oleh 1.329 pegawai organik dengan persentase rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 73% dari total pegawai.

TRAINING ACTIVITIES IN 2019

To create resources that have knowledge and competencies following the demands of the present industry, the Company regularly implements Education and Training. The realisation of the Education and Training programme that was implemented in 2019 was 241 training. The activity was participated by 1,329 organic employees with a percentage ratio of 73% of the total employees who had attended the training.

KEGIATAN PELATIHAN 2019 2019 TRAINING ACTIVITIES

NO	KETERANGAN DESCRIPTION	JUMLAH PEGAWAI TOTAL EMPLOYEE	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PELATIHAN TOTAL EMPLOYEE ATTENDED THE TRAINING	PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PELATIHAN PERCENTAGE OF EMPLOYEE ATTENDED THE TRAINING
1	Seluruh Pegawai Total Employee	1.820	1.329	73,0%
2	Pegawai Pria Male Employee	1.459	1.020	69,9%
3	Pegawai Wanita Female Employee	361	309	85,6%

Dengan realisasi 241 pelatihan, rata-rata jam pelatihan per tahun untuk pegawai Pelindo III adalah 41,95 jam/tahun dengan rincian 40,90 jam/tahun untuk pegawai pria dan 46,19 jam/tahun untuk pegawai wanita.

With the realisation of 241 training, the average training hours per year for Pelindo III employees are 41.95 hours/year with 40.90 hours/year for male employees and 46.19 hours/year for female employees.

PELATIHAN 2019 BERDASAR JUMLAH JAM DAN GENDER 2019 TRAINING BY TRAINING HOUR AND GENDER

NO	KETERANGAN DESCRIPTION	JUMLAH PEGAWAI TOTAL EMPLOYEE	JUMLAH JUDUL PELATIHAN TOTAL TRAINING	JUMLAH JAM PELATIHAN TOTAL TRAINING HOURS	RATA RATA JAM PELATIHAN/TAHUN AVERAGE TRAINING HOUR/ YEAR
1	Seluruh Pegawai Total Employee	1.820	241	76.341,5	41,95
2	Pegawai Pria Male Employee	1.459	241	59.668,5	40,90
3	Pegawai Wanita Female Employee	361	241	16.673	46,19

Program Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan akademik atau pendidikan profesi yang diikuti di lembaga pendidikan. Pada tahun 2019, Manajemen Pelindo III memberikan kesempatan kuliah Pasca Sarjana (S2) kepada pegawai-pegawai terpilih sebanyak 32 pegawai, untuk menuntut ilmu di berbagai Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

The Education and Training programme is divided into three, namely:

1. Formal Education

Formal education is academic education or professional education that is participated in educational institutions. In 2019, Pelindo III management provides Post-Graduate (S2) education for 32 selected employees to study in the best universities in Indonesia with the following details:

JUMLAH PESERTA PENDIDIKAN FORMAL DAN DAFTAR UNIVERSITAS 2019
NUMBER OF FORMAL EDUCATION PARTICIPANTS AND UNIVERSITY LISTS IN 2019

NO	UNIVERSITAS <i>UNIVERSITY</i>	JURUSAN <i>MAJOR</i>	JUMLAH <i>TOTAL</i>
1	Institut Teknologi Bandung	Magister Administrasi Bisnis <i>Master of Business Administration</i>	2
2	Universitas Airlangga	K3	1
3	Universitas Gajah Mada	Magister Manajemen <i>Master of Management</i>	2
4	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Manajemen Pengembangan Masyarakat <i>Community Development Management</i>	1
5	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Manajemen Proyek <i>Project Management</i>	1
6	PPM School of Management	Marketing Bisnis <i>Business Marketing</i>	22
7	IHE Delft Institute	Engineering	3
TOTAL TOTAL			32

2. Diklat Managerial

Diklat Managerial adalah diklat yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan struktural tertentu, yang terdiri atas Diklat Managerial tingkat Muda, tingkat Madya, dan tingkat Utama. Salah satu pelatihan peningkatan kompetensi pejabat struktural yang telah dilaksanakan di tahun 2019 adalah Pelatihan Directorship Program.

Guna mempersiapkan kader-kader pemimpin bidang SDM, telah dilaksanakan pelatihan Rancangan Strategis Program Pembelajaran Bidang SDM yang diikuti oleh 24 peserta. Program ini diharapkan mampu memberikan bekal kompetensi bidang pengelolaan SDM dan mempersiapkannya menjadi pemimpin di masa mendatang.

2. Managerial Training

Training is training that required to occupy certain structural positions, which consists of junior, middle level, primary level Training Managerial. One of the training to improve the competency of structural officials implemented in 2019 is the Directorship Programme Training.

To prepare the leading cadres in the Human Capital, a Strategic Design for Human Capital Learning Programme was participated by 24 participants. This programme is expected to provide competencies in the field of Human Capital management and prepare them to become future leaders.

3. Diklat Substansial

Substansial terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Diklat dasar

Program pelatihan yang menekankan pada *soft competency*, pembentukan sikap, kepribadian dan etika perusahaan, serta pengenalan bisnis perusahaan. Diklat Delivering Service Excellence, budaya perusahaan (change champion), Speak to Change, dan lain-lain diberikan untuk meningkatkan *soft competency* Pegawai.

2. Substantial Training

Substantial training is divided into three groups, namely:

a. Basic training

A training programme that emphasises soft competency, the formation of attitudes, personality and corporate ethics, while introducing the company's business. Delivering Service Excellence, corporate culture (change champion), Speak to Change, and other training to improve soft competency.

- b. Diklat teknis
Program yang menekankan pada pencapaian kompetensi teknis untuk bidang operasional, keuangan, teknik, SDM, hukum, kehumasan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sesuai jabatannya. Diklat *mandatory* meliputi pelatihan-pelatihan teknis yang dipersyaratkan dalam peraturan baik Nasional maupun Internasional.
- c. Diklat fungsional
Program yang menekankan pada persyaratan kompetensi yang diperlukan dalam jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional seperti Tenaga Pandu, bidang *Information and Technology*, dan Auditor diberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi bidangnya.

- b. *Technical training*
Programmes emphasising the achievement of technical competencies in the operational, financial, technical, Human Capital, legal, public relations, and other fields necessary for implementing duties according to their positions. The mandatory training includes technical training required in both National and International regulations.
- c. *Functional Training*
Programmes emphasising the necessary competency requirements in functional levels. Functional positions such as Pilot, Information and Technology, and Auditor staffs are given the necessary training to improve their field competencies.

REALISASI DIKLAT MANAGERIAL DAN SUBSTANSIAL 2019

Secara keseluruhan jumlah peserta Diklat Managerial dan Substansial adalah sebanyak 2.790 orang yang terdiri dari beragam jabatan, yaitu Manager Utama, Manager Madya, Manager Dasar, Pelaksana Utama, Pelaksana Madya, dan Pelaksana Muda. Uraian mengenai kegiatan Diklat Managerial dan Substansial di tahun 2019 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

THE REALISATION OF MANAGERIAL AND SUBSTANTIAL TRAINING 2019

Overall, the number of Managerial and Substantial Training participants is 2,790 people comprising of various positions, namely the Main Manager, Middle Manager, Basic Manager, Top Staff, Middle Staff, and Junior Staff. The description of Managerial and Substantial Training activities in 2019 is outlined in the following table:

REKAPITULASI PELAKSANAAN DIKLAT MANAGERIAL DAN SUBSTANSIAL 2019 RECAP OF MANAGERIAL AND SUBSTANTIAL TRAINING IMPLEMENTATION IN 2019

NO	NAMA PELATIHAN <i>NAME OF TRAINING</i>	BIDANG <i>FIELD</i>	MANAGER UTAMA <i>TOP MANAGER</i>	MANAGER MADYA <i>MIDDLE MANAGER</i>	
			(1-3)	(4-6)	
1	ECPP Group 18	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	1	1	
2	ECPP Group 17	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
3	Workshop Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan terhadap Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) <i>Workshop on Government Safeguarding and Development of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Strategic Projects</i>	HUKUM <i>LEGAL</i>	27	9	
4	Pelatihan dan Sertifikasi SIO HMC dan/atau Fixed Crane dan Forklift Batch I <i>SIO HMC and/or Fixed Crane and Forklift Training and Certification Batch I</i>	HSSE	0	0	
5	Workshop Humas di Lingkungan Pelindo III Group <i>Workshop on Public Relations in Pelindo III Group Vicinity</i>	HUMAS <i>PUBLIC RELATIONS</i>	0	0	



KELAS JABATAN | POSITION LEVEL

	MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/SUBSIDIARIES	JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)		
	1	0	0	0	0	0	3
	0	0	0	0	0	1	1
	5	1	0	0	0	0	42
	0	1	5	3	0	0	9
	0	4	12	3	4	0	23

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
6	Pelatihan dan Sertifikasi SIO HMC dan/atau Fixed Crane dan Forklift Batch II <i>SIO HMC and/or Fixed Crane and Forklift Training and Certification Batch II</i>	HSSE	0	0	
7	Pelatihan Publik Interpretasi dan Asesor KPKU BUMN <i>Public Training on KPKU SOE Interpretation and Assessor</i>	BIROPER	0	0	
8	Workshop Agile Culture And Execution Phase I <i>Workshop Agile Culture and Execution Phase I</i>	CM	0	11	
9	Seminar Nasional IKA UNDIP JATIM "Kompetensi SDM di Era Revolusi Industri 4.0" <i>IKA UNDIP JATIM National Seminar "Human Capital Competency in 4.0 Industrial Revolution Era"</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
10	Pelatihan dan Sertifikasi SIO Operator RTG, Forklift, Wheel Loader Batch 1 <i>RTG, Forklift, Wheel Loader Operator SIO Training and Certification Batch 1</i>	HSSE	0	0	
11	Pelatihan Peningkatan SIO RTG dari Kelas III menjadi SIO RTG Kelas II Batch 1 <i>Training to Improve RTG SIO from Class III into RTG SIO Class II Batch 1</i>	HSSE	0	0	
12	Pelatihan Improving Port Performance (IPP 1 General Cargo Operations) <i>Improving Port Performance Training (IPP 1 General Cargo Operations)</i>	OPERATIONAL	0	0	
13	Pelatihan dan Sertifikasi SIO Operator RTG, Forklift, Wheel Loader Batch 2 <i>RTG, Forklift, Wheel Loader Operator SIO Training and Certification Batch 2</i>	HSSE	0	0	
14	Pelatihan Peningkatan SIO RTG dari Kelas III ke Kelas II Batch 2 <i>Training to Improve RTG SIO from Class III into RTG SIO Class II Batch 2</i>	HSSE	0	0	
15	PR Indonesia Workshop & Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2019 <i>PR Indonesia Workshop & the 2019 Public Relations Indonesia Awards</i>	HUMAS PUBLIC RELATIONS	0	0	
16	Workshop Organization Alignment Model For Reinventing The Best Human Capital Strategy & Execution <i>Organisation Alignment Model for Reinventing the Best Human Capital Strategy & Execution Workshop</i>	SDM HUMAN CAPITAL	2	1	
17	Diklat Pengenalan Bisnis Perusahaan <i>Introduction Training and Education on Company Business</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
18	Pelatihan Persiapan Sertifikasi Supply Chain Manager <i>Training for Supply Chain Manager Certification</i>	OPERATIONAL	0	2	
19	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
0	1	6	0	0	0	7	
0	1	1	0	0	0	2	
21	13	11	1	1	2	60	
0	0	1	0	1	0	2	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	2	
1	11	7	2	2	0	23	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	3	0	0	0	3	
0	1	1	0	0	0	2	
0	1	0	0	0	0	4	
0	0	17	3	0	0	20	
2	0	1	0	0	0	5	
1	7	10	5	2	0	25	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
20	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	1	
21	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	0	
22	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	1	
23	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	0	
24	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	1	
25	Workshop Agile Culture and Execution Phase 2 Batch 1 <i>Agile Culture and Execution Phase 2 Workshop Batch 1</i>	CM	0	2	
26	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	0	
27	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	2	
28	APC KPKU BUMN <i>SOE KPKU APC</i>	PENGBIS <i>BUSINESS DEVELOPMENT</i>	0	0	
29	Assessment Center	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
30	Pelatihan Kontrak Design and Build <i>Design and Build Contract Training</i>	PBJ <i>PROCUREMENT</i>	0	0	
31	Workshop Kaderisasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III 2019 <i>The 2019 Labour Union Pelabuhan Indonesia III Regeneration Workshop</i>	SERIKAT PEKERJA <i>LABOUR UNION</i>	0	0	
32	Workshop Human Capital Forum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2019 <i>The 2019 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Human Capital Forum Workshop</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	4	15	
33	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	1	
34	Workshop Agile Culture and Execution Phase 2 Batch 2 <i>Agile Culture and Execution Phase 2 Workshop Batch 2</i>	CM	0	2	
35	Pelatihan Assessment Center Assessor Certification <i>Assessment Center Assessor Certification Training</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
36	Leadership Endurance Test (LET)	LEADERSHIP	0	8	
37	Leadership Endurance Test (LET)	LEADERSHIP	0	1	
38	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	2	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
0	5	6	2	1	0	15	
1	2	4	3	2	0	12	
1	1	2	0	0	0	5	
0	3	9	2	0	0	14	
3	10	10	1	1	0	26	
5	5	2	1	0	1	16	
0	3	7	0	1	0	11	
3	11	10	2	1	0	29	
0	2	2	0	0	0	4	
1	0	0	0	0	0	1	
0	0	3	0	0	0	3	
3	6	9	5	12	0	35	
5	16	15	2	3	1	61	
6	6	9	1	3	0	26	
2	5	3	3	1	0	16	
0	1	1	0	0	0	2	
12	3	0	0	0	0	23	
0	0	0	0	0	0	1	
5	6	10	2	3	0	28	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
39	Workshop Mekanisme PBJ <i>Procurement Mechanism Workshop</i>	PBJ <i>PROCUREMENT</i>	0	0	
40	Procurement and Fraud	PBJ <i>PROCUREMENT</i>	2	0	
41	Lokakarya Kiat dan Strategi Penyusunan HPS <i>Workshop on Tips and Strategies for HPS Development</i>	SPI <i>INTERNAL AUDIT</i>	0	1	
42	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	1	0	
43	Diklat Sertifikasi Operator Radio Umum <i>General Radio Operator Certification Training</i>	OPERATIONAL	0	0	
44	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	1	0	
45	Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan - Pelayaran <i>Port Industry Strategic Dialogue on the 4.0 Revolution – Shipping</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	1	1	
46	Training SAP Tahun 2019 <i>2019 SAP Training</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	0	
47	Pelatihan Aplikasi Remote versi 2 <i>Remote App Training ver. 2</i>	MARKETING	0	0	
48	Diklat Refreshment Sertifikasi K3 Migas <i>K3 Oil and Gas Certification Refreshment Training</i>	HSSE	0	0	
49	Pelatihan Human Resources Management <i>Human Resources Management Training</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
50	Pelatihan dan Sertifikasi CGP <i>CGP Certification and Training</i>	SEKPER <i>CORPORATE SECRETARY</i>	0	1	
51	Pelatihan dan Sertifikasi Sales Operation <i>Sales Operation Certification and Training</i>	MARKETING	1	1	
52	MUNAS FHBUMN <i>FHBUMN National Conference</i>	SEKPER <i>CORPORATE SECRETARY</i>	0	0	
53	Pelatihan Business Inspiring Forum <i>Business Inspiring Forum Training</i>	HSSE	1	3	
54	Seminar Nasional Prospek BUMN di Tahun Politik <i>National Seminar on SOE Prospects in Political Year</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
55	Pelatihan Executive Education: “Directorship Program” <i>Executive Education Training: “Directorship Program”</i>	KEUANGAN <i>FINANCE</i>	0	0	
56	Sertifikasi Auditor Hukum <i>Legal Auditor Certification</i>	SPI <i>INTERNAL AUDIT</i>	0	0	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
0	0	0	2	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	2	
1	0	0	0	0	0	2	
1	4	2	3	0	0	11	
0	0	0	0	0	0	0	
2	8	5	13	0	0	29	
0	0	0	0	0	0	2	
3	6	7	6	2	0	24	
2	5	7	4	5	1	24	
0	2	6	0	12	0	20	
0	0	0	0	2	0	2	
0	0	0	0	0	0	1	
0	12	0	0	0	0	14	
1	0	0	0	0	0	1	
2	0	0	0	0	0	6	
0	1	0	2	0	0	3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	1	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
57	Diklat Persiapan Sertifikasi Penanganan Klaim Asuransi Certificate in General Insurance (CGI) Certification Preparation Training for Insurance Claim Handling, Certificate in General Insurance (CGI)	SMMR	0	1	
58	Seminar Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di BUMN Seminar on Corporate Criminal Law Enforcement in SOEs	HUKUM LEGAL	1	1	
59	Training Interpersonal Understanding Interpersonal Understanding Training	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
60	Pelatihan dan Sertifikasi CHCM CHCM Training and Certification	SDM HUMAN CAPITAL	1	1	
61	Pelatihan Assessment Center Assessor Certification Assessment Center Assessor Certification Training	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
62	Workshop The 4th PR Indonesia Award (PRIA) The 4th PR Indonesia Award (PRIA) Workshop	SEKPER CORPORATE SECRETARY	0	0	
63	Seminar Kebijakan Reformasi Perpajakan Tax Reform Policy Seminar	KEUANGAN FINANCE	0	0	
64	MUKERWIL FKASPI FKASPI MUKERWIL	SPI INTERNAL AUDIT	1	2	
65	Pelatihan Training Management Training Management Training	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
66	Workshop dan Uji Kompetensi Bidang Geoteknik Sertifikasi HATTI 2019 Geotechnical Workshop and Competency Test on the 2019 HATTI Certification	TEKNIK ENGINEERING	0	0	
67	Forum Kehumasan "Workshop on Media Handling for Executives" Public Relations Forum "Workshop on Media Handling for Executives"	SEKPER CORPORATE SECRETARY	21	24	
68	Seminar VTS For Safety & Efficiency dengan tema "Peran Penting Komunikasi VTS Bagi Keselamatan Pelayaran" VTS for Safety & Efficiency Seminar themed "The Important Role of VTS Communication for Shipping Safety"	OPERATIONAL	0	1	
69	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	PBJ PROCUREMENT	0	0	
70	Pelatihan MDP Level Manager Muda Batch I MDP Training for Junior Manager Level Batch I	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
71	Pelatihan Effective Leadership Effective Leadership Training	LEADERSHIP	0	0	
72	Sertifikasi TOT TOT Certification	SDM HUMAN CAPITAL	0	1	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
3	1	1	0	0	0	6	
0	0	0	0	0	0	2	
0	2	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	2	
0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	
1	1	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	3	
0	2	0	0	0	0	2	
0	1	0	1	0	0	2	
22	8	2	0	0	1	78	
4	5	4	1	3	0	18	
0	13	0	0	0	0	3	
13	13	0	0	0	0	26	
0	0	3	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	0	1	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
73	Pelatihan Mastering Strategic Budgeting, Cost Control, and Business Analysis <i>Mastering Strategic Budgeting, Cost Control, and Business Analysis Training</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	
74	Training MPP <i>MPP Training</i>	SDM HUMAN CAPITAL	1	3	
75	Manager Muda <i>Junior Manager</i>	LEADERSHIP	0	0	
76	Pelatihan Improving Port Performance (IPP 2 Container Terminal) Operations <i>Improving Port Performance Training (IPP 2 Container Terminal) Operations</i>	OPERATIONAL	0	0	
77	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Batch 1 <i>Certified Risk Management Training and Certification Batch 1</i>	SMMR	0	3	
78	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Batch 2 <i>Certified Risk Management Training and Certification Batch 2</i>	SMMR	0	0	
79	Pelatihan Teknisi K3 Listrik <i>Electricity Technician K3 Training</i>	HSSE	0	0	
80	Diklat GRI Standards Sustainability Reporting <i>GRI Standards Sustainability Reporting Training</i>	SEKPER CORPORATE SECRETARY	0	0	
81	Vendor Management	PBJ PROCUREMENT	0	0	
82	Seminar Transformasi Budaya <i>Culture Transformation Seminar</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
83	Port Facility Security Officer (PFSO)	HSSE	0	1	
84	Pembentukan Undang-Undang Perikatan <i>Establishment of Engagement Law</i>	HUKUM LEGAL	0	0	
85	Pelatihan Finance and Managerial Accounting for Non-Finance Manager <i>Finance and Managerial Accounting for Non-Finance Manager Training</i>	KEUANGAN FINANCE	3	13	
86	Seminar Transformasi Budaya di Era VUCA <i>Culture Transformation in VUCA Era</i>	SDM HUMAN CAPITAL	1	0	
87	Workshop dan Uji Kompetensi Bidang Geoteknik Sertifikasi HATTI 2019 <i>Geotechnical Workshop and Competency Test on the 2019 HATTI Certification</i>	TEKNIK ENGINEERING	0	0	
88	Pelatihan dan Sertifikasi Teknik Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kelas D <i>Class D Fire Prevention and Management Techniques Training and Certification</i>	HSSE	0	0	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
1	0	0	0	0	0	1	
12	16	6	0	0	0	38	
13	11	1	0	0	0	25	
0	3	9	3	8	0	23	
5	11	7	3	0	0	29	
7	4	6	1	0	0	18	
1	3	4	7	0	0	15	
0	1	1	0	0	0	2	
0	1	2	0	0	0	3	
0	1	0	2	0	0	3	
4	2	2	0	0	0	9	
0	0	0	0	0	3	3	
9	0	0	0	0	0	25	
0	1	0	0	0	0	2	
0	1	0	1	0	0	2	
0	1	1	2	0	0	4	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
89	Workshop Feasibility Study: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Batch I <i>Feasibility Study Workshop: Qualitative and Quantitative Approach Batch I</i>	MARKETING	0	3	
90	Workshop Feasibility Study: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Batch II <i>Feasibility Study Workshop: Qualitative and Quantitative Approach Batch II</i>	MARKETING	0	2	
91	Social Return On Investment (SROI) Training	CSR	0	1	
92	Teknis Aplikasi PINTAR (Pelindo 3 Talent Resource) <i>PINTAR (Pelindo 3 Talent Resource) App Technicalities</i>	SDM HUMAN CAPITAL	1	7	
93	Shaping the Future Role of Corporate Secretary	HUMAS PUBLIC RELATIONS	0	0	
94	Balance Leadership Training "Menjadi Pemimpin Sukses dengan Model Kepemimpinan Paripurna (Pendekatan IQ, EQ, SQ dalam Kesatuan AQ)" <i>Balance Leadership Training "Becoming a Successful Leader with Perfect Leadership Model (IQ, EQ, SQ Training and AQ Unity)</i>	LEADERSHIP	0	0	
95	Self Driving Training	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
96	Enhancing Your Business Acumen Batch 7	SDM HUMAN CAPITAL	17	1	
97	Enhancing Your Business Acumen Batch 8	SDM HUMAN CAPITAL	0	17	
98	Inhouse Training tentang Penguatan Kapasitas Internal Audit <i>In-House Training on Strengthening Internal Audit Capacity</i>	SPI INTERNAL AUDIT	1	4	
99	Workshop Knowledge Community (KONCO)/Community of Practice Batch III Regional Jawa Tengah <i>Knowledge Community (KONCO) Workshop/Community of Practice Batch III Central Java Region</i>	CM	0	0	
100	Training & Certification Corporate Culture Specialist <i>Corporate Culture Specialist Training and Certification</i>	CM	0	0	
101	Workshop PSAK Akuntansi Aset <i>Asset Accounting PSAK Workshop</i>	KEUANGAN FINANCE	0	1	
102	Workshop Akuntansi Imbalan Kerja, Manfaat Purnakarya dan Aspek Perpajakannya <i>Workshop on Work Honorarium Accounting, Benefits of Retirement and the Taxation Aspects</i>	KEUANGAN FINANCE	0	1	
103	Workshop Akuntansi Imbalan Kerja, Manfaat Purnakarya dan Aspek Perpajakannya <i>Workshop on Work Honorarium Accounting, Benefits of Retirement and the Taxation Aspects</i>	KEUANGAN FINANCE	0	1	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
2	7	8	2	1	0	23	
3	7	9	2	0	0	23	
0	1	1	0	0	0	3	
4	10	11	4	2	0	39	
0	1	0	0	0	0	1	
1	0	1	0	0	0	2	
4	0	0	0	0	0	4	
0	0	0	0	0	0	18	
0	0	0	0	0	0	17	
13	6	1	0	0	0	25	
6	9	3	0	2	0	20	
0	1	0	0	0	0	1	
0	0	1	2	0	0	4	
0	0	2	2	0	0	5	
0	0	1	0	0	0	2	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
104	Workshop Humas dengan tema "Social Media Handling Management" <i>Public Relations Workshop themed "Social Media Handling Management"</i>	SEKPER CORPORATE SECRETARY	0	0	
105	Pengarahan dan Seleksi Calon Peserta S2 Luar Negeri Tahun 2019 Program MSc. Coastal Engineering & Port Development di IHE – Delft <i>Candidate Briefing and Selection for the 2019 Overseas Master's Degree Participant, MSc. Coastal Engineering & Port Development Programme in IHE-Delft</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
106	Munas & Konferensi Nasional IV FKSPI Tahun 2019 <i>Fourth FKSPI National Discussion and Conference in 2019</i>	SPI INTERNAL AUDIT	1	1	
107	Pelatihan Sertifikasi Profesional Internal Auditor (PIA) Dasar-Dasar Audit <i>Professional Internal Auditor (PIA) Certification Training, Audit Foundations</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	0	
108	Pelatihan Fundamental ERM <i>ERM Fundamental Training</i>	SMMR	0	0	
109	Seminar Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) "Mengupas Pelaporan Keuangan Holding Company" <i>Continuous Professional Education Seminar "Analysing Holding Company Financial Reporting"</i>	KEUANGAN FINANCE	2	11	
110	Workshop KONCO Regional Kalimantan <i>KONCO Workshop for Kalimantan Region</i>	CM	0	0	
111	Seminar Auditor's Talk Kementerian BUMN <i>Auditor's Talk Seminar by the Ministry of SOE</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	1	
112	Pelatihan/Sertifikasi Business Analyst Foundation + <i>Business Analyst Foundation + Training/Certification</i>	TIK ICT	0	0	
113	Pelatihan Digital Supply Chain <i>Digital Supply Chain Training</i>	CM	0	0	
114	CQI and IRCA Certified Lead Auditor (ISO 9001:2015)	SMMR	0	1	
115	Environmental Management System Lead Auditor (ISO 14001)	SMMR	0	1	
116	People Analytics	CM	0	0	
117	Pelatihan/Sertifikasi Togaf 9.2 <i>Togaf 9.2 Training/Certification</i>	TIK ICT	0	0	
118	Pelatihan dan Sertifikasi Mastering Business Analysis (BABOK -v3) – A Practical Approach <i>Mastering Business Analysis (BABOK -v3) – A Practical Approach Training and Certification</i>	TIK ICT	0	0	
119	Pelatihan Keprotokoleraan <i>Protocolship Training</i>	SERIKAT PEKERJA LABOUR UNION	0	1	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
5	6	10	2	2	0		25
0	0	9	1	0	0		10
1	0	0	0	0	0		3
1	2	0	1	0	0		4
0	0	0	0	0	0		0
6	4	5	1	0	0		29
5	9	6	0	3	0		23
0	0	0	0	0	0		1
0	1	2	0	0	0		3
1	0	0	0	0	0		1
1	0	0	0	0	0		2
0	0	0	0	0	0		1
1	0	1	0	0	0		2
1	0	0	0	0	0		1
0	1	0	1	0	0		2
0	0	0	0	1	0		2

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
120	Pelatihan dan Sertifikasi Mastering Agile Project Management <i>Mastering Agile Project Management Training and Certification</i>	TIK ICT	0	0	
121	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN dan BUMD <i>Technical Guidance for Goods/Services Procurement in SOEs and BUMD</i>	PBJ PROCUREMENT	0	0	
122	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi (Certified Strategic Procurement Specialist (CSPs)) Sertifikasi Ahli Strategi Pengadaan <i>Competency Training and Certification (Certified Strategic Procurement Specialist (CSPs)) Expert Procurement</i>	PBJ PROCUREMENT	0	0	
123	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <i>Government Goods/Services Procurement Training and Certification</i>	PBJ PROCUREMENT	1	1	
124	Workshop "Liability Management" <i>"Liability Management" Workshop</i>	SMMR	0	3	
125	International Funding Alternatives Training	KEUANGAN FINANCE	0	0	
126	Seminar Bidang Anggaran dan Pelaporan mengenai Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 dalam Penyusunan Laporan Keuangan <i>Budgeting and Reporting Seminar on the Impacts of PSAK 71, 72, and 73 Implementation in Financial Statement Compilation</i>	KEUANGAN FINANCE	0	1	
127	Pelatihan "Budgeting Practices and Cash Flow Forecasting Techniques" <i>"Budgeting Practices and Cash Flow Forecasting Techniques" Training</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	
128	Workshop "Advanced Cost Accounting" <i>"Advanced Cost Accounting" Workshop</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	
129	Refreshment dan Pelatihan Internal Audit ISO 9001:2015 Batch 1 <i>Internal Audit ISO 9001:2015 Refreshment and Training Batch 1</i>	SMMR	0	1	
130	Refreshment dan Pelatihan Internal Audit ISO 9001:2015 Batch 2 <i>Internal Audit ISO 9001:2015 Refreshment and Training Batch 2</i>	SMMR	0	0	
131	Pelatihan perpajakan dengan tema "E-Faktur dan Permasalahannya" <i>Taxation training themed "E-Faktur and their Issues"</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	
132	Training BigData HADOOP <i>HADOOP BigData Training</i>	TIK ICT	0	1	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
0	0	1	0	0	0	1	
0	1	2	0	0	0	3	
2	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	2	
5	8	6	2	0	2	26	
1	2	1	3	0	0	7	
0	0	1	0	0	0	2	
0	2	1	0	0	0	3	
0	0	1	2	0	0	3	
2	3	3	0	0	0	9	
5	1	0	0	0	0	6	
0	1	0	0	0	0	1	
0	1	1	0	0	0	3	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD		
			MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER
			(1-3)	(4-6)
133	Bimtek Pengelolaan Arsip Berbasis Elektronik <i>Technical Guidance on Electronic-Based Archive Management</i>	SEKPER CORPORATE SECRETARY	0	0
134	Pelatihan "Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI" <i>"General K3 Expert Certification from Kemnaker RI" Training</i>	HSSE	1	0
135	Pelatihan Business Continuity Management (BCM/BCP) <i>Business Continuity Management (BCM/BCP) Training</i>	SMMR	0	1
136	Pelatihan dan Sertifikasi Corporate Culture Specialist <i>Corporate Culture Specialist Certification and Training</i>	CM	0	5
137	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) <i>Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification and Training</i>	SMMR	0	0
138	Pelatihan Teknis Aplikasi dan Excellence Service POCC Regional Jawa Tengah <i>POCC App and Excellence Service Technical Training in Central Java Region</i>	OPERATIONAL	0	0
139	Pelatihan dan Sertifikasi Port Facility Security Officer (PFSO) <i>Port Facility Security Officer (PFSO) Certification and Training</i>	HSSE	0	0
140	Pelatihan Teknis Aplikasi dan Excellence Service POCC Regional Kalimantan <i>POCC App and Excellence Service Technical Training in Kalimantan Region</i>	OPERATIONAL	0	0
141	Pelatihan Project Management <i>Project Management Training</i>	TEKNIK ENGINEERING	0	0
142	Pelatihan IMO Model Course 3.24 <i>IMO Model Course 3.24. Training</i>	HSSE	0	0
143	Pelatihan IMO Model Course 3.25. <i>IMO Model Course 3.25. Training</i>	HSSE	0	0
144	Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabeanan <i>Customs Expert Education and Training</i>	MARKETING	0	0
145	Corporate Culture Specialist Training & Certification Program	CM	0	0
146	Sertifikasi Ulang Sertifikat Kompetensi Kerja Teknik Instrumentasi Tingkat I <i>Level I Instrumentation Technical Competency Certificate Recertification</i>	TEKNIK ENGINEERING	0	0
147	Certified Risk Management Professional (CRMP)	SMMR	8	2
148	Pelatihan Building Public Trust through Digital Literacy <i>Building Public Trust through Digital Literacy Training</i>	HUMAS PUBLIC RELATIONS	0	0
149	Pelatihan Fraud Detection & Investigation <i>Fraud Detection & Investigation Training</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	0

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
0	0	0	1	0	0	1	
1	0	0	0	0	0	2	
1	0	0	0	0	0	2	
0	0	0	0	0	0	5	
0	0	0	0	0	1	1	
0	2	6	1	1	0	10	
2	2	0	0	0	0	4	
1	3	5	1	2	0	12	
0	0	1	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	
0	1	2	0	1	0	4	
0	1	3	1	0	0	5	
1	0	0	0	0	0	1	
0	0	4	5	0	0	9	
3	0	0	0	0	2	15	
0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	1	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
150	Pelatihan Fraud Auditing 2 <i>Fraud Auditing 2 Training</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	0	
151	Pelatihan Talent Mapping Basic <i>Talent Mapping Basic Training</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	1	
152	Pelatihan Manajemen SDM <i>Human Capital Management Training</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
153	Training Mastering IT Quality Using IT Management Best Practices for IT Quality, IT Assurance and IT (Operation) <i>Mastering IT Quality Using IT Management Best Practices for IT Quality, IT Assurance and IT (Operation) Training</i>	TIK ICT	0	0	
154	Pendidikan Khusus Profesi Advokat <i>Special Education for Advocates</i>	HUKUM LEGAL	0	0	
155	Pelatihan Professional Negotiating Skill Batch I <i>Professional Negotiating Skill Batch I Training</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	2	
156	Workshop & Kunjungan Kerja <i>Workshop & Work Visit</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	1	
157	Certified Professional Marketer Asia Batch October 2019	MARKETING	0	0	
158	Forum Kajian Manajemen (seri soft skill) untuk Sekretaris <i>Management Study Forum (soft skill series) for Secretaries</i>	SEKPER CORPORATE SECRETARY	0	0	
159	Pelatihan Pembelian/PBJ <i>Purchasing/Procurement Training</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	
160	Pelatihan Fraud Auditing 1 <i>Fraud Auditing 1 Training</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	0	
161	Pelatihan Fraud Auditing 2 <i>Fraud Auditing 2 Training</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	0	
162	Pelatihan Perihal Kupasan dan Implementasi Perpres no. 16 <i>Training on Analysis and Implementation of Perpres No. 16</i>	PBJ PROCUREMENT	0	0	
163	Seminar Nasional Kontrak <i>National Seminar on Contract</i>	HUKUM LEGAL	0	1	
164	Workshop Persiapan Menghadapi Pensiun <i>Workshop on Retirement Preparation</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	1	
165	Pelatihan Inhouse Training Brevet A dan B Terpadu <i>Integrated Brevet A and B In-House Training</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	
166	Pelatihan Antikorupsi BUMN/D Batch 3 <i>SOE/BUMD Anti-Corruption Training Batch 3</i>	SSMR	1	1	
167	Pelatihan Fraud Auditing 1 <i>Fraud Auditing 1 Training</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	0	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
2	0	0	0	0	0	2	
0	2	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	
0	1	1	0	0	0	2	
5	4	4	1	0	0	16	
0	1	0	0	0	0	2	
0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	
1	0	0	0	0	0	1	
2	1	0	0	0	0	3	
1	1	0	0	0	0	2	
0	2	0	0	0	0	2	
1	0	0	1	0	0	3	
1	0	0	0	0	0	2	
0	8	7	6	0	1	22	
0	0	0	0	0	0	2	
1	1	0	0	0	0	2	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
168	International Maritime Seminal: Adaptive Port Planning on Coastal Zones	OPERATIONAL	5	23	
169	Workshop Elevating Self Leadership in Highly Complex Organization <i>Elevating Self Leadership in Highly Complex Organisation Workshop</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
170	Seminar Path to the World Class of Safety Culture Level <i>Path to the World Class of Safety Culture Level Seminar</i>	HSSE	0	0	
171	Uji Sertifikasi Project Management Certification (PMBOK v6) <i>Project Management Certification (PMBOK v6) Certification Test</i>	TEKNIK ENGINEERING	0	0	
172	Pelatihan Refreshment Operator dan Operasional Terminal Peti Kemas Banjarmasin <i>Operator and Banjarmasin Container Terminal Refreshment Training</i>	OPERATIONAL	0	0	
173	Pelatihan Excellent Service Port Operation Command Center (POCC) Batch I <i>Excellent Service Port Operation Command Center (POCC) Batch I Training</i>	OPERATIONAL	0	0	
174	Pelatihan Excellent Service Port Operation Command Center (POCC) Batch II <i>Excellent Service Port Operation Command Center (POCC) Batch II Training</i>	OPERATIONAL	0	0	
175	Diklat Pandu Laut Dalam (Deep Sea Pilot) Angkatan III Tahun 2019 <i>Deep Sea Pilot Training Class III of 2019</i>	PANDU PILOT	0	0	
176	Uji Sertifikasi Ahli Kepabeanaan <i>Customs Expert Certification Test</i>	MARKETING	0	0	
177	Asia Pacific Maritime Pilots Conference Australia 2019	OPERATIONAL	1	1	
178	Diklat Keterampilan Khusus Pandu Bridge Resource Management (BRM) Batch II <i>Special Pilot Skills Training Bridge Resource Management (BRM) Batch II</i>	PANDU PILOT	0	0	
179	Diklat Keterampilan Khusus Paandu Bridge Resource Management (BRM) Batch I <i>Special Pilot Skills Training Bridge Resource Management (BRM) Batch I</i>	PANDU PILOT	0	0	
180	Pelatihan Teknis Aplikasi dan Excellence Service POCC Regional Bali Nusa Tenggara <i>POCC App and Excellence Service Technical Training in Bali Nusa Tenggara Region</i>	OPERATIONAL	0	0	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
18	20	15	4	7	1	93	
1	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	
13	6	19	3	4	0	45	
2	3	8	2	3	0	18	
0	4	5	1	3	0	13	
5	0	0	0	0	0	5	
0	1	3	1	0	0	5	
4	0	0	0	0	0	6	
8	5	0	0	0	0	13	
9	11	0	0	0	0	20	
1	1	3	1	3	0	9	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD		
			MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER
			(1-3)	(4-6)
181	25th Asia Pacific Quality Organization International Conference and International Quality & Productivity Convention 2019 "Pursuing Excellence, Futureproofing Sustainability" <i>The 25th Asia Pacific Quality Organisation International Conference and International Quality & Productivity Convention 2019 "Pursuing Excellence, Futureproofing Sustainability"</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0
182	Pelatihan Digital Leadership <i>Digital Leadership Training</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0
183	Pelatihan "Managing IT Investment and Services: Measuring and Justifying the Business Value of IT" <i>"Managing IT Investment and Services: Measuring and Justifying the Business Value of IT" Training</i>	TIK ICT	0	4
184	Knowledge Community (KONCO) Regional Bali Nusa Tenggara <i>Knowledge Community (KONCO) in Bali Nusa Tenggara Region</i>	SDM HUMAN CAPITAL	1	3
185	Workshop "Elevating Self Leadership in Highly Complex Organization" <i>Elevating Self Leadership in Highly Complex Organisation Workshop</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0
186	Knowledge Community (KONCO) Regional Kalimantan <i>Knowledge Community (KONCO) in Kalimantan Region</i>	SDM HUMAN CAPITAL	1	6
187	Workshop "Procurement and Fraud" <i>"Procurement and Fraud" Workshop</i>	SPI INTERNAL AUDIT	1	1
188	Workshop Update Knowledge Software Pilot Pro <i>Update Knowledge Software Pilot Pro Workshop</i>	OPERATIONAL	0	0
189	Pelatihan Finon: Understanding Financial Statement <i>Finon Training: Understanding Financial Statement</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0
190	Seminar Tenaga Kerja Konfederasi SPSI Kota Surabaya <i>Surabaya SPSI Confederation Labour Seminar</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0
191	UC Signature Partners Day 2019	SDM HUMAN CAPITAL	0	0
192	Pelatihan Procurement Fraud <i>Procurement Fraud Training</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	0
193	Big Data Analytics for Developing Data Literate Workforce	SDM HUMAN CAPITAL	0	1
194	Workshop Human Capital Sharing Knowledge Regional Jawa Tengah <i>Human Capital Sharing Knowledge for Central Java Region</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0
195	Training Interpretasi KPKU <i>KPKU Interpretation Training</i>	BIOPER	1	3

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
0	1	1	0	0	0	2	
0	1	0	0	0	0	1	
3	0	0	0	0	0	7	
14	13	13	5	3	0	52	
1	0	0	0	0	0	1	
14	13	9	1	5	0	49	
0	0	0	0	0	0	2	
9	0	0	0	0	0	9	
0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	1	0	2	
1	1	0	0	0	0	2	
0	0	1	1	0	0	2	
0	1	2	0	0	0	4	
4	11	24	3	7	1	50	
6	4	5	3	0	0	22	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
			196	Workshop Human Capital Sharing Knowledge Regional Kalimantan <i>Human Capital Sharing Knowledge for Kalimantan Region</i>	SDM HUMAN CAPITAL
197	Workshop Human Capital Sharing Knowledge Regional Bali Nusra <i>Human Capital Sharing Knowledge for Bali Nusra Region</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	1	
198	Bimtek Klasifikasi dan Pemberkasan Arsip <i>Technical Guidance on Archive Classification and Filing</i>	SEKPER CORPORATE SECRETARY	0	0	
199	Workshop Human Capital Sharing Knowledge Regional Jawa Timur <i>Human Capital Sharing Knowledge for East Java Region</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
200	Training ESQ New Chapter Batch Perdana Jawa Timur <i>ESQ New Chapter Training Prime Batch East Java</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	2	
201	Port Supervisor Program in Johor Port Batch 1	LEADERSHIP	0	0	
202	Port Supervisor Program in Johor Port Batch 2	LEADERSHIP	0	1	
203	Port Supervisor Program in Johor Port Batch 3	LEADERSHIP	0	0	
204	Short Course Port Manager Program Batch 1	LEADERSHIP	0	1	
205	Pelatihan Update Withholding Tax & Aplikasi PPh 21 <i>Update Withholding Tax & PPh 21 App Training</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	
206	Training The Specialist Course of Malacca Strait Pilotage & Asesmen Pandu Selat Malaka <i>Training The Specialist Course of Malacca Strait Pilotage & Malacca Strait Pilot Assessment</i>	PANDU PILOT	1	2	
207	Training The Specialist Course of Malacca Strait Pilotage & Asesmen Pandu Selat Malaka <i>Training The Specialist Course of Malacca Strait Pilotage & Malacca Strait Pilot Assessment</i>	PANDU PILOT	1	2	
208	Seminar Transformasi HR menghadapi Industri 4.0 <i>HR Transformation Seminar to Face the 4.0 Industry</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	1	
209	Pelatihan Customer Service Port Operation Command Center (POCC) Batch 1 <i>Customer Service Port Operation Command Center (POCC) Batch 1 Training</i>	OPERATIONAL	0	0	
210	Pelatihan Customer Service Port Operation Command Center (POCC) Batch 2 <i>Customer Service Port Operation Command Center (POCC) Batch 2 Training</i>	OPERATIONAL	0	0	
211	Pelatihan Executive Learning Forum: Outsmart Disruption Era Through Agile Management Practices <i>Executive Learning Forum Training: Outsmart Disruption Era Through Agile Management Practices</i>	TIK ICT	1	0	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
5	17	16	1	9	0	49	
7	10	11	4	4	0	37	
0	0	0	2	0	0	2	
5	8	30	4	7	0	54	
2	0	0	0	0	1	5	
1	6	5	0	0	0	12	
0	2	1	1	0	1	6	
0	0	0	0	0	0	0	
1	4	4	2	0	0	12	
0	0	1	0	0	0	1	
4	5	16	8	3	1	40	
35	2	0	0	0	0	40	
0	1	0	0	0	0	2	
1	5	1	0	5	16	28	
0	3	5	0	3	0	11	
0	0	0	0	0	1	2	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
212	Pelatihan Senior Pelatih di Tempat Kerja <i>Senior Training of Trainers at Work</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
213	Knowledge Sharing Pelatihan Supervisor Port Program Johor Port batch I <i>Knowledge Sharing Supervisor Port Program Johor Port batch I Training</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
214	Pelatihan Pelatih/Mentor di Tempat Kerja <i>Training/Mentor Training in Workplace</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
215	Diklat Endorsement/Penyegaran Pandu 2019 <i>Endorsement Training/Pilot Refreshment 2019</i>	PANDU PILOT	0	0	
216	Benchmark ke Port Klang <i>Benchmark to Port Klang</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
217	Pelatihan Maritime English Batch I <i>Maritime English Batch I Training</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	2	
218	Pelatihan Effective Cost Managemesn <i>Effective Cost Management Training</i>	KEUANGAN FINANCE	0	0	
219	Pelatihan Pemahaman dan Audit Sistem Manajemen Terintegrasi berdasarkan Standar PAS 99 <i>Understanding Training and Integrated Management System Audit based on PAS 99 Standards</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	0	
220	Workshop Asuransi dan Manajemen Risiko <i>Insurance Risk Management Workshop</i>	MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT	0	2	
221	Workshop Asuransi dan Manajemen Risiko <i>Insurance Risk Management Workshop</i>	MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT	0	0	
222	Sharing Knowledge Asia Pacific Maritime Pilot Conference Australia 2019 dan Penyuluhan Aplikasi dan Implementasi Bidang Pemanduan bagi Pandu <i>Asia Pacific Maritime Pilot Conference Australia 2019 Sharing Knowledge and Application Counseling and Implementation in Pilotage for Pilots</i>	SDM HUMAN CAPITAL	0	0	
223	Pelatihan Internal Control & Risk Management Series: Risk- Based Auditing A Value Add Proposition <i>Internal Control & Risk Management Series: Risk-Based Auditing A Value Add Proposition Training</i>	SMMR	0	0	
224	Internal Control & Risk Management <i>Internal Control & Risk Management</i>	SMMR	0	0	
225	Bimtek Manajemen Arsip Inaktif dan Pengelolaan Pusat Arsip <i>Technical Guidance on Inactive Archive Management and Management of Archive Centre</i>	SEKPER CORPORATE SECRETARY	0	0	
226	Semnas Maritime Leadership <i>Maritime Leadership National Seminar</i>	LEADERSHIP	0	0	
227	Pelatihan Fraud Auditing <i>Fraud Auditing Training</i>	SPI INTERNAL AUDIT	0	1	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
0	0	1	0	0	0	1	
0	4	24	19	30	1	78	
0	0	1	0	0	1	2	
0	1	1	2	0	1	5	
0	18	0	0	0	0	18	
0	3	0	0	0	0	5	
7	0	1	0	1	0	9	
0	0	0	1	0	0	1	
6	3	2	0	0	0	13	
0	0	0	0	0	2	2	
1	3	3	1	4	14	26	
37	15	1	0	0	2	55	
0	1	0	0	0	0	1	
0	1	0	0	0	0	1	
0	1	2	0	0	2	5	
1	1	0	0	2	0	5	

NO	NAMA PELATIHAN NAME OF TRAINING	BIDANG FIELD	MANAGER UTAMA TOP MANAGER	MANAGER MADYA MIDDLE MANAGER	
			(1-3)	(4-6)	
228	Pelatihan Designing SOP <i>Designing SOP Training</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
229	Forum dan Workshop PR INDONESIA Outlook PRIO 2020 <i>PR INDONESIA Outlook PRIO 2020 Forum and Workshop</i>	HUMAS <i>HUMAS</i>	0	0	
230	Pelatihan Excellence Public Relations Management <i>Excellence Public Relations Management Training</i>	HUMAS <i>PUBLIC RELATIONS</i>	0	0	
231	Bimtek Ahli Pengerukan & Reklamasi 2019 <i>2019 Technical Guidance for Dredging & Reclamation Expert</i>	OPERATIONAL	0	0	
232	Sharing Knowledge Johor Port <i>Johor Port Sharing Knowledge</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
233	Human Capital & HSSE Forum 2019 "SDM Pelindo III Unggul Berwawasan Global untuk Indonesia Maju" <i>2019 Human Capital & HSSE Forum "Pelindo III Superior and Forward-Global Human Capital for Advanced Indonesia"</i>	HSSE	0	0	
234	Human Capital & HSSE Forum 2019 "SDM Pelindo III Unggul Berwawasan Global untuk Indonesia Maju" <i>Human Capital & HSSE Forum 2019 "SDM Pelindo III Unggul Berwawasan Global untuk Indonesia Maju"</i>	HSSE	2	5	
235	Human Capital & HSSE Forum 2019 "SDM Pelindo III Unggul Berwawasan Global untuk Indonesia Maju" <i>Human Capital & HSSE Forum 2019 "SDM Pelindo III Unggul Berwawasan Global untuk Indonesia Maju"</i>	HSSE	2	12	
236	Knowledge Sharing Benchmark di Port Klang <i>Benchmark in Port Klang Knowledge Sharing</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
237	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <i>Government Goods/Services Procurement Expert Training and Certification</i>	PBJ <i>PROCUREMENT</i>	6	7	
238	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah <i>Government Goods/Services Procurement Expert Training and Certification</i>	PBJ <i>PROCUREMENT</i>	0	0	
239	Workshop Knowledge Capture Batch III tahun 2019 <i>Knowledge Capture Workshop Batch III of 2019</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
240	Pelatihan Key Performance Indicators - PPM Center Jebabeka <i>Key Performance Indicators Training - PPM Center Jebabeka</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
241	Tata Kelola Serikat Pekerja Dalam Dinamika Hubungan Industrial <i>Labour Management Governance in Industrial Relations Dynamics</i>	SDM <i>HUMAN CAPITAL</i>	0	0	
Jumlah Peserta Total Participants			126	276	

KELAS JABATAN POSITION LEVEL							JUMLAH PESERTA TOTAL PARTICIPANT
MANAGER MUDA JUNIOR MANAGER	MANAGER DASAR BASIC MANAGER	PELAKSANA UTAMA TOP STAFF	PELAKSANA MADYA MIDDLE STAFF	PELAKSANA MUDA JUNIOR STAFF	PDS/ANAK PERUSAHAAN PDS/ SUBSIDIARIES		
(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
2	0	0	0	0	0	2	
0	1	0	0	1	0	2	
1	0	0	0	0	0	1	
0	1	0	0	0	0	1	
1	0	2	0	0	0	3	
2	11	26	6	4	1	50	
1	11	8	3	3	5	38	
12	11	10	3	5	10	65	
0	0	0	0	0	1	1	
6	14	23	7	6	0	69	
0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	
0	2	5	3	1	17	28	
0	1	0	0	0	0	1	
530	634	692	228	209	95	2.790	

BIAYA PENGEMBANGAN SDM

Hingga penghujung tahun 2019, Perusahaan telah menggunakan anggaran sebesar Rp44,285 miliar untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM. Nilai ini lebih besar Rp12,35 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Salah satu penyebab lebih besarnya nilai serapan anggaran adalah karena tahun 2019 merupakan awal dari tahun pengembangan SDM, sehingga Pelindo III meningkatkan jumlah program pengembangan SDM.

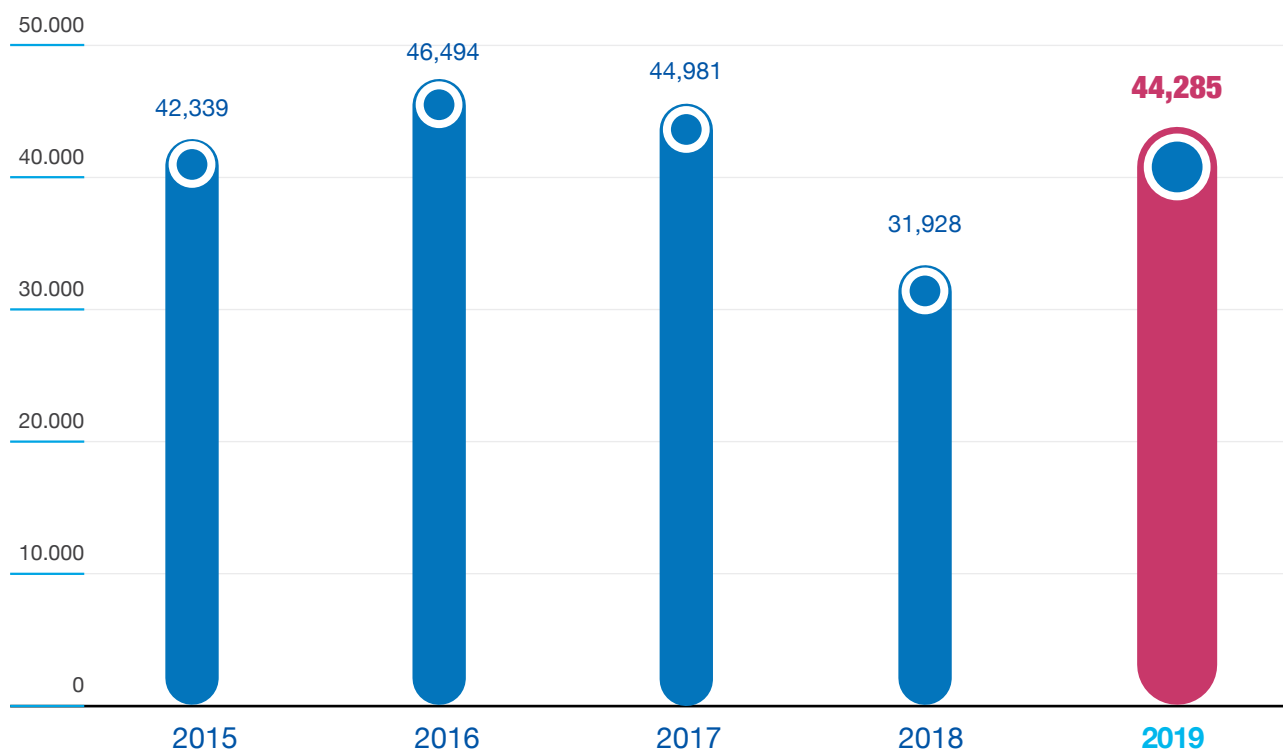
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT COSTS

Until the end of 2019, the Company has utilised Rp44.285 billion for Human Capital education and training activities. This value is Rp12.35 billion more compared to that of the 2018 realisation. One of the reasons for this is because 2019 is the start of Human Capital development years, hence Pelindo III increased the Human Capital development programmes..

REALISASI BIAYA DIKLAT

THE REALISATION OF EDUCATION AND TRAINING EXPENSES

dalam miliar Rupiah | dalam miliar Rupiah



RENCANA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 2020

Rencana program kerja pengembangan SDM di tahun 2020 yaitu:

- Pendidikan dan Pelatihan Formal**
Perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan memberikan beasiswa pendidikan untuk pegawai berupa beasiswa peningkatan ijazah pegawai dari Diploma III (D-III) menjadi Strata 1 (S-1), Program Pascasarjana, baik di dalam maupun luar negeri.
- Pendidikan dan Pelatihan Substansial**
Perusahaan berusaha terus meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan terbaik kepada pelanggan. Untuk itu, Perusahaan berfokus untuk memberikan Pendidikan

TRAINING AND DEVELOPMENT PLAN FOR 2019

The 2020 work programmes for Human Capital Development are:

- Formal Education and Training**
The Company strives to improve the quality of its human capital by providing educational scholarships for employees to increase employee diplomas from Diploma III (D-III) to Bachelor's Degree (S-1), Master's Degree programme both at local and overseas universities.
- Substantial Education and Training**
The Company strives to continually improve its capabilities in providing the best port services to customers. Hence, the Company focuses on providing necessary education and training for each organisational function, fulfilling

dan Pelatihan yang dibutuhkan pada masing-masing fungsi organisasi, pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan *mandatory*, serta memperbanyak pelatihan bersertifikasi.

Peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada tahun 2020 akan berpedoman pada *Learning Design* yang telah dimiliki, dengan target bahwa pelatihan didasarkan pada standar kompetensi Perusahaan dimana setiap Pegawai memperoleh minimal masing-masing 1 kali pelatihan Soft Competency dan Hard Competency. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan Gap Kompetensi masing-masing. Selain itu, pada tahun depan akan ditambahkan beberapa kegiatan peningkatan pengetahuan melalui kegiatan *Sharing Session* dan *Ask The Expert* yang juga merupakan bagian dari Knowledge Management, serta sertifikasi keahlian di berbagai bidang.

TALENT MANAGEMENT

Talent Management merupakan suatu rangkaian proses, sistem, dan pengimplementasian strategi yang dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja. Hal tersebut dilakukan melalui perekrutan, pengembangan, dan mempertahankan individu-individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Sebagai salah satu strategi yang diterapkan oleh Perusahaan, segala sesuatu mengenai *Talent Management System* diatur dalam Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.07/KP.0302/P.III-2015. Dalam hal ini, pelaksanaan *Talent Management* berada di bawah Subdirektorat Human Capital System and Strategy dengan pengawasan dan pengendalian langsung dari Vice President Human Capital Planning and Talent Management.

Sebagai suatu rangkaian proses sistem, *Talent Management* memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang berkesinambungan. Pada tahapan awal, dilakukan asesmen pemetaan kompetensi kepada seluruh Pegawai untuk memperoleh gambaran awal kompetensi dan potensi yang dimiliki masing-masing Pegawai. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Pegawai dikelompokkan ke dalam kategori *talent pool* yang berbeda. Kategori dari *talent pool* tersebut akan menentukan pengembangan individu pegawai lebih lanjut dan juga mengarahkan jalur karir yang sesuai dengan Pegawai tersebut. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ saja, proses tahapan ini akan terus berlanjut sebagai siklus untuk mencari dan menemukan potensi-potensi unggul Pegawai dalam Perusahaan maupun potensi unggul yang ditemukan melalui perekrutan calon Pegawai baru.

Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program kaderisasi tanpa membedakan gender ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, maupun golongan. Aspek yang dinilai dalam program pengembangan karier karyawan adalah potensi, kompetensi, dan keterampilan individual karyawan, dengan mempertimbangkan kesesuaian profil jabatan.

mandatory education and training, and increasing certified training.

Knowledge and competency improvement in 2020 will be guided by the Learning Design, with the target that the training is based on Company competency standards where each Employee obtains at least one training in Soft Competency and Hard Competency. Education and training provided to Employees are under their respective Competency Gap. Moreover, some knowledge enhancement activities will be added next year through Sharing Session and Ask The Expert activities which are also part of Knowledge Management, as well as expertise certification in various fields.

TALENT MANAGEMENT

Talent Management is a series of processes, systems, and implementation strategies that are designed as an effort to increase productivity in the work environment. This is done through recruitment, development, and keeping individuals who have the skills in line with the Company's business needs. As one of the strategies implemented by the Company, everything about the Talent Management System is regulated in the Regulation of the BOD No. PER.07/KP.0302/P.III-2015. In this case, the implementation of talent management is under the Human Capital System and Strategy Sub-Directorate with supervision and control directly from the Vice President Human Capital Planning and Talent Management.

As a series of system processes, Talent Management has stages of continuous implementation. As an initial step, a competency mapping assessment is carried out on all Employees to obtain an initial description of the competencies and potential of each Employee. Based on the assessment results, Employees are grouped into different talent pool categories. The category of the talent pool will further determine the individual development of Employees and also direct the career path appropriate for the Employee. Furthermore, this process will also continue as a cycle to find and discover the superior potential of Employees in the Company and the superior potential found through the recruitment of prospective new Employees.

The Company engages all employees in the regeneration programme regardless of gender or other factors such as ethnicity, religion, or class. Aspects assessed in the employee's career development programme are the potential, competencies, and skills of individual employees by considering the suitability of the position profile.

DEMOGRAFI SDM PELINDO III

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Hingga 31 Desember 2019, jumlah Pegawai Pelindo III Group tercatat sebanyak 4.573 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan dengan jumlah Pegawai pada tahun 2018. Penurunan jumlah Pegawai ini terjadi karena kebijakan manajemen untuk menunda adanya rekrutmen sehingga tidak dilakukan penggantian atas Pegawai pensiun, mengundurkan diri, dan meninggal dunia. Faktor lain penurunan jumlah tersebut adalah pengalihan Pegawai PKWT menjadi tenaga alih daya berdasarkan pertimbangan capaian produktivitas Pegawai.

HUMAN CAPITAL DEMOGRAPHY OF PELINDO III

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON EMPLOYMENT STATUS

As of 31 December 2019, there were 4,573 Employees in Pelindo III Group. This number decreased by 6% compared to that of 2018. The decrease in a total employee is due to the policy to delay recruitment, hence there was no replacement for pension, early pension, resignation, and deceased employees. Another factor for the decrease is the alteration of PKWT employees into outsourced employees by consideration of employee productivity achievement.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN EMPLOYEE COMPOSITION BY EMPLOYMENT STATUS

dalam orang | in personnel

URAIAN URAIAN	2019	2018	HASIL PERBANDINGAN COMPARISON RESULT	
			PERUBAHAN CHANGES	%
Organik Organic	3.758	3.696	62	2
Non Organik (Diperbantukan, PKWT, dan Pemegang) Non-Organic (Outsourced, PKWT, and Internship)	784	1.065	-281	-26
Calon Pegawai Employment Candidate	31	95	-64	-67
JUMLAH TOTAL	4.573	4.856	-283	-6

Di tahun 2019, jumlah Pegawai Organik mengalami peningkatan sebesar 2%. Hal ini disebabkan oleh penundaan penggantian tenaga kerja yang telah purna tugas mengacu pada capaian produktivitas pada Triwulan III 2019 serta pengalihan pegawai dengan status PKWT menjadi tenaga alih daya di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

In 2019, the number of Organic Employees increased by 2%. This was caused by the replacement postponement on retired employees referring to the productivity achieved in the Third Quarter of 2019, as well as the transfer of employees with PKWT transfer into outsourced employees within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS JABATAN EMPLOYEE COMPOSITION BY TYPE OF POSITION

dalam orang | in personnel

URAIAN URAIAN	2019	2018	HASIL PERBANDINGAN COMPARISON RESULT	
			PERUBAHAN CHANGES	%
Struktural Structural	415	95	320	337
Fungsional Functional	466	762	-296	-39
Staf Staff	3.692	3.999	-307	-8
JUMLAH TOTAL	4.573	4.856	-283	-6

Perusahaan memiliki 3 kelompok jabatan dalam menjalankan organisasi yaitu pada jenjang struktural, fungsional, dan staf. Pada tahun 2019, terjadi kenaikan jumlah jabatan struktural sebanyak 320 orang. Hal ini sejalan dengan perubahan organisasi yang terjadi di Perusahaan.

The company has three groups of positions in running the organisation, namely at the structural, functional and staff levels. In 2019, there was an increase in the number of structural positions by 320 people. This is in line with the organisational changes that have taken place in the Company.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG MANAJEMEN EMPLOYEE COMPOSITION BY MANAGEMENT LEVEL

dalam orang | in personnel

URAIAN DESCRIPTION	KELAS JABATAN POSITION LEVEL	2019	2018	HASIL PERBANDINGAN COMPARISON RESULT	
				PERUBAHAN CHANGES	%
Manager Utama Top Manager	1-3	67	61	6	10
Manager Madya Middle Manager	4-6	125	121	4	3
Manager Muda Junior Manager	7-9	395	395	0	0
Manager Dasar Basic Manager	10-11	553	528	25	5
JUMLAH TOTAL		1.140	1.105	35	3

Perubahan organisasi yang terjadi pada tahun 2019 berdampak pada kenaikan jumlah Manager Dasar (Pejabat Struktural Kelas Jabatan 10-11) sebanyak 24 orang.

The changes in organisational structure in 2019 effects on the increase of the total Basic Manager (structural officials with the position level of 10-11) as many as 24 people.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

dalam orang | in personnel

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	HASIL PERBANDINGAN COMPARISON RESULT	
			PERUBAHAN CHANGES	%
Laki-laki Male	3.477	3.875	-398	-10
Perempuan Female	1.096	981	115	12
JUMLAH TOTAL	4.573	4.856	-283	-6

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, komposisi Pegawai Perusahaan di tahun 2019 didominasi oleh laki-laki, yang mana tercatat komposisi laki-laki sebesar 76% dan komposisi perempuan sebesar 24%. Dalam proses pengadaannya, Perusahaan tidak memiliki aturan yang membatasi suatu gender. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan perbedaan komposisi ini antara lain adalah ketersediaan sumber daya manusia saat proses perekrutan, keberhasilan mengikuti tahapan seleksi, masa pensiun, dan pengunduran diri pegawai.

Based on gender, the Employee composition in 2019 was dominated by men, which recorded a male composition of 76% and female composition of 24%. In the procurement process, the Company does not have rules that limit a gender. Other things that can cause differences in the composition include the availability of human capital during the recruitment process, the success of taking part in the selection stages, retirement, and employee resignation.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

dalam orang | in personnel

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	HASIL PERBANDINGAN COMPARISON RESULT	
			PERUBAHAN CHANGES	%
SLTA High School Degree	1.003	1.443	-440	-30
Sarjana Muda/DIII Diploma Degree	880	935	-55	-6
Sarjana (S1) Bachelor's Degree	2.176	2.179	-3	0
Magister (S2) Master's Degree	504	296	208	70
Doktor (S3) Doctorate Degree	10	3	7	233
TOTAL TOTAL	4.573	4.856	-283	-6

Untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing, Perusahaan senantiasa memberikan peningkatan kompetensi bagi para Pegawai. Perusahaan memiliki program beasiswa strata-1 untuk rekrutmen khusus dan beasiswa strata-2 bagi seluruh Pegawai perusahaan yang dinyatakan lulus melalui serangkaian tahapan seleksi. Beasiswa pada jenjang strata-2 ini, dilakukan di dalam dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

To create excellence in competition, the Company provides competency development for Employees. The Company has a bachelor's degree scholarship programme for special recruitment and master's degree scholarship programme for all Employees who are declared to pass through a series of selection stages. The scholarships at this level of study are carried out in Indonesia or abroad according to the needs of the Company.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE

dalam orang | in personnel

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	HASIL PERBANDINGAN COMPARISON RESULT	
			PERUBAHAN CHANGES	%
Di bawah 30 tahun Under 30 years old	1.265	1.578	-313	-20
Usia 31-35 tahun years old	1.040	1.054	-14	-1
Usia 36-40 tahun years old	836	820	16	2
Usia 41-45 tahun years old	708	679	29	4
Usia 46-50 tahun years old	449	423	26	6
Usia di atas 50 Above 50 years old	275	302	-27	-9
JUMLAH TOTAL	4.573	4.856	-283	-6

Selanjutnya dari segi komposisi usia pegawai, Perusahaan didominasi oleh pegawai usia produktif terutama di bawah 30 tahun (generasi milenial) yaitu sebesar 28% dan rentang usia 31-35 tahun sebesar 23%. Terdapat 275 Pegawai yang ada pada kelompok usia di atas 50 tahun yang nantinya akan menjalani masa pensiun dalam 0-4 tahun ke depan.

In terms of Employees composition by age, the Company is dominated by Employees of productive age, especially under 30 years (millennial generation) at 28% and the age range of 31-35 years at 23%. 275 Employees in the age group above 50 years will later retire in the next 0-4 years.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN UNIT KERJA EMPLOYEE COMPOSITION BY WORK UNITS

dalam orang | in personnel

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	HASIL PERBANDINGAN COMPARISON RESULT	
			PERUBAHAN CHANGES	%
Kantor Pusat Head Office	511	471	40	8
Regional Jawa Timur East Java Region	502	495	7	1
Regional Jawa Tengah Central Java Region	315	321	-6	-2
Regional Kalimantan Kalimantan Region	348	308	40	11
Regional Bali Nusra Bali Nusra Region	176	166	10	6
Anak Perusahaan Subsidiaries	257	289	-32	-12
JUMLAH TOTAL	2.109	2.050	59	3

Jumlah formasi yang ada pada masing-masing Cabang dan Anak Perusahaan di lingkungan Perusahaan didasarkan pada perencanaan SDM dan disesuaikan dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing Cabang dan Anak Perusahaan sesuai dengan yang direncanakan dalam RJPP. Jumlah tenaga kerja atau pegawai yang tepat dalam masing-masing Cabang atau Anak Perusahaan membantu Perusahaan untuk bekerja lebih efisien dan efektif.

The formation available at each Branch and Subsidiary within the Company is based on the Human Capital Planning and adjusted to the established organisational structure. Hence, the workload of each Branch and Subsidiary shall be under the plan set in the RJPP. The appropriate number of employees in each Branch or Subsidiary helps the Company to carry out its business more efficiently and effectively.

KESEJAHTERAAN SDM

KEPUASAN KERJA PEGAWAI

Perusahaan tentunya tidak hanya melihat faktor remunerasi dan manfaat sebagai indikator kepuasan kerja pegawai. Lebih dari itu, Perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas transportasi di Indonesia harus mampu memberikan iklim dan suasana kerja yang positif serta tempat yang aman bagi Pegawai Perusahaan. Hal tersebut dicanangkan dalam rangka menciptakan tempat yang tepat bagi seluruh Pegawai dalam mengembangkan talenta dan bakat yang dimiliki demi kemajuan bersama dan tentunya kemajuan bagi usaha Perusahaan.

Perusahaan secara konsisten melakukan survei kepuasan karyawan untuk mengukur kepuasan pegawai terhadap kebijakan yang diambil oleh Perusahaan. Survei kepuasan pegawai dilakukan secara *online* untuk mempermudah

THE WELFARE OF THE HUMAN CAPITAL

EMPLOYEES SATISFACTION

The Company does not only consider remuneration and benefit factors as employee satisfaction indicator. More than that, as a business entity having strategic roles in supporting domestic transportation activities, the Company is required to be able to provide positive work climate and atmosphere as well as a secure place for its Employees. Such objective has been established as the Company's commitment to creating a place suitable for all Employees to develop their talents and skills for the sake of common progress and its business.

The Company consistently conducts employee satisfaction surveys to measure employees' satisfaction with policies adopted by the Company. The employee satisfaction survey is conducted online to facilitate the calculation and accuracy

perhitungan dan akurasi data. Indikator yang dinilai dalam survei kepuasan pegawai yaitu:

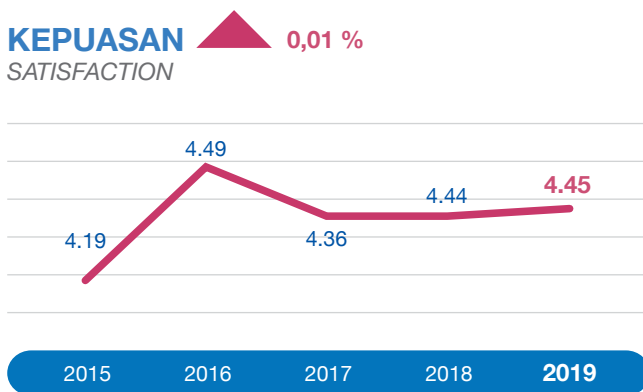
1. Strategi dan Organisasi
2. Manajemen Karir
3. Pelatihan dan Pengembangan
4. Manajemen Kinerja
5. Remunerasi dan Kesejahteraan
6. Hubungan Industrial
7. Lingkungan Kerja dan Budaya Perusahaan
8. Disiplin Kerja

of survey data. The indicators assessed in the employee satisfaction survey are:

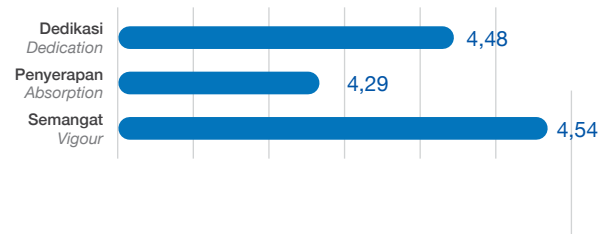
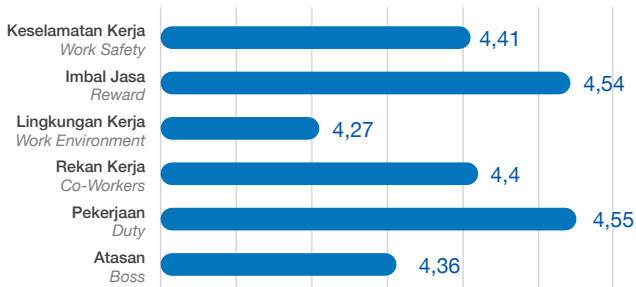
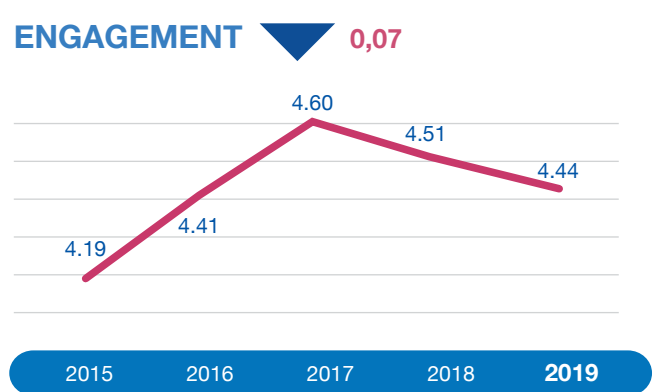
1. Strategy and Organisation
2. Career Management
3. Training and Development
4. Performance Management
5. Remuneration and Welfare
6. Industrial Relations
7. Work Environment and Corporate Culture
8. Work Discipline

HASIL SURVEI KORPORAT RESULTS OF CORPORATE SURVEYS

KEPUASAN SATISFACTION



ENGAGEMENT



Hasil dari survei kepuasan pegawai tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembenahan dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang kepegawaian.

The results of the employee satisfaction survey are used as a reference to make improvement and decision, particularly in employment.

FASILITAS DAN MANFAAT

Untuk memotivasi Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerjanya, Perusahaan memberikan berbagai fasilitas dan manfaat yang diatur melalui peraturan Direksi, antara lain:

1. Asuransi Kesehatan Pegawai
Selain menggunakan BPJS kesehatan yang merupakan syarat wajib dari Pemerintah bagi pengusaha untuk memproteksi pekerjanya, Perusahaan memberikan asuransi tambahan bagi pegawai serta keluarganya (mencakup suami/istri serta dua anak) dan pensiunan pegawai (mencakup istri/suami) yang bekerja sama dengan Jasindo.

FACILITIES AND BENEFITS

In motivating Employees to improve their performance, the Company provides various facilities and benefits that are stipulated through the Regulation of the BOD, namely:

1. Employee Health Insurance
In addition to utilising BPJS Kesehatan programme, which is a government's mandatory requirement for employers to protect their workers, the Company provides additional insurance for its employees and their families (covering husband/wife as well as two children) and retired employees (covering wife/husband) in cooperation with Jasindo.

2. **Bantuan Pulang Kampung**
Perusahaan memfasilitasi tiket perjalanan Pegawai dengan menggunakan transportasi darat dan udara untuk dapat mengunjungi keluarga intinya (suami/Istri dan anak apabila berstatus Janda/Duda) apabila tinggal terpisah untuk bertemu sebanyak 4 kali dalam setahun.
 3. **Flexy Time**
Pegawai Perusahaan dapat menentukan jadwal pulang kerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni dengan prinsip datang lebih awal dapat pulang lebih cepat.
 4. **Bantuan Ibadah Keagamaan**
Diberikan bagi Pegawai (suami dan istri) terpilih yang memenuhi kriteria (Asesmen, Masa Kerja, serta Nilai Prestasi Pegawai) untuk mengikuti perjalanan rohani sesuai dengan masing-masing keyakinannya (Mekkah, India, Thailand, atau Yerusalem).
 5. **Cuti Bersalin Anak Pertama**
Tambahkan 2 bulan cuti bersalin bagi Pegawai yang melahirkan anak pertamanya untuk menikmati ASI eksklusif.
 6. **Cuti mendampingi Istri Melahirkan**
Pegawai laki-laki mendapat cuti khusus 5 hari kerja untuk mendampingi istri yang melahirkan.
 7. **Cuti Pegawai**
Perusahaan menambah cuti tahunan sebanyak 14 hari kerja dengan ketentuan 12 hari kerja penuh dan 2 hari kerja yang diambil masing-masing ½ hari untuk kepentingan mendesak Pegawai.
 8. **Penghargaan Purnabakti**
Selain pesangon yang diamanatkan dalam ketentuan ketenagakerjaan, Perusahaan juga memberikan penghargaan yang besarnya atas masa kerja Pegawai selama bertugas di Perusahaan.
 9. **Pengangkatan Kembali**
Khusus untuk Pegawai yang ditugaskan sebagai Direksi BUMN oleh Kementerian, diberikan kesempatan kembali untuk bergabung di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 10. **Usia Pensiun**
Usia pensiun Pegawai yang semula 56 tahun, diperpanjang menjadi 58 tahun.
2. **Homecoming Allowance**
The Company facilitates Employees' travel tickets by land and air transport to visit their nuclear family (husband/wife and children if they are of widow/widower status), if they live separately, to meet four times a year.
 3. **Flexy Time**
Employees can set the schedule of their work according to their respective needs and the stipulated provisions, i.e. the principle of coming to work early to finish earlier.
 4. **Religious Donations**
Provided for selected employees (husband and wife) who meet the criteria (Assessment, Work Period, and Employee Achievement Value) to have a spiritual journey according to their respective beliefs (Mecca, India, Thailand, or Jerusalem).
 5. **First Child Maternity Leave**
Provision of additional two-month maternity leave for female employees who gave birth to their first child for exclusive breastfeeding.
 6. **Leave To Accompany Childbirth**
Male employees receive a special leave of five working days to accompany their wife in labour.
 7. **Employee Leave**
The Company adds annual leave of 14 workdays with the provisions of 12 full work days and two workdays taken a half-day each for urgent matters.
 8. **Post-Employment Award**
In addition to the severance mandated in the employment provisions, the Company also gives rewards of which the number is based on the term of employment of the concerned Employees in the Company.
 9. **Reappointment**
Particularly for employees who are assigned as a member of the BOD of an SOE by the Ministry, they are allowed to join the Company again based on applicable regulations.
 10. **Retirement Age**
The Employees' retirement age is extended to 58 years old from 56 years old, previously.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan Pegawai, salah satunya melalui imbal jasa yang diterima setiap bulannya. Kebijakan penetapan remunerasi Perusahaan bagi Pegawai disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah tentang ketenagakerjaan, survei penghasilan, serta kemampuan Perusahaan dan pencapaian Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menggunakan konsep 3P (*People, Performance, Position*) dalam pemberian imbal jasa pegawai. Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.0023/KP.0602/HOFC-2018 tanggal 24 Juli 2018 mengatur komponen imbal jasa pegawai sebagaimana tabel di bawah ini:

REMUNERATION POLICY

The Company always takes the welfare of its employees into account, one of which is through the monthly fee and benefits. The Company's policy to determine remuneration for Employees is adjusted to the Government's provisions on employment, income surveys, and corporate capabilities as well as to the achievements of the Company. In practice, the Company uses the concept of 3P (People, Performance, Position) in providing benefits for Employees. The Regulation of the BOD No. PER.0023/KP.0602/HOFC-2018 dated 24 July 2018 regulates the following employee benefit components:

KOMPONEN REMUNERASI BAGI PEGAWAI REMUNERATION COMPONENTS FOR EMPLOYEES

STRUKTURAL STRUCTURAL	FUNGSIONAL FUNCTIONAL	PELAKSANA IMPLEMENTER
Penghasilan merit <i>Income merit</i>	Penghasilan merit <i>Income merit</i>	Penghasilan merit <i>Income merit</i>
Tunjangan prestasi pegawai <i>Employee performance allowance</i>	Tunjangan prestasi pegawai <i>Employee performance allowance</i>	Tunjangan prestasi pegawai <i>Employee performance allowance</i>
Tunjangan jabatan <i>Position allowance</i>	Tunjangan jabatan <i>Position allowance</i>	Bantuan transportasi <i>Transportation allowance</i>
Tunjangan mobilitas <i>Mobility allowance</i>	Tunjangan mobilitas <i>Mobility allowance</i>	Bantuan hidup minimum <i>Minimum living allowance</i>
Bantuan hidup minimum <i>Minimum living allowance</i>	Bantuan hidup minimum <i>Minimum living allowance</i>	Tunjangan hari raya <i>Holiday allowance</i>
Tunjangan hari raya <i>Holiday allowance</i>	Tunjangan hari raya <i>Holiday allowance</i>	Bonus tahunan <i>Annual bonus</i>
Tunjangan kinerja individu <i>Individual performance allowance</i>	Tunjangan kinerja individu <i>Individual performance allowance</i>	Tunjangan kinerja individu <i>Individual performance allowance</i>
Bonus tahunan <i>Annual bonus</i>	Bonus tahunan <i>Annual bonus</i>	Fasilitas kesehatan <i>Health facility</i>
Fasilitas kesehatan <i>Health facility</i>	Fasilitas kesehatan <i>Health facility</i>	Tunjangan cuti <i>Leave benefits</i>
Tunjangan cuti <i>Leave benefits</i>	Tunjangan cuti <i>Leave benefits</i>	Bantuan pendidikan <i>Educational allowance</i>
Bantuan pendidikan <i>Educational allowance</i>	Bantuan pendidikan <i>Educational allowance</i>	-

Terhitung mulai tahun 2018, terdapat komponen baru imbal jasa pegawai (Tunjangan Kinerja Individu) yang besarnya berdasarkan penilaian langsung dari masing-masing atasan. Selain hal tersebut, secara konsisten Perusahaan juga memberikan komponen imbal jasa lainnya seperti Bantuan Hidup Minimum, Bantuan Pulang Kampung, Bantuan Pendidikan, Tunjangan Hari Raya, serta Insentif Kinerja yang besarnya didiskusikan bersama-sama oleh Manajemen dan Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) untuk kemudian disepakati dan diusulkan kepada jajaran Direksi.

As of 2018, there is a new component of employee benefits (Individual Performance Allowance) based on the direct assessment of each boss. In addition to this, the Company also consistently provides other reward components such as Minimum Life Allowance, Homecoming Allowance, Educational Allowance, Holiday Allowance, as well as Performance Incentives which are discussed jointly by Management and the Pelabuhan Indonesia III Labour Union (SPPI III) to be agreed upon and proposed to the BOD.

REWARD DAN PUNISHMENT

REWARD

Perusahaan memberikan penghargaan berupa tunjangan pembinaan bagi Pegawai yang memberikan usulan inovasi yang berguna bagi kemajuan proses bisnis Perusahaan. Tunjangan pembinaan ini diberikan 2 kali dalam setahun.

REWARD AND PUNISHMENT

REWARD

The Company provides awards in the form of coaching allowances for Employees who provide useful innovation proposals for the progress of the Company's business processes. This coaching allowance is given twice a year.

PUNISHMENT

Perusahaan mengenakan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan tindakan indisipliner sesuai Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.50.1/KP.0303/P.III-2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Peraturan Disiplin Pegawai.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Serikat pekerja Perusahaan resmi terdaftar pada tahun 1999 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP.327/M/BW/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang pendaftaran Serikat Pegawai Pelindo III (SPPI) tingkat nasional. Kemudian tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya tanggal 28 Desember 2004.

Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) memiliki kepengurusan pusat (Dewan Pengurus Pusat) di Surabaya dan kepengurusan cabang (Dewan Pengurus Cabang) di seluruh wilayah kerja Perusahaan guna menjangkau aspirasi para pegawai. Kegiatan rutin yang dilaksanakan SPPI III adalah pembahasan perjanjian kerja bersama (PKB) yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali bersama Manajemen untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan baru antara Pegawai dan Manajemen sebagai perwakilan Pengusaha untuk kemudian diusulkan pada Direksi dan didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

PUNISHMENT

The Company implements a disciplinary punishment to Employees who violate the Company's regulations as per the Regulation of the BOD No. PER.50.1/KP.0303/P.III-2013 dated 27 December 2013 on Employee Disciplinary Regulations.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Company's labour union was officially registered in 1999 according to the Decree of Minister of Manpower No. KEP.327/M/BW/1999 dated 20 July 1999 on registration of Pelindo III Labour Union (SPPI) at the national level. It was then registered at the Manpower and Mobility Office of Surabaya on 28 December 2004.

Pelabuhan Indonesia III Labour Union (SPPI III) has central management (Central Management Board) in Surabaya and branch management (Branch Management Board) throughout the Company's work area to obtain all employees aspirations. The routine activities conducted by SPPI III are, among others, discussion of collective labour agreements held every two years with the Management to determine new agreements between the Employees and the Management as representatives of Employers to then be proposed to the BOD and registered to the Ministry of Manpower.



TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dewasa ini terus dimanfaatkan oleh segenap masyarakat dan entitas bisnis di seluruh belahan dunia. Pemanfaatan TIK semakin gencar dilakukan dalam rangka mendukung aktivitas individu maupun organisasi yang lebih efisien serta memiliki keterhubungan secara *real-time* tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dengan manfaat serta potensi yang besar dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan, Pelindo III mengambil langkah dengan mempersiapkan pengelolaan bisnis berbasis TIK yang digagas secara resmi di tahun 2014. Pemanfaatan TIK sebetulnya bukan hal baru bagi Perusahaan, pemanfaatan TIK dalam mendukung aktivitas di bidang jasa kepelabuhanan telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan semakin berkembangnya pemanfaatan TIK bagi kegiatan bisnis, Perusahaan menempatkan aspek tersebut sebagai bagian dari rencana bisnis Perusahaan yang perlu dikelola secara baik dan ditata secara berkelanjutan.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima penerapan *Master Plan TI 2015-2019*. Tidak hanya sekadar memenuhi target maupun program yang ada, Perusahaan juga melakukan evaluasi dan pembenahan yang diperlukan agar realisasi atas rencana di bidang TIK dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan keselarasan dengan RJPP.

KEBIJAKAN TIK PERUSAHAAN

Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan serta pengembangan TIK di lingkungan Perusahaan, Direksi menetapkan kebijakan terkait penerapan TIK melalui:

- PER.0019/HK.01.06/HOFC-2019 tentang Kebijakan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.
- PER.60/OS/0102/P.III-2017 tentang Kebijakan Keamanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.
- PER.61/OS/0102/P.III-2017 tentang Kebijakan Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.

Ruang lingkup disahkannya kebijakan tersebut adalah agar Perusahaan dapat melakukan pengaturan terhadap aspek-aspek terkait pengelolaan TIK seperti pengembangan, inovasi, maupun pengelolaan risiko yang mungkin ditimbulkan dari penerapan TIK di Perusahaan.

The rapid development of technology information and communication (ICT) continues to be utilised by the whole community and business entities around the world. The utilisation of ICT is intensified in order to support individual or organisational activities to be more efficient as well as possessing real-time connectedness without the limitation of space and time. With the benefit and great potential in supporting the Company's business activities, Pelindo III takes several steps by preparing ICT-based business management, which was officially initiated in 2014. The utilisation of ICT is not something new for the Company as it has been implemented in supporting activities of port services in previous years. However, with the increasing development of ICT utilisation for business activities, the Company places this aspect as a part of the Company's business plan which needs to be managed well and regulated in a sustainable manner.

The year 2019 is the fifth year of ICT Master Plan implementation. The Company undertakes evaluation and made necessary improvement not only to meet the targets and pre-listed programmes but also to ensure that the ICT Plan rolled out as planned without setting aside the alignment with the Company's Long-Term Plan.

ICT POLICIES OF THE COMPANY

In supporting the implementation of ICT management and development within the Company, the BOD establishes policies regarding the application of ICT through:

- PER.0019/HK.01.06/HOFC-2019 on the Operational Policy of Information and Communication Technology in Pelindo III.
- PER.60/OS/0102/P.III-2017 on the Security System Policy of Information and Communication Technology in Pelindo III.
- PER.61/OS/0102/P.III-2017 on the Strategic Policy of Information and Communication Technology within Pelindo III.

The policies are validated to enable the Company to manage the aspects of ICT such as development, innovation, or risk management that may arise from ICT application within the Company.

TATA KELOLA TIK PERUSAHAAN

REGULASI RUJUKAN TERKAIT TATA KELOLA TIK PERUSAHAAN

Selain regulasi yang berlaku di internal Perusahaan, pengelolaan TIK juga disesuaikan dengan regulasi Pemerintah. Regulasi Pemerintah yang digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan TIK adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- PER-09/MBU/2012 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG); dan
- PER-02/MBU/2018 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

ORGAN TATA KELOLA

Pengelolaan TIK di Pelindo III dijalankan oleh Subdirektorat TIK yang dikepalai oleh seorang Senior Manager dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi dan Komersial.

PROFIL PEJABAT SUB-DIREKTORAT TIK

AGUS DHARMAWAN

SM Teknologi Informasi dan Komunikasi

SVP of Information Communication and Technology

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Magetan pada tanggal 25 Agustus 1976. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2007 dengan masa kerja kurang lebih 12 tahun. Jejak karir selama di Pelindo III hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai SM TIK sejak tahun 2018.
2. Menjabat sebagai Asisten Senior Manager (ASM) Solusi dan Pengembangan TIK pada tahun 2014.
3. Menjabat sebagai Asisten Manajer Sistem Manajemen dan Informasi di Pelabuhan Cabang Banjarmasin pada tahun 2012.
4. Tahun 2010 menjabat sebagai Asisten Manajer Sistem Informasi di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, yang merupakan salah satu Anak Perusahaan Pelindo III.

AGUS MAY SURYANTO

ASM Pengembangan dan Solusi TIK Front-End

VP of Front-End ICT Development and Solutions

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Lamongan tanggal 20 Mei 1980. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2007 dengan masa kerja kurang lebih 12 tahun. Jejak karir selama di Pelindo III hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabat sebagai ASM Pengembangan dan Solusi TIK Front-End di tahun 2018.
2. Menjabat sebagai Pimpinan Proyek Integrasi ERP dan Aplikasi Korporat pada tahun 2016.

ICT GOVERNANCE OF THE COMPANY

REFERENCE FOR REGULATIONS RELATED TO ICT GOVERNANCE

Aside from internal regulations of the Company, ICT management in Pelindo III is based on the conformity with the government's regulations. The regulations used as the guidelines in managing the Company's ICT are as follows:

- Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions;
- Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure;
- PER-09/MBU/2012 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance; and
- PER-02/MBU/2018 of 2019 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/2013 on Information Technology Management Guidelines in SOE.

GOVERNANCE ORGANS

ICT management at Pelindo III is run by the ICT Sub-Directorate lead by a Senior Manager (SVP) who answers directly to the Operations and Commercial Director.

PROFILES OF THE OFFICIALS OF THE ICT SUB-DIRECTORATE

An Indonesian citizen, born in Magetan on 25 August 1976. Beginning a career in Pelindo III in 2007 with a tenure of about twelve years. The career milestones in Pelindo III to the present day are as follows:

1. SVP of ICT since 2018.
2. Assistant of Senior Manager (ASM) of ICT Development and Solutions in 2014.
3. Assistant Manager of Information and Management System on Port of Banjarmasin Branch in 2012.
4. In 2010 he was appointed as an Assistant Manager of Information System on PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, a Subsidiary of Pelindo III.

An Indonesian citizen, born in Lamongan on 20 May 1980. Beginning a career at Pelindo III in 2007 with a tenure of about twelve years. The career milestones in Pelindo III to the present day are as follows:

1. VP of Front-End ICT Development and Solution in 2018.
2. Leader of the ERP and Corporate Application Integration Project in 2016.

- Menjabat sebagai Asisten Manajer TIK di Pelabuhan Cabang Tanjung Perak pada tahun 2015.
- Menjabat sebagai Asisten Manager Sistem Manajemen dan Informasi Cabang Terminal Petikemas Semarang pada tahun 2011.

- Assistant Manager of ICT on Port of Tanjung Perak Branch in 2015.*
- Assistant Manager of Management System and Information on Terminal Petikemas Semarang Branch in 2011.*

AGUNG EKA WARDHANA

ASM Pengembangan dan Solusi TIK Back-End

VP of Back-End ICT Development and Solutions

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya tanggal 5 Agustus 1981. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2009 dengan masa kerja kurang lebih 10 tahun. Jejak karir selama di Pelindo III hingga saat ini adalah sebagai berikut:

- Menjabat sebagai ASM Pengembangan dan Solusi TIK Back-End di tahun 2018.
- Menjabat sebagai Manager TIK di Cabang Terminal Petikemas Semarang pada tahun 2015.
- Menjabat sebagai Asisten Manager TIK di Cabang Terminal Petikemas Semarang pada tahun 2015.
- Menjabat sebagai Asisten Manager TIK di Cabang Pelabuhan Banjarmasin pada tahun 2014.
- Menjabat sebagai Asisten Manager TIK di Cabang Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2012.
- Menjabat sebagai Supervisor di Cabang Gresik pada tahun 2012.

An Indonesian citizen, born in Surabaya on 5 August 1981. Beginning a career at Pelindo III in 2009 with a tenure of about ten years. The career milestones in Pelindo III to the present day are as follows:

- VP of Back-End ICT Development and Solutions in 2018.*
- Manager of ICT on Terminal Petikemas Semarang Branch in 2015.*
- Assistant Manager of ICT on Terminal Petikemas Semarang Branch in 2015.*
- Assistant Manager of ICT on Port of Banjarmasin Branch in 2014.*
- Assistant Manager of ICT on Port of Tanjung Perak Branch in 2012.*
- Supervisor on Gresik Branch in 2012.*

LUTHMAYANNA FRISTIKAWANSYAH

ASM Pelayanan dan Operasi TIK

VP of ICT Services and Operations

Warga Negara Indonesia, lahir di Malang pada tanggal 9 Agustus 1980. Mulai berkarir di Pelindo III sejak tahun 2006 dengan masa kerja kurang lebih 13 tahun. Jejak karir di Pelindo III adalah sebagai berikut:

- Menjabat sebagai ASM Pelayanan dan Operasi di tahun 2018.
- Menjabat sebagai Asisten Manager TIK di Cabang Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2016.
- Menjabat sebagai Asisten Manager Perangkat Keras dan Jaringan pada Cabang Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2012.
- Menjabat sebagai Supervisor Sistem Informasi di Cabang Pelabuhan Gresik di tahun 2011.

An Indonesian citizen, born in Malang on 9 August 1980. Beginning a career at Pelindo III in 2006 with a tenure of about 13 years. The career milestones in Pelindo III to the present day are as follows:

- VP of ICT Services and Operations in 2018.*
- Assistant Manager of ICT on the Branch Port of Tanjung Perak in 2016.*
- Assistant Manager of Hardware and Network on the Branch Port of Tanjung Perak in 2012.*
- Supervisor of Information System on the Branch Port of Gresik in 2011.*

RAHMI IKA NOVIANA

ASM Tata Kelola dan Perencanaan Strategis TIK

VP of ICT Governance and Strategic Planning

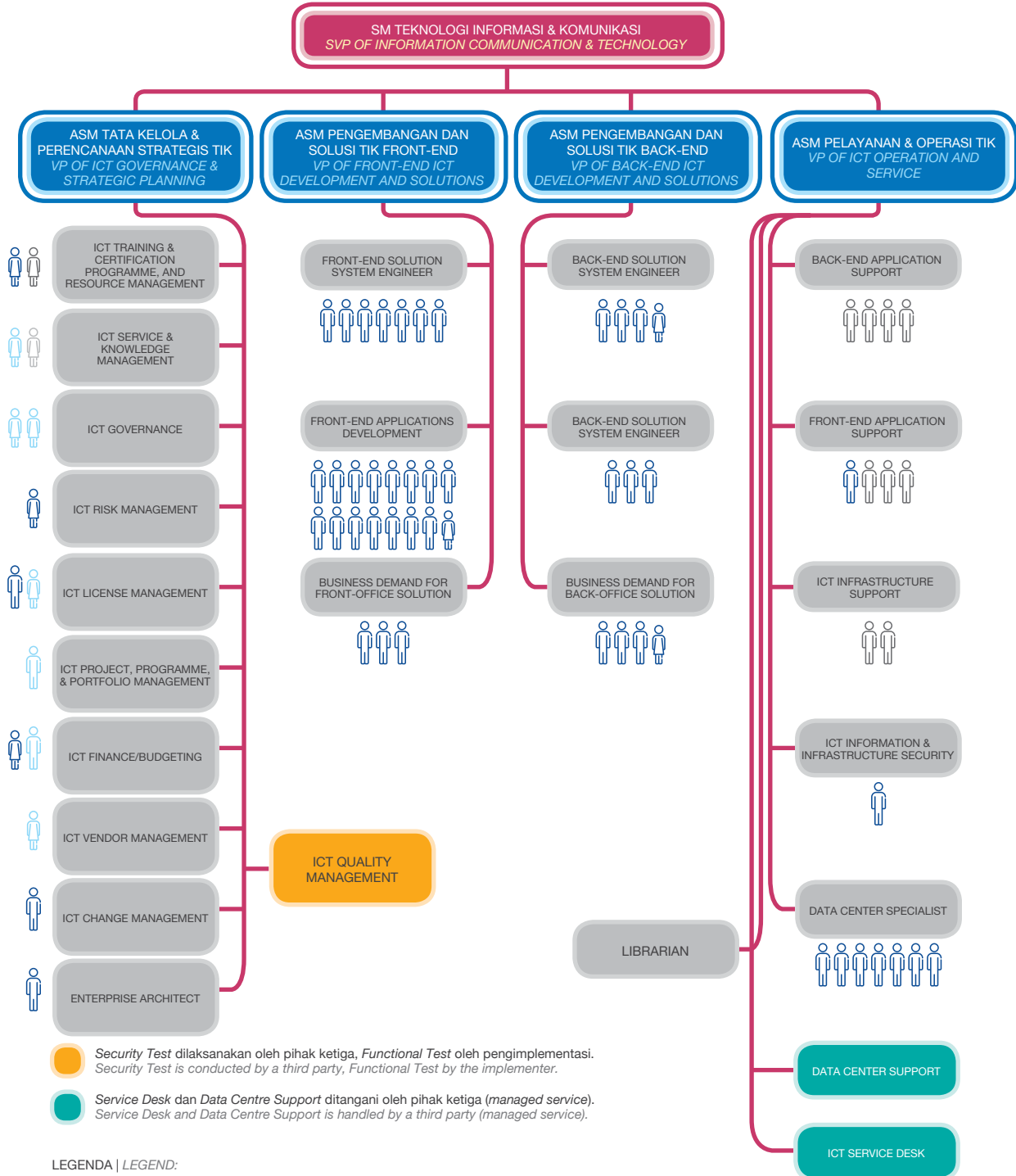
Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 14 November 1982. Memulai karir di Pelindo III sejak tahun 2006 dengan masa kerja kurang lebih 13 tahun. Jejak karir selama di Pelindo III hingga saat ini sebagai berikut:

- Menjabat sebagai ASM Tata Kelola dan Perencanaan Strategis TIK di tahun 2018.
- Wakil Pengembangan Pusat Layanan Bersama dan Tata Kelola di akhir 2017.
- Menjabat sebagai Asisten Manager Sistem Manajemen dan Informasi di Cabang Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2012.

An Indonesian citizen, born in Pasuruan on 14 November 1982. Beginning a career at Pelindo III since 2006 with a term of service of approximately 13 years. The career milestones in Pelindo III to the present day are as follows:

- VP of ICT Governance and Strategic Planning in 2018.*
- Vice of the Development of Shared Service Center and Governance at the end of 2017.*
- Assistant Manager of Management System and Information on the Branch Port of Tanjung Emas in 2012.*

STRUKTUR ORGANISASI SUBDIREKTORAT TIK
ORGANISATION STRUCTURE OF ICT SUB-DIRECTORATE



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PENGELOLAAN TIK

Subdirektorat TIK dipimpin oleh seorang Senior Manager yang membawahi 4 Kepala Bidang, yaitu:

1. ASM Pengembangan dan Solusi TIK Front-End, bertanggung jawab untuk:
 - Memastikan keselarasan dan kesinambungan proses pengembangan baru dan/atau penyempurnaan solusi TIK *front-end* dengan kebutuhan bisnis unit fungsional terkait berdasarkan analisis biaya dan ketercapaian manfaat.
 - Memastikan agar proses perencanaan, akuisisi, dan pengembangan solusi TIK *front-end* sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.
 - Memastikan dilakukannya riset dan pengembangan TIK *front-end* dengan mempertimbangkan tren teknologi di industri kepelabuhanan untuk memberi solusi yang inovatif bagi bisnis.
 - Memastikan bahwa investasi TIK *front-end* seimbang sesuai dengan nilai strategis yang diberikan bagi Perusahaan.
 - Memastikan adanya dukungan dan keterlibatan *Business Process Owner* atas penerapan inisiatif-inisiatif TIK *front-end*.
 - Memastikan terwujudnya transformasi solusi TIK *front-end* ke aktivitas operasional *Business Process Owner* melalui proses manajemen perubahan.
2. ASM Pengembangan dan Solusi TIK Back-End, bertanggung jawab untuk:
 - Memastikan keselarasan dan kesinambungan proses pengembangan baru dan/atau penyempurnaan solusi TIK *back-end* dengan kebutuhan bisnis unit fungsional terkait berdasarkan analisis biaya dan ketercapaian manfaat.
 - Memastikan agar proses perencanaan, akuisisi dan pengembangan solusi TIK *back-end* sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.
 - Memastikan dilakukannya riset dan pengembangan TIK *back-end* dengan mempertimbangkan tren teknologi di industri kepelabuhanan untuk memberi solusi yang inovatif bagi bisnis.
 - Memastikan bahwa investasi TIK *back-end* seimbang sesuai dengan nilai strategis yang diberikan bagi Perusahaan.
 - Memastikan adanya dukungan dan keterlibatan *Business Process Owner* atas penerapan inisiatif-inisiatif TIK *back-end*.
 - Memastikan terwujudnya transformasi solusi TIK *back-end* ke aktivitas operasional *Business Process Owner* melalui proses manajemen perubahan.
3. ASM Tata Kelola & Perencanaan Strategis TIK, bertanggung jawab untuk:
 - Memastikan tersedianya rencana kerja dan portfolio TIK yang sesuai dengan target, strategi, dan kebutuhan bisnis Perusahaan.
 - Memastikan agar rencana kerja dan portfolio TIK diterjemahkan, dikembangkan, dan dilaksanakan di dalam koridor yang telah disepakati bersama.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ICT MANAGEMENT ORGAN

The ICT Sub-Directorate is led by a Senior Vice President who oversees four Division Heads, namely:

1. VP of Front-End ICT Development and Solutions, who is responsible for:
 - Ensuring the alignment and sustainability in the new development and/or improvement process of front-end ICT solutions to the business needs of related functional units based on cost analysis and benefits achievement.
 - Ensuring that the planning, acquisition, and development process of front-end ICT solutions match business needs.
 - Ensuring that the research and development of front-end ICT are considering the technology trends in the port industry to provide innovative solutions for the business.
 - Ensuring that front-end ICT investments are balanced in accordance with the strategic values for the Company.
 - Ensuring Business Process Owner support and involvement in the implementation of front-end ICT initiatives.
 - Ensuring the realisation of front-end ICT solution transformation into the business operations of the Business Process Owner through a change management process.
2. VP of Back-End ICT Development and Solutions, who is responsible for:
 - Ensuring the alignment and sustainability in the new development and/or improvement process of back-end ICT solutions to the business needs of related functional units based on cost analysis and benefits achievement.
 - Ensuring that the planning, acquisition, and development process of back-end ICT solutions match business needs.
 - Ensuring that the research and development of back-end ICT are considering the technology trends in the port industry to provide innovative solutions for the business.
 - Ensuring that back-end ICT investments are balanced in accordance with the strategic values provided for the Company.
 - Ensuring Business Process Owner support and involvement in the implementation of back-end ICT initiatives.
 - Ensuring the realisation of back-end ICT solution transformation into the business operations of the Business Process Owner through a change management process.
3. VP of ICT Governance and Strategic Planning, who is responsible for:
 - Ensuring the availability of ICT work plans and portfolios fitting the Company's targets, strategies, and business needs.
 - Ensuring that the ICT work plan and portfolio are translated, developed, and implemented within a commonly agreed term.

- Memastikan adanya pengelolaan dan pemeliharaan arsitektur Perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola TIK serta sesuai dengan *Master Plan* TIK Perusahaan.
 - Memastikan adanya pengelolaan SDM TIK yang meliputi proses perencanaan, pembinaan, dan pengembangan SDM sebagai salah satu aset penting Perusahaan.
 - Memastikan tersedianya proses pengelolaan risiko TIK dalam pelaksanaan program kerja dan operasional TIK.
 - Memastikan adanya kebijakan, standar, dan prosedur TIK yang sesuai dengan kondisi Perusahaan dan menjamin adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya.
 - Memastikan adanya *Service Level Agreement* (SLA) termasuk proses pengelolaannya yang telah disepakati dengan unit fungsional terkait.
 - Memastikan adanya proses pemantauan SLA, termasuk hasil analisis dan evaluasi kinerja SLA, serta penyusunan laporan konsolidasi mengenai kinerja dan pencapaian layanan secara berkala.
 - Menjamin adanya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan memastikan tersedianya dokumentasi proyek sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
 - Memastikan adanya pengelolaan *change management* dalam penyediaan layanan TIK.
 - Memastikan adanya pengelolaan *quality assurance* dalam penyediaan layanan TIK.
 - Memastikan adanya analisis profil vendor, penilaian risiko, dan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perusahaan.
 - Memastikan adanya inventarisasi atas aset dan kajian terhadap efektivitas aset dalam memenuhi kebutuhan bisnis.
 - Menjamin adanya tindak lanjut dan perbaikan atas setiap rekomendasi yang telah disepakati bersama dengan auditor internal dan eksternal.
4. ASM Pelayanan & Operasi TIK, bertanggung jawab untuk:
- Memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh sumber daya yang mendukung jalannya operasional dan pelayanan TIK Perusahaan secara berkesinambungan.
 - Memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas operasional dan pelayanan TIK, sekaligus memastikan adanya langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan berdasarkan standar dan target kerja Perusahaan.
 - Memastikan ketersediaan, kapasitas, keamanan, dan keandalan layanan TIK.
 - Memastikan terlaksananya operasional infrastruktur jaringan dan data center dengan optimal sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
 - Memastikan beroperasinya *help desk* dalam memenuhi kebutuhan dan menjawab keluhan pengguna sesuai dengan SLA yang telah disepakati.
 - Melakukan investigasi, analisis, dan menyelesaikan permasalahan pada layanan TIK dan kegagalan komponennya.
- *Ensuring that the Company's architecture is managed and maintained based on the principles of ICT governance as well as the Company's ICT Master Plan.*
 - *Ensuring the management of ICT Human Capital, which covers the processes of planning, cultivating, and developing Human Capital as one of the important Company assets.*
 - *Ensuring the availability of ICT risk management process in the implementation of ICT programmes and operations.*
 - *Ensuring that the ICT policies, standards, and procedures are available and suitable with the Company's conditions and ensuring periodic evaluations on its implementation.*
 - *Ensuring the availability of Service Level Agreement (SLA), including its management processes agreed upon with the relevant functional unit.*
 - *Ensuring the SLA monitoring process, including the results of SLA performance analysis and evaluation, and the preparation of periodic consolidated reports on the performance and achievement of service.*
 - *Ensuring an oversight on project implementation and the availability of project documentation in accordance with applicable standards and regulations.*
 - *Ensuring change management in the provision of ICT services.*
 - *Ensuring quality assurance management in the provision of ICT services.*
 - *Ensuring the vendor profile analysis, risk assessment, and scope of work by the Company.*
 - *Ensuring the inventory of assets and review on asset effectiveness in meeting business needs.*
 - *Ensuring the follow-up and improvement of any recommendations agreed upon with internal and external auditors.*
4. *VP of ICT Services and Operations, who is responsible for:*
- *Ensuring the supervision and evaluation of the performance of all resources which continuously support the ICT operations and services of the Company.*
 - *Ensuring the supervision and evaluation of all ICT operational activities and services while ensuring strategic steps to improve and develop service quality based on the Company's standards and targets.*
 - *Ensuring ICT services availability, capacity, security, and reliability.*
 - *Ensuring the optimal operations of network infrastructure and data centre in accordance with the applicable standards and procedures.*
 - *Ensuring the help desk operations in meeting the Company's needs and answering user complaints in accordance with the agreed SLA.*
 - *Investigating, analysing, and solving ICT service issues as well as its component failures.*

- Memastikan penyelesaian permintaan perubahan/penyempurnaan layanan TIK dilakukan dengan tepat waktu, terkendali, dan terdokumentasikan sesuai aturan yang berlaku.

- Ensuring that the completion of ICT service change/improvement demands is timely, controlled, and documented in accordance with the applicable rules.

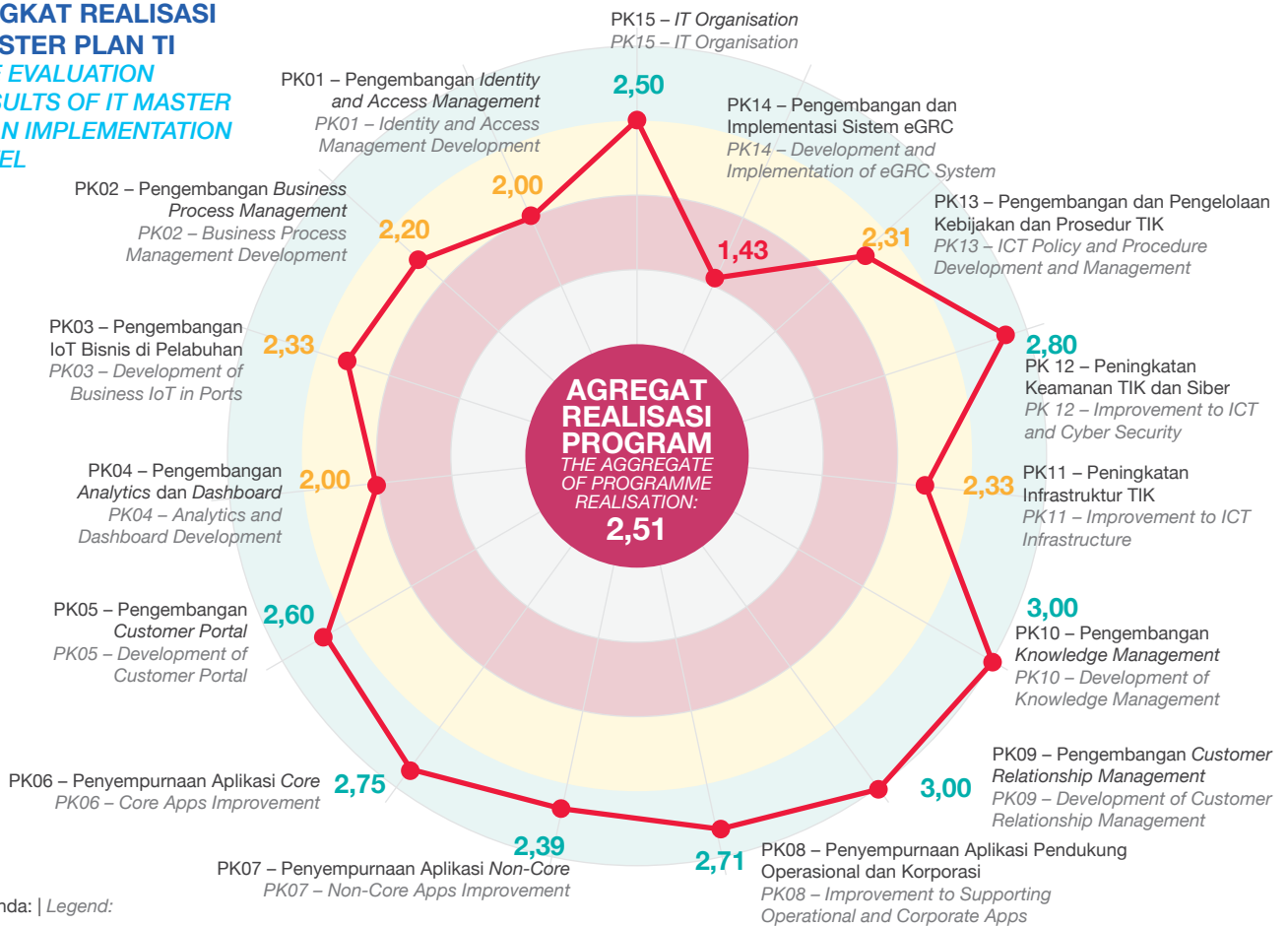
TINJAUAN MASTER PLAN TI 2015-2019 BESERTA PENYELARASANNYA

Dalam rangka memastikan keselarasan strategi TIK dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019, serta sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian BUMN, maka disusunlah *Master Plan* TI 2015-2019 dan dilakukan peninjauan atas penerapannya oleh tim konsultan internasional (*big four*) pada tahun 2019 atas *Master Plan* yang telah diselaraskan untuk periode 2018-2019. Berikut hasil penilaian tingkat realisasi program *Master Plan* TI dengan skala 3:

REVIEW AND ALIGNMENT OF THE 2015-2019 IT MASTER PLAN

In order to ensure the alignment of ICT strategy and the 2015-2019 RJPP and in accordance with the Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2018 dated 12 February 2018 on the Principles of Information Technology Governance of the Ministry of SOE, the IT Master Plan 2015-2019 was formulated and an international consulting team (*big four*) reviewed its 2018-2019 implementation. The evaluation result of the implementation level of the Master Plan programme on the scale of 3 is as follows:

HASIL PENILAIAN TINGKAT REALISASI MASTER PLAN TI THE EVALUATION RESULTS OF IT MASTER PLAN IMPLEMENTATION LEVEL



ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP TIK

1. APLIKASI

- Aplikasi yang terintegrasi dan menyeluruh.
- *Data analytics, real-time dashboard*, dan pelaporan terkonsolidasi.
- Penerapan teknologi digital dan *mobile*.

2. TEKNOLOGI

- Jaringan data yang andal dengan cakupan luas.
- Sistem informasi yang responsif dan tersedia.
- *Single sign-on* dan provisi terintegrasi.

3. SDM DAN ORGANISASI

- Struktur organisasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis.
- Sumber daya manusia yang cekatan serta tingkat layanan bersama yang responsif, efektif, dan *extended*.

4. TATA KELOLA

- Tata kelola TIK dan *cyber security* yang baik dan bijak.
- Penerapan dan penetapan kebijakan proses bisnis secara konsisten.

5. DATA

- Tata kelola data yang baik.
- Kualitas data yang optimal.

TREN TIK DI INDUSTRI KEPELABUHANAN

1. Penerapan aplikasi *mobile* di industri kepelabuhanan.
2. Penerapan *Internet of Things (IoT)* and *big data* untuk *data analytics*.
3. Pengembangan IoT ke depan terkait pemeliharaan alat.
4. Penerapan sistem robotika atau *artificial intelligence* pada TOS pelayanan petikemas.

BUSINESS BUILDING BLOCK HINGGA AKHIR TAHUN 2019

Business Building Block menggambarkan unit bisnis mana saja yang telah didukung oleh TIK, dalam proses pengembangan, maupun yang belum. Informasi mengenai realisasi *Business Building Block* hingga akhir tahun 2019 tersaji dalam bagan di bawah.

STAKEHOLDER ASPIRATION FOR ICT

1. APPLICATION

- *Integrated and thorough applications.*
- *Data analytics, real-time dashboard, and consolidated report.*
- *Digital and mobile technology implementation.*

2. TECHNOLOGY

- *Reliable data network with wide coverage.*
- *Highly responsive and available information system.*
- *Single sign-on and integrated provision.*

3. HUMAN CAPITAL AND ORGANISATION

- *The organisational structure in line with business necessities.*
- *Agile human capital as well as responsive, effective, and extended shared services.*

4. GOVERNANCE

- *Good and wise ICT and cybersecurity governance.*

- *Consistent business process policy establishment and implementation.*

5. DATA

- *Good data governance.*
- *Optimal data quality.*

ICT TRENDS IN PORT INDUSTRY

1. *Mobile app implementation in the port industry.*
2. *Internet of Things (IoT) and big data implementation for data analytics.*
3. *Future IoT implementation for equipment maintenance.*
4. *Robotic system or artificial intelligence implementation in the container service TOS.*

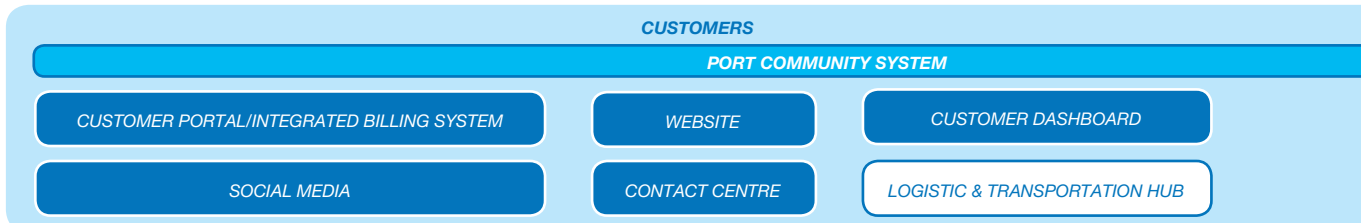
BUSINESS BUILDING BLOCK UP TO THE END OF 2019

The Business Building Block illustrates which business unit is not yet supported, in progress, or is already supported by ICT. Information on the realisation of Business Building Block as of 2019 is presented in the following figure.

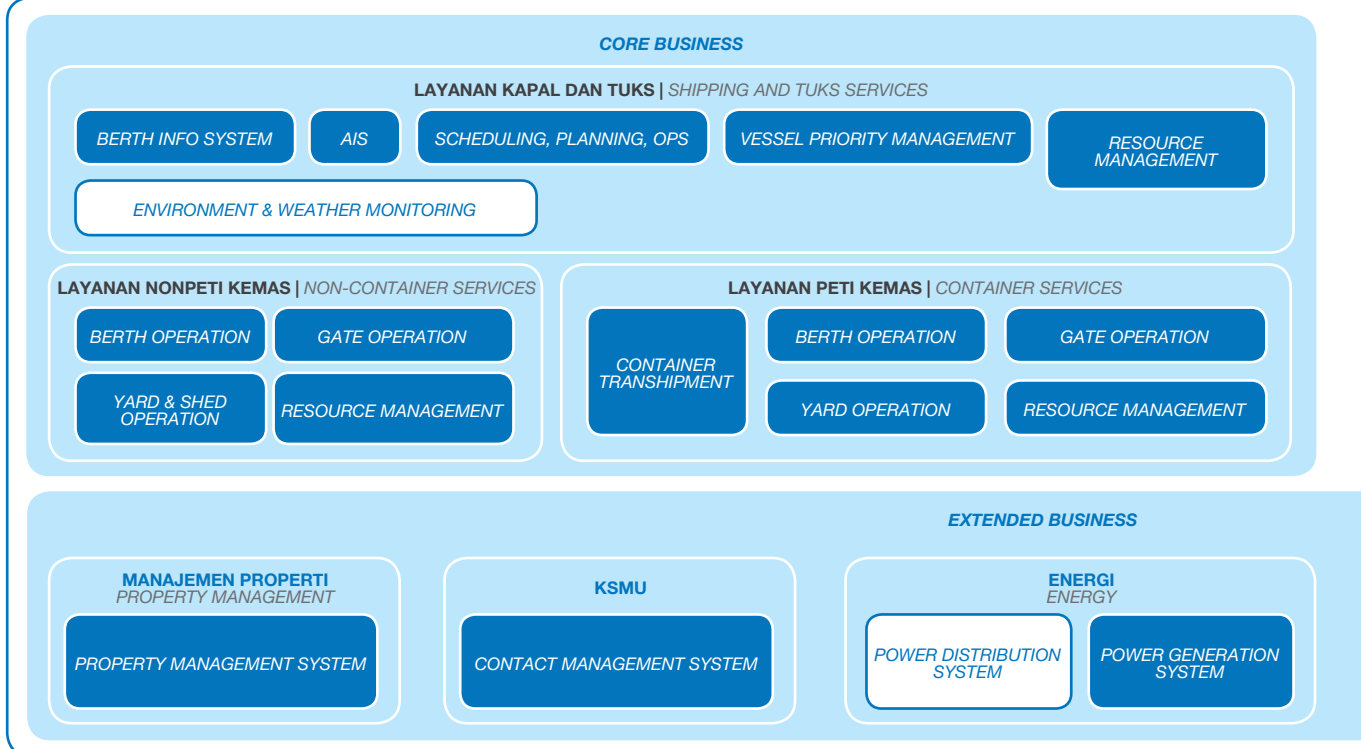


BUSINESS BUILDING BLOCK 2019

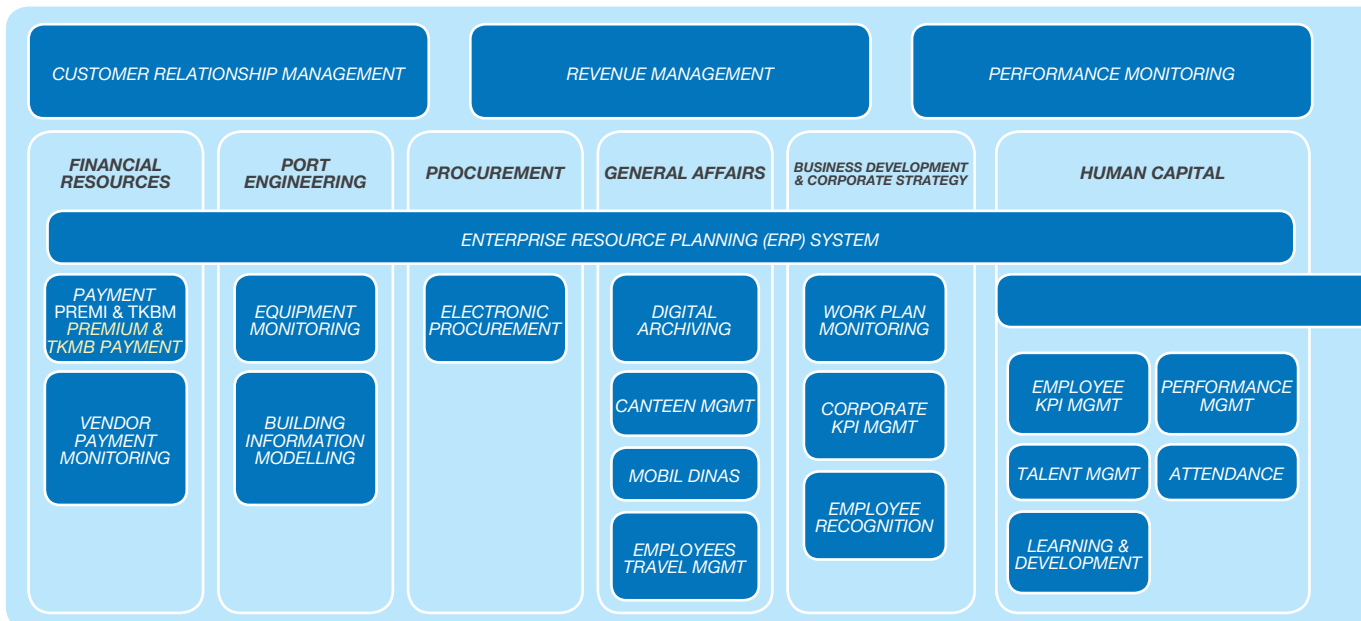
FRONT END




BUSINESS & OPERATION




ENTERPRISE SERVICES & OPERATION SUPPORT

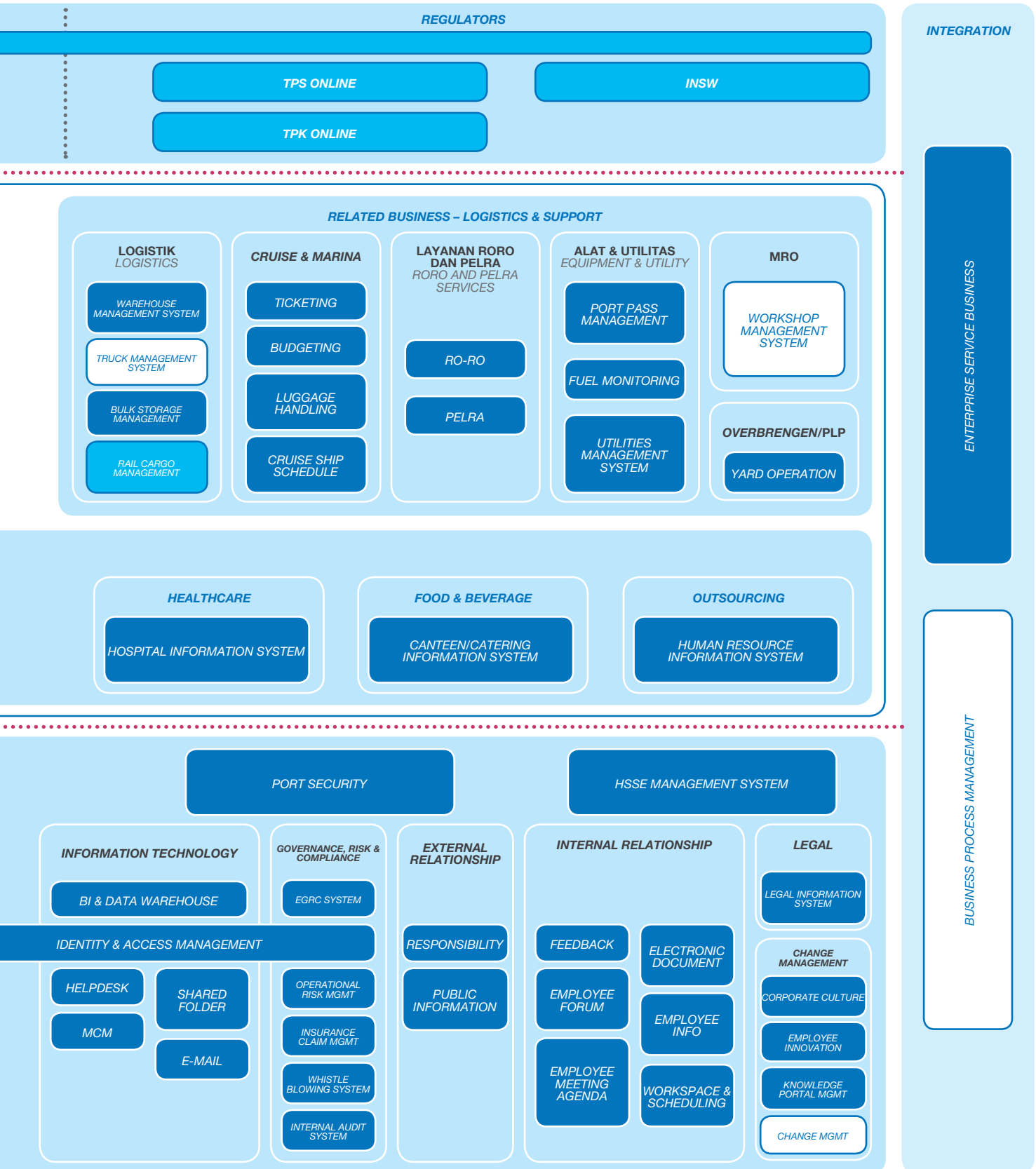


LEGENDA | LEGENDS

 Saat ini terdapat aplikasi yang mengakomodasi
There is an accommodating app

 Merupakan aplikasi eksternal atau regulator
An external or regulator's app

 Solusi sistem informasi belum tersedia
The information system solution is unavailable



FRONT END

CUSTOMERS

PORT COMMUNITY SYSTEM

ANJUNGAN Customer Portal INTEGRATED BILLING SYSTEM www.pelindo.co.id ANJUNGAN Customer Portal CUSTOMER DASHBOARD

SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA www.pelindo.co.id LOGISTIC & TRANSPORTATION HUB

BUSINESS & OPERATION

CORE BUSINESS

LAYANAN KAPAL DAN TUKS | SHIPPING AND TUKS SERVICES

ENVIRONMENT & WEATHER MONITORING ENVIRONMENT & WEATHER MONITORING

LAYANAN NONPETI KEMAS | NON-CONTAINER SERVICES

GEN-C

LAYANAN PETI KEMAS | CONTAINER SERVICES

CBS-Webaccess TPKS SPINER cytrans TOPX Advance

EXTENDED BUSINESS

MANAJEMEN PROPERTI
PROPERTY MANAGEMENT

REMOTE

KSMU

KSMU

ENERGI
ENERGY

POWER DISTRIBUTION SYSTEM
POWER DISTRIBUTION SYSTEM

SCADA

ENTERPRISE SERVICES & OPERATION SUPPORT

CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Inco

RAPORTS
Operational Reporting System
EPIC

FINANCIAL
RESOURCES

PORT
ENGINEERING

PROCUREMENT

GENERAL AFFAIRS

BUSINESS DEVELOPMENT
& CORPORATE STRATEGY

HUMAN CAPITAL

CENTRA

SAP ESS/MSS

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) SYSTEM

IMAIS

pembayaran Operasional

SAP PM

SAP MM

MILEA

MANAJEMEN RENCANA KERJA

Portal SI

procure to pay

Building Information Modelling

Procurement

My Pelindo / Kalender Kerja

Input KPI

My Pelindo / Performance SMKI

My Pelindo / Performance

SAP BPC SAP FI SAP CO SAP PO

MOBIL DINAS MOBIL DINAS

MOBIL DINAS MOBIL DINAS

My Pelindo / Travel

My Pelindo / Budaya

My Pelindo / Pintar

My Pelindo / Hadir

SAP HCM

SunFish

SunFish


SunFish

SunFish


SunFish

SunFish

LEGENDA | LEGENDS

 Saat ini terdapat aplikasi yang mengakomodasi
There is an accommodating app

 Merupakan aplikasi eksternal atau regulator
An external or regulator's app

 Solusi sistem informasi belum tersedia
The information system solution is unavailable

REGULATORS

TPS ONLINE

INSW

TPK ONLINE

INTEGRATION

RELATED BUSINESS – LOGISTICS & SUPPORT

**LOGISTIK
LOGISTICS**



TRUCK MANAGEMENT
SYSTEM
TRUCK MANAGEMENT
SYSTEM



RAIL CARGO
MANAGEMENT
RAIL CARGO
MANAGEMENT

CRUISE & MARINA

E-TICKETING

E-TICKETING

E-TICKETING

KAPAL CRUISE

**LAYANAN RORO
DAN PELRA
RORO AND PELRA
SERVICES**



**ALAT & UTILITAS
EQUIPMENT & UTILITY**



MONITA



MRO

WORKSHOP
MANAGEMENT
SYSTEM
WORKSHOP
MANAGEMENT
SYSTEM

OVERBRENGEN/PLP



HEALTHCARE

SIRS

FOOD & BEVERAGE

e-CANTEEN

OUTSOURCING

HUMANIS

CCTV



INFORMATION TECHNOLOGY



**GOVERNANCE, RISK &
COMPLIANCE**

eGRC System

**EXTERNAL
RELATIONSHIP**



KEMILAU



INTERNAL RELATIONSHIP



LEGAL



**CHANGE
MANAGEMENT**



CHANGE MGMT

IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

SERVICE NOW

SAFEBOX



ENTERPRISE SERVICE BUSINESS

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

PROGRAM KERJA TIK 2018-2019

Mengacu pada *Master Plan* TI yang telah disusun, Subdirektorat TIK telah melakukan pembagian atas rencana-rencana pengembangan dan pengelolaan yang ada menjadi sebuah rencana kegiatan yang diterapkan dalam program tahunan Subdirektorat TIK. Program ini tentunya telah diselaraskan dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan serta memiliki fleksibilitas terhadap inisiatif strategis yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Terdapat 15 program kerja tahun 2018-2019 yang tertuang di dalam Dokumen Penyelarasan *Master Plan* TI:

1. Pengembangan *identity and access management*
2. Pengembangan manajemen proses bisnis
3. Pengembangan IoT bisnis di pelabuhan
4. Pengembangan *analytics* dan *dashboard*
5. Pengembangan *customer portal*
6. Penyempurnaan aplikasi *core*
7. Penyempurnaan aplikasi *non-core*
8. Penyempurnaan aplikasi pendukung korporasi dan operasional
9. Pengembangan manajemen hubungan dengan pelanggan
10. Pengembangan manajemen pengetahuan
11. Peningkatan infrastruktur TIK
12. Peningkatan keamanan TIK dan siber
13. Pengembangan dan pengelolaan kebijakan dan prosedur TIK
14. Pengembangan dan implementasi sistem eGRC
15. Peningkatan organisasi TIK

SERTIFIKASI BIDANG TIK

Upaya Perusahaan dalam meningkatkan standar pengelolaan dan aktivitas di bidang TIK dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi, yaitu:

1. ISO 27001:2013 (*Information Security Management*) dengan ruang lingkup aplikasi e-procurement dan fisik *data center*.
2. Surat Pencatatan Ciptaan atas 6 aplikasi:
 - Spiner
 - Monic
 - Home Terminal System
 - Gen-C
 - My Pelindo
 - Vasa
3. ISO 20000:2011 (*IT Service Management*) dengan ruang lingkup aplikasi IBS.

KESIAPAN PERUSAHAAN DI BIDANG TIK

KESIAPAN DARI ASPEK REGULASI

Dukungan atas penerapan dan pengembangan TIK dalam rangka menunjang kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan direalisasikan oleh manajemen Pelindo III, dalam hal ini Direksi Perusahaan, melalui Peraturan Direksi

2018-2019 ICT WORK PROGRAMMES

Referring to the *IT Master Plan*, the ICT Sub-Directorate has classified the development plans and existing management in order to be an action plan applied to ICT Sub-Directorate's annual programmes. The programmes have certainly been aligned with the Company's business development plan and could be adjusted to the necessary strategic initiatives to face unpredictable situations.

There are 15 programmes for 2018-2019 in the *IT Master Plan Alignment Document*:

1. *Identity and access management development*
2. *Business process management development*
3. *Development of Business IoT in ports*
4. *Analytics and dashboard development*
5. *Development of customer portal*
6. *Core apps Improvement*
7. *Non-core apps Improvement*
8. *Improvement of supporting operational and corporate apps*
9. *Development of customer relationship management*
10. *Development of knowledge management*
11. *Improvement of ICT infrastructure*
12. *Improvement of ICT and cybersecurity*
13. *ICT policy and procedure development and management*
14. *Development and implementation of eGRC system*
15. *Improvement to ICT organisation*

ICT CERTIFICATIONS

The Company's effort to improve the management and activity standards of ICT is proven by acquired certifications, namely:

1. ISO 27001:2013 (*Information Security Management*) in the scope of work e-procurement app and data centre physics.
2. Copyright Letter for six apps, namely:
 - Spiner
 - Monic
 - Home Terminal System
 - Gen-C
 - My Pelindo
 - Vasa
3. ISO 20000:2011 (*IT Service Management*) in the scope of IBS app.

THE READINESS OF THE COMPANY IN ICT

THE READINESS IN REGULATIONS

The support for ICT implementation and development to encourage the Company's business activity is realised by the management of Pelindo III, in this case, the BOD, through the Regulation of the BOD of Pelindo III No. PER.0019/HK.01.06/

Pelindo III No. PER.0019/HK.01.06/HOFC-2019 tentang Kebijakan Operasional Teknologi Informasi di Lingkungan Pelindo III serta Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.0046/HK.0501/HOFC-2020 tentang Sinergi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III Group. Dalam regulasi tersebut, Perusahaan berusaha memenuhi aspek infrastruktur maupun *soft-structure* yang diperlukan guna memberikan aturan main yang jelas serta kewenangan-kewenangan yang diperlukan terkait pengelolaan aspek TIK di lingkungan Perusahaan.

Muatan yang terkandung dalam regulasi tersebut yaitu:

1. Proses Perencanaan TIK
2. Pengelolaan Layanan TIK
3. Pengelolaan Keamanan TIK
4. Pengelolaan Layanan TIK Pihak Ketiga
5. Pengelolaan Operasional TIK
6. Pengelolaan Mutu Layanan TIK
7. *Knowledge Transfer* layanan TIK
8. Pengelolaan data pemantauan dan evaluasi kinerja TIK
9. Pemantauan dan evaluasi pengendalian internal
10. Pengelolaan kepatuhan terhadap kebijakan eksternal

KESIAPAN DARI ASPEK ANGGARAN

Guna mendukung daya saing usaha yang tinggi serta kemajuan atas penerapan TIK di lingkungan Perusahaan sehingga mampu sejajar dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa kepelabuhan lainnya di regional Asia bahkan dunia, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan secara menyeluruh dari beragam aspek termasuk dalam aspek anggaran.

Dengan melakukan riset yang terukur serta mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, dan kewajaran, Perusahaan telah melakukan pemetaan dan pengembangan rencana TIK yang dituangkan dalam *Master Plan* TI 2015-2019. Dalam Rencana Jangka Panjang tersebut, telah dilakukan penaksiran atas kebutuhan investasi di bidang TIK yang diperlukan selama berjalannya program kerja yang ada.

Pada tahun 2019, terdapat anggaran investasi *carry over* dari tahun 2018 di bidang TIK sebesar Rp219,3 miliar. Di akhir tahun 2019, Subdirektorat TIK melalui program-program yang diselenggarakan berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 80%. Sisa anggaran yang belum terserap dikarenakan adanya efisiensi melalui pemberdayaan tenaga internal dalam pengembangan aplikasi.

KESIAPAN DARI ASPEK SDM

Faktor kesiapan penyelenggaraan dan pengembangan TIK tidak hanya diukur dari seberapa banyak Perusahaan melakukan investasi dari segi perangkat lunak, perangkat keras, maupun besaran biaya pemeliharaan yang direalisasikan. Faktor kesiapan SDM khususnya SDM pengelola TIK itu sendiri juga berperan penting dalam mengukur sejauh mana penerapan atas program-program yang ada dapat berjalan dengan baik. Untuk menyeimbangkannya, Perusahaan juga melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola TIK secara berkala dan intensif agar dapat meminimalkan kendala-kendala dari aspek tersebut.

HOFC-2019 on the Operational Policy of Information Technology in Pelindo III as well as the Regulation of the BOD of Pelindo III No. PER.0046/HK.0501/HOFC-2020 on the Synergy of Information Technology and Communication of Pelindo III Group. In the regulations, the Company strives to fulfil the required infrastructure and soft-structure to provide clear rules and the necessary authority regarding the management of ICT aspect within the Company.

The contents of the regulation are:

1. *ICT Planning Process*
2. *ICT Service Management*
3. *ICT Security Management*
4. *ICT Service Management of Third Parties*
5. *ICT Operations Management*
6. *ICT Service Quality Management*
7. *ICT Service Knowledge Transfer*
8. *Management of ICT monitoring data and performance evaluation*
9. *Monitoring and evaluation of internal control*
10. *Management of compliance with external policies*

THE READINESS IN BUDGETING

The Company is committed to providing comprehensive support in terms of various aspects, including the budget aspect, in order to encourage strong business competitiveness and progress on ICT implementation within the Company to be on a par with other companies engaging in port services in Asia or even the world.

By conducting measured researches focusing on transparency, accountability, and fairness principles, the Company has mapped and developed a plan compiled in the 2015-2019 IT Master Plan. In the Long-Term Plan, the Company has carried out an assessment on investment in ICT that is required during the course of the current work programme.

In 2019 there is a carry-over investment budget from 2018 in ICT at Rp219.3 billion. At the end of 2019, through the implemented programmes, the ICT Sub-Directorate succeeded in 80% of budget absorption. The remaining budget is due to the efficiency through internal resources empowerment in app development.

THE READINESS OF HUMAN CAPITAL

The readiness in ICT implementation and development is not only measured from how much the Company invested in software, hardware, or maintenance cost. The readiness of Human Capital, especially the Human Capital managing ICT, also plays an important role in measuring the extent of the proper implementation of current programmes. In order to balance it, the Company also strengthened the capacity and capability of the Human Capital of ICT regularly and intensively in order to minimise obstacles in that aspect.

Berikut adalah pelatihan dan sertifikasi SDM bidang TIK yang dilakukan Perusahaan sepanjang 2019:

1. Managing IT Investment and Services
2. Big Data HADOOP
3. Enabling and Managing Office 365
4. IT Operation Management
5. Mastering Business Analysis (BABOK-v3)
6. TOGAF 9 v.2
7. Mastering Agile Project Management
8. Business Analysis Foundation (BAFF)

ICT Human Capital training and certification carried out by the Company in 2019 are:

1. Managing IT Investment and Services
2. Big Data HADOOP
3. Enabling and Managing Office 365
4. IT Operation Management
5. Mastering Business Analysis (BABOK-v3)
6. TOGAF 9 v.2
7. Mastering Agile Project Management
8. Business Analysis Foundation (BAFF)

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TIK 2019

Terdapat 38 Fokus pekerjaan TIK tahun 2019 yang terdiri dari 14 inisiatif *ad-hoc* dan 24 inisiatif *Master Plan TI*. Penjabaran informasi tersebut tersaji pada tabel di bawah:

EVALUATION OF ICT WORK PROGRAMMES IN 2019

There are 38 ICT projects in 2019 which consist of 14 *ad-hoc* initiatives and 14 24 *Master Plan* initiatives. The information is presented in the table below:

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TIK 2019 THE IMPLEMENTATION 2019 ICT WORK PROGRAMME

KODE INISIATIF INITIATIVE CODE	NAMA PEKERJAAN JOB NAME	NAMA INISIATIF MASTER PLAN TI IT MASTER PLAN INITIATIVE
05b-1	Pengadaan Server, Virtualisasi, Jaringan <i>Server, Virtualisation, Network Procurement</i>	Penyempurnaan aplikasi Integrated Billing System <i>Improvement of the Integrated Billing System App</i>
Ad-hoc	Pekerjaan HW Server Load Balancer pada API <i>HW Server Load Balancer Job on API</i>	
04b-1	Penyediaan Backup System DB dan App 19 <i>Provision of Backup System for DB and App 19</i>	Pengembangan Dashboard Operasional <i>Development of Operational Dashboard</i>
Ad-hoc	Server Cluster DB App Korporat <i>DB Server Cluster for Corporate App</i>	
03b	Jasa Konsultasi Pengembangan SAP dan Monic <i>Consultation Service for SAP and Monic Development</i>	
Ad-hoc	Server dan Upgrade Memory Server HANA <i>HANA Server and Server Memory Upgrade</i>	
Ad-hoc	Pengadaan Software Object Storage <i>Procurement of Software Object Storage</i>	
Ad-hoc	Penambahan DC Switch <i>Additional DC Switch</i>	
Ad-hoc	Pengadaan Server DataBase TOS TTL <i>Procurement of TTL TOS Server Database</i>	
06a-1	Pengembangan Integrated Gate System BRIZZI <i>Development of BRIZZI Integrated Gate System</i>	Peningkatan core apps (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.) <i>Core apps Improvement (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.)</i>

KODE INISIATIF <i>INITIATIVE CODE</i>	NAMA PEKERJAAN <i>JOB NAME</i>	NAMA INISIATIF MASTER PLAN TI <i>IT MASTER PLAN INITIATIVE</i>
06e-1	Vasa Middleware <i>Vasa Middleware</i>	Penyempurnaan aplikasi SPINER (Domestik) <i>Improvement to SPINER (domestic) app</i>
06a-1	Pengembangan SPINER dan MDT 1.2 <i>Development of SPINER and MDT 1.2</i>	Peningkatan <i>core apps</i> (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.) <i>Core apps Improvement (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.)</i>
12d-1	Perangkat Riset dan MiniLab TOS <i>Research and TOS MiniLab Device</i>	Hardening server dan perangkat <i>data center</i> <i>Non-Core Apps Development for Subsidiaries</i>
07c-4	Pengembangan IBS untuk Subs dan SPINER1.2 <i>IBS Development for Subs and SPINER 1.</i>	Pengembangan Aplikasi <i>Non-Core</i> Anak Perusahaan <i>Non-Core Apps Development for Subsidiaries</i>
08r	Pengembangan POCC Tahap 2 dan <i>Magic Berthing</i> <i>Development of Phase 2 POCC and Magic Berthing</i>	Pengembangan aplikasi Port Operation Command Centre <i>Development of Port Operation Command Centre App</i>
11d-2	Pengembangan MySPPD <i>Development of MySPPD</i>	Peningkatan <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> <i>Data Center and Disaster Recovery Center Improvement</i>
10b-2	Pengadaan Perangkat dan Aplikasi CAT <i>Procurement of CAT Devices and App</i>	Penyempurnaan sistem manajemen informasi dan ilmu pengetahuan <i>Improvement of information management and knowledge system</i>
11f-1	Pengembangan Sistem DVPayment <i>Development of DVPayment System</i>	Peningkatan <i>database</i> <i>Database improvement</i>
11d-1	Pengadaan Aplikasi Integrated TMS <i>Procurement of Integrated TMS App</i>	Peningkatan <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> <i>Data Center and Disaster Recovery Center Improvement</i>
11d-1	Pengembangan dan Implementasi SI Back Office PHC <i>Development and Implemenation of PHC SI Back Office</i>	Peningkatan <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> <i>Data Center and Disaster Recovery Center Improvement</i>
08b	Optimalisasi Implementasi SAP Back Office <i>Optimisation of SAP Back Office Implementation</i>	Penyempurnaan SAP Pelindo III <i>SAP Pelindo III improvement</i>
08u-1	Jasa Konsultasi Readiness Aplikasi FOBO PHC <i>Consultation Service for the Readiness of PHC FOBO App</i>	Peningkatan <i>tool Building Information Modelling</i> <i>Tool Building Information Modelling improvement</i>
08u-1	Pengembangan SI Front Office PHC <i>Development of PHC SI Front Office</i>	Peningkatan <i>tool Building Information Modelling</i> <i>Tool Building Information Modelling improvement</i>
03b	Pengembangan Monic dan Integrasi SAP <i>Development of Monic and SAP Integration</i>	Penerapan Sistem dan Sensor Pemantauan Alat Pelabuhan <i>Implementation of Port Equipment Monitoring System and Sensor</i>
Ad-hoc	Pengembangan MyPelindo Fase 2 <i>Second Phase of MyPelindo Development</i>	
Ad-hoc	Pelindo Intercompany Integration dan Consol <i>Pelindo Intercompany Integration and Consol</i>	
13a-10	Pengadaan Perangkat Lunak SAP2000 <i>Procurement of SAP 2000 Software</i>	Pengembangan dan Pengelolaan Kebijakan dan Prosedur TIK <i>ICT Policy and Procedure Development and Management</i>

KODE INISIATIF <i>INITIATIVE CODE</i>	NAMA PEKERJAAN <i>JOB NAME</i>	NAMA INISIATIF MASTER PLAN TI <i>IT MASTER PLAN INITIATIVE</i>
13a-10	Pengadaan Perangkat Lunak SAP2000 <i>Procurement of SAP 2000 Software</i>	Pengembangan dan Pengelolaan Kebijakan dan Prosedur TIK <i>ICT Policy and Procedure Development and Management</i>
06a-1	Pengadaan Lisensi Oracle DB 2019 <i>Procurement for 2019 Oracle DB License</i>	Peningkatan <i>core apps</i> (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.) <i>Core apps Improvement (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.)</i>
10a-2	Pengadaan Lisensi Microsoft 2019 <i>Procurement for 2019 Microsoft License</i>	Pengembangan Sistem <i>Bulletin Board</i> <i>Bulletin Board System development</i>
06a-1	Pengadaan Lisensi Oracle DB 2019 <i>Procurement for 2019 Oracle DB License</i>	Peningkatan <i>core apps</i> (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.) <i>Core apps Improvement (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.)</i>
06a-1	POCC Bena Banyuwangi & Nusa Tenggara (BBN) Kalimantan Jawa Tengah <i>POCC for Bena Banyuwangi & Nusa Tenggara (BBN), Kalimantan, and Central Java</i>	Peningkatan <i>core apps</i> (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.) <i>Core apps Improvement (e.g. GenC, Gate System, PCS, etc.)</i>
07b-2	Penataan Jaringan Kantor Region Kalimantan dan BBN <i>Network Arrangement in Kalimantan and BBN Regional Office</i>	Pengembangan Sistem Pendukung Logistik <i>Logistics Supporting System development</i>
Ad-hoc	Backbone FO Baru di TTL <i>New FO Backbone in TTL</i>	
Ad-hoc	Jaringan Komunikasi DC ke TPM dan Pelindo III Group <i>DC Communication Network to TPM and Pelindo III Group</i>	
Ad-hoc	Pengadaan Infrastruktur IT Terminal Gilimas <i>Procurement of IT Infrastructure in Terminal Gilimas</i>	
Ad-hoc	Pengadaan Infrastruktur IT di TPM <i>Procurement of IT Infrastructure in TPM</i>	
Ad-hoc	Pengadaan Infrastruktur IT TPM Tahap II <i>Second Phase of IT Infrastructure Procurement in TPM</i>	

PENCAPAIAN TIK TAHUN 2019

Terdapat beberapa *key achievement* yang dicapai di bidang TIK di tahun 2019, di antaranya adalah:

- Sinergi Pelindo III Group terkait pelaksanaan IT *charging*, Integrasi Tata Kelola dengan Anak Perusahaan
- Sinergi Pelindo III Group terkait pembangunan dan implementasi aplikasi:
 - CENTRA
 - My PDS
 - My TTL
 - RS PHC Care
 - Aplikasi OK
 - Aplikasi Klinik K3
 - Aplikasi PCN
 - Aplikasi Monita

2019 ICT ACHIEVEMENT

There are several *ICT key achievements* throughout 2019, namely

- Pelindo III Group Synergy* related to the implementation of *IT charging*, *Corporate Integration with the Subsidiaries*
- Pelindo III Group Synergy* related to *app development and implementation*:
 - CENTRA
 - My PDS
 - My TTL
 - RS PHC Care
 - OK App
 - Klinik K3 App
 - PCN App
 - Monita App

3. *Go Live* Aplikasi pada Pelindo III dan regional:

- Ask The Expert
- E-GRC modul Risk Register
- REMOTE V.2
- Monitoring Equipment V.2
- Mail Labelling Application
- Cy Trans
- Meeting Online VASA
- POCC
- Market X
- Pelra
- Mobile VASA
- Spiner Reborn
- EPIC
- Winco
- BIOS
- Super Depo
- Gapura

4. Pengembangan Aplikasi MyPelindo 2.4.2

5. Integrasi antarsistem terkait *vendor payment*

6. Release Peraturan Direksi mengenai Kebijakan Operasional TIK

7. Penataan *instance database* dan implementasi HA server database

8. Implementasi *security system* dan *Hypervconverged Infrastructure* (HCI)

3. *App Go Live* in Pelindo III and regional:

- Ask The Expert
- E-GRC Risk Register module
- REMOTE V.2
- Monitoring Equipment V.2
- Mail Labelling Application
- Cy Trans
- Meeting Online VASA
- POCC
- Market X
- Pelra
- Mobile VASA
- Spiner Reborn
- EPIC
- Winco
- BIOS
- Super Depo
- Gapura

4. *Development of MyPelindo App ver. 2.4.2.*

5. *Inter-system integration related to vendor payment*

6. *Release on the Decree of the BOD related to ICT operations*

7. *Instance database arrangement and HA server database implementation*

8. *Security system and Hyperconverged Infrastructure (HCI) implementation*

PROGRAM KERJA SUBDIREKTORAT TIK 2020

Di tahun 2020, program kerja Subdirektorat TIK terdiri dari:

1. Pengadaan infrastruktur untuk penerapan *Big Data Analysis*
2. Pengembangan dan Penerapan ERP di Anak/Cucu Perusahaan
3. Implementasi *Smart Visual Zoning Area*
4. Penyusunan *Master Plan TI 2020-2024*
5. Implementasi ISO Aplikasi Korporat

2020 ICT SUB-DIRECTORATE PROGRAMMES

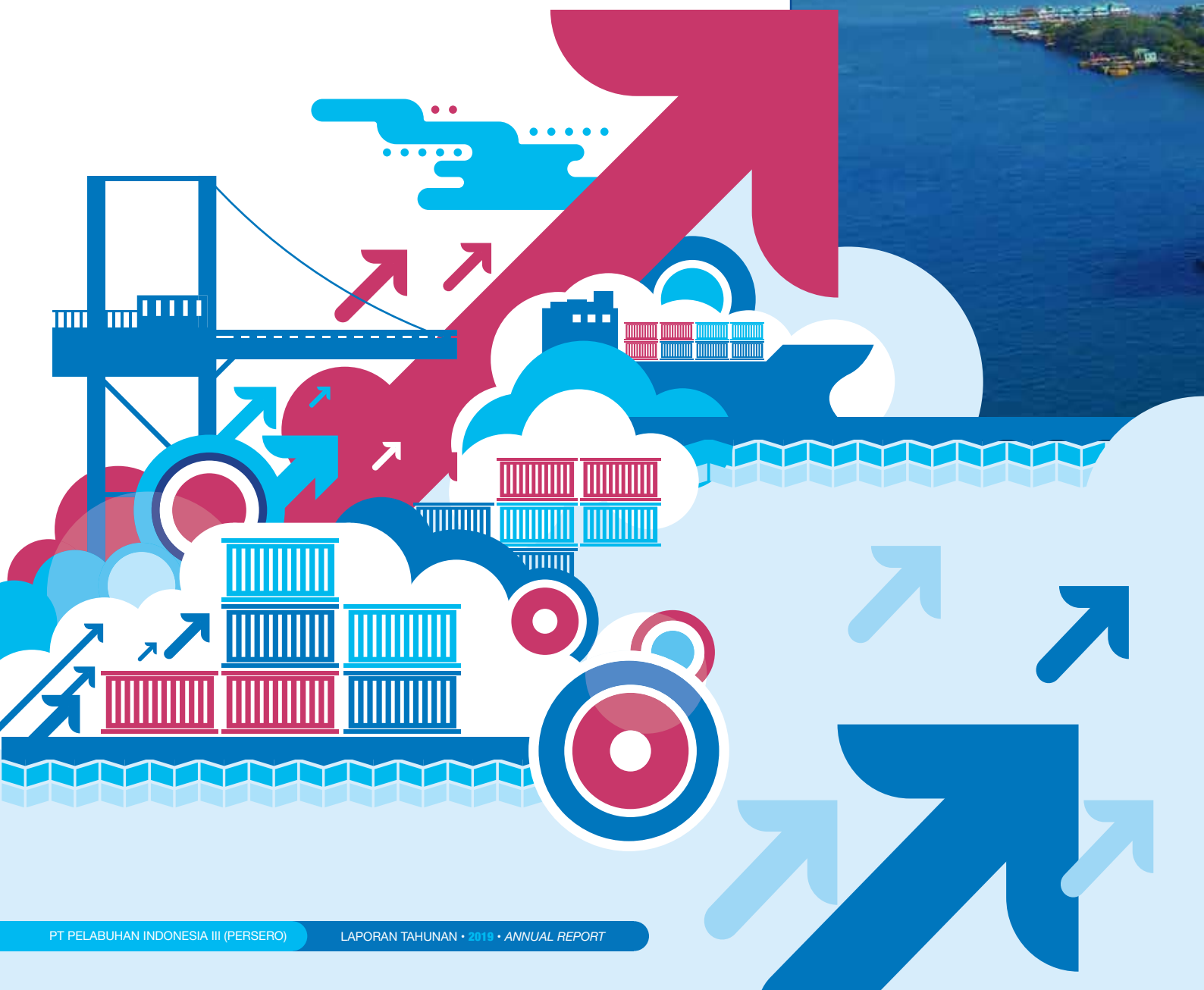
In 2020, the work programmes of ICT Sub-Directorate include:

1. *Infrastructure procurement for Big Data Analysis implementation*
2. *ERP Development and Implementation in Subsidiaries/ Second-Tier Subsidiaries*
3. *Smart Visual Zoning Area Implementation*
4. *2020-2024 IT Master Plan Composition*
5. *Implementation of Corporate ISO App*



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS





TINJAUAN UMUM

GENERAL OVERVIEW

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL

Dalam laporan International Monetary Fund (IMF) yang bertajuk *World Economic Outlook Database April 2020*, pertumbuhan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar 2,9%. Angka pertumbuhan tersebut melambat 19% bila dibandingkan dengan nilai pertumbuhan tahun 2018 sebesar 3,6%. Selain itu, laporan IMF yang bertajuk *World Economic Outlook, October 2019: Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers* menyatakan bahwa perlambatan ekonomi global merupakan dampak dari manufaktur internasional yang melambat dan adanya hambatan dalam aktivitas perdagangan seperti yang terjadi antara AS dan Tiongkok.

Kelompok-kelompok negara berkembang tersebut telah melakukan langkah-langkah pemulihan perekonomian dari pelambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang merupakan tekanan terberat serta berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mendatang. Kesulitan ekonomi makro yang sangat parah telah atau terus dialami secara khusus oleh Argentina, Iran, Turki, Venezuela, dan negara-negara kecil yang dilanda konflik, seperti Libya dan Yaman. Ekonomi negara berkembang lainnya seperti Brasil, Meksiko, Rusia, dan Arab Saudi diproyeksikan akan tumbuh pada 2019 sekitar 1% atau kurang, jauh di bawah rata-rata historisnya.

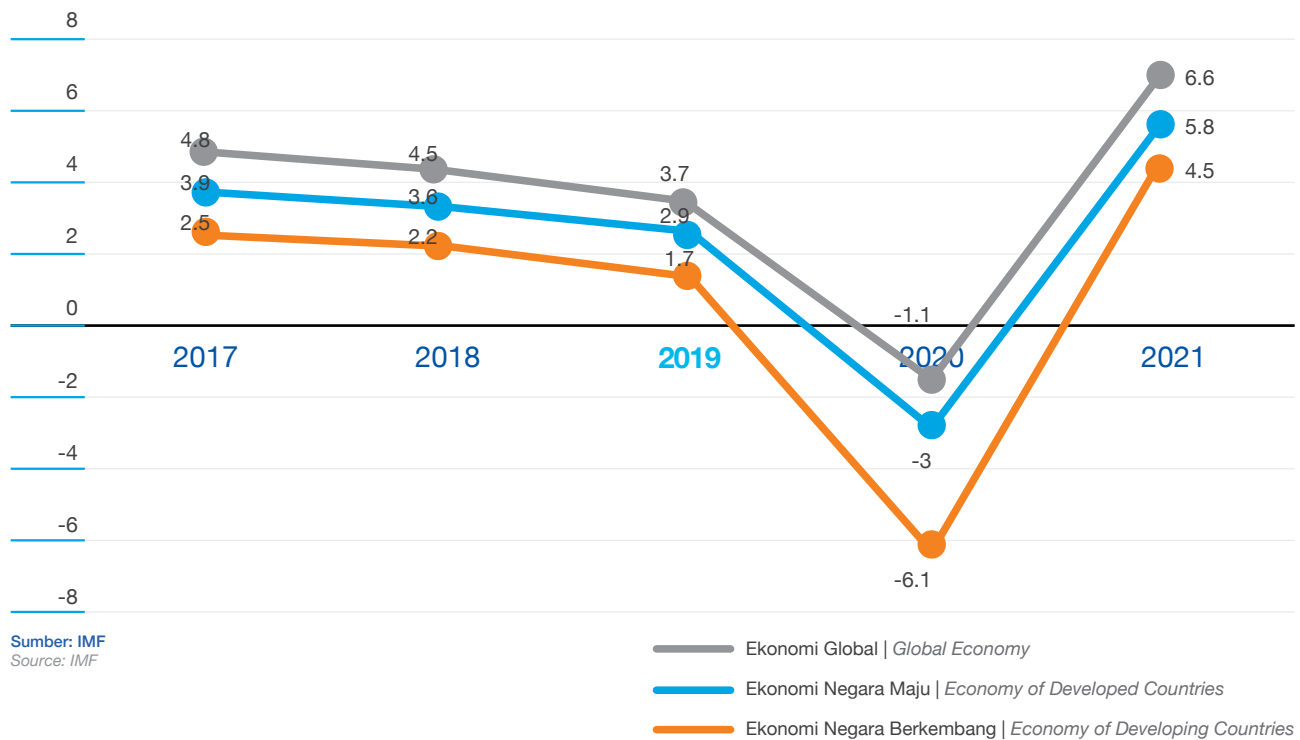
GLOBAL ECONOMIC REVIEW

In the report from the International Monetary Fund (IMF) titled World Economic Outlook Database April 2020, the global economic growth up to the end of 2019 is recorded at 2.9%. The figure slowed down by 19% compared to that of 2018 with 3.6% growth figure. Moreover, another report by IMF titled World Economic Outlook, October 2019: Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers stated that the global economy slowed down as an impact from the slowing international manufacture and obstacles in trading activities e.g. between USA and China.

The developing country groups have taken economic recovery measures from the heaviest pressure of 2019 economic slowdown as well as measures to improve the future economic growth rate in 2020. Severe macroeconomic difficulties are and continue to be experienced by countries such as Argentina, Iran, Turkey, Venezuela, and small countries under conflicts such as Libya and Yemen. The economic condition of other developing countries such as Brazil, Mexico, Russia, and Saudi Arabia is projected to grow by 1% or less in 2019, far below their historical average.

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL GLOBAL ECONOMIC GROWTH

dalam persen | in percent



VOLUME PERDAGANGAN GLOBAL GLOBAL TRADE VOLUME

URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2016	2017	2018
Pertumbuhan Volume Ekspor Export Volume Growth	%	1,3	4,1	2,5
Pertumbuhan Volume Impor Import Volume Growth	%	1,2	4,8	3,1
Curah Cair Liquid Bulk	%	4	3	2
Main Bulk Main Bulk	%	3	5	2
Kargo Kering Lainnya Other Dry Cargo	%	2	5	4

Sumber: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Source: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5%, yakni dengan tumbuh mencapai angka 5,02% di 2019. Namun, angka ini lebih rendah 0,15% bila dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh hingga 5,17%. BPS juga mencatat bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terlepas dari empat negara mitra dagang utama yang perekonomiannya melambat di sepanjang 2019, yaitu Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan AS. Hal tersebut menunjukkan perekonomian global masih lemah dan belum stabil akibat lemahnya perdagangan global dan investasi.

Ditinjau dari segi pengeluaran, perekonomian Indonesia tahun 2019 didominasi oleh komponen pengeluaran belanja Pemerintah Pusat sebesar 91,7% APBN atau Rp1.498,9 triliun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja bantuan sosial sebesar 34,2% dengan adanya kebijakan kenaikan indeks manfaat Program Keluarga Harapan untuk mendukung program Pemerintah dalam percepatan pengurangan kemiskinan.

Di tahun 2019, Bank Indonesia (BI) melakukan 4 kali revisi BI 7-Days Repo Rate (7DRRR) untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Berikut rincian revisi tersebut:

- Revisi 5,75% per 18 Juli 2019;
- Revisi 5,50% per 22 Agustus 2019;
- Revisi 5,25% per 19 September 2019; dan
- Revisi 5,00% per 24 Oktober 2019.

EKONOMI WILAYAH OPERASIONAL

Ditinjau dari wilayahnya, kegiatan operasional Pelindo III tersebar di 7 provinsi yang terletak di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data BPS tahun 2019, pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi yang merupakan wilayah kerja Pelindo III adalah sebagai berikut:

- Kalimantan Tengah: 6,16%
- Kalimantan Selatan: 4,08%
- Jawa Tengah: 5,41%
- Jawa Timur: 5,52%
- Bali: 5,63%
- Nusa Tenggara Barat: 4,01%
- Nusa Tenggara Timur: 5,20%

PROSPEK EKONOMI INDONESIA

Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Selain itu, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

NATIONAL ECONOMY REVIEW

Indonesia is still able to maintain its growth of around 5% by reaching 5.02% of growth in 2019. However, it is still 0.15% lower than that of the prior year which grew by 5.17%. BPS also recorded that the decline in Indonesia's economic growth cannot be separated from the four main trading partner countries which also experienced economic growth throughout 2019, namely Singapore, China, South Korea, and the USA. This has shown that the global economy still weak and unstable due to the weakening global trade and investment.

In terms of expenditure, the Indonesian economics in 2019 is dominated by the Central Government expenditure component at 91.7% of the APBN or Rp1,498.9 trillion. This is due to the increasing social assistance spending by 34.2% with the policy to increase the Family Hope Programme benefit index to support the Government's programme in accelerating poverty reduction.

In 2019 Bank Indonesia (BI) conducted four revisions to BI 7-Days Repo Rate (7DRRR) to strengthen the policy effectiveness in reaching the stipulated inflation target. The following is the revision details:

- 5.75% revision as of 18 July 2019;
- 5.50% revision as of 22 August 2019;
- 5.25% revision as of 19 September 2019; and
- 5.00% revision as of 24 October 2019.

ECONOMY OF REGIONAL OPERATIONS

Judging from the region, Pelindo III's operational activities are spread across 7 provinces located in the central and eastern parts of Indonesia which consist of Central Kalimantan, South Kalimantan, Central Java, East Java, Bali, West Nusa Tenggara (NTB), and East Nusa Tenggara (NTT). Based on the 2019 BPS data, the economic growth in each province of Pelindo III work area is as follows:

- Central Kalimantan: 6.16%
- South Kalimantan: 4.08%
- Central Java: 5.41%
- East Java: 5.52%
- Bali: 5.63%
- West Nusa Tenggara: 4.01%
- East Nusa Tenggara: 5.20%

INDONESIAN ECONOMIC PROSPECTS

Fiscal policy will be directed to support competitiveness acceleration through innovation and strengthening the quality of human resources. Various policies in education and health will be carried out to improve human resources quality to be ready to compete and adapt to industrial and technological development. Moreover, the Government will continue a more equal infrastructure construction, allocating economic sources to be more efficient and effective, as well as supporting an effective, serving, and corruption-free bureaucracy.

Pertumbuhan ekonomi 2020 ditargetkan mencapai angka 5,3% dengan defisit transaksi berjalan dianggarkan mencapai Rp307,2 triliun atau setara dengan 1,76% Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah Indonesia juga semakin gencar meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Untuk tahun 2020 sendiri penerimaan negara dari pajak ditargetkan mencapai Rp1.865,7 triliun atau tumbuh sebesar 13,5%. Total pendapatan negara pada tahun 2020 dianggarkan mencapai Rp2.233,2 triliun, sedangkan total belanja negara dianggarkan mencapai Rp2.540,4 triliun.

Perekonomian Indonesia diprediksikan membaik seiring dengan meningkatnya indikator pembangunan, di antaranya angka kemiskinan yang menurun, penciptaan kesempatan kerja yang berpengaruh terhadap angka pengangguran, serta ketimpangan yang menurun. Nilai inflasi juga berkisar 3% untuk 5 tahun terakhir.

TINJAUAN INDUSTRI PELABUHAN

Guna menyediakan informasi mengenai transportasi laut nasional, BPS telah menghimpun data mengenai aktivitas transportasi laut di 5 pelabuhan utama di Indonesia, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Makassar. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

TOTAL BARANG DALAM NEGERI YANG DIBONGKAR

Di tahun 2019, total barang dalam negeri yang dibongkar di 5 pelabuhan utama nasional mencapai 44.158.350 ton, meningkat 9.089.486 ton atau 26% bila dibandingkan pencapaian tahun 2018 yang tercatat 35.068.864 ton. Kenaikan jumlah barang yang dibongkar di tahun 2019 secara signifikan disebabkan terjadinya kenaikan jumlah barang dalam negeri yang dibongkar di Pelabuhan Belawan yang mencapai 306% dari tahun 2018.

TOTAL BARANG DALAM NEGERI YANG DIMUAT

Di tahun 2019, total barang dalam negeri yang dimuat di 5 pelabuhan utama nasional mencapai 33.968.369 ton, meningkat 2.258.981 ton atau 7% dibanding capaian tahun 2018 yang tercatat 31.709.388 ton. Kenaikan jumlah barang yang dibongkar di tahun 2019 secara signifikan disebabkan terjadinya kenaikan jumlah barang dalam negeri yang dimuat di Pelabuhan Belawan yang mencapai 203% dari tahun 2018.

TOTAL KEBERANGKATAN PENUMPANG DARI PELAYARAN DALAM NEGERI

Di tahun 2019, total keberangkatan penumpang dari pelayaran dalam negeri di 5 pelabuhan utama nasional mencapai 1.637.252 orang, meningkat 681.232 orang atau 71% dari tahun 2018 yang tercatat mencapai 956.020 orang. Peningkatan ini didukung naiknya capaian di Pelabuhan Balikpapan sebesar 173% dan Tanjung Priok sebesar 133% dari tahun 2018.

The 2020 economic growth is targeted to reach 5.3% with current account deficit budgeted at Rp307.2 trillion or on par with 1.76% of Gross Domestic Product (PDB). The Government of Indonesia is also more incessant to increasing state revenue from taxes. For 2020, state revenue from taxes is targeted to reach Rp1,865.7 trillion or grow by 13.5%. The total state revenue in 2020 is targeted to reach Rp2,233.2 trillion and the total state expenditure is budgeted to reach Rp2,540.4 trillion.

The Indonesian economy is predicted to improve along with the increasing development indicators, namely declining poverty rate, creation of employment opportunities with impacts to the unemployment rate, and declining inequality. The inflation rate also ranges at 3% for the last five years.

PORT INDUSTRY OVERVIEW

To provide information on national sea transportation, BPS has compiled data on sea transportation activities in five major ports in Indonesia consisting of the Ports of Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Balikpapan and Makassar. Based on these data, information can be obtained as follows:

TOTAL UNLOADED DOMESTIC GOODS

In 2019 the total unloaded domestic goods in five main national ports reach 44,158,350 tonnes, increased by 9,089,486 tonnes or 26% compared to that of 2018 achievement recorded at 35,068,864 tonnes. The increase in unloaded domestic goods in 2019 is significantly caused by the increase in total unloaded domestic goods in Port of Belawan which reached 306% from 2018.

TOTAL LOADED DOMESTIC GOODS

In 2019 the total loaded domestic goods in five main national ports reach 33,968,369 tonnes, increased by 2,258,981 tonnes or 7% compared to the 2018 achievement recorded at 31,709,388 tonnes. The increase in loaded domestic goods in 2019 is significantly caused by the increase in total loaded domestic goods in Port of Belawan which reached 203% from 2018.

TOTAL PASSENGER DEPARTURE FROM DOMESTIC SHIPPING

In 2019 the total passenger departure from domestic shipping in five main national ports reach 1,637,252 passengers, increased by 681,232 passengers or 71% from 2018 which reached 956,020 passengers. The increase is driven by the 173% achievement in Port of Balikpapan and 133% in Port of Tanjung Priok from 2018.

TOTAL KEDATANGAN PENUMPANG DARI PELAYARAN DALAM NEGERI

Di tahun 2019, total kedatangan penumpang dari pelayaran dalam negeri di 5 pelabuhan utama nasional mencapai 1.699.729 orang, naik 762.264 orang atau 81% dari tahun 2018 yang tercapai 937.465 orang. Kenaikan kedatangan penumpang dari pelayaran dalam negeri disebabkan kenaikan yang signifikan pada rata-rata di 5 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Makassar. Peningkatan terbesar terjadi pada Pelabuhan Belawan yang mencapai 264% dari tahun 2018.

Di sisi lain, Pemerintah juga berprioritas pada pengembangan kawasan strategis di berbagai wilayah di Indonesia yang memerlukan dukungan sarana infrastruktur di wilayah masing-masing untuk memperbaiki konektivitas dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia barat dan timur.

PROSPEK INDUSTRI KEPELABUHANAN

Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan produksi angkutan laut Indonesia mencapai 6,58%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan angkutan laut dunia yang hanya mencapai 2,91% pada periode 2007-2017. Hal ini terjadi karena data produksi angkutan laut dunia hanya mencatat ekspor-impor, sedangkan data produksi angkutan laut Indonesia menunjukkan produksi angkutan laut baik untuk ekspor-impor maupun domestik.

Walaupun kondisi perekonomian global dan nasional di masa mendatang diperkirakan akan berjalan melambat, industri kepelabuhanan nasional diproyeksikan akan mampu tumbuh dengan baik dan menjanjikan. Hal ini seiring dengan optimisme dan antusiasme Pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia barat dan timur.

TOTAL PASSENGER ARRIVAL FROM DOMESTIC SHIPPING

In 2019 the total passenger arrival from domestic shipping in five main national ports reach 1,699,729 passengers, increased by 762,264 passengers or 81% from 2018 which reached 937,465 passengers. The increase in passenger arrival from domestic shipping is driven by the significant average increase in five ports, namely Port of Belawan, Port of Tanjung Priok, Port of Tanjung Perak, Port of Balikpapan, and Port of Makassar. The most significant increase is in Port of Belawan which reached 264% from 2018.

On the other hand, the Government is prioritising on development of strategic areas in various Indonesian region in need of infrastructure facilities aid in each region to repair the connectivity and balancing the trade flow between the western and eastern part of Indonesia.

PORT INDUSTRY PROSPECTS

In the last ten years, the average growth in Indonesian sea transport production reaches 6.58%, higher than the average growth of world sea transport which only reaches 2.91% in the 2007-2017 period. This is because world sea transport production data only records export-import while Indonesian sea transport production shows the export-import and domestic sea transport production.

Even though the future global and national economic condition is expected to proceed slowly, the national port industry is projected to grow well and promising. This is along with the optimism and enthusiasm of the Government to reduce the national logistics fee, repair connectivity, and balance the trade flow between the western and eastern part of Indonesia.



TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

Sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan terpenting di Indonesia, Pelindo III memiliki peranan kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Perusahaan mampu memberikan stimulasi positif terhadap kegiatan ekonomi nasional dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan, dan lingkungan maritim. Status Pelindo III yang bukan lagi sebagai regulator melainkan operator secara otomatis mengubah bisnis Perusahaan dari *port operator* menjadi *terminal operator*.

Perusahaan melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Bidang usaha kepelabuhanan yang saat ini diselenggarakan oleh Pelindo III antara lain:

1. Bidang Usaha Pelayanan Kapal, yang meliputi:

- a. Pelayanan **Labuh**, yaitu pelayanan penyediaan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- b. Pelayanan **Pemanduan**, yaitu kegiatan pelayanan membantu Nakhoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar;
- c. Pelayanan **Penundaan**, yaitu kegiatan pelayanan menarik mendorong atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk tambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestel*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya menggunakan kapal tunda;
- d. Pelayanan **Penambatan**, yaitu kegiatan pelayanan kapal melakukan ikat tali di tambatan/dermaga untuk melakukan bongkar muat barang atau kegiatan lainnya.
- e. Pelayanan **Alur**, yaitu pelayanan penyediaan perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman bagi keluar masuknya kapal di pelabuhan; dan
- f. Pelayanan **Kepil**, yaitu pelayanan untuk menarik dan mengikat tali kapal ke *bolder* yang ada di tambatan/dermaga.

As a prominent port services provider in Indonesia, Pelindo III has a key role to ensure the continuity and sound operations of sea transportation. With the availability of adequate sea transportation infrastructure, the Company is able to mobilise and stimulate the economic activities of the state and society.

According to Law No. 17 of 2008 on Shipping, the Company is responsible for the safety of shipping, port operations, water transportation, and maritime environment. The status of the Company as an operator, after previously serving only as of the regulator, automatically changes the business nature of Pelindo III from port operator to terminal operator.

The Company conducts business in the field of port services operations and exploitation, as well as optimisation of the utilisation of resources owned by to produce high-quality goods and/or services with strong competitiveness to gain/pursue profits to increase the Company's value by applying the principles of Limited Liability Company.

Port business segments that Pelindo III are engaged in includes, among others:

1. Ship Service, which consists of:

- a. **Anchoring Services**, namely the service of providing port and water pools for traffic and the berths of ships;
- b. **Pilotage Services**, i.e. service activities to help the ship's captain to navigate safely, orderly and smoothly;
- c. **Tugboat Service**, which is a push-and-pull service activity or holding a motion-driven vessel for mooring to or to remove from the wharf, jetty, trestle, pier, buoy, dolphin, ship and other mooring facilities using tugboats;
- d. **Berthing Service**, i.e. ship service activities to tie the ropes at tethers/docks to perform loading and unloading of goods or other activities.
- e. **Navigation Services**, i.e. provision of waters that is safe and free in terms of depth, width, and free of obstruction, thus ensuring safety for vessels moving from and to ports; and
- f. **Mooring Services**, i.e. activities to pull or tie the vessel ropes to bolder tethered at the wharf.

2. Bidang usaha Pelayanan Peti Kemas, yang meliputi:

- a. Pelayanan **Operasi Kapal**, yaitu pelayanan pembongkaran atau pemuatan peti kemas dari atau ke kapal;
- b. Pelayanan **Operasi Lapangan**, yaitu pelayanan penumpukan sementara muatan setelah dibongkar atau akan dimuat dari atau ke kapal pada lapangan penumpukan terbuka;
- c. Pelayanan **CFS**, yaitu pelayanan penimbunan sementara muatan setelah dibongkar atau dimuat dari atau ke kapal pada ruangan tertutup;
- d. Pelayanan **Peti Kemas Transshipment**, yaitu pelayanan membongkar peti kemas dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut kedua; dan
- e. Pelayanan **Peti Kemas Lainnya**, yaitu pelayanan yang diberikan kepada para pengguna jasa berupa *behandle*, tempat pemeriksaan terpadu, fumigasi, batal muat, pindah kapal/alih kapal, *closing*, batal dokumen, *labelling*, dan *overbrenge*n.

3. Bidang usaha Pelayanan Nonpeti Kemas, yang meliputi:

- a. Pelayanan Nonpeti Kemas **General Cargo**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemasan *general cargo* termasuk *bag cargo* dan *unitised/pallet* berupa fasilitas dermaga, gudang dan lapangan penumpukan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
- b. Pelayanan Nonpeti Kemas **Curah Kering**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemasan curah kering berupa fasilitas dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan *silo* penyimpanan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
- c. Pelayanan Nonpeti Kemas **Curah Cair**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemasan curah cair berupa fasilitas dermaga, fasilitas penyimpanan (*Storage Tank*), serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
- d. Pelayanan Nonpeti Kemas **Gas**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas gas berupa fasilitas dermaga, fasilitas penyimpanan (*Pipa*), serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
- e. Pelayanan Nonpeti Kemas **Car Terminal**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk segmen car terminal berupa fasilitas dermaga, fasilitas lapangan penumpukan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal; dan
- f. Pelayanan Nonpeti Kemas **Hewan**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas hewan berupa fasilitas dermaga, fasilitas lapangan penumpukan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal.

4. Bidang usaha Penunjang, yang meliputi:

- a. **Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang**, yaitu pelayanan yang diberikan berupa area khusus di luar terminal yang dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk melakukan kegiatan pelayanan barang baik peti kemas maupun nonpeti kemas, yang meliputi kegiatan *receiving/delivery*, *stuffing/stripping*, unitasi/

2. Container Service, which includes:

- a. **Ship Operation Service**, i.e. loading or unloading service from or to the ship;
- b. **Field Operation Services**, i.e. temporary hoarding services after loading or loading from or to vessels in enclosed spaces;
- c. **CFS Service**, which is a temporary conglomeration service after loading or loading from or to the vessel in an open container yard;
- d. **Container Transshipment Service**, which is a service of unloading the container from the first carrier vessel, to be further arranged and stacked in the container yard and shipped it to the second carrier vessel;
- e. **Other Container Service**, which is services provided to users of services such as *behandle*, *integrated checkpoint*, *fumigation*, *void load*, *transshipment*, *closing*, *document cancellation*, *labelling*, and *overbrenge*n.

3. Non-Container Service, covering:

- a. **General Cargo Non-Container Service**, which provides general cargo non-container service, including bag cargo and unitised/pallet in the form of dock facilities, warehouses and container yard as well as loading and unloading services from and to the vessel;
- b. **Dry Bulk Non-Container Service**, which provides non-container services for dry bulk cargo in the form of dock facilities, warehouses, container yard and storage silos and loading and unloading services from and to vessels;
- c. **Liquid Bulk Non-Container Service**, which provides non-container services for liquid bulk cargo in the form of dock facilities, Storage Tank, as well as loading and unloading services from and to the vessel;
- d. **Gas Non-Container Service**, which provides non-container services for gas cargo in the form of dock facilities, storage facilities (*Pipes*) and loading and unloading services from and to vessels;
- e. **Car Terminal Non-Container Service**, which provides non-container services for car terminal segment in the form of dock facilities, container yard facilities, as well as loading and unloading services from and to vessels;
- f. **Animal Non-Container Service**, which provides non-container service for animals in the form of dock facilities, container yard, as well as loading and unloading services from and to the vessel.

4. Supporting Service, covering:

- a. **Consolidation and Distribution of Goods Service**, namely services delivered by providing designated area outside the Terminal that can be used by service users to perform their goods service, either container or non-container services, among others, *receiving/delivery*, *stuffing/stripping*, *unitisation/palletization*,

paletisasi, *packing*, *labeling*, sortasi, serta kegiatan penumpukan peti kemas maupun barang nonpeti kemas dan kegiatan fumigasi;

- b. **Pelayanan Pelra**, yaitu pelayanan yang diberikan bagi kapal-kapal pelayaran rakyat yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan berupa fasilitas penambatan, kepil, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan bongkar muat barang;
- c. **Pengusahaan alat**, yaitu kegiatan pelayanan perusahaan alat-alat penunjang kegiatan kepelabuhan baik berupa alat angkat, alat angkut, alat bantu bongkar muat serta alat apung;
- d. **Pengusahaan Properti**, terdapat 24.061.005 m² tanah yang tersebar di seluruh wilayah operasi Perusahaan. Lahan HPL tersebut diusahakan dengan diklasifikasikan sebagai usaha jasa kepelabuhan, usaha industri, usaha konsolidasi dan distribusi, usaha pariwisata, industri perkapalan, usaha perkantoran dan pusat bisnis, dan nonusaha (misal instansi pemerintahan, rumah tangga, dan tempat ibadah). Selain pengelolaan lahan, Perusahaan juga melakukan pengusahaan bangunan, yang pengelolaannya dilakukan di masing-masing Cabang Pelabuhan. Sebagai langkah untuk mengoptimalkan lahan milik Perusahaan, maka dibentuk anak perusahaan PT Pelindo Properti Indonesia (PT PPI) yang bergerak dalam usaha marina pelabuhan;
- e. **Pengusahaan Air dan Listrik**, dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dan penduduk di lingkungan pelabuhan, Pelindo III bekerja sama dengan PDAM menyediakan air bersih bagi kapal-kapal laut yang sedang berlabuh dan bertambat di perairan pelabuhan, serta berkerja sama dengan PLN menyediakan suplai listrik untuk perkantoran dan rumah tangga di lingkungan sekitar pelabuhan;
- f. **Pelayanan Terminal Penumpang dan Usaha Lainnya**, yaitu pelayanan yang diberikan kepada penumpang angkutan laut untuk debarkasi/embarkasi termasuk pelayanan pas terminal penumpang serta pelayanan pas masuk pelabuhan;
- g. **Pelayanan Forwarding**, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga terkait penyediaan fasilitas untuk kegiatan pengangkutan barang dari lapangan penumpukan ke depo Kereta Api ataupun ke area penumpukan lainnya (transit);
- h. **Pelayanan TUKS**, yaitu pelayanan kapal dan barang yang diberikan oleh Pelindo III di area TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) meliputi pelayanan pemanduan dan penundaan serta kerjasama pelayanan bongkar muat barang dari dan ke kapal; dan
- i. **Marine Services**, dalam upaya meningkatkan kelancaran kinerja pemanduan dan penundaan, Perusahaan membentuk anak perusahaan PT Pelindo Marine Service (PMS). Selain bergerak dalam usaha penyediaan SBPP (Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan) untuk mendukung kelancaran pelayanan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan, PMS juga bergerak dalam usaha pelayanan wisata bahari, perbaikan kapal, penyewaan kapal, dan penyediaan tenaga Anak Buah Kapal.

packing, *labelling*, *sorting*, as well as the container or non-container stacking, and fumigation activities;

- b. **Pelra (People's Shipping) Service**, namely services provided for people's sailing vessels who will perform activities at the Port, by providing berthing facilities, mooring, docks, warehouses, container yard, as well as loading and unloading facility;
- c. **Equipment Rentals**, namely providing equipment to support port operations, such as lifting equipment, transport equipment, loading and unloading (B/M) support equipment, and floating equipment.
- d. **Property Business**, there are 24,061,005 m² of land spread throughout the Company operational area. The HPL land is utilised as a business with the following classification; namely as a port services business, industrial business, consolidation and distribution business, tourism business, shipping industry, office and business centre, and non-business (e.g. government agencies, households, and places of worship). In addition to land management, the Company also carries out building concession, which is managed in each Port Branch. To optimise land assets, the Company formed a subsidiary called PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) engaging in marine port business;
- e. **Clean Water and Electricity Business**, in facilitating service users and residents around the harbour environment, in cooperation with PDAM, Pelindo III provides clean water for vessels that are docked and tethered in port basins, and in cooperation with PLN, to provide electricity supply for offices and households in the vicinity of the harbour;
- f. **Passenger Terminal and Other Business Services**, namely service provided to seafaring passengers for disembarkation/embarkation, including passenger terminal pass service and port entry pass service;
- g. **Forwarding Service**, namely cooperation with third parties related to the provision of facilities for goods transport from container yard to the Train depot or to other container yards (transit);
- h. **TUKS (Special Terminal) Service**, a ship and goods services provided by the Company in TUKS (Terminal for Own Interest) areas, which include pilotage and tugboat service as well as the cooperation of loading and unloading of cargo services to and from the vessel; and
- i. **Marine Services**. In an effort to improve the Pilotage and Tugs performance, the Company forms a Subsidiary called PT Pelindo Marine Service (PMS) which, in addition to operating in SBPP (Pilotage Service Support Facility) provision business to support the operations of pilotage and tug services, PMS also engages in marine tourism services, ship repair, boat rental, and labour supply of Ship Crew.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

SEGMENT USAHA PELAYANAN KAPAL

Segment usaha pelayanan kapal terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Labuh,
2. Pelayanan Pemanduan,
3. Pelayanan Penundaan,
4. Pelayanan Penambatan,
5. Pelayanan Alur, dan
6. Pelayanan Kepil.

Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi dan pendapatan segment usaha Pelayanan Kapal pada tahun 2018.

PRODUKSI PELAYANAN KAPAL TAHUN 2019

a. Pelayanan Pemanduan

Pada tahun 2019, produksi pelayanan pemanduan terealisasi sebesar 638.978.418 GT.Kpl.GrK. Produksi ini meningkat sebanyak 120.983.105 GT.Kpl.GrK atau 23% bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 517.995.313 GT.Kpl.GrK. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan kunjungan kapal terutama dengan ukuran GT kapal yang lebih besar di beberapa pelabuhan cabang di antaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas, dan Mekarputih, serta adanya pelimpahan pemanduan kepada Pelindo III untuk melaksanakan pemanduan di perairan Sungai Danau Satui dan Bunati yang pada tahun sebelumnya tidak direncanakan.

b. Pelayanan Penundaan

Pelayanan Penundaan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 699.132.023 GT.Kpl.Jam. Produksi ini meningkat sebanyak 21.466.970 GT.Kpl.Jam atau 3% dari tahun sebelumnya sebesar 677.665.053 GT.Kpl.Jam. Peningkatan ini terjadi seiring dengan peningkatan produksi pemanduan dengan kenaikan kunjungan kapal dengan ukuran GT yang lebih besar.

c. Pelayanan Penambatan

Pada tahun 2019 produksi pelayanan penambatan terealisasi sebesar 329.208.083 GT.Etm. Produksi ini meningkat sebesar 4% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 315.978.423 GT.Etm. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan arus kunjungan kapal dengan ukuran GT yang lebih besar serta dengan muatan yang lebih banyak.

d. Pelayanan Alur

Di tahun 2019, produksi Pelayanan Alur hanya terealisasi sebesar 24.932.281 ton, sedangkan pada tahun 2018 nilai tersebut terealisasi 24.272.827 ton. Tercapainya realisasi produksi Pelayanan Alur di tahun 2019 didukung oleh adanya peningkatan kegiatan kapal-kapal luar negeri yang melewati Alur Pelayaran Barat Surabaya, khususnya jenis kapal Peti Kemas, Curah Cair, dan Curah Kering dengan muatan yang cukup besar dimana tarif alur untuk kapal luar negeri lebih tinggi 233% dibandingkan tarif untuk kapal domestik.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

SHIP SERVICE BUSINESS SEGMENT

Ship Service business segment is divided into several business lines, among others:

1. Anchorage Service,
2. Pilotage Service,
3. Tugboat Service,
4. Berthing Service,
5. Navigation Service, and
6. Mooring Service.

The following is an explanation on the level of production and revenue of Ship Service segment in 2019.

SHIP SERVICE PRODUCTION IN 2019

a. Pilotage Services

In 2019, the production of pilotage service amounted to 638,978,418 GT.Ship.Movement. This production increased by 120,983,105 GT.Ship.Movement or 23% when compared to that of 2018 amounting to 517,995,313 GT.Ship.Movement. This increase was due to an increase in ship visits, especially with larger ship GT sizes in several branch ports including Port of Tanjung Perak, Banjarmasin, Tanjung Emas, and Mekarputih, as well as a pilotage delegation to Pelindo III to carry out pilotage in the waters of the Danau Satui River and Bunati which was not planned in the prior year.

b. Tugboat Services

Tugboat services in 2019 are realised at 699,132,023 GT.Ship.Hour. This production increased by 21,466,970 GT.Ship.Hour or 3% from the prior-year amounting to 677,665,053 GT.Ship.Hour. This increase occurred in line with the increase in pilotage production with an increase in ship visits with larger GT sizes.

c. Berthing Service

In 2019 the production of berthing services was realised at 329,208,083 GT.Ship.Movement. This production increased by 4% from the prior year at 315,978,423 GT.Ship.Movement. This is also in line with the increasing flow of ship visits with larger GT sizes and with more cargo.

d. Navigation Service

In 2019, the production of Navigation Service was successfully realised at 24,932,281 tonnes, while in 2018 the value was recorded at 24,272,827 tonnes. The achievement of Navigation Service production in 2019 is supported by an increase in the activities of international vessels passing through the Surabaya West Shipping Channel, especially the Container, Liquid Bulk and Dry Bulk vessels with a large load where the flow rates for foreign vessels are 233% higher than the tariff for domestic vessels.

e. Pelayanan Kepil

Produksi Pelayanan Kepil pada tahun 2019 terealisasi sebesar 26.168 Grk. Hasil ini relatif sama dengan tahun lalu yang mencapai 26.006 Grk.

e. Mooring service

Mooring service in 2019 had a production realised at 26,168 Movement. This result was relatively the same as the prior-year at 26,006 Movement.

PRODUKSI PELAYANAN KAPAL 2019

SHIP SERVICE PRODUCTION IN 2019

URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
				NOMINAL	%
Pelayanan Labuh Anchorage Service	GT Masa GT Mass	-	-	-	-
Pelayanan Pemanduan Pilotage Service	Kpl. Grk Ship.Movement	116.251	87.550	28.701	32
	GT. Kpl. Grk GT.Ship.Movement	638.978.418	517.995.313	120.983.105	23
Pelayanan Penundaan Tugboat Service	Kpl. Jam Ship.Hour	87.718	83.859	3.859	4
	GT.Kpl.Jam GT.Ship.Hour	699.132.023	677.665.053	21.466.970	3
Pelayanan Penambatan Berthing Service	GT. Etm GT.Etm	329.208.083	315.978.423	13.229.660	4
	GT	-	-	-	0
Pelayanan Alur Navigation Service	ton tonnes	24.932.281	24.272.827	659.454	2
	M ³	-	-	-	0
	Box	2.160.953	2.125.712	35.241	1
Pelayanan Kepil Mooring Service	Grk Movement	26.168	26.006	162	0,6
	GT	17.155.062	15.844.599	1.310.463	8

PENDAPATAN PELAYANAN KAPAL TAHUN 2019

Secara keseluruhan, segmen usaha Pelayanan Kapal Perusahaan di tahun 2019 mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,1 triliun, turun Rp 391 miliar atau terealisasi 74% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2018 sebesar 1,49 triliun. Faktor utama penurunan pendapatan segmen usaha Pelayanan Kapal di 2019 adalah tidak tercapainya produksi penundaan dan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar Dolar AS. Di samping itu, faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian juga dikarenakan menurunnya pendapatan kegiatan penambatan yang disebabkan oleh tidak tercapainya kunjungan arus kapal.

SHIP SERVICE REVENUE IN 2019

Overall, the Company's Ship Service business segment in 2019 recorded revenue of Rp1.1 trillion, down by Rp391 billion or realised by 74% compared to that of 2018 at Rp1.49 billion. The main factors for the revenue decline in Ship Service are the realisation of tugboat production that didn't reach the target and the strengthening of Rupiah exchange rate against that of the US Dollar. Moreover, another factor for the decline is the decline in berthing service revenue due to the achievement of the ship visit below the set target.

PENDAPATAN PELAYANAN KAPAL 2018 SHIP SERVICE REVENUE IN 2019

dalam ribu Rupiah | in thousand Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pelayanan Labuh Anchorage Services	-	-	-	-
Pelayanan Pemanduan Pilotage Service	181.254.450	350.874.960	-169.220.510	-48
Pelayanan Penundaan Tugboat Service	418.484.370	528.636.079	-110.151.709	-20
Pelayanan Penambatan Berthing Service	221.575.544	341.461.672	-119.886.128	-35
Pelayanan Alur Navigation Service	276.275.928	268.927.135	7.348.793	3
Pelayanan Kepil Mooring Service	4.858.130	4.494.999	363.131	8
Jumlah Pendapatan Total Revenues	1.102.448.422	1.494.394.845	-391.946.423	-26

a. Pelayanan Pemanduan

Pendapatan Pelayanan Pemanduan tahun 2019 tercatat sebesar Rp181 miliar, turun Rp169 miliar atau 52% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp350 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan nilai kurs/nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar AS.

a. Pilotage Service

The revenue of Pilotage Service in 2019 was recorded at Rp181 billion, a Rp169 billion decline or 52% compared to that of 2018 at Rp350 billion. This was caused by the decline of Rupiah exchange rate against USD Dollar.

b. Pelayanan Penundaan

Pendapatan Pelayanan Penundaan tahun 2019 tercatat sebesar Rp418 miliar, turun Rp111 miliar atau 79% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp528 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya diskon tarif untuk kapal-kapal *cruise* yang ada di Pelabuhan Benoa yang diberikan berdasarkan GT kapal, di samping adanya penganggaran untuk kenaikan tarif kapal di salah satu regional Pelindo III namun belum dapat teralisasi di tahun 2019.

b. Tugboat Service

The revenue of Tugboat Service in 2019 was recorded at Rp418 billion, a Rp111 billion decline or 79% compared to that of 2018 at Rp528 billion. This was caused by tariff discount for cruise ships in Port of Benoa based on the ship's GT, aside from the budgeting for ship tariff increase in one of the regions of Pelindo III that was not realised yet in 2019.

c. Pelayanan Penambatan

Pendapatan Pelayanan Penambatan tahun 2019 tercatat sebesar Rp221 miliar, turun Rp119 miliar atau 65% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar Rp341 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktercapaian produksi penambatan di beberapa Pelabuhan/Terminal akibat dari ketidaktercapaian kunjungan arus kapal.

c. Berthing Service

The revenue of Berthing Service in 2019 was recorded at Rp221 billion, a Rp119 billion decline or 65% compared to the 2018 achievement at Rp341 billion. This is due to the realisation of berthing production in several Ports/Terminals that did not reach the set target due to ship visit that also did not reach the target.

d. Pelayanan Alur

Pendapatan Pelayanan Alur tahun 2019 tercatat sebesar Rp276 miliar, naik Rp7 miliar atau 103% dibanding 2018 yang terealisasi sebesar Rp269 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan kapal-kapal luar negeri yang melewati Alur Pelayanan Barat

d. Navigation Service

The revenue of Navigation Service in 2019 was recorded at Rp276 billion, increased by Rp7 billion or 103% compared to that of 2018 at Rp269 billion. This is caused by an increase in the activities of foreign ships passing through the Surabaya West Shipping Channel, especially

Surabaya khususnya jenis kapal Peti Kemas, Curah Cair, dan Curah Kering dengan muatan yang cukup besar dimana tarif alur untuk kapal luar negeri lebih tinggi 233% dibandingkan tarif untuk kapal domestik.

e. Pelayanan Kepil

Pendapatan Pelayanan Kepil tahun 2019 tercatat sebesar Rp4,9 miliar, naik Rp363 juta atau 108% dibandingkan realisasi 2018 sebesar Rp4,5 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan arus kunjungan kapal secara keseluruhan selama tahun 2019.

SEGMENT USAHA PELAYANAN PETI KEMAS

Segmen usaha Pelayanan Peti Kemas terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Operasi Kapal,
2. Pelayanan Operasi Lapangan,
3. Pelayanan CFS,
4. Pelayanan Peti Kemas *Transshipment*, dan
5. Pelayanan Peti Kemas Lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan membagi segmen usaha Pelayanan Peti Kemas menjadi 2 bagian, yaitu Pelayanan Peti Kemas Internasional dan Pelayanan Peti Kemas Domestik. Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi dan pendapatan Pelayanan Peti Kemas tersebut pada tahun 2019.

Produksi Pelayanan Peti Kemas Tahun 2019

a. Pelayanan Peti Kemas Internasional

- Produksi dermaga peti kemas internasional tahun 2019 tercatat sebesar 1.534.356 box, meningkat sebesar 911.163 box atau 246% dari tahun 2018 yang tercatat 623.193 box. Peningkatan produksi dermaga ini dipengaruhi adanya penambahan kunjungan kapal di luar *window schedule* seperti dari Evergreen, SITC, dan KMTC, CMA, serta COSCO di PT Terminal Teluk Lamong (TTL) serta penambahan 2 pelanggan baru yakni Emirate Shipping Line dan Mariana Express Line di PT Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS).
- Produksi penumpukan peti kemas internasional pada tahun 2019 terealisasi sebesar 12.632.922 Box.Hari, sedangkan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 23.186.938 Box.Hari. Penurunan produksi penumpukan peti kemas sebesar 10.554.016 Box. Hari atau 46% dikarenakan adanya penerapan aturan perihal *dwelling time* penumpukan peti kemas internasional dimana penerapan target untuk angka *dwelling time* tahun 2019 adalah 3 hari. Semakin pendek waktu penumpukan peti kemas internasional di TPS, TTL, dan PT Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) maka semakin baik pula pencapaian angka *dwelling time* di masing masing Pelabuhan tersebut.
- Produksi bongkar muat untuk pelayanan peti kemas internasional tahun 2019 terealisasi sebesar 1.518.976 box, menurun sebesar 2% dibandingkan tahun 2018 yang terealisasi sebesar 1.553.472 box. Hal ini disebabkan penurunan arus peti kemas internasional di TPS, tidak teralisasinya *window* baru dengan CMA di TTL, kapal *omit* di TPKS, serta penurunan *ship call* dan jumlah muatan di TPKS.

the Container, Bulk and Dry Bulk vessels with a large load, where the flow rates for foreign vessels are 233% higher than that of domestic vessels'.

e. Mooring services

The revenue of Mooring Service in 2019 was recorded at Rp4.9 billion, increased by Rp363 million or 108% compared to that of 2018 at Rp4.5 billion. This is due to the increase in the overall ship visit in 2019.

CONTAINER SERVICE BUSINESS SEGMENT

Container Service business segment is divided into several business lines, including:

1. *Ship Operations Service,*
2. *Field Operations Service,*
3. *CFS Service,*
4. *Transshipment Container Service, and*
5. *Other Container Service.*

In conducting its operational activities, the Company divides the Container Business segment into two parts, namely International Container Service and Domestic Container Service. The following is an explanation of the production and revenue of the Container Service segment in 2019.

Production of Container Service in 2018

a. International Container Service

- *Production of international container wharf in 2019 was recorded at 1,534,356 boxes, an increase of 911,163 boxes or 246% from 2018 which was recorded at 623,193 boxes. This increase in wharf production was triggered by additional ship visits outside the scheduled window such as from Evergreen, SITC, and KMTC, CMA, and COSCO at PT Terminal Teluk Lamong (TTL) and the addition of 2 new customers, namely Emirate Shipping Line and Mariana Express Line in PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS).*
- *Production of international container yard in 2019 is realised at 12,632,922 Box.Day, while in 2018 it was realised at 23,186,938 Boxes.Day. The decrease in container yard production amounted to 10,554,016 Box.Day or 46% is due to the application of dwelling time rule for the international container where the set target for dwelling time in 2019 is three days. The shorter dwelling time of international container in TPS, TTL, and PT Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) means a better dwelling time achievement in the respective Port.*
- *Loading and unloading production for international container services in 2019 was realised at 1,518,976 boxes, a 2% decrease compared to that of 2018 at 1,553,472 boxes. This is due to the decline in international container flow in TPS, the new window with CMA in TTL that was not realised, omit ship in TPKS, as well as a decline in ship call and total load in TPKS.*

- Untuk realisasi kinerja bongkar muat peti kemas internasional, angka tertinggi diperoleh dari TPS dengan rata-rata 55,77 Box/Ship/Hour serta 27,88 Box/Crane/Hour pada tahun 2019.
- *In the realisation of international container loading and unloading performance, the highest figure is obtained from TPS with an average of 55.77 Box/Ship/Hour and 27.88 Box/Crane/Hour in 2019.*

PRODUKSI PELAYANAN PETI KEMAS INTERNASIONAL 2019 INTERNATIONAL CONTAINER SERVICE PRODUCTION IN 2019

URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
				NOMINAL	%
Dermaga Wharf	box	1.534.356	623.193	911.163	146
Penumpukan Peti Kemas Container Yard	Box.Hari Box.Day	12.632.922	23.186.938	-10.554.016	-45
Bongkar Muat Loading and Unloading	box	1.518.976	1.553.472	-34.496	-2

b. Pelayanan Peti Kemas Domestik

- Produksi dermaga peti kemas domestik tahun 2019 tercatat sebesar 2.836.337 box, meningkat sebesar 88.745 box atau 3% dari tahun 2018 yang tercatat 2.747.592 box. Penurunan produksi ini dikarenakan terjadi penurunan arus peti kemas domestik di beberapa pelabuhan/terminal, seperti penurunan kegiatan PT Mentari Sejati Perkasa di Terminal Jamrud, pengalihan pengangkutan dari laut ke darat yang terjadi di Terminal Benoa, mundurnya musim tanam jagung di daerah Bima, dan juga adanya perbaikan CC di Terminal Nilam.
- Produksi penumpukan peti kemas domestik pada tahun 2019 terealisasi sebesar 4.125.450 Box.Hari, menurun 182.773 Box.Hari atau 4% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 4.308.223 Box.Hari. Penurunan produksi penumpukan disebabkan adanya ketidaktercapaian pada beberapa pelabuhan/terminal, antara lain belum terealisasinya wajib *stack* 100% di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), penurunan *dwelling time* peti kemas domestik di TTL, masih banyaknya pelaksanaan kegiatan secara *truck lossing* di Terminal Jamrud, dan berkurangnya peti kemas untuk komoditi pupuk di regional Kalimantan.
- Produksi bongkar muat untuk pelayanan peti kemas domestik tahun 2019 terealisasi sebesar 2.714.628 box, meningkat sebesar 102% dibandingkan tahun 2018 yang terealisasi sebesar 2.669.020 box. Terdapat peningkatan arus kapal peti kemas domestik di tahun 2019.
- Kapasitas dermaga peti kemas secara total di lingkungan Pelindo III pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 10.346.473 TEUs, sedangkan kapasitas lapangan penumpukan pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 4.214.618 TEUs.

b. Domestic Container Service

- *The production of domestic container jetty in 2019 was recorded at 2,836,337 boxes, a 3% increase or 88,745 boxes from that of 2018 at 2,747,592 boxes. The decline in production is due to the decline in domestic container flow in several ports/terminals, such as the activity decline of PT Mentari Sejati Perkasa in Jamrud Terminal, transportation diversion from sea to land in Benoa Terminal, the delay in corn cultivation season in Bima, as well as CC repair in Nilam Terminal.*
- *The production of domestic container yard in 2019 is realised at 4,125,450 Box.Day, a 4% decrease or 182,773 Box.Day or compared to that of 2018 at 4,308,223 Box.Day. This decline is due to the unsuccessful achievement of production in several ports/terminals, namely the requirement of 100% stack in PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) that was not realised, the decline of domestic container dwelling time in TTL, considerable amount of truck lossing in Jamrud Terminal, and the container decline for fertiliser commodity in Kalimantan region.*
- *The domestic container loading-unloading service production in 2019 was realised at 2,714,628 boxes, a 102% increase compared to that of 2018 at 2,669,020 boxes. There is an increase in domestic container ship flow in 2019.*
- *The total container wharf capacity in Pelindo III at the end of 2019 is 10,346,473 TEUs, while the container yard capacity at the end of 2018 is 4,214,618 TEUs.*

PRODUKSI PELAYANAN PETI KEMAS DOMESTIK 2019

DOMESTIC CONTAINER SERVICE PRODUCTION IN 2019

URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
				NOMINAL	%
Dermaga Wharf	box	2.836.337	2.747.592	88.745	3
Penumpukan Peti Kemas Container Yard	Box.Hari Box.Day	4.125.450	4.308.223	(182.773)	-4
Bongkar Muat Loading and Unloading	box	2.714.628	2.669.020	45.608	2

Pendapatan Pelayanan Peti Kemas Tahun 2019

Secara keseluruhan, segmen usaha Pelayanan Peti Kemas Pelindo III di tahun 2019 mencatatkan pendapatan sebesar Rp5,729 triliun, turun Rp237 miliar bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2018 sebesar Rp5,966 triliun. Penurunan ini disebabkan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS serta adanya penurunan peti kemas internasional.

Revenue of Container Service in 2019

Overall, the Container Service business segment of Pelindo III recorded revenue of Rp5.729 trillion in 2019, down by Rp237 billion compared to that of 2018 at Rp5.966 trillion. The decrease is due to the strengthening of Rupiah exchange rate against that of the US Dollar and the decline in the international container.

PENDAPATAN PELAYANAN PETI KEMAS 2019

CONTAINER SERVICE REVENUE IN 2019

dalam ribu Rupiah | in thousand Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pelayanan Peti Kemas Internasional International Container Service	3.705.734.096	4.067.366.542	(361.632.446)	91
Pelayanan Peti Kemas Domestik Domestic Container Service	2.023.049.762	1.960.349.576	62.700.186	103
Jumlah Total	5.728.783.858	6.027.716.118	(298.932.260)	95

SEGMENT USAHA PELAYANAN NONPETI KEMAS

Segmen usaha Pelayanan Nonpeti Kemas terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan *General Cargo*,
2. Pelayanan Curah Kering,
3. Pelayanan Curah Cair,
4. Pelayanan Gas,
5. Pelayanan *Car Terminal*, dan
6. Pelayanan Hewan.

Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi, pendapatan, dan laba dari segmen Pelayanan Nonpeti Kemas tersebut pada tahun 2019.

Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Tahun 2019

a. Pelayanan Nonpeti Kemas *General Cargo*

- Produksi dermaga *general cargo* tahun 2019 untuk satuan ton sebesar 8.086.463 ton, turun sebesar 4% dari tahun 2018 sebesar 8.450.865 ton, sedangkan

NON-CONTAINER SERVICE BUSINESS SEGMENT

Non-Container Service business segment is divided into several business lines, including:

1. *General Cargo Service*,
2. *Dry Bulk Services*,
3. *Liquid Bulk Service*,
4. *Gas Service*,
5. *Car Terminal Service*, and
6. *Animal Service*.

The following is an explanation of the production, revenue, and profit of *Non-Container Service* segment in 2019.

Production of Non-Container Service in 2019

a. *Non-Cargo Container Service General Cargo*

- Production of *general cargo wharf* in 2019 in tonnes is 8,086,463 tonnes, a 4% decrease from that of 2018 at 8,450,865 tonnes, while in M3 is realised at 2,710,830

untuk satuan M3 terealisasi sebesar 2.710.830 M3, menurun sebesar 4% dari tahun 2018 sebesar 2.832.470 M3. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan arus kapal GC serta perpindahan kemasan dari GC ke peti kemas yang dinilai lebih cepat dan efisien.

- Produksi gudang penumpukan *general cargo* tahun 2019 untuk satuan Ton.Hari tercatat sebesar 253.975 Ton.Hari, menurun sebesar 33% dari tahun 2018 sebesar 330.570 Ton.Hari. Sementara itu, untuk satuan M3.Hari terealisasi sebesar 202.138 M3.Hari, menurun sebesar 14% dari tahun 2018 sebesar 233.825 M3.Hari. Penurunan produksi gudang untuk satuan Ton.Hari disebabkan adanya beberapa gudang penumpukan yang diusahakan dengan skema *lump sum* bukan menggunakan masa penumpukan harian, penurunan produksi dermaga GC, serta meningkatnya kegiatan yang dilakukan secara *truck lossing*.
- Produksi lapangan penumpukan *general cargo* tahun 2019 untuk satuan Ton.Hari tercatat sebesar 3.497.286 Ton.Hari, menurun dari tahun 2018 sebesar 4.916.823 Ton.Hari, sedangkan untuk satuan M3.Hari terealisasi sebesar 3.119.231 M3.Hari, meningkat sebesar 124% dari tahun 2018 sebesar 2.525.438 M3.Hari. Kecenderungan penurunan produksi lapangan penumpukan dalam satuan Ton.Hari maupun satuan M3.Hari dikarenakan adanya kegiatan BM yang dilakukan secara *truck lossing* dan juga adanya penurunan produksi dermaga.
- Produksi bongkar muat *general cargo* tahun 2019 untuk satuan ton sebesar 1.474.239 ton, menurun sebesar 13% dari tahun 2018 sebesar 1.698.871 ton, sedangkan untuk satuan M3 terealisasi sebesar 1.171.940 M3, menurun sebesar 16% dari tahun 2018 sebesar 1.393.150 M3. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan produksi dermaga untuk kegiatan bongkar muat GC yang disebabkan karena beralihnya kegiatan bongkar muat dari kemasan *General Cargo* ke containerisasi.

M3, a 4% decrease from that of 2018 at 2,832,470 M3. The decrease is due to the decline in GC ship flow as well as packaging transfer to a container that is considered to be faster and more efficient.

- *Production of general cargo stacking warehouse in 2019 in Tonnes.Day was recorded at 253,975 Tonnes.Day, a 33% decrease from that of 2018 at 330,570 Tonnes.Day. Meanwhile, in M3.Day it is realised at 202,138 M3.Day, a 14% decrease from that of 2018 at 233,825 M3.Day. A decrease in warehouse production in Tonnes.Day is due to several stacking warehouses that are managed with lump-sum schemes rather than using a daily buildup period, a decrease in GC wharf production, and the decline in truck lossing activity.*
- *Production of general cargo open storage in 2019 in Tonnes.Day is recorded at 3,497,286 Tonnes.Day, a decline from that of 2018 at 4,916,823 Tonnes.Day, while in M3.Day was realised at 3,119,231 M3.Day, a 124% increase from that of 2018 at 2,525,438 M3.Day. The declining trend in open storage production in both Tonnes.Day and M3.Day is due to loading-unloading activity done by truck lossing as well as the decline in wharf production.*
- *Production of general cargo loading-unloading in 2019 in tonnes is recorded at 1,474,239 tonnes, a 13% decrease from that of 2018 at 1,698,871 tonnes, while in M3 it was realised at 1,171,940 M3, a 16% decrease from that of 2018 at 1,393,150 M3. The decrease was due to the decline in wharf production for GC loading-unloading activity due to the shift in loading-unloading activity from General Cargo packaging to containerisation.*

PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS GENERAL CARGO 2019

PRODUCTION OF GENERAL CARGO NON-CONTAINER SERVICE IN 2019

NO.	URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
					NOMINAL	%
1.	Dermaga Wharf	ton tonnes	8.086.463	8.450.865	(364.402)	-4
		M3 M3	2.710.830	2.832.470	(121.640)	-4
2.	Gudang Penumpukan Stacking Warehouse	Ton.Hari Tonnes.Day	253.975	330.570	(76.596)	-23
		M3.Hari M3.Day	202.138	233.825	(31.688)	-13
3.	Lapangan Penumpukan Open Storage	Ton.Hari Tonnes.Day	3.497.286	4.916.823	(1.419.537)	-29
		M3.Hari M3.Day	3.119.231	2.525.438	593.793	24
4.	Bongkar Muat Loading and Unloading	ton tonnes	1.474.239	1.698.871	(224.632)	-13
		M3 M3	1.171.940	1.393.150	(221.210)	-16

b. Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering

- Produksi dermaga Curah Kering tahun 2019 terealisasi sebesar 19.006.016 ton, menurun 4% dari tahun lalu yang tercatat 19.837.450 ton. Produksi dermaga Curah kering mengalami penurunan karena disebabkan beberapa hal antara lain berkurangnya kegiatan bongkar pasir coral di Terminal Nilam, beralihnya beberapa kegiatan batu bara di Pelabuhan Gresik dikarenakan akses perbaikan jalan, berakhirnya kegiatan bongkar pasir yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas, belum terealisasinya kegiatan bongkar pasir di Pelabuhan Benoa untuk project Bandara Ngurah Rai, dan juga penurunan kegiatan bongkar muat curah kering lainnya di Pelabuhan Celukan Bawang dan Tanjung Wangi.
- Produksi lapangan penumpukan Curah Kering tahun 2019 terealisasi sebesar 283.885 Ton.Hari, menurun 10.400 Ton.Hari atau 96% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 294.285 Ton.Hari. Penurunan produksi penumpukan curah kering dipengaruhi oleh menurunnya produksi Dermaga untuk kegiatan curah kering, baik yang kegiatan curah keringnya beralih ke pelabuhan lain maupun belum terealisasinya kegiatan curah kering yang sudah dianggarkan.
- Produksi bongkar muat curah kering tahun 2019 tercatat sebesar 19.690.622 ton, dibandingkan tahun sebelumnya 2018 tercatat sebesar 15.124.196 ton meningkat 130%. Peningkatan ini dikarenakan adanya kenaikan kegiatan bongkar muat batu bara di Pelabuhan IBT yang tidak memiliki Dermaga sendiri.

b. Dry Bulk Non-Container Service

- Production of Dry Bulk wharf in 2019 was realised at 19,006,016 tonnes, a 4% decrease from that of the prior year at 19,837,450 tonnes. The production of Dry Bulk wharf declined due to a number of factors, namely the decline of coral sand unloading activity in Nilam Terminal, the transfer of coal activity in Port of Gresik due to road access repair, the ending of sand unloading activity in Port of Tanjung Emas, the sand unloading activity in Port of Benoa for the Ngurah Rai Airport that was not realised, as well as the decline in other dry bulk loading-unloading activities in Port of Celukan Bawang and Tanjung Wangi.
- Production of Dry Bulk open storage in 2019 was realised at 283,885 Tonnes.Day, down by 10,400 Tonnes.Day or 96% from that of the prior year at 294,285 Tonnes.Day. The decrease in dry bulk open storage production is due to the decline in Wharf production for dry bulk, both for the dry bulk activity that was transferred to another port or the achievement of dry bulk activity that didn't reach the set target.
- Production of dry bulk loading-unloading in 2019 was recorded at 19,690,622 tonnes, compared to that of the prior year at 15,124,196 tonnes, an increase of 130%. The increase is due to the increasing coal loading-unloading activity in the Port of IBT that doesn't have their own Wharf.

- Realisasi kinerja bongkar muat curah kering di Terminal Nilam dengan rata-rata 416,31 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan internasional serta 200,63 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan domestik pada tahun 2019.
- *The 2019 realisation of international and domestic dry bulk loading-unloading performance in Nilam Terminal is averaging at 416.31 Tonnes/Gang/Hour and 200.63 Tonnes/Gang/Hour, respectively.*

PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS CURAH KERING PRODUCTION OF DRY BULK NON-CONTAINER SERVICE

URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
				NOMINAL	%
Dermaga Wharf	ton tonnes	19.006.016	19.837.450	(831.434)	-4
Lapangan Penumpukan Diusahakan Open Storage	Ton.Hari Tonnes.Day	283.885	294.285	(10.400)	-4
Bongkar Muat Loading and Unloading	ton tonnes	19.690.622	15.124.196	4.566.426	30

c. Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Cair

- Produksi dermaga Curah Cair tahun 2019 sebesar 12.733.251 ton, meningkat sebesar 168.960 ton atau 101% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 12.564.291 ton. Hal ini antara lain disebabkan adanya peningkatan kegiatan bongkar muat stearin dan molases di Terminal Jamrud, peningkatan kegiatan bongkar muat curah cair ekspor impor milik PT Petro Oxo Nusantara di Pelabuhan Gresik, peningkatan pengiriman CPO, serta kegiatan ekspor PFAD, stearin, dan RBD Olein di Pelabuhan Tanjung Emas.
- Produksi bongkar muat curah cair tahun 2019 tercatat sebesar 10.195.550 ton, dibandingkan tahun sebelumnya 2018 tercatat sebesar 11.020.066 ton terjadi penurunan 7%. Penurunan ini disebabkan oleh kegiatan bongkar muat molases dan aspal yang ditangani oleh PBM Pelindo di Pelabuhan Tanjung Emas.
- Realisasi kinerja bongkar muat curah cair Terminal Nilam rata-rata 312,33 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan internasional serta 135,42 Ton/Gang/Hour untuk kegiatan domestik pada tahun 2019.

c. Liquid Bulk Non-Container Service

- *Production of Liquid Bulk wharf in 2019 amounted to 12,733,251 tonnes, an increase of 168,960 tonnes or 101% from that of 2018 at 12,564,291 tonnes. The increase is due to an increase in stearin and molasses loading-unloading in Jamrud Terminal, an increase in liquid bulk export-import loading-unloading by PT Petro Oxo Nusantara in the Port of Gresik, an increase in CPO shipment, as well as PFAD, stearin, and RBD Olein export activity in Port of Tanjung Emas.*
- *Production of liquid bulk loading-unloading in 2019 was recorded at 10,195,550 tonnes, compared to that of 2018 at 11,020,066 tonnes, there is a 7% decrease. This decrease was due to molasses and asphalt loading-unloading activity by PBM Pelindo in Port of Tanjung Emas.*
- *The 2019 realisation of international and domestic liquid bulk loading-unloading performance in Nilam Terminal is averaging at 312.33 Tonnes/Gang/Hour and 135.42 Tonnes/Gang/Hour, respectively.*

PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS CURAH CAIR PRODUCTION OF LIQUID BULK NON-CONTAINER SERVICE

NO.	URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
					NOMINAL	%
1.	Dermaga Wharf	ton tonnes	12.733.251	12.564.291	168.960	1
2.	Bongkar Muat Loading and Unloading	ton tonnes	10.195.550	11.020.066	(824.516)	7

d. Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan

Di 2019, pelayanan nonpeti kemas hewan masing-masing menunjukkan adanya peningkatan di produksi lapangan penumpukan dan kegiatan bongkar muat *stevedoring* namun mengalami penurunan pada produksi dermaga dan kerja sama pelayanan bongkar muat. Penurunan ini disebabkan oleh:

- Pengurangan pengiriman hewan dari Bima ke Tanjung Perak seiring dengan berdirinya rumah potong hewan modern dan beralihnya moda pengiriman dalam bentuk daging beku serta adanya pemberlakuan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas dan Balai Karantina mengenai penanganan kegiatan bongkar hewan yang lebih memprioritaskan aspek *animal welfare*.
- Penurunan permintaan kebutuhan daging sapi impor di Jawa Tengah untuk pemenuhan kebutuhan daging di Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto.
- Menurunnya kegiatan impor hewan ternak (sapi) dari Australia di Pelabuhan Kumai/Bumiharjo.

d. Animal Non-Container Service

The animal non-container service in 2019 showed an increase in both open storage production and *stevedoring* loading-unloading activity with the decline in wharf production and cooperation in loading-unloading services. The decline is due to:

- The decline of animal shipment from Bima to Tanjung Perak along with the establishment of modern slaughterhouse and the switching of delivery mode in the form of frozen meat, as well as the enactment of regulation by the Authority and Quarantine Agency on animal unloading handling which prioritises the animal welfare aspect.
- The decrease in demand for imported beef in Central Java to meet the needs of meat in Semarang, Yogyakarta, and Purwokerto.
- The decrease in livestock (cattle) imports from Australia in Port of Kumai/Bumiharjo.

PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS HEWAN

PRODUCTION OF ANIMAL NON-CONTAINER SERVICE

NO.	URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
					NOMINAL	%
1.	Dermaga Wharf	ekor animal	121.663	134.831	(13.168)	-10
2.	Lapangan Penumpukan Diusahakan Open Storage	Ekor.Hari Animal.Day	11.012	10.108	904	9
3.	Bongkar Muat <i>Loading and Unloading</i>					
	Per Mata Rantai <i>Per Chain</i>					
	<i>Stevedoring</i>	ekor animal	40.693	20.645	20.048	97
	<i>Cargodoring</i>	ekor animal	-	-	0	0
	<i>Receiving/Delivery</i>	ekor animal	-	-	0	0
4.	Kerja Sama Pelayanan B/M <i>Cooperation in Loading and Unloading Services</i>	ekor animal	70.133	109.304	(39.171)	-36

Pendapatan Bidang Usaha Nonpeti Kemas Tahun 2019

Secara keseluruhan, di tahun 2019 bidang usaha Nonpeti Kemas mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,034 triliun, naik Rp73 miliar atau 0,7% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp961 miliar. Peningkatan pendapatan bidang usaha Nonpeti Kemas didukung dari meningkatnya semua subbidang usaha dengan rata-rata peningkatan sebesar 29,5%.

Revenue of Non-Container Business Segment in 2019

Overall, in 2019 the Non-Container business segment recorded a revenue of Rp1.034 billion, a 0.7% or Rp73 billion increase compared to that of 2018 at Rp961 billion. The increase in the Non-Container business segment revenue was supported by the increase in all sub-segment with an average increase of 29.5%.

PENDAPATAN BIDANG USAHA NONPETI KEMAS TAHUN 2018-2019 NON-CONTAINER BUSINESS SEGMENT REVENUE IN 2018-2019

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pelayanan Nonpeti Kemas <i>General Cargo</i> <i>General Cargo Non-Container Service</i>	235.893.544	251.137.592	(15.244.048)	-9
Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering <i>Dry Bulk Non-Container Service</i>	582.558.311	516.296.818	66.261.493	12
Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Cair <i>Liquid Bulk Non-Container Service</i>	214.210.277	192.022.747	22.187.530	11
Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan <i>Animal Non-Container Service</i>	1.959.438	1.543.418	416.020	26
Jumlah <i>Total</i>	1.034.621.570	961.000.575	73.620.995	0,7

a. Pelayanan Nonpeti Kemas *General Cargo*

Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas *General Cargo* tahun 2019 tercatat sebesar Rp235 miliar, turun Rp 15 miliar atau 9% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp251 miliar. Penurunan tersebut terutama didukung oleh penurunan kegiatan di dermaga yang menyebabkan turunnya kegiatan pula di gudang dan lapangan penumpukan diusahakan.

b. Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering

Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering tahun 2019 tercatat sebesar Rp582 miliar, naik Rp66 miliar atau 12% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp516 miliar. Hal ini didukung dari adanya pendapatan *silo* di TTL serta peningkatan bongkar muat *stevedoring* di berbagai pelabuhan.

c. Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Cair

Pendapatan Nonpeti Kemas Curah Cair tahun 2019 tercatat sebesar Rp214 miliar, naik Rp 22 miliar atau 11% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp192 miliar. Hal tersebut didukung oleh peningkatan kegiatan bongkar muat ekspor impor curah cair di beberapa Regional.

d. Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan

Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan tahun 2019 tercatat sebesar Rp1,95 miliar, naik Rp416 juta atau 26% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,54 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan tarif untuk kegiatan bongkar muat hewan.

a. *General Cargo Non-Container Service*

General Cargo Non-Container Service revenue in 2019 was recorded at Rp235 billion, down by Rp15 billion or 9% compared to that of 2018 at Rp251 billion. The decrease is mainly due to the decline in wharf activity which then triggers a decline in the warehouse and open storage activity.

b. *Dry Bulk Non-Container Service*

Dry Bulk Non-Container Service revenue in 2019 was recorded at Rp582 billion, up by Rp66 billion or 12% compared to that of 2018 at Rp516 billion. This is supported by *silo* revenue in TTL as well as the increase of *stevedoring* loading-unloading in various ports.

c. *Liquid Bulk Non-Container Service*

The *Liquid Bulk Non-Container Service* revenue in 2019 was recorded at Rp214 billion, up by Rp22 billion or 11% compared to that of 2018 at Rp192 billion. This is supported by the increase in liquid bulk export-import loading-unloading activity in several regions.

d. *Animal Non-Container Service*

The *Animal Non-Container Service* revenue in 2019 was recorded at Rp1.95 billion, up by Rp416 million or 26% compared to that of 2018 at Rp1.54 billion. This was caused by the increase in tariff for animal loading-unloading activity.

BIDANG USAHA PENUNJANG

Bidang usaha penunjang terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang,
2. Pelayanan Pelra,
3. Pengusahaan Alat,
4. Pengusahaan Properti,
5. Pengusahaan Air dan Listrik,
6. Pelayanan Terminal Penumpang dan Usaha Lainnya,
7. Pelayanan *Forwarding*, dan
8. Pelayanan TUKS dan *Marine Service*.

Berikut merupakan informasi mengenai produksi dan pendapatan dari bidang Pengusahaan Properti di tahun 2019.

Produksi Pengusahaan Properti Tahun 2019

- Realisasi Pengusahaan Lahan Sewa tahun 2019 tercatat sebesar 9.894.169 m², turun 267.350 m² atau 3% bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 9.524.808 m². Penurunan ini disebabkan antara lain:
 - a. Didukung adanya pengembalian lahan Eks.PT Hastawira Bimasena oleh BJTI di Regional Jawa Timur; dan
 - b. Adanya penurunan tarif tanah atas nama PT Indonesia Power yang sebelumnya dikenakan tarif 5,5% menjadi 3,61% sehingga mengalami penurunan sebesar ± Rp9 miliar.
- Produksi berdasarkan *Throughput Fee/Kontribusi* di tahun 2019 tercatat sebesar 2.256.969 ton, turun 374.182 ton atau 15% bila dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 2.631.151 ton. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penambahan luas lahan yang disewakan atau dikerjasamakan pada tahun 2018 seperti di Pelabuhan Gresik dan Tanjung Emas.
- Realisasi kapasitas produksi Pengusahaan Perairan di tahun 2019 tercatat sebesar 381.858 m², mengalami penurunan dengan tahun 2018 yang tercatat 858.860 m². Hal ini disebabkan antara lain karena PT JMI, PT Indonesia Power, dan PT Opsico yang terletak di Pelabuhan Tanjung Perak beralih ke KSOP.
- Realisasi Pengusahaan Bangunan pada tahun 2019 tercatat sebesar 191.576 m², turun 8.032 m² atau 5% bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 199.608 m². Hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Adanya pengakuan pendapatan penggunaan ruangan/bangunan eks Gudang 100 dan Terminal Gapura Surya Nusantara yang dikelola oleh Terminal Jamrud di Pelabuhan Tanjung Perak; dan
 - b. Terealisasinya pendapatan oleh Regional BBN dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Penggunaan Bangunan untuk kios di Terminal Domestik Pelabuhan Benoa,
 - 2) Penggunaan Gudang oleh PT Sentra Satwatama Indonesia di Pelabuhan Badas, dan
 - 3) Penggunaan Gudang oleh PT Sarana Global Indonesia di Pelabuhan Kupang.

SUPPORTING BUSINESS LINE

Supporting business is divided into several lines, namely:

1. *Consolidation and Goods Distribution Service,*
2. *Pelra (People's Shipping) Service,*
3. *Equipment Rentals,*
4. *Property Business,*
5. *Clean Water and Electricity Business,*
6. *Passenger Terminal and Other Business Services,*
7. *Forwarding Service,*
8. *TUKS (Special Terminal) and Marine Service.*

The following is an explanation of the production and revenue in 2019.

Production of Property Business in 2019

- *The realisation of Rental Land Concession in 2019 was recorded at 9,894,169 m², down by 267,350 m² or 3% compared to that of 2018 at 9,524,808 m². This decrease is due to:*
 - a. *Land return previously owned by PT Hastawira Bimasena by BJTI in East Java Region; and*
 - b. *The decrease in land tariff under PT Indonesia Power that was previously charged at 5.5% into 3.61%, recording a decline of ± Rp9 billion.*
- *Production capacity based on Throughput Fee/Contribution in 2019 was recorded at 2,256,969 tonnes, down by 374,182 tonnes or 15% compared to that of 2018 at 2,631,151 tonnes. This is caused by the addition of land area that is leased or cooperated in 2018 such as in Port of Gresik and Tanjung Emas.*
- *The realisation of Aquatic Concession production capacity in 2019 was recorded at 381,858 m², a decrease from that of 2018 at 858,860 m². This is due to the KSOP transfer by PT JMI, PT Indonesia Power, and PT Opsico that were previously located in Port of Tanjung Perak.*
- *The realisation of Building Concession in 2019 was recorded at 191,576 m², down by 8,032 m² or 5% compared to that of 2018 at 199,608 m². This is due to:*
 - a. *Recognition of revenue from the room/building utilisation previously owned by Gudang 100 and Gapura Surya Nusantara Terminal managed by Jamrud Terminal in Port of Tanjung Perak; and*
 - b. *Revenue realisation by BBN Region with the following description:*
 - 1) *Building Concession for kiosks in the Domestic Terminal of the Port of Benoa,*
 - 2) *Warehouse Concession by PT Sentra Satwatama Indonesia in Port of Badas, and*
 - 3) *Warehouse Concession by PT Sarana Global Indonesia in Port of Kupang.*

- Realisasi produksi Konsolidasi dan Distribusi Barang tahun 2019 tercatat sebesar 469.724 paket, naik sebesar 219.967 paket atau 87% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 250.757 paket. Hal tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Adanya perubahan pembayaran kerja sama operasi TPS yang pembayarannya setelah bulan Agustus 2019 langsung ke Kantor Pusat Pelindo III; dan
 - b. Adanya pengembalian lahan eks Hastawirya, eks Bimasena oleh BJTI.
- *The production realisation for Consolidation and Goods Distribution in 2019 was recorded at 469,724 packages, up by 219,967 packages or 87% compared to that of 2018 at 250,757 packages. This is due to:*
 - a. *A change in TPS operation payment cooperation after August 2019 to Pelindo III Head Office; and*
 - b. *Land return previously owned by Hastawirya and Bimasena by BJTI.*

PRODUKSI PENGUSAHAAN PROPERTI 2019 PRODUCTION OF PROPERTY BUSINESS 2019

NO.	URAIAN DESCRIPTION	SATUAN UNIT	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
					NOMINAL	%
	Pengusahaan Lahan <i>Land Concession</i>					
1.	Sewa <i>Rent</i>	m ²	9.894.169	10.161.519	(267.350)	(3)
	Kontribusi <i>Throughput Fee</i>	ton <i>tonnes</i>	2.256.969	2.631.151	(374.182)	(15)
		unit <i>unit</i>	23	28	(5)	(18)
2.	Pengusahaan Perairan <i>Aquatic Concession</i>	m ²	381.858	858.860	(477.002)	(56)
3.	Pengusahaan Bangunan <i>Building Concession</i>	m ²	191.576	199.608	(8.032)	(5)
		m ³	2.000	-	2.000	100
4.	Konsolidasi dan Distribusi Barang <i>Consolidation and Distribution of Goods</i>	paket <i>package</i>	469.724	250.757	218.967	87

Pendapatan Pengusahaan Properti Tahun 2019

Secara keseluruhan, Pengusahaan Properti mencatatkan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp382 miliar, turun Rp9,3 miliar atau 2% bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2018 sebesar Rp391 miliar. Penurunan ini dikarenakan jumlah kontrak yang diperbarui dan kontrak baru terkait dengan pengusahaan properti yang tidak sesuai target.

Revenue of Property Business in 2019

Overall, the Company's Property Business revenue in 2019 is Rp382 billion, down by Rp9.3 billion or 2% compared to the total revenue in 2018 at Rp391 billion. This decline is caused by the number of renewed contracts and new contracts related to the concession of properties that are not on target.

PENDAPATAN PENGUSAHAAN PROPERTI 2019

REVENUE OF PROPERTY BUSINESS IN 2019

dalam ribu Rupiah | in thousand Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pengusahaan Lahan <i>Land Concession</i>	262.921.758	268.216.237	(5.294.479)	98
Pengusahaan Perairan <i>Aquatic Concession</i>	96.102	96.102	0	100
Pengusahaan Bangunan <i>Building Concession</i>	40.027.705	19.169.055	20.858.650	209
Paket Pengusahaan Properti <i>Property Business Package</i>	71.091.925	104.203.591	(33.111.666)	(68)
Jumlah Total	374.137.490	391.684.984	(17.547.494)	(96)

PERBANDINGAN PENDAPATAN PER SEGMENT

COMPARISON OF SEGMENT REVENUE

PERBANDINGAN PROFITABILITAS PER SEGMENT DI 2018 DAN 2019

COMPARISON OF SEGMENT PROFITABILITY IN 2018 AND 2019

dalam ribu Rupiah | in thousand Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pelayanan Kapal <i>Ship Service</i>	1.102.448.422	1.494.394.845	-391.946.423	-26%
Pelayanan Peti Kemas <i>Container Service</i>	5.728.783.858	6.027.716.118	-298.932.260	-5%
Pelayanan Nonpeti Kemas <i>Non-Container Service</i>	1.034.621.570	961.000.575	73.620.995	8%
Pengusahaan Properti <i>Property Business</i>	374.137.490	391.684.984	-17.547.494	-4%
Jumlah Total	8.239.991.340	8.874.796.522	-634.805.182	-7%

Kontribusi pendapatan terbesar di tahun 2019 berasal dari segmen Pelayanan Peti Kemas yang menghasilkan laba sebesar Rp5,73 triliun, diikuti oleh Pelayanan Kapal dengan pendapatan sebesar Rp1,10 triliun. Di tahun 2019, terdapat penurunan yang signifikan pada pendapatan segmen Pelayanan Kapal yang disebabkan oleh tidak tercapainya produksi penundaan dan menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar Dolar AS. Di samping itu, faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian juga dikarenakan menurunnya pendapatan kegiatan penambatan yang disebabkan oleh tidak tercapainya kunjungan arus kapal.

The largest revenue contribution in 2019 is from the Container Service segment with a revenue of Rp5.73 trillion, followed by Ship Service with revenue of Rp1.10 trillion. In 2019, there is a significant revenue decrease in the Ship Service segment due to the realisation of tugboat production that didn't reach the target and the strengthening of Rupiah exchange rate against that of the US Dollar. Moreover, another factor for the decline is the decline in berthing service revenue due to the achievement of the ship visit below the set target.

KINERJA ENTITAS ANAK

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES

Pelindo III memiliki sejumlah Anak Perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Kinerja Anak Perusahaan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Dengan berpegang pada nilai Perusahaan Service Excellence, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mengoperasikan Terminal di bagian barat Tanjung Perak dan menyediakan pelayanan terminal pelabuhan untuk kapal-kapal Internasional dan domestik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 bekerja sama dengan P&O Dover, yang pada 2006 diakuisisi oleh Dubai Port World.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar perusahaan, maksud dan tujuan TPS ialah berusaha di bidang jasa terminal peti kemas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TPS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Penyediaan dan pelaksanaan perusahaan jasa pelayanan operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang, serta penyediaan dan perusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan peti kemas, dan air bagi kapal-kapal peti kemas yang bertambat di terminal peti kemas.
- Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, perusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gudang, pas, dan parkir), serta usaha jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal peti kemas.
- Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas.
- Perencanaan dan pengelolaan keuangan logistik untuk terminal peti kemas.
- Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan terminal peti kemas.

AKTIVITAS USAHA TPS TAHUN 2019

Berbagai inovasi pun dilakukan oleh TPS, mulai dari sistem pelayanan yang telah berbasis daring seperti E-Registrasi yang senantiasa memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menjadi mitra TPS, peremajaan alat bongkar muat, serta komitmen TPS untuk menjaga fasilitas kolam dermaga internasional pada kedalaman -13 meter low water spring (LWS).

Tonggak sejarah baru juga tercatat pada 28 April 2019, dimana Pelindo III mengambil alih seluruh kepemilikan

Pelindo III has several Subsidiaries engaged in various sectors. The Subsidiaries' performance in 2019 is as follows:

PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Holding onto the corporate value of Service Excellence, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) operates the Terminal on west Tanjung Perak and provides port terminal services for international and domestic ships. This company was established in 1999, cooperating with P&O Dover, which was acquired by Dubai Port World in 2006.

According to Article 3 of the company's Articles of Association, the purpose and objective of TPS are to engage in the business of container terminal services. To achieve the purpose and objective above, TPS carries out the following business:

- Provision and services of ship operations, yard and warehouse operations, as well as the provision and services of mooring, docking, container stacking, and freshwater for container ships docking at the container terminal.*
- Planning and development, management, enterprising and marketing new services, miscellaneous businesses (building and parking space rental), and other services related to container terminals.*
- Provision, operations, and maintenance of facilities and equipment for container loading and unloading.*
- Financial and logistics planning and management for container terminals.*
- Education and training related to container terminal operations.*

TPS BUSINESS ACTIVITIES IN 2019

TPS has made several innovations, from the online-based services system such as E-Registrasi which continues to accommodate service users in becoming TPS's partners, the revitalisation of loading-unloading equipment, and TPS's commitment to maintaining international docking pool to be at a depth of -13 metres low water spring (LWS).

A new milestone has been marked on 28 April 2019, where Pelindo III acquired the entire shares of P&O Dover, and since

saham P&O Dover, sehingga sejak tanggal tersebut TPS sepenuhnya beroperasi di bawah kepemimpinan Pelindo III sebagai pemegang saham prioritas (99,5%) dan Koperasi Pegawai Pelindo III (0,5%).

Berbagai penghargaan diterima oleh TPS di 2019 yakni Penghargaan Kecelakaan Nihil dan Penghargaan Implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) dengan kategori memuaskan yang dianugerahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Penghargaan Pelayanan Prima pada Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi tahun 2019 dengan predikat Prima Utama oleh Kementerian Perhubungan, dan SNI Award tahun 2019.

KINERJA TPS TAHUN 2019

Pada tahun 2019, TPS mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp2,382 triliun, turun Rp326 miliar atau 12% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2,708 triliun. Penurunan pendapatan tersebut menyebabkan laba bersih turun sebesar Rp263 miliar atau 21,93%, menjadi Rp938 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp1,202 triliun. Perubahan pada laba bersih terutama disebabkan oleh penurunan arus kapal dan barang.

Dengan produksi yang ada sekarang, TPS memimpin dalam hal produksi, yaitu 1.409.881 TEUs selama tahun 2019. Sementara itu jumlah aset TPS tahun 2019 tercatat sebesar Rp1,762 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp285 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp1,477 triliun.

then TPS has fully operated under the leadership of Pelindo III as the priority Shareholder (99.5%) as well as Koperasi Pegawai Pelindo III (0.5%).

TPS received many awards in 2019, namely the Zero Accident Award and OHS Management System (SMK3) Implementation Award under the satisfactory category awarded by the Minister of Manpower, the Award for Excellent Service in the Public Service Unit of Transportation in 2019 with the predicate of Major Excellence given by the Ministry of Transportation, and the 2019 SNI Award.

TPS PERFORMANCE IN 2019

In 2019, TPS achieved a Rp2.382 trillion revenue, Rp326 billion or 12% less than the Rp2.708 revenue of 2018. The decline in revenue caused a Rp263 billion or 23.93% decline in net profit, resulting in Rp938 billion of profit compared to that of 2018 at Rp1.202 trillion. The decrease in net profit is mainly due to the decrease in ship and goods flows.

With the current production, TPS leads in production, with 1,409,881 TEUs throughout 2019. Meanwhile, TPS's assets in 2019 are Rp1.762 trillion, the liabilities are Rp285 billion, and the equity is Rp1.477 trillion.

KINERJA PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA PERFORMANCE OF PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha Revenue	2.382.154	2.708.645	(326.491)	(12,05)
Beban Usaha Operating Expenses	1.143.875	1.095.773	48.101	4,39
Laba Usaha Operating Profit	1.238.280	1.612.872	(374.592)	(23,23)
Beban Pajak Tax Expenses	318.011	424.566	(106.556)	(25,10)
Laba Bersih Net Income	938.623	1.202.254	(263.631)	(21,93)
Jumlah Aset Total Assets	1.762.801	1.886.010	(123.209)	(6,53)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	285.417	441.730	(156.313)	(35,39)
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.477.385	1.444.280	33.105	2,29

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari TPS pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp466,965 miliar atau 49,75% dari jumlah laba bersih TPS tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,86% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan pendanaan investasi TPS di tahun 2020.

PROVIDED DIVIDENDS

The dividends Pelindo III received from TPS in 2019 are Rp466.965 billion or 49.75% from its net profit in 2019. The amount decreased by 3.86% compared to that in 2018 due to TPS's investment-funding provision in 2020.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA DIVIDENDS PROVIDED BY PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Laba Bersih Net Income	938.623	1.202.275	(263.652)	(21,93)
Dividen Dividend	466.965	485.719	(18.754)	(3,86)
Payout Ratio	49,75%	40,40%	-	-

PT PELINDO HUSADA CITRA

Memulai bisnis di tahun 1999 dengan 1 rumah sakit tipe C di Surabaya dan pelayanan kesehatan, saat ini PT Pelindo Husada Citra (PHC) telah berkembang dengan mengelola dan mengoperasikan 1 rumah sakit tipe B Pendidikan, 1 klinik utama, 5 klinik pratama, 38 klinik *first aid* dan K3 perusahaan, pengelolaan biaya kesehatan pegawai di lingkungan Pelindo III melalui Medsos (*Medical Solution Service*), serta 1 anak perusahaan yaitu PT Prima Citra Nutrindo yang bergerak di bidang *food and beverages*.

PHC merupakan *trauma centre* dan rumah sakit rujukan utama untuk penyakit jantung di wilayah timur Indonesia. Setelah berhasil melakukan operasi bedah jantung terbuka untuk pertama kalinya di Surabaya, PHC membangun beberapa klinik di kota lain dan mengembangkan asuransi kesehatan PHC Health Care untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PHC terutama dalam bidang jasa pelayanan kesehatan. Bidang jasa pelayanan kesehatan tersebut dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

- Melaksanakan pelayanan kesehatan.
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesehatan.
- Melaksanakan pelayanan jasa konsultan manajemen kesehatan.
- Melaksanakan pelayanan farmasi dan peralatan kesehatan.
- Melaksanakan pelayanan gizi masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan lainnya.

PT PELINDO HUSADA CITRA

Starting its business in 1999 with one C-type hospital in Surabaya and healthcare services, PT Pelindo Husada Citra (PHC) has now advanced, managing and operating one B-type teaching hospital, one main clinic, five primary clinics, 38 first-aid and corporate OHS clinics, employee healthcare fund management in Pelindo III area through Medsos (*Medical Solution Service*), and one subsidiary, PT Prima Citra Nutrindo, engaging in food and beverages business.

PHC is a *trauma centre* and the main referral hospital for cardiac diseases in eastern parts of Indonesia. After successfully carrying out the first open-heart surgery in Surabaya, PHC builds several clinics in other cities and developed PCH Health Care health insurance for better services.

According to Article 3 of the company's Articles of Association, PHC's main activity scope mainly covers the area healthcare services, which can be described as follows:

- Carrying out healthcare services.
- Carrying out healthcare education and training.
- Carrying out consulting services for healthcare management.
- Carrying out pharmacy and healthcare equipment services.
- Carrying out community nutrition services.
- Carrying out other activities in the field of healthcare.

AKTIVITAS USAHA PHC TAHUN 2019

Dalam upaya merespon keinginan pelanggan dan menjadi perusahaan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang handal dan terdepan, PHC senantiasa melakukan pengembangan di segala aspek pelayanannya selama tahun 2019, antara lain:

1. Pengoperasian alat Revolix Duo untuk penanganan saluran kemih.
2. Pembukaan layanan Baby Spa.
3. Penandatanganan komitmen bersama untuk melakukan transformasi Sistem Informasi menuju PHC Go Live 1 Januari 2020.
4. Mengadakan PHC Innovation Week melalui *Lean Breakthrough Competition* untuk akselerasi budaya organisasi yang efektif dan efisien.
5. *Launching* pembayaran daring di RS PHC Surabaya.
6. Pembukaan pelayanan vaksin perjalanan internasional.
7. MSCT Scan 128 Slices dan PACS untuk Teleradiology.
8. Pembukaan layanan Rumah Sunat di Klinik PHC Semarang.
9. Pembukaan pelayanan vaksin umroh dan perjalanan internasional di Klinik PHC Banjarmasin.

Pada tahun 2019, PHC mendapatkan beberapa penghargaan atas prestasinya antara lain:

1. Lulus akreditasi The Shipowners Club Luxembourg untuk Pre-Employment Medical Examination for Seafarers.
2. Penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja kategori Platinum.
3. Penghargaan The Inspiring & Innovative Hospital dari PERSI Jawa Timur.
4. Akreditasi SNARS kategori paripurna.
5. Rumah Sakit pertama di Jawa Timur yang melaksanakan asesmen GCG dengan predikat Baik.
6. Juara III Kaizen Festival Nasional 2019 kategori perbaikan berkesinambungan dunia pelayanan kesehatan.
7. Penghargaan Silver Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) dari Badan Perlindungan Konsumen RI.

KINERJA PHC TAHUN 2019

Pada tahun 2019, PHC mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp423 miliar, naik Rp59 miliar atau 16,5% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp363 miliar. Peningkatan yang signifikan pada pendapatan tersebut menyebabkan laba bersih PHC pada tahun 2019 naik sebesar Rp10 miliar atau 99%, menjadi Rp22 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp11 miliar. Kenaikan pada laba bersih terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan anak usaha (PT PCN), farmasi, dan klinik.

Sementara itu, jumlah aset PHC tahun 2019 tercatat sebesar Rp395 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp155 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp240 miliar.

PHC BUSINESS ACTIVITIES IN 2019

Responding to customer expectations and becoming a reliable and advanced healthcare service provider, PHC consistently develops all of its service aspects in 2019, namely:

1. *Operating Revolix Duo to care for urinary tracts.*
2. *Opening the Baby Spa service.*
3. *Signing joint commitment to transform its Information System, leading to PHC Go Live on 1 January 2020.*
4. *Carrying out PHC Innovation Week through the Lean Breakthrough Competition to accelerate the process of effective and efficient organisational culture.*
5. *Launching the online payment in RS PHC Surabaya.*
6. *Opening vaccine services for international trips.*
7. *MSCT Scan 128 Slices and PACS for Teleradiology.*
8. *Opening a Circumcision Centre in PHC Clinic Semarang.*
9. *Opening vaccine services for umrah and international trips in the Clinic of PHC Banjarmasin.*

In 2019, PHC received several awards for its achievements, namely:

1. *Accreditation pass for The Shipowners Club Luxembourg for Pre-Employment Medical Examination for Seafarers.*
2. *An award for HIV/AIDS prevention and treatment programmes at the workplace, Platinum category.*
3. *The Inspiring and Innovative Hospital from PERSI East Java.*
4. *SNARS accreditation, perfect category.*
5. *The first hospital in East Java with a Great predicate for GCG assessment.*
6. *The third winner of the 2019 National Kaizen Festival, continuous improvement of healthcare category.*
7. *Silver award in Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) from the Indonesian Consumer Protection Agency.*

PHC PERFORMANCE IN 2019

In 2019, PHC achieved a Rp423 billion revenue, a Rp59 billion or 16.5% increase from Rp363 billion in 2018. The significant rise in revenue increased PHC's 2019 net profit by Rp10 billion or 99%, resulting in Rp22 billion, while the 2018 net profit was Rp11 billion. The increase in net profit is mainly due to the increase in the revenues of a subsidiary (PT PCN), pharmacies, and clinics.

Meanwhile, PHC's assets in 2019 are Rp395 billion, its liabilities are Rp155 billion, and the equity is Rp240 billion.

KINERJA PT PELINDO HUSADA CITRA PERFORMANCE OF PT PELINDO HUSADA CITRA

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha Revenue	423.284	363.331	59.953	16,50
Beban Usaha Operating Expenses	391.361	346.506	44.855	12,94
Laba Usaha Operating Profit	31.923	16.825	15.098	89,74
Beban Pajak Tax Expenses	8.105	5.184	2.921	56,35
Laba Bersih Net Income	22.027	11.062	10.966	99,12
Jumlah Aset Total Assets	395.636	307.165	88.471	28,80
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	155.033	89.282	65.751	73,64
Jumlah Ekuitas Total Equity	240.603	217.883	22.720	10,43

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PHC pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp4,2 miliar atau 19,75% dari jumlah laba bersih PHC tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,9% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan laba bersih perusahaan di tahun 2019.

PROVIDED DIVIDENDS

The dividends received by Pelindo III from PHC in 2019 are Rp4.2 billion or 19.75% of its net profit in 2018. The amount increases by 12.9% compared to that in 2018 due to the company's increase in 2019 net profit.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT PELINDO HUSADA CITRA DIVIDENDS PROVIDED BY PT PELINDO HUSADA CITRA

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Laba Bersih Net Income	21.528	10.894	10.634	97,61
Dividen Dividend	4.251	3.765	486	12,92
Payout Ratio	19,75%	34,56%	-	-

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) adalah salah satu Anak Perusahaan dari Pelindo III yang didirikan pada tanggal 9 Januari 2002. Fokus utama BJTI pada saat ini adalah menangani kegiatan jasa kepelabuhanan, khususnya pada kegiatan bongkar muat peti kemas domestik dan kegiatan penunjang lainnya yang berhubungan dengan jasa kepelabuhanan di Terminal Berlian Tanjung Perak Surabaya. Selain itu, BJTI juga melayani kapal batu bara di Kalimantan dan mengembangkan kawasan *Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE)* di Gresik, Jawa Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BJTI, maksud dan tujuan BJTI ialah:

- Pengembangan usaha dalam bidang pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan peti kemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang, untuk menunjang kelancaran arus barang di pelabuhan serta mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- Pengembangan usaha dalam bidang pelayanan jasa pengoperasian dan pemeliharaan alat bongkar muat peti kemas dan pengembangan kegiatan terminal lainnya untuk menunjang kelancaran arus barang di pelabuhan serta mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BJTI dapat menyediakan fasilitas serta melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair, curah kering, dan *general cargo*) dan peti kemas;
- Konsolidasi, distribusi, dan pengangkutan barang (*trucking*), serta transportasi multimoda;
- Jasa terminal kapal *roll on-roll off (Ro-Ro)*;
- Jasa terminal bahan bakar minyak kapal dan suplai bahan bakar minyak kapal; dan
- Jasa terminal kapal ikan dan kegiatan pendukungnya.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas BJTI dapat melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan Perusahaan antara lain:

- Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar-muat, serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi terminal dan/atau kepelabuhanan;
- Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, *cleaning*, fumigasi, serta pelayanan logistik;
- Jasa timbangan;
- Jasa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat bongkar muat peti kemas; dan
- Usaha-usaha penunjang untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) is one of Pelindo III Subsidiaries established on 9 January 2002. Currently, BJTI's main focus is handling port service activities, especially domestic container loading and unloading as well as other supporting activities related to port services at Terminal Berlian Tanjung Perak Surabaya. Moreover, BJTI serves coal ships in Kalimantan and develops the Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) in Gresik, East Java.

Based on Article 3 of BJTI's Articles of Association, BJTI's purpose and objectives are:

- Business development in terminal services for loading and unloading goods and container as well as activities related to goods consolidation and distribution to support the seamless goods flows at its ports and to gain profits to increase the company's value by implementing Limited Liabilities principles.*
- Business development in the operational and maintenance services of container loading-unloading equipment as well as the development of other terminal activities to support goods flows at its port and to gain profits to increase the company's value.*

To achieve the purpose and objective above, BJTI can provide and carry out the following businesses:

- Loading-unloading terminal services for cargo (liquid bulk, dry bulk, and general cargo) as well as containers;*
- Consolidation, goods distribution and transporting (trucking), and multimodal transportation;*
- Roll-on-roll-off (Ro-Ro) ship terminal;*
- Ship fuel terminal and supply; and*
- Fishing ship terminal and supporting services.*

Besides the main activities stated above, BJTI can also carry out other business supporting the achievement of the company's objectives, namely:

- Provision and/or services of warehouses, stacking fields, tankers, port transportation, loading-unloading equipment, and port equipment;*
- Provision and management of consolidation, education, and training related to terminal and/or port operation management;*
- The business and operations of container depots and repair, cleaning, fumigation, and logistics service;*
- Weighing services;*
- Maintenance and repair for container loading-unloading equipment; and*
- Supporting businesses to achieve the company's goals and objectives.*

AKTIVITAS USAHA BJTI TAHUN 2019

Sejak didirikan dan menjadi bagian dari Pelindo III Group, BJTI terus bertransformasi menjadi perusahaan jasa kepelabuhanan yang andal dan dapat dipercaya. Salah satu transformasi yang dilakukan di tahun 2019 adalah dengan membentuk dan menerapkan pola budaya perusahaan yang baru melalui Keputusan Direksi No. KEP.009-00/VII/BJTI-2019 yang merumuskan pola budaya “Perubahan Untuk Negeri” dengan nilai inti budaya **#BerUBah**, yang merupakan penjabaran dari **Bersih, Unggul, dan Bahagia**.

Berbagai inovasi dan peningkatan kinerja juga terus digenot bahkan untuk memperkuat kinerja operasi dari Terminal Berlian sebagai bagian dari *continuous improvement* perusahaan. Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain:

1. Golden Time, yaitu program preventif pemeliharaan alat di Terminal Berlian dan pengisian BBM pada tingkat operasional rendah;
2. Program penyesuaian pola pembayaran upah TKBM berdasarkan produksi per Box;
3. Program menjaga kelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi gas karbon di Terminal Berlian dengan menggunakan energi listrik sebagai bahan utama;
4. Menambah waktu efektif untuk bongkar muat dengan melaksanakan pergantian operator HMC dan RTG di kabin operator;
5. *Supply Chain Financing* (bentuk kerja sama pihak ketiga untuk menyalurkan fasilitas kredit modal kerja dari Bank BUMN pada perusahaan pengguna jasa BJTI untuk membayar nota tagihan pelayanan jasa peti kemas);
6. Memberikan *reward* kepada perusahaan pelayaran yang mendukung peningkatan produktivitas bongkar muat dengan melakukan *stack* muat 100%;
7. Mengutamakan program CSR untuk memajukan dunia pendidikan dengan menghibahkan alat angkut dan mesin angkat ke Sekolah Tingkat Atas;
8. Sinergi strategis dengan anak/cucu usaha Pelindo III Group;
9. *Super Operator* (Penghargaan pada pegawai dengan prestasi terbaik); dan
10. *Relaxing Center* untuk pegawai.

Tidak hanya itu, untuk memberikan jasa pelayanan kepelabuhanan yang baik dan maksimal, di tahun 2019 BJTI telah menambah investasi alat pendukung berupa 3 unit *Spreader*, sehingga pada tahun 2019 total alat BJTI yang digunakan di Terminal Berlian dan Lapangan Penumpukan adalah: 16 unit *Harbour Mobile Crane* (HMC), 16 unit *Rubber-Tired Gantry* (RTG), 50 unit *Head Truck* dan *Chassis*, 8 unit *Reach Stacker*, serta 12 unit *Forklift*. Selain itu, di tahun yang sama BJTI memulai langkah baru dengan membuka lini bisnis usaha baru berupa Tempat Penimbunan Sementara (Gudang Konsolidasi Impor) yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Selain itu, berbagai macam penghargaan dan pengakuan atas sistem manajemen terstandar pun juga diraih oleh BJTI di tahun 2019 yakni:

1. Pengakuan Kategori Jasa Layanan Pelabuhan Domestik ISO 14001:2015 *Environmental Management System*.

BJTI BUSINESS ACTIVITIES IN 2019

Since its establishment as a part of Pelindo III Group, BJTI has continuously transformed into a reliable and trustworthy port service company. One of the transformations in 2019 is the creation and application of new corporate cultures through the Decree of the BOD No. KEP.009-00/VII/BJTI-2019 which formulates the culture of “Transforming for the Country” with the core cultural value of **#BerUBah** (lit. changing), an acronym of **Bersih** (Clean), **Unggul** (Excellent), and **Bahagia** (Happy).

Many innovations and performance improvements are also encouraged to even strengthen the operational performance of Terminal Berlian as a part of the company’s *continuous improvement*. Some of the innovations are:

1. Golden Time, a preventive programme of equipment maintenance in Terminal Berlian and fuel filling on low operations;
2. An adjustment programme for TKBM wage payment based on production per Box;
3. Environmental preservation programme through the reduction of carbon gas emissions at Terminal Berlian by using electricity as the main power source;
4. Increasing effective time for loading and unloading by switching HMC and RTG operators in operator cabins;
5. *Supply Chain Financing* (third-party cooperations to distribute working capital credit from SOE Banks to BJTI service user companies to pay container service bills);
6. Rewarding shipping companies that support the loading-unloading productivity improvement with 100% loading stack;
7. Prioritising CSR programmes to advance education by donating transportation equipment and machines to High Schools;
8. Strategic synergy with subsidiaries/second-tier subsidiaries of Pelindo III Group;
9. *Super Operator* (Awards for employees with the best achievement); and
10. *Relaxing Centre* for employees.

Additionally, to provide great and optimal port services, in 2019 BJTI has invested in supporting equipment, namely three units of *Spreader*. Thus, in 2019 BJTI’s total equipment used in Terminal Berlian and Stacking Fields consists of 16 units of *Harbour Mobile Crane* (HMC), 16 units of *Rubber-Tired Gantry* (RTG), 50 units of *Head Trucks and Chassis*, eight units of *Reach Stackers*, and 12 units of *Forklifts*. Moreover, in the same year, BJTI has taken another step by opening a new business line of *Temporary Stacking Warehouse* (*Import Consolidation Warehouse*) that has gained permission from the Indonesian Ministry of Finance.

Furthermore, several awards and recognition of BJTI’s standardised management system have been achieved in 2019:

1. Recognition in the Category of Domestic Port Services ISO 14001:2015 *Environmental Management System*.

- Pengakuan Kategori Jasa Layanan Pelabuhan Domestik ISO 9001:2015 *Quality Management System*.
 - Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
 - Penghargaan K3 Zero Accident oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur.
 - Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan berdasarkan Kode Internasional tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas.
- Recognition in the Category of Domestic Port Services ISO 9001:2015 Quality Management System.*
 - OHS Management System (SMK3) Award from the Indonesian Ministry of Manpower.*
 - Zero Accident OHS Award by the Governor of East Java.*
 - Statement of Security Compliance for Port Facilities Based on the International Code on Ship and Facility Security.*

KINERJA BJTI TAHUN 2019

Dengan dukungan fasilitas dan alat yang memadai serta inovasi dan kerja keras manajemen, di tahun 2019 BJTI berhasil meningkatkan produksinya dari 1.198.029 TEUs di tahun 2018 menjadi 1.235.836 TEUs di 2019.

Pada tahun 2019, BJTI mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1,129 triliun, naik Rp62,7 miliar atau 5,88% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,067 triliun. Secara konsolidasian, laba bersih BJTI pada tahun 2019 naik sebesar Rp18,7 miliar atau 16,81%, menjadi Rp130 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp111 miliar.

Jumlah aset BJTI tahun 2019 tercatat sebesar Rp3,702 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp1,803 triliun dan jumlah ekuitas sebesar Rp1,899 triliun.

BJTI PERFORMANCE IN 2019

With adequate facilities and equipment as well as the management's innovation and hard work, BJTI successfully increased its production in 2019 from 1,198,029 TEUs in 2018 to 1,235,836 TEUs in 2019.

In 2019, BJTI achieved a Rp1.129 trillion of revenue, a Rp62.7 billion or 5.88% increase from Rp1.067 trillion in 2018. Consolidated, BJTI's net profit in 2019 has increased by Rp18.7 billion or 16.81% to Rp130 billion from Rp111 billion in 2018.

BJTI's assets are Rp3.702 trillion, the liabilities are Rp1.803 trillion, and the equity is Rp1.899 trillion.

KINERJA PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA PERFORMANCE OF PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha Revenue	1.129.743	1.067.024	62.719	5,88
Beban Usaha Operating Expenses	882.667	819.357	63.310	7,73
Laba Usaha Operating Profit	247.077	247.667	(590)	(0,24)
Beban Pajak Tax Expenses	41.481	47.282	(5.801)	(12,27)
Laba Bersih Net Income	130.109	111.385	18.724	16,81
Jumlah Aset Total Assets	3.702.683	3.614.561	88.122	2,44
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.803.633	1.444.332	359.301	24,88
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.899.051	2.170.229	(271.178)	(12,50)

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Hingga Laporan Tahunan ini disusun, BJTI belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sehingga belum ada penetapan atas jumlah dividen yang dibayarkan. Jumlah dividen yang diprediksi dapat diterima oleh Perusahaan dari BJTI atas kinerja tahun 2019 tercatat sebesar Rp43,2 miliar atau 38,74% dari jumlah laba bersih BJTI tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2018.

PROVIDED DEVIDENDS

Up to the preparation of this Annual Report, BJTI has not carried out the Annual General Meeting of Shareholders, and thus there has been no provision on the paid dividend amount. The estimated dividend amount to be received by the Company from BJTI for 2019 performance is Rp43.2 billion or 38.74% from its net profit in 2019. The amount is a 5% increase from the 2018 dividends.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA DIVIDENDS PROVIDED BY PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Laba Bersih Net Income	111.708	106.235	5.473	5,15
Dividen Dividend	43.271	41.151	2.120	5,15
Payout Ratio	38,74%	38,74%	-	-

Keterangan: Angka dividen dan kinerja keuangan yang disampaikan pada tabel di atas adalah angka taksasi tahun 2019, karena BJTI belum melaksanakan RUPS Tahunan 2019 hingga Laporan Tahunan ini disusun.

Note: the dividend and financial performance stated in the table above is a 2019 taxation since BJTI has not carried out the 2019 Annual GMS up to the preparation of this Annual Report.

PT PELINDO MARINE SERVICE

Dengan jenis produk jasa yang beragam, PT Pelindo Marine Service (PMS) merupakan salah satu penyedia jasa perkapalan terbaik. Mulai 2016, PMS melalui cucu perusahaan PT Pelindo Energi Logistik yang berbasis di Bali, juga menyediakan layanan distribusi gas dan minyak, terutama ke wilayah Indonesia bagian timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PMS, maksud dan tujuan PMS adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman, baik nasional maupun internasional, dengan memberikan pelayanan prima yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PMS dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Jasa angkutan di perairan;
- Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan/atau jasa penundaan kapal;
- Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa mendorong dan/atau menarik kapal;
- Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa berbagai jenis kapal dan tongkang untuk kegiatan spesifik;
- Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa galangan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal;
- Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemenuhan kebutuhan logistik kapal dan/atau kru kapal; dan

PT PELINDO MARINE SERVICE

With various types of service products, PT Pelindo Marine Service (PMS) is one of the best ship service provider. Since 2016, through its Bali-based subsidiary PT Pelindo Energi Logistik, PMS provides oil and gas distribution services, especially to the eastern parts of Indonesia.

Based on Article 3 of PMS's Articles of Association, PMS's purpose and objectives are to carry out the business of ship services for maritime service users, both national and international, by providing excellent services and prioritising GCG principles and applying Limited Liabilities principles.

To achieve the purpose and objectives above, PMS can carry out main businesses as follows:

- Water transportation services;
- Facility provision and/or services of ship pilotage and/or tugging;
- Facility provision and/or services of ship tugging and/or towing;
- Facility provision and/or services of various ship types and barge for specific activities;
- Facility provision and/or services of shipyards for ship maintenance and/or repair;
- Facility provision and/or services of ship logistic supplies and/or ship crew;

- g. Penyediaan kru kapal; dan
- h. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, PMS dapat melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan PMS, antara lain:

- a. Penyediaan pengelolaan jasa konsultasi, surveyor, serta pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi perkapalan;
- b. Penyediaan peralatan dan/atau perawatan peralatan di bidang perkapalan; dan
- c. Jasa penyelamatan dan penyelaman (*salvage*).

AKTIVITAS USAHA PMS TAHUN 2019

Pada tahun 2019, PMS mulai mengoptimalkan sistem informasi internal perusahaan dalam menunjang proses bisnis perusahaan. Pemanfaatan IT ini membuahkan pencapaian-pencapaian seperti:

1. Penghargaan dari IT Works – Top Digital Awards 2019 atas kategori Top Digital Implementation on Logistic & Transportation Sector (Level Star 3).
2. Penghargaan di bidang SDM, yaitu Juara I atas HR Transformation HRD Power yang didapat dari Universitas Airlangga pada Human Capital Achievement Award 2019.
3. Penghargaan dari Marketing Plus (MarkPlus) atas Marketing of the Year Surabaya 2019, Sales People of the Year 2019, Service People of the Year 2019, dan Promotion People of the Year 2019.

Pada induk korporasi (PMS), pengembangan bisnis dilakukan melalui pengembangan pasar eksternal, yaitu atas penyediaan kapal tunda K3S (Camar Resource Canada & HCML) SKK Migas serta penyediaan kapal tunda untuk *terminal tug* di lingkungan kerja PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Dalam upaya efisiensi biaya, PMS telah melakukan renegotiasi skema kontrak kapal, serta efisiensi BBM dengan pemasangan alat pemantauan BBM dan CCTV pada kapal tunda. Terdapat pula penambahan 12 Kapal Tunda Jayanegara Series (serah operasi dari Pelindo III) dan 9 Kapal Pandu Srikandi Series yang mulai beroperasi di tahun 2018. Penambahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan pelayanan perusahaan kepada pelanggan, terutama ke Induk Perusahaan yakni Pelindo III.

Sejalan dengan pengembangan bisnis yang dilakukan oleh PMS, anak perusahaan juga melakukan berbagai pengembangan bisnis guna mencapai target kinerja tahun 2019. Pada 2019, PT APBS melakukan pengembangan usaha di bidang pemeliharaan kolam pelabuhan yang telah dilaksanakan di Pelabuhan Banjarmasin, TPS, Smart Tarjun, Kalimas, dan Terminal Nilam, sehingga laba dapat tercapai dengan baik.

Di tahun ini, PT PE Logistik melakukan sinergi dengan BUMN melalui pembentukan *Joint Venture Company* dengan PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) sehingga terbentuk PT Lamong Nusantara Gas (PT LNG) yang akan mengelola terminal LNG di Terminal Teluk Lamong dan direncanakan dapat beroperasi pada 2020.

- g. *Provision or ship crew; and*
- h. *Other facility provision and/or services related to vessel management and operations.*

Besides the main activities above, PMS can also carry out other businesses supporting the achievement of its objectives, namely:

- a. *Provision and management of consulting services, surveyor, education and training related to vessel operation management;*
- b. *Provision and/or maintenance of ship-related equipment; and*
- c. *Rescue and submersion (salvage) services.*

PMS BUSINESS ACTIVITIES IN 2019

In 2019, PMS begin to optimise its internal information system to support its business process. The IT utilisation results in the following achievements:

1. *An award from IT Works – Top Digital Awards 2019 in the category of Top Digital Implementation on Logistic & Transportation Sector (Level Star 3).*
2. *An award in HC, namely the First Winner of HR Transformation HRD Power from Universitas Airlangga in the Human Capital Achievement Award 2019.*
3. *An award from Marketing Plus (MarkPlus), namely the Marketing of the Year Surabaya 2019, Sales People of the Year 2019, Service People of the Year 2019, and Promotion People of the Year 2019.*

In the corporate parent entity (PMS), the business is developed through external market development, specifically the provision of K3S tugboat (Camar Resource Canada & HCML) SKK Migas and the provision for tug terminals in the work area of PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. To create cost efficiency, PMS has renegotiated the ship contract schemes and saved fuel with the installation of fuel-monitoring equipment and CCTV on tugboats. There has also been an addition of 12 Jayanegara Series Tugboats (operational transfer from Pelindo III) and 9 Srikandi Series Pilot Boats that began their operations in 2018. This addition aims to improve the company's competitiveness and services for the customers, especially for Pelindo III as the Parent Entity.

Along with PMS's business development, its subsidiaries also develop their business to reach the 2019 performance targets. In 2019, PT APBS developed its business in port pool maintenance as carried out in Port of Banjarmasin, TPS, Smart Tarjun, Kalimas, and Terminal Nilam, resulting in a great profit achievement.

This year, PT PE Logistic carried out SOE Synergy through a Joint Venture Company with PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN), establishing PT Lamong Nusantara Gas (PT LNG) that will manage the LNG terminal at Terminal Teluk Lamong and is planned to operate in 2020.

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan upaya pengembangan usaha yang dilakukan oleh PT BMC adalah telah beroperasinya secara penuh CCC-CDC Banjarmasin. Tak hanya itu, pengembangan usaha baru yang dicapai oleh PT BMC adalah kerja sama dengan PT INKA untuk pengurusan *Custom Clearance* dan pengiriman barang ke Madiun.

KINERJA PMS TAHUN 2019

Pada tahun 2019, PMS secara konsolidasi mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1,546 triliun, turun 9% atau Rp155 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,701 triliun. Penurunan tersebut akibat dari adanya ketidaktercapaian pada pendapatan jasa logistik marina dan jasa lain di entitas asosiasi (PT PEL dan PT BMC). Dengan upaya efisiensi biaya yang dilakukan oleh manajemen hingga 17%, PMS mengalami peningkatan laba bersih sebesar Rp73 miliar, menjadi Rp277 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp204 miliar.

Sementara itu, jumlah aset PMS tahun 2019 tercatat sebesar Rp1,641 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp739 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp901 miliar. Perubahan terbesar dapat dilihat dari jumlah aset pada tahun 2019 adanya investasi pada entitas asosiasi dan adanya sewa jangka panjang atas lahan Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) Peti Kemas.

To achieve the targets, PT BMC has developed its business through the fully-operating CCC-CDC Banjarmasin. Additionally, the new business development by PT BMC is its cooperation with PT INKA for customs clearance and goods delivery to Madiun.

PMS PERFORMANCE IN 2019

In 2019, PMS achieved Rp1.546 trillion of consolidated revenue, a 9% or Rp155 billion decrease compared to Rp1.701 trillion in 2018. The decline is due to the underachievement in marine logistics revenue and other services in the associated entities (PT PEL and PT BMC). With the cost efficiency actions by the management resulting in 17% efficiency, PMS has increased its net profit by Rp73 billion, reaching Rp277 billion from Rp204 billion in 2018.

Meanwhile, PMS's assets in 2019 are Rp1.641 trillion, the liabilities are Rp739 billion, and the equity is Rp901 billion. The most significant change can be seen in the 2019 total assets with the investment in associated entities and the long-term rent of Stack-Location Moving (PLP) land for Containers.

KINERJA PT PELINDO MARINE SERVICE PERFORMANCE OF PT PELINDO MARINE SERVICE

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha Revenue	1.546.521	1.701.993	(155.472)	(9,13)
Beban Usaha Operating Expenses	1.183.121	1.433.944	(250.823)	(17,49)
Laba Usaha Operating Profit	363.400	268.049	95.351	35,57
Beban Pajak Tax Expenses	8.897	7.380	1.517	20,56
Laba Bersih Net Income	277.715	204.629	73.086	35,72
Jumlah Aset Total Assets	1.641.154	1.515.961	125.193	8,26
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	739.225	883.942	(144.717)	(16,37)
Jumlah Ekuitas Total Equity	901.930	632.020	269.910	42,71

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PMS pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp104 miliar atau 39,29% dari jumlah laba bersih PMS tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 37% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan laba bersih serta keputusan Pemegang Saham untuk meningkatkan dividen di tahun 2019.

PROVIDED DIVIDENDS

The dividends received by Pelindo III from PMS in 2019 are Rp104 billion or 39.29% of its net profit in 2019, increasing by 37% compared to the 2018 dividends due to the increase in net profit and the decision of Shareholders to increase dividends in 2019.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT PELINDO MARINE SERVICE**DIVIDENDS PROVIDED BY PT PELINDO MARINE SERVICE**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Laba Bersih Net Income	266.460	194.728	71.732	36,84
Dividen Dividend	104.698	76.248	28.450	37,31
Payout Ratio	39,29%	39,16%	-	-

PT TERMINAL TELUK LAMONG

Multi-Purpose Terminal di Teluk Lamong dibangun dengan kade sedalam 13 LWS dan dilengkapi peralatan-peralatan canggih yang mendukung modernisasi dan otomatisasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Terminal yang pada 2015 lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini mengusung konsep Go Green dengan menggunakan bahan bakar gas dan meminimalkan emisi dari keseluruhan proses bisnisnya. Hal ini merupakan bentuk kontribusi Pelindo III Group terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL) telah menginisiasi modernisasi operasi kepelabuhanan dalam rangka mengurangi tingkat emisi dan mengoptimalkan biaya operasional melalui otomatisasi fasilitas pelabuhan yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat baik bagi bisnis dan lingkungan.

TTL menggunakan teknologi informasi dalam sebagian besar proses bisnisnya, dimana pelayanan jasa di TTL menggunakan online platform sebagai mediana. Pengguna jasa pun dimudahkan dengan proses yang paperless, cepat, dan mudah. Metode ini sekaligus yang pertama kali diadakan di lingkungan maritim Indonesia.

Berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., No. 309 tanggal 30 Desember 2013 pasal 3, maksud dan tujuan TTL adalah melakukan usaha dalam bidang jasa usaha kepelabuhanan yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TTL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

PT TERMINAL TELUK LAMONG

The Multipurpose Terminal in Teluk Lamong was built with a 13 LWS dock equipped with sophisticated tools to support the modernisation and automation of port services. Inaugurated by President Joko Widodo in 2015, the terminal embraces the concept of Go Green, using gas as fuel and minimising emission from the entire business process. This is Pelindo III Group's contribution to environmental sustainability.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL) has initiated the modernisation of port operations for emission reduction and operational cost efficiency through port facility automation, which is expected to benefit the business and the environment.

TTL uses information technology in most of its business process, where its services use online platforms as a media. The service users are also facilitated with a paperless, quick, and easy process. This method is the first in the maritime sector in Indonesia.

Based on the Notarial Deed of Yatiningsih, S.H., M.H., No. 309 dated 30 December 2013 article 3, the purpose and objective of TTL are to engage in port businesses that prioritise GCG principles and apply Limited Liabilities principles. To achieve the purpose and objective above, TTL can carry out the following business activities:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;</p> <p>b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (<i>pilotage</i>) dan penundaan kapal;</p> <p>c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa pelaksanaan perusahaan jasa-jasa operasi kapal (bongkar muat), operasi lapangan dan operasi gudang, serta penyediaan dan perusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan peti kemas, barang curah, <i>general cargo</i> (termasuk hewan), dan kendaraan (<i>ro-ro</i>), barang curah dan <i>multi-purpose</i>, serta fasilitas naik turunnya penumpang;</p> <p>d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa peti kemas, barang curah, <i>multi-purpose</i>, penumpang, dan <i>ro-ro</i>;</p> <p>e. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang termasuk curah, angkutan bandar, alat bongkar-muat, peralatan pelabuhan, serta peralatan penunjang lainnya;</p> <p>f. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri, dan gedung-gedung/ bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan multimoda;</p> <p>g. Penyediaan dan/atau pelayanan utilitas pelabuhan termasuk tetapi tidak terbatas pada telekomunikasi, listrik, air minum/air kapal, instalasi limbah, serta pengelolaan sampah;</p> <p>h. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal dan kendaraan di lingkungan Pelabuhan;</p> <p>i. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan serta pelayananan logistik;</p> <p>j. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;</p> <p>k. Perusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, <i>cleaning</i> fumigasi;</p> <p>l. Perusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara;</p> <p>m. Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, perusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gedung, pas, dan parkir), serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal peti kemas, barang curah, dan <i>multi-purpose</i>;</p> <p>n. Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas, barang curah, dan <i>multi-purpose</i>; dan</p> <p>o. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan logistik untuk terminal peti kemas, barang curah, dan <i>multi-purpose</i>.</p> | <p>a. <i>Provision and/or services of port pools and waters for ship traffic and berthing;</i></p> <p>b. <i>Provision and/or services related to ship pilotage and tugging;</i></p> <p>c. <i>Provision and/or services for ship operations (loading-unloading), field and warehouse operations, as well as the provision and services of mooring, docking, container stacking, bulk goods, general cargo (including animals), and vehicles (ro-ro), bulk and multipurpose goods, as well as passenger loading and unloading;</i></p> <p>d. <i>Provision and/or services of containers, bulk goods, multipurpose, passengers, and ro-ro;</i></p> <p>e. <i>Provision and/or services of warehouses, stacking fields, and tanker including bulks, port transportation, loading-unloading equipment, port equipment, and other supporting equipment;</i></p> <p>f. <i>Land provision and/or services for many buildings and fields, industries, and buildings related to the seamless multimodal transportation;</i></p> <p>g. <i>Port utility provision and/or services including but not limited to telecommunication, electricity, drinking water/ship water, waste facility installation, and waste management.</i></p> <p>h. <i>Provision and/or services of fuel filling for ships and vehicles in the port areas;</i></p> <p>i. <i>Provision and/or services of goods consolidation and distribution including animal and logistics;</i></p> <p>j. <i>Provision and/or services of port-related consulting, education, and training;</i></p> <p>k. <i>The business and operations of container depots and repair as well as cleaning and fumigation;</i></p> <p>l. <i>The business of customs area and temporary stacking field;</i></p> <p>m. <i>Planning and development, management, enterprising and marketing new services, miscellaneous businesses (building and parking space rental), and other services related to container terminals, bulk goods, and multipurpose;</i></p> <p>n. <i>Provision, operations, and maintenance of facilities and equipment for container loading and unloading, bulk goods, and multipurpose; and</i></p> <p>o. <i>Financial and logistics planning and management for container terminals, bulk goods, and multipurpose.</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKTIVITAS USAHA TTL TAHUN 2019

Secara keseluruhan arus peti kemas mengalami peningkatan 12% dibanding tahun 2018. Arus peti kemas internasional TTL meningkat sebesar 6% dari yang semula 321.977 TEUs menjadi 341.498 TEUs. Arus peti kemas domestik mengalami peningkatan 18% dari semula 314.909 TEUs menjadi 372.936 TEUs. Hal yang sama terjadi pada operasional curah kering meningkat 13% menjadi 2.882.102 ton selama tahun 2019.

TTL BUSINESS ACTIVITIES IN 2019

Overall, the container flows increased by 12% compared to that in 2018. The international container flows in TTL increased by 6% from 321,977 TEUs to 341,498 TEUs. The domestic container flows increased by 18% from 314,909 TEUs to 372,936 TEUs. Similarly, the dry bulk operations experienced a 13% increase to 2,882,102 tonnes in 2019.

Atas kinerja dan pelayanan tahun 2019, TTL berhasil mendapatkan penghargaan antara lain:

1. Top Digital Awards untuk kategori Top Leader dan Top Digital Implementation 2019 on Logistic & Transportation.
2. Silver Award pada SNI.
3. Green Port Award dari Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Zero Accident dari Gubernur Jawa Timur.
5. Great Woman on Fire dari Majalah SWA.
6. Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Propinsi Jatim dalam hal Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

KINERJA TTL TAHUN 2019

Pada tahun 2019, TTL mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp772 miliar, naik Rp75 miliar atau 10,8% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp697 miliar. Peningkatan pada pendapatan tersebut menyebabkan laba bersih TTL pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp15 miliar, menjadi Rp218 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp203 miliar. Perubahan pada laba bersih terutama disebabkan oleh meningkatnya arus peti kemas, kapal, dan juga curah kering yang dilayani oleh TTL.

Sementara itu, jumlah aset TTL tahun 2019 tercatat sebesar Rp665 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp191 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp473 miliar. Peningkatan terbesar dapat dilihat dari jumlah ekuitas pada tahun 2019 disebabkan oleh kenaikan signifikan saldo laba karena membaiknya performa bisnis TTL.

For its 2019 performance and services, TTL achieved the following awards:

1. The Top Digital Awards in the category of Top Leader and Top Digital Implementation 2019 on Logistics & Transportation.
2. Silver Award of SNI.
3. Green Port Award from the Indonesian Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investments.
4. Zero Accident from the Governor of East Java.
5. Great Woman on Fire from SWA Magazine.
6. An award from the Indonesian Ministry of Manpower and the East Java Provincial Government for the Prevention and Treatment of HIV/AIDS at the workplace.

TTL PERFORMANCE IN 2019

In 2019, TTL achieved a Rp772 billion revenue, a Rp75 billion or 10.8% increase from Rp697 billion in 2018, increasing TTL's net profit in 2019 by Rp15 billion, resulting in a net profit of Rp218 billion from Rp203 billion in 2018. The increase in net profit is mainly caused by the increasing container flows, ships, and dry bulk services delivered by TTL.

Meanwhile, TTL's assets in 2019 are Rp665 billion, the liabilities are Rp191 billion, and the equity is Rp473 billion. The largest increase comes from total equity in 2019 as a result of a significant rise in profit balance due to the improvement of TTL's business performance.

KINERJA PT TERMINAL TELUK LAMONG PERFORMANCE OF PT TERMINAL TELUK LAMONG

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha Revenue	772.568	697.095	75.473	10,83
Beban Usaha Operating Expenses	493.287	436.936	56.351	12,90
Laba Usaha Operating Profit	279.281	260.159	19.122	7,35
Beban Pajak Tax Expenses	71.241	65.497	5.745	8,77
Laba Bersih Net Income	218.641	203.590	15.051	7,39
Jumlah Aset Total Assets	665.022	566.120	98.902	17,47
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	191.385	266.475	(75.090)	(28,18)
Jumlah Ekuitas Total Equity	473.637	299.645	173.992	58,07

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari TTL pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp86,9 miliar atau 39,8% dari jumlah laba bersih TTL tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 – hal ini sejalan dengan kenaikan pendapatan TTL di tahun 2019.

PROVIDED DIVIDENDS

The dividends received by Pelindo III from TTL in 2019 are Rp86.9 billion or 39.8% of its total net profit in 2019. The amount increased from that in 2018 along with TTL's revenue increase in 2019.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT TERMINAL TELUK LAMONG

DIVIDEND PROVIDED BY PT TERMINAL TELUK LAMONG

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Laba Bersih Net Income	218.545	193.750	24.795	12,80
Dividen Dividend	86.981	77.112	9.868	12,80
Payout Ratio	39,80%	39,80%	-	-

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) merupakan Anak Perusahaan yang menaungi tenaga kerja alih daya di lingkungan Perusahaan. PDS didirikan atas dasar komitmen Perusahaan untuk menjamin kesejahteraan pegawainya baik organik maupun alih daya. Melalui PDS, Pelindo III Group berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja alih daya di lingkungan Pelindo III Group.

Fokus utama PDS adalah memberikan layanan kepada industri kepelabuhanan dan industri pelayaran. Secara bertahap, cakupan dan jenis layanan dikembangkan ke Perusahaan atau institusi bisnis lain. PDS aktif mengadakan pelatihan dan pengembangan dan saat ini telah mendirikan anak perusahaan yang khusus menyediakan tenaga kerja *tally* di Semarang dengan nama PT Tanjung Emas Daya Sejahtera.

Saat ini, PDS tidak hanya menyediakan tenaga alih daya yang menangani kegiatan industri kepelabuhanan tetapi juga *non-core* yang meliputi tetapi tidak terbatas pada *tally*, sekretaris, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, operator alat hingga ke *entry data services*. Sebagai penyedia tenaga alih daya, PDS aktif mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM PDS sehingga dapat mendukung kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, PDS bergerak dalam jasa penyediaan tenaga kerja. Untuk mencapai hal tersebut Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa kebersihan;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa ekspedisi, pengepakan, dan pergudangan;

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) is a Subsidiary providing outsourced employees in the Company's environment. PDS is established through the Company's commitment to guaranteeing the well-being of its employees, both organic and outsourcing. Through PDS, Pelindo III Group is committed to guaranteeing the well-being of outsourced employees in the environment of Pelindo III Group.

PDS's main focus is to provide service for the port and shipping industries. The service scope and types are gradually developed for the Company or other business institutions. PDS actively conduct training and development, and currently, it has established a subsidiary specifically providing *tally* employees in Semarang under the name of PT Tanjung Emas Daya Sejahtera.

Currently, PDS provides outsourced employees handling not only port industry activities but also non-core activities, including but not limited to *tallying*, secretary, security, cleaning service, equipment operator, and entry data services. As a provider for outsourced employees, PDS actively carries out training to increase its HR competence and abilities to support the entire performance of the Company.

Based on Article 3 of the Articles of Association, PDS engages in employee provision. To achieve that, the Company carries out the following business activities:

- Carrying out cleaning service business;
- Carrying out business in expeditions, packing, and warehousing services;

- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa keamanan;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penerimaan dan penyaluran tenaga kerja;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penjahitan pakaian;
- f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa fotokopi;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penjualan tiket dan tur;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyewaan kendaraan roda empat; dan
- i. Menjalankan jasa pendidikan dan pelatihan.

AKTIVITAS USAHA PDS TAHUN 2019

Melanjutkan ekspansi bisnis ke luar *captive market* yang telah dimulai pada tahun 2018, di tahun 2019 kerja sama dengan beberapa pihak eksternal juga bertambah secara signifikan. Di awal tahun 2019, PDS bekerja sama dengan KSOP Banjarmasin dalam penyediaan tenaga alih daya serta layanan kebersihan. Pelindo Development Center sebagai unit usaha yang menangani asesmen, pelatihan, dan konsultasi kembali melaksanakan Diklat Pandu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; serta Diklat *Rigger* untuk Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan Puskopala Koarmada II Surabaya.

Pada Triwulan IV, PDS menambah daftar pasar eksternal melalui kerja sama dengan PT Dok dan Pekapalan Surabaya (DPS) dalam bidang penyediaan tenaga kerja. Di penghujung tahun 2019, komitmen PDS untuk menyediakan pelayanan terbaik dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu yang tentunya meningkatkan kredibilitas PDS di hadapan pengguna jasa. Tahun 2019 ditutup dengan manis, PDS juga berhasil meraih penghargaan Zero Accident Award dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

KINERJA PDS TAHUN 2019

Pada tahun 2019, PDS mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp458 miliar, naik Rp104 miliar atau 29% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp354 miliar. Beban usaha mengalami peningkatan 26% atau sebesar Rp90 miliar menjadi Rp427 miliar, hal ini sejalan dengan naiknya pendapatan. Dengan demikian, laba bersih PDS tahun 2019 tercatat sebesar Rp21,9 miliar atau meningkat sebesar 92% dibandingkan laba bersih tahun 2018.

Sementara itu, jumlah aset PDS tahun 2019 tercatat sebesar Rp167 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp97 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp69 miliar. Perubahan terbesar dapat dilihat dari jumlah aset lancar pada tahun 2019 yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang masih akan diterima dari pihak berelasi dan pihak ketiga.

- c. Carrying out business in security services;
- d. Carrying out business in employee admission and distribution services;
- e. Carrying out business in clothes tailoring services;
- f. Carrying out business in photocopy services;
- g. Carrying out business in ticketing and tour services;
- h. Carrying out business in four-wheel vehicle rent; and
- i. Carrying out education and training services.

PDS BUSINESS ACTIVITIES IN 2019

Continuing its business expansion outside the captive market since 2018, the cooperations with several external parties has increased significantly. In early 2019, PDS cooperates with KSOP Banjarmasin in providing outsourced employees for cleaning service. Pelindo Development Center as a business unit handling assessment, training, and consulting once again carries out Pilotage Training with the General Directorate of Sea Transportation and the Ministry of transportation as well as the Rigger Training for Loading-Unloading Employees for Puskopala Koarmada II Surabaya.

In Quarter IV, PDS increased its external market through its cooperation with PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) in employee provision. At the end of 2019, PDS shows its commitment to providing the best service by acquiring the ISO 9001:2015 Certification for Quality Management System which increases its credibility in the eyes of the service users. The year 2019 was ended with a brilliant achievement by the Zero Accident Award PDS received from the Office of Manpower and Transmigration of the East Java Province.

PDS PERFORMANCE IN 2019

In 2019, PDS achieved a Rp458 billion revenue, a Rp104 billion or 29% increased from Rp354 billion in 2018. The operating expenses increased by 26% or Rp90 billion to Rp427 billion along with the revenue increase. Therefore, PDS's net revenue in 2019 is Rp21.9 billion, a 92% increase from the 2018 net profit.

Meanwhile, PDS's assets in 2019 are Rp167 billion, the liabilities are Rp97 billion, and the equity is Rp69 billion. The most significant change can be seen in total current assets in 2019 due to the increase in accrued revenue from related parties and third parties.

KINERJA PT PELINDO DAYA SEJAHTERA PERFORMANCE OF PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pendapatan Usaha Revenue	458.582	354.339	104.243	29,42
Beban Usaha Operating Expenses	427.843	337.222	90.621	26,87
Laba Usaha Operating Profit	30.738	17.118	13.620	79,57
Beban Pajak Tax Expenses	7.637	5.766	1.871	32,45
Laba Bersih Net Income	21.932	11.411	10.521	92,20
Jumlah Aset Total Assets	167.484	110.815	56.669	51,14
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	97.720	59.322	38.398	64,73
Jumlah Ekuitas Total Equity	69.764	51.493	18.271	35,48

DIVIDEN YANG DIBERIKAN

Jumlah dividen yang diperoleh Perusahaan dari PDS pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp3,9 miliar atau 18% dari jumlah laba bersih PDS tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,94% bila dibandingkan dengan dividen tahun 2018.

PROVIDED DIVIDENDS

The dividends that the Company received from PDS in 2019 are Rp3.9 billion, 18% of PDS's net profit in 2019. The amount increased by 9.94% from the 2018 dividends.

DIVIDEN YANG DIBERIKAN PT PELINDO DAYA SEJAHTERA DIVIDENDS PROVIDED BY PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Laba Bersih Net Income	21.887	11.376	10.511	92,40
Dividen Dividend	3.940	3.583	357	9,96
Payout Ratio	18,00%	31,50%	-	-

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL OVERVIEW

Tinjauan kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Pelindo III yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian Pelindo III dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

This financial performance description is prepared based on the Consolidated Financial Statement of Pelindo III presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia for the year ended on 31 December 2019. The financial statements have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja with an unqualified opinion. The consolidated financial position of Pelindo III and its Subsidiaries as of 31 December 2019, as well as financial performance and consolidated cash flows for the year ended on the date, are in accordance with the Financial Accounting Standard in Indonesia.

Discussion of the Company's financial performance is submitted by taking into account the explanation on notes to the Consolidated Financial Statements from the external auditor as an inseparable part of this Annual Report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah aset dan liabilitas per 31 Desember 2019 Audited sebesar Rp30,75 triliun. Bila dibandingkan dengan posisi neraca per 31 Desember 2018 Audited mencapai 101% disebabkan kenaikan Aset Tetap-Bersih dan Aset tak berwujud, sedangkan dari sisi Liabilitas dan Ekuitas terdapat kenaikan saldo laba dicadangkan dan belum dicadangkan.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

The total audited assets and liabilities as of 31 December 2019 is Rp30.75 trillion. When compared with the audited balance sheet as of 31 December 2018, it reached 101% due to increase in Fixed Assets-Net and Intangible Assets, as well as the reserved and unreserved increase in retained earnings from Liabilities and Equities.

LAPORAN POSISI KEUANGAN 2018-2019

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Aset Assets	30.755.914	30.505.716	250.198	101%
• Aset Lancar <i>Current Assets</i>	5.407.567	6.462.869	(1.055.302)	84%
• Aset Tidak Lancar <i>Non-Current Assets</i>	25.348.347	24.042.847	1.305.500	105%
Liabilitas Liabilities	19.709.051	20.150.402	(441.351)	98%
• Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i>	3.265.197	3.574.313	(309.116)	91%
• Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i>	16.443.854	16.576.088	(132.234)	99%
Ekuitas Equity	11.046.863	10.355.314	691.549	107%

ASET

Pada akhir tahun 2019, jumlah aset Perusahaan tercatat sebesar Rp30,7 triliun yang terdiri dari 18% aset lancar dan 89% aset tidak lancar. Nilai jumlah aset ini meningkat Rp250 miliar atau 1% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp30,5 triliun. Peningkatan aset tersebut terutama berasal dari realisasi investasi dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud.

ASET LANCAR

Per 31 Desember 2019, Pelindo III berhasil mencatatkan jumlah aset lancar sebesar Rp5,41 triliun, turun Rp1,05 triliun atau 16% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp6,46 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas karena aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

ASET LANCAR 2018-2019 CURRENT ASSETS FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	3.644.611	4.612.047	(967.436)	79%
Investasi Jangka Pendek Short-Term Investment	27.940	57.920	(29.980)	48%
Piutang Usaha Trade Receivables	823.075	856.737	(33.662)	96%
Piutang Lain-Lain Other Receivables	310.675	298.768	11.907	104%
Persediaan Inventories	84.546	52.115	32.431	162%
Pendapatan Masih akan Diterima Accrued Revenues	217.281	317.663	(100.382)	68%
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	85.023	98.388	(13.365)	86%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	173.776	146.710	27.066	118%
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	40.640	22.519	18.121	180%
Jumlah Total	5.407.567	6.462.869	(1.055.304)	84%

ASSETS

At the end of 2019, the total Company assets are recorded at Rp30.7 trillion consisting of 18% of current assets and 89% of non-current assets. The total asset has increased by Rp250 billion or 1% compared to that of 2018 at Rp30.5 trillion. The increase in assets is mainly from investment realisation in the form of fixed assets and intangible assets.

CURRENT ASSETS

As of 31 December 2019, Pelindo III successfully recorded current assets amounting to Rp5.41 trillion, a decrease of Rp1.05 trillion or 16% compared to that of 31 December 2018 at Rp6.46 trillion. The decrease is mainly caused by a decrease in cash and cash equivalents due to investment and financing activities.

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp3,64 triliun, turun Rp967 miliar atau 21% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp4,61 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh *cash outflow* dari aktivitas investasi dan defisit aktivitas pendanaan serta pengaruh perubahan kurs mata uang asing.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents up to the end of 2019 are recorded at Rp3.64 trillion, down by Rp967 billion or 21% when compared to that of 31 December 2018 at Rp4.61 trillion. The decrease is mainly caused by cash outflow from investment activities, a deficit from financing activities, as well as the effect of change in foreign exchange rates.

KAS DAN SETARA KAS 2018-2019
CASH AND CASH EQUIVALENTS FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Kas Cash	14.989	2.107	12.882	711%
Bank	478.299	657.440	(179.141)	73%
Deposito Berjangka Time Deposits	3.151.322	3.952.500	(801.178)	80%
Jumlah Total	3.644.611	4.612.047	(967.436)	79%

INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek tercatat menurun sebesar Rp29,9 miliar atau 52% menjadi Rp27,9 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp57,9 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengalihan deposito berjangka menjadi kas dan setara kas guna pembayaran investasi.

SHORT-TERM INVESTMENT

Short-term investment is recorded to decrease by Rp29.9 billion or 52% into Rp27.9 billion as of 31 December 2019 when compared to that at the end of 2018 at Rp57.9 billion. The decrease is mainly caused by the transfer of time deposits into cash and cash equivalents for investment payment.

PIUTANG USAHA

Piutang usaha tercatat menurun sebesar Rp33,6 miliar atau 4% menjadi Rp823 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp857 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyisihan piutang kepada BUMN terkait sewa lahan.

TRADE RECEIVABLES

Trade receivables decreased by Rp33.6 billion or 4% into Rp823 billion as of 31 December 2019 when compared to that at the end of 2018 at Rp857 billion. The decrease is due to receivables allowance to SOEs related to the land lease.

PIUTANG USAHA 2018-2019
TRADE RECEIVABLES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pihak Berelasi Related Parties	308.956	340.360	(31.404)	91%
Pihak Ketiga Third Parties	514.119	516.377	(2.258)	100%
Jumlah Total	823.075	856.737	(33.662)	96%

PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang tercatat meningkat sebesar Rp11 miliar atau 4% menjadi Rp310 miliar bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp298 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada entitas asosiasi.

OTHER RECEIVABLES

Other receivables increased by Rp11 billion or 4% into Rp310 billion when compared to that at the end of 2018 at Rp298 billion. The increase is due to lending to an associate entity.

PIUTANG LAIN-LAIN 2018-2019 OTHER RECEIVABLES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pihak Berelasi Related Parties	269.898	262.531	7.367	103%
Pihak Ketiga Third Parties	40.777	36.237	4.540	113%
Jumlah Total	310.675	298.768	11.907	104%

PERSEDIAAN

Persediaan tercatat meningkat sebesar Rp32 miliar atau 62% menjadi Rp84 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp52 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan suku cadang sebesar 87%.

INVENTORIES

Inventories were recorded to rise by Rp32 billion or 62% into Rp84 billion as of 31 December 2019 when compared to that at the end of 2018 at Rp52 billion. The increase is mainly due to the increase in spare parts inventories by 87%.

PERSEDIAAN 2018-2019 PERSEDIAAN 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Suku Cadang Spare Parts	73.305	39.183	34.122	187%
Obat Medis Medicine	4.739	3.234	1.505	147%
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	5.589	7.726	(2.137)	72%
Lain-lain Others	1.820	3.113	(1.293)	58%
Subtotal	85.453	53.256	32.197	160%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Loss	(907)	(1.141)	234	79%
Jumlah Total	84.546	52.115	32.431	162%

PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

Pendapatan masih akan diterima merupakan pendapatan yang belum difakturkan. Jumlah pendapatan masih akan diterima tercatat menurun sebesar Rp100 miliar atau 32% menjadi Rp217 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp318 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh intensifnya *approval* nota kegiatan jasa kepelabuhanan yang telah selesai s.d. tanggal 31 Desember 2019.

BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Beban dibayar dimuka tercatat menurun sebesar Rp13 miliar atau 14% menjadi Rp85 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp98 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban pegawai yang sebagian besar telah terealisasi s.d. 31 Desember 2019.

BEBAN DIBAYAR DI MUKA 2018-2019**PREPAID EXPENSES FOR 2018-2019**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pemindahan tempat penimbunan peti kemas <i>Container yard relocation</i>	43.751	-	43.751	-
Pegawai <i>Personnel</i>	17.783	58.296	(40.513)	31%
Asuransi <i>Insurance</i>	15.551	19.685	(4.134)	79%
Lainnya <i>Others</i>	7.938	20.408	(12.470)	39%
Jumlah Total	85.023	98.388	(13.365)	86%

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pajak dibayar di muka tercatat meningkat sebesar Rp27 miliar atau 18% menjadi Rp174 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp147 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 Perusahaan baru memperoleh fasilitas perpajakan bebas pemotongan PPh Pasal 23 di bulan Mei 2019 sedangkan tahun 2018 diperoleh sejak bulan Februari 2018.

ASET TIDAK LANCAR

Per 31 Desember 2019, Perusahaan mencatatkan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp25 triliun, naik Rp1,3 triliun atau 5% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp24 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada aset pajak tangguhan, yaitu sebesar 66%.

ACCRUED REVENUES

Accrued revenues represent unbilled revenue. The total of accrued revenues decreased by Rp100 billion or 32% into Rp217 billion as of 31 December 2019 when compared to that at the end of 2018 at Rp318 billion. The decrease is mainly due to the intensiveness of port service activity memorandum approval done up to 31 December 2019.

PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses decreased by Rp13 billion or 14% into Rp85 billion as of 31 December 2019 when compared to that at the end of 2018 at Rp98 billion. The decrease is mainly caused by employee expenses that were mainly realised up to 31 December 2019.

PREPAID TAXES

Prepaid Taxes increased by Rp27 billion or 18% into Rp174 billion as of 31 December 2019 when compared to that at the end of 2018 at Rp147 billion. The increase is due to the free taxation fee facility received based on Article 23 of PPh in May 2019 for the 2019 fiscal year, while in 2019 it was received since February 2018.

NON-CURRENT ASSETS

As of 31 December 2019, the Company recorded non-current assets of Rp25 trillion, up by Rp1.3 trillion or 5% when compared to that as of 31 December 2018 at Rp24 trillion. The increase is mainly caused by a significant increase in deferred tax at 66%.

ASET TIDAK LANCAR 2018-2019 NON-CURRENT ASSETS FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Investasi pada Entitas Asosiasi <i>Investments in Associates</i>	1.156.556	1.090.566	65.989	106%
Properti Investasi <i>Investment Properties</i>	101.880	103.268	(1.388)	99%
Aset Tetap <i>Fixed Assets</i>	16.791.363	16.231.547	559.816	103%
Aset Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Assets</i>	437.436	263.407	174.029	166%
Aset Tak Berwujud <i>Intangible Assets</i>	6.056.750	5.147.470	909.280	118%
Estimasi Tagihan Pajak <i>Estimated Claims for Tax Refund</i>	215.985	430.661	(214.676)	50%
Aset Tidak Lancar Lainnya <i>Other Non-Current Assets</i>	588.377	775.928	(187.551)	76%
Jumlah Total	25.348.347	24.042.847	1.305.500	105%

INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Investasi pada entitas asosiasi sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp1,16 triliun, naik Rp66 miliar atau 6% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp1,09 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan investasi pada PT Lamong Nusantara Gas di tahun 2019.

INVESTMENTS IN ASSOCIATED ENTITIES

Investment in associated entities up to the end of 2019 is recorded at Rp1.16 trillion, up by Rp66 billion or 6% compared to that as of 31 December 2018 at Rp1.09 trillion. The increase is mainly caused by the additional investment at PT Lamong Nusantara Gas in 2019.

INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 2018-2019 INVESTMENTS IN ASSOCIATED ENTITIES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	925.600	909.525	16.075	102%
PT Terminal Nilam Utara	60.726	68.786	-8.060	88%
PT Jasamarga Bali Tol (JBT)	46.515	60.549	-14.034	77%
PT Terminal Petikemas Indonesia	32.969	32.588	381	101%
PT Ambang Barito Nusapersada	19.545	18.797	748	104%
PT Energi Manyar Sejahtera	331	321	10	103%
PT Portek Indonesia	-	-	-	-
PT Lamong Nusantara Gas	70.869	-	-	-
Jumlah Total	1.156.556	1.090.566	65.990	106%

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp101 miliar. Angka tersebut relatif sama dengan kondisi di tahun 2018.

ASET TETAP

Aset tetap tercatat meningkat sebesar Rp559 miliar atau 3% menjadi Rp16,79 triliun per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp16,23 triliun.

ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset pajak tangguhan tercatat naik sebesar Rp174 miliar atau 66% menjadi Rp437 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp263 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan karena terdapat pemulihan rugi fiskal tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp69 miliar, pengakuan rugi fiskal tahun 2017 sebesar Rp66 miliar, serta biaya penyusutan/amortisasi fiskal di atas biaya penyusutan/amortisasi komersial yang meningkatkan aset pajak tangguhan sebesar Rp70 miliar.

ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud pada 2019 tercatat sebesar Rp6,05 triliun, naik sebesar Rp909 miliar atau 18% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp5,15 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan aset konsesi (berupa pembangunan dermaga Gilimas Lombok dan pembangunan infrastruktur PT Berlian Manyar Sejahtera) dan piranti lunak.

ESTIMASI TAGIHAN PAJAK

Estimasi Tagihan Pajak tercatat menurun sebesar Rp214 miliar atau 50% menjadi Rp215 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp430 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan Perusahaan telah menerima pengembalian/restitusi dari Negara atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2014 sebesar Rp21 miliar, tahun 2017 sebesar Rp159 miliar, dan tahun 2018 sebesar Rp35 miliar.

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya tercatat menurun sebesar Rp187 miliar atau 24% menjadi Rp588 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp775 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh uang muka pembelian aset tetap telah terkompensasi dengan tagihan progres fisiknya.

INVESTMENT PROPERTIES

Up to the end of 2019 investment properties is recorded at Rp101 billion. The figure is relatively similar to that of the 2018 condition.

FIXED ASSETS

Fixed assets increased by Rp559 billion or 3% into Rp16.79 trillion as of 31 December 2019 when compared to the end of 2018 at Rp16.23 trillion.

DEFERRED TAX ASSETS

Deferred tax assets increased by Rp174 billion or 66% into Rp437 billion as of 31 December 2019 when compared to that at the end of 2018 at Rp263 billion. The increase is mainly caused by fiscal losses recovery for the year 2015 and 2016 at Rp69 billion, fiscal loss recognition for the year 2017 of Rp66 billion, as well as fiscal depreciation/amortization fee above the cost of commercial depreciation/amortization which increased the deferred tax assets by Rp70 billion.

INTANGIBLE ASSETS

The 2019 intangible assets are recorded at Rp6.05 trillion, up by Rp909 billion or 18% when compared to the end of 2018 at Rp5.15 trillion. The increase is due to the additional concession assets (in a form of Gilimas Lombok wharf construction and infrastructure construction at PT Berlian Manyar Sejahtera) and software.

ESTIMATED CLAIMS FOR TAX REFUND

Estimated claims for tax refund decreased by Rp214 billion or 50% into Rp215 billion as of 31 December 2019 when compared to the end of 2018 at Rp430 billion. The decrease is mainly caused by the refund/restitution for tax overpayment from the State for the year 2014 amounted to Rp 21 billion, for the year 2017 amounted to Rp159 billion, and for the year 2018 amounted to Rp35 billion.

OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets decreased by Rp187 billion or 24% into Rp588 billion as of 31 December 2019 when compared to the end of 2018 at Rp775 billion. The decrease is mainly caused by a deposit for fixed asset payment that is compensated with its physical progress bill.

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 2018-2019 OTHER NON-CURRENT ASSETS FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Piutang dalam Kepengurusan Negara <i>Receivable from the State Management</i>	17.636	17.636	-	-
Penyisihan Piutang dalam Kepengurusan Negara <i>Allowances of Receivable from the State Management</i>	(17.636)	(17.636)	-	-
Subtotal	0	0	-	-
Uang Muka Pembelian Aset Tetap <i>Advance for Purchase Fixed Assets</i>	406.371	676.634	(270.263)	60%
Aset Lain-Lain – Neto <i>Other Assets – Net</i>	182.006	99.294	82.712	183%
Jumlah Total	588.377	775.928	(187.551)	76%

LIABILITAS

Pada akhir tahun 2019, jumlah liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp19,7 triliun yang terdiri dari 17% liabilitas jangka pendek dan 83% liabilitas jangka panjang. Nilai jumlah liabilitas ini menurun Rp441 miliar atau 2% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp20,1 triliun. Penurunan liabilitas tersebut terutama berasal turunnya nilai liabilitas jangka pendek sebesar 9%. Selain itu, liabilitas jangka panjang juga turut menurun sebesar 1% sampai dengan akhir tahun 2019.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Per 31 Desember 2019, Perusahaan mencatatkan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,26 triliun, turun Rp309 miliar atau 9% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp3,57 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya liabilitas jangka pendek lainnya.

LIABILITIES

At the end of 2019, the Company's total liabilities are recorded at Rp19.7 trillion that consists of 17% of current liabilities and 83% of non-current liabilities. The total liabilities figure decreased by Rp441 billion or 2% compared to that of 2018 at Rp20.1 trillion. The decrease is mainly caused by a 9% decrease in current liabilities. Moreover, non-current liabilities also decreased by 1% up to the end of 2019.

CURRENT LIABILITIES

As of 31 December 2019, the Company recorded a total of current liabilities at Rp3.26 trillion, down by Rp309 billion or 9% compared to 31 December 2018 at Rp3.57 trillion. The increase is mainly caused by an increase in other current liabilities.

LIABILITAS JANGKA PENDEK 2019

CURRENT LIABILITIES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pinjaman Bank Jangka Pendek <i>Short-Term Bank Loans</i>	-	-	-	-
Utang Usaha <i>Trade Payables</i>	630.349	606.560	23.789	104%
Utang Lain-Lain <i>Other Payables</i>	789.967	698.913	91.054	113%
Utang Pajak <i>Tax Payables</i>	164.854	260.741	(95.887)	63%
Beban Akrua <i>Accrued Expenses</i>	1.110.512	1.287.510	(176.998)	86%
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Pendek <i>Short-term Unearned Revenue</i>	292.260	306.552	(14.292)	95%
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang <i>Current Maturity of Long-Term Liabilities</i>	162.163	413.954	(251.791)	39%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya <i>Other Current Liabilities</i>	115.092	82	115.010	140356%
Jumlah Total	3.265.197	3.574.313	(309.116)	91%

UTANG USAHA

Utang usaha sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp630 miliar, naik Rp23 miliar atau 4% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp606 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya utang usaha pada pihak berelasi sebesar 8%.

TRADE PAYABLES

Trade payables up to the end of 2019 are recorded at Rp630 billion, up by Rp23 billion or 4% compared to 31 December 2018 at Rp606 billion. The increase is mainly caused by the 8% increase in trade payables on third parties.

UTANG USAHA 2018-2019 TRADE PAYABLES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pihak Berelasi Related Parties	568.634	527.416	41.218	108%
Pihak Ketiga Third Parties	61.715	79.144	(17.429)	78%
Jumlah Total	630.349	606.560	23.789	104%

UTANG PAJAK

Utang pajak sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp164 miliar, turun Rp95 miliar atau 37% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp260 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena realisasi pembayaran kepada rekanan pada bulan Desember 2019 lebih kecil dibandingkan realisasi pembayaran kepada rekanan pada bulan Desember 2018.

BEBAN AKRUAL

Beban akrual tercatat menurun sebesar Rp176 miliar atau 14% menjadi Rp1,11 triliun per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp1,29 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh terealisasinya pembayaran tagihan beban akrual ke pihak ketiga.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK

Pendapatan diterima di muka jangka pendek tercatat menurun sebesar Rp14 miliar atau 5% menjadi Rp292 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp306 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan uang di muka dari pelanggan yang telah diakui sebagai pendapatan sesuai masanya.

TAX PAYABLES

Up to the end of 2019, tax payables are recorded at Rp164 billion, down by Rp95 billion or 37% compared to that of 31 December 2018 at Rp260 billion. The decrease is mainly caused by payment realisation to partners in December 2019 that is less than the payment realisation to partners in December 2018.

ACCRUED EXPENSES

Accrued Expenses decreased by Rp176 billion or 14% into Rp1.11 trillion as of 31 December 2019 when compared to the end of 2018 at Rp1.29 billion. The decrease is due to the realisation of accrued expenses paid to third parties.

SHORT-TERM UNEARNED REVENUE

Short-term unearned revenue is recorded to decrease by Rp14 billion or 5% into Rp292 billion as of 31 December 2019 compared to the end of 2018 at Rp306 billion. The decrease is mainly caused by receipt of money in advance from customers that are recognised as revenue according to its period.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK 2018-2019

SHORT-TERM UNEARNED REVENUE FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Uang untuk Diperhitungkan: <i>Advances from Customers:</i>	189.985	226.439	(36.454)	84%
Pihak Ketiga <i>Third Parties</i>	149.827	191.087	(41.260)	78%
Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	40.158	35.352	4.806	114%
Pelayanan Jasa Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik <i>Land, Building, Water, and Electricity Service</i>	39.038	26.699	12.339	146%
Lain-lain <i>Others</i>	-	650	-	-
Bagian Lancar Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang <i>Current Portion of Long-Term Unearned Revenue</i>	63.237	52.764	10.473	120%
Jumlah Total	292.260	306.552	(14.292)	95%

BAGIAN LANCAR ATAS LIABILITAS JANGKA PANJANG

Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang tercatat menurun sebesar Rp252 miliar atau 61% menjadi Rp162 miliar per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp414 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh pinjaman *export credit* fasilitas A ke Deutsche Bank yang telah lunas pada tahun 2019.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2019, Perusahaan mencatatkan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp16,44 triliun, turun Rp135 miliar atau 1% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp16,58 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran angsuran pokok pinjaman *export credit* ke Deutsche Bank.

CURRENT PORTION OF NON-CURRENT LIABILITIES

Current portion of non-current liabilities decreased by Rp252 billion or 61% into Rp162 billion as of 31 December 2019 when compared to the end of 2018 at Rp414 billion. The decrease is due to export credit facility A loan to Deutsche Bank that has been paid off in 2019.

NON-CURRENT LIABILITIES

As of 31 December 2019, the Company recorded a total of Rp16.44 trillion of non-current liabilities, down by Rp135 billion or 1% compared to that as of 31 December 2018 at Rp16.58 trillion. The decrease is mainly due to the payment of principal instalment for export credit loan to Deutsche Bank.

LIABILITAS JANGKA PANJANG 2018-2019 NON-CURRENT LIABILITIES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Liabilitas Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Liabilities</i>	59.926	63.213	(3.287)	95%
Liabilitas Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian lancar: <i>Long-Term Liabilities – Net of Current Maturities:</i>				
Utang Bank <i>Bank Loans</i>	81.764	256.387	(174.623)	32%
Utang Sewa Pembiayaan <i>Finance Lease Liability</i>	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan <i>Securities Issued</i>	13.784.415	14.329.613	(545.198)	96%
Liabilitas Imbalan Kerja <i>Employee Benefits Liabilities</i>	2.161.034	1.572.168	588.866	137%
Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang <i>Unearned Revenue</i>	354.991	353.005	1.986	101%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya <i>Other Non-Current Liabilities</i>	1.724	1.702	22	101%
Jumlah Total	16.443.854	16.576.088	(132.234)	99%

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp60 miliar, naik Rp3 miliar dibandingkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp63 miliar.

SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN

Surat berharga yang diterbitkan tercatat menurun sebesar Rp545 miliar atau 4% menjadi Rp13,8 triliun per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp14,3 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan karena menguatnya kurs penutupan per 31 Desember 2019 dibandingkan kurs penutupan per 31 Desember 2018.

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja tercatat meningkat sebesar Rp588 miliar atau 37% menjadi Rp2,2 triliun per 31 Desember 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp1,6 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pengakuan pencadangan saldo program Kesehatan Pensiunan sesuai perhitungan Aktuarial.

DEFERRED TAX LIABILITIES

Deferred tax assets as of the end of 2019 stood at Rp60 billion, increased by Rp3 million compared to that of 31 December 2018 at Rp63 billion.

SECURITIES ISSUED

Securities issued decreased by Rp545 billion or 4% into Rp13.8 trillion as of 31 December 2019 when compared to the end of 2018 at Rp14.3 trillion. The decrease is mainly caused by the strengthening closing exchange rate as of 31 December 2019 compared to the closing exchange rate as of 31 December 2018.

EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY

Employee benefit liability increased by Rp588 billion or 37% into Rp2.2 trillion as of 31 December 2019 compared to the end of 2018 at Rp1.6 trillion. The increase is mainly caused by the balance reserve recognition for the Retired Health programme according to Actuarial calculations.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

Pendapatan diterima di muka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat naik sebesar Rp2 miliar atau 1% menjadi Rp354 miliar dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp353 miliar.

EKUITAS

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2019 tercapai Rp11 triliun, naik Rp691 miliar atau 7% bila dibandingkan dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp10,3 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dicadangkan.

EKUITAS 2018-2019**EQUITY FOR 2018-2019****LONG-TERM UNEARNED REVENUE**

Long-term unearned revenue represents advance received from the rental of land rights and buildings around the port which will be due in more than a year. The balance as of 31 December 2019 has increased by Rp2 billion or 2% into Rp354 billion compared to the end of 2018 at Rp353 billion.

EQUITY

Total equity as of 31 December 2019 reached Rp11 trillion, up by Rp691 billion or 7% compared to the total equity as of 31 December 2018 at Rp10.3 trillion. The increase is mainly caused by the increasing reserved retained earnings.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Modal Saham Capital Stock	1.018.953	1.018.953	0	100%
Selisih Atas Perubahan Ekuitas Entitas Anak dan Dampak Transaksi dengan Kepentingan Nonpengendali The Difference from Changes in Equity in Subsidiaries and Effects of Transaction with Non-Controlling Interest:	(476.073)	38.741	(514.814)	-1229%
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	7.580.565	7.048.818	531.747	108%
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	877.166	(481.116)	1.358.282	-182%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	1.151.483	1.453.840	(302.357)	79%
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity	10.152.095	9.079.236	1.072.859	112%
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interest	894.769	1.276.078	(381.309)	70%
Jumlah Total	11.046.863	10.355.314	691.549	107%

LAPORAN LABA (RUGI)

Kinerja Perusahaan pada tahun 2019 dapat dilihat dari nilai Pendapatan Operasi Perusahaan yang tercatat sebesar Rp9,77 triliun, turun Rp399 miliar atau 4% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp10,17 triliun.

Penurunan pendapatan operasi ini utamanya dipicu oleh turunnya pendapatan dari pelayanan jasa barang sebesar 333% dan pelayanan peti kemas sebesar 5%.

STATEMENT OF PROFIT (LOSS)

The Company's performance in 2019 can be seen from the value of the Company's Operating Revenue of Rp9.77 trillion, down by Rp399 billion or 4% compared that of 2018 at Rp10.17 trillion.

The decrease in operating revenue is mainly triggered by the decrease in goods services revenue by 333% and container service by 5%.

Secara keseluruhan, laba tahun berjalan Perusahaan di tahun 2019 menunjukkan kenaikan sebesar Rp743 miliar atau 54% menjadi Rp2,12 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,38 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan terdapat laba atas selisih kurs sebesar Rp507 miliar di mana tahun lalu mengalami kerugian Rp792 miliar.

Overall, the Company's profit for the year in 2019 shows an increase of Rp743 billion or 54% to Rp2.12 trillion compared to that of 2018 at Rp1.38 trillion. This is mainly due to the return on foreign exchange difference by Rp507 billion that suffered a Rp792 billion loss in the prior year.

LAPORAN LABA (RUGI) 2018-2019 STATEMENT OF PROFIT (LOSS) FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pendapatan Operasi Operating Revenues	9.775.808	10.174.932	(399.124)	(4%)
Pendapatan Konstruksi Construction Revenues	871.354	603.841	267.513	31%
Beban Operasi Operating Expenses	(7.034.624)	(6.879.590)	(155.034)	2%
Beban Konstruksi Construction Expenses	(871.354)	(597.017)	(274.337)	31%
Beban Operasi Lainnya – Neto Other Operating Expenses – Net	480.676	(733.924)	1.214.600	253%
Laba Usaha Operating Profit	3.221.860	2.568.243	653.617	20%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Profit Before Final Tax and Corporate Income Tax	2.659.620	1.872.050	787.570	30%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	2.594.619	1.823.505	771.114	30%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	2.129.013	1.385.402	743.611	35%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	1.836.548	2.125.075	(288.527)	(16%)

PENDAPATAN OPERASI

Selama tahun 2019, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan operasi sebesar Rp9,77 triliun, turun Rp399 miliar atau 4% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp10,17 triliun. Dua sumber pendapatan yang mengalami penurunan tertinggi di tahun 2019 antara lain adalah pelayanan jasa barang sebesar 333% dan pelayanan terminal peti kemas sebesar 5%. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penurunan arus barang dan arus peti kemas internasional dan akibat selisih kurs.

OPERATING REVENUES

Throughout 2019 the Company recorded operating revenue of Rp9.77 trillion, down by Rp399 billion or 4% compared to that of 2018 at Rp10.17 trillion. The two revenue sources with the highest decline in 2019 are the goods service by 333% and container services by 5%. The decrease in revenue is due to the decrease in goods flow and international container flow due to the difference in the exchange rate.

PENDAPATAN OPERASI 2018-2019

OPERATING REVENUES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Pelayanan Terminal Peti Kemas Container Services	5.729.237	6.026.393	(297.156)	(5%)
Pelayanan Jasa Kapal Vessel Services	1.522.760	1.494.395	28.365	2%
Pelayanan Jasa Terminal Terminal Services	1.031.189	837.081	194.108	19%
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik Land, Building, Water, and Electricity Services	467.490	598.533	(131.043)	(28%)
Pelayanan Jasa Barang Cargo Services	116.356	503.652	(387.296)	(333%)
Lain-lain Others	908.773	714.878	193.895	21%
Jumlah Total	9.775.808	10.174.932	(399.127)	(4%)

PENDAPATAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal *multipurpose* Teluk Lamong dan APBS. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset. Pada tahun 2019, pendapatan konstruksi meningkat sebesar 31% sehingga menjadi Rp871 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp603 miliar.

BEBAN OPERASI

Beban operasi di tahun 2019 tercatat meningkat sebesar Rp996 miliar atau 17% sehingga menjadi Rp6,87 triliun di tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya beban imbalan kerja, beban penyusutan dan amortisasi, beban sumber daya pihak ketiga dari beban *sharing* operasi, dan beban umum dari anggaran atas pembayaran konsesi dan penyesihan piutang.

CONSTRUCTION REVENUES

Construction revenue is the compensation of the service recognised by the Company for constructing Teluk Lamong and APBS *multipurpose* terminal. Construction revenue is measured using the cost method, which is all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets. In 2019 construction revenue increased by 31% into Rp871 billion compared to that of 2018 at Rp603 billion.

OPERATING EXPENSES

Operating expense in 2019 increased by Rp996 billion or 17% into Rp6.87 trillion in 2019. The increase is mainly caused by expenses in employee benefits, expenses in depreciation and amortisation, expenses in third-party resources from operation-sharing expenses, and general expense from the budget for payment of concessions and allowance for accounts receivable.

BEBAN OPERASI 2018-2019 OPERATING EXPENSES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Umum General	3.645.959	3.013.393	632.566	17%
Kerja Sama Mitra Usaha Partnership	1.572.143	1.921.119	(348.976)	(22%)
Pemeliharaan, Penyusutan, dan Amortisasi Maintenance, Depreciation, and Amortisation	1.294.492	1.674.254	(379.762)	(29%)
Asuransi Insurance	404.370	187.353	217.017	54%
Administrasi Kantor Office Administration	93.376	30.007	63.369	68%
Lain-lain Others	24.281	53.464	(29.183)	(120%)
Jumlah Total	7.034.624	6.879.590	155.034	2%

BEBAN KONSTRUKSI

Beban konstruksi tercatat meningkat sebesar 31% menjadi Rp871 miliar di tahun 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp597 miliar.

LABA USAHA

Laba usaha tercatat naik sebesar Rp653 miliar atau 20% menjadi Rp3,22 triliun di tahun 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp2,56 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan laba selisih kurs yang tercapai 253% dari realisasi tahun 2018.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak penghasilan tercatat naik sebesar Rp771 miliar atau 30% menjadi Rp2,59 triliun pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp1,82 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan laba selisih kurs yang tercapai 253% dari realisasi tahun 2018.

LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan tercatat naik sebesar Rp743 miliar atau 35% menjadi Rp2,12 triliun di tahun 2019 bila dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar Rp1,38 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan naiknya nilai laba usaha Perusahaan.

LAPORAN ARUS KAS

Arus kas Perusahaan dapat ditinjau pada pos kenaikan kas bersih dan setara kas. Pada tahun 2019, jumlah kenaikan kas bersih dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp2,6 triliun atau 148% menjadi minus Rp850 triliun. Penurunan ini seiring dengan *cash outflow* dari aktivitas investasi dan defisit aktivitas pendanaan.

CONSTRUCTION EXPENSES

Construction expense increased by 31% into Rp871 billion in 2019 compared to the end of 2018 at Rp597 billion.

OPERATING PROFIT

Operating profit increased by Rp653 billion or 20% into Rp3.22 trillion in 2019 compared to the end of 2018 at Rp2.56 trillion. The increase is due to return for exchange rate difference which reached 253% from the 2018 realisation.

PROFIT BEFORE CORPORATE INCOME TAX

Profit before income tax increased by Rp771 billion or 30% into Rp2.59 trillion in 2019 compared to the end of 2018 at Rp1.82 trillion. The increase is due to return for exchange rate difference which reached 253% from the 2018 realisation.

PROFIT FOR THE YEAR

Profit for the year increased by Rp743 billion or 35% into Rp2.12 trillion in 2019 compared to the end of 2018 at Rp1.38 trillion. The increase is in line with the increasing amount of operating profit.

STATEMENT OF CASH FLOW

The Company's cash flows can be reviewed in the net increase in cash and cash equivalents. In 2019, the total increase in net cash and cash equivalents decreased by Rp2.6 trillion or 148% into minus Rp850 trillion. The decrease is in line with the cash outflow from investment activities and deficit from financing activities.

ARUS KAS 2018-2019

CASH FLOWS FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i>	4.041.642	4.169.985	(128.343)	97%
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi <i>Cash Flows for Investing Activities</i>	(3.181.706)	(3.457.846)	276.140	92%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flows from Financing Activities</i>	(1.710.475)	1.078.078	(2.788.553)	-159%
Kenaikan Kas Bersih dan Setara Kas <i>Net Increase in Cash and Cash Equivalents</i>	(850.539)	1.790.218	(2.640.757)	-48%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year</i>	4.612.047	2.750.527	1.861.520	168%
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas <i>Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents</i>	(116.897)	71.301	(188.198)	-164%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Cash Equivalents at End of Year</i>	3.644.611	4.612.047	(967.436)	79%

Perubahan tersebut terutama berasal dari penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan yang turun sebesar Rp2,79 triliun atau 259% di tahun 2019 menjadi minus Rp1,71 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,07 triliun. Besarnya penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh terdapat penerimaan pinjaman Global Bond pada tahun 2018.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi tahun 2019 tercatat sebesar Rp4,04 triliun, turun Rp128 miliar atau 3% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp4,17 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pembayaran kepada karyawan sebesar 35%.

The change is mainly due to a decrease in cash flows from financing activities by Rp2.79 trillion or 259% in 2019 into minus Rp1.71 trillion compared to that of 2018 at Rp1.07 trillion. The significant decrease in cash flows from financing activity is due to the Global Bond loan receipt in 2018.

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Cash flows from operating activities in 2019 is recorded at Rp4.04 trillion, down by Rp128 billion or 3% when compared to that of 2018 at Rp4.17 trillion. The increase is mainly caused by the increasing payment to employees by 35%.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 2018-2019 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan dan Non Pelanggan <i>Cash Received from Customers and Non-Customers</i>	10.355.596	10.113.238	242.358	102%
Pembayaran kepada Kontraktor, Pemasok, dan Lainnya <i>Payment to Contractors, Suppliers, and Others</i>	(4.388.247)	(4.395.947)	7.700	100%
Pembayaran kepada Karyawan <i>Payment to Employees</i>	(1.636.168)	(1.212.050)	(424.118)	135%
Pembayaran Pajak Penghasilan <i>Payment for Income Taxes</i>	(437.156)	(478.448)	41.292	91%
Penghasilan Bunga <i>Interest Received</i>	147.617	143.194	4.423	103%
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi <i>Net Cash Provided by Operating Activities</i>	4.041.642	4.169.985	(128.343)	97%

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 tercatat sebesar Rp3,18 triliun, naik Rp276 miliar atau 8% bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp3,45 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian saham TPS.

CASH FLOWS FOR INVESTMENT ACTIVITIES

Cash flows for investment activities in 2019 are recorded at Rp3.18 trillion, up by Rp276 billion or 8% compared to that of 2018 at Rp3.45 trillion. The increase is mainly due to the purchase of TPS stock.

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI 2018-2019 CASH FLOWS FOR INVESTMENT ACTIVITIES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Penerimaan Dividen <i>Receipt of Dividend</i>	9.649	6.387	3.262	151%
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud <i>Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets</i>	(2.576.817)	(3.419.983)	843.166	75%
Penempatan Investasi Jangka Pendek <i>Placement of Short-Term Investments</i>	29.980	(46.932)	76.912	-64%
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap <i>Proceed from Sales of Fixed Assets</i>	4.009	2.682	1.327	149%
Investasi pada Penyertaan Saham <i>Investment in Shares of Stock</i>	(648.527)	-	-	-
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi <i>Net Cash Used in Investing Activities</i>	(3.181.706)	(3.457.846)	276.140	92%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan turun sebesar Rp2,8 triliun atau 259% di tahun 2019 sehingga menjadi minus Rp1,71 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,07 triliun. Besarnya penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh penerimaan pinjaman Global Bond pada tahun 2018.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Cash flows from financing activities decreased by Rp2.8 trillion or 259% in 2019 into minus Rp1.71 trillion compared to that of 2018 at Rp1.07 trillion. The significant decrease in cash flows from financing activity is due to the Global Bond loan receipt in 2018.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 2018-2019
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL	%
Penerimaan Pinjaman Receipt of Loans	500.000	6.901.500	(6.401.500)	7%
Pembayaran Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Payment of Bank Loans and Other Financial Institution	(853.296)	(4.040.118)	3.186.822	21%
Pembayaran Beban Bunga Payment of Interest	(761.086)	(677.007)	(84.079)	112%
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan Payment of Obligation Under Finance Lease	(62.813)	(444)	(62.369)	14147%
Pembayaran Dividen Payment of Dividend	(533.280)	(1.105.853)	572.573	48%
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net Increase in Cash and Cash Equivalents	(1.710.475)	1.078.078	(2.788.553)	-159%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

SOLVENCY

Kemampuan membayar utang pada Pelindo III secara umum dapat ditinjau melalui laporan rasio keuangan Perusahaan. Laporan rasio keuangan Pelindo III tersaji melalui tabel berikut:

The solvency of Pelindo III in general can be reviewed through the Company's financial ratio. Pelindo III's financial ratio is presented through the following table:

RASIO KEUANGAN 2018-2019 FINANCIAL RATIO FOR 2018-2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2019	2018
Rasio Laba terhadap Ekuitas <i>Return on Equity (ROE)</i>	19,24%	11,31%
Rasio Laba terhadap Investasi <i>Return on Investment (ROI)</i>	14,16%	16,08%
Rasio Laba terhadap Modal Kerja <i>Return on Capital Employed (ROCE)</i>	7,48%	4,36%
Margin Laba Bersih <i>Net Profit Margin</i>	21,78%	13,62%
Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	165,61%	168,72%
Rasio Cepat <i>Quick Ratio</i>	163,02%	179,35%
Rasio Kas <i>Cash Ratio</i>	111,62%	105,60%
Periode Pengumpulan Piutang (hari) <i>Collection Period (days)</i>	30,73	49,86
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset <i>Debt to Assets Ratio (DAR)</i>	64,08%	66,05%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	148,86%	100,85%
Perputaran Persediaan (hari) <i>Inventory Turnover (days)</i>	3,16	2,28
Rasio Perputaran Total Aset <i>Total Asset Turn Over (TATO)</i>	47,27%	43,35%
Rasio Ekuitas terhadap Aset <i>Total Equity to Total Asset</i>	42,84%	28,79%
EBITDA (Rp1000)	4.035.676.175	4.610.024.797
EBITDA Margin	41,28%	45,14%
Rasio Utang Neto terhadap EBITDA <i>Net Debt to EBITDA</i>	2,53	2,22
Rasio Utang Bruto terhadap EBITDA <i>Gross Debt to EBITDA</i>	3,44	3,24

RASIO RENTABILITAS

Kemampuan Perusahaan dalam mencetak laba dapat diukur dari besaran rasio rentabilitasnya. Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang dihitung untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu.

Rasio laba terhadap ekuitas (ROE) sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar 19,24%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 11,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dengan menggunakan ekuitas yang tersedia mengalami kenaikan di tahun 2019.

Margin laba bersih atau *net profit margin* pada tahun 2019 tercatat sebesar 21,78%, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 13,62%. Hal ini terjadi karena pengaruh laba selisih kurs.

RASIO LIKUIDITAS

Dalam mengukur kemampuan Perusahaan untuk membayar utang usahanya, Perusahaan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Besaran rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.

Pada tahun 2019, rasio lancar tercatat sebesar 165,61%, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 168,72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia mengalami penurunan.

Rasio cepat sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar 163,02% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 179,35%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban atau utang lancarnya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki namun mengalami penurunan dari pada tahun lalu.

Rasio kas tahun 2019 tercatat sebesar 111,62% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 116,87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas yang tersedia sedikit menurun.

RASIO SOLVABILITAS

Perusahaan juga memakai rasio solvabilitas untuk mengukur besarnya jumlah aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio solvabilitas yang dipakai Perusahaan adalah rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset (DAR).

Rasio liabilitas terhadap jumlah aset (DAR) tahun 2019 tercatat sebesar 64,08% sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 66,05%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah aset yang dimiliki Perusahaan sebagian besar dibiayai oleh utang,

RENTABILITY RATIO

The ability of the Company to make a profit can be measured from the amount of rentability ratio. A profitability ratio is a ratio calculated to determine a company's ability to make a profit from revenues related to sales, assets, and equity on the basis of certain measurements.

Return on equity (ROE) up to the end of 2019 is recorded at 19.24%, higher than that of 2018 of 11.31%. This has shown the Company's ability to generate profit for the year with the available equity which increased in 2019.

Net profit margin in 2019 is recorded at 21.78%, higher than that of 2018 13.62%. This is due to return on the exchange rate difference.

LIQUIDITY RATIO

In measuring the Company's solvency, the Company uses a liquidity ratio consisting of current ratio, quick ratio, and cash ratio. The liquidity ratio can be used to measure a company's ability to meet its obligations or pay its short-term debt.

In 2019 the current ratio is recorded at 165.61%, lower than that of 2018 at 168.72%. This shows that the Company's ability to fulfil its short-term liabilities using available current assets has decreased.

Quick ratio until the end of 2019 is recorded at 173.02%, lower than that of 2018 at 179.35%. This shows that the Company can fulfil its current obligations or debt using available current assets but it has decreased compared to the prior year.

The cash ratio in 2019 is recorded at 111.62%, lower than that of 2018 at 116.87%. This shows that the Company's ability to meet its short-term liabilities using available cash and cash equivalents slightly decreased.

SOLVABILITY RATIO

The Company also uses a solvability ratio to measure the total assets of the Company financed by debt. The solvability ratio used by the Company is the debt to equity ratio (DER) and debt to assets ratio (DAR).

DAR in 2019 is recorded at 64.08%, slightly lower than that of 2018 at 66.05%. This shows that the increase in the number of assets owned by the Company is mostly financed by debt, both long-term and short-term debt. The Company's investment funding sources are mainly from global bond debt

baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sumber pendanaan investasi Perusahaan terutama dari utang obligasi global sebagai upaya menjaga pertumbuhan organik maupun menangkap peluang pertumbuhan anorganik.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebesar 148,86% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 100,85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aset Perusahaan sebagian besar bersumber dari dana utang. Namun rasio ini masih dalam rentang aman bagi Perusahaan. Pencairan utang dilakukan dengan prudent, mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dan tingkat kesehatan Perusahaan.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan tahun 2019 adalah 30,73 hari dan kolektibilitas piutang usaha tahun 2018 adalah 49,86 hari (Laporan Manajemen tahun 2019). Hal ini menunjukkan tingkat kolektibilitas piutang semakin cepat. Perusahaan menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan penagihan langsung ke pelanggan/pengguna jasa yang memiliki piutang jatuh tempo;
2. Melakukan rekonsiliasi saldo piutang dengan pelanggan/pengguna jasa untuk penentuan jadwal pembayaran piutang;
3. Menerapkan UPER (uang pertanggungjawaban/uang muka) di atas 100% dari estimasi tagihan pelayanan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan/pengguna jasa pada saat pengguna jasa mengajukan permohonan pelayanan jasa kepelabuhanan;
4. Menerapkan peraturan *locking system* secara korporat di mana pelanggan yang memiliki piutang jatuh tempo tidak akan mendapat pelayanan jasa kepelabuhanan di seluruh Cabang Pelabuhan sampai pengguna jasa tersebut telah membayar seluruh piutang yang telah jatuh tempo;
5. Bekerja sama dengan pihak Kejaksaan untuk menagih piutang-piutang lama Perusahaan yang telah jatuh tempo; dan
6. Penerapan Integrated Billing System untuk mempercepat perputaran piutang usaha.

which is an effort to maintain organic growth and capture opportunities for inorganic growth.

DER up to the end of 2019 was recorded at 148.86% higher than that of 2018 which was recorded at 100.85%. This shows that the increase in the Company's assets mostly came from debt funds. However, this ratio is still in the safe range for the Company. Debt disbursement is done prudently, taking into account the Company's capabilities and the Company's soundness.

RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

Receivables collectability rate of the Company in 2019 was 30.73 days and trade receivables collectability in 2018 was 49.86 days (2019 Management Report). This showed a faster receivables collectability rate. The Company implemented various strategies below:

1. *Collect directly to customers/service users that have due receivables;*
2. *Reconciliation of receivables balance with customers/service users to determine receivables payment schedule;*
3. *Implemented UPER (fee/advances) of above 100% from the estimated bill of service given to customers/service users when the service users propose port services;*
4. *Implemented corporate locking system regulation where customers with due receivables will not obtain port services across Port Branches until the service users have paid all due receivables;*
5. *Cooperated with the Attorney to collect old and due receivables of the Company; and*
6. *Implementing Integrated Billing System to accelerate trade receivables turnover.*

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL

Komposisi struktur modal Pelindo III di tahun 2019 tersaji melalui tabel berikut:

Pelindo III's capital structure composition in 2019 is presented through the following table:

KOMPOSISI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN TAHUN 2019 COMPOSITION OF CAPITAL STRUCTURE IN 2019

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

URAIAN URAIAN	2019	2018	KETERANGAN KETERANGAN
Utang Jangka Pendek Short-Term Loan	-	-	
Utang Jangka Panjang Long-Term Loan	13.784.415	14.940.707	
Utang Kotor Gross Debt	13.784.415	14.940.707	Utang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang The short-term loan plus long-term loan
Kas Cash	3.644.611	4.612.047	
Utang Bersih Net Debt	10.139.804	10.328.660	Utang kotor dikurangi dengan kas The short-term loan plus long-term loan
Ekuitas Equity	11.046.863	10.355.314	
Jumlah Struktur Modal Total Capital Structure	24.831.278	25.296.021	

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Total struktur modal Pelindo III pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh kenaikan kurs nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang memengaruhi konversi utang jangka panjang Perusahaan sebesar USD 1 miliar menjadi setara dengan Rp13,78 triliun.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The total capital structure of Pelindo III in 2019 has decreased compared to that in 2018. The decrease is mainly due to the increase in US Dollar exchange rate into Rupiah which affects the conversion of the Company's long-term loan at USD 1 billion to be equivalent to Rp13.78 trillion.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

PROGRAM INVESTASI 2019

Di tahun 2019, Pelindo III telah melaksanakan program-program investasi berikut:

1. Pekerjaan Perkuatan Struktur Dermaga Berlian 1600 m

Pekerjaan perkuatan struktur Dermaga Berlian 1600 m dimulai sejak 21 November 2019 dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp474 miliar dan diharapkan dapat selesai pada 4 November 2021. Hingga 31 Desember 2019, progres perkembangan fisik mencapai 10%.

2. Pembangunan Perpanjangan dan Pelebaran Dermaga PT Berlian Manyar Sejahtera Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik

Pembangunan perpanjangan dan pelebaran dermaga PT Berlian Manyar Sejahtera dimulai sejak 2 September 2019 dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp 342 miliar dan diharapkan dapat selesai pada 2 Juni 2021. Hingga 31 Desember 2019, progres perkembangan fisik mencapai 39%.

3. Perkerasan Lapangan Penumpukan Eks-Semen Tonasa

Perkerasan lapangan penumpukan Eks-Semen Tonasa dimulai sejak 20 Agustus 2019 dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp149 miliar dan diharapkan dapat selesai pada 18 Agustus 2020. Hingga 31 Desember 2019, progres perkembangan fisik mencapai 30%.

4. Pembangunan Open Storage di Eks-Lahan Indonesia Power Terminal Nilam

Pembangunan open storage di Eks-Lahan Indonesia power Terminal Nilam dimulai sejak 2 Desember 2019 dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp61 miliar dan diharapkan dapat selesai pada 25 November 2020. Hingga 31 Desember 2019, progres perkembangan fisik mencapai 1%.

5. Pembangunan Dermaga Penumpang Maumere

Pembangunan dermaga penumpang Maumere dimulai sejak 12 November 2019 dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp60 miliar dan diharapkan dapat selesai pada 13 September 2020. Hingga 31 Desember 2019, progres perkembangan fisik mencapai 22%.

Tidak ada ikatan yang material atas pengadaan investasi tersebut di atas.

INVESTMENT PROGRAMMES IN 2019

In 2019 Pelindo has implemented the following investment programmes:

1. The 1600 m Structural Strengthening Work in Berlian Wharf

The 1600 m structural strengthening work in Berlian Wharf has started on 21 November 2019 with a contract value of Rp474 billion and is expected to finish on 4 November 2021. Up to 31 December 2019, the physical development progress reached 10%.

2. PT Berlian Manyar Sejahtera Wharf Extension and Widening Construction in Manyar Terminal in Port of Gresik

The construction for the wharf extension and widening of PT Berlian Manyar Sejahtera has started on 2 September 2019 with a contract value of Rp342 billion and is expected to finish on 2 June 2021. Up to 31 December 2019, the physical development progress reached 39%.

3. Ex-Semen Tonasa Container Yard Pavement

The pavement work on the container yard of Ex-Semen Tonasa has started on 20 August 2019 with a contract value of Rp149 billion and is expected to finish on 18 August 2020. Up to 31 December 2019, the physical development progress reached 30%.

4. Open Storage Construction in Ex-Indonesia Power Area in Nilam Terminal

Open storage construction in Ex-Indonesia Power area in Nilam Terminal has started on 2 December 2019 with a contract value of Rp61 billion and is expected to finish on 25 November 2020. Up to 31 December 2019, the physical development progress reached 1%.

5. Construction of Maumere Passenger Terminal

The construction of Maumere passenger terminal has started on 12 November 2019 with a contract value of Rp60 billion and is expected to finish on 13 September 2020. Up to 31 December 2019, the physical development progress reached 22%.

There are no material bonds for the abovementioned investment provision.

SUMBER DANA

Sumber dana yang digunakan untuk program investasi adalah berasal dari dana internal Perusahaan.

MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI

Mata uang yang menjadi denominasi ikatan material untuk investasi barang modal adalah Rupiah, mata uang Republik Indonesia.

MITIGASI RISIKO TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG ASING

Perusahaan melakukan analisis risiko keuangan terkait pengelolaan instrumen keuangan perusahaan meliputi:

1. Risiko Pasar

Terkait pengelolaan instrumen keuangan kas dan setara kas dan valuta asing. Untuk aktivitas pendanaan perusahaan jangka pendek, Perusahaan mempertimbangkan volatilitas nilai tukar yang dipengaruhi oleh faktor kondisi perekonomian global yang sangat dipengaruhi oleh kejadian dan kebijakan global. Kondisi ini di antaranya adalah perang dagang, kebijakan Bank Sentral AS, harga minyak dunia, serta faktor domestik seperti kebijakan pemerintah terkait penetapan suku bunga untuk menetapkan batasan risiko yang diambil dengan tetap mempertimbangkan selera risiko Perusahaan.

Untuk aktivitas pendanaan perusahaan jangka panjang, Perusahaan melakukan analisis dan pertimbangan untuk melakukan alternatif pendanaan. Perusahaan belum menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak *forward* untuk meminimalkan risiko nilai tukar.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, deposito berjangka, piutang usaha, dan piutang nonusaha. Manajemen berusaha untuk terus mengendalikan dan meminimalkan risiko kredit yang muncul melalui kebijakan CMS, *auto collection*, sistem *locking*, maupun melalui perjanjian *term of payment* dengan tetap mempertimbangkan manfaat dan risiko yang timbul untuk setiap kebijakan yang diambil.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dimana arus kas perusahaan mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Dalam kebijakan manajemen risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga level kas dan setara kas diperkirakan cukup untuk membiayai operasional Perusahaan dan mengurangi pengaruh fluktuasi dalam arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan secara berkelanjutan melakukan penilaian atas kondisi pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

SUMBER DANA

The source of fund utilised for the investment programmes derived from the Company's internal fund.

MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI

The currency in the denomination for the material bonds of capital goods investment is Rupiah, a currency of the Republic of Indonesia.

RISK MITIGATION ON THE USE OF FOREIGN CURRENCIES

The Company conducted financial risk analysis related to corporate financial instruments management including:

1. Market Risk

Risks related to financial instrument management of cash and cash equivalents as well as foreign exchange. For short-term corporate funding activities, the Company considers the volatility of exchange rate influenced by global economic conditions that are strongly influenced by global events and policies. The conditions are trade war, the policy of US Bank Central, world oil price, and domestic factor such as government policies related to a stipulation of interest rates to stipulate risk limits while taking account the Company's risk appetite.

For the long-term corporate funding activities, the Company conducted analysis and consideration for alternative funding. The Company is yet to utilise a financial instrument such as contract forwarding to minimise foreign exchange risk.

2. Credit Risk

Credit risks are mainly from fund placement in banks, time deposits, trade receivables, and non-trade receivables. The management strives to control and minimise the emerging credit risks through policies such as CMS, *auto collection*, *locking system*, and agreement on the term of payment while considering the benefits and risks arising for each policy taken.

3. Liquidity Risk

Liquidity Risk is a risk arising in which the company cash flows indicate that the cash inflow from short-term revenue is inadequate to fulfil the cash outflow for short-term expenditure. In the management of liquidity risk policy, the management monitor and maintain the level of cash and cash equivalents to be adequate for funding the Company's operations and reducing the effect of cash flows fluctuations. The management also periodically evaluations on the cash flows projection and actual, including the schedule of loan maturity and sustainably evaluates the financial market condition to earn optimal funding sources.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

INFORMATION AND MATERIAL FACT AFTER BALANCE SHEET

Operasi Kelompok Usaha telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus COVID-19 yang telah menyebar ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Efek virus COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, depresiasi nilai tukar mata uang asing, dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari wabah virus COVID-19 terhadap Indonesia dan Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran wabah yang berkepanjangan dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan Kelompok Usaha secara khusus. Namun, dampak di masa depan juga akan tergantung pada efektivitas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The Company operation has and may continue to be the Group operation has and may continue to be adversely impacted by the outbreak of COVID-19 that has since spread to many countries including Indonesia. The effects of COVID-19 to the global and Indonesian economy include adverse effect on economic growth, a decline in capital markets, depreciation of foreign currency exchange rates, and disruption of business operations. The future effects of the outbreak of COVID-19 to Indonesia and the Group are unclear at this time. A significant rise in the number of COVID-19 infections or prolongation of the outbreak could have a severe impact on the Indonesian economy and the Group in particular. However, future effects will also depend on the effectiveness of policy responses issued by the Government of the Republic of Indonesia.

PROSPEK USAHA

BUSINESS PROSPECT

Prospek bisnis kepelabuhanan khususnya di Pelindo III akan tumbuh semakin pesat. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya Pemerintah Indonesia semakin memprioritaskan pemerataan ekonomi khususnya di wilayah Indonesia Timur di mana pelabuhan-pelabuhan di wilayah Pelindo III menjadi pintu gerbang bagi logistik di kawasan tersebut.

Perusahaan telah merumuskan prospek bisnis di tahun 2020. Penentuan prospek tersebut didasarkan pada beberapa faktor, seperti kebijakan Pemerintah terkait jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pungutan terhadap jasa kepelabuhanan; kegiatan atas perusahaan pelayanan pemanduan, pelayanan labuh, serta penyediaan dan perusahaan tanah yang mendapatkan pelimpahan dari Pemerintah; dan juga estimasi perekonomian (*economic outlook*) di tahun 2020 yang diproyeksikan oleh Pemerintah akan tumbuh menguat dari 2019. Pemerintah melalui dokumen nota keuangan APBN 2020 memproyeksikan ekonomi nasional akan melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3%.

Perusahaan juga telah menyusun RKAP 2020 dimana dasar penyusunannya menggunakan asumsi makroekonomi sebagai berikut:

- Kurs USD terhadap Rupiah: Rp14.400/USD
- Harga BBM nonsubsidi: Rp11.500/liter
- Pertumbuhan ekonomi: 5,3%
- Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (3 bulan): 5,4%
- Inflasi: 3,1%

Untuk konteks jangka panjang, Perusahaan juga telah menentukan Sasaran Strategis Perusahaan untuk 5 tahun ke depan guna mendukung terlaksananya visi dan misi. Sasaran Strategis Perusahaan tersebut adalah:

- Pemenuhan standar yang ditetapkan oleh lembaga rating;
- Menciptakan kinerja pelayanan yang unggul berbasis GCG;
- Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan bisnis di pelabuhan;
- Sinergi dengan mitra strategis dan kerja sama dengan Pemerintah;
- Penguasaan pasar baru di luar wilayah Pelindo III; dan
- Penguasaan pasar baru pelabuhan di luar negeri.

The prospect of port business, particularly in Pelindo III, will grow more rapidly. This is due to a number of factors, one of which is a prioritisation of economic quality for areas in Eastern Indonesia by the Government of Indonesia, in which ports in Pelindo III area becomes the logistics gateway in those areas.

*The Company has formulated business prospects in 2020. The determination of these prospects is based on several factors such as Government policies related to the types and tariffs for types of non-tax state revenues, levies on port services; activities on the business of pilotage services, anchorage services, and the provision and exploitation of land that has been delegated from the government; and also the estimation of the economy (*economic outlook*) in 2020 projected by the Government will grow stronger from 2019. The government through the 2020 APBN financial note document projects that the national economy will continue the improvement trend by growing by 5.3%.*

The Company has also compiled the 2020 RKAP where the basis for its preparation uses the following macroeconomic assumptions:

- USD exchange rate against Rupiah: IDR 14,400 /USD*
- Non-subsidised fuel prices: IDR 11,500 /litre*
- Economic growth: 5.3%*
- Treasury Bills interest rate (three months): 5.4%*
- Inflation: 3.1%*

In the long term context, the Company has also determined the direction of the Company's Strategic Objectives for the next five years to support the implementation of the vision and mission. The Objectives are:

- Fulfilment of standards set by rating agencies;*
- Creating GCG-based excellent service performance;*
- Creating efficiency and effectiveness in business services in ports;*
- Synergy with strategic partners and cooperation with the Government;*
- New market share outside of Pelindo III area; and*
- New port market share overseas.*



PROYEKSI TAHUN 2020

PROJECTION FOR 2020

Pelindo III telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 sebagai acuan pokok Perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pencapaian target finansial untuk tahun 2020 tersebut didasarkan oleh berbagai asumsi kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi aktivitas Perusahaan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, berikut adalah target finansial Perusahaan untuk tahun buku 2020:

The Company has prepared the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2020 as the main reference in conducting its business activities. The achievement of financial targets for the year 2020 is based on various assumptions of external and internal conditions that may affect the Company's activities. Based on these assumptions, the following are the financial targets of the Company for the fiscal year of 2020:

URAIAN URAIAN	REALISASI 2019 2019 REALISATION	PROYEKSI 2020 2020 PROJECTION	PENINGKATAN (%) INCREASE (%)
Aset Assets	30.755.914	39.427.881	28%
Liabilitas Liabilities	19.709.051	20.571.358	4%
Ekuitas Equity	1.694.363	7.058.411	317%
Pendapatan Bersih Operating Revenues	9.775.808	11.058.939	13%
Laba Usaha Operating Profit	3.221.860	3.821.688	19%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before Tax	2.594.619	2.986.298	15%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	2.129.013	2.250.176	6%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit for the Year	1.836.548	2.250.176	23%

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS

STRATEGI PEMASARAN

Pelindo III menyadari bahwa pelanggan merupakan salah satu aset Perusahaan yang penting. Untuk itu, upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh Perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan yang antara lain:

1. Kesiapan dan ketersediaan fasilitas pelabuhan yang andal;
2. Ketepatan waktu pelayanan, sistem informasi yang *real time*, dan tarif jasa pelabuhan yang kompetitif; dan
3. Berkualitas dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan melebihi standar yang ditetapkan.

Dalam menjalankan usahanya, segmen usaha Pelindo III diidentifikasi dengan 4 pelayanan utama, yaitu Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, Pelayanan Bongkar/Muat (B/M), dan Pelayanan Penumpang.

Untuk mengantisipasi perkembangan bisnis kepelabuhanan yang semakin kompleks, Perusahaan melakukan transformasi atas perencanaan bisnis Perusahaan. Transformasi perencanaan bisnis dilakukan untuk lebih mengarahkan fokus Perusahaan pada segmentasi *core business* yang merupakan inti dari jasa pelayanan yang disediakan Pelindo III.

Untuk tetap mengembangkan segmen usaha Perusahaan yang bukan merupakan *core business*, maka Manajemen mengklasifikasikan sebagaimana penjelasan berikut:

1. *Non-Core Business* Strategis, meliputi:
 - a. Cargo Konsolidasi/Distribusi dan Depo
 - b. *Forwarding*
 - c. Properti
 - d. Pariwisata Maritim (*Cruise* dan Marina)
2. *Non-Core Business* Lainnya, meliputi:
 - a. *Maintenance*
 - b. *Energy Supply* dan *Labor*
 - c. Sarana dan Prasarana Transportasi
 - d. Rupa-Rupa Usaha

Terkait dengan strategi pemasaran, Pelindo III memiliki 3 pilihan strategi yang dapat diterapkan, yaitu:

1. **Market Penetration**

Strategi Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar terhadap produk atau jasa pada pasar yang dimiliki selama ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih agresif.

MARKETING STRATEGY

The Company is aware that customers are one of its important assets. To that end, continuous improvement efforts are carried out by the Company to fulfil customers' interest, which includes:

1. *Readiness and availability of reliable port facilities;*
2. *Timeliness of services, real-time information systems, and competitive port service rates; and*
3. *Quality services in terms of providing port services beyond the set standards.*

In running its business, Pelindo III's business segment is identified by four main services, namely Ship Services, Goods Services, Loading/Unloading (B/M) Services, and Passenger Services.

To anticipate the increasingly complex port business development, the Company transforms its business plan to further direct its focus on core business segmentation which is the core of the services provided by Pelindo III.

In continuing to develop the Company's business segments that are not a core business, the Management classified them as such:

1. *Strategic Non-Core Business, among others:*
 - a. *Cargo Consolidation/Distribution and Depot*
 - b. *Forwarding*
 - c. *Property*
 - d. *Maritime Tourism (Cruise and Marina)*
2. *Other Non-Core Businesses, among others:*
 - a. *Maintenance*
 - b. *Energy and Labour Supply*
 - c. *Transportation Facility and Infrastructure*
 - d. *Miscellaneous Service*

In relation with marketing strategy, Pelindo III has three choices of strategy to be adopted in its business, namely:

1. **Market Penetration**

The Company's strategy to increase its market share of products or services in the existing market share through more aggressive marketing programmes.

2. Market Development

Market Development adalah strategi Perusahaan dalam memperkenalkan produk barang atau jasa pada lingkungan pasar yang baru.

3. Product Development

Product Development adalah strategi Perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui pengembangan produk barang atau jasa yang sudah ada atau pengembangan produk-produk baru.

Kelompok/segmen pasar dibagi berdasarkan tujuan (domestik atau internasional). Sementara itu, dalam menentukan pelanggan, kelompok pelanggan, dan segmen pasar yang akan dijadikan target untuk pelayanan saat ini dan di masa mendatang didasarkan pada peningkatan realisasi produksi setiap tahun dari kegiatan B/M sesuai dengan jenis komoditas. Ke depan, Perusahaan akan menentukan prioritas pelayanan kapal dan barang untuk jenis peti kemas, curah cair, dan curah kering dengan melakukan prioritas pelayanan kepada beberapa pengguna jasa. Pembagian pasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

2. Market Development

Market Development is a corporate strategy in introducing products or services to a new market environment.

3. Product Development

Product Development is a company strategy to increase sales through the development of existing products or services or the development of new products.

Market group/segment is divided based on destination (domestic or international). Meanwhile, the determination of customer, customer group, and market segment that becomes the target for current and future services are based on the increase in production realisation every year from loading and unloading based on the type of commodities. Going forward, the Company will determine the priority of ship and goods services for container type, liquid bulk, and dry bulk by prioritising services to limited customers. Distribution of the Company's market is as follows:

PEMBAGIAN PASAR PERUSAHAAN COMPANY MARKET SEGMENTATION



PANGSA PASAR

Pangsa pasar Pelindo III dibedakan berdasarkan komoditasnya, yaitu yaitu peti kemas, curah kering, curah cair, dan *general cargo*. Pada laporan ini Perusahaan melaporkan gambaran pangsa pasar Perusahaan dalam bentuk persentase. Perhitungan persentase tersebut didapat dari perbandingan jumlah produksi bongkar muat barang dengan arus operasional yang melalui dermaga.

MARKET SHARE

Market share of the Company is distinguished based on its commodities, namely containers, dry bulk, liquid bulk, and general cargo. In this report, the Company reports the description of the Company's market share in percentage. The percentage is calculated from the ratio of the total production of loading and unloading of goods to operational traffic at the wharf.

Untuk komoditas peti kemas, persentase pangsa pasar yang tercatat oleh Perusahaan di tahun 2019 sebesar 99,57% atau naik dibandingkan tahun 2018 yakni 98,43%. Untuk komoditas curah kering, penguasaan pangsa pasar yang diperoleh Perusahaan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 75,33%. Untuk komoditas curah cair, pangsa pasar yang diperoleh Perusahaan di tahun 2019 adalah 90,28%, tidak jauh berbeda dengan penguasaan pangsa pasar di tahun 2018. Penguasaan pangsa pasar Perusahaan untuk *general cargo* dan *bag cargo* secara berturut-turut di tahun 2019 adalah 20,88% dan 20,56%. Secara keseluruhan, pangsa pasar Perusahaan di semua komoditas di tahun 2019 tidak jauh berbeda dibanding capaian di tahun 2018.

Di tahun 2019, Perusahaan mulai mencetuskan program Marketing Sales Officer, dimana di masing-masing regional ditempatkan personel khusus untuk melakukan penetrasi pasar baru guna peningkatan pangsa pasar. Dengan demikian, pelaksanaan bina pelanggan, tidak hanya melalui program *Customer Relationship Management* (CRM) yang melakukan kunjungan kepada pelanggan *existing*, tetapi juga mitra bisnis yang belum memanfaatkan jasa bongkar muat dari Perusahaan.

For container commodities, the percentage of market share recorded by the Company in 2019 was 99.57% or an increase compared to that of 2018 at 98.43%. For the dry bulk commodity, the market share controlled by the Company in 2019 decreased to 75.33%. For the liquid bulk commodity, the market share controlled by the Company in 2019 is 90.28%, not much of a difference compared to the market share controlled in 2018. The market share controlled by the Company in general cargo and bag cargo in 2019 is 20.88% and 20.56%, respectively. Overall, there is not much of a difference in market share of all commodity in 2019 compared to that in 2018.

In 2019, the Company brought forth a Marketing Sales Officer programme, in which there is a special employee in every region to conduct penetration on a new market to widen market share. Hence, the implementation of customer development is not only through Customer Relationship Management (CRM) who visits the existing customers, but also business partners who have not utilised the loading/unloading services of the Company.

PERBANDINGAN PANGSA PASAR BERDASAKAN KOMODITAS 2015-2019 COMPARISON OF MARKET SHARE BY COMMODITIES IN 2015-2019

NO.	JENIS CARGO CARGO TYPE	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Peti Kemas <i>Container</i>	99%	99%	99,79%	98,43%	99,57%
2.	Curah Kering <i>Dry Bulk</i>	53%	60%	72,17%	77%	75,33%
3.	Curah Cair <i>Liquid Bulk</i>	89%	92%	96,97%	90%	90,28%
4.	<i>General Cargo</i>	33%	24%	25,64%	25,01%*	20,88%
5.	<i>Bag Cargo</i>	18%	22%	16,09%	-*	20,56%

Keterangan:

* Pada tahun 2018, pelaporan *General Cargo* dan *Bag Cargo* dijadikan dalam satu tipe jenis cargo, yaitu *General Cargo*

Note:

* In 2018, *General Cargo* and *Bag Cargo* reporting are made into one type of cargo, namely *General Cargo*.

DIVIDEN

DIVIDEND

Pelindo III memberikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan RUPS. Perkembangan dividen yang disalurkan Perusahaan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Pelindo III shall pay dividends to the Government of the Republic of Indonesia as a Shareholder based on the resolution of the GMS. The development of dividend distributed by the Company for the last five years is as follows:

PEMBAGIAN DIVIDEN PADA TAHUN BUKU 2015-2019 DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2015-2019 FISCAL YEARS

TAHUN BUKU FISCAL YEAR	RISALAH RUPS GMS MINUTES	TANGGAL PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT DATE	TANGGAL PEMBAYARAN PAYMENT DATE	DIVIDEN (RIBU RUPIAH) DIVIDEND (THOUSAND RUPIAH)	LABA PERUSAHAAN (RIBU RUPIAH) COMPANY PROFIT (THOUSAND RUPIAH)	PAYOUT RATIO
2015	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 14 Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 14	17 Mei 2016 17 May 2016	Pembayaran dividen dibayar secara angsuran dengan masing-masing tanggal: - 17 Juni 2016 - 15 Juli 2016 - 15 Agustus 2016 <i>The dividend payment was conducted in instalments on:</i> - 17 June 2016 - 15 July 2016 - 15 August 2016.	196.709.330	702.533.323	28,00%
2016	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 05 Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 5	8 Mei 2017 8 May 2017	Pembayaran dividen dibayar secara angsuran dengan masing-masing tanggal: - 8 Juni 2017 - 7 Juli 2017 - 8 Agustus 2017 - 8 September 2017 - 6 Oktober 2017 - 8 November 2017 <i>The dividend payment was conducted in instalments on:</i> - 8 June 2017 - 7 July 2017 - 8 August 2017 - 8 September 2017 - 6 October 2017 - 8 November 2017	311.198.916	1.037.329.721	30,00%

TAHUN BUKU FISCAL YEAR	RISALAH RUPS GMS MINUTES	TANGGAL PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT DATE	TANGGAL PEMBAYARAN PAYMENT DATE	DIVIDEN (RIBU RUPIAH) DIVIDEND (THOUSAND RUPIAH)	LABA PERUSAHAAN (RIBU RUPIAH) COMPANY PROFIT (THOUSAND RUPIAH)	PAYOUT RATIO
2017	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 2 Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 2	8 Mei 2017 8 May 2017	8 November 2017 8 November 2017	311.198.916	1.037.329.721	30,00%
2018	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 2 Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 2	3 April 2018 3 April 2018	3 Mei 2018 3 May 2018	441.147.068	1.470.490.226	30,00%
2019	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H. No. 29	29 April 2019 29 April 2019	29 Mei 2019 29 May 2019	227.891.712	759.639.040	30,00%

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan berita acara RUPS Perusahaan No. 29 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Emi Susilowati, S.H., Pemegang Saham Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasi sebesar Rp759.639.040.000 sebagai berikut:

- Sebesar 30% dari laba bersih atau sebesar Rp227.891.712.000 ditetapkan sebagai dividen.
- Sebesar 70% dari laba bersih atau sebesar Rp531.747.328.000 ditetapkan sebagai cadangan.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut pada tanggal 29 Mei 2019.

DIVIDEND POLICY

In accordance with the Minutes of GMS No. 29 of 29 April 2019 from Emi Susilowati, S.H. as the Notary, the Shareholders has stipulated the following utilisation of the consolidated net income of Rp759,639,040,000:

- A total of 30% of net income or Rp227,891,712,000 as dividends.
- A total of 70% of net income or Rp531,747,328,000 as a reserve.

The Company has paid the dividends on 29 May 2019.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP AND/OR MANAGEMENT PROGRAMME (ESOP/MSOP)

Sesuai dengan karakteristik Pelindo III yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah, maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) di Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan tidak menyajikan informasi yang terkait program tersebut seperti jumlah saham ESOP/MSOP, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga exercise.

Since the Company is originally and fully owned by the Government, there is no employee and/or management stock ownership (ESOP/MSOP) program in the Company. Thus, the Company does not provide information related to the program, such as the number of shares of ESOP/MSOP, the term, the conditions of the eligible employee and/or management and exercise price.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALISATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Di tahun 2018, Pelindo III melakukan penawaran umum dengan menerbitkan obligasi global sebesar USD 500 juta. Dana obligasi global tersebut digunakan untuk mendanai program-program investasi di tahun 2019 seperti:

1. Pengembangan Terminal Teluk Lamong tahap 3 dan 4.
2. Pengembangan JIPE tahap 2 sampai dengan 4.
3. Pengembangan kapasitas pelabuhan dan fasilitas terminal (Pelabuhan Kendal, Tanjung Bulupandan, Gilimas, Benoa, dan Pelabuhan lainnya).

Rincian penggunaan dana hasil penawaran umum dijelaskan pada tabel di bawah ini.

In 2018, Pelindo III conducted a public offering by issuing global bonds of USD 500 million. The global bond is used to fund investment programs in 2019 such as:

1. Terminal Teluk Lamong development phase 3 and 4.
2. JIPE development phase 2 to 4.
3. Development of port capacities and terminal facilities (Port of Kendal, Tanjung Bulupandan, Gilimas, Benoa, and other ports).

Details of the use of public offering proceeds are explained in the table below:

PENGGUNAAN DANA OBLIGASI GLOBAL YANG DIPEROLEH PADA TAHUN 2018 USE OF GLOBAL BOND FUNDS OBTAINED IN 2018

dalam USD | in USD

KETERANGAN INFORMATION	JUMLAH TOTAL
Penerbitan Obligasi Global Global Bonds Issuance	500.000.000
Biaya Penerbitan Obligasi Global Global Bond Issuance Fee	(5.989.426)
Penerimaan Dana Obligasi Global Global Bond Funds Acceptance	494.010.574

dalam USD | in USD

KETERANGAN INFORMATION	JUMLAH TOTAL
Penggunaan Use	
Pelunasan Bridging Loan ANZ <i>ANZ Bridging Loan Repayment</i>	(50.618.198)
Pelunasan Bridging Loan BNI <i>BNI Bridging Loan Repayment</i>	(221.742.260)
Pembayaran Investasi <i>Investment Payment</i>	(121.651.160)
Cadangan Kas Perusahaan <i>Company Cash Reserves</i>	(100.000.000)
Sisa Saldo Dana Obligasi Global Remaining Global Bond Fund Balance	-

Nilai Kurs: Rp14.393
Exchange Rate: Rp14,393

INFORMASI REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

INFORMATION ON CAPITAL GOODS REALISATION

JENIS DAN TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Pelindo III melakukan investasi barang modal berupa bangunan fasilitas pelabuhan, kapal, alat-alat fasilitas pelabuhan, instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, peralatan, alat transportasi, emplasemen, investasi penyertaan anak, serta aktiva tidak berwujud. Tujuan investasi tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas produksi, meningkatkan optimalisasi kuantitas dan kualitas hasil produksi, serta untuk keberlanjutan Perusahaan.

TYPES AND OBJECTIVES OF INVESTMENT IN CAPITAL GOODS

Pelindo III invests in capital goods in the form of port facilities, ships, port facility tools, port facilities installation, land, roads and buildings, tools, vehicles, emplacement, investment property, and intangible assets. The purpose of the investment is to increase the effectiveness of production, improve the optimisation of production quantity and quality, and for the continuity of the Company.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Realisasi investasi tahun 2019 pada Induk dan Anak Perusahaan tercapai sebesar Rp6,41 triliun. Realisasi investasi pada Induk Perusahaan saja tercatat sebesar Rp5,71 triliun. Rincian mengenai investasi tersaji pada tabel berikut.

INVESTMENT VALUE OF CAPITAL GOODS

The realisation of investment in 2019 to Parent Company and Subsidiaries reached Rp6.41 trillion. The investment realisation in the Parent Company alone amounted to Rp5.71 trillion. Details about the investment are presented in the following table.

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN JENIS

THE REALISATION OF PARENT COMPANY AND SUBSIDIARIES INVESTMENT BASED ON TYPES

dalam ribu Rupiah | in thousand Rupiah

NO.	JENIS INVESTASI TYPE OF INVESTMENT	REALISASI PENYERAPAN REALISATION ABSORPTION
1.	Bangunan Fasilitas Pelabuhan <i>Port Facility Building</i>	2.523.856.500
2.	Kapal <i>Ship</i>	19.400.000
3.	Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan <i>Port Facility Tools</i>	958.937.650
4.	Instalasi Fasilitas Pelabuhan <i>Port Facility Installation</i>	366.911.500
5.	Tanah <i>Lands</i>	32.100.000
6.	Jalan dan Bangunan <i>Roads and Buildings</i>	1.160.636.500
7.	Peralatan <i>Tools</i>	306.254.550
8.	Kendaraan <i>Vehicles</i>	6.800.000
9.	Emplasemen <i>Emplacement</i>	89.350.000
10.	Properti Investasi <i>Investment Property</i>	400.000.000
11.	Aktiva Tidak Berwujud <i>Intangible Assets</i>	546.000.000
JUMLAH INVESTASI Total Investment		6.410.246.700

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI GRUP PERUSAHAAN BERDASARKAN CABANG THE REALISATION OF PARENT COMPANY AND SUBSIDIARIES INVESTMENT BASED ON BRANCHES

dalam ribu Rupiah | in thousand Rupiah

NO.	NAMA CABANG BRANCH NAME	REALISASI PENYERAPAN REALISATION ABSORPTION
REGIONAL JAWA TIMUR EAST JAVA REGION		
1.	Kalimas	14.000.000
2.	Nilam & Mirah	349.000.000
3.	Tanjung Perak	715.242.500
4.	Gresik	26.700.000
5.	Probolinggo	3.600.000
REGIONAL JAWA TENGAH CENTRAL JAVA REGION		
6.	Tanjung Emas	164.014.000
7.	TPKS	84.643.000
8.	Tanjung Intan	31.850.000
REGIONAL KALIMANTAN KALIMANTAN REGION		
9.	Trisakti	12.000.000
10.	TPKB	126.500.000
11.	Batulicin	27.650.000
12.	Sampit	10.500.000
13.	Bagendang	99.730.000
14.	Kumai	34.800.000
15.	Pulang Pisau	12.000.000
16.	Bumiharjo	66.370.000
REGIONAL BALI NUSA TENGGARA BALI NUSA TENGGARA REGION		
17.	Benoa	240.550.000
18.	Celukan Bawang	58.650.000
19.	Lembar	167.539.000
20.	Bima	23.600.000
21.	Maumere	43.950.000
22.	Tanjung Wangi	74.000.000
23.	Tenau Kupang	198.770.000

NO.	NAMA CABANG BRANCH NAME	REALISASI PENYERAPAN REALISATION ABSORPTION
KANTOR PUSAT <i>HEAD OFFICE</i>		
25.	General Affair	23.950.000
26.	Port Facility	2.103.438.500
27.	Port Equipment	383.187.500
28.	ICT	219.386.950
29.	Subsidiary	400.000.000
SUBTOTAL INVESTASI INDUK PERUSAHAAN <i>SUB-TOTAL PARENT COMPANY INVESTMENT</i>		5.715.621.450
ANAK PERUSAHAAN <i>SUBSIDIARIES</i>		
30.	PT Terminal Petikemas Surabaya	138.569.900
31.	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	214.077.000
32.	PT Pelindo Husada Citra	37.413.150
33.	PT Pelindo Marine Service	27.400.000
35.	PT Terminal Teluk Lamong	27.488.000
36.	PT Pelindo Daya Sejahtera	3.877.200
SUBTOTAL INVESTASI ANAK PERUSAHAAN <i>SUB-TOTAL SUBSIDIARIES INVESTMENT</i>		448.825.250
CUCU PERUSAHAAN <i>SECOND-TIER SUBSIDIARIES</i>		
37.	PT Berkah Multi Cargo	8.100.000
38.	PT Pelindo Energi Logistik	38.500.000
39.	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	4.200.000
40.	PT Pelindo Properti Indonesia	20.000.000
41.	PT Berlian Manyar Sejahtera	100.000.000
42.	PT Lamong Energi Indonesia	75.000.000
SUBTOTAL INVESTASI CUCU PERUSAHAAN <i>SUB-TOTAL SECOND-TIER SUBSIDIARIES INVESTMENT</i>		245.800.000
TOTAL INVESTASI GRUP PERUSAHAAN <i>TOTAL COMPANY GROUP INVESTMENT</i>		6.410.246.700

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

Pelindo III telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai bagian dari Kebijakan Akuntansi Penting terkait Hubungan Afiliasi (Pihak Berelasi), yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2019.

Pelindo III has disclosed all nature and transactions with related parties as part of the Significant Accounting Policy related to Affiliated Parties (Related Parties), which can be found in the Company's 2019 Financial Statements.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

Related parties are persons or entities related to the reporting entity:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:

- a. Having joint control or control over the reporting entity;*
 - b. Having significant influence over the reporting entity; or*
 - c. Is key management personnel of the reporting entity or parent entity of the reporting entity.*
2. *One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:*
 - a. The reporting entity and entity are members of the same business group (meaning the parent entity, subsidiary, and subsequent subsidiary entity are associated with another entity).*
 - b. An entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture entity that is a member of a business group, of which the other entity is a member).*
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - d. An entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of one of the reporting entities or entities associated with the reporting entity.*
 - f. Entities controlled or jointly controlled by persons identified in letter (a); or*
 - g. Persons identified in (a) have significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or parent entity of the entity).*

h. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah, dan Badan yang serupa baik lokal, nasional, maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Dalam kegiatan usaha normal, Pelindo III melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Pelindo III dan Anak Perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

h. An entity or member of a group in which the entity is a part of that group provides the services of key management personnel to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entities that are related to the government are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. The Government refers to the government, government agencies and similar bodies both locally, nationally, and internationally.

Entities related to the Government may be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Regional Government which is Shareholder of the entity, or entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as a proxy of shareholders.

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the entity has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or has significant influence over the Group in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

NATURE OF RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows:

SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DI 2019

NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES IN 2019

SIFAT RELASI NATURE OF RELATIONSHIP	NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	JENIS TRANSAKSI NATURE OF TRANSACTIONS
Pemegang Saham Shareholder	Negara Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Jasa konsesi Concession service
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entity	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking services and loans
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking services and loans
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking services and loans
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman Banking services and loans
	PT Bank Syariah Mandiri	Jasa perbankan dan pinjaman Banking services and loans
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional Sales and operational activities
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan Construction services
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan Construction services
	PT Virama Karya (Persero)	Jasa pembangunan Construction services
	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa pembangunan Construction services
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan Construction services
	PT Nindya Karya (Persero)	Jasa pembangunan Construction services
	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	Pinjaman dana dan biaya pengerukan Loan funds and dredging costs
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa Sales
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa Sales	
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa Sales	
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa Sales	
PT Bahtera Adhiguna	Penjualan jasa Sales	

SIFAT RELASI NATURE OF RELATIONSHIP	NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	JENIS TRANSAKSI NATURE OF TRANSACTIONS
	PT Dharma Lautan Nusantara (Persero)	Penjualan jasa Sales
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Penjualan jasa Sales
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa Sales
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan jasa Sales
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa Sales
	PT Semen Tonasa	Penjualan jasa Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa Sales
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa Sales
	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3)	Jasa pensiun Pension services
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Jasa pensiun Pension services
Entitas Asosiasi Associates	PT Portek Indonesia	Jasa pemeliharaan alat fasilitas pelabuhan Port facilities equipment maintenance Service
	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Investasi saham dan pemberian pinjaman dana Investment in stock and lending fund
	PT Ambang Barito Nusapersada	Pemberian pinjaman dana Investment in stock and lending fund
	PT Jasa Marga Bali Tol	Investasi saham Lending fund
	PT Lamin Aspalindo Tiga	Investasi saham Lending fund
	PT Terminal Nilam Utara	Investasi saham dan sewa lahan Investment in stock and land lease
	PT Energi Manyar Sejahtera	Investasi saham Lending fund
	PT Terminal Peti kemas Indonesia	Investasi saham Lending fund
Memiliki Manajemen Kunci yang Sama Under the Same Key Management	Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia III	Jasa tenaga kerja bongkar Muat Handling service

REALISASI TRANSAKSI

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (Pemerintah, Entitas Pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

TRANSACTION REALISATION

Details of significant accounts with related parties (Government, State Owned Entities unless otherwise indicated) are as follows:

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN KAS DAN SETARA KAS TRANSACTION REALISATION ON CASH AND CASH EQUIVALENT ACCOUNT

dalam ribu Rupiah | in thousands Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	2019	2018
Bank Bank Transaksi dilakukan dengan Rupiah <i>Transaction in Rupiah</i>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	214.718.786	289.028.344
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	145.243.561	153.492.846
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.022.335	56.113.723
PT Bank Tabungan Negara Tbk	1.005.644	346.914
PT Bank Syariah Mandiri	186.429	-
Jumlah Total	385.176.755	498.981.827
Bank Bank Transaksi dilakukan dengan Dolar AS <i>Transaction in US Dollar</i>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.872.864	4.165.998
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.869.291	3.265.913
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.482	2.930.493
PT Bank Syariah Mandiri	-	6.731.895
PT Bank Tabungan Negara Tbk	-	99.602
Jumlah Total	3.779.637	17.193.901
Deposito Deposito Transaksi dilakukan dengan Rupiah <i>Transaction in Rupiah</i>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	222.250.000	186.750.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.500.000	172.945.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	94.200.000	124.000.000
PT Bank Tabungan Negara Tbk	34.000.000	45.000.000
PT Bank BNI Syariah	20.000.000	-
PT Bank Mandiri Syariah	10.000.000	-
Jumlah Total	530.950.000	528.695.000

dalam ribu Rupiah | in thousands Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	2019	2018
Deposito <i>Deposito</i> Transaksi dilakukan dengan Dolar AS <i>Transaction in US Dollar</i>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.787.880.374	1.787.880.374
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	543.037.500	515.929.068
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	515.929.068	543.037.500
Jumlah Total	2.220.450.463	2.846.846.942

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN PIUTANG USAHA TRANSACTION REALISATION ON TRADE RECEIVABLES ACCOUNT

dalam ribu Rupiah | in thousands Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	2019	2018
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	91.145.385	68.247.983
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	86.568.472	72.149.140
PT Pertamina (Persero)	44.932.795	39.527.408
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	43.610.754	28.953.310
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)	39.971.227	11.543.521
PT Petrokimia Gresik	35.995.746	27.463.487
PT Bahtera Adhiguna	11.163.377	10.859.277
PT Perikanan Nusantara (Persero)	9.373.897	6.920.612
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	9.314.629	6.311.709
Lain-lain di bawah Rp5 miliar <i>Others below Rp5 billion</i>	96.714.783	70.121.318
Subtotal Sub-total	468.791.065	342.097.765
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: <i>Allowance for impairment</i>	(159.835.543)	(1.737.260)
Jumlah Total	308.955.522	340.360.505

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN PIUTANG LAIN-LAIN TRANSACTION REALISATION ON OTHER RECEIVABLES ACCOUNT

dalam ribu Rupiah | in thousands Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	2019	2018
PT BKMS	227.363.181	208.881.837
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	52.267.802	52.267.802
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	26.576.794	29.330.404
Lain-lain di bawah Rp5 miliar Others below Rp5 billion	61.504.801	7.556.110
Subtotal Sub-total	367.712.578	298.036.153
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	(97.814.713)	(35.504.794)
Jumlah Total	269.897.865	262.531.359

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA TRANSACTION REALISATION ON TRADE PAYABLES ACCOUNT

dalam ribu Rupiah | in thousands Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	2019	2018
BPJS Kesehatan	40.298.956	59.828.888
PT Pertamina (Persero)	4.268.754	1.779.407
PT Indonesia Power	1.779.312	741.697
PT Perkebunan Nusantara XII	1.718.728	716.442
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) Others (each below Rp1 billion)	28.762.264	11.989.394
Jumlah Total	76.828.014	75.055.828

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN UTANG USAHA TRANSACTION REALISATION ON TRADE PAYABLES

dalam ribu Rupiah | in thousands Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	2019	2018
Koperasi Pegawai Pelindo III	17.512.404	15.878.580
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia <i>The Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia</i>	15.206.429	-
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.084.910	4.898.774
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3.178.007	4.557.701
PT Portek Indonesia	206.384	6.935.879
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	89.764	34.392.785
Lain-lain di bawah Rp4 miliar <i>Others below Rp4 billion</i>	18.436.770	12.480.467
Jumlah Total	61.714.668	79.144.186

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN UTANG LAIN-LAIN TRANSACTION REALISATION ON OTHER PAYABLES ACCOUNT

dalam ribu Rupiah | in thousands Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI NAME OF RELATED PARTY	2019	2018
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	170.168.880	79.163.886
PT Nindya Karya (Persero)	79.575.063	108.231.555
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	63.429.111	42.476.420
PT Brantas Abipraya (Persero)	40.883.828	-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	14.637.235	19.108.606
Lain-lain di bawah Rp5 miliar <i>Others below Rp5 billion</i>	16.924.040	10.550.846
Jumlah Total	385.618.157	259.531.313

REALISASI TRANSAKSI PADA AKUN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK *TRANSACTION REALISATION ON SHORT-TERM UNEARNED REVENUE ACCOUNT*

dalam ribu Rupiah | in thousands Rupiah

NAMA PIHAK BERELASI <i>NAME OF RELATED PARTY</i>	2019	2018
PT Pertamina (Persero)	18.925.977	5.527.144
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.054.036	1.536.854
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	466.718	1.963.783
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) <i>Others (each below Rp1 billion)</i>	19.711.821	26.324.415
Jumlah Total	40.158.552	35.352.196

REMUNERASI PERSONEL MANAJEMEN KUNCI

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar dan diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp27.611.659 dan Rp21.460.340, masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018.

KEY MANAGEMENT PERSONNEL REMUNERATION

Total salaries and other short-term benefits paid to and accrued for the BOC and BOD amounted to Rp27.611.659 and Rp21.460.340 for 2019 and 2018 respectively.

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Penjelasan mengenai kewajaran transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

EXPLANATION ON ARM-LENGTH TRANSACTIONS

An explanation of the fairness of the transactions conducted with related parties is under PSAK 7 (2010 revision) on Related Party Disclosure.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI

Kebijakan Perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi adalah melalui proses audit, baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal.

COMPANY POLICY ON TRANSACTION REVIEW MECHANISM

The Company policy on the mechanism to review the transactions with related parties is by conducting an audit, either by internal or external auditors.

PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

COMPLIANCE TO THE RELEVANT REGULATIONS

One purpose of disclosure of party transactions related is the effort to fulfil PSAK 7 (2010 revision) on Related Party Disclosure.

PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

AMENDMENT TO THE RELATED LAWS AND REGULATIONS

Selama tahun 2019, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja maupun proses bisnis Pelindo III. Oleh karena itu, informasi mengenai nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan beserta dampak kuantitatif dan kualitatifnya tidak tersedia.

Throughout 2019, there were no changes in laws and regulations or Government policies that significantly affected performance and business processes of Pelindo III. Therefore, information on the name of the amended laws and regulations as well as their quantitative and qualitative impacts are not available.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Pada tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

On 1 January 2019, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

The adoption of the following new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- **ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka**

Interpretasi ini mengatur penentuan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset, biaya atau pendapatan (atau bagiannya) terkait pada penghentian pengakuan aset atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing.

- **ISAK 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration**

This interpretation addresses how to determine the date of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income (or part of it) on the de-recognition of a non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration in a foreign currency.

- **Amandemen PSAK 26: Biaya Pinjaman**

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas memperlakukan sebagai bagian dari pinjaman umum setiap pinjaman yang awalnya dibuat untuk mengembangkan aset kualifikasian ketika secara substansial semua kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tersebut untuk penggunaan atau

- **Amendments to PSAK 26: Borrowing Costs**

The amendments clarify that an entity treats as part of general borrowings any borrowing originally made to develop a qualifying asset when substantially all of the activities necessary to prepare that asset for its intended use or sale is complete. The entity applies the amendments to borrowing costs incurred on or after the

penjualan yang dimaksudkan selesai. Entitas menerapkan amendemen atas biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan.

- **Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan**

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen lebih terkait langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, entitas mengakui konsekuensi dari pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu terkait. Entitas menerapkan amendemen untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan. Ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut, entitas menerapkannya pada konsekuensi pajak penghasilan dari dividen yang diakui pada atau setelah awal periode komparatif paling awal.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- **PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan**

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan, dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan**

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments. An entity applies those amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2019, with early application permitted.

- **AMENDMENTS TO PSAK 46: INCOME TAXES**

The amendments clarify that the income tax consequences of dividends are linked more directly to past transactions or events that generated distributable profits than to distributions to owners. Therefore, an entity recognises the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where it originally recognised those past transactions or events. An entity applies the amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2019, with early application permitted. When the entity first applies those amendments, it applies them to the income tax consequences of dividends recognised on or after the beginning of the earliest comparative period.

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. Group intends to adopt these standards, if applicable when they become effective.

- **PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with an earlier application is permitted**

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant, and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing more general requirements based on management's judgment.

- **PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective 1 January 2020 with an earlier application is permitted**

This PSAK is a single standard that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have to analyse before recognising the revenue.

- **PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- **Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan**

Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- **Amandemen PSAK 71 – Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan**

Amandemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- **PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with an earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers**

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognise the right-of-use assets and liability of the lease. There are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- **Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures, effective 1 January 2020 with an earlier application is permitted**

These amendments provide that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in associates or joint ventures.

- **Amendments to PSAK 71 – Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation, effective 1 January 2020 with an earlier application is permitted**

This amendment provides that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

The Group has presently evaluated and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Untuk menganalisis kelangsungan usaha Perusahaan, telah dilakukan asesmen risiko tahun 2019 yang terbukukan di laporan manajemen risiko triwulanan yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan asesmen tersebut, telah teridentifikasi 10 risiko utama yang berpotensi untuk memengaruhi kelangsungan utama Perusahaan, yaitu:

1. Risiko insiden kegiatan operasional dan kecelakaan kerja tingkat *fatality*
2. Risiko penolakan pengguna jasa terhadap penyesuaian tarif yang diusulkan perusahaan
3. Risiko defisit arus kas perusahaan
4. Risiko sengketa lahan/aset
5. Risiko persaingan bisnis dengan kompetitor
6. Risiko gangguan fungsi teknologi informasi dan komunikasi
7. Risiko bencana alam yang memengaruhi keandalan fasilitas
8. Risiko peningkatan keluhan pengguna jasa yang memengaruhi reputasi perusahaan
9. Risiko keterlambatan penyelesaian proyek investasi
10. Risiko pelanggaran ketentuan/prosedur operasional

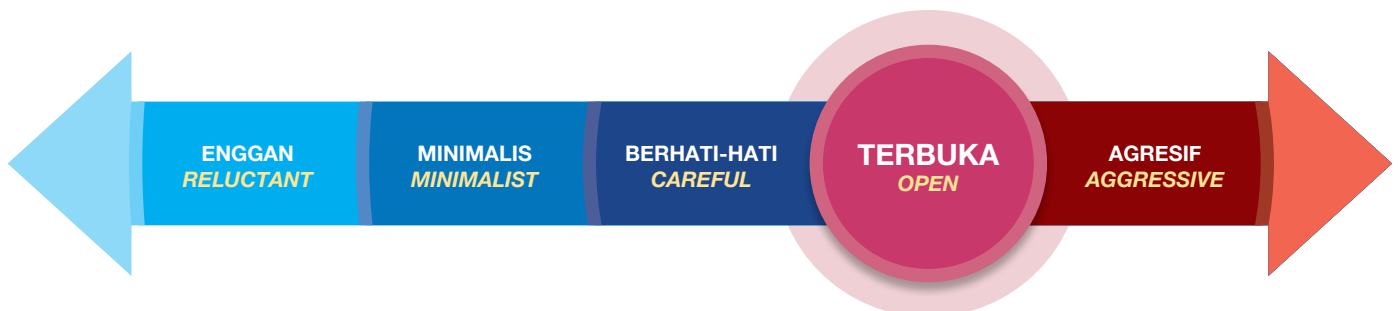
Risiko-risiko utama tersebut diidentifikasi berdasarkan selera risiko dan toleransi risiko Direksi Pelindo III. Selera risiko ditunjukkan melalui pengambilan keputusan untuk menjalankan pemenuhan kinerja bisnis utama dan diversifikasi bisnis baru yang potensial sesuai target *Key Performance Indicator* (KPI) dengan cara mempertimbangkan semua opsi bisnis potensial yang memberikan tingkat *reward* yang dapat diterima. Hal ini karena Perusahaan telah melakukan langkah-langkah pengendalian yang tepat sesuai prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

To analyse the Company's business continuity, a 2019 risk assessment has been conducted and recorded in the quarterly risk management report submitted to the BOC. Based on the assessment, ten main risks have been identified with the potential to affect the Company's business continuity, namely:

1. Risk of incidents during operational activity and fatality-level work accident
2. Risk of service user rejection against tariff adjustments proposed by the company
3. Risk of company cash flows deficit
4. Risk of land/assets dispute
5. Risk of business competition with competitors
6. Risk of disruption in the information and communication technology function
7. Risk of natural disasters affecting facilities' reliability
8. Risk of increase in service user complaints that affect the company's reputation
9. Risk of late investment project completion
10. Risk of operational rules/procedures violation

The main risks are identified based on the risk appetite and tolerance of the BOD of Pelindo III. Risk appetite is shown through decision making to carry out the fulfilment of key business performance and potential new business diversification in accordance with the *Key Performance Indicator* (KPI) targets by considering all potential business options that provide an acceptable level of reward. This is because the Company has conducted appropriate control measures in accordance with the procedures and good corporate governance (GCG).

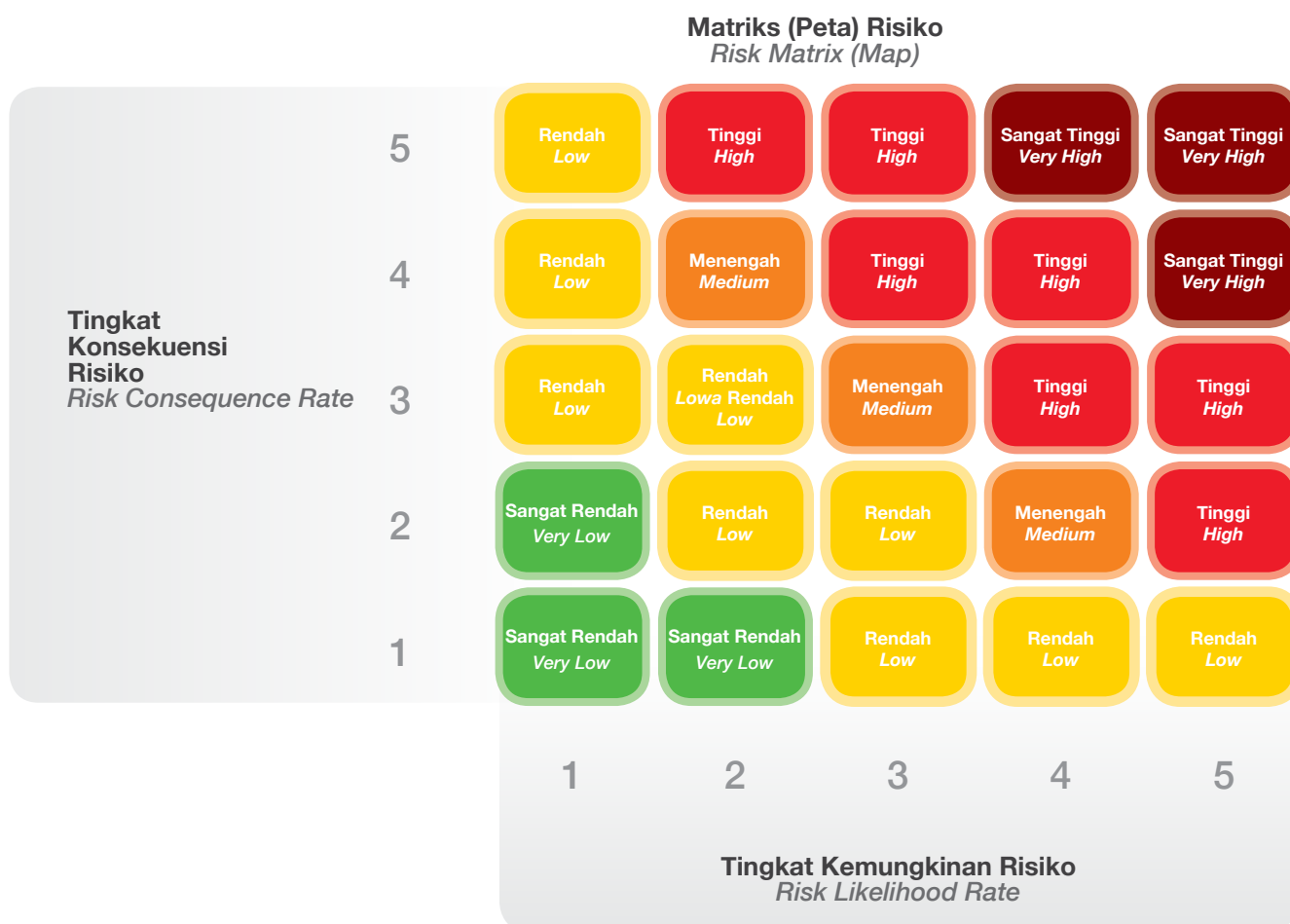
SIKAP SELERA RISIKO DIREKSI PELINDO III RISK APPETITE ATTITUDE OF PELINDO III BOD



Sementara itu, toleransi risiko ditunjukkan melalui penerimaan risiko mempertimbangkan toleransi nilai dan tingkat risiko yang berada di bawah tingkat risiko menengah dengan pengendalian *existing* yang konsisten dan dapat dipertahankan. Risiko yang belum dapat ditoleransi mempertimbangkan nilai dan tingkat risiko yang berada pada tingkat risiko menengah ke atas, sehingga diperlukan peninjauan dan perbaikan pengendalian *existing* serta penanganan lebih lanjut melalui tahapan mitigasi.

Meanwhile, risk tolerance is shown through risk acceptance by considering value tolerance and risk level under the medium risk level through a consistent and maintained *existing* control. Risks that have not been tolerated will consider the value and risk level on the medium to high-risk level, hence further reviewing and improving *existing* control as well as further handling through mitigation phase is necessary.

PENETAPAN SELERA RISIKO DAN TOLERANSI RISIKO DETERMINATION OF RISK APPETITE AND TOLERANCE



Keterangan:

- Area di bawah dan sebelah kiri garis biru merupakan area toleransi risiko diterima dengan adanya/tanpa pengendalian *existing*.
- Area di atas dan sebelah kanan garis biru merupakan area di luar toleransi risiko sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.

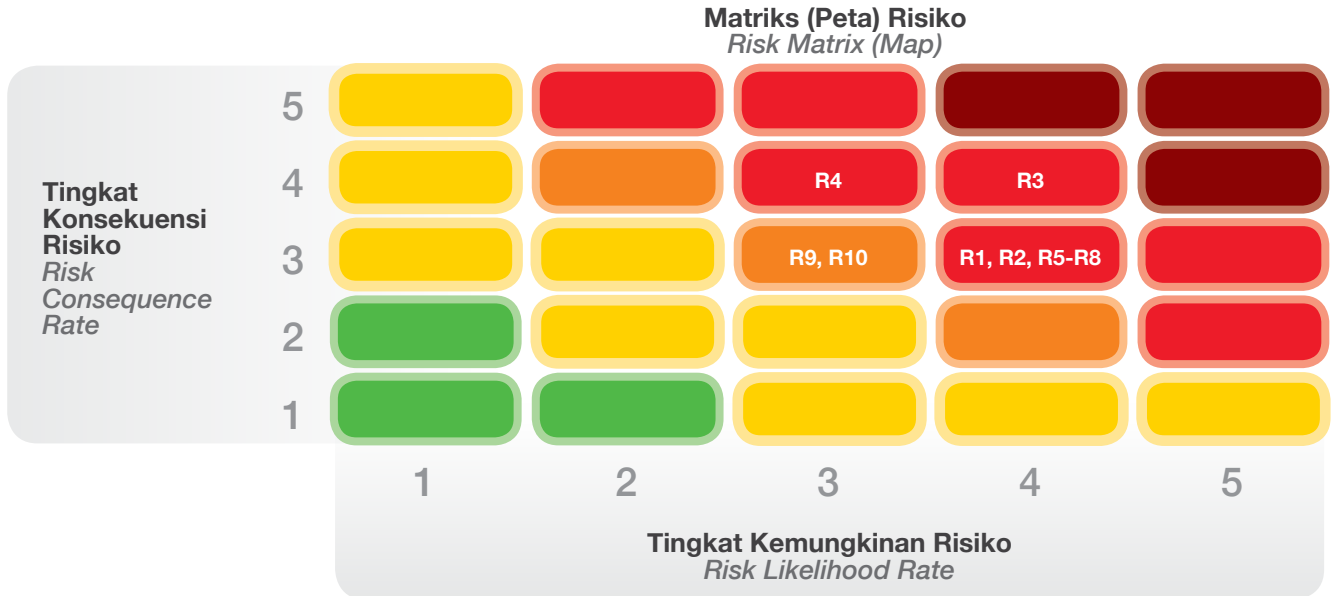
Information:

- Areas under and left side of the blue line are the accepted risk tolerance areas without *existing* control.
- Areas above and right side of the blue line are areas beyond risk tolerance and further handling is necessary.

Berdasarkan asumsi di atas, tingkat risiko dapat divisualisasikan melalui peta risiko atau matriks sebagai gambaran profil risiko dengan kisaran posisi konsekuensi dan kemungkinan kejadian dari risiko tersebut. Berikut adalah peta risiko sebelum dilakukan mitigasi:

Based on the assumption, risk level may be visualised through a risk map or matrix as an overview of risk profile with a range of position consequences and the likelihood of risk occurrence. Below is the risk map before mitigation is conducted:

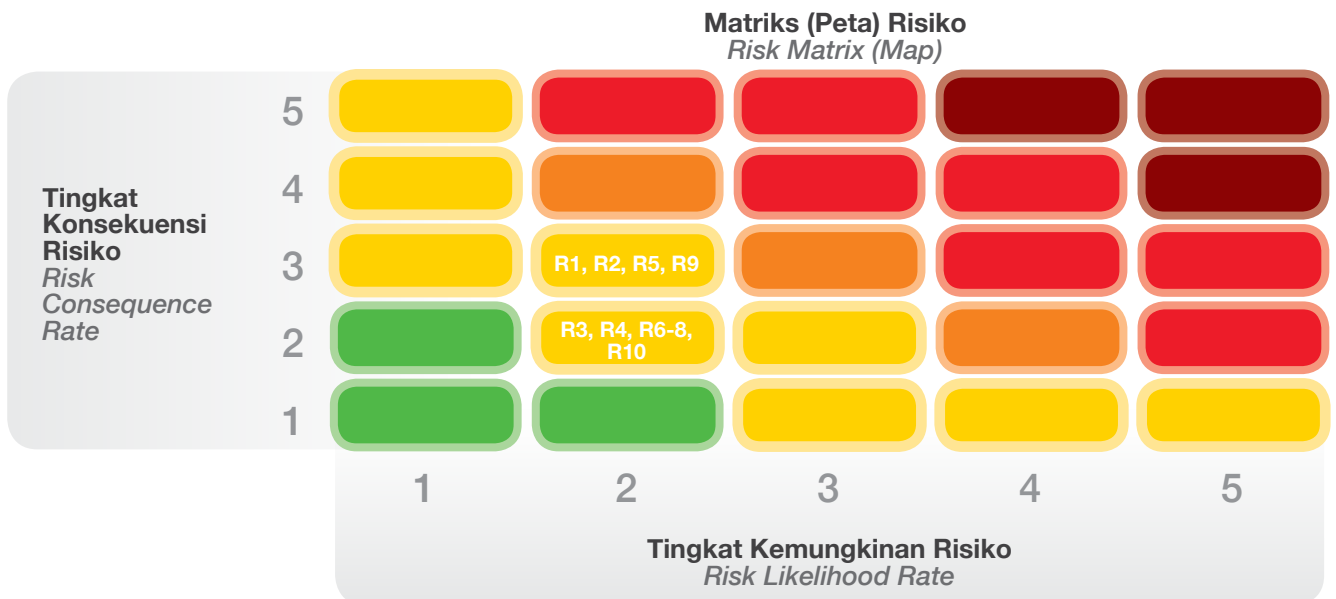
PETA RISIKO SEBELUM MITIGASI RISK MAP BEFORE MITIGATION



Dari peta risiko tersebut, terlihat bahwa terdapat 8 risiko sangat tinggi dan 2 risiko menengah. Penjelasan detail mengenai masing-masing risiko berikut upaya mitigasinya dapat dilihat pada subbab Manajemen Risiko. Berikut adalah peta risiko setelah dilakukan mitigasi:

From the risk map, it can be seen that there are 8 high risks and 2 medium risks. Detailed explanation on every risk along with their mitigation efforts can be found in the Risk Management sub-chapter. Below is the risk map after mitigation is conducted:

PETA RISIKO SETELAH MITIGASI RISK MAP AFTER MITIGATION

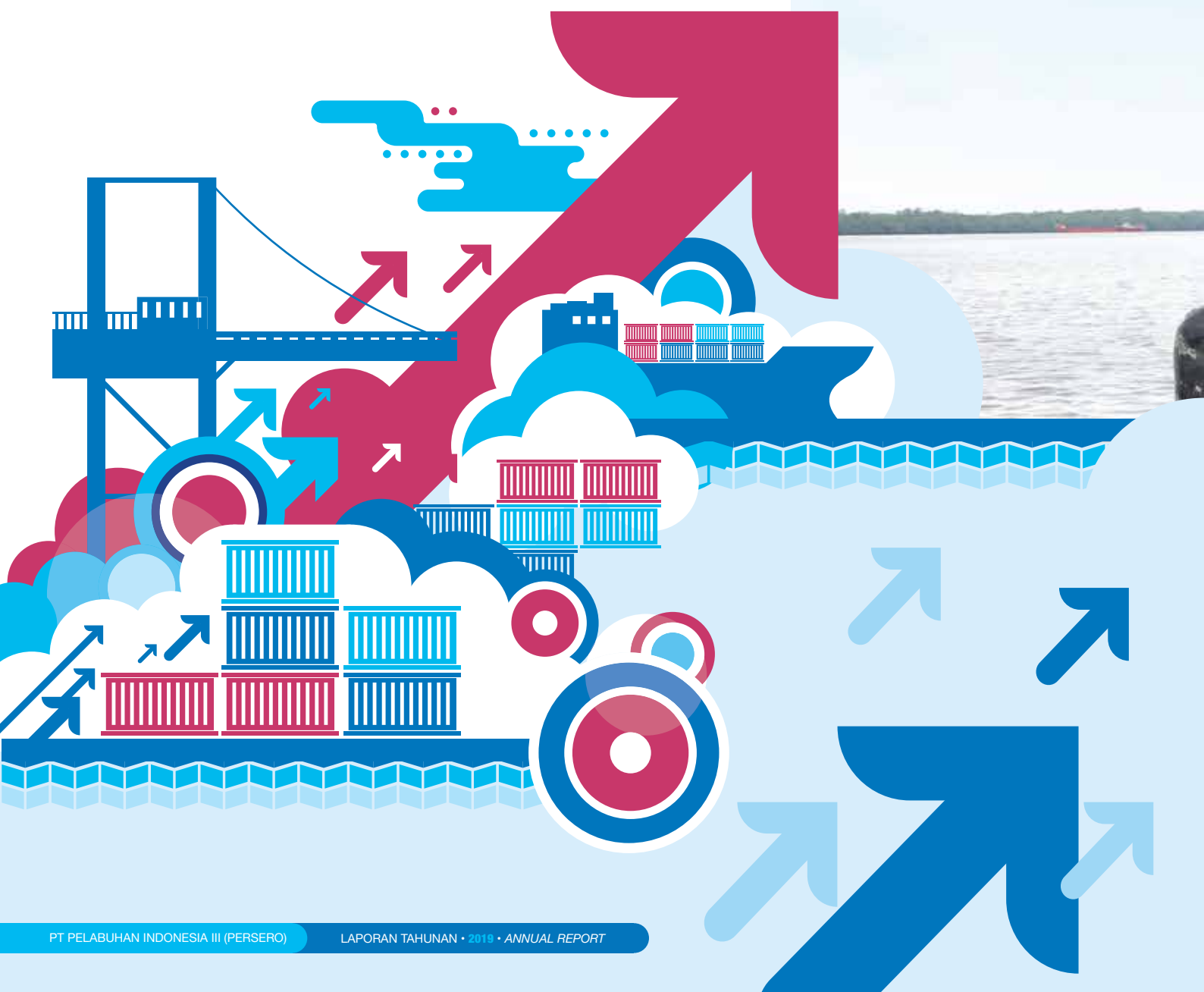


Setelah mitigasi dilakukan, terlihat bahwa terdapat penurunan tingkat risiko dengan identifikasi 10 risiko rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hingga akhir tahun 2019 Pelindo III tidak memiliki hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

After mitigation is conducted, it can be seen that there is a decrease in risk level with the identification of ten low risks. Therefore, it is concluded that up to the end of 2019 Pelindo III does not have risks with significant effects on business continuity.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE





TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Peran Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi setiap entitas usaha mutlak dibutuhkan dalam rangka menjamin kepentingan seluruh pihak, baik pemangku kepentingan maupun pemegang saham melalui aktivitas pengelolaan usaha yang bertanggung jawab, serta jauh dari aspek-aspek yang merugikan. Penerapan GCG pada Perusahaan tidak berkedudukan sebagai suatu dimensi yang terpisah, namun terintegrasi dalam setiap aktivitas inti perusahaan seperti pada aktivitas operasional dan pengelolaan keuangan. Tata kelola usaha yang baik jika dipraktikkan dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan tentunya mampu mendorong perbaikan kinerja usaha di tengah berbagai kondisi. Implementasi GCG yang baik setidaknya mampu membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan serta memberikan *output* terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan usaha yang ada.

Sebagai sebuah entitas usaha yang memiliki visi ke depan di sektor jasa kepelabuhanan, Pelindo III tentunya memiliki keinginan untuk menciptakan tata kelola usaha yang baik dengan memenuhi serta menginternalisasi seluruh prinsip-prinsip yang terkandung. Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk menjadikan GCG sebagai budaya yang diterapkan secara menyeluruh di setiap tingkatan organisasi maupun jabatan.

PRINSIP DAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Prinsip tata kelola yang diterapkan oleh Perusahaan mengacu kepada peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, yakni:

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

The role of Good Corporate Governance (GCG) for all business entities is unquestionably required in order to ensure the interests of all parties, both stakeholders and shareholders, through responsible business management that is free from harmful aspects. GCG implementation in the Company is understood as an integrated dimension within all core activities, such as operational and financial management activities. If properly practised with strong and sustainable commitment, good business governance will be able to encourage improvement to the business performance amidst the current dynamic condition. Appropriate GCG implementation will, at the very least, be able to build the trust of all stakeholders and provide the best output in facing the existing business challenges.

As a business entity with a vision in the port service sector, Pelindo III has a willingness to create good business governance by meeting and internalising all of the contained principles. The Company's commitment is not only limited to the abovementioned efforts but also realised by making GCG as its culture to be implemented in all level of organisations and positions in the Company.

PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Governance principles implemented by the Company refer to the Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 juncto No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOE, namely:

1. *Transparency, i.e. disclosure in the implementation of the decision-making process and openness in providing material and relevant information on a company;*
2. *Accountability, i.e. clarity of function, implementation and responsibility of organs so that a company's management may run effectively;*
3. *Responsibility, i.e. conformity in the management of a company to the laws and regulations as well as sound corporate principles;*

4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dari kelima prinsip GCG yang disebutkan, Pelindo III senantiasa berkomitmen untuk melakukan internalisasi dengan menyusun *roadmap* pengembangan GCG dengan memperhatikan tujuan bisnis yang ingin dicapai serta tantangan terkait pengelolaan usaha di masa mendatang. Perusahaan tentunya berupaya menyusun *roadmap* GCG yang mampu mengikuti perkembangan usaha di sektor jasa kepelabuhanan baik perkembangan yang ada di internal Perusahaan maupun dari eksternal.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Perusahaan, penerapan GCG menjadi suatu keharusan yang diterapkan di lingkungan Pelindo III. Penerapan ini sangat penting dalam menghadapi persaingan usaha serta iklim bisnis yang semakin kompetitif guna meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan. Sebagai BUMN, Perusahaan memiliki acuan dasar penerapan GCG yang termuat dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Peraturan tersebut tentunya menjadi landasan utama Perusahaan dalam mengembangkan *best practice* pengelolaan usaha serta sebagai landasan atas komitmen pelaksanaan GCG di lingkungan Pelindo III.

Perusahaan berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan dan mengimplementasikan GCG serta wajib diketahui dan dijalankan oleh seluruh insan Pelindo III mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Pegawai. Hal ini menjadi substansial guna memenuhi tuntutan Pemangku Kepentingan dalam mencapai target Perusahaan yang diharapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN GCG

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, Pelindo III senantiasa berkomitmen dan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang terukur dan akuntabel. Perusahaan meyakini bahwa dengan mengimplementasikan GCG, Perusahaan akan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan bisnis dan kemudian mampu memberi warna pada kinerja Perusahaan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Filosofi dalam menjalankan bisnis ini menjadi latar belakang yang kuat bagi Pelindo III untuk menetapkan tujuan dalam menerapkan GCG.

4. *Independence*, i.e. a condition in which a company is managed professionally without any conflict of interest with and influence/pressure from other parties that are not based on the laws and regulations as well as sound corporate principles; and
5. *Fairness*, i.e. fairness and equality in meeting the rights of Stakeholders arising from agreements and laws and regulations.

Regarding the five principles of GCG, Pelindo III is fully committed to conducting internalisation by drafting a GCG development roadmap in consideration of the business goals to be achieved as well as challenges related to business management in the future. The Company puts attention to its efforts to compose a GCG road map that will be able to follow business development in the port service sector, both internally and externally.

COMMITMENT OF GCG IMPLEMENTATION

In improving the effectiveness and efficiency within the Company's management, implementation of GCG is a requirement for Pelindo III. Such implementation is essential in facing business challenges and the increasingly competitive business climate, so as to be able to leverage the Stakeholders' trusts in line with the Company's vision and mission. As an SOE, the Company implements GCG by referring to the Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011. The regulation becomes the foundation for the Company in improving the best practice of business management as well as for the commitment to implementing GCG within Pelindo III.

The Company is committed to consistently carrying out and implementing GCG and disseminating it to be conducted by all Personnel of Pelindo III, including the BOC, BOD, Management, and employees, to meet the demands of Stakeholders and to achieve the Company targets through the implementation of GCG principles.

OBJECTIVES AND BENEFITS OF GCG IMPLEMENTATION

Pelindo III's commitment to always implementing GCG refers to the measured and accountable GCG principles. By implementing GCG, the Company believes that it will be able to survive against various business challenges and further provide nuance to the Company's performance so as to be more competitive and sustainable. Such philosophy in performing its business serves as a strong foundation for Pelindo III to set its objectives in implementing GCG.

TUJUAN PENERAPAN GCG BAGI PERUSAHAAN

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION FOR THE COMPANY

NO.	TUJUAN OBJECTIVE	SASARAN TUJUAN TARGET
1.	<p>Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan; <i>Encouraging the achievement of Company continuity through management that is based on transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality principles</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemenuhan best practice GCG pada organ-organ Perusahaan termasuk organ utama • Pemenuhan standar yang berlaku pada proses bisnis Perusahaan • Pemenuhan hak-hak Pemangku Kepentingan sesuai pada ketentuan yang berlaku • Meminimalisasi penyimpangan dalam kegiatan usaha • Pengambilan keputusan yang mandiri yang berlandaskan penelaahan yang komprehensif <ul style="list-style-type: none"> • <i>To fulfil the best practices of GCG on Company's organs, including its main organ.</i> • <i>To meet the prevailing standards in the Company's business process.</i> • <i>To meet the rights of stakeholders based on the prevailing provisions.</i> • <i>To minimise deviation in business activities.</i> • <i>To encourage independent decision-making process that is based on comprehensive reviews.</i>
2.	<p>Membangun mekanisme <i>Check and Balances</i> antar organ Perusahaan serta Pemangku Kepentingan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan dan komunikasi antar organ Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya; <i>Developing Check-and-Balances mechanism between the Company's organs and other Stakeholders to be able to encourage improvement to Company performance and communication between the Company's organs and other Stakeholders.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan asesmen dan/atau asesmen mandiri implementasi penerapan GCG pada Perusahaan. • Tindak lanjut <i>area of improvement</i> atas hasil asesmen dan/atau asesmen mandiri yang telah dilaksanakan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Implementation of assessment and/or self-assessment on GCG implementation in the Company.</i> • <i>Follow-up on the area of improvement resulting from the implementation of assessment/self-assessment.</i>
3.	<p>Meningkatkan kepercayaan Pemangku Kepentingan serta citra dan reputasi Perusahaan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perusahaan; <i>Improving Stakeholders' trust as well as the image and reputation of the Company, to be able to leverage business relations and performance of the Company.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya target skor implementasi GCG pada Perusahaan. • Mendapatkan pengharagaan khususnya dalam bidang Implementasi GCG. • Publikasi informasi publik tepat waktu guna memenuhi prinsip transparansi. <ul style="list-style-type: none"> • <i>The achievement of GCG Implementation score target at the Company.</i> • <i>To obtain awards, especially in GCG implementation.</i> • <i>Timely disclosure of public information to fulfil the transparency principle.</i>
4.	<p>Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat; <i>Optimising Company's values by improving the principles of transparency, accountability, reliability, responsibility, and fairness to reinforce the Company's competitiveness.</i></p>	<p>Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan GCG pada Perusahaan. <i>To improve Human Capital competencies in GCG aspect in the Company.</i></p>
5.	<p>Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien; serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan <i>Encouraging a professional, transparent and efficient management of the Company, empowering the Company's functions and improving the independence of the Company's organs.</i></p>	<p>Pelaksanaan <i>review</i> terhadap sistem operasi dan prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan guna mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikan pada perubahan regulasi yang ada. <i>To review the operation and procedure systems of the Company to follow the current development and adjust with the changes in regulations.</i></p>

NO.	TUJUAN OBJECTIVE	SASARAN TUJUAN TARGET
6.	<p>Mendorong agar organ Perusahaan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perusahaan.</p> <p><i>Encouraging the decision-making process of the Company's organs and carrying out activities that are based on high moral value and compliance with the prevailing laws and regulations, as well as encouraging awareness of social responsibility of the Company to the Stakeholders as well as the preservation of the surrounding environment of the Company.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan pakta integritas sebagai bagian dari komitmen Insan Pelindo III dalam implementasi GCG. • Penandatanganan surat benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan pengambilan keputusan strategis Perusahaan. • <i>Signing of integrity pact as part of the commitment of Pelindo III Personnel in GCG implementation.</i> • <i>The signing of conflict of interest statement in the procurement of goods and services and strategic decision-making processes of the Company.</i>

Komitmen kuat Perusahaan untuk mengimplementasikan prinsip dan nilai yang terkandung dalam GCG tentunya selaras dengan maksud dan tujuan keberadaan Perusahaan sebagai sebuah entitas usaha yang berbentuk BUMN. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003, pendirian BUMN haruslah memiliki tujuan seperti memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara; mengejar keuntungan; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ini tentunya sesuai dengan dimensi penerapan GCG yang berlaku umum yang terakomodasi dalam aspek *People, Profit, dan Planet*.

The Company's strong commitment to implementing principles and values contained in GCG is certainly in line with the purposes and objectives of the Company as an SOE business entity. As stipulated in the Law No. 19 of 2003, the establishment of SOE shall have objectives such as providing a contribution to national economic development and state income, seeking for profit, benefitting the public by providing high-quality goods and services, pioneering business activities that have yet to be carried out by private sectors and cooperatives and actively providing guidance and support to underprivileged people, cooperatives and the public in general. Such objectives are in line with the dimension of GCG implementation that is applicable in general and accommodated within the People, Profit, and Planet aspects.

DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perusahaan senantiasa mengedepankan pemenuhan aspek legal-formal dalam melaksanakan kegiatan tata kelola usahanya. Pemenuhan aspek tersebut direalisasikan dalam bentuk pengadopsian aturan yang berlaku di dunia usaha secara umum maupun regulasi yang berlaku di lingkungan BUMN atau di sektor perhubungan dan kemaritiman secara khusus di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

Selain mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang tata kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, jo. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan juga melakukan beberapa penyesuaian regulasi yang berlaku guna menyempurnakan pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan. Selain memenuhi ketentuan yang berlaku, hal tersebut juga berfungsi untuk menciptakan interpretasi teknis terhadap mekanisme GCG yang terpadu di luar tujuan-tujuan kepatuhan. Dari regulasi yang berlaku,

LEGAL BASIS AND POLICY OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company continuously prioritises the fulfilment of formal legal aspect in carrying out its business governance activities. Such fulfilment is manifested in adopting the regulations that are generally applicable in the business industry as well as other regulations applicable within SOE or in transportation and maritime sector, particularly in which the Company conducts its business.

Aside from referring to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance in SOE, jo. Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/2012 on Amendments to Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, the Company also made several adjustments to the applicable regulations to improve GCG implementation within the Company. In addition to fulfilling the applicable provisions, this also serves to create technical interpretations of the GCG mechanism that are integrated outside the compliance objectives. From the applicable regulations, the Company interprets the contents contained in each regulation that intersects with the Company's business

Perusahaan melakukan tafsiran atas muatan yang terkandung dari tiap-tiap regulasi yang bersinggungan dengan kegiatan usaha Perusahaan untuk kemudian diinternalisasi dalam bentuk aturan-aturan yang berlaku di lingkup internal.

Beberapa aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan usaha dan tata kelola Perusahaan yaitu:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No. 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5208).

KEPUTUSAN MENTERI

- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-104/MBU/2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi BUMN.
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJPP.
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP.
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

PERATURAN MENTERI

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

activities to then be internalised in the form of rules that apply within the internal scope.

Several regulations that serve as the guidelines for business activities and governance implementation in the Company are:

LAWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- *Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure.*
- *Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on SOE (Article 5 paragraph 3).*
- *Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.*
- *Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 on Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.*
- *Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 on Shipping.*

GOVERNMENT REGULATIONS

- *Government Regulation No. 61 of 2009 on Port Business.*
- *Presidential Regulation No. 35 of 2011 on Amendment to the Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Goods/ Services Procurement by the Government.*
- *Government Regulation No. 20 of 2010 on Water Transport (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 No. 26, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5108) as amended to Government Regulation No. 22 of 2011 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 No. 43, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5208).*

MINISTERIAL RESOLUTIONS

- *Decree of the Minister of SOE No. Kep-104/MBU/2002 on Assessment to the Candidates for Members of BOD of SOE.*
- *Decree of the Minister of SOE No. Kep-102/MBU/2002 on RJPP Drafting.*
- *Decree of the Minister of SOE No. Kep-101/MBU/2002 on RKAP Drafting.*
- *Decree of the Minister of SOE No. Kep-100/MBU/2002 on Assessment of SOE Soundness Level.*
- *Decree of the Minister of SOE No. Kep-09A/MBU/2002 on Fit-and-Proper Test for the Candidates for Members of BOD of SOE.*
- *Decree of Minister of Transportation No. KM 54 of 2002 on Seaports Implementation.*

MINISTERIAL REGULATIONS

- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 which has been amended several times, lastly by the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 on Guidelines to Determine Income for the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOE.*
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss the Members of the BOC and Supervisory Board of SOE.*

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-16/MBU/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss the Members of BOD of SOE.*
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-11/MBU/09/2015 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-08/MBU/06/2015 on Guidelines to Report the Realisation of the Use of Funds from State Capital Investment in SOE and Limited Liability Companies.*
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-08/MBU/06/2015 on Guidelines to Report the Realisation of the Use of Funds from State Capital Investment in SOE and Limited Liability Companies.*
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-16/MBU/2012 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2012 on Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss the Members of BOD of SOE.*
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of the BOC/Supervisory Board of SOE.*
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-06/MBU/2012 on Amendment to the Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2012 on Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss the Members of the BOD of SOE.*
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-05/MBU/2008 on Procurement of Goods and Services at SOE.*
- *Regulation of the Minister of SOE No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE.*
- *Decree of the Secretary to the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012, on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.*

PERATURAN LAINNYA

- Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual dan Code of Corporate Governance*).
- Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III.
- Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006.
- Anggaran Dasar Pelindo III.
- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam risalah RUPS.

OTHER REGULATIONS

- *Joint Decree of the BOC and BOD No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of GCG (Board Manual dan Code of Corporate Governance).*
- *Joint Decision of the BOC, BOD, and Pelabuhan Indonesia III Labor Union No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated 25 September 2017, on the Code of Conduct within Pelindo III.*
- *The 2006 General GCG Guidelines by the National Governance Policy Committee (KNKG).*
- *Articles of Association of Pelindo III.*
- *Resolutions of General Meeting of Shareholders (GMS) contained in the minutes of GMS.*

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (COCG)

LATAR BELAKANG

Dalam rangka Impelementasi GCG di lingkungan Perusahaan, Pelindo III secara sistematis membentuk pedoman tata kelola Perusahaan yang disebut sebagai *Code of Corporate Governance* (CoCG) sebagai manual yang menjadi rujukan

CODE OF CORPORATE GOVERNANCE (COCG)

BACKGROUND

In the internalisation of GCG best practices within its business, Pelindo III systematically developed a *Code of Corporate Governance* (CoCG) as a manual and reference for all individuals of the Company to carry out their duties

seluruh Insan Pelindo III dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Perusahaan menekankan bahwa prinsip GCG merupakan kaidah, norma, ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja Perusahaan sehingga pelaksanaannya perlu dioptimalkan.

Penyusunan CoCG adalah upaya penjabaran lebih lanjut Perusahaan dalam mengimplementasikan praktik GCG. Dengan adanya CoCG, diharapkan akan tercipta suatu pola kerja tata kelola Perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

KEDUDUKAN DAN SIFAT PENGEMBANGAN COCG

Mengingat CoCG merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan.

Dengan karakteristik CoCG yang bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya sangat tergantung pada perubahan yang terjadi di Perusahaan. Untuk itu, secara berkala Perusahaan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan agar pelaksanaan CoCG Perusahaan relevan dengan kondisi Perusahaan dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di dunia bisnis secara umum dan sektor jasa kepelabuhanan secara khusus.

MUATAN COCG PERUSAHAAN

Dalam buku pedoman GCG Perusahaan, terangkum beberapa aspek pembahasan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. PENDAHULUAN

Pada bagian ini diterangkan mengenai apa yang menjadi latar belakang dibentuknya pedoman GCG (CoCG) di Perusahaan, maksud dan tujuan dikeluarkannya pedoman tersebut, serta ruang lingkup dan sistematika pengkajian pedoman.

2. POKOK-POKOK GCG

Dalam pembahasan pokok-pokok GCG, termuat informasi mengenai *soft structure* dalam penerapan GCG seperti tujuan penerapan GCG, prinsip-prinsip GCG, Visi dan Misi Perusahaan, dan Tata Nilai.

3. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Setelah memuat informasi mengenai *soft structure*, pembahasan selanjutnya adalah perangkat pelaksana (*infrastruktur*) GCG di lingkungan Perusahaan seperti organ utama pelaksana GCG, organ pendukung, serta struktur tata kelola dengan pihak eksternal.

4. PROSES GCG

Muatan proses GCG menerangkan petunjuk teknis atas ruang lingkup implementasi GCG pada organ utama, organ pendukung, dan struktur GCG lainnya seperti pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, penetapan kontrak manajemen (KPI), pen delegasian wewenang, penetapan anggaran dan kerja Perusahaan, mekanisme rapat, dan lain sebagainya.

and responsibilities. The Company emphasises that GCG principles are the rules, norms, and corporate guidelines required in the management and performance improvement of the Company; hence, the implementation shall be optimised.

The preparation of CoCG is the Company's further effort in implementing GCG practices. Through CoCG, the Company expects to create a work and governance pattern of the Company's individuals that is in line with such principles.

POSITION AND NATURE OF COCG DEVELOPMENT

Considering that CoCG is a further elaboration of Articles of Association, its implementation shall always refer to the laws and regulations as well as GMS resolutions as the higher provisions. Various detail regulations contained in the Articles of Association, directives from the Shareholders determined in the General Meeting of Shareholders, and other legal provisions remain binding despite them being nonspecifically described.

With its dynamic and continuously developing characteristics, improvement of CoCG highly depends on the changes occurred in the Company. Hence, the Company periodically adjusts the CoCG so that it remains relevant to the condition of the Company and can adapt to the dynamics of the business industry in general and port service sector in particular.

CONTENTS OF COCG

The Company's CoCG guideline contains various discussion and guidelines of technical implementation and is divided into several parts, namely:

1. INTRODUCTION

This part describes the background for the establishment CoCG within the Company, intents and objectives of the guidelines, as well as scope and systematics of guideline presentation.

2. PRINCIPALS OF GCG

This part contains information on soft-structure of GCG implementation, such as objectives of GCG implementation, GCG principles, Vision and Mission, as well as Corporate Values.

3. CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Following the information on soft-structure, this part describes the GCG infrastructures within the Company, such as the main organs of GCG implementation, supporting organs, as well as governance structure with external parties.

4. GCG PROCESS

This part describes technical directions on the scope of GCG implementation in the main organs, supporting organs and other GCG structures such as the appointment and dismissal of the BOC, determination of management contract (KPI), delegation of authority, determination of Company's plan and budget, meeting mechanisms, and so on.

5. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada bab ini memuat pembahasan mengenai dimensi serta pola hubungan antara Perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG yang ada.

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG

Seiring dengan perkembangan dinamika dunia usaha baik global maupun nasional, penyempurnaan atas pelaksanaan teknis implementasi GCG senantiasa dilaksanakan Perusahaan. Peningkatan kualitas penerapan GCG dilakukan dengan merujuk pada standar penerapan tata kelola usaha yang berlaku di Indonesia serta rekomendasi dari hasil asesmen tata kelola yang dilakukan secara berkala. Dari rekomendasi tersebut, Perusahaan akan menindaklanjuti temuan-temuan dengan melakukan perbaikan dan mengupayakan meminimalisasi potensi risiko tata kelola yang timbul.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUKTUR TATA KELOLA

Mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, struktur umum tata kelola perusahaan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi yang berkedudukan sebagai organ utama dalam melakukan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam melaksanakan proses *check and balances* kegiatan usaha agar dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara sehat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, organ Perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

- RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. MANAGEMENT OF STAKEHOLDERS ENGAGEMENT

This chapter contains the relationship dimension and pattern between the Company and various related stakeholders based on the existing GCG principles.

IMPROVEMENT TO GCG IMPLEMENTATION QUALITY

In line with global and national business dynamics, an improvement in the technical implementation of GCG is continuously performed by the Company. GCG implementation quality is always enhanced by referring to the prevailing business governance standards in Indonesia as well as a recommendation on the governance assessment results conducted periodically. Based on such recommendations, the Company shall follow-up the findings by making improvement and minimising governance risk potentials that may arise in the future.

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

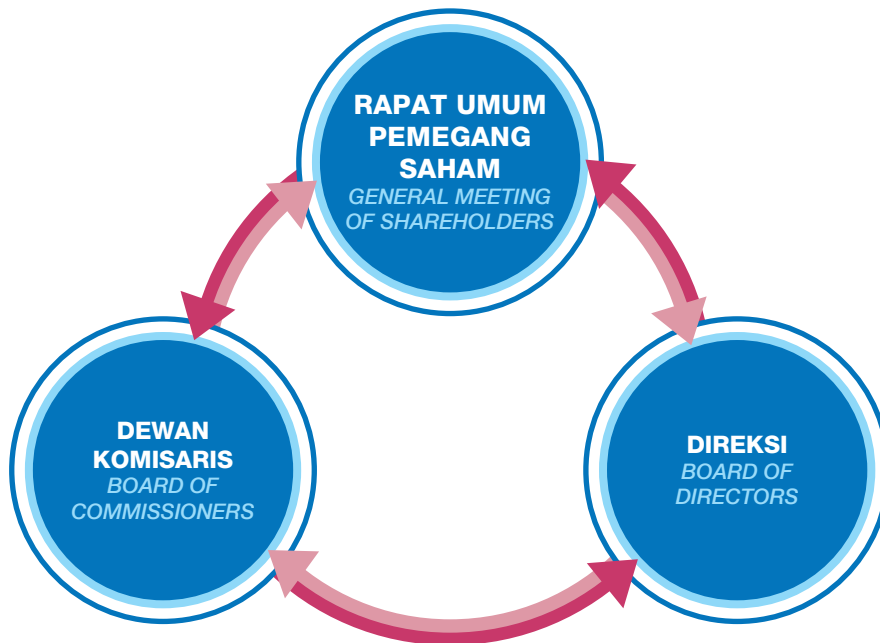
GOVERNANCE STRUCTURE

Referring to the Law of Limited Liability Company No. 40 of 2007 and Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011, the general governance structure of a company consists of the GMS, BOC, and BOD which hold the position as the main organs whose duties are to control and supervise business activities. These primary organs play a role in implementing the checks-and-balances process on business activities so that the Company can be managed and held accountable in a proper manner.

In line with Law No. 40 of 2007, Chapter I on General Provisions, Article 1 No. 2 as well as the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011, the Company's Organs consist of the GMS, BOD, and BOC.

- *GMS is the organ of the Company having the authority that cannot be granted to the BOD and BOC within the limits set in the Law and/or Articles of Association.*
- *BOC is an organ of the Company with a duty to supervise in a general and/or specific manner based on the Articles of Association and to advise the BOD.*
- *BOD is an organ of the Company who has the authority and full responsibility on the management of the Company, for the interest of the Company in accordance with objectives and purposes of the Company, as well as to represent the Company, both inside and outside the court, in accordance with the Articles of Association.*

ORGAN UTAMA STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN MAIN ORGANS OF COMPANY GOVERNANCE STRUCTURE



Organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-Undang dan Anggaran Dasar.

PENANGGUNG JAWAB TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direktur Sumber Daya Manusia ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP-385/KP.07.03/HOFC-2019 yang melaksanakan penerapan dan pemantauan terhadap tata kelola perusahaan yang sesuai dengan *Good Governance*.

KOORDINATOR PELAKSANA TATA KELOLA

Pelaksana Tata kelola Perusahaan di lingkungan Pelindo III berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan, pada sub-unit Investor Relation and Corporate Governance, sesuai Peraturan Direksi No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat.

These organs play a key role in achieving the successful GCG implementation and perform their function in accordance with the laws and regulations, Articles of Association, and other provisions on the basis that each organ has their independence in implementing the duties, functions, and responsibilities for the interest of the Company. GMS, BOC, and BOD respect each other's duties, responsibilities, and authority in line with the laws and regulations as well as the Articles of Association.

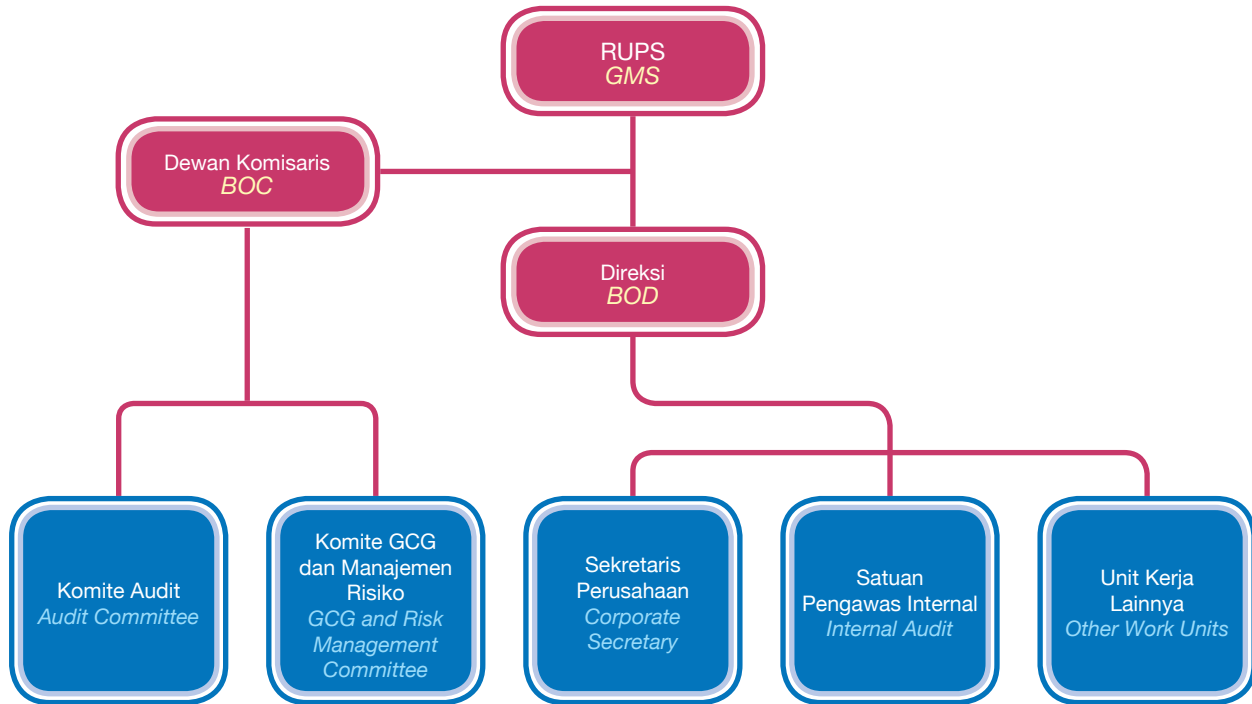
PARTIES RESPONSIBLE FOR CORPORATE GOVERNANCE

The Human Capital Director has been appointed as the person in charge of the implementation and monitoring of GCG in the Company based on the Decision of the BOD No KEP-385/KP.07.03/HOFC-2019 with the function to implement and monitor the Company's governance to be in line with the best practices of GCG.

COORDINATOR OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The executor of corporate governance in Pelindo III is under the coordination of Corporate Secretary, Division of Investor Relation and Corporate Governance, following the Regulation of BOD No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 dated 28 June 2019 on the Organisational Structure and Work Procedure of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Head Office.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE



MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme implementasi GCG Perusahaan tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Perusahaan memiliki *Board Manual* yang disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

Perusahaan telah memiliki *Board Manual*, *Code of Conduct*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Komite Audit Charter, Internal Audit Charter, dan berbagai kebijakan

MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE

GCG implementation mechanism of the Company is reflected on its strong system; an essential matter as GCG implementation does not merely rely on governance structure pillar but requiring clear regulations in the form of a mechanism. Governance mechanism is defined as a clear regulation, procedure, and relationship between the parties who make decisions and the parties who perform control (supervision) on the decisions.

The Company has established a Board Manual approved by the Joint Decree of the BOC and BOD No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision to the Guideline of Corporate Governance (Board Manual and Code of Corporate Governance).

Moreover, the Company has had the Board Manual, Code of Conduct, Gratification Control Guideline, Whistleblowing System Guideline, Audit Committee Charter, Internal Audit Charter, as well as various other policies and procedures

serta prosedur dalam mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. Semua kebijakan dan prosedur tersebut dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan agar mampu melakukan *check and balance* pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

SOSIALISASI, INTERNALISASI, DAN EVALUASI GCG

1. SOSIALISASI

Kesamaan persepsi atas implementasi GCG bagi seluruh Insan Pelindo III di setiap jenjang harus senantiasa tercipta. Hal ini berguna untuk menciptakan efektivitas pengelolaan serta menempatkan seluruh organ menuju pada satu visi yang sama terkait pemenuhan prinsip-prinsip yang ada. Untuk itu, diperlukan sarana yang tepat berupa sosialisasi atas implementasi GCG.

Kegiatan sosialisasi GCG ditujukan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai perkembangan aturan yang berlaku serta manfaat yang diciptakan terkait pemenuhan *best practice* GCG di lingkungan Perusahaan. Pemahaman tersebut harus disosialisasikan secara baik terhadap subjek-subjek pelaksanaannya, khususnya dalam lingkup internal Perusahaan/internalisasi. Hal tersebut disebabkan penerapan GCG banyak menitikberatkan pada kegiatan operasional Perusahaan yang banyak melibatkan pihak-pihak terkait di dalamnya.

Salah satu bentuk dilaksanakannya kegiatan sosialisasi penerapan GCG adalah kegiatan publikasi internal Perusahaan terkait kerangka kerja dan petunjuk implementasi GCG yang tertuang dalam *Code of Conduct* Perusahaan. Publikasi atas *Code of Conduct* dilakukan kepada organ utama Perusahaan, organ pendukung dan pihak-pihak terkait lainnya. Di tahun 2019, Perusahaan juga melaksanakan sosialisasi GCG selain sosialisasi terhadap CoCG Perusahaan yaitu Pencegahan Gratifikasi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. INTERNALISASI

Salah satu bentuk kegiatan internalisasi GCG di Pelindo III adalah dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan GCG (*Code of Conduct*) yang telah disahkan melalui keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. *Code of Conduct* Pelaksanaan GCG yang tertuang dalam buku pedoman CoCG Perusahaan menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atas implementasi GCG di Perusahaan.

3. PENGUKURAN PENERAPAN GCG

Untuk memberikan gambaran serta evaluasi atas efektivitas pelaksanaan GCG di Perusahaan. Setiap tahunnya, Perusahaan melakukan kegiatan evaluasi dan pengukuran penerapan GCG melalui kegiatan asesmen dan/atau asesmen mandiri. Pelaksanaan asesmen GCG yang dilakukan oleh Perusahaan dilaksanakan dengan menggandeng pihak eksternal. Hasil dari pengukuran GCG menjadi masukan atas pengembangan GCG di Perusahaan (*area of improvement*) untuk ditindaklanjuti agar implementasi GCG yang diterapkan berkembang secara berkelanjutan.

that support GCG implementation. All these policies and procedures are intended to support the Company in carrying out the check-and-balance mechanism in all business activities according to the prevailing GCG principles.

GCG DISSEMINATION, INTERNALISATION, AND EVALUATION

1. DISSEMINATION

The similarity in the perception of GCG implementation in all Personnel of Pelindo III at each level shall always be promoted in order to create effectiveness in the management and to place all organs to reach the same vision, i.e. to fulfil all the prevailing principles. To that end, the Company requires a proper infrastructure in the form of dissemination of GCG implementation.

GCG dissemination aims at providing a thorough understanding of the development of the regulations in force as well as benefits obtained by fulfilling the best practices of GCG within the Company. Such understanding needs to be properly disseminated on the subjects that will implement the GCG, particularly within the Company's internal organisation (internalisation). This is conducted as GCG implementation focuses mostly on the Company's operations that involve parties from diverse backgrounds.

One of the forms of implementation of GCG dissemination is the Company's internal publication of GCG implementation framework and manual contained in the Code of Conduct. The publication of Code of Conduct is carried out for the main organs, supporting organs, and other related parties. In 2019, the Company also disseminated GCG in forms other than the publication of CoCG, namely Prevention of Gratification in cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK).

2. INTERNALISATION

One of the forms of GCG internalisation within Pelindo III is the publication of GCG implementation manual (Code of Conduct) approved through a joint decision of BOC and BOD. The Code of Conduct is contained in the CoCG Guideline which serves as the technical guidelines and directions for GCG implementation in the Company.

3. MEASUREMENT OF GCG IMPLEMENTATION

To provide description and evaluation on the effectiveness of GCG implementation, the Company carries out annual evaluation and measurement of GCG implementation through assessment and/or self-assessment. The Company's GCG assessment is carried out by cooperating with external parties. The result of GCG assessment becomes an input so GCG development in the Company (area of improvement) can be followed-up, ensuring that GCG implementation can be improved continuously.

4. PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMEN GCG

Landasan yuridis dan prosedur pelaksanaan asesmen GCG di Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, jo. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

4. PROCEDURE FOR GCG ASSESSMENT

Juridical basis and procedure for the implementation of GCG assessment in the Company refer to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance in SOEs, jo. Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Good Corporate Governance in SOEs.

ROADMAP PENERAPAN GCG

Pelindo III menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk *Roadmap* GCG yang diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi GCG di seluruh tingkatan. *Roadmap* GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dalam setiap aktivitas operasional. Sasaran akhir *Roadmap* GCG adalah terwujudnya Perusahaan sebagai *Most Trusted Company*. Diharapkan dengan dicapainya sasaran akhir tersebut, Perusahaan optimis dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja secara berkesinambungan.

ROADMAP OF GCG IMPLEMENTATION

Pelindo III set the direction of its GCG implementation in a GCG roadmap which is expected to be a guideline in applying GCG in all levels. GCG roadmap aims at turning GCG into a reference in all operational activities with the final target to strengthen the Company's position as the Most Trusted Company. With such a vision in sight, the Company is optimistic to be able to improve and sustain its performance in a continuous manner.

ROADMAP PENERAPAN GCG ROADMAP OF GCG IMPLEMENTATION



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT ON GCG IMPLEMENTATION

Peran penting penerapan GCG dalam mendukung serta menjaga kinerja usaha yang baik yang mampu mengakomodasi tidak hanya tujuan bisnis perusahaan namun juga ikut menjaga kepentingan Pemangku Kepentingan senantiasa perlu terus ditingkatkan dan terus diawasi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, secara berkala Perusahaan diwajibkan melakukan kegiatan evaluasi penerapan GCG guna mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan. Selain untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan GCG, adanya kegiatan evaluasi atau asesmen GCG dilakukan setiap entitas usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku serta penyesuaian atas kebutuhan sistem tata kelola terkini di dunia usaha.

STANDAR DAN TIPOLOGI PENILAIAN ATAS HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

STANDAR

Terkait pelaksanaan atas kegiatan asesmen GCG yang dilakukan oleh Perusahaan, pihak otoritas terkait dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai instansi induk Pelindo III menerbitkan pedoman asesmen yang menjadi standar rujukan penilaian implementasi GCG pada BUMN. Standar tersebut termuat dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN. Dengan demikian, evaluasi atas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan akan merujuk pada regulasi tersebut untuk kemudian dipublikasikan pada sarana-sarana yang dibenarkan dalam aturan yang ada di eksternal maupun internal Perusahaan.

TIPOLOGI

Perbedaan jenis asesmen GCG terletak pada pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Terdapat 2 jenis asesmen GCG yang dilakukan diantaranya kegiatan asesmen yang melibatkan pihak, institusi, atau lembaga di luar Perusahaan (eksternal) dan kegiatan asesmen yang melibatkan pihak internal Perusahaan (*self-assessment*). Dalam melakukan kegiatan asesmen, Perusahaan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan periode asesmen 2 tahun sekali.

The significant role of GCG implementation in supporting good business performance and accommodating the Company's business goals as well as maintaining the interests of Stakeholders needs to be continuously improved and monitored. To that end, the Company periodically evaluates its GCG implementation to measure its effectiveness within the operations of the Company. Aside from that, GCG assessment needs to be carried out by every business entity to adjust to the prevailing regulations as well as to meet the most up-to-date needs of the governance system in the business.

ASSESSMENT STANDARDS AND TYPOLOGY FOR GOVERNANCE IMPLEMENTATION

STANDARDS

Regarding the implementation of GCG Assessment activity conducted by the Company, the related authorities, namely the Ministry of SOE as the parent institution of Pelindo III, issue an assessment guideline that serves as the reference for the assessment of GCG implementation in SOEs. The standards are contained in the Decree of Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on the Assessment and Evaluation Indicators/Parameters for the Implementation of GCG in SOEs. Hence, assessment on GCG implementation within the Company shall refer to the aforementioned regulation and shall be published on media stated in the external and internal regulations of the Company.

TYPOLOGY

*The difference in the types of GCG assessment is on the parties carrying out the assessment. There are two types of GCG assessment: one that is conducted by involving external parties, institutions or agencies, and the other that involves internal parties (*self-assessment*). In conducting the assessment, the Company cooperates with Finance Supervisory and Development Board (BPKP) with the assessment period of once every two years.*

JENIS-JENIS METODE ASESMEN GCG DI PELINDO III TYPES OF GCG ASSESSMENT METHOD IN PELINDO III

ASESMEN MANDIRI SELF-ASSESSMENT	ASESMEN EKSTERNAL EXTERNAL ASSESSMENT
Menggunakan Standar Asesmen Keputusan No. SK-16/S.MBU/2012. <i>Utilises Assessment Standard according to the Decree No. SK-16/S.MBU/2012.</i>	Menggunakan Standar Asesmen Keputusan No. SK-16/S.MBU/2012. <i>Utilises Assessment Standard according to the Decree No. SK-16/S.MBU/2012.</i>
Tim penilai dilakukan oleh fungsi yang dibentuk khusus. <i>Assessor team is composed of a specifically-established function.</i>	Tim penilai dilakukan oleh profesional dari masing-masing lembaga yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan asesmen di Perusahaan. <i>Assessor team is composed of professionals from each institution appointed to assess the Company.</i>
Dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. <i>Conducted once every two years.</i>	Dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. <i>Conducted once every two years.</i>

ASESMEN GCG 2019

Tujuan dari pelaksanaan asesmen GCG yang dilakukan Perusahaan adalah untuk mengukur, memberi gambaran, serta evaluasi bagi seluruh pihak mengenai sudah sejauh mana Perusahaan mampu menginternalisasi prinsip-prinsip GCG yang ada dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan. Asesmen GCG sendiri melakukan pengukuran pada 6 aspek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Hasil asesmen GCG disajikan dalam bentuk skor dengan indikator bobot yang berbeda, persentase capaian, serta kualifikasi kualitas penerapan GCG.

THE 2019 GCG ASSESSMENT

The assessment carried out by the Company on its GCG practice aims at measuring, providing a description, and evaluating the extent of GCG principles internalisation in every business activity of the Company for all parties. GCG assessment measures six aspects that are stipulated in the Decree of Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012. The result of the GCG assessment is presented in a scoring form with different value indicators, achievement percentage, and qualification of GCG implementation quality.

TAHAPAN PELAKSANAAN ASESMEN

Pada tahun 2019, Perusahaan telah melakukan asesmen yang dilakukan oleh eksternal Perusahaan (*External Assessment*) yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rincian pra, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan asesmen GCG di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

STAGES OF ASSESSMENT

In 2019, the Company has conducted an assessment by an external institution (*External Assessment*), the Finance Supervisory and Development Board (BPKP). The details of the preparation, implementation, and post-implementation of GCG assessment in 2019 are:

RINCIAN KEGIATAN ASESMEN GCG LIST OF GCG ASSESSMENT ACTIVITIES IN 2019

NO.	KEGIATAN ACTIVITIES	TANGGAL PELAKSANAAN DATE OF IMPLEMENTATION
1.	Pembentukan Tim Internal <i>Formation of Internal Team</i>	4 September <i>4 September</i>
2.	<i>Entry Meeting</i>	14 September <i>14 September</i>
3.	Penelaahan Dokumen <i>Document Review</i>	18 September s.d. 3 Oktober <i>18 September to 3 October</i>
4.	Pembahasan hasil asesmen <i>Discussion of Assessment Result</i>	17-18 Oktober <i>17-18 October</i>

NO.	KEGIATAN ACTIVITIES	TANGGAL PELAKSANAAN DATE OF IMPLEMENTATION
5.	Exit Meeting	23 Oktober 23 October
6.	Pengumuman skor dan hasil asesmen Announcement of Assessment Score and Result	30 Oktober 30 October

HASIL PENILAIAN GCG 2019

Berdasarkan hasil asesmen, di tahun 2019 penerapan GCG mengalami kemajuan yang cukup berarti, baik dalam lingkup penerapan maupun kedalaman masing-masing aspek. Perusahaan telah melaksanakan komitmen untuk menerapkan GCG di setiap lini organisasi. Berikut hasil asesmen GCG Pelindo III (per aspek) di tahun 2019:

RESULTS OF GCG ASSESSMENT 2019

Based on the self-assessment results, the GCG implementation in 2019 has progressed significantly, both within the scope of application and the depth of each aspect. The Company has committed to implementing GCG in every line of the organisation. The result of Pelindo III GCG assessment (per aspect) in 2019 is as follows:

HASIL PENILAIAN GCG 2019

RESULTS OF GCG ASSESSMENT 2019

NO.	INDIKATOR INDICATOR	BOBOT VALUE	CAPAIAN ACHIEVEMENT		
			2019	2018	2017
1.	Komitmen terhadap penerapan tata kelola berkelanjutan <i>Komitmen terhadap penerapan tata kelola berkelanjutan</i>	7	5,929	5,922	5,725
2.	Pemegang Saham dan RUPS <i>Pemegang Saham dan RUPS</i>	9	8,092	8,222	8,222
3.	Dewan Komisaris <i>Dewan Komisaris</i>	35	31,798	32,524	32,524
4.	Direksi <i>Direksi</i>	35	32,385	32,652	32,458
5.	Pengungkapan informasi dan transparansi <i>Pengungkapan informasi dan transparansi</i>	9	7,903	8,268	8,268
6.	Aspek lainnya <i>Aspek lainnya</i>	5	5	5	1,750
Jumlah Total		100	91,107	92,587	88,946
Asesor Assessor			BPKP	Self- Assessment	BPKP

Berdasarkan hasil asesmen, penerapan GCG Pelindo III pada 2019 memperoleh skor sebesar 91,107 dengan kategori "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan hasil asesmen yang dilakukan pada 2017, dimana asesmen dilakukan oleh asesor eksternal yang sama yakni BPKP Perwakilan Jawa Timur, Perusahaan memperoleh skor 88,946 atau mengalami kenaikan sebesar 2,161 poin atau 2,1%.

Based on the assessment results, the GCG implementation of Pelindo III in 2019 obtained a score of 91.107 with "Excellent" category. If compared to the assessment in 2017 conducted by the same external assessor, East Java Representative of BPKP, the Company earned a score of 88.946 or increased by 2.161 points or 2.1%.

REKOMENDASI

Dalam upaya untuk terus memperbaiki kinerja, terdapat beberapa rekomendasi berdasarkan hasil asesmen GCG di tahun 2019, sebagai berikut:

RECOMMENDATION

In the effort to improve its performance, there were recommendations based on the GCG assessment in 2019, as follows:

REKOMENDASI, TINDAK LANJUT, DAN ALASAN BELUM DITINDAKLANJUTINYA HASIL ASESMEN GCG SEBELUMNYA

THE RECOMMENDATION, FOLLOW UP, AND REASONS FOR THE FOLLOW-UP DELAY FROM THE PREVIOUS GCG ASSESSMENT RESULT

NO.	REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW UP	PENJELASAN/ALASAN EXPLANATION/REASON
KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN <i>COMMITMENT TO THE SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>			
1.	Direksi memperbarui penandatanganan atas kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap tahunnya dan menginstruksikan karyawan Pelindo III untuk menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku setiap tahunnya. <i>The BOD should renew the signing of compliance with the code of conduct annually and instructs Pelindo III employees to sign the compliance to the Code of Conduct annually.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
2.	Direksi menginstruksikan Penanggung Jawab LHKPN Perusahaan untuk memantau dan memastikan tidak ada keterlambatan penyampaian LHKPN serta melaporkan hasilnya kepada Direksi. <i>The BOD instructs the Person in Charge of LHKPN to monitor and ensures that there is no delay in LHKPN submission and reports the results to the</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
3.	Direksi memberikan sanksi yang tegas kepada wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya. <i>The BOD imposes strict sanctions to LHKPN compulsory reporter who does not report their wealth.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
4.	Direksi menyusun Program/Rencana Sosialisasi Pengaturan Gratifikasi dalam Program Kerja Tahunan Perusahaan. <i>The BOD arranges a Programme/Plan for Socialising Gratification Control in the Company Annual Work Programme.</i>		Dalam proses <i>In process</i>
5.	Direksi menginstruksikan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi untuk membuat rencana dan program kerja pengendalian gratifikasi. <i>The BOD instructs the Gratification Control Unit to make a plan and work programme for gratification control.</i>		Dalam proses <i>In process</i>
6.	Direksi dan Dewan Komisaris mengesahkan Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) di Lingkungan Pelindo III dalam suatu Keputusan Bersama. <i>The BOD and BOC ratify the Whistleblowing System (WBS) guideline in Pelindo III Vicinity in a Joint Decision.</i>	Pedoman WBS masih dalam proses review <i>WBS guideline is still in a review process</i>	Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>

NO.	REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW UP	PENJELASAN/ALASAN EXPLANATION/REASON
7.	<p>Direksi menyusun program kerja sosialisasi WBS dalam Program Kerja Tahunan Perusahaan dan menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk mempublikasikan kebijakan dan kegiatan WBS dalam majalah Perusahaan.</p> <p><i>The BOD arranges a WBS socialisation work programme in the Company Annual Work Programme and instructs the Corporate Secretary to publish the WBS policy and activity in the Company magazine.</i></p>		<p>Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i></p>
8.	<p>Direksi menginstruksikan tim Unit Pelaksana WBS untuk membuat laporan atas pelaksanaan program kerja unit/aktivitas WBS dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem WBS yang mencakup perangkat pendukung, sosialisasi yang telah dilakukan, maupun asesmen terhadap efektivitas unit pelaksana dan media pendukungnya.</p> <p><i>The BOD instructs the WBS Executing Unit to make a report on the implementation of work unit programme/ WBS activity and conduct an evaluation on WBS system implementation which includes the supporting tools, conducted socialisations, and assessment on the effectiveness of the executing unit and their supporting media.</i></p>	<p>Pedoman WBS masih dalam proses review <i>WBS guideline is still in a review process</i></p>	<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>
<p>PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL SHAREHOLDERS AND GMS/CAPITAL HOLDERS</p>			
9.	<p>Pemegang Saham menetapkan anggota Direksi baru yang definitif selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.</p> <p><i>The Shareholders appoint a new definitive BOD member at least 30 days since the term of office ends.</i></p>		<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>
10.	<p>Pemegang Saham mendokumentasikan Berita Acara Pelantikan Anggota Dewan Komisaris.</p> <p><i>The Shareholders document the Minutes of BOC Members Appointment.</i></p>		<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>
11.	<p>Pemegang Saham menyebutkan alasan pemberhentian anggota Komisaris secara tertulis dalam keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris.</p> <p><i>The Shareholders state the reasons for BOC member dismissal in writing in a GMS resolution on a BOC member dismissal.</i></p>		<p>Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i></p>
12.	<p>1. Untuk RJPP 2020-2024, Pemegang Saham melakukan pembahasan bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi presentasi RJPP oleh Direksi dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam pembahasan tersebut.</p> <p>2. RJPP 2020-2024 hasil pembahasan agar disahkan melalui keputusan RUPS tanpa menggunakan mekanisme pelampauan 60 hari dalam regulasi.</p> <p><i>1. For 2020-2024 RJPP, the Shareholders conduct a joint discussion with the BOD and BOC, including RJPP presentation by the BOD and BOC recommendation in the discussion.</i></p> <p><i>2. The results of 2020-2024 RJPP discussion shall be ratified through a GMS resolution without the 60-days overriding mechanism in the regulation.</i></p>		<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>

NO.	REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW UP	PENJELASAN/ALASAN EXPLANATION/REASON
13.	Pemegang Saham memberikan persetujuan pelepasan aset secara tepat waktu sesuai ketentuan (tidak melebihi durasi 7 hari). <i>The Shareholders approve the asset disposal on time according to the provisions (not exceeding seven days).</i>		Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i>
14.	Pemegang Saham membuat ketentuan mengenai penilaian kinerja Direksi secara individu dan pedoman penyusunan kontrak manajemen Direksi secara individual. <i>The Shareholders make provisions regarding individual BOD performance assessment and the preparation guideline for individual BOD management contract.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
15.	Pemegang Saham agar menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. <i>The Shareholders stipulate the preparation guideline for BOC supervisory duty report.</i>		Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i>
16.	Pemegang Saham menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari hasil asesmen GCG 2018 dan sebelumnya. <i>The Shareholders follow up on the area of improvement from the previous GCG assessment results in 2018.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BOARD OF COMMISSIONERS/SUPERVISORY BOARD			
17.	Realisasi pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai yang dianggarkan. <i>The realisation of competency development should be implemented according to the budget.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
18.	Kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris diberikan tambahan poin tentang <i>Whistleblowing System</i> . <i>An additional point about the Whistleblowing System should be added to the BOC supervision and advice provision policy.</i>		Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i>
19.	Dalam tugas pengawasan, Dewan Komisaris memberi arahan tentang kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan. <i>In their supervision duty, the BOC also provides directives on Subsidiary management policy.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
20.	Dewan Komisaris juga melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual. <i>The BOC also assesses the individual BOC performance.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
21.	Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap usulan remunerasi Direksi sebelum mengusulkan penetapannya kepada Pemegang Saham. <i>The BOC conducts a review on the BOD remuneration proposal before proposing the stipulation to the Shareholders.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
22.	Pedoman tata tertib rapat juga mengatur pelaksanaan evaluasi hasil tindak lanjut rapat sebelumnya dan telaah atas usulan Direksi dan persetujuan RUPS atas usulan Direksi. <i>The guideline for meeting rules also stipulates the follow-up evaluation of the previous meeting and the review on BOD proposal and GMS approval on the proposal.</i>		Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i>

NO.	REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW UP	PENJELASAN/ALASAN EXPLANATION/REASON
23.	Mencantumkan tindak lanjut atas hasil rapat sebelumnya pada risalah rapat bulan berikutnya. <i>Including the follow up on the previous meeting results in the minutes of the meeting in the upcoming month.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
24.	Komite dan Dewan Komisaris melakukan proses pembaruan piagam komite dengan penyesuaian yang diperlukan. <i>The Committees and the BOC renew the committee charter with necessary adjustments.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
25.	Komite membuat laporan secara triwulanan kepada Dewan Komisaris dan menyertakan rekomendasi yang diberikan pada laporan tersebut. <i>The Committee prepares quarterly reports to the BOC and includes their recommendation in the report.</i>		Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i>
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS			
26.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program diklat bagi Direksi dan anggaran yang terpisah dengan pelaksanaan diklat karyawan. 2. Merealisasikan diklat bagi Direksi sesuai program/ rencana yang telah dianggarkan. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Prepares a training programme for the BOC with a separate budget from the employee training implementation budget.</i> 2. <i>Implementing the training for the BOD according to the budgeted programme/plan.</i> 		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
27.	Melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya pelanggaran SOP, misalnya dengan melakukan <i>review</i> dan kajian terhadap SOP yang dilanggar. <i>Taking the measures to prevent SOP violation, e.g. through a review and study on the violated SOP.</i>	Telah dilakukan <i>review</i> atas SOP yang ada <i>A review on the existing SOP has been conducted</i>	Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
28.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan rancangan RJPP 2020-2024 kepada Dewan Komisaris sebelum tanggal 30 September 2019 untuk ditelaah. 2. Menyampaikan rancangan RJPP 2020-2024 kepada Pemegang Saham selambatnya pada tanggal 31 Oktober 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Submits the 2020-2024 RJPP draft to the BOC before 30 September 2019 to be reviewed.</i> 2. <i>Submits the 2020-2024 RJPP draft to the Shareholders no later than 31 October 2019.</i> 	Penyampaian rancangan RJPP sesuai waktu yang telah ditentukan <i>Submission of RJPP draft according to the stipulated time.</i>	Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
29.	Bersama-sama dengan Pemegang Saham untuk menetapkan target kinerja individu Direksi. <i>Stipulates the BOD individual performance target with the Shareholders.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>
30.	Menyampaikan usulan insentif kinerja Direksi kepada Pemegang Saham setelah mendapatkan telaah dan persetujuan Dewan Komisaris. <i>Submits the BOD performance incentive proposal to the Shareholders after obtaining a review and approval from the BOC.</i>		Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i>

NO.	REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW UP	PENJELASAN/ALASAN EXPLANATION/REASON
31.	<p>Meningkatkan program-program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. <i>Improves K3 programmes to reduce occupational accident rates.</i></p>		<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>
32.	<p>Laporan asesmen kinerja pemasok/vendor memuat rekomendasi hasil asesmen, serta melakukan tindak lanjut hasil asesmen tersebut. <i>Supplier/vendor performance assessment report includes the recommendation from the result and conducting a follow-up to the assessment results.</i></p>		<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>
33.	<p>Meningkatkan nilai Pemegang Saham melalui peningkatan <i>Earning per Share</i> secara konsisten. <i>Increasing the Shareholders value through a consistent increase in Earning per Share.</i></p>		<p>Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i></p>
34.	<p>Agar rencana rapat Direksi tahunan memuat agenda rapat yang akan dibahas. <i>The annual BOD meeting plan shall include the meeting agenda to be discussed.</i></p>		<p>Belum ditindaklanjuti <i>Not followed up yet</i></p>
35.	<p>Dalam Notulen Rapat Gabungan menjelaskan alasan ketidakhadiran Direksi dan/atau Komisaris. <i>States the reason for BOD and/or BOC absence in the Minutes of Joint Meeting.</i></p>		<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>
36.	<p>Melakukan asesmen atas kepatuhan SPI terhadap IAC dan pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan yang dimiliki SPI (<i>self-assessment</i> tahunan dan <i>independent assessment</i> setiap 5 tahun). <i>Assesses the SPI compliance to IAC and guidelines of supervision implementation by SPI (annual self-assessment and independent assessment every five years).</i></p>		<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>
37.	<p>Menyelenggarakan RUPS RJPP 2020-2024 secara tepat waktu (selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berjalan). <i>Holds the 2020-2024 RJPP GMS on time (at least 60 days after RJPP draft has been fully received or before RJPP period commenced).</i></p>		<p>Telah ditindaklanjuti <i>Followed up</i></p>

NO.	REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW UP	PENJELASAN/ALASAN EXPLANATION/REASON
PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI <i>INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY</i>			
38.	<p>Dalam Laporan Tahunan pada bab Profil Perusahaan menginformasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris dan atau keluarganya pada perusahaan lain. Ada atau tidak adanya tindakan Perusahaan yang menyebabkan jumlah efek lainnya. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku. Nama Bursa di mana efek lainnya Perusahaan dicatatkan. Alamat Anak Perusahaan. <p><i>In the Company Profile chapter of the Annual Report should also inform:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>BOD and BOC share ownership or their families' in other companies.</i> <i>Any other existing Corporate action that causes some other securities.</i> <i>Changes in the number of other securities from the beginning of registration to the end of the financial year.</i> <i>Name of the Exchange where the Company's other securities are listed.</i> <i>Subsidiary addresses.</i> 	<p>Penyempurnaan Laporan Tahunan pada Bab Profil Perusahaan terus dilakukan</p> <p><i>Continuous Annual Report improvement in the Company Profile chapter is conducted</i></p>	<p>Telah ditindaklanjuti</p> <p><i>Followed up</i></p>
39.	<p>Dalam Laporan Tahunan pada bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Uraian produksi dan pendapatan secara lengkap. Uraian tentang komponen-komponen substansi dari pendapatan dan beban lainnya untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. Dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih Perusahaan dan laba usaha selama dua tahun. Informasi material mengenai ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal. <p><i>The Management Analysis and Discussion chapter of the Annual Report should also include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>A complete description of production and revenue.</i> <i>The description of substantial components of the revenue and other expenses to know the company's operating results.</i> <i>The impacts of price changes to Company sales or net revenue and operating profit for two years.</i> <i>Material information on expansion, divestment, acquisition, and debt/capital structuring.</i> 	<p>Penyempurnaan Laporan Tahunan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan terus dilakukan</p> <p><i>Continuous Annual Report improvement in the Management Analysis and Discussion chapter is conducted</i></p>	<p>Telah ditindaklanjuti</p> <p><i>Followed up</i></p>

NO.	REKOMENDASI RECOMMENDATION	TINDAK LANJUT FOLLOW UP	PENJELASAN/ALASAN EXPLANATION/REASON
40.	<p>Dalam Laporan Tahunan pada bab Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya remunerasi anggota Direksi yang meliputi gaji, fasilitas, dan atau tunjangan lain yang diterima dari anak perusahaan/perusahaan asosiasi perusahaan yang bersangkutan. 2. Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan secara lengkap. 3. Uraian hasil evaluasi tahunan oleh Satuan Pengawasan Intern atas pengendalian perusahaan. 4. Program peningkatan layanan kepada pelanggan dan biaya yang telah dikeluarkan atas program peningkatan layanan kepada langganan. 5. Pokok perkara No. 15/KPPUL/2018 tentang dugaan adanya praktik monopoli jasa bongkar muat (kebijakan wajib <i>stack</i>/penumpukan peti kemas 100%) di Pelabuhan L-Say Maumere. <p><i>The Good Corporate Governance chapter of the Annual Report should also include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amount of BOD remuneration which includes salary, facilities, and/or other benefits received from related subsidiaries/associate companies. 2. A complete description of Corporate Secretary duties implementation. 3. Description of annual evaluation results by the Internal Audit on company control. 4. Service improvement programme for customers and the costs of the service improvement programme. 5. Case No. 15/KPPUL/2018 on the alleged loading-unloading monopoly practice (mandatory stack policy/100% container stacking) in Port of L-Say Maumere. 	<p>Penyempurnaan Laporan Tahunan pada Bab Praktik Tata Kelola terus dilakukan</p> <p><i>Continuous Annual Report improvement in the Good Corporate Governance chapter is conducted</i></p>	<p>Telah ditindaklanjuti</p> <p><i>Followed up</i></p>
41.	<p>Berupaya untuk berpartisipasi dalam Sustainability Reporting Award dan sejenisnya.</p> <p><i>Participates in a Sustainability Reporting Award and the like.</i></p>		<p>Belum ditindaklanjuti</p> <p><i>Not followed up yet</i></p>

ASESMEN GCG 5 TAHUN TERAKHIR

Berikut adalah hasil asesmen GCG berdasarkan indikator parameter asesmen pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

GCG ASSESSMENT IN THE PAST FIVE YEARS

The following is the results of GCG assessments based on the assessment parameter indicator in the Decree of Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 in the last five years:

SKOR GCG PELINDO III 2015-2019

PELINDO III GCG SCORE IN 2015-2019

TAHUN YEAR	SKOR SCORE	ASESOR ASSESSOR
2019	91,107	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Jawa Timur <i>Finance Supervisory and Development Board (BPKP), East Java Representative</i>
2018	92,587	<i>Self-Assessment (Internal)</i>
2017	88,946	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Jawa Timur <i>Finance Supervisory and Development Board (BPKP), East Java Representative</i>
2016	84,831	<i>Self-Assessment (Internal)</i>
2015	82,956	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Jawa Timur <i>Finance Supervisory and Development Board (BPKP), East Java Representative</i>

PENILAIAN GCG DALAM 4 TAHUN KE BELAKANG

GCG ASSESSMENT IN THE LAST FOUR YEARS

ASESOR ASSESSOR	TAHUN YEARS	SKOR SCORE					
		KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN GCG COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION	PEMEGANG SAHAM DAN RUPS SHAREHOLDERS AND GMS	DEWAN KOMISARIS BOC	DIREKSI BOD	PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY	ASPEK LAINNYA OTHER ASPECTS
BPKP	2019	5,929	8,092	31,798	32,385	7,903	5
	2017	5,725	8,222	32,524	32,458	8,268	1,750
<i>Self-Assessment</i>	2018	5,922	8,222	32,524	32,652	8,268	5
	2016	5,566	7,430	31,064	32,508	8,262	0

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Komitmen peningkatan *best practice* tata kelola perusahaan yang baik tertuang dalam RKAP dan KPI Perusahaan dimana target perolehan skor asesmen GCG yang ditetapkan di tahun 2019 adalah sebesar 89 dan realisasinya sebesar 91,107. Terkait perbandingan dan realisasinya, Perusahaan telah menunjukkan komitmen nyata dalam hal meningkatkan implementasi seluruh prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas usahanya sehari-hari.

Pada dasarnya, dalam hal penetapan target skor asesmen GCG Perusahaan tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas nilai yang diperoleh namun juga melakukan kajian strategis dengan berbagai pihak di internal Perusahaan dalam hal ini

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALISATION

Commitment to improving the GCG best practices is contained in the RKAP and KPI of the Company where the stipulated target of GCG assessment score for 2019 is 89 with a realisation of 91.107. Concerning the comparison and its realisation, the Company has demonstrated a real commitment to improving the implementation of all GCG principles in its daily business activities.

Essentially, in determining the target of GCG assessment score, the Company does not merely focus on the quantity of obtained score but also conducts strategic review with various internal parties, such as Internal Audit, Management

Internal Audit, Management System and Risk Management, dan Strategic Planning and Corporate Performance Bureau untuk mengukur sejauh mana kapabilitas Perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG serta keterpenuhan berbagai aspek yang disyaratkan dalam mendukung implementasi tata kelola usaha yang baik dan sehat.

INDIKATOR DALAM MENENTUKAN TARGET SKOR GCG

Dalam menentukan target perolehan skor GCG, Perusahaan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada yaitu:

- Skor GCG di tahun sebelumnya (*self-assessment* dan/atau asesmen pihak eksternal);
- Tingkat pemenuhan dan tindak lanjut atas rekomendasi GCG di tahun sebelumnya;
- Implementasi atas *area of improvement* GCG; dan
- Aspirasi Pemegang Saham.

Selain melihat beberapa indikator yang ada, Perusahaan juga melakukan verifikasi implementasi GCG untuk melakukan penilaian apakah aspek keterpenuhan infrastruktur dan *soft structure* GCG di Perusahaan terkorelasi dengan praktik-praktik yang ada, seperti tingkat pemenuhan kepatuhan, laporan pelanggaran, teguran dan sanksi administrasi, laporan tingkat penyimpangan, laporan pelanggaran kode etik, serta laporan dari WBS sepanjang tahun buku.

Berdasarkan hasil penelaahan atas indikator serta verifikasi atas kondisi aktivitas tata kelola Perusahaan yang disebutkan sebelumnya, disimpulkan bahwa pengelolaan Perusahaan telah mengacu dan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham.

System and Risk Management, as well as Strategic Planning and Corporate Performance Bureau, to measure the extent of Company's capability to implement GCG principles as well as fulfilling various aspects required to support the application of good and sound business governance.

INDICATORS TO DETERMINE GCG SCORE TARGETS

The Company considers various aspects in determining the target of the GCG score, namely:

- *GCG score of the previous year (self-assessment and/or assessment by an external party);*
- *Level of fulfilment and follow-up actions of GCG recommendations in the previous year;*
- *Implementation on the GCG area of improvement; dan*
- *Shareholders' Aspirations.*

In addition to observing the existing indicators, the Company verifies its GCG implementation to understand whether it has fulfilled the aspect of infrastructure and soft-structure of GCG and whether they have been well-correlated with the existing practices in the Company, such as the level of compliance, violation report, administrative sanction, violation level report, code of conduct violation report, and WBS report throughout the fiscal year.

Based on the result of the review on indicators as well as verification of Company's governance activity condition previously mentioned, it can be concluded that the Company's management has referred to and been based on the regulations of the Ministry of SOE as the Shareholder.



KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Selain menggunakan media asesmen GCG dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tata kelola usaha yang baik di Perusahaan, Pelindo III juga memiliki sarana pengukuran lainnya salah satunya adalah *Key Performance Indicator* (KPI). Sarana pengukuran ini digunakan sebagai indikator untuk melakukan pengukuran capaian kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran maupun rencana kerja dalam RKAP 2019 guna memberikan target kerja lebih yang terukur kepada organ maupun unit kerja yang ada, serta menjadi alat ukur bagi Perusahaan dalam melakukan evaluasi di tahun-tahun ke depan. Dasar pelaksanaan pengukuran kinerja melalui KPI disahkan Perusahaan melalui RUPS dengan terlebih dahulu dilaporkan dan disetujui Kementerian BUMN.

In addition to utilising GCG assessment media, the Company utilises Key Performance Indicator (KPI) to measure the effectiveness of its GCG implementation. This method functions to measure performance achievement that has been adjusted to the work plan and budget contained in the 2019 RKAP, to provide a more measurable work target to the organs and work units of the Company, as well as to become the benchmark for the Company to perform an evaluation in the following years. The basis of performance measurement using KPI is approved by the Company through the GMS with the prior report submission to the Ministry of SOE to gain approval.

METODE PENYUSUNAN KPI

Penerapan KPI Perusahaan berbasis pada metode Malcolm-Baldrige dan mengacu pada Pedoman Penentuan KPI pada BUMN sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN. Penentuan indikator pengukuran berdasarkan pada aspirasi pemegang saham melalui Surat dari Kementerian BUMN No. S-564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP tahun 2019 dan kesepakatan pada Rakortas PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero).

KPI DRAFTING METHOD

The Company's implementation of KPI is based on Malcolm-Baldrige method and refers to Guidelines of Determination of KPI on SOE pursuant to Letter of the Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 dated 16 January 2013 on Submission of Guidelines of KPI Determination and Assessment Criteria of Excellent Performance in SOEs. The determination of measurement indicators is in accordance with the aspirations of shareholders through Letter of the Ministry of SOE No. S-564/MBU/08/2018 dated 31 August 2018 on Submission of Shareholders/Investors Aspirations for the Preparation of 2019 RKAP and the Agreement of Limited Coordination Meeting of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero).

DASAR PENENTUAN KPI TAHUN 2019 BASIS OF KPI DETERMINATION IN 2019

NO.	TAHUN YEAR	JUDUL DAN NOMOR DOKUMEN DOCUMENT TITLE AND NUMBER	ISI DOKUMEN DOCUMENT CONTENT
1.	2013	Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN <i>Letter of Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 on Guidelines of KPI Determination and Assessment Criteria of Excellent Performance in SOEs</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan bahwa KPI yang digunakan oleh Perusahaan BUMN menggunakan perspektif Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Menetapkan jumlah indikator dan bobot pada setiap perspektif <i>Stipulating that the KPI utilised in SOE refers to the Assessment Criteria of Excellent Performance (KPKU)</i> <i>Stipulating the total indicator and weight of each perspective</i>

NO.	TAHUN YEAR	JUDUL DAN NOMOR DOKUMEN DOCUMENT TITLE AND NUMBER	ISI DOKUMEN DOCUMENT CONTENT
2.	2017	Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN <i>Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/06/2017 on the Second Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 on the Income Guideline for the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan bahwa KPI Agen Pembangunan sebagai salah satu indikator yang menentukan pemberian tantiem Direksi • Menetapkan KPI Agen Pembangunan terdiri dari: Sinergi BUMN, Hilirisasi dan Kandungan Lokal, Kemandirian dan Penciptaan Nilai Tambah, Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu, serta Penugasan Pemerintah • Petunjuk Teknis untuk menetapkan indikator KPI Agen Pembangunan akan ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Menteri tersebut • <i>Stipulating that the Agent of Development KPI is one of the indicators to determine BOD tantiem</i> • <i>Stipulating the Agent of Development KPI which consists of SOE Synergy, Downstream and Local Content, Independence and Creation of Added Value, Integrated Regional Economic Development, and Government Assignment</i> • <i>Technical Instruction to stipulate the Agent of Development KPI indicator which will be stipulated separately from the Ministerial Regulation</i>
3.	2018	Arahan Umum Menteri BUMN dalam penyusunan RKAP tahun 2019 terkait Penyaluran PKBL <i>General Directive from the Minister of SOE in the preparation for the 2019 RKAP related to PKBL Distribution</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Indikator Penyaluran PKBL menjadi salah satu indikator dalam KPI Kontrak Manajemen Direksi • Indikator Penyaluran PKBL terdiri dari 8 indikator dengan rumus dan bobot yang telah ditentukan • <i>Stipulating the PKBL Distribution Indicator as one of the indicators in the BOD KPI Management Contract</i> • <i>The PKBL Distribution Indicator consists of eight indicators with the stipulated formula and weight</i>
4.	2018	Draf Peraturan Menteri tentang Kontrak Manajemen dan KPI BUMN <i>Draft of Ministerial Regulation on Management Contract and SOE KPI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan perubahan jumlah indikator dan bobot pada masing-masing perspektif • Mengusulkan pedoman penentuan KPI Direksi secara individu • <i>Proposing the amendment to the total indicator and weight of each perspective</i> • <i>Proposing the guideline for individual BOD KPI determination</i>

INDIKATOR DALAM MENENTUKAN TARGET KPI

Dalam menentukan target KPI, Perusahaan mengacu pada persyaratan yang tertuang di Pedoman Penentuan KPI pada BUMN sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN, dokumen RKAP Perusahaan tahun 2019, serta Peraturan DJPL No. HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan secara Komersial.

INDICATORS TO DETERMINE KPI TARGETS

In determining KPI targets, the Company refers to the requirements contained in the Guidelines of KPI Determination in SOEs pursuant to Letter of the Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 dated 16 January 2013 on Submission of Guidelines of KPI Determination and Criteria of Excellent Performance Assessment in SOEs, the Company's 2019 RKAP document, as well as Regulation of DJPL No. HK.103/2/18/DJPL-16 on Performance Standards of Operational Port Services on Commercialised Ports

TARGET DAN PENCAPAIAN KPI KORPORAT

Di tahun 2019, hasil pencapaian KPI Korporat adalah sebesar 100,11 atau turun 4% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercapai sebesar 103,32. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya 3 indikator yang “tidak tercapai”, yaitu:

- 1. Pertumbuhan Pendapatan Usaha**
 Realisasi pendapatan usaha tercapai sebesar 96% dari target tahun 2019 sebesar 111%. Pendapatan yang terealisasi tidak mencapai anggarannya antara lain adalah pendapatan pelayanan kapal, pelayanan peti kemas, pelayanan barang nonpeti kemas, pelayanan konsolidasi dan distribusi barang, pelayanan PELRA, perusahaan alat, perusahaan properti, pelayanan rupa-rupa usaha, pelayanan *forwarding*, dan pendapatan PMS.
- 2. Direct Export**
 Realisasi Peti Kemas ekspor tahun 2019 mencapai target 100%, tetapi target tersebut turun dari yang ditargetkan sebesar 105%. Peti kemas ekspor tahun lalu mencapai 1.207.715 TEUs sedangkan tahun 2019 hanya mencapai 1.150.706 TEUs.
- 3. PKBL**
 Jumlah Mitra Binaan yang dianggarkan 522 Mitra, sementara taksasi jumlah mitra binaan 401 Mitra. Tidak tercapainya disebabkan realisasi ke BUMN Khusus melalui PT PNM (Persero) sebesar Rp25 miliar dengan mekanisme hibah dan bukan merupakan pinjaman modal ke Mitra Binaan. Hal ini berdasarkan pada Surat Kementrian BUMN No. S-133/MBU/02/2019 perihal Penyaluran Dana Program Kemitraan melalui BUMN Khusus.

TARGET AND ACHIEVEMENT OF CORPORATE KPI

In 2019, the achievement of Corporate KPI was 100.11 or decrease by 4% compared to that of 2018 at 103.32. The decrease was caused by the three indicators that were “not reached”, namely:

- 1. Growth of Business Revenue**
The realisation of business revenue was realised at 96% of the 2019 target at 111%. The realised revenues which did not reach their targets were revenues in ship service, container service, non-container service, consolidation and goods distribution service, PELRA service, equipment rental, property business, miscellaneous service, forwarding service, and PMS revenue.
- 2. Direct Export**
The realisation of the export container in 2019 reached 100% but the target itself declined by 105%. The export container of the prior year reached 1,207,715 TEUs while in 2019 it only reached 1,150,706 TEUs.
- 3. PKBL**
The total Development Partner is targeted at 522 Partners, while the taxation of total partners only reached 401. The realisation did not reach the target due to realisation of Special SOE through PT PNM (Persero) at Rp25 billion with a grant mechanism and not in a form of capital loan to Development Partners. This is based on the Letter of the Ministry of SOE No. S-133/MBU/02/2019 on Distribution of Partnership Programme Fund through Special SOE.

INDIKATOR PENENTUAN KPI 2019

KPI DETERMINATION INDICATORS OF 2019

NO.	INDIKATOR INDICATOR	DASAR PENENTUAN DETERMINATION BASIS	SATUAN UNIT	BOBOT VALUE	TARGET	REALISASI REALISATION	NILAI PRESTASI ACHIEVEMENT SCORE	KETERANGAN INFORMATION
I. KEUANGAN DAN PASAR <i>FINANCE AND MARKET</i>				22,00			21,82	Tidak Tercapai <i>Not Achieved</i>
1.	Pertumbuhan Pendapatan Usaha <i>Business Revenue Growth</i>	SHA 2019	%	6,00	111,15	86,44	5,19	Tidak Tercapai <i>Not Achieved</i>
2.	<i>Sales to Operating Asset</i>	SHA 2019	%	6,00	51,08	51,87	6,10	Tercapai <i>Achieved</i>
3.	Capaian Pangsa Pasar Peti Kemas <i>Container Market Share Achievement</i>	Th 2019	%	5,00	99,40	99,57	5,01	Tercapai <i>Achieved</i>
4.	Penyerapan Investasi (CAPEX) <i>Investment Absorption (CAPEX)</i>	Th 2019	%	5,00	87,50	96,59	5,52	Tercapai <i>Achieved</i>
II. FOKUS PELANGGAN <i>CUSTOMER FOCUS</i>				20,00			20,60	Tercapai <i>Achieved</i>
5.	Indeks Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index</i>	Th 2019	Skala Likert <i>Likert Scale</i>	9,00	4,00	4,02	9,05	Tercapai <i>Achieved</i>
6.	Efektivitas Kerja Sama Mitra Strategis BUMN <i>Effectiveness of SOE Strategic Partner Cooperation</i>	Th 2019	%	11,00	102,50	238,09	5,25	Tercapai <i>Achieved</i>
III. EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES <i>PRODUCT AND PROCESS EFFECTIVENESS</i>				18,00			18,31	Tercapai <i>Achieved</i>
7.	Implementasi Pelindo Incorporated <i>Implementation of Pelindo Incorporated</i>	Th 2019	%	8,00	100,00	100,00	8,00	Tercapai <i>Achieved</i>
8.	Produktivitas B/M Terminal Peti Kemas <i>Loading/Unloading Productivity of Container Terminal</i>	SK DJPL 2016	B/S/H	5,00	42,40	47,23	5,25	Tercapai <i>Achieved</i>
9.	<i>Throughput</i> Pelabuhan <i>Port Throughput</i>							
	<i>a. Number of Ship/ Customer Served</i>	SK DJPL 2016	GT	3,00	186.364.033	197.425.147	3,15	Tercapai <i>Achieved</i>
	<i>b. Direct Export</i>	SHA 2019	%	2,00	105,00	100,00	1,91	Tidak Tercapai <i>Not Achieved</i>
IV. FOKUS TENAGA KERJA <i>MANPOWER FOCUS</i>				15,00			15,47	Tercapai <i>Achieved</i>

NO.	INDIKATOR INDICATOR	DASAR PENENTUAN DETERMINATION BASIS	SATUAN UNIT	BOBOT VALUE	TARGET	REALISASI REALISATION	NILAI PRESTASI ACHIEVEMENT SCORE	KETERANGAN INFORMATION
10.	Indeks Kepuasan Pegawai <i>Employee Satisfaction Index</i>	Th 2019	Skala Likert <i>Likert Scale</i>	8,00	4,00	4,45	8,40	Tercapai <i>Achieved</i>
11.	Produktivitas Pegawai <i>Employee Productivity</i>	Th 2019	Rp/ Orang <i>Rp/ Person</i>	7,00	698.082.865	704.539.814	7,07	Tercapai <i>Achieved</i>
V. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN <i>LEADERSHIP, GOVERNANCE AND COMMUNITY RESPONSIBILITY</i>				15,00			15,22	Tidak Tercapai <i>Not Achieved</i>
12.	PKBL	Th 2019	Skor <i>Score</i>	4,00	4,00	3,89	3,89	Tidak Tercapai <i>Not Achieved</i>
13.	Skor GCG <i>GCG Score</i>	Th 2019	Skor <i>Score</i>	6,00	90,00	91,10	6,08	Tercapai <i>Achieved</i>
14.	Tindak Lanjut Temuan Audit Internal <i>Follow Up on Internal Audit Findings</i>	Th 2019	Skor <i>Score</i>	5,00	80,00	90,21	5,25	Tercapai <i>Achieved</i>
VI. AGEN PEMBANGUNAN <i>AGENT OF DEVELOPMENT</i>				10,00			10,25	
15.	Sinergi BUMN <i>BUMN Synergy</i>	Th 2019	Rupiah	5,00	50.947.650.000	71.050.000.000	5,25	Tercapai <i>Achieved</i>
16.	Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai <i>Financial Independence and Value Creation</i>	Th 2019	Skor <i>Skor</i>	5,00	4,00	4,00	5,00	Tercapai <i>Achieved</i>
Jumlah Total				100			101,67	Tercapai Achieved

PENCAPAIAN KPI KORPORAT 3 TAHUN TERAKHIR

Dalam 3 tahun terakhir, pencapaian KPI Korporat adalah sebagai berikut:

ACHIEVEMENT OF CORPORATE KPI FOR THE LAST THREE YEARS

In the last three years, the achievement of Corporate KPI is as follows

PENCAPAIAN KPI KORPORAT 2017-2019 CORPORATE KPI ACHIEVEMENT IN 2017-2019

NO.	TAHUN YEAR	PENCAPAIAN KPI KPI ACHIEVEMENT
1.	2019	101,67
2.	2018	103,32
3.	2017	103,13

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Asesmen implementasi KPKU tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan:

- Surat Kementerian BUMN No. S-08/D7.MBU/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Pelaksanaan Asesmen Implementasi KPKU BUMN Tahun 2019.
- Surat Forum Ekselen BUMN No. FEB-068.ASS.KPKU.II.2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Ketentuan Asesmen KPKU BUMN Tahun 2019.
- Surat Forum Ekselen BUMN No. FEB-252.BA.VI.2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Penugasan Asesor KPKU BUMN 2019.

Kriteria yang digunakan mengacu pada Buku KPKU BUMN tahun 2017 yang didasarkan pada 2 dimensi penilaian yaitu dimensi proses dan hasil.

Pada tahun 2019 Pelindo III mencapai skor 643,75 dan mendapatkan predikat “Emerging Industry Leader”. Untuk tahun 2020, Pelindo III menargetkan tercapainya peningkatan skor untuk persiapan menuju tahapan selanjutnya yaitu menjadi “Industry Leader” dengan terus melakukan *continuous improvement*.

FAKTOR PENILAIAN PROSES

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/ Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI.

- Metode/Sistem (*Approach*) adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada:
 - Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi Perusahaan.
 - Efektivitas dari penggunaan metode/sistem tersebut.
 - Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (*repeatable*) dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis).
- Penerapan (*Deployment*) mengacu pada sejauh mana:
 - Metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya.
 - Metode/Sistem diterapkan secara konsisten.
 - Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang terkait sesuai dengan desainnya.
- Pembelajaran (*Learning*) mengacu pada:
 - Penyempurnaan Metode/Sistem dengan cara siklus evaluasi dan perbaikan (*improvement*).
 - Inovasi Metode/Sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (*breakthrough*).
 - Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap Metode/Sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang terkait dalam Perusahaan.
- Integrasi (*Integration*) mengacu pada:
 - Keselarasan Metode/Sistem dengan kebutuhan Perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya.

ASSESSMENT CRITERIA OF EXCELLENT PERFORMANCE

Asesmen implementasi KPKU tahun 2019 dilaksanakan The assessment of KPKU implementing in 2019 was carried out based on:

- Letter of the Ministry of SOE No. S-08/D7.MBU/01/2019 dated 23 January 2019 on the Implementation of KPKU Assessment in SOEs in 2019.
- Letter of SOE Excellent Forum No. FEB-068.ASS.KPKU.II.2019 dated 19 February 2019 on the Provisions for KPKU Assessment in SOEs in 2019.
- Letter of SOE Excellent Forum No. FEB-252.BA.VI.2019 dated 13 June 2019 on the Assignment of SOE KPKU Assessor in 2019.

The criteria used to refer to the 2017 KPKU BUMN Book based on two assessment dimensions, namely the process and outcome dimensions.

In 2019 Pelindo III reached a score of 643.75 and earned the “Emerging Industry Leader” predicate. For 2020, Pelindo III targets the achievement of score improvement in preparing to the next phase as an “Industry Leader” through *continuous improvement*.

PROCESS ASSESSMENT FACTORS

Factors used to assess process consists of Approach, Deployment, Learning and Integration or abbreviated as ADLI.

- The Approach is a method/system designed to conduct works. The assessment refers to:
 - Approach conformity with the requirements in the SOE KPKU and Company operation environment.
 - Effectiveness of the approach.
 - The extent of a repeatable approach and based on reliable data and information (e.g. structured and systematic)
- Deployment refers to the extent of:
 - The applied approach based on the design.
 - Consistently applied approach.
 - Approach conducted by all functions/work units in relation to the design.
- Learning refers to:
 - Enhancement of approach by evaluation and improvement cycle.
 - The innovation of approach to stimulate breakthrough.
 - Sharing of enhancement and innovation results on the approach to other work units and other process owners related to the Company.
- Integration refers to:
 - Approach alignment to the Company’s needs as described in the Company Profile and in the subcategory of other processes.

2. Ukuran, informasi, dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses.
3. Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmoniskan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran Perusahaan.

Subkategori pada dimensi Proses yang terdiri dari ADLI tersebut, dilakukan klarifikasi, saling dihubungkan untuk menekankan bahwa deskripsi *Approach* harus selalu menunjukkan penerapan yang konsisten dengan persyaratan spesifik suatu subkategori dan Perusahaan. Seiring dengan semakin matangnya proses, maka deskripsinya juga harus menunjukkan bagaimana siklus pembelajaran (termasuk inovasi) dan juga integrasi dengan proses kerja lainnya dan dengan unit kerja lainnya.

FAKTOR PENILAIAN HASIL

Faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level, Trend, Comparison* dan *Integration* (LeTCI).

- *Level* mengacu pada: tingkat pencapaian kinerja saat ini;
- *Trend* mengacu pada:
 - a) Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni, kecuraman data tren) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 tahun terakhir).
 - b) Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil-hasil kinerja.
- *Comparison* mengacu pada:
 - a) Perbandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap pembandingan yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis.
 - b) Perbandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia.
- *Integration* mengacu pada:
 - a) Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam Profil Perusahaan dan dalam subkategori pada kategori 1 s.d. 6.
 - b) Hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang.
 - c) Hasil-hasil diharmoniskan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran Perusahaan.

Subkategori pada dimensi hasil tersebut diklarifikasi dengan meminta data yang menunjukkan level kinerja, tren, dan pembandingan yang terkait untuk ukuran dan indikator utama kinerja Perusahaan serta terintegrasi dengan persyaratan utama Perusahaan. Subkategori pada dimensi hasil juga meminta data tentang luasnya cakupan hasil-hasil kinerja yang dilaporkan. Secara langsung hal ini terkait dengan penerapan dan pembelajaran Perusahaan; jika proses perbaikan disebarkan secara luas maka harusnya ada hasilnya yang sesuai.

2. *Measurement, information, and system improvement* have been complementary to each other across work units and across processes.
3. *Work programme, process, result, analysis, learning, and action, are harmonised across process and work units to support the achievement of the Company's target.*

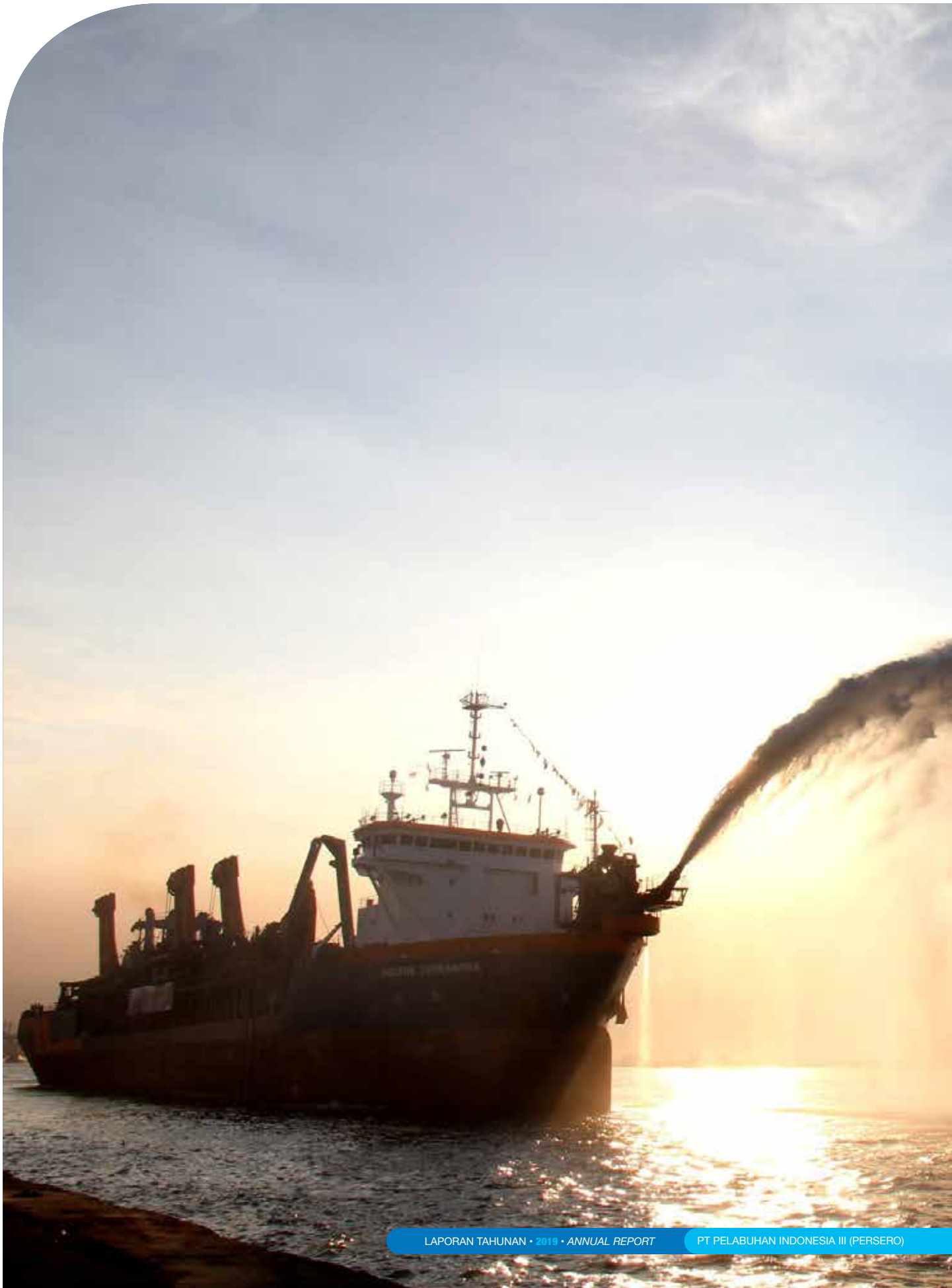
The subcategories on Process dimension comprising ADLI, are verified, interconnected to emphasise that Approach description shall demonstrate an application which is consistent with specific requirements of a subcategory and Company. Along with the increasingly prepared process, the description shall also demonstrate the learning cycle (including innovation) and integration with other work processes and with other work units

RESULT ASSESSMENT FACTORS

Factors used to evaluate company results cover Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCI).

- *Level* refers to the current performance achievement level;
- *Trend* refers to:
 - a) *The performance increase rate or the capability to sustain good performance (namely, steep trend data) over time (at least in the last three years)*
 - b) *The extent of (application level) performance results.*
- *The Comparison* refers to:
 - a) *Comparison of Company relative performance to appropriate comparators, such as competitor or company in the same industry.*
 - b) *Comparison of company relative performance to benchmarks or leader of the industry, or with a world-class company;*
- *Integration* refers to:
 - a) *Results measure on the requirements of performance of customer, product, market, process, and main work programme, as described in the Company Profile and in subcategories on categories 1 to 6.*
 - b) *Results covering valid indicators on the coming performance.*
 - c) *Results harmonised across processes and units to support the Company's target.*

The subcategory on result dimension is clarified by requiring data which demonstrate related performance level, trend and comparison for the measure and main indicators of company performance and integrated with the company's main requirements. The subcategory on Result dimension also requires data on the breadth of reported performance results. Directly, this is in relation to the implementation and learning of the Company; if the improvement process is widely spread, the results have to be corresponding.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola Perusahaan yang menjadi medium pengambilan keputusan antara para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam menentukan fondasi pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun buku yang ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. RUPS juga merupakan organ Perusahaan yang memegang otoritas tertinggi dalam Perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi. RUPS adalah representasi dari Pemegang Saham dalam berinteraksi dengan Perusahaan.

JENIS RUPS

Jenis RUPS Pelindo III terdiri dari:

1. RUPS Tahunan untuk mengesahkan RKAP yang diselenggarakan paling lambat 1 bulan setelah periode tahun yang baru dimulai.
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan yang diselenggarakan paling lambat dalam 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

WEWENANG RUPS

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Perseroan terbatas No. 40 tahun 2007, RUPS memiliki kewenangan selain dari pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Komisaris. Pada BUMN, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, RUPS diwakili oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Karena aset/kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan.

Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Menteri BUMN berkewajiban untuk melaporkan kepada hal-hal berikut kepada Menteri Keuangan:

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Corporate governance organ that functions as a medium for the decision-making process for the Shareholders, BOC, and BOD in determining the Company management foundation throughout a fiscal year, by taking into account the Articles of Association as well as prevailing laws and regulation. GMS is also the Company organ with the highest authority which cannot be granted to the BOD or BOC and both the GMS and/or Shareholders cannot intervene with the duties, function, and authority of the BOC and BOD. GMS represents the Shareholders' interaction with the Company.

TYPES OF GMS

Types of GMS in Pelindo III are:

1. Annual GMS to approve the RKAP, which is convened in no later than one month after the beginning of a new fiscal year.
2. Annual GMS to approve the Annual Report and Annual Account, which is convened in no later than six months after the end of a fiscal year.
3. Extraordinary GMS, which can be convened at any given time if required by the Shareholders or on the request of the BOC and/or BOD.

GMS AUTHORITY

According to article 75 of the Law of Limited Liability Company No. 40 of 2007, GMS has authority other than authority granted by the law and articles of association to the BOD and BOC. In SOEs, according to Article 14 of the Law No. 19 of 2003 on SOEs, GMS is represented by a Minister. According to Article 6 Verse 1 and 2 of the Law No. 17 of 2003 on State Financial affairs, the President, as the Head of Government, holds the power to manage the financial affairs of the State as part of Government's power. Since SOE assets are the state's separated assets, the power is granted to the Minister of Finance.

However, according to the Government Regulation No. 41 of 2003 on Delegation of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance on Perseoran (Persero), Perusahaan Umum (Perum), and Perusahaan Jawatan (Perjan) to the Minister of SOE, the Minister of Finance's authority in SOE development and monitoring is partly delegated to the Minister of SOE. Thus, the Minister of SOE is obliged to report the following matters to the Minister of Finance:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP. 2. Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan antara lain untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Dividen kepada Pemegang Saham. b. Cadangan. c. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun individu atas Direksi dan Dewan Komisaris. 6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan. 7. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 8. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Dewan Komisaris. 9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris. 10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan. 11. Mendelegasikan tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi kepada Dewan Komisaris. 12. Membubarkan atau melikuidasi Perusahaan. 13. Mengalihkan kepemilikan saham Perusahaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Approving or rejecting RJPP and RKAP. 2. Establishing calculation of the Company's profit gains allocation, among others, for: <ol style="list-style-type: none"> a. Dividend to Shareholders. b. Reserves. c. Partnership and Community Development Programmes. 3. Appointing and dismissing the BOD and BOC. 4. Establishing performance targets for each member of BOD and BOC. 5. Evaluating the collective and individual performances of members of BOD and BOC. 6. Determining external auditors to perform audit activity on the Company's financial statements. 7. Establishing remuneration for the BOD and BOC. 8. Establishing policy on potential conflicts of interest related to the BOC. 9. Establishing the maximum amount of BOC position that may be concurrently served by a Commissioner. 10. Establishing the maximum amount of position of BOC that may be concurrently served by a Director in Subsidiaries. 11. Delegating the function of distributing the duties and authority of BOD to the BOC. 12. Dissolving or liquidating the Company. 13. Diverting the Company's share ownership. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

INFORMASI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

Pemegang Saham yang bertindak sebagai Pemegang Saham Utama dan Pengendali adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebesar 100% atau mewakili sebanyak 3.200.000 lembar saham dalam bentuk saham Seri A Dwiwarna. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 14 ayat 1 tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara.

INFORMATION ON SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Majority and Controlling Shareholder of the Company are the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOE which holds 100% shares of the Company or representing 3200,000 shares of Dwiwarna (Golden Share) Series A. According to Law No. 19 of 2003 article 14 paragraph 1 on SOE, the Ministry of SOE acts as the GMS since all shares are owned by the Government.

PEMEGANG SAHAM PELINDO III PELINDO III SHAREHOLDER



HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Ruang lingkup hak dan tanggung jawab Pemegang Saham Perusahaan tercantum dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, terdiri dari:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan.
3. Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen).
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Mengalihkan kepemilikan saham Perusahaan.

KESETARAAN DI ANTARA PEMEGANG SAHAM

Dengan status Perusahaan sebagai BUMN yang kepemilikan saham 100% dipegang oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN, cakupan atas pemenuhan aspek kesetaraan (*fairness*) Pemegang Saham di lingkungan Perusahaan tidak terlalu luas seperti pada perusahaan publik. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban Perusahaan serta pemenuhan atas hak pemegang saham hanya dilakukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti standar pelaporan yang berlaku di bawah Kementerian BUMN. Meski demikian, sebagai bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas terutama bagi masyarakat yang memegang obligasi Perusahaan, Perusahaan tetap memublikasikan beberapa informasi dalam bentuk Laporan Keuangan (triwulan, semesteran, dan tahunan, baik yang belum dilakukan audit maupun yang telah diaudit), Laporan Tahunan Perusahaan, Laporan Manajemen, Laporan PKBL, dan bentuk-bentuk pengungkapan lainnya yang dibenarkan dari segi regulasi yang berlaku.

AKSES INFORMASI YANG DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perusahaan membagi saluran akses informasinya dengan melakukan klasifikasi sesuai pada kebutuhan masing-masing pihak. Sehubungan dengan kepemilikan tunggal saham Perusahaan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Perusahaan senantiasa memenuhi ketentuan pemberian akses informasi melalui ketentuan yang berlaku di Kementerian BUMN. Selain itu, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya terkait masyarakat pemegang obligasi Perusahaan, Perusahaan juga memberikan akses informasi dengan materi-materi informasi yang dibenarkan secara regulasi.

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS IN GMS

The scope of rights and responsibilities of Shareholders of the Company is stipulated in the Law No. 19 of 2003 on SOE, namely:

1. *Attending GMS and casting a vote in the GMS.*
2. *Obtaining material information (including the right to pose a question) either from the BOC or BOD on financial matters or other issues concerning the Company.*
3. *Earning profit distribution of the Company (dividend).*
4. *Convening GMS in the event of the negligence of the BOD and/or BOC to convene Annual GMS and to request to convene Extraordinary GMS at any given time deemed necessary, in accordance with the Articles of Association.*
5. *Transferring ownership of the Company's shares.*

EQUALITY AND FAIRNESS AMONG SHAREHOLDERS

Due to the Company's status as an SOE with 100% of its shares owned by the Government, i.e. the Ministry of SOE, the scope of the fulfilment of fairness and equality aspect to the Shareholders are not as broad as that of public companies. The reason for such issue is related to the Company's responsibility as well as the fulfilment of shareholder rights by the Government of the Republic of Indonesia, and by following the reporting standards prevailing in the Ministry of SOE. Nevertheless, as a form of commitment to the transparency and accountability aspects, particularly to the public who hold the Company's bonds, the Company continues to publish information in the form of Financial Statements (unaudited and audited quarterly, semester, and annual statements), Annual Report, management report, PKBL report, and other forms of disclosure that are justified by the prevailing regulations.

INFORMATION ACCESS FOR SHAREHOLDERS

The Company divides its information channels by classifying the information in accordance with the needs of each party. Regarding the single share ownership of the Company by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOE, the Company continuously fulfills the provisions related to the provision of information access by taking the prevailing regulations in the Ministry of SOE into account. Furthermore, the Company provides access to information to its bondholders with material information justified by the prevailing regulations.

- **AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**
Perusahaan memberikan akses informasi terkait kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham melalui *announcement*, paparan publik dan pertemuan dengan analis, *press release*, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Penelitian yang terkait dengan kinerja Perusahaan. Perusahaan juga memberikan informasi atas permintaan data langsung yang diminta oleh Pemegang Saham.

- **AKSES INFORMASI KEPADA MASYARAKAT (PEMEGANG EFEK LAINNYA)**
Perusahaan memberikan akses informasi terkait kinerja Perusahaan kepada seluruh Pemegang Saham melalui *announcement*, paparan publik dan pertemuan dengan analis, *press release*, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Penelitian yang terkait dengan kinerja Perusahaan.

- **INFORMATION ACCESS FOR SHAREHOLDERS**
The Company provides information access related to the Company's performance for all Shareholders through an announcement, public expose and analyst meeting, press release, Annual And Sustainability Reports, and other Research Reports related to the performance of the Company. The Company also provides data that are directly inquired by the Shareholders.

- **INFORMATION ACCESS FOR THE PUBLIC (OTHER SECURITY HOLDERS)**
The Company provides access to information related to the Company's performance for all shareholders through an announcement, public expose and analyst meeting, press release, Annual And Sustainability Report, and other research reports related to the performance of the Company.



LAPORAN REALISASI RUPS TAHUN SEBELUMNYA

AGENDA, KEPUTUSAN, DAN REALISASI RUPS TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Pelindo III telah melaksanakan RUPS Laporan Tahunan tahun buku 2017, Laporan Pengesahaan RKAP tahun 2018, serta RUPS berupa Surat Keputusan.

REALISATION REPORT OF GMS OF THE PREVIOUS YEAR

AGENDA, RESOLUTIONS, AND REALISATION OF 2018 GMS

Throughout 2018, the Company has implemented GMS of Annual Report for the 2017 fiscal year, Report of 2018 RKAP Approval, as well as GMS in the form of Decree.

REALISASI RUPS TAHUN 2018 2018 GMS REALISATION

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT RUPS DATE AND VENUE OF GMS	NAMA DAN AKTA PELAKSANAAN RUPS GMS NAME AND DEED OF IMPLEMENTATION	AGENDA DAN HASIL RUPS GMS AGENDA AND RESOLUTION	STATUS REALISASI REALISATION STATUS
1.	22 Januari 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat 22 January 2018, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	RUPS RKAP Berita Acara RUPS RKAP No. 08 Persetujuan RKAP Tahun Buku 2018 RKAP GMS Minutes of RKAP GMS No. 08 on the Approval to RKAP for the 2018 Fiscal Year	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan/Pengesahaan RKAP serta RKAP Anggaran PKBL Tahun 2018. 2. Persetujuan dan Pengesahan <i>Key Performance Indicators</i> Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018. 3. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018. 4. Persetujuan penyesuaian penetapan nilai dan jangka waktu kerja sama yang menjadi kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. 5. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% dari masing-masing item investasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. The Approval/Ratification of RKAP as well as Work Plan and Budget for the 2018 PKBL. 2. The Approval and Ratification of the 2018 Key Performance Indicator of the BOD and the BOC. 3. The Determination of Operational Aspect indicators for Calculating the Company's Soundness Level in 2018. 4. The approval for adjusting the determination of value and time period of cooperation that becomes the authority of the BOD, BOC, and GMS. 5. Delegation of authority to the BOC to give consent if there are actions that result in changes to investment budget allocation with a maximum value of 10% from each investment item. 	Telah diambil keputusan seluruhnya terhadap agenda RUPS RKAP Tahun 2018. Full resolution has been made on the agenda of the 2018 RKAP GMS.

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT RUPS DATE AND VENUE OF GMS	NAMA DAN AKTA PELAKSANAAN RUPS GMS NAME AND DEED OF IMPLEMENTATION	AGENDA DAN HASIL RUPS GMS AGENDA AND RESOLUTION	STATUS REALISASI REALISATION STATUS
2.	<p>3 April 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat</p> <p><i>3 April 2018, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta</i></p>	<p>RUPS Laporan Tahunan 2018</p> <p>Berita Acara RUPS Tahunan No. 02 Peretujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017</p> <p><i>The 2018 Annual Report GMS</i></p> <p><i>Minutes of Annual GMS No. 02 on the Approval on the Annual Report for the 2017 Fiscal Year</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 serta Pengesahan Laporan PKBL untuk Tahun Buku 2017. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2017. 3. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2018. 4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018. <p><i>1. Approval on the Annual Report for the 2017 Fiscal Year including the Report for the Supervisory Duty of the BOC and Validation for the Annual Report for the 2017 Fiscal Year Ending on 31 December 2017 as well as Validation to PKBL Report for the 2018 Fiscal Year.</i></p> <p><i>2. Stipulation for Net Profit Utilisation of the 2017 Fiscal Year.</i></p> <p><i>3. The stipulation of Public Accountant to audit the Consolidated Financial Statement of the Company for the 2018 Fiscal Year and the PKBL Financial Statement for the 2018 Fiscal Year.</i></p> <p><i>4. The stipulation of Tantiem for the 2017 Fiscal Year, Salary, Honorarium and Allowances, as well as other Facilities for Members of the BOD and BOC in 2018.</i></p>	<p>Telah diambil keputusan seluruhnya terhadap agenda RUPS Laporan tahunan 2017.</p> <p><i>Full resolution has been made on the agenda of the 2017 Annual Report GMS.</i></p>
3.	<p>12 Juli 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat</p> <p><i>12 July 2018, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta</i></p>	<p>RUPS berupa Surat Keputusan</p> <p>Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018</p> <p><i>GMS in a form of Decree</i></p> <p><i>Decree No. SK-207/MBU/07/2018</i></p>	<p>Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.</p> <p><i>The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Dismissal and Appointment of the BOC Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).</i></p>	
4.	<p>19 September 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat</p> <p><i>19 September 2018, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta</i></p>	<p>RUPS berupa Surat Keputusan</p> <p>Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018</p> <p><i>GMS in a form of Decree</i></p> <p><i>Decree No. SK-244/MBU/09/2018</i></p>	<p>Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.</p> <p><i>The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).</i></p>	

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT RUPS DATE AND VENUE OF GMS	NAMA DAN AKTA PELAKSANAAN RUPS GMS NAME AND DEED OF IMPLEMENTATION	AGENDA DAN HASIL RUPS GMS AGENDA AND RESOLUTION	STATUS REALISASI REALISATION STATUS
5.	5 November 2018, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat 5 November 2018, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	RUPS berupa Surat Keputusan Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 GMS in a form of Decree Decree No. SK-289/MBU/11/2018	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).	

PERNYATAAN PEMENUHAN KEPUTUSAN RUPS 2018

Seluruh keputusan atau arahan Pemegang Saham tahun 2018 dalam RUPS Kinerja tahun buku 2017 dan RUPS RKAP 2018 telah selesai ditindaklanjuti.

STATEMENT OF FULFILLMENT OF 2018 GMS RESOLUTION

All resolutions and directives from the Shareholders in 2018 in the GMS to discuss the 2017 fiscal year performance and the 2018 RKAP have been completely followed-up.

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPS

1. PERSIAPAN RAPAT:

- Pemanggilan untuk RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 hari kerja sebelum acara RUPS dilaksanakan. Surat atau media pemanggilan harus mencakup informasi mengenai:
 - Agenda RUPS.
 - Materi usulan dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara RUPS.
 - Hari, tanggal, dan jam diadakannya RUPS.
 - Tempat pelaksanaan RUPS.
- Tempat pelaksanaan RUPS adalah di lokasi tempat beroperasinya Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- Tidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS Luar Biasa jika semua peserta RUPSLB sudah mengetahui, menyetujui, dan menyatakan dapat hadir.

2. PELAKSANAAN RAPAT:

- RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemegang Saham.
- RUPS diawali dengan pembacaan tata tertib RUPS.
- RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS.
- Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.

MECHANISMS TO CONVENE GMS

1. MEETING PREPARATIONS:

- Summons for Annual GMS is delivered to the Shareholders in no later than fourteen workdays before the convention of GMS. Summons letter or other media shall include the following information:
 - GMS Agenda.
 - Proposed materials and other exposition related to the GMS agenda.
 - Day, date, and time of GMS convention.
 - Location of GMS convention.
- The location for convening GMS is the location on which the Company operates, or at any other place within the Indonesian territory;
- Written summons for Extraordinary GMS is not required if all attendees of EGMS have understood, approved, and stated that they will be present in the meeting.

2. MEETING CONVENTION:

- GMS shall be chaired by a Shareholder or a party authorised with the right of substitution by the Shareholders.
- GMS shall be started by reading the GMS rules and regulations.
- GMS shall discuss matters that have been stated in the GMS agenda.
- Additional GMS agenda may be discussed after being approved by the GMS.

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

- a. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil.
- b. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah.

4. PENDOKUMENTASIAN HASIL RUPS:

- a. Sekretaris Perusahaan atau Notaris membuat risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS.
- b. Risalah RUPS harus ditandatangani Ketua Rapat dan Pemegang Saham.
- c. Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan berita acara notaris.
- d. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.
- e. Pemegang Saham berhak memperoleh risalah RUPS.

5. RUPS SIRKULER:

- a. Pemegang Saham dapat melaksanakan RUPS secara sirkuler.
- b. Syarat dan ketentuan pelaksanaan RUPS sirkuler ditetapkan oleh Pemegang Saham.

RENCANA DAN REALISASI PENYELENGGARAAN RUPS 2019

Sesuai dengan agenda dan perencanaan yang ditetapkan oleh Perusahaan serta memperhatikan secara saksama aturan-aturan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta memperhatikan arahan yang diberikan oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Utama Perusahaan, maka:

1. Penyelenggaraan RUPS RKAP 2019 diselenggarakan pada hari Jumat, 4 Januari 2019, dan bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.
2. Penyelenggaraan RUPS Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan 2018 diselenggarakan pada hari Senin, 29 April 2019, dan bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

PUBLIKASI RUPS KEPADA PEMANGSAHAM

Sebelum Perusahaan melaksanakan kegiatan RUPS, baik RKAP maupun Laporan Tahunan bersama Pemegang Saham, Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham untuk kemudian disepakati dan diagendakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses Penyampaian Informasi RUPS kepada Pemegang Saham melalui mekanisme surat menyurat sebagaimana diatur dalam Code of Corporate Governance (CoCG).

3. DECISION-MAKING:

- a. Decision-making in the GMS is carried out through a transparent and fair procedure.
- b. GMS resolutions are made based on consensus according to the prevailing laws and regulations.
- c. If the consensus is not achieved, resolutions can be made based on the valid majority vote.

4. DOCUMENTATION OF GMS RESOLUTIONS:

- a. The Corporate Secretary or a Notary shall prepare Minutes of GMS at every GMS convention.
- b. Minutes of GMS shall be signed by the Chairman of Meeting and Shareholders.
- c. The signing of GMS Minutes is not required if the minutes are prepared along with the Minutes of a Notarial Deed.
- d. Minutes of GMS must be documented and archived by the Corporate Secretary.
- e. Shareholders are entitled to obtain the Minutes of GMS.

5. CIRCULAR GMS:

- a. Shareholders may convene a Circular GMS.
- b. Requirements and provisions to convene circular GMS shall be determined by the Shareholders.

PLANS AND REALISATION OF 2018 GMS CONVENTION

In line with agenda and plan set by the Company and in thorough consideration of the laws and regulations to convene GMS as contained in the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as well as directives from the Ministry of SOE as the Main Shareholder of the Company, hence:

1. The 2019 RKAP GMS was implemented on Friday, 4 January 2019 at the Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta.
2. GMS of Annual Report and Annual Account 2018 was implemented on Monday, 3 April 2019 at the Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta.

GMS PUBLICATION TO SHAREHOLDERS

Prior to convening GMS, both for RKAP and Annual Report with the Shareholders, the Company shall notify the Shareholders about the to be approved and scheduled by the Shareholders. The process of GMS information delivery to the Shareholders is through correspondence mechanism as regulated in the Code of Corporate Governance (CoCG).

KETENTUAN KUORUM DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI DALAM RUPS

Dikarenakan status Perusahaan sebagai BUMN yang bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, dalam melaksanakan agenda kegiatan RUPS Perusahaan memiliki ketentuan kuorum sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 51% dari jumlah seluruh saham.
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Kedua.
3. Dalam pemanggilan kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit 50% dari jumlah seluruh saham.
5. Jika pada RUPS kedua masih belum tercapai kuorum, maka Perusahaan melakukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk ditetapkan kuorum RUPS ketiga.
6. Dalam pemanggilan RUPS ketiga, harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
7. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan.
8. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

QUORUM AND ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN GMS

As an SOE with the responsibility to its Shareholders, the Company has established provisions regarding quorum in the GMS as follows:

1. The GMS shall be convened if attended by 51% of the total shares, at the very least.
2. Should the quorum is not reached, the second summons to the meeting shall be conducted.
3. In the second summons, it shall be stated that the first GMS has been convened but the quorum has not been reached.
4. The second GMS is valid and entitles to make resolutions if it is attended by 50 of the total shares, at the very least.
5. Should the quorum has not been reached in the second GMS, the Company may submit a proposal to the Head of Local District Court to determine the quorum for the third GMS.
6. In the third summons, it shall be stated that the second GMS has been convened but the quorum has not been reached.
7. The second and third summons for GMS shall be conducted in no later than seven days before the convention of second and third GMS.
8. The second and third GMS shall be convened in ten days, at the earliest, and in 21 days, at the latest, after the preceding date of GMS convention.

AGENDA, KEPUTUSAN, DAN REALISASI RUPS 2019

Sepanjang tahun 2019, Pelindo III telah melaksanakan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2018, Laporan pengesahaan RKAP tahun 2019, serta RUPS berupa Surat Keputusan.

AGENDA, RESOLUTION, AND REALISATION OF 2019 GMS

Throughout 2019, Pelindo III has implemented GMS of Annual Report for the 2018 Fiscal Year, Report of 2019 RKAP approval as well as GMS in the form of Decree.

REALISASI RUPS TAHUN 2019 2019 GMS REALISATION

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT RUPS DATE AND VENUE OF GMS	NAMA DAN AKTA PELAKSANAAN RUPS GMS NAME & DEED OF IMPLEMENTATION	AGENDA DAN HASIL RUPS GMS AGENDA & RESOLUTION	STATUS REALISASI REALISATION STATUS
1.	4 Januari 2019, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat 4 January 2019, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	RUPS RKAP Berita Acara RUPS RKAP No. 02 Pengesahan RKAP Tahun Buku 2019 RKAP GMS Minutes of RKAP GMS No. 02 on the Approval to RKAP for the 2019 Fiscal Year	1. Persetujuan/Pengesahaan RKAP serta Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun 2019. 2. Penetapan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019. 3. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019. 1. The Approval/Ratification of RKAP as well as Work Plan and Budget for the 2019 PKBL. 2. The Approval and Ratification of the 2019 Key Performance Indicator of the BOD and the BOC. 3. The Determination of Operational Aspect indicators for Calculating the Company's Soundness Level in 2019.	Telah diambil keputusan seluruhnya terhadap agenda RUPS RKAP Tahun 2019. Full resolution has been made on the agenda of the 2019 RKAP GMS.

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT RUPS DATE AND VENUE OF GMS	NAMA DAN AKTA PELAKSANAAN RUPS GMS NAME & DEED OF IMPLEMENTATION	AGENDA DAN HASIL RUPS GMS AGENDA & RESOLUTION	STATUS REALISASI REALISATION STATUS
2.	<p>29 April 2019, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat</p> <p><i>29 April 2019, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta</i></p>	<p>RUPS Laporan Tahunan 2018</p> <p>Berita Acara RUPS Tahunan No. 29</p> <p>Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018</p> <p><i>The 2018 Annual Report GMS</i></p> <p><i>Minutes of Annual GMS No. 29 on the Approval on the Annual Report for the 2018 Fiscal Year</i></p>	<p>1. Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya.</p> <p>2. Persetujuan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya.</p> <p>3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2018.</p> <p>4. Penetapan dan pengesahan penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik tahun buku 2018 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2019 serta Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2019.</p> <p>5. Persetujuan Tantiem dan remunerasi kinerja tahun 2018 dan persetujuan gaji, honorarium dan tunjangan, serta fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.</p> <p><i>1. Approval on the Consolidated Financial Statement for the year ending on 31 December 2018, the restatement of the Consolidated Financial Statement of 31 December 2017 and on the year ending on the date, the 2018 Report for the Supervisory Duty of the BOC, as well as granting of full repayment and full discharge of responsibility.</i></p> <p><i>2. Approval on the 2018 PKBL Financial Statement for the 2018 fiscal year as well as granting of full repayment and full discharge of responsibility.</i></p> <p><i>3. Stipulation for Net Profit Utilisation of the 2018 Fiscal Year.</i></p> <p><i>4. Stipulation and validation for the reappointment of Public Accounting Firm for the 2018 fiscal year to check the 2019 consolidated Financial Statement of the Company for the 2019 fiscal year as well as the PKBL Financial Statement for the 2019 fiscal year.</i></p> <p><i>5. The stipulation of Tantiem and 2018 performance remuneration as well as the validation on the salary, honorarium and allowances, as well as other facilities for the BOD and BOC in the 2019 fiscal year.</i></p>	<p>Telah diambil keputusan seluruhnya terhadap agenda RUPS Laporan tahunan 2018.</p> <p><i>Full resolution has been made on the agenda of the 2018 Annual Report GMS.</i></p>
3.	<p>14 Mei 2019, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat</p> <p><i>14 May 2019, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta</i></p>	<p>RUPS berupa Surat Keputusan</p> <p>Surat Keputusan No. SK-94/MBU/05/2019</p> <p><i>GMS in a form of Decree</i></p> <p><i>Decree No. SK-94/MBU/05/2019</i></p>	<p>Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.</p> <p><i>The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Dismissal and Appointment of the BOD Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).</i></p>	

NO.	TANGGAL DAN TEMPAT RUPS DATE AND VENUE OF GMS	NAMA DAN AKTA PELAKSANAAN RUPS GMS NAME & DEED OF IMPLEMENTATION	AGENDA DAN HASIL RUPS GMS AGENDA & RESOLUTION	STATUS REALISASI REALISATION STATUS
4.	13 September 2019, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat 13 September 2019, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat	RUPS berupa Surat Keputusan Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019 GMS in a form of Decree Decree No. SK-206/MBU/09/2019	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. <i>The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).</i>	
5.	16 Oktober 2019, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat 16 October 2019, Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	RUPS berupa Surat Keputusan Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019 GMS in a form of Decree Decree No. SK-219/MBU/10/2019	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. <i>The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Dismissal and Appointment of the BOD Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).</i>	

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPS

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ATTENDING THE GMS

Dalam pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan pada 4 Januari 2019, Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir antara lain:

In the GMS convened on 4 January 2019 the BOC and BOD who attended the meeting are as follows:

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPS 2018

ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2019 GMS

NAMA NAME	JABATAN POSITION
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	
Hari Bowo	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
Wahju Satrio Utomo	Komisaris <i>Commissioner</i>
Heddy Lugito	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Zainal Abidin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Dedi Syarif Usman*	Komisaris <i>Commissioner</i>

NAMA NAME	JABATAN POSITION
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
Doso Agung	Direktur Utama <i>President Director</i>
Putut Sri Mulyanto	Direktur Operasi dan Komersial <i>Commercial and Operations Director</i>
Joko Noerhudha	Direktur Teknik <i>Engineering Director</i>
Toto Heliyanto**	Direktur Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Director</i>
Iman Rachman	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Director</i>

Keterangan:

* Dikuasakan kepada Komisaris Utama

** Dikuasakan kepada Direktur Keuangan

Information:

* Authorised to the President Commissioner

** Authorised to the Finance Director

Sementara itu, berikut adalah kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019:

Meanwhile, below is the attendance of the BOC and BOD on the GMS held on 29 April 2019:

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RUPS 2019 LAPORAN TAHUNAN ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2019 ANNUAL REPORT GMS

NAMA NAME	JABATAN POSITION
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	
Hari Bowo	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>
Wahju Satrio Utomo	Komisaris <i>Commissioner</i>
Heddy Lugito	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Zainal Abidin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>
Dedi Syarif Usman	Komisaris <i>Commissioner</i>
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
Doso Agung	Direktur Utama <i>President Director</i>
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial <i>Commercial and Operations Director</i>
Joko Noerhudha	Direktur Teknik <i>Engineering Director</i>
Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Director</i>
Iman Rachman	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Director</i>

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DAN PEMUNGUTAN SUARA

Pengambilan keputusan RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dikarenakan kepemilikan saham Perusahaan dipegang penuh oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN.

RUPS LUAR BIASA

Selain RUPS Pembahasan RKAP dan RUPS Laporan Tahunan, Perusahaan juga memiliki organ RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Ketentuan pelaksanaan RUPS LB Perusahaan, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MEKANISME PELAKSANAAN RUPS LB

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak menutup kemungkinan Perusahaan melaksanakan kegiatan RUPS LB. Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 79 Ayat 1, Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan RUPS LB dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPS LB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. Pemegang Saham yang dimaksud dapat terdiri dari 1 orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permintaan tersebut diajukan oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Tembusan dari surat tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN RUPS LB 2019

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, Perusahaan tidak pernah menyelenggarakan RUPS LB, baik dalam bentuk agenda kegiatan maupun pengambilan keputusan yang bersifat sirkuler.

MECHANISM FOR MAKING RESOLUTIONS AND VOTING

Resolutions of GMS shall be made by consensus as the shareholding of the Company is fully owned by the Government of Indonesia, represented by the Ministry of SOE.

EXTRAORDINARY GMS

Aside from GMS to discuss RKAP and Annual Report, the Company may also convene Extraordinary GMS (EGMS) at any given time if required by the Shareholders or upon the request of the BOC and/or BOD. Provisions to convene EGMS in the Company refer to the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.

MECHANISMS TO CONVENE EGMS

In conducting its business activities, the Company may also convene an EGMS. In reference to Law No. 40 of 2007, Article 79 Paragraph 1, the BOD has the function and authority to convene EGMS by firstly conducting GMS summons. However, EGMS may also be convened upon the request from the Shareholders or BOC. The Shareholders eligible to request for the convention of EGMS shall constitute one person or more who jointly represent 1/10 of the total shares with valid voting rights. The request is submitted by the Shareholders or BOC to the BOD, accompanied by a registered letter as well as the reasons. A copy of the letter shall also be submitted to the BOC.

CONVENTION OF 2019 EGMS

Until the end of the 2019 fiscal year, the Company did not convene any EGMS either in the form of agenda or circular decision-making.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Pengawasan, nasihat, dan arahan yang diberikan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada beberapa dasar aturan yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, *Code of Conduct* pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan yang tertuang dalam *Code of Corporate Governance* untuk kemudian diuraikan dalam secara lengkap dalam *Board Manual* sesuai Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Dengan mengacu pada dasar aturan tersebut, Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi dengan prinsip-prinsip:

1. Selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.
3. Pengawasan, nasihat, dan arahan yang diberikan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis.
4. Dewan komisaris bertindak sebagai majelis (bersifat kolegial) dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.
5. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak memiliki Direksi.

Board of Commissioners (BOC) is an organ of the Company with a duty to supervise and advise the BOD in conducting their management duties. Supervisory, advice, and directive from the BOC are given in a written form and presented in an official forum. In performing their duties, the BOC shall always adhere to the prevailing laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. The BOC is responsible for and authorised to supervise the management policies of the Company and to advise the BOD. Such functions are carried out for the interest of the Company and based on the Company's objectives and purposes, and not intended for certain parties or groups.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

In performing their duties and responsibilities, the BOC refers to several regulations, namely the Law No. 19 of 2003 on SOE, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, Articles of Association of the Company, Code of Conduct of GCG implementation in the Company is stipulated in the Code of Corporate Governance which is detailed comprehensively in a Joint Decision of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance). Through the regulations, the BOC shall be responsible for conducting supervisory function on the Company's management policy and process carried out by the BOD with the following principles:

1. *Always complies with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
2. *Supervises the Company's management conducted by the BOD.*
3. *Delivers the supervisory, advice, and directive to the BOD through an official forum in a written form.*
4. *Acts as a council (collectively) and may not act independently to represent the BOC.*
5. *May not perform executive duties instead of a supervisory function, unless the Company has no BOD.*

6. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui dan tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif, mencakup semua aspek bisnis.
7. Dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

6. *In conducting supervision, the BOC does not merely approve and reject actions requiring BOC's approval but also carries out proactive supervision that encompasses all business aspects.*
7. *May employ an independent professional service and/or establish committees that assist the implementation of BOC duties.*

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Secara umum tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan target kinerja Dewan Komisaris secara periodik serta menyusun pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan Direksi, termasuk pelaksanaan rencana pengembangan Perusahaan, RJPP, dan RKAP serta perubahannya.
3. Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
4. Menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan.
5. Memantau kepatuhan Direksi atas peraturan perundangan yang berlaku.
6. Mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian intern.
7. Mengkaji pemanfaatan teknologi informasi.
8. Memantau dan mengevaluasi kinerja Perusahaan.
9. Mengadakan rapat secara berkala membahas hasil pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan Direksi.
10. Jika oleh sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi kekosongan Direksi tersebut.
11. Selama jabatan anggota Direksi kosong dan RUPS belum mengangkat anggota Direksi baru, Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong.
12. Melaksanakan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham.
13. Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.
14. Menginformasikan kepada RUPS perihal kepemilikan saham dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain untuk dicantumkan dalam Laporan Tahunan.

DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In general, the BOC has the following duties:

1. *To periodically draft work plan and performance target of the BOC and draft distribution of duties among members of BOC in line with the expertise and experience of each BOC member.*
2. *To supervise and advise the BOD on the Company's management policies carried out by the BOD, including the implementation of the Company's development plans, RJPP, and RKAP as well as its changes.*
3. *To sign the Annual Report, and if a BOC member does not sign the Annual Report, the reason must be stated.*
4. *To sign Quarterly Management Reports and Annual Management Reports.*
5. *To monitor BOD compliance with applicable laws and regulations.*
6. *To supervise the effectiveness of risk management and internal control implementation.*
7. *To assess the use of information technology.*
8. *To monitor and evaluate the performance of the Company.*
9. *To hold meetings regularly to discuss the results of the implementation of supervision of the management of the company carried out by the BOD.*
10. *If for any reason the Company does not have a BOD, for the time being, the BOC is obliged to carry out the work of the BOD, then within 30 days of requesting an Extraordinary GMS to fill the vacancy of the BOD.*
11. *As long as the positions as a BOD member is vacant and the GMS has not appointed a new BOD member, the BOC appoints one other member of the BOD to carry out the duties of the BOD with the same duties, authorities, and obligations as the vacant members of the BOD.*
12. *To implement the interests of the company by considering the interests of the Shareholders.*
13. *To propose an External Auditor to be ratified at the GMS and monitor the implementation of the External Auditor's assignment.*
14. *To inform the GMS regarding share ownership and/or his family to the Company and other companies to be included in the Annual Report.*

15. Memantau efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perusahaan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas, merencanakan, dan melaksanakan evaluasi atas implementasi GCG.
16. Mengkaji komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, proses nominasi Direksi serta kebijakan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
17. Mengkaji kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta kesesuaian remunerasi dengan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
18. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

15. To monitor the effectiveness of GCG practices implemented by the Company, among others by holding regular meetings with the BOD to discuss, plan, and implement evaluations of GCG implementation.
16. To review the composition of the BOD and BOC, the process of nominating the BOD as well as the performance evaluation policies of the BOD and BOC.
17. To review the remuneration policies of the BOD and BOC as well as the suitability of remuneration with the performance of the BOD and BOC.
18. To take responsibility for carrying out their duties to the GMS.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

HAK DEWAN KOMISARIS

Hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
2. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas biaya Perusahaan, atau membentuk komite-komite sesuai kebutuhan.
3. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan.
4. Menerima gaji dan tunjangan lain termasuk santunan purnajabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
5. Mendapatkan fasilitas Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.
6. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan.
7. Melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku.

KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
 - b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer-BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate-BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
 - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.

RIGHTS AND AUTHORITY OF BOARD OF COMMISSIONERS

RIGHTS OF BOARD OF COMMISSIONERS

The following describes the rights of BOC:

1. To obtain access to the Company's information in an accurate, comprehensive and timely manner.
2. To employ the service of experts to assist their duties for a limited period at the expense of the Company, or to establish committees according to necessity.
3. To assist their duties, the BOC may establish a BOC Secretariat on the expense of the Company.
4. To receive a salary and other allowances, including postemployment benefits, according to the prevailing regulations with the amount stipulated by the GMS.
5. To obtain Company's facilities based on the GMS stipulation.
6. To receive incentives for their work achievement with the amount stipulated by the GMS, should the Company reached a certain profit level.
7. To conduct work travel based on the prevailing provisions

AUTHORITY OF BOARD OF COMMISSIONERS

1. The BOC is authorised to approve or reject the plans of the BOD in a written form in terms of:
 - a. To collateralise fixed assets for shortterm credit withdrawal.
 - b. To cooperate with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contract, asset leasing, Joint Operations, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other forms of cooperation with certain value or period as determined by the GMS.
 - c. To receive or give medium/longterm loans, except loans (debts or receivables) from business transactions, and loans given to Company subsidiaries provided that the loans are reported to the BOC.
 - d. To remove non-performing receivables and non-productive asset inventory from bookkeeping.

- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun.
 - f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 3. Mengajukan usulan calon Direksi yang baru kepada RUPS.
 4. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jikalau Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Menunjuk anggota Direksi yang ada untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.
 6. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
 7. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
 8. Mengadakan pengawasan atas pengurusan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
- e. To release fixed productive assets with economic maturity that is normally valid in the industry in general, i.e. five years.
 - f. To determine organisation structure up until one level below the BOD.
2. To enter the buildings and yards or other places used or controlled by the Company and the right to examine books, letters, evidence, inventories, to examine and match the condition of Company's cash for verification needs and other securities, and to know all actions taken by the BOD.
 3. To propose the prospective candidates for BOD member(s) to the GMS.
 4. To temporarily dismiss one or more member of the BOD, upon gaining majority votes, should the BOD violate the Articles of Association or neglect their obligations, or if there is another urgent reason for the Company to dismiss the member(s) of the BOD based on the prevailing provisions.
 5. To appoint the existing Director(s) to carry out the duties of other Director(s) who left their position, with the same power and authority, in addition to carrying out their main duties.
 6. To request for explanation on all inquired matters to the BOD, and the BOD is obliged to provide the explanations.
 7. To carry out other authority granted by the Shareholders to the GMS.
 8. To supervise the management of Subsidiaries and Joint Ventures.

PENDELEGASIAN WEWENANG

Ketentuan terkait pendelegasian wewenang Dewan Komisaris di Perusahaan yaitu Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD CHARTER)

Pengungkapan *Board Charter* dilakukan melalui situs web Perusahaan www.pelindo.co.id pada submenu Tata Kelola. Di samping itu, *Board Charter* juga menjadi materi pada program orientasi/pengenalan bagi Anggota Baru Komisaris baru.

DELEGATION OF AUTHORITY

Provisions related to the delegation of authority of the BOC at the Company refer to the Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on Review and Revision of GCG (Board Manual dan Code of Corporate Governance).

GUIDELINES AND RULES OF CONDUCT WORKING BOC (BOARD CHARTER)

Board Charter disclosures are done through the Company's website at www.pelindo.co.id in the Governance submenu. Also, the Board Charter is a material in the orientation/introduction program for new Commissioners.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

PEDOMAN DAN RUANG LINGKUP

Dalam rangka menginternalisasikan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan aktivitas pengawasan di Perusahaan, pada tanggal 3 September 2018 Pelindo III menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*), menggantikan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 dan KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 mengenai *review* dan *revisi* panduan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Pelindo III sebagai acuan bagi tata laksana kerja bagi organ Dewan Komisaris Perusahaan yang meliputi:

- Persyaratan, keanggotaan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
- Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Tugas Dewan Komisaris
- Kewenangan Dewan Komisaris
- Hak Dewan Komisaris
- Hubungan Kerja dengan Direksi
- Mekanisme Pengawasan Dewan Komisaris
- Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris
- Komite-Komite Dewan Komisaris
- Sekretariat Dewan Komisaris
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

DASAR HUKUM PENYUSUNAN BOARD MANUAL

Tata aturan kerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang berisi teknis tugas pengawasan dan pemberian saran atas pengelolaan perusahaan kepada Direksi. *Board Manual* merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip GCG, prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari pemegang saham, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris. *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan pemberlakuan *Board Manual* ini adalah:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas.
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN.

BOARD MANUAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

GUIDELINES AND SCOPE

To internalise GCG principles in carrying out supervisory activities in the Company, on 3 September 2018 Pelindo III stipulates a Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 on Review and Revision of Corporate Governance Guidelines (*Board Manual* and *Code of Corporate Governance*), replacing Joint Decree of the BOC and BOD No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 and KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 on the review and revision of the guideline for the BOC and BOD (*Board Manual*) of Pelindo III as a reference for work procedures for the BOC which includes:

- Requirements, membership, and term of office of members of the BOC
- Responsibility of the BOC
- Duties of the BOC
- Authority of the BOC
- Rights of the BOC
- Work Relationship with the BOD
- Supervisory Mechanism of the BOC
- Scope of BOC Supervisory implementation
- Committees of the BOC
- BOC Secretariat
- Performance Assessment for the BOC

LEGAL BASIS FOR ESTABLISHMENT OF BOARD MANUAL

Work procedure of the BOC is implemented by referring to the BOC work guideline (*Board Manual*) containing the technical matters on supervisory and advisory actions on the Company's management carried out by the BOD. The *Board Manual* is the codification of various regulations applicable in the Company and the best practices of GCG principles, prevailing laws and regulations, directive from shareholders, as well as provisions contained in the Articles of Association which regulate the work procedures of BOC. The *Board Manual* contains directions for work procedures of the BOC and the BOD and explains stages of activity in a structured, systematic, and comprehensible manner which can be implemented consistently and serve as a reference for the BOC and the BOD in implementing their duties to achieve the Company's vision and mission; thus, it is expected that high work standards can be achieved in line with GCG principles.

The laws and regulations which become the foundation for the drafting and enforcing of *Board Manual* are:

1. Law No. 19 of 2003 on SOE.
2. Law No. 40 of 2007 on limited liability companies.
3. Law No. 17 of 2008 on shipping.
4. Government Regulation No. 45 of 2005 on the establishment, management, monitoring, and dissolution of SOEs.

5. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan.
6. Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN.
7. Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/2012 tentang pedoman pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN.
8. Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN.
9. Peraturan Menteri BUMN No. Per-12/MBU/2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
10. Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/02/2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
11. Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/02/2015 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
12. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/MBU/2009 tentang Pengaturan Cuti bagi Direksi serta Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-08/MBU/12/2015 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
14. Surat Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN.
15. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
16. Anggaran Dasar Pelindo III.

TUJUAN PEMBENTUKAN BOARD MANUAL

Board Manual menjelaskan tentang tanggung jawab, tugas kewenangan, dan hak organ utama Perusahaan, terutama Dewan Komisaris dan Direksi, untuk mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien. Maksud penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah wujud nyata pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan.

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah menguraikan dan menjabarkan tanggung jawab, tugas, kewenangan, serta hak Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung berjalannya proses atau hubungan kerja di antara kedua organ utama Perusahaan tersebut, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Selain itu, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian Perusahaan secara maksimal, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota.

5. *Government Regulation No. 61 of 2009 on port services.*
6. *Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 on GCG implementation in SOEs.*
7. *Regulation of Minister of SOE No. Per-03/MBU/2012 on guidelines to appoint Members of the BOD and the BOC of SOE Subsidiaries.*
8. *Regulation of Minister of SOE No. Per-09/MBU/2012 on the amendment to the Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 on implementation of GCG in SOEs.*
9. *Regulation of Minister of SOE No. Per-12/MBU/2012 on supporting organs of the BOC/Supervisory Board of SOEs.*
10. *Regulation of Minister of SOE No. Per-02/MBU/02/2015 on requirements and procedures to appoint and dismiss Members of the BOC and Supervisory Board of SOEs.*
11. *Regulation of Minister of SOE No. Per-03/MBU/02/2015 on requirements and procedures to appoint and dismiss Members of the BOD of SOE.*
12. *Circular Letter of Minister of SOE No. SE-01/MBU/2009 on Proposal for Leave for the BOD and Regulation for Work Travel Abroad for the BOD and BOC.*
13. *Circular Letter of Minister of SOE No. SE-04/MBU/6/2015 on Work Travel Abroad for the BOD and BOC/Supervisory Board of SOEs.*
14. *Letter of Minister of SOE No. S-375/MBU.Wk/2011 on the Policy of Minister of SOE in Management and Supervision of SOE.*
15. *Decree of Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters to Assess and Evaluate the Implementation of Good Corporate Governance (GC) at SOEs.*
16. *Articles of Association of Pelindo III.*

OBJECTIVES OF BOARD MANUAL

The Board Manual describes the responsibilities, duties, authority and rights of the main organs of the Company, particularly the BOC and BOD, to embody professional, transparent, and efficient company management system. Board Manual is drafted and implemented as the manifestation of GCG principles implementation in the Company.

The Board Manual aims to describe and elaborate the responsibilities, duties, authorities, and rights of the BOC and BOD to support the work process or relationship between the two main organs, and to support the implementation of BOC and BOD duties.

DISTRIBUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES

The duty of President Commissioner as primus inter pares is to coordinate the activities of the BOC. Furthermore, to perform supervisory and advisory duties optimally, the BOC distributes duties to each Commissioner as stipulated in the Decree of President Commissioner of Pelindo III No.

Pembagian tugas bagi tiap-tiap anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Surat Keputusan Komisaris Utama Pelindo III No. SK-176/09/KEP/DK.P.III/2019 tentang Penetapan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Pelindo III yang ditetapkan tanggal 25 September 2019. Penjelasan pembagian tugas mengacu pada regulasi tersebut disampaikan dalam tabel berikut:

SK-176/09/KEP/DK.P.III/2019 on Stipulation of Duties and Responsibilities Distribution for Members of the BOC of Pelindo III dated 25 September 2019. The following table describes the duties of each Commissioner of the Company in reference to the regulation:

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DISTRIBUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES

NAMA NAME	JABATAN POSITION	RUANG LINGKUP TUGAS SCOPE OF DUTIES
Ahmad Bambang	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Mengoordinasikan semua bidang tugas organ Dewan Komisaris. <i>Coordinating all fields of duty of the BOC.</i>
Dedi Syarif Usman	Komisaris <i>Commissioner</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan jangka pendek Perusahaan Akuntansi, Keuangan, PKBL, dan Perpajakan Investasi dan Sumber Pendanaan Perencanaan Strategis Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <i>Short-term plans of the Company</i> <i>Accounting, Finance, PKBL, and Tax</i> <i>Investment and Funding Source</i> <i>Strategic Planning of the Company</i>
Heddy Lugito	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	<ul style="list-style-type: none"> GCG dan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Organisasi, SDM, Umum, Remunerasi, dan Nominasi Pemasaran dan Pengembangan Usaha <ul style="list-style-type: none"> <i>GCG and Risk Management</i> <i>Goods and Services Procurement</i> <i>The Organisation, Human Capital, General, Remuneration, and Nomination</i> <i>Marketing and Business Development</i>
Zainal Abidin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	<ul style="list-style-type: none"> Audit Optimalisasi Aset Sistem Pelaporan Kinerja Operasional <ul style="list-style-type: none"> <i>Audit</i> <i>Asset Optimisation</i> <i>Reporting System</i> <i>Operational Performance</i>
Wahju Satrio Utomo	Komisaris <i>Commissioner</i>	<ul style="list-style-type: none"> Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembinaan Anak Perusahaan Hukum dan Litigasi Restrukturisasi <ul style="list-style-type: none"> <i>Engineering, Information and Communication Technology</i> <i>Fostering the Subsidiaries</i> <i>Legal and Litigation</i> <i>Restructuration</i>

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan dalam RUPS oleh Pemegang Saham. Susunan dan perubahan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

The BOC is determined in the GMS by the Shareholders. The composition and changes of the BOC in 2019 are as follows:

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS I COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
1.	Hari Bowo	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-127/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 <i>Decree No. SK-127/MBU/2014 dated 10 June 2014</i>
2.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-30/MBU/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 <i>Decree No. SK-30/MBU/02/2016 dated 9 February 2016</i>
3.	Heddy Lugito	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-241/MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 <i>Decree No. SK-241/MBU/10/2016 dated 19 October 2016</i>
4.	Zainal Abidin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017 <i>Decree No. SK-198/MBU/09/2017 dated 14 September 2017</i>
5.	Dedi Syarif Usman	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 <i>Decree No. SK-207/MBU/07/2018 dated 12 July 2018</i>
6.	Ahmad Bambang*	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 <i>Decree No. SK-206/MBU/09/2019 dated 13 September 2019</i>

Keterangan:

* Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo dengan Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019.

Setelah Ahmad Bambang diangkat sebagai Komisaris Utama untuk menggantikan Hari Bowo yang diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019, komposisi Dewan Komisaris menjadi:

Information:

* Ahmad Bambang has been serving as the President Commissioner since 13 September 2019 to succeed Hari Bowo with a Decree No. SK-206/MBU/09/2019.

After Ahmad Bambang is appointed as the President Commissioner to replace Hari Bowo, who has been dismissed respectfully based on the Decree No. SK-206/MBU/09/2019, the BOC composition is as follows:

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS II COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS II

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
1.	Ahmad Bambang	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 <i>Decree No. SK-206/MBU/09/2019 dated 13 September 2019</i>
2.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-30/MBU/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 <i>Decree No. SK-30/MBU/02/2016 dated 9 February 2016</i>
3.	Heddy Lugito	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-241/MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 <i>Decree No. SK-241/MBU/10/2016 dated 19 October 2016</i>

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
4.	Zainal Abidin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017 <i>Decree No. SK-198/MBU/09/2017 dated 14 September 2017</i>
5.	Dedi Syarif Usman	Komisaris <i>Commissioner</i>	Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 <i>Decree No. SK-207/MBU/07/2018 dated 12 July 2018</i>

PROSEDUR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PEMILIHAN ULANG DEWAN KOMISARIS (SUKSESI DEWAN KOMISARIS)

Dengan status Pelindo III sebagai BUMN yang kinerjanya diawasi oleh Kementerian BUMN, dinamika pengangkatan dan pemberhentian di tataran organ utama Perusahaan termasuk Dewan Komisaris menjadi dinamika yang selalu dilalui. Selain menciptakan regenerasi, hal ini juga bertujuan untuk menjaga independensi dan kredibilitas fungsi pengawasan perusahaan agar tetap bersandar pada prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Regenerasi pejabat Perusahaan juga ditujukan untuk mendekati Perusahaan pada perspektif baru di dalam dunia bisnis terutama di sektor jasa kepelabuhanan yang dibawa oleh para profesional terbaik yang dimiliki bangsa.

Terkait dengan menempatkan konsep *right man on the right place* dalam struktur Dewan Komisaris Perusahaan, kecakapan dan kemampuan Dewan Komisaris dibutuhkan Perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan strategis. Melalui kompetensi yang dimiliki, Perusahaan dapat memperoleh pandangan profesional maupun pertimbangan dari setiap anggota Dewan Komisaris dari sudut pandang yang beragam agar kebijakan yang dirumuskan oleh Perusahaan jauh lebih efektif, tepat, dan tentunya mengedepankan aspek-aspek independensi. Dengan begitu, jalannya operasional Perusahaan diharapkan sesuai dengan visi maupun target yang telah dicanangkan.

Dalam melaksanakan pengangkatan, pemberhentian, dan pemilihan ulang Dewan Komisaris, pedoman pelaksanaannya mengikuti petunjuk yang tercantum dalam CoCG Perusahaan. Dalam hal pedoman petunjuk teknis, Perusahaan menggunakan rujukan beberapa kebijakan terkait di antaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Usaha yang Baik (GCG) pada BUMN serta Anggaran Dasar Pelindo III. Selain itu, Perusahaan juga merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

PROCEDURES TO APPOINT, DISMISS, AND RE-NOMINATION OF BOARD OF COMMISSIONERS (SUCCESSION OF BOARD OF COMMISSIONERS)

With the status of Pelindo III as an SOE whose performance is closely monitored by the Ministry of SOE, the appointment and dismissal dynamics at the main organ of the Company, including the BOC, are the dynamics that shall always be carried out by the Company. Other than encouraging regeneration, it also aims at maintaining independence and credibility of supervisory function to always be in line with the prevailing GCG principles. Regeneration of Company officials also aims at steering the Company towards new perspectives in business, particularly in the port service sector, brought by the prominent professionals of the nation.

Concerning the concept of right man on the right place in the Company's BOC structure, BOC skills and capabilities are highly required by the Company in each decision-making process or formulation of strategic policies. Through the competence, the Company may obtain professional opinion and consideration from various viewpoints so the policies formulated by the Company will be more effective, accurate, and prioritise the independence aspect. Hence, the Company's operational activity is expected to align with the vision and targets set by the Company.

In conducting appointment, dismissal, and renomination of the BOC, the Company refers to the provisions stipulated in the CoCG of the Company. In terms of a technical guideline, the Company refers to several related policies, such as Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Law No. 19 of 2003 on SOEs, Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at SOEs as well as Articles of Association of Pelindo III. Moreover, the Company also refers to the Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss Members of the BOC and Supervisory Board of SOEs.

MEKANISME PENGANGKATAN**1. SUMBER BAKAL CALON**

Pengajuan nama-nama calon Dewan Komisaris didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris, pejabat struktural dan fungsional pemerintah dari sumber lain.

2. PENJARINGAN

Penjaringan nama-nama Dewan Komisaris dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

3. PENILAIAN

Merujuk pada PER-02/MBU/02/2015, secara umum penilaian yang dilakukan terhadap calon meliputi pemenuhan persyaratan baik formal, materiel, dan lain; evaluasi terhadap persyaratan; diajukan dengan memberikan rekomendasi "Disarankan".

4. USULAN PENGANGKATAN

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris Perusahaan. Untuk penetapan, karena status Perusahaan sebagai BUMN yang kepemilikan seluruh saham dimiliki negara maka penetapan dilakukan melalui Keputusan Menteri.

PEMBERHENTIAN

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana tercantum dalam PER-02/MBU/02/2015 yaitu:

1. ALASAN PEMBERHENTIAN

Alasan pemberhentian Dewan Komisaris meliputi ketidakmampuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan bagi Perusahaan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan serta mengundurkan diri.

2. TATA CARA PEMBERHENTIAN

Tata cara pemberhentian dilakukan dengan evaluasi oleh Deputi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan dievaluasi, Perusahaan terlebih dahulu memberikan informasi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan agar Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan (untuk lisan dibuatkan berita cara penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari terhitung setelah Dewan Komisaris yang bersangkutan memperoleh informasi pemberhentian kepada Deputi. Setelah disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan ke dalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan. Proses pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris pengganti dan pemberhentian berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau RUPS.

APPOINTMENT MECHANISM**1. SOURCE OF POTENTIAL CANDIDATES**

Proposal for BOC candidates is based on the sources of potential candidates which consist of ex-members of the BOD of SOEs, the BOC, structural and functional officials of the government and other sources.

2. SELECTION

The selection for members of the BOC is conducted by the Minister of SOE, Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy to search potential candidates from various sources. All potential candidates are administrated by the Deputy.

3. ASSESSMENT

Referring to PER-02/MBU/02/2015, assessment conducted on the candidates, in general, shall encompass the fulfilment of formal, material, and other requirements; evaluation on the requirements; and proposing the candidates with "Recommended" stamp.

4. PROPOSAL FOR APPOINTMENT

Candidates obtaining "Recommended" stamp from the assessment team may be appointed as the members of the BOC. As for the determination, considering the Company's status as an SOE whose shares are wholly owned by the state, it shall be conducted through a Minister Resolution.

DISMISSAL

Provisions regarding dismissal mechanism as stipulated in PER-02/MBU/02/2015 are as follows:

1. REASONS FOR DISMISSAL

Reasons for dismissing members of the BOC including the incapability of the BOC in conducting their duties, violation of Articles of Association and laws and regulations, involvement in actions that cause loss to the Company and the nation and actions that violate code of conduct, a guilty statement based on court order and resignation.

2. DISMISSAL PROCEDURES

Dismissal procedures began with evaluation by a Deputy on the concerned BOC, followed by submitting a proposal to be determined by the Minister of SOE. Before the determination and evaluation, the Company shall inform the concerned members of the BOC so they can prepare a defence provided that such defence is delivered in written and spoken forms to the Deputy (for the spoken form, minutes of defence deliverance shall be prepared) in no later than 14 days since the concerned members of the BOC received information of dismissal. After the defence is stated, minutes of defence shall be submitted to the GMS to be resolved. The dismissal process is carried out simultaneously with the appointment of the succeeding members of the BOC. The dismissal shall take into effect since the determination through a Minister or GMS Resolution.

PEMILIHAN ULANG

Prosedur pemilihan ulang Dewan Komisaris mengikuti prosedur pengangkatan dimana usulan yang diajukan akan dievaluasi oleh Menteri, Sekretaris Menteri, atau Deputi. Apabila calon yang bersangkutan memenuhi persyaratan, maka akan diberikan kriteria “Disarankan” dan diajukan untuk ditetapkan dalam RUPS ataupun Keputusan Menteri BUMN yang bersifat sirkuler.

Dengan statusnya sebagai BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Perusahaan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dalam hal pengangkatan, pemilihan ulang, dan pemberhentian Dewan Komisaris. Karena hal-hal tersebut bersifat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku wakil Pemerintah di dalam Perusahaan, maka fungsi Nominasi dan Remunerasi Perusahaan diadakan.

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Program orientasi bagi Dewan Komisaris dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi pemahaman serta gambaran atas aktivitas bisnis, rencana usaha ke depan, panduan kerja (*Board Manual*), dan lainnya yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Dewan Komisaris. Program pengenalan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dengan melakukan kajian dokumen Agenda dan Publikasi Rencana Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari dokumen Laporan Tahunan, RKAP, RJPP, Anggaran Dasar Perusahaan, CoCG, Pedoman Etika dan Perilaku (CoC), Program Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2019, Kementerian BUMN memberhentikan dan mengangkat 1 orang Dewan Komisaris Pelindo III. Program orientasi atau di Perusahaan disebut dengan pengenalan perusahaan terhadap Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program ini berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, kemudian diturunkan menjadi CoCG. Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019 kepada Ahmad Bambang.

RENOMINATION

Procedures for the re-nomination of the BOC follow the appointment procedure in which the proposal shall be evaluated by the Minister, Secretary to the Minister, or a Deputy. If the concerned candidates meet the requirements, the “Recommended” title shall be given and they shall be proposed to be determined in the GMS or through Circular Decision of Minister of SOE.

As an SOE whose shares are fully owned by the government, the Company always adheres to the procedures that have been determined in line with the Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 regarding appointment, renomination and dismissal of the BOC. Since the abovementioned matters are established as a provision issued by the Minister of SOE as a representative of the Government in the Company, the Nomination and Remuneration function in the Company is hence removed.

ORIENTATION PROGRAMME FOR BOARD OF COMMISSIONERS

Orientation programme for the BOC is implemented to provide understanding and description of the Company’s business activities, plans, Board Manual, and so on, which become the scope of the duty of the BOC. The programme is prepared by the Corporate Secretary by conducting a review on the Agenda and Publication of Meeting Plan of the BOC, consisting of Annual Report, RKAP, RJPP, Articles of Association, CoCG, Code of Conduct, Work Programmes of Board of Commissioners and Supporting Committees of the BOC, as well as laws and regulations related to the Company’s business process.

In 2019, the Ministry of SOE dismissed and appointed a member of the BOC of Pelindo III. Hence, the Company carried out an orientation programme for the newly-appointed Commissioner. The programme is under the responsibility of the Corporate Secretary as stipulated in the Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on GCG Implementation in SOEs from which the CoCG of the Company is derived. The programme was implemented on Ahmad Bambang on 27 September 2019.

MATERI PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

THE MATERIAL OF ORIENTATION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE ASPECT	REALISASI MATERI MATERIAL REALISATION	KETERANGAN DESCRIPTION
<p>Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan berbagai masalah strategis lainnya.</p> <p><i>Description of the Company concerning the objectives, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks, and other strategic issues.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Sejarah Perusahaan Wilayah kerja Perusahaan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Laporan keuangan Perusahaan Rencana jangka pendek dan panjang Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> Company History Company work area Corporate Vision, Mission and Culture Financial statements of the Company Short-term and long-term plans of the Company 	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan.</p> <p><i>Implementation of GCG principles by the Company.</i></p>	Tata kelola Perusahaan <i>Corporate governance</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern, serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p><i>Explanation related to the delegated authority, internal and external audit activities, internal control system and policy, as well as duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the BOC.</i></p>	Struktur organisasi Perusahaan, SDM dan entitas Anak Perusahaan. <i>The Company's organisational structure, Human Capital, and Subsidiaries.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p><i>Description of duties and responsibilities of the BOC and BOD.</i></p>		
<p>Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi. Pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan di mana program tersebut dilaksanakan.</p> <p><i>An orientation programme can be given in the form of presentation, meeting or visit the Company's facilities, or any other programme deemed appropriate with the Company's condition where it is implemented.</i></p>	Kunjungan ke fasilitas pelabuhan, Anak Perusahaan, dan afiliasi dilakukan secara bertahap setelah presentasi pengenalan Perusahaan oleh Corporate Secretary. <i>Visit port facilities, Subsidiaries, and affiliations were conducted in stages after the company orientation presentation by the Corporate Secretary</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

RINGKASAN KEGIATAN ORIENTASI

ORIENTATION SUMMARY

PESERTA PARTICIPANT	TOPIK TOPICS	PENYELENGGARA ORGANISER	WAKTU DAN TEMPAT DATE AND VENUE	DURASI DURATION	BIAYA COST
Ahmad Bambang	Pengenalan Perusahaan <i>Company Introduction</i>	Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat No. TR.01.03/160/HOFC-2019 tanggal 23 September 2019 <i>Corporate Secretary based on Decree No. TR.01.03/160/HOFC-2019 dated 23 September 2019</i>	27 September 2019, Kantor Pusat <i>27 September 2019, Head Office</i>	1 hari <i>One day</i>	-

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS

Guna meningkatkan wawasan dan kompetensi Dewan Komisaris, Perusahaan telah menyelenggarakan program pengembangan Dewan Komisaris, baik melalui program internal maupun dari pihak eksternal. Berikut adalah rincian informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris pada 2019.

TRAINING AND DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

To improve the insights and competencies of the BOC, the Company has organised a development programme for the BOC both through internal programmes and from external parties. The following are detailed information on the competency development programme that was participated by the BOC in 2019.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DI 2019 COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMME FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2019

NAMA NAME	TANGGAL DATE	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMME	TEMPAT VENUE	PENYELENGGARA ORGANISER
Hari Bowo	28-29 Maret 28-29 March	Rapat kerja dengan tema "Transformation of Corporate Culture and Human Capital Capacity to Win Global Competition" Work meeting with the theme "Transformation of Corporate Culture and Human Capital Capacity to Win Global Competition"	Hotel Sheraton Surabaya	Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN The Deputy in Energy, Logistics, Area, and Tourism of the Ministry of SOE
1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito	9-10 April 9-10 April	Seminar dengan tema "Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab" A seminar themed "Becoming a Competent and Responsible Commissioner"	Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta	INTI PESAN Knowledge for Success
Zainal Abidin	9 Mei 9 May	Full Day Seminar Auditor's Talk untuk penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMN dan Anak Perusahaan BUMN di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Full-Day Seminar Auditor's Talk to strengthen the role of Internal Audit Unit (SPI) of SOEs and SOE Subsidiaries in Merah Putih Building, KPK Jakarta	Gedung Merah Putih Jakarta Merah Putih Building, Jakarta	KPK
1. Zainal Abidin 2. Heddy Lugito	2-6 November 2-6 November	Studi Banding ke luar negeri tentang pengelolaan Pelabuhan Fremantle di Perth Australia untuk model pengelolaan di Benoa dan Marina Boom Banyuwangi Comparative study abroad on management of Port of Fremantle in Perth Australia for the management model in Benoa and Marina Boom Banyuwangi	Perth Australia	Pelindo III
Heddy Lugito	28-29 November 28-29 November	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko bertemakan "Growth, Sustainability and Risk Issues in Global Competition" National Conference for Risk Management Professionals themed "Growth, Sustainability, and Risk Issues in Global Competition"	Hotel Gumayah Semarang	BNSP

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT

Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi serta Komite. Rapat Dewan Komisaris umumnya diagendakan secara berkala dalam satu tahun buku untuk menindaklanjuti berbagai keperluan pengawasan dan pemberian saran atas aktivitas operasional yang dijalankan Direksi beserta jajarannya. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan jika terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran dan tugas-tugas Dewan Komisaris di dalamnya.

Sepanjang 2019, Dewan Komisaris mengadakan 11 kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS

The BOC holds both internal and joint meetings with the BOD and Committee. The BOC meetings are regularly scheduled throughout one fiscal year to follow-up various supervisory and advisory needs on the operational activities conducted by the BOD and the management. BOC meetings may also be held outside of the set agenda should other urgent matters require the roles and duties of the BOC.

Throughout 2019, the BOC has held eleven internal meetings consisting in the following table:

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS

NAMA NAME	JABATAN POSITION	RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING		
		JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	KEHADIRAN ATTENDANCE	%
Hari Bowo*	Komisaris Utama President Commissioner	5	5	100%
Ahmad Bambang*		3	3	100%
Zainal Abidin	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	11	100%
Wahju Satrio U.	Komisaris Commissioner	11	7	64%
Heddy Lugito	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	9	82%
Dedi Syarif Usman	Komisaris Commissioner	11	10	91%

Keterangan:

* Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo berdasarkan Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019.

Information:

* Ahmad Bambang has been serving as the President Commissioner since 13 September 2019 to succeed Hari Bowo based on the Decree No. SK-206/MBU/09/2019.

AGENDA DAN PUBLIKASI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Secara umum agenda rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris membahas tentang:

- Evaluasi kinerja Perusahaan,
- Penyusunan RJPP dan RKAP,
- Menindaklanjuti temuan SPI,
- Melakukan pembahasan tindak lanjut temuan BPK RI,

AGENDA AND PUBLICATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

In general, the agenda of the BOC meeting discuss:

- Evaluation to Company performance,
- RJPP and RKAP drafting,
- Followup on Internal Audit findings,
- Further discussion to followup on BPK RI findings,

- Melakukan koordinasi dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan
- Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan Organ Dewan Komisaris.

PUBLIKASI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN AGENDA RAPAT

Selain agenda umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris juga melaksanakan penyusunan rencana pembahasan dalam rapat (internal, internal melibatkan komite, maupun rapat gabungan) dengan agenda khusus. Rencana awal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang tertuang dalam Jadwal Tahunan Perusahaan (*calendar event*).

Informasi rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, serta organ-organ lainnya seperti Internal Audit dan Divisi-Divisi yang ada. Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat.

Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara). Kegiatan tersebut telah tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 36.1/III/SK/DK.P.III/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Tata Kelola, Prosedur, dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Pelindo III.

DOKUMENTASI HASIL RAPAT

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Dewan Komisaris) didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

- *Coordination with committees under the BOC, and*
- *Other agenda under the jurisdiction of the BOC.*

PUBLICATION OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETING AND MEETING AGENDA

Other than the general agenda of duties and responsibilities of the BOC as stipulated in Board Manual, the BOC also prepares discussion plan in the meetings (internal, internal with committees, and joint meetings) with special agenda. The initial plan for BOC meetings is stipulated in the Calendar Event of the Company.

Information on meeting plan has been widely distributed to other related parties such as the Secretary to the BOC, Corporate Secretary, and other organs including Internal Audit and other existing Divisions. Information on the BOC meeting plan is distributed no later than seven days before the meeting date. In the publication, date and time of the meeting, location, agenda, and participants of the meeting are informed.

If there is an incidental agenda in the meeting, a publication of meeting information is carried out as effectively and efficiently as possible but remains in conformity with the documentation procedure (preparing minutes of the meeting). Such activities have been stipulated in the Decree of the BOC No. 36.1/III/SK/DK.P.III/2015 dated 9 March 2015 regarding Governance, Procedures, and Meeting Implementation of the BOC of Pelindo III.

DOCUMENTATION OF MEETING DECISIONS

In ensuring the implementation of transparency and accountability principles, minutes of meeting implementation (in this case, for BOC meeting) is documented well to contain the discussion of meeting agenda, dissenting opinions, as well as the stipulated decisions. The meeting documentation is signed by the chairman and all meeting participants attending and shall be distributed accordingly.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada mekanisme rapat yang tertera dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dijabarkan ketentuan-ketentuan yaitu:

- a. Semua keputusan dalam Rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- c. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Kenyataan tersebut harus dicatat dalam risalah rapat.
- d. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan voting secara tertutup.
- e. Setiap Anggota Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 suara ditambah 1 suara Anggota Komisaris yang diwakilinya.
- f. Suara blangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
- g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- h. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan Rapat Komisaris, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisaris.
- i. Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Komisaris atau dalam bentuk keputusan yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

DECISION-MAKING MECHANISMS IN BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

The Board Manual of the BOC stipulates the following meeting mechanisms which serve as references for the decision-making process:

- a. All decisions of the meeting of the BOC are made by consensus.
- b. If consensus is not achieved, decisions are made by voting.
- c. To maintain independence and objectivity, every BOC member with a conflict of interest is not eligible to cast their vote in decision-making. Such a fact has to be stated in the minutes of the meeting.
- d. If the number of 'agree' votes is equal to the number of 'disagreeing' votes, the concerned proposal is considered to be rejected, unless the concerning an individual, closed voting shall be conducted.
- e. Each member of the BOC is entitled to cast one vote plus one vote of the represented Commissioner.
- f. A blank vote shall be considered to agree with the proposal submitted in the meeting.
- g. Invalid votes shall be considered absent and shall not be counted in determining the total votes cast in the meeting.
- h. Binding resolutions can be made without having to hold the BOC meetings, provided that the resolutions are approved in writing and signed by all members of the BOC.
- i. Decisions related to strategic aspects shall be made through the BOC Meeting mechanism or in the form of decisions that are approved in writing and signed by all members of the BOC. Such strategic aspects include, among others, all BOD actions requiring GMS approval after obtaining a written recommendation from the BOC, and all BOD actions shall obtain written approval from the BOC.

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS DI 2019 MINUTES OF MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
1.	23 Januari 23 January	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi <i>Unaudited</i> 2018. 2. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2018 terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi sistem pengendalian internal; b. Temuan-temuan signifikan dari KAP; c. Temuan IT <i>general control audit</i>; dan d. Langkah-langkah Direksi untuk menyelesaikan temuan audit. 3. Pemaparan Rencana Kerja Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis. 4. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Desember 2018. 5. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan Nataru 2018, dan b. Penjelasan tentang inisiasi rencana Direksi yang dipaparkan pada saat RUPS RKAP 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Management Performance Report and the 2018 unaudited investment achievement.</i> 2. <i>Audit Progress on the 2018 Financial Statement related to:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Evaluation of internal control system;</i> b. <i>Significant findings from KAP;</i> c. <i>Findings from the IT general control audit; and</i> d. <i>BOD measures to resolve audit findings.</i> 3. <i>Description of the Business Transformation and Development Directorate Work Plan.</i> 4. <i>The follow-up to the BOC-BOD Meeting in December 2018.</i> 5. <i>Others:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The 2018 Nataru Implementation Report, and</i> b. <i>The description of the BOD plan initiation described during the 2019 RKAP GMS.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin 4. Dedi Syarif Usman
2.	14 Februari 14 February	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi bulan Januari 2019. 2. Persiapan RUPS Tahunan. 3. Progres pengakhiran kerja sama dengan DP World di TPS. 4. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Progres investasi Boom Marina Banyuwangi; b. Rencana pembubaran PT Lamin Aspalindo Tiga; dan c. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Januari 2019. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Management Performance Report and January 2019 investment achievement.</i> 2. <i>Preparation for the Annual GMS.</i> 3. <i>The process for cooperation termination with DP World in TPS.</i> 4. <i>Others:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Investment progress in Boom Marina Banyuwangi;</i> b. <i>Plan for dissolution of PT Lamin Aspaslindo Tiga; and</i> c. <i>Follow up to the BOC-BOD Meeting in January 2019.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Bowo 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin 4. Dedi Syarif Usman

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
3.	27 Maret 27 March	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi sampai dengan bulan Februari 2019. 2. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2018. 3. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Februari 2019. 4. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Progres finalisasi TPS; dan b. Update Finalisasi Biaya/Tarif untuk Terminal LNG Jatim. <p><i>1. Management Performance Report and investment achievement up to February 2019.</i></p> <p><i>2. Audit Progress on the 2018 Financial Statement.</i></p> <p><i>3. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in February 2019.</i></p> <p><i>4. Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Progress for TPS finalisation; and b. Update on the Finalisation of Fee/Tariff for East Java LNG Terminal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Bowo 2. Hedy Lugito 3. Zainal Abidin 4. Dedi Syarif Usman
4.	25 April 25 April	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi Triwulan I Tahun 2019. 2. Permohonan Penarikan Sumber Dana Eksternal. 3. Usulan Penggantian Direksi Anak Perusahaan. 4. Usulan Materi RUPS Tahun 2018. 5. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Tugas Pengawasan 2018; dan b. Tanggapan Laporan Keuangan Audited 2018. <p><i>1. Management Performance Report and investment achievement in the Third Quarter of 2019.</i></p> <p><i>2. Request to Withdraw an External Funding Source.</i></p> <p><i>3. Proposal to Replace the BOD in a Subsidiary.</i></p> <p><i>4. Proposal for Matters Discussed in the 2018 GMS.</i></p> <p><i>5. Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. The 2018 Report on Supervisory Duty; and b. Response to the 2018 Audit Financial Statement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Bowo 2. Hedy Lugito 3. Wahyu Satrio Utomo 4. Zainal Abidin 5. Dedi Syarif Usman
5.	27 Mei 27 May	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan Investasi, dan PKBL sampai April 2019. 2. Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan yang masih belum mencapai target. 3. Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. 4. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan April 2019. <p><i>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to April 2019.</i></p> <p><i>2. Discussion on Subsidiary Performances that have not reached their target.</i></p> <p><i>3. The follow-up to Report of BPK Checking Results.</i></p> <p><i>4. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in April 2019</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Bowo 2. Wahyu Satrio Utomo 3. Zainal Abidin
6.	26 Juni 26 June	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan Investasi, dan PKBL sampai Mei 2019. 2. Rencana tindak lanjut penataan Pelabuhan Benoa dan Boom Banyuwangi. 3. Progres tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. 4. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Mei 2019. <p><i>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to May 2019.</i></p> <p><i>2. The plan to follow up the management of Port of Benoa and Boom Banyuwangi.</i></p> <p><i>3. The follow-up progress to the Report of BPK Checking Results.</i></p> <p><i>4. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in May 2019.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahyu Satrio Utomo 2. Zainal Abidin 3. Dedi Syarif Usman

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
7.	29 Juli 29 July	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan usulan konkret dari Komite untuk perbaikan Kinerja Manajemen sampai Semester I Tahun 2019. 2. Telaah Komite atas tindak lanjut arahan RUPS atas surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/D2/06/2019 tanggal 18 Juni 2019. 3. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pemanfaatan ekskendaraan dinas Direksi; dan b. Sosialisasi dan implimentasi K3 Pelindo III. <p><i>1. Description of a concrete proposal from the Committee to improve the Management Performance up to the First Semester of 2019.</i></p> <p><i>2. Committee review on the follow-up to the GMS directive regarding the letter from the Minister of SOE No. S-574/MBU/D2/06/2019 dated 18 June 2019.</i></p> <p><i>3. Others:</i></p> <p><i>a. Report on utilisation of then-business vehicles of the BOD; and</i></p> <p><i>b. K3 socialisation and implementation of Pelindo III.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahyu Satrio Utomo 2. Heddy Lugito
8.	26 Agustus 26 August	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan investasi, dan PKBL sampai Juli 2019. 2. Pembahasan Rencana <i>Bundling 4</i> Pelabuhan oleh BO yang telah dikaji oleh Konsultan dalam rangka menunjang program Pemerintah untuk peningkatan pariwisata nasional. 3. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penghapusbukuan aset Aset yang tidak direkomendasi; b. Catatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Anak Perusahaan untuk Direksi; dan c. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Juli 2019. <p><i>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to July 2019.</i></p> <p><i>2. The discussion on 4 Port Bundling Plan by BO reviewed by the Consultant in supporting the Government programme to improve the national tourism.</i></p> <p><i>3. Others:</i></p> <p><i>a. Evaluation to remove non-recommended assets from book-writing;</i></p> <p><i>b. Notes on the BOC's work visit to Subsidiaries to the BOD; and</i></p> <p><i>c. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in July 2019.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahyu Satrio Utomo 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin 4. Dedi Syarif Usman
9.	27 September 27 September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Kinerja Manajemen, Penyerapan Investasi, dan PKBL sampai Agustus 2019. 2. Pembahasan Usulan Revisi Investasi Tahun 2019. 3. Progres pengembangan Pelabuhan Benoa. 4. Progres pembentukan <i>holding</i> maritim dan <i>sub-holding</i> peti kemas. 5. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan kerja sama di JIPE; dan b. Rencana pembentukan Komite Investasi dan Remunerasi Dewan Komisaris. <p><i>1. Review on Management Performance, Investment Absorption, and PKBL up to August 2019.</i></p> <p><i>2. The Discussion for Revision on the 2019 Investment Proposal.</i></p> <p><i>3. Development progress on Port of Benoa.</i></p> <p><i>4. Progress on the establishment of marine holding and container sub-holding.</i></p> <p><i>5. Others:</i></p> <p><i>a. Report on cooperation implementation in JIPE; and</i></p> <p><i>b. Plan to establish the Investment and Remuneration Committee under the BOC.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Bambang 2. Wahyu Satrio Utomo 3. Heddy Lugito 4. Zainal Abidin

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
10.	27 November 27 November	1. Pembahasan Laporan Keuangan sampai bulan Oktober 2019. 2. Pembahasan Realisasi dan Prognosis Investasi Tahun 2019. 3. Pembahasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan. 4. Pembahasan Usulan Direksi tentang Penggantian Kepala SPI. 5. Laporan Pembahasan Teknis atas usulan RKAP dan RJPP. <i>1. Discussion on Financial Statement up to October 2019. 2. Discussion on the 2019 Investment Realisation and Prognosis. 3. Discussion on Quality and Service Policy. 4. Discussion on BOD Proposal on Replacing the Chairman of SPI. 5. Technical Discussion Report on the RKAP and RJPP proposal.</i>	1. Ahmad Bambang 2. Heddy Lugito 3. Zainal Abidin 4. Dedi Syarif Usman



NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
11.	26 Desember 26 December	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Kinerja Manajemen sampai akhir November 2019 dan perkiraan sampai akhir Desember 2019. 2. Pembahasan Progres Realisasi dan Anggaran Investasi sampai akhir November 2019 dan <i>rolling forecast</i> s.d. Desember 2019. 3. Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing Terminal dan Anak Perusahaan Tahun 2019 dan Tahun sebelumnya. 4. Pembahasan Laporan Progres Audit KAP Tahun 2019. 5. Evaluasi Laporan Angkutan NATARU 2019/2020. <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Management Performance Report up to the end of November 2019 and estimate up to the end of December 2019. 2. Discussion on the Progress of Investment Realisation and Budget up to the end of November 2019 and rolling forecast up to December 2019. 3. Performance Evaluation Report of each Terminal and Subsidiary in 2019 and the Prior Year. 4. Discussion on the KAP Audit Progress for 2019. 5. Evaluation of NATARU Transportation Report for 2019/2020. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Bambang 2. Wahyu Satrio Utomo 3. Heddy Lugito 4. Zainal Abidin 5. Dedi Syarif Usman



HUBUNGAN KERJA DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Komisaris dengan Direksi, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
- Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan.
- Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- Hubungan kerja antara organ-organ pendukung Dewan Komisaris dengan organ-organ pendukung Direksi harus disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

CHECK AND BALANCES

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

- Merealisasikan tujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:
 - Tercapainya nilai perusahaan (*value of the firm*) sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham.
 - Terlaksananya dengan baik pengendalian intern dan manajemen risiko.
 - Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham.
 - Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar.
 - Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran organisasi Perusahaan.
 - Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
- Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta strategi Perusahaan:
 - Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perusahaan, unit-unit dalam organisasi Perusahaan, dan pegawai.

WORK RELATIONSHIP AND REPORT ON DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

WORK RELATIONSHIP WITH BOARD OF DIRECTORS

The proper work relationship between the BOC and BOD is essential to support each organ to work according to their function effectively and efficiently. To that end, the Company implements the following principles to maintain such work relations:

- The BOC shall respect the responsibilities and authority of the BOD in managing the Company as regulated in the prevailing laws and regulations, as well as Articles of Association of the Company.
- The BOD shall respect the responsibilities and authority of the BOC to supervise and provide advice on the management policies of the Company.
- The working relationship between the BOC and BOD is a formal institutional relationship, meaning that such relationship shall always be based on a formal mechanism and correspondence that can be held accountable.
- The BOD shall be responsible for the accuracy, completeness, and timely Company's information submitted to the BOC.
- The working relationship between BOC supporting organs and BOD supporting organs shall be approved beforehand by the BOC and BOD.

CHECK AND BALANCES

Regarding such issues, both the BOC and BOD have a strong commitment in line with each of their responsibilities to jointly:

- Realise the Company's objectives through the achievement of longterm business sustainability of the Company which is reflected on:
 - The achievement of the value of the firm as expected by the Shareholders.
 - Proper implementation of internal control and risk management.
 - A fair return for Shareholders.
 - Fair protection of stakeholders' interests.
 - Implementation of leadership succession and management continuity across all organisation levels in the Company.
 - Fulfilment of GCG implementation.
- Agree with the following matters to support the achievement of the Company's vision and mission as well as the strategies:
 - Business targets, strategies, longterm plan, as well as annual work and budget plan.
 - Policies in fulfilling provisions contained in laws and regulations and the Company's Articles of Association.
 - Performance assessment policies and methods for the Company's, work units in the organisation, and

- d. Struktur organisasi Perusahaan di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Perusahaan.

employees.

- d. The organisation structure of the Company at the executive level which can support the achievement of the Company's business targets.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Pelindo III Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 5 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Notaris Heni Yuniartin, S.H., M.Kn. No. 3 tanggal 23 Oktober 2019 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN serta sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Pelindo III.

1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

- Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 106);
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106);
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-21/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN;
- f. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN;
- Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dengan surat Dewan Komisaris Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017, surat Direksi Pelindo III No. HK.03/14/P.III/2017, dan surat Serikat Pekerja Pelindo III, No. 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Pelindo III;
- Surat Keputusan Komisaris Utama Pelindo III No. SK.-205/10/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab anggota Dewan Komisaris; dan
- Board Manual* Pelindo III Tahun 2018

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris Tahun 2019 adalah sebagai pelaporan

REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES

Supervisory Report of the BOC of Pelindo III in 2017 was prepared to comply with the Articles of Association stated in the Notarial Deed of Imas Fatimah, SH, Notary, No. 5 dated 1 December 1992, as amended several times with the latest amendment through the Notarial Deed of Heni Yuniartin, S.H., M.Kn. No. 3 dated 23 October 2019, and Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 juncto PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on Changes in Implementation of Good Corporate Governance at State Owned Enterprises, and as the responsibility of implementation of supervisory duties and functions of the BOC of Pelindo III.

1. LEGAL BASIS OF ACTIVITIES

- Law No. 19 of 2003 dated 19 June 2003 on SOE (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 No. 70, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 106);
- Law No. 40 of 2007 dated 16 August 2008 on Limited Liability Companies (2007 State Gazette of the Republic of Indonesia No. 106);
- Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on Changes in Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
- Regulation of Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 on Supporting Instruments of the BOC/Supervisory Board of SOEs;
- Regulation of Minister of SOE No. PER-21/MBU/2012 dated 27 December 2012 on Guidelines for the Implementation of Financial Accountability of SOEs;
- Resolution of Minister of SOE No. KEP101/MBU/2002 dated 4 June 2002 on RKAP Drafting in SOEs;
- Joint Decision of the BOC, BOD, and Labour Union of Pelabuhan Indonesia III (Persero), through the letter of the BOC of Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017, letter of the BOD of Pelindo III No. HK.03/14/P.III/2017, and letter of Labour Union of Pelindo III No. 36/DP.SPPI/IX-2017 dated 25 September 2017 on the Code of Conduct applicable within Pelindo III;
- Decree of the President Commissioner of Pelindo III No. SK-205/10/KEP/DK.P.III/2017 dated 4 October 2017 on Distribution of Duties and Responsibilities of the Members of the BOC; and
- The 2018 Board Manual of Pelindo III.

2. PURPOSES AND OBJECTIVES

The purpose of preparation of Supervisory Report by the BOC in 2019 is to serve as a report on the implementation

pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Pelindo III pada tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris Pelindo III yang telah disetujui oleh Pemegang Saham.

Tujuan laporan pengawasan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 juncto PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

of supervisory duties of the BOC of Pelindo III in 2019 according to work and budget plan of the BOC of Pelindo III that has been approved by the Shareholder.

The objective of this supervisory report is to fulfil the obligation of the BOC based on the Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 juncto PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on Amendment in Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS 2019

1. Dalam rangka menegakkan GCG di lingkungan Pelindo III, anggota Dewan Komisaris turut mendukung dengan membuat Pakta Integritas dan Surat Pernyataan yang menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan di Pelindo III.
2. Atas permohonan Direksi Pelindo III No. HK.0501/1/HOFC-2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Usulan Penyempurnaan Peraturan Direksi tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya melalui surat Dewan Komisaris No. HK.30/02/DK.P.III/2019 tanggal 4 Februari 2019 perihal Persetujuan Penyempurnaan Pedoman Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
3. Atas permohonan Direksi Pelindo III No. TR.0101/121/HOFC-2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Pembubaran PT Lamin Aspalindo Tiga, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya melalui surat Dewan Komisaris No. HK.47/02/DK.P.III/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Pembubaran PT Lamin Aspalindo Tiga.
4. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dengan surat No. RH.48/02/DK.P.III/2019 tanggal 25 Februari 2019 atas usulan Direksi Pelindo III sesuai surat No. RH.20/KP.0604/P.III-2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Jabatan Komisaris Utama pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), yaitu TPS, BJTI, PMS, TTL, PDS, dan PHC.
5. Atas permohonan Direksi Pelindo III No. PJ.07.01/14/HOFC-2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Rekomendasi Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan Tanjung Perak oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasinya melalui surat Dewan Komisaris No. UM.49/02/DK.P.III/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Rekomendasi atas Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Pelabuhan Tanjung Perak oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).
6. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan persetujuan atas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Persetujuan Pelaksanaan Penghapusbukuan Aset Milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Periode Tahun

RECOMMENDATIONS AND DECISIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2019

1. To enforce GCG in Pelindo III environment, members of the BOC also support by making an Integrity Pact and a Statement stating that no conflict of interest can affect the decision-making process in Pelindo III.
2. On the request of the BOD of Pelindo III No. HK.0501/1/HOFC-2019 dated 3 January 2019 on the Proposal to Improve the BOD Regulation on Cooperation Guideline in the Vicinity of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the BOC has given their recommendation through the letter of the BOC No. HK.30/02/DK.P.III/2019 dated 4 February 2019 on the Approval to Improve Cooperation Guideline in the Vicinity of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
3. On the request of the BOD of Pelindo III No. TR.0101/121/HOFC-2019 dated 7 January 2019 on the Approval Request for the Dissolution of PT Lamin Aspalindo Tiga, the BOC has given their recommendation through the letter of the BOC No. HK.47/02/DK.P.III/2019 dated 25 February 2019 on the Recommendation to Approve the Request for the Dissolution of PT Lamin Aspalindo Tiga.
4. The BOC has recommended with the letter No. RH.48/02/DK.P.III/2019 dated 25 February 2019 on the proposal of the BOD of Pelindo III by the letter No. RH.20/KP.0604/P.III/2019 dated 13 February 2019 on the Recommendation Request for the Position of the President Commissioner in Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), namely TPS, BJTI, PMS, TTL, PDS, and PHC.
5. On the request of the BOD of Pelindo III No. PJ.07.01/14/HOFC-2019 dated 13 February 2019 on the Recommendation to Utilise Part of HPL Land in Port of Tanjung Perak by PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), the BOC has given their recommendation through the letter of the BOC No. UM.49/02/DK.P.III/2019 dated 25 February 2019 on the Recommendation for Part of HPL Land Utilisation in Port of Tanjung Perak by PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).
6. The BOC has given a recommendation and approval for the Request for Period Extension in the Approval for Removal of Asset Owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in 2018 through the letter No. UM. 50/02/

- 2018 melalui surat No. UM. 50/02/DK.P.III/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal perpanjangan atas permohonan pelaksanaan penghapusbukuan aset tetap milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk aset tetap bergerak dengan umur ekonomis sampai dengan 5 tahun serta aset yang dibongkar untuk dibangun kembali, dan memberikan rekomendasi atas usulan penghapusbukuan aset tetap lain selain aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis di atas 5 tahun.
7. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dengan surat No. RH.52/02/DK.P.III/2019 tanggal 28 Februari 2019 atas usulan Direksi Pelindo III sesuai surat No. RH.21/KP.0604/P.III-2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Jabatan Komisaris Utama pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), yaitu TPS, BJTI, PMS, TTL, PDS, dan PHC.
 8. Atas permohonan Direksi Pelindo III No. TR.04.06/13/HOFC-2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Persetujuan dan Rekomendasi atas Permohonan Penghapusbukuan Aset di TPKS milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan rekomendasi atas Permohonan Penghapusbukuan Aset di TPKS milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) melalui surat No. UM.-153/08/DK.P.III/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan Persetujuan dan Rekomendasi Penghapusbukuan Aset di TPKS Milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
 9. Atas permohonan Direksi Pelindo III No. RH.112/KP.06.04/P.III-2019 tanggal 1 Agustus 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Pergantian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Dewan Komisaris memberikan Rekomendasi Pergantian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) melalui surat No. UM.-154/08/DK.P.III/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
 10. Dewan Komisaris memberikan Persetujuan Realokasi Anggaran Investasi Tahun 2019 melalui surat No. UM.-195/10/DK.P.III/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas surat Direksi No. TT.01.03/29/HOFC-2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Persetujuan Anggaran Investasi Pembangunan Terminal LNG di Teluk Lamong dan Pemindahan Anggaran Pengadaan Peralatan B/M untuk modernisasi TPS.
 11. Dewan Komisaris memberikan Tanggapan atas Pelepasan Saham Pelindo III pada TPI melalui surat No. UM.-19610/DK.P.III/2019 tanggal 21 Oktober 2019 atas surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HM.01.01/28/HOFC-2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Penjelasan atas Permohonan Persetujuan Pelepasan Saham TPI.
 12. Atas surat Direksi No. HK.01.01/3/HOFC-2019 tanggal 30 September 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Dewan Komisaris memberikan rekomendasi atas penyesuaian Anggaran Dasar Pelindo III melalui surat No. UM.-197/10/DK.P.III/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 13. Dewan Komisaris memberikan persetujuan penetapan usulan pengisian Jabatan Kepala Satuan Pengawas Intern melalui surat No. KP.-233/12/DK.P.III/2019 tanggal 10 Desember 2019.
- DK.P.III/2019 dated 25 February 2019 on the extension on the request for the removal of fixed assets owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for movable fixed assets with the economic age of up to five years as well as the dismantled assets to be rebuilt, and recommendation on the proposal for removal of other fixed assets other than fixed productive assets with the economic age of more than 5 years.*
7. *The BOC has recommended with the letter No. RH.52/02/DK.P.III/2019 dated 28 February 2019 on the proposal of the BOD of Pelindo III by the letter No. RH.21/KP.0604/P.III-2019 dated 13 February 2019 on the Recommendation Request for the Position of the President Commissioner in Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), namely TPS, BJTI, PMS, TTL, PDS, and PHC.*
 8. *On the request of the BOD of Pelindo III No. TR.04.06/13/HOFC-2019 dated 2 August 2019 on the Request for Removal of Fixed Assets in TPKS owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the BOC has given the approval and recommendation on the Request for Removal of Fixed Assets in TPKS owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) through the letter No. UM.-153/08/DK.P.III/2019 dated 19 August 2019 on the Request for Approval and Recommendation for Removal of Fixed Assets in TPKS owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).*
 9. *On the request of the BOD of Pelindo III No. RH.112/KP.06.04/P.III/2019 dated 1 August 2019 on the Request for Recommendation to Alter the Members of the BOD and BOC in Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the BOC has given the Recommendation to Alter the Members of the BOD and BOC in Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) through the letter No. UM.154/08/DK.P.III/2019 dated 19 August 2019.*
 10. *The BOC has given the Approval for Reallocation in the 2019 Investment Budget through the letter No. UM.-195/10/DK.P.III/2019 dated 21 October 2019 based on the letter of the BOD No. TT.01.03/29/HOFC-2019 dated 18 October 2019 on the Request for Approval of Investment Budget in the Construction of LNG Terminal in Teluk Lamong and Budget Transfer for Loading/Unloading Facility Procurement for modernisation in TPS.*
 11. *The BOC has given their Response on the Divestment of Pelindo III in TPI through the letter No. UM.19610/DK.P.III/2019 dated 21 October 2019 based on the letter of the BOD No. HM.01.01/28/HOFC-2019 dated 10 October 2019 on the Explanation for Approval Request for Divestment in TPI.*
 12. *Based on the letter of the BOD No. HK.01.01/3/HOFC-2019 dated 30 September 2019 on the Request for Approval to Adjust the Articles of Association of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the BOC has given a recommendation on adjustment to the Articles of Association of Pelindo III through the letter No. UM.-197/10/DK.P.III/2019 dated 21 October 2019.*
 13. *The BOC has approved to determine the proposal for filling the Chairman of Internal Audit position through the letter No. KP.-233/12/DK.P.III/2019 dated 10 December 2019.*

14. Berkaitan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Pelindo III No. SK.206/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama, serta berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 juncto PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, telah dilaksanakan pengenalan/orientasi kepada Anggota Komisaris baru pada saat rapat bulanan Direksi dan Dewan Komisaris di bulan September 2019.
15. Pakta Integritas Dewan Komisaris Pelindo III No. HK-49.01/02/DK.P.III/2019 tentang Pemberian Rekomendasi atas Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Pelabuhan Tanjung Perak oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).
16. Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK-176/09/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Pelindo III.
17. Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.-130/07/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan Pelindo III tersebut mulai berlaku sejak tanggal penetapan, sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan Pelindo III secara definitif oleh RUPS.
18. Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK-42/02/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Pelindo III.
19. Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK-204/10/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Pelindo III.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

INDEPENDENSI DARI ASPEK KEPEMILIKAN SAHAM

Hingga akhir tahun buku 2019, saham Pelindo III dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN sebesar 100%. Dengan demikian, Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki saham di Pelindo III.

INDEPENDENSI DARI ASPEK KOMPOSISI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat, dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan anggota Dewan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen adalah paling sedikit 20% dari anggota Komisaris.

Kebijakan mengenai benturan kepentingan juga telah diatur dalam *Code of Conduct* yang memuat antara lain:

- a. Insan Pelindo III dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau

14. *Related to the Resolution of the Minister of SOE as the GMS of Pelindo III No. SK.206/MBU/09/2019 dated 13 September 2019 on the Dismissal and Appointment of the President Commissioner and based on the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 juncto PER-09/MBU/2012 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, an orientation to the new Commissioner has been conducted in the monthly BOD and BOC meeting in September 2019.*

15. *Integrity Pact of the BOC of Pelindo III No. HK49.01/02/DK.P.III/2019 on Recommending the Utilisation of Part of HPL Land in Port of Tanjung Perak by PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).*

16. *Resolution of the BOC of Pelindo III No. SK176/09/KEP/DK.P.III/2019 dated 25 September 2019 on the Stipulation of Duties and Responsibilities Distribution for BOC Members in Pelindo III.*

17. *Resolution of the BOC of Pelindo III No. SK.130/07/KEP/DK.P.III/2019 dated 23 July 2019 on the Determination of Financial Director ad interim in Pelindo III to be in effect since the date of determination up to the appointment of the definitive Financial Director of Pelindo III by GMS.*

18. *Resolution of the BOC of Pelindo III No. SK42/02/KEP/DK.P.III/2019 dated 18 February 2019 on the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members in Pelindo III.*

19. *Resolution of the BOC of Pelindo III No. SK204/10/KEP/DK.P.III/2019 dated 30 October 2019 on the Dismissal and Appointment of the Secretary to the BOC of Pelindo III.*

INDEPENDENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

INDEPENDENCY IN SHAREHOLDING ASPECT

As of the end of the 2019 fiscal year, 100% of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of SOE. Hence, it can be informed that the BOC has no shares in the Company.

INDEPENDENCY IN COMPOSITION AND CONFLICT OF INTEREST ASPECT

The composition of the BOC of the Company shall be designed in such a way that enables an effective, accurate, and fast decision-making process. Furthermore, the BOC is required to act independently, meaning that the BOC shall have no conflict of interest that may affect them in conducting their duties independently and critically, both in the relationship among members of the BOC and with the BOD. To that end, Independent Commissioner is required with the number of Independent Commissioner shall be 20% at the very least of total BOC members.

Policies regarding conflict of interest have been stipulated in the Code of Conduct which includes, among others:

- a. *Personnel of Pelindo III are prohibited from taking advantage of their position for personal interests or the*

pihak lain yang terkait.

- b. Insan Pelindo III wajib menghindari setiap aktivitas di luar kedinasan yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam mengambil keputusan.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS DARI ASPEK RANGKAP JABATAN

Informasi mengenai rangkap jabatan telah disajikan dalam bagian profil perusahaan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris. Berdasarkan informasi tersebut, Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki jabatan lain di luar Perusahaan namun memiliki jabatan lain di dalam struktur Perusahaan yaitu Ketua Komite-Komite yang ada di Perusahaan.

Dengan demikian, Dewan Komisaris Perusahaan dapat dinyatakan independen dan bebas dari benturan kepentingan terkait adanya faktor rangkap jabatan dengan tidak adanya jabatan lain yang diemban di luar Perusahaan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Perusahaan telah mengatur tugas dan tanggung jawab dari Komisaris Independen yang tertuang dalam *Board Manual* yaitu Pedoman Tata Kerja Kegiatan Dewan Komisaris yang ditetapkan bersama Direksi melalui surat keputusan bersama No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Di tahun 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan penetapan Komisaris Independen Pelindo III, Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan Pelindo III, menetapkan Zainal Abidin dan Hedy Lugito sebagai Komisaris Independen Pelindo III dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan formal dan material serta persyaratan lain, juga harus memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur dan/ atau anggota Dewan Komisaris lain di perusahaan yang bersangkutan.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk kementerian, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
4. Tidak bekerja di perusahaan yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
5. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada perusahaan yang bersangkutan dan afiliasinya.
6. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup perusahaan.
7. Memiliki kompetensi dalam bidang audit, keuangan, dan akuntansi.

interests of other related individuals or parties.

- b. *Personnel of Pelindo III are obliged to avoid any activity outside of official duties that may impact negatively on their independence and objectivity in the decision-making process.*

INDEPENDENCY IN CONCURRENT POSITION ASPECT

Information on the concurrent position of the BOC has been presented in Profile of the Board of Commissioners. Based on the information, the BOC has no other positions outside of the Company, but holds other positions in the Company's structure, namely as the Head of Committees in the Company.

In conclusion, due to no other position held by the BOC outside the Company, the BOC of the Company is independent of and free from any conflict of interest related to concurrent position factor.

INDEPENDENT COMMISSIONER

The Company has stipulated the duties and responsibilities of Independent Commissioners in the Board Manual which has been established jointly with the BOD through Joint Decree No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and PER.0050/HK.01/HOFC-2018 on Review and Revision of Board Manual dan Code of Corporate Governance. In 2018, by the Decree of the Minister of SOE No. SK-207/MBU/07/2018 dated 12 July 2018 on the dismissal and appointment of the BOC and the appointment of Independent Commissioner of Pelindo III, the Ministry of SOE as GMS of the Company stipulated Zainal Abidin and Hedy Lugito as Independent Commissioners of Pelindo III with the term of service is continuing the previous term.

DETERMINATION CRITERIA FOR INDEPENDENT COMMISSIONERS

To be appointed as Independent Commissioners, besides having to fulfil formal and material requirements and other requirements, they must also fulfil the following independence requirements:

1. *Not affiliated with the BOD and/or other members of the BOC in the concerned company.*
2. *Not serving as BOD in another company affiliated with the concerned company.*
3. *Not working for the Government including ministries, institutions, and the military within the last three years.*
4. *Not working in the concerned company or its affiliates within the last three years.*
5. *Does not have a financial relationship, both directly and indirectly with the concerned company or other companies that provide services and products to the concerned company and their affiliates.*
6. *Free from interests and business activities or other relationships that can hinder or interfere with the ability of the BOC to act or think freely in the company's scope.*
7. *Having competency in audit, finance, and accounting.*

INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Dewan Komisaris memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan Perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris dipastikan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun ikatan perkawinan dengan satu sama lain hingga derajat ketiga baik secara vertikal maupun horizontal.

Dewan Komisaris Independen tidak memiliki benturan kepentingan secara pribadi terhadap hal-hal yang termaktub dalam RKAP 2018 dan Dewan Komisaris Independen berkomitmen tidak akan memanfaatkan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang termaktub dalam Pakta Integritas, Surat Pernyataan tidak Memiliki Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen, serta *Board Manual* dan CoCG sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

PENILAIAN ATAS KINERJA ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2019, Dewan Komisaris menilai bahwa organ penunjang Dewan Komisaris baik Komite Audit, Komite GCG dan Manajemen Risiko, maupun Sekretaris Dewan Komisaris memiliki kinerja yang baik. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh organ penunjang Dewan Komisaris telah membantu pencapaian kinerja Dewan Komisaris di tahun 2019.

Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2019. Pelaksanaan tugas tersebut secara umum telah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja komite penunjang Dewan Komisaris juga dapat ditinjau dari skor KPI pada indikator rapat Komite bersama Dewan Komisaris yang terealisasi sebesar 92,53.

INDEPENDENCE OF EACH INDEPENDENT COMMISSIONER

The BOC has independence in carrying out its duties, responsibilities, and authority in conducting the supervision of the Company. Each member of the BOC is certain not to have family ties or marital ties with each other to the third degree both vertically and horizontally.

The Independent Commissioners do not have a personal conflict of interest regarding the matters in the 2018 RKAP and the Independent Commissioners are committed not to use the Company either directly or indirectly for personal interests as contained in the Integrity Pact, Statement of Conflict of Interest and Independence Statement of the Independent Commissioner, and Board Manual and CoCG under the Joint Decision of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and PER.0050/HK.01/HOFC-2018 on the Review and Revision of Corporate Governance Guidelines (Board Manual and Code of Corporate Governance).

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the BOC's Supervisory Report in 2019, the BOC considered that the supporting organs of the BOC, be the Audit Committee, GCG Committee and Risk Management, and the Secretary of the BOC had a good performance. Support for the implementation of duties and functions by supporting organs of the BOC has assisted in the BOC performance achievement in 2019.

The implementation of BOC supervisory duties is based on the 2019 Work and Budget Plan of the BOC. The implementation of these tasks, in general, has been realised based on the predetermined plan. Moreover, the performance achievement of the BOC supporting committees can also be reviewed from the KPI score for the indicators of the Joint Committee meeting of the BOC which was realised at 92.53.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Guna menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menerbitkan Surat Keputusan No. SK.-204/10/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris yang dijabat oleh Weny Maulatsih.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support the effectiveness of their functions and roles, the BOC has issued a Decree No. SK.-204/10/KEP/DK.P.III/2019 dated 30 October 2019 on the Dismissal and Appointment of Secretary to the BOC. The position of secretary of the BOC is currently held by Weny Maulatsih.



WENY MAULATSIH

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of
Commissioners

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, 34 tahun, kelahiran Banyumas, 24 November 1985. Memperoleh gelar Diploma di bidang Perbendaharaan (2006) dan Sarjana Akuntansi (2012) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Layanan SDM di Kementerian BUMN (2017-sekarang) dan Sekretaris Dewan Komisaris di PT Pelayaran Nasional Indonesia (2018-sekarang). Pernah menduduki beberapa jabatan lain di Kementerian BUMN sebagai Analis Kepegawaian (2012-2014), Analis SDM Aparatur (2014-2015), dan Analis Manajemen Kinerja (2015-2017). Pernah juga menjabat sebagai Komite Audit Perum Jasa Tirta (2012-2017) dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indofarma, Tbk. (2017-2018).

PROFILE OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

An Indonesian citizen, 34 years old, born in Banyumas, 24 November 1985. Earned a Diploma in Treasury (2006) and a Bachelor's Degree in Accounting (2012) from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Currently the Head of Human Capital Services Sub-Department in the Ministry of SOE (2017-present) and the Secretary of the BOC in PT Pelayaran Nasional Indonesia (2018-present). Previously held other positions in the Ministry of SOE as a Staffing Analyst (2012-2014), Human Resources Analyst (2014-2015), and Performance Management Analyst (2015-2017). Also had the experience as a member of the Audit Committee in Perum Jasa Tirta (2012-2017) and a Secretary of the BOC of PT Indofarma, Tbk. (2017-2018).

FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

1. Menyediakan informasi untuk Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan rutin yang disampaikan Direksi Pelindo III dalam pengelolaan Perusahaan.
3. Menyiapkan rapat dan mengoordinasikan agenda rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
4. Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
5. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.
6. Mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat dengan Direksi, serta rapat dengan pihak-pihak terkait lainnya.
7. Membuat dan mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Rapat Internal Dewan Komisaris.
8. Menyampaikan Risalah rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Mempersiapkan bahan pertimbangan, pendapat, saran, dan masukan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk Pemegang Saham, Direksi, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan Perusahaan.
10. Menindaklanjuti keputusan dalam rapat Dewan Komisaris antara lain dengan mencatat, memantau, dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan keputusan rapat Dewan Komisaris, serta mendorong dan mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat Dewan Komisaris kepada penanggung jawab terkait.
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan tata kelola dan kearsipan surat.
12. Melaksanakan dan mengoordinasikan kelancaran kegiatan administrasi kesekretariatan, baik untuk Dewan Komisaris maupun Organ Pendukung di lingkungan Dewan Komisaris.
13. Melakukan dan mengoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, serta menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris.
14. Memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Sekretariat Dewan Komisaris.
15. Meminta data informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar Perusahaan, untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
16. Menyampaikan usulan rencana atau program kerja Dewan Komisaris khususnya berkaitan dengan fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris.
17. Menggunakan fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Dewan Komisaris.
18. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

FUNCTIONS AND DUTIES OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. *Preparing the information for the BOC to make decisions.*
2. *Preparing the necessary materials related to the periodic reports submitted by the BOD in Company management.*
3. *Prepare meetings and coordinating the BOC meeting agenda to parties attending the meeting.*
4. *Preparing and submitting the summons for BOC meeting to parties attending the meeting.*
5. *Confirming the time, place, attendance, and other things deemed necessary for convening the BOC meeting.*
6. *Preparing any meeting or BOC meeting, both internal and joint meetings with the BOD, as well as meetings with other related parties.*
7. *Preparing and documenting the Minutes of BOC Meetings with the BOD and the Internal Meetings of the BOC.*
8. *Submitting the Minutes of BOC meeting to interested parties.*
9. *Preparing consideration material, opinion, suggestion, and other input to the BOC for the Shareholders, BOD, and other parties related to Company management.*
10. *Following up BOC meeting resolutions by taking notes, monitoring, and checking the stage of progress in the implementation of BOC meeting resolutions, as well as encouraging and coordinating the implementation of BOC meeting resolution follow-up to the related person-in-charge.*
11. *Conducting and coordinating mail governance and archiving.*
12. *Conducting and coordinating the secretarial administration, both for the BOC and Supporting Organs around the BOC.*
13. *Conducting and coordinating the scheduling of BOC activities in conducting their duties and preparing the requirements in the implementation of BOC activities.*
14. *Leading, directing, and coordinating the implementation of systems and procedures within the vicinity of the BOC Secretariat work area.*
15. *Requesting data information/explanation required by the BOC to related parties, both within or outside the Company, for the implementation of BOC duties.*
16. *Submitting the proposal for the plan or work programme of the BOC, particularly those related to the BOC secretarial function of.*
17. *Utilising the BOC secretarial facilities to conduct the duties of the Secretary of the BOC.*
18. *Obligated to maintain the confidentiality of Company documents, data, and information, both from internal and external parties, and only use them for duty implementation.*

TUGAS LAIN

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundangan serta menerapkan prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota-anggota komite Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris memiliki 2 komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi, yakni Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko. Masing-masing komite tersebut diketuai oleh anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko diisi oleh para profesional yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas di bidangnya masing-masing.

Komite Audit merupakan organ yang berada di bawah Dewan Komisaris dan memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris mengawasi beberapa aspek seperti informasi keuangan, Sistem Pengendalian Internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, dan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

SUSUNAN KOMITE AUDIT

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Pelindo III; No. SK.145/08/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Komite Audit Pelindo III; No. SK.46/03/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 22 Juni 2017 serta No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Pelindo III, maka susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

SUSUNAN KOMITE AUDIT

COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

JABATAN POSITION	NAMA NAME	PERIODE JABATAN TENURE	KETERANGAN DESCRIPTION
Komisaris merangkap Ketua Komite Audit <i>Commissioner concurrently serving as the Head of Audit Committee</i>	Zainal Abidin	2017-2022	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the BOC</i>

OTHER DUTIES

1. Ensuring that the BOC complies with the laws and regulations and implements GCG principles;
2. Periodically providing information required by the BOC and/or at any time requested by the BOC;
3. Coordinating members of the BOC' committees, if required, to ensure the flow of the BOC's duties; and
4. As a liaison of the BOC with other parties.

AUDIT COMMITTEE

According to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 on the Supporting Organ of the BOC/Supervisory Board of SOEs, the BOC has two committees that assist the BOC in supervising the management of the Company conducted by the BOD, namely the Audit Committee and GCG and Risk Management Committee. Each committee is headed by a member of the BOC. The members of the Audit Committee and GCG and Risk Management Committee are professionals that have competence, experience, and integrity in their respective fields.

The Audit Committee is an organ under the BOC in the structure of the Company that has the function to assist the BOC in supervising several aspects, such as financial information, Internal Control System, audit effectiveness of external and internal auditor and the Company's compliance with the prevailing laws and regulations.

COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

In accordance with the Decree of the BOC No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2018 dated 23 February on the Dismissal and Appointment of the Head of the Audit Committee of Pelindo III; No. SK.145/08/KEP/DK.P.III/2018 dated 27 August 2018 on the Appointment of Deputy Head of the Audit Committee of Pelindo III; No. SK.46/03/KEP/DK.P.III/2017 dated 22 June 2017 and No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2019 dated 18 February 2019 on the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of Pelindo III, the composition of the Audit Committee is as follows:

JABATAN POSITION	NAMA NAME	PERIODE JABATAN TENURE	KETERANGAN DESCRIPTION
Komisaris merangkap Wakil Ketua Komite Audit <i>Commissioner concurrently serving as the Deputy Head of Audit Committee</i>	Dedi Syarif Usman	2018-2023	Anggota Dewan Komisaris <i>Member of the BOC</i>
Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	Amilin*	Periode I: 2014-2017 Periode II: 2017-2019 <i>Period I: 2014-2017 Period II: 2017-2019</i>	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kepelabuhanan. <i>Independent Party with expertise in financial and port sectors.</i>
Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	Andi Sudhana	2017-2020	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kepelabuhanan. <i>Independent Party with expertise in financial and port sectors.</i>
Anggota Komite Audit <i>Member of Audit Committee</i>	Mohammad Rizqa*	2019-2022	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kepelabuhanan. <i>Independent Party with expertise in financial and port sectors.</i>

Keterangan:

* Mohammad Rizqa diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 18 Februari 2019 menggantikan Amilin.

Information:

* Mohammad Rizqa is appointed based on the Decree No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2019 dated 18 February 2019 to succeed Amilin.

PROFIL KOMITE AUDIT**KETUA KOMITE AUDIT****Zainal Abidin**

Profil Ketua Komite Audit tersedia pada Profil Dewan Komisaris Perusahaan.

WAKIL KETUA KOMITE AUDIT**Dedi Syarif Usman**

Profil Wakil Ketua Komite Audit telah dicantumkan dalam profil Dewan Komisaris Perusahaan.

ANGGOTA KOMITE**Andi Sudhana**

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, kelahiran Medan, 16 Oktober 1961. Saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara (1991), Magister di Bidang Manajemen dari Universitas Bhayangkara (2012), dan Gelar Doktor dari Universitas Brawijaya di bidang Manajemen. Selain itu memiliki sertifikasi Akuntan, Register Negara dari Kementerian Keuangan Indonesia (2015), Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (2015), Wakil Perantara Perdagangan Efek dari Panitia Standar Profesi Pasar Modal (2013), dan Ahli Syariah Pasar Modal (2016). Saat ini menjabat sebagai Komisaris di Dwidana Sakti Sekuritas (2017-sekarang) dan memiliki pengalaman kerja sebagai Inspektur (1990-1996), Pengajar di beberapa Universitas (1986-sekarang) dan Staf Akuntan (1986-1988).

Mohammad Rizqa

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, kelahiran Yogyakarta, 14 Juni 1973. Saat ini berdomisili di Cimahi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (1997) dan Magister Manajemen dari Universitas

PROFILE OF THE AUDIT COMMITTEE**HEAD OF AUDIT COMMITTEE****Zainal Abidin**

Profile of the Head of Audit Committee is available in the Profile of the Board of Commissioners.

DEPUTY HEAD OF AUDIT COMMITTEE**Dedi Syarif Usman**

Profile of the Deputy Head of Audit Committee is available in the Profile of the Board of Commissioners.

COMMITTEE MEMBERS**Andi Sudhana**

An Indonesian citizen, 58 years old, born in Medan, 16 October 1961. Currently living in Jakarta. Earned a Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Sumatera Utara (1991), a Master's Degree in Management from Universitas Bhayangkara (2012), and a Doctoral Degree in Management from Universitas Brawijaya. He also has certification as an Accountant, State Registered Accountant from the Ministry of Finance (2015), Chartered Accountant from Indonesian Accountant Union (2015), Broker-Dealer from the Committee for Capital Market Professional Standards (2013), and Sharia Expert of Capital Market (2016). Currently serving as a Commissioner in Dwidana Sakti Sekuritas (2017-present) and has experience as an Inspector (1990-1996), a Teaching Staff in several Universities (1986-present), and an Accountant Staff (1986-1988).

Mohammad Rizqa

An Indonesian citizen, 46 years old, born in Yogyakarta, 14 June 1973. Currently living in Cimahi. Earned a Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Padjadjaran (1997) and a Master's Degree in Management from Universitas

Widyatama (2009). Selain itu, memiliki sertifikasi Professional Internal Auditor (2012) dan Certified Internal Auditor Assessor (2017). Memiliki pengalaman kerja sebagai Senior Auditor dari Kantor Akuntan Publik KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan (1995-1999), Auditor Ahli Ketua Tim pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (1999-2001), serta pengalaman sebagai Auditor (general audit, audit operasional, dan audit investigatif), Konsultan (Manajemen Risiko, Audit Internal Berbasis Risiko, *Quality Assurance* Fungsi Audit Internal, Implementasi Good Corporate Governance, Asesmen Good Corporate Governance, Manajemen Aset, Optimalisasi Pajak Daerah), dan Instruktur/Pengajar pada berbagai perusahaan seluruh Indonesia. Saat ini berprofesi sebagai Pengajar dan Senior Consultant pada Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (2008-sekarang).

PERSYARATAN KOMITE AUDIT

Persyaratan Komite Audit telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Revisi dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan persyaratan Komite Audit terdiri dari:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri atau bisnis Perusahaan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Masa Jabatan Ketua Komite Audit mengikuti masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, sedangkan masa jabatan Anggota Komite Audit sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Widyatama (2009). He is also a certified Professional Internal Auditor (2012) and Certified Internal Auditor Assessor (2017). Has work experiences as a Senior Audit from KPMG Hanadi Sudjendro & Partners Public Accounting Firm (1995-1999), Expert Auditor Team Leader from BPKP Representative of West Java (1999-2001), and experiences as an Auditor (general audit, operational audit, and investigative audit), Consultant (Risk Management, Risk-Based Internal Audit, Quality Assurance in the Internal Audit Function, Good Corporate Governance Implementation, Good Corporate Governance Assessment, Asset Management, and Optimisation of Regional Tax, and Instructor/Teacher in various companies around Indonesia. Currently a Teacher and Senior Consultant in Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (2008-present).

REQUIREMENTS OF THE AUDIT COMMITTEE

Requirements of the Audit Committee has been stipulated in the Joint Decision of the BOC and the BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 in the Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance). It is stated in the provision that the requirements of the Audit Committee, which consist of:

1. Having good integrity and knowledge as well as adequate professional experience in supervision/audit sector.
2. Not having personal interest/connection that may cause a negative impact and any conflict of interest on the Company.
3. Being able to communicate effectively.
4. Having sufficient time to finish their duties.
5. One of the members of the Audit Committee must have an educational background or expertise in accounting or financial sector, and one of the members must understand the industry/business of the Company.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE AUDIT COMMITTEE

The appointment and dismissal of members of the Audit Committee are performed by the BOC of the Company based on the Decree of the BOC and reported to the GMS. Dismissal of the members of the Audit Committee may only be conducted if the members end their term of office and dismissed based on the resolution of the BOC due to not fulfilling the set performance standard and/or incompetent in carrying out their duties.

Term of office for the Head of Audit Committee follows their term of office as a member of the BOC, while the term of office for members of the Audit Committee is following the provision regulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 which stipulates that the term of office of members of the Audit Committee who are not members of the BOC/Supervisory Board is not longer than three years and may be extended once for two years of the term and not lessen the right of the BOC/Supervisory Board to dismiss them at any time.

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit Perusahaan telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja yang dituangkan dalam Komite Audit Piagam (*Audit Committee Charter*) guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 3 September 2018 dalam *Board Manual* Perusahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya, agar pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Sebagaimana yang tercantum dalam *Board Manual* dan Piagam Komite Audit tugas dan tanggung jawab Komite Audit terdiri atas:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Internal Audit.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam pemilihan dan pengusulan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS.
3. Mengevaluasi Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan dan Laporan Tahunan, serta laporan-laporan lainnya yang memerlukan rekomendasi Dewan Komisaris.
4. Mengevaluasi Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal dan Internal Audit.
6. Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal pada periode sebelumnya.
7. Memberikan rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
8. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
9. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
10. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
11. Menelaah laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik.

WORK GUIDELINE FOR THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of the Company has been complemented with the Audit Committee Charter to support the implementation of its functions and duties. The document is prepared based on the prevailing laws and regulations and has been stipulated by the BOC on 3 September 2018 in the *Board Manual* stipulated through the Joint Decision of the BOC and the BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Under the provision in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 dated 44 August 2012 on the Supporting Organ of the BOC/Supervisory Board of SOE, the main function of the Audit Committee is to assist the BOC in fulfilling its supervisory function to make the management of the Company effective and efficient. The Audit Committee is independent in carrying out its duties in reporting and directly responsible to the BOC. The responsibility of the Audit Committee to the BOC is the realisation of the accountability in supervision on the management of the company in the implementation of GCG principles.

As stipulated in the *Board Manual* and *Audit Committee Charter*, the duties and responsibilities of the Audit Committee consist of:

1. To assist the BOC to evaluate the effectiveness of the Internal Control System and the effectiveness of the duties of the External Auditor and Internal Audit.
2. To assist the BOC in the selection and nomination of External Auditors to be ratified at the GMS.
3. To evaluate the Quarterly Management Reports, Annual Management Reports and Annual Reports, as well as other reports that require recommendations from the BOC.
4. To evaluating Monthly, Quarterly, and Annual Financial Statements.
5. To evaluate the implementation of activities and the results of audits carried out by External Auditors and Internal Audit.
6. To compile evaluation reports on the implementation of audit services for annual historical financial information by the External Auditor in the previous period.
7. To provide recommendations regarding management control systems and their implementation.
8. To ensure that there are adequate evaluation procedures for all information released by the Company.
9. Identifying matters requiring the attention of the BOC in carrying out their duties.
10. Provide opinions to the BOC regarding reports or matters submitted by the BOD to the BOC.
11. Reviewing the financial statements that will be published publicly.

12. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dan melakukan penelaahan atas adanya tuntutan hukum yang dihadapi Perusahaan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan dan membuat Pedoman Kerja Komite Audit.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

12. To report to the BOC and conduct a review of the lawsuits faced by the Company.
13. To maintain the confidentiality of Company documents, data, and information and make Audit Committee Work Guidelines.
14. To carry out other duties given by the BOC.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit Perusahaan terdiri dari seorang ketua yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris, serta 2 orang anggota yang berasal dari pihak independen. Tabel independensi Komite Audit dapat dijelaskan sebagai berikut:

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of the Company consists of a chairman that is also a Member of the BOC as well as two members from independent parties. The independence of the Audit Committee can be described below:

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

ASPEK INDEPENDENSI INDEPENDENCE ASPECTS	ZAINAL ABIDIN	DEDI SYARIF U.	ANDI SUDHANA	MOHAMMAD RIZQA
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the BOC and the BOD.</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Pelindo III, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship in Pelindo III, subsidiaries, and affiliates.</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan. <i>Has no share ownership in the Company.</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. <i>Has no familial relationship with the BOC, BOD, and/or members of the Audit Committee.</i>	✓	✓	✓	✓

Selama 2019, seluruh anggota Komite Audit Pelindo III tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan sesama anggota Komite lain serta tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain atau afiliasi.

Throughout 2019, members of the Audit Committee has no familial and financial relationship with members of the BOC, BOD, and members of other Committees, as well as has no management relationship and share ownership in other companies or affiliates.

FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT

Mengacu pada Pedoman Kerja, Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama fungsi keuangan dan Internal Audit dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan baik secara berkala maupun sesuai kondisi yang diperlukan. Berikut tingkat kehadiran anggota Komite Audit selama tahun 2019:

FREQUENCY OF THE AUDIT COMMITTEE MEETING

Referring to the Audit Committee Charter, the Audit Committee shall hold regular meet-ings with the BOC for at least once a month as well as periodically hold meetings with related functions, particularly financial and Internal Audit functions to discuss the devel-opment and activities of the Company or in accordance with the required conditions. The attendance rate of the Audit Committee members throughout 2019 is as follows:

FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT

FREQUENCY OF THE AUDIT COMMITTEE MEETING

NAMA NAME	JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	KEHADIRAN ATTENDANCE	PERSENTASE KEHADIRAN ATTENDANCE PERCENTAGE
Zainal Abidin	22	18	82%
Dedi Syarif Usman	22	16	73%
Amilin*	2	2	100%
Andi Sudhana	22	21	95%
Mohammad Rizqa*	20	20	100%

Keterangan:

* Mohammad Rizqa diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 18 Februari 2019 menggantikan Amilin.

Information:

* Mohammad Rizqa is appointed based on the Decree No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2019 dated 18 February 2019 to succeed Amilin.

RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite Audit selama 2019 adalah sebagai berikut:

MINUTES OF THE AUDIT COMMITTEE MEETING

Agenda discussed in the Audit Committee meetings in 2019 is as follows:

RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT DI 2019

MINUTES OF THE AUDIT COMMITTEE MEETING IN 2019

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
1.	23 Januari 23 January	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi <i>Unaudited</i> 2018. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2018 terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi sistem pengendalian internal; Temuan-temuan signifikan dari KAP; Temuan IT <i>general control audit</i>; dan Langkah-langkah Direksi untuk menyelesaikan temuan audit. Pemaparan Rencana Kerja Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Desember 2018. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Nataru 2018, dan Penjelasan tentang inisiasi rencana Direksi yang dipaparkan pada saat RUPS RKAP 2019. <p> <i>1. Management Performance Report and the 2018 unaudited investment achievement.</i> <i>2. Audit Progress on the 2018 Financial Statement related to:</i> <i>a. Evaluation of internal control system;</i> <i>b. Significant findings from KAP;</i> <i>c. Findings from the IT general control audit; and</i> <i>d. BOD measures to resolve audit findings.</i> <i>3. Description of the Business Transformation and Development Directorate Work Plan.</i> <i>4. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in December 2018.</i> <i>5. Others:</i> <i>a. The 2018 Nataru Implementation Report, and</i> <i>b. The description of the BOD plan initiation described during the 2019 RKAP GMS.</i> </p>	<ol style="list-style-type: none"> Zainal Abidin Dedi Syarif Usman Amilin Andi Sudhana

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
2.	14 Februari 14 February	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi bulan Januari 2019. 2. Persiapan RUPS Tahunan. 3. Progres pengakhiran kerja sama dengan DP World di TPS. 4. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Progres investasi Boom Marina Banyuwangi; b. Rencana pembubaran PT Lamin Aspalindo Tiga; dan c. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Januari 2019. <p>1. Management Performance Report and January 2019 investment achievement.</p> <p>2. Preparation for the Annual GMS.</p> <p>3. The process for cooperation termination with DP World in TPS.</p> <p>4. Others:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Investment progress in Boom Marina Banyuwangi; b. Plan for dissolution of PT Lamin Aspaslindo Tiga; and c. Follow up to the 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Amilin 4. Andi Sudhana
3.	25 Februari 25 February	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan rencana kerja audit. 2. Laporan audit tematik 2019. 3. Progres laporan General Audit 2018. 4. Laporan operasional/kinerja. 5. Laporan realisasi investasi bulanan tahun berjalan. 6. Laporan pengendalian internal. <p>1. Description of the audit work plan.</p> <p>2. The 2019 thematic audit report.</p> <p>3. Progress on the 2018 General Audit report.</p> <p>4. Operational/performance report.</p> <p>5. Report on the monthly investment realisation of the year.</p> <p>6. Internal control report.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amilin 2. Andi Sudhana
4.	27 Maret 27 March	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi sampai dengan bulan Februari 2019. 2. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2018. 3. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Februari 2019. 4. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Progres finalisasi TPS; dan b. Update Finalisasi Biaya/Tarif untuk Terminal LNG Jatim. <p>1. Management Performance Report and investment achievement up to February 2019.</p> <p>2. Audit Progress on the 2018 Financial Statement.</p> <p>3. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in February 2019.</p> <p>4. Others:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Progress for TPS finalisation; and b. Update on the Finalisation of Fee/Tariff for East Java LNG Terminal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Mohammad Rizqa 4. Andi Sudhana
5.	18 April 18 April	<p>Pemaparan atas Rencana Penarikan Sumber Dana Eksternal. The description of the External Funding Source Withdrawal Plan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amilin 2. Andi Sudhana 3. Mohammad Rizqa

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
6.	25 April 25 April	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi Triwulan I Tahun 2019. 2. Permohonan Penarikan Sumber Dana Eksternal. 3. Usulan Penggantian Direksi Anak Perusahaan. 4. Usulan Materi RUPS Tahun 2018. 5. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Tugas Pengawasan 2018; dan b. Tanggapan Laporan Keuangan Audited 2018. <p><i>1. Management Performance Report and investment achievement in the Third Quarter of 2019.</i></p> <p><i>2. Request to Withdraw an External Funding Source.</i></p> <p><i>3. Proposal to Replace the BOD in a Subsidiary.</i></p> <p><i>4. Proposal for Matters Discussed in the 2018 GMS.</i></p> <p><i>5. Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The 2018 Report on Supervisory Duty; and</i> b. <i>Response to the 2018 Audit Financial Statement.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Mohammad Rizqa 4. Andi Sudhana
7.	27 Mei 27 May	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan Investasi, dan PKBL sampai April 2019. 2. Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan yang masih belum mencapai target. 3. Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. 4. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan April 2019. <p><i>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to April 2019.</i></p> <p><i>2. Discussion on Subsidiary Performances that have not reached their target.</i></p> <p><i>3. The follow-up to Report of BPK Checking Results.</i></p> <p><i>4. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in April 2019.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Mohammad Rizqa
8.	28 Mei 28 May	<p>Tindak Lanjut Hasil Uji Petik dan Penjelasan atas Penambahan Modal pada Anak Perusahaan.</p> <p><i>Follow Up on the Results of Quotation Test and Explanation on Capital Increase in Subsidiaries</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Andi Sudhana 4. Mohamad Rizqa
9.	20 Juni 20 June	<p>Pembahasan Kebijakan Pengawasan Anak Perusahaan.</p> <p><i>Discussion on Subsidiary Supervision Policy.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Sudhana 2. Mohamad Rizqa
10.	26 Juni 26 June	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan Investasi, dan PKBL sampai Mei 2019. 2. Rencana tindak lanjut penataan Pelabuhan Benoa dan Boom Banyuwangi. 3. Progres tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. 4. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Mei 2019. <p><i>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to May 2019.</i></p> <p><i>2. The plan to follow up the management of Port of Benoa and Boom Banyuwangi.</i></p> <p><i>3. The follow-up progress to the Report of BPK Checking Results.</i></p> <p><i>4. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in May 2019.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Andi Sudhana 4. Mohammad Rizqa
11.	23 Juli 23 July	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja Semester I Tahun 2019. 2. KAK atas penunjukan kembali KAP untuk <i>general audit</i> atas Laporan Keuangan Perusahaan dan PKBL Tahun Buku 2019. <p><i>1. Discussion on the Financial Statement and Performance in the First Semester of 2019.</i></p> <p><i>2. KAK on the re-appointment of KAP for general audit on the Financial Statement and PKBL of the Company for the 2019 Fiscal Year.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Andi Sudhana 4. Mohamad Rizqa

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
12.	29 Juli 29 July	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan usulan konkret dari Komite untuk perbaikan Kinerja Manajemen sampai Semester I Tahun 2019. 2. Telaah Komite atas tindak lanjut arahan RUPS atas surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/D2/06/2019 tanggal 18 Juni 2019. 3. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pemanfaatan ekskendaraan dinas Direksi; dan b. Sosialisasi dan implimentasi K3 Pelindo III. <p><i>1. Description of a concrete proposal from the Committee to improve the Management Performance up to the First Semester of 2019.</i></p> <p><i>2. Committee review on the follow-up to the GMS directive regarding the letter from the Minister of SOE No. S-574/MBU/D2/06/2019 dated 18 June 2019.</i></p> <p><i>3. Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Report on utilisation of then-business vehicles of the BOD; and b. K3 socialisation and implementation of Pelindo III 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Sudhana 2. Mohammad Rizqa
13.	8 Agustus 8 August	<p>Pemaparan atas Skema Kerja Sama Serah Operasi Terminal.</p> <p><i>The description on the Handover Scheme for Terminal Operation Cooperation</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Andi Sudhana 4. Mohammad Rizqa
14.	22 Agustus 22 August	<p>Penjelasan Hasil Audit Entitas BJTI dan BIMA.</p> <p><i>Explanation of the Entity Audit Results in BJTI and BIMA.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Andi Sudhana 3. Mohammad Rizqa
15.	26 Agustus 26 August	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan investasi, dan PKBL sampai Juli 2019. 2. Pembahasan Rencana <i>Bundling</i> 4 Pelabuhan oleh BO yang telah dikaji oleh Konsultan dalam rangka menunjang program Pemerintah untuk peningkatan pariwisata nasional. 3. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penghapusbukuan aset yang tidak direkomendasi; b. Catatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Anak Perusahaan untuk Direksi; dan c. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Juli 2019. <p><i>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to July 2019.</i></p> <p><i>2. The discussion on 4 Port Bundling Plan by BO reviewed by the Consultant in supporting the Government programme to improve the national tourism.</i></p> <p><i>3. Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluation to remove non-recommended assets from book-writing; b. Notes on the BOC's work visit to Subsidiaries to the BOD; and c. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in July 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Andi Sudhana 4. Mohammad Rizqa
16.	5 September 5 September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penajaman alasan pembatalan/penambahan/perubahan investasi. 2. Ketersediaan waktu dan personel sampai akhir tahun 2019 atas masing-masing usulan. 3. Kegiatan investasi yang dianggap prioritas dan waktu pelaksanaan sampai akhir tahun 2019. <p><i>1. Improvement on reasons of investment cancellation/addition/revision.</i></p> <p><i>2. Time and personnel available to the end of 2019 on each proposal.</i></p> <p><i>3. Investment considered to be prioritized and the time implementation up to the end of 2019.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Sudhana 2. Mohammad Rizqa
17.	12 September 12 September	<p>Penjelasan atas hasil kajian KJPP rencana pelepasan saham Pelindo III pada TPI.</p> <p><i>Explanation of the results of KJPP review for the plan on Pelindo III shares divestment in TPI.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Andi Sudhana 4. Mohammad Rizqa

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
18.	27 September 27 September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Kinerja Manajemen, Penyerapan Investasi, dan PKBL sampai Agustus 2019. 2. Pembahasan Usulan Revisi Investasi Tahun 2019. 3. Progres pengembangan Pelabuhan Benoa. 4. Progres pembentukan <i>holding</i> maritim dan <i>sub-holding</i> peti kemas. 5. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan kerja sama di JIPE; dan b. Rencana pembentukan Komite Investasi dan Remunerasi Dewan Komisaris. <p><i>1. Review on Management Performance, Investment Absorption, and PKBL up to August 2019.</i></p> <p><i>2. The Discussion for Revision on the 2019 Investment Proposal.</i></p> <p><i>3. Development progress on Port of Benoa.</i></p> <p><i>4. Progress on the establishment of marine holding and container sub-holding.</i></p> <p><i>5. Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Report on cooperation implementation in JIPE; and b. Plan to establish the Investment and Remuneration Committee under the BOC. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Andi Sudhana 3. Mohammad Rizqa
19.	14 November 14 November	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan atas Usulan RJPP Pelindo III tahun 2020 s.d. 2024. 2. Usulan RKAP Pelindo III Tahun 2020. <p><i>1. Discussion on the Proposal for RJPP from 2020 to 2024.</i></p> <p><i>2. Proposal for the 2020 RKAP of Pelindo III.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Andi Sudhana 4. Mohammad Rizqa
20.	27 November 27 November	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Keuangan sampai bulan Oktober 2019. 2. Pembahasan Realisasi dan Prognosis Investasi Tahun 2019. 3. Pembahasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan. 4. Pembahasan Usulan Direksi tentang Penggantian Kepala SPI. 5. Laporan Pembahasan Teknis atas usulan RKAP dan RJPP. <p><i>1. Discussion on Financial Statement up to October 2019.</i></p> <p><i>2. Discussion on the 2019 Investment Realisation and Prognosis.</i></p> <p><i>3. Discussion on Quality and Service Policy.</i></p> <p><i>4. Discussion on BOD Proposal on Replacing the Chairman of SPI.</i></p> <p><i>5. Technical Discussion Report on the RKAP and RJPP proposal.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman 3. Andi Sudhana 4. Mohammad Rizqa
21.	16 Desember 16 December	<p>Pemaparan <i>Talent Management</i> Perusahaan. <i>Description of Company Talent Management.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dedi Syarif Usman 2. Andi Sudhana 3. Mohammad Rizqa
22.	26 Desember 26 December	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Kinerja Manajemen sampai akhir November 2019 dan perkiraan sampai akhir Desember 2019. 2. Pembahasan Progres Realisasi dan Anggaran Investasi sampai akhir November 2019 dan <i>rolling forecast</i> s.d. Desember 2019. 3. Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing Terminal dan Anak Perusahaan Tahun 2019 dan Tahun sebelumnya. 4. Pembahasan Laporan Progres Audit KAP Tahun 2019. 5. Evaluasi Laporan Angkutan NATARU 2019/2020. <p><i>1. Discussion on Management Performance Report up to the end of November 2019 and estimate up to the end of December 2019.</i></p> <p><i>2. Discussion on the Progress of Investment Realisation and Budget up to the end of November 2019 and rolling forecast up to December 2019.</i></p> <p><i>3. Performance Evaluation Report of each Terminal and Subsidiary in 2019 and the Prior Year.</i></p> <p><i>4. Discussion on the KAP Audit Progress for 2019.</i></p> <p><i>5. Evaluation of NATARU Transportation Report for 2019/2020.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainal Abidin 2. Dedi Syarif Usman

REKOMENDASI KOMITE AUDIT

Dari hasil evaluasi terhadap kegiatan Pengawasan Internal selama 2019, Komite Audit merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti di antaranya adalah penyusunan RJPP, pembubaran PT Lamin Aspalindo Tiga, penghapusbukuan aset, revisi investasi, penunjukan KAP, serta kerja sama usaha.

KEBIJAKAN REMUNERASI KOMITE AUDIT

Remunerasi bagi Anggota Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dimana penghasilan anggota Komite Audit Perusahaan diberikan honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp43.200.000, dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

RECOMMENDATIONS FROM THE AUDIT COMMITTEE

From the evaluation results on the activities of Internal Audit throughout 2019, the Audit Committee recommends significant matters that need to be followed up, among others RJPP formulation, dissolution of PT Lamin Aspalindo Tiga, asset removal, investment revision, the appointment of KAP, and business cooperation.

REMUNERATION POLICY FOR THE AUDIT COMMITTEE

Remuneration for Members of the Audit Committee is stipulated in the Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 on the Supporting Organ of the BOC/Supervisory Board of SOE, of which the income of the members of the Audit Committee is granted through honorarium with the maximum of 20% from the salary of the President Director or amounting to Rp43,200,000 with the tax imposed upon the company, and is not allowed to receive other income other than the honorarium.

The members of the BOC that serves as the Head/Member of the Audit Committee are not granted additional income from the position other than the income from serving as Members of the BOC.

STRUKTUR REMUNERASI KOMITE AUDIT

REMUNERATION STRUCTURE OF THE AUDIT COMMITTEE

NAMA NAME	JABATAN POSITION	HONORARIUM	KETERANGAN DESCRIPTION
Zainal Abidin	Ketua Head	-	Anggota Dewan Komisaris (Honorarium dapat dilihat di tabel Honorarium Dewan Komisaris)
Dedi Syarif Usman	Wakil Ketua Deputy Head	-	Member of the BOC (Honorarium can be seen in the table of BOC Honorarium)
Amilin*	Anggota Member	Rp43.200.000	
Andi Sudhana	Anggota Member	Rp43.200.000	
Mohammad Rizqa*	Anggota Member	Rp43.200.000	

Keterangan:

* Mohammad Rizqa diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 18 Februari 2019 menggantikan Amilin.

Information:

* Mohammad Rizqa is appointed based on the Decree No. SK.42/02/KEP/DK.P.III/2019 dated 18 February 2019 to succeed Amilin.

RENCANA KERJA DAN REALISASI DI TAHUN 2019

Sepanjang 2019, Komite Audit telah melaksanakan program kerja sebagai berikut:

WORK PLAN AND REALISATION IN 2019

Throughout 2019, the Audit Committee has implemented the following work programmes:

RENCANA KERJA DAN REALISASI DI TAHUN 2019

WORK PLAN AND REALISATION IN 2019

NO.	RENCANA KERJA WORK PLAN	KETERANGAN DESCRIPTION
1.	Pembahasan <i>Terms of Reference</i> Kantor Akuntan Publik (KAP). Discussion of <i>Term of Reference</i> for Public Accounting Firm (KAP).	Terlaksana Implemented

NO.	RENCANA KERJA WORK PLAN	KETERANGAN DESCRIPTION
2.	Pembahasan secara lebih mendalam mengenai temuan-temuan audit Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang perlu masuk dalam cakupan Laporan Keuangan Audited. <i>Thorough discussion regarding audit findings from the Internal Audit Unit (SPI) which needs to be included in the scope of the Audited Financial Statement.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
3.	Evaluasi mengenai lingkup audit yang telah dan sedang dilaksanakan, termasuk perluasan dan pendalaman audit pada beberapa objek tertentu. <i>Evaluation of audit scope that has been and is currently implemented, including the expansion of audit activity on certain objects.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
4.	Evaluasi atas hasil audit KAP. <i>Evaluation of KAP audit results.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
5.	Pembahasan hasil temuan SPI. <i>Discussion on SPI findings.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
6.	Pembahasan masukan mengenai berbagai kendala dalam pemeriksaan. <i>Discussion on inputs concerning obstacles in audits.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
7.	Pembahasan mengenai berbagai kebutuhan perluasan lingkup dan perbaikan teknik pemeriksaan. <i>Discussion of various needs to expand the scope and improvement technique of examination.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
8.	Penilaian terhadap informasi hasil audit bersama-sama KAP, SPI, dan jajaran manajemen. <i>Assessment of information result from a joint audit with KAP, SPI, and management board.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
9.	Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. <i>Identify issues requiring BOC attention.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
10.	Komite Audit melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan hasil keputusan RUPS. <i>Monitoring on the implementation process of GMS Resolution.</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMITE AUDIT TAHUN 2019

Guna meningkatkan wawasan dan kompetensi Komite Audit, Perusahaan telah menyelenggarakan program pengembangan Komite Audit baik melalui program internal maupun dari pihak eksternal. Berikut rincian informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Audit pada 2019.

TRAINING AND DEVELOPMENT OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2019

To improve the insights and competencies of the Audit Committee, the Company has organised a development programme for the Audit Committee both through internal programmes and from external parties. The following is detailed information on the competency development programme that was participated by the Audit Committee in 2019.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT DI 2019 COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMME FOR THE AUDIT COMMITTEE IN 2019

NAMA NAME	TANGGAL DATE	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMME	TEMPAT PLACE	PENYELENGGARA ORGANISER
Zainal Abidin	9 Mei 9 May	Full Day Seminar Auditor's Talk untuk penguatan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) BUMN dan Anak Perusahaan BUMN <i>Full-Day Seminar Auditor's Talk to strengthen the role of Internal Audit Unit (SPI) of SOEs and SOE</i>	Gedung Merah Putih KPK Jakarta <i>Merah Putih Building, KPK Jakarta</i>	KPK

NAMA NAME	TANGGAL DATE	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMME	TEMPAT PLACE	PENYELENGGARA ORGANISER
1. Andi Sudhana 2. Mohammad Rizqa	15-19 Juli 15-19 July	Pelatihan dan sertifikasi <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) training and certification</i>	Grha Barunawati Surabaya	
Zainal Abidin	2-6 November 2-6 November	Studi Banding ke luar negeri tentang pengelolaan Pelabuhan Fremantle di Perth Australia untuk model pengelolaan di Benoa dan Marina Boom Banyuwangi <i>Comparative study abroad on management of Port of Freemantle in Perth Australia for the management model in Benoa and Marina Boom Banyuwangi</i>	Perth Australia	Pelindo III

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Demikian halnya Komite Audit, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Dewan Komisaris memiliki 2 komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi, yakni Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko. Masing-masing komite tersebut diketuai oleh anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko diisi oleh para profesional yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas di bidangnya masing-masing.

Komite GCG dan Manajemen Risiko merupakan organ yang di dalam struktur Perusahaan berada di bawah Dewan Komisaris yang memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas efektivitas pelaksanaan GCG dan manajemen risiko.

SUSUNAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.65/03/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko Pelindo III, Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.-145/08/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko Pelindo III, serta Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.204/11/KEP/DK.P.111/2018 tanggal 1 November 2018 dan SK.-70/04/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko Pelindo III, maka susunan Ketua dan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

As it is with the Audit Committee, under the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 on the Supporting Organ of the BOC/Supervisory Board of SOEs, the BOC has two committees that assist the BOC in supervising the management of the Company conducted by the BOD, namely the Audit Committee and GCG and Risk Management Committee. Each committee is headed by a member of the BOC. The members of the Audit Committee and GCG and Risk Management Committee are professionals that have competence, experience, and integrity in their respective fields.

The GCG and Risk Management Committee is an organ under the BOC in the Company's structure that has the function to assist the BOC in monitoring, supervising, and assessing the effectiveness of GCG and risk management implementation

COMPOSITION OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Based on the Resolution of the BOC No. SK.65/03/KEP/DK.P.III/2017 dated 30 March 2017 on the Dismissal and Appointment of the Head of GCG and Risk Management Committee of Pelindo III, Resolution of the BOC No. SK.-145/08/KEP/DK.P.III/2018 dated 27 August 2018 on the Appointment of the Deputy Head of GCG and Risk Management Committee of Pelindo III, as well as the resolution of the BOC of Pelindo III No. SK.204/11/KEP/DK.P.111/2018 dated 1 November 2018 and SK.-70/04/KEP/DK.P.III/2019 dated 8 April 2019 on the Dismissal and Appointment of the Members of GCG and Risk Management Committee of Pelindo III, the composition of GCG and Risk Management Committee is as follows:

SUSUNAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

COMPOSITION OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

JABATAN POSITION	NAMA NAME	PERIODE JABATAN TERM OF SERVICE	KETERANGAN DESCRIPTION
Ketua Head	Heddy Lugito	2017-2021	Anggota Dewan Komisaris Member of the BOC
Wakil Ketua Deputy Head	Wahju Satrio Utomo	2018-2021	Anggota Dewan Komisaris Member of the BOC
Anggota Member	Pandu Fajar Wisudha*	2017-2019	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kepelabuhanan. Independent Party with expertise in financial and port sectors.
Anggota Member	Tubagus Arief Fahmi	2018-2021	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kepelabuhanan. Independent Party with expertise in financial and port sectors.
Anggota Member	Darmansyah*	2019-2022	Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan kepelabuhanan. Independent Party with expertise in financial and port sectors.

Keterangan:

* Darmansyah diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.70/04/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 8 April 2019 menggantikan Pandu Fajar Wisudha.

Information:

* Darmansyah is appointed based on the Decree No. SK.70/04/KEP/DK.P.III/2019 dated 8 April 2019 to succeed Pandu Fajar Wisudha.

KETUA KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Heddy Lugito

Profil Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko tersedia pada Profil Dewan Komisaris Perusahaan. Diangkat sebagai Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.65/03/KEP/DK.P.III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko.

HEAD OF GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Heddy Lugito

Profile of the Head of GCG and Risk Management Committee is available in the Profile of the Board of Commissioners. He was appointed as the Head of GCG and Risk Management Committee based on the Resolution of the BOC No. SK.65/03/KEP/DK.P.III/2017 dated 30 March 2017 on the Dismissal and Appointment of the Head of GCG and Risk Management Committee.

WAKIL KETUA KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Wahju Satrio Utomo

Profil Wakil Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko tersedia pada Profil Dewan Komisaris Perusahaan. Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III No. SK.-145/08/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Komite Audit dan Wakil Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

DEPUTY HEAD OF GCG AND RISK MANAGEMENT

Wahju Satrio Utomo

Profile of the Deputy Head of GCG and Risk Management Committee is available in the Profile of the Board of Commissioners. He was appointed as the Deputy Head of GCG and Risk Management Committee based on the Resolution of the BOC No. SK.-145/08/KEP/DK.P.III/2018 dated 27 August 2018 on the Appointment of the Deputy Head of GCG and Risk Management Committee of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

ANGGOTA KOMITE

Tubagus Arief Fahmi

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, kelahiran Bandung, 21 Januari 1981 dan saat ini berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan jenjang Sarjana Manajemen di Universitas Padjajaran tahun 2005 dan Magister Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2015. Memiliki kualifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) yang diperoleh di tahun 2018. Memiliki riwayat karir sebagai Manajer Channel Digital Enterprise di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2018), serta menjadi

COMMITTEE MEMBERS

Tubagus Arief Fahmi

An Indonesian citizen, 31 years old, born in Bandung, 21 January 1981 and currently lives in Jakarta. Earned a Bachelor's Degree in Management from Universitas Padjajaran in 2005 and a Master's Degree in Management Science from Universitas Indonesia in 2015. He has a *Certified Risk Management Professional* (CRMP) qualification obtained in 2018. Has a career history as a Manager of Digital Enterprise Channel at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Tim Asistensi Deputi Menteri Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan pada Kementerian BUMN (2016-2017).

Darmansyah

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, kelahiran Sibolga, 15 Mei 1962 dan saat ini berdomisili di Depok. Memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1989), Magister Akuntansi dari Universitas Pancasila (2014), Doktor Pendidikan Akuntansi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor (2015), dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Pancasila. Selain itu, memiliki piagam Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (2016) dan Register Negara Akuntan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016). Berpengalaman sebagai Accounting Manager di PT Halliburton Indonesia (1989-1994), Finance Manager di MT Mercedes Benz Indonesia (1994-1999), Costing Manager di PT Squibb Indonesia (1999-2002), Finance & Administration Manager di United Nation Development Program (2002-2004), Human Resources Manager di PT Komaritim (2004-2006), Direktur pada PT Rizqita Prima Busana (2006-2008), serta Kepala Biro Keuangan pada Universitas Pancasila (2014-2016). Saat ini berprofesi sebagai Konsultan Pajak dan Keuangan "Mata Pena", Dosen Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Pancasila, serta Sekretaris Prodi Magister Akuntansi Universitas Pancasila.

PERSYARATAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Persyaratan Komite GCG dan Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan persyaratan Komite GCG dan Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tata kelola Perusahaan dan manajemen.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

(2018), as well as being the Deputy Minister's Assistance Team for Restructuring and Development at the Ministry of SOE (2016-2017).

Darmansyah

An Indonesian citizen, 57 years old, born in Sibolga on 15 May 1962 and currently lives in Depok. Earned a Bachelor's Degree in Economics from Universitas Indonesia (1989), a Master's Degree in Accounting from Universitas Pancasila (2014), a Doctorate in Islamic Accounting Education from Universitas Ibn Khaldun Bogor (2015), and a Doctorate in Economic Science from Universitas Pancasila. Moreover, has a Chartered Accountant charter from Indonesian Accountant Union (2016) and State Accounting Register from the Ministry of Finance (2016). Has experiences as the Accounting Manager in PT Halliburton Indonesia (1989-1994), Finance Manager in MT Mercedes Benz Indonesia (1994-1999), Costing Manager in PT Squibb Indonesia (1999-2002), Finance & Administration Manager in United Nation Development Program (2002-2004), Human Resources Manager in PT Komaritim (2004-2006), Director in PT Rizqita Prima Busana (2006-2008), and the Head of Financial Bureau in Universitas Pancasila (2014-2016). Currently a Tax and Financial Consultant in "Mata Pena", an Accounting Graduate Lecturer in Universitas Pancasila, and a Secretary to the Graduate Accounting Study Programme in Universitas Pancasila.

REQUIREMENTS OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Requirements of the GCG and Risk Management Committee has been stipulated in the Joint Decision of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 in the Review and Revision of GCG (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). It is stated in the provision that the requirements of the Risk Management Committee consisting of:

1. Having good integrity and knowledge as well as adequate professional experience in supervision/audit sector.
2. Not having personal interest/connection that may cause a negative impact and any conflict of interest on the Company.
3. Having adequate knowledge in the Company's business and able to provide sufficient time to fulfil their duties.
4. Being able to cooperate and communicate effectively.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The appointment and dismissal of members of the GCG and Risk Management Committee are performed by the BOC of the Company based on the Decree of the BOC and reported to the GMS. Dismissal of the members of the GCG and Risk Management Committee may only be conducted if the members end their term of office and dismissed based on the resolution of the BOC due to not fulfilling the set performance standard and/or incompetent in carrying out their duties.

Masa jabatan Komite GCG dan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko paling lama 3 tahun. Masa jabatan Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris, sedangkan anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 tahun diangkat untuk 1 periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali pada masa jabatan berikutnya.

PEDOMAN KERJA KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja yang dituangkan dalam bentuk *Charter* guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 3 September 2018 melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan kewenangan Komite GCG dan Manajemen Risiko dituangkan dalam Piagam Komite GCG dan Manajemen Risiko. Komite GCG dan Manajemen Risiko bertugas untuk:

1. Memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil asesmen berkala atas penerapan GCG untuk memastikan efektivitas implementasi GCG yang dilaksanakan oleh organ-organ utama (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi) serta organ-organ pendukung (Komite-komite Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Corporate Secretary, dan Internal Audit).
2. Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan infrastruktur GCG Perusahaan serta memantau pelaksanaannya, mencakup:
 - a. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).
 - b. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CoCG).
 - c. Pedoman Etika dan Perilaku (CoC).
3. Mereviu rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan.
4. Melaksanakan kajian tentang praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG untuk dapat diimplementasikan di Perusahaan.
5. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa manajemen risiko Perusahaan dijalankan secara efektif dan efisien.
6. Memantau kebijakan pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Direksi untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi dapat dikelola dengan baik.

The term of office for the GCG and Risk Management Committee is under the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 which stipulates that the term of office of members of the GCG and Risk Management Committee is not longer than three years. The term may be extended according to the BOC's term of office, while members of the GCG and Risk Management Committee who are not members of the BOC are appointed for one period for not more than two years and may be reappointed once more for the next term of office.

WORK GUIDELINE FOR THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The GCG and Risk Management Committee has been complemented with the GCG and Risk Management Committee Charter to support the implementation of its functions and duties. The document is prepared based on the prevailing laws and regulations and has been stipulated by the BOC on 3 September 2018 in the Board Manual stipulated through the Joint Decision of the BOC and the BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The duties and authority of the GCG and Risk Management Committee are outlined in the GCG and Risk Management Committee Charter. The Committee is tasked to:

1. *Monitor the implementation and evaluation of periodic assessment results on GCG implementation to ensure the effectiveness of GCG implementation carried out by the main organs (GMS, BOC, and BOD) and supporting organs (Committees of the BOC, Secretary of the BOC, Corporate Secretary, and Internal Audit).*
2. *Provide recommendations on improving the GCG infrastructure and monitoring its implementation, including:*
 - a. *Guidelines for the BOC and BOD (Board Manual).*
 - b. *Guidelines for Corporate Governance (CoCG).*
 - c. *Code of Conduct (CoC).*
3. *Review work plans and reports on GCG implementation as part of the Company's Annual Report.*
4. *Carry out a study of GCG best practices to be implemented in the Company.*
5. *Assist the BOC to ensure that the Company's risk management is carried out effectively and efficiently.*
6. *Monitor risk management policies established by the BOD ensure that all risks may be managed properly.*

7. Mengevaluasi kesesuaian realisasi capaian kinerja Perusahaan dengan rencana bisnis.
8. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan manajemen risiko serta pelaksanaannya.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan dan menyusun Pedoman Kerja Komite GCG dan Manajemen Risiko.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

INDEPENDENSI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Manajemen Risiko terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris, serta 2 anggota komite yang berasal dari pihak independen. Tabel independensi Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

7. Evaluate the suitability of the Company's performance achievements with the business plan.
8. Provide recommendations on improving risk management and implementation.
9. Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information and formulate the GCG Committee and Risk Management Work Guidelines.
10. Carry out other duties given by the BOC.

INDEPENDENCE OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The GCG and Risk Management Committee consists of a member of the BOC, as well as two members from independent parties. The independence of the GCG and Risk Management Committee can be described as follows:

ASPEK INDEPENDENSI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO INDEPENDENCE OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

ASPEK INDEPENDENSI INDEPENDENCE ASPECTS	HEDDY LUGITO	WAHJU SATRIO U.	TUBAGUS ARIEF FAHMI	DARMANSYAH
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Has no financial relationship with the BOC and the BOD.</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Pelindo III, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. <i>Has no management relationship in Pelindo III, subsidiaries, and affiliates.</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan. <i>Has no share ownership in the Company.</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko. <i>Has no familial relationship with the BOC, BOD, and/or members of the Audit Committee.</i>	✓	✓	✓	✓

FREKUENSI RAPAT KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Mengacu pada Pedoman Kerja, Komite GCG dan Manajemen Risiko wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama unit kerja GCG dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan, baik secara berkala maupun sesuai kondisi yang diperlukan. Berikut tingkat kehadiran anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko selama tahun 2019:

FREQUENCY OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

Referring to the Work Guideline, the the GCG and Risk Management Committee shall hold regular meetings with the BOC for at least once a month as well as hold meetings with the related functions, particularly the GCG work unit, to discuss the development and activities of the Company, both in a periodic manner or in accordance with the required conditions. The attendance rate of the GCG and Risk Management Committee members throughout 2019 is as follows:

KEHADIRAN RAPAT KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO FREQUENCY OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

NAMA NAME	JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	KEHADIRAN ATTENDANCE	PERSENTASE KEHADIRAN ATTENDANCE PERCENTAGE
Heddy Lugito	22	18	82%
Wahju Satrio U.	22	15	68%
Pandu Fajar Wisudha*	4	4	100%
Tubagus Arief Fahmi	22	21	95%
Darmansyah*	18	17	94%

Keterangan:

* Darmansyah diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.70/04/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 8 April 2019 menggantikan Pandu Fajar Wisudha.

Information:

* Darmansyah is appointed based on the Decree No. SK.70/04/KEP/DK.P.III/2019 dated 8 April 2019 to succeed Pandu Fajar Wisudha.

RISALAH RAPAT KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko selama 2019 adalah sebagai berikut:

MINUTES OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING

Agenda discussed in the GCG and Risk Management Committee meetings in 2019 is as follows:

RISALAH RAPAT KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO MINUTES OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING IN 2019

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
1.	23 Januari 23 January	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi <i>Unaudited</i> 2018. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2018 terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi sistem pengendalian internal; Temuan-temuan signifikan dari KAP; Temuan IT <i>general control audit</i>; dan Langkah-langkah Direksi untuk menyelesaikan temuan audit. Pemaparan Rencana Kerja Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Desember 2018. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Nataru 2018, dan Penjelasan tentang inisiasi rencana Direksi yang dipaparkan pada saat RUPS RKAP 2019. <p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Management Performance Report and the 2018 unaudited investment achievement.</i> <i>Audit Progress on the 2018 Financial Statement related to:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Evaluation of internal control system;</i> <i>Significant findings from KAP;</i> <i>Findings from the IT general control audit; and</i> <i>BOD measures to resolve audit findings.</i> <i>Description of the Business Transformation and Development Directorate Work Plan.</i> <i>The follow-up to the BOC-BOD Meeting in December 2018.</i> <i>Others:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>The 2018 Nataru Implementation Report, and</i> <i>The description of the BOD plan initiation described during the 2019 RKAP GMS</i> </p>	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Pandu Fajar Wisudha Tubagus Arief Fahmi

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
2.	14 Februari 14 February	<p>1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi bulan Januari 2019. 2. Persiapan RUPS Tahunan. 3. Progres pengakhiran kerja sama dengan DP World di TPS. 4. Lain-lain: a. Progres investasi Boom Marina Banyuwangi; b. Rencana pembubaran PT Lamin Aspalindo Tiga; dan c. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Januari 2019.</p> <p><i>1. Management Performance Report and January 2019 investment achievement. 2. Preparation for the Annual GMS. 3. The process for cooperation termination with DP World in TPS. 4. Others: a. Investment progress in Boom Marina Banyuwangi; b. Plan for dissolution of PT Lamin Aspalindo Tiga; and c. Follow up to the BOC-BOD Meeting in January 2019.</i></p>	<p>1. Heddy Lugito 2. Pandu Fajar Wisudha 3. Tubagus Arief Fahmi</p>
3.	25 Februari 25 February	<p>1. Pemaparan rencana kerja audit. 2. Laporan audit tematik 2019. 3. Progres laporan General Audit 2018. 4. Laporan operasional/kinerja. 5. Laporan realisasi investasi bulanan tahun berjalan. 6. Laporan pengendalian internal.</p> <p><i>1. Description of the audit work plan. 2. The 2019 thematic audit report. 3. Progress on the 2018 General Audit report. 4. Operational/performance report. 5. Report on the monthly investment realisation of the year. 6. Internal control report.</i></p>	<p>1. Heddy Lugito 2. Pandu Fajar Wisudha 3. Tubagus Arief Fahmi</p>
4.	27 Maret 27 March	<p>1. Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi sampai dengan bulan Februari 2019. 2. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2018. 3. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Februari 2019. 4. Lain-lain: a. Progres finalisasi TPS; dan b. Update Finalisasi Biaya/Tarif untuk Terminal LNG Jatim.</p> <p><i>1. Management Performance Report and investment achievement up to February 2019. 2. Audit Progress on the 2018 Financial Statement. 3. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in February 2019. 4. Others: a. Progress for TPS finalisation; and b. Update on the Finalisation of Fee/Tariff for East Java LNG Terminal.</i></p>	<p>1. Heddy Lugito 2. Pandu Fajar Wisudha 3. Tubagus Arief Fahmi</p>
5.	18 April 18 April	<p>Pemaparan atas Rencana Penarikan Sumber Dana Eksternal. <i>The description of the External Funding Source Withdrawal Plan.</i></p>	<p>1. Heddy Lugito 2. Wahyu Satrio Utomo 3. Darmansyah 4. Tubagus Arief Fahmi</p>

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
6.	25 April 25 April	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen dan capaian investasi Triwulan I Tahun 2019. Permohonan Penarikan Sumber Dana Eksternal. Usulan Penggantian Direksi Anak Perusahaan. Usulan Materi RUPS Tahun 2018. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Tugas Pengawasan 2018; dan Tanggapan Laporan Keuangan Audited 2018. <p>1. Management Performance Report and investment achievement in the Third Quarter of 2019.</p> <p>2. Request to Withdraw an External Funding Source.</p> <p>3. Proposal to Replace the BOD in a Subsidiary.</p> <p>4. Proposal for Matters Discussed in the 2018 GMS.</p> <p>5. Others:</p> <ol style="list-style-type: none"> The 2018 Report on Supervisory Duty; and Response to the 2018 Audit Financial Statement. 	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Wahju Satrio Utomo Darmansyah Tubagus Arief Fahmi
7.	27 Mei 27 May	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan Investasi, dan PKBL sampai April 2019. Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan yang masih belum mencapai target. Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan April 2019. <p>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to April 2019.</p> <p>2. Discussion on Subsidiary Performances that have not reached their target.</p> <p>3. The follow-up to Report of BPK Checking Results.</p> <p>4. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in April 2019.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wahju Satrio Utomo Pandu Fajar Wisudha Tubagus Arief Fahmi
8.	28 Mei 28 May	<p>Tindak Lanjut Hasil Uji Petik dan Penjelasan atas Penambahan Modal pada Anak Perusahaan.</p> <p>Follow Up on the Results of Quotation Test and Explanation on Capital Increase in Subsidiaries.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Wahju Satrio Utomo Darmansyah Tubagus Arief Fahmi
9.	20 Juni 20 June	<p>Pembahasan Kebijakan Pengawasan Anak Perusahaan.</p> <p>Discussion on Subsidiary Supervision Policy.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Darmansyah Tubagus Arief Fahmi
10.	26 Juni 26 June	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan Investasi, dan PKBL sampai Mei 2019. Rencana tindak lanjut penataan Pelabuhan Benoa dan Boom Banyuwangi. Progres tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Mei 2019. <p>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to May 2019.</p> <p>2. The plan to follow up the management of Port of Benoa and Boom Banyuwangi.</p> <p>3. The follow-up progress to the Report of BPK Checking Results.</p> <p>4. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in May 2019.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wahju Satrio Utomo Darmansyah Tubagus Arief Fahmi
11.	23 Juli 23 July	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja Semester I Tahun 2019. KAK atas penunjukan kembali KAP untuk <i>general audit</i> atas Laporan Keuangan Perusahaan dan PKBL Tahun Buku 2019. <p>1. Discussion on the Financial Statement and Performance in the First Semester of 2019.</p> <p>2. KAK on the re-appointment of KAP for general audit on the Financial Statement and PKBL of the Company for the 2019 Fiscal Year.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Wahju Satrio Utomo Darmansyah Tubagus Arief Fahmi

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
12.	29 Juli 29 July	<p>1. Pemaparan usulan konkret dari Komite untuk perbaikan Kinerja Manajemen sampai Semester I Tahun 2019.</p> <p>2. Telaah Komite atas tindak lanjut arahan RUPS atas surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/D2/06/2019 tanggal 18 Juni 2019.</p> <p>3. Lain-lain:</p> <p>a. Laporan pemanfaatan ekskendaraan dinas Direksi; dan</p> <p>b. Sosialisasi dan implimentasi K3 Pelindo III.</p> <p><i>1. Description of a concrete proposal from the Committee to improve the Management Performance up to the First Semester of 2019.</i></p> <p><i>2. Committee review on the follow-up to the GMS directive regarding the letter from the Minister of SOE No. S-574/MBU/D2/06/2019 dated 18 June 2019.</i></p> <p><i>3. Others:</i></p> <p><i>a. Report on utilisation of then-business vehicles of the BOD; and</i></p> <p><i>b. K3 socialisation and implementation of Pelindo III</i></p>	<p>1. Heddy Lugito</p> <p>2. Wahyu Satrio Utomo</p>
13.	8 Agustus 8 August	<p>Pemaparan atas Skema Kerja Sama Serah Operasi Terminal.</p> <p><i>The description on the Handover Scheme for Terminal Operation Cooperation</i></p>	<p>1. Heddy Lugito</p> <p>2. Wahyu Satrio Utomo</p> <p>3. Darmansyah</p> <p>4. Tubagus Arief Fahmi</p>
14.	22 Agustus 22 August	<p>Penjelasan Hasil Audit Entitas BJTI dan BIMA.</p> <p><i>Explanation of the Entity Audit Results in BJTI and BIMA.</i></p>	<p>1. Heddy Lugito</p> <p>2. Wahyu Satrio Utomo</p> <p>3. Darmansyah</p> <p>4. Tubagus Arief Fahmi</p>
15.	26 Agustus 26 August	<p>1. Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan Investasi, dan PKBL sampai Juli 2019.</p> <p>2. Pembahasan Rencana <i>Bundling</i> 4 Pelabuhan oleh BO yang telah dikaji oleh Konsultan dalam rangka menunjang program Pemerintah untuk peningkatan pariwisata nasional.</p> <p>3. Lain-lain:</p> <p>a. Evaluasi Penghapusbukuan Aset yang tidak direkomendasi;</p> <p>b. Catatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Anak Perusahaan untuk Direksi; dan</p> <p>c. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Juli 2019.</p> <p><i>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to July 2019.</i></p> <p><i>2. The discussion on 4 Port Bundling Plan by BO reviewed by the Consultant in supporting the Government programme to improve the national tourism.</i></p> <p><i>3. Others:</i></p> <p><i>a. Evaluation to remove non-recommended assets from book-writing;</i></p> <p><i>b. Notes on the BOC's work visit to Subsidiaries to the BOD; and</i></p> <p><i>c. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in July 2019.</i></p>	<p>1. Heddy Lugito</p> <p>2. Wahyu Satrio Utomo</p> <p>3. Darmansyah</p> <p>4. Tubagus Arief Fahmi</p>
16.	5 September 5 September	<p>1. Penajaman alasan pembatalan/penambahan/perubahan investasi.</p> <p>2. Ketersediaan waktu dan personel sampai akhir tahun 2019 atas masing-masing usulan.</p> <p>3. Kegiatan investasi yang dianggap prioritas dan waktu pelaksanaan sampai akhir tahun 2019.</p> <p><i>1. Improvement on reasons of investment cancellation/addition/revision.</i></p> <p><i>2. Time and personnel available to the end of 2019 on each proposal.</i></p> <p><i>3. Investment considered to be prioritized and the time implementation up to the end of 2019.</i></p>	<p>1. Darmansyah</p> <p>2. Tubagus Arief Fahmi</p>
17.	12 September 12 September	<p>Penjelasan atas hasil kajian KJPP rencana pelepasan saham Pelindo III pada TPI.</p> <p><i>Explanation of the results of KJPP review for the plan on Pelindo III shares divestment in TPI.</i></p>	<p>1. Heddy Lugito</p> <p>2. Wahyu Satrio Utomo</p> <p>3. Darmansyah</p> <p>4. Tubagus Arief Fahmi</p>

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
18.	27 September 27 September	<ol style="list-style-type: none"> Telaah Kinerja Manajemen, Penyerapan Investasi, dan PKBL sampai Agustus 2019. Pembahasan Usulan Revisi Investasi Tahun 2019. Progres pengembangan Pelabuhan Benoa. Progres pembentukan <i>holding</i> maritim dan <i>sub-holding</i> peti kemas. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan kerja sama di JIPE; dan Rencana pembentukan Komite Investasi dan Remunerasi Dewan Komisaris. <p>1. <i>Review on Management Performance, Investment Absorption, and PKBL up to August 2019.</i></p> <p>2. <i>The Discussion for Revision on the 2019 Investment Proposal.</i></p> <p>3. <i>Development progress on Port of Benoa.</i></p> <p>4. <i>Progress on the establishment of marine holding and container sub-holding.</i></p> <p>5. <i>Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Report on cooperation implementation in JIPE; and</i> <i>Plan to establish the Investment and Remuneration Committee under the BOC.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Wahju Satrio Utomo Darmansyah Tubagus Arief Fahmi
19.	14 November 14 November	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan atas Usulan RJPP Pelindo III tahun 2020 s.d. 2024. Usulan RKAP Pelindo III Tahun 2020. <p>1. <i>Discussion on the Proposal for RJPP from 2020 to 2024.</i></p> <p>2. <i>Proposal for the 2020 RKAP of Pelindo III.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Wahju Satrio Utomo Darmansyah Tubagus Arief Fahmi
20.	27 November 27 November	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keuangan sampai bulan Oktober 2019. Pembahasan Realisasi dan Prognosis Investasi Tahun 2019. Pembahasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan. Pembahasan Usulan Direksi tentang Penggantian Kepala SPI. Laporan Pembahasan Teknis atas usulan RKAP dan RJPP. <p>1. <i>Discussion on Financial Statement up to October 2019.</i></p> <p>2. <i>Discussion on the 2019 Investment Realisation and Prognosis.</i></p> <p>3. <i>Discussion on Quality and Service Policy.</i></p> <p>4. <i>Discussion on BOD Proposal on Replacing the Chairman of SPI.</i></p> <p>5. <i>Technical Discussion Report on the RKAP and RJPP proposal.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Darmansyah Tubagus Arief Fahmi
21.	16 Desember 16 December	<p>Pemaparan <i>Talent Management</i> Perusahaan. <i>Description of Company Talent Management.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Wahju Satrio Utomo Darmansyah Tubagus Arief Fahmi
22.	26 Desember 26 December	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Kinerja Manajemen sampai akhir November 2019 dan perkiraan sampai akhir Desember 2019. Pembahasan Progres Realisasi dan Anggaran Investasi sampai akhir November 2019 dan <i>rolling forecast</i> s.d. Desember 2019. Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing Terminal dan Anak Perusahaan Tahun 2019 dan Tahun sebelumnya. Pembahasan Laporan Progres Audit KAP Tahun 2019. Evaluasi Laporan Angkutan NATARU 2019/2020. <p>1. <i>Discussion on Management Performance Report up to the end of November 2019 and estimate up to the end of December 2019.</i></p> <p>2. <i>Discussion on the Progress of Investment Realisation and Budget up to the end of November 2019 and rolling forecast up to December 2019.</i></p> <p>3. <i>Performance Evaluation Report of each Terminal and Subsidiary in 2019 and the Prior Year.</i></p> <p>4. <i>Discussion on the KAP Audit Progress for 2019.</i></p> <p>5. <i>Evaluation of NATARU Transportation Report for 2019/2020.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Heddy Lugito Wahju Satrio Utomo Darmansyah Tubagus Arief Fahmi

REKOMENDASI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Dari hasil evaluasi terhadap kegiatan Pengawasan Internal selama 2019, Komite GCG dan Manajemen Risiko merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti di antaranya adalah: penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, persetujuan *talent* SDM untuk Sekretaris Perusahaan, setoran modal Anak Perusahaan, kerja sama usaha, serta perubahan jenis saham dan anggaran dasar.

KEBIJAKAN REMUNERASI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Remunerasi bagi Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dimana penghasilan anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan diberikan honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp43.200.000 dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

RECOMMENDATIONS FROM THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

From the evaluation results on the activities of Internal Supervision throughout 2019, the GCG and Risk Management Committee recommends significant matters that need to be followed up, among others: the succession of BOD and BOC in Subsidiaries, approval for Human Capital talent for the Corporate Secretary, paid-up capital for Subsidiaries, business cooperation, as well as changes in the stock type and Articles of Association.

REMUNERATION POLICY FOR THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Remuneration for Members of the GCG and Risk Management Committee is stipulated in the Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 on the Supporting Organ of the BOC/Supervisory Board of SOE, of which the income of the members of the GCG and Risk Management Committee is granted through honorarium with the maximum of 20% from the salary of the President Director or amounting to Rp43,200,000 with the tax imposed upon the company, and is not allowed to receive other income other than the honorarium.

The members of the BOC that serves as the Head/Member of the GCG and Risk Management Committee are not granted additional income from the position other than the income from serving as Members of the BOC.

STRUKTUR REMUNERASI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO REMUNERATION STRUCTURE OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

NAMA NAME	JABATAN POSITION	HONORARIUM	KETERANGAN INFORMATION
Heddy Lugito	Ketua Head	-	Anggota Dewan Komisaris (Honorarium dapat dilihat di tabel Honorarium Dewan Komisaris)
Wahju Satrio U.	Wakil Ketua Deputy Head	-	Member of the BOC (Honorarium can be seen in the table of BOC Honorarium)
Pandu Fajar Wisudha*	Anggota Member	Rp43.200.000	
Tubagus Arief Fahmi	Anggota Member	Rp43.200.000	
Darmansyah*	Anggota Member	Rp43.200.000	

Keterangan:

* Darmansyah diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SK.70/04/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 8 April 2019 menggantikan Pandu Fajar Wisudha.

Information:

* Darmansyah is appointed based on the Decree No. SK.70/04/KEP/DK.P.III/2019 dated 8 April 2019 to succeed Pandu Fajar Wisudha.

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Manajemen Risiko wajib menyampaikan laporan tertulis aktivitasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 bulan sekali sebagaimana diamanatkan dalam Code of Corporate Governance. Ruang lingkup Laporan Kegiatan

REALISATION OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE WORK PROGRAMME

The GCG and Risk Management Committee is required to submit a written report of its activities to the BOC every three months as mandated in Code of Corporate Governance. The scope of the Activity Report of the GCG and Risk

Komite GCG dan Manajemen Risiko mencakup tugas, tanggung jawab dan wewenang, rapat, kegiatan, program kerja dan realisasi program kerja. Berikut merupakan program kerja Komite GCG dan Manajemen Risiko di tahun 2019.

Management Committee includes duties, responsibilities and authorities, meetings, activities, work programmes and their realisation. Below is the list of work programmes of the GCG and Risk Management Committee in 2019.

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

THE REALISATION OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE WORK PROGRAMME

NO.	RENCANA KERJA WORK PLAN	KETERANGAN DESCRIPTION
1.	Pengembangan Kapasitas <i>Capacity Building</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
2.	Evaluasi Pelaksanaan RKAP 2019 <i>Evaluation on the 2019 RKAP Implementation</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
3.	Kunjungan Kerja ke Cabang dan Anak Perusahaan <i>Working Visits to Branches and Subsidiaries</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
4.	Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik <i>Monitoring the Implementation of Good Governance Principles</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
5.	Pembahasan Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris <i>Discussion of Strategic Policies that require the approval of the BOC</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
6.	Penelaahan Kerja Sama dengan pihak ketiga <i>Review of Cooperation with third parties</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
7.	Penelaahan Pengaduan yang diterima Dewan Komisaris <i>Review on Complaints received by the BOC</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
8.	Penelaahan Rancangan RKAP 2019 <i>Review on the Draft for 2019 RKAP</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
9.	Pengawasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan <i>Supervision of Quality and Service Policies</i>	Terlaksana <i>Terlaksana</i>
10.	Pengawasan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia <i>Supervision of Human Resource Development Policy</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
11.	Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko <i>Supervision of Risk Management Implementation</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
12.	Pengawasan Penerapan Teknologi Informasi <i>Supervision of Information Technology Implementation</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
13.	Pengawasan Kinerja Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Anak Perusahaan <i>Supervision of Operational Performance of Head Office, Branch Offices, and Subsidiaries</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
14.	Penyusunan RKA Dewan Komisaris 2019 <i>Preparation for the 2019 BOC RKA</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
15.	Perhitungan KPI Dewan Komisaris <i>Calculation of the BOC KPI</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2019

Guna meningkatkan wawasan dan kompetensi Komite GCG dan Manajemen Risiko, Perusahaan telah menyelenggarakan program pengembangan Komite GCG dan Manajemen Risiko baik melalui program internal maupun dari pihak eksternal. Berikut rincian informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite GCG dan Manajemen Risiko pada 2019:

TRAINING AND DEVELOPMENT OF THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

To improve the insights and competencies of the GCG and Risk Management Committee, the Company has organised a development programme for the GCG and Risk Management Committee both through internal programmes and from external parties. The following is a detailed information on the competency development programme that was participated by the GCG and Risk Management Committee in 2019.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO DI 2019 COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAMME FOR THE GCG AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE IN 2019

NAMA NAME	TANGGAL DATE	PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TRAINING AND DEVELOPMENT PROGRAMME	TEMPAT PLACE	PENYELENGGARA ORGANISER
1. Heddy Lugito 2. Tubagus Arief Fahmi	9-10 April 9-10 April	Seminar yang bertemakan “Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab” <i>Knowledge for Success themed “Becoming a Competent and Responsible Commissioner”</i>	Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta	INTI PESAN Knowledge for Success
1. Tubagus Arief Fahmi 2. Darmansyah	15-19 Juli 15-19 Juli	Refreshment level III Certified Risk Management Professional (CRMP) <i>Refreshment on Level III Certified Risk Management Professional (CRMP)</i>	Hotel Papandayan Bandung	
Tubagus Arief Fahmi	23-25 September 23-25 September	Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) <i>Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification</i>	Hotel Santika BSD Tangerang	RAP Indonesia
1. Heddy Lugito 2. Tubagus Arief Fahmi	2-6 November 2-6 November	Studi Banding pengelolaan Pelabuhan Fremantle di Perth untuk model pengelolaan di Benoa dan Marina Boom Banyuwangi <i>Comparative study on management of Port of Fremantle in Perth Australia for the management model in Benoa and Marina Boom Banyuwangi</i>	Perth Australia	Pelindo III
1. Heddy Lugito 2. Darmansyah 3. Tubagus Arief Fahmi	28-29 November 28-29 November	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko bertemakan “Growth, Sustainability and Risk Issues in Global Competition” <i>National Conference for Risk Management Professionals themed “Growth, Sustainability, and Risk Issues in Global Competition”</i>	Hotel Gumayah Semarang	BNSP

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Perusahaan tidak memiliki organ yang secara khusus memiliki fungsi dalam memberikan saran atau rekomendasi terkait nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Halhal terkait nominasi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi kewenangan Kementerian BUMN dan diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

The Company does not have an organ with a specific duty to provide suggestion or recommendation related to the nomination of the BOC and the BOD. Matters related to the nomination of the BOC and the BOD are within the authority of the Ministry of SOE and stipulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures of Appointment and Dismissal of the Members of the BOC and Supervisory Board of SOEs.

Perusahaan tidak memiliki organ yang secara khusus memiliki fungsi dalam memberikan saran atau rekomendasi terkait Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Hal-hal terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN dan diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

The Company does not have an organ with a specific duty to provide a suggestion or recommendation related to the remuneration of the BOC and the BOD. Matters related to the remuneration of the BOC and the BOD are within the authority of the Ministry of SOE and regulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 dated 10 March 2014 which has been amended several times, lastly by the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 dated 31 May 2019 on the Guideline to Determine the Income of the BOD, BOC, and the Supervisory Board of SOEs.



PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2019

Dikarenakan Perusahaan tidak memiliki organ yang secara khusus memiliki fungsi dalam memberikan saran atau rekomendasi terkait nominasi dan remunerasi, maka informasi mengenai pelatihan dan pengembangan pada fungsi nominasi dan remunerasi tidak tersedia.

TRAINING AND DEVELOPMENT FOR THE NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION IN 2019

Since the Company does not have a specific organ in providing suggestion or recommendation on nomination and remuneration, the information on training and development for the nomination and remuneration function is unavailable.



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ tata kelola Perusahaan yang bertanggungjawab secara kolegal atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit 2 orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN WEWENANG DIREKSI

Dalam rangka merumuskan tugas dan tanggung jawab Direksi, Perusahaan senantiasa mengacu pada sumber hukum yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, Code of Conduct Perusahaan yang tercantum dalam CoCG Perusahaan untuk kemudian dijabarkan secara lengkap dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual dan Code of Corporate Governance*) yang menggantikan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 dan KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 tentang *Review dan revisi Panduan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)* Perusahaan tanggal 16 Desember 2015. Dalam keputusan tersebut, ruang lingkup tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang Direksi adalah:

TUGAS DAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan target kinerja Perusahaan. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng hingga harta pribadi Direksi yang bersangkutan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan.

TUGAS DIREKSI Umum

Penetapan pembagian tugas anggota Direksi merupakan kewenangan RUPS. Secara umum tugas Direksi adalah sebagai berikut:

The BOD is a Company governance organ that is collectively responsible for the management of the Company for the interest and objective of the Company, acts as the leader in the Company's management, and represents the Company both inside and outside the court. The composition of the BOD is adjusted to the needs of the Company, with a provision that the BOD shall be composed of, at the very least, two members and one of whom shall serve as the President Director, by taking the prevailing laws and regulations into account.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, RIGHTS, AND AUTHORITY OF BOARD OF DIRECTORS

In formulating the duties and responsibilities of the BOD, the Company continuously refers to the prevailing legal sources, among others, Law No. 19 of 2003 on SOEs, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's Articles of Association, the Code of Conduct stipulated in the CoCG to be further elaborated in Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 in Review and Revision of GCG (Board Manual dan Code of Corporate Governance) which replaced the Joint Decree of the BOD of Pelindo III No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 and KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 on Review and Revision for Board Manual of the BOC and BOD of the Company dated 16 December 2015. In the decree, the BOD scope of duties, responsibilities, rights and authority are as follows:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES RESPONSIBILITIES

The BOD is fully responsible for the management of the Company, for the interests and objectives of the Company, and is fully responsible for the achievement of the Company's objectives and performance targets. The nature of this responsibility is collective and encompass the personal wealth of the BOD' members to the extent the concerned members are found guilty or negligent in carrying out their duties for the interests of the Company.

DUTIES OF BOARD OF DIRECTORS General

The GMS is authorised to determine the distribution of the BOD' duties. In general, the duties of the BOD are as follows:

1. Mematuhi ketentuan-ketentuan serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
2. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan;
3. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
4. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan tertentu;
5. Menyiapkan susunan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan;
6. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memberikan informasi dan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan Dewan Komisaris; dan
8. Menerapkan GCG secara konsisten.

Rincian Tugas Direksi

Secara rinci tugas-tugas Direksi mencakup:

1. Tugas Terkait dengan RUPS

- a. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
- c. Menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan.
- d. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
- e. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.
- f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan, termasuk Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS.
- g. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.
- h. Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.

2. Tugas yang Terkait dengan Strategi dan Rencana Perusahaan

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- b. Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS.
- c. Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perusahaan.

1. *Complying with the provisions and ensuring that all Company activities have been in line with the prevailing laws and regulations, Articles of Association, and GMS resolutions;*
2. *Leading and managing the Company based on the objectives and purposes of the Company as well as striving to improve the Company's efficiency and effectiveness;*
3. *Controlling, maintaining, and managing the Company's assets;*
4. *Conducting all actions and activities regarding the Company's management and ownership as well as binding the Company with other parties and/or other parties with the Company with certain limitations;*
5. *Formulating organisational structure and work procedures of the Company;*
6. *Organising and keeping Special Register based on the laws and regulations;*
7. *Providing information and description on all matters required by the BOC;*
8. *Implementing GCG consistently.*

Details of the Board of Directors' Duties

In details, duties of the BOD are as follows:

1. Duties Related to GMS

- a. *Obligated to carry out and store documents related to the GMS based on the provisions of the legislation.*
- b. *Signing the Annual Report, and if a member of the BOD does not sign the Annual Report, the reason must be stated.*
- c. *Signing Quarterly Management Reports and Annual Management Reports.*
- d. *Summoning and convening Annual GMS and/or Extraordinary GMS.*
- e. *Providing GMS materials to the Shareholders.*
- f. *Providing accountability and all information about the condition and execution of the Company in the form of reports on Company activities including Financial Statements in the form of Annual Reports or in the form of other periodic reports in the manner and time specified to the GMS.*
- g. *Requesting approval from the GMS if changes to the Articles of Association will be made.*
- h. *Providing Minutes of GMS if requested by the Shareholders.*

2. Duties Related to Corporate Strategies and Plans

- a. *Engaging and ensuring the Company's business and activities to be in line with the Company's purposes and objectives.*
- b. *Preparing RJPP and RKAP as well as other plans related to the implementation of the Company's business activities to be submitted to the BOC and Shareholders to obtain approval in the GMS.*
- c. *Executing business plans effectively in managing the Company.*

3. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan RJPP

- a. Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.
 - 2) Posisi Perusahaan saat ini.
 - 3) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.
- b. Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang.
- c. Bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani RJPP yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham.
- d. Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perusahaan dikarenakan terdapat perubahan materiel yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku.
- e. Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS.

4. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan RKAP

- a. Direksi menyusun RKAP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Kinerja Perusahaan tahun berjalan.
 - 2) Rencana kerja Perusahaan.
 - 3) Anggaran Perusahaan.
 - 4) Proyeksi keuangan Perusahaan.
 - 5) Proyeksi keuangan anak Perusahaan.
 - 6) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- b. Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

5. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan Laporan Tahunan

- a. Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud.
- b. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.

6. Tugas yang Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko

Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi.
- b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi.
- c. Evaluasi Risiko, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan.
- d. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial.
- e. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko.
- f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Duties related to RJPP Drafting

- a. *Preparing RJPP which includes, at the very least:*
 - 1) *Evaluation of the previous RJPP implementation.*
 - 2) *The current Company position.*
 - 3) *Assumptions used in preparing the RJPP.*
- b. *Determining the Vision, Mission, Targets, Strategies, Policies, and Long-Term Work Programmes.*
- c. *Together with the BOC, signing the approved RJPP and deliver it to the Shareholders.*
- d. *In the event of a change to the Company's internal and external factors due to material changes that are outside of the Company's control, the BOD shall review the possibilities to revise the prevailing RJPP.*
- e. *Should the RJPP needs to be revised, the BOD shall submit the revised RJPP to the BOC to be reviewed and approved so it can be submitted to the GMS.*

4. Duties Related to RKAP Drafting

- a. *Preparing RKAP which includes, at the very least:*
 - 1) *Company's performance in the current year.*
 - 2) *Company's work plan.*
 - 3) *Company's budget.*
 - 4) *Company's financial projection.*
 - 5) *Subsidiaries' financial projections.*
 - 6) *Other matters requiring GMS' resolutions.*
- b. *The BOD shall submit the RKAP to the BOC to be reviewed and approved before submitting it to the GMS to obtain approval.*

5. Duties Related to the Preparation of Annual Report

- a. *Preparing the Annual Report and, together with the BOC, signing the concerned Annual Report of the Company.*
- b. *Delivering the Annual Report to the Shareholders.*

6. Duties Related to Risk Management

Developing a risk management system and implement it consistently through the following stages:

- a. *Risk Identification, i.e. a process to identify the relevant risks with a potential to occur.*
- b. *Risk Measurement, i.e. a process to measure the size of impact and probability of the result of risk identification.*
- c. *Risk Evaluation, i.e. a review process on the availability of the entire risk management activity conducted in the Company.*
- d. *Risk Handling, i.e. a process to determine the efforts to be conducted to handle potential risks.*
- e. *Risk Monitoring, i.e. a process to monitor various factors that allegedly lead to the emergence of risks.*
- f. *Reporting and Disclosure, i.e. a process to report the risk management system implemented by the Company as well as the disclosure to the related parties based on the prevailing provisions.*

7. Tugas yang Terkait dengan Pengendalian Intern

- a. Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan.
- b. Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Lingkungan pengendalian internal.
 - 2) Penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan.
 - 3) Identifikasi risiko.
 - 4) Penilaian risiko.
 - 5) Mitigasi risiko.
 - 6) Aktivitas pengendalian.
 - 7) Informasi dan komunikasi.
 - 8) *Monitoring*.

Keterbukaan Informasi

- a. Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.
- b. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.
- c. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi Perusahaan.

Hubungan dengan Stakeholders

- a. Menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan pemangku kepentingan.
- b. Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial.
- c. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- d. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan.
- e. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.

Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEWENANGAN DIREKSI

Kewenangan Umum

- a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;

7. Duties Related to Internal Control

- a. *Stipulating policies on the effective internal control system to ensure the achievement of the Company's objectives.*
- b. *The internal control system shall cover the following matters:*
 - 1) *Internal control environment.*
 - 2) *Determination of company's work plans and targets.*
 - 3) *Risk identification.*
 - 4) *Risk evaluation.*
 - 5) *Risk mitigation.*
 - 6) *Controlling activities.*
 - 7) *Information and communication.*
 - 8) *Monitoring.*

Information Disclosure

- a. *Disclosing important information in the Annual Report and Financial Statements to the related parties according to the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.*
- b. *Taking the initiative to disclose not only the issues required by the laws and regulations but also matters deemed significant for decision making by the stakeholders.*
- c. *Actively disclosing the implementation of GCG principles and material issues faced by the Company.*

Relation with Stakeholders

- a. *Respecting the rights of stakeholders arising from the prevailing laws and regulations or agreements made between the Company and the stakeholders.*
- b. *Ensuring that the Company carries out social responsibility.*
- c. *Ensuring that the assets and business locations, as well as other facilities of the Company, have complied with the prevailing laws and regulations on environmental preservation, and occupational health and safety.*
- d. *In employment, the establishment of the amount of salary, provision of training activities, and determination of career path and other work requirements, the BOD and the Company shall not discriminate the employees based on their ethnicity, religion, gender, age, disability, or any other special conditions as in line with the provisions contained in the laws and regulations.*
- e. *The BOD shall prepare a work environment that is free from all manners of pressure.*

Other Duties and Obligations

Fulfilling other obligations in line with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on the applicable laws and regulations.

AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS

General Authority

- a. *Determining the Company's management policies;*

- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan kebijakan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Intern; dan
- g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
- b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*–BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*–BOWT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*–BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun; dan
- f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 tingkat di bawah Direksi.

Authority of Board of Directors Requiring Written Approval of the Board of Commissioners

- a. *Guaranteeing fixed assets of the Company for short-term credit withdrawal;*
- b. *Cooperating with other business entities or other parties in the form of license cooperation, management contract, asset leasing, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other forms of cooperation with certain value or time as determined by the GMS;*
- c. *Receiving or giving medium/long-term loans, except loans (debts or receivables) from business transactions, and loans given to Company subsidiaries provided that the loans are reported to the BOC;*
- d. *Removing non-performing receivables and non-productive asset inventory from bookkeeping;*
- e. *Disposing of fixed productive assets with economic maturity that is normally valid in the industry in general, i.e. five years; and*
- f. *Determining organisation structure up until one level below the BOD.*

Kewenangan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan dari RUPS dan Persetujuan Tersebut Diberikan Setelah Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
2. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
4. Melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
6. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
7. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*–BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*–BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*–BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS;
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun;
10. Menetapkan *blueprint* organisasi Perusahaan;
11. Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan;
12. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP;
13. Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan;
14. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan; dan
15. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

HAK-HAK DIREKSI

- a. Menerima gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- b. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan.

PRINSIP PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN OLEH DIREKSI

Umum

- a. Setiap kebijakan pengelolaan Perusahaan harus ditetapkan dalam suatu kebijakan tertulis.
- b. Kebijakan tertulis tersebut ditetapkan oleh Direksi, baik dengan keputusan Direksi atau keputusan Direktur terkait.

Authority of the Board of Directors Requiring Approval of the General Meeting of Shareholders after Obtaining Written Approval from the Board of Commissioners

1. *Guaranteeing fixed assets of the Company for medium/long-term credit withdrawal;*
2. *Carrying out capital investment in other companies;*
3. *Establishing subsidiaries and/or joint ventures;*
4. *Removing capital investment in Subsidiaries and/or Joint Ventures;*
5. *Conducting consolidation, merger, acquisition, segregation, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;*
6. *Binding the Company as a guarantor (borg or avalist);*
7. *Cooperating with other business entities or other parties in the form of license cooperation, management contract, asset leasing, Joint Operations, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO), and other forms of cooperation with the value or time exceeding the stipulations resolved by the GMS;*
8. *Not collecting non-performing receivables that have been removed from bookkeeping;*
9. *Disposing and eliminating Company's fixed productive assets except for fixed productive assets with economic maturity of five years that are generally valid in the industry;*
10. *Stipulating the Company's organisation blueprint;*
11. *Stipulating and changing the Company's logo;*
12. *Conducting other actions which have not been established in RKAP;*
13. *Establishing foundations, organisations and/or groups, either directly or indirectly related to the Company, that may give an impact on the Company;*
14. *Imposing fixed and regular expenses of the Company for the activities of the foundation, organisation and/or group that either directly or indirectly related to the Company; and*
15. *Recommending representatives of the Company to become the candidates for members of the BOD and BOC of joint ventures and/or subsidiaries that give a significant contribution to the Company and/or have strategic values as determined in the GMS.*

RIGHTS OF BOARD OF DIRECTORS

- a. *Receiving salaries including facilities and/or other allowances, including post-employment benefits of which the amount shall be determined by the GMS.*
- b. *Receiving incentives for their work achievement of which the amount shall be determined by the GMS if the Company achieve a certain level of profitability.*

GENERAL PRINCIPLES TO DETERMINE THE COMPANY MANAGEMENT POLICIES

General

- a. *Each policy regarding the Company's management shall be determined in a written form.*
- b. *Such written policy shall be determined by the BOD through either BOD resolution or the resolution of the concerned Director.*

Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengelolaan Perusahaan

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak serta kewajiban pengelolaan Perusahaan sehari-hari, Direksi wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegal merupakan sesuatu yang akan memengaruhi kinerja Perusahaan, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan rapat Direksi.
- b. Apabila anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan rapat Direksi, namun harus mengambil keputusan yang akan memengaruhi kinerja Perusahaan, dapat ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam rapat Direksi selanjutnya.
- c. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. Itikad baik.
 2. Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup.
 3. Pendalaman terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan.
 4. Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
 5. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan.
 6. Pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada karyawan atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama.
 7. Bentuk-bentuk kebijakan pengurusan perusahaan seperti surat keputusan dan lain-lain, diatur dalam dokumen Perusahaan tersendiri.

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas secara kolegal, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dilakukan pembidangan tugas di antara anggota Direksi. Pembidangan tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Perusahaan. Pembidangan tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS. Penjabaran lebih rinci dari pembidangan tugas tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui persetujuan penetapan dan penyesuaian struktur organisasi.

Di tahun 2019, nomenklatur penamaan Direksi yang digunakan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pelindo III; Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pelindo III; dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. Informasi atas tugas masing-masing Direksi nomenklatur penamaan Direktur Perusahaan adalah:

Principles of Company Management Policies

To use and implement the rights and obligations to manage the Company routinely, the BOD is required to meet the following principles:

- a. In terms of policies set collectively by the BOD that will have the power to affect the Company's performance, the policies need to obtain approval through the meeting of the BOD.
- b. If the meeting of the BOD does not reach the quorum but decisions that may affect the Company's performance is required, the BOD may determine a temporary policy regarding the matter to be discussed until the matter is resolved in the following meeting of the BOD.
- c. In determining policies regarding an issue, each member of the BOD is required to consider the following principles:
 1. Goodwill.
 2. Rational consideration and adequate information.
 3. Investigation on the issue as well as various resolutions that can be taken.
 4. The resolution shall be made based on thorough consideration for the sake of the Company's interests.
 5. In conducting daily obligations, the BOD shall always consider the appropriateness of their actions to the Company's plans and objectives.
 6. Delegation of the authority of members of the BOD to the employees of the Company or other parties to carry out legal action on behalf of the Company shall be stated in a written document and approved by the President Director.
 7. Forms of Company's management policies, such as decrees and so on, are regulated in a separate document of the Company.

SCOPE OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The BOD has a collegial duty; however, to create effectiveness and efficiency within the BOD, the duties are divided among the members of the BOD of the Company as determined by the GMS. Distribution of scope of duties of each member does not eliminate the collegial responsibility of the BOD in managing the Company. Detailed descriptions on the duties are determined by the BOC through approval for the determination and adjustment of organisation structure.

In 2019, the Company adjusted its nomenclature of the BOD which was approved through the Decree of the Minister of SOE No. SK-244/MBU/09/2018 date 19 September 2018 on Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD Members of Pelindo III; the Decree of Minister of SOE No. SK-289/MBU/11/2018 date 5 November 2018 on the Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III; and the Decree of the Minister of SOE No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 October 2019 on the Dismissal and Appointment of Company BOD Members in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Information on the duties of each Director as well as changes on the nomenclature is described in the following table.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI DUTIES DISTRIBUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

NAMA NAME	JABATAN POSITION	TUGAS DUTY	BIDANG YANG DIBAWAHI DIRECTORATE
Doso Agung	Direktur Utama <i>President Director</i>	Pembuat kebijakan umum Perusahaan, pengambil keputusan strategis Perusahaan, dan sebagai koordinator Direksi. <i>The Company's general policymaker, strategic decision-maker, and the BOD coordinator.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Pengawasan Intern Sekretaris Perusahaan Internal Audit Corporate Secretary
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial <i>Operations and Commercial Director</i>	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pelayanan jasa kapal, barang, terminal, <i>miscellaneous service</i> ; manajemen risiko dan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, <i>International Ship and Port Security (ISPS) Code</i> , peningkatan dan kerja sama usaha, serta manajemen properti. <i>Guiding the ship service, goods service, terminal service, miscellaneous service; risk and quality management, occupational health and safety and environment, International Ship and Port Security (ISPS) Code, business improvement and cooperation, as well as property management.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Pemasaran Subdit Teknologi Informasi dan Komunikasi Subdit Operasi Subdit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko Marketing Sub-Directorate Information and Communication Technology Sub-Directorate Operations Sub-Directorate Risk Management and Management Systems Sub-Directorate
Joko Noerhudha	Direktur Teknik <i>Engineering Director</i>	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kolam pelabuhan, investasi, studi kelayakan, bangunan pelabuhan, serta bangunan sipil. <i>Guiding provision and maintenance of port facilities and pools, investments, feasibility studies, port buildings, and civil buildings.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Peralatan Pelabuhan Subdit Fasilitas Pelabuhan Subdit Seperviisi Investasi Teknik Port Equipment Sub-Directorate Port Facility Sub-Directorate Engineering Investment Supervision Sub-Directorate
Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Director</i>	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, proses pengadaan barang dan jasa, bidang umum dan rumah tangga, serta pengelolaan Kantor Pusat. <i>Guiding Human Capital planning and development, staffing and organisation system, welfare, employee administration, employee performance assessment, goods and services procurement, general affairs and householding, as well as Head Office management.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Strategi dan Kesisteman SDM Subdit Pelayanan SDM dan HSSE Subdit Umum/Kepala Kantor Pusat Subdit Pengadaan Barang dan Jasa Subdit Hukum Human Capital Strategy and System Sub-Directorate Human Capital and HSSE Services Sub-Directorate General Sub-Directorate/Head of Head Office Procurement of Goods and Services Sub-Directorate Legal Sub-Directorate

NAMA NAME	JABATAN POSITION	TUGAS DUTY	BIDANG YANG DIBAWAHI DIRECTORATE
Irvandi Gustari	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan keuangan Perusahaan, meliputi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, hutang piutang, aset Perusahaan, dan pembinaan Anak Perusahaan. <i>Guiding the Company's financial activities, covering management and financial accounting, accounts payable, Company assets, and Subsidiaries guidance.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Subdit Akuntansi dan Anggaran • Subdit Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan • Subdit Shared Service Center • Subdit Pembinaan Anak Perusahaan • <i>Accounting and Budget Sub-Directorate</i> • <i>Corporate, Treasury, and Taxation Finance Sub-Directorate</i> • <i>Shared Service Centre Sub-Directorate</i> • <i>Subsidiary Development Sub-Directorate</i>
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Director</i>	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pengembangan bisnis Perusahaan; mulai dari perencanaan, pelaksanaan kerja sama, pemantauan kerja sama, manajemen perubahan dan perencanaan strategis, dan kinerja perusahaan. <i>Guiding the Company's business development; starting from planning, implementing cooperation, monitoring cooperation, change management and strategic planning, and company performance.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Subdit Pengembangan Bisnis • Subdit Manajemen Perubahan • Subdit Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan • <i>Business Development Sub-Directorate</i> • <i>Change Management Sub-Directorate</i> • <i>Strategic Planning and Company Performance Sub-Directorate</i>

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, Direksi Perusahaan berpedoman kepada Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

Perusahaan memiliki pedoman GCG yang disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual dan Code of Corporate Governance*). Secara rinci, pedoman kerja Direksi diatur dalam Bab 3 *Board Manual* yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Persyaratan, keanggotaan, dan masa jabatan Direksi
- Tanggung jawab Direksi
- Tugas Direksi
- Rincian tugas Direksi
- Kewenangan Direksi
- Hak-hak Direksi
- Prinsip penetapan kebijakan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi

BOARD MANUAL OF BOARD OF DIRECTORS

In carrying out the duties and responsibilities regarding the Company's management, the BOD refers to the Board Manual of the BOC and BOD formulated based on the principles of corporate laws, Articles of Association, prevailing laws and regulations, directives from the Shareholders as well as GCG best practices.

The Company has also established a GCG guideline through the Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on Review and Revision of GCG (Board Manual dan Code of Corporate Governance). In detail, the work guideline of the BOD is stipulated in Chapter 3 of Board Manual which generally covers the following:

- *Requirement, membership, and term of office of the BOD*
- *Responsibilities of the BOD*
- *Duties of the BOD*
- *Details of the BOD's duties*
- *Authority of the BOD*
- *Rights of the BOD*
- *Principles to determine the Company's management policies by the BOD*

- Pembidangan tugas Direksi
- Organ pendukung Direksi dalam implementasi GCG
- Penilaian kinerja Direksi

- *Division of duties of the BOD*
- *Supporting organs of the BOD in the implementation of GCG*
- *Assessment of the BOD performance*

SUSUNAN DIREKSI

Direksi Pelindo III diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Susunan Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

The BOD of Pelindo III is appointed by the Shareholders through GMS. As of 2019, the composition of Company's BOD is as follows:

SUSUNAN DIREKSI I COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS I

NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
Doso Agung	Direktur Utama <i>President Director</i>	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 <i>Decree No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018</i>
Putut Sri Muljanto	Direktur Komersial & Operasional <i>Operations and Commercial Director</i>	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 <i>Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018</i>
Joko Noerhudha	Direktur Teknik <i>Engineering Director</i>	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 <i>Decree No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018</i>
Toto Heliyanto	Direktur SDM <i>Human Capital Director</i>	Surat Keputusan No. SK.103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 jo. SK-94/MBU/05/209 tanggal 14 Mei 2019 <i>Decree No. SK.103/MBU/2014 dated 12 May 2014 jo. SK-94/MBU/05/209 dated 14 May 2019</i>
Iman Rachman*	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 <i>Decree No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018</i>
Toto Nugroho	Direktur Utama <i>Business Transformation and Development Director</i>	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 <i>Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018</i>
Irvandi Gustari*	Direktur Operasi dan Komersial <i>Finance Director</i>	Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 <i>Decree No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 October 2019</i>

Keterangan:

* Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019 dengan Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019 menggantikan Iman Rachman.

Description:

* Irvandi Gustari has been serving as the Finance Director since 16 October 2019 based on the Decree No. SK-219/MBU/10/2019 to succeed Iman Rachman.

Setelah mengalami perubahan susunan Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-219/MBU/10/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, maka susunan Direksi Pelindo III di tahun 2019 menjadi:

After the change in Financial Director based on the Resolution of the Minister of SOE No. SK-219/MBU/10/2019 on the Dismissal and Appointment of Company BOD Members in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the BOD composition in 2019 is:

SUSUNAN DIREKSI II

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS II

NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
Doso Agung	Direktur Utama <i>President Director</i>	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 <i>Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018</i>
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial <i>Operations and Commercial Director</i>	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 <i>Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018</i>
Joko Noerhudha	Direktur Teknik <i>Engineering Director</i>	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 <i>Decree No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018</i>
Toto Heliyanto	Direktur SDM <i>Human Capital Director</i>	Surat Keputusan No. SK.103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 jo. SK-94/MBU/05/209 tanggal 14 Mei 2019 <i>Decree No. SK.103/MBU/2014 dated 12 May 2014 jo. SK-94/MBU/05/209 dated 14 May 2019</i>
Irvandi Gustari	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 <i>Decree No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 Oktober 2019</i>
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Director</i>	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 <i>Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018</i>

PROSEDUR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMILIHAN ULANG DIREKSI

Sebagai entitas usaha berstatus BUMN, Pelindo III memiliki mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pemilihan ulang Direksi sebagaimana yang menjadi kewenangan Pemegang Saham. Mekanisme ini hadir sebagai bentuk pemenuhan atas prinsip keadilan (*fairness*) dalam GCG bagi individu-individu yang berkompeten baik bagi pegawai Perusahaan atau para profesional yang memenuhi persyaratan untuk diberikan kepercayaan dalam melakukan pengelolaan usaha Perusahaan. Regenerasi perlu dilakukan pada tataran manajemen terutama di jajaran Direksi mengingat Perusahaan memiliki mekanisme penetapan batas masa jabatan Direksi hanya selama 5 tahun untuk kemudian digantikan oleh kandidat lain atau diangkat kembali melalui pertimbangan dan keputusan Pemegang Saham.

Terkait mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan ulang Direksi, Perusahaan telah memuat petunjuk pelaksanaan dan teknis yang tercantum dalam Pedoman CoCG Perusahaan. Pedoman tersebut dibuat dengan mengacu pada regulasi terkait seperti:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PROCEDURES TO APPOINT, DISMISS, AND RE-NOMINATION OF THE BOARD OF DIRECTORS (SUCCESSION OF BOARD OF DIRECTORS)

As an SOE, Pelindo III has a mechanism of appointment, dismissal, and re-nomination of the BOD which authority of the Shareholders. This mechanism exists as a form of compliance with the fairness principle of GCG for competent individuals, i.e. employees of the Company or qualified professionals to be given the trust and mandate in managing the Company's business. Regeneration is necessary at the management level, especially in the BOD level, considering that the Company has a mechanism for determining the term of office of the BOD for only five years which is then succeeded by another candidate or re-appointed through the consideration and decision of the Shareholders.

Concerning the mechanism of appointment, dismissal, and re-appointment of the BOD, the Company has provided the implementation and technical guidelines contained in the CoCG Guidelines. Such guidelines are made by referring to the following related regulations:

- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN (pasal 5)
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
- Keputusan Menteri Negara No. Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi BUMN

MEKANISME

Dalam pedoman yang berlaku dinyatakan bahwa mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan ulang Direksi terdiri dari:

PERSYARATAN

Persyaratan Formal

Direksi Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; dan
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan Materiel

Persyaratan materiel Direksi BUMN, yaitu:

1. Keahlian;
2. Integritas;
3. Kepemimpinan;
4. Pengalaman;
5. Jujur;
6. Perilaku yang baik; dan
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

SUMBER BAKAL CALON

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN, dan sumber lain.

PENJARINGAN

Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

- Law No. 19 of 2003 on SOEs
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs (article 5)
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the BOD of SOEs
- Resolution of the Minister No. Kep-09A/MBU/2002 on Fit-and-Proper Test of Candidates Members of the BOD of SOEs

MECHANISM

In the applicable guidelines, it is stated that the mechanism of appointment, dismissal, and reappointment of the BOD consists of:

REQUIREMENTS

Formal Requirements

The BOD of the Company is an individual who is capable of performing legal acts, except within five years before the appointment they must never have:

1. Been declared bankrupt;
2. Been a member of the BOD or the BOC/Supervisory Board who is found guilty of causing an SOE and/or a Company to be declared bankrupt;
3. Been convicted of committing criminal acts that are detrimental to State finances, SOE, and/or those related to the financial sector.

Material Requirements

Material requirements for the BOD are as follows:

1. Expertise;
2. Integrity;
3. Leadership;
4. Experience;
5. Honesty;
6. Good behaviour; and
7. High dedication to promote and develop the Company.

CANDIDATE SOURCE

The nomination of names of candidates for the BOD shall be based on sources of prospective candidates comprising former BOD SOE, BOC, Talents from SOE, Talents from the Ministry of SOE, and other sources.

SELECTION

The selection for members of the BOC is conducted by the Minister of SOE, Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy to search potential candidates from various sources. All potential candidates are administrated by the Deputy.

FIT-AND-PROPER TEST (UKK)

Prospective candidates who will be appointed as a BOD member are individuals who have been declared to fulfil the Formal Requirements and other Requirements, as well as passing the UKK. UKK for the prospective candidates shall be conducted by professional institutions appointed by the Minister.

USULAN PENGANGKATAN

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi “Disarankan” oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan. Untuk penetapan, karena status Perusahaan sebagai BUMN yang kepemilikan seluruh saham dimiliki negara maka penetapan dilakukan melalui Keputusan Menteri. Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi adalah:

1. Persyaratan, susunan, dan masa jabatan Anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pengangkatan anggota Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Pemegang Saham. Kewenangan tersebut mencakup:
 - a. Menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Direksi;
 - b. Membentuk tim seleksi calon anggota Direksi; dan
 - c. Mengangkat anggota Direksi, termasuk mengangkat Direktur Utama.
3. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perusahaan.
4. Calon-calon anggota Direksi merupakan pejabat internal Perusahaan dapat diusulkan oleh Dewan Komisaris.
5. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
6. Anggota Direksi diangkat melalui RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pengangkatan.
7. Pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan dengan keputusan Menteri.
8. Pengangkatan anggota Direksi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
9. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada.

PEMBERHENTIAN

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana tercantum dalam PER-03/MBU/02/2015 yaitu:

1. Alasan Pemberhentian

Alasan pemberhentian Direksi meliputi ketidakmampuan Direksi dalam menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan bagi Perusahaan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan, serta mengundurkan diri.

2. Tata Cara Pemberhentian

Tata cara pemberhentian dilakukan dengan evaluasi oleh Deputi kepada Direksi yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk kemudian

PROPOSED APPOINTMENT

Candidates obtaining “Recommended” stamp from the assessment team may be reappointed as the members of the BOC. As for the determination, considering the Company's status as an SOE whose shares are wholly owned by the state, it shall be conducted through a Ministerial Resolution. The Company's governance policies on the appointment of members of the BOD are as follows:

1. Requirements, composition, and term of office of members of the BOD are stipulated in the Articles of Association.
2. The appointment of members of the BOD is under the full authority of the Shareholders. Such authority includes:
 - a. To determine general assessment criteria for candidates for members of the BOD;
 - b. To establish a selection team of candidates for members of the BOD;
 - c. To appoint members of the BOD, including appointing the President Director;
3. Selection of the candidates for members of the BOD shall be conducted through a transparent selection and nomination processed by taking into account the expertise, integrity, honesty, leadership, experience, conduct and dedication, and time availability of the candidates to manage the Company.
4. Candidates for members of the BOD from internal Company's officials can be proposed by the BOC.
5. Appointment of members of the BOD shall be conducted through a fit and proper test mechanism. Candidates who pass the test must sign a management contract before being appointed as a member of the BOD.
6. Members of the BOD shall be appointed through GMS by stating the effective date of appointment.
7. Appointment of candidates for members of the BOD shall be conducted by a Ministerial resolution.
8. Appointment of members of the BOD shall be effective as of the date of inauguration or the date stipulated in the Ministerial Resolution.
9. The term of office of the BOD' members shall be five years and thereafter they may be reappointed for another term.
10. If there is an addition to the BOD, the term of office of the new member of the BOD will end with the term of office of the existing members of the BOD.

DISMISSAL

Provisions concerning the dismissal mechanism as stated in PER-03/MBU/02/2015 are as follows:

1. Reason for Dismissal

The reasons for BOD dismissal include the inability of the BOD to perform their duties, violation of the Articles of Association as well as laws and regulations, involvement in actions that cause a loss for the Company and the country, involvement in ethical offences, and being declared guilty by the court decision, as well as resignation.

2. Procedures of Dismissal

Dismissal procedures began with evaluation by a Deputy on the concerned BOD, followed by submitting a proposal to be determined by the Minister of SOE. Before the

ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan dievaluasi, Perusahaan terlebih dahulu memberikan informasi kepada Direksi yang bersangkutan agar yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan (untuk lisan dibuatkan berita cara penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari terhitung setelah Direksi yang bersangkutan memperoleh informasi pemberhentian kepada Deputi. Setelah disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan ke dalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan.

Proses pemberhentian Direksi dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Direksi pengganti dan pemberhentian berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau RUPS.

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi adalah:

1. Persyaratan pemberhentian anggota Direksi dari jabatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu, dengan prosedur:
 - a. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dalam butir (a) harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
 - c. Dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk meminta diadakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk hadir dan membela diri.
 - d. Jika RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal demi hukum.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan, dengan pertimbangan:
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya.
 - b. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara.

determination and evaluation, the Company shall inform the concerned members of the BOD so they can prepare a defence provided that such defence is delivered in written and spoken forms to the Deputy (for the spoken form, minutes of defence deliverance shall be prepared) in no later than 14 days since the concerned members of the BOD received information of dismissal. After the defence is stated, minutes of defence shall be submitted to the GMS to be resolved.

The dismissal process is carried out simultaneously with the appointment of the succeeding members of the BOD. The dismissal shall take into effect since the determination through a Minister or GMS Resolution.

The Company's governance policies concerning the appointment of BOD members are as follows:

1. *The requirements for dismissal for members of the BOD from their positions are stipulated in the Articles of Association.*
2. *Members of the BOD may be dismissed temporarily through the following procedures:*
 - a. *The BOC with the most votes shall at all times be entitled to temporarily dismiss one or more members of the BOD, if they act contrary to the Articles of Association or if they neglect their obligations or if there is an urgent reason for the Company.*
 - b. *A temporary dismissal referred to in point (a) shall be notified in writing to the concerned members of the BOD with the reasons for dismissal.*
 - c. *Within 30 days after the dismissal, the BOC is required to request an Extraordinary GMS to be convened to decide whether the concerned members of the BOD shall be dismissed entirely or returned to their position, by first providing an opportunity to the temporarily dismissed members of the BOD for attending the meeting and defend themselves.*
 - d. *If the Extraordinary GMS is not convened within 30 days after the dismissal, the dismissal shall be declared null and void in law.*
3. *Members of the BOD may be dismissed before the end of their term of office, with the following considerations:*
 - a. *The concerned members of the BOD act contrary to the Company's Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations, are found guilty due to a court decision or are found to be neglecting their obligations.*
 - b. *Not capable of fulfilling their obligations as agreed in the management contract.*
 - c. *Not capable of performing their duties properly.*
 - d. *Do not comply with the provisions of the laws and regulations and/or provisions of the Articles of Association.*
 - e. *Engaged in actions that cause loss to the Company and/or the country.*

- f. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau keputusan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN.
 - g. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 4. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri Negara BUMN atau Deputi Teknis Kementerian BUMN.
 5. Keputusan pemberhentian anggota Direksi sebelum masa jabatan berakhir diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 7. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 8. Anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pemberhentian.
 9. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawaban dalam RUPS, atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal penetapan pengunduran diri.
 10. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan.
 11. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
 12. Selama jabatan anggota Direksi lowong dan penggantinya belum ada, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.
 13. Jika oleh suatu sebab Perusahaan tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan, Dewan Komisaris berkewajiban untuk meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi lowongan tersebut.
- f. *Conducted unethical and/or improper actions that should be respected instead as members of the BOD of an SOE.*
 - g. *Found guilty due to a court decision which has a fixed legal power.*
 4. *The plan to dismiss the members of the BOD before the end of their term of office shall be notified in advance to the concerned members of the BOD in oral or writing forms by the Minister of SOE or the Technical Deputy of Ministry of SOE.*
 5. *The decision of dismissal of the members of the BOD before the end of their term of office is made after the concerned members are allowed to defend themselves.*
 6. *A member of the BOD is entitled to resign from their position by submitting notification in writing form of their intention to the Shareholders with a copy to the BOC and BOD in, at the very least, 30 days before the date of their resignation.*
 7. *Dismissal of members of the BOD at any time before the end of their term of office shall be carried out by the GMS by stating the reasons.*
 8. *Members of the BOD are dismissed by the GMS by stating the effective date of dismissal.*
 9. *A resigning member of the BOD shall be held accountable at the GMS for their performance regarding their duties from the date of their appointment until the date of their resignation.*
 10. *If a member of the BOD resigns or is dismissed before the end of their term of office, the term of office of their replacement shall be the remaining term of the replaced member of the BOD.*
 11. *If by any reason the position of the BOD is vacant, then, within no later than 30 days after the vacancy, a GMS shall be convened to fill the vacancy.*
 12. *As long as the position of the BOD is vacant and their successor has yet existed, one of the other members of the BOD appointed by the BOC shall perform the duties of the vacant position of the BOD with the same powers and authority, in addition to continuing to carry out their main duties.*
 13. *If for any reason the Company does not have a BOD, the BOC is temporarily obliged to carry out the duties of the BOD. Within no later than 30 days after the vacancy, the BOC is obliged to request an Extraordinary GMS to be convened to fill the vacancy.*

PEMILIHAN ULANG

Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN dapat dilakukan tanpa UKK apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya yang antara lain didasarkan pada pencapaian target kinerja Perusahaan, kekompakan Tim, Integritas, dan rekam jejak. Penyajian hasil penilaian dapat dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

Dengan statusnya sebagai BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Perusahaan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dalam hal pengangkatan, pemilihan ulang

RE-NOMINATION

The reappointment of BOD members in the same position in an SOE can be conducted without holding UKK if they are considered capable of performing their duties well during their term of office. This is based on the achievement of company performance targets, teamwork, integrity, and track record. The presentation of assessment results can be done in the form of qualitative narrative.

As an SOE whose shares are fully owned by the government, the Company always adheres to the procedures that have been determined in line with the Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 regarding appointment, renomination and dismissal of the BOD. Since the abovementioned matters

dan pemberhentian Direksi. Karena hal-hal tersebut bersifat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku wakil Pemerintah di dalam Perusahaan, maka Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada Perusahaan diadakan.

are established as a provision issued by the Minister of SOE as a representative of the Government in the Company, the Nomination and Remuneration function in the Company is hence removed.

PEMENUHAN ATAS MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

FULFILLMENT OF THE APPOINTMENT AND DISMISSAL MECHANISMS

PENGANGKATAN

Pada tahun 2019, Perusahaan mengalami pergantian Direksi. Proses pengangkatan Direksi Perusahaan telah sesuai dengan RUPS, sebagaimana tabel di bawah:

APPOINTMENT

In 2019, the Company changed the composition of its BOD. The appointment mechanism has conformed with the GMS as follows:

KESESUAIAN PENGANGKATAN DIREKSI DENGAN RUPS CONFORMITY OF BOARD OF DIRECTORS' APPOINTMENT WITH THE GMS

KETENTUAN PROVISIONS	PEMENUHAN FULFILLMENT	KETERANGAN INFORMATION
KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM DALAM PENGANGKATAN DIREKSI SHAREHOLDERS' AUTHORITY IN THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS		
Menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Direksi. <i>To determine general assessment criteria for candidate members of the BOD</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	
Membentuk tim seleksi calon anggota Direksi. <i>To establish a selection team of candidate members of the BOD.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	
Mengangkat anggota Direksi, termasuk mengangkat Direktur Utama. <i>To appoint members of the BOD, including appointing the President Director.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	
Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perusahaan. <i>Selection of the candidate members of the BOD shall be conducted through a transparent selection and nomination processed by taking into account the expertise, integrity, honesty, leadership, experience, conduct and dedication, and time availability of the candidates to manage the Company.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan asesmen terhadap calon Direksi. <i>Ministry of SOE as the Shareholder cooperates with a third party to conduct an assessment on candidates members of the BOD.</i>
Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. <i>Appointment of members of the BOD shall be conducted through a fit-and-proper test mechanism. Candidates who pass the test must sign a management contract before being appointed as a member of the BOD.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	
Anggota Direksi diangkat melalui RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pengangkatan. <i>Members of the BOD shall be appointed through GMS by stating the effective date of appointment.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	
Pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri. <i>Appointment of candidate members of the BOD shall be conducted by a Ministerial Decision.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	Pengangkatan Direktur Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019. <i>Appointment of the Finance Director is based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 October 2019.</i>

PEMBERHENTIAN

Pada tahun 2019, Perusahaan mengalami pergantian Direksi. Proses pemberhentian Direksi Perusahaan telah sesuai dengan RUPS, sebagaimana tabel di bawah:

DISMISSAL

In 2019, the Company changed the composition of its BOD. The dismissal mechanism has conformed with the GMS as follows:

KESESUAIAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DENGAN RUPS CONFORMITY OF BOARD OF DIRECTORS' DISMISSAL WITH THE GMS

KETENTUAN PROVISIONS	PEMENUHAN FULFILMENT	KETERANGAN INFORMATION
Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya. <i>Dismissal of members of the BOD at any time before the end of their term of office shall be carried out by the GMS by stating the reasons.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	
Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. <i>If a member of the BOD resigns or is dismissed before the end of their term of office, then the term of office of their replacement shall be the remaining term of the replaced member of the BOD.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	Masa jabatan Direktur Keuangan yang baru melanjutkan sisa masa jabatan Direktur Keuangan sebelumnya. <i>The term of office of the Finance Director continues the remaining term of office of the previous Finance Director.</i>
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. <i>If by any reason the position of the BOD is vacant, then, within no later than 30 days after the vacancy, a GMS shall be convened to fill the vacancy.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>	

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Pada tahun 2019, Kementerian BUMN memberhentikan 1 orang dan mengangkat 1 orang anggota Direksi Pelindo III. Program orientasi di Perusahaan disebut dengan pengenalan perusahaan terhadap Direksi yang baru diangkat. Program ini berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN, kemudian diturunkan menjadi CoCG. Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019 kepada Direksi baru.

Materi Program pengenalan perusahaan, mencakup:

1. Sejarah Perusahaan
2. Wilayah kerja Perusahaan
3. Struktur organisasi Perusahaan, SDM, dan entitas Anak Perusahaan
4. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
5. Laporan keuangan Perusahaan
6. Tata kelola Perusahaan
7. Rencana jangka pendek dan panjang Perusahaan

ORIENTATION PROGRAMME FOR BOARD OF DIRECTORS

In 2019, the Ministry of SOE dismissed and appointed a member of the BOC of Pelindo III. Hence, the Company carried out an orientation programme for the newly-appointed Commissioner. The programme is under the responsibility of the Corporate Secretary as stipulated in the Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on GCG Implementation in SOEs from which the CoCG of the Company is derived. The programme was implemented on the new Director on 27 September 2019.

Materials presented in the orientation programme cover:

1. Company History
2. Company work area
3. The Company's organisational structure, Human Capital, and Subsidiaries
4. Corporate Vision, Mission and Culture
5. Financial statements of the Company
6. Corporate Governance
7. Short-term and long-term plans of the Company

MATERI PROGRAM ORIENTASI DIREKSI THE MATERIAL OF ORIENTATION PROGRAMME FOR THE BOARD OF DIRECTORS

ASPEK TATA KELOLA PERUSAHAAN GOVERNANCE ASPECTS	REALISASI MATERI MATERIAL REALISATION	PEMENUHAN FULFILMENT
<p>Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan berbagai masalah strategis lainnya.</p> <p><i>Description of the Company concerning the objectives, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks, and other strategic issues.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Sejarah Perusahaan Wilayah kerja Perusahaan Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Laporan keuangan Perusahaan Rencana jangka pendek dan panjang Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> Company History Company work area Corporate Vision, Mission and Culture Financial statements of the Company Short-term and long-term plans of the Company 	Terpenuhi Fulfilled
<p>Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan.</p> <p><i>Implementation of GCG principles by the Company.</i></p>	Tata kelola Perusahaan Corporate governance	Terpenuhi Fulfilled
<p>Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem, dan kebijakan pengendalian intern serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p><i>Explanation related to the delegated authority, internal and external audit activities, internal control system and policy, as well as duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the BOC.</i></p>	Struktur organisasi perusahaan, SDM, dan entitas anak perusahaan. <i>The Company's organisational structure, Human Capital, and Subsidiaries.</i>	Terpenuhi Fulfilled
<p>Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p><i>Description of duties and responsibilities of the BOC and BOD.</i></p>		
<p>Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan di mana program tersebut dilaksanakan.</p> <p><i>An orientation programme can be given in the form of presentation, meeting or visit the Company's facilities, or any other programme deemed appropriate with the Company's condition where it is implemented.</i></p>	Direksi mendapatkan pengenalan Perusahaan di Kantor Pusat dan juga melakukan kunjungan ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan. <i>The Directors get an introduction to the Company at the Head Office and also visits Port Branches and Subsidiaries..</i>	Terpenuhi Fulfilled

RINGKASAN KEGIATAN ORIENTASI ORIENTATION SUMMARY

PESERTA PARTICIPANT	TOPIK TOPICS	PENYELENGGARA ORGANISER	WAKTU DAN TEMPAT DATE AND VENUE	DURASI DURATION	BIAYA COST
Irvandi Gustari	Pengenalan Perusahaan Company Orientation	Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat No. TR.01.03/160/HOFC-2019 tanggal 23 September 2019 Corporate Secretary based on Decree No. TR.01.03/160/HOFC-2019 dated 23 September 2019	27 September 2019, Kantor Pusat 27 September 2019, Head Office	1 hari One day	-

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIREKSI 2019

Di tahun 2019, jajaran Direksi tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal Pelindo III maupun dari pihak eksternal. Dengan demikian, data mengenai pendidikan dan pelatihan Direksi tidak tersedia.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan, baik rapat internal Direksi maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris serta Komite-Komite. Rapat Direksi umumnya diagendakan secara berkala dalam 1 tahun buku untuk menindaklanjuti berbagai keperluan operasional yang dijalankan Direksi. Sementara itu, rapat gabungan ditujukan untuk memberikan laporan dan penerimaan masukan kepada Dewan Komisaris dalam mendukung aktivitas pengawasan atas jalannya kegiatan operasional Perusahaan. Rapat Direksi juga dapat diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan jika terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran dan tugas-tugas Direksi di dalamnya.

Sepanjang 2019, Direksi mengadakan 17 kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

TRAINING AND DEVELOPMENT FOR THE BOARD OF DIRECTORS IN 2019

In 2019, the BOD did not take part in education and training that was conducted internally by Pelindo III or from external parties. Therefore, information on the BOD's education and training is unavailable.

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF THE BOARD DIRECTORS IN MEETINGS

The BOD holds both internal and joint meetings with the BOC and Committee. The BOD meetings are regularly scheduled throughout one fiscal year to follow-up various supervisory and advisory needs on the operational activities conducted by the BOD and the management. Meanwhile, joint meetings aim to provide the report and obtain opinions from the BOC in supporting the supervision on the Company's operational activity. BOD meetings may also be held outside of the set agenda should other urgent matters require the roles and duties of the BOD.

In 2019, the BOD held 17 internal meetings with the following details

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS

NAMA NAME	JABATAN POSITION	RAPAT INTERNAL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' MEETING		
		JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	KEHADIRAN ATTENDANCE	%
Doso Agung	Direktur Utama President Director	17	17	100%
Putur Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial Operation and Commercial Director	17	17	100%
Joko Noerhudha	Direktur Teknik Engineering Director	17	15	88%
Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	17	14	82%
Iman Rachman*	Direktur Keuangan Finance Director	7	7	100%
Irvandi Gustari*		5	5	100%
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	17	15	88%

Keterangan:

* Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019 menggantikan Iman Rachman berdasarkan Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019.

Description:

* Irvandi Gustari has been serving as the Finance Director since 16 October 2019 to succeed Iman Rachman based on the Decree No. SK-219/MBU/10/2019.

PUBLIKASI RAPAT DIREKSI DAN AGENDA RAPAT

Berdasarkan dokumen *Code of Corporate Governance* pada BAB VI Proses-Proses Corporate Governance, disebutkan bahwa rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan. Kemudian, berdasarkan Surat Edaran Direksi No. SE.31/TR.0101/P.III-2017 tanggal 16 Agustus 2017, Pelaksanaan Rapat Direksi dilaksanakan setiap hari Senin setiap minggunya, sedangkan rapat Manajemen/Manajemen terbatas yang melibatkan pejabat 1 tingkat di bawah Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

PUBLICATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Based on the *Code of Corporate Governance* document in Chapter VI of *Corporate Governance Processes*, it is stated that the BOD meetings are held whenever deemed necessary, but at least once a month. Then, based on the BOD Circular No. SE.31/TR.0101/P.III-2017 dated 16 August 2017, Implementation of BOD Meetings is held every Monday every week, while Management/Management meetings are limited to involving officials at 1 level below the BOD, as follows:

RAPAT MANAJEMEN PERUSAHAAN MEETINGS OF THE COMPANY MANAGEMENT

RAPAT MANAJEMEN TERBATAS KANTOR PUSAT | LIMITED MANAGEMENT MEETINGS IN HEAD OFFICE

Frekuensi <i>Frequency</i>	Dua minggu sekali tiap bulan (minggu pertama dan minggu ketiga), maksimal 2 jam untuk 1 topik pembahasan. <i>Once every two weeks in every month (the first and third week of every month), for 2 hours at maximum to discuss 1 topic.</i>
Hari Rapat <i>Meeting Days</i>	Diutamakan, Senin s.d. Selasa <i>On Monday or Tuesday (prioritised)</i>
Dipimpin <i>Chaired by</i>	Direktur Utama Pelindo III <i>President Director of Pelindo III</i>
Peserta <i>Participants</i>	Direksi, Senior Vice President terkait, General Manager terkait, serta Direksi Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dan Dana Pensiun terkait. <i>The BOD, related Senior Vice Presidents, related General Managers, as well as related BOD of Subsidiaries/Second-Tier Subsidiaries/Affiliations and Pension Funds.</i>
Tempat <i>Location</i>	Kantor Pusat Pelindo III <i>Head Office of Pelindo III</i>
Media	Pertemuan langsung dan/atau Tele/Video <i>Direct meeting and/or Tele/Video Conference</i>
Notulis <i>Minute-Taker</i>	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>

RAPAT MANAJEMEN KANTOR PUSAT | MANAGEMENT MEETINGS IN HEAD OFFICE

Frekuensi <i>Frequency</i>	Dua minggu sekali tiap bulan (minggu kedua dan minggu keempat), maksimal 1 jam untuk 1 topik pembahasan. <i>Once every two a weeks in every month (the second and fourth week of every month), for 1 hour at maximum to discuss 1 topic</i>
Hari Rapat <i>Meeting Days</i>	Diutamakan, Senin <i>Monday (prioritised)</i>
Dipimpin <i>Chaired by</i>	Direktur Utama/Direksi Pelindo III <i>President Director/BOD of Pelindo III</i>
Peserta <i>Participants</i>	Direksi, Senior Vice President terkait, General Manager terkait, serta Direksi Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dan Dana Pensiun terkait. <i>The BOD, related Senior Vice Presidents, related General Managers, as well as related BOD of Subsidiaries/Second-Tier Subsidiaries/Affiliations and Pension Funds.</i>
Tempat <i>Location</i>	Kantor Pusat Pelindo III <i>Head Office of Pelindo III</i>
Media	Pertemuan langsung dan/atau Tele/Video Conference <i>Direct meeting and/or Tele/Video Conference</i>
Notulis <i>Minute-Taker</i>	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>

MEKANISME PUBLIKASI RAPAT DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*), mekanisme publikasi rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 hari sebelum rapat diadakan.
2. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
3. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda-agenda bagi rapat yang akan dilaksanakan.
4. Panggilan rapat Direksi tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
5. Pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan sewaktu-waktu dibuat oleh pihak yang meminta diadakannya rapat dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dan ditujukan kepada semua anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.

MEKANISME RAPAT DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*), mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Rapat diawali dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya.
2. Semua keputusan dalam rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional, dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan, serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Direksi.
3. Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
4. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 suara dan ditambah 1 suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju atau tidak setuju sama, maka Pimpinan Rapat yang menentukannya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.
6. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Direksi.

PUBLICATION MECHANISM OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of Corporate Governance Guide (*Board Manual* and *Code of Corporate Governance*), the publication mechanism of BOD meetings are as follows:

1. *Summons for the BOD meeting shall be conducted in writing to the members of the BOD entitled to represent the Company, and shall be delivered in on later than five days before the meeting is held.*
2. *The summons for the BOD meetings shall include the agenda, date, time and location of the meeting.*
3. *Each member of the BOD shall have the right to propose agendas for the meetings to be held.*
4. *Summons for the BOD meetings shall not be required if all members of the BOD are present at the meeting.*
5. *The summons for the BOD meetings conducted at any time is made by a party requesting the meetings within a period of no later than three working days before the meetings are held, and is addressed to all members of the BOD and the Corporate Secretary by stating the date, time, place, and agenda of the meeting.*

MECHANISM OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Based on the Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of Corporate Governance Guide (*Board Manual* and *Code of Corporate Governance*), the decision-making mechanism in BOD meetings are as follows:

1. *The meeting begins with an evaluation of the implementation of the previous meeting.*
2. *All decisions made in the BOD meetings shall be in good faith and rational considerations and shall have been thoroughly investigated on relevant matters, sufficient information and free from conflict of interest, and are independently made by each member of the BOD.*
3. *The decision made in the BOD meetings shall be determined by consensus. If no agreement is reached, the decision shall be determined by majority vote.*
4. *Each member of the BOC is entitled to cast one vote plus one vote of the represented Director.*
5. *If decisions based on deliberations for consensus are not reached, they shall be made by majority vote. If the number of approving votes and disapproving votes is the same, the Chairman shall determine the decisions with due regard to the provisions on accountability.*
6. *A blank vote shall be considered to agree with the proposal submitted in the BOD meeting.*

7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 8. Keputusan hasil rapat yang diambil diterima sebagai keputusan bersama (kolegial).
 9. Jika terdapat anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.
 10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai hasil keputusan yang dimaksud dan seluruh anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.
7. *Invalid votes shall be considered absent and shall not be counted in determining the total votes cast in the meeting.*
 8. *Meeting decisions that are made are regarded as a collegial decision.*
 9. *If any member of the BOD has a different opinion on the decision made, such opinion shall be included in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion.*
 10. *The BOD may also take a valid and binding decision without holding a BOD Meeting, provided that all members of the BOD have been notified in writing of the concerned decision and that all members of the BOD give their approval for the proposal in writing and sign the agreement. Decisions made in such manner shall have the same power as the decisions made legally in the BOD meeting.*

RISALAH RAPAT DIREKSI DI 2019

MINUTES OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
1.	2 Januari 2 January	Rahasia Confidential	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Iman Rachman 6. Toto Nugroho
2.	3 Januari 3 January	Rahasia Confidential	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Iman Rachman
3.	22 Januari 22 January	1. Persiapan rapat bulanan Dewan Komisaris dan Direksi Bulan Januari 2019 2. Agenda lain-lain 1. Preparation for the BOC-BOD monthly meeting in January 2019 2. Other agenda	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Iman Rachman 6. Toto Nugroho
4.	26 Januari 26 January	1. Rencana Pengoperasian Pelabuhan Cigading milik PT Krakatau Bandar Samudra (PT KBS) 2. Agenda lain-lain 1. The Plan to Operate Port of Cigading owned by PT Krakatau Bandar Samudra (PT KBS) 2. Other agenda	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Iman Rachman 6. Toto Nugroho

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
5.	5 Maret 5 March	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Audit 2019 oleh KAP Paparan Pengembangan Bisnis BMS dan BKMS Progres Penyelesaian Masalah FRU Bena Laporan Hasil Kajian Konsultan tentang PT Portek Update Pengakhiran TPS Marketing Officer Programme Progres kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan PGN Timeline untuk Bena Home Port dan KSP Progres Rencana Holding KPI Regional dan Terminal Penggunaan Tanah HPL Pelabuhan - PT Perinus <ol style="list-style-type: none"> <i>The 2019 Audit Results by KAP</i> <i>The description of BMS and BKMS Business Development</i> <i>Progress on FRU Bena Problem Resolution</i> <i>The Report on Consultant Review on PT Portek</i> <i>Update on TPS Ending</i> <i>Marketing Officer Programme</i> <i>Cooperation progress with PT Pertamina (Persero) and PGN</i> <i>Timeline for Bena Home Port and KSP</i> <i>Progress on Holding Plan</i> <i>Regional and Terminal KPI</i> <i>The utilisation of Port HPL Land – PT Perinus</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Iman Rachman Toto Nugroho
6.	6 Mei 6 May	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi struktur organisasi Bonus dan THR Diskon Tarif Diferensiasi TPKS kepada PT SSL Laporan hasil evaluasi BPKP atas PLTMG PT LEGI Joint Procurement seluruh Pelindo III Group Agenda Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> <i>Evaluation of the organisational structure</i> <i>Bonus and Holiday Allowance</i> <i>TPKS Differentiation Tariff Discount to PT SSL</i> <i>Report on BPKP evaluation on PLTMG in PT LEGI</i> <i>Joint Procurement of all Pelindo III Group</i> <i>Other agenda</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Heliyanto Iman Rachman Toto Nugroho
7.	27 Mei 27 May	<ol style="list-style-type: none"> Presentasi Konsultan Individu tentang Standarisasi Renumerasi Direksi Anak Usaha Pelindo III Group Presentasi dari SKHA Consulting tentang Kajian Penyusunan Struktur Korporasi Pelindo III Group Tindak lanjut Penyelesaian PT Portek Rencana Kerja Sama dengan Khrisna Group dan Kerja Sama dengan PGN LNG dari Sisi Komersial (Pembentukan JV dan Tarip) <ol style="list-style-type: none"> <i>Individual Consultant Presentation on the Standardisation for Remuneration of all BOD of Pelindo III Group Subsidiaries</i> <i>Presentation from SKHA Consulting on the Review for Corporation Structure Composition in Pelindo III Group</i> <i>Follow-up on PT Portek Resolution</i> <i>Cooperation Plan with Khrisna Group and Cooperation with PGN LNG in Commercial (Establishment of JV and Tarip)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Heliyanto Iman Rachman Toto Nugroho
8.	1 Juli 1 July	Rahasia Confidential	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Heliyanto Iman Rachman Toto Nugroho

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA	KEHADIRAN ATTENDANCE
9.	1 Agustus 1 August	Rahasia Confidential	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Nugroho
10.	19 Agustus 19 August	Rahasia Confidential	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto (Plt. A5) 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Toto Nugroho
11.	23 September 23 September	Rahasia Confidential	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto (Plt. A5) 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Toto Nugroho
12.	9 Oktober 9 October	1. Progres Investasi tahun 2019 2. Update Progres Kesiapan Go Live PT BMST sebagai O&M Company Subholding Peti Kemas 3. Progres lelang PT NLI di TTL 4. Keputusan BANI terkait Isu KLA PJB 5. Pelaksanaan Family Gathering 1. Investment progress in 2019 2. Update on the Go Live Preparation of PT BMST as an O&M Container Company Subholding 3. PT NLI tender progress in TTL 4. BANI decision related to KLA PJB issue 5. Family Gathering implementation	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto (Plt. A5) 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Toto Nugroho
13.	6 November 6 November	Rahasia Confidential	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Toto Heliyanto 4. Irvandi Gustari 5. Toto Nugroho
14.	11 November 11 November	Agenda Persiapan Pelaksanaan Pelindo III Outlook 2020 Agenda to Prepare the Implementation of 2020 Pelindo III Outlook	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Irvandi Gustari 6. Toto Nugroho
15.	29 November 29 November	Koordinasi Persiapan Raker Pelindo III Coordination to Prepare for Pelindo III Work Meeting	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Irvandi Gustari
16.	4 Desember 4 December	Rahasia Confidential	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Irvandi Gustari 6. Toto Nugroho
17.	11 Desember 11 December	Rahasia Confidential	1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Toto Heliyanto 4. Irvandi Gustari 5. Toto Nugroho

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Mengacu pada RJPP dan RKAP tahun 2019 serta memperhatikan dinamika yang terjadi secara makro maupun khusus di sektor jasa kepelabuhan, Direksi telah merancang fokus pengelolaan usaha Perusahaan yang terdiri dari:

REPORT ON BOARD OF DIRECTORS DUTIES

Referring to the 2019 RJPP and RKAP, and by taking into account the dynamics in macroeconomic condition and specific matters of the port services, the BOD has designed the following focus business management of the Company:

FOKUS PENGELOLAAN BISNIS BUSINESS MANAGEMENT FOCUS

ASPEK ASPECT	FOKUS PENGELOLAAN MANAGEMENT FOCUS
Aspek Keuangan <i>Financial Aspect</i>	Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan keuangan Perusahaan, meliputi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, utang piutang, aset Perusahaan, dan pembinaan Anak Perusahaan. <i>Duties and responsibilities of the Finance Director are to guide the Company's financial activities, covering management and financial accounting, accounts payable, Company assets, and Subsidiaries guidance.</i>
Aspek Operasi dan Komersial <i>Operation and Commercial Aspect</i>	Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi dan Komersial adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pelayanan jasa kapal, barang, terminal, <i>miscellaneous service</i> , manajemen risiko dan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, ISPS Code, peningkatan dan kerja sama usaha, serta manajemen properti. <i>Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pelayanan jasa kapal, barang, terminal, miscellaneous service, manajemen risiko dan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, ISPS Code, peningkatan dan kerja sama usaha, serta manajemen properti.</i>
Aspek SDM <i>Human Capital Aspect</i>	Tugas dan tanggung jawab Direktur SDM adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, proses pengadaan barang dan jasa, bidang umum dan rumah tangga, serta pengelolaan Kantor Pusat. <i>Duties and responsibilities of the Human Capital Director are to guide Human Capital planning and development, staffing and organisation system, welfare, employee administration, employee performance assessment, goods and services procurement, general affairs and householding, as well as Head Office management.</i>
Aspek Teknik <i>Engineering Aspect</i>	Tugas dan tanggung jawab Direktur Teknik adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kolam pelabuhan, investasi, studi kelayakan, bangunan pelabuhan, bangunan sipil, aplikasi perangkat lunak, perangkat keras, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. <i>Duties and responsibilities of the Engineering Director are to guide provision and maintenance of port facilities and pools, investments, feasibility studies, port buildings, civil buildings, software, hardware, and development of information and communication technology.</i>
Aspek Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Aspect</i>	Tugas dan tanggung jawab Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis adalah melakukan pengawasan dan pembinaan atas potensi pengembangan bisnis Perusahaan serta memantau dan evaluasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Selain itu, juga melakukan pembinaan atas manajemen perubahan Perusahaan. <i>Duties and responsibilities of the Business Transformation and Development are to monitor and guide the potential of the Company's business development as well as monitoring and evaluating the cooperations of the Company. It also includes guiding the Company's transformation management.</i>

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI 2019 REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS DUTIES IN 2019

URAIAN TUGAS DESCRIPTION OF DUTIES	REALISASI REALISATION
TERKAIT DENGAN RUPS RELATED TO GMS	
<p>Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat Pemegang Saham. 2. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, apabila dikeluarkan lebih dari 1 klasifikasi saham. 3. Nama dan alamat dari orang/perseorangan/badan hukum yang mempunyai hak gadai tersebut. 4. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. <p><i>Obligation to organise and keep Shareholder Register and other documents related to GMS according to the laws and regulations. The Shareholder Register contains:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Names and addresses of the Shareholders. 2. Number, serial numbers, and date of acquisition of the share certificate owned by the Shareholders, if the issued shares have more than one classification. 3. Name and address of a person/individual/legal institution having the right of pledge. 4. Particulars on the payment of shares other than in cash. 	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
<p>Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.</p> <p><i>Signing the Annual Report, and if a member of the BOD does not sign the Annual Report, the reason must be stated.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
<p>Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.</p> <p><i>Summoning and convening Annual GMS and/or Extraordinary GMS.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
<p>Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.</p> <p><i>Providing GMS materials to the Shareholders.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
<p>Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS.</p> <p><i>Providing accountability and all information about the condition and execution of the Company in the form of reports on Company activities including Financial Statements in the form of Annual Reports or in the form of other periodic reports in the manner and time specified to the GMS.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
<p>Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.</p> <p><i>Requesting approval from the GMS if changes to the Articles of Association will be made.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
<p>Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.</p> <p><i>Providing Minutes of GMS if requested by the Shareholders.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
TERKAIT STRATEGI DAN RENCANA PERUSAHAAN RELATED TO CORPORATE STRATEGIES AND PLANS	
<p>Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.</p> <p><i>Providing Minutes of GMS if requested by the Shareholders.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
<p>Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS.</p> <p><i>Preparing RJPP and RKAP as well as other plans related to the implementation of the Company's business activities to be submitted to the BOC and Shareholders to obtain approval in the GMS.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>
<p>Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perusahaan.</p> <p><i>Executing business plans effectively in managing the Company.</i></p>	<p>Terpenuhi <i>Fulfilled</i></p>

URAIAN TUGAS
DESCRIPTION OF DUTIESREALISASI
REALISATION

TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RJPP | RELATED TO THE DRAFTING OF RJPP

Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
2. Posisi Perusahaan saat ini; dan
3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.

Terpenuhi
Fulfilled

Preparing RJPP which includes, at the very least:

1. Evaluation of the previous RJPP implementation;
2. The current Company position; and
3. Assumptions used in preparing the RJPP.

Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang.
Determining the Vision, Mission, Targets, Strategies, Policies, and Long-Term Work Programmes.

Terpenuhi
Fulfilled

Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perusahaan dikarenakan terdapat perubahan materiel yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku.
In the event of a change to the Company's internal and external factors due to material changes that are outside of the Company's control, the BOD shall review the possibilities to revise the prevailing RJPP.

Terpenuhi
Fulfilled

Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS.
Should the RJPP needs to be revised, the BOD shall submit the revised RJPP to the BOC to be reviewed and approved so it can be submitted to the GMS.

Terpenuhi
Fulfilled

TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RKAP | RELATED TO THE DRAFTING OF RKAP

Direksi menyusun RKAP yang sekurang- kurangnya memuat:

1. Kinerja Perusahaan tahun berjalan;
2. Rencana kerja Perusahaan;
3. Anggaran Perusahaan;
4. Proyeksi keuangan Perusahaan;
5. Proyeksi keuangan Anak Perusahaan; dan
6. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.

Terpenuhi
Fulfilled

Preparing RKAP which includes, at the very least:

1. Company's performance in the current year.
2. Company's work plan.
3. Company's budget
4. Company's financial projection.
5. Subsidiaries' financial projections.
6. Other matters requiring GMS' resolutions.

Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
The BOD shall submit the RKAP to the BOC to be reviewed and approved before submitting it to the GMS to obtain approval.

Terpenuhi
Fulfilled

TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN | RELATED TO THE PREPARATION OF ANNUAL REPORT

Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud.
Preparing the Annual Report and, together with the BOC, signing the Annual Report of the Company.

Terpenuhi
Fulfilled

Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.
Delivering the Annual Report to the Shareholders.

Terpenuhi
Fulfilled

URAIAN TUGAS
DESCRIPTION OF DUTIES

REALISASI
REALISATION

TERKAIT MANAJEMEN RISIKO | RELATED TO RISK MANAGEMENT

- Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut:
- Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi;
 - Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko;
 - Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan;
 - Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial;
 - Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko; dan
 - Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Terpenuhi
Fulfilled

- Developing a risk management system and implement it consistently through the following stages:*
- Risk Identification, i.e. a process to identify the relevant risks with a potential to occur;*
 - Risk Measurement, i.e. a process to measure the size of impact and probability of the result of risk identification;*
 - Risk Evaluation, i.e. a review process on the availability of the entire risk management activity conducted in the Company;*
 - Risk Handling, i.e. a process to determine the efforts to be conducted to handle potential risks;*
 - Risk Monitoring, i.e. a process to monitor various factors that allegedly lead to the emergence of risks; and*
 - Reporting and Disclosure, i.e. a process to report the risk management system implemented by the Company as well as the disclosure to the related parties based on the prevailing provisions.*

TERKAIT PENGENDALIAN INTERN | RELATED TO INTERNAL CONTROL

- Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan.
Stipulating policies on the effective internal control system to ensure the achievement of the Company's objectives.

Terpenuhi
Fulfilled

- Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Lingkungan pengendalian internal;
 - Penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan;
 - Identifikasi risiko;
 - Penilaian risiko;
 - Mitigasi risiko;
 - Aktivitas pengendalian;
 - Informasi dan komunikasi; dan
 - Monitoring.

Terpenuhi
Fulfilled

- The internal control system shall cover the following matters:*
- Internal control environment.*
 - Determination of company's work plans and targets.*
 - Risk identification.*
 - Risk evaluation.*
 - Risk mitigation.*
 - Controlling activities.*
 - Information and communication.*
 - Monitoring.*

KETERBUKAAN INFORMASI | INFORMATION DISCLOSURE

- Mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
Disclosing important information in the Annual Report and Financial Statements to the related parties according to the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.

Terpenuhi
Fulfilled

URAIAN TUGAS DESCRIPTION OF DUTIES

REALISASI REALISATION

Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.
Taking the initiative to disclose not only the issues required by the laws and regulations but also matters deemed significant for decision making by the stakeholders.

Terpenuhi
Fulfilled

Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi.
Actively disclosing the implementation of GCG principles and material issues faced by the Company.

Terpenuhi
Fulfilled

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN | RELATION WITH THE STAKEHOLDERS

Menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan.
Respecting the rights of stakeholders arising from the prevailing laws and regulations or agreements made between the Company and the stakeholders.

Terpenuhi
Fulfilled

Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial.
Ensuring that the Company carries out social responsibility.

Terpenuhi
Fulfilled

Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
Ensuring that the assets and business locations, as well as other facilities of the Company, have complied with the prevailing laws and regulations on environmental preservation, and occupational health and safety.

Terpenuhi
Fulfilled

Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan.
In employment, the establishment of the amount of salary, provision of training activities, and determination of career path and other work requirements, the BOD and the Company shall not discriminate the employees based on their ethnicity, religion, gender, age, disability, or any other special conditions as in line with the provisions contained in the laws and regulations.

Terpenuhi
Fulfilled

Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.
The BOD shall prepare a work environment that is free from all manners of pressure.

Terpenuhi
Fulfilled

TUGAS DAN KEWAJIBAN LAIN | OTHER DUTIES AND OBLIGATIONS

Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Fulfilling other obligations in line with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on the applicable laws and regulations.

Terpenuhi
Fulfilled

ARAHAN DEWAN KOMISARIS DIRECTIVES FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

ARAHAN DIRECTIVES	TINDAK LANJUT FOLLOW-UP
<p>Direksi hendaknya melakukan langkah mitigasi risiko terkait ketidakpastian nilai tukar Dolar terhadap Rupiah karena terkait dengan Pelindo III yang memiliki pinjaman berupa obligasi dalam bentuk Dolar yang akan segera jatuh tempo.</p> <p><i>The BOD should conduct risk mitigation measures related to the uncertainty in the Dollar exchange rate to Rupiah related to the loan of Pelindo III in a form of bonds in the dollar which will due soon.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Strategi Pelindo III ke depan agar lebih berwawasan global; tidak hanya berpikir skala nasional saja akan tetapi sudah harus memikirkan ekspansi ke luar wilayah Indonesia.</p> <p><i>Future Pelindo III strategy must be on a global scale; not only at the national level but also must consider expansion outside of Indonesia area.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Bila ada kebijakan kenaikan tarif hendaknya dilakukan secara bertahap guna menstabilkan <i>logistic cost</i> dan sudah seharusnya diimbangi dengan kenaikan pelayanan kepada pengguna jasa.</p> <p><i>Tariff increase policy should be done in stages to stabilise logistic costs and should be balanced with service improvement to service users.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Memetakan kembali ancaman dari eksternal yang memungkinkan bisa menjadi pesaing dari Pelindo III dan segera melakukan tindakan mitigasi atas ancaman tersebut.</p> <p><i>Remapping external threats which may become a Pelindo III competitor and promptly conduct mitigation to such risk.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Direksi Pelindo III hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pembelanjaan investasi agar mencegah terjadinya <i>financial distress</i>. Selain itu, investasi yang akan dilakukan oleh Pelindo III hendaknya mengutamakan <i>level of revenue</i> agar dapat meningkatkan profitabilitas dari Perusahaan.</p> <p><i>The BOD of Pelindo III should be more prudent in investment to prevent financial distress. Moreover, the investments to be taken by Pelindo III should prioritise the level of revenue to increase the Company's profitability.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Direksi agar mengupayakan perawatan dari fasilitas dan peralatan sesuai dengan pedoman sehingga dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan produksi, tidak mengganggu kegiatan pelayanan, dan meningkatkan kenyamanan konsumen.</p> <p><i>The BOD shall strive to maintain the facilities and equipment according to the guideline to be utilised optimally for the production process, not hindering with the services, and improve customer's comfort.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Penyaluran dana Bina Lingkungan agar menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di sekitar lingkungan kerja Perusahaan seperti bencana alam yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan sehingga tepat sasaran.</p> <p><i>Distribution of Community Development fund shall adapt with the condition of the Company's work environment, such as natural disasters, in which the implementation is adjusted with the provisions to be on target.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Direksi agar melakukan penataan aset serta mengupayakan agar pemanfaatannya memberikan kontribusi yang optimal bagi Perusahaan.</p> <p><i>The BOD shall conduct asset structuring and encourage that the utilisation provides an optimal contribution to the Company.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Direksi agar segera menyampaikan Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP kepada Pemegang Saham sesuai batas waktu yang ditentukan.</p> <p><i>The BOD should submit the audited Financial Statement for the 2018 fiscal year by KAP to the Shareholders soon according to the set time limit.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
<p>Direksi agar mengevaluasi pelaksanaan NATARU 2018 dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada penumpang untuk kegiatankegiatan di masa yang akan datang.</p> <p><i>The BOD should evaluate the 2018 NATARU implementation and improve on the things that are lacking to improve customer service in the upcoming activities.</i></p>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

ARAHAN DIRECTIVES

TINDAK LANJUT FOLLOW-UP

Terkait dengan rencana pemutusan kontrak kerja sama dengan DP World di TPS, Direksi sebaiknya mengkaji langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi Perusahaan di kemudian hari.
Related to the plan to terminate the cooperation contract with DP World in TPS, the BOD should review the measures to be taken according to the prevailing contract and provisions comprehensively to prevent any arising problem and loss for the Company in the future.

Terpenuhi
Fulfilled

Terkait rencana penataan Pelabuhan Benoa dan Boom Banyuwangi, Direksi sebaiknya menyusun kajian kelayakan (*feasibility study*) sebagai penyempurnaan untuk rencana pengembangan Marina Boom Banyuwangi, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Celukan Bawang, dan Pelabuhan Gili Mas Lombok ke depan.
Related to the plan to the arrangement of Port of Benoa and Boom Banyuwangi, the BOD shall formulate a feasibility study as an improvement for the future development plan of Marina Boom Banyuwangi, Port of Benoa, Port of Celukan Bawang, and Port of Gili Mas.

Terpenuhi
Fulfilled

Direksi perlu melakukan langkah-langkah inovasi untuk bisa meningkatkan pendapatan selain dari bisnis kepelabuhanan seperti membangun *port/harbor city*.
The BOD should take innovation measures to improve revenue other than from the port business such as constructing a port/harbour city.

Terpenuhi
Fulfilled

Direksi sebaiknya melakukan kajian kemungkinan kerja sama lahan dengan Freeport yang sedang membangun *smelter*.
The BOD should conduct a study on the possibility of land cooperation with Freeport which is currently constructing a smelter.

Terpenuhi
Fulfilled

Direksi agar merencanakan peningkatan *non-port business* untuk meningkatkan pendapatan dari *non-port*. Demikian pula untuk pengelolaan limbah dan pengelolaan energi di pelabuhan.
The BOD shall plan an improvement on non-port businesses to improve non-port revenue, as well as waste and energy management in ports

Terpenuhi
Fulfilled

Direksi diminta untuk memaparkan pencapaian KPI Perusahaan secara keseluruhan dan berikan foto pelaksanaan di bagian bawah.
The BOD is required to describe the Company KPI achievement in its entirety with implementation photos attached below.

Terpenuhi
Fulfilled

INFORMASI RANGKAP JABATAN DIREKSI

Informasi terkait rangkap jabatan Direksi telah disajikan di bagian profil Direksi.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Hingga 31 Desember 2019, saham Pelindo III dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Untuk itu dapat diinformasikan bahwa Direksi Perusahaan tidak memiliki saham di Perusahaan dan pembahasannya telah dijabarkan dalam informasi Struktur dan Komposisi Pemegang Saham dalam bagian profil Perusahaan.

INFORMATION ON BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITION

Information related to the concurrent position of the BOD has been presented in the Profile of the Board of Directors' sub-chapter.

SHARE OWNERSHIP OF BOARD OF DIRECTORS

Up to 31 December 2019, the Company's shares are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE. Hence, it is informed that the BOD has no shares in the Company. Discussion regarding such matter has been presented in the information on Structure and Composition Shareholder in the Company Profile chapter.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

AGENDA DAN PUBLIKASI RENCANA RAPAT GABUNGAN

Secara umum agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang:

1. Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan.
2. Pembahasan dan Perumusan RKAP.
3. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Pembahasan perkembangan kinerja operasional.
5. Pembahasan dan *review* RJPP.
6. Pembahasan terkait penetapan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit Laporan Tahunan.
7. Pembahasan terkait kinerja dan rencana pengembangan Anak Perusahaan.

PUBLIKASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Komite-Komite Perusahaan dilakukan selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan dengan bentuk surat menyurat. Dalam publikasi tersebut termuat mengenai informasi dan materi rapat yang terdiri dari:

- Tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- Agenda rapat;
- Nama peserta; dan
- Undangan rapat.

Guna membentuk perencanaan yang disiplin, di awal tahun 2019 Perusahaan telah menyusun rencana awal pelaksanaan rapat gabungan tersebut yang tertuang dalam Jadwal Tahunan Perusahaan. Informasi rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti Internal Audit dan Departemen-departemen yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

AGENDA AND PUBLICATION OF PLAN TO HOLD JOINT MEETINGS

In general, the agenda of the joint meeting of the BOC and BOD discuss the followings:

1. *Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Performance Report.*
2. *RKAP Formulation and Discussion.*
3. *Coordinating Meeting of the BOC and BOD.*
4. *Discussion on operational performance development.*
5. *RJPP review and discussion.*
6. *Discussion on the appointment of Public Accounting Firm to audit annual financial statements.*
7. *Discussion on performance and development plan of Subsidiaries.*

PUBLICATION OF JOINT MEETINGS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Publication on the plan to hold joint meetings of the BOC and BOD with the Committees of the Company is conducted within no later than five days before the date of the meeting through correspondence. The publication shall contain agenda and information of the meeting, consisting of:

- *Date and time of the meeting;*
- *Meeting agenda;*
- *Participants; and*
- *Meeting Invitation*

To establish a disciplined plan, at the beginning of 2019 the Company had drawn up a preliminary plan for the joint meetings which was contained in the Company's Annual Schedule (calendar event). Information on the meeting plan was also widely distributed to related parties such as Corporate Secretary and other organs such as Internal Audit and other departments. In the event of incidental meeting proposals, the publication can be done as effectively and efficiently as possible while still adhering to the applicable documenting procedures (drafting minutes of the meeting).

FREKUENSI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN

ATTENDANCE FREQUENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN JOINT MEETINGS

Sepanjang 2019, Perusahaan telah mengadakan 12 kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

In 2019, the Company held twelve joint meetings with attendance rate described below:

FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT GABUNGAN ATTENDANCE FREQUENCY IN JOINT MEETINGS

NAMA NAME	JABATAN POSITION	RAPAT GABUNGAN JOINT MEETING		
		JUMLAH RAPAT TOTAL MEETINGS	KEHADIRAN ATTENDANCE	%
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS				
Hari Bowo ¹	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	4	4	100%
Ahmad Bambang ¹		12	12	100%
Zainal Abidin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	12	8	67%
Wahju Satrio U.	Komisaris <i>Commissioner</i>	12	10	83%
Heddy Lugito	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	12	11	92%
Dedi Syarif Usman	Komisaris <i>Commissioner</i>	5	5	100%
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS				
Doso Agung	Direktur Utama <i>President Director</i>	12	11	92%
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial <i>Operation and Commercial Director</i>	12	11	92%
Joko Noerhudha	Direktur Teknik <i>Engineering Director</i>	12	11	92%
Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum <i>Human Capital and General Affairs Director</i>	12	10	83%
Iman Rachman ²	Direktur Keuangan <i>Finance Director</i>	3	3	100%
Irvandi Gustari ²		12	12	100%
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Director</i>	6	6	100%

Keterangan:

- Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo berdasarkan Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019.
- Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019 menggantikan Iman Rachman berdasarkan Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019.

Information:

- Ahmad Bambang has been serving as the President Commissioner since 13 September 2019 to succeed Hari Bowo based on the Decree No. SK-206/MBU/09/2019.
- Irvandi Gustari has been serving as the Financial Director since 16 October 2019 to succeed Iman Rachman based on the Decree No. SK-219/MBU/10/2019.

RISALAH RAPAT GABUNGAN

MINUTES OF JOINT MEETINGS

Berikut adalah risalah dan daftar Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat gabungan yang dilaksanakan sepanjang Tahun Buku 2019:

The following table details the minutes of joint meeting of the BOC and BOD held during the 2019 Fiscal Year:

RISALAH RAPAT GABUNGAN 2019 MINUTES OF 2019 JOINT MEETINGS

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR ATTENDING BOC	DIREKSI YANG HADIR ATTENDING BOD
1.	23 Januari 23 January	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan Capaian Investasi <i>Unaudited</i> 2018. 2. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2018 terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal; b. Temuan-temuan signifikan dari KAP; c. Temuan IT General Control Audit; dan d. Langkah-langkah Direksi untuk menyelesaikan Temuan Audit; 3. Pemaparan Rencana Kerja Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis. 4. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Desember 2018. 5. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan NATARU 2018; dan b. Penjelasan tentang Inisiasi Rencana Direksi pada Paparan RUPS RKAP 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hari Bowo 2. Zainal Abidin 3. Heddy Lugito 4. Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putut Sri Muljanto 2. Joko Noerhudha 3. Toto Heliyanto 4. Iman Rachman 5. Toto Nugroho
		<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Management Performance Report and the 2018 Unaudited Investment Achievement.</i> 2. <i>Audit Progress on the 2018 Financial Statement related to:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Evaluation of Internal Control System;</i> b. <i>Significant findings from KAP;</i> c. <i>Findings from the IT General Control Audit;</i> and d. <i>BOD measures to resolve Audit Findings.</i> 3. <i>Description of the Business Transformation and Development Directorate Work Plan.</i> 4. <i>The follow-up to the BOC-BOD Meeting in December 2018.</i> 5. <i>Others:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The 2018 NATARU Implementation Report;</i> and b. <i>The description of the BOD plan initiation described during the 2019 RKAP GMS.</i> 		

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR ATTENDING BOC	DIREKSI YANG HADIR ATTENDING BOD
2.	14 Februari 14 February	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen dan Capaian Investasi bulan Januari 2019. Persiapan RUPS Tahunan. Progres Pengakhiran Kerja Sama dengan DP World di TPS. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> Progres Investasi Boom Marina Banyuwangi; Rencana Pembubaran PT Lamin Aspalindo Tiga; dan Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Januari 2019. <p>1. Management Performance Report and January 2019 Investment Achievement.</p> <p>2. Preparation for the Annual GMS.</p> <p>3. The Process for Cooperation Termination with DP World in TPS.</p> <p>4. Others:</p> <ol style="list-style-type: none"> Investment Progress in Boom Marina Banyuwangi; Plan for Dissolution of PT Lamin Aspaslindo Tiga; and Follow up to the BOC-BOD Meeting in January 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> Hari Bowo Zainal Abidin Heddy Lugito Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Heliyanto Iman Rachman Toto Nugroho
3.	28 Maret 28 March	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen dan Capaian Investasi sampai dengan bulan Februari 2019. Progres Audit Laporan Keuangan Tahun 2018. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Februari 2019. Lain-lain. <p>1. Management Performance Report and Investment Achievement up to February 2019.</p> <p>2. Audit Progress on the 2018 Financial Statement.</p> <p>3. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in February 2019.</p> <p>4. Others.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hari Bowo Wahju Satrio U. Zainal Abidin Heddy Lugito Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Heliyanto Iman Rachman Toto Nugroho
4.	29 April 29 April	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan RUPS. Laporan Kinerja Manajemen dan Capaian Investasi Triwulan I 2019. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Maret 2019. Lain-lain. <p>1. GMS Preparation.</p> <p>2. Management Performance Report and investment achievement in the Third Quarter of 2019.</p> <p>3. The follow-up to the BOC-BOD Meeting in March 2019.</p> <p>4. Others.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hari Bowo Zainal Abidin Heddy Lugito Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Heliyanto Iman Rachman Toto Nugroho

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR ATTENDING BOC	DIREKSI YANG HADIR ATTENDING BOD
5.	28 Mei 28 May	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan investasi, dan PKBL sampai April 2019. Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan yang masih belum mencapai target. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Lain-lain. <p>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to April 2019.</p> <p>2. Discussion on Subsidiary Performances that have not reached their target.</p> <p>3. The follow-up to Report of BPK Checking Results.</p> <p>4. Others.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hari Bowo Wahju Satrio U. Zainal Abidin Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Heliyanto Iman Rachman Toto Nugroho
6.	26 Juni 26 June	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen, penyerapan investasi, dan PKBL sampai Mei 2019. Rencana tindak lanjut penataan Pelabuhan Benoa dan Boom Banyuwangi. Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Lain-lain. <p>1. Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to May 2019.</p> <p>2. The plan to follow up the management of Port of Benoa and Boom Banyuwangi.</p> <p>3. The follow-up progress to the Report of BPK Checking Results.</p> <p>4. Others.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wahju Satrio U. Zainal Abidin Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Heliyanto Iman Rachman Toto Nugroho
7.	31 Juli 31 July	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen Semester I Tahun 2019. Progres Tindak Lanjut Arahan RUPS sebagaimana tersebut dalam Surat Menteri BUMN No. S-574/MBU/D2/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 pada butir 3.a. sampai dengan butir 3.i. Lain-lain. <p>1. Management Performance Report for the First Semester of 2019.</p> <p>2. Progress on the Follow-Up to the GMS Directive as stated in Letter of the Minister of SOE No. S-574/MBU/D2/06/2019 dated 18 June 2019 from item 3.a. to 3.i.</p> <p>3. Others.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wahju Satrio U. Zainal Abidin Heddy Lugito Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Putut Sri Muljanto Joko Noerhudha Toto Nugroho

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR ATTENDING BOC	DIREKSI YANG HADIR ATTENDING BOD
8.	26 Agustus 26 August	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, Penyerapan Investasi, dan PKBL sampai Juli 2019 (termasuk <i>Rolling Forecast</i> Kas, R/L Inves). 2. Pemaparan Rencana <i>Bundling 4</i> Pelabuhan sesuai hasil kajian Konsultan dalam rangka menunjang program Pemerintah untuk meningkatkan pariwisata nasional. 3. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penghapusbukuan Aset yang tidak direkomendasikan; b. Penyampaian Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Anak Perusahaan; c. Tindak lanjut rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan Juli 2019; dan d. Penghentian Reklamasi di Benoa Bali. <p>1. <i>Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to July 2019 (including cash Rolling Forecast, Invest R/L).</i></p> <p>2. <i>Explanation on 4 Port Bundling Plan according to the Consultant's review in supporting the Government programme to improve the national tourism.</i></p> <p>3. <i>Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Removal of non-recommended assets from book-writing;</i> b. <i>Submission of BOC Work Visit to Subsidiaries;</i> c. <i>The follow-up to the BOC-BOD Meeting in July 2019; and</i> d. <i>Cessation of Reclamation in Benoa, Bali.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahyu Satrio U. 2. Zainal Abidin 3. Heddy Lugito 4. Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Toto Nugroho
9.	27 September 27 September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, Penyerapan Investasi dan PKBL sampai Agustus 2019 (termasuk <i>Rolling Forecast</i> Kas, R/L, Investasi). 2. Usulan Revisi Investasi Tahun 2019. 3. Progres Pengembangan Pelabuhan Benoa. 4. Progres Pembentukan <i> Holding </i> Maritim dan <i> Sub-Holding </i> Peti Kemas. 5. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pelaksanaan Kerja Sama di JIPE; dan b. Rencana Pembentukan Komite Investasi dan Remunerasi Dewan Komisaris. <p>1. <i>Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to August 2019 (including cash Rolling Forecast, Invest R/L).</i></p> <p>2. <i>Proposal to Revise the 2019 Investment.</i></p> <p>3. <i>Development progress on Port of Benoa.</i></p> <p>4. <i>Progress on Establishment of Marine Holding and Container Sub-Holding.</i></p> <p>5. <i>Others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Report on Cooperation Implementation in JIPE; and</i> b. <i>Plan to Establish the Investment and Remuneration Committee under the BOC.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Bambang 2. Wahyu Satrio U. 3. Zainal Abidin 4. Heddy Lugito 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Toto Nugroho

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR ATTENDING BOC	DIREKSI YANG HADIR ATTENDING BOD
10.	28 Oktober 28 Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen, Penyerapan Investasi dan PKBL sampai September 2019 (termasuk <i>Rolling Forecast</i> Kas, R/L, Investasi). 2. Usulan RKAP Tahun 2020 dan RJPP 2020 s.d. 2024. 3. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi September 2019. 4. Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan atas Progres <i>Fly Over</i> di Teluk Lamong; b. Penjelasan atas Biaya Pengangkatan Kapal Wihan; c. Permasalahan Piutang dengan PT PLN dan PT Petrokimia Gresik; d. Proses Tuntutan Pihak Lain atas B/M di Maumere; e. Penjelasan Permasalahan/Pengembangan Benoa; f. <i>Talent Pool</i> Perusahaan; dan g. Pengaduan Fasilitas Kesehatan Pensiunan Pelindo (IKAPEN). <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Management Performance Report, investment absorption, and PKBL up to September 2019 (including cash Rolling Forecast, Invest R/L).</i> 2. <i>Proposal for 2020 RKAP and RJPP from 2020 to 2024.</i> 3. <i>The follow-up to the BOC-BOD Meeting in September 2019.</i> 4. <i>Others:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Explanation on the Flyover Progress in Teluk Lamong;</i> b. <i>Explanation on the Wihan Ship Lifting Fee;</i> c. <i>Receivables Problem with PT PLN and PT Petrokimia Gresik;</i> d. <i>Claim Process from Other Party for Loading/ Unloading in Maumere;</i> e. <i>Explanation of the Problem/Development of Benoa;</i> f. <i>The Company's Talent Pool; and</i> g. <i>Complaint on Pelindo Retired Health Facility (IKAPEN).</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Bambang 2. Wahyu Satrio U. 3. Zainal Abidin 4. Heddy Lugito 5. Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Irvandi Gustari 6. Toto Nugroho
11.	27 November 27 November	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan PKBL sampai Oktober 2019 (termasuk <i>Rolling Forecast</i> Kas, Laba/Rugi). 2. Realisasi dan Prognosis Investasi Tahun 2019. 3. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi Oktober 2019. 4. Kebijakan Mutu dan Pelayanan. 5. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Management Performance Report and PKBL up to October 2019 (including cash Rolling Forecast, Profit/Loss)</i> 2. <i>The 2019 Investment Realisation and Prognosis.</i> 3. <i>The follow-up to the BOC-BOD Meeting in October 2019.</i> 4. <i>Quality and Service Policy.</i> 5. <i>Others.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Bambang 2. Zainal Abidin 3. Heddy Lugito 4. Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doso Agung 2. Putut Sri Muljanto 3. Joko Noerhudha 4. Toto Heliyanto 5. Irvandi Gustari 6. Toto Nugroho

NO.	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS YANG HADIR ATTENDING BOC	DIREKSI YANG HADIR ATTENDING BOD
12.	26 Desember 26 December	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Manajemen sampai akhir November 2019 dan perkiraan sampai akhir Desember 2019. Progres Realisasi dan Anggaran Investasi sampai akhir November 2019 dan <i>rolling forecast</i> s.d. Desember 2019. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi bulan November 2019. Laporan Evaluasi Kinerja masing-masing Terminal dan Anak Perusahaan Tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Laporan Progres Audit KAP Tahun 2019. Laporan Angkutan NATARU 2019/2020. Lain-lain. <ol style="list-style-type: none"> <i>Discussion on Management Performance Report up to the end of November 2019 and estimate up to the end of December 2019.</i> <i>Discussion on the Progress of Investment Realisation and Budget up to the end of November 2019 and rolling forecast up to December 2019.</i> <i>The follow-up to the BOC-BOD Meeting in November 2019.</i> <i>Performance Evaluation Report of each Terminal and Subsidiary in 2019 and the prior year.</i> <i>KAP Audit Progress for 2019.</i> <i>NATARU Transportation Report for 2019/2020.</i> <i>Others.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Bambang Wahju Satrio U. Zainal Abidin Heddy Lugito Dedi Syarif Usman 	<ol style="list-style-type: none"> Doso Agung Joko Noerhudha Toto Heliyanto Irvandi Gustari Toto Nugroho

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT GABUNGAN

Rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi beserta jajarannya dalam kegiatan Rapat Gabungan antara lain:

- Memberikan arahan terkait rumusan RKAP.
- Memberikan arahan terkait perkembangan Temuan BPK, Audit oleh KAP dan SAP, serta Kajian Risiko Investasi 2019.
- Memberikan arahan terkait persiapan RUPS Laporan Tahunan tahun buku 2018.
- Usulan mengenai Calon Auditor KAP tahun buku 2020.
- Menindaklanjuti *Memorandum of Collaboration (MoC)* dan perjanjian dengan 16 BUMN dan Swasta.
- Pembahasan pemutusan hubungan kerja sama TPS dengan DP World.

RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETING

Recommendations proposed by the BOC to the BOD in Joint Meetings are related to, among others:

- Directive on RKAP formulation.*
- Directive on the development of BPK Findings, Audit by KAP and SAP, and Investment Risk Review of 2019.*
- Directive on the preparation of GMS for Annual Report for the 2018 fiscal year.*
- Proposal for Auditor Candidates from KAP for the 2020 fiscal year.*
- The follow-up to the Memorandum of Collaboration (MoC) and agreement with 16 SOEs and Private Sectors.*
- Discussion on TPS cooperation termination with DP World.*

ASESMEN TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ASSESSMENT ON THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMEN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan hasil asesmen atas pengawasan dan penasihatian serta pengurusan pengelolaan Perusahaan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian terhadap anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala berdasarkan target pencapaian dan KPI yang sudah disepakati bersama di awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN ASESMEN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris berpegang pada aturan Anggaran Dasar, Kementerian BUMN, serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris atas penerapan GCG tahun 2019 dilakukan oleh BPKP dan bersifat kolegial yang dituangkan dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER 01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN, pada saat RUPS RKAP tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan KPI Dewan Komisaris Pelindo III dalam bentuk kontrak manajemen kepada Menteri BUMN.

Dalam menjalankan tugas operasionalnya, Direksi mengacu pada Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, peraturan yang diterbitkan Pemegang Saham, serta komitmennya terhadap KPI yang tertuang dalam kontrak manajemen. Sesuai kewenangannya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja Direksi, baik secara individual maupun kolegial, serta melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham dan akan menjadi salah satu pertimbangan Pemegang Saham dalam keputusan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan PKBL Pelindo III tahun 2019.

PROCEDURE FOR PERFORMANCE ASSESSMENT ON THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The BOC and BOD are responsible for the assessment results on their supervisory and advisory duties as well as management of the Company in the GMS in accordance with the prevailing laws and regulations. Assessment on the performance of members of the BOD is periodically conducted by the BOC based on the achievement targets KPI jointly determined at the beginning of the year according to the duties and responsibilities of each BOD member.

CRITERIA USED IN ASSESSING THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In performing its duties, the BOC adheres to the Articles of Association, the Ministry of SOEs, and Guidelines for Good Corporate Governance. The BOC's performance assessment of GCG implementation in 2019 shall be conducted by BPKP and is collegial in nature as set forth in the BOC' Supervisory Task Report. Task implementation has been planned at the beginning of each year in a Work Programme listed in RKAP. At the end of the year, the BOC shall prepare a Supervisory Task Report to be submitted to the Shareholders at the GMS to be evaluated and ratified. In accordance with the provisions in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the implementation of GCG in SOEs, at the 2019 RKAP GMS the BOC has submitted the proposed KPI of the BOC of Pelindo III in the form of a management contract to the Minister of SOE.

In performing its operational duties, the BOD shall refer to the Articles of Association, the Governance Manual, the rules issued by the Shareholders, and their commitment to the KPI as stipulated in the management contract. In accordance with its authority, the BOC oversees and evaluates the performance of the BOD, individually or collegially, and reports the results to the Shareholders and will become one of the Shareholders' considerations in the GMS resolution on validating the 2019 Annual Financial Statement and PKBL of Pelindo III.

Penilaian kinerja Direksi tahun 2019 berdasarkan kriteria, capaian target, dan indikator kinerja utama (KPI) yang telah diaudit oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young). Secara umum, hasil asesmen GCG menunjukkan bahwa kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sudah "Sangat Baik". Hal ini tercermin dari hasil asesmen GCG Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018 masing-masing sebesar 90,85% dan 92,53%.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup 10 indikator, yang terdiri dari:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan, terdiri dari 6 Indikator;
2. Aspek Laporan, terdiri dari 1 indikator; dan
3. Aspek Dinamis, terdiri dari 3 indikator.

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup 13 indikator, yang terdiri dari:

1. Aspek Keuangan, terdiri dari 8 indikator;
2. Aspek Operasional, terdiri dari 4 indikator; dan
3. Aspek Administrasi, terdiri dari 4 indikator.

The assessment of the BOD's performance in 2019 is based on the criteria, performance targets, and KPI audited by an Independent Auditor from Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young) Public Accounting Firm. In general, the GCG assessment results show that the performance of the BOC and BOD has been "Excellent". This is reflected in the results of GCG assessment of the BOC and BOD in 2018 amounting to 90.85% and 92.53%, respectively

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The performance assessment criteria for the BOC covers 10 indicators, consisting of:

1. *Supervision and Directive Aspects, consisting of six Indicators;*
2. *Report Aspect, consisting of one indicator; and*
3. *Dynamic Aspects, consisting of three indicators.*

The performance assessment criteria for the BOD covers 13 indicators, consisting of:

1. *Financial Aspects, consisting of eight indicators;*
2. *Operational Aspects, consisting of four indicators; and*
3. *Administration Aspects, consisting of four indicators.*



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION POLICIES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan dengan peranan yang sangat penting pada roda bisnis Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan memberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang memberikan motivasi kepada Direksi maupun Dewan Komisaris atas kontribusinya terhadap Perusahaan.

The BOD and BOC are two organs that have a crucial role in the Company's business. Therefore, the Company strives to provide decent appreciation in the form of income to motivate the BOD and BOC for their contribution to the Company.

DASAR KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Hal ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 *juncto* PER-02/MBU/2016 *juncto* PER-01/MBU/2017 *juncto* PER-06/MBU/2018 *juncto* PER-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

- Faktor skala usaha
- Faktor kompleksitas usaha
- Tingkat inflasi
- Kondisi dan kemampuan Perusahaan

BASIS OF REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

*Approval for the remuneration of the BOC and BOD of the Company is stipulated by the GMS. This is based on the Resolution of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 *juncto* PER-02/MBU/2016 *juncto* PER-01/MBU/2017 *juncto* PER-06/MBU/06/2018 *juncto* PER-01/MBU/05/2019 on Guidelines to Determine the Remuneration of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs.*

The Shareholders determine the adjustment to BOC and BOD remuneration with the following considerations:

- Business scale
- Business complexity
- Inflation rate
- Company's condition and capability

PROSES PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, *jo.* Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, *jo.* Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, *jo.* Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014

PROCESS TO DETERMINE THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*According to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2014 dated 10 March 2014 on Guidelines to Determine the Income of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs, *jo.* Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/06/2017 dated 19 June 2017 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2014 dated 10 March 2014 on Guidelines to Determine the Income of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs, *jo.* Regulation of the Minister of SOE No. PER-06/MBU/06/2018 dated 4 June 2018 on the Third Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2014 on Guidelines to Determine the Income of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs, *jo.* Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 dated 31 May 2019 on the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2014 on Guidelines to*

tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*); bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam melakukan kajian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta kinerja Perusahaan. Namun terdapat pula faktor pengaruh lainnya yaitu KPI, kontrak manajemen, dan tingkat kesehatan perusahaan.

Hasil kajian tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham berdasarkan lampiran dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019. Rumusan untuk menghitung penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Determine the Income of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs stipulated in the Joint Decree of the BOC and BOD No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 in the Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance) the determination of remuneration for the BOD and BOC refers to the resolutions of GMS and shall take into account the result of a review conducted by the Company.

DISCLOSURE OF INDICATORS FOR DIRECTORS' REMUNERATION DETERMINATION

In conducting the review, the Company considers various factors, such as business scale, business complexity, inflation rate, financial condition and capability, and Company's performance. There are also several other influential factors, namely KPI, management contract, and the Company's soundness level.

The review result is submitted to the BOC to be proposed to the Shareholders to determine remuneration according to the attachment of Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 dated 31 May 2019. The formula to calculate the BOC and BOD remuneration is determined by the Shareholders.

STRUKTUR REMUNERASI REMUNERATION STRUCTURE

NO.	JENIS PENGHASILAN REMUNERATION TYPE	BESARAN MAKSIMUM SESUAI KEPUTUSAN RUPS DAN PERATURAN MENTERI BUMN MAXIMUM AMOUNT ACCORDING TO THE RESOLUTION OF GMS AND REGULATION OF THE MINISTER OF SOE	DASAR PENETAPAN BASIS OF DETERMINATION
KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS REMUNERATION COMPONENT OF BOARD OF COMMISSIONERS			
1.	Honorarium <i>Honorarium</i>	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama <i>President Commissioner: 45% of the salary of the President Director</i> <i>Commissioner: 90% of the Honorarium of the President Commissioner</i> 	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019
2.	Tunjangan <i>Allowance</i>		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan <i>Holiday Allowance</i>	1 kali honorarium <i>One honorarium</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019
	Tunjangan Transportasi <i>Transportation Allowance</i>	20% dari honorarium per bulan <i>20% of monthly honorarium</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

NO.	JENIS PENGHASILAN REMUNERATION TYPE	BESARAN MAKSIMUM SESUAI KEPUTUSAN RUPS DAN PERATURAN MENTERI BUMN MAXIMUM AMOUNT ACCORDING TO THE RESOLUTION OF GMS AND REGULATION OF THE MINISTER OF SOE	DASAR PENETAPAN BASIS OF DETERMINATION
	Asuransi Purna Jabatan <i>Post-Employment Insurance</i>	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun. <i>Premium at the expense of the Company amounting to 25% of honorarium in 1 year.</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019
3.	Fasilitas <i>Facilities</i>		
	Fasilitas Kesehatan <i>Health Facility</i>	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (<i>at cost</i>). <i>In the form of health insurance or reimbursement of medical treatment (at cost).</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019
	Fasilitas Bantuan Hukum <i>Legal Aid Facility</i>	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) <i>At cost</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019
KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI REMUNERATION COMPONENT OF BOARD OF DIRECTORS			
1.	Honorarium <i>Honorarium</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama: 100% • Direktur yang membidangi SDM: 90% dari Direktur Utama • Direktur lainnya: 85% dari Direktur Utama <ul style="list-style-type: none"> • <i>President Director: 100%</i> • <i>Human Capital Director: 90% of the President Director</i> • <i>Other Directors: 85% of the President Director</i> 	
2.	Tunjangan <i>Allowance</i>		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan <i>Holiday Allowance</i>	1 kali gaji <i>One honorarium</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019
	Asuransi Purna Jabatan <i>Post-Employment Insurance</i>	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun. <i>Premium at the expense of the Company amounting to 25% of honorarium in 1 year.</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019
	Tunjangan Perumahan <i>Housing Allowance</i>	Rp25.000.000,00 per bulan <i>Rp25,000,000 per month</i>	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019 apabila perusahaan telah menyediakan rumah jabatan maka wajib dipergunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. <i>According to PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019 if the Company has provided an office house, then it shall be used until the term of office ends and the concerned BOD shall not be given housing allowance.</i>

NO.	JENIS PENGHASILAN REMUNERATION TYPE	BESARAN MAKSIMUM SESUAI KEPUTUSAN RUPS DAN PERATURAN MENTERI BUMN MAXIMUM AMOUNT ACCORDING TO THE RESOLUTION OF RGS AND REGULATION OF THE MINISTER OF SOE	DASAR PENETAPAN BASIS OF DETERMINATION
3.	Fasilitas Facilities		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan <i>One unit including maintenance cost and operational cost, taking into account the Company's financial conditions</i>	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc <i>Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc</i>
	Fasilitas Kesehatan Health Facilities	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost). <i>In the form of health insurance or reimbursement of medical treatment (at cost).</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facilities	Sebesar pemakaian (at cost) <i>At cost</i>	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

TOTAL REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

dalam Rupiah | in Rupiah

NO.	JABATAN POSITION	HONORARIUM PER BULAN HONORARIUM PER MONTH	KETERANGAN DESCRIPTION
1.	Direktur Utama President Director	216.000.000	
2.	Direktur Human Capital Director	194.400.000	
3.	Direktur lainnya Other Directors	183.600.000	
4.	Komisaris Utama President Commissioner	97.200.000	
5.	Komisaris Commissioner	87.480.000	Perbandingan gaji Direktur Utama dengan Direktur SDM, Direktur lainnya, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:90%:85%:45%:90% <i>Salary comparison between the President Director with the Human Capital Director, other Directors, President Commissioner, and Commissioners is 100%:90%:85%:45%:90%</i>

Dengan demikian, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi selengkapny adalah sebagai berikut:

Hence, the BOC and BOD remuneration is as follows:

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

dalam Rupiah | in Rupiah

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS ALLOWANCE AND FACILITIES	TAKE-HOME PAY PER BULAN TAKE-HOME PAY PER BULAN
1.	Ahmad Bambang*	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	97.200.000	19.440.000	116.640.000
2.	Zainal Abidin	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	87.480.000	17.496.000	104.976.000
3.	Wahju Satrio Utomo	Komisaris <i>Commissioner</i>	87.480.000	17.496.000	104.976.000
4.	Heddy Lugito	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	87.480.000	17.496.000	104.976.000
5.	Dedi Syarif Usaman	Komisaris <i>Commissioner</i>	87.480.000	17.496.000	104.976.000
6.	Hari Bowo*	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	97.200.000	19.440.000	116.640.000

Keterangan:

* Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo.

Information:

* Ahmad Bambang has been serving as the President Commissioner since 13 September 2019 to succeed Hari Bowo.

REMUNERASI DIREKSI REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

dalam Rupiah | in Rupiah

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	HONORARIUM
1.	Doso Agung	Direktur Utama <i>President Director</i>	216.000.000
2.	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial <i>Operations and Commercial Director</i>	183.600.000
3.	Joko Noerhudha	Direktur Teknik <i>Engineering Director</i>	183.600.000
4.	Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia <i>Human Capital Director</i>	194.400.000
5.	Irvandi Gustari*	Direktur Keuangan <i>Financial Director</i>	183.600.000
6.	Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Business Transformation and Development Director</i>	183.600.000
7.	Iman Rachman*	Direktur Keuangan <i>Financial Director</i>	183.600.000

Keterangan:

* Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019 menggantikan Iman Rachman.

Information:

* Irvandi Gustari has been serving as the Financial Director since 16 October 2019 to succeed Iman Rachman.

TANTIEM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2019

TANTIEM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2019

dalam Rupiah | in Rupiah

NO.	JABATAN POSITION	TANTIEM	KETERANGAN DESCRIPTION
1.	Direktur Utama President Director	6.777.184.540	
2.	Direktur Director	5.777.505.486	Perbandingan tantiem Direktur Utama dengan Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah: 100%:90%:45%:90% Tantiem comparison between the President Director with other Directors, President Commissioner, and other Commissioners is 100%:90%:45%:90%
3.	Komisaris Utama President Commissioner	3.058.679.375	
4.	Komisaris Commissioner	2.752.811.437	
4.	Komisaris Commissioner	2.752.811.437	

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 2016-2018

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2017-2019

dalam Rupiah | in Rupiah

NO.	JABATAN POSITION	2017*		2018*		2019*	
		HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS ** ALLOWANCES & FACILITIES**)	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS ** ALLOWANCES & FACILITIES**)	HONORARIUM	TUNJANGAN & FASILITAS ** ALLOWANCES & FACILITIES**)
1.	Direktur Utama President Director	146.000.000	25.000.000	180.000.000	25.000.000	216.000.000	25.000.000
2.	Direktur SDM Human Capital Director	131.400.000	25.000.000	153.000.000	25.000.000	194.400.000	25.000.000
3.	Direktur lainnya Other Directors	131.400.000	25.000.000	153.000.000	25.000.000	183.600.000	25.000.000
4.	Komisaris Utama President Commissioner	65.700.000	13.140.000	65.700.000	13.140.000	97.200.000	19.440.000
5.	Komisaris Commissioner	59.130.000	11.826.000	59.130.000	11.826.000	87.480.000	17.496.000

Keterangan:

* Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan setiap bulan

** Tunjangan/Fasilitas Direksi: Penjumlahan mobilitas dan perumahan, sedangkan pada tahun 2018 hanya tunjangan perumahan. Tunjangan/Fasilitas Komisaris: Tunjangan mobilitas.

Information:

* Salary and Allowances that are paid monthly

** Allowance/Facilities of the BOD: Sum of mobility and housing, while in 2018 is only the housing allowance. Allowance/Facilities of the Commissioners: Mobility allowance.

INFORMASI HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

INFORMATION ON AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Sesama anggota Dewan Komisaris serta antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Pelindo III tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Pemegang Saham tentang Pelaksanaan GCG.

There is no familial relationship among the members of the BOC and between the BOC and BOD of Pelindo III up to the second degree, both vertically and horizontally. All members of the BOC and BOD of the Company also have no concurrent positions that are prohibited through the regulation of Shareholders on GCG implementation.

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM

AFFILIATION BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND SHAREHOLDERS

NAMA NAME	HUBUNGAN DENGAN ORGAN PELINDO III RELATIONSHIP WITH PELINDO III ORGANS						HUBUNGAN KEPENGURUSAN DI PERUSAHAAN LAIN MANAGEMENT IN OTHER COMPANIES					
	DEWAN KOMISARIS BOC		DIREKSI BOD		PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS		SEBAGAI DEWAN KOMISARIS AS THE BOC		SEBAGAI DIREKSI AS THE BOD		SEBAGAI PEMEGANG SAHAM AS SHAREHOLDERS	
	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
Ahmad Bambang*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Zainal Abidin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Wahju Satrio Utomo	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Heddy Lugito	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dedi Syarif Usman	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Hari Bowo*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Keterangan:

* Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo.

Information:

* Ahmad Bambang has been serving as the President Commissioner since 13 September 2019 to succeed Hari Bowo.

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM

AFFILIATION BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHAREHOLDERS

NAMA NAME	HUBUNGAN DENGAN ORGAN PELINDO III RELATIONSHIP WITH PELINDO III ORGANS						HUBUNGAN KEPENGURUSAN DI PERUSAHAAN LAIN MANAGEMENT IN OTHER COMPANIES					
	DEWAN KOMISARIS BOC		DIREKSI BOD		PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS		SEBAGAI DEWAN KOMISARIS AS THE BOC		SEBAGAI DIREKSI AS THE BOD		SEBAGAI PEMEGANG SAHAM AS SHAREHOLDERS	
	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
Doso Agung	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Putut Sri Muljanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Joko Noerhudha	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Toto Heliyanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Irvandi Gustari*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Toto Nugroho	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Iman Rachman*	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Keterangan:

* Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019 menggantikan Iman Rachman.

Information:

* Irvandi Gustari has been serving as the Finance Director since 16 October 2019 to succeed Iman Rachman.



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON DIVERSITY IN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITIONS

Keberagaman pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ditunjukkan untuk memberikan sudut pandang dan paradigma pengelolaan yang luas sesuai dengan kompetensi, pengalaman, dan latar belakang kepakaran pada masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman pada komposisi Dewan Komisaris dan Direksi selain pada aspek kompetensi juga memenuhi aspek-aspek lainnya sebagai wujud pembudayaan prinsip GCG melalui prinsip keadilan (*fairness*) seperti kelompok usia yang mewakili sudut pandang di tiap-tiap generasi, latar belakang kesukuan sebagai implementasi kebhinekaan, gender sebagai wujud pemenuhan *affirmative action*, dan aspek-aspek lainnya yang bersifat nonkepentingan.

Diversity in the BOC and BOD composition is intended to provide a broad perspective and management paradigm in accordance with the competence, experience, and expertise of each member of the BOC and BOD. Aside from meeting the competence aspect, diversity in the BOC and BOD composition also meets other aspects as a form of the Company's efforts to make GCG as its culture, especially the fairness principles. This is done, among others, through the diversity in the age group to represent perspective in each generation, in the ethnic background as the implementation of diversity, in gender as a form of affirmative action fulfilment, as well as other non-interest aspects.

DASAR HUKUM

Komposisi dan penentuan penunjukan Dewan Komisaris merupakan hak Pemegang Saham melalui RUPS, dipilih berdasarkan integritas, berdedikasi, memahami permasalahan manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai sesuai PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

LEGAL BASIS

The composition and determination of the BOC appointment are the rights of Shareholders exerted through GMS. The BOC is selected based on their integrity, dedication, understanding of management issues and have sufficient knowledge according to PER-02/MBU/02/2015 dated 17 February 2015 set forth in Joint Regulation of the BOC and BOD No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance).

DASAR KEBIJAKAN INTERNAL

Internalisasi atas regulasi yang mengatur tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam Dasar kebijakan internal Perusahaan yang tercantum dalam *Board Manual*.

BASIS OF INTERNAL POLICY

The internalisation of regulations stipulating the diversity in BOC and BOD composition is set forth in the Company's internal policy basis contained in the Board Manual.

LAPORAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Secara prinsip Dewan Komisaris telah memiliki komposisi yang beragam yang dapat dilihat dari beragamnya pengalaman kerja, usia, dan pendidikan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris. Perpaduan ini menjadi pijakan yang baik bagi Direksi secara kolektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut:

REPORT ON THE DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In principle, the BOC is composed of various individuals as observed from the diversity of their work experience, age, and education. This combination becomes a good foundation for the BOD in carrying out their duties collectively. The composition of the BOC up to 31 December 2019 is as follows

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

NAMA NAME	USIA AGE	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN EDUCATION BACKGROUND	KEAHLIAN EXPERTISE
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS			
Ahmad Bambang ¹	57 tahun 57 years old	Teknik Informatika Informatics Engineering	Teknologi Technology
Zainal Abidin	72 tahun 72 years old	Akademi Angkatan Darat Military Academy	Pertahanan dan Politik National Defense and Politics
Wahju Satrio Utomo	60 tahun 60 years old	Hukum, Politik, dan Manajemen Pendidikan Laws, Politics, and Education Management	Hukum, Politik, dan Manajemen Pendidikan Laws, Politics, and Education Management
Heddy Lugito	59 tahun 59 years old	Ilmu Budaya Humanity	Humaniora Humanities
Dedi Syarif Usman	54 tahun 54 years old	Ekonomi dan Akuntansi Economics and Accounting	Ekonomi dan Keuangan Negara State Economics and Finance
Hari Bowo ¹	63 tahun 63 years old	Akademi Angkatan Laut Naval Academy	Pertahanan dan Kematriman National Defense and Maritime
DEWAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS			
Doso Agung	51 tahun 51 years old	Manajemen Management	Hubungan Masyarakat dan Hukum Public Relation and Law
Putut Sri Muljanto	50 tahun 50 years old	Manajemen Management	Pemasaran Marketing
Joko Noerhudha	46 tahun 46 years old	Teknik Sipil Civil Engineering	Teknik Engineering
Toto Heliyanto	54 tahun 54 years old	Hukum Bisnis Business Law	Ekonomi dan Administrasi Bisnis Economy and Business Administration
Irvandi Gustari ²	54 tahun 54 years old	Ekonomi dan Keuangan Economics and Finance	Ekonomi dan Keuangan Economics and Finance
Toto Nugroho	52 tahun 52 years old	Teknik Gas dan Kimia Gas and Chemical Engineering	Teknik Kimia dan Pengembangan Bisnis Chemical Engineering and Business Development
Iman Rachman ²	47 tahun 47 years old	Ekonomi dan Keuangan Economics and Finance	Ekonomi dan Keuangan Economics and Finance

Keterangan:

- Ahmad Bambang menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 13 September 2019 menggantikan Hari Bowo.
- Irvandi Gustari menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 16 Oktober 2019 menggantikan Iman Rachman.

Information:

- Ahmad Bambang has been serving as the President Commissioner since 13 September 2019 to succeed Hari Bowo.
- Irvandi Gustari has been serving as the Finance Director since 16 October 2019 to succeed Iman Rachman.

PERNYATAAN PEMENUHAN ASPEK KEBERAGAMAN GENDER

Pada saat laporan tahunan ini dipublikasikan, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan terdiri dari 5 orang Dewan Komisaris dan 6 orang Direksi yang seluruhnya bergender laki-laki. Meski demikian, komposisi Dewan Komisaris pernah diduduki oleh orang-perorangan yang bergender Perempuan.

STATEMENT OF GENDER DIVERSITY FULFILMENT

At the time this annual report is published, the BOC and BOD of the Company are composed of five Commissioners and six Directors who are male. Nevertheless, the position as the BOC has been occupied by a woman in previous terms.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Dalam rangka membantu tugas Direksi, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai *liaison officer* (public relation/corporate communication), *institution relations*, GCG implementation, monitoring pencapaian KPI, monitoring pelaksanaan kegiatan PKBL, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi.

The Corporate Secretary has the mission to support the creation of a good corporate image consistently and continuously through the management of effective communication programme to the stakeholders. To assist the duties of the BOD, the Corporate Secretary has the main function as a liaison officer (public relation/corporate communication), institution relations, GCG implementation, KPI achievement monitoring, PKBL implementation monitoring, as well as the administration of policy documents and minutes of the BOD meetings.

KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

POSITION AND QUALIFICATION OF CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is appointed and dismissed as well as directly responsible to the President Director. In carrying out its duties, the Corporate Secretary must have the academic qualification and adequate competence to be able to execute its duties and responsibilities.



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY



ARDHY WAHYU BASUKI
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, kelahiran Surabaya, 11 September 1978. Saat ini berdomisili di Surabaya. Memperoleh gelar Sarjana Muda Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1998). Memiliki riwayat karir sebagai Senior Manager Pemasaran (2018-2019), CEO Regional Jawa Tengah (2018-2019), General Manager Pelabuhan Cabang Tanjung Emas (2017-2018), General Manager Pelabuhan Cabang Benoa (2017), dan General Manager Pelabuhan Maumere (2015-2016).

An Indonesian citizen, 41 years old, born in Surabaya on 11 September 1978. Currently living in Surabaya. Earned his Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (1998). Previously served as the Senior Vice President Marketing (2018-2019), Regional CEO of Central Java (2018-2019), General Manager Port of Tanjung Emas (2017-2018), General Manager Port of Benoa (2017), and General Manager Port of Maumere (2015-2016).

DASAR PENGANGKATAN

Beliau diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pelindo III No. KEP.200/KP.0604/P.III-2019 tanggal 20 Juni 2019.

BASIS OF APPOINTMENT

He is appointed as the Corporate Secretary by the President Director after gaining approval from the BOC based on the Decree of BOD of Pelindo III No. KEP.200/KP.0604/P.III-2019 dated 20 June 2019.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Organ Sekretaris Perusahaan dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi dengan No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelindo III. Sekretaris Perusahaan memiliki misi untuk "Memastikan Meningkatnya Citra Perusahaan dan Terimplementasinya GCG melalui Pengelolaan Kegiatan Hubungan Masyarakat, Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta fungsi umum lainnya".

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary Organ was established through the Decree of the BOD No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 on the Organisation Structure and Work Procedure of Pelindo III. The Corporate Secretary has the mission "To Ensure the Improvement of Corporate Image and GCG Implementation Through Management of Corporate Communication, Investor Relation and Corporate Governance, Partnership and Community Development, and other general functions".

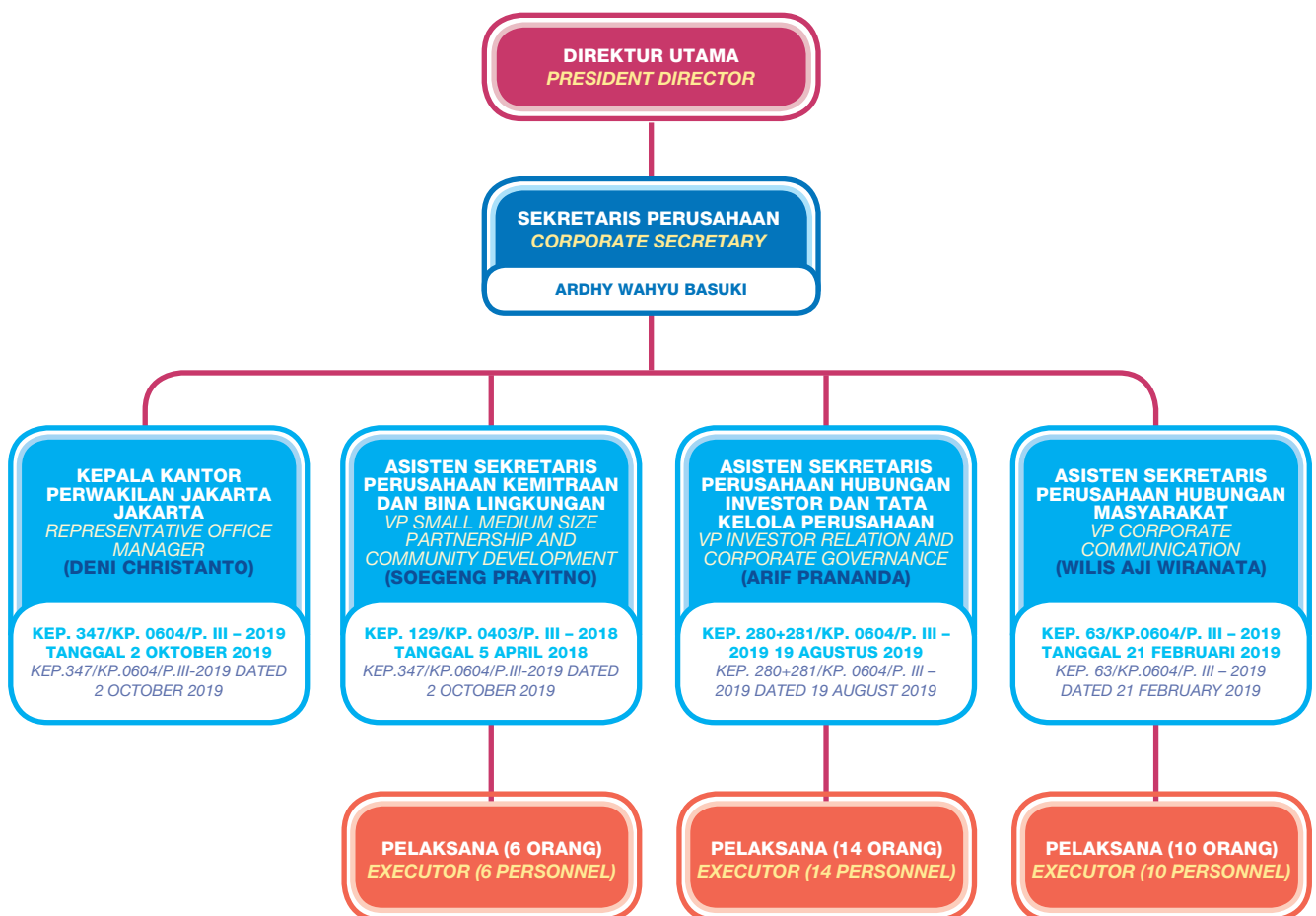
Sekretaris Perusahaan dikepalai oleh satu orang dengan didukung oleh 34 personel dengan kualitas dan kompetensi yang telah memenuhi persyaratan dalam *Job Profile* Sekretaris Perusahaan dan terdiri dari fungsi-fungsi berikut:

- Hubungan Masyarakat.
- Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan.
- Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Fungsi Umum.

The Corporate Secretary is headed by one person that is supported by 34 personnel with quality and competence that meets the requirements in the Job Profile of Corporate Secretary and consisting of several functions:

- *Corporate Communication.*
- *Investor Relation and Corporate Governance.*
- *Partnership and Community Development.*
- *General Functions.*

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN ORGANISATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan, dan pengendalian Kegiatan Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.
2. Penyusunan kegiatan dan evaluasi program fungsi Hubungan Masyarakat secara korporasi, termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan antara lain melalui pengelolaan situs web, media sosial, *Company Profile*, penyelenggaraan hubungan investor, serta pembinaan administrasi kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk keprotokoleran Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penyusunan sistem dan prosedur kegiatan serta pembinaan teknis fungsi kehumasan secara korporasi termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan, penerbitan laporan tahunan, penyelenggaraan hubungan investor, dan tata kelola perusahaan.
4. Penyusunan rencana kebutuhan karyawan fungsi kehumasan secara korporasi pada setiap pelabuhan di setiap wilayah kerja Perusahaan termasuk rancangan pemenuhan standar kualifikasi karyawan sesuai peraturan yang berlaku untuk menunjang kegiatan Hubungan Masyarakat di wilayah kerja Perusahaan.
5. Pemantauan dan pengajuan usulan kepada manajemen maupun unit-unit lain terkait pelaksanaan fungsi kehumasan, hubungan kelembagaan, dan kemitraan Bina Lingkungan di wilayah Perusahaan.
6. Sebagai juru bicara Perusahaan, memantau pelaksanaan *Board Manual* dan memantau kepatuhan korporat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

PROGRAM KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN 2019

Selama 2019, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan pembagian bidang dalam struktur organisasi meliputi:

FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penanganan dan pembinaan hubungan masyarakat (*public relation*), penanganan kegiatan yang berhubungan dengan Pemangku Kepentingan, hubungan kelembagaan, serta pencitraan Perusahaan.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR DAN TATA KELOLA KORPORASI

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, dan analis tentang berbagai aspek terkait dengan kinerja Perusahaan, serta memastikan proses administrasi di Perusahaan sesuai dengan ketentuan GCG.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *Policy formulation, organisation development, and control of Corporate Secretary Work Unit Activities.*
2. *Preparation of programme activity and evaluation of Corporate Communication function, including the publication and establishment of corporate image, e.g. through the management of the website, social media, Company Profile, investor relations, as well as secretarial administration of the BOD and the BOC, including the protocol of the BOD and the BOC.*
3. *Preparation of system and activity procedure as well as the technical development of corporate public relations function, including the publication and establishment of corporate image, issuance of annual reports, investor relations, and corporate governance organisation.*
4. *Preparation of employee needs a plan of the corporate public relations function in every Company work area, including the plan for employee qualification standard fulfilment plan under applicable regulations to support Corporate Communication activities in Company work area.*
5. *Monitoring and recommendation to the management or other units concerning public relations, institutional relations, as well as partnership and Community Development function in the Company work area.*
6. *As a spokesperson of the Company, monitoring the implementation of Board Manual and monitoring the corporate compliance to the prevailing regulations.*

THE 2019 WORK PROGRAMME OF THE CORPORATE SECRETARY

Throughout 2019, the Corporate Secretary has performed activities and submitted the report in the form of Corporate Secretary Report under the division of sectors in the organisation structure, including:

COMMUNITY COMMUNICATION FUNCTION

Planning, controlling, fostering, analysing, as well as evaluating and reporting on the activities of handling and fostering public relations, handling activities related to Stakeholders, institutional relations, and corporate imaging.

INVESTOR AND CORPORATE GOVERNANCE FUNCTIO

Planning, controlling, fostering, analysing, and evaluating as well as reporting communication activities especially to investors, prospective investors, and analysts on various aspects related to Company performance as well as ensuring the administrative process in the Company is following the provisions of GCG.

FUNGSI KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

1. Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan penyusunan strategi dan program kemitraan dan bina lingkungan.
2. Analisis kelayakan untuk peminjaman kepada pihak masyarakat sekitar.
3. Penyaluran dana.
4. Memastikan pengembalian dan laporan kegiatan peminjaman tepat waktu.

FUNGSI UMUM

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, serta membantu fungsi hubungan investor khusus di Kantor Perwakilan.

KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN KOMUNIKASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Aktivitas komunikasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan yang dijalankan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

AKTIVITAS KOMUNIKASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN COMMUNICATION ACTIVITIES WITH STAKEHOLDERS

AKTIVITAS ACTIVITIES	FREKUENSI PELAKSANAAN IMPLEMENTATION FREQUENCY
<i>Press Conference</i>	<p>Empat kali pelaksanaan dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan <i>Home Terminal</i>. • Pelaksanaan kegiatan program CSR operasi tumor mata, bekerja sama dengan PHC. • Kinerja Triwulan III Perusahaan. • Pelaksanaan <i>Charity Run</i> dan <i>Single Billing</i>. <p><i>Four implementations with the details:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Introduction to Home Terminal</i>. • <i>Implementation of eye tumour surgery CSR programmer in cooperation with PHC</i>. • <i>Corporate Performance in the Third Quarter</i>. • <i>Implementation of Charity Run and Single Billing</i>.
<i>Media Gathering</i>	<p>Mengadakan Pertemuan dan <i>Site Visit</i> dengan Media Elektronik dan Cetak di Lingkungan Pelabuhan Regional Jawa Timur.</p> <p><i>Convene Meetings and Site Visit with Electronic and Printed Media in East Java Port Region Area.</i></p>
<i>Media Visit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia. • Kunjungan ke Kantor Harian Kompas. <p>• <i>The Office Visit to Bisnis Indonesia.</i></p> <p>• <i>The Office Visit to Harian Kompas.</i></p>
RUPS GMS	<ul style="list-style-type: none"> • Satu kali RUPS RKAP • Satu kali RUPS Tahunan <p>• <i>One RKAP GMS</i></p> <p>• <i>One Annual GMS</i></p>

PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT FUNCTION

1. *Planning, controlling, fostering, analysing, and evaluating the activities of developing strategies and programmes in partnership and community development.*
2. *Loan feasibility analysis on the surrounding community.*
3. *Distribution of funds.*
4. *Ensuring ontime loan repayment and report.*

GENERAL FUNCTION

Planning, controlling, fostering, analysing, as well as evaluating and reporting on household activities and preparing necessary needs as well as assisting the special investor relations function in the Representative Office.

COMMUNICATION AND COMMUNICATION ACTIVITIES WITH STAKEHOLDERS

The communication and relation activities with stakeholders carried out by the Corporate Secretary throughout 2019 were as follows:

AKTIVITAS
ACTIVITIESFREKUENSI PELAKSANAAN
IMPLEMENTATION FREQUENCY

Pertemuan Serikat Pekerja
Meeting with Labour Union

- Tiga bulan sekali audiensi dengan manajemen.
- Satu kali pembahasan tentang PKB.
- *Audience with the management every three months.*
- *One discussion on PKB.*

Analyst Meeting

-

PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS
PERUSAHAAN

Dalam rangka menciptakan kualitas kinerja unggul, Sekretaris Perusahaan memiliki KPI sebagai media dalam melakukan pengukuran efektivitas dan ketercapaian target kinerja. Selain KPI, Sekretaris Perusahaan juga menjadi salah satu objek dalam asesmen GCG Perusahaan. Dengan adanya media pengukuran tersebut, kinerja Sekretaris Perusahaan akan senantiasa terpantau dan terevaluasi sehingga menciptakan kinerja keberlanjutan di masa depan.

CORPORATE SECRETARY
PERFORMANCE ASSESSMENT

To create excellent performance, the Corporate Secretary has KPI as a media in measuring the effectiveness and achievement of the performance target. Aside from KPI, the Corporate Secretary is also one of the objects in the GCG assessment of the Company. Through the measurement media, the Corporate Secretary performance will always be monitored and evaluated to create continuous performance in the future.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Di tahun 2019, Sekretaris Perusahaan tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal Pelindo III maupun dari pihak eksternal, sehingga data mengenai pendidikan dan pelatihan Sekretaris Perusahaan tidak tersedia.

CORPORATE SECRETARY
EDUCATION AND TRAINING

In 2019 the Corporate Secretary did not participate in education and training that is held internally by Pelindo III or from external parties, hence, the data on education and training of the Corporate Secretary is unavailable.



SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Perusahaan harus dilengkapi dengan organ Satuan Pengawasan Intern (SPI). Keberadaan SPI berperan dalam memastikan seluruh proses bisnis, sistem, dan kinerja yang dijalankan Perusahaan, baik organ, unit kerja, atau fungsi yang berada di dalamnya, berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku yang berimplikasi bagi dukungan keberlanjutan usaha Perusahaan. Selain itu, keberadaan SPI juga berperan untuk mendukung peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola melalui evaluasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG.

SPI memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi, setia kepada Perusahaan, dan tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, jujur, objektif, dipercaya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, bersikap independen, serta terus melakukan aktivitas pengawasan melalui kegiatan audit operasional yang dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan Perusahaan. Aktivitas pengawasan meliputi proyek yang sedang dilaksanakan dengan memberikan rekomendasi perbaikan untuk tercapainya tujuan Perusahaan. Dasar pelaksanaannya terdapat pada Audit Charter No. PER.0033/HK.01/HOFC-2019 tentang Internal Audit Charter.

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Struktur SPI berada di bawah Direktur Utama dan sejajar dengan Sekretaris Perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern yang membawahi 4 orang Pengawas Bidang Audit yang masing-masing membawahi bagian-bagian berbeda seperti Pengawas Audit Bidang SDM, Umum, dan Hukum; Pengawas Audit Bidang Teknik, Teknologi Informasi, dan Komunikasi; Pengawas Audit Bidang Operasi dan Pengembangan Bisnis; dan Pengawas Bidang Keuangan. Berikut adalah struktur organisasi dari SPI:

To execute the audit function, the Company must be complemented with an Internal Audit Unit organ. The Internal Audit has the role in ensuring that all of the business process, system, and performance carried out by the Company including the organs, work units, or functions in the Company are carried out following the prevailing regulation which implies the support of business continuity of the Company. Moreover, the Internal Audit also has the role to support the increase in risk management effectiveness, internal control, and governance process through evaluations by referring to GCG principles.

The Internal Audit has a strong commitment to the profession, loyal to the Company, and does not get involved in any activities violating the law. The Internal Audit is also honest, objective, trusted, and responsible in carrying out its duties and acting independent as well as conducting supervisory activities through operational audit activities performed to the work units in the environment of the Company including projects currently implemented by providing improvement recommendation to achieve the objectives of the Company. The implementation is stated in the Audit Charter No. PER.0033/HK.01/HOFC-2019 on Internal Audit Charter.

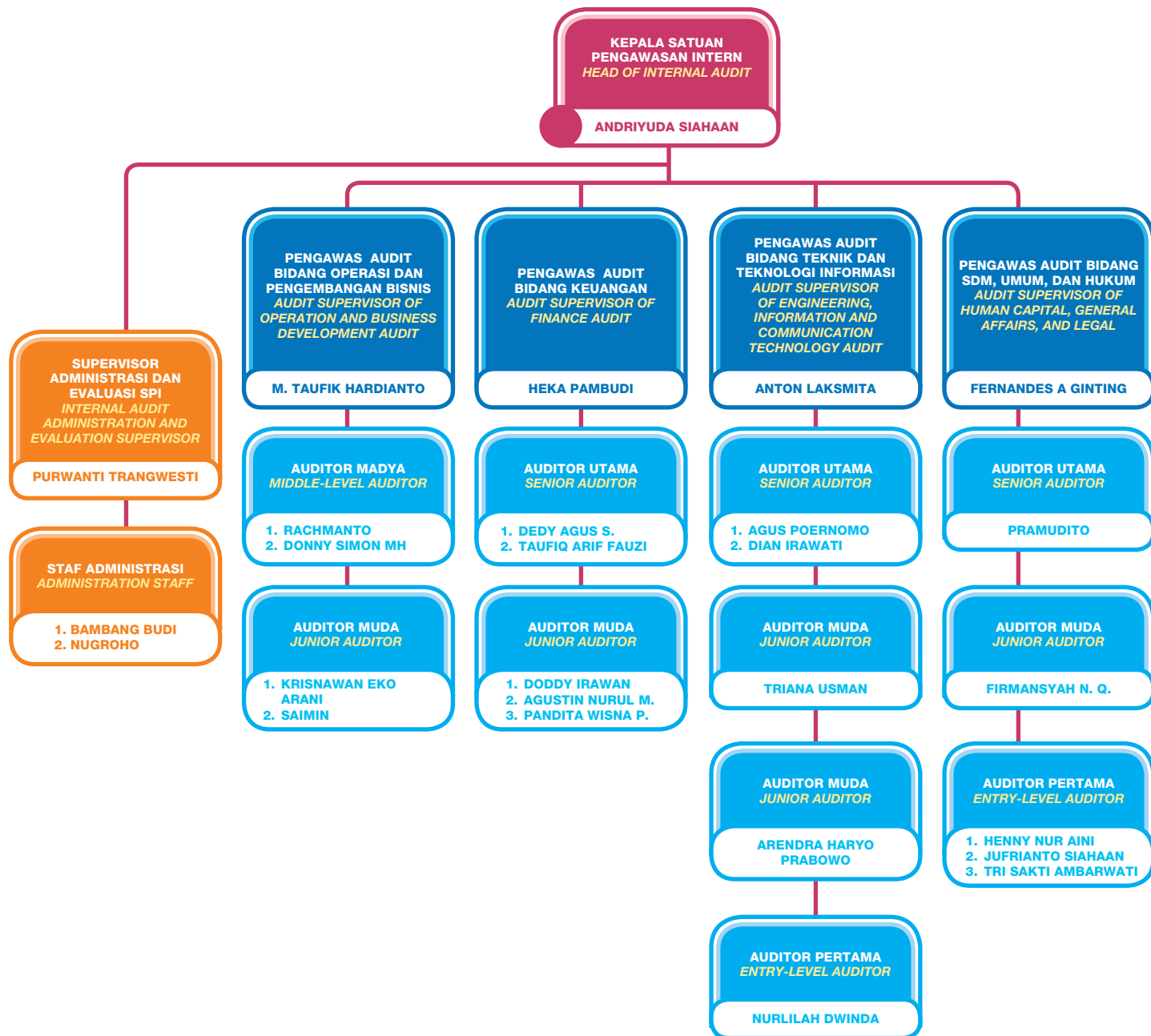
POSITION OF INTERNAL AUDIT IN THE COMPANY STRUCTURE

The Internal Audit structure is under the President Director and is parallel with the Corporate Secretary.

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who oversees four Field Supervisors, each oversees different parts such as Audit Supervisor of Human Capital, General Affairs, and Legal; Audit Supervisor of Engineering, Information, and Communication Technology; Audit Supervisor of Operations and Business Development; and Audit Supervisor of Finance. The following is the organisational structure of the Internal Audit:

STRUKTUR ORGANISASI SPI ORGANISATION STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT



PENUNJUKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Sesuai dengan Piagam Internal Audit Perusahaan, kewenangan penunjukan Kepala Internal Audit dilakukan oleh Direksi Perusahaan. Di tahun 2019, Internal Audit Perusahaan dikepalai oleh Andriyuda Siahaan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern setelah mendapatkan Keputusan Direksi Pelindo III No. 156/KP.0403/P.III-2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

APPOINTMENT OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT

Under the Internal Audit Charter, the authority for the appointment of the Head of Internal Audit is performed by the BOD. In 2019, the Internal Audit was headed by Andriyuda Siahaan as the Head of the Internal Audit after earning the Decree of the BOD No. 156/KP.0403/P.III-2018 dated 26 April 2018 on Adjustment of Structural Position Classes in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

PROFIL KEPALA INTERNAL AUDIT

PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT



ANDRIYUDA SIAHAAN
Kepala Internal Audit
Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, kelahiran Jakarta 3 September 1978. Berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang (2000) dan memperoleh banyak sertifikasi dari berbagai pendidikan nonformal di bidang pemeriksaan keuangan. Berkarir di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan riwayat jabatan fungsional sebagai Pemeriksa Muda, Auditorat Utama Keuangan Negara VII (2012); Pemeriksa Pertama Auditorat Utama Keuangan Negara VII (2011) dan Auditor Ahli Pertama Perwakilan BPK-RI Jayapura (2007).

Indonesian citizen, 40 years old, born in Jakarta on 3 September 1978. Currently living in Jakarta. Earned his Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Brawijaya, Malang (2000) and many certifications from various non-formal education in financial audit. He developed his career at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) and has held several strategic positions, among others, as a Junior Auditor at Main Auditorate of State Finance VII (2012), First-Level Auditor at Main Auditorate of State Finance VII (2011), and First-Level Expert Auditor of BPK-RI Jayapura Representative (2007).

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SPI mengacu pada beberapa aturan yang berlaku antara lain:

PERATURAN DIREKSI

- PER.01.1/PW.01/P.III-2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Pelindo III.
- PER.0033/HK.01/HOFC-2019 tentang *Internal Audit Charter*.
- PER.0034/HK.01.13/HOFC-2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Audit.
- PER.0035/HK.01.13/HOFC-2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Assurance dan Advisory.
- PER.78/HK.03/P.III-2017 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
- PER.76/PW.08/P.III-2014 tentang Pedoman berbasis Risiko.
- PER.30/HK.03/P.III-2015 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern.

LEGAL BASIS OF DUTIES IMPLEMENTATION

In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit of the Company refers to the following prevailing regulations:

REGULATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- PER.01.1/PW.01/P.III-2011 on the Implementation of Internal Audit in Pelindo III.
- PER.0033/HK.01/HOFC-2019 on the Internal Audit Charter.
- PER.0034/HK.01.13/HOFC-2019 on the Implementation of Audit Work Sheets Management.
- PER.0035/HK.01.13/HOFC-2019 on the Guidance for Assurance and Advisory Implementation.
- PER.78/HK.03/P.III-2017 on Whistleblowing System.
- PER.76/PW.08/P.III-2014 on Risk-based Guideline.
- PER.30/HK.03/P.III-2015 on the General Guideline of Internal Control System.

PEDOMAN KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pedoman Kerja bagi Internal Audit telah diatur dalam *Internal Audit Charter* yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. PER.0033/HK.01/HOFC-2019/HK.136/07/SKB/DK.P.III/2019 tanggal 26 Juli 2019 sebagai pembaruan dari No. HK.04/18.1/P.III-2014 tanggal 8 Oktober 2014. Piagam Internal Audit berisi ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin hasil pemeriksaan yang bermutu agar Internal Audit dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik. *Audit Charter* dipublikasikan ke seluruh Unit Kerja guna menjalin kerja sama yang baik dalam mewujudkan tujuan Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan Internal Audit yaitu memberikan layanan jasa *Assurance* dan *Advisory*. *Compliance Audit* merupakan kegiatan *assurance* untuk menjamin setiap bagian pada Perusahaan melakukan proses kerjanya sesuai dengan peraturan perundangan, standar, dan SOP yang berlaku. Sementara itu, *Performance Audit* merupakan jenis audit yang berfokus pada audit atas pengelolaan operasional perusahaan yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas dengan tujuan untuk mendorong ke arah perbaikan.

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALIFIKASI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Sampai dengan periode 31 Desember 2019, jumlah SDM Internal Audit adalah sebanyak 26 orang dengan komposisi sebagai berikut:

JUMLAH DAN KUALIFIKASI SPI NUMBER AND QUALIFICATION OF INTERNAL AUDIT

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	JUMLAH TOTAL
1.	Andriyudha Siahaan	Kepala Satuan Pengawasan Intern <i>Head of Internal Audit</i>	1
2.	M. Taufik Hardjanto	Pengawas Audit Bidang Operasional dan Pengembangan Bisnis <i>Audit Supervisor of Operation and Business Development Audit</i>	5
	a. Rachmanto	Auditor Madya <i>Middle-Level Auditor</i>	
	b. Donny Simon M. H.	Auditor Madya <i>Middle-Level Auditor</i>	
	c. Krisnawan Eko Arani	Auditor Muda <i>Junior Auditor</i>	
	d. Saimin	Auditor Muda <i>Junior Auditor</i>	

INTERNAL AUDIT MANUAL

The Work Guideline for the Internal Audit has been regulated in the Internal Audit Charter stipulated through the Joint Decision of the BOC and BOD of Pelindo III No. PER.0033/HK.01/HOFC-2019/HK.136/07/SKB/DK.P.III/2019 dated 26 July 2019 as an improvement from No. HK.04/18.1/P.III-2014 dated 8 October 2014. The Internal Audit Charter contains provisions that guarantee the quality of the audit result so that the Internal Audit can perform its functions properly. The Audit Charter is publicised to all Work Units to foster good cooperation in realising the Company objectives.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The supervisory function executed by the Internal Audit is to provide Assurance and Advisory services. Compliance Audit is an assurance activity to ensure that all parts of the Company have conducted their work process under the prevailing laws, regulation, standards, and SOP. Meanwhile, Performance Audit is a kind of audit focusing on company operational management audit consisting of economic and efficiency audit as well as effectiveness audit to encourage improvements.

NUMBER OF HUMAN CAPITAL AND INTERNAL AUDIT QUALIFICATION

Up to 31 December 2019, the number of Human Capital in Internal Audit is 26 personnel with the following composition:

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	JUMLAH TOTAL
3.	Heka Pambudi	Pengawas Audit Bidang Keuangan <i>Audit Supervisor of Finance Audit</i>	6
	a. Dedy Agus S.	Auditor Utama <i>Senior Auditor</i>	
	b. Taufiq Arif Fauzi	Auditor Utama <i>Senior Auditor</i>	
	c. Doddy Irawan	Auditor Muda <i>Junior Auditor</i>	
	d. Agustin Nurul M.	Auditor Pertama <i>Entry-Level Auditor</i>	
	e. Pandita Wisna P.	Auditor Pertama <i>Entry-Level Auditor</i>	
4.	Anton Laksmita	Pengawas Audit Bidang Teknik, dan Teknologi Informasi <i>Audit Supervisor of Engineering, Information, and Communication Technology Audit</i>	5
	a. Agus Purnomo	Auditor Utama <i>Senior Auditor</i>	
	b. Dian Irawati	Auditor Utama <i>Senior Auditor</i>	
	c. Triana Usman	Auditor Madya <i>Middle-Level Auditor</i>	
	d. Arendra P.	Auditor Muda <i>Junior Auditor</i>	
5.	Fernandes A. Ginting	Pengawas Audit Bidang SDM, Umum, dan Hukum <i>Audit Supervisor of Human Capital, General Affairs, and Legal Audit</i>	6
	a. Pramudito	Auditor Utama <i>Senior Auditor</i>	
	b. Firmansyah N. Q.	Auditor Utama <i>Middle-Level Auditor</i>	
	c. Henny Nur Aini	Auditor Pertama <i>Entry-Level Auditor</i>	
	d. Jufrianto Siahaan	Auditor Pertama <i>Entry-Level Auditor</i>	
	e. Tri Sakti Ambarwati	Auditor Pertama <i>Entry-Level Auditor</i>	
5.	Purwani Trangwesti	Supervisor Administrasi dan Evaluasi SPI <i>Internal Audit Administration and Evaluation Supervisor</i>	3
	Bambang Budiyanoro	Staf Administrasi <i>Administration Staff</i>	
	Nugroho	Staf Administrasi <i>Administration Staff</i>	

SERTIFIKASI DAN PELATIHAN PROFESI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM SPI Perusahaan, selama tahun buku 2019 SPI telah memberikan kesempatan kepada seluruh pegawainya untuk mengikuti kegiatan sertifikasi maupun pelatihan. Pelatihan yang diikuti oleh SDM SPI di tahun 2019, yaitu:

CERTIFICATION AND TRAINING FOR INTERNAL AUDIT PROFESSION

To increase the competencies of the Internal Auditors, throughout the 2019 fiscal year the Internal Audit has provided opportunities to all of its employees to participate in certification activities and trainings. Trainings attended by the Internal Auditors in 2019, namely:

PELATIHAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DI 2019 TRAINING FOR INTERNAL AUDIT IN 2019

NO.	TEMA PENDIDIKAN/ PELATIHAN EDUCATION/TRAINING THEME	TANGGAL DATE	TEMPAT LOCATION	PENYELENGGARA ORGANISER	PESERTA PARTICIPANT
1.	Workshop Procurement & Fraud	28 Februari – 1 Maret <i>28 February – 1 March</i>	Bandung	AAF	Andriyuda S.
2.	Lokakarya Kiat dan Strategi Penyusunan HPS <i>Tips and Strategies Workshop for HPS Preparation</i>	28 Februari – 1 Maret <i>28 February – 1 March</i>	Yogyakarta	Istiqomah Study Center	1. Anton Laksmita 2. Arendra Haryo 3. Prabowo
3.	Pendidikan dan Sertifikasi Auditor Hukum <i>Legal Auditor Education and Certification</i>	18-22 Maret <i>18-22 March</i>	Jakarta	Jimly School of Law	Syaiful Anam
4.	Workshop Peran Auditor Internal dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan di era yang penuh tantangan. <i>The Workshop on the Role of Internal Auditor in supporting the achievement of company objectives in a challenging era.</i>	27-29 Maret <i>27-29 March</i>	Yogyakarta	FKSPI Jawa Timur	1. Andriyuda Siahaan 2. Fernandes A. Ginting 3. M. Taufik Hardjanto
5.	Penguatan Kapasitas Internal Audit/ Audit Berbasis Data <i>Strengthening of Internal Audit Capacity/Data-Based Audit</i>	24-27 Juni <i>24-27 June</i>	Bandung	Awesome Consulting (Lim Kurniawan)	Semua SDM SPI <i>Semua SDM SPI</i>
6.	Workshop Internal Audit in the era of VUCA & Digitalization <i>Workshop Internal Audit in the era of VUCA & Digitalization</i>	21-23 Agustus <i>21-23 August</i>	Semarang	FKSPI	1. Andriyuda Siahaan 2. Heka Pambudi 3. Bambang Budiyanoro
7.	Dasar-Dasar Audit <i>Audit Foundations</i>	15-24 September	Malang	PPAK	1. Agustin Nurul Mahmudah 2. Bambang Budiyanoro 3. Pandita Wisna Patria 4. Nurlillah Dwindia Wicaksono
8.	Pelatihan Fraud Auditing 1 <i>Fraud Auditing 1 Training</i>	1-4 Oktober <i>1-4 October</i>	Jakarta	LPFA	1. Firmansyah N. Q. 2. Syaiful Anam
9.	Pelatihan Fraud Auditing 2 <i>Fraud Auditing 2 Training</i>	8-11 Oktober <i>8-11 October</i>	Jakarta	LPFA	1. Ronny Hendra Siagian 2. Doddy Irawan

NO.	TEMA PENDIDIKAN/ PELATIHAN EDUCATION/TRAINING THEME	TANGGAL DATE	TEMPAT LOCATION	PENYELENGGARA ORGANISER	PESERTA PARTICIPANT
10.	Pelatihan Audit Pembelian/PBJ <i>Procurement/PBJ Audit Training</i>	17-20 Oktober <i>17-20 October</i>	Bogor	PPAK	Rachmanto
11.	Pelatihan Antikorupsi BUMN <i>SOE Anti-Corruption Training</i>	29-31 Oktober <i>29-31 October</i>	Jakarta	KPK	1. Andriyuda Siahaan 2. Fernandes A. Ginting
12.	Pelatihan Fraud Auditing 1 <i>Fraud Auditing 1 Training</i>	5-8 November	Jakarta	LPFA	1. Triana Usman 2. Agus Purnomo 3. Kresnawan Eko Arani
12.	Pelatihan Fraud Detection & Investigation <i>Fraud Detection & Investigation Training</i>	7-8 November	Jakarta	IIA	1. Dian Irawati 2. Henny Nur Aini
13.	Pelatihan Fraud Auditing 1 <i>Fraud Auditing 1 Training</i>	3-6 Desember <i>3-6 Desember</i>	Jakarta	LPFA	1. Taufiq Arif Fauzi 2. Pramudito
14.	Pelatihan Internal Control & Risk Management <i>Internal Control & Risk Management Training</i>	9-10 Desember <i>9-10 Desember</i>	Jakarta	IIA	1. Saimin 2. Jufrianto Siahaan

REALISASI PROGRAM KERJA AUDIT 2019

Program kerja Audit Tahunan SPI tahun 2019 meliputi:

- Audit Terpadu
- Audit Tematik
- Review
- Audit Khusus

Pada tahun 2019, SPI telah melaksanakan program Audit meliputi Audit Terpadu 4 Regional, Audit Tematik Operasional dan Tematik Keuangan, serta Audit terpadu Kantor Pusat.

REALISATION OF THE 2019 AUDIT WORK PROGRAMME

The 2019 Annual Audit work programme of the Internal Audit includes:

- Integrated Audit
- Thematic Audit
- Review
- Special Audit

In 2019, SPI has carried out the Audit programme including Integrated Audit in Four Regions, Operational Thematic Financial Thematic Audit, as well as an Integrated Audit on the Head Office.



AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT

Auditor Eksternal adalah pihak independen dan profesional yang melakukan audit keuangan dan audit lainnya seperti audit operasional, audit khusus, audit mutu, audit investigasi, dan audit teknologi informasi. Untuk menjaga independensinya, maka:

- Auditor Eksternal melaporkan hasil auditnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan (Pemangku Kepentingan).
- Auditor Eksternal tidak boleh memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit.
- Auditor Eksternal tidak boleh mempunyai kepentingan keuangan yang materiel baik langsung maupun tidak langsung dan hubungan bisnis dengan Perusahaan.

Pada tahun 2019, Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja) ditunjuk untuk melakukan audit untuk Laporan Keuangan dan PKBL periode 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Tugas yang diberikan mencakup ruang lingkup audit laporan keuangan, kepatuhan, penilaian kinerja usaha, dan PKBL, serta evaluasi status tindak lanjut atas keputusan dan arahan RUPS. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit berikut nilai jasa serta ruang lingkup pekerjaan audit, dan hasilnya pada tahun 2015-2019.

The External Auditor is an independent and professional party conducting financial audit and other audits, such as operational audit, special audit, quality audit, investigation audit, and information technology audit. To maintain its independence, then:

- *External Auditor reports its audit result to the BOC and the BOD.*
- *External Auditor must be free from influence and has no conflict of interest with the BOC, the BOD, and interested parties in the Company (Stakeholders).*
- *External Auditor must not provide other services aside from audit services during the audit period.*
- *External Auditor must not have any direct or indirect material financial interest and business relationship with the Company.*

In 2019, the Public Accounting Firm of Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja) was appointed to conduct an audit of Financial Statements and PKBL for the period of 1 January until 31 December 2019. The assigned duties include the scope of financial statements audit, compliance, business performance assessment, and PKBL, as well as evaluation on the follow up of GMS resolution and direction. The following is the Public Accounting Firm appointed to perform audit along with the service fee as well as the scope of audit duty and its result in 2015-2019.

AKUNTAN PUBLIK 2015-2019 PUBLIC ACCOUNTANT IN 2015-2019

TAHUN YEARS	KAP KAP	AUDITOR	NILAI JASA SERVICE FEE	RUANG LINGKUP JASA SCOPE OF SERVICE	OPINI AUDITOR AUDITOR OPINION
2019	Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja)	Muhammad Kurniawan	Rp3.366.000.000	<p>a. Melaksanakan Pemeriksaan Umum/General Audit (dengan pelaksanaan interim dan akhir tahun) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) per 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pengujian efektivitas atas sistem pengendalian internal dan sistem teknologi informasi yang berdampak terhadap laporan keuangan.</p> <p>b. Melaksanakan audit atas Laporan PKBL.</p> <p>c. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Laporan Penilaian KPI.</p> <p>d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.</p> <p>e. Melaksanakan penugasan prosedur yang disepakati atas pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri sebagaimana diatur dalam PBI No. 16/22/PBI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</p> <p>a. Carry out general checks/General Audit (with interim and end of the year) on the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as per 31 December 2019 and for the year ended on 31 December 2019 in accordance with the applicable Financial Accounting Standards, including and not limited to testing the effectiveness of internal control systems and information technology systems that affect financial statements.</p> <p>b. Carry out an audit on the PKBL Report.</p> <p>c. Carry out the agreed procedures of the Company's Performance Evaluation Report and KPI Assessment Report.</p> <p>d. Carry out an audit of compliance with laws and regulations and internal control.</p> <p>e. Carry out agreed-upon procedure assignments for reporting activities for applying the precautionary principle in managing foreign debt as stipulated in PBI No. 16/22/PBI/2014 as amended by the Regulation of Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</p>	Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified</i>

TAHUN YEARS	KAP KAP	AUDITOR	NILAI JASA SERVICE FEE	RUANG LINGKUP JASA SCOPE OF SERVICE	OPINI AUDITOR AUDITOR OPINION
2018	Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja)	Muhammad Kurniawan	Rp3.060.000.000	<p>a. Melaksanakan pemeriksaan Umum/General Audit (dengan pelaksanaan interim dan akhir tahun) atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pelindo III per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pengujian efektivitas atas sistem pengendalian internal dan sistem teknologi informasi yang berdampak terhadap laporan keuangan.</p> <p>b. Melaksanakan audit atas Laporan PKBL.</p> <p>c. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Laporan Penilaian KPI.</p> <p>d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.</p> <p>e. Melaksanakan penugasan prosedur yang disepakati atas pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri sebagaimana diatur dalam PBI No. 16/22/PBI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</p> <p>a. Carry out general checks/General Audit (with interim and end of the year) on the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as per 31 December 2018 and for the year ended on 31 December 2018 in accordance with the applicable Financial Accounting Standards, including and not limited to testing the effectiveness of internal control systems and information technology systems that affect financial statements.</p> <p>b. Carry out an audit on the PKBL Report.</p> <p>c. Carry out the agreed procedures of the Company's Performance Evaluation Report and KPI Assessment Report.</p> <p>d. Carry out an audit of compliance with laws and regulations and internal control.</p> <p>e. Carry out agreed-upon procedure assignments for reporting activities for applying the precautionary principle in managing foreign debt as stipulated in PBI No. 16/22/PBI/2014 as amended by the Regulation of Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016</p>	Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified</i>

TAHUN YEARS	KAP KAP	AUDITOR	NILAI JASA SERVICE FEE	RUANG LINGKUP JASA SCOPE OF SERVICE	OPINI AUDITOR AUDITOR OPINION
2017	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan)	Benny Andria	Rp1.248.500.000	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL, serta peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. <i>Audit of the Company's Annual Financial Statements and PKBL, as well as certain statutory regulations and internal controls based on the State Financial Inspection Standards issued by the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency and Statement of Auditing No. No. 62 (Section 801) stipulated by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.</i>	Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified</i>
2016	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan)	Endang Pramuwati	Rp1.349.975.000	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL. <i>Audit of Annual Financial Statements and PKBL Report of the Company.</i>	Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified</i>
2015	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan)	Endang Pramuwati	Rp1.298.000.000	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL. <i>Audit of Annual Financial Statements and PKBL Report of the Company.</i>	Wajar dalam semua hal yang material <i>Unqualified</i>



SISTEM PENGENDALIAN INTERN

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi/Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin adanya keamanan atas pengelolaan harta Perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pelindo III mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.30/HK.03/P.III-2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pelindo III.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasi keuangan dan nonkeuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan perusahaan dapat:

- Menjaga dan mengamankan aset Perusahaan;
- Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud;
- Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dalam kegiatan operasional Perusahaan; dan
- Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada Organisasi secara menyeluruh.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL (COSO)

Infrastruktur dan *soft structure* Sistem Pengendalian Intern di Perusahaan juga disesuaikan pada kerangka pengendalian yang berlaku secara internasional atau mengikuti kerangka yang dipublikasikan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organization the Treadway Commission*). Penyesuaian

The Internal Control System is an integrated process and it is attached to the action and activity conducted continuously by the management and all employees to provide adequate faith on the objective achievement of the organisation/company through effective and efficient activities, assuring the security on assets management of the Company, reliability of the financial reporting, and compliance with laws and regulations.

Implementation of Internal Control System in Pelindo III refers to the Law No. 19 of 2003 on SOEs, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Regulation of the BOD of Pelindo III No. PER.30/HK.03/P.III-2015 dated 26 May 2015 on the General Guideline of Internal Control System in Pelindo III.

OBJECTIVES OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The objectives of the Internal Control System is as an organisational framework and financial and non-financial work operational procedure that can assure that every activity in the Company can:

- *Maintain and secure the Company's assets;*
- *Reduce the financial/loss impact, deviation, including fraud;*
- *Assure that business activities implementation of the Company comply with the prevailing laws and regulations;*
- *Provide correct, complete, and timely financial and management information;*
- *Improve efficiency, effectiveness, and frugality in the operational activity of the Company;*
- *Comprehensively improve the effectiveness of risk culture in the organisation.*

CONFORMITY OF CONTROL SYSTEM WITH INTERNATIONALLY RECOGNISED FRAMEWORK (COSO)

Infrastructure and soft structure of Internal Control System in the Company is also adjusted to the international applicable framework or follow the framework issued by COSO (Committee of Sponsoring Organisation The Treadway Commission). This conformity is aimed to provide

ini ditujukan untuk memberikan peningkatan kualitas pengendalian di internal Perusahaan serta terbentuknya pengakuan secara luas terhadap sistem pengendalian yang diterapkan Perusahaan.

Sistem Pengendalian Intern yang dirancang, ditetapkan dan diterapkan pada Perusahaan terdiri dari 5 unsur pengendalian yaitu:

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Pembentukan lingkungan organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian intern bagi Perusahaan. Perlunya hirarki pengendalian internal yang terstruktur sehingga tercipta integritas, komitmen, dan partisipasi seluruh organ Perusahaan.

2. PENILAIAN RISIKO

Kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat Perusahaan dalam mencapai tujuannya.

3. KEGIATAN PENGENDALIAN

Jaminan yang diberikan oleh Perusahaan berupa kebijakan dan sistem operasi dan prosedur guna meyakinkan Pemangku Kepentingan bahwa Perusahaan telah menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan sebagaimana mestinya.

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam proses pengambilan keputusan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan telah berupaya untuk menciptakan sistem informasi yang didasarkan pada kebijakan yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Proses informasi dan komunikasi tersebut meliputi: memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi suatu entitas di Perusahaan serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait.

5. PEMANTAUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Perusahaan terus berupaya untuk melakukan penilaian yang berkelanjutan dan periodik dalam pelaksanaan pengendalian internal serta melakukan *review* dan perubahan sesuai dengan kondisi atau hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern yang ada.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan menggunakan metode *review* berkala setiap 2 tahun sekali dan/atau terdapat perubahan perundangan yang berlaku.

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2018

Berdasarkan hasil pengawasan SPI atas bisnis proses yang berlangsung pada Pelindo III melalui Audit Terpadu yang rutin dilakukan pada seluruh Region dan Audit Tematik atas Pengelolaan Operasional dan Tematik keuangan, Manajemen telah melakukan langkah-langkah Pengendalian Internal secara baik namun belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam Evaluasi Tahunan SPI atas

the quality of internal control in the Company as well as the establishment of the wide recognition to the control system implemented by the Company.

The Internal Control System planned, established, and implemented in the Company consists of five components, namely:

1. CONTROL ENVIRONMENT

Creation of organisation environment and provision of awareness of the needs for internal control in the Company. A structured hierarchy of internal control is required in order to generate integrity, commitment, and participation of all organs of the Company.

2. RISK ASSESSMENT

Activities conducted by the Company to identify and analyse risks that hinder the Company in achieving its objectives.

3. CONTROL ACTIVITIES

Assurance by the Company in the form of policies as well as operational systems and procedures to ensure the Stakeholders that the Company has implemented the appropriate management functions.

4. INFORMATION AND COMMUNICATION

In the decision-making process for delivery of financial statements and annual reports, the Company endeavors to establish a communication system that is based on the policies determined by the Company. This information and communication process covers the activities of starting, recording, processing, and reporting the transactions of an entity in the Company as well as maintaining the accountability of the related assets.

5. MONITORING OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company strives to conduct continuous and regular assessment in regard to the implementation of internal control as well as conducting review and transformation in line with the conditions or results of evaluation on the existing internal control.

EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

Evaluation of the Effectiveness of Internal Control System is conducted using periodic review method once every two years and/or when there are changes in the prevailing laws and regulations.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2019

Based on the results of SPI supervision of the business processes that took place at Pelindo III through an Integrated Audit that was periodically carried out throughout the Region and Thematic Audit of Operational Management and Thematic Financial Management, the Management has carried out internal control measures but were not fully adequate. This is shown in the SPI Annual Evaluation of

Pengendalian Perusahaan Tahun 2019 dengan pendekatan COSO yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *Internal Control* (IC) di seluruh organisasi.

2. PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.

3. AKTIVITAS PENGENDALIAN

Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan.

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab IC-nya dalam rangka pencapaian tujuan. Sementara itu, komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan IC sehari-hari.

5. AKTIVITAS PENGAWASAN

Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen IC ada dan berfungsi.

Company Control in 2019 with COSO approach as follows:

1. CONTROL ENVIRONMENT

The control environment is a series of standards, processes, and structures that form the basis for implementing Internal Control (IC) throughout the organisation.

2. RISK ASSESSMENT

Risk assessment involves a dynamic and repetitive process for identifying and analysing risks to achieve objectives and forming a basis for how risk must be managed.

3. CONTROL ACTIVITIES

Control activities are actions that are determined by procedures and policies to ensure that management has led to mitigating risks to achieve objectives.

4. INFORMATION AND COMMUNICATION

Information is needed to carry out IC responsibilities to achieve goals. Meanwhile, communication occurs both internally and externally by providing the information needed in the context of daily IC implementation.

5. MONITORING ACTIVITY

Continuous or separate evaluation, or a combination of both, to ensure all IC components exist and function.



MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

CORPORATE RISK MANAGEMENT

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pelindo III berinisiatif untuk mulai menerapkan proses manajemen risiko perusahaan sejak tahun 2007 dengan diterbitkannya Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.11/PS.0503/P.III-2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Kebijakan dan Sistem Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan Pelindo III. Perusahaan meningkatkan upaya implementasi dari proses manajemen risiko pada tahun 2010 dengan diterbitkannya Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.15.1/PM.02/P.III-2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan Pelindo III. Selanjutnya penerapan manajemen risiko Perusahaan dapat diperkuat dengan adanya dukungan dasar dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Dasar inilah yang menjadi dorongan bagi Perusahaan dalam mengembangkan proses manajemen risiko yang melindungi sasaran Perusahaan dan menciptakan nilai tambah atau peluang di lingkungan Perusahaan.

KERANGKA DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Penciptaan dan upaya mempertahankan budaya sadar risiko menjadi perhatian Pelindo III dalam rangka mendukung tercapainya sasaran perusahaan dengan komitmen tinggi yang didukung sepenuhnya oleh Dewan Komisaris melalui Komite GCG dan Manajemen Risiko serta dukungan Jajaran Direksi secara bertahap dan berkelanjutan dengan riwayat penetapan kebijakan dan pedoman sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi No. PER.71/PM.02/P.III-2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan, yang menggantikan kebijakan tahun 2007;
2. Peraturan Direksi No. PER.89/PR.02/P.III-2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), yang menggantikan pedoman teknis tahun 2010;
3. Peraturan Direksi No. PER.0055/HK.01.06/HOFC-2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.71/PM.02/P.III-2017 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan; dan
4. Peraturan Direksi No. PER.0078/HK.01.06/HOFC-2019 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), yang menggantikan pedoman teknis tahun 2017.

GUIDELINE OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Pelindo III has taken the initiative to implement a risk management process since 2017 through the issuance of the Regulation of the BOD No. PER.11/PS.0503/P.III-2007 dated 9 July 2017 on the Corporate Risk Management Policy and System in Pelindo III. The Company has improved the implementation measures of the risk management process in 2010 through the issuance of the Regulation of the BOD of Pelindo III No. PER.15.1/PM.02/P.III-2010 dated 3 December 2010 on the Technical Guideline of Corporate Risk Management in Pelindo III. Moreover, the risk management implementation has been strengthened by the foundational support from the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on Good Corporate Governance Implementation in SOEs. The foundations are the encouragement for the Company in developing a risk management process which protects Company objectives and creating additional value or opportunities around the Company.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK AND PROCESS

The embodiment and measures to maintain risk-awareness culture become a concern for Pelindo III in supporting the achievement of company objectives through high commitment that is fully supported by the BOC through the GCG and Risk Management Committee as well as support from the BOD in stages and continuously with the following history on policy and guideline determination:

1. Regulation of the BOD No. PER.71/PM.02/P.III-2017 dated 13 October 2017 on the Risk Management Policy which replaced the 2017 policy;
2. Regulation of the BOD No. PER.89/PR.02/P.III-2017 dated 12 December 2017 on the Technical Guideline of Risk Management in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) which replaced the 2010 policy;
3. Regulation of the BOD No. PER.0055/HK.01.06/HOFC-2019 dated 27 September 2019 on Amendment to Regulation of the BOD of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.71/PM.02/P.III-2017 on the Risk Management Policy; and
4. Regulation of the BOD No. PER.0078/HK.01.06/HOFC-2019 on the Technical Guideline for Integrated Risk Management in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) which replaced the 2017 technical guideline.

Penerapan manajemen risiko di Pelindo III memperhatikan perkembangan terhadap pendekatan standar yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan praktik terbaik dari implementasinya. Pada tahun 2019, Pelindo III melakukan pembaruan dalam menggunakan pendekatan standar dari SNI ISO 31000:2011 Manajemen Risiko – Prinsip dan Pedoman menjadi pendekatan SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 Manajemen Risiko – Pedoman. Pelindo III menggunakan standar SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 dalam membangun dan memelihara kebijakan beserta proses manajemen risiko yang diterapkan di lingkungan perusahaan.

Risk management implementation in Pelindo III considers the developments in the standard approaches utilised by organisations or companies which may provide the best implementation practices. In 2019 Pelindo III has renewed the standard approaches implementation of ISO 31000:2018 Risk Management – Principles and Guideline into SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 Risk Management – Guideline. Pelindo III adopts the SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 standards in establishing and maintaining the policy and process of risk management implemented in the company's vicinity.

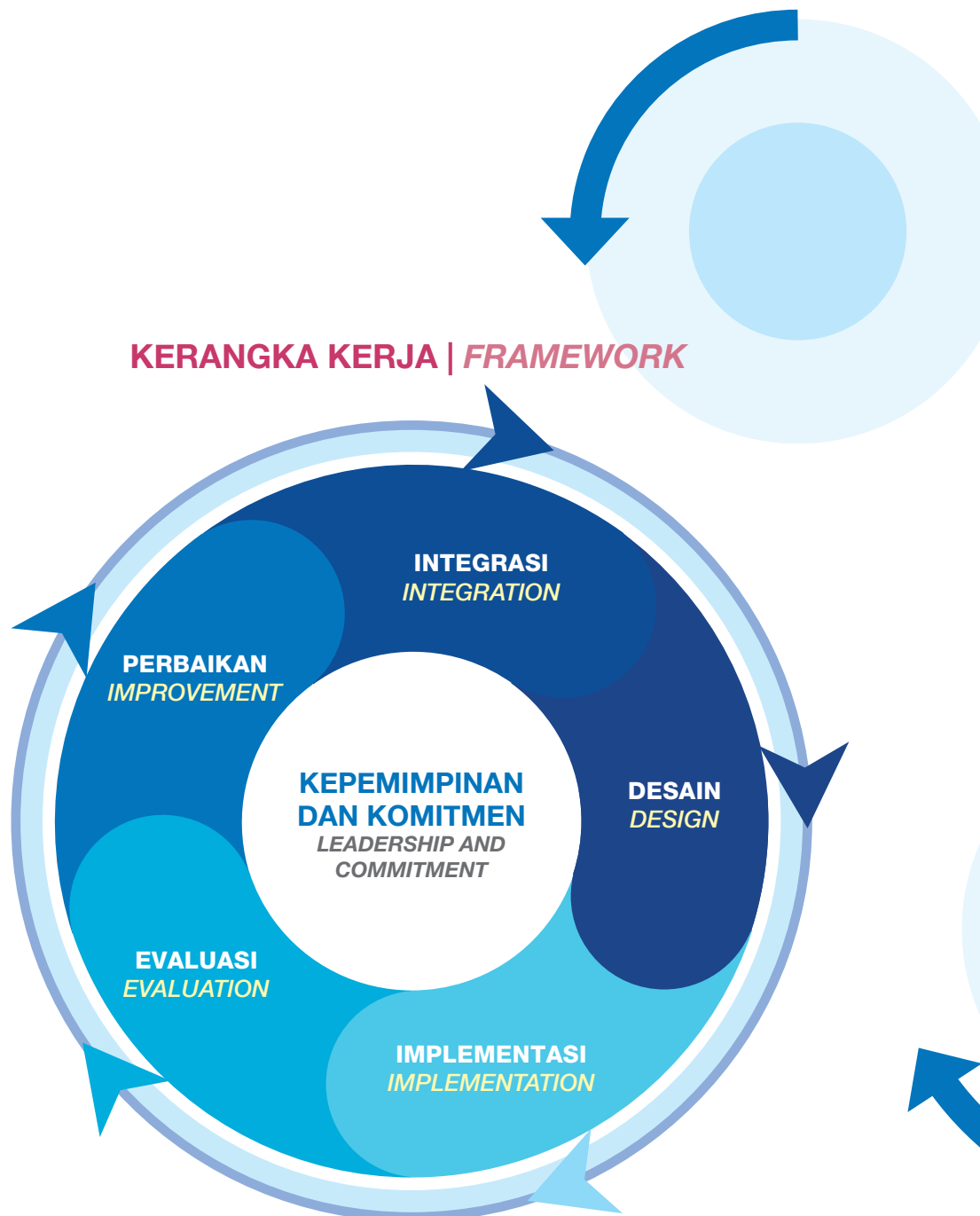


Prinsip yang harus dibudayakan oleh Manajemen Perusahaan dalam rangka melindungi sasaran Perusahaan dan menciptakan nilai tambah atau peluang bagi Perusahaan yaitu manajemen risiko dilaksanakan secara terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan (*tailor made*), inklusif, dinamis, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhatikan faktor manusia dan budaya, serta dilakukan perbaikan berkelanjutan. Pembudayaan sadar risiko dijalankan melalui serangkaian kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan untuk dapat diterapkan pada seluruh bagian di lingkungan perusahaan dengan penggambaran di bawah ini.

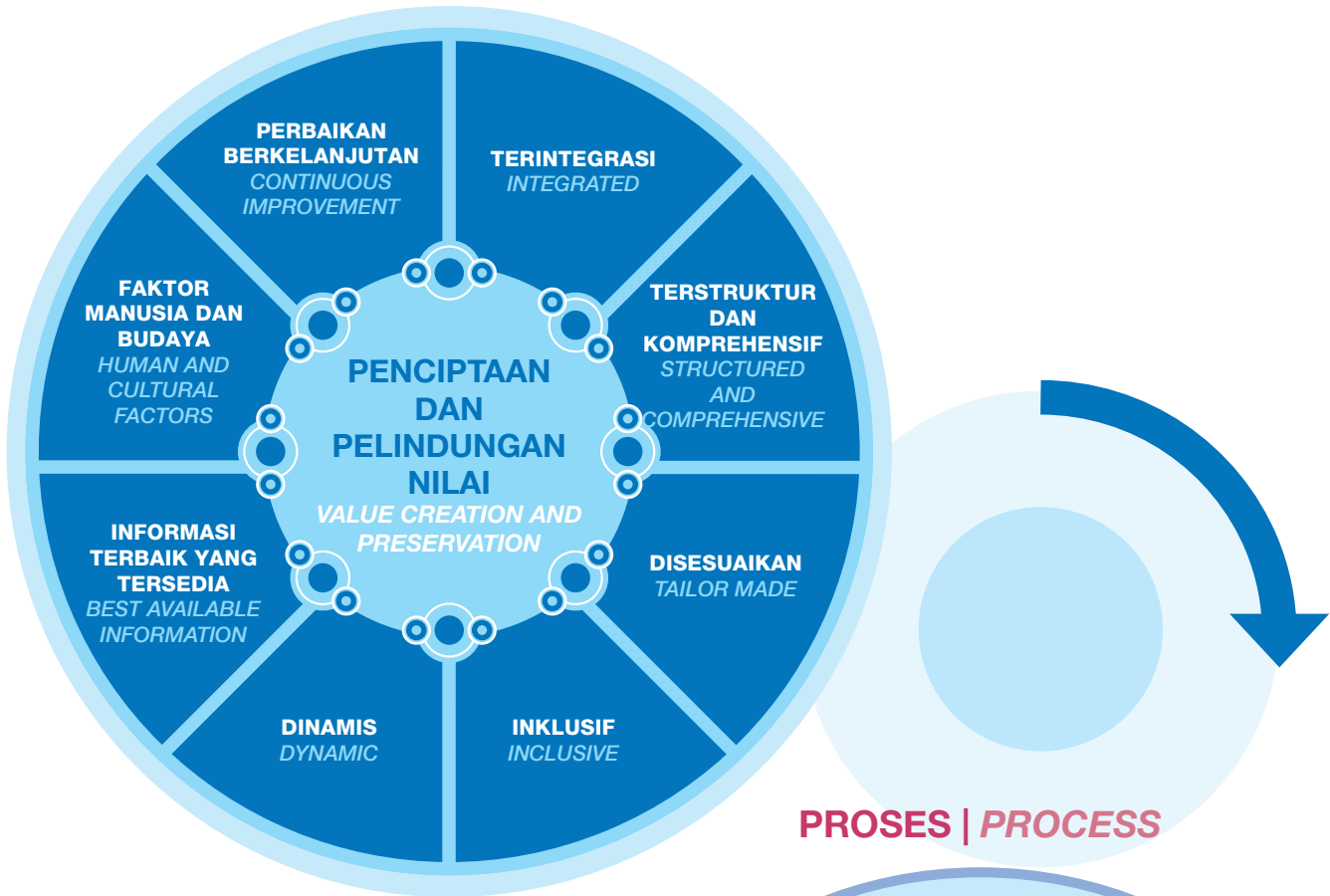
The principle that must be cultivated by the management in safeguarding Company goals and creating added value or opportunity for the Company is that risk management must be implemented in an integrated, structured and comprehensive, tailor-made, inclusive, dynamic, based on the best available information, considers human and cultural factors, as well as conducting continuous improvement. The risk awareness culture is carried out through a series of risk management framework and processes set by the BOD to be implemented in all company environment with the following illustration:



KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN COMPANY RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

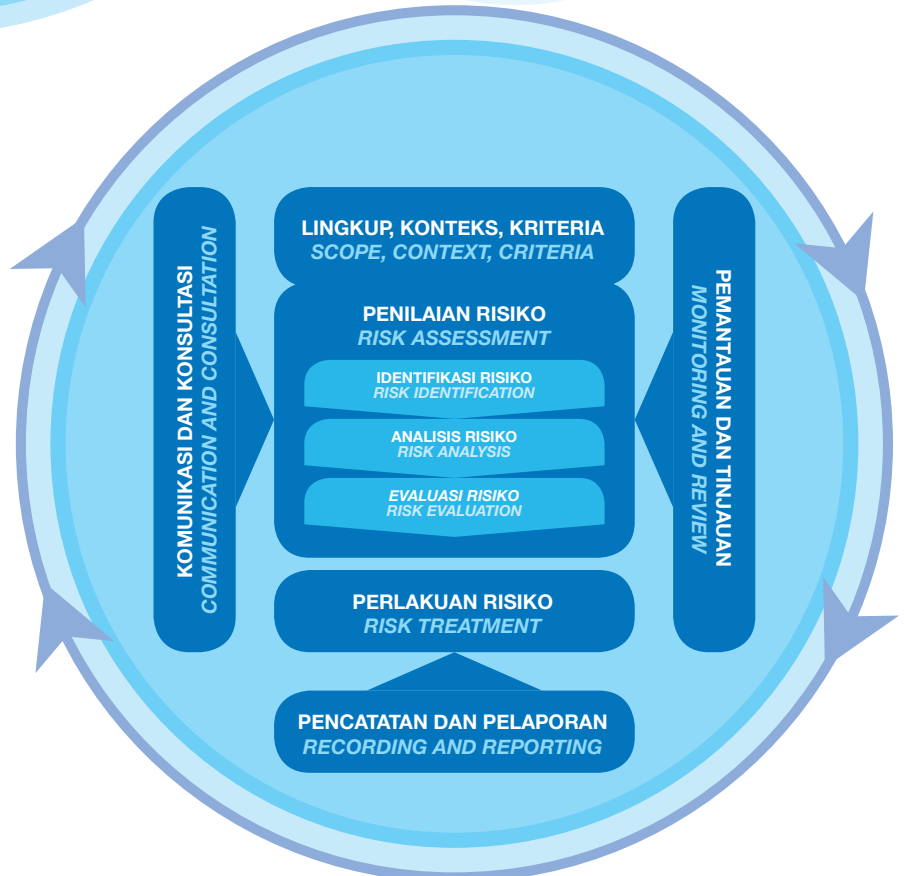


PRINSIP | PRINCIPLES



PROSES | PROCESS

SNI 8615:2018
ISO 31000:2018



Perkuatan untuk penerapan sistem manajemen risiko di Pelindo III memperhatikan selera risiko Direksi dan toleransi risiko Direksi sebagai penentu arah kebijakan dalam merencanakan dan menangani risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan.

SELERA RISIKO DIREKSI PELINDO III

Pengambilan keputusan untuk menjalankan pemenuhan kinerja bisnis utama dan diversifikasi bisnis baru yang potensial sesuai target KPI dengan cara mempertimbangkan semua opsi bisnis potensial yang memberikan tingkat *reward* yang dapat diterima. Hal ini karena Perusahaan telah melakukan langkah-langkah pengendalian yang tepat sesuai prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

The strengthening of risk management system implementation in Pelindo III considers the risk appetite and risk tolerance of the BOD to determinate the policy direction in planning and handling Company risks.

RISK APPETITE OF PELINDO III BOD

The decision-making to carry out the fulfilment of key business performance and potential new business diversification under the KPI targets by considering all potential business options that provide an acceptable level of reward. This is because the Company has conducted appropriate control measures following the procedures and good corporate governance (GCG).

SIKAP SELERA RISIKO DIREKSI PELINDO III

RISK APPETITE ATTITUDE OF PELINDO III BOD



TOLERANSI RISIKO DIREKSI PELINDO III

Penerimaan risiko mempertimbangkan toleransi nilai dan tingkat risiko yang berada di bawah tingkat risiko menengah dengan pengendalian *existing* yang konsisten dan dapat dipertahankan. Risiko yang belum dapat ditoleransi mempertimbangkan nilai dan tingkat risiko yang berada pada tingkat risiko menengah ke atas, sehingga diperlukan peninjauan dan perbaikan pengendalian *existing* serta penanganan lebih lanjut melalui tahapan mitigasi.

RISK TOLERANCE OF PELINDO III BOD

Risk acceptance considers the value tolerance and risk level under the medium risk level with consistent and maintained existing control. Risks which cannot be tolerated considers the value and risk levels in the medium-up level, hence further review and improvement on existing control and handling are necessary through the mitigation phase.

PENETAPAN SELERA RISIKO DAN TOLERANSI RISIKO DETERMINATION OF RISK APPETITE AND TOLERANCE

Matriks (Peta) Risiko | Risk Matrix (Map)



Keterangan:

- Area di bawah dan sebelah kiri garis biru merupakan area toleransi risiko diterima dengan adanya/tanpa pengendalian *existing*.
- Area di atas dan sebelah kanan garis biru merupakan area di luar toleransi risiko sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.

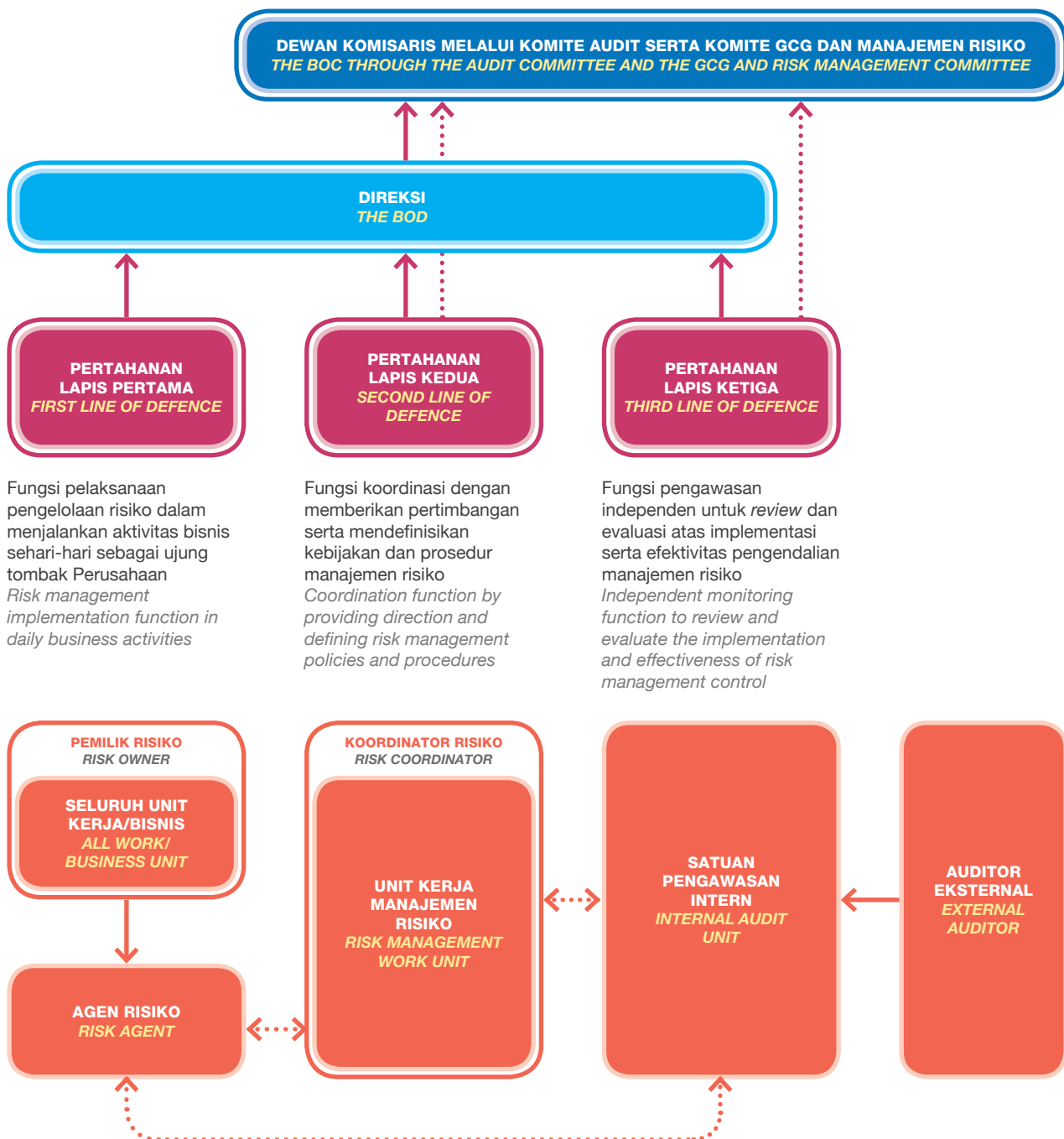
Information:

- Areas under and left side of the blue line are the accepted risk tolerance areas with/without existing control.
- Areas above and right side of the blue line are areas beyond risk tolerance and further handling is necessary.

Selanjutnya, berdasarkan kebijakan dan pedoman teknis terkait manajemen risiko termasuk di dalamnya dengan adanya selera risiko Direksi dan toleransi risiko Direksi, maka implementasi dari praktik manajemen risiko di lingkungan perusahaan secara konsisten dilaksanakan dengan akuntabilitas proses manajemen risiko yang melekat pada setiap bagian organisasi di perusahaan melalui pendekatan model pertahanan 3 lapis (*three lines of defence*) dengan gambaran sebagaimana gambar di bawah ini:

Moreover, based on the technical policy and guideline related to risk management, including the risk appetite and tolerance of the BOD, the risk management implementation and practices in the company is consistently conducted through a risk management process accountability attached on each organisational body of the company through the following three lines-of-defence approaches:

STRUKTUR AKUNTABILITAS MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT ACCOUNTABILITY STRUCTURE



RISIKO-RISIKO UTAMA PERUSAHAAN

Melihat salah satu prinsip Manajemen Risiko yaitu bersifat dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan, maka pengelolaan risiko selalui diperbarui sejalan dengan perubahan tujuan atau sasaran Perusahaan. Gambaran deskripsi risiko dan mitigasinya secara generik dan dalam lingkup korporasi Perusahaan dapat ditunjukkan pada tabel sederhana sebagai berikut:

MAIN COMPANY RISKS

Since one of the risk management principles is dynamic, repetitive, and responsive to changes, therefore, risk management is always updated to be in line with the change in objectives or targets of the Company. Risk description and action plan/its mitigation in general and in the corporate scope of the Company is demonstrated in the following table:

RISIKO DAN UPAYA MITIGASI RISK AND MITIGATION MEASURES

NO.	RISIKO RISK	PELAKSANAAN MITIGASI MITIGATION IMPLEMENTATION
1.	Insiden kegiatan operasional dan kecelakaan kerja tingkat <i>fatality</i> <i>Incidents during operational activity and fatality-level work accident</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan implementasi <i>Daily Safety Activity</i> (<i>Safety Induction, Safety Talk, Safety Patrol, dan Inspection</i>) termasuk program kampanye budaya dan promosi K3. 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pemantauan lingkungan kerja di area Dermaga. 3. Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkait kepatuhan dan pelanggaran K3. 4. Standardisasi, <i>Monitoring</i>, dan Evaluasi ketersediaan sarana/prasarana K3 seperti: Rambu, APD, dan lain-lain di area Dermaga. 5. Menyiapkan SOP Pengelolaan barang Berbahaya sesuai <i>IMDG Code</i> termasuk pelatihan <i>IMDG Code</i> kepada petugas yang akan mengelola barang berbahaya. 6. Membuat <i>barrier</i> untuk setiap akses keluar masuk di pelabuhan/terminal. 7. Pelaksanaan audit internal berkala secara konsisten beserta tindak lanjutnya terhadap pemenuhan klausul dalam standar sertifikasi yang telah diadopsi oleh Pelindo III. 8. Melakukan peninjauan dan perbaikan prosedur kegiatan operasional dan HSSE yang memperhatikan pembelajaran adanya insiden kecelakaan untuk <i>property damage</i> fatal di TPKS. 9. Meningkatkan kegiatan verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan fasilitas dan peralatan di pelabuhan dalam rangka kelancaran kegiatan operasional. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Improving the implementation of Daily Safety Activity (Safety Induction, Safety Talk, Safety Patrol, and Inspection) including K3 culture campaign and promotion programme.</i> 2. <i>Monitoring and Evaluation of the work environment in the Wharf area.</i> 3. <i>Reward and punishment related to K3 compliance and violation.</i> 4. <i>Standardisation, Monitoring, and Evaluation on availability of K3 infrastructure/facilities such as Sign, APD, etc. in the Wharf area.</i> 5. <i>Preparing the SOP for Dangerous Goods Handling according to the IMDG Code, including IMDG Code training to staffs who will handle dangerous goods.</i> 6. <i>Constructing barriers for each entry-exit access in ports/terminals.</i> 7. <i>Consistent implementation of periodic internal audit along with their follow up on the clause fulfilment in the certification standards adopted by Pelindo III.</i> 8. <i>Review and improve the operational and HSSE activity procedures which consider the learning from accidents resulting in fatal property damage in TPKS.</i> 9. <i>Improving the verification and evaluation of facility and equipment eligibility in ports to ensure the smoothness of operational activities.</i>

NO.	RISIKO RISK	PELAKSANAAN MITIGASI MITIGATION IMPLEMENTATION
2.	<p>Penolakan pengguna jasa terhadap penyesuaian tarif yang diusulkan Perusahaan</p> <p><i>Service user rejection against tariff adjustments proposed by the company</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara aktif melaporkan segala hal terkait usaha menaikkan tarif kepada kantor pusat c.q. Subdit Pemasaran untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan BUP Pelindo III sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat. 3. Meningkatkan kemampuan personel dalam melakukan kegiatan pemasaran untuk menarik pengguna jasa baru. 4. Menyampaikan <i>Service Level Agreement-Service Level Guarantee (SLA/SLG)</i> pelayanan jasa kepelabuhanan sebagai bentuk peningkatan pelayanan. 5. Dalam penyampaian rencana kenaikan tarif kepada Pemangku Kepentingan menggunakan pendekatan personal kepada ketua asosiasi dengan menyampaikan bahwa alasan rencana kenaikan tarif ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan telah sesuai dengan peraturan perundangan tentang tarif jasa kepelabuhanan. 6. Menyampaikan data inflasi provinsi dan nasional serta kenaikan harga bahan baku strategis seperti BBM, TKBM, dan lain-lain yang memengaruhi harga pokok produksi jasa kepelabuhanan selama periode tidak naiknya tarif. 7. Menerapkan <i>single tariff</i> untuk setiap pelayanan jasa yang sama. 8. Proaktif melakukan sinergi dengan instansi pemerintah setempat seperti Otoritas Pelabuhan, Pemerintah Daerah, dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) terkait penertiban dermaga pinggiran yang ilegal dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. 9. Proaktif berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam upaya memberantas pungli di pelabuhan. 10. Membuat kerja sama strategis bisnis antarmoda angkutan barang dari dan ke pelabuhan seperti dengan PT KAI dan JPT, termasuk dengan perusahaan pelayaran dalam rangka mendukung penyediaan fasilitas logistik yang terintegrasi. 11. Peningkatan kegiatan studi pemasaran-perencanaan korporat untuk meningkatkan portofolio bisnis logistik secara terintegrasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Actively reporting everything related to the measures to raise the tariff to the head office c.q. Marketing Sub-Directorate to gain further direction.</i> 2. <i>Improving the BUP service quality of Pelindo III as a loading-unloading executor.</i> 3. <i>Improving personnel ability in marketing to obtain new service users.</i> 4. <i>Present the Service Level Agreement-Service Level Guarantee (SLA/SLG) of port services as a form of service improvement.</i> 5. <i>Utilising personal approach to the head of the association in delivering the plan to raise the tariff to the Stakeholders by explaining that the plan is a measure to improve service quality to service users and is under the laws and regulation on port services tariff.</i> 6. <i>Delivering the provincial and national inflation data as well as rising strategic resources price such as fuel, TKBM, etc. which also influence the cost of port services during the period in which the tariff has not been raised.</i> 7. <i>Enforce single tariff for the same service.</i> 8. <i>Proactively synergising with local government agencies such as the Port Authority, Regional Government, and Port Security Implementation Unit (KSSP) related to curb illegal fringe docks to improve shipping safety and security.</i> 9. <i>Proactively coordinating with government agencies related to the measures to eradicate illegal fees in ports.</i> 10. <i>Drafting strategic intermodal business cooperation for goods transportation from and to ports such as cooperation with PT KAI and JPT, including with shipping companies to support the provision of an integrated logistics facility.</i> 11. <i>Improvement of corporate marketing-planning study to improve the integrated logistics business portfolio.</i>

NO.	RISIKO <i>RISK</i>	PELAKSANAAN MITIGASI <i>MITIGATION IMPLEMENTATION</i>
3.	Defisit arus kas perusahaan <i>Company cash flows deficit</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan bertahap untuk penyusunan RKAP berbasis risiko. 2. Menyusun Pedoman RKAP Berbasis Risiko sebagai rencana implementasi bertahap yang nantinya juga dapat diterapkan di anak perusahaan. 3. Tindak lanjut dan evaluasi hasil studi yang melibatkan konsultan eksternal dalam rangka menentukan strategi untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan struktur elemen dalam arus kas. 4. Konsisten melaksanakan rapat peninjauan kinerja operasi dan komersial secara berkala antara kantor pusat dan regional beserta pelabuhan/terminal melalui <i>video conference</i>. 5. Menyusun dan menginformasikan berbagai rasio keuangan dengan beberapa skenario untuk diketahui oleh seluruh Direksi sebagai pertimbangan dalam pengelolaan bisnis perusahaan dan meneruskannya sesuai filter yang relevan kepada setiap pejabat struktural di kantor pusat dan regional berdasarkan ruang lingkup kinerja pelabuhan-terminal masing-masing dalam satu regional. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Improving awareness through socialisation and coordination for a gradual improvement of risk-based RKAP drafting.</i> 2. <i>Arrangement of Risk-Based RKAP Guideline as a gradual plan implementation which can be implemented in subsidiaries.</i> 3. <i>Following up and evaluating the study result involving an external consultant in determining the strategy to follow up on the recommendation of element structure improvement in cash flows.</i> 4. <i>Consistently convening periodic operations and commercial performance monitoring meeting between the head office, regional office, and ports/terminal through video conference.</i> 5. <i>Arranging and informing various financial ratio in several scenarios for the BOD as a consideration in company business management and transmitted them through a relevant filter to every structural officer in the head office and regional office based on the respective port-terminal performance scope in a region.</i>
4.	Sengketa lahan/aset <i>Land/assets dispute</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proaktif melaksanakan kegiatan gabungan antarbagian dalam memantau pengamanan HPL/aset Pelindo III. 2. Memastikan pemantauan dan pengecekan pemenuhan dokumen sah yang dimiliki oleh Pelindo III dengan dukungan kerja sama instansi berwenang. 3. Melakukan perencanaan dan melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan eksternal, termasuk pengamanan dalam rangka melakukan upaya penertiban. 4. Meningkatkan koordinasi untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat maupun pejabat negara di pemerintahan yang berwenang dengan adanya pengembangan pelabuhan yang dapat memberikan kontribusi yang lebih baik apabila lahan HPL Pelindo III yang ditempati oleh oknum tidak berkepentingan dapat ditertibkan. 5. Meningkatkan pemantauan dan verifikasi berkala di lapangan terhadap kesesuaian setiap kontrak yang terjadi dalam pemanfaatan HPL/HGB dan segera melakukan pelaporan maupun koordinasi terhadap munculnya ketidaksesuaian. 6. Memantau dan memastikan telah ada tahapan upaya yang dilakukan di lingkungan Pelindo III termasuk oleh regional dan pelabuhan/terminal dalam mendapatkan dokumen sertifikat, baik untuk HPL/HGB maupun induk dokumen lainnya seperti IMB yang selanjutnya dikoordinasikan secara berkala dengan Kantor Pusat. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Proactively conducting joint activities between sections in monitoring the security of Pelindo III HPL/assets.</i> 2. <i>Ensuring the monitoring and checking of legal documents fulfilment by Pelindo III with support from authorised institutions.</i> 3. <i>Planning and involving various external Stakeholders, including security in curbing measures.</i> 4. <i>Coordinating the approach and socialisation with public figures and authorised state officials in the government for development of ports with a better contribution if the HPL Land owned by Pelindo III currently occupied by unauthorised people can be put to order.</i> 5. <i>Improving periodic monitoring and verification in the field with the suitability of each contract in HPL/HGB utilisation and promptly report and coordinate the discrepancies.</i> 6. <i>Monitoring and ensuring that there are stages of measures conducted in Pelindo III, including by the regions and ports/terminals in obtaining certification documents, both for HPL/HGB or other parent documents such as IMB which will be periodically coordinated with the Head Office.</i>

NO.	RISIKO RISK	PELAKSANAAN MITIGASI MITIGATION IMPLEMENTATION
5.	Persaingan bisnis dengan kompetitor <i>Business competition with competitors</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kegiatan pemasaran melalui perbaikan struktur organisasi pemasaran yang dilengkapi tenaga <i>executive marketing</i> yang andal beserta insentif yang diberikan dengan pemantauan dan evaluasi berdasarkan laporan upaya pencapaian yang disampaikan ke Pemasaran Kantor Pusat. 2. <i>Site visit</i> ke lokasi pelabuhan-terminal, <i>hinterland</i>, dan <i>sharing session</i> oleh Kantor Pusat beserta regional-pelabuhan dalam rangka memperkuat relasi dan penciptaan kerja sama pengelolaan yang dikaji-ulang secara berkala untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di sekitar lokasi pelabuhan-terminal. 3. Memantau perkembangan terhadap adanya rencana perubahan peraturan oleh Kementerian Perhubungan terkait penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat untukantisipasi dan koordinasi cepat apabila terdapat isu yang berkonsekuensi negatif terhadap keberlangsungan PBM Pelindo III dengan menyiapkan beberapa alternatif skema sinergi kerja sama dengan PBM Non-Pelindo III. 4. Melakukan peninjauan terhadap kinerja bisnis di pelabuhan/terminal untuk selanjutnya menyusun alternatif perbaikan dalam hal penyesuaian struktur organisasi di pelabuhan beserta ruang lingkup bisnisnya untuk mendukung peningkatan kinerja. 5. Meningkatkan komitmen rencana kerja sama melalui program sinergi dengan perusahaan-perusahaan BUMN sebagai peningkatan portofolio bisnis yang mendukung pelaksanaan integrasi rantai pasokan dan dalam upaya penurunan biaya logistik seperti sinergi dengan Holding BUMN Migas dan Holding BUMN Pertambangan. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Improving marketing activities through improvement on marketing organisational structure complemented with reliable executive marketing along with the provided incentives through monitoring and evaluation based on the achievement report submitted to Head Office Marketing.</i> 2. <i>Site visit to ports-terminals, hinterlands, and sharing session by the Head Office along with the regions/ports to strengthen the relationship and creation of regularly-reviewed management cooperation to know the developments occurring around ports-terminal locations.</i> 3. <i>Monitoring the development on the plan to amend the regulation by the Ministry of Transportation related to loading-unloading operations for rapid anticipation and coordination if there are issues with negative consequences to Pelindo III PBM by preparing several alternatives for cooperation energy schemes with Non-Pelindo III PBM.</i> 4. <i>Reviewing the business performance in ports/terminals to consequently prepare an improvement alternative for adjustment in the port structural organisation along with their business scope to encourage performance improvement.</i> 5. <i>Improving cooperation plan commitment through synergy programmes with SOEs to improve business portfolio which will then improve the implementation of supply chain integration and in the effort to reduce logistics fees, such as through synergy with Oil and Gas Holding SOE and Mining Holding SOE.</i>

NO.	RISIKO <i>RISK</i>	PELAKSANAAN MITIGASI <i>MITIGATION IMPLEMENTATION</i>
6.	<p>Gangguan fungsi teknologi informasi dan komunikasi <i>Disruption in the information and communication technology function</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban jadwal <i>backup</i> dan pembuatan jadwal pengujian <i>restore</i> secara bertahap untuk setiap layanan aplikasi TIK. 2. <i>Security testing</i> dan <i>performance test</i> wajib dilaksanakan sebelum <i>go live</i> dan berkala. 3. Pelaksanaan <i>switch over</i> ke DC site dengan jumlah I/O device yang lebih banyak dibandingkan I/O device di DRC site sehingga <i>input-output operation per second</i> (IOPS) meningkat. 4. Memberikan pelatihan terhadap kesiapan dan simulasi tanggap darurat bidang TIK kepada pelabuhan-terminal dan bidang lainnya seperti evakuasi personel dan langkah pemulihan setelah keadaan darurat. 5. Pengarahan dan pelaksanaan simulasi prosedur manual di pelabuhan/terminal secara berkala oleh regional sesuai cakupan pelabuhan/terminal masing-masing. 6. Koordinasi gabungan tingkat Kantor Pusat untuk kebijakan saat manajemen krisis. 7. Peningkatan bertahap untuk penerapan <i>Business Continuity Plan</i> melalui penyusunan prosedur BCP di pelabuhan/terminal. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Control on backup schedules and scheduling the restoring testing in stages for every TIK app service.</i> 2. <i>Obligated security testing and performance testing before go-live conducted periodically.</i> 3. <i>Implementation of switch over to DC site with more I/O devices compared I/O devices in the DRC site to increase input-output operation per second (IOPS).</i> 4. <i>Providing training on emergency response preparedness and simulation in TIK to ports-terminals and other sections such as employee evacuation and recovery measures after an emergency.</i> 5. <i>Periodic briefing and simulation on the manual procedure in ports-terminals by each region following their respective scope.</i> 6. <i>Joint coordination in Head Office level for policy during crisis management.</i> 7. <i>Gradual improvement for implementation of Business Continuity Plan through BCP drafting procedure in ports-terminals.</i>
7.	<p>Bencana alam yang memengaruhi keandalan fasilitas <i>Natural disasters affecting facilities' reliability</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dalam menghadapi kondisi darurat. 2. Simulasi pelaksanaan tanggap darurat yang melibatkan Pemangku Kepentingan pelabuhan. 3. Pemantauan dan pengecekan aset pelabuhan termasuk dalam hal perlindungan asuransinya. 4. Peningkatan koordinasi dengan BMKG untuk pembaruan informasi secara cepat dan sebagai <i>early warning</i>. 5. Pembangunan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) secara bertahap seperti dengan dilakukannya penyusunan prosedur BCP secara bertahap yang dimulai dengan tingkat pelabuhan/terminal peti kemas. 6. Evaluasi umur aset yang memperhatikan kewajiban dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan berkala di luar adanya kerusakan karena bencana alam. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Training to face emergency conditions.</i> 2. <i>Simulation of emergency response implementation involving port Stakeholders.</i> 3. <i>Monitoring and checking on port assets including in protecting their insurance.</i> 4. <i>Coordinating with BKMG for correct and rapid information update as an early warning.</i> 5. <i>The gradual establishment of Business Continuity Plan (BCP) such as by gradually drafting BCP procedures starting from the container ports/terminal level.</i> 6. <i>Evaluation of assets age by considering the requirement to conduct periodic care and maintenance outside any damage due to a natural disaster.</i>

NO.	RISIKO RISK	PELAKSANAAN MITIGASI MITIGATION IMPLEMENTATION
8.	<p>Peningkatan keluhan pengguna jasa yang memengaruhi reputasi perusahaan</p> <p><i>Increase in service user complaints that affect the company's reputation</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan oleh konsultan independen secara berkala. 2. Pemantauan tindak lanjut pemenuhan keluhan pelanggan, baik yang dihasilkan dari survei kepuasan pelanggan maupun dalam pengelolaan keluhan pelanggan di masing-masing tempat pelayanan operasional pelabuhan. 3. Pelaksanaan audit internal yang juga berdasarkan standar sistem manajemen mutu 9001:2015 dalam rangka perbaikan berkelanjutan. 4. Melakukan <i>refreshing</i> terhadap pelaksanaan <i>Customer Relationship Management (CRM)</i> pada masing-masing regional yang juga diteruskan kepada tim Pelabuhan/Terminal. 5. Pelaksanaan <i>customer gathering</i> yang juga dapat dilakukan secara spesifik berdasarkan segmen layanan atau per komoditas untuk dapat mengetahui kebutuhan peningkatan layanan secara tepat. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Conducting periodic customer satisfaction survey with an independent consultant.</i> 2. <i>Monitoring the follow-up to customer complaints, both from a customer satisfaction survey or from the management of customer complaints in every port operations service.</i> 3. <i>Internal audit implementation based on the 9001:2015 quality management system for continuous improvement.</i> 4. <i>Refreshing to Customer Relationship Management (CRM) implementation in every region forwarded to the Ports/Terminals team.</i> 5. <i>Customer gathering implementation which can also be conducted specifically based on their service segment or commodity to correctly understand the need for service improvement.</i>
9.	<p>Keterlambatan penyelesaian proyek</p> <p><i>Late investment project completion</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi antarbagian termasuk dengan Komite Investasi dalam setiap tahapan manajemen proyek. 2. Pemantauan realisasi proyek yang dapat dilakukan secara terintegrasi dan terinformasi secara <i>up to date</i> untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. 3. Pelaporan profil pencapaian proyek secara bulanan yang ditingkatkan menjadi informasi per <i>project</i> dengan detail masing-masing <i>project coordinator</i> atau <i>project manager</i> yang terkait. 4. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan maupun sertifikasi manajemen proyek yang relevan. 5. Memastikan setiap usulan pekerjaan proyek investasi untuk regional dan terminal telah memperhatikan kesesuaian jumlah waktu yang diperlukan dalam memenuhi persyaratan perizinan eksternal untuk pengambilan keputusan dalam penetapan periode proyek akan dilaksanakan. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Improving inter-section coordination, including with the Investment Committee, in every stage of project management.</i> 2. <i>Project realisation monitoring which can be conducted in an up-to-date integrated and informed manner for quick decision-making.</i> 3. <i>Monthly reporting of project achievement profile which is improved by per project information with details on related project coordinator or project manager.</i> 4. <i>Improving Human Capital competency through relevant training or certification on project management.</i> 5. <i>Ensuring that every investment project proposal in regional and terminal level has considered the suitability of the required amount of time in fulfilling the external licensing requirement for decision-making in the period determination for projects which will be carried out.</i>

NO.	RISIKO <i>RISK</i>	PELAKSANAAN MITIGASI <i>MITIGATION IMPLEMENTATION</i>
10.	Pelanggaran ketentuan/ prosedur operasional <i>Operational rules/ procedures violation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan prosedur dari perubahan proses bisnis melalui konsultan pendamping independen yang telah memiliki pengalaman dalam evaluasi proses bisnis khususnya di Pelindo III. 2. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada para pegawai terkait pembaruan kebijakan maupun prosedur dengan pendampingan unit Manajemen Perubahan untuk turut mengawal proses transformasi maupun budaya dalam melaksanakan proses bisnis. 3. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada pengguna jasa terkait SLA SLG termasuk ketentuan terkait tata kelola yang baik di Pelindo III. 4. Memastikan induksi telah dilakukan terhadap setiap tahapan pekerjaan yang melibatkan pihak eksternal dalam melakukan pekerjaan di dalam perusahaan terkait keamanan data, informasi, dan langkah-langkah koordinasi yang diperlukan. 5. Mendorong peningkatan sistem terintegrasi dalam pemantauan terhadap keseluruhan kinerja layanan melalui implementasi <i>Port Operation Command Center</i> (POCC) secara bertahap untuk seluruh regional yang juga dimaksudkan untuk meminimalkan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian pelayanan sesuai prosedur perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Procedure improvement from the change in business processes through an independent consultant with experience in evaluating business process, particularly in Pelindo III.</i> 2. <i>Periodic socialisation to employees on policy and procedure updates with the Change Management Unit to oversee the transformation process and culture in carrying out business processes.</i> 3. <i>Periodic socialisation to service users related to SLA SLG including regulations related to good corporate governance in Pelindo III.</i> 4. <i>Ensuring that induction has been conducted in every stage of work involving an external party within the Company related to data security, information, and necessary coordination measures.</i> 5. <i>Encouraging improvement of integration system in overall monitoring on all service performance through gradual implementation of Port Operation Command Center (POCC) on all regions to minimise any violation or service mismatch with the company procedures.</i>

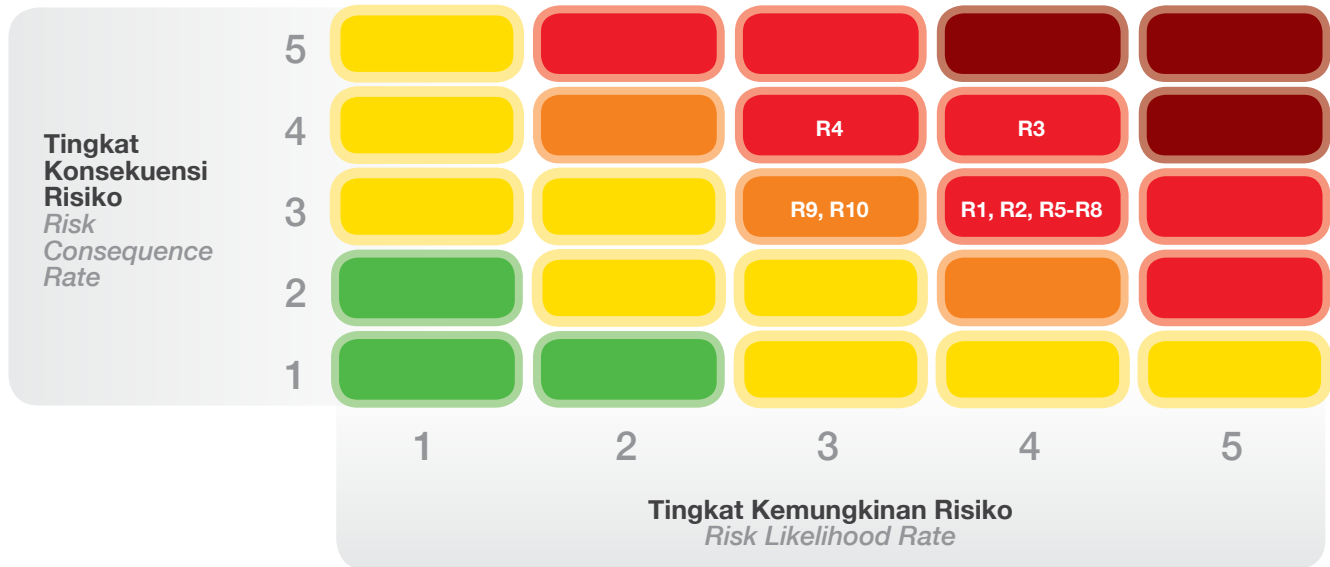
Tingkat risiko dapat divisualisasikan melalui peta risiko atau matriks sebagai gambaran profil risiko dengan kisaran posisi konsekuensi dan kemungkinan kejadian dari risiko tersebut. Berikut adalah peta risiko sebelum dilakukan mitigasi:

Risk level may be visualised through a risk map or matrix as an overview of risk profile with a range of position consequences and the likelihood of risk occurrence. Below is the risk map before mitigation is conducted:

PETA RISIKO SEBELUM MITIGASI

RISK MAP BEFORE MITIGATION

Matriks (Peta) Risiko | Risk Matrix (Map)



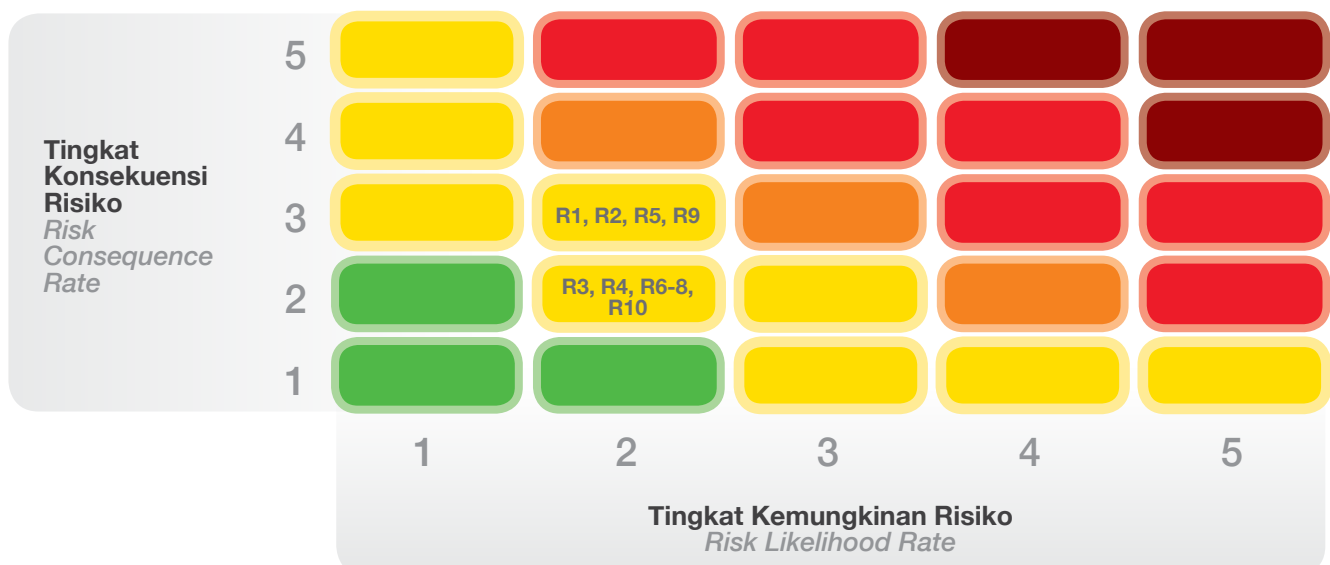
Dari peta risiko tersebut, terlihat bahwa terdapat 8 risiko sangat tinggi dan 2 risiko menengah. Berikut adalah peta risiko setelah dilakukan mitigasi:

From the risk map, it can be seen that there are 8 high risks and 2 medium risks. Below is the risk map after mitigation is conducted:

PETA RISIKO SETELAH MITIGASI

RISK MAP AFTER MITIGATION

Matriks (Peta) Risiko | Risk Matrix (Map)



Setelah mitigasi dilakukan, terlihat bahwa terdapat penurunan tingkat risiko dengan identifikasi 10 risiko rendah.

After mitigation is conducted, it can be seen that there is a decrease in risk level with the identification of ten low risks.

REVIEW TERHADAP SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan pengukuran tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Pelindo III pada tahun 2019 telah dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan antara lain review dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dengan alat ukur yang dimiliki oleh Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perusahaan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

Komponen yang diukur terdiri dari 8 komponen antara lain lingkungan internal, penetapan sasaran, identifikasi peristiwa, penaksiran risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dengan masing-masing aspek yang telah ditentukan dan disepakati antara Pelindo III dengan BPKP Jawa Timur. Hasil pengukuran yang dilakukan BPKP yaitu menghasilkan skor 3,47 dengan tingkat kematangan "Defined" yang terbagi atas komponen sebagai berikut:

1. Komponen Lingkungan Internal (bobot 25%): menghasilkan skor 3,80
2. Komponen Penetapan Sasaran (bobot 15%): menghasilkan skor 4,00
3. Komponen Identifikasi Peristiwa (bobot 10%): menghasilkan skor 3,96
4. Komponen Penaksiran Risiko (bobot 10%): menghasilkan skor 3,79
5. Komponen Respon Risiko (bobot 10%): menghasilkan skor 3,40
6. Komponen Aktivitas Pengendalian (bobot 10%): menghasilkan skor 2,70
7. Komponen Informasi dan Komunikasi (bobot 10%): menghasilkan skor 4,25
8. Komponen Pemantauan (bobot 10%): menghasilkan skor 1,88

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan BPKP di atas, dapat diketahui bahwa komponen yang masih berada di bawah skor 3,50 yaitu terhadap skor dari komponen pemantauan, komponen aktivitas pengendalian, dan komponen respon risiko. Oleh karena itu, pada tahun mendatang diperlukan rencana aksi untuk dapat melakukan perbaikan khususnya terhadap ketiga komponen dimaksud. Keseluruhan penilaian tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini.

REVIEW ON THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The measurement on risk management maturity level in Pelindo III in 2019 has been conducted through a series of activity such as reviews on documents, questionnaire, interviews, and observations with measuring instruments of the East Java Representative of the Indonesian Audit Board (BPKP).

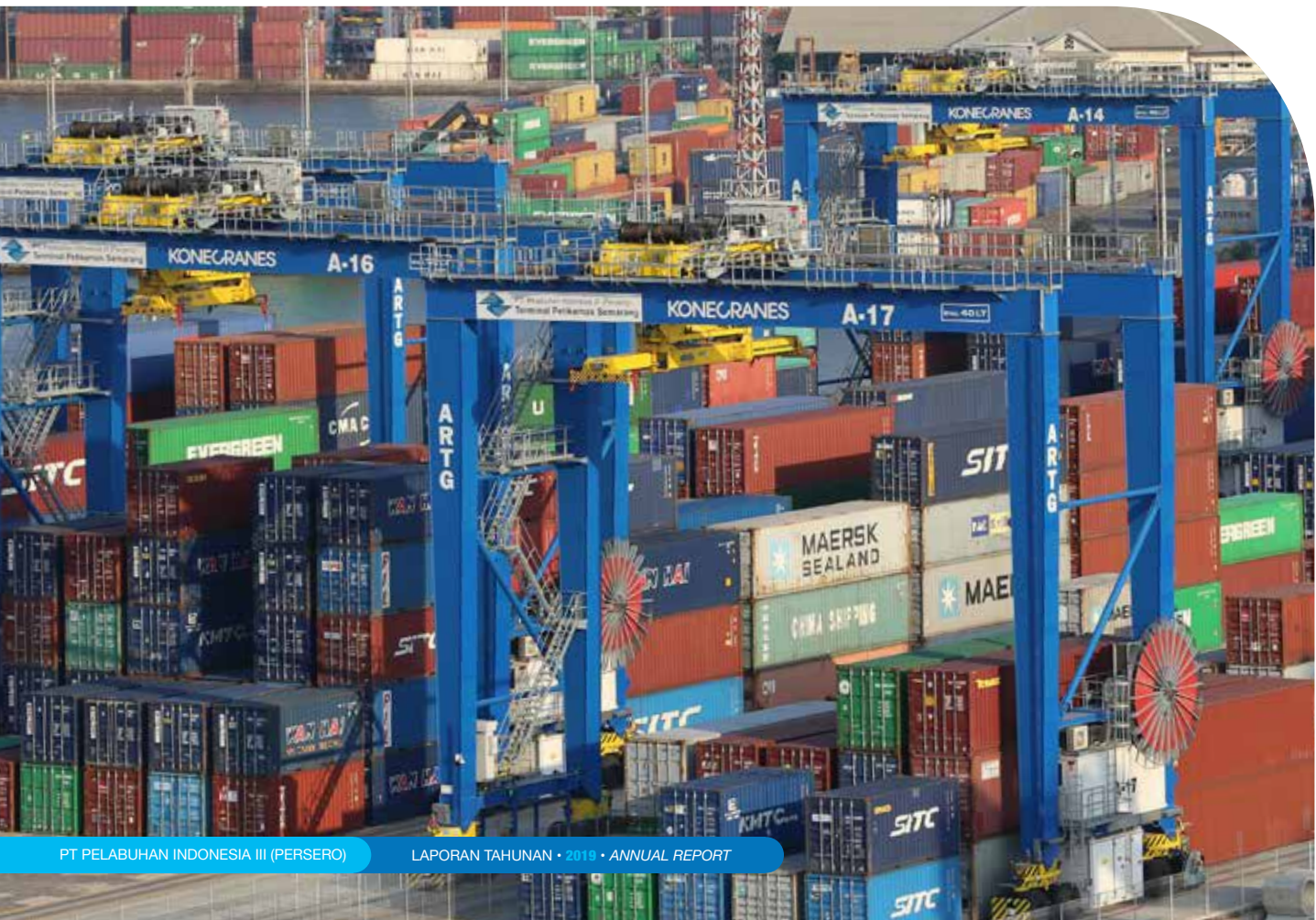
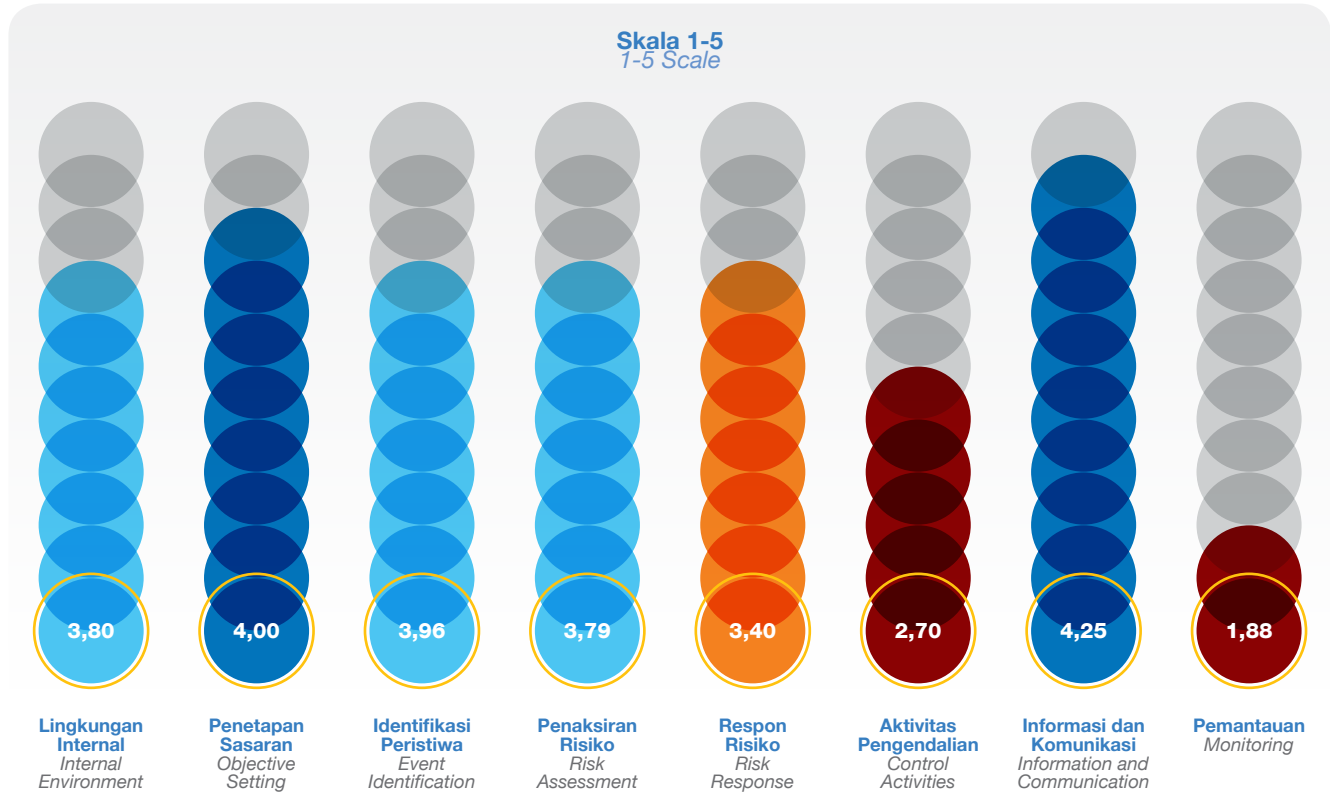
The measured components consist of eights, namely internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, as well as monitoring on every aspect predetermined and agreed upon between Pelindo III and East Java Representative of BPKP. The result of measurement conducted by BPKP is a score of 3.27 with a "Defined" maturity level consisting of the following components:

1. *Internal Environment Component (25%): scored at 3.80*
2. *Objective Setting Component (15%): scored at 4.00*
3. *Event Identification Component (10%): scored at 3.96*
4. *Risk Assessment Component (10%): scored at 3.79*
5. *Risk Response Component (10%): scored at 3.40*
6. *Control Activities Component (10%): scored at 2.70*
7. *Information and Communication Component (10%): scored at 4.25*
8. *Monitoring Component (10%): scored at 1.88*

Based on the measurement and evaluation conducted by BPKP, it is known that the components scoring below 3.50 are scores from the monitoring, control activities, and risk response. Therefore, a future action plan is necessary for improvement, particularly on the three components. The entire assessment may be depicted in the following image:

TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PELINDO III TAHUN 2019

PELINDO III RISK MANAGEMENT MATURITY LEVEL IN 2019



KODE ETIK

CODE OF CONDUCT

DASAR PELAKSANAAN DAN RUANG LINGKUP

Pedoman etika dan perilaku Pelindo III mengalami penyempurnaan pada tahun 2017 dan telah disahkan melalui Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III yang merupakan penyempurnaan dari pedoman etika dan perilaku sebelumnya. Pedoman ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) yakni:

1. Komitmen dan tata nilai Perusahaan.
2. Komitmen Perusahaan dan etika bisnis.
3. Perlindungan aset Perusahaan, benturan kepentingan, gratifikasi, diskriminasi, *benchmark*, media sosial, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.
4. Kerahasiaan dan keterbukaan informasi.
5. Pelanggaran etika dan penanganannya.
6. Penerapan dan penegakan.

PERNYATAAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK SECARA MENYELURUH

Kode Etik Perusahaan disusun secara bersama-sama oleh Insan Pelindo III; muatannya menjamin terwujudnya penyelenggaraan usaha yang harmonis dan terpenuhinya hak asasi bagi setiap elemen tanpa meninggalkan aspek bisnis. Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III berlaku secara luas bagi setiap Insan Pelindo III tanpa terkecuali.

MUATAN KODE ETIK

Code of Conduct berlaku bagi seluruh Insan Pelindo III, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perusahaan. Selain itu, pihak eksternal yang berhubungan dengan Perusahaan pun diwajibkan untuk mengikuti berbagai ketentuan yang ada di dalam *Code of Conduct*.

BASIS OF IMPLEMENTATION AND SCOPE

The Code of Conduct has been improved in 2017 and ratified through Joint Decision of the BOC, BOD, and Pelindo III Labour Union No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated 25 September 2017 on the Code of Conduct within Pelindo III which is an improvement of the previous Code of Conduct. The Code of Conduct is the description of GCG principles implementation (transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness) namely:

1. *Commitment and Corporate Value.*
2. *Corporate commitment and business ethics.*
3. *Protection of the Company's assets, conflict of interest, gratification, discrimination, benchmark, social media, corruption and money laundering crime.*
4. *Information confidentiality and disclosure.*
5. *Ethics violation and its handling.*
6. *Implementation and enforcement.*

STATEMENT OF COMPREHENSIVE CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT

The Code of Conduct is prepared by all Personnel of Pelindo III containing assurance of harmonious business organisation and fulfilment of human rights for every element without dismissing the business aspect. Joint Decision of the BOC, BOD, and Pelindo III Labour Union No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated 25 September 2017 on the Code of Conduct within Pelindo III is applied extensively for every personnel of the Company without any exception.

CONTENT OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct applies to all Personnel of Pelindo III, from the BOC, BOD, and all employees of the Company. Also, external parties related to the Company are required to follow various provisions in the Code of Conduct.

Code of Conduct mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Pelindo III. Pedoman ini berlaku dan ditandatangani oleh seluruh Insan Pelindo III setelah ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pegawai Pelindo III dengan No. 146/VII/KEP/DK.P.III/2014, HK.01/13/P.III-2014, SK 02/DPP.SPPI-III/VIII-2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Pedoman tersebut dapat diunduh di situs web Pelindo III oleh para Pemangku Kepentingan. Jika terjadi pelanggaran terhadap komitmen etika dan perilaku dapat diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Pegawai juga dapat mengakses *Whistleblowing System* (WBS) untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran pedoman etika dan perilaku, perjanjian kerja bersama, maupun ketentuan lain yang ditetapkan Perusahaan sehingga dapat bersama-sama mengawasi dan memantau kinerja SDM.

Berikut adalah uraian mengenai ruang lingkup kode etik di lingkungan Perusahaan:

HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

- Perusahaan akan memperlakukan Pemegang Saham sesuai Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
- Perusahaan akan memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham, dan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.
- Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Pengusulan penetapan dividen oleh Perusahaan didasarkan pada kepentingan Perusahaan dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan, serta rencana investasi.

HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA JASA

Perusahaan akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna jasa pelabuhan yang diwujudkan dalam program Pelayanan Prima. Perusahaan juga berusaha melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penataan berbagai fasilitas pelabuhan secara bertahap sesuai skala prioritas agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai.

Untuk dapat memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pengguna jasa pelabuhan, Perusahaan secara rutin mengadakan pertemuan dengan pengguna jasa pelabuhan serta melakukan *monitoring* atas hasil pertemuan sehingga dapat diketahui kebutuhan pengguna jasa pelabuhan tersebut dan dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan keinginannya.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa, Perusahaan melakukan berbagai pendekatan seperti:

- a. Perusahaan melakukan sertifikasi ISO 9001 sebagai bentuk komitmen dalam hal standardisasi mutu dan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan.
- b. Perusahaan melakukan sosialisasi kebijakan pelayanan, aturan, dan fasilitas pelabuhan bagi pengguna jasa pelabuhan.

The Code of Conduct regulates the policy of ethical values expressed explicitly as a behavioural standard that must be referred to as a guideline by all Personnel of Pelindo III. The guideline is signed and applied by all personnel of Pelindo III after it was established and jointly signed by the BOC, BOD, and Pelindo III Labour Union with No.146/VII/KEP/DK.P.III/2014, HK.01/13/P.III-2014, SK 02/DPP.SPPI-III/VIII-2014 dated 4 August 2014.

The guideline can be downloaded on the website of Pelindo III by the Stakeholders. Sanctions can be imposed upon any violation of ethical and behavioural commitment under the prevailing laws and regulations. Employees may also access the Whistleblowing System (WBS) to report any violations on the Code of Conduct, collective labour agreement, and other provisions defined by the Company to oversee and monitor the Human Capital performance.

The following is the description on the scope of Code of Conduct in the Company:

RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS

- *The Company shall treat Shareholders under the prevailing Laws and Regulations.*
- *The Company shall provide an optimum and continuous contribution for Shareholders and always strive for continuous growth.*
- *Dividends determination is conducted by Shareholders in the GMS. Suggestion on dividend distribution by the Company is based on the interest of the Company by taking into account various matters such as business continuity, current and future strategy, as well as an investment plan.*

RELATIONSHIP WITH SERVICE USERS

The Company will always strive to provide services with the best quality to the port service users with the realisation of Pelayanan Prima (First-Rate Service) programme. The Company also strives to perform maintenance, gradual improvement and arrangement of port facilities according to the priority scale to assure facility availability with adequate quality.

To provide the best service quality to port service users, the Company periodically holds meetings with port service users as well as conducts monitoring on meeting results to understand the needs of port service users and to be able to provide services following their needs and wishes.

To provide the best service to service users, the Company performed several approaches, such as:

- a. *The Company performed ISO 9001 certification as a form of commitment in terms of quality standardisation and port service system.*
- b. *The Company conducted dissemination of port service policies, regulations, and facilities for port service users.*

- c. Perusahaan memberikan jaminan layanan secara umum yang dinyatakan dalam *service level guarantee* di setiap unit usaha atau layanan.
- d. Perusahaan memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna jasa tertentu yang dituangkan dalam bentuk perjanjian layanan kegiatan (*service level agreement*) dengan masing-masing pengguna jasa.
- e. Perusahaan menjadikan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (regulator) sebagai pedoman minimal terhadap pencapaian kinerja operasional pelabuhan.
- f. Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik berkaitan dengan pelayanan jasa dan fasilitas sebagai wujud dari pelayanan prima untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada pengguna jasa.
- g. Perusahaan melakukan pelayanan dan menindaklanjuti setiap keluhan pengguna jasa dengan cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi.
- h. Perusahaan melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pelabuhan dan fasilitas umum yang ada di pelabuhan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
- i. Perusahaan melakukan peningkatan keamanan di pelabuhan dengan mengimplementasikan ISPS Code (*International Ship and Port Facility Security*) bagi pelabuhan tertentu secara bertahap.

HUBUNGAN DENGAN PEMASOK

Perusahaan senantiasa menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pemasok atas dasar kesetaraan dan keadilan berdasarkan penilaian secara wajar dengan menggunakan ukuran-ukuran kompetensi, kualifikasi, mutu produk, harga, manfaat, waktu pengiriman, serta pelayanan selama proses pengadaan maupun purna jual. Pengelolaan hubungan yang baik dengan pemasok antara lain diwujudkan melalui:

- a. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, jelas, dan objektif guna menjamin kualitas, kuantitas, maupun harga barang dan jasa yang diperoleh dari pemasok.
- b. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melakukan kendali terhadap independensi dari Pemangku Fungsi atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan sehingga dapat menjamin persaingan yang sehat dan proses pengadaan barang dan jasa yang baik tanpa intervensi.
- c. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa membuat kontrak kerja atau perjanjian atas semua pesanan barang/pekerjaan dengan mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi untuk menghindari terjadinya konflik.
- d. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa mempertahankan pemasok yang dapat menyediakan barang dan jasa sesuai kewajiban masing-masing sebagai mitra bisnis dan menghormati hak-hak pemasok dengan selalu berkomitmen terhadap perjanjian yang disepakati.

HUBUNGAN DENGAN KREDITUR

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, Perusahaan memanfaatkan sumber dana eksternal, baik perbankan maupun sumber pembiayaan lainnya. Dalam hal tersebut,

- c. *The Company provided general service assurance stated in service level guarantee in each business unit or service.*
- d. *The Company provided service assurance to certain service users as stipulated in the form of service level agreement with each service user.*
- e. *The Company referred to Port Operational Performance Standard issued by regulators as guidelines in the minimum achievement of port operational performance.*
- f. *The Company periodically conducted a customer satisfaction survey concerning service and facility provision as the realisation of the first-rate service to evaluate and improve service performance to services users.*
- g. *The Company provided services and followed up each complaint of service users in a quickly, rapidly, and without discrimination.*
- h. *The Company performed maintenance and repair on port facilities and public port facilities to their best ability.*
- i. *The Company gradually improved the security in the port through the implementation of ISPS Code (International Ship and Port Facility Security) for certain ports.*

RELATIONSHIP WITH SUPPLIERS

The Company continues to foster and maintain a good relationship with suppliers based on equality and fairness based on fair assessment using the measurement of competence, qualification, product quality, price, benefit, delivery time, as well as service during the procurement process and after-sale. Management of good relationship with suppliers is realised through:

- a. *The Company is committed to always run transparent, clear, and objective goods and services procurement system to assure quality, quantity, and price of the goods and services obtained from suppliers.*
- b. *The Company is committed to always control the independence of the function holder or Goods and Services Procurement Committee of the Company to assure healthy competition and proper goods and services procurement without any intervention.*
- c. *The Company is committed to always make work contract or agreement on goods/services orders by stating the rights and obligations as well as the sanction of each order in a clear manner to avoid any conflict.*
- d. *The Company is committed to always maintain suppliers that can provide goods and services following the obligations of each business partner and to respect the rights of suppliers by always committed to the agreement.*

RELATIONSHIP WITH CREDITORS

In carrying out its business activities, the Company utilises external fund sources, both from banks and other financing sources. In that regard, the Company commits to always

Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa melindungi hak dan kepentingan kreditur, melalui:

- Pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian.
- Pengungkapan informasi yang diperlukan secara transparan, akurat, dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman sesuai isi perjanjian.

HUBUNGAN DENGAN APARTUR PEMERINTAH

Kebijakan Perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap Aparatur yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perusahaan dilakukan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan Aparatur Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat kemitraan.

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparatur di luar kapasitas resmi, dan segala hal yang bertentangan dengan hukum maupun praktik bisnis yang sehat dilarang oleh Perusahaan. Pembayaran tidak langsung meliputi penggunaan sarana milik Perusahaan, layanan Perusahaan, ataupun pemanfaatan Pekerja Perusahaan. Larangan ini berlaku tidak hanya terhadap pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, tetapi juga dilakukan atas nama Perusahaan oleh agen atau wakil-wakil Perusahaan lainnya. Perusahaan juga tidak akan membiayai keperluan pengeluaran Kementerian dan Instansi Pemerintah.

HUBUNGAN DENGAN PEKERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perusahaan akan selalu berusaha mengembangkan kualitas SDM, sesuai dengan kebutuhan visi, misi, serta program jangka panjang Perusahaan. Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa terdapat perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, untuk itu segenap Insan Pelindo III akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan memiliki komitmen untuk:

- Memperlakukan Pekerja secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja.
- Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Pekerja.
- Memberikan kesempatan yang setara/adil kepada seluruh Pekerja dalam pengembangan karir dan promosi (Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/2012).
- Melindungi Pekerja dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- Memberikan hak kepada Pekerja untuk berserikat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.
- Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pekerja, secara umum mengikuti peraturan yang berlaku.

protecting the rights and interests of creditors, through:

- Fulfilment of obligations to creditors following the agreement.*
- Disclosure of required information transparently, accurately, and timely, both during requesting and using the loans following the content of the agreement.*

RELATIONSHIP WITH GOVERNMENT APPARATUS

The Company policy to develop and maintain a good relationship and effective communication with every Apparatus that has the authority in the Company operations within the tolerance limitation allowed by law. Every contact with the Government Apparatus shall be maintained as a partnership relationship.

Direct or indirect payment to the Apparatus outside of the official capacity and in violation of laws and sound business practices is prohibited by the Company. Indirect payment includes the utilisation of the Company's facilities, the Company's service or the Company's Workers. This prohibition applies to the payment and expenses of the Company as well as conducted on behalf of the Company by the agent or other representatives of the Company. The Company will not finance the expense needs of the Ministries and Government Institutions.

RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES AND INDUSTRIAL RELATIONS

The Company always strive to develop the quality of its Human Capital by the needs of the vision, mission, as well as long-term plans of the Company. The Company is fully aware of the changes in the dynamic business environment. Therefore, all Personnel of Pelindo III will always strive to foster partnership to support each other in achieving the common goals and progress. In line with such purpose, the Company commits to:

- Treat Employee fairly and free from any bias due to the difference in race, origin, gender, religion, and birthplace as well other matter unrelated to performance.*
- Provide good and safe working conditions for Employees.*
- Provide equal/fair opportunity to all Employees in career development and promotion. (Decree of the Secretary of the Minister of SOE No.16/2012).*
- Protect Employees from any possibility that endangers the safety and health in the workplace.*
- Provide the right to Employees for forming a union under the prevailing Laws and Regulations.*
- Provide opportunities to Employees to participate in education, training, and further development that are in line with the competence and needs of the Company.*
- Manage remuneration scheme to be accepted by employees in general by following the prevailing regulations.*

- h. Menghargai Pekerja sebagai aset utama Perusahaan.
- i. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang mendorong semangat kerja para Pekerja.
- j. Memberikan kebebasan kepada Pekerja untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

Perusahaan menyadari bahwa Pegawai adalah tulang punggung sekaligus mitra Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk itu Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja setiap Tenaga Kerja. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja, serta selalu mengusahakan agar Pegawai memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan selalu memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku.

Demi tercapainya tujuan kesehatan dan keselamatan kerja, maka Perusahaan memiliki komitmen untuk:

- a. Membangun Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagai landasan kepatuhan yang sejalan dengan hukum dan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- b. Menetapkan dan mengkaji sasaran serta melakukan penilaian dan pelaporan kinerja SMK3.
- c. Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SMK3 di lingkungan Perusahaan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada Pegawai dari gangguan dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan.
- d. Memastikan pemahaman yang lebih baik oleh Pegawai dan mitra kerja mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan aktivitas Perusahaan.
- e. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan SMK3.
- f. Menempatkan SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP dan Laporan Tahunan.
- g. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan SMK3.

HUBUNGAN DENGAN PESAING

Perusahaan menjunjung tinggi hubungan dengan industri sejenis guna menciptakan iklim usaha yang sehat:

- a. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (Undang-Undang No. 5/1999);
- b. Menghindari dan mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Undang-Undang No. 5/1999); dan

- h. *Appreciate Employees as the main asset of the company.*
- i. *Apply reward and punishment system that encourages the spirit at work of Employees.*
- j. *Provide freedom to Employees for providing opinions and aspirations in the ethical procedure and not in violation of the regulation of the Company.*

The Company realises that the Employees are the backbone as well as partners of the Company in carrying out its business activities. Therefore, the Company commits to always prioritising the occupational health and safety of the Workforce. The Company realises that the management of occupational health and safety is significant for the success of the Company in the long term.

The Company always takes accurate action to avoid any workplace accident and health issues in the workplace, as well as prioritises for Employees to have a safe and healthy workplace. To pursue such an objective, the Company will always ensure that business assets and location, as well as other facilities of the Company, fulfil the prevailing laws and regulations related to occupational health and safety.

To achieve occupational health and safety, the Company commits to:

- a. *Develop Occupational Health and Safety Management System (SMK3) as the basis for compliance that is in line with the laws and regulations of Occupational Health and Safety.*
- b. *Define and review target, conduct performance, and reporting of SMK3.*
- c. *Provide full support on the implementation of SMK3 within the Company in the effort to provide optimum protection to Employees from any disruption and matters that threaten life safety and health.*
- d. *Ensure a better understanding by Employees and business partners on occupational health and safety concerning the activities of the Company.*
- e. *Strive for sustainable improvement on various aspects related to SMK3.*
- f. *Place SMK3 as an inseparable part of RKAP and Annual Report.*
- g. *Include Employee participation as a part of SMK3 improvement implementation.*

RELATIONSHIP WITH COMPETITORS

The Company upholds the relationship with similar industry to create a sound business climate:

- a. *Realising conducive business climate through the arrangement of business competition to assure the equal business opportunities for all business players; (Law No.5/1999)*
- b. *Avoiding and preventing monopoly practice and/or unhealthy business competition; (Law No.5/1999).*

- c. Saling menghormati dan menghargai hubungan dengan pesaing.

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Perusahaan sangat memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal dalam wilayah sekitar pelabuhan. Hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.

Dalam berinteraksi dan membantu pembangunan serta pengembangan masyarakat sekitar, cara yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sejauh mungkin meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar.
- Menjalin kemitraan secara efektif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan.
- Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
- Perusahaan tetap berpartisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat khususnya yang berdekatan dengan pelabuhan. Pelaksanaannya melibatkan seluruh unsur mulai dari warga masyarakat, Pemerintah, serta lembaga terkait lainnya.
- Perusahaan senantiasa memperhitungkan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perusahaan, serta melakukan pencegahan atas dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasional Perusahaan (Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/2012).
- Perusahaan senantiasa berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal bagi tercapainya keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan Perusahaan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, Pemerintah Pusat dan Daerah Setempat, serta pihak-pihak yang terkait lainnya guna mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan keterbukaan. Perusahaan bekerja sama secara erat dengan organisasi dan lembaga masyarakat lain dalam memformulasikan kebijakan kemitraan dengan masyarakat, misalnya berpartisipasi dalam dialog dengan lembaga-lembaga tersebut; dengan harapan kebijakan yang lebih rasional dan efektif dapat diformulasikan dengan baik. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai Perusahaan bagi masyarakat.

HUBUNGAN ATASAN TERHADAP BAWAHAN

- Memiliki dedikasi, semangat, dan disiplin yang tinggi dalam bekerja;
- Menunjukkan tingkah laku dan sikap yang baik terhadap atasan;
- Melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh atasan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab;
- Memberikan saran dan pendapat positif kepada atasan; dan
- Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.

- c. *Mutual respect and appreciation with competitors.*

RELATIONSHIP WITH THE COMMUNITY AND ENVIRONMENT

The Company is highly concerned with issues in the community, particularly around the port. Good relationship and surrounding community development are the principal basis for longterm Company success.

In interacting and assisting the surrounding community development, it is conducted under the following principles:

- Mutual respect to the rights and obligations of respective parties, through minimising any conflict potential with the surrounding community.*
- Have an effective partnership based on mutual benefits and living side by side principles.*
- Always able to adapt to the development of cultural values of the surrounding community.*
- The Company always participates in the development of the community around the port. The implementation involves all elements, starting from the community, Government, as well as other relevant institutions.*
- The Company always calculates issues and environmental impact from the Company's activities as well as performs prevention on environmental negative impact due to the operational activities of the Company. (Decree of the Secretary of the Minister of SOE No. 16/2012).*
- The Company strives to maintain environmental sustainability as a capital for achieving the success of the Company in the long term.*

Partnership principle actively requires the Company to cooperate with the surrounding community, such as the case with the central government and local region as well as other relevant parties to achieve the joint commitment based on mutual trust and transparency. The Company cooperates closely with other community organisation and institution in formulating the policy with the community, such as participating in the dialogue with such institutions, with the expectation that a more rational and effective policy can be properly formulated. The Company highly appreciates every partnership that provides a contribution to the community and increases the Company's values for the community.

RELATIONSHIP OF SUPERIORS WITH SUBORDINATES

- Having high dedication, spirit and discipline in working;*
- Demonstrating good behaviour and attitude to the superiors;*
- Performing the duties mandated by superiors in an honest, professional, and responsible manner;*
- Providing positive suggestion and opinion to superiors; and*
- Developing and improving skills and knowledge to perform duties in a better manner.*

HUBUNGAN DENGAN MEDIA

Dalam hubungan dengan media, Perusahaan secara aktif melakukan publikasi kegiatan seremonial maupun operasional di media masa (cetak dan elektronik) serta media sosial. Prinsip penyampaian informasi Perusahaan dilakukan dengan asas transparansi dan keterbukaan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan yang berlaku. Praktek penyelenggaraan penyampaian informasi tersebut berupa:

- Penyampaian informasi dilakukan secara relevan dan berimbang kepada media masa (cetak dan elektronik) maupun media sosial dengan memperhatikan *platform* yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- Pemeliharaan hubungan baik dengan media masa (cetak dan elektronik) sehingga tercipta kerja sama yang kondusif dan bermanfaat bagi pembentukan citra positif Perusahaan.
- Penanganan keluhan dan kritik konstruktif yang disampaikan pada seluruh kanal informasi, yakni media masa (cetak dan elektronik) dan media sosial, dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
- Melibatkan jurnalis media masa (cetak dan elektronik) untuk meliput kegiatan maupun proses bisnis Perusahaan.

HUBUNGAN DENGAN SERIKAT PEKERJA

Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.

HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Anak Perusahaan merupakan entitas tersendiri yang kepemilikan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pelindo III. Hubungan dengan Anak Perusahaan tersebut dilandasi dengan:

- Peraturan yang berlaku di Perusahaan, dan
- Dukungan dan kepercayaan terhadap Anak Perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan aktivitas Perusahaan secara mandiri.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR

Perusahaan dalam menjalankan roda kegiatan usaha senantiasa mengedepankan Peraturan yang berlaku serta taat terhadap kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Regulator agar dapat membangun dan memajukan perekonomian bangsa. Hubungan tersebut dijalankan dengan prinsip kewajaran, transparan, dan profesional baik dalam hal penyampaian laporan-laporan maupun perkembangan Perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG.

HUBUNGAN DENGAN LEGISLATIF

Perusahaan melakukan hubungan komunikasi yang baik dengan legislatif dengan menerima masukan dan informasi yang berguna bagi kepentingan Perusahaan maupun lingkungan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN YUDIKATIF

Perusahaan patuh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan di bidang hukum dengan menjalin kerja sama dengan pihak Penegak Hukum dalam rangka melindungi Perusahaan agar

RELATIONSHIP WITH MEDIA

The Company establishes a relationship with media by actively publishing both ceremonial and operational activities on mass media (printed and electronic) as well as social media. The delivery process of the Company's information is conducted with the principles of transparency and openness under the code of conduct in journalism and the applicable regulations. The practice of such information delivery covers:

- The information delivery is carried out in a relevant and impartial manner to mass media (printed and electronic) and social media by considering the platform set by the management.*
- Maintaining a good relationship with mass media (printed and electronic), generating conducive and beneficial cooperation to form a positive image of the Company.*
- Handling of complaints and constructive criticism addressed to the entire information channels, namely mass media (printed and electronic) and social media, conducted with due regard of risk and cost aspects.*
- Involving journalists of mass media (printed and electronic) to cover activities and business process of the Company.*

RELATIONSHIP WITH THE LABOUR UNION

Placing the Labour Union as the Company's partner in achieving the objectives to generate a dynamic and harmonious industrial relationship.

RELATIONSHIP WITH SUBSIDIARIES

Subsidiaries are a separate entity whose most of its shares are owned by Pelindo III. The relationship with subsidiaries is established with the following basis:

- Regulations applied in the Company, and*
- Support and trust to subsidiaries in performing and developing activities of the company independently.*

RELATIONSHIP WITH GOVERNMENT AS REGULATOR

In spurring its business practice, the Company upholds the prevailing Regulations and complies with responsibilities given by the Regulator to develop and promote the nation's economy. Such a relationship is established with the principles of fairness, transparency, and professionalism, as well as by upholding the GCG principles in the submission of reports and the Company's progress.

RELATIONSHIP WITH LEGISLATIVE

The Company performs a good relationship with the legislative. This is manifested by openly accepting suggestions and information which is beneficial for the interest of the Company and the environment according to the applicable Regulations.

RELATIONSHIP WITH JUDICIARY

The Company is obedient to provisions on law through establishing cooperation with law enforcement authorities to

dalam menjalankan roda operasional tidak menyimpang dari standar operasional. Hubungan tersebut dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR DAN LEMBAGA KEUANGAN

Kerjasama Perusahaan dengan pihak investor dan lembaga keuangan dilandasi dengan tujuan membangun serta mengembangkan Perusahaan lebih maju dan berkembang. Perusahaan memberikan informasi tentang keadaan Perusahaan secara terbuka kepada pihak investor dan Lembaga Keuangan yang telah di seleksi secara baik dan resmi serta sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Perusahaan juga memiliki itikad baik dalam pengembalian pinjaman atau bantuan yang telah diberikan demi keuntungan bersama baik Perusahaan, Investor, maupun Lembaga Keuangan tanpa adanya benturan kepentingan dan sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PERGURUAN TINGGI

Perusahaan menjaga mutu dan kualitas dunia pendidikan dengan melakukan kerjasama perguruan tinggi guna meningkatkan mutu siswa. Peningkatan mutu siswa ditempuh dengan memberikan informasi tentang perkembangan Perusahaan serta membantu kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan yang diselenggarakan.

HUBUNGAN DENGAN KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN (K3) SERTA LINGKUNGAN KERJA

Komitmen Perusahaan yang tinggi terhadap salah satu aset yang dimiliki, yakni SDM, menjadikan K3 sebagai prioritas Perusahaan untuk meyakinkan bahwa lingkungan kerja dalam kondisi aman, sehat, dan bersih serta penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja dalam kondisi terstandar. Perusahaan juga turut memperhatikan ekosistem di lingkungan sekitar sebagai bagian tujuan Perusahaan.

HUBUNGAN DENGAN DEBITUR

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, adakalanya Perusahaan memberikan sumber dana kepada mitra kerja di lingkungan Perusahaan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah, melalui:

- a. Bantuan Modal Usaha untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah setelah proses evaluasi proposal pengajuan.
- b. Meminta imbal jasa (bunga) atas bantuan modal yang telah diberikan dengan besaran sesuai perjanjian.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK

Jika terjadi pelanggaran terhadap komitmen etika dan perilaku dapat diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

prevent the Company's operations from any deviation from the operational standard. Such relationship is performed under the applicable provisions.

RELATIONSHIP WITH INVESTORS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Cooperation with investors and financial institutions is based on the purpose to develop and promote the Company. The Company openly provides information on its conditions that has been properly and officially selected for the investors and Financial Institutions under the agreements with them.

Furthermore, The Company has good faith in repayment of loans or assistance that has been given for mutual benefit for the Company, Investor, and Financial Institution without any conflict of interest and under the prevailing laws and regulations.

RELATIONSHIP WITH RESEARCH INSTITUTIONS AND UNIVERSITIES

The Company maintains the quality and quantity of education by entering into a partnership with universities in the forms of information on the development of the Company and several educational support activities to improve students' quality.

RELATIONSHIP WITH HEALTH, SAFETY AND SECURITY (K3) AND WORKING ENVIRONMENT

The high commitment to the assets owned, namely human resources, drives K3 to become the Company's priority to ensure safe, sound, and clean working environment as well as the use of standard work equipment and tools. The Company also concerns with the surrounding ecosystem as part of the Company's goals.

RELATIONSHIP WITH DEBTORS

In the implementation of the business practice, the Company facilitates funding sources to its partners located near the company to develop and promote minor and medium enterprises through:

- a. Working capital aid to developing and promoting minor and medium enterprises after the process of proposal evaluation.
- b. Requiring interest for the working capital granted with the amount corresponding to the agreement.

SANCTIONS FOR VIOLATING THE CODE OF CONDUCT

Sanctions can be imposed upon any violation of ethical and behavioural commitment under the prevailing laws and regulations.

LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK

Hingga 31 Desember 2019, tercatat sebanyak 92 pelanggaran kode etik dengan detail pelanggaran dan proses penindakan sebagai berikut:

REPORT ON THE VIOLATION OF THE CODE OF CONDUCT

As of 31 December 2019, 92 violations of the Code of Conduct were recorded with the following details and follow up:

LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK 2019 REPORT ON THE VIOLATION OF THE CODE OF CONDUCT IN 2019

NO.	JENIS PELANGGARAN TYPE OF VIOLATION	JUMLAH TOTAL	SANKSI SANCTION
1.	Teguran Lisan Oral Warning	62	Potongan Bonus dengan persentase berbeda Bonus Deduction with varying percentage
2.	Disiplin Ringan Light Discipline	13	Teguran Tertulis dan Potongan Bonus dengan persentase berbeda Written Warning and Bonus Deduction with varying percentage
3.	Disiplin Sedang Medium Discipline	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan kenaikan penghasilan selama 1 tahun dan tidak dapat dipromosikan selama setengah tahun 2. Penundaan kenaikan penghasilan selama 2 tahun dan tidak dapat dipromosikan selama 1 tahun 3. Penurunan penghasilan 1 periodik lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 1,5 tahun 4. Penurunan penghasilan 1 periodik lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 2 tahun 5. Potongan Bonus dengan persentase berbeda <ol style="list-style-type: none"> 1. Delay in income increase for one year and cannot be promoted for six months 2. Delay in income increase for two years and cannot be promoted for one year 3. Delay in income increase for one year and cannot be promoted for six months 4. Income decrease by one level lower and cannot be promoted for 1.5 year 5. Income decrease by one level lower and cannot be promoted for two years 6. Bonus Deduction with varying percentage
4.	Disiplin Berat Severe Discipline	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kelas jabatan 1 tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 2 tahun 2. Penurunan kelas jabatan 2 tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 3 tahun 3. Penurunan kelas jabatan 3 tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 4 tahun 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 5. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri 6. Potongan Bonus dengan persentase berbeda <ol style="list-style-type: none"> 1. Demotion level of one level lower and cannot be promoted for two years 2. Demotion level of two levels lower and cannot be promoted for three years 3. Demotion level of three levels lower and cannot be promoted for four years 4. Respectful dismissal not on one's accord 5. Dismissal not on one's accord 6. Bonus Deduction with varying percentage

PERKARA PENTING PERUSAHAAN DAN GRUP DI 2019

LEGAL CASE OF THE COMPANY AND GROUPS IN 2019

Di tahun 2019, Perusahaan menghadapi 8 perkara hukum dengan rincian sebagai berikut:

In 2019, the Company was faced with eight legal cases with the following:

PERKARA PENTING 2019 LEGAL CASES IN 2019

NO.	POKOK PERKARA CASES	INFORMASI PERKARA CASES INFORMATION	STATUS PENYELESAIAN SETTLEMENT STATUS
1.	Perkara Tata Usaha Negara No. Register 273/G/201/2017/PTUN-JKT dengan Sinar Centra Cipta di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan sengketa Kegiatan reklamasi lahan 22.0198 hektar. <i>State Administration Case Register No. 273/G/201/2017/PTUN-JKT with Sinar Centra Cipta in the State Administrative Court, with disputes on 22,0198 hectares of land reclamation activities.</i>	Perusahaan sebagai Turut Tergugat <i>The Company as the Co-Defendant</i>	Perusahaan mengajukan Peninjauan Kembali <i>The Company filed a Review Petition</i>
2.	Perkara Perdata No. Register 865/PDT.G/2017/PN.Sby oleh Perusahaan terhadap Wawan Syarwani, bahwa Wawan Syarwani menolak untuk membayar uang pemasukan tanah HPL kepada Perusahaan dengan alasan Perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan uang tersebut. <i>Civil Case Register No. 865/PDT.G/2017/PN.SBY by the Company to Wawan Syarwani, in that Wawan Syarwani, refused to pay HPL land income to the Company with the reason that the Company does not have the authority to levy on HPL land.</i>	Perusahaan sebagai Tergugat <i>The Company as the Defendant</i>	Tergugat mengajukan Kasasi <i>The Defendant filed a Cassation</i>
3.	Perkara Perdata No. Register 315/PDT.G/2018/PN.Sby oleh Ardiansyah dkk., bahwa Perusahaan sebagai Tergugat tidak memberikan Hak Milik atau tidak memberikan rekomendasi peralihan tanah HPL menjadi Hak Milik. <i>Civil Case Register No. 315/PDT.G/2018/PM. SBY by Ardiansyah et al. that the Company as the Defendant does not give Ownership Rights, neither does it provide recommendations for transferring HPL land to Ownership Rights</i>	Perusahaan sebagai Tergugat <i>The Company as the Defendant</i>	Masih proses menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI <i>Awaiting on Cassation Decision from the Indonesian Supreme Court</i>
4.	Perkara Perdata No. Register 553/PDT.G/2018/PN.Sby oleh Ir. H. Irmain bahwa Perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pemasukan tanah HPL. <i>Civil Case No. Register 553/PDT.G/2018/PN.SBY by Ir. H. Irmain that the Company does not have the authority to levy on HPL land.</i>	Perusahaan sebagai Tergugat <i>The Company as the Defendant</i>	Masih proses menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI <i>Awaiting on Cassation Decision from the Indonesian Supreme Court</i>
5.	Perkara Perdata No. Register 599/PDT.G/2018/PN.Sby oleh PT Surya Segara Safety Marine, bahwa Perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pemasukan tanah HPL. <i>Civil Case Register No. 599/PDT.G/2018/PN.SBY by PT Surya Segara Safety Marine, that the Company does not have the authority to levy on HPL land.</i>	Perusahaan sebagai Tergugat <i>The Company as the Defendant</i>	Masih proses menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI <i>Awaiting on Cassation Decision from the Indonesian Supreme Court</i>

NO.	POKOK PERKARA CASES	INFORMASI PERKARA CASES INFORMATION	STATUS PENYELESAIAN SETTLEMENT STATUS
6.	Perkara Perdata No. Register 11/Pdt.G/2019/PN.Bjm oleh Liliyana Poernama Wijaya, bahwa Penggugat mengajukan klaim bahwa ia berada dalam wilayah tanah HPL milik Perusahaan berdasarkan Sertifikat HPL No. 1 tanggal 10 September 1996. <i>Civil Case Register No. 11/Pdt.G/2019/PN.Bjm by Liliyana Poernama Wijaya, in which the Plaintiff submitted a claim that she is in the HPL land of the Company based on the HPL Certificate No. 1 of 10 September 1996.</i>	Perusahaan sebagai Tergugat <i>The Company as the Defendant</i>	Penggugat mengajukan Kasasi <i>The Plaintiff submitted a Cassation</i>
7.	Perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melawan PT Pelindo Marine Service dan Perusahaan dengan No. Register: 1. 135/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby oleh Hadi Prayitno, Yono Pujoharto, Wahyu Aji; 2. 136/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby oleh Bejo dan Cahyono <i>Industrial Relations Case in Surabaya District Course against PT Pelindo Marine Service and the Company with a Register No.:</i> <i>a. 135/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby by Hadi Prayitno, Yono Pujoharto, Wahyu Aji;</i> <i>b. 136/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby by Bejo and Cahyono</i>	Perusahaan sebagai Tergugat <i>The Company as the Defendant</i>	Masih dalam tahap Duplik <i>Still in Rebuttal stage</i>
8.	Perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang melawan PT Pelindo Marine Service dan Perusahaan dengan No. Register 87/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg oleh Sdr Winarno dan Sdr Andi Cahyawan. <i>Industrial Relations Case in Semarang District Course against PT Pelindo Marine Service and the Company with a Register No. 87/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg by Winarno and Andi Cahyawan.</i>	Perusahaan sebagai Tergugat <i>The Company as the Defendant</i>	Pembacaan Gugatan akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020 <i>Lawsuit readings will be conducted on 16 January 2020</i>

RISIKO ATAS PERKARA YANG DIHADAPI

Perkara hukum yang sedang dihadapi oleh Perusahaan di tahun 2019 secara umum tidak berdampak/memberikan risiko kepada kondisi kelangsungan Perusahaan.

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN ENTITAS

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana, sehingga data mengenai sanksi administrasi terhadap Dewan Komisaris, Direksi, dan Entitas tidak dapat disajikan.

RISK OF THE CASE FACED

The legal cases currently being faced by the Company in 2019 do not have an impact/risk to the condition of the Company's continuity.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON THE BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS, AND ENTITIES

Throughout 2019, there were no members of the BOC and BOD of the Company who had legal or civil legal problems, hence the data regarding administrative sanctions against the BOC and BOD and Entities cannot be presented.

PEMENUHAN ASPEK KEPATUHAN

FULFILMENT ON COMPLIANCE ASPECT

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

Dalam meminimalkan potensi terjadinya tindak pidana Korupsi dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan telah melakukan beberapa upaya pencegahan meliputi:

1. Infomasi ketentuan Etika Kerja dan Etika bisnis seluruh Insan Pelindo III agar terhindar dari perilaku penyimpangan, khususnya tindak pidana korupsi, dalam Kode Etik Perusahaan yang disahkan melalui Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III.
2. Ketentuan mengenai kebijakan gratifikasi yang menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang disahkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan.
3. Pengawasan tindak pidana korupsi pejabat di lingkungan Perusahaan melalui mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Instruksi Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tanggal 9 September 2009 *juncto* Peraturan Direksi No. PER.28/HK.03/P.III-2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pelindo III.

Dengan diberlakukannya 3 mekanisme pencegahan tersebut, sepanjang 2019 Perusahaan telah mampu mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi di lingkungan Pelindo III. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan perkara hukum yang melibatkan Perusahaan untuk jenis kasus tindak pidana korupsi yang tercatat nihil.

PAKTA INTEGRITAS

Seluruh Insan Pelindo III senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada Kode Etik Perusahaan dan regulasi yang berlaku. Sebagai

ANTI-CORRUPTION POLICY

To minimise potential Corruption in performing its business activities, the Company has made several preventive measures covering:

1. *Information on provisions of Work Ethics and Business Ethics to all Personnel of Pelindo III to avoid irregularities especially corruption on the Company's Code of Conduct validated through the Joint Decision of the BOC, BOD and Labour Union of Pelabuhan Indonesia III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated 25 September 2017 on Code of Conduct within Pelindo III.*
2. *Provision on gratification policy which prompts potential corruption as ratified in Law No. 20 of 2001 on the Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption and the Company Regulation stated in the Regulation of the BOD No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 dated 9 March 2018 on Gratification Control in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and Its Subsidiaries.*
3. *Corruption monitoring of officials within the Company through Report of State Officials Assets (LHKPN) mechanism according to Law No. 28 of 1999 on Implementing a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism and the Company's Instruction contained in the Decree of the BOD No. PER.27/HK.03/P.III-2009 dated 9 September 2009 *juncto* Regulation of the BOD No. PER.28/HK.03/P.III-2016 dated 15 July 2016 on Amendment to the Regulation of the BOD No. PER.27/HK.03/P.III-2009 on Obligation to Submit Report of State Officials Assets (LHKPN) within Pelindo III.*

Throughout 2019, the Company managed to prevent Corruption within the Company through the enactment of three preventive mechanisms. This is evidenced by the legal case report involving the Company for the type of corruption cases recorded in nil.

INTEGRITY PACT

All Personnel of Pelindo III strives to maintain their integrity in carrying out their business activities guided by the Code of Conduct of the Company and prevailing regulations. As a

wujud komitmen penerapan Kode Etik Perusahaan, Insan Pelindo III diwajibkan menandatangani Pakta Integritas di setiap tahunnya.

manifestation of its implementation, all Personnel of Pelindo III is required to sign an Integrity Pact every year.

PENCEGAHAN PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Dengan menempatkan komitmen yang besar dalam pemenuhan seluruh prinsip-prinsip GCG, Perusahaan berupaya sebaik mungkin melakukan pencegahan dan meminimalisasi terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, Perusahaan mengadopsi dan melakukan internalisasi terhadap beberapa regulasi yang berlaku secara umum.

PREVENTION OF BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

With its solid commitment to fulfilling all GCG principles, the Company strives to exert its best effort in preventing and minimising Bad Corporate Governance practices by formulating the required policies. In formulating such policies, the Company adopts and internalizes several generally applied regulations.

KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN STATEMENT OF CORPORATE INTENT

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Perusahaan juga diimplementasikan Perusahaan dalam bentuk pemaparan rencana dan target Perusahaan di masa depan (RKAP dan publikasi *Statement of Corporate Intent*) dengan melibatkan atau tidak melibatkan analis dalam pelaksanaannya. Kegiatan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau publikasi *Statement of Corporate Intent* kepada Pemegang Saham dilaksanakan melalui sarana RUPS maupun dalam kesempatan lainnya.

COMMUNICATION WITH SHAREHOLDERS AND STATEMENT OF CORPORATE INTENT

The accountability principle in Company's management is also implemented in the form of exposition of Company's plans and targets for the future (RKAP and Statement of Corporate Intent publication) by involving or without involving analysts in the implementation. Communication with the Shareholder or publication of Statement of Corporate Intent to the Shareholder is conducted through the means of GMS or in other opportunities.

Di tahun 2019, Perusahaan melaksanakan kegiatan komunikasi kepada Pemegang Saham mengenai analisis kinerja usaha sepanjang tahun buku dan rencana bisnis serta publikasi *Statement of Corporate Intent* pada tanggal 4 Januari 2019.

In 2019, the Company conducted communication with Shareholders activity concerning business performance analysis throughout the fiscal year and business plan, as well as the publication of a statement of corporate intent on 4 January 2019.

PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP PAJAK

Perusahaan senantiasa memenuhi aturan Perundang-Undangan dalam hal kontribusi pajak penghasilan atas kegiatan jasa usaha kepelabuhanan. Acuan kepatuhan Perusahaan terhadap pajak yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Kepatuhan Perusahaan terhadap pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi Perusahaan dalam membangun negara.

TAX COMPLIANCE

The Company strives to comply with the laws and regulations regarding income tax contribution to port services business activities. The Company's tax compliance refers to the Regulation of the Government of Republic of Indonesia No. 51 of 2008 dated 20 July 2008 which has been amended with through the Regulation of the Government of Republic of Indonesia No. 40 of 2009 on Income Tax from the Construction Service Business. The Company's tax compliance is one of the forms of the Company's contribution to developing the nation.

INFORMASI KEPATUHAN PAJAK 2019

Sepanjang 2019, tidak terdapat teguran yang bersifat ketidakpatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak yang ditujukan kepada Perusahaan.

INFORMATION ON TAX COMPLIANCE IN 2019

Throughout 2019, there were no reprimand letters delivered to the Company regarding the violation of tax obligation fulfilment.

LAPORAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Perusahaan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL). Perusahaan selaku pemberi kerja melakukan pemantauan terhadap kontraktor pelaksana yang dipekerjakan untuk mematuhi standar lingkungan yang berlaku guna meminimalisasi terjadinya aktivitas pencemaran. Terkait dengan laporan pencemaran lingkungan, pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap hal tersebut adalah dari pihak kontraktor pelaksana. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki laporan terkait pencemaran lingkungan.

LAPORAN PERKARA PENTING YANG TIDAK DIJABARKAN

Informasi terkait perkara penting Perusahaan telah dijabarkan secara lengkap dalam pembahasan Perkara Penting dalam bab ini. Informasi yang disajikan menampilkan seluruh rangkuman atas perkara maupun gugatan yang dihadapi Perusahaan sepanjang 2019.

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Sepanjang 2019, tidak tercatat adanya kasus yang melibatkan Perusahaan dengan buruh atau karyawan Perusahaan. Rekapitulasi perkara dan gugatan baik yang dilakukan dan/atau ditujukan kepada Perusahaan telah dijabarkan dalam pembahasan Informasi Perkara Penting dalam bab ini.

INFORMASI KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Penyajian materi dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah merujuk pada parameter yang berlaku seperti kriteria Annual Report Award (ARA), dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 20/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

KESESUAIAN LAPORAN TAHUNAN HARD COPY DAN SOFT COPY

Perusahaan menjamin bahwa isi Laporan Tahunan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* telah sesuai dan tidak terdapat adanya perbedaan.

REPORT ON ENVIRONMENTAL POLLUTION

The Company continuously maintains environmental preservation with guidance from the Environmental Impact Assessment (AMDAL). As an employer, the Company monitors the executing contractors to comply with the prevailing environmental standards in minimising pollution. Regarding the environmental pollution report, the party in charge of preparing the report is the contractor; thus, the Company has no reports related to environmental pollution.

REPORT ON UNEXPOSED SIGNIFICANT CASES

Information related to significant cases of the Company has been described comprehensively in the discussion of Legal Cases in this chapter. The presented information demonstrates the entire summary of cases or lawsuits faced by the Company throughout the year.

CASES RELATED TO LABOUR AND EMPLOYEES

Throughout 2019, there were no cases involving the Company with labour or employees of the Company. Cases and lawsuits recapitulation conducted by and/or directed to the Company have been presented in the discussion of Legal Cases in this chapter.

INFORMATION ON PRESENTATION DISCREPANCY OF ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS

Presentation of materials in the Annual Report of the Company has referred to the prevailing parameters, such as the criteria for Annual Report Award (ARA), and Circular Letter of Financial Services Authority (SEOJK) No. 20/SEOJK.04/2016 on Form and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies.

CONFORMITY OF HARD COPY AND SOFT COPY OF ANNUAL REPORT.

The Company ensures that the contents of the Annual Report in the form of hardcopy and softcopy conform and without any discrepancy.

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

MECHANISM OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

PRINSIP DAN KEBIJAKAN

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) melalui Peraturan Direksi No. PER.69/LG.0202/P.III-2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan diperbarui oleh Perubahan Sispro No. PER.001/LG.0202/HOFC-2018 tanggal 17 April 2018 turut serta mendukung implementasi GCG (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip:

1. Efisien, menggunakan dana dan sumber daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Efektif, sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi Perusahaan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.
3. Terbuka dan Bersaing, harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan memberikan persaingan yang sehat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi penyedia serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil tidak diskriminatif, memberikan perlakuan dan ketentuan yang sama bagi semua calon penyedia.
6. Akuntabel, mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas Perusahaan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Selain hal-hal tersebut di atas, Perusahaan juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh prinsip kehati-hatian (asas prudensial), yakni memperhitungkan dampak risiko yang terkecil bagi Perusahaan.

UKPBJ Perusahaan sudah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan proses bisnis pengadaan barang/jasa yang berlaku melalui situs eproc.pelindo.co.id.

E-procurement memfasilitasi semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *database* eproc, serta membuka kesempatan mendaftar yang seluas-luasnya kepada seluruh penyedia yang belum terdapat pada Daftar Rekanan Perusahaan (DRP) dengan syarat dan ketentuan yang sama. Aplikasi ini juga telah lulus sertifikasi ISO 27001 semenjak tahun 2018.

PROSEDUR DAN TATA CARA

Panitia Pengadaan/UKPBJ mempunyai ruang lingkup, wewenang, dan tanggung jawab, seperti gambar di bawah ini:

PRINCIPLE AND POLICY

Goods and Services Procurement Work Unit (UKPBJ) through the Decree of the BOD No. PER.69/LG.0202/P. III-2017 dated 2 October 2017 and updated by Sispro Amendment No. PER.001/LG.0202/HOFC-2018 dated 17 April 2018 participated in supporting the implementation of GCG by applying the following principle:

1. *Efficient, using limited funds and resources to achieve the determined target within the shortest possible time.*
2. *Effective, being in line with the needs and providing benefits for the Company following the set targets.*
3. *Open and Competitive, being open to suppliers that meet the requirements and demonstrate sound competition following the clear and transparent provisions and procedures.*
4. *Transparent, all provisions and information on Goods/ Services procurement are transparent for the suppliers and public in general.*
5. *Fair and non-discriminatory, demonstrating equal treatment and provisions for all potential suppliers.*
6. *Accountable, pursuing the targets and capable of being held accountable, either physical, financial, or benefits in performing the Company's role and public services following the principles and the prevailing provisions.*

In addition to the issues mentioned above, the Company commits to always taking into account the prudent principle, namely to calculate even the smallest risks to the Company.

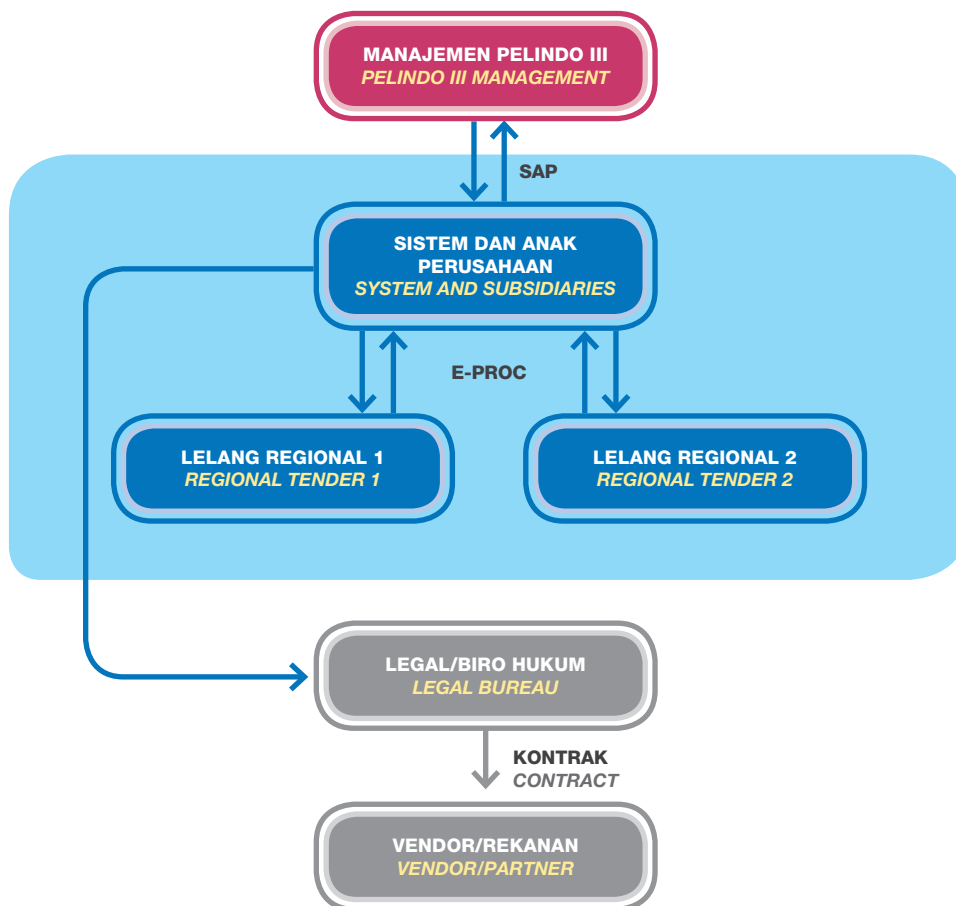
The Company's UKPBJ has adopted an electronic procurement system using information technology that is in line with the applicable process of goods/services procurement, through eproc.pelindo.co.id.

E-Procurement facilitates all providers of goods/services registered in the e-proc data-base and provides extensive opportunities to all providers not registered on the List of Corporate Associates (DRP) the same terms and conditions. This application has also passed ISO 27001 certification since 2018.

PROCUREMENT PROCEDURE

Procurement Committee/UKPBJ has the scope, authority, and responsibilities as described in the following chart:

PROSEDUR PENGADAAN PROCUREMENT PROCEDURE



PEMILIHAN VENDOR

Vendor yang diikutsertakan dalam pelelangan harus terdaftar dan tervalidasi dalam aplikasi E-Procurement Perusahaan, yang otomatis tersimpan dalam *database* sehingga mempermudah dalam pemilihan vendor sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Dalam proses pelelangan, penawaran vendor dievaluasi dan dinegosiasi secara elektronik sebagai upaya efisiensi waktu dan biaya.

EVALUASI KEGIATAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PENGADAAN

Evaluasi kegiatan dilakukan berkala setiap bulan sekali dengan membahas hasil kinerja, tata cara, dan sispro pelelangan itu sendiri; dengan melihat data pada bulan sebelumnya sebagai acuan tren proses pelelangan.

VENDOR SELECTION

Vendors included in the auction must be registered and validated in the Company's E-Procurement application, which is automatically stored in the database so that the selection process for the suitable vendor is manageable. In the auction process, vendor offers are electronically evaluated and negotiated as an effort to time and cost-efficiency.

ACTIVITY EVALUATION AND DEVELOPMENTS PLANS FOR THE PROCUREMENT DEPARTMENT

The evaluation activity is carried out every month by discussing the performance results, procedures, and procedures for the auction itself by looking at the data in the previous month as a reference for trends in the auction process.

Dari hasil kinerja tahun 2018 UKPBJ telah melelangkan 2.029 pekerjaan dan berhasil melakukan efisiensi sebesar 8% dari anggaran atau Rp115.503.132.109. Pada tahun 2019 UKPBJ telah melelangkan 2.350 pekerjaan dan berhasil melakukan efisiensi sebesar 11,8% dari anggaran atau Rp275.162.092.026.

Aplikasi E-Procurement mengalami pengembangan berkelanjutan. Untuk tahun 2019 telah dikembangkan metode *upload password* penawaran baru yang lebih memudahkan rekanan untuk *upload password* dan mengurangi risiko gagal terkirimnya *password* kepada rekanan. Terdapat penambahan jenis PO pada aplikasi SAP, yaitu PO Pembayaran dan PO Penyelesaian Pekerjaan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Rencana pengembangan SDM Unit Pengadaan diisi dengan sertifikasi dan pelatihan untuk staf pengadaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat pemahaman tentang pengadaan.

From the results of the 2018 performance, UKPBJ has auctioned 2,029 jobs and made 8% efficiency of the budget or Rp115,503,132,109. In 2019 UKPBJ had auctioned 2,350 jobs and made 11.8% efficiency of the budget or Rp275,162,092,026.

E-Procurement applications undergo continuous development. In 2019 a password upload method for new offer has been developed to facilitate the partners in uploading their passwords and reduce the risk of sending failure to the partners. There is also an additional PO on SAP app, namely PO Payment and PO Job Completion to accelerate the procurement of goods and services.

The development plan for employees of the Procurement Unit is filled with certification and training for procurement staff aimed at developing and strengthening the understanding of procurement.



KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Perusahaan, Pelindo III bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan pedoman Gratifikasi. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi oleh Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Ketua Umum SPPI III yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK pada tanggal 12 Maret 2014. Tindak lanjut dari penandatanganan komitmen tersebut adalah dilakukannya *workshop* penyusunan aturan gratifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 November 2014 bekerja sama dengan KPK serta dibentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pelindo III.

Agar pelaksanaan UPG Pelindo III dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka terdapat pedoman Peraturan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan.

Mengacu pada peraturan Direksi tersebut, maka dibentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan, ditetapkan bahwa Sekretaris Perusahaan menjadi koordinator pelaksanaan pelaporan Pegawai Perusahaan yang menerima gratifikasi.

Tugas dan Tanggung Jawab terkait pelaksanaan pelaporan gratifikasi adalah:

1. Menyosialisasikan dan memublikasikan program pengendalian gratifikasi;
2. Menerima laporan gratifikasi dari Insan Pelindo III yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
3. Menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk penetapannya;
4. Meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan KPK untuk mendapat penetapan status dari penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan oleh KPK;
5. Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas penetapan status gratifikasi;
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari Insan Pelindo III;
7. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi; dan
8. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi dengan KPK.

To prevent and eradicate corruption within the Company, Pelindo III cooperates with the Corruption Eradication Commission (KPK) in the preparation of the Gratification guidelines. This is embodied by the signing of the Statement of Commitment to Implement Gratification Control by the President Commissioner, President Director, and SPPI III Chairman witnessed by the Director of Gratification of KPK on 12 March 2014. The follow-up of the signing of the commitment is the workshop on the preparation of the gratification rules which was held on 19 November until 21 November 2014 in cooperation with KPK and the establishment of Gratification Control Unit (UPG) Pelindo III.

For UPG implementation to be effective and efficient, the Regulation of the BOD No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 dated 9 March 2018 on Gratification Control in within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and Its Subsidiaries was established.

Referring to such regulation, a Gratification Control Unit was established through the Decree of the BOD No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 dated 9 March 2018 on the Establishment of Gratification Control Unit Team within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and Its Subsidiaries as well as the determination that the Corporate Secretary is the coordinator of a report on personnel of the Company who receive gratuity.

Duties and Responsibilities related to the implementation of gratification report are:

1. *Disseminating and publishing the gratification control programme;*
2. *Receiving the gratification report from all Personnel of Pelindo III that has been completed by other related documents;*
3. *Reviewing the gratification report and providing recommendations to the BOD for the determination;*
4. *Forwarding the gratification report which is a KPK authority to obtain status determination on gratification that shall be reported by the KPK;*
5. *Following up recommendations from KPK on the determination of gratification status;*
6. *Conducting coordination and consultation with KPK to process the gratification report from all Personnel of Pelindo III; and*
7. *Submitting recapitulation report of handling and follow up of gratification report; and*
8. *Performing monitoring and evaluation of the effectiveness of gratification control with KPK.*

KATEGORI GRATIFIKASI

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan:
Adalah penerimaan gratifikasi sehubungan dengan jabatan sebagai Insan Pelindo III dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan:
Adalah penerimaan gratifikasi dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan Pelindo III meraih prestasi tertentu.
3. Gratifikasi dalam Kedinasan:
Adalah penerimaan gratifikasi yang diterima Insan Pelindo III dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perusahaan.

GRATIFICATION CATEGORY

1. *The gratification that is obliged to report:
Gratuity receipt concerning the position as a Personnel of Pelindo III is against their duties and obligations.*
2. *The gratification that is not obliged to report:
Gratuity receipt from third parties based on valid agreement or due to certain achievements received by the Personnel of Pelindo III.*
3. *Gratification in Official Duties:
Gratuity receipt by a Personnel of the Company during the official duties assigned to them as the Company's representative.*

MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI

Penyampaian laporan dapat melalui:

GRATIFICATION REPORTING MEDIA

Report can be submitted to:

**SEKRETARIS
PERUSAHAAN
CORPORATE
SECRETARY**

UP. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya, 60165

Situs Web | *Website:*
gratifikasi.pelindo.co.id
Surel | *E-mail:*
lapor.gratifikasi@pelindo.co.id
Telepon | *Phone:*
08113484333

PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI

Segala bentuk penerimaan atau penolakan gratifikasi oleh Tim UPG dicatat dalam laporan dan diserahkan kepada KPK. Dalam tahun 2019 terdapat penerimaan sebanyak 5 laporan.

HANDLING OF GRATIFICATION COMPLAINT

Any form of gratuity acceptance or rejection by UPG is recorded in the report submitted to KPK. There are five reports in 2019.

LAPORAN GRATIFIKASI 2019

Sepanjang 2019, tercatat sebanyak 5 pemberian gratifikasi yang diterima pegawai Perusahaan baik dalam jajaran Dewan Komisaris, Direksi, General Manager, hingga staf. Uraian mengenai gratifikasi yang diterima disajikan dalam tabel di bawah ini:

THE 2019 GRATIFICATION REPORT

Throughout 2019, five gratuities received by the Company's employees at the BOC, the BOD, General Manager, and staff. Details on the received gratification are presented in the following table:

PENERIMAAN GRATIFIKASI 2019

GRATUITY RECEIPT IN 2019

NO.	PENERIMA RECIPIENT	PEMBERI SENDER	TEMPAT DAN WAKTU PENERIMAAN PLACE AND TIME OF RECEIPT	BENTUK GRATIFIKASI FORM OF GRATIFICATION	JUMLAH AMOUNT	HARGA SATUAN (ESTIMASI) PRICE PER UNIT (ESTIMATE)	NILAI GRATIFIKASI (ESTIMASI) GRATIFICATION VALUE (ESTIMATE)	KETERANGAN INFORMATION
1.	Pandji Widya Rasmi	PT Sriboga Flour Mills	Kantor Pusat Pelindo III, 20 Maret <i>Pelindo III Head Office, 20 March</i>	Tepung <i>Flour</i>	3 Dos (36 pax) <i>3 boxes (36 pax)</i>	Rp10.000	Rp360.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>
2.	Hafid Noval	Mitra Kerja	Kantor Pusat Pelindo III <i>Pelindo III Head Office</i>	Parcel Kue <i>Cake Parcel</i>	1	Rp500.000	Rp500.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>
3.	Karina Rindang	PT SMC	Rumah <i>Home</i>	Parcel Kue <i>Cake Parcel</i>	1	Rp500.000	Rp500.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>
4.	Toto Nugroho, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Toto Nugroho, Business Transformation and Development Director</i>	TTL	Kantor Pusat Pelindo III, 1 Juli, 15.00 WIB <i>Pelindo III Head Office, 1 July, 15.00 WIB</i>	Parcel Kue <i>Cake Parcel</i>	1	Rp750.000	Rp750.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>
5.	Toto Nugroho, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Toto Nugroho, Business Transformation and Development Director</i>	PGN LNG	Kantor Pusat Pelindo III, 1 Juli, 15.00 WIB <i>Pelindo III Head Office, 1 July, 15.00 WIB</i>	Parcel Kue <i>Cake Parcel</i>	1	Rp500.000	Rp500.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta untuk memperkuat penerapan GCG, Perusahaan menerapkan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System-WBS*). WBS adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri. WBS digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Pelindo III dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

To avoid irregularities and fraud and strengthen the implementation of GCG practice, the Company applies the Whistleblowing System (WBS). The WBS is a system that manages complaints/disclosures regarding unlawful behaviour, unethical/improper secret acts anonymously and independently. WBS is used to optimise the contribution of Personnel of Pelindo III and other parties in disclosing violations that occur within the Company.

PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

Pelaporan pelanggaran ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP) sesuai Surat Keputusan Direksi No. PER.78/HK.03/P.III-2015 tanggal 1 Oktober 2015. Tugas dan wewenang TTPP meliputi:

- Melakukan investigasi berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern, Direktorat, Biro dan cabang perusahaan, serta pihak eksternal terkait;
- Membuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/pemintaan keterangan terhadap pengaduan yang disampaikan pelapor; dan
- Memberikan klarifikasi/jawaban yang diperlukan apabila terdapat pihak lain yang meminta keterangan tentang tindak lanjut pengaduan.

Susunan Keanggotaan TTPP terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Sekretaris merangkap anggota; dan
4. Anggota.

RUANG LINGKUP PENGADUAN

Ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan melalui WBS meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Peraturan Perusahaan;
- b. Pelanggaran Kode Etik Perusahaan;
- c. Penyalahgunaan kewenangan jabatan;
- d. Tindakan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan Perusahaan;
- e. Kecurangan/pengelembuan/pencurian aset-aset Perusahaan; dan
- f. Pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGER

Violation report is submitted through the standard mechanism and managed professionally by the Integrated Complaint Handling Team (TTPP) based on the Decree of the BOD No. PER.78/HK.03/P.III-2015 dated 1 October 2015. The duties and authorities of TTPP include:

- *Conduct investigation by coordination with the Internal Audit, Directorate, Company Bureau and branch, and related external parties;*
- *Make conclusions, suggestions, and recommendations based on the results of examination/request for information submitted by the whistleblower; and*
- *Provide the necessary clarification/answer if other parties are enquiring the information on the follow-up to the report.*

TTPP Membership Composition consists of:

1. *Head and member;*
2. *Deputy Head and member;*
3. *Secretary and member; and*
4. *Members*

SCOPE OF COMPLAINTS

The scope of complaints which can be submitted through WBS covers the following:

- a. *Violations of the Company's Regulations;*
- b. *Violations of the Code of Conduct;*
- c. *Misuse of office authority;*
- d. *Acts causing a loss or reduction of the Company's income;*
- e. *Fraud/embezzlement/theft of the Company's assets; and*
- f. *Violations of the procurement of goods and services.*

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Perusahaan memberikan perlindungan terhadap pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme WBS. Kebijakan perlindungan terhadap pelapor, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan;
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun; dan
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

Selain perlindungan di atas, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan ini diharapkan akan mendorong setiap Insan Pelindo III dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor dan keluarganya.

MEDIA PELAPORAN

Media Pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan meliputi berbagai media sebagai berikut:



NO. KONTAK
CONTACT NO

0823 666 9999



**SURAT DENGAN
ALAMAT:**
A LETTER TO:

PO BOX 1128



FAKS:
FAX:

+6231 329 1291



SUREL:
E-MAIL:

timwbs@pelindo.co.id

MEKANISME PENGADUAN

Mekanisme pengaduan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan pelapor diterima melalui media sebagaimana dalam Pasal 4 dan dicatat dalam buku pengaduan oleh TTPP.
2. Dalam hal pelaporan dilakukan melalui surel atau faksimile, bukti-bukti pengaduan disampaikan setelah dinyatakan perlu ditindaklanjuti.
3. Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas Pelapor yaitu nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk memudahkan tindak lanjut.
4. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap diproses, namun demikian akan dipertimbangkan

PROTECTION TO WHISTLEBLOWERS

The Company protects whistleblowers who report alleged violations through the WBS mechanism. A whistleblowers protection policy is as follows:

1. Confidentiality of the Whistleblowers' identities is guaranteed by the Company;
2. The Company guarantees protection against the Whistleblowers from all forms of threats, intimidation or disagreeable actions of any party as long as the Whistleblowers keep the confidentiality of reporting submitted to any party; and
3. Protection against the Whistleblowers also applies for parties who carry out Investigation or parties who provide information related to such Complain/Disclosure.

In addition to the above protection, the Company will also provide legal protection. This protection is expected to encourage every Personnel of Pelindo III and other Whistleblowers to report any violations and ensure the security of the Whistleblowers and their family.

REPORTING MEDIA

Reporting Media provided by the Company consists of the following media:

REPORTING MECHANISM

The reporting mechanism is as follows:

1. Complaints submitted by the whistleblowers are received through media as stated in Article 4 and recorded in the complaint book by TTPP.
2. The report is sent via e-mail or facsimile, while proof of complaints after being declared necessary follow up.
3. The reporting is conducted by mentioning the Whistleblower's identity including name, address, and telephone number that can be contacted to facilitate the follow-up.
4. A report with no identity is still processed, however, the truth of content, credibility and proof submitted, as well

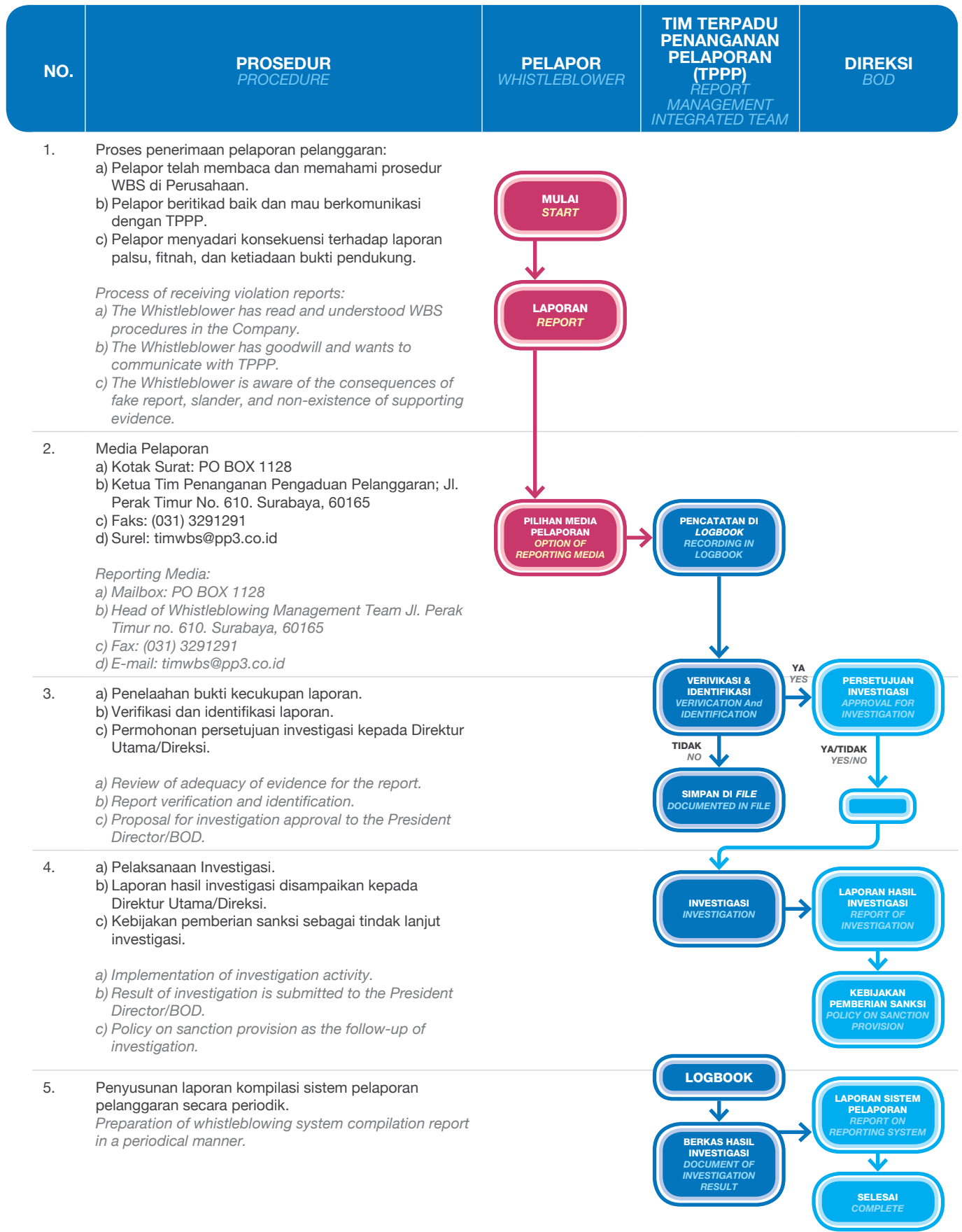
terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.

5. TTPP mengadministrasikan dokumen pengaduan yang diatur berdasarkan klasifikasi jenis masalah, unit kerja terlapor, serta urutan waktu pengaduan yang disesuaikan dengan prosedur pengarsipan yang berlaku.
6. TTPP selanjutnya melakukan verifikasi/penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk menentukan apakah pengaduan yang disampaikan pelapor sudah sesuai atau memenuhi syarat/kriteria pengaduan.
7. TTPP selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi/penelitian dan identifikasi dengan langkah-langkah berikut:
 - a) Merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - b) Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang berlaku;
 - c) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang berkaitan dengan materi pengaduan yang diterima; dan
 - d) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan.
8. Apabila pengaduan telah memenuhi syarat, maka TTPP melaporkan ke Direktur Utama atau Direktur lainnya untuk mendapatkan persetujuan dilakukannya investigasi.
9. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka TTPP tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam *file* berkas pengaduan.
10. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dilakukan tindak lanjut terhadap laporan pengaduan adalah sebagai berikut:
 - a) Direktur Utama, apabila yang menjadi terlapor adalah Pegawai/Direktur lainnya/Komisaris Perusahaan dan/atau Pegawai Perusahaan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi, serta Personil lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Pelindo III; dan
 - b) Direktur lainnya, apabila yang menjadi terlapor adalah Direktur Utama.
11. Terhadap pengaduan yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Utama atau Direktur lainnya, TTPP melakukan tindak lanjut sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
12. Teknik investigasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan tim TTPP dengan prinsip-prinsip proposional dan sebanding atas materi yang dilaporkan.
13. Selama proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran, terlapor memiliki hak-hak yang meliputi:
 - a) Mendapatkan pemberitahuan dengan jelas tentang maksud pemanggilan;
 - b) Memberikan keterangan secara bebas;
 - c) Mengajukan saksi dan bukti-bukti guna memberikan keterangan.
14. Hasil investigasi dituangkan dalam laporan hasil investigasi yang disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan yang dilengkapi dengan data pendukung dan saran tindak lanjut.
15. Hasil investigasi yang telah dibahas dan disepakati bersama tim TTPP disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi investigasi.

as the possibility to confirm the report will be considered first.

5. *TTPP organises the reporting documents based on classifications of type of complaint, work unit of the reported party, as well as a timeline of complaints tailored to the applicable archiving procedure.*
6. *TTPP then conducts verification/analysis on the reports submitted by the whistleblowers to determine whether a report submitted by a whistleblower has been based on or has met the reporting requirements/criteria.*
7. *TTPP formulates the results of verification/analysis and identifies with the following measures:*
 - a) *Formulating subject matter of the report;*
 - b) *Relating reporting materials with the applicable regulations;*
 - c) *Verifying document and/or information related to the received reporting materials; and*
 - d) *Formulating settlement plan or measures required.*
8. *If the report has met the requirements, TTPP will report to the President Director or other Directors to obtain approval for the investigation.*
9. *If the report does not meet the requirements then TTPP will not follow up and the report is filed.*
10. *The authorised official who approves to conduct the follow up is as follows:*
 - a) *President Director, if the reported party is an employee/ another Director/Commissioner of the Company and or the Company's employee works in a subsidiary and or affiliated company, as well as another person who works for and on behalf of Pelindo III;*
 - b) *Other Directors, if the reported party is the President Director.*
11. *About the report which has obtained approval from the President Director or other Directors, TTPP will conduct follow up based on its duties and responsibilities.*
12. *Investigation technique is the confidentiality and authority of TTPP team with the principles proportional to the subject reported.*
13. *During an investigation of the alleged violation, the reported party has the rights which cover:*
 - a) *Obtaining clear notification about the purpose to summon;*
 - b) *Providing independent information;*
 - c) *Proposing witness and proof to provide information.*
14. *Results of the investigation are contained in a report on the results of the investigation which is prepared systematically, concisely, clearly, and accountable as well as conclusion along with supporting data and recommendations for the follow-up.*
15. *The results of the investigation being discussed and agreed with the TTPP team are submitted to the President Director and or other Directors for the follow-up based on evaluation results of the investigation.*

ALUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN FLOWCHART OF WHISTLEBLOWING SYSTEM



SOSIALISASI DAN EVALUASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan melaksanakan sosialisasi *Whistleblowing System* secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Pelindo III dan secara berkala akan melaksanakan pemutakhiran serta penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG, publikasi melalui intranet, dan media komunikasi lainnya.

PELAPORAN PELANGGARAN DAN TINDAK LANJUT

Pada tahun 2019, tidak terdapat laporan pelanggaran yang diterima ataupun diproses oleh WBS sehingga tidak ada sanksi/tindak lanjut yang dilakukan.

DISSEMINATION AND EVALUATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Company continuously organises dissemination of Whistleblowing system to all Personnel of Pelindo III and conducts periodic updates and enhancements for the continuous improvement which is parallel with the Company's business development. The dissemination is conducted in conjunction with GCG implementation dissemination, publication via intranet and other communication media.

WHISTLEBLOWING REPORTING AND FOLLOW-UP

There are no reports on violation in 2019 both those received and processed by WBS, hence no sanction/follow up is imposed/conducted.



LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

REPORT OF STATE OFFICIAL ASSETS

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pelindo III mewajibkan pejabat sampai satu tingkat di bawah Direksi untuk membuat dan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Koordinator pelaksana untuk menangani Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Perusahaan yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia. Penentuan tugas ini mengacu pada Keputusan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tanggal 9 September 2009 *juncto* Peraturan Direksi No. PER.28/HK.03/P.III-2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di lingkungan Pelindo III.

To support the Government programme to create a clean and authoritative government, Pelindo III obliges the officials up to one level below the BOD to prepare and submit their assets to the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK). The executive coordinator that manages the Report of State Official Assets (LHKPN) within the Company is the Human Capital Directorate. The determination of duty refers to the Decree of the BOD No. PER.27/HK.03/P.III-2009 dated 9 September 2009 juncto Regulation of the BOD No. PER.28/HK.03/P.III-2016 dated 15 July 2016 on Amendment to the Regulation of the BOD No. PER.27/HK.03/P.III-2009 on Obligation to Submit LHKPN within Pelindo III.

DASAR HUKUM

Dasar aturan pengaturan LHKPN di lingkungan Pelindo III terdiri dari:

- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MEKANISME PELAPORAN

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 28 tahun 1999 dimana penyelenggara berkewajiban untuk:

- Diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.
- Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
- Mengumumkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
- Mengumumkan harta kekayaannya.

LEGAL BASIS

Basis regulation of LHKPN within Pelindo III consists of:

- Law No. 28 of 1999 on Clean State Administration Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.*
- Law No. 19 of 2003 on SOEs.*
- Law No. 13 of 2003 on Employment.*
- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.*

SUBMISSION MECHANISM

Mechanism of company official assets report submission is conducted through referring to Law No. 28 of 1999 in which officials are obliged to:

- Report asset before, during, and after tenure.*
- Report assets for the first time in office, mutation, promotion, and retirement.*
- Announce assets for the first time in office, mutation, promotion, and retirement.*
- Announce their assets.*

LHKPN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

LHKPN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

NO.	NAMA NAME	JABATAN POSITION	PELAPORAN TERAKHIR LAST REPORT	
			PERIODE LAPOR REPORTING PERIOD	TANGGAL KIRIM DATE OF RECEIPT
1.	Doso Agung	Direktur Utama President Director	-	-
2.	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial Operations and Commercial Director	31 Desember 2019 31 December 2019	20 Februari 2020 20 February 2020
3.	Joko Noerhudha	Direktur Teknik Engineering Director	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Maret 2020 31 March 2020
4.	Toto Heliyanto	Direktur SDM Human Capital Director	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Maret 2020 31 March 2020
5.	Irvandi Gustari	Direktur Keuangan Financial Director	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Maret 2020 31 March 2020
6.	Toto Nugroho Pranatyasto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Business Transformation and Development Director	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Maret 2020 31 March 2020

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LHKPN 2019

RECAPITULATION OF THE 2019 LHKPN SUBMISSION

NO.	TAHUN YEAR	WAJIB LAPOR LHKPN LHKPN COMPULSORY REPORTING	SUDAH LAPOR REPORTED	BELUM LAPOR NOT REPORTED
1.	2014	497	392	105
2.	2015	518	439	79
3.	2016	292	213	79
4.	2017	188	170	18
5.	2018	208	169	39

AKSES DAN INFORMASI PERUSAHAAN

COMPANY ACCESS AND INFORMATION

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, Pelindo III menyediakan berbagai akses informasi melalui sarana dan media sebagai berikut:

1. Situs web : www.pelindo.co.id
2. Twitter : @pelindo3
3. Facebook : pelindo III
4. Instagram : @pelindo3
5. YouTube : pelindo III
6. Contact Center : +6231 329 8631-37
7. Majalah Internal : Majalah Dermaga
(www.majalahdermaga.com)

To support its commitment on the implementation of information disclosure, the Company provides several information access through media as follows:

1. Website : www.pelindo.co.id
2. Twitter : @pelindo3
3. Facebook : pelindo III
4. Instagram : @pelindo3
5. YouTube : pelindo III
6. Contact Centre : +6231 329 8631-37
7. Internal Magazine: Dermaga Magazine
(www.majalahdermaga.com)





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY





TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

GOVERNANCE ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sebagai perusahaan yang tumbuh di tengah publik, Pelindo III menyadari bahwa kesejahteraan masyarakat dan lingkungan terutama yang berada di sekitar kegiatan operasional merupakan tanggung jawab yang harus diemban bersama. Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berlandaskan pada 3 aspek utama, yakni masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*), dan keuntungan (*profit*). Keseluruhan aspek tersebut dijalankan sebagai bagian dari proses bisnis Perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat konkrit bagi Pemangku Kepentingan Perusahaan.

Komitmen Pelindo III dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan pihak masyarakat di sekitar Perusahaan. Program yang dijalankan di antaranya berbentuk bantuan permodalan bagi pengusaha kecil dengan pinjaman berbunga rendah, pembinaan seperti pelatihan dan mengikutsertakan Mitra Binaan pada pameran berskala nasional maupun internasional yang bertujuan untuk memajukan usaha Mitra Binaan, sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh publik maupun penyempurnaan infrastruktur yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.

KEBIJAKAN DAN LINGKUP PROGRAM CSR DAN PKBL

Pedoman pelaksanaan program CSR dan PKBL telah disusun dan ditetapkan guna mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kebijakan Perusahaan tersebut tertuang dalam Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.0064/ML.01/HOFC-2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Lingkungan Pelindo III.

PKBL yang dijalankan oleh Perusahaan pada praktiknya lebih menekankan pada pembangunan sosial dan mengembangkan potensi masyarakat yang kemudian diarahkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan. Perusahaan berpandangan hal ini dapat menciptakan peluang-peluang usaha, menyerap tenaga kerja, serta menata lingkungan dengan lebih baik, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya dan dukungan masyarakat atas kehadiran Perusahaan.

SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITMENT

As a company that grows in public, Pelindo III understands that the welfare of community and environment, particularly around the Company's operations, is a responsibility that shall be carried along. The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) activities is based on three main aspects namely people, planet, and profit. These aspects are manifested as part of the Company's business process and expected to generate concrete advantages for the Company's Stakeholders.

A commitment of Pelindo III to performing corporate social responsibility is internalised through the Partnership and Community Development Programme (PKBL) aiming to accommodate the interests of the community residing near the Company's premises. The programme covers capital assistance for small entrepreneurs with low-interest loans, coaching such as training and participation in national and international exhibitions aimed at promoting the business of Developed Partners, and the provision of facilities and infrastructures that can be accessed by the public as well as improvements in infrastructure that can be widely used by the community.

POLICY AND SCOPE OF CSR AND PKBL PROGRAMMES

Guidelines of the implementation of CSR and PKBL programmes are designed and set to anticipate the negative impacts of the Company's business activities for the community and the environment. The Company's policy is contained in the Regulation of the BOD of Pelindo III No. PER.01/ML.01/P.III-2016 dated 8 January 2016 on the Guidelines for Management of Partnership and Community Development Programme within Pelindo III.

The PKBL practices performed by the Company tend to emphasise social development and develop the community potential which is then directed to the development of the people's economy, to create business opportunities, absorb the workforce, and organise the environment better, hence it is expected to foster trust and public support for the Company's presence.

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM

Komitmen Perusahaan tersebut sejalan dan mengacu pada ketentuan Pemerintah terkait tanggung jawab sosial Perusahaan dan PKBL, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
6. Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

METODE DAN LINGKUP DUE DILIGENT DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Agar seluruh program CSR dapat terlaksana dengan efektif, tepat sasaran, dan tepat guna, Perusahaan menyusun *Roadmap* PKBL PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2007-2021 yang disusun dengan didahului pemetaan seluruh kepentingan dan harapan pemangku kepentingan di seluruh pelabuhan serta kondisi sosial di sekitar lingkungan perusahaan. Mengacu pada *roadmap* tersebut, tiap tahun seluruh pelabuhan juga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama 1 tahun ke depan.

IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN ISU-ISU PENTING

Salah satu aspek penting dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah terselenggaranya hubungan harmonis dengan para Pemangku Kepentingan. Pelindo III senantiasa berupaya memahami kebutuhan serta kepentingan para Pemangku Kepentingan. Guna mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan bagi Pemangku Kepentingan, Manajemen berkomitmen untuk menjalin interaksi timbal balik yang saling mendukung antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan. Hal ini akan meningkatkan hubungan baik di antara keduanya sehingga berdampak positif bagi keberlanjutan usaha Perusahaan.

BASIS OF PROGRAMME IMPLEMENTATION

The commitment of the Company is in line with and refers to government provisions related to corporate social responsibility and PKBL, namely:

1. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.*
2. *Law No. 19 of 2003 Article 88 on SOE.*
3. *Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environment Responsibility of Limited Liability Companies.*
4. *Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 dated 3 July 2015 on Partnership and Community Development Programme of SOEs.*
5. *Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/12/2016 dated 16 December 2016 on Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Programme of SOE.*
6. *Regulation of the Minister of SOE No. 02/MBU/2017 on the Second Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Programme of SOE.*

METHODS AND SCOPE OF DUE DILIGENT FROM COMPANY ACTIVITIES

For all CSR programmes to be implemented effectively, right on target, and appropriate, the Company has arranged the PKBL Roadmap of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for 2007-2021 which started with the mapping of all stakeholders' interest and expectations in all ports as well as the social condition around the company vicinity. Referring to the roadmap, all ports also arranged an annual Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Programme for the upcoming year.

STAKEHOLDERS IDENTIFICATION AND IMPORTANT ISSUES

One important aspect of Good Corporate Governance is a manifestation of harmonious relations with Stakeholders. Pelindo III strives to understand the needs and interests of the Stakeholders. To realise fair equality for Stakeholders, Management is committed to establishing mutually supportive interactions between the Company and Stakeholders. This will enhance good relations between the two to have a positive impact on the continuity of the Company's business.

DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DAN ISU-ISUNYA

LIST OF STAKEHOLDERS AND THEIR ISSUES

PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS	ISU-ISU PENTING IMPORTANT ISSUES
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Peningkatan Kinerja Perusahaan <i>Improvement of Company Performance</i>
	Dukungan pada kepentingan Pemegang Saham <i>Support for the interest of Shareholders</i>
Karyawan <i>Employees</i>	Terjaminnya kesejahteraan pekerja beserta keluarganya <i>Assurance of employee welfare along with their family</i>
	Suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman <i>A conducive, healthy, and secure work atmosphere</i>
	Jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara, dan tidak ada praktik diskriminasi <i>Clear and fair career path and performance assessment without any discrimination</i>
Pelanggan <i>Customers</i>	Kontinuitas dan keandalan pasokan energi listrik <i>Continuity and reliability of electricity supply</i>
	Harga jual yang bersaing dan efisien <i>Competitive and efficient selling price</i>
Pemasok <i>Suppliers</i>	Kepatuhan terhadap peraturan <i>Compliance with regulations</i>
	Pembayaran tepat waktu <i>Timely payment</i>
	Proses evaluasi yang objektif <i>Objective evaluation process</i>
	Hubungan yang harmonis <i>Harmonious relationship</i>
	Kepatuhan terhadap peraturan <i>Compliance with regulations</i>
	Kesehatan perusahaan <i>Corporate soundness</i>
Pemerintah <i>Government</i>	Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) <i>Economic contribution to the government (tax and subsidy use)</i>
	Kepatuhan terhadap peraturan <i>Compliance with regulations</i>
	Kesehatan perusahaan <i>Corporate soundness</i>
	Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan pengurangan subsidi) <i>Economic contribution to the government (tax and subsidy reduction)</i>

PEMANGKU KEPENTINGAN
STAKEHOLDERS

ISU-ISU PENTING
IMPORTANT ISSUES

Masyarakat <i>Community</i>	Hubungan yang harmonis tanpa ada konflik <i>A harmonious relationship without any conflict</i>
	Dampak negatif terhadap lingkungan minimal <i>Minimum negative impact on the environment</i>
	Hubungan yang harmonis <i>Harmonious relationship</i>
	Memperoleh akses informasi yang luas <i>Broad information access</i>
Media Massa <i>Mass Media</i>	Hubungan yang harmonis <i>Harmonious relationship</i>
	Memperoleh akses informasi yang luas <i>Broad information access</i>
Kreditur <i>Creditor</i>	Keterbukaan informasi kinerja saat pemberian kredit dan update kinerja perusahaan <i>Disclosure of performance information when lending and provide corporate performance updates</i>

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA

Agar seluruh program CSR dapat terlaksana dengan efektif, tepat sasaran, dan tepat guna, Perusahaan menyusun *Roadmap* PKBL PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2007-2021 yang disusun dengan didahului pemetaan seluruh kepentingan dan harapan pemangku kepentingan di seluruh pelabuhan serta kondisi sosial di sekitar lingkungan perusahaan. Mengacu pada *roadmap* tersebut, tiap tahun seluruh pelabuhan juga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama 1 tahun ke depan.

PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. Desa Panglipuran merupakan desa wisata binaan Pelindo III sejak tahun 2015. Desa ini juga menjadi tujuan wisata turis mancanegara yang turun dari kapal pesiar di pelabuhan Pelindo III. Bantuan Pelindo III berupa sarana dan prasarana umum berupa toilet umum, perbaikan gapura kampung-kampung, dan perbaikan berugak. Saat ini, Desa Panglipuran menjadi desa paling bersih di dunia dan rutin menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan asing maupun domestik.
2. *Basic Safety Training* Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) merupakan pelatihan yang diberikan secara gratis oleh Perusahaan untuk TKBM yang bekerja di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III. Pelatihan ini dilaksanakan sejak tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para TKBM terhadap K3.

STRATEGY AND WORK PROGRAMME

For all CSR programmes to be implemented effectively, right on target, and appropriate, the Company has arranged the PKBL Roadmap of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for 2007-2021 which started with the mapping of all stakeholders' interest and expectations in all ports as well as the social condition around the company vicinity. Referring to the roadmap, all ports also arranged an annual Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Programme for the upcoming year.

PROGRAMMES BEYOND THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

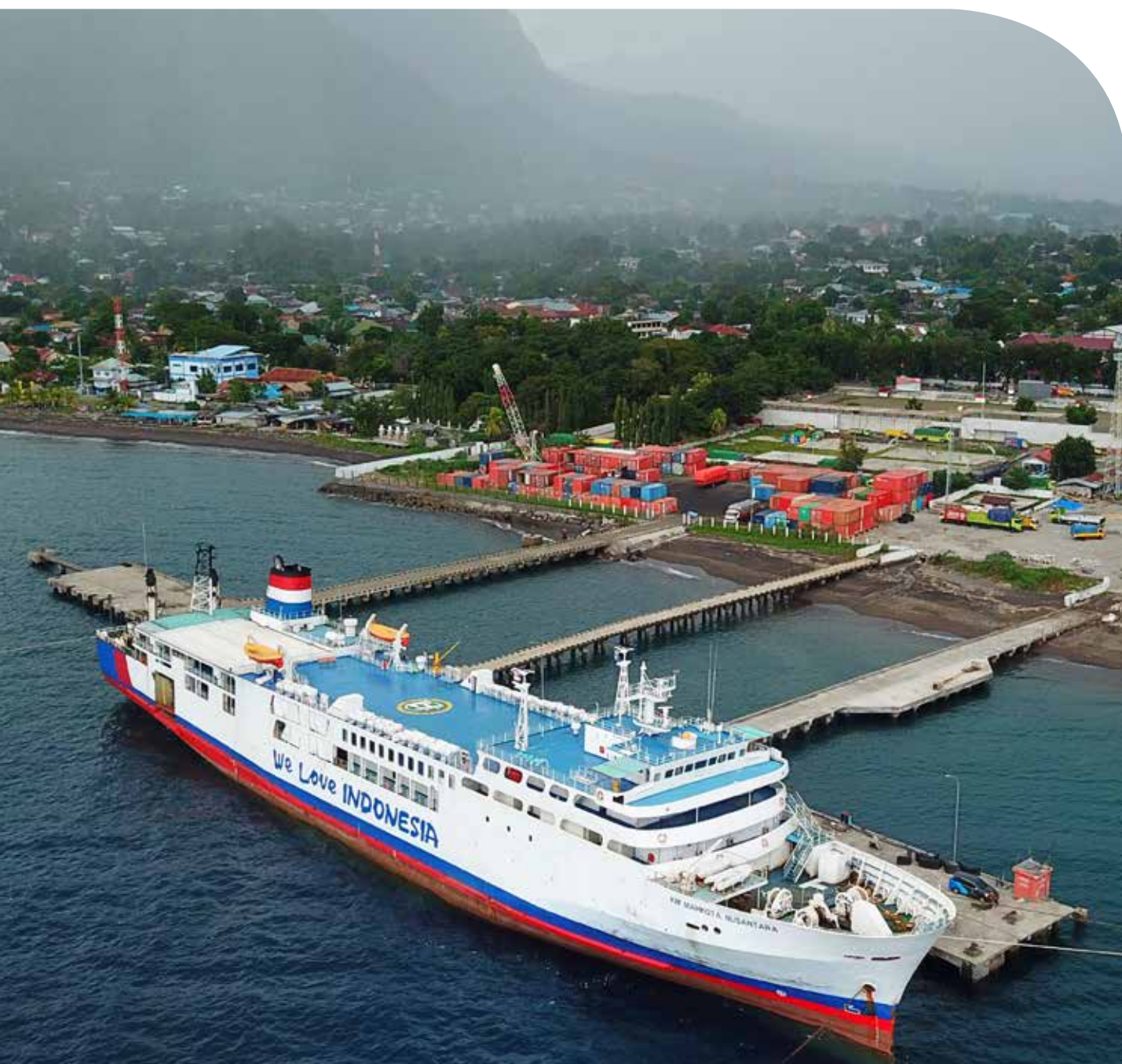
1. Desa Panglipuran is a tourist village which has been developed by Pelindo III since 2015. The village is also a destination for international tourists disembarked from cruise ships in Pelindo III ports. Pelindo III aided in the form of public infrastructure and facilities such as public toilets, repair on kampung gates, and repair on berugak. Currently, Desa Panglipuran is the cleanest village in the world and becomes one of the destinations for foreign and domestic tourists.
2. *Basic Safety Training for Loading Unloading Workforce (TKBM)* is a free training provided by the Company for TKBM working in ports managed by Pelindo III. The training has been implemented since 2018 to improve TKBM awareness on K3.

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN PROGRAM

Sampai dengan tahun 2019, Pelindo III telah menyalurkan pinjaman kepada 6.849 UMKM senilai Rp285,33 miliar dan tersebar di 7 Provinsi di wilayah kerja Perusahaan. Sementara itu, realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan di 2019 mencapai sebesar Rp38,08 miliar atau turun 8% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp41,4 miliar, sedangkan rata-rata bantuan yang disalurkan adalah sebesar Rp52,81 juta atau turun 25% dari rata-rata bantuan tahun 2018 sebesar Rp70,28 juta. Bantuan Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan menjadi bantuan terbanyak yaitu sebesar Rp10,92 miliar atau turun 1% dari realisasi triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp10,99 miliar.

PROGRAMME FUNDING AND BUDGET

As of 2019, Pelindo III has distributed loans to 6,849 UMKM worth Rp285.33 billion across seven provinces in the Company's work area. Meanwhile, distribution of the Community Development Programme in 2019 reached Rp38.08 billion or decreased by 8% from that of the 2018 realisation at Rp41.4 billion, while the average aid distributed is Rp52.81 million or decreased by 25% from that of the average aid in 2018 at Rp70.28 million. Social aid to alleviate poverty becomes the largest aid at Rp10.92 billion or decreased by 1% from the realisation in the fourth quarter of 2018 in Rp10.99 billion.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN CSR TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Selama ini, Pelindo III telah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan terkait CSR di lingkungan Group Perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kesejahteraan pegawai, kebebasan berserikat, kesempatan berkarir, pengaturan waktu kerja, pengaturan seragam pegawai, serta izin meninggalkan pekerjaan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja serta diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Direksi Perusahaan.

PERUMUSAN RUANG LINGKUP CSR TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dirumuskan dalam PKB yang didasari oleh hubungan industrial antara Perusahaan yang diwakili oleh Manajemen dan Pegawai yang diwakili oleh Serikat Pekerja, meliputi hubungan bipartit maupun tripartit, pemenuhan kesejahteraan pegawai, kesempatan berkarir, serta fasilitas serikat pekerja.

RENCANA KEGIATAN

Pelindo III senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan harapan peningkatan pada kinerja dan produktivitas pegawai yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan pegawai seiring dengan meningkatnya kinerja Perusahaan.

LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia dapat meliputi:

PEMENUHAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Perusahaan senantiasa ingin memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pegawai. Sejauh ini, kesejahteraan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pegawai seperti penghasilan/take home pay bulanan di atas rata-rata Upah Minimum Regional, Tunjangan, Bonus Tahunan, fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri, serta kesejahteraan lainnya yang diberikan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi Hak Asasi Manusia.

CSR COMMITMENT AND POLICY RELATED TO HUMAN RIGHTS

To date, Pelindo III is committed to applying CSR-related policy in the Company Group vicinity, including those related to Human Rights fulfilment. This is embodied in the form of fulfilment of employee welfare, freedom of association, career opportunities, work time arrangement, employee uniform arrangements, and permission to leave work. The policy is included in the Collective Bargaining Agreement (PKB) between the Company and Labour Union and further regulated in a BOD Regulation.

FORMULATION OF CSR SCOPE RELATED TO HUMAN RIGHTS

Human Rights scope is formulated in the PKB based on the industrial relationship between the Company (represented by the Management) and Employees (represented by the Labour Union), including bipartite and tripartite relationship, fulfilment of employee welfare, career opportunity, and labour union facilities.

ACTIVITY PLAN

Pelindo III continues to implement the human rights principles with the expectation to improve employee performance and productivity which will increase employee welfare along with the increase in Company performance.

SCOPE AND IMPLEMENTATION

Corporate social responsibility activities related to Human Rights may include:

FULFILMENT OF EMPLOYEE WELFARE

The Company strives to provide better welfare for the employees. To date, the welfare provided by the Company includes monthly salary/take-home pay above the average Regional Minimum Wage, Allowance, Annual Bonus, health facilities to maintain personal health and hygiene, and other welfare provided by paying attention to the equality and non-discrimination principles in Human Rights.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Pegawai berhak menjadi anggota Serikat Pekerja dan Perusahaan mendukung hal tersebut dengan memberikan fasilitas Serikat Pekerja seperti Ruang Kesekretariatan yang memadai serta menyediakan kotak saran bagi Pegawai untuk menyampaikan keluh kesah sebagai upaya pencegahan pelanggaran HAM.

KESEMPATAN BERKARIR

Perusahaan membuka kesempatan berkarir bagi pegawai dengan membuat sebuah sistem Manajemen Talenta yang Terintegrasi, sehingga pegawai dapat menyampaikan aspirasi karirnya untuk dapat dipertimbangkan dalam proses mutasi (baik rotasi maupun promosi) serta penentuan arah pengembangan diri pegawai. Perusahaan juga telah menunjuk pejabat struktural wanita untuk menempati posisi-posisi penting mulai dari Supervisor, Deputy Manajer, Manajer, Asisten Senior Manajer, Senior Manajer, bahkan Direktur Utama Anak Perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu kesetaraan.

PENGATURAN WAKTU KERJA

Perusahaan mengatur waktu kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan menetapkan waktu kerja pegawai sebanyak 5 hari dalam 1 minggu dengan jam kerja sebanyak 8 jam kerja sehari dan maksimal 40 jam kerja dalam satu minggu. Jam kerja normal bagi Pegawai *Non-Shift* yaitu Senin-Kamis pada pukul 08.00-17.00 WIB dengan waktu istirahat sebanyak 1 jam pada pukul 12.00-13.00 WIB dan untuk hari Jum'at pada pukul 07.00-16.00 WIB dengan waktu istirahat sebanyak 1 jam pada pukul 12.00-13.00 WIB.

IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

Perusahaan juga memberikan izin bagi pegawai untuk meninggalkan pekerjaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Ada beberapa jenis izin meninggalkan pekerjaan yang diberikan oleh Perusahaan yaitu Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, dan Cuti Ibadah Keagamaan.

- a. Cuti Tahunan
Cuti Tahunan diberikan kepada pegawai selama 14 hari kerja.
- b. Cuti Bersalin
Pegawai Perempuan berhak atas cuti bersalin yang diberikan oleh Perusahaan sebanyak 3 bulan kalender yang dilaksanakan 1,5 bulan sebelum persalinan dan 1,5 bulan setelah persalinan.
- c. Cuti Sakit
Pegawai yang sakit berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Pegawai Perempuan yang mengalami keguguran juga diberikan cuti selama 1,5 bulan sejak terjadinya keguguran sesuai surat keterangan dokter.
- d. Cuti Ibadah Keagamaan
Diberikan kepada seluruh pegawai yang ingin melaksanakan ibadah keagamaan.

FREEDOM OF ASSOCIATION

The employees have the right to become members of the Labour Union and the Company support this by providing a Labour Union facility such as an adequate Secretariat Room and providing a suggestion box for the Employees to submit their complaints as an effort to prevent Human Rights violation.

CAREER OPPORTUNITIES

The Company opens career opportunities for employees by establishing an Integrated Talent Management system for the employees to submit their career aspiration to be considered in a mutation process (both rotation and promotion) and determining the direction of their self-development. The Company also has appointed women as structural officials who held important positions such as Supervisor, Deputy Manager, Vice President, Senior Vice President, even a President Director in Subsidiaries. This is one of the fulfilments of Human Rights principles, namely equality.

WORK TIME ARRANGEMENT

The Company set the working hour in consideration of Human Rights principles by stipulating an employee working hour of five days in a week, eight hours a day and 40 hours in a week at a maximum. The normal working hour for Non-Shift Employees is Monday-Thursday at 08.00-17.00 WIB with one-hour of break time at 12.00-13.00 WIB, while on Fridays the working hour is 07.00-16.00 WIB with one-hour of break time at 12.00-13.00 WIB.

PERMISSION TO LEAVE WORK

The Company also permits the employees to leave their work in consideration of Human Rights principles. There are several permits to leave work, namely Annual Leave, Maternity Leave, Sick Leave, and Religious Worship Leave.

- a. Annual Leave
Annual Leave is given to employees for 14 days of work.
- b. Maternity Leave
Female employees have the right for three-months of maternity leave from the Company, starting 1.5 months before and after childbirth.
- c. Sick Leave
Sick employees have the right to sick leave by submitting a medical certificate. Female employees with miscarriage are also given 1.5 months of leave since the miscarriage per the medical certificate.
- d. Religious Worship Leave
Given to all employees who wish to carry out religious worship.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATIONS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN CSR TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Sebagai sebuah entitas yang bersinggungan dengan banyak pihak dalam kegiatan operasional sehari-harinya, Pelindo III berkomitmen untuk menerapkan prinsip operasi yang adil. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk Pedoman Etika dan Perilaku Pelindo III yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan Pelindo III yang merupakan penyempurnaan dari pedoman etika dan perilaku sebelumnya. Pedoman Etika dan Perilaku mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Pelindo III.

Pedoman Etika dan Perilaku menjadi dasar penerapan kebijakan dan pengendalian gratifikasi, Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS), dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa. Komitmen penerapan pengendalian gratifikasi Perusahaan diwujudkan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan pedoman Gratifikasi. Kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi oleh Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Ketua Umum SPPI III yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK pada tanggal 12 Maret 2014. Tindak lanjut dari penandatanganan komitmen tersebut adalah workshop penyusunan aturan gratifikasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan KPK serta pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pelindo III.

Sementara itu, dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan sekaligus memperkuat penerapan GCG di Perusahaan, Perusahaan menerapkan WBS. WBS juga digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Pelindo III dan pihak lainnya dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Komitmen Perusahaan untuk mengimplementasikan mekanisme ini diwujudkan dalam pembentukan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP) sesuai Surat Keputusan Direksi No. PER.78/HK.03/P.III-2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Untuk mengatur kerja sama dengan pihak-pihak luar, Pelindo III juga membuat Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa. Mekanisme ini menjadi fasilitas bagi semua penyedia barang/jasa untuk bekerja sama dengan Perusahaan. Mekanisme ini memastikan persaingan yang sehat sesuai dengan

CSR COMMITMENT AND POLICY ON FAIR OPERATIONS

As an entity intersecting with various parties in its operations, Pelindo III is committed to applying fair operations principles. This commitment is embodied in the form of Pelindo III Code of Conduct which has been ratified through the Joint Decision of the BOC, BOD, and Pelindo III Labour Union No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated 25 September 2017 on the Code of Conduct within Pelindo III which is an improvement of the previous Code of Conduct. The Code of Conduct regulates the policy of ethical values expressed explicitly as a behavioural standard that must be referred to as a guideline by all Personnel of Pelindo III.

The Code of Conduct becomes the foundation for the implementation of the gratification policy and control, Whistleblowing System (WBS), as well as the Goods and Services Procurement Mechanism. The commitment to gratuity control implementation in the Company is embodied in the cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) in preparing the Gratification guidelines. The cooperation started with the signing of the Statement of Commitment to Implement Gratification Control by the President Commissioner, President Director, and SPPI III Chairman witnessed by the Director of Gratification of KPK on 12 March 2014. The follow-up of the commitment signing is the workshop on the preparation of the gratification rules in cooperation with KPK and the establishment of Gratification Control Unit (UPG) Pelindo III.

Meanwhile, to avoid irregularities and fraud while strengthening the implementation of GCG practice, the Company applies WBS. It is also used to optimise the contribution of Personnel of Pelindo III and other parties in disclosing violations that occur within the Company. The Company's commitment to implementing this mechanism is embodied in the formation of the Integrated Complaint Handling Team (TTPP) based on the Decree of the BOD No. PER.78/HK.03/P.III-2015 dated 1 October 2015.

To regulate the cooperation with external parties, Pelindo III also established a Goods and Services Procurement Mechanism. The mechanism is a facility for all goods/services providers to cooperate with Pelindo III. The mechanism ensures sound competition following the clear and

ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) melalui Peraturan Direksi No. PER.69/LG.0202/P.III-2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan diperbarui oleh Perubahan Sispro No. PER.001/LG.0202/HOFC-2018 tanggal 17 April 2018.

PERUMUSAN RUANG LINGKUP CSR TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Pedoman Etika dan Perilaku berlaku bagi seluruh Insan Pelindo III, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perusahaan. Selain itu, pihak eksternal yang berhubungan dengan Perusahaan pun diwajibkan untuk mengikuti berbagai ketentuan yang ada di dalam Pedoman Etika dan Perilaku.

Pedoman Etika dan Perilaku mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Pelindo III. Pedoman ini berlaku dan ditandatangani oleh seluruh Insan Pelindo III setelah ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pegawai Pelindo III dengan No. 146/VII/KEP/DK.P.III/2014, HK.01/13/P.III-2014, SK 02/DPP.SPPI-III/VIII-2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Pedoman tersebut dapat diunduh di situs web Pelindo III oleh para Pemangku Kepentingan. Jika terjadi pelanggaran terhadap komitmen etika dan perilaku dapat diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemangku Kepentingan juga dapat mengakses WBS untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran pedoman etika dan perilaku, perjanjian kerja bersama, maupun ketentuan lain yang ditetapkan Perusahaan sehingga dapat bersama-sama mengawasi dan memantau kinerja Perusahaan.

Jika ruang lingkup kebijakan Kode Etik dan WBS melingkupi seluruh Insan Pelindo III, pelaporan gratifikasi hanya mencakup pegawai Perusahaan beserta Anak Perusahaan. Implementasinya bekerja sama dengan KPK untuk proses pelaporan, koordinasi, konsultasi, serta pemantauan dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi. Di sisi lain, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa mencakup semua pihak penyedia barang/jasa yang bekerja sama dengan Pelindo III melalui pemenuhan syarat dan ketentuan Perusahaan.

RENCANA KEGIATAN

Pelindo III senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip operasi yang adil melalui perwujudan komitmen-komitmen dan kebijakan yang telah dibuat. Harapannya, implementasi tersebut dapat menciptakan perilaku korporasi yang baik sekaligus persaingan yang sehat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

transparent provisions and procedures, hence it can be held accountable. The mechanism is implemented by the Goods and Services Procurement Work Unit (UKPBJ) through the Decree of the BOD No. PER.69/LG.0202/P.III-2017 dated 2 October 2017 and updated by Sispro Amendment No. PER.001/LG.0202/HOFC-2018 dated 17 April 2018.

FORMULATION OF CSR SCOPE ON FAIR OPERATIONS

The Code of Conduct applies to all Personnel of Pelindo III, from the BOC, BOD, and all employees of the Company. Also, external parties related to the Company are required to follow various provisions in the Code of Conduct.

The Code of Conduct regulates the policy of ethical values expressed explicitly as a behavioural standard that must be referred to as a guideline by all Personnel of Pelindo III. The guideline is signed and applied by all personnel of Pelindo III after it was established and jointly signed by the BOC, BOD, and Pelindo III Labour Union with No.146/VII/KEP/DK.P.III/2014, HK.01/13/P.III-2014, SK 02/DPP.SPPI-III/VIII-2014 dated 4 August 2014.

The guideline can be downloaded on the website of Pelindo III by the Stakeholders. Sanctions can be imposed upon any violation of ethical and behavioural commitment under the prevailing laws and regulations. Stakeholders may also access the WBS to report any violations on the Code of Conduct, collective labour agreement, and other provisions defined by the Company to oversee and monitor the Company performance.

If the scope of the Code of Conduct and WBS covers all Personnel of Pelindo III, gratification control only covers Company employees and the Subsidiaries. The implementation is in cooperation with KPK for reporting, coordination, consultation, as well as monitoring and evaluation process on the effectiveness of gratification control. On the other hand, the Goods and Services Procurement Mechanism covers all providers of goods/services cooperating with Pelindo III through the fulfilment of the Company's terms and condition.

ACTIVITY PLAN

Pelindo III strives to implement the principles of fair operations through the embodiment of its commitments and policies. It is expected that the implementation may create good corporate behaviour and sound competition based on the prevailing laws and regulation.

LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial Perusahaan terkait Operasi yang Adil di tahun 2019 meliputi:

PELAKSANAAN KODE ETIK

Berdasarkan ketentuan pada Pedoman Etika dan Perilaku, pelanggaran terhadap komitmen ini dapat diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hingga 31 Desember 2019, tercatat sebanyak 92 pelanggaran kode etik dengan detail pelanggaran dan proses penindakan sebagai berikut:

LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK 2019 REPORT ON THE VIOLATION OF THE CODE OF CONDUCT IN 2019

NO.	JENIS PELANGGARAN TYPE OF VIOLATION	JUMLAH TOTAL	SANKSI SANCTION
1.	Teguran Lisan <i>Oral Warning</i>	62	Potongan Bonus dengan persentase berbeda <i>Bonus Deduction with varying percentage</i>
2.	Disiplin Ringan <i>Light Discipline</i>	13	Teguran Tertulis dan Potongan Bonus dengan persentase berbeda <i>Written Warning and Bonus Deduction with varying percentage</i>
3.	Disiplin Sedang <i>Medium Discipline</i>	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan kenaikan penghasilan selama 1 tahun dan tidak dapat dipromosikan selama setengah tahun 2. Penundaan kenaikan penghasilan selama 2 tahun dan tidak dapat dipromosikan selama 1 tahun 3. Penurunan penghasilan 1 periodik lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 1,5 tahun 4. Penurunan penghasilan 1 periodik lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 2 tahun 5. Potongan Bonus dengan persentase berbeda <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Delay in income increase for one year and cannot be promoted for six months</i> 2. <i>Delay in income increase for two years and cannot be promoted for one year</i> 3. <i>Delay in income increase for one year and cannot be promoted for six months</i> 4. <i>Income decrease by one level lower and cannot be promoted for 1.5 year</i> 5. <i>Income decrease by one level lower and cannot be promoted for two years</i> 6. <i>Bonus Deduction with varying percentage</i>
4.	Disiplin Berat <i>Severe Discipline</i>	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kelas jabatan 1 tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 2 tahun 2. Penurunan kelas jabatan 2 tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 3 tahun 3. Penurunan kelas jabatan 3 tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 4 tahun 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 5. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri 6. Potongan Bonus dengan persentase berbeda <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Demotion level of one level lower and cannot be promoted for two years</i> 2. <i>Demotion level of two levels lower and cannot be promoted for three years</i> 3. <i>Demotion level of three levels lower and cannot be promoted for four years</i> 4. <i>Respectful dismissal not on one's accord</i> 5. <i>Dismissal not on one's accord</i> 6. <i>Bonus Deduction with varying percentage</i>

SCOPE AND IMPLEMENTATION

Corporate social responsibility activities related to Fair Operations in 2019 include:

THE CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION

Based on the regulation in the Code of Conduct, any violation to the ethical and behavioural commitment will result in sanctions under the prevailing laws and regulations. As of 31 December 2019, 92 violations of the Code of Conduct were recorded with the following details and follow up:

PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Untuk memastikan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang efektif dan efisien, terdapat pedoman Peraturan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan. Peraturan ini sekaligus membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang menetapkan Sekretaris Perusahaan menjadi koordinator pelaksanaan pelaporan Pegawai Perusahaan yang menerima gratifikasi.

Terdapat 3 kategori gratifikasi, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan, dan gratifikasi dalam kedinasan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah penerimaan gratifikasi sehubungan dengan jabatan sebagai Insan Pelindo III dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah penerimaan gratifikasi dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan Pelindo III meraih prestasi tertentu. Sementara itu, gratifikasi dalam kedinasan adalah penerimaan gratifikasi yang diterima Insan Pelindo III dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perusahaan.

Segala bentuk penerimaan atau penolakan gratifikasi oleh Tim UPG dicatat dalam laporan dan diserahkan kepada KPK. Sepanjang 2019, tercatat sebanyak 5 pemberian gratifikasi yang diterima pegawai Perusahaan baik dalam jajaran Dewan Komisaris, Direksi, General Manager, hingga staf. Uraian mengenai gratifikasi yang diterima disajikan dalam tabel di bawah ini:

GRATIFICATION CONTROL IMPLEMENTATION

To ensure an effective and efficient Gratification Control implementation, the Regulation of the BOD No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 dated 9 March 2018 on Gratification Control in within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and Its Subsidiaries was established. The regulation also established the Gratification Control Unit (UPG) which determined the Corporate Secretary as the coordinator of a report on personnel of the Company who receive gratuity.

There are three categories of gratification, namely the gratification that is obliged to report, the gratification that is not obliged to report, and gratification in official duties. The gratification that is obliged to report is gratuity receipt concerning the position as a Personnel of Pelindo III is against their duties and obligations, while the gratification that is not obliged to report is gratuity receipt from third parties based on valid agreement or due to certain achievements received by the Personnel of Pelindo III. Meanwhile, gratification in official duties is gratuity receipt by a Personnel of the Company during the official duties assigned to them as the Company's representative.

Any form of gratuity acceptance or rejection by UPG is recorded in the report submitted to KPK. Throughout 2019, five gratuities received by the Company's employees at the BOC, the BOD, General Manager, and staff. Details on the received gratification are presented in the following table:

PENERIMAAN GRATIFIKASI 2019
GRATUITY RECEIPT IN 2019

NO.	PENERIMA RECIPIENT	PEMBERI SENDER	TEMPAT DAN WAKTU PENERIMAAN PLACE AND TIME OF RECEIPT	BENTUK GRATIFIKASI FORM OF GRATIFICATION	JUMLAH AMOUNT	HARGA SATUAN (ESTIMASI) PRICE PER UNIT (ESTIMATE)	NILAI GRATIFIKASI (ESTIMASI) GRATIFICATION VALUE (ESTIMATE)	KETERANGAN INFORMATION
1.	Pandji Widya Rasmii	PT Sriboga Flour Mills	Kantor Pusat Pelindo III, 20 Maret <i>Pelindo III Head Office, 20 March</i>	Tepung Flour	3 Dos (36 pax) 3 boxes (36 pax)	Rp10.000	Rp360.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>
2.	Hafid Noval	Mitra Kerja	Kantor Pusat Pelindo III <i>Pelindo III Head Office</i>	Parcel Kue <i>Cake Parcel</i>	1	Rp500.000	Rp500.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>
3.	Karina Rindang	PT SMC	Rumah Home	Parcel Kue <i>Cake Parcel</i>	1	Rp500.000	Rp500.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>

NO.	PENERIMA RECIPIENT	PEMBERI SENDER	TEMPAT DAN WAKTU PENERIMAAN PLACE AND TIME OF RECEIPT	BENTUK GRATIFIKASI FORM OF GRATIFICATION	JUMLAH AMOUNT	HARGA SATUAN (ESTIMASI) PRICE PER UNIT (ESTIMATE)	NILAI GRATIFIKASI (ESTIMASI) GRATIFICATION VALUE (ESTIMATE)	KETERANGAN INFORMATION
4.	Toto Nugroho, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Toto Nugroho, Business Transformation and Development Director</i>	TTL	Kantor Pusat Pelindo III, 1 Juli, 15.00 WIB <i>Pelindo III Head Office, 1 July, 15.00 WIB</i>	Parcel Kue <i>Cake Parcel</i>	1	Rp750.000	Rp750.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>
5.	Toto Nugroho, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis <i>Toto Nugroho, Business Transformation and Development Director</i>	PGN LNG	Kantor Pusat Pelindo III, 1 Juli, 15.00 WIB <i>Pelindo III Head Office, 1 July, 15.00 WIB</i>	Parcel Kue <i>Cake Parcel</i>	1	Rp500.000	Rp500.000	Sudah diserahkan ke Masjid Baitul Hakam <i>Submitted to Masjid Baitul Hakam</i>

PELAKSANAAN SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN

Sistem Pengaduan Pelanggaran di Pelindo III dikelola secara profesional oleh Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP). Tugas dan wewenang TTPP meliputi:

1. Melakukan investigasi berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern, Direktorat, Biro dan cabang perusahaan, serta pihak eksternal terkait;
2. Membuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/pemintaan keterangan terhadap pengaduan yang disampaikan pelapor; dan
3. Memberikan klarifikasi/jawaban yang diperlukan apabila terdapat pihak lain yang meminta keterangan tentang tindak lanjut pengaduan.

Pemangku Kepentingan dapat menyampaikan pengaduan mereka melalui media-media pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan sebagai berikut:

WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

Whistleblowing System in Pelindo III is managed professionally by the Integrated Complaint Handling Team (TTPP). The duties and authorities of TTPP include:

1. Conduct investigation by coordination with the Internal Audit, Directorate, Company Bureau and branch, and related external parties;
2. Make conclusions, suggestions, and recommendations based on the results of examination/request for information submitted by the whistleblower; and
3. Provide the necessary clarification/answer if other parties are enquiring the information on the follow-up to the report.

Stakeholders may submit their complaints through the following reporting media provided by the Company:



NO. KONTAK
CONTACT NO

0823 666 9999



**SURAT DENGAN
ALAMAT:**
A LETTER TO:

PO BOX 1128



FAKS:
FAX:

+6231 329 1291



SUREL:
E-MAIL:

timwbs@pelindo.co.id

Untuk memastikan penyebaran informasi mengenai WBS, Perusahaan melaksanakan sosialisasi WBS secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Pelindo III. Secara berkala juga akan melaksanakan pemutakhiran serta penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan. Sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG, publikasi melalui intranet, dan media komunikasi lainnya.

Pada tahun 2019, tidak terdapat laporan pelanggaran yang diterima ataupun diproses oleh WBS sehingga tidak ada sanksi/tindak lanjut yang dilakukan.

PELAKSANAAN MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). UKPBJ Perusahaan sudah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan proses bisnis pengadaan barang/jasa yang berlaku melalui situs eproc.pelindo.co.id.

E-Procurement memfasilitasi semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada *database* e-proc, serta membuka kesempatan mendaftar yang seluas-luasnya kepada seluruh penyedia yang belum terdapat pada Daftar Rekanan Perusahaan (DRP) dengan syarat dan ketentuan yang sama. Aplikasi ini juga telah lulus sertifikasi ISO 27001 semenjak tahun 2018.

Evaluasi kegiatan dilakukan berkala setiap bulan sekali dengan membahas hasil kinerja, tata cara, dan sispro pelelangan itu sendiri; dengan melihat data pada bulan sebelumnya sebagai acuan tren proses pelelangan.

Dari hasil kinerja tahun 2018 UKPBJ telah melelangkan 2.029 pekerjaan dan berhasil melakukan efisiensi sebesar 8% dari anggaran atau Rp115.503.132.109. Pada tahun 2019 UKPBJ telah melelangkan 2.350 pekerjaan dan berhasil melakukan efisiensi sebesar 11,8% dari anggaran atau Rp275.162.092.026.

Aplikasi E-Procurement mengalami pengembangan berkelanjutan. Untuk tahun 2019 telah dikembangkan metode *upload password* penawaran baru yang lebih memudahkan rekanan untuk *upload password* dan mengurangi risiko gagal terkirimnya *password* kepada rekanan. Terdapat penambahan jenis PO pada aplikasi SAP, yaitu PO Pembayaran dan PO Penyelesaian Pekerjaan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

To ensure the information dissemination on WBS, the Company continuously organises WBS socialisation to all Personnel of Pelindo III. Periodic updates and enhancements for continuous improvement are also conducted, parallel with the Company's business development. The socialisation is conducted in conjunction with GCG implementation dissemination, publication via intranet and other communication media.

There are no reports on violation in 2019 both those received and processed by WBS, hence no sanction/follow up is imposed/conducted.

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT MECHANISM IMPLEMENTATION

The implementation of Goods and Services is conducted by the Goods and Services Procurement Work Unit (UKPBJ). The Company's UKPBJ has adopted an electronic procurement system using information technology that is in line with the applicable process of goods/services procurement, through eproc.pelindo.co.id.

E-Procurement facilitates all providers of goods/services registered in the e-proc database and provides extensive opportunities to all providers not registered on the List of Corporate Associates (DRP) the same terms and conditions. This application has also passed ISO 27001 certification since 2018.

The evaluation activity is carried out every month by discussing the performance results, procedures, and procedures for the auction itself by looking at the data in the previous month as a reference for trends in the auction process.

From the results of the 2018 performance, UKPBJ has auctioned 2,029 jobs and made 8% efficiency of the budget or Rp115,503,132,109. In 2018 2019 had auctioned 2,350 jobs and made 11.8% efficiency of the budget or Rp275,162,092,026.

E-Procurement applications undergo continuous development. In 2019 a password upload method for new offer has been developed to facilitate the partners in uploading their passwords and reduce the risk of sending failure to the partners. There is also an additional PO on SAP app, namely PO Payment and PO Job Completion to accelerate the procurement of goods and services.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, maka sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, Pelindo III memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan sebagai acuan untuk mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap kegiatan operasional Perusahaan.

Untuk memastikan Perusahaan selalu menjalankan kegiatan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, Perusahaan melakukan sertifikasi dan audit Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015). Kegiatan audit yang dilakukan oleh Perusahaan terdiri dari audit eksternal dan internal yang dilakukan setiap tahun. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Sertifikasi selaku perusahaan yang mengeluarkan sertifikat ISO 14001:2015 bagi Perusahaan, sedangkan audit internal dilakukan oleh pihak manajemen Perusahaan.

Pelindo III juga telah memperoleh Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 sesuai dengan SNI 19-14001-2005 dengan Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 54/KEP/BSN/05/2002 dan ISO 14001:2015 yang mengacu pada Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 282/KEP/BSN/12/2015. Saat ini ISO 14001:2015 telah diterapkan pada 9 Cabang Pelabuhan dan 1 Unit Kantor Pusat.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT AND POLICY

Under Law No. 32 of 2009 stating that every activity is obliged to maintain the continuity of environmental functions, as an SOE engaging in port services, Pelindo III commits to the environment. The Company has environmental documents as a reference to manage the environmental impacts as the result of each operational activity of the Company.

To ensure continuous environmental responsibility activities, the Company conducts certification and audit on the Environmental Management System (ISO 14001:2015). The audit activities conducted by the Company consist of external and internal annual audits. The external audit is conducted by the Certification Board as a company issuing the ISO 14001:2015 certificate for the Company, while the internal audit is conducted by the Company management.

Pelindo III has obtained ISO 14001:2015 Certificate of Environmental Management System implementation according to SNI 19-14001-2005 with the Decree by the National Standardization Agency No. 54/KEP/BSN/05/2002 and ISO 14001:2015 referring to the Decree by the National Standardisation Agency No. 282/KEP/BSN/12/2015. Currently, ISO 14001:2004 has been implemented to nine Port Branches and one Head Office.

SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001 ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

NO.	CABANG BRANCH	VERSI VERSION	NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	BADAN SERTIFIKASI CERTIFICATION AGENCY	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD
1.	Kantor Pusat <i>Head Office</i>	2015	01 104 1535145/01	TUV Rheinland	20 Februari 2019 s.d. 9 Februari 2022 20 February 2019 until 9 February 2022
2.	Tanjung Perak	2015	01 104 1535145/02		
3.	Banjarmasin	2015	01 104 1535145/03		
4.	Tanjung Emas	2015	01 104 1535145/04		
5.	TPKS	2015	01 104 1535145/05		
6.	Tanjung Intan	2015	01 104 1535145/06		

NO.	CABANG BRANCH	VERSI VERSION	NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	BADAN SERTIFIKASI CERTIFICATION AGENCY	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD
7.	Kotabaru	2015	01 104 1535145/07		
8.	Gresik	2015	01 104 1535145/08	TUV Rheinland	20 Februari 2019 s.d. 9 Februari 2022 20 February 2019 until 9 February 2022
9.	Benoa	2015	01 104 1535145/09		
10.	Kupang	2015	01 104 1535145/10		

PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP DALAM INTERNAL PERUSAHAAN

Komitmen Perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diwujudkan melalui banyak program, di antaranya program *paperless and green port*. *Paperless* merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Perusahaan untuk mengurangi penggunaan kertas, melalui optimalisasi implementasi teknologi informasi. Seiring dengan upaya untuk menerapkan dan mendukung program *green port*, Perusahaan telah menggunakan mesin dan peralatan bongkar muat yang lebih ramah lingkungan (elektrifikasi) di beberapa Cabang Pelabuhan.

Salah satu upaya lain untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam kegiatan operasional, Perusahaan melakukan upaya pengurangan emisi gas buang dari kapal dan peralatan apung lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil. Sebagai alternatif daya, Perusahaan menyediakan suplai listrik darat atau yang dikenal dengan *shore plug connection* pada saat kapal *standby* di tambatan. Melalui program bina lingkungan, Pelindo III juga berkomitmen untuk turut berpartisipasi mengurangi dampak pemanasan global yang lebih buruk terhadap bumi. Upaya ini ditempuh dengan melakukan kegiatan berupa program penghijauan di sekitar pelabuhan dan pesisir pantai.

KEGIATAN CSR BIDANG LINGKUNGAN 2019

TARGET

Di tahun 2019, Pelindo III telah menyusun target/rencana kegiatan CSR di bidang lingkungan. Target tersebut antara lain adalah:

1. Penanaman 51.900 bibit bakau di seluruh wilayah kerja perusahaan.
2. Rehabilitasi terumbu karang di Kabupaten Buleleng.

REALISASI DAN DAMPAK KUANTITATIF

Pelindo III telah berhasil merealisasikan setiap target/rencana kegiatan CSR di bidang lingkungan yang telah ditetapkan manajemen Perusahaan di tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan telah direalisasikannya penanaman 51.900 bibit bakau di seluruh wilayah kerja Perusahaan

ENVIRONMENTAL PROGRAMME WITHIN THE COMPANY

The Company's commitment to preserving the environment is manifested through various programmes, e.g. paperless and green port programme. Paperless is one of the programmes performed by the Company to reduce paper usage through the optimisation of information technology implementation. Along with implementing and supporting the green port programme, the Company has been using more environmentally-friendly machinery and loading-unloading equipment at several port branches.

Another effort to minimise negative environmental impacts from operational activities is by reducing exhaust emissions from ships and other floating equipment using fossil fuels. As an alternative power, the Company provides a land electricity supply or known as a shore plug connection when the ship is on standby on the dock. Through its community development programme, Pelindo III is also committed to taking part in reducing the impact of global warming that is worse for the earth. This effort was taken by carrying out activities in the form of greening programmes around ports and beaches.

ENVIRONMENTAL CSR ACTIVITIES IN 2019

TARGETS

In 2019 Pelindo has set the target/activity plan for environmental CSR activities. The targets are as follows:

1. *Planting 51,900 mangrove seeds in all company work areas.*
2. *Coral rehabilitation in Kabupaten Buleleng.*

REALISATION AND QUANTITATIVE IMPACTS

Pelindo III has successfully realised every target/activity plan for environmental CSR activities set by the management in 2019. This is proven by the realisation of 51,900 mangrove seeds planting in all company work areas as well as coral rehabilitation in Kabupaten Buleleng. These programmes

serta rehabilitasi terumbu karang di Kabupaten Buleleng. Beberapa program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan hidup di sekitar Perusahaan.

are carried out as a form of the Company's concern for the environment around the Company.

PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN

Komitmen Perusahaan untuk terus mampu menjadi warga korporat yang baik ditunjukkan melalui berbagai penghargaan di bidang lingkungan yang diterima sepanjang 3 tahun terakhir:

ENVIRONMENTAL AWARDS

The Company's commitment to always becoming a good corporate citizen is proven through a number of awards in the environment received in the last three years:

PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN DI TIGA TAHUN TERAKHIR ENVIRONMENTAL AWARDS IN THE LAST THREE YEARS

NO.	PENGHARGAAN AWARDS	TAHUN YEAR
1.	Pelindo III – Kategori BUMN Perhubungan Laut Pelaksana PKBL/CSR Pengembang UMKM Terbaik dari Universitas Sebelas Maret <i>Pelindo III – Sea Transportation SOE Category, the Best PKBL/CSR Implementer for UMKM Development from Universitas Sebelas Maret</i>	2017
2.	Penghargaan International Council For Small Bussiness (ICSB) Indonesia President award 2017 MarkPlus, Inc didukung Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Republik Indonesia <i>International Council For Small Bussiness (ICSB) Indonesia award in the 2017 Markplus, Inc. award, supported by the Indonesian Ministry of Cooperation and Small-Medium Size Enterprise</i>	2017
3.	Penghargaan Pemerintah Kota Mojokerto atas Program CSR di Kota Mojokerto Tahun 2018 <i>Award from the Government of Mojokerto for the 2018 CSR Programme in Mojokerto</i>	2018
4.	Penghargaan kategori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas untuk Program Kampung Lawas Maspati dari The La Tofi School Of CSR Tahun 2019 <i>The award in Community Economic Development Category for Kampung Lawas Maspati Programme from The La Tofi School of CSR in 2019</i>	2019

MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Apabila masyarakat menemukan keluhan yang terkait dengan Perusahaan, maka dapat menyampaikan keluhan tersebut melalui Humas Perusahaan. Jika keluhan tersebut terkait dengan pelanggan maka mekanismenya sebagai berikut:

1. User Internal atau user eksternal menyampaikan suara melalui salah satu media komunikasi.
2. User internal dan petugas gateway akan menerima dan mencatat suara pelanggan ke dalam Customer Portal.
3. Tim CRO melakukan pengklasifikasian suara pelanggan untuk kemudian didistribusikan kepada unit kerja terkait.
4. Unit kerja terkait segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.
5. Cabang segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.
6. Kantor Pusat segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas suara pelanggan.

COMPLAINT MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL PROBLEMS

If the public has complaints related to the Company, they can submit the complaints through the Corporate Communication of the Company. If the complaint is related to the customer, the following mechanism is applied:

1. Internal or external user relays the message via one of the communication media.
2. Internal user and gateway officer will receive and record customer message into the Customer Portal.
3. CRO Team classifies the customer message to be distributed to relevant work units.
4. Related work units follow up the complaints in the form of comments and/or answers to the message.
5. The branch immediately follows up in the form of comments and/or answers to the message.
6. The Head Office immediately follows up in the form of response and/or answers to the message.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN K3

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja, yang telah diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02/Men/1980 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.03/Men/1982 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

POLICY AND COMMITMENT RELATED TO EMPLOYMENT AND K3

In performing the corporate responsibility to employment, occupational health and safety (K3), the Company refers to several prevailing regulations and laws and regulations, including:

1. Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety.
2. Law No. 33 of 2013 on Employment.
3. Law No. 36 of 2009 on Health.
4. Government Regulation No. 50 of 2012 on Implementation of Occupational Safety and Health Management System.
5. Presidential Decree No. 22 of 1993 on Occupational Disease, updated with the Presidential Decree No. 7 of 2019 on Occupational Disease.
6. Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.02/Men/1980 of 1980 on Manpower Medical Examination in the Implementation of Occupational safety.
7. Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. Per.03/Men/1982 of 1982 on Occupational Health Services.
8. Regulation of the Minister of Manpower No. 4 of 1987 on the Occupational Health and Safety Committee.
9. Regulation of the Minister of Manpower No. PER-04/MEN/1987 on Occupational Health and Safety Committee as well as Appointment Procedure of Occupational Safety Expert.
10. Regulation of the Minister of Manpower No. 2 of 1992 on Procedure for Appointment, Responsibility, and Authority of Occupational Health and Safety Expert.
11. Regulation of the Minister of Manpower No. PER-03/MEN/1998 on Procedure for Accident Reporting and Inspection.
12. Regulation of the Minister of Manpower No. PER.13/MEN/X/2011 on Threshold Limit Value of Physical and Chemical Factors at the Workplace.
13. Regulation of the Minister of Manpower No. 26 of 2014 on Implementation of Occupational Health and Safety Management System Assessment.
14. Regulation of the Minister of Manpower No. 18 of 2016 on Board of Occupational Safety and Health.

Prinsip penerapan K3 di Perusahaan adalah *Zero Tolerance For Accident* yang bermakna bahwa Pelindo III berkomitmen untuk tidak menerima terjadinya insiden dengan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja sesuai kaidah-kaidah K3; serta dalam pengelolaan K3 di unit kerja diberlakukan sistem *reward* dan *punishment* ke seluruh Insan Pelindo III.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

Perusahaan berkembang dan tumbuh bersama SDM. Oleh karena itu Perusahaan memandang SDM sebagai fondasi utama bagi Perusahaan dalam bertumbuh, baik dalam segi operasional maupun bisnis yang dijalankan. Komitmen perusahaan terhadap pentingnya SDM dan melaksanakan tanggung jawab sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan:

1. Kesetaraan dan persamaan hak atau memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh pegawai dalam kesempatan kerja.
2. Pemenuhan remunerasi/imbalance kerja dan kesejahteraan pegawai.
3. Penyediaan sarana dan prasarana K3. Dalam hal ini, Perusahaan:
 - Mengimplementasikan Sistem Manajemen K3.
 - Menyediakan tempat kerja dan fasilitas kerja yang memadai (sehat, aman, dan nyaman) untuk pegawai.
 - Menjalankan program kesehatan bagi pegawai.
4. Menjalankan program pengembangan kompetensi bagi pegawai.
5. Kebebasan berserikat bagi pegawai.
6. Melakukan pengelolaan tingkat perputaran pegawai.
7. Peningkatan kepedulian mitra kerja pada K3 di area kerja.
8. Kegiatan pegawai di luar jam kerja sebagai stimulus pembentukan iklim kerja yang sportif dan kondusif.

ORGAN PENGELOLA K3 PERUSAHAAN

Sebagai persyaratan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) maka wajib dibentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang menjadi wadah antara Perusahaan dan pegawai untuk bersama-sama menerapkan K3. Penanggung jawab penerapan SMK3 adalah pimpinan puncak Perusahaan, yaitu SM Umum/Kepala Kantor Pusat untuk unit Kantor Pusat, dan General Manager untuk Pelabuhan Cabang/UPP. P2K3 merupakan gugus tugas fungsional yang tugas pokoknya memberikan saran dan pertimbangan terkait permasalahan K3 kepada manajemen Perusahaan, baik diminta maupun tidak diminta.

Seluruh sistem manajemen telah diterapkan di Perusahaan, yaitu meliputi Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Keamanan dan Lingkungan (Sistem Manajemen MK4L) telah diintegrasikan dalam pelaksanaannya.

K3 implementation principle in the Company is "Zero Tolerance for Accident" which means that Pelindo III is committed to not receiving accidents by taking the measures to prevent any occupational accidents at the workplace under the K3 rules and adopting a reward and punishment system to Personnel of Pelindo III in all work units.

SCOPE AND FORMULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT

The Company develops and grows with its Human Capital. Therefore, the Company views its Human Capital as the main foundation for the Company to growth, both in terms of operations and the business it engages in. The Company's commitment to the importance of Human Capital and carrying out social responsibility in employment is carried out through:

1. *Equality and equal rights or giving the same treatment to all employees in work opportunity.*
2. *Fulfilment of remuneration/employee benefit and welfare.*
3. *Provision of K3 facilities and infrastructure. In this sense, the Company:*
 - *Implements K3 Management System.*
 - *Provides adequate workplace and facilities (healthy, safe, and comfortable) for the employees.*
 - *Carry out health programme for employees.*
4. *Carry out competency development programme for employees.*
5. *Freedom of association for employees.*
6. *Management of employee turnover level.*
7. *Improving K3 awareness of work partners in work areas.*
8. *Employee activity outside the working hour as a stimulus for establishing a sportive and conducive working climate.*

K3 MANAGEMENT ORGAN IN THE COMPANY

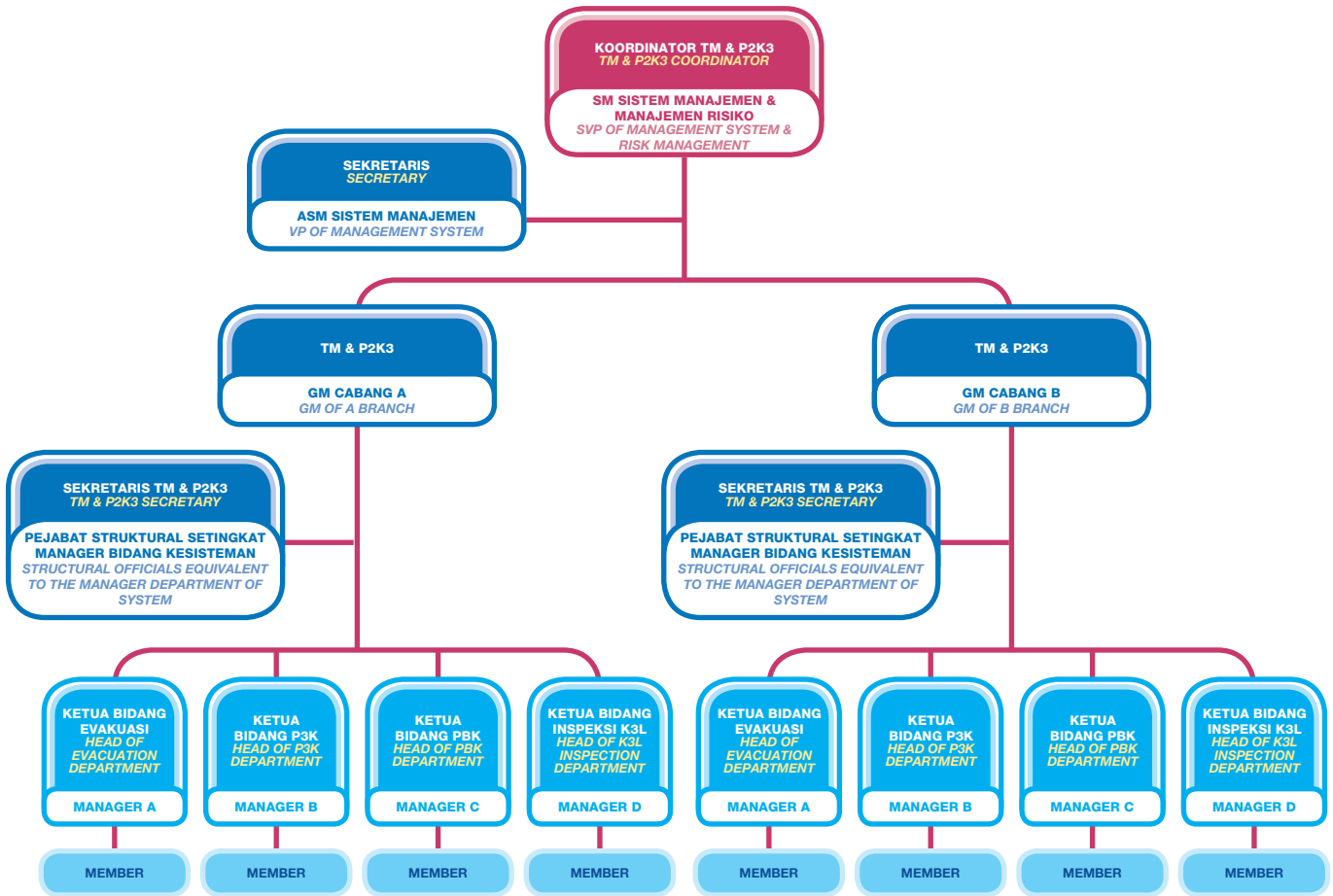
As a requirement of the K3 Management System (SMK3) implementation, the Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3) must be established as a means of the Company and its employees to jointly implement K3. A person in charge of SMK3 is the top management of the Company, namely SVP General Affairs/Head Office unit and General Manager for Port Branch/UPP. P2K3 is a functional task force whose main task is to provide advice and consideration related to K3 issues to the Company's management, whether requested or not requested.

All management system has been implemented in the Company, including Quality Management System, Occupational Health and Safety, as well as Security and Environment (MK4L Management System) has been integrated into their implementation.

Penerapan Sistem Manajemen MK4L di Kantor Pusat menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja Kantor Pusat yang dikoordinasi oleh unit Sistem Manajemen di bawah pimpinan koordinator *Top Management* (TM) dan P2K3 yang melekat pada jabatan SM Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko. Pada Cabang/UPP Penerapan Sistem Manajemen MK4L menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja terminal/pelabuhan yang dikoordinasi oleh Unit Kesisteman dibawah pimpinan TM dan P2K3 yang melekat pada General Manager terminal/pelabuhan terkait. Struktur TM dan P2K3 dapat digambarkan sesuai dengan bagan berikut:

The implementation of MK4L System Management at the Head Office is the responsibility of all work units of the Head Office coordinated by Management System unit supervised by Top Management (TM) and P2K3 attached to the SVP Management System and Risk Management position. At the Branch/UPP, the MK4L System Management implementation is the responsibility of all work units of the Branch coordinated by System Unit supervised by the head of TM and P2K3 attached to the General Manager of the related Branch. The TM and P2K3 structure are described in the following chart

STRUKTUR TM DAN P2K3 PADA CABANG PELABUHAN TM AND P2K3 STRUCTURE IN PORT BRANCHES



TARGET/RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019

Target K3 di tahun 2019 dituangkan dalam KPI untuk dengan indikator dan bobot nilai sebagai berikut:

INDIKATOR DAN BOBOT NILAI KPI K3 TAHUN 2019 K3 KPI INDICATOR AND WEIGHT VALUE IN 2019

NO.	INDIKATOR INDICATOR	NILAI VALUE
1.	Jumlah kecelakaan kerja berakibat meninggal dunia <i>The total occupational accident resulting in a fatality</i>	0
2.	Jumlah kecelakaan kerja berakibat cedera berat <i>The total occupational accident resulting in heavy injury</i>	0
3.	Jumlah kecelakaan kerja berakibat kerusakan harta benda <i>The total occupational accident resulting in property damage</i>	99

Sementara itu, rencana Program K3 tahun 2019 meliputi:

1. Peringatan Bulan K3 Nasional.
2. Asesmen K3 Terminal/Pelabuhan.
3. *Silent inspection* Terminal/Pelabuhan.
4. Pemenuhan perizinan lingkungan di area kerja.
5. Pelatihan *Basic Safety* pada TKBM di 4 Regional.
6. Simulasi K3.

Secara menyeluruh, Rencana Kerja Manajemen untuk tahun 2019 yaitu “pengembangan aplikasi *safety patrol* korporat menjadi aplikasi HSSE korporat”.

REALISASI KEGIATAN

Berdasarkan target dan rencana kegiatan yang telah disusun, berikut adalah realisasi kegiatan yang telah dicapai:

- a. Pencapaian KPI K3 di tahun 2019 dengan deskripsi sebagai berikut:

INDIKATOR DAN PENCAPAIAN KPI K3 TAHUN 2019 K3 KPI INDICATOR AND WEIGHT VALUE IN 2019

NO.	INDIKATOR INDICATOR	NILAI VALUE
1.	Jumlah kecelakaan kerja berakibat meninggal dunia <i>The total occupational accident resulting in a fatality</i>	0
2.	Jumlah kecelakaan kerja berakibat cedera berat <i>The total occupational accident resulting in heavy injury</i>	0
3.	Jumlah kecelakaan kerja berakibat kerusakan harta benda <i>The total occupational accident resulting in property damage</i>	99

- b. Realisasi rencana Program K3 tahun 2019, yang meliputi:

TARGET/ACTIVITY PLAN IN 2019

K3 targets in 2019 is included in KPI with the following indicator and weight value:

Meanwhile, K3 Programme plan for 2019 includes:

1. *Commemoration of National K3 Month.*
2. *K3 Assessment in Terminal/Ports.*
3. *Silent inspection in Terminal/Ports.*
4. *Fulfilment of environmental permit in the work area.*
5. *Basic Safety training for TKBM in 4 Regions.*
6. *K3 Simulations.*

The overall Management Work Plan for 2019 is “development of corporate safety patrol app into corporate HSSE app”.

ACTIVITY REALISATION

Based on the set target and activity plan, below is the realisation of the achieved activities:

- a. *K3 KPI Achievement in 2019 with the following description:*

- b. *The realisation of K3 Programme in 2019 which includes:*

REALISASI PROGRAM K3 DI 2019

K3 PROGRAMME REALISATION IN 2019

NO.	PROGRAM/KEGIATAN PROGRAMME/ACTIVITY	REALISASI REALISATION	KETERANGAN INFORMATION
1.	Peringatan Bulan K3 Nasional <i>Commemoration of National K3 Month</i>	Jan-Feb <i>Jan-Feb</i>	Terminal/Pelabuhan, Regional <i>Terminal/Ports, Regions</i>
2.	<i>Silent inspection</i> Terminal/Pelabuhan <i>Silent inspection in Terminal/Ports</i>	Jan-Des <i>Jan-Dec</i>	Terminal/Pelabuhan <i>Terminal/Ports</i>
3.	Pemenuhan perizinan lingkungan di area kerja <i>Fulfilment of environmental permit in work area</i>	Jan-Des <i>Jan-Dec</i>	Kantor Pusat dan Regional <i>Head Office and Regions</i>
4.	Pelatihan <i>Basic Safety</i> pada TKBM di 4 Regional <i>Basic Safety training for TKBM in 4 Regions</i>	Sep-Okt <i>Sep-Oct</i>	Kantor Pusat dan Regional <i>Head Office and Regions</i>
6.	Simulasi K3 <i>K3 Simulations</i>	Jan-Feb <i>Jan-Feb</i>	Terminal/Pelabuhan, Regional, dan Kantor Pusat <i>Terminal/Ports, Regions, and Head Office</i>

- c. Realisasi Rencana Kerja Manajemen untuk tahun 2019, “pengembangan aplikasi *safety patrol* korporat menjadi aplikasi HSSE korporat”, adalah penambahan fitur HSSE dalam aplikasi My Pelindo. Fitur ini telah *go live* pada November 2019. Hal ini memberikan kemudahan bagi seluruh pegawai untuk melakukan pelaporan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja.
- d. Pelatihan *Basic Safety* pada TKBM telah terlaksana pada 4 Regional, hal ini memberikan dampak yang baik terkait peningkatan kepedulian TKBM pas aspek K3 saat melakukan pekerjaan di area PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
- c. *Management Work Plan realisation in 2019, “development of corporate safety patrol app into corporate HSSE app”, is by adding an HSSE feature in the My Pelindo app. The feature has gone live in November 2019. This has facilitated all employees to conduct reporting and participate in K3 implementation in the workplace.*
- d. *Basic Safety training for TKBM has been implemented in four regions and has given good impacts related to raising their K3 awareness while carrying out their duties in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) area*

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN K3

KESEMPATAN KERJA YANG SAMA

Pola karir pegawai Pelindo III telah diatur dalam Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.19/KP.0403/P.III-2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penyempurnaan Peraturan Direksi No. PER.88/KP.0403/P.III-2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.26/KP.0403/P.III-2014 tentang Karier Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan. Keberadaan pola karir tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kesempatan pengembangan karir yang sama kepada masing-masing pegawai Pelindo III. Di dalam Peraturan Direksi tersebut dijelaskan mengenai penjenjangan karir pegawai Perusahaan berdasarkan pendidikan pegawai dan keahlian pegawai. Selain itu, juga dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dalam jabatan untuk kepentingan promosi dan mutasi pegawai.

TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN

Perputaran karyawan dalam suatu perusahaan dijadikan indikator baik buruknya lingkungan kerja di perusahaan tersebut, semakin kondusif dan nyaman lingkungan kerjanya akan membuat tingkat Perputaran karyawan cenderung rendah. Pelindo III senantiasa melakukan peninjauan

EMPLOYMENT AND K3 PRACTICES

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Employee career pattern in Pelindo III has been regulated in the Regulation of BOD No. PER.19/KP.0403/P.III-2016 dated 1 July 2016 on Improvement of the Regulation of the BOD No. PER.88/KP.0403/P.III-2014 on Amendment to the Regulation of the BOD No. PER.26/KP.0403/P.III-2014 on Employee Career and Appointment for a Position. The career pattern aims to provide clarity and career development opportunity to every Pelindo III employee. The BOD Regulation describes the employee career path based on employee education and employee skills. It also explains the requirements and procedures of position appointment for promotion and employee transfer purposes.

EMPLOYEE TURNOVER

The employee turnover in a company is the indicator of the company work environment. The more conducive and comfortable work environment, the employee turnover rate tends to be lower. Pelindo III continuously conducts a review on the existing policies concerning employee remuneration

terhadap kebijakan-kebijakan terkait remunerasi dan paket *benefit* bagi karyawan sebagai upaya mengelola tingkat Perputaran karyawan. Selain hal-hal bersifat materi, membangun budaya kerja Perusahaan juga senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan bagi karyawan.

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 67 karyawan dengan perincian 4 orang mengundurkan diri, 4 orang meninggal dunia, 45 orang pensiun normal, 11 orang pensiun dini, dan 3 orang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Komitmen Perusahaan dalam menjaga hubungan industrial telah dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017, HK.03/14/P.III-2014, 36/DP.SPPI/IX-2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III.

Pelindo III senantiasa melakukan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja, serta selalu mengusahakan agar pekerja memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan selalu memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Perusahaan memiliki komitmen untuk:

- Memperlakukan pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja.
- Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai.
- Memberikan kesempatan yang setara/adil kepada seluruh pegawai dalam pengembangan karir dan promosi (Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/2012).
- Melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- Memberikan hak kepada pegawai untuk berserikat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.
- Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pekerja secara umum mengikuti peraturan yang berlaku.
- Menghargai pegawai sebagai aset utama Perusahaan.
- Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang mendorong semangat kerja Pegawai.
- Memberikan kebebasan kepada pegawai untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

and benefits package as an effort to manage the employee turnover rate. Aside from material matters, the Company's work culture is also continuously developed to create a conducive, comfortable, and enjoyable work environment for the employees.

In 2019 the Company dismissed 67 employees with details: 4 employees resigned, 4 employees deceased, 45 employees entered retirement, 11 employees retired early, and 3 employees were dismissed on the disciplinary violation.

INDUSTRIAL RELATION

The Company's commitment to maintaining industrial relations has been outlined in the Joint Decision of the BOC, BOD, and Labour Union of Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017, HK.03/14/P.III-2014, 36/DP.SPPI/IX-2017 on the Code of Conduct within Pelindo III.

Pelindo III strives to develop the quality of its Human Capital following the requirement for Vision and Mission as well as the long-term work programme of the Company. The Company is fully aware of the changes in the dynamic business environment, thus Personnel of Pelindo III will strive to establish a partnership to achieve mutual support and common goals and growth.

In line with these matters, the Company has commitments to:

- Treating employees fairly and free from bias due to the diversity of ethnicity, origin, gender, religion, and birth as well as matters that are unrelated to performance.*
- Providing proper and safe working conditions for employee.*
- Providing equal/fair opportunity to all employees in career development and promotion (Decree of the Secretary of the Minister of SOE No. 16/2012).*
- Protecting employees from any possibilities that may endanger safety and health at the workplace.*
- Providing the freedom of association to employees as per the applicable laws and regulations.*
- Providing opportunities for employees to participate in further education, training, and development programmes which are in line with competency and the Company's needs.*
- Ensuring that the remuneration scheme received by employees generally complies with the applicable regulations.*
- Respecting employees as the Company's main asset.*
- Applying the reward and punishment system that encourages employee morale.*
- Giving freedom to employees to express opinions and aspirations ethically without violating the Company regulations.*

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pelindo III menyadari bahwa pegawai adalah mitra Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk itu, Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Pelindo III senantiasa melakukan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja, serta selalu mengusahakan agar pekerja memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan selalu memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Komitmen Perusahaan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pegawai telah dituangkan dalam Peraturan Direksi No. PER.91/PM.02/P.III-2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Melalui keputusan tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Membangun SMK3 sebagai landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3.
- b. Menetapkan dan mengkaji sasaran, melakukan penilaian dan pelaporan kinerja SMK3.
- c. Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SMK3 di lingkungan Perusahaan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada Pegawai dari gangguan dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan.
- d. Memastikan pemahaman yang lebih baik oleh pekerja dan mitra kerja mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan aktivitas Perusahaan.
- e. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan SMK3.
- f. Menempatkan SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP dan Laporan Tahunan.
- g. Menyertakan partisipasi pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan SMK3.

Perusahaan telah berupaya untuk mendukung terciptanya Budaya K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan melalui berbagai program, di antaranya:

- a. Kegiatan yang bersifat perencanaan, antara lain:
 - 1) Pencanangan Budaya K3 di lingkungan kerja;
 - 2) Pemberian penghargaan K3;
 - 3) Konvensi/Seminar/Lokakarya/Semiloka;
 - 4) Pembentukan tim investigasi kecelakaan kerja; dan
- 5) Melaksanakan kegiatan Bulan K3 dengan tema yang sudah ditentukan oleh Pemerintah setiap tahunnya.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The Company is aware that employees are the Company's partner in performing its business activities. Hence, the Company commits to continuously prioritising employee safety and health. The Company is also aware that managing occupational health and safety is essential for the Company's success in the long run.

The Company strives to take the correct measures to prevent any accidents and health problems in the workplace while ensuring that the employees are in a safe and healthy workplace. On this basis, the Company will continuously ensure that the Company's assets and business sites, as well as other facilities, have complied with the prevailing laws and regulations concerning occupational health and safety.

The Company's commitment to employee health and safety has been declared in the Regulation of the BOD No. PER.91/PM.02/P.III-2017 dated 29 December 2017 on Occupational Health and Safety Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Based on the decision, the Company is committed to:

- a. *Developing SMK3 as the foundation of compliance under the law and regulations on K3.*
- b. *Determining and reviewing target, conducting the assessment and making a report on SMK3 performance.*
- c. *Providing full support for SMK3 implementation within the Company as an effort to provide optimum protection to the Employees from any disruption and matters that may harm life and health.*
- d. *Ensuring a better understanding of the employees and partners on occupational health and safety matters concerning the Company's activities.*
- e. *Striving for continuous improvements in various aspects related to SMK3.*
- f. *Placing SMK3 as an integral part of RKAP and Annual Report.*
- g. *Appreciating the Employees' participation as part of the efforts to improve SMK3 implementation.*

The Company seeks to support the establishment of K3 Culture in the implementation of the Company's operations through various programmes, among others:

- a. *Planning activities including:*
 - 1) *Formulation of K3 Culture in the workplace;*
 - 2) *K3 awards;*
 - 3) *Convention/Seminar/Workshop;*
 - 4) *Establishment of work accident investigation team; and*
 - 5) *Performing K3 Month activity with the theme specified by the Government every year.*

- b. Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain:
- 1) Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3;
 - 2) Pameran K3;
 - 3) Sosialisasi dan publikasi K3;
 - 4) Aksi Sosial K3; dan
 - 5) Cerdas Cermat K3.
- c. Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain:
- 1) Penilaian penghargaan K3;
 - 2) Pembinaan dan pengujian lisensi;
 - 3) Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3;
 - 4) Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja;
 - 5) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
 - 6) Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja;
 - 7) Operasi tertib di bidang K3;
 - 8) *Silent inspection* Terminal/Pelabuhan;
 - 9) Simulasi Keadaan Darurat; dan
 - 10) Asesmen K3 Terminal/Pelabuhan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja K3, Perusahaan juga telah melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap para karyawan yang dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2019, Perusahaan mengadakan pelatihan K3 dengan rincian yang telah dijabarkan pada subbab Sumber Daya Manusia.

STANDAR DAN SARANA KESELAMATAN KERJA

Pelindo III berkomitmen untuk melaksanakan secara konsisten pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan efisien dengan cara:

- a. Menerapkan SMK3 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Minimalisasi terjadinya penyakit akibat kerja dan nihilnya ancaman keamanan dan kecelakaan kerja;
- c. Memastikan terpenuhinya aspek K3 pada alat dan peralatan operasional (alat angkat dan angkut);
- d. Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan kaidah-kaidah K3;
- e. Melibatkan seluruh komponen Perusahaan ikut bertanggung jawab atas terlaksananya program K3 agar tercapainya kinerja usaha yang optimal; dan
- f. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dalam bidang Jasa Kepelabuhanan, terutama yang berkaitan dengan aspek K3.

Dalam rangka pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku, Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan secara aman dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Pelindo III No. PER.91/PM.02/P.III-2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Perusahaan juga menerapkan SMK3 di 17 Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat di lingkungan Perusahaan. Berikut ini adalah daftar Pelabuhan yang telah menerapkan SMK3 beserta nomor sertifikat dan masa berlakunya:

- b. *Promoting activities including:*
- 1) *Installation of K3 flag, banner, and billboard;*
 - 2) *K3 Exhibition;*
 - 3) *K3 dissemination and publication;*
 - 4) *K3 Social Action; and*
 - 5) *K3 quiz.*
- c. *Implementation activities including:*
- 1) *K3 awards assessment;*
 - 2) *License development and testing;*
 - 3) *K3 object Examination and/or testing;*
 - 4) *Handling of work accident cases;*
 - 5) *Employee medical examination;*
 - 6) *Work environment measurement and testing;*
 - 7) *K3 orderly operation;*
 - 8) *Silent inspection in Terminal/Ports;*
 - 9) *Emergency Condition Simulation; and*
 - 10) *K3 Assessment in Terminal/Ports.*

In improving K3 performance, the Company has also conducted annual training and development to employees. In 2019 the Company has conducted K3 training with details described in Human Capital sub-chapter.

WORK SAFETY STANDARDS AND FACILITIES

Pelindo III is committed to consistently carrying out the effective and efficient management of occupational health and safety with the following procedure:

- a. *Implementing SMK3 following the prevailing laws and regulations;*
- b. *Minimising the occurrence of occupational diseases and preventing security threats and occupational accidents;*
- c. *Ensuring the fulfilment of K3 aspect in operational tools and equipment (lifting and conveyance tools);*
- d. *Developing work awareness that prioritises K3 rules;*
- e. *Involving all Company components to be responsible for K3 programme implementation to achieve optimal business performance; and*
- f. *Complying with the laws and regulations and other requirements in Port Services, especially those related to K3 aspects.*

To comply with the prevailing laws and regulations, the Company is committed to performing its operations safely by applying a high standard on Occupational Safety and Health aspects outlined in the Decree of the BOD of Pelindo III No. PER.91/PM.02/P.III-2017 dated 29 December 2017 on Occupational Health and Safety Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

The Company also implemented SMK3 in 17 port branches and one Head Office Unit within the Company. The following is the list of ports that have implemented SMK3 along with the certificate number and validity period:

SERTIFIKAT SMK3 SMK3 CERTIFICATIONS

NO.	CABANG PELABUHAN PORT BRANCHES	AUDITOR AUDITOR	NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD	KETERANGAN INFORMATION
1.	Tanjung Perak	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 <i>29 March 2019 to 28 March 2022</i>	Dalam proses pembaruan <i>In the renewal process</i>
2.	Tanjung Emas	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 <i>29 March 2019 to 28 March 2022</i>	
3.	Tanjung Intan	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 <i>29 March 2019 to 28 March 2022</i>	
4.	Banjarmasin	PT Sucofindo Indonesia	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018 <i>31 August 2015 to 30 August 2018</i>	Dalam proses pembaruan <i>In the renewal process</i>
5.	Benoa	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 <i>29 March 2019 to 28 March 2022</i>	
6.	Tenau Kupang	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 <i>29 March 2019 to 28 March 2022</i>	
7.	Kotabaru	PT Sucofindo Indonesia	No. 357 Tahun 2015 <i>No. 357 of 2015</i>	31 Agustus 2015 s.d. 30 Agustus 2018 <i>31 August 2015 to 30 August 2018</i>	Dalam proses pembaruan <i>In the renewal process</i>
8.	TPKS	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 <i>29 March 2019 to 28 March 2022</i>	
9.	Gresik	PT Sucofindo Indonesia	No. 168 Tahun 2014 <i>No. 168 of 2014</i>	14 Mei 2014 s.d. 13 Mei 2017 <i>14 May 2014 to 13 May 2017</i>	Dalam proses pembaruan <i>In the renewal process</i>
10.	Sampit	TUV Rheinland	No. 168 Tahun 2014 <i>No. 168 of 2014</i>	14 Mei 2014 s.d. 13 Mei 2017 <i>14 May 2014 to 13 May 2017</i>	Dalam proses pembaruan <i>In the renewal process</i>
11.	Lembar	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 <i>29 March 2019 to 28 March 2022</i>	
12.	Tanjung Wangi	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 <i>No. 33 of 2019</i>	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 <i>29 March 2019 to 28 March 2022</i>	

NO.	CABANG PELABUHAN PORT BRANCHES	AUDITOR AUDITOR	NOMOR SERTIFIKAT CERTIFICATE NUMBER	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD	KETERANGAN INFORMATION
13.	Celukan Bawang	TUV Rheinland	No. 143 Tahun 2015 No. 143 of 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019 16 May 2016 to 16 May 2019	Dalam proses pembaruan In the renewal process
14.	Kumai	TUV Rheinland	No. 143 Tahun 2015 No. 143 of 2015	16 Mei 2016 s.d. 16 Mei 2019 16 May 2016 to 16 May 2019	Dalam proses pembaruan In the renewal process
15.	Kantor Pusat	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 29 March 2019 to 28 March 2022	
16.	Bima	TUV Rheinland	No. 201 Tahun 2017 No. 201 of 2017	14 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020 14 July 2017 to 14 July 2020	
17.	Maumere	TUV Rheinland	No. 201 Tahun 2017 No. 201 of 2017	14 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020 14 July 2017 to 14 July 2020	
18.	Tanjung Tembaga	TUV Rheinland	No. 201 Tahun 2017 No. 201 of 2017	14 Juli 2017 s.d. 14 Juli 2020 14 July 2017 to 14 July 2020	

SARANA DAN PRASARANA K3 DI PELINDO III

K3 INFRASTRUCTURE AND FACILITIES IN PELINDO III

NO.	DATA SARANA DAN PRASARANA K3 K3 INFRASTRUCTURE AND FACILITIES	JUMLAH QUANTITY	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD
a.	Peralatan/Mesin/Pesawat/Instalasi Peralatan Equipment/Machinery/Device/ Equipment Installation		
1.	Instalasi Penyalur Petir Gedung A Installation of Lightning Distributor in Building A	1 Unit 1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/148/I/436.6.12/2012 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan uji berkala setiap 2 tahun sekali. Uji berkala terakhir tanggal 29 Agustus 2019 (berlaku hingga 29 Agustus 2020). Approval Letter of Use No. 566/148/I/436.6.12/2012 by the Manpower Department of Surabaya. Periodically tested every two years. The last periodic test is 29 August 2019 (valid until 29 August 2020).
2.	Instalasi Penyalur Petir Gedung B Installation of Lightning Distributor in Building B		

NO.	DATA SARANA DAN PRASARANA K3 K3 INFRASTRUCTURE AND FACILITIES	JUMLAH QUANTITY	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD
	Jenis/Klasifikasi: Instalasi penyalur petir air terminal viking V-6, jumlah arde dan penerima 1, tahanan sebaran R=0.65 Ohm. <i>Type/Classification: Installation of V-6 air terminal viking lightning, number of groundings and recipient: 1, spreading resistance=0,65 Ohm.</i>	1 Unit 1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/0134/I/436.6.12/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan uji berkala setiap 2 tahun sekali. Uji berkala terakhir terakhir tanggal 29 Agustus 2019 (berlaku hingga 29 Agustus 2020). <i>Approval Letter of Use No. 566/0134/I/436.6.12/2013 by the Manpower Department of Surabaya. Periodically tested every two years. The last periodic test is 29 August 2019 (valid until 29 August 2020).</i>
3.	Instalasi Penyalur Petir Gedung C <i>Installation of Lightning Distributor in Building C</i>		
	Jenis/Klasifikasi: Instalasi penyalur petir air terminal viking V-6, jumlah arde dan penerima 1, tahanan sebaran R=0.2 Ohm. <i>Type/Classification: Installation of V-6 air terminal viking lightning, number of groundings and recipient: 1, spreading resistance=0,2 Ohm</i>	1 Unit 1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/6721/I/436.6.12/2016 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan uji berkala setiap 2 tahun sekali. Uji berkala terakhir terakhir tanggal 29 Agustus 2019 (berlaku hingga 29 Agustus 2020). <i>Approval Letter of Use No. 566/6721/I/436.6.12/2016 by the Manpower Department of Surabaya. Periodically tested every two years. The last periodic test is 29 August 2019 (valid until 29 August 2020).</i>
4.	Pesawat Angkat Gedung A <i>Lifting Device in Building A</i>		
a.	a. Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2010, kapasitas 900 kg, 13 penumpang, tenaga listrik AC.11 KW/380 V/21 A. <i>Type/Classification: 2010 hyundai passenger elevator, 900 kg capacity, 13 passengers, AC.11 KW/380 V/21 A of electrical energy.</i>	1 Unit 1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/1031/III/436.6.12/2011 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 30 Agustus 2019 (berlaku hingga 30 Agustus 2020). <i>Approval Letter of Use No. 566/1031/III/436.6.12/2011 by the Manpower Department of Surabaya. Periodic checks are conducted every year. The last periodic check is 30 August 2019 (valid until 30 August 2020).</i>
b.	b. Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2010, kapasitas 900 kg, 13 penumpang, tenaga listrik AC.11 KW/380 V/21 A. <i>Type/Classification: 2010 hyundai passenger elevator, 900 kg capacity, 13 passengers, AC.11 KW/380 V/21 A of electrical energy.</i>	1 Unit 1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/1033/III/436.6.12/2011 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 30 Agustus 2019 (berlaku hingga 30 Agustus 2020). <i>Approval Letter of Use No. 566/1033/III/436.6.12/2011 by the Manpower Department of Surabaya. Periodic checks are conducted every year. The last periodic check is 30 August 2019 (valid until 30 August 2020).</i>
5.	Pesawat Angkat Gedung B <i>Lifting Device in Building B</i>		
	Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2013, kapasitas 900 kg, 13 penumpang, tenaga listrik 5.5 KW/380 V. <i>Type/Classification: 2013 hyundai passenger elevator, 900 kg capacity, 5.5 KW/380 V of electrical energy</i>	2 Unit 2 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/1433/436.6.12/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 30 Agustus 2019 (berlaku hingga 30 Agustus 2020). <i>Approval Letter of Use No. 566/1433/III/436.6.12/2013 by the Manpower Department of Surabaya. Periodic checks are conducted every year. The last periodic check is 30 August 2019 (valid until 30 August 2020).</i>

NO.	DATA SARANA DAN PRASARANA K3 K3 INFRASTRUCTURE AND FACILITIES	JUMLAH QUANTITY	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD
6.	Pesawat Angkat Gedung C <i>Lifting Device in Building C</i>		
	<p>Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2016, kapasitas 1350 kg, 18 penumpang, tenaga listrik AC 7.6 KW/380 V/21 A. <i>Type/Classification: 2016 hyundai passenger elevator, 1,350 kg capacity, 7.6 KW/380 V/21 A of electrical energy</i></p>		<p>Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/6745/436.6.12/2016 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 30 Agustus 2019 (berlaku hingga 30 Agustus 2020). <i>Approval Letter of Use No. 566/6745/436.6.12/2016 by the Manpower Department of Surabaya. Periodic checks are conducted every year. The last periodic check is 30 August 2019 (valid until 30 August 2020).</i></p>
7.	Motor Diesel Pembangkit Listrik <i>Diesel Generator</i>		
	<p>Jenis/Klasifikasi: Stasioner tahun 2010, daya 1029 KVA, frekuensi 50 Hz, jenis 4 tak, jumlah silinder 12 buah. <i>Type/Classification: 2010 Stationer, 1029 KVA power, 50 Hz frequency, 4 tax type, 12 cylinders.</i></p>	1 Unit <i>1 Unit</i>	<p>Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/4551/436.6.12/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 29 Agustus 2019 (berlaku hingga 29 Agustus 2020). <i>Approval Letter of Use No. 566/4551/436.6.12/2013 by the Manpower Department of Surabaya. Periodically tested every year. The last periodic test is 29 August 2019 (valid until 29 August 2020).</i></p>
8.	Penanggulangan kebakaran <i>Fire prevention</i>		
	a. Box Hydrant di gedung A dan gedung B. <i>Hydrant Boxes in building A and B.</i>	11 Unit <i>11 Unit</i>	
	b. Tabung APAR di gedung A dan gedung B. <i>APAR tubes in building A and B.</i>	61 Unit <i>61 Unit</i>	
9.	Alat pelindung diri dan perlengkapan K3 <i>Personel protective equipment and K3 equipment</i>		
	a. Rompi paramedik/tanggap darurat, helm paramedik/tanggap darurat. b. Lampu senter, alat bantu pernapasan, kotak P3K, <i>police line</i> , dan masker.		
	a. <i>Paramedic/emergency response vest, paramedic/emergency response helmet.</i> b. <i>Flashlight, breathing apparatus, first aid kit, police line, and face masks.</i>		

NO.	DATA SARANA DAN PRASARANA K3 K3 INFRASTRUCTURE AND FACILITIES	JUMLAH QUANTITY	MASA BERLAKU VALIDITY PERIOD
b.	<p>Pelayanan Kesehatan Kerja <i>Occupational Health Services</i></p>		
	<p>Pemeriksaan kesehatan <i>medical check-up</i> bagi karyawan sesuai dengan Peraturan Direksi No. PER.0043/KP.0606/HOFC-2018 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai dan Pensiunan. <i>Medical check-up for employees per the Regulation of the BOD No. PER.0043/KP.0606/HOFC-2018 on Health Services for Employees and Retired Employees.</i></p>		
c.	<p>Fasilitas Kesejahteraan (Kantin/Ruang Makan, Tempat Ibadah, Rekreasi, dan lain-lain). <i>Welfare Facilities (Canteen/Dining Room, Worship Place, Recreation, and so forth).</i></p>		
	<p>1. Disediakan fasilitas kantin/ruang makan di gedung B. <i>Canteen/dining room is provided at building B.</i></p>		
	<p>2. Disediakan fasilitas tempat ibadah di gedung A lantai 4. <i>Worship place is provided at building A floor 4.</i></p>		
d.	<p>Standard Operational Procedure (SOP)</p> <p>Izin bekerja bagi mitra kerja di Kantor Pusat berkaitan dengan bekerja di ketinggian, akses tegangan tinggi, menggali membongkar, pekerjaan <i>bypass</i> sistem, dll. <i>Work Permit for work partners at the Head Office related to working at height, access to high voltage, excavation unloading, system bypass, etc.</i></p>		
e.	<p>Rambu <i>Signs</i></p> <p>Rambu-rambu sudah dibuat dan ditempatkan baik gedung A, B, dan C. <i>Signs have been made and placed in building A, B, and C.</i></p>		

TINGKAT KECELAKAAN KERJA

Informasi mengenai tingkat kecelakaan kerja di Pelindo III selama tahun buku 2019 tersaji dalam tabel berikut:

WORK ACCIDENT RATE

Information on work accident rate in Pelindo III throughout 2019 is available in the following table:

TINGKAT KECELAKAAN KERJA
WORK ACCIDENT RATE

KATEGORI KECELAKAAN ACCIDENT CATEGORIES	2019	2018	UPAYA UNTUK MENGURANGI KECELAKAAN INITIATIVES TO REDUCE ACCIDENTS
Ringan Minor	2	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan K3 2. Teknik Investigasi Kecelakaan 3. Penilaian Risiko dan Perbaikan Berkelanjutan 4. Perbaikan Sistem dan Prosedur 5. Audit internal SMK3L masing-masing Regional
Sedang Moderate	0	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. K3 Training 2. Accident Investigation Techniques 3. Risk Assessment and Continuous Improvement 4. System and Procedure Improvement 5. Internal SMK3L audit in each Region
Berat Severe	0	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. K3 Training 2. Accident Investigation Techniques 3. Risk Assessment and Continuous Improvement 4. System and Procedure Improvement 5. Internal SMK3L audit in each Region
Meninggal Fatality	0	2	

INSIDEN K3 CABANG PELABUHAN
K3 INCIDENTS IN PORT BRANCHES

NO.	CABANG BRANCH	2019			2018		
		BODILY INJURY	FATALITY	PROPERTY DAMAGE	BODILY INJURY	FATALITY	PROPERTY DAMAGE
1.	Tanjung Perak	0	0	15	4	0	9
2.	Banjarmasin	0	0	17	0	1	21
3.	Tanjung Emas	0	0	18	0	1	6
4.	TPKS	0	0	29	0	0	17
5.	Gresik	0	0	0	0	0	3
6.	Kotabaru	1	0	2	1	0	0
7.	Tanjung Intan	0	0	2	1	0	3
8.	Tenau Kupang	0	0	4	0	0	0
9.	Benoa	0	0	0	0	0	2
10.	Sampit	1	0	8	0	0	1
11.	Tanjung Wangi	0	0	0	0	0	0
12.	Kumai	0	0	3	0	0	4
13.	Lembar	0	0	3	0	0	1
14.	Tanjung Tembaga	0	0	0	0	0	0
15.	Bima	0	0	5	0	0	1

NO.	CABANG BRANCH	2019			2018		
		BODILY INJURY	FATALITY	PROPERTY DAMAGE	BODILY INJURY	FATALITY	PROPERTY DAMAGE
16.	Celukan Bawang	0	0	0	0	0	0
17.	Maumere	0	0	4	0	0	0
18.	Kantor Pusat <i>Head Office</i>	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		2	0	110	6	2	68

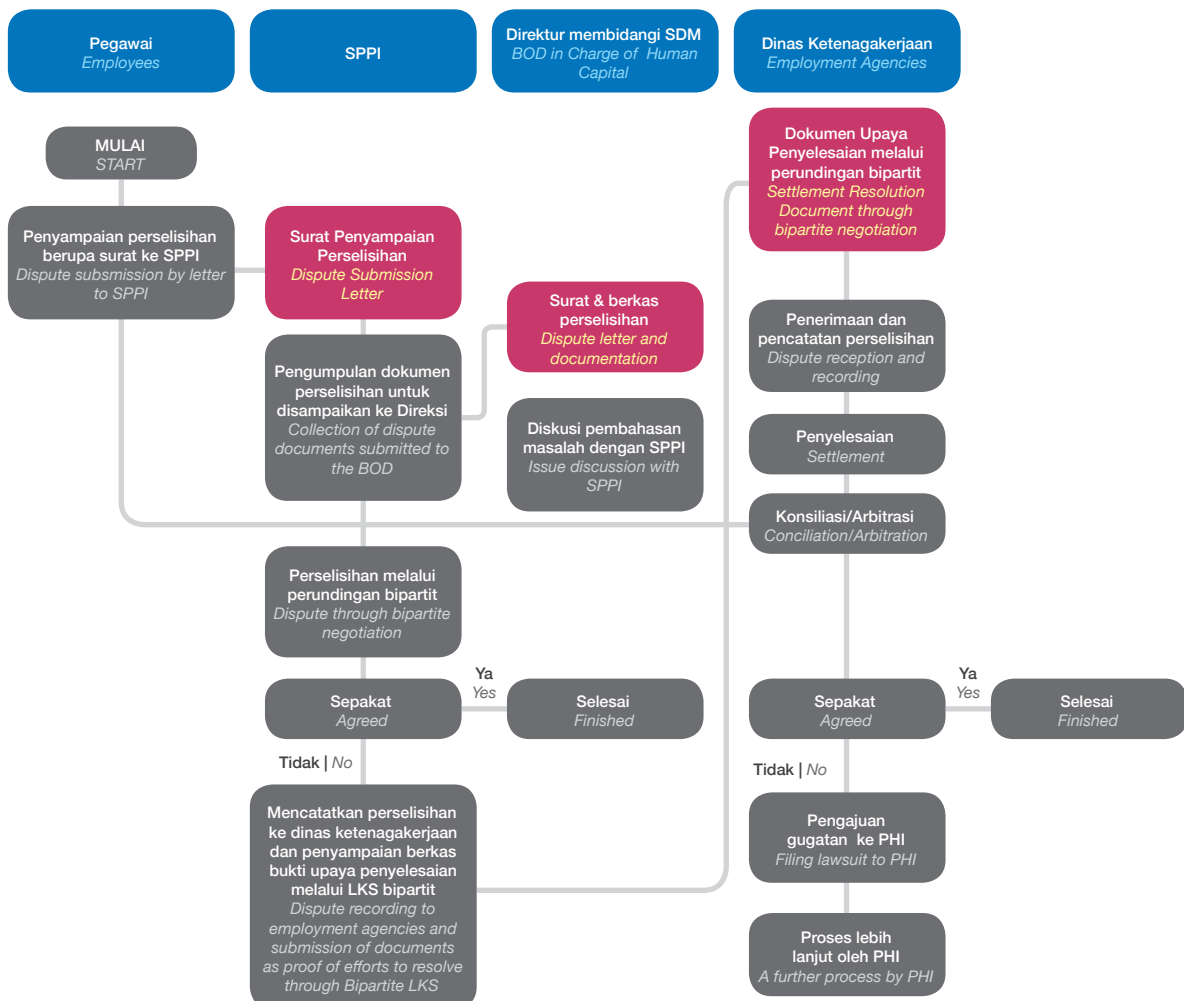
MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

Dalam menangani permasalahan di bidang ketenagakerjaan, Pelindo III memiliki mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Alur penyelesaian masalah tersaji melalui bagan di bawah.

COMPLAINT MECHANISM ON EMPLOYMENT ISSUES

In the effort to resolve employment problems, Pelindo III has a mechanism for employment issues submission. The problem-solving flow is available in the following graph.

ALUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL THE FLOW OF INDUSTRIAL DISPUTE SETTLEMENT



Pegawai yang hendak melaporkan perselisihan dapat langsung melaporkan ke SPPI dengan membawa surat dan dokumen pendukung lainnya yang nantinya akan dibahas di internal SPPI. Hasil pembahasan internal akan diteruskan ke Direktur yang membidangi SDM dan didiskusikan untuk pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit. Setelah itu, akan segera dilakukan perundingan bipartit dengan pegawai, SPPI, dan Direksi/Manajemen. Jika ditemukan kesepakatan, maka perselisihan selesai. Jika tidak, maka SPPI/kedua belah pihak wajib mencatatkan perselisihan ke instansi yang membidangi ketenagakerjaan beserta dokumen-dokumen lain yang membuktikan bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan.

Langkah selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan konsiliasi atau arbitrase yang dapat ditentukan oleh pihak terkait (Pegawai/SPPI/Manajemen sebagai wakil Direksi) atau disesuaikan dengan jenis perselisihan yang diperkarakan. Jika diperoleh kesepakatan, maka perselisihan dianggap selesai. Jika tidak, maka langkah selanjutnya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Employees who intended to report dispute can directly submit a letter and other supporting documents which later will be discussed internally by SPPI. Subsequently, it will be forwarded to the Director in charge of Human Capital and be discussed for the implementation of dispute settlement through bipartite negotiations. Immediately, bipartite negotiations will be conducted with employees, SPPI and BOD/management. If the agreement is reached then the dispute is settled, otherwise, the SPPI/both parties shall register the dispute to the agency in charge of employment along with other documents proving that bipartite negotiation had been carried out.

The next measure will be followed up with conciliation or arbitration, which can be determined by the related party (Employee/SPPI/Management as a representative of the BOD) or adjusted to the dispute type. If the agreement is reached then the dispute is over, otherwise, the lawsuit can be filed to the Industrial Relations Court (PHI).



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELANGGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CONSUMER RESPONSIBILITY

PEMENUHAN SERVICE LEVEL AGREEMENT/SERVICE LEVEL GUARANTEE

Sebagai salah satu sarana dan prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antardaerah atau negara serta menjadi tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Dengan demikian penting bagi sebuah pelabuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akumulasi komoditi perdagangan *hinterland*. Umumnya terdapat 3 tolok ukur utama yang digunakan dalam pemberian pelayanan di pelabuhan, yaitu:

1. *Quality of services* (kepastian, keamanan, keselamatan, dan kelancaran)
2. *Cost* (Tarif yang wajar)
3. *Delivery* (kecepatan, produktivitas)

Komponen lain yang tak kalah penting dalam rangka memberikan servis terbaik bagi pengguna pelabuhan ialah penerapan *Services Level Guarantee* (SLG). SLG adalah standar jaminan pelayanan minimal dari suatu jasa kepelabuhanan pada pelabuhan tertentu yang diumumkan secara terbuka untuk seluruh pemakaian jasa kepelabuhanan. Sementara itu, *Services Level Agreement* (SLA) adalah perjanjian antara General Manager cabang tertentu dengan pengguna jasa tertentu yang berisi tentang kondisi SLG dan kompensasi yang diberikan.

Kepuasan pelanggan yang menjadi fokus dan prioritas Perusahaan membuat penerapan SLG dan SLA menjadi hal penting yang senantiasa diperhatikan. Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas, biaya, dan pengiriman untuk memperoleh *loyal customer* yang semakin besar, terutama mengingat setiap wilayah kerja Cabang Pelabuhan diperkenankan untuk memiliki SLA/SLG tersendiri yang mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2008. Dalam pelaksanaan SLG/SLA, Perusahaan mengacu pada beberapa referensi yakni:

1. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Kinerja Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.
2. RJPP tahun 2015-2019.
3. RKAP tahun 2018.
4. Kontrak manajemen Direksi dan Pemegang Saham dalam bentuk KPI tahun 2019.

FULFILMENT OF SERVICE LEVEL AGREEMENT/SERVICE LEVEL GUARANTEE

As a means of transportation infrastructure and facility, a port has a strategic role to support the transportation system as the node point of the relationship between regions or countries as well as a place of inter-mode transport movement. On this basis, a port shall improve the efficiency and accumulation of hinterland trading commodities. In general, there are three main benchmarks used in the provision of port services, namely:

1. *Quality of services* (certainty, security, safety, and smoothness)
2. *Cost* (Reasonable rate)
3. *Delivery* (Speed, Productivity)

Another essential component in providing the best services for port users is the implementation of Services Level Guarantee (SLG). SLG is a minimum service guarantee standard of a port service at a certain port that is openly declared for all port services, whereas the Services Level Agreement (SLA) is an agreement between the General Manager of a certain branch and the specific service user that contains the SLG conditions and the provided compensation.

Customer satisfaction, the Company's focus and priority, encourages the importance of SLG and SLA application to be continuously concerned. The Company strives to always improve quality, cost, and delivery in earning more loyal customers, especially given that each working area of the Port Branch is allowed to have their respective SLA/SLG which refers to the Law No. 17 of 2008. In the SLG/SLA implementation, The Company refers to several references, including:

1. *The Decree of the Directorate General of Sea Transportation concerning the performance standards of port services.*
2. *The 2015-2019 RJPP.*
3. *The 2018 RKAP.*
4. *Management Contract of the BOD and Shareholders in the form of 2019 KPI.*

Penyesuaian tarif pelayanan Jasa Kepelabuhanan dilakukan setiap 2 tahun sekali, yang persetujuannya diberikan setelah Perusahaan memenuhi standar kinerja yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, perhitungan tarif kerja sama perusahaan properti ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pasar (NJOP) atau harga pasar yang berlaku pada setiap daerah. Setiap pengguna jasa yang membutuhkan informasi terhadap tarif pelayanan Perusahaan, ataupun keberatan terhadap tarif yang diberikan dapat menghubungi setiap Dinas Komersial di Pelabuhan Cabang untuk mendapatkan penjelasan terbaik.

PENYEDIAAN MEDIA KELUHAN PELANGGAN

Perusahaan menyediakan sarana untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan mengenai mutu produk, dukungan pelanggan, dan transaksi, melalui media sebagai berikut:

1. Surat, Kotak Saran, Kartu Saran, Telepon dan Faksimile, Surel, serta SMS.
2. Face to Face/Rapat/Customer Gathering/Focus Group Discussion (FGD)/Customer Relationship Officer (CRO).

Survei Analisis Kebutuhan Pengguna Jasa Layanan, Survei Kepuasan Pelanggan, dan alur penanganan keluhan pelanggan dalam Perusahaan dilakukan melalui Surat, Kotak Saran dan Kartu Saran, Telepon dan Faksimile, Surel, dan SMS dengan langkah sebagai berikut:

1. Pelanggan mengajukan keluhan melalui media keluhan.
2. Tim keluhan pelanggan menerima dan mencatat semua keluhan pelanggan ke dalam *logbook*.
3. Tim keluhan pelanggan melakukan verifikasi keluhan pelanggan.
4. Tim keluhan pelanggan memberikan jawaban atas keluhan pelanggan apabila penyelesaiannya kurang dari 1x24 jam.
5. Apabila penyelesaian keluhan pelanggan memerlukan koordinasi dengan Kantor Pusat Perusahaan/Instansi terkait, tim keluhan pelanggan tetap memberikan tanggapan dalam waktu 1x24 jam, sebelum mengundang pelanggan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.
6. Tim keluhan pelanggan melakukan pemantauan pelaksanaan perbaikan yang tertuang dalam *logbook* keluhan sesuai dengan jadwal perbaikan yang ditetapkan.
7. Tim keluhan pelanggan melakukan pencatatan keluhan pelanggan, rekapitulasi, dan melakukan pemantauan penyelesaian keluhan pelanggan melalui aplikasi www.crm.pelindo.co.id.

KEPUASAN PELANGGAN

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan setiap tahunnya dilakukan dengan melakukan survei yang dilakukan terhadap jenis pelayanan pelabuhan:

1. Pelayanan Jasa Kapal
2. Pelayanan Barang
3. Pelayanan Bongkar Muat

Port Service Tariff Adjustment is conducted every two years, in which the approval is given after the Company meets the performance standards determined by the Ministry of Transportation.

Meanwhile, the calculation of the property expenditure cooperation tariff is determined based on the Market Object Sold Value or the prevailing market price in each region. Any service user requiring information on the service tariff of The Company, or any objection to the tariff, may contact every Commercial Service at the Branch Port to obtain complete explanation.

CUSTOMER COMPLAINT MEDIA

The Company provides a means for customer feedback regarding product quality, customer support, and transactions, through the following media:

1. Mail, Suggestion Box, Suggestion Card, Telephone and Facsimile, Email, and SMS.
2. Face to Face/meeting/customer gathering/focus group discussion (FGD)/Customer Relationship Officer (CRO).

Survey of Service Users' Needs Analysis, Customer Satisfaction, and the flow of customer complaint handling in the Company are conducted through Letter, Suggestion Box and Suggestion Card, Telephone and Facsimile, E-mail, and SMS are described as follows:

1. Customers file complaints through complaint media.
2. Customer complaint team receives and records all customer complaints in the *logbook*.
3. The customer complaint team verifies the customer complaints.
4. The customer complaint team responds to customer complaints if the completion is less than 1x24 hours.
5. If the completion of the customer complaints requires coordination with the Company Head Office/Related Institution, the customer complaint team shall remain to respond within 1x24 hours before inviting the customers for further discussions.
6. The Customer complaint team monitors the improvement implementation contained in the complaint *logbook* following the specified schedule.
7. The Customer complaint team records, recapitulates, and monitors the customer complaint settlement through the app in www.crm.pelindo.co.id.

CUSTOMER SATISFACTION

The measurement of customer satisfaction level is conducted every year through a survey in several types of seaport service:

1. Ship Services
2. Goods Service
3. Loading Unloading Service

4. Pelayanan Terminal Penumpang
5. Vendor

Analisis yang dilakukan terhadap Survei Kepuasan Pelanggan Perusahaan tahun 2019 antara lain untuk mengetahui nilai kepuasan pelanggan, nilai ketidakpuasan pelanggan, nilai loyalitas pelanggan, dan mengetahui *engagement* pelanggan.

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan yang telah dilakukan, selanjutnya diperoleh indikator kepuasan pelanggan yang meliputi rata-rata harapan (*Importance*), rata-rata pelayanan yang dirasakan pelanggan (*Performance*), nilai GAP, *Customer Satisfaction Index* (CSI), serta keterangan dari nilai CSI.

Tabel berikut merupakan hasil data kumulatif kualitas pelayanan di 16 cabang Perusahaan, 1 Unit Pengusahaan Perusahaan (TPKS), dan Kantor Pusat.

4. *Passenger Terminal Services*
5. *Vendor*

Analysis conducted on the Company's Customer Satisfaction Survey in 2019, among others, aims to identify the value of customer satisfaction, the value of customer dissatisfaction, the value of customer loyalty, and identify customer engagement.

Based on the results of the customer satisfaction survey, customer satisfaction indicator is obtained which includes the average of expectation (Importance), average perceived customer service (Performance), GAP value, Customer Satisfaction Index (CSI), and information from CSI score.

The following table is the result of cumulative data of service quality in sixteen branches of The Company, a Business Enterprise Unit (TPKS), and Head Office.

INDEKS KEPUASAN PELANGGAN (CSI) CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI)

dalam skala Likert | in Likert scale

CABANG PELABUHAN PERFORMANCE INDICATOR	TARGET RKAP RKAP TARGET	REALISASI REALISATION	KATEGORI CATEGORY
CSI Layanan Kapal <i>CSI for Ship Services</i>	4	4,10	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Layanan Barang <i>CSI for Goods Services</i>	4	4,03	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Layanan Bongkar/Muat <i>CSI for Loading/Unloading Services</i>	4	4,05	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Layanan Penumpang <i>CSI for Passenger Services</i>	4	3,94	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Layanan Vendor <i>CSI for Vendor Services</i>	4	4,32	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Layanan Peti Kemas <i>CSI for Container Services</i>	4	4,02	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Layanan Nonpeti Kemas <i>CSI for Non-Container Services</i>	4	4,09	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Total <i>Total CSI</i>	4	4,02	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Layanan Kapal (Nakhoda) Relatif terhadap Pesaing <i>CSI for Ship Services (Captain) Relative to Competitors</i>	4	4,19	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Layanan Bongkar/Muat Peti Kemas Relatif terhadap Pesaing <i>CSI for Container Loading/Unloading Services Relative to Competitors</i>	4	4,31	Puas <i>Satisfied</i>
CSI Total Pelindo III Relatif terhadap Pesaing <i>Total Pelindo III CSI Relative to Competitors</i>	4	4,25	Puas <i>Satisfied</i>

INDEKS KETIDAKPUASAN PELANGGAN (CDI) CUSTOMER DISSATISFACTION INDEX (CSI)

dalam skala Likert | in Likert scale

INDIKATOR KINERJA PERFORMANCE INDICATOR	TARGET RKAP RKAP TARGET	REALISASI REALISATION
CDI Layanan Kapal CDI for Ship Services	2	0,87
CDI Layanan Barang (Nonpeti Kemas) CDI for Goods Services (Non-Container)	2	0,97
CDI Layanan Bongkar/Muat Peti Kemas CDI for Container Loading/Unloading Services	2	1,06
CSI Layanan Penumpang CSI for Passenger Services	2	1,09
CSI Layanan Vendor CSI for Vendor Services	2	0,82
CDI Total Total CDI	2	1

INDEKS LOYALITAS PELANGGAN (CLI) CUSTOMER LOYALTY INDEX (CLI)

dalam skala Likert | in Likert scale

INDIKATOR KINERJA PERFORMANCE INDICATOR	REALISASI REALISATION
CDI Layanan Kapal CDI for Ship Services	4,15
CDI Layanan Barang (Nonpeti Kemas) CDI for Goods Services (Non-Container)	4,1
CDI Layanan Bongkar/Muat CDI for Loading/Unloading Services	4,18
CLI Total Total CLI	4,16

INDEKS ENGAGEMENT PELANGGAN (CEI) CUSTOMER ENGAGEMENT INDEX (CEI)

dalam skala Likert | in Likert scale

INDIKATOR KINERJA PERFORMANCE INDICATOR	REALISASI REALISATION
CDI Layanan Kapal CDI for Ship Services	4,14
CDI Layanan Barang (Nonpeti Kemas) CDI for Goods Services (Non-Container)	4,1
CDI Layanan Bongkar/Muat CDI for Loading/Unloading Services	4,19
CEI Total Total CEI	4,16

PRODUK DAN PELAYANAN BAGI KONSUMEN

Perusahaan berupaya memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pelanggan telah memenuhi standar layanan terbaik. Guna menjamin hal tersebut, Perusahaan telah tersertifikasi berdasarkan ISO 9001, ISO 14001, serta ISPS Code.

PRODUCTS AND SERVICES FOR THE CUSTOMER

The Company strives to ensure that the services provided to the customer have met the best standard service. Hence, the Company has been certified by ISO 9001, ISO 14001, as well as the ISPS Code.

REALISASI PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN TAHUN 2019

Selama tahun 2019 Pelindo III menerima sebanyak 766 keluhan pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

THE REALISATION OF CUSTOMER COMPLAINT SERVICES IN 2019

Throughout 2019, Pelindo III received 766 customer complaints with the following details:

INSIDEN K3 CABANG PELABUHAN K3 INCIDENTS IN PORT BRANCHES

NO.	CABANG PELABUHAN PORT BRANCH	Keluhan Pelanggan CUSTOMER COMPLAINT			STATUS TINDAK LANJUT PELANGGAN FOLLOW-UP STATUS OF CUSTOMER COMPLAINT	
		TERIMA ACCEPTED	TOLAK REJECTED	JUMLAH TOTAL	DALAM PROSES IN PROCESS	SELESAI SETTLED
1.	Tanjung Perak	254	52	306	-	306
2.	Gresik	-	-	-	-	-
3.	Tanjung Tembaga	2	-	2	-	2
4.	Tanjung Emas	15	-	15	-	15
5.	TPKS	413	-	413	-	413
6.	Tanjung Intan	3	-	3	-	3
7.	Tegal	-	-	-	-	-
8.	Banjarmasin	35	-	35	-	35
9.	Pulang Pisau	-	-	-	-	-
10.	Sampit	2	-	2	-	2
11.	Bagendang	-	-	-	-	-
12.	Kumai	-	-	-	-	-
13.	Bumiharjo	-	-	-	-	-
14.	Kotabaru	2	-	2	-	2
15.	Batulicin	-	-	-	-	-
16.	Mekarputih	-	-	-	-	-
17.	Benoa	2	-	2	-	2
18.	Tanjung Wangi	6	-	6	-	6

NO.	CABANG PELABUHAN PORT BRANCH	Keluhan Pelanggan CUSTOMER COMPLAINT			STATUS TINDAK LANJUT PELANGGAN FOLLOW-UP STATUS OF CUSTOMER COMPLAINT	
		TERIMA ACCEPTED	TOLAK REJECTED	JUMLAH TOTAL	DALAM PROSES IN PROCESS	SELESAI SETTLED
19.	Lembar	8	-	8	-	8
20.	Celukan Bawang	4	-	4	-	4
21.	Maumere	2	-	2	-	2
22.	Bima	-	-	-	-	-
23.	Badas	-	-	-	-	-
24.	Kupang	-	-	-	-	-
25.	Waingapu	17	-	17	-	17
26.	Ende	-	-	-	-	-
27.	Kalabahi	1	-	1	-	1
Jumlah Total		766	52	818	-	818
Persentase Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan Follow-Up Status of Customer Complaint					0%	100%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sebagai BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa kepelabuhanan, Perusahaan memiliki kewajiban untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat sebagaimana maksud dan tujuan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 Ayat 1 Huruf e.

Program Kemitraan adalah program yang dicanangkan pemerintah sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab BUMN terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi tangguh dan mandiri. Penyaluran Program Kemitraan diharapkan dapat membantu Mitra Binaan untuk meningkatkan omzetnya (*pro growth*), membuka peluang kerja (*pro job*) bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mengentaskan kemiskinan (*pro poor*), serta mengembangkan wilayah pemasaran produknya hingga ke luar negeri.

Program Bina Lingkungan (BL) dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Pelindo III terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar Perusahaan. Melalui program Bina Lingkungan tersebut, diharapkan masyarakat di sekitar Perusahaan dapat diberdayakan dan dikembangkan menuju kemandirian. Pelindo III juga berharap agar pelaksanaan program tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan *corporate image* dan opini masyarakat terhadap eksistensi Perusahaan, sehingga dalam jangka panjang dapat tercipta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha dan pengamanan aset Perusahaan.

Komitmen Pelindo III dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sejalan dan mengacu pada ketentuan Pemerintah terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

POLICY AND COMMITMENT RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

As an SOE engaged in port services, the Company is obligated to actively provide assistance and aid to economically-weak entrepreneur groups, cooperatives, and communities as the intention and purpose in Article 2 paragraph (1) letter e of Law No. 19 of 2003 on SOEs.

*The Partnership Programme is a programme launched by the government as concern and responsibility of SOEs for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) to improve their ability to be resilient and independent. The distribution of the Partnership Programme is expected to help the Development Partners to increase their turnover (*pro-growth*), creating job opportunities (*pro-jobs*) for the surrounding communities so they can alleviate poverty (*pro-poor*), and develop the marketing area of their products abroad.*

The Community Development Programme (BL) was carried out as a form of Pelindo III's concern for the social conditions of the communities surrounding the Company. Through the programme, it is expected that the community around the Company can be empowered and developed towards independence. Pelindo III also expects that the implementation of the programme can contribute positively in the formation of corporate image and public opinion towards the existence of the Company so that a conducive climate can be created for business activities and safeguarding the Company's assets in the long term.

Pelindo III's commitment to implementing PKBL is in line and refers to Government regulations related to corporate social responsibility and PKBL, namely:

1. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.*
2. *Law No. 19 of 2003 Article 88 on SOEs.*
3. *Government Regulation No. 47 of 2012 on the Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies.*

4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

IDENTIFIKASI ISU DAN RISIKO SOSIAL

Berdasarkan pemetaan sosial yang telah dilaksanakan pada masyarakat di sekitar area operasi Perusahaan, berikut isu dan risiko sosial yang teridentifikasi:

1. Akses permodalan bagi UMKM *non-bankable*;
2. Sarana dan prasarana umum;
3. Sarana ibadah;
4. Pendidikan dan/atau pelatihan masyarakat;
5. Pelestarian alam;
6. Pengentasan kemiskinan;
7. Peningkatan kesehatan; dan
8. Bantuan korban bencana alam.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Agar seluruh program CSR dapat terlaksana dengan efektif, tepat sasaran, dan tepat guna, Perusahaan menyusun *Roadmap* PKBL PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2007-2021 yang disusun dengan didahului pemetaan seluruh kepentingan dan harapan pemangku kepentingan di seluruh pelabuhan serta kondisi sosial di sekitar lingkungan perusahaan. Mengacu pada *roadmap* tersebut, tiap tahun seluruh pelabuhan juga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama 1 tahun ke depan.

ROADMAP PKBL 2017-2021

Agar PKBL dapat terlaksana dengan efektif, tepat guna, serta tepat sasaran, Pelindo III menyusun *roadmap* PKBL untuk tahun 2017-2021 yang tertuang dalam visi dan misi berikut:

VISI:

Mendukung Pembangunan Kawasan Kepentingan Pelabuhan.

MISI:

1. Menciptakan Kawasan Kepentingan Pelabuhan Pelindo III yang Aman, Nyaman, dan Tenram.

IDENTIFICATION ON SOCIAL ISSUES AND RISKS

Based on the social mapping on communities around the Company operational area, below are the identified social issues and risks:

1. Capital access for non-bankable UMKM;
2. Public infrastructure and facilities;
3. Religious worship infrastructure;
4. Community education and/or training;
5. Nature preservation;
6. Poverty alleviation;
7. Health improvement; and
8. Aid for natural disaster victims.

SCOPE AND FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY

For all CSR programmes to be implemented effectively, right on target, and appropriate, the Company has arranged the PKBL *Roadmap* of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for 2007-2021 which started with the mapping of all stakeholders' interest and expectations in all ports as well as the social condition around the company vicinity. Referring to the *roadmap*, all ports also arranged an annual Work Plan and Budget for Partnership and Community Development Programme for the upcoming year.

ROADMAP PKBL 2017-2021

For PKBL to be carried out effectively, appropriately, and on target, Pelindo III prepares the 2017-2021 PKBL *roadmap* which is contained in the following vision and mission:

VISION:

To Support the Development of Port Interest Areas.

MISSION:

1. Creating a Safe, Comfortable, and Peaceful Pelindo III Port Interest Area.

2. Mendukung Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Pesisir di Sekitar Pelabuhan.
3. Mendukung Pengembangan Pariwisata Pesisir di Sekitar Kawasan Pelabuhan.
4. Mendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Kepentingan Pelabuhan Guna Menjadi Masyarakat yang Sejahtera.

2. Supporting Coastal Development and Conservation around the Port.
3. Supporting Coastal Tourism Development around the Port Area.
4. Supporting Community Economic Development in Port Interest Areas to Become Prosperous Communities.

STRUKTUR PENGELOLAAN PKBL

Mengacu pada Peraturan Direksi No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat, unit kerja PKBL melekat pada Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Sumber Daya Manusia.

Di tahun 2019, pelaksana kegiatan PKBL di Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

- Direktur SDM: Toto Heliyanto
- Sekretaris Perusahaan: Ardhy Wahyu Basuki
- ASP KBL: Soegeng Prayitno
- Staf: Tjatur Rahman Salfatah, Erfan Aspriandi, Diah Utari, Eka Cahyani, Sugeng Riyadi, dan Luqman Firmansyah

Struktur organisasi untuk pelabuhan penyalur Program Kemitraan telah terlaksana di seluruh regional, dengan penanggungjawab melekat pada Deputy Manager PKBL regional. Program Kemitraan memiliki 9 pelabuhan Pembina, yaitu:

1. Regional Jawa Timur: Tanjung Perak
2. Regional Jawa Tengah: Tanjung Emas dan Tanjung Intan
3. Regional Kalimantan: Banjarmasin dan Sampit
4. Regional Bali Nusra: Benoa, Lembar, Kupang, dan Tanjung Wangi

Program Bina Lingkungan dilaksanakan di seluruh pelabuhan dengan mengutamakan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019

Rencana Kerja Manajemen tahun 2019 adalah pengembangan komunitas di wilayah kerja perusahaan. Seluruh regional dan/atau pelabuhan diharapkan memiliki kampung binaan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan.

PELAKSANAAN PROGRAM DI 2019

Kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan oleh Pelindo III selama tahun 2019 adalah:

- a. Pelaksanaan penyaluran pinjaman Program Kemitraan kepada 234 mitra binaan di 7 pelabuhan penyalur.
- b. Mengikutsertakan 47 mitra binaan pada 15 pameran untuk membantu pemasaran produk-produk mitra binaan.

PKBL MANAGEMENT STRUCTURE

Referring to Regulation of the BOD No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 dated 28 June 2019 on the Organisational Structure and Work Administration of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Head Office, the PKBL work unit is attached to the Corporate Secretary and is responsible to the Human Capital Director.

In 2019, the executives of PKBL at Head Office were as follows:

- Human Capital Director: Toto Heliyanto
- Corporate Secretary: Ardhy Wahyu Basuki
- ASP KBL: Soegeng Prayitno
- Staff: Tjatur Rahman Salfatah, Erfan Aspriandi, Diah Utari, Eka Cahyani, Sugeng Riyadi, and Luqman Firmansyah

The organisational structure for ports channelling the Partnership Programme has been implemented in all region with responsibility on the Regional PKBL Deputy Manager. The programme has nine Assisting ports, namely:

1. East Java Region: Tanjung Perak
2. Central Java Region: Tanjung Emas and Tanjung Intan
3. Kalimantan Region: Banjarmasin and Sampit
4. Bali Nusra Region: Benoa, Lembar, Kupang, and Tanjung Wangi

The Community Development Programme is implemented in all ports by prioritising communities around the Company work area.

TARGET AND ACTIVITY PLAN FOR 2019

The 2019 Management Work Plan is community development in the company work area. All region and/or ports are expected to have a development kampung as a form of company community empowerment.

PROGRAMME IMPLEMENTATION IN 2019

PKBL activities that have been carried out by Pelindo III throughout 2019 are:

- a. Implementation of Partnership Programme loan distribution to 234 development partners in seven distribution ports.
- b. Participating 47 development partners in 15 exhibitions to assist their product marketing.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Pelatihan untuk 70 Mitra Binaan peternak sapi perah di Regional Jawa Timur dan Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Usaha untuk 23 Mitra Binaan di Regional Bali Nusra. d. Sertifikasi untuk 3 Mitra Binaan di Regional Jawa Timur. e. Bantuan kepada korban bencana alam di Bengkulu, Maluku, Madiun, Jayapura, Bantul, dan Sulawesi Selatan serta korban kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. f. Kelas kreatif BUMN di Universitas Nusa Cendana Kupang, Pelatihan sertifikasi TKBM sebanyak 370 orang di Regional Kalimantan dan Bali Nusra, serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan di Pondok Pesantren, PKBM, dan PAUD di wilayah kerja perusahaan. g. Bakti sosial khitanan massal ±500 anak di seluruh wilayah kerja perusahaan, penanganan kesehatan warga kurang mampu, serta operasi bibir sumbing di Kabupaten Bima. h. Bantuan pengerasan jalan, perbaikan drainase, sarana prasarana posyandu, sarana dan prasarana panti asuhan, tong sampah, serta pembangunan balai RW. i. Bantuan pembangunan sarana ibadah di seluruh pelabuhan dan pembagian 1000 Al-Qur'an dan Alkitab gratis. j. Penanaman serentak 51.900 bibit bakau di wilayah kerja Perusahaan serta pelestarian terumbu karang di Kabupaten Buleleng. k. Bantuan sembako gratis bagi warga kurang mampu di seluruh wilayah kerja perusahaan, elektrifikasi bantuan MCK, bantuan sarana dan prasarana air bersih di Provinsi NTT, dan bedah rumah warga prasejahtera. | <ul style="list-style-type: none"> c. <i>Training for 70 dairy farmers Development Partners in East Java Region as well as Entrepreneurship and Business Management Training for 23 Development Partners in Bali Nusra Region.</i> d. <i>Certification for 3 Development Partners in East Java Region.</i> e. <i>Aid to victims of natural disasters in Bengkulu, Maluku, Madiun, Jayapura, Bantul, and South Sulawesi; as well as forest and land fires victim in Kalimantan.</i> f. <i>SOE creative class in Universitas Nusa Cendana Kupang, Certification training for 370 TKBM in Kalimantan and Bali Nusra Region, as well as educational infrastructure and facilities aid in Islamic Boarding School, PKBM, and PAUD in the company work area.</i> g. <i>Mass circumcision on ±500 kids in all company work area, health assistance for underprivileged residents, and cleft lip surgery in Kabupaten Bima.</i> h. <i>Aid in road hardening, drainage repair, posyandu infrastructure and facilities, orphanage infrastructure and facilities, garbage bins, and construction of RW halls.</i> i. <i>Aid in construction of religious facilities in all ports and distribution of free 1000 Al-Qur'an and Bibles.</i> j. <i>Simultaneous planting of 51,900 mangrove seeds in Company work area and coral preservation in Kabupaten Buleleng.</i> k. <i>Daily necessity aid for underprivileged residents in all company work area, MCK aid electrification, aid for clean water infrastructure and facilities in NTT Province, and housing renovation for pre-prosperous residents.</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN

Beberapa dampak yang dirasakan masyarakat atas seluruh kegiatan PKBL di atas antara lain:

1. Akses permodalan bagi UKM binaan Pelindo III yang belum *bankable*.
2. Perluasan pangsa pasar produk-produk mitra binaan.
3. Peningkatan perekonomian masyarakat pada program kampung binaan Perusahaan.
4. Sarana dan prasarana umum yang layak.
5. Sarana dan prasarana ibadah masyarakat yang layak.
6. Tempat tinggal dan sarana sanitasi yang layak bagi warga kurang mampu.
7. Membantu Pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu.

PENYALURAN DANA SOSIAL KEMASYARAKATAN

PENYALURAN PINJAMAN MODAL

Sampai dengan tahun 2019, Pelindo III telah menyalurkan pinjaman kepada 6.849 UMKM senilai Rp285,33 miliar dan tersebar di 7 Provinsi di wilayah kerja Perusahaan.

QUANTITATIVE IMPACTS OF ACTIVITIES

Some impacts felt by the community on all PKBL activities above include:

1. *Capital access for Pelindo III-assisted UKM that are not yet bankable.*
2. *Market share expansion of development partner products.*
3. *Community economy improvement in the Company's assisted village programme.*
4. *Adequate public infrastructure and facilities.*
5. *Adequate community religious facilities and infrastructures.*
6. *Adequate housing and sanitation facilities for underprivileged residents.*
7. *Assisting the Government to reduce the price of basic needs and improve the living standards of the poor.*

DISTRIBUTION OF SOCIO-COMMUNITY FUND

CAPITAL LOAN DISTRIBUTION

As of 2019, Pelindo III has distributed loans to 6,849 UMKM worth Rp285.33 billion spreading across seven provinces in the Company's work area.

PENYALURAN PINJAMAN KE MITRA BINAAN 2018-2019

LOAN DISTRIBUTION TO DEVELOPMENT PARTNERS IN 2018-2019

NO.	SEKTOR USAHA MITRA BINAAN DEVELOPMENT PARTNERS BUSINESS SECTOR	REALISASI S.D 2018 REALISATION UP TO 2018		REALISASI S.D 2019 REALISATION UP TO 2019	
		JUMLAH MITRA BINAAN TOTAL PARTNERS	JUMLAH RUPIAH TOTAL RUPIAH	JUMLAH MITRA BINAAN TOTAL PARTNERS	JUMLAH RUPIAH TOTAL RUPIAH
1.	Industri Industry	1.344	57.849.416.095	1.372	59.638.416.095
2.	Perdagangan Trade	3.475	111.060.082.650	3.565	116.350.082.650
3.	Pertanian Agriculture	81	19.837.500.000	84	20.062.500.000
4.	Peternakan Stockbreeding	265	8.409.000.000	332	10.589.000.000
5.	Perkebunan Plantation	20	3.560.000.000	26	3.875.000.000
6.	Perikanan Fisheries	121	2.429.500.000	127	2.889.500.000
7.	Jasa Service	1.278	49.399.900.000	1.312	52.019.900.000
8.	Sektor lain-lain Other Sectors	31	19.910.039.408	31	19.910.039.408
JUMLAH TOTAL		6.615	272.485.438.153	6.849	285.334.438.153

BANTUAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Bantuan Program Bina Lingkungan yang mengacu No. PER-02/MBU/7/2017 yang meliputi 7 objek bantuan, yaitu:

1. Bantuan korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
3. Bantuan peningkatan kesehatan
4. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum
5. Bantuan sarana ibadah
6. Bantuan pelestarian alam
7. Bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan

Realisasi biaya yang tersalurkan untuk Program Bina Lingkungan hingga tahun 2019 dijabarkan pada tabel berikut:

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME ASSISTANCE

Community Development Programme aid refers to No. PER-02/MBU/7/2017 which includes seven objects of assistance, namely:

1. Assistance to victims of natural disasters
2. Educational and/or training assistance
3. Health improvement assistance
4. Assistance in developing public facilities and infrastructure
5. Aid for religious facilities
6. Nature conservation assistance
7. Community social assistance in poverty alleviation

The realisation of fund distributed for the Community Development Programme up to 2019 is described in the following table:

REALISASI AKUMULASI PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN HINGGA 2018 DAN 2019

THE REALISATION OF ACCUMULATED DISTRIBUTION OF COMMUNITY DEVELOPMENT FUND UP TO 2018 AND 2019

dalam Rupiah | in Rupiah

NO.	URAIAN DESCRIPTION	HINGGA 2018 UNTIL 2018	HINGGA 2019 UNTIL 2019
1.	Korban Bencana Alam <i>Victims of Natural Disasters</i>	5.819.421.600	6.531.821.600
2.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training</i>	43.528.274.182	50.891.216.510
3.	Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement</i>	9.607.734.128	11.291.624.069
4.	Sarana dan Prasarana Umum <i>Public Facilities and Infrastructure</i>	45.375.900.950	54.631.811.950
5.	Sarana Ibadah <i>Religious Facilities</i>	48.940.224.726	56.685.315.726
6.	Ketahanan Pangan <i>Food Security</i>	1.199.325.525	1.199.325.525
7.	Pelestarian Alam <i>Nature Conservation</i>	3.820.335.700	4.213.915.700
8.	Pengentasan Kemiskinan <i>Poverty Alleviation</i>	41.164.317.444	52.087.805.944
9.	Bantuan Pendidikan, Pelatihan Mitra Binaan <i>Education Aid, Training of Foster Partners</i>	2.302.243.267	2.302.243.267
Subtotal Sub-Total		201.757.777.522	239.835.080.291
	BL BUMN Peduli <i>BUMN Peduli Community Development</i>	11.233.348.787	11.233.348.787
Jumlah Total		212.991.126.309	251.068.429.078

REALISASI AKUMULASI PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN TRIWULAN IV THE REALISATION OF ACCUMULATED DISTRIBUTION OF COMMUNITY DEVELOPMENT IN THE FOURTH QUARTER

dalam Rupiah | in Rupiah

NO.	URAIAN DESCRIPTION	TRIWULAN IV TAHUN QUARTER IV FOR THE YEAR		%
		2018	2019	
1.	Korban Bencana Alam <i>Victims of Natural Disasters</i>	940.738.200	712.400.000	76
2.	Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Education and/or Training</i>	12.614.152.128	7.362.942.328	58
3.	Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement</i>	2.207.154.292	1.683.889.941	76
4.	Sarana dan Prasarana Umum <i>Public Facilities and Infrastructure</i>	9.288.183.000	9.255.911.000	100
5.	Sarana Ibadah <i>Religious Facilities</i>	5.191.904.681	7.745.091.000	149
6.	Pelestarian Alam <i>Nature Conservation</i>	160.500.000	393.580.000	245
7.	Pengentasan Kemiskinan <i>Poverty Alleviation</i>	10.993.657.451	10.923.488.500	99
8.	Bantuan Pendidikan, Pelatihan Mitra Binaan <i>Education Aid, Training of Foster Partners</i>	-	-	-
Jumlah Total		41.396.289.752	38.077.302.769	92

TOTAL PENYALURAN BANTUAN TRIWULAN IV TOTAL AID DISTRIBUTION IN THE FOURTH QUARTER

dalam Rupiah | in Rupiah

NO.	URAIAN DESCRIPTION	TRIWULAN IV TAHUN QUARTER IV FOR THE YEAR		%
		2018	2019	
1.	Jumlah Objek <i>Total Beneficiary</i>	940.738.200	712.400.000	76
2.	Jumlah Bantuan <i>Amount of Aids</i>	12.614.152.128	7.362.942.328	58
3.	Rata-rata Penyaluran Bantuan per Objek <i>Average Aid Distribution per Beneficiary</i>	2.207.154.292	1.683.889.941	76

Di tahun 2019, realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan mencapai sebesar Rp38,08 miliar atau turun 8% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp41,4 miliar, sedangkan rata-rata bantuan yang disalurkan adalah sebesar Rp52,81 juta atau turun 25% dari rata-rata bantuan tahun 2018 sebesar Rp70,28 juta. Bantuan Sosial dalam rangka pengentasan

In 2019, the distribution of the Community Development Programme reached Rp38.08 billion or decreased by 8% from that of the 2018 realisation at Rp41.4 billion, while the average aid distributed is Rp52.81 million or decreased by 25% from that of the average aid in 2018 at Rp70.28 million. Social aid to alleviate poverty becomes the largest aid at

kemiskinan menjadi bantuan terbanyak yaitu sebesar Rp10,92 miliar atau turun 1% dari realisasi triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp10,99 miliar.

Rp10.92 billion or decreased by 1% from the realisation in the fourth quarter of 2018 in Rp10.99 billion.

KEGIATAN PENGEMBANGAN MITRA BINAAN

Selain menyalurkan pinjaman berupa modal kerja, Pelindo III juga melakukan upaya untuk meningkatkan wawasan dan mengembangkan jaringan Mitra Binaan. Hal ini ditempuh dengan mengikutsertakan Mitra Binaan ke event pameran. Di tahun 2019, Pelindo III telah mengikutsertakan 47 Mitra Binaan pada 15 event pameran berskala nasional maupun internasional yaitu:

DEVELOPMENT ACTIVITIES FOR DEVELOPMENT PARTNERS

In addition to distributing loans in the form of working capital, Pelindo III also makes efforts to improve insights and develop a network of Development Partners. This is done by including them to exhibition events. In 2019, Pelindo III has included 47 Development Partners in 15 national and international exhibition events, namely:

PENGIRIMAN MITRA BINAAN DALAM EVENT 2018 DEVELOPMENT PARTNERS DELEGATION IN 2019 EVENTS

NO.	URAIAN DESCRIPTION	TANGGAL PELAKSANAAN IMPLEMENTATION DATE	LOKASI LOCATION	JUMLAH MITRA BINAAN TOTAL DEVELOPMENT PARTNERS
1.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	4 Januari 4 January	Surabaya	3
2.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	15 Januari 15 January	Surabaya	3
3.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	23 Januari 23 January	Surabaya	3
4.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	15 Februari 15 February	Surabaya	5
5.	Banjarmasin Sasirangan Festival 2019	6-10 Maret 6-10 March	Banjarmasin	2
6.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	18 Maret 18 March	Surabaya	3
7.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	19 Maret 19 March	Surabaya	3
8.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	28 Maret 28 March	Surabaya	3
9.	Pameran Inacraft 2019 2019 Inacraft Expo	24-28 April 24-28 April	Jakarta	6
10.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	14 Mei 14 May	Surabaya	1
11.	Surabaya Great Expo 2019	14-18 Agustus 14-18 August	Surabaya	6
12.	Pameran Pesta Rakyat 2019	20-21 Agustus 20-21 August	Denpasar	1
13.	Jatim Fair 2019	8-13 Oktober 8-13 October	Surabaya	6

NO.	URAIAN DESCRIPTION	TANGGAL PELAKSANAAN IMPLEMENTATION DATE	LOKASI LOCATION	JUMLAH MITRA BINAAN TOTAL DEVELOPMENT PARTNERS
14.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	22 November 22 November	Surabaya	1
15.	Surabaya North Quay (Kapal Pesiar Cruise)	9 Desember 9 December	Surabaya	1
JUMLAH MITRA BINAAN TOTAL DEVELOPMENT PARTNERS				47

CAPAIAN PROGRAM PKBL

Beberapa capaian keberhasilan PKBL yang dilaksanakan Pelindo III dapat digambarkan sebagai berikut:

KAMPOENG LAWAS MASPATI

Kampung yang mengandalkan wisata sejarah ini telah menjadi kampung binaan Pelindo III sejak tahun 2015. Pelindo III telah mengucurkan bantuan kepada Kampong Lawas Maspati sebesar Rp645.158.080 yang meliputi bantuan perbaikan infrastruktur, pelatihan kewirausahaan, maupun event promosi sebagai kampung wisata. Hasil dari upaya-upaya tersebut nampak pada tahun 2016 dimana Kampong Lawas Maspati menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Surabaya.

Gaung Kampong Lawas Maspati sebagai kampung yang memiliki sejarah dan kearifan lokal yang terjaga dengan baik telah sampai ke luar negeri, terbukti dengan jumlah kunjungan turis mancanegara yang mencapai 75 kunjungan dengan total 500 orang turis. Perputaran uang di kawasan Kampong Lawas Maspati telah mencapai kurang lebih Rp3.000.000/hari, yang berasal dari penjualan souvenir, makanan, minuman, *tour guide*, serta *homestay*. Jumlah UKM juga terus meningkat dari yang semula hanya berjumlah 20 UKM, kini telah menjadi 50 UKM. Saat ini Kampong Lawas Maspati menjadi *role model* pengembangan kampung nasional, hal ini dibuktikan dengan kunjungan beberapa kepala daerah ke kampung ini.

KAMPUNG HIDROPONIK SIMOKALANGAN

Semenjak menjadi kampung binaan pada bulan Juli 2018, kampung yang berada di daerah Simokalangan ini telah memperoleh beberapa penghargaan seperti:

- Kampung Penghijauan Terbaik 2018 Kota Surabaya
- Juara I Kampung Hidroponik Kota Surabaya Tahun 2018
- Lingkungan Paling Berbunga 2018 Kota Surabaya.
- Juara 3 Kelompok Tani Kota Surabaya Tahun 2019

Semenjak meraih beberapa penghargaan tersebut, Kampung Hidroponik mulai dikenal masyarakat baik domestik maupun mancanegara. Hal ini terbukti dari adanya kunjungan mahasiswa asing serta liputan TV dan media massa setempat. Kampung yang dihuni oleh kurang lebih 115 KK dan mayoritas buruh ini, kini telah memiliki 15 media tanam dengan jumlah lubang tanaman sebanyak 1.344

PKBL PROGRAMME ACHIEVEMENTS

Some PKBL achievements by Pelindo III can be described as follows:

KAMPOENG LAWAS MASPATI

A kampung relying on historical tourism has been a development kampung of Pelindo III since 2015. Pelindo III has distributed a total of Rp645,158,080 to Kampong Lawas Maspati for aid in with infrastructure improvements, entrepreneurship training, and promotional events as tourist villages. The results of these efforts were evident in 2016, where Kampong Lawas Maspati became one of the mainstay tourist destinations in the city of Surabaya.

The portrait of Kampong Lawas Maspati as a village that has a well-preserved history and local wisdom has arrived abroad, as evidenced by the number of foreign tourist visits which reached 75 visits with a total of 500 tourists. The money velocity in Kampong Lawas Maspati area has reached approximately Rp3,000,000/day, which comes from the sale of souvenirs, food, drinks, tour guides, and homestays. The total UKM also continued to increase from the original number of only 20 SMEs, now becoming 50 SMEs. Kampong Lawas Maspati becomes the role model of national kampung development, proven by visits of some regional heads to this kampung.

SIMOKALANGAN HYDROPONIC KAMPONG

Since becoming a development kampung in July 2018, the kampung in Simokalangan area has received several awards such as:

- The Best Greening Kampung in 2018 of Surabaya
- First-Place Winner of the 2018 Surabaya Hydroponic Kampung
- The Most Flowering Environment of 2018 of Surabaya
- Third-Place Winner of Surabaya Farming Group in 2019

Since winning some awards, the Hydroponic Kampung has been recognised by both domestic and foreign communities. This is evident from the presence of foreign student visits and TV coverage and local mass media. The kampung inhabited by approximately 115 families and most of them are workers, now has 15 planting media with a total of 1,344 plant holes, in which every planting medium can generate gross revenues

lubang, dimana setiap media tanamnya dapat menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp180.000 hingga Rp200.000.

Kampung ini telah berkembang menjadi Kelompok Tani Kebun Selada yang fokus menangani penanaman sayuran hidroponik dan UKM Kebun Selada yang menangani pengolahan sayuran menjadi kue basah. Kue basah hasil produksi Kampung Hidroponik menjadi kue untuk konsumsi rapat di Kantor Pelindo III sebanyak 100-250 kue tiap harinya.

KAMPUNG KEFIR

Kampung Kefir binaan Pelindo III ini merupakan sebuah kampung yang memiliki potensi di industri susu kefir dan berlokasi di Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan. Pelindo III telah memberikan pelatihan hingga membentuk 5 kader warga yang juga dapat memproduksi susu kefir. Selain memproduksi susu kefir, masyarakat di Kampung Kefir juga peduli pada pengolahan sampah melalui bank sampah serta pemanfaatannya. Dari aktivitas tersebut, kampung ini memiliki produk andalan berupa souvenir yang terbuat dari pemanfaatan limbah sampah plastik. Pada tahun 2019, Pelindo III memberikan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi souvenir yang memiliki nilai jual.

DESA PANGLIPURAN

Desa Panglipuran merupakan desa wisata binaan Pelindo III sejak tahun 2015. Bantuan Pelindo III berupa sarana dan prasarana umum berupa toilet umum, perbaikan gapura kampung-kampung, dan perbaikan berugak. Saat ini, Desa Panglipuran menjadi desa terbersih di dunia dan rutin menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan asing maupun domestik.

from Rp180,000 to Rp200,000.

The kampung has developed into a Lettuce Farmers Group focusing on the planting of hydroponic vegetables and Lettuce Garden UKM which manages the processing of vegetables into cakes. The cakes produced from the Hydroponic Kampung becomes the cake for meeting consumption in Pelindo III Office, totalling of 100-250 cakes daily.

KAMPUNG KEFIR

Kampung Kefir is a Pelindo III-aided kampung with a potential in the kefir dairy industry and is located in Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan. Pelindo III has provided training to form five citizen cadres of who can also produce kefir milk. In addition to producing kefir milk, the community in Kampung Kefir is also concerned with waste management through waste banks and their utilisation. From this activity, this village has a reliable product in the form of souvenirs made from the use of plastic waste. In 2019, Pelindo III has provided household waste-processing training into souvenirs with sale values.

DESA PANGLIPURAN

Desa Panglipuran is a tourism village which has been aided by Pelindo III since 2015. Pelindo III aids include public facilities and infrastructure in the form of public toilets, reparation of kampung gates, and berugak reparation. Currently, Desa Panglipuran is the cleanest village in the world and periodically becomes one of the destinations for foreign and domestic tourists.



LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENT





PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2019 and for the year then ended
with independent auditors' report*



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK ("KELOMPOK USAHA")
UNTUK TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING TO THE
RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS OF PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) AND SUBSIDIARIES ("GROUP")
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND FOR
THE YEAR THEN ENDED**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama
Alamat Kantor

Alamat Domisili sesuai
KTP atau Identitas
Nomor Telepon
Jabatan | Doso Agung
Jl. Tanjung Perak Timur No. 61C
Surabaya
Jl H Noin No.2
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
+82-31 3298631
Direktur Utama / President Director | Name
Office Address

Domicile as stated
in ID Card
Phone Number
Position |
| 2. | Nama
Alamat Kantor

Alamat Domisili sesuai
KTP atau Identitas
Nomor Telepon
Jabatan | Irvandi Gustari
Jl Tanjung Perak Timur No, 610
Surabaya
Taman Beugenville E-1 / no. 8 Jatibening,
Pondokgede, Bekasi

+62-31-3298631
Direktur Keuangan / Director of Finance | Name
Office Address

Domicile as stated
in ID Card
Phone Number
Position |

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. | 1. | We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements. |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | 2. | The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha disajikan secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | 3 | a. All information contained in the Group's consolidated financial statements are complete and correct.
b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information or facts. |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Kelompok Usaha. | 4. | We are responsible for the Group's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This Statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Surabaya.

23 Maret / March 23, 2020



Doso Agung
Direktur Utama / President Director

Irvandi Gustari
Direktur Keuangan / Director of Finance

HEAD OFFICE

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia

T: +62 31 3298631-37
F: +62 31 3295204

www.pelindo.co.id

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1 - 3	<i>.....Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4 - 5	<i>.....Consolidated Statement of Profit or Loss andOther Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6	<i>.....Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7 - 8	<i>.....Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	9 - 164	<i>.....Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Informasi keuangan tambahan	165 - 177	<i>.....Supplementary financial information</i>



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-
2/1/III/2020

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-
2/1/III/2020

**The Shareholders, the Board of Commissioners
and the Board of Directors
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknyanya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020 (lanjutan)

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00287/3.0311/AU.1/06/0240-2/1/III/2020 (continued)

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended, was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under the Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as a whole.

Purwanto, Sungkoro & Surja

Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

23 Maret 2020/March 23, 2020

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

31 Desember/December 31,				
	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3.644.611.039	4,6	4.612.047.296	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	27.939.981	5	57.920.390	Short-term investment
Piutang usaha - neto		7		Trade receivables - net
Pihak ketiga	514.119.258		516.377.060	Third parties
Pihak berelasi	308.955.522	6	340.360.505	Related parties
Piutang lain-lain - neto		8		Other receivables - net
Pihak ketiga	40.777.347		36.236.852	Third parties
Pihak berelasi	269.897.865	6	262.531.359	Related parties
Pendapatan masih akan diterima	217.280.808	9	317.662.932	Accrued revenues
Persediaan - neto	84.545.673	10	52.115.524	Inventories - net
Pajak dibayar dimuka	173.776.366	17a	146.709.690	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	85.022.833	11	98.388.521	Prepaid expense
Aset lancar lainnya	40.640.205		22.518.736	Other current assets
TOTAL ASET LANCAR	5.407.566.897		6.462.868.865	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	1.156.555.890	12	1.090.565.886	Investment in associates
Properti investasi - neto	101.879.933	13	103.267.839	Investment properties - net
Aset tetap - neto	16.791.363.156	14	16.231.547.122	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan	437.436.420	17f	263.407.156	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	6.056.750.109	15	5.147.470.056	Intangible assets - net
Estimasi tagihan pajak	215.984.806	17e	430.661.045	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	588.377.362	16	775.927.618	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	25.348.347.676		24.042.846.722	TOTAL NON CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	30.755.914.573		30.505.715.587	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

		31 Desember/December 31,				
		2019	Catatan/ Notes	2018		
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS					LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES	
Utang usaha			18		Trade payables	
Pihak ketiga	568.633.930			527.416.198	Third parties	
Pihak berelasi	61.714.668	6		79.144.186	Related parties	
Utang lain - lain		19			Other payables	
Pihak ketiga	404.348.746			439.382.061	Third parties	
Pihak berelasi	385.618.157	6		259.531.313	Related parties	
Utang pajak	164.853.576	17b		260.741.232	Tax payables	
Beban akrual	1.110.512.317	20		1.287.510.462	Accrued expenses	
Pendapatan diterima dimuka jangka pendek	292.259.965	21,6		306.552.410	Short-term unearned revenue	
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:					Current maturities of long-term liabilities:	
Utang bank	162.163.278	22		351.140.707	Bank loans	
Utang sewa pembiayaan	-			62.813.193	Finance lease liability	
Liabilitas jangka pendek lainnya	115.092.216			81.715	Other current liabilities	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.265.196.853			3.574.313.477	TOTAL CURRENT LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES	
Liabilitas pajak tangguhan	59.925.820	17h		63.213.116	Deferred tax liabilities	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:					Long-term liabilities - net of current maturities:	
Utang bank	81.764.281	22		256.387.236	Bank loans	
Surat berharga yang diterbitkan	13.784.415.230	23		14.329.612.957	Securities issued	
Liabilitas imbalan kerja	2.161.034.313	25		1.572.167.803	Employee benefits liabilities	
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	354.991.002	24		353.005.199	Long-term unearned revenue	
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.723.573			1.702.002	Other non-current liabilities	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	16.443.854.219			16.576.088.313	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES	
TOTAL LIABILITAS (dipindahkan)	19.709.051.072			20.150.401.790	TOTAL LIABILITIES (carried forward)	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2018
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember/December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
TOTAL LIABILITAS (pindahan)	19.709.051.072		20.150.401.790	TOTAL LIABILITIES (brought forward)
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 3.200.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.018.953 saham	1.018.953.000	26	1.018.953.000	Authorized capital - 3,200,000 shares, subscribed and paid up amounting to 1,018,953 shares
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(476.073.010)	28	38.740.826	Difference from changes in equity in subsidiaries and effects of transaction with non-controlling interest
Saldo laba:				Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya	7.580.565.471	26, 27	7.048.818.143	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	877.166.010		(481.116.013)	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	1.151.483.326	29	1.453.839.874	Other comprehensive income
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.152.094.797		9.079.235.830	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	894.768.704	30	1.276.077.967	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS	11.046.863.501		10.355.313.797	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	30.755.914.573		30.505.715.587	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
Pendapatan operasi	9.775.808.197	31	10.174.932.027	Operating revenue
Pendapatan konstruksi	871.354.794	32	603.841.389	Construction revenues
Beban operasi	(7.034.624.204)	33	(6.879.589.941)	Operating expenses
Beban konstruksi	(871.354.794)	32	(597.016.991)	Construction expenses
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	480.676.576	34	(733.923.638)	Other operating income (expenses) - net
LABA USAHA	3.221.860.569		2.568.242.846	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	147.617.525	35	143.193.611	Finance income
Beban keuangan	(714.939.086)	36	(808.410.118)	Finance costs
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi	5.081.420	37	(30.976.449)	Equity in income (loss) of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.659.620.428		1.872.049.890	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(65.000.801)	17d	(48.544.590)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.594.619.627		1.823.505.300	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(545.735.537)	17d	(597.212.172)	Current
Tangguhan	80.129.386	17d	159.109.419	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	(465.606.151)		(438.102.753)	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	2.129.013.476		1.385.402.547	INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(456.844.843)		915.126.260	<i>Remeasurements of defined benefit plans</i>
Efek pajak tangguhan - pengukuran kembali program imbalan pasti	114.211.211		(228.756.291)	<i>Deferred tax effect - remeasurement of defined benefit plans</i>
Perubahan cadangan aset revaluasi	66.891.587		71.069.966	<i>Changes in asset revaluation reserves</i>
Efek pajak tangguhan - perubahan cadangan aset revaluasi	(16.722.897)		(17.767.491)	<i>Deferred tax effect - changes in asset revaluation reserves</i>
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(292.464.942)		739.672.444	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.836.548.534		2.125.074.991	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	2.096.571.306		759.639.040	<i>Owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	32.442.170		625.763.507	<i>Non-controlling interests</i>
LABA TAHUN BERJALAN	2.129.013.476		1.385.402.547	INCOME FOR THE YEAR
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	1.803.510.328		1.502.624.862	<i>Owners of the parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	33.038.206	30	622.450.129	<i>Non-controlling interests</i>
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.836.548.534		2.125.074.991	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2.058	2t	745	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

Saldo per 31 Desember 2017	Saldo labar/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income		Total ekuitas/ Total Equity	Balance as of December 31, 2017
	Saldo per 31 Desember 2017	Saldo per 31 Desember 2017	Saldo per 31 Desember 2017	Saldo per 31 Desember 2017		
Saldo per 31 Desember 2017	1,018,953,000	6,022,038,102	219,744,010	1,166,601,138	9,365,615,133	Income for the year
Labanya tahun berjalan	-	-	759,639,041	-	1,385,402,848	Treasury stocks of PT PEL
Saham treasury PT PEL	-	-	-	-	439,500	Addition of share premium
Perubahan porsi kepemilikan saham	-	-	-	-	-	Share premium of PMS
Disagio saham PMS	-	-	-	-	(29,750,000)	Transfer of capital stock of non-controlling interest
Peralihan saham nonpengendali	-	-	-	-	(145,605)	Transfer of share premium
Perubahan kembali liabilitas keuangan kerja dan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	Transfer of capital stock of non-controlling interest
Pengukuran kembali liabilitas keuangan kerja dan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	Transfer of share premium
Dekonsolidasi BJTJ - GAMA JO	-	(2,563,117)	-	57,589,897	739,672,443	Reconsolidation BJTJ - GAMA JO
Dividen tunai	-	-	(441,147,068)	-	(83,637)	Deconsolidation BJTJ - GAMA JO
Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	Cash dividend
Pembentukan cadangan umum	-	1,029,343,168	(1,029,343,158)	-	(664,705,697)	Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests
Pelepasan aset revaluasi oleh BJTJ	-	-	9,991,162	(7,493,371)	2,579,297	Appropriation for general reserve
Saldo per 31 Desember 2018	1,018,953,000	7,048,818,143	(481,116,013)	1,216,697,664	10,355,313,797	Disposal of revaluation assets by BJTJ
Labanya tahun berjalan	-	-	2,096,571,306	-	2,129,013,476	Income for the year
Perubahan porsi kepemilikan Saham treasury PT PEL	-	-	-	-	-	Changes in percentage of ownership of treasury stocks of PT PEL
Perubahan porsi kepemilikan agio saham	-	-	(13,450)	-	13,450	Changes in percentage of ownership of share premium
Perubahan porsi kepemilikan Disagio saham PMS	-	-	-	-	-	Changes in percentage of ownership of share premium of PMS
Disagio saham TPS	-	-	-	-	-	Share premium of PMS
Peralihan saham nonpengendali	-	-	-	-	-	Transfer of capital stock of non-controlling interest
Penyesuaian saldo laba hak minoritas	-	-	11,330,165	-	(62,663,189)	Retained earnings adjustment of non-controlling interest
Pengukuran kembali liabilitas keuangan kerja dan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	Reconsolidation of employee benefit liability and fixed assets revaluation
Dividensi	-	-	(227,891,712)	50,168,690	(281,988,006)	Cash dividend
Revaluasi penghasilan komprehensif lainnya hak minoritas	-	-	-	(2,377,088)	(27,891,712)	Revaluation of other comprehensive income of non-controlling interest
Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	(8,269,713)	Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests
Pembentukan cadangan umum	-	531,747,328	(531,747,328)	-	(305,388,245)	Appropriation for general reserve
Pelepasan aset revaluasi	-	-	10,019,592	(7,514,516)	2,516,186	Disposal of revaluation assets
Saldo per 31 Desember 2019	1,018,953,000	7,580,565,471	877,166,010	1,259,351,836	11,046,863,501	Balance as of December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan. The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	Catatan/ Notes	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan dan non-pelanggan	10.355.595.751		Cash received from customers and non-customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(4.388.247.403)		Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1.636.168.317)		Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(437.155.872)		Payment for income taxes
Penghasilan bunga	147.617.525		Interest received
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	4.041.641.684		Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	9.648.958		Receipt of dividend
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(2.576.817.830)		Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penempatan investasi jangka pendek	29.980.409	5	Placement of short-term investments
Penerimaan atas penjualan aset tetap	4.009.498		Proceed from sales of fixed assets
Investasi pada penyertaan saham	(648.527.175)		Investment in shares of stock
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.181.706.140)		Net Cash Used in Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For the Year Ended December 31, 2019
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	Catatan/ Notes	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	500.000.000		6.901.500.000	Receipt of loans
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(853.295.614)		(4.040.117.626)	Payment of bank loans and other financial institution
Pembayaran beban bunga	(761.085.855)		(677.007.121)	Payment of interest
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(62.813.193)		(444.042)	Payment of obligation under finance lease
Pembayaran dividen	(533.279.957)	27	(1.105.852.765)	Payment of dividend
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.710.474.619)		1.078.078.446	Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(850.539.075)		1.790.218.296	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(116.897.182)		71.301.529	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.612.047.296		2.750.527.471	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.644.611.039	4	4.612.047.296	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Perusahaan") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan III berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 16 tahun 1983. Perum Pelabuhan III merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 1991, Perum Pelabuhan III mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 5 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-9992 HT.01.01.Th.93 tanggal 30 September 1993. Sejak terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 08 dari Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., di Surabaya, tanggal 13 Agustus 2012 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-61954.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012.

Berdasarkan Akta No. 08 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Negara BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp209.730.528 yang merupakan Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp809.222.000 menjadi sebesar Rp1.018.953.000.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("the Company") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan III based on Government Regulation No. 16, Year 1983. It was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on Government Regulation No. 58 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan III was changed into a State Owned Company (Persero). As a result of such government regulation, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) was established based on Notarial Deed No. 5 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision No. C2-9992 HT.01.01.Th.93 dated September 30, 1993. Since the establishment of the Ministry of State-Owned Enterprise ("MSOE") in 1998, the Company has been under the supervision of the MSOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Resolution notarized by Notarial Deed No. 08 of Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, dated August 13, 2012 regarding the Company's additional share capital issued and fully paid share capital. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Acceptance Letter No. AHU-61954.AH.01.02 Year 2012 dated December 5, 2012.

Based on the Notarial Deed No. 08 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of State-Owned Enterprises (MSOE) increased its investment in the Company amounting to Rp209,730,528 as an Addition in State Capital Participation as stated in Government Regulation No. 8 of 2012 concerning the Addition of the State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company's increased from Rp809,222,000 to Rp1,018,953,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa transportasi laut, jasa rumah sakit, jasa perbaikan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Perak Timur No.610, Surabaya 60165, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan mengelola 4 kantor regional yang meliputi 28 Terminal Pelabuhan yang terdiri dari:

Regional	Cabang/Branch	Region
Jawa Timur	Tanjung Perak, Gresik, Tanjung Tembaga, Kalianget	East Java
Bali Nusra	Bima, Celukan Bawang, Maumere, Bena, Tenau Kupang, Lembar, Tanjung Wangi, Badas, Waingapu, Kalabahi, Ende	Bali Nusra
Jawa Tengah	Tanjung Emas, Terminal Petikemas Semarang, Tanjung Intan, Tegal	Central Java
Kalimantan	Sampit, Banjarmasin, Pulau Pisau, Kotabaru, Batulicin, Mekar Putih, Bagendang, Kumai, Bumiharjo	Kalimantan

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, sea transportation services, hospital services, repair services, training services and others.

The Company's head office is located at Jl. Perak Timur No.610, Surabaya 60165, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

The Company manages 4 regional offices which includes 28 Port Terminal as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Berikut adalah izin-izin penting yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- Keputusan Menteri Perhubungan No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- Perjanjian konsesi (Catatan 41).

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2019	2018	2019	2018
PT Terminal Petikemas Surabaya ("PT TPS")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Services	1999	99,50%	50,50%	1.789.406.335	1.906.460.765
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("PT BJTI")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Services	1999	96,84%	96,84%	3.696.174.378	3.614.637.234
PT Pelindo Husada Citra ("PT PHC")	Surabaya	Layanan Jasa Kesehatan/ Health Care Services	1999	98,73%	98,73%	396.148.132	307.164.679
PT Pelindo Marine Service ("PT PMS")	Surabaya	Pelayanan Jasa Perkapalan/ Shipping services	2011	98,23%	97,89%	1.638.141.996	1.515.961.390
PT Terminal Teluk Lamong ("PT TTL")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas dan Curah Kering/ Container Port Service and Dry Bulk	2013	99,50%	99,50%	667.177.840	584.691.292
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PT PDS")	Surabaya	Layanan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/ Human Resources Services	2013	90,00%	90,00%	167.539.358	110.814.712

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company (continued)

The following are significant permits obtained by the Company in relation to port operations:

- Decree of Minister of Transportation No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as Port Operation Entity ("BUP").
- Decree of Minister of Transportation No. KP 603 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- Concession agreements (Notes 41).

b. Subsidiaries and Associates

As of December 31, 2019 and 2018, the Company has subsidiaries, associates and joint operation with effective percentage of ownership as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2019	2018	2019	2018
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership</u>							
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT TPS</u>							
PT Berlian Manyar Stevedore ("PT BMST")	Gresik	Jasa Bongkar Muat/ Stevedoring Service	2016	99,00%	60,00%	667.790	688.268
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT BJTJ</u>							
PT Berlian Manyar Sejahtera ("PT BMS")	Surabaya	Layanan Terminal/ Port Services	2012	60,00%	60,00%	990.995.604	876.948.065
PT Pelindo Properti Indonesia ("PT PPI")	Surabaya	Pengelolaan Properti/ Property Management	2014	99,91%	99,91%	138.227.647	139.085.277
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("PT BIMA")	Surabaya	Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Maintenance and Repair Service	2015	90,00%	90,00%	109.595.952	83.307.537
PT Terminal Curah Semarang ("PT TCS")	Semarang	Jasa Pelayanan Curah Cair dan Gas/ Liquid Bulk and Gas Service	2015	51,00%	51,00%	53.765.258	53.040.445
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT PHC</u>							
PT Prima Citra Nutrindo ("PT PCN")	Surabaya	Layanan Jasa Katering/ Catering Business	2016	70,00%	70,00%	11.118.057	8.295.363
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT PMS</u>							
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ("PT APBS")	Surabaya	Jasa Pengerukan, Jasa Reklamasi dan Pengelolaan Alur Pelayaran/ Dredging Service, Reclamation Service and Management of Shipping Channel	2014	90,00%	90,00%	528.097.719	456.100.756
PT Pelindo Energi Logistik ("PT PEL")	Surabaya	Perdagangan Jasa/ Trading Services	2014	90,00%	90,00%	551.284.560	562.992.029
PT Berkah Multi Cargo ("PT BMC")	Surabaya	Jasa Angkutan Multi Modal/ Loading and Unloading of Goods to and from Ship Services	2015	99,80%	90,00%	119.883.956	44.278.709
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT TTL</u>							
PT Lamong Energi Indonesia ("PT LEGI")	Surabaya	Penyediaan Energi/ Energy Provider	2014	99,00%	99,00%	135.330.012	84.423.327

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries and Associates (continued)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Tahun pendirian/ Year of Establishment	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination	
				2019	2018	2019	2018
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT PDS</u>							
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("PT TEDS")	Surabaya	Kegiatan Tally/ Tally Activity	2014	99,00%	99,00%	16.039.950	12.507.042
<u>Entitas Asosiasi/Associates Entities</u>							
PT Portek Indonesia	Surabaya	Pemeliharaan Peralatan Bongkar Muat/ Stevedoring Equipment Maintenance	1998	49,00%	49,00%	11.517.531	45.545.658
PT Terminal Petikemas Indonesia ("PT TPI")	Surabaya	Layanan Terminal Petikemas/ Container Port Service	1999	25,00%	25,00%	133.111.708	131.715.920
PT Ambang Barito Nusapersada ("PT Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai Barito/ Management of Shipping Barito River	2004	40,00%	40,00%	124.947.401	119.302.049
PT Jasa Marga Bali Tol ("PT JBTT")	Bali	Pengelolaan Jalan Tol/ Toll Operator	2011	17,58%	17,58%	1.890.157.490	1.949.801.148
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT BJI</u>							
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("PT BKMS")	Surabaya	Pengelolaan Kawasan Industri JIPE/ JIPE Industrial Estate Management	2012	40,00%	40,00%	6.187.896.430	4.969.892.546
PT Terminal Nilam Utara ("PT TNU")	Surabaya	Layanan Terminal Curah Cair dan Gas/ Liquid Bulk and Gas Terminal Service	2013	40,00%	40,00%	434.556.428	450.049.481
PT Energi Manyar Sejahtera ("PT EMS")	Surabaya	Jasa Pembangkit Listrik/ Power Plant Service	2015	30,00%	30,00%	1.101.762	1.070.672
<u>Dimiliki melalui/Owned through PT PEL</u>							
PT Lamong Nusantara Gas ("PT LNG")	Surabaya	Pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian terminal LNG Jawa Timur/ Development, management and operation of LNG terminal in East Java	2019	49,00%	0,00%	144.630.705	-

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries dan Associates (continued)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT TPS

PT TPS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 April 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

Modal dasar PT TPS sebesar Rp127.884.057 terdiri dari 255.768.116 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 50,50% atau sebanyak 129.162.897 saham dengan nilai nominal Rp64.581.448.
- P&O Dover memiliki 49,00% atau sebanyak 125.326.377 saham dengan nilai nominal Rp62.663.188.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

Berdasarkan Akta Notaris No. 143 tanggal 28 April 2019, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, mengenai Perjanjian Pemindahan Hak (Jual Beli) Saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 254.489.274 saham dengan nilai nominal Rp127.244.637.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau sebanyak 1.278.841 saham dengan nilai nominal Rp639.420.

PT BJTI

PT BJTI didirikan berdasarkan Akta Notaris No.1 tanggal 9 Januari 2002 oleh Notaris Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT TPS

PT TPS was established under the Notarial Deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

The authorized capital of PT TPS amounted to Rp127,884,057 composed of 255,768,116 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares are as follows:

- The Company owns 50.50% or 129,162,897 shares with total amount of Rp64,581,448.
- P&O Dover owns 49.00% or 125,326,377 shares with total amount of Rp62,663,188.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.

Based on Notarial Deed No. 143 dated April 28, 2019, by Notary Yatiningsih, S.H., M.Kn., Notary in Surabaya, regarding the Agreement on Transfer of Rights (Sale and Purchase) of Shares. The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2019 are as follows:

- The Company owns 99.50% or 254,489,274 shares with total amount of Rp127,244,637.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 1,278,841 shares with total amount of Rp639,420.

PT BJTI

PT BJTI was established under the Notarial Deed No. 1 dated January 9, 2002 of Notary Moendjiati Soegito S.H., Notary in Jakarta, and was approved Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT BJTI (lanjutan)

Anggaran Dasar PT BJTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 1 Maret 2017 oleh Mira Irani, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2017 dan peningkatan modal dasar menjadi Rp4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dan persetujuan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp1.114.310.000 terbagi atas 1.114.310 saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0006656.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 18 Maret 2017.

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 96,84% atau sebanyak 1.079.138 saham dengan nilai sebesar Rp1.079.138.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 3,16% atau sebanyak 35.172 saham dengan nilai nominal sebesar Rp35.172.000.

PT PHC

PT PHC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 September 1999 oleh Notaris Syafran, S.H., Notaris di Semarang, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, tanggal 13 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 13 September 1999.

Modal dasar PT PHC sebesar Rp142.000.000 terdiri dari 284.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT BJTI (continued)

PT BJTI's Articles of Association has been amended several times, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated March 1, 2017 by Mira Irani, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the approval of Company's Budget Plan (RKAP) year 2017 and increase of authorized capital to become Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share and approval of reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp1,114,310,000 divided into 1,114,310 shares. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-0006656.AH.01.02. Year 2017 dated March 18, 2017.

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 96.84% or 1,079,138 shares amounting to Rp1,079,138,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 3.16% or 35,172 shares amounting to Rp35,172,000.

PT PHC

PT PHC was established under Notarial Deed No. 1 dated September 1, 1999 of Notary Syafran, S.H., Notary at Semarang, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-16306 HT.01.01 TH.1999, dated September 13, 1999 and was published in the State Gazette No. 11, dated September 13, 1999.

The authorized capital of PT PHC amounted to Rp142,000,000 composed of 284,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. The composition share ownership issued and fully paid shares is as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT PHC (lanjutan)

- Perusahaan memiliki sebesar 98,73% atau sebanyak 280.400.000 saham dengan nilai nominal Rp140.200.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,27% atau sebanyak 3.600.000 saham dengan nilai nominal Rp1.800.000.

PT PMS

PT PMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 31 Desember 2011 oleh Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-34988.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012.

Modal dasar PT PMS sebesar Rp260.500.000 terdiri dari 260.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 97,89% atau sebanyak 255.000.000 saham dengan nilai nominal Rp255.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 2,11% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal Rp5.500.000.

Anggaran Dasar PT PMS telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 1 tanggal 18 November 2019 oleh Heni Yuniartin, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar menjadi Rp310.500.000.000 terbagi atas 310.500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Akta ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0361631 Tahun 2019 tanggal 19 November 2019.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT PHC (continued)

- The Company owns 98.73% or 280,400,000 shares with total amount of Rp140,200,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.27% or 3,600,000 shares with total amount of Rp1,800,000.

PT PMS

PT PMS was established under the Notarial Deed No. 8 dated December 31, 2011, of Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-34988.AH.01.01 Year 2012 dated September 27, 2012.

The authorized capital of PT PMS amounted to Rp260,500,000 composed of 260,500,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 97.89% or 255,000,000 shares with total amount of Rp225,000,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 2.11% or 5,500,000 shares with total amount of Rp5,500,000.

PT PMS's Articles of Association has been amended, most recently by notarial deed of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated November 18, 2019 by Heni Yuniartin, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the notification amendment of the Articles of Association to become Rp310,500,000,000 divided into 310,500,000 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in decision letter No. AHU-AH.01.03-0361631 Year 2019 dated November 19, 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT PMS (lanjutan)

Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 98,23% atau sebanyak 305.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp305.000.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 1,77% atau sebanyak 5.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.500.000.

PT TTL

PT TTL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 309 tanggal 30 Desember 2013, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., Magister Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

Modal dasar PT TTL sebesar Rp400.000 terdiri dari 400.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 99,50% atau sebanyak 134.325 saham dengan nilai nominal Rp134.325.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 0,50% atau 675 saham dengan nilai nominal Rp675.000.

PT PDS

PT PDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41 tanggal 10 Maret 2008 oleh Notaris Inas Abdullah Thalib, S.H., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 tanggal 16 April 2008.

Modal dasar PT PDS sebesar Rp17.500.000 terdiri dari 35.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT PMS (continued)

The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 98.23% or 305,000,000 shares amounting to Rp305,000,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.77% or 5,500,000 shares amounting to Rp5,500,000.

PT TTL

PT TTL was established under Notarial Deed No. 309 dated December 30, 2013, of Notary Yatiningsih, S.H., Master of Laws, Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-10997.AH.01.01 Year 2014 dated March 13, 2014.

The authorized capital of PT TTL amounted to Rp400,000 composed of 400,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 99.50% or 134,325 shares with total amount of Rp134,325,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.50% or 675 shares with total amount of Rp675,000.

PT PDS

PT PDS was established under Notarial Deed No. 41 dated March 10, 2008 of Notary Inas Abdullah Talib, S.H., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-18839AH.01.01.TH.2008 dated April 16, 2008.

The authorized capital of PT PDS amounted to Rp17,500,000 composed of 35,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT PDS (lanjutan)

- Perusahaan memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 31.500 saham dengan nilai nominal Rp15.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 10,00% atau sebanyak 3.500 saham dengan nilai nominal Rp1.750.000.

PT BMST

PT BMST didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 241 tanggal 28 Januari 2016, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0013280.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2016.

Modal dasar PT BMST adalah sebesar Rp2.000.000 terdiri dari 2.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- PT UEPN memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 200 saham dengan nilai nominal sebesar Rp200.000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 6 September 2019, dan Akta Notaris No. 08 tanggal 31 Oktober 2019, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, mengenai Perjanjian Jual Beli saham "PT Berlian Manyar Stevedore". Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- PT TPS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 495 saham dengan nilai sebesar Rp495.000.
- PT UEPN memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 5 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT PDS (continued)

- The Company owns 90.00% or 31,500 shares with total amount of Rp15,750,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 3,500 shares with total amount of Rp1,750,000.

PT BMST

PT BMST was established under Notarial Deed No.241 dated January 28, 2016 by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0013280.AH.01.11 dated January 30, 2016.

The authorized capital of PT BMST amounted to Rp2,000,000 composed of 2,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 60.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.
- PT UEPN owns 40.00% or 200 shares amounting to Rp200,000.

Based on Notarial Deed No. 02 dated September 6, 2019, and Notary Deed No. 08 dated October 31, 2019, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, regarding the Agreement of Sale and Purchase of shares "PT Berlian Manyar Stevedore". The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2019 are as follows:

- PT TPS owns 99.00% or 495 shares amounting to Rp495,000.
- PT UEPN owns 1.00% or 5 shares amounting to Rp5,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT BMS

PT BMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 12 Juni 2012 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya. PT BMS secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.164 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013.

Modal dasar PT BMS adalah sebesar Rp1.000.000.000 terdiri dari 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 60,00% atau sebanyak 432.600 saham dengan nilai sebesar Rp432.600.000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara ("PT UEPN") memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 288.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp288.400.000.

PT PPI

PT PPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 5 Desember 2014 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014.

Modal dasar PT PPI adalah sebesar Rp220.000.000 terdiri dari 220.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 99,91% atau sebanyak 84.920.000 saham dengan nilai sebesar Rp84.920.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,09% atau sebanyak 80.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp80.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT BMS

PT BMS was established under Notarial Deed No. 12 dated June 12, 2012 of Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya. PT BMS had officially become Badan Usaha Pelabuhan (BUP), by Minister of Transportation under Decision Letter No. KP.164 Year 2013 dated February 15, 2013.

The authorized capital of PT BMS amounted to Rp1,000,000,000 composed of 1,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 60.00% or 432,600 shares amounting to Rp432,600,000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara ("PT UEPN") owns 40.00% or 288,400 shares amounting to Rp288,400,000.

PT PPI

PT PPI was established under Notarial Deed No. 5 dated December 5, 2014 by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014.

The authorized capital of PT PPI amounted to Rp220,000,000 composed of 220,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 99.91% or 84,920,000 shares amounting to Rp84,920,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.09% or 80,000 shares amounting to Rp80,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT BIMA

PT BIMA didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 11 November 2015 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2468002.AH.01.01 tanggal 23 November 2015.

Modal dasar PT BIMA adalah sebesar Rp10.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 90,00% atau 6.750 saham dengan nilai sebesar Rp6.750.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp750.000.

PT TCS

PT TCS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 189 tanggal 15 Desember 2015, oleh Notaris Mira Irani, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016.

Modal dasar PT TCS adalah sebesar Rp240.000.000 terdiri dari 240.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 30.600 saham dengan nilai sebesar Rp30.600.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 29.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp29.400.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT BIMA

PT BIMA was established under Notarial Deed No. 6 dated November 11, 2015, by Notary Yahya Abdullah Waber, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2468002.AH.01.01 dated November 23, 2015.

The authorized capital of PT BIMA amounted to Rp10,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 90.00% or 6,750 shares amounting to Rp6,750,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 750 shares amounting to Rp750,000.

PT TCS

PT TCS was established, under Notarial Deed No. 189 dated December 15, 2015, by Notary Mira Irani, S.H., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016.

The authorized capital of PT TCS amounted to Rp240,000,000 composed of 240,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 51.00% or 30.600 shares amounting to Rp30,600,000.
- PT Andahanesa Abadi owns 49.00% or 29,400 shares amounting to Rp29,400,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT PCN

PT PCN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 11 Januari 2016, oleh Notaris Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Modal dasar PT PCN adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PHC memiliki sebesar 70,00% atau sebanyak 7.000 saham dengan nilai sebesar Rp3.500.000.
- PT BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 3.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.500.000.

PT APBS

PT APBS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 21 April 2014 oleh Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014.

Modal dasar PT APBS adalah sebesar Rp750.000.000 terdiri dari 750.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 168.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp168.750.000.
- Van Oord memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.
- Gerbang Sarana Utama memiliki sebesar 5,00% atau sebanyak 9.375.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.375.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT PCN

PT PCN was established under Notarial Deed No. 35 dated January 11, 2016, by Notary Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0002328.AH.01.01 Year 2016 dated January 15, 2016.

The authorized capital of PT PCN amounted to Rp20,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PHC owns 70.00% or 7,000 shares amounting to Rp3,500,000.
- PT BJTI owns 30.00% or 3,000 shares amounting to Rp1,500,000.

PT APBS

PT APBS was established under Notarial Deed No. 9 dated April 21, 2014 by Notary Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notary in Depok, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-06051.40.10.2014 dated April 25, 2014.

The authorized capital of PT APBS amounted to Rp750,000,000 composed of 750,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PMS owns 90.00% or 168,750,000 shares amounting to Rp168,750,000.
- Van Oord owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.
- Gerbang Sarana Utama owns 5.00% or 9,375,000 shares amounting to Rp9,375,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT PEL

PT PEL didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 9 September 2014 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2963.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014.

Modal dasar PT PEL adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 9.000.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.000.000.
- PT PEL (pembelian kembali) memiliki sebesar 9,00% atau sebanyak 900.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp900.000.
- PT BJTI memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 100.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PT BMC

PT BMC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 16 Desember 2015, oleh Notaris Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kendal, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU.2473417.AH.01.01 tanggal 21 Desember 2015.

Modal dasar PT BMC adalah sebesar Rp1.000.000 terdiri dari 1.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 900 saham dengan nilai sebesar Rp900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT PEL

PT PEL was established under Notarial Deed No. 2 dated September 9, 2014, by Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-2963.40.10.2014 dated October 14, 2014.

The authorized capital of PT PEL amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PMS owns 90.00% or 9,000,000 shares amounting to Rp9,000,000.
- PT PEL (buyback) owns 9.00% or 900,000 shares amounting to Rp900,000.
- PT BJTI owns 1.00% or 100,000 shares amounting to Rp100,000.

PT BMC

PT BMC was established under Notarial Deed No. 17 dated December 16, 2015, by the Notary Yohana S. Aminah Hadijanto, S.H., M.Kn., Notary in Kendal, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU.2473417.AH.01.01 dated December 21, 2015.

The authorized capital of PT BMC amounted to Rp1,000,000 composed of 1,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PMS owns 90.00% or 900 shares amounting to Rp900,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT BMC (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 29 November 2019, oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0102677.AH.01.02 Tahun 2019. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- PT PMS memiliki sebesar 99,80% atau sebanyak 50.900 saham dengan nilai sebesar Rp50.900.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 0,20% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PT LEGI

PT LEGI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 8 Desember 2014, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005031.AH.01.01 tanggal 3 Februari 2015.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta Notaris No. 35 oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., tanggal 7 Juni 2017, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan pemindahan hak saham PT TTL pada Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 91 saham atau sebesar Rp91.000. Penjualan saham tersebut telah disahkan dengan Akta Jual Beli saham No. 36 tanggal 7 Juni 2017 oleh Yatiningsih, S.H., M.H..

Modal dasar PT LEGI adalah sebesar Rp36.000.000 terdiri dari 36.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT TTL memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 9.009 saham dengan nilai sebesar Rp9.009.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT BMC (continued)

Based on Notarial Deed No. 5 dated November 29, 2019, by Notary Amanda Mirza Ervariana, S.H., M.Kn., Notary in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter AHU-0102677.AH.01.02 Year 2019. The composition of the issued and fully paid capital as of December 31, 2019 are as follows:

- PT PMS owns 99.80% or 50,900 shares amounting to Rp50,900,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 0.20% or 100 shares amounting to Rp100,000.

PT LEGI

PT LEGI was established under Notarial Deed No. 58 dated December 8, 2014 by Notary Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0005031.AH.01.01 on February 3, 2015.

Based on Extraordinary General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 35 dated June 7, 2017 by Yatiningsih, S.H., M.H., the shareholders approved and authorized the transfer of shares from PT TTL to Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) amounting to 91 shares or equivalent to Rp91,000. The transfer of shares was approved by Deed of Sale and Purchase of shares No. 36 dated June 7, 2017 by Yatiningsih, S.H., M.H..

The authorized capital of PT LEGI amounted to Rp36,000,000 composed of 36,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT TTL owns 99.00% or 9,009 shares amounting to Rp9,009,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT LEGI (lanjutan)

Modal dasar PT LEGI adalah sebesar Rp36.000.000 terdiri dari 36.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut: (lanjutan)

- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 91 saham dengan nilai nominal sebesar Rp91.000.

PT TEDS

PT TEDS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 360 tanggal 29 September 2014, oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-306131.40.10.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Modal dasar PT TEDS adalah sebesar Rp5.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp500.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- PT PDS memiliki sebesar 99,00% atau sebanyak 3.960 saham dengan nilai sebesar Rp1.980.000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 1,00% atau sebanyak 40 saham dengan nilai nominal sebesar Rp20.000.

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 175 tanggal 21 September 1999 oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Februari 2000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT LEGI (continued)

The authorized capital of PT LEGI amounted to Rp36,000,000 composed of 36,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows: (continued)

- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 91 shares amounting to Rp91,000.

PT TEDS

PT TEDS was established under Notarial Deed No. 360 dated September 29 2014, by Notary Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, and was approved by the Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-306131.40.10.2014 dated October 21, 2014.

The authorized capital of PT TEDS amounted to Rp5,000,000 composed of 10,000 shares with par value of Rp500,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PDS owns 99.00% or 3,960 shares amounting to Rp1,980,000.
- Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 1.00% or 40 shares amounting to Rp20,000.

PT Portek Indonesia

PT Portek Indonesia was established under Notarial Deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, S.H., Notary in Surabaya, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT Portek Indonesia (lanjutan)

Modal dasar PT Portek Indonesia adalah sebesar USD2.000.000 (angka penuh) terdiri dari 400 saham dengan nilai nominal USD5.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 49 saham dengan nilai sebesar Rp2.670.500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapura memiliki 51,00% atau sebanyak 51 saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.779.500.

PT TPI

PT TPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-21873.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

Modal dasar PT TPI adalah sebesar Rp500.000.000 terdiri dari 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 25,00% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT Portek Indonesia (continued)

The authorized capital of PT Portek Indonesia amounted to USD2,000,000 (full amount) composed of 400 shares with par value of USD5,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 49.00% or 49 shares amounting to Rp2,670,500.
- Portek System & Equipment Pte Ltd., Singapore owns 51.00% or 51 shares amounting to Rp2,779,500.

PT TPI

PT TPI was established under Notary Deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-21873.AH.01.01. Year 2013 dated April 24, 2013.

The authorized capital of PT TPI amounted to Rp500,000,000 composed of 500,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.
- PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25.00% or 37,500 shares amounting to Rp37,500,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT Ambapers

PT Ambapers didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 26 Maret 2004 oleh Notaris Grace Senda Sardjito, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 Juni 2004.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 16 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., tanggal 9 Maret 2018, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp5.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta Notaris No. 33 oleh Notaris Neddy Farmanto, S.H., tanggal 21 Maret 2017, para pemegang saham telah menyetujui dan mengesahkan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp6.000.000.

Modal dasar PT Ambapers adalah sebesar Rp20.000.000 terdiri dari 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 6.000 saham dengan nilai sebesar Rp6.000.000.
- PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 60,00% atau sebanyak 9.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp9.000.000.

PT JBT

PT JBT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 tanggal 25 November 2011.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT Ambapers

PT Ambapers was established under Notarial Deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, S.H., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. C-14469 HT.01.TH.2004 dated June 11, 2004.

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 16 dated March 9, 2018 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp5,000,000.

Based on General Shareholders Meeting as stated in Notarial Deed No. 33 dated March 21, 2017 by Neddy Farmanto, S.H., the shareholders approved and authorized the reclassification of the balance of capital reserve to become share capital so that the total paid up capital becomes Rp6,000,000.

The authorized capital of PT Ambapers amounted to Rp20,000,000 composed of 20,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 40.00% or 6,000 shares amounting to Rp6,000,000.
- PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan owns 60.00% or 9,000 shares amounting to Rp9,000,000.

PT JBT

PT JBT was established under Notarial Deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H. and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-57740.AH.01.01.TH.2011 dated November 25, 2011.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT JBT (lanjutan)

Modal dasar PT JBT adalah sebesar Rp745.434.000 terdiri dari 745.434 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki sebesar 17,58% atau sebanyak 131.048 saham dengan nilai sebesar Rp131.048.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 55,00% atau sebanyak 409.993 saham dengan nilai nominal sebesar Rp409.993.000.
- Pemerintah Provinsi Bali memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- Pemerintah Kabupaten Badung memiliki 8,01% atau sebanyak 59.707 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.707.000.
- PT Angkasa Pura I memiliki 8,00% atau sebanyak 59.635 saham dengan nilai nominal sebesar Rp59.635.000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Utama Karya (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) memiliki 1,00% atau sebanyak 7.454 saham dengan nilai nominal sebesar Rp7.454.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 0,40% atau sebanyak 2.982 saham dengan nominal sebesar Rp2.982.000.

PT BKMS

PT BKMS didirikan dengan Akta Notaris No. 56 tanggal 18 Mei 2012 oleh Notaris Ardi Kristiar berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Andayani Risilawati SH., MH.,CN., No. 01 tanggal 19 Maret 2014 berkedudukan di Gresik, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019775 tanggal 27 Maret 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT JBT (continued)

The authorized capital of PT JBT amounted to Rp745,434,000 composed of 745,434 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- The Company owns 17.58% or 131,048 shares amounting to Rp131,048,000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 55.00% or 409,993 shares amounting to Rp409,993,000.
- Government of Bali Province owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- Government of Badung District owns 8.01% or 59,707 shares amounting to Rp59,707,000.
- PT Angkasa Pura I owns 8.00% or 59,635 shares amounting to Rp59,635,000.
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Utama Karya (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) owns 1.00% or 7,454 shares amounting to Rp7,454,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 0.40% or 2,982 shares amounting to Rp2,982,000.

PT BKMS

PT BKMS was established Notarial Deed, No. 56 dated May 18, 2012 by Notary Ardi Kristiar, in Jakarta and has recent amended by Notary Andayani Risilawati, SH., MH., CN., No. 01 dated March 19, 2014 domiciled in Gresik, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0019775 dated March 27, 2015.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT BKMS (lanjutan)

Modal dasar PT BKMS adalah sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTJ memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 800.000 saham dengan nilai sebesar Rp800.000.000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) memiliki 60,00% atau sebanyak 1.200.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000.

PT TNU

PT TNU didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 89 tanggal 23 Agustus 2013 oleh Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-13479.AH.01.01 tahun 2014.

Modal dasar PT TNU adalah sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTJ memiliki sebesar 40,00% atau sebanyak 68.500 saham dengan nilai sebesar Rp68.500.000.
- PT Andahanesa Abadi memiliki 60,00% atau sebanyak 102.750 saham dengan nilai nominal sebesar Rp102.750.000.

PT EMS

PT EMS didirikan berdasarkan Akta No.14 tanggal 5 Maret 2015 dari Yulia, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0010566.AH.01.01 tanggal 6 Maret 2015.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT BKMS (continued)

The authorized capital of PT BKMS amounted to Rp4,000,000,000 composed of 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTJ owns 40.00% or 800,000 shares amounting to Rp800,000,000.
- PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) owns 60.00% or 1,200,000 shares amounting to Rp1,200,000,000.

PT TNU

PT TNU was established under Notarial Deed No. 89 dated August 23, 2013 of Notary Yulia, SH., Notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-13479.AH.01.01 2014.

The authorized capital of PT TNU amounted to Rp40,000,000 composed of 40,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTJ owns 40.00% or 68,500 shares amounting to Rp68,500,000.
- PT Andahanesa Abadi owns 60.00% or 102,750 shares amounting to Rp102,750,000.

PT EMS

PT EMS was established under Notarial Deed No. 14 dated March 5, 2015 by Yulia, SH., Notary in Jakarta., and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0010566.AH.01.01 dated March 6, 2015.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

PT EMS (lanjutan)

Modal dasar PT EMS adalah sebesar Rp4.000.000 terdiri dari 4.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT BJTI memiliki sebesar 30,00% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.
- PT UEPN memiliki 45,00% atau sebanyak 450 saham dengan nilai nominal sebesar Rp450.000.
- PT Santiniluwansa Lestari memiliki 15,00% atau sebanyak 150 saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.
- PT Amanah Indo Invest memiliki 10,00% atau sebanyak 100 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.

PT LNG

PT LNG didirikan berdasarkan Akta No.01 tanggal 1 Oktober 2019 dari Heni Yuniantin, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051386.AH.01.01 tanggal 5 Oktober 2019.

Modal dasar dan disetor PT LNG masing-masing sebesar Rp580.000.000.000 dan Rp145.000.000.000, yang terdiri dari 145.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham. Komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

- PT PGN LNG Indonesia (PLI) memiliki sebesar 51,00% atau sebanyak 73.950 saham dengan nilai sebesar Rp73.950.000.
- PT PEL memiliki sebesar 49,00% atau sebanyak 71.050 saham dengan nilai sebesar Rp71.050.000.

1. GENERAL (continued)

b. Subsidiaries, Associates and Joint Operation (continued)

PT EMS (continued)

The authorized capital of PT EMS amounted to Rp4,000,000 composed of 4,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT BJTI owns 30.00% or 300 shares amounting to Rp300,000.
- PT UEPN owns 45.00% or 450 shares amounting to Rp450,000.
- PT Santiniluwansa Lestari owns 15.00% or 150 shares amounting to Rp150,000.
- PT Amanah Indo Invest owns 10.00% or 100 shares amounting to Rp100,000.

PT LNG

PT LNG was established under Notarial Deed No. 01 dated October 1, 2019 by Heni Yuniantin, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo, and was approved by Minister of Law and Human Rights under Decision Letter No. AHU-0051386.AH.01.01 dated October 5, 2019.

The authorized capital and issued and paid capital of PT LNG totaling Rp580,000,000,000 and Rp145,000,000,000 respectively, which consists of 145,000 shares with nominal value per share of Rp1,000,000 (full amount). The share ownership issued and fully paid shares is as follows:

- PT PGN LNG Indonesia (PLI) owns 51.00% or 73,950 shares amounting to Rp73,950,000.
- PT PEL owns 49.00% or 71,050 shares amounting to Rp71,050,000.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 30 September 2019 dan No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Ahmad Bambang
Komisaris Independen	Heddy Lugito
Komisaris Independen	Zainal Abidin
Komisaris	Wahju Satrio Utomo
Komisaris	Dedi Syarif Usman

Dewan Direksi

Direktur Utama	Doso Agung
Direktur Operasi dan Komersial	Putut Sri Mulyanto
Direktur Teknik	Joko Noerhudha
Direktur Sumber Daya Manusia	Toto Heliyanto
Direktur Keuangan	Irvandi Gustari
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Toto Nugroho

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 20 September 2018 dan SK-289/MBU/11/2018 tanggal 9 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Hari Bowo
Komisaris Independen	Heddy Lugito
Komisaris Independen	Zainal Abidin
Komisaris	Wahju Satrio Utomo
Komisaris	Dedi Syarif Usman

Dewan Direksi

Direktur Utama	Doso Agung
Direktur Operasi dan Komersial	Putut Sri Mulyanto
Direktur Teknik	Joko Noerhudha
Direktur Sumber Daya Manusia	Toto Heliyanto
Direktur Keuangan	Iman Rachman
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Toto Nugroho

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management, Corporate Secretary and Employees

Based on the Statement of Decree of the Minister of State Owned Enterprise (SOE) in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-206/MBU/09/2019 dated September 30, 2019 and No. SK-219/MBU/10/2019 dated October 23, 2019, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2019 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Operational and Commercial Director
Technical Director
Human Resources Director
Finance Director
Business Transformation and Development Director

Based on the Statement of Decree of the Minister of State Owned Enterprise (SOE) in lieu of the General Meeting of the Company's Shareholders No. SK-244/MBU/09/2018 dated September 20, 2018, and SK-289/MBU/11/2018 dated November 9, 2018, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2018 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Operational and Commercial Director
Technical Director
Human Resources Director
Finance Director
Business Transformation and Development Director

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

- c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Zainal Abidin
Anggota	Andi Sudhana
Anggota	Mohammad Rizqa

**Komite Good Corporate
Governance dan Manajemen
Risiko**

Ketua	Heddy Lugito
Anggota	Darmansyah
Anggota	Tubagus Arief Fahmi

Sekretaris Perusahaan

Ardhy Wahyu Basuki

Susunan Komite Audit, Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Zainal Abidin
Anggota	Andi Sudhana
Anggota	Amilin

**Komite Good Corporate
Governance dan Manajemen
Risiko**

Ketua	Heddy Lugito
Anggota	Pandu Fajar Wisudha
Anggota	Tubagus Arief Fahmi

Sekretaris Perusahaan

Faruq Hidayat

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 4.573 dan 4.855 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

- c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management, Corporate Secretary and Employees (continued)

The Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management and Corporate Secretary as of December 31, 2019 are as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

**Good Corporate Governance
Committee and Risk Management**

Chairman
Member
Member

Corporate Secretary

The Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management and Corporate Secretary as of December 31, 2018 are as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

**Good Corporate Governance
Committee and Risk Management**

Chairman
Member
Member

Corporate Secretary

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2019 and 2018 are 4,573 and 4,855 employees, respectively (unaudited).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah.

e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 23 Maret 2020. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

1. GENERAL (continued)

d. Reporting Currency

The Group's reporting currency is Rupiah.

e. Completion of consolidated financial statements

The consolidated financial statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 23, 2020. The Company's Directors are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprises the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant Notes.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

Perusahaan memiliki kontrol atas entitas anak apabila Perusahaan memiliki dampak dari atau memiliki hak atas penerimaan/imbalance hasil variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk penerimaan tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang material telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak.
- menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP.
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada.
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima.
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya.
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Group mentioned in Note 1.

The Company have control over the subsidiaries when the Company have an impact to, or has right of, variable return from its involvement with the subsidiaries and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiaries.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Non-controlling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

If it loses control over a subsidiary, the Group:

- derecognizes the assets (including any *goodwill*) and liabilities of the subsidiaries.
- derecognizes the carrying amount of any NCI.
- derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity.
- recognizes the fair value of the consideration received.
- recognizes the fair value of any investment retained.
- recognizes any surplus or deficit in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

b. Principles of consolidation (continued)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries entity that not attributable directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Kelompok Usaha dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not impact in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's and non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent entity.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

c. Foreign currency transactions and balances

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

The Group applied PSAK 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
(lanjutan)**

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (nilai penuh):

	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	13.901

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

f. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**c. Foreign currency transactions and balances
(continued)**

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2019 and 2018 (full amount):

	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
14.481		United States Dollar (USD) 1

Exchange differences arising on the settlement of monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

d. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

e. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

f. Inventory

Inventory was recorded using the weighted average method. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

g. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya.

h. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan di mana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk *goodwill* diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lainnya. Mutasi penghasilan komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66, "Pengaturan Bersama".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the benefit periods.

h. Investment in associates

Associates entities over which the Group has significant influence but not control. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Group's investment in associates including goodwill is identified on acquisition, net of impairment loss.

The Group's share of profits or losses in its associates post acquisition is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Group's share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

The Group does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the Group ceases to have significant influence over an associate and records for the investment in accordance with PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK 66, "Joint Arrangement".

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Ketika kehilangan pengaruh signifikan, maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap selisih antara:

- nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan
- jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014).

i. Properti investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan *rental* atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Kelompok Usaha telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa tanah dan bangunan (10-50 tahun).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Investment in associates (continued)

On the loss of significant influence, the Group shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Group shall recognize in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income any difference between:

- the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and
- the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

When an investment ceases to be an associate and is recorded for in accordance with PSAK 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK 55 (Revised 2014).

i. Investment properties

Investment properties represent properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Group has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of investment properties which consist of land and building (10-50 years).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

j. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan yang lebih pendek antara estimasi umur manfaat ekonomis dan masa konsesi sebagai berikut:

Jenis Aset	Tahun/Years	Type of Assets
Bangunan fasilitas pelabuhan	2 - 50	Port facility
Kapal	4 - 20	Ships
Alat fasilitas pelabuhan	2 - 20	Port facility equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	2 - 50	Port facility installation
Jalan dan bangunan	2 - 50	Building and roads
Peralatan	3 - 25	Equipments
Kendaraan	4 - 5	Vehicles
Emplasemen	3 - 50	Emplacement

Sejak 1 Juli 2016, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan dicatat pada nilai revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup berkala untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Investment properties (continued)

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period of retirement or disposal.

j. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets starts when it is available for intended use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets whichever lower between the estimated economic useful life and concession period as follows:

Since July 1, 2016, Port Facility Buildings and Port Facility Equipments are stated at their revalued amount. Revaluations are performed with sufficient regularity such that the carrying amount is not different materially from that which would be determined using fair values at the statement of financial position.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan yang berasal dari revaluasi Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan tersebut langsung dikreditkan ke surplus revaluasi pada bagian penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelum penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap dibebankan dalam laba rugi apabila penurunannya tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Kelompok Usaha menetapkan bahwa:

- Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan cara dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut.
- Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dipindahkan ke dalam saldo laba pada saat penghentian/pelepasan aset oleh entitas. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Perusahaan menerapkan ISAK 25 tentang "Hak Atas Tanah", yang menyatakan bahwa hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal atas hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Fixed assets (continued)

Any revaluation increase arising from the revaluation of such Building Port Facility and Port Facility Tool is credited to fixed asset revaluation surplus in the other comprehensive income section, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising from the evaluation of such fixed asset is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the fixed asset revaluation surplus relating to a previous revaluation of such fixed asset, if any.

The Group's decided to:

- Accumulated depreciation at the date of revaluation to be treated by eliminating the gross carrying amount and the carrying amount of net assets after elimination is restated as revaluation amount of assets.
- The revaluation surplus included in equity is transferred to retained earnings upon termination/disposal of assets by the entity. Transfer of revaluation surplus to retained earnings is not made through profit or loss.

The Company adopted Interpretation of ISAK 25 on "Land Rights", which states that land rights are stated at cost and not depreciated, unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land is likely or definitely not be obtained. The cost of legal rights to land when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition of land. The cost of the extension or renewal of legal rights to land is recognized as intangible assets and amortized over the life of the legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Biaya perbaikan dan pemugaran terminal pelabuhan dan lahan penumpukan yang dioperasikan oleh entitas anak dalam jangka waktu tertentu dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan masa perbaikan berikutnya atau jangka waktu operasional entitas anak berakhir.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba (rugi) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat panyusutan aset yang bersangkutan.

Biaya pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan

Masa manfaat dalam mempertahankan kedalaman alur dan kolam pelabuhan tersebut adalah 5 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus apabila pekerjaan pengerukan tersebut perlu dilakukan kembali.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

k. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Fixed assets (continued)

The costs of repairs and restoration of port terminals and container yard operated by the subsidiaries within a certain period of time are capitalized when incurred and amortized on a straight line basis until the time of the next repair or operating period of the subsidiaries ends.

The routine repair and maintenance are expensed to profit (loss) as incurred. Repairs which add useful life of the fixed assets are capitalized and depreciated at their applicable depreciation rates.

Dredging costs of shipping channels and port waters

The useful life of depths obtained on the dredged channels and port waters is 5 years and the remaining amortization period will be expensed off at a point when the dredging works need to be done before that period ends.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

k. Lease

In determining of whether an arrangement is, or contains, a lease, is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan di akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

Kelompok Usaha sebagai lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Lease (continued)

The Group as a lessee

A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

The Group as a lessor

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak atas tanah, aset hak konsesi, piranti lunak, *goodwill*, merk dagang dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat: i) dilepaskan; atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Kelompok Usaha terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya dievaluasi setidaknya secara tahunan atau lebih, bila terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets

Intangible assets of the Group consist of land rights, concession rights asset, software, goodwill, trademark and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

An intangible asset shall be derecognized: i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, whose benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

Goodwill

Goodwill represents the excess of acquisition cost of the Group ownership over the fair value of the acquiree's net asset. Non-controlling interest is measured at proportional of non-controlling interest ownership over net asset which identified on the acquisition date.

Goodwill is not amortized but the impairment value is reviewed at least annually or more frequently when there is an indication of impairment value. For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the cash-generating units expected to benefit from the synergies of the business combination.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud (lanjutan)

Jika jumlah tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* pada unit penghasil kas tersebut dan kemudian pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan pada tahun berikutnya.

Goodwill dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil usaha tahun berjalan dan prospek di masa yang akan datang dari entitas anak secara berkala.

Aset Hak Konsesi

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" sehubungan dengan Hak Konsesi.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset hak konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset hak konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jasa kepelabuhanan yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi diakui sebagai aset hak konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset hak konsesi tersebut siap digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets (continued)

If the recorded amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment losses are allocated firstly to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets using prorated basis. An impairment loss of goodwill is not reversed in the subsequent period.

Goodwill is evaluated periodically by considering the current year operating results and future prospects of the subsidiary.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" related to the concession rights.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession rights assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession rights assets are sea port services concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation. During the construction period, the accumulated construction cost is recognized as concession rights assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession rights assets are ready to be operated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Aset hak konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset hak konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa syarat.

Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")

Kontrak konstruksi APBS merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan yang dikeluarkan sehubungan dengan proses persiapan pembangunan dan seluruh biaya konstruksi pembangunan pengerukan alur (*Capital Dredging*) dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung serta biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Terminal Multipurpose Teluk Lamong ("TMTL")

Kontrak konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi TMTL yang meliputi biaya pengadaan tanah, proses studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

The concession rights assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession rights assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kementerian Perhubungan Republik Indonesia for no consideration.

The Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")

Construction contract of APBS is the cost directly attributable to the construction incurred in relation to the preparation process for construction, the entire cost of dredging construction (*Capital Dredging*), other costs related directly, and costs of borrowing related directly used to fund these asset constructions are capitalized until the construction is completed and in operation.

Terminal Multipurpose Teluk Lamong ("TMTL")

Construction contract is the cost directly attributable to the construction of TMTL concession rights assets which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus costs of borrowing directly used for financing the construction of concession rights asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

I. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

**Terminal Multipurpose Teluk Lamong
("TMTL") (lanjutan)**

Aset hak konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi ditambah dengan marjin konstruksi yang ditentukan manajemen.

Aset hak konsesi APBS dan TMTL akan diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

**Terminal Pelabuhan Manyar Gresik
("TPMG")**

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset hak konsesi TPMG yang meliputi biaya pembangunan fasilitas pelabuhan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan.

Aset konsesi diamortisasi selama periode aset diharapkan dapat digunakan oleh Perusahaan dengan metode garis lurus selama periode umur aset sampai dengan akhir periode konsesi

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset hak konsesi sebagai aset takberwujud di mana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Intangible assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

**Terminal Multipurpose Teluk Lamong
("TMTL") (continued)**

Concession rights assets are recorded at fair value, i.e. construction cost of concession rights assets plus a profit margin determined by the management.

Concession rights asset of APBS and TMTL are amortized over the concession period using the straight-line method.

Manyar Gresik Terminal Port ("TPMG")

Concession rights asset is the cost directly attributable to the construction of concession rights assets TPMG which includes cost of port development and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required.

The concession assets are amortized over the period of assets can be used by the Company on a straight-line method over the period of the asset until the end of the concession period.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession rights asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Aset takberwujud (lanjutan)

I. Intangible assets (continued)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Concession Rights Assets (continued)

**Terminal Pelabuhan Manyar Gresik
("TPMG") (lanjutan)**

**Manyar Gresik Terminal Port ("TPMG")
(continued)**

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Aset takberwujud yang melekat pada suatu komponen fisik dan bukan merupakan bagian yang signifikan dari suatu aset fisik, diakui sebagai bagian dari aset berwujud dan diperlakukan sebagai aset tetap.

Intangible assets that are attached to a physical component and are not a significant part of a physical asset, is recognized as part of the tangible assets and treated as fixed assets.

Umur manfaat suatu aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut. Akan tetapi, jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut dapat diperbarui, maka umur manfaat mencakup periode yang diperbarui, hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan yang dilakukan oleh estimasi tanpa biaya yang signifikan.

Useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights. However, if the contractual or other legal rights can be renewed, the useful life shall include renewal period, only if there is an evidence to support that renewal is performed without significant cost.

m. Kapitalisasi biaya pinjaman

m. Capitalization of borrowing costs

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

The Group implemented PSAK 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

m. Kapitalisasi biaya pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

n. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

o. Pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan jasa kapal, jasa terminal petikemas, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.
- Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien.
- Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.
- Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.
- Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Capitalization of borrowing costs
(continued)**

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

n. Unearned revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long-term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

o. Revenues and expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- Revenue from ship services, container services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.
- Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items have been delivered to the patients.
- Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.
- Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts.
- Dividend revenue is recognized when the Group's right to receive the dividend payment is established.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Pendapatan dan beban (lanjutan)

o. Revenues and expenses (continued)

- Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka.
- Pendapatan Kerjasama Mitra: Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha adalah berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama. Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".
- Pendapatan konstruksi. Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.
- Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat risiko dan hak atas kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

- Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet billed are recorded as accrued income. The excess of payments received and the value of work completed are recorded as unearned revenue.
- Revenue of Partner Cooperation: The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period. Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices issued by the Company to third parties. Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".
- Construction revenues. The Group recognizes intangible assets of construction services in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis.
- Revenue or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.

Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

p. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Kelompok Usaha menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Kelompok Usaha memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Revenues and expenses (continued)

Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

The Group accounted for construction revenue and construction cost at the same time of recognition of intangible asset during construction phase.

p. Employee benefits

Post-employment benefits

The Group has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Group also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

p. Employee benefits (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Other long-term employment benefits including the long services leave benefit are determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long-term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

p. Imbalan kerja (lanjutan)

Program iuran pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, di mana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara berkala merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode di mana jasa diberikan oleh pekerja.

q. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Oleh karena itu, Kelompok Usaha memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee benefits (continued)

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

q. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determines that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK 46. Therefore, the Group has decided to present all of the final tax arising from land and building rent revenue as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Perpajakan (lanjutan)

q. Taxation (continued)

Pajak Kini (lanjutan)

Current Tax (continued)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previous unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

r. Instrumen keuangan

i). Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi jangka panjang dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai "Pinjaman yang diberikan dan Piutang".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to the items that are previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

r. Financial instruments

i). Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.

Financial assets are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

The financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, long-term investment and other non-current assets, are all classified as "Loans and Receivables".

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

r. Financial instruments (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (a). Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- (a). Financial assets at fair value through profit or loss

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are presented in the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

The Group has short-term investment classified under this category.

- (b). Pinjaman yang diberikan dan piutang

- (b). Loan and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or defined payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

r. Financial instruments (continued)

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

(b). Pinjaman yang diberikan dan piutang
(lanjutan)

(b). Loan and receivables (continued)

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini.

The Group has cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets that are classified under this category.

ii. Liabilitas keuangan

ii. Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measured at amortized cost, included directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang mencakup pinjaman bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, sewa pembiayaan, utang obligasi serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The financial liabilities of the Group, which include bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liabilities, finance lease, bonds payable and other non-current liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

r. Financial instruments (continued)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Financial liabilities (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Subsequent measurement (continued)

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

iii. Offsetting of financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a current enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv). Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

iv). Amortized cost of financial instruments

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Amortized cost is computed using the effective interest rate method deducted by allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

v). Penurunan nilai aset keuangan

v). Impairment of financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**v). Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**v). Impairment of financial assets
(continued)**

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and on which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**v). Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)**

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**v). Impairment of financial assets
(continued)**

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a condition that the carrying amount of the financial assets exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

r. Financial instruments (continued)

**vi). Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan**

**vi). Derecognition of financial assets and
liabilities**

Aset keuangan

Financial assets

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

If the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

**vi). Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Liabilitas keuangan

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset dan liabilitas yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Financial instruments (continued)

**vi). Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)**

Financial assets (continued)

Continuing the involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of payment received that the Group could be required to repay.

Financial liabilities

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the payment received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (*arm's-length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

t. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.018.953 saham.

u. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined based on quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm's-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

t. Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,018,953 shares.

u. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

v. Kontingensi

Liabilitas kontingensi diungkapkan, kecuali jika kemungkinan kecil (*remote*) terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Aset kontingensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

w. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

x. Penurunan nilai aset non-keuangan

Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

y. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang merupakan peristiwa non-penyesuaian diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely to take place, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

w. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and inter Group transactions are eliminated.

x. Impairment of non-financial assets

Group assesses at reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

y. Events after the reporting period

Events after reporting period that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru

Pada tanggal 1 Januari 2019, Kelompok Usaha menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

Interpretasi ini mengatur penentuan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset, biaya atau pendapatan (atau bagiannya) terkait pada penghentian pengakuan aset atau liabilitas non-moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing.

- Amandemen PSAK 26: Biaya Pinjaman

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas memperlakukan sebagai bagian dari pinjaman umum setiap pinjaman yang awalnya dibuat untuk mengembangkan aset kualifikasian ketika secara substansial semua kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tersebut untuk penggunaan atau penjualan yang dimaksudkan selesai. Entitas menerapkan amendemen atas biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

z. Adoption of new accounting standards

On January 1, 2019, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the following new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- ISAK 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration

This interpretation addresses how to determine the date of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income (or part of it) on the derecognition of a non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration in a foreign currency.

- Amendments to PSAK 26: Borrowing Costs

The amendments clarify that an entity treats as part of general borrowings any borrowing originally made to develop a qualifying asset when substantially all of the activities necessary to prepare that asset for its intended use or sale are complete. The entity applies the amendments to borrowing costs incurred on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments. An entity applies those amendments for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen lebih terkait langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, entitas mengakui konsekuensi dari pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu terkait. Entitas menerapkan amandemen untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan. Ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut, entitas menerapkannya pada konsekuensi pajak penghasilan dari dividen yang diakui pada atau setelah awal periode komparatif paling awal.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- Amendments to PSAK 46: Income Taxes

The amendments clarify that the income tax consequences of dividends are linked more directly to past transactions or events that generated distributable profits than to distributions to owners. Therefore, an entity recognises the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where it originally recognised those past transactions or events. An entity applies the amendments for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted. When the entity first applies those amendments, it applies them to the income tax consequences of dividends recognised on or after the beginning of the earliest comparative period.

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirements based on management's judgment.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This PSAK is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

This PSAK establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease. There are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

These amendments provides that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

z. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 71 - Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amendemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**z. Adoption of new accounting standards
(continued)**

- Amendments to PSAK 71 - Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.

This amendments provides that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.

The Group has presently evaluated and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS**

In the applications of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.

These estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represents a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 55 (2014) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2.

Penyisihan penurunan nilai piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan Catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. That currency is the currency that mainly influences the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities are determined by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2.

The allowance of impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customers, quality of collateral received and the customers' current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai piutang (lanjutan)

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti objektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 41a). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan terminal Kalibaru kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal Kalibaru.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

The allowance of impairment of receivables (continued)

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, the Group includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group. Further details are disclosed in Note 7.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Otoritas Pelabuhan ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 41a). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the Kalibaru Terminal free of any form of charge to OP, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the Kalibaru Terminal.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Kelompok Usaha berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset hak konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset hak konsesi atau peningkatan kemampuan aset hak konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset hak konsesi dan biaya konstruksi atas aset hak konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset hak konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Service concession arrangement (continued)

The Group has made judgment that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession rights asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession rights assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group recognizes construction revenue of concession rights asset and construction costs of concession rights asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar.

PSAK 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 39.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair value of financial assets and financial liabilities

The Company applies PSAK 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement.

PSAK 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities is disclosed in Note 39.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13, 14, 15, dan 16.

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate of useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on the results of operations of the Group.

Further details are disclosed in Notes 13, 14, 15 and 16.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

Imbalan kerja karyawan

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi manajemen diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada pendapatan komprehensif lainnya yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 25.

4. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Kas	14.989.351	2.107.112
Bank	478.299.167	657.439.613
Deposito berjangka	3.151.322.521	3.952.500.571
Total kas dan setara kas	3.644.611.039	4.612.047.296

a. Kas

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	14.989.351	2.107.112

**3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES,
JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 17.

Employee benefits

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the management's assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized as other comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. Further details are disclosed in Note 25.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Cash	14.989.351	2.107.112
Bank	478.299.167	657.439.613
Time deposit	3.151.322.521	3.952.500.571
Total cash and cash equivalents	3.644.611.039	4.612.047.296

a. Cash on hand

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Rupiah	14.989.351	2.107.112

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

b. Bank

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	42.415.021	37.112.935	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	19.211.191	49.117.912	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk	11.455.905	15.120.598	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.487.572	5.033.361	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.377.843	1.343.534	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	943.236	7.187.150	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Panin Tbk	907.532	433.687	PT Bank Panin Tbk
PT Bank UOB Indonesia	835.937	807.588	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Bukopin Tbk	630.292	2.486.977	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	284.008	632.193	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	58.697	58.221	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	88	501.963	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank	-	1.963.086	Standard Chartered Bank
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	1.008.250	PT Bank OCBC NISP Tbk
Pihak berelasi (Catatan 6)			Related parties (Note 6)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	214.718.786	289.028.344	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	145.243.561	153.492.846	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.022.335	56.113.723	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	1.005.644	346.914	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	186.429	-	PT Bank Syariah Mandiri
Subtotal	464.784.077	621.789.282	Subtotal
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.233.276	1.961.047	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.143.586	2.849.025	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata	1.388.048	1.444.011	PT Bank Permata
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.211.345	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.129.754	4.882.771	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Deutsche Bank	723.117	754.078	Deutsche Bank
PT Bank ANZ Indonesia	686.743	715.470	PT Bank ANZ Indonesia
Standard Chartered Bank	219.584	5.703.591	Standard Chartered Bank
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	-	146.437	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Pihak berelasi (Catatan 6)			Related parties (Note 6)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.872.864	4.165.998	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.869.291	3.265.913	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	37.482	2.930.493	PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	-	6.731.895	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara Tbk	-	99.602	PT Bank Tabungan Negara Tbk
Subtotal	13.515.090	35.650.331	Subtotal
Total	478.299.167	657.439.613	Total

The original consolidated financial statements included herein
are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	164.510.000	130.530.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	64.000.000	78.000.000	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank NTB Syariah	61.500.000	-	PT Bank NTB Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten	43.000.000	25.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Banten
PT Bank Jatim Syariah	16.500.000		PT Bank Jatim Syariah
PT Bank Permata Tbk	12.000.000	9.000.000	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.500.000	90.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000	77.500.000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5.000.000	15.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Bali
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	5.000.000	5.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank DKI	3.412.058	6.226.129	PT Bank DKI
PT Bank Mega Syariah	3.000.000	4.000.000	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.000.000	8.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.000.000	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	2.000.000	5.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.500.000	61.500.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.000.000	-	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	-	18.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Mandiri Taspen Pos	-	8.000.000	PT Bank Mandiri Taspen Pos
Subtotal	399.922.058	540.756.129	

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak berelasi (Catatan 6)			Related parties (Note 6)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	222.250.000	186.750.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.500.000	172.945.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	94.200.000	124.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	34.000.000	45.000.000	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank BNI Syariah	20.000.000	-	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Mandiri Syariah	10.000.000	-	PT Bank Mandiri Syariah
Subtotal	930.872.058	1.069.451.129	Subtotal
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Bukopin Tbk	-	36.202.500	PT Bank Bukopin Tbk
Pihak berelasi (Catatan 6)			Related parties (Note 6)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.398.600.462	1.787.880.374	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	797.523.251	515.929.068	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.326.750	543.037.500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal	2.220.450.463	2.883.049.442	Subtotal
Total	3.151.322.521	3.952.500.571	Total

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah			Rupiah
Deposito berjangka	6,25% - 9,25%	6,00% - 9,25%	Time deposits
Deposito syariah	4,50% - 8,25%	5,00% - 8,00%	Sharia deposits
Dolar AS	2,00% - 4,00%	1,75% - 2,80%	US Dollar

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

5. SHORT TERM INVESTMENTS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Deposito			Time deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	5.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	3.000.000	3.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	3.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	3.000.000	8.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
PT Bank BNI Syariah	-	10.707.973	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	9.917	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Dolar AS			US Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	36.202.500	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Subtotal	14.000.000	57.920.390	Subtotal
Surat Berharga Komersial (SBK)			Securities (SBK)
Rupiah			Rupiah
SBK I PT Pengelola Aset (Persero) 2019	13.939.981	-	SBK I PT Pengelola Aset (Persero) 2019
Total	27.939.981	57.920.390	Total

Investasi jangka pendek merupakan deposito berjangka dan surat berharga yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Short term investments represent time deposits and securities with maturities of more than 3 months but no more than 1 year and were not used as collateral.

Suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	7,00% - 8,00%	7,00% - 7,50%	Rupiah
Dolar AS	-	2,00%	US Dollar

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Kelompok Usaha dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengegalan dengan Kelompok Usaha.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party
Pemegang saham/ Shareholder Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Negara Republik Indonesia
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri
	PT Pertamina (Persero)
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Virama Karya (Persero) PT Hutama Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Nindya Karya (Persero) PT Pengerukan Indonesia (Persero) Tentara Nasional Indonesia PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT Bahtera Adhiguna PT Dharma Lautan Nusantara (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Petrokimia Gresik PT Perikanan Nusantara (Persero) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Semen Tonasa BPJS Kesehatan PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)

6. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the entity has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or has significant influence over the Group in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows:

Jenis transaksi/ Nature of transactions
Jasa konsesi/Concession service
Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Jasa perbankan dan pinjaman/Banking services and loans Penjualan jasa dan kegiatan operasional/Sales and operational activities Penjualan jasa dan kegiatan operasional/Sales and operational activities Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Jasa pembangunan/Construction services Pinjaman dana dan biaya pengerukan/Loan funds and dredging costs Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Penjualan jasa/Sales Jasa pensiun/Pension services Jasa pensiun/Pension services

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party
Entitas Asosiasi/ Associates	PT Portek Indonesia PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Ambang Barito Nusapersada PT Jasa Marga Bali Tol PT Lamin Aspalindo Tiga PT Terminal Nilam Utara PT Energi Manyar Sejahtera PT Terminal Petikemas Indonesia
Memiliki manajemen kunci yang sama/ Under the same key management	Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia III

Jenis transaksi/ Nature of transactions
Jasa pemeliharaan alat fasilitas pelabuhan/ Port facilities equipment maintenance service Investasi saham dan pemberian pinjaman dana/ Investment in stock and lending funds Pemberian pinjaman dana/Lending fund Investasi saham/Investment in stock Investasi saham/Investment in stock Investasi saham dan sewa lahan/Investment in stock and land lease Investasi saham/Investment in stock Investasi saham/Investment in stock
Jasa tenaga kerja bongkar muat/ Handling service

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government, state owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalent (Note 4)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Bank			Bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	214.718.786	289.028.344	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	145.243.561	153.492.846	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.022.335	56.113.723	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	1.005.644	346.914	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	186.429	-	PT Bank Syariah Mandiri
Total	385.176.755	498.981.827	Total
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.872.864	4.165.998	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.869.291	3.265.913	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.482	2.930.493	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	-	6.731.895	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara Tbk	-	99.602	PT Bank Tabungan Negara Tbk
Total	3.779.637	17.193.901	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

a. Kas dan setara kas (Catatan 4) (lanjutan)

a. Cash and cash equivalent (Note 4) (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Deposito			Deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	222.250.000	186.750.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.500.000	172.945.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	94.200.000	124.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	34.000.000	45.000.000	PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank BNI Syariah	20.000.000	-	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Mandiri Syariah	10.000.000	-	PT Bank Mandiri Syariah
Total	530.950.000	528.695.000	Total
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.398.600.462	1.787.880.374	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	797.523.251	515.929.068	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.326.750	543.037.500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	2.220.450.463	2.846.846.942	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

b. Piutang usaha (Catatan 7)

b. Trade receivables (Note 7)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	91.145.385	68.247.983	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	86.568.472	72.149.140	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Pertamina (Persero)	44.932.795	39.527.408	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	43.610.754	28.953.310	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS)	39.971.227	11.543.521	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS)
PT Petrokimia Gresik	35.995.746	27.463.487	PT Petrokimia Gresik
PT Bahtera Adhiguna	11.163.377	10.859.277	PT Bahtera Adhiguna
PT Perikanan Nusantara (Persero)	9.373.897	6.920.612	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	9.314.629	6.311.709	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	96.714.783	70.121.318	Others (each below Rp5 billion)
Subtotal	468.791.065	342.097.765	Sub-total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(159.835.543)	(1.737.260)	Allowance for impairment
Total	308.955.522	340.360.505	Total

c. Piutang lain-lain (Catatan 8)

c. Other receivables (Note 8)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT BKMS	227.363.181	208.881.837	PT BKMS
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	52.267.802	52.267.802	Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	26.576.794	29.330.404	PT Pengerukan Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	61.504.801	7.556.110	Others (each below Rp5 billion)
Subtotal	367.712.578	298.036.153	Sub-total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(97.814.713)	(35.504.794)	Allowance for impairment
Total	269.897.865	262.531.359	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

d. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

d. *Accrued revenues (Note 9)*

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
BPJS Kesehatan	40.298.956	59.828.888	BPJS Kesehatan
PT Pertamina (Persero)	4.268.754	1.779.407	PT Pertamina (Persero)
PT Indonesia Power	1.779.312	741.697	PT Indonesia Power
PT Perkebunan Nusantara XII	1.718.728	716.442	PT Perkebunan Nusantara XII
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	28.762.264	11.989.394	Others (each below Rp1 billion)
Total	76.828.014	75.055.828	Total

e. Utang usaha (Catatan 18)

e. *Trade payables (Note 18)*

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	17.512.404	15.878.580	Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	15.206.429		The Ministry of Transportation of Republic of Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.084.910	4.898.774	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3.178.007	4.557.701	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Portek Indonesia	206.384	6.935.879	PT Portek Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	89.764	34.392.785	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp4 miliar)	18.436.770	12.480.467	Others (each below Rp4 billion)
Total	61.714.668	79.144.186	Total

Transaksi utang usaha dengan pihak berelasi merupakan utang sewa kendaraan operasional, utang pemakaian listrik, utang jasa pengklasifikasian kapal niaga yang dimiliki oleh Perusahaan.

Account payable transaction with related parties represent debt for vehicle rent, debt for electricity use, debt for the classification of commercial vessels owned by the Company.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**6. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**6. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

f. Utang lain-lain (Catatan 19)

f. Other payables (Note 19)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	170.168.880	79.163.886	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Nindya Karya (Persero)	79.575.063	108.231.555	PT Nindya Karya (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	63.429.111	42.476.420	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Brantas Abipraya (Persero)	40.883.828		PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	14.637.235	19.108.606	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	16.924.040	10.550.846	Others (each below Rp5 billion)
Total	385.618.157	259.531.313	Total

Transaksi utang lain-lain dengan pihak berelasi merupakan utang terkait pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Other payable transaction with related parties represent debt related to construction development carried out by the Company.

g. Pendapatan diterima dimuka jangka pendek (Catatan 21)

g. Short-term unearned revenue (Note 21)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Pertamina (Persero)	18.925.977	5.527.144	PT Pertamina (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.054.036	1.536.854	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	466.718	1.963.783	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	19.711.821	26.324.415	Others (each below Rp1 billion)
Total	40.158.552	35.352.196	Total

h. Remunerasi personel manajemen kunci

h. Key management personnel remuneration

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar dan diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp27.611.659 dan Rp21.460.340, masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018.

Total salaries and other short-term benefits paid to and accrued for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors amounted to Rp27,611,659 and Rp21,460,340 for 2019 and 2018, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	581.694.631	578.460.164	Private
Perorangan	4.539.545	4.039.844	Individuals
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(72.114.918)	(66.122.948)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	514.119.258	516.377.060	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 6)	468.791.065	342.097.765	Related parties (Note 6)
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(159.835.543)	(1.737.260)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	308.955.522	340.360.505	Related parties - net
Piutang usaha - neto	823.074.780	856.737.565	Trade receivables - net

b. Analisis umur piutang usaha

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	78.013.622	352.959.208	Neither past due nor impaired
Lewat jatuh tempo:			Overdue:
1 - 30 hari	284.883.692	106.171.043	1 - 30 days
31 - 60 hari	135.906.182	140.044.847	31 - 60 days
61 - 90 hari	89.091.675	10.864.971	61 - 90 days
91 - 180 hari	103.412.883	86.582.590	91 - 180 days
> 180 hari	363.717.187	227.975.114	> 180 days
	1.055.025.241	924.597.773	
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(231.950.461)	(67.860.208)	Allowance for impairment
Piutang usaha - neto	823.074.780	856.737.565	Trade receivables - net

c. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	1.041.405.860	909.244.045	Rupiah
Dolar AS	13.619.381	15.353.728	US Dollar
Total	1.055.025.241	924.597.773	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(231.950.461)	(67.860.208)	Allowance for impairment
Neto	823.074.780	856.737.565	Net

7. TRADE RECEIVABLES

a. By customer:

b. Aging analysis on trade receivables

c. By currency

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

- d. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Saldo awal	67.860.208	91.332.946
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	164.090.253	(23.472.738)
Saldo akhir	231.950.461	67.860.208

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 piutang usaha tidak dijaminkan.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Pihak ketiga		
Swasta	45.718.478	50.765.718
Perorangan	846.307	2.984.456
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(5.787.438)	(17.513.322)
Pihak ketiga - neto	40.777.347	36.236.852
Pihak berelasi (Catatan 6)	367.712.578	298.036.153
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(97.814.713)	(35.504.794)
Pihak berelasi - neto	269.897.865	262.531.359
Piutang lain-lain - neto	310.675.212	298.768.211

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Saldo awal	53.018.116	40.307.802
Penyisihan tahun berjalan	50.584.035	12.710.314
Saldo akhir	103.602.151	53.018.116

7. TRADE RECEIVABLES (continued)

- d. The movements in the allowance for impairment of receivables are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	67.860.208	91.332.946	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	164.090.253	(23.472.738)	Provision (reversal) for the year
Saldo akhir	231.950.461	67.860.208	Ending balance

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

As of December 31, 2019 and 2018 trade receivables are not pledged as collateral.

8. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	45.718.478	50.765.718	Private
Perorangan	846.307	2.984.456	Individuals
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(5.787.438)	(17.513.322)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	40.777.347	36.236.852	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 6)	367.712.578	298.036.153	Related parties (Note 6)
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(97.814.713)	(35.504.794)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto	269.897.865	262.531.359	Related parties - net
Piutang lain-lain - neto	310.675.212	298.768.211	Other receivables - net

The movement in the allowance for impairment of other receivable is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	53.018.116	40.307.802	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	50.584.035	12.710.314	Provision for the year
Saldo akhir	103.602.151	53.018.116	Ending balance

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

8. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 piutang lain-lain tidak dijaminkan.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Group believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

As of December 31, 2019 and 2018 other receivables are not pledged as collateral.

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

9. ACCRUED REVENUES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga	140.452.794	242.607.104	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 6)	76.828.014	75.055.828	Related parties (Note 6)
Total	217.280.808	317.662.932	Total

Pendapatan masih akan diterima merupakan pendapatan yang belum difakturkan.

Accrued revenues represent unbilled revenue.

10. PERSEDIAAN

10. INVENTORIES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Suku cadang	73.304.724	39.183.361	Spare parts
Bahan bakar dan pelumas	5.588.721	7.725.715	Fuel and lubricants
Obat medis	4.739.080	3.234.358	Medical medicine
Lain-lain	1.820.212	3.112.907	Others
Total	85.452.737	53.256.341	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(907.064)	(1.140.817)	Less: Allowance for decline in value
Neto	84.545.673	52.115.524	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for decline in value of inventories are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	1.140.817	936.796	Beginning balance
Penambahan (pemulihan) pada tahun berjalan	(233.753)	204.021	Addition (reversal) during the year
Saldo akhir	907.064	1.140.817	Ending balance

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PERSEDIAAN (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 persediaan tidak dijaminkan.

10. INVENTORIES (continued)

Based on the review of the condition and turnover of the inventory items, the Group believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover any possible losses from decrease in value.

As of December 31, 2019 and 2018 inventories are not pledged as collateral.

11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

11. PREPAID EXPENSE

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Beban dibayar dimuka - Pemindahan tempat penimbunan petikemas	43.751.137	-	Prepaid expense - Relocation of container yard
Beban dibayar dimuka - Asuransi	15.550.585	19.684.692	Prepaid expenses - Insurance
Beban dibayar dimuka - Pegawai	17.783.397	58.296.053	Prepaid expenses - Personnel
Beban dibayar dimuka - Lainnya	7.937.714	20.407.776	Prepaid expenses - Others
Total	85.022.833	98.388.521	Total

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

12. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT BKMS	925.599.602	909.524.691	PT BKMS
PT TNU	60.726.334	68.785.862	PT TNU
PT JBT	46.515.482	60.548.923	PT JBT
PT TPI	32.969.428	32.588.155	PT TPI
PT Ambapers	19.545.469	18.797.053	PT Ambapers
PT EMS	330.529	321.202	PT EMS
PT Portek Indonesia	-	-	PT Portek Indonesia
PT LNG	70.869.046	-	PT LNG
Total	1.156.555.890	1.090.565.886	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (continued)

The movements of investments in associates are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas						Equity method
PT BKMS	40,00%	800.000.000	125.782.185	(182.583)	925.599.602	PT BKMS
PT TNU	40,00%	68.500.000	(7.799.561)	25.895	60.726.334	PT TNU
PT JBT	17,58%	131.047.297	(84.597.840)	66.025	46.515.482	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	(4.530.572)	-	32.969.428	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	6.000.000	13.598.255	(52.786)	19.545.469	PT Ambapers
PT EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	PT EMS
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	PT Portek Indonesia
PT LNG	49,00%	71.050.000	(180.954)	-	70.869.046	PT LNG
Total		1.117.067.797	39.631.542	(143.449)	1.156.555.890	Total

31 Desember 2018/December 31, 2018

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas						Equity method
PT BKMS	40,00%	800.000.000	109.448.167	76.524	909.524.691	PT BKMS
PT TNU	40,00%	68.500.000	285.862	-	68.785.862	PT TNU
PT JBT	17,58%	131.047.297	(70.545.463)	47.089	60.548.923	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	(4.911.845)	-	32.588.155	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	6.000.000	12.867.225	(70.172)	18.797.053	PT Ambapers
PT EMS	30,00%	300.000	21.202	-	321.202	PT EMS
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	PT Portek Indonesia
Total		1.046.017.797	44.494.648	53.441	1.090.565.886	Total

Perusahaan asosiasi tersebut meminta persetujuan Kelompok Usaha untuk membagikan keuntungannya. Kelompok Usaha tidak memperkirakan akan memberikan persetujuan tersebut pada tanggal pelaporan. Perusahaan asosiasi tidak memiliki liabilitas kontijensi atau komitmen modal pada tanggal 31 Desember 2019.

The associates require the Group's consent to distribute its profits. The Group does not foresee giving such consent at the reporting date. The associates have no contingent liabilities or capital commitments as December 31, 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTIES

Mutasi 2019	Saldo 1 Januari 2019/ Balance January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2019/ Balance December 31, 2019	2019 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	85.298.157	-	-	401.191	85.699.348	Land
Bangunan	21.754.178	-	-	(808.594)	20.945.584	Building
Sub Total	107.052.335	-	-	(407.403)	106.644.932	Sub Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	(3.784.496)	(1.750.035)	-	769.532	(4.764.999)	Building
Sub Total	(3.784.496)	(1.750.035)	-	769.532	(4.764.999)	Sub Total
Nilai buku	103.267.839				101.879.933	Net book value

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	85.298.157	-	-	-	85.298.157	Land
Bangunan	24.634.502	3.167.634	(2.194.305)	(3.853.653)	21.754.178	Building
Sub Total	109.932.659	3.167.634	(2.194.305)	(3.853.653)	107.052.335	Sub Total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan	(6.685.904)	(1.488.635)	1.039.369	3.350.674	(3.784.496)	Building
Sub Total	(6.685.904)	(1.488.635)	1.039.369	3.350.674	(3.784.496)	Sub Total
Nilai buku	103.246.755				103.267.839	Net book value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai beban operasi.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as operating expenses.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.596.204.734 berdasarkan penilaian oleh manajemen yang didasari oleh penilaian yang dilakukan KJPP Immanuel, Jhonny dan Rekan dalam laporannya No. 00023A.1/PA/HH-VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.

The fair value of investment properties as of December 31, 2019 amounting to Rp4,596,204,734 are based on management's assessment referring to the appraisal valuation performed by KJPP Immanuel, Jhonny and Partners in its report No. 00023A.1/PA/HH-VII/2018 dated July 30, 2018.

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan pasar dengan menggunakan hirarki level 2.

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is market approach using hierarchy level 2.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 properti investasi tidak dijaminkan.

13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of investment properties as of December 31, 2019 and 2018.

As of December 31, 2019 and 2018 investment properties are not pledged as collateral.

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS

Mutasi 2019	Saldo 1 Januari 2019/ Balance January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2019/ Balance December 31, 2019	2019 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	130.493.381	-	-	27.786.638	158.280.019	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	4.290.634.631	34.374.031	(2.954.042)	448.805.976	4.770.860.596	Port facility buildings
Kapal	2.021.139.790	10.853.465	-	4.931.699	2.036.924.954	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	8.318.666.255	79.876.184	(1.403.767)	64.548.867	8.461.687.540	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	1.084.640.201	4.242.299	(393.824)	77.845.022	1.166.333.698	Port facility installations
Jalan dan bangunan	1.112.937.114	3.659.405	(4.506.225)	190.813.556	1.302.903.850	Roads and buildings
Peralatan	501.136.603	13.207.014	(778.348)	37.850.660	551.415.929	Equipments
Kendaraan	69.448.281	30.200	(7.142.469)	(6.175.830)	56.160.182	Vehicles
Emplasemen	235.595.448	588.747	(275.027)	4.014.691	239.923.859	Emplacement
Subtotal	17.764.691.704	146.831.345	(17.453.702)	850.421.280	18.744.490.627	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	69.278.038	-	(3.835.589)	(65.442.449)	-	Leased assets
Aset dalam penyelesaian	1.563.980.907	1.762.551.019	(238.197.315)	(799.878.042)	2.288.456.569	Construction in progress
Subtotal	19.397.950.649	1.909.382.363	(259.486.606)	(14.899.211)	21.032.947.196	Sub-total
						Accumulated depreciation:
Akumulasi penyusutan:						
Bangunan fasilitas pelabuhan	(417.012.103)	(210.182.459)	1.013.109	(5.398.645)	(631.580.098)	Port facility buildings
Kapal	(304.608.685)	(102.248.503)	-	-	(406.857.188)	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	(1.312.929.535)	(586.390.245)	1.433.984	(154.350)	(1.898.040.146)	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	(261.160.774)	(58.854.656)	335.763	(6.602.509)	(326.282.176)	Port facility installations
Jalan dan bangunan	(388.113.674)	(44.076.763)	2.250.323	(831.990)	(430.772.104)	Roads and buildings
Peralatan	(314.075.543)	(60.034.008)	765.415	(117.665)	(373.461.801)	Equipments
Kendaraan	(54.838.865)	(5.275.111)	5.975.597	-	(54.138.379)	Vehicles
Emplasemen	(75.201.232)	(10.806.496)	133.174	(34.617)	(85.909.171)	Emplacement
Subtotal	(3.127.940.411)	(1.077.868.241)	11.907.365	(13.139.776)	(4.207.041.063)	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	(7.793.779)	(908.923)	2.885.595	5.817.107	-	Leased assets
Subtotal	(3.135.734.190)	(1.078.777.164)	14.792.960	(7.322.669)	(4.207.041.063)	Sub-total
Total	16.262.216.459				16.825.906.133	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(30.669.337)	(3.873.640)	-	-	(34.542.977)	Allowance for impairment
Nilai buku neto	16.231.547.122				16.791.363.156	Net book value

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Tanah	129.162.446	30.000	-	1.300.935	130.493.381	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	3.733.669.573	25.721.222	-	531.243.836	4.290.634.631	Port facility buildings
Kapal	1.056.649.930	11.076.770	-	953.413.090	2.021.139.790	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	6.672.166.810	722.350.617	(15.241.800)	939.390.628	8.318.666.255	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	852.913.506	15.378.052	-	216.348.643	1.084.640.201	Port facility installations
Jalan dan bangunan	1.034.773.818	4.140.987	-	74.022.309	1.112.937.114	Roads and buildings
Peralatan	465.530.427	10.572.916	(308.060)	25.341.320	501.136.603	Equipments
Kendaraan	67.619.624	386.530	(692.255)	2.134.382	69.448.281	Vehicles
Emplasemen	217.538.888	6.315.264	-	11.741.296	235.595.448	Emplacement
Subtotal	14.230.025.022	795.972.358	(16.242.115)	2.754.936.439	17.764.691.704	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	69.278.038	-	-	-	69.278.038	Leased assets
Aset dalam penyelesaian	1.979.179.413	2.350.219.400	(3.105.668)	(2.762.312.238)	1.563.980.907	Construction in progress
Subtotal	16.278.482.473	3.146.191.758	(19.347.783)	(7.375.799)	19.397.950.649	Sub-total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan fasilitas pelabuhan	(244.844.965)	(172.167.138)	-	-	(417.012.103)	Port facility buildings
Kapal	(217.673.446)	(86.935.239)	-	-	(304.608.685)	Vessels
Alat-alat fasilitas pelabuhan	(799.267.281)	(521.306.320)	5.974.786	1.669.280	(1.312.929.535)	Port facility equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	(205.011.865)	(56.148.909)	-	-	(261.160.774)	Port facility installations
Jalan dan bangunan	(332.424.142)	(55.689.532)	-	-	(388.113.674)	Roads and buildings
Peralatan	(257.818.122)	(56.262.451)	5.030	-	(314.075.543)	Equipments
Kendaraan	(48.656.830)	(7.026.184)	844.149	-	(54.838.865)	Vehicles
Emplasemen	(64.007.732)	(11.193.500)	-	-	(75.201.232)	Emplacement
Subtotal	(2.169.704.383)	(966.729.273)	6.823.965	1.669.280	(3.127.940.411)	Sub-total
Aset sewa pembiayaan	(4.329.877)	(3.463.902)	-	-	(7.793.779)	Leased assets
Subtotal	(2.174.034.260)	(970.193.175)	6.823.965	1.669.280	(3.135.734.190)	Sub-total
Total	14.104.448.213	2.175.998.583	(12.523.818)	(5.706.519)	16.262.216.459	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(8.039.931)	(22.629.406)	-	-	(30.669.337)	Allowance for impairment
Nilai buku neto	14.096.408.282				16.231.547.122	Net book value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets is allocated to operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap dan aset takberwujud (Catatan 15) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Benoa Gas Terminal, PT Asuransi Tri Pakarta, Tugu Insurance, dengan total nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp26.447.473.229 tanggal 31 Desember 2019 dan Rp13.099.316.643 dan US\$1.031.786 pada tanggal 31 Desember 2018. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

As of December 31, 2019 and 2018, the Group insured its fixed assets and intangible assets (Note 15) against risk from fire and other insurable risks to PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Benoa Gas Terminal, PT Asuransi Tri Pakarta, Tugu Insurance, with total insurance coverage amounting to Rp26,447,473,229 as of December 31, 2019 and Rp13,099,316,643 and US\$1,031,786 as of December 31, 2018. In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that might be arise from the insurance coverage.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai aset tetap.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible impairments losses on fixed assets.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 aset tetap tidak dijaminkan.

Hak atas tanah Perusahaan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan ("HPL").

Reklasifikasi pada tahun 2019 termasuk reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset properti investasi dengan nilai perolehan sebesar Rp401.191, reklasifikasi dari akun aset dalam penyelesaian menjadi akun aset takberwujud sebesar Rp21.182.957, terdapat reklasifikasi akun aset takberwujud menjadi akun aset dalam penyelesaian sebesar Rp 11.459.756, serta terdapat reklasifikasi dari akun aset tetap ke akun aset tersedia dijual sebesar Rp5.577.201.

Revaluasi Aset Tetap

Penambahan aset tetap pada tahun 2019, termasuk surplus revaluasi aset tetap bangunan fasilitas pelabuhan dan alat fasilitas pelabuhan masing-masing sebesar Rp28.488.432 dan Rp38.403.155.

Termasuk dalam reklasifikasi adalah pemindahan aset alat fasilitas pelabuhan ke aset tidak lancar lainnya.

Revaluasi kelompok aset tetap bangunan fasilitas pelabuhan dan alat-alat fasilitas pelabuhan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Immanuel, Jhonny dan Rekan, dan KJPP Wahyono Adi dan Rekan.

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari bangunan fasilitas pelabuhan dan alat fasilitas pelabuhan yang dinilai.

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan pasar dengan menggunakan hirarki level 2.

14. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2019 and 2018 fixed assets are not pledged as collateral.

The Company's land rights include Rights Management Certificate ("HPL").

Reclassification in 2019 included reclassification from fixed assets to investment property assets amounted to Rp401,191, reclassification of assets under construction to intangible assets amounting to Rp21,182,957, there is reclassification from intangible assets to assets under construction amounting to Rp11,459,756, and reclassification of fixed assets to assets available for sale amounting to Rp5,577,201.

Revaluation of Fixed Assets

Addition of fixed assets in 2019, including the revaluation surplus of port facility building and port facility equipments amounts to Rp28,488,432 and Rp38,403,155, respectively.

Included in the reclassification is the transfer of port facility equipments assets to other non-current assets.

Revaluation class of fixed assets for port facility buildings and port facility equipments are based on valuation performed by KJPP Immanuel, Jhonny and Partners, and KJPP Wahyono Adi and Partners.

The fair value was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the appraisers are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location and condition of the building port facilities and port facility equipment.

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is market approach using hierarchy level 2.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of sales of fixed assets are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Hasil penjualan aset tetap	4.009.498	2.682.015	Proceeds from sales of fixed assets
Nilai buku	5.546.337	12.523.818	Net book value
Kerugian penjualan aset tetap	1.536.839	9.841.803	Loss on sale of fixed assets

Aset dalam penyelesaian

Construction in progress

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

Construction in progress consists of:

	31 Desember 2018/ December 31, 2019			31 Desember 2018/ December 31, 2018			
	Nilai perolehan / Cost	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Target penyelesaian/ Target of completion	Nilai perolehan / Cost	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Target penyelesaian/ Target of completion	
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.925.874.441	10,49% - 95%	2020	1.287.501.431	2% - 98%	2019	Port facility buildings
Kapal	126.577		2020	4.657.116	87%	2019	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	63.738.731	98%	2020	106.921.176	5% - 90%	2019	Port facility equipments
Peralatan	28.548.810	98%	2020	4.559.177	4% - 97%	2019	Equipments
Instalasi fasilitas pelabuhan	101.201.359		2020	72.147.950	15% - 78%	2019	Port facility installations
Jalan dan bangunan	153.988.281	2%-76%	2020	82.879.952	8% - 90%	2019	Roads and buildings
Emplasemen	22.701.232	74%	2020	5.314.105	36% - 95%	2019	Emplacement
Total	2.296.179.431			1.563.980.907			Total

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp110.346.123 dan Rp5.039.859 masing-masing pada tahun 2019 dan 2018.

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp110,346,123 and Rp5,039,859 in 2019 and 2018, respectively.

15. ASET TAKBERWUJUD

15. INTANGIBLE ASSETS

Mutasi 2019	Saldo 1 Januari 2019/ Balance January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2019/ Balance December 31, 2019	2019 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Aset hak konsesi	5.424.840.538	950.193.902	-	3.585.370	6.378.619.810	Concession rights assets
Piranti lunak	132.291.532	82.495.281	-	-	214.786.813	Software application
Goodwill	1.143.301	-	-	-	1.143.301	Goodwill
	<u>5.558.275.371</u>	<u>1.032.689.183</u>	<u>-</u>	<u>3.585.370</u>	<u>6.594.549.924</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Aset hak konsesi	(366.456.103)	(95.098.369)	-	(3.781)	(461.558.253)	Concession rights assets
Piranti lunak	(44.349.212)	(31.892.350)	-	-	(76.241.562)	Software application
	<u>(410.805.315)</u>	<u>(126.990.719)</u>	<u>-</u>	<u>(3.781)</u>	<u>(537.799.815)</u>	
Nilai buku	5.147.470.056				6.056.750.109	Net book value

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Mutasi 2018	Saldo 1 Januari 2018/ Balance January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo 31 Desember 2018/ Balance December 31, 2018	2018 Movements
Harga perolehan:						Cost:
Aset hak konsesi	5.328.536.755	96.303.783	-	-	5.424.840.538	Concession rights assets
Piranti lunak	114.977.615	17.313.917	-	-	132.291.532	Software application
Goodwill	1.143.301	-	-	-	1.143.301	Goodwill
	<u>5.444.657.671</u>	<u>113.617.700</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.558.275.371</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortization:
Aset hak konsesi	(272.269.825)	(94.186.278)	-	-	(366.456.103)	Concession rights assets
Piranti lunak	(19.503.877)	(24.845.335)	-	-	(44.349.212)	Software application
	<u>(291.773.702)</u>	<u>(119.031.613)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(410.805.315)</u>	
Nilai buku	<u>5.152.883.969</u>				<u>5.147.470.056</u>	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of intangible assets as of December 31, 2019 and 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 aset takberwujud tidak dijaminkan.

As of December 31, 2019 and 2018 intangible assets are not pledged as collateral.

Aset hak konsesi

Concession rights assets

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan (KSOP) kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan APBS, TMTL dan TPMG berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 41a).

Concession rights are assets built on the rights granted by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Harbourmaster Office and Port Authority (KSOP) to the Company to build and operate APBS, TMTL and TPMG based on Concession Agreement (Notes 41a).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing persentase rata-rata penyelesaian pembangunan TMTL masih dalam konstruksi sebesar 83,90% dan 51,00%.

As of December 31, 2019 and 2018, the average percentage completion of construction of TMTL under construction is 83.90% and 51.00%, respectively.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan TMTL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp40.866.323 dan Rp6.621.136.

Borrowing costs capitalized for the concession rights assets of TMTL for the year ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp40,866,323 and Rp6,621,136, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai proforma operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

Goodwill

Goodwill berasal dari akuisisi PT PDS pada tanggal 24 Februari 2014 dan PT TPS pada tanggal 28 April 2019 yaitu sebesar Rp1.143.301 dan Rp514.813.986. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan.

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Piutang dalam kepengurusan Negara	17.636.751	17.636.751	Receivable from the State management
Penyisihan piutang dalam kepengurusan Negara	(17.636.751)	(17.636.751)	Allowances of receivable from the State management
Subtotal		-	Sub-total
Uang muka pembelian aset tetap	406.371.161	676.634.108	Advance for purchase fixed assets
Aset lain-lain - neto	182.006.201	99.293.510	Other assets - net
Total	588.377.362	775.927.618	Total

Piutang dalam kepengurusan Negara merupakan piutang macet dan telah didaftarkan pada Panitia Urusan Piutang Negara ("PUPN") untuk ditindaklanjuti.

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

Software

Software application represents cost incurred for the development of *Port Wide Solution* application for *car terminal services*, *container terminal services* and *warehouse* including *Annual Technical Support (ATS)* and *change request*, licensed software application used for *electronic data interchange*, operational application, ERP (*finance*, *human resources*, *technical information system*), development of *Port Community System/Inaportnet*, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, *autogate* integration and VGM for terminal operating system.

Goodwill

Goodwill was initially derived from the acquisition of PT PDS on February 24, 2014 and PT TPS on April 28, 2019 amounting to Rp1,143,301 and Rp514,813,986. Management believes that there was no impairment in the value of goodwill as of December 31, 2019 and 2018, therefore no allowance of impairment losses required.

16. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Receivable from the State management represent loss accounts which have already been registered to Panitia Urusan Piutang Negara ("PUPN") to be followed up.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Perusahaan		
PPN - Masukan	4.666.542	9.845.140
PPH Pasal 23	27.373	-
PPH Final	-	9.469.870
Entitas Anak		
PPN - Masukan	163.093.340	125.593.372
PPH Pasal 23/26	5.569.321	1.661.688
PPH Pasal 28A	319.505	-
PPH Final	100.285	139.620
Total	173.776.366	146.709.690

The Company
VAT - In
Income Tax Article 23
Final Income Tax
Subsidiaries
VAT - In
Income Tax Article 23/26
Income Tax Article 28A
Final Income Tax

Total

17. TAXATION

a. Prepaid taxes

b. Utang pajak

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Perusahaan		
PPH Pasal 4(2)	44.620.498	37.263.647
PPH Pasal 15	122.012	572.118
PPH Pasal 21	19.759.600	12.354.367
PPH Pasal 22	345.299	553.497
PPH Pasal 23/26	1.705.702	3.108.136
PPN WAPU	29.339.687	34.361.992
Subtotal	95.892.798	88.213.757
Entitas Anak		
PPH Pasal 4(2)	1.898.128	376
PPH Pasal 15	169.364	804.133
PPH Pasal 21	6.390.411	6.609.122
PPH Pasal 22	111.818	225.356
PPH Pasal 23/26	1.757.101	2.226.203
PPH Pasal 25	9.051.310	7.116.674
PPN (Neto)	17.531.584	15.463.338
PPH Pasal 29	32.051.062	140.082.273
Subtotal	68.960.778	172.527.475
Total	164.853.576	260.741.232

The Company
Income Tax Article 4(2)
Income Tax Article 15
Income Tax Article 21
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23/26
VAT WAPU

Sub-total

Subsidiaries
Income Tax Article 4(2)
Income Tax Article 15
Income Tax Article 21
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23/26
Income Tax Article 25
VAT (Net)
Income Tax Article 29

Sub-total

Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi pajak pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.594.619.627	1.823.505.300	Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.421.877.250	1.448.498.848	Income before corporate income tax of subsidiaries
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	1.172.742.377	375.006.452	Profit before corporate income tax expenses - the Company
<u>Beda temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Beban imbalan kerja	129.366.206	150.854.860	Employee Benefit expense
Cadangan beban pegawai	90.433.131	31.167.932	Employee expenses reserve
Penyisihan penurunan nilai piutang	212.004.532	(15.134.364)	Provision for impairment of receivables
Penyisihan penurunan aset tetap	3.873.640	3.948.820	Provision for impairment of fixed assets
Biaya emisi obligasi	7.252.938	7.889.848	Obligation fee
Bunga	(48.457.389)	94.737.084	Interest
Amortisasi	581.304.366	(912.342.356)	Amortization
Penyusutan	(863.282.448)	364.208.276	Depreciation
Jumlah perbedaan temporer	112.494.976	(274.669.900)	Total temporary differences
<u>Beda permanen:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	391.639.934	468.419.658	Non-deductible expenses
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(584.765.606)	(615.626.250)	Income subject to final tax
Beban berkaitan dengan pendapatan final	23.065.030	58.524.070	Expenses related to income subject to final tax
Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak	(712.985.176)	(880.451.063)	Income not subjected to tax
Jumlah perbedaan tetap	(883.045.818)	(969.133.585)	Total permanent differences
Taksiran laba (rugi) kena pajak	402.191.535	(868.797.033)	Estimated taxable profit (loss)
Laba (rugi) fiskal tahun sebelumnya:			Tax profit (loss) carry forward:
2015	(137.111.713)	-	2015
2016	(142.649.189)	-	2016
2017	(267.192.555)	-	2017
2018	(868.797.031)	-	2018
Taksiran akumulasi rugi fiskal setelah kompensasi rugi fiskal	(1.013.558.953)	-	Estimated accumulated tax loss after compensation of tax loss carry forward

17. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax loss in 2019 and 2018 is as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Taksiran akumulasi rugi fiskal setelah kompensasi rugi fiskal (pindahan)	(1.013.558.953)	-
Beban pajak kini	-	-
Pembayaran pajak penghasilan di muka::		
Pasal 22	1.148	6.563.562
Pasal 23	53.902.498	14.379.287
Pasal 25	14.734.925	14.734.925
Lebih bayar beban pajak penghasilan badan	68.638.571	35.677.774

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.594.619.627	1.823.505.300
Dikurangi:		
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	1.421.877.250	1.448.498.848
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	1.172.742.377	375.006.452
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	293.185.594	93.751.613
Dampak perbedaan permanen	(220.761.455)	(242.283.395)
Pemulihan akumulasi rugi fiskal	(136.738.364)	-
Perusahaan	(64.314.225)	(148.531.782)
Entitas anak	529.920.376	586.634.535
Beban pajak penghasilan badan	465.606.151	438.102.753

17. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Taksiran akumulasi rugi fiskal setelah kompensasi rugi fiskal (pindahan)	(1.013.558.953)	-
Beban pajak kini	-	-
Pembayaran pajak penghasilan di muka::		
Pasal 22	1.148	6.563.562
Pasal 23	53.902.498	14.379.287
Pasal 25	14.734.925	14.734.925
Lebih bayar beban pajak penghasilan badan	68.638.571	35.677.774

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate is as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	2.594.619.627	1.823.505.300
Less:		
Income before corporate income tax of subsidiaries	1.421.877.250	1.448.498.848
Profit before corporate income tax expenses - the Company	1.172.742.377	375.006.452
Income tax calculated at applicable rate	293.185.594	93.751.613
Effect of permanent Differences	(220.761.455)	(242.283.395)
Recovery for tax losses carried forward	(136.738.364)	-
The Company Subsidiaries	(64.314.225)	(148.531.782)
	529.920.376	586.634.535
Corporate income tax expense	465.606.151	438.102.753

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019.

17. TAXATION (continued)

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2019 will be used as a basis in filling the 2019 annual corporate income tax return.

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

d. The details of income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Beban pajak final			Final tax expense
Perusahaan	53.735.288	39.029.899	The Company
Entitas anak	11.265.513	9.514.691	Subsidiaries
Subtotal	65.000.801	48.544.590	Sub-total
Beban pajak penghasilan badan			Corporate income tax expense
Kini			Current
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	545.735.537	597.212.172	Subsidiaries
Subtotal	545.735.537	597.212.172	Sub-total
Tangguhan			Deferred
Perusahaan	(64.314.225)	(148.531.782)	The Company
Entitas anak	(15.815.161)	(10.577.637)	Subsidiaries
Subtotal	(80.129.386)	(159.109.419)	Sub-total
Total	530.606.952	486.647.343	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Estimasi tagihan pajak

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Perusahaan			The Company
Pajak Penghasilan			Income Tax
2019	68.638.571	-	2019
2018	35.677.774	35.677.774	2018
2017	-	146.357.543	2017
2014	-	34.719.428	2014
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
2018	34.998.471	79.033.751	2018
2017	-	13.252.788	2017
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Penghasilan			Income Tax
PT BJTI	624.682	31.881.876	PT BJTI
PT PMS	15.360.051	20.819.960	PT PMS
PT TTL	-	66.884	PT TTL
PT TPS	58.343.252	-	PT TPS
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
PT BJTI	2.342.005	68.851.041	PT BJTI
Total	215.984.806	430.661.045	Total

f. Pajak tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

f. Deferred taxes

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019					
Dibebankan pada/Charged to					
	Saldo awal/ Beginning balance	Laporan laba rugi/ Statement of profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ loss and other comprehensive	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Perusahaan					Company
Liabilitas imbalan kerja	372.366.445	32.341.552	105.758.494	510.466.491	Employee Benefit
Cadangan beban pegawai	50.130.638	22.608.283	-	72.738.921	Employee expenses reserve
Penyisihan penurunan nilai piutang	25.248.516	53.001.133	-	78.249.649	Provision for impairment of receivables
Bunga	55.754.191	(12.114.347)	-	43.639.844	Interest
Biaya emisi obligasi	3.299.866	1.813.235	-	5.113.101	Obligation fee
Provisi penurunan aset tetap	2.999.161	968.410	-	3.967.571	Provision for impairment of fixed assets
Rugi fiskal	345.302.179	(33.624.300)	-	311.677.879	Tax losses carried forward
Penyisihan atas rugi fiskal	(128.102.921)	69.814.780	-	(58.288.141)	Allowance for tax losses carried forward
Penyusutan	(222.231.698)	(215.820.612)	(16.400.633)	(454.452.943)	Depreciation
Amortisasi	(278.027.914)	145.326.091	-	(132.701.823)	Amortization
Subtotal	226.738.463	64.314.225	89.357.861	380.410.549	Subtotal
Entitas anak	36.668.693	17.740.420	2.616.758	57.025.871	Subsidiaries
Total	263.407.156	82.054.645	91.974.619	437.436.420	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(63.213.116)	(1.925.259)	5.212.555	(59.925.820)	Subsidiaries
Total	(63.213.116)	(1.925.259)	5.212.555	(59.925.820)	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan (lanjutan)

f. Deferred taxes (continued)

31 Desember 2018/December 31, 2018					
Dibebankan pada/Charged to					
Saldo awal/ Beginning balance	Laporan laba rugi/ Statement of profit or loss	Penghasilan Komprehensif lain/ Loss and other comprehensive	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset Pajak Tangguhan				Deferred Tax Assets	
Perusahaan				Company	
Liabilitas imbalan kerja	561.960.488	37.713.715	(227.307.758)	372.366.445	Employee Benefit
Cadangan beban pegawai	42.338.655	7.791.983	-	50.130.638	Employee expenses reserve
Penyisihan penurunan nilai piutang	29.032.107	(3.783.591)	-	25.248.516	Provision for impairment of receivables
Bunga	32.069.920	23.684.271	-	55.754.191	Interest
Biaya emisi obligasi	1.327.404	1.972.462	-	3.299.866	Obligation fee
Provisi penurunan aset tetap	2.011.956	987.205	-	2.999.161	Provision for impairment of fixed assets
Rugi fiskal	167.019.280	178.282.899	-	345.302.179	Tax losses carried forward
Penyisihan atas rugi fiskal	(167.019.280)	38.916.359	-	(128.102.921)	Allowance for tax losses carried forward
Penyusutan	(292.629.122)	91.052.069	(20.654.645)	(222.231.698)	Depreciation
Amortisasi	(49.942.325)	(228.085.589)	-	(278.027.914)	Amortization
Subtotal	326.169.083	148.531.783	(247.962.403)	226.738.463	Subtotal
Entitas anak	24.027.514	14.912.027	(2.270.848)	36.668.693	Subsidiaries
Total	350.196.597	163.443.810	(250.233.251)	263.407.156	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan				Deferred Tax Liabilities	
Entitas anak	(62.588.195)	(4.334.390)	3.709.469	(63.213.116)	Subsidiaries
Total	(62.588.195)	(4.334.390)	3.709.469	(63.213.116)	Total

g. Surat Ketetapan Pajak

g. Tax Assessment Letter

Perusahaan

The Company

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2014

Tax assessment for fiscal year 2014

Pajak penghasilan badan 2014

Corporate income tax 2014

Berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan No. 00001/206/14/093/16 tanggal 17 Februari 2016 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2014 sebesar Rp8.959.588 ditambah sanksi administrasi sebesar Rp2.508.685, dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp785.944.424.

Based on the SKPKB of Corporate Income Tax No. 00001/206/14/093/16 dated February 17, 2016 from the Head of the Tax Office for Large Taxpayers Four, the Company had an underpayment of corporate income tax for 2014 amounting to Rp8,959,588 plus administrative sanction amounting to Rp2,508,685 with taxable income amounting to Rp785,944,424.

Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut melalui Surat No. KU.05/47/P.III-2016 tanggal 31 Maret 2016. Namun berdasarkan No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya No. KU.05/47/P.III.2016 tanggal 31 Maret 2016. Perusahaan telah membayar pajak terutang atas keputusan tersebut pada tanggal 17 Mei 2017. Perusahaan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

The Company has filed an objection to the SKPKB through Letter No. KU.05/47/P.III-2016 dated March 31, 2016. However, based on No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017, Directorate General of Taxes rejected the objection of the Tax Payer in letter No. KU.05/47/P.III.2016 dated March 31, 2016. The Company has paid the indebted tax on such decision on May 17, 2017. The Company appealed against the decision.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak penghasilan badan 2014 (lanjutan)

Pada tanggal 14 Juni 2017, Perusahaan melalui Surat No. KU.05/44/P.III-2017 mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017 kepada Pengadilan Pajak tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2014.

Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak penghasilan tahun pajak 2014 tersebut sebesar Rp34.719.428 pada tahun berjalan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2017

Pajak Penghasilan Badan 2017

Berdasarkan SKPLB Pajak Penghasilan Badan No. 00017/406/17/093/19 tanggal 25 April 2019 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2017 sebesar Rp146.357.543.

Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak penghasilan tahun pajak 2017 tersebut sebesar Rp146.357.543 pada tahun berjalan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pajak Pertambahan Nilai 2017

Berdasarkan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai No. 00045/407/17/093/19 tanggal 25 April 2019 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak pertambahan nilai masa Desember 2017 sebesar Rp12.625.407. Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak pertambahan nilai tahun pajak 2017 tersebut sebesar Rp12.625.407 pada tahun berjalan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah yang dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp627.381 dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

17. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

Corporate income tax 2014 (continued)

On June 14, 2017, the Company through Letter No. KU.05/44/P.III-2017 filed an Appeal on Decision of the Director General of Tax No. KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017 to the Tax Court about objection of SKPKB PPh Badan Year 2014.

The Company received the refund on overpayment of income tax in 2014 amounting to Rp 34,719,428 in the current year via PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk.

Tax assessment for fiscal year 2017

Corporate Income Tax 2017

Based on SKPLB Corporate Income Tax No. 00017/406/17/093/19 dated April 25, 2019 from the Head of the Large Tax Office Four, the Company had an overpayment of corporate income tax 2017 amounting to Rp146,357,543.

The Company received the refund on overpayment of income tax in 2017 amounting to Rp Rp146,357,543 in the current year via PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk.

Value Added Tax 2017

Based on SKPLB Value Added Tax No. 00045/407/17/093/19 dated April 25, 2019 from the Head of Large Tax Office Four, the Company had an overpayment of value added tax for December, 2017 amounting to Rp12,625,407. The Company received the refund on overpayment of value added tax in 2017 amounting to Rp12,625,407 in the current year via PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk. The amount corrected by tax audit amounting to Rp627,381 was charged to current year's profit or loss

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan 2018

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. PEMB-00188/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019 tanggal 25 Juli 2019, Perusahaan sedang dalam proses pemeriksaan pajak penghasilan badan tahun fiskal 2018 dengan estimasi tagihan pajak sebesar Rp35.677.774.

Pajak Pertambahan Nilai 2018

Berdasarkan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai No. 00006/407/18/093/19 dan No. 00007/407/18/093/19 tanggal 21 Februari 2019 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan lebih bayar pajak pertambahan nilai masa Maret 2018 dan April 2018 masing-masing sebesar Rp30.152.799 dan Rp17.938.853. Perusahaan telah menerima pengembalian lebih bayar pajak pertambahan nilai 2018 tersebut sebesar masing-masing Rp30.152.799 dan Rp17.938.853 pada tahun berjalan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sedangkan sisanya masih dalam proses pemeriksaan.

Entitas Anak

PT BJTI

PT BJTI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00013/406/16/093/18 pada 19 April 2018 atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp5.069.702 dari tagihan lebih bayar pajak yang diajukan PT BJTI sebesar Rp35.046.414. Pengembalian tersebut dikompensasi dengan SKPKB pajak pertambahan nilai masa Januari hingga Desember 2016. PT BJTI telah mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut pada tanggal 16 Juli 2018.

PT BJTI menerima Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-00959/KEB/WPJ.19/2019 pada tanggal 31 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan senilai Rp2.555.542. Atas keputusan tersebut, PT BJTI mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2019.

17. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

Corporate Income Tax 2018

Based on Notification Letter of Inspection No. PEMB-00188/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2019 dated July 25, 2019, the Company still in the process of inspection of the corporate income tax on fiscal year 2018 with estimated for tax refund amounting to Rp35,677,774.

Value Added Tax 2018

Based on SKPLB Value Added Tax No. 00006/407/18/093/19 and No. 00007/407/18/093/19 dated February 21, 2019 from the Head of the Large Tax Office Four, the Company had an overpayment of value added tax for March, 2018 and April 2018 amounting to Rp30,152,799 and Rp17,938,853, respectively. The Company received the refund on overpayment of value added tax in 2018 amounting to Rp30,152,799 and Rp17,938,853, respectively in the current year via PT Bank Negara Republik Indonesia (Persero) Tbk where the rest is still in examination process.

Subsidiaries

PT BJTI

PT BJTI received Notice of Tax Overpayment Assessment (SKPLB) No.00013/406/16/093/18 on April 19, 2018 of overpayment of corporate income tax for the year 2016 amounting to Rp5,069,702 out of the Rp35,046,414 for tax refund claimed by PT BJTI. The refund was compensated with SKPKB value added tax for January to December 2016. PT BJTI has filed an objection of the SKPLB dated July 16, 2018.

PT BJTI received a decision letter from the Directorate General of Taxes No. KEP-00959/KEB/WPJ.19/2019 dated May 31, 2019 which stated that the Directorate General of Taxes granted partial objections amounting to Rp2,555,542. PT BJTI has submitted an appeal dated July 24, 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT BJTI (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2019, PT BJTI mengajukan pengajuan surat pencabutan banding dan telah disetujui oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Penetapan Pengadilan Pajak No. PEN-1/PP/CBT/2020 tanggal 8 Januari 2020.

Nilai sisa estimasi tagihan pajak sebesar Rp 27.421.170 diakui sebagai bagian dari beban pajak kini tahun 2019.

PT PMS

Termasuk di dalam jumlah estimasi tagihan pajak adalah kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan PT PMS tahun 2018 sebesar Rp7.212.895. Dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") tanggal 26 September 2019, pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2018 telah dinyatakan rampung dengan lebih bayar sebesar Rp7.212.895, sesuai dengan catatan Perusahaan dan telah diterima pada bulan Oktober 2019.

17. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

Subsidiaries (continued)

PT BJTI (continued)

On December 19, 2019, PT BJTI submitted a revocation letter of tax appeal and it has been approved by the Tax Court through decision letter No. PEN-1/PP/CBT/2020 dated January 8, 2020.

The estimated claims for tax refund balance amounting to Rp27,421,170 is recorded as part of current income tax expenses year 2019.

PT PMS

Included in PT PMS' estimated claims for tax refund year 2018 is the overpayment of PT PMS corporate income tax year 2018 amounting Rp7,212,895. In the decision letter dated September 26, 2019 issued by the Directorate General of Taxes ("DGT"), the corporate income tax for 2018 of the Company was finalized with overpayment amounting to Rp7,212,895, same with the balance as recorded by the Company and has been received on October 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	568.633.930	527.416.198	Private
Pihak berelasi (Catatan 6)	61.714.668	79.144.186	Related parties (Note 6)
Total	630.348.598	606.560.384	Total

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	620.432.172	593.136.130	Rupiah
Dolar AS	9.916.426	13.424.254	US Dollar
Total	630.348.598	606.560.384	Total

19. UTANG LAIN-LAIN

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	404.348.746	439.382.061	Private
Pihak berelasi (Catatan 6)	385.618.157	259.531.313	Related parties (Note 6)
Total	789.966.903	698.913.374	Total

18. TRADE PAYABLES

a. By supplier

b. By currency

19. OTHER PAYABLES

a. By supplier

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Dollar AS	112.185.398	135.136.363	US Dollar
Euro	1.248.233	1.248.233	Euro
Rupiah	676.533.272	562.528.778	Rupiah
Total	789.966.903	698.913.374	Total

20. BEBAN AKRUAL

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pegawai	440.289.804	371.878.190	Employees
Kerjasama mitra usaha	175.212.873	370.799.194	Partnership
Bunga	173.876.736	220.023.521	Interest
Umum	134.264.242	193.127.666	General
Pemeliharaan	59.170.361	59.280.793	Maintenance
Lain-lain	127.698.301	72.401.098	Others
Total	1.110.512.317	1.287.510.462	Total

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk bonus karyawan dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represent accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Accrued expenses - partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for stevedoring activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pembelian bahan bakar.

Accrued expenses - generally represent accrued expenses for fuel purchase.

Beban akrual - pemeliharaan merupakan beban akrual untuk suku cadang dan pemeliharaan.

Accrued expenses - maintenance represent accrued expenses for spareparts and maintenance.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA PENDEK

21. SHORT-TERM UNEARNED REVENUE

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Uang untuk diperhitungkan			
Pihak ketiga	149.827.219	191.086.509	Advances from customers
Pihak berelasi (Catatan 6)	40.158.552	35.352.196	Third parties
			Related parties (Note 6)
Subtotal	189.985.771	226.438.705	Subtotal
Pelayanan jasa perusahaan			
tanah, bangunan, air, dan			Land, building, water and
listrik	39.037.637	26.698.909	electricity service
Lain - lain	-	650.200	Others
Subtotal	39.037.637	27.349.109	Subtotal
Bagian lancar pendapatan			Current portion of
diterima di muka jangka			long-term unearned
panjang (Catatan 24)	63.236.557	52.764.596	revenue (Note 24)
Total	292.259.965	306.552.410	Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang dimuka dari pelanggan berkaitan dengan pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Kelompok Usaha.

Advances from customers represent advances received from customers related to ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

22. UTANG BANK JANGKA PANJANG

22. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pihak ketiga			Third parties
Deutsche Bank AG, London			Deutsche Bank AG, London Branch
Branch	243.927.559	607.527.943	
Bagian lancar utang bank jangka			Current maturities of long-term
panjang	(162.163.278)	(351.140.707)	bank loans
Total	81.764.281	256.387.236	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

22. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Tingkat bunga pinjaman bank jangka panjang:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Rupiah	-	7,53% - 7,68%	Rupiah
Dolar AS	1.79%	2,27%	US Dollar

Perusahaan

Deutsche Bank AG, London Branch

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 30 Agustus 2013, yang terakhir diubah tanggal 19 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas *letter of credit* (LC) sebesar US\$121.241.871 (angka penuh) yang terdiri dari Fasilitas A dan Fasilitas B, masing-masing sejumlah US\$62.913.953 (angka penuh) dan US\$58.327.918 (angka penuh) dari Deutsche Bank AG, London Branch. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini.

Pembayaran pinjaman dilakukan setiap semester selama 10 kali dimulai sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 29 Desember 2019 untuk fasilitas A dan tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 Mei 2021 untuk fasilitas B. Jumlah pokok pinjaman yang dibayarkan pada tahun 2019 adalah sebesar US\$12.582.791 (angka penuh) untuk fasilitas A dan US\$11.665.584 (angka penuh) fasilitas B.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan.

Pinjaman Bank Sindikasi

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 23 Juni 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *non revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.500.000.000 dari Bank Sindikasi yang terdiri dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini. Pembayaran pinjaman dilakukan secara kuartalan.

Pada tanggal 28 Februari 2018, Perusahaan telah melunasi pinjaman bank sindikasi seluruhnya.

22. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Annual interest rate of long-term bank loans:

The Company

Deutsche Bank AG, London Branch

Based on credit agreement dated August 30, 2013 which was lastly amended on April 19, 2018 the Company obtained a letter of credit (LC) loan facility amounting to US\$121,241,871 (full amount) which consists of Facility A and Facility B amounting to US\$62,913,953 (full amount) and US\$58,327,918 (full amount), respectively, from Deutsche Bank AG, London Branch. There is no collateral given for these facilities.

The repayment is done every semester for 10 installments starting from June 29, 2015 until December 29, 2019 for facility A and November 30, 2016 until May, 30 2021 for facility B. Total repayments made in 2019 amounted to US\$12,582,791 (full amount) for facility A and US\$11,665,584 (full amount) for facility B.

As of December 31, 2019 and December 31, 2018, the Company complied with the required covenants.

Syndicated Bank Loans

Based on credit agreement dated 23 Juni 2016, the Company obtained a non revolving loan facility with a maximum facility of Rp4,500,000,000 from Syndicated Banks which consist of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. There is no collateral given for these facilities. The repayment of the loans is in quarterly basis.

On February 28, 28, the Company has fully paid the syndicated bank loans.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN

23. SECURITIES ISSUED

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Senior notes penerbitan tahun 2014 USD500.000.000	6.950.500.000	7.240.500.000	Senior notes issued in 2014 USD500,000,000
Senior notes penerbitan tahun 2018 USD500.000.000	6.950.500.000	7.240.500.000	Senior notes issued in 2018 USD500,000,000
Diskonto dan biaya penerbitan	83.575.951	48.773.678	Discount and issuance cost
Dikurangi:			Less:
Diskonto dan biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(200.160.721)	(200.160.721)	Unamortized of discount and issuance cost
Total	13.784.415.230	14.329.612.957	Total

Obligasi/ Bonds	Pokok utang/Debt principal	Penerbit/ Issuer	Tempat pencatatan/Listed	Tanggal terbit/Issue date	Jatuh tempo/ Due date	Periode pembayaran bunga/Interest payment period	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum
Senior Notes due 2024	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ October 1, 2014	1 Oktober 2024/ October 1, 2024	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,875%
Senior Notes due 2024	USD500.000.000	Perusahaan/ the Company	Singapore Exchange Securities Trading Limited	2 Mei 2018/ May 2, 2018	2 Mei 2023/ May 2, 2023	Setengah tahunan/Semi- Annually	4,500%

Perusahaan menerbitkan US\$500.000.000 (nilai penuh) Senior Notes masing-masing berdasarkan Perjanjian Pembelian pada tanggal 24 September 2014 dan addendum dari perjanjian tersebut tertanggal 30 September 2014, dan Perjanjian Pembelian tanggal 24 April 2018, yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal 2 Mei 2023, dengan harga penerbitan masing-masing adalah 99,314% dan 99,809%. Senior Notes tersebut digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi dan keperluan umum korporasi lainnya.

The Company issued US\$500,000,000 (full amount) Senior Notes based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and an addendum to this agreement dated September 30, 2014, and Purchase Agreement dated April 24, 2018 which will be due on October 1, 2024 and May 2, 2023, with issue price of 99.314% and 99.809%, respectively. The Senior Notes are used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes.

Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2014 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, dan Standard Chartered Bank. Wali Amanat untuk tahun 2014 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners for 2014 are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, and Standard Chartered Bank. Acting as the trustee for 2014 is The Bank of New York Mellon Corporation.

Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk tahun 2018 adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, dan Standard Chartered Bank. Wali amanat untuk tahun 2018 adalah The Bank of New York Mellon Corporation.

Acting as the joint bookrunners for 2018 are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities PTE. LTD, and Standard Chartered Bank. Acting as the trustee for 2018 is The Bank of New York Mellon Corporation.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**23. SURAT BERTAGIH YANG DITERBITKAN
(lanjutan)**

Senior Notes masing-masing dikenakan bunga tetap sebesar 4,875% dan 4,500% per tahun, yang dibayarkan masing-masing setengah tahunan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober untuk tahun 2014 dan setiap tanggal 2 Mei dan 2 November untuk tahun 2018. Senior Notes dicatat pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional, yaitu Fitch Rating, Standard and Poors (S&P), dan Moody's Investor Service dengan peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BBB- dan Baa3 stable. Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana untuk pelunasan utang Senior Notes ini.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

The Senior Notes bear fixed interest at 4.875% and 4.500% annually, paid semi-annually in arrears on April 1 and October 1 for the Year 2014 and May 2 and November 2 for the Year 2018. The Senior Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.

In 2019, the Company has obtained ratings from three International Rating Agencies, namely Fitch Rating, Standard and Poors (S&P) and Moody's Investors Service where the bonds are rated at BBB-, BBB- and Baa3 stable, respectively. The Company is not required to provide sinking fund with respect to repayment of the Senior Notes.

**24. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA JANGKA
PANJANG**

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	133.356.569	147.654.701
PT Salim Ivomas Pratama, Tbk	51.023.142	55.894.129
Lain-lain	233.847.848	202.220.965
Subtotal	418.227.559	405.769.795
Bagian lancar (Catatan 21)	(63.236.557)	(52.764.596)
Total bagian jangka panjang	354.991.002	353.005.199

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp354.991.002 dan Rp353.005.199.

24. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk	133.356.569	147.654.701
PT Salim Ivomas Pratama, Tbk	51.023.142	55.894.129
Lain-lain	233.847.848	202.220.965
Subtotal	418.227.559	405.769.795
Bagian lancar (Catatan 21)	(63.236.557)	(52.764.596)
Total bagian jangka panjang	354.991.002	353.005.199

Long-term unearned revenue represents advance received from rental of landrights and buildings around the port which will be due in more than a year. Balance as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp354,991,002 and Rp353,005,199, respectively.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT RAS Actuarial Consulting, PT Emerald Delta Consulting, PT Tama Aktuaria dan PT Binaputera Jaga Hikmah, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,98%/tahun/year	8,50%/tahun/year	Discount rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6,50%/tahun/year	6,50%/tahun/year	Salary increase projection rate
Tingkat mortalitas	TMI III 2011 10% dari tabel	TMI III 2011 10% dari tabel	Mortality rate
Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas)	mortalitas/of mortality rate	mortalitas/of mortality rate	Permanent disability rate (from mortality table)
Tingkat pengunduran diri	1,00% usia/age 20-29 0,5% usia/age 30-39 0,25% usia/age 40-45 0,13% usia/age 45 ke atas/and above	1,00% usia/age 20-29 0,5% usia/age 30-39 0,25% usia/age 40-45 0,13% usia/age 45 ke atas/and above	Resignation level
Usia pensiun normal	58 tahun/58 years	58 tahun/58 years	Normal pension age

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Program pensiun	450.546.287	333.828.742	Pension program
Program kesehatan pensiunan	1.559.049.632	1.143.277.616	Pension healthcare program
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	32.270.045	12.359.423	Other long-term employee benefits
Subtotal	2.041.865.964	1.489.465.781	Subtotal
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Program pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	119.168.349	82.702.022	Pension program and other post-benefits program
Total	2.161.034.313	1.572.167.803	Total

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

As of December 31, 2019 and 2018, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, PT Sentra Jasa Aktuaria, PT RAS Actuarial Consulting, PT Emerald Delta Consulting PT Tama Aktuaria and PT Binaputera Jaga Hikmah, using the "Projected Unit Credit" method.

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

The employee benefit liabilities are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2003 dan sebelumnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Manfaat yang diperhitungkan termasuk penghargaan purna bakti dan cinderamata yang mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun dengan definisi gaji yang meliputi gaji *merit* dan tunjangan prestasi pegawai.

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	661.450.278	369.772.468	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(210.903.991)	(35.943.726)	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	450.546.287	333.828.742	Recognized liabilities

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember/
Year ended December 31,**

	2019	2018	
Biaya jasa kini	26.308.310	28.561.646	Current service cost
Biaya bunga, neto	28.375.443	21.404.276	Interest cost, net
Biaya jasa lalu	14.607.388	-	Past service cost
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	756.903	-	Remeasurement of Other Long Term Employee Benefits
Beban yang diakui	70.048.044	49.965.922	Recognized expense

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember/
Year ended December 31,**

	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	333.828.742	315.335.402	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	70.048.044	49.965.922	Expense recognized in profit or loss
Beban yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	82.554.375	8.735.429	Expense recognized in the other comprehensive income
Iuran pemberi kerja	(17.279.531)	(10.926.833)	Employer's contributions
Pembayaran manfaat	(18.605.343)	(29.281.178)	Benefit payments
Liabilitas akhir tahun	450.546.287	333.828.742	Liabilities at end of year

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Program pensiun (lanjutan)

a. Pension program (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	369.772.468	387.688.085	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	26.308.310	28.561.646	Current service cost
Biaya bunga	31.430.660	26.754.346	Interest cost
Biaya jasa lalu	14.607.388	-	Past service cost
Pembayaran manfaat	(64.799.069)	(37.325.257)	Benefit payments
Keuntungan (kerugian) aktuarial	284.130.521	(35.906.352)	Actuarial gain (loss)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	661.450.278	369.772.468	Present value of liabilities - end of year
			(46.765.816)
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	
Nilai wajar aset program awal tahun	35.943.726	72.352.683	Fair value of program assets - beginning of year
Pendapatan bunga	3.055.217	5.350.070	Interest income
Laba (rugi) ekspektasian aset program	200.819.243	(44.641.781)	Expected profit (loss) from program assets
luran pemberi kerja	17.279.531	10.926.833	Employer's contributions
luran peserta program	572.090	-	Plan participants' contributions
Pembayaran manfaat	(46.765.816)	(8.044.079)	Benefits payments
Nilai wajar aset program akhir tahun	210.903.991	35.943.726	Fair value of program assets at end of year

Aset program yang dimiliki oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

Plan assets owned by the Group are as follows:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Reksa dana 33,09% | - Mutual funds 33.09% |
| - Aset tetap 48,37% | - Fixed assets 48.37% |
| - Investasi saham 2,86% | - Investment in shares 2.86% |
| - Surat utang negara 9,54% | - State bonds 9.54% |
| - Penempatan langsung 5,95% | - Direct placement 5.95% |
| - Deposito berjangka 0,19% | - Time deposits 0.19% |

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program pensiun (lanjutan)

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jatuh tempo <= 1 tahun	285.990.286
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	53.600.954
Jatuh tempo > 5 tahun	288.309.930
Total	627.901.170

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut

2019	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Beban jasa kini/ Current service cost	2019
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	(36.927.428) 45.821.286	(3.817.732) 3.192.713	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	41.782.626 (34.720.932)	3.232.756 (3.901.589)	Salary increase rate

Masa kerja

Pada tanggal 31 Desember 2019, durasi tertimbang dari liabilitas imbalan kerja adalah 9,08 tahun.

b. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 orang yang belum bekerja, masih kuliah dan belum kawin dengan maksimal umur 25 tahun). Program ini tidak didanai.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	1.559.049.632	1.143.277.616	Present value of liabilities
Liabilitas yang diakui	1.559.049.632	1.143.277.616	Recognized liabilities

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Pension program (continued)

The maturity profiles of employee benefits liability as of December 31, 2019 are as follows:

Maturity <= 1 year
Maturity > 1 year and <= 5 years
Maturity > 5 years

The sensitivity of employee benefit liabilities to changes in the weighted assumption is as follows.

Years of service

As of December 31, 2019, weighted duration of employee benefits liability was 9.08 years.

b. Pension healthcare program

The Company also provides long-term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 2 unemployeed dependants, undergraduate and single with maximum age of 25 years old). This program is unfunded.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

b. Pension healthcare program (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	44.878.893	42.170.482	Current service cost
Biaya bunga	97.178.598	137.591.754	Interest cost
Beban yang diakui	142.057.491	179.762.236	Recognized expense
	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	1.143.277.616	1.919.273.738	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	142.057.491	179.762.236	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	340.479.602	(912.845.465)	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(66.765.077)	(42.912.893)	Benefit payments
Liabilitas akhir tahun	1.559.049.632	1.143.277.616	Liabilities at end of year

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The maturity profiles of employee benefits liability as of December 31, 2019 are as follows:

Jatuh tempo <= 1 tahun	24.037.505	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	613.967.089	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	4.561.204.772	Maturity > 5 years
Total	5.199.209.366	Total

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut

The sensitivity of employee benefit liabilities to changes in the weighted assumption is as follows.

2019	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Beban jasa kini/ Current service cost	2019
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	(181.704.639) 225.342.634	(9.315.364) 12.430.289	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	- -	- -	Salary increase rate

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

c. Other long-term employee benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap Perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 years of continuous service and given long services gratuity amounting to 1 time regular income. This program is not funded.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Nilai kini liabilitas	32.270.045	12.359.423	Present value of liabilities
Liabilitas yang diakui	32.270.045	12.359.423	Recognized liabilities
	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Biaya jasa kini	4.807.937	4.505.570	Current service cost
Biaya bunga	1.050.551	916.794	Interest cost
Beban yang diakui	5.858.488	5.422.364	Recognized expense
	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Liabilitas awal tahun	12.359.423	13.232.813	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	5.858.488	5.422.364	Expense recognized in profit or loss
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	19.613.195	(5.120.994)	Expense (income) recognized in the other comprehensive income
Pembayaran manfaat	(5.561.061)	(1.174.760)	Benefit payments
Liabilitas akhir tahun	32.270.045	12.359.423	Liabilities at end of year

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The maturity profiles of employee benefits liability as of December 31, 2019 are as follows:

Jatuh tempo <= 1 tahun	3.459.405	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	30.563.821	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	264.753.712	Maturity > 5 years
Total	298.776.938	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Sensitivitas dari liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut

2019	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Beban jasa kini/ Current service cost	2019
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	(1.918.885) 2.137.449	(291.830) 326.259	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%	2.147.533 (1.961.609)	327.801 (298.316)	Salary increase rate

d. Program pensiun iuran pasti

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2004. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Pada tahun 2019 dan 2018, iuran program yang dibayarkan Kelompok Usaha masing-masing sebesar Rp17.851.621 dan Rp19.625.197.

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Other long-term employee benefits (continued)

The sensitivity of employee benefit liabilities to changes in the weighted assumption is as follows.

d. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2004. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

In 2019 and 2018, contribution plan paid by the Group amounted to Rp17,851,621 and Rp19,625,197, respectively.

26. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah:

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	1.018.953	100%	1.018.953.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan No. SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000 terbagi atas 3.200.000 saham, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

26. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 08 dated August 13, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary public in Surabaya, regarding the amendment of the Articles of Association and based on a copy of the Decree of the Secretary of the MSOE as the Representative of the MSOE as the Company's GMS No. SK-226/MBU/S/2012 dated July 16, 2012, the Company's authorized capital amounting to Rp3,200,000,000 divided into 3,200,000 shares, has been placed and held by the Republic of Indonesia in the following details:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

26. MODAL SAHAM (lanjutan)

26. SHARE CAPITAL (continued)

	<u>Nominal/Amount</u>	
Setoran modal lama sesuai dengan akta No. 3 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH.	809.222.000	Issued and paid up capital in accordance with notary deed No. 3 dated August 15, 2008 of Notary Agus Sudiono Kuntjoro, SH.
Peningkatan modal disetor tahun 2012 berasal dari:		Increase in paid up capital in 2012 came from:
Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang tertuang dalam PP No. 08 Tahun 2012	209.730.528	Conversion from Government Contribution (PMN) as decreed in Government Regulation (PP) No. 08 Year 2012
Kapitalisasi sebagai cadangan sampai tahun buku 2011	472	Capitalization of unappropriated retained earnings up to year 2011
Total peningkatan modal disetor tahun 2012	<u>209.731.000</u>	Total increase in paid up capital in 2012
Total modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2019 dan 2018	<u><u>1.018.953.000</u></u>	Total issued and paid up capital as of December 31, 2019 and 2018

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk menyisihkan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode penyajian.

Kebijakan Kelompok Usaha adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba dan penghasilan komprehensif lainnya dan utang neto).

Capital management

The primary objective of the Company capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40 year 2007 effective on August 16, 2007 to allocate up until at least 20% from the issued and paid-in capital into non-distributable reserve.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owner of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income and net payables).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. DIVIDEN

- a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 29 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Emy Susilowati, SH., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2018 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp227.891.712.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp531.747.328.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 29 Mei 2019.

- b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang telah diaktakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 2 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Emy Susilowati, SH., pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
- penggunaan laba neto konsolidasian Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:
 - pembagian dividen tunai sebesar 30% dari laba neto atau sebesar Rp441.147.068.
 - penetapan cadangan sebesar 70% dari laba neto atau sebesar Rp1.029.343.158.

Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tersebut di atas pada tanggal 3 Mei 2018.

27. DIVIDEND

- a. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 29 on April 29, 2019 of Emy Susilowati, SH., the shareholders approved, among others:
- utilization of 2018 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp227,891,712.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp531,747,328.

The Company has paid the above mentioned dividend on May 29, 2019.

- b. Based on the General Meeting of Shareholders of the Company that was notarized through Notarial Deed No. 2 on April 3, 2018 of Emy Susilowati, SH., the shareholders approved, among others:
- utilization of 2017 consolidated net income of the Company as follows:
 - distribution of cash dividends 30% of net income or amounted to Rp441,147,068.
 - reserve 70% of net income or amounted to Rp1,029,343,158.

The Company has paid the above mentioned dividend on May 3, 2018.

28. SELISIH ATAS PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS ANAK DAN DAMPAK TRANSAKSI DENGAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI

28. DIFFERENCE FROM CHANGES IN EQUITY OF SUBSIDIARIES AND EFFECTS OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT BMS	38.697.264	38.697.264	PT BMS
PT APBS	33.152.625	33.037.875	PT APBS
PT PEL	(3.885.488)	(3.872.038)	PT PEL
PT PMS	(29.223.425)	(29.122.275)	PT PMS
PT TPS	(514.813.986)	-	PT TPS
Total	(476.073.010)	38.740.826	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

28. SELISIH ATAS PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS ANAK DAN DAMPAK TRANSAKSI DENGAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

28. DIFFERENCE FROM CHANGES IN EQUITY OF SUBSIDIARIES AND EFFECTS OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST (continued)

PT BMS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari PT Usaha Era Pratama Nusantara sebesar Rp38.697.264.

PT BMS

This account represents the difference between the par value and the capital contribution received from PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp38,697,264.

PT APBS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging dan Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.152.625 dan Rp33.037.875 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

PT APBS

This account represents the difference between the par value and the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,152,625 and Rp33,037,875 as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

PT PEL

Akun ini merupakan nominal pembelian saham kembali milik PT PEL dan reklasifikasi dari bagian non pengendali atas pembelian saham kembali oleh PT PEL. Berdasarkan Akta Notaris Amanda Mirza Ervariana No. 2, tanggal 24 Mei 2018, PT BJTI membeli 1% saham treasury PT PEL sehingga saldo saldo tambahan modal disetor pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp3.885.488 dan Rp3.872.038.

PT PEL

This account represents the shares buy-back transactions of PT PEL and reclassification of the non-controlling interest that forms part of the shares buy back by PT PEL. Based on Amanda Mirza Ervariana Notarial Deed No. 2, dated May 24, 2018, PT BJTI purchases 1% of PT PEL's treasury shares so that the additional balance of paid-in capital as of December 31, 2019 and 2018 is Rp3,885,488 and Rp3,872,038, respectively.

PT PMS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PT APBS yang dibeli oleh PT PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV dan PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar Rp29.223.425 pada tanggal 31 Desember 2019.

PT PMS

This account represents the difference between the par value owned by PT APBS which was purchased by PT PMS from Van Oord Dredging Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama with the capital contribution received amounting to Rp29,223,425 as of December 31, 2019.

PT TPS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PT TPS yang dibeli oleh Perusahaan dari P&O Dover (Holdings) Limited dengan setoran modal saham sebesar Rp514.813.986 pada tanggal 31 Desember 2019.

PT TPS

This account represents the difference between the par value owned by PT TPS which was purchased by the Company from P&O Dover (Holdings) Limited with the capital contribution received amounting to Rp513,813,986 as of December 31, 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

29. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Saldo awal	1.453.839.874	718.347.423	Beginning balance
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(345.010.720)	685.395.925	Remeasurements of defined benefit plans
Perubahan cadangan aset revaluasi	42.654.172	50.096.526	Changes in asset revaluation reserves
Saldo akhir	1.151.483.326	1.453.839.874	Ending Balance

30. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

30. NON-CONTROLLING INTEREST

	Aset Neto/Net Assets		Laba (Rugi) Komprehensif Neto/ Net Comprehensive Income (Loss)		
	31 Desember/ December 31,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2019	2018	2019	2018	
PT TPS dan entitas anak	308.430.318	735.519.559	4.637.452	597.478.243	PT TPS and subsidiary
PT BJTI dan entitas anak	438.203.940	431.951.123	8.959.331	8.483.517	PT BJTI and subsidiaries
PT PHC dan entitas anak	3.283.767	3.504.646	273.097	179.928	PT PHC and subsidiary
PT PMS dan entitas anak	135.328.492	98.279.493	16.178.672	13.985.070	PT PMS and subsidiaries
PT TTL dan entitas anak	2.461.793	1.585.840	1.108.108	1.039.288	PT TTL and subsidiary
PT PDS dan entitas anak	7.060.394	5.237.306	1.881.546	1.284.083	PT PDS and subsidiary
Total	894.768.704	1.276.077.967	33.038.206	622.450.129	Total

31. PENDAPATAN OPERASI

31. OPERATING REVENUES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pelayanan terminal petikemas	5.729.237.606	6.026.392.640	Container services
Pelayanan jasa kapal	1.522.760.324	1.494.394.845	Vessel services
Pelayanan jasa terminal	1.031.189.286	837.081.110	Terminal services
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	467.490.896	598.533.246	Land, building, water and electricity services
Pelayanan jasa barang	116.356.962	503.651.814	Cargo services
Lain-lain	908.773.123	714.878.372	Others
Total	9.775.808.197	10.174.932.027	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan TPMG, APBS dan TMTL. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

32. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of TPMG, APBS and TMTL. Construction revenue is measured using cost method, which all cost is directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan konstruksi TPMG, APBS dan TMTL	871.354.794	603.841.389	Construction revenues of TPMG, APBS and TMTL
Beban konstruksi TPMG, APBS dan TMTL	(871.354.794)	(597.016.991)	Construction expenses of TPMG, APBS and TMTL

33. BEBAN OPERASI

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Umum	3.645.959.684	3.066.857.506
Kerja sama mitra usaha	1.572.143.409	1.921.118.838
Penyusutan dan amortisasi	1.294.492.182	1.312.107.452
Pemeliharaan	404.370.792	362.146.501
Asuransi	93.376.203	187.352.678
Administrasi kantor	24.281.934	30.006.966
Total	7.034.624.204	6.879.589.941

33. OPERATING EXPENSES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Umum	3.645.959.684	3.066.857.506	General
Kerja sama mitra usaha	1.572.143.409	1.921.118.838	Partnership
Penyusutan dan amortisasi	1.294.492.182	1.312.107.452	Depreciation and amortization
Pemeliharaan	404.370.792	362.146.501	Maintenance
Asuransi	93.376.203	187.352.678	Insurance
Administrasi kantor	24.281.934	30.006.966	Office administration
Total	7.034.624.204	6.879.589.941	Total

Beban umum terutama merupakan beban konsesi, beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of concession fee, consultants, employee benefits, business traveling, education and training and marketing expenses.

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off di pelabuhan serta beban pegawai non-organik.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for stevedoring activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

34. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Laba (rugi) selisih kurs - neto	506.718.618	(791.880.261)
Lain-lain - neto	(26.042.042)	57.956.623
Total	480.676.576	(733.923.638)

34. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Laba (rugi) selisih kurs - neto	506.718.618	(791.880.261)	Profit (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - neto	(26.042.042)	57.956.623	Others - net
Total	480.676.576	(733.923.638)	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. PENDAPATAN KEUANGAN

35. FINANCE INCOME

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Pendapatan bunga deposito	120.490.881	94.357.416	Interest income from deposits
	16.850.634	35.828.952	
Pendapatan bunga pinjaman			Interest income on loans
Pendapatan jasa giro	10.276.010	13.007.243	Interest income on current account
Total	147.617.525	143.193.611	Total

36. BEBAN KEUANGAN

36. FINANCE COSTS

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi	710.881.629	803.022.758	Interest expenses and amortization of discount and transaction cost
Beban administrasi	4.057.457	5.387.360	Administration expenses
Total	714.939.086	808.410.118	Total

37. BAGIAN LABA (RUGI) ENTITAS ASOSIASI

37. EQUITY IN INCOME (LOSS) OF ASSOCIATES

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT BKMS	16.334.022	(8.628.619)	PT BKMS
PT TNU	(8.085.423)	(502.998)	PT TNU
PT JBT	(14.052.377)	(9.001.520)	PT JBT
PT TPI	381.273	(1.190.508)	PT TPI
PT Ambapers	10.675.552	9.596.516	PT Ambapers
PT EMS	9.327	7.909	PT EMS
PT Portek Indonesia	-	(21.257.229)	PT Portek Indonesia
PT LNG	(180.954)	-	PT LNG
Total	5.081.420	(30.976.449)	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

**38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

31 Desember 2019/December 31, 2019

		Dalam mata uang asing/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	160.705.385	2.233.965.553	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	-	-	Short-term investments
Piutang usaha	USD	979.741	13.619.381	Trade receivables
Total aset			2.247.584.934	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	USD	1.000.000.000	13.784.415.230	Securities issued
Beban akrual	USD	12.334.269	171.458.680	Accrued expenses
Utang bank	USD	17.498.375	243.927.559	Bank loans
Utang usaha	USD	8.783.672	122.101.824	Trade payables
Total liabilitas			14.321.903.293	Total liabilities
Liabilitas neto			12.074.318.359	Net liabilities

31 Desember 2018/December 31, 2018

		Dalam mata uang asing/ In foreign currencies (full amount)	Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	201.553.744	2.918.699.767	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	2.500.000	36.202.500	Short-term investments
Piutang usaha	USD	1.060.267	15.353.726	Trade receivables
Total aset			2.970.255.993	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	USD	989.179.155	14.324.303.344	Securities issued
Beban akrual	USD	101.405.894	1.468.458.751	Accrued expenses
Utang bank	USD	41.953.452	607.527.938	Bank loans
Utang usaha	USD	927.025	13.424.249	Trade payables
Total liabilitas			16.413.714.282	Total liabilities
Liabilitas neto			13.443.458.289	Net liabilities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

39. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

39. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

31 Desember 2019/
December 31, 2019

	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	3.644.611.039	3.644.611.039	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	27.939.981	27.939.981	Short-term investments
Piutang usaha - Pihak ketiga	514.119.258	514.119.258	Trade receivables - Third parties
Piutang usaha - Pihak berelasi	308.955.522	308.955.522	Trade receivables - Related parties
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	40.777.347	40.777.347	Other receivables - Third parties
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	269.897.865	269.897.865	Other receivables - Related parties
Pendapatan masih akan diterima	217.280.808	217.280.808	Accrued revenues
Total	5.023.581.820	5.023.581.820	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	13.469.505.780	13.784.415.230	Securities issued
Beban akrual	1.110.512.317	1.110.512.317	Accrued expenses
Utang usaha - Pihak ketiga	568.633.930	568.633.930	Trade payables - Third parties
Utang usaha - Pihak berelasi	61.714.668	61.714.668	Trade payables - Related parties
Utang lain - lain - Pihak ketiga	404.348.746	404.348.746	Other payables - Third parties
Utang lain - lain - Pihak berelasi	385.618.157	385.618.157	Other payables - Related parties
Utang bank	246.238.178	243.927.559	Bank loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	115.092.216	115.092.216	Other current liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.723.576	1.723.576	Other non-current liabilities
Total	16.363.387.568	16.675.986.399	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**39. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

**39. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

	31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	4.612.047.296	4.612.047.296	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	57.920.390	57.920.390	Short-term investments
Piutang usaha - Pihak ketiga	516.377.060	516.377.060	Trade receivables - Third parties
Piutang usaha - Pihak berelasi	340.360.505	340.360.505	Trade receivables - Related parties
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	36.236.852	36.236.852	Other receivables - Third parties
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	262.531.359	262.531.359	Other receivables - Related parties
Pendapatan masih akan diterima	317.662.932	317.662.932	Accrued revenues
Total	6.143.136.394	6.143.136.394	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	13.469.505.780	14.329.612.957	Securities issued
Beban akrual	1.287.510.462	1.287.510.462	Accrued expenses
Utang usaha - Pihak ketiga	527.416.198	527.416.198	Trade payables - Third parties
Utang usaha - Pihak berelasi	79.144.186	79.144.186	Trade payables - Related parties
Utang lain - lain - Pihak ketiga	439.382.061	439.382.061	Other payables - Third parties
Utang lain - lain - Pihak berelasi	259.531.313	259.531.313	Other payables - Related parties
Utang bank	607.527.943	607.527.943	Bank loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	81.715	81.715	Other current liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.702.002	1.702.002	Other non-current liabilities
Total	16.671.801.660	17.531.908.837	Total

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**39. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Kelompok Usaha menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Estimasi nilai wajar surat berharga yang diterbitkan, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Selain item-item tersebut diatas, Perusahaan tidak memiliki aset atau kewajiban lain yang diukur atau diungkapkan berdasarkan nilai wajar, sehingga tidak ada keharusan untuk menyajikan hirarki nilai wajar berdasarkan PSAK 68 (Penyesuaian 2014): Pengukuran Nilai Wajar.

**39. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenues, trade payables, other payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discount.*
- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured or their carrying amounts are not significantly different from their fair values. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*
- *The estimated fair values of bonds payable, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.*

Other than those items mentioned above, the Company does not have any assets or liabilities that are measured or disclosed based on fair value, therefore it is not considered necessary to present fair value hierarchy based on PSAK 68 (Amendment 2014): Fair Value Measurement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang Dollar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurun/meningkat sebesar 1% dengan semua variabel konstan, pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebesar Rp107.322.371 lebih rendah/tinggi, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang bank dan surat berharga yang diterbitkan dalam satuan mata uang asing.

40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in US Dollar.

As of December 31, 2019 had the exchange rate of the Rupiah against the foreign currency depreciated/appreciated by 1% with all other variables held constant, income before tax for the year then ended would have been Rp107,322,371 lower/higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivable, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, bank loans, securities issued denominated in foreign currency.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko di mana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2019.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Jumlah/ Total	
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year		
Aset						Assets
Kas dan setara kas	3.644.611.039	-	-	-	3.644.611.039	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	-	27.939.981	-	27.939.981	Short-term investments
Liabilitas						Liabilities
Utang bank	-	-	162.163.278	81.764.281	243.927.559	Bank loans
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	-	-	Finance lease liability
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	13.784.415.230	13.784.415.230	Securities issued
Total	3.644.611.039	-	190.103.259	13.866.179.511	17.700.893.809	Total

Analisis sensitivitas untuk tingkat bunga

Jika tingkat suku bunga lebih rendah/lebih tinggi 1% dan seluruh variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp143.885.469 terutama akibat surat berharga yang diterbitkan dan utang bank dalam mata uang asing.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk are to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2019.

Sensitivity analysis for interest rate

Had the interest rate been 1% lower/higher, with all other variables constant, income before corporate income tax for the year ended December 31, 2019 would have been Rp143,885,469 higher/lower, mainly as a result of securities issued and bank loans denominated in foreign currency.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2019	2018
Aset keuangan		
Kas dan setara kas	3.644.611.039	4.612.047.296
Piutang usaha - neto	823.074.780	856.737.565
Piutang lain-lain - neto	310.675.212	298.768.211
Pendapatan masih akan diterima	217.280.808	317.662.932
Investasi jangka pendek	27.939.981	57.920.390
Total	5.023.581.820	6.143.136.394

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there is no significant concentration of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trades with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follows:

Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
Short-term investments
Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**40. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi di mana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Kelompok Usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Kelompok Usaha.

Selain itu, Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

**40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continues to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

	Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate		Jumlah/ Total	
	< 1 tahun/ < 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-3 tahun/ 2-3 years	> 3 tahun/ > 3 years		
Utang usaha	630.348.598	-	-	-	630.348.598	Trade payables
Utang lain-lain	789.966.903	-	-	-	789.966.903	Other payables
Beban akrual	1.110.512.317	-	-	-	1.110.512.317	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	115.092.216	-	-	-	115.092.216	Other short-term liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	13.784.415.230	13.784.415.230	Securities issued
Utang bank	162.163.278	-	-	81.764.281	243.927.559	Bank loans
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	1.723.576	-	-	1.723.576	Other non-current liabilities
Total	2.808.083.312	1.723.576	-	13.866.179.511	16.675.986.399	Total

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING

Perusahaan

a) Perjanjian Konsesi

1) Perjanjian Konsesi APBS

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan No. HK. 0501/175/P.III-2014 (Perjanjian Konsesi APBS) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan memperoleh hak untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan diharuskan untuk membiayai, merencanakan/merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran, serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS.
- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 25 tahun, yang terdiri dari masa pra-konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender, masa konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender, dan masa operasi selama 23 tahun terhitung sejak masa pemungutan pertama jasa penggunaan alur pelayaran hingga sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Konsesi APBS.

41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company

a) Concession Agreement

1) APBS Concession Agreement

The Company entered into an agreement on the provision of Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS") utilization services No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No. HK.0501/175/P.III-2014 (APBS Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 8, 2014. Based on this agreement, the Company obtained the right to provide the APBS utilization services with the following conditions:

- The Company is required to finance, plan/design, build, operate, and maintain the APBS including the installation of shipping navigation facilities, as well as collecting APBS service fee.
- The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 25 years, consisting of the pre-construction period no later than 12 calendar months, the construction period of no later than 12 calendar months, and the operating period for 23 years from the first collection period until the end of the APBS Concession Agreement.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

1) Perjanjian Konsesi APBS (lanjutan)

- Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 3,5% dari pendapatan kotor pengoperasian APBS kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya.
- Perusahaan wajib mengembalikan aset pengoperasian APBS yang berupa *capital dredging* kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.
- Atas kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS, Perusahaan berhak untuk memungut tarif jasa penggunaan APBS berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun.

Berdasarkan Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 tanggal 5 November 2015, alur baru APBS dinyatakan siap beroperasi. Pemungutan tarif jasa pengguna APBS dilakukan 2 hari setelah sosialisasi kepada para pengguna APBS.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

1) APBS Concession Agreement (continued)

- The Company is required to pay concession revenue amounting to 3.5% of the APBS operation's gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every month, no later than 15 days in the following month.
- The Company is required to return the APBS operating assets in form of capital dredging to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.
- For the APBS utilization services provision, the Company has the right to collect the APBS utilization service fee based on the mechanism required by the Law. The tariff is valid for at least 2 years.

Based on the Letter from Tanjung Perak Main Port Authority Office No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 dated November 5, 2015, the new APBS channel was declared ready to operate. The collection of APBS service fee was carried out 2 days after the socialization to APBS users.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

2) Perjanjian Konsesi TTL

Perusahaan mengadakan perjanjian penyediaan dan pelayaran perusahaan jasa kepelabuhanan di TMTL No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 (Perjanjian Konsesi TTL) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2015. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan memperoleh hak perusahaan TMTL untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatan pengoperasian dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian Konsesi tidak dapat dialihkan ke pihak lain dan berlaku selama 72 tahun sejak diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.001/3/20/DPPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong pada tanggal 11 November 2014.
- Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan perusahaan TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap 3 bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan pertama per triwulannya.
- Perusahaan wajib melaporkan laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan konsesi TMTL kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setiap bulan dan setiap tahun, dengan laporan tahunan diaudit oleh auditor independen.
- Perusahaan wajib mengembalikan aset konsesi TMTL yang berupa dermaga kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia setelah berakhirnya Perjanjian Konsesi.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

2) TTL Concession Agreement

The Company entered into an agreement on the provision of port services in TMTL No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 (TTL Concession Agreement) with the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on May 19, 2015. Based on this agreement, the Company obtained the TMTL utilization rights for the construction and the development of port facilities, maintenance activities, and the operational activities with the following conditions:

- The Concession Agreement is not transferrable to another party and is valid for 72 years since the issuance of the General Director of Sea Transportation's Letter No. PP.001/3/20/DPPL-14 concerning the Operational Trials at Teluk Lamong Terminal on November 11, 2014.
- The Company is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the TMTL's utilization service provision activities' gross revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia every 3 months, no later than 15 days in the first month of each quarter.
- The Company is required to report TMTL's operational performance and concession revenue to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia monthly and annually, with the annual report audited by an independent auditor.
- The Company is required to return TMTL's concession assets in the form of port to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia as the Concession Agreement ends.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

2) Perjanjian Konsesi TTL (lanjutan)

- Perusahaan berhak melakukan kerja sama dengan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan konsesi TMTL dengan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Perusahaan berhak untuk menetapkan tarif awal jasa kepelabuhanan, melakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan, serta mengenakan dan memungut tarif jasa kepelabuhanan.

3) Perjanjian Konsesi di Pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan

Perusahaan mengadakan perjanjian kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015 dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak pada tanggal 9 November 2015. Perjanjian ini telah diubah dengan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atas Perjanjian Kegiatan Perusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan No. HK.107/01/12/OP.Tpr-216 dan No. HK.0502/437/P.III-2016 tanggal 14 Oktober 2016. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh hak perusahaan di area yang terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan milik Perusahaan yang telah diusahakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

2) TTL Concession Agreement (continued)

- The Company has the right to cooperate with other competent parties to carry out TMTL's concession activities with written notification to the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.
- The Company has the right to determine the initial rates of port services first rate of, make amendments to the port services rate, and apply and collect the port services rate payment.

3) Concession Agreement in the port operated by the Company

The Company entered into an agreement on the port services provision in the Commercial Ports No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015 with Tanjung Perak Main Port Authority Office on November 9, 2015. This agreement was updated with the Additional Agreement (*Addendum*) on the Port Services Provision Agreement in the Ports No. HK.107/01/12/OP.Tpr-216 and No. HK.0502/437/P.III-2016 dated October 14, 2016. Based on this agreement, the Company obtained the rights to commercially utilize the locations where the Company's terminals and port facilities are located and operated with the following conditions:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

- 3) Perjanjian Konsesi di Pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan (lanjutan)
- Perjanjian Konsesi berlaku selama 30 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Konsesi dan diperpanjang selama area konsesi masih diusahakan Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.
 - Perusahaan wajib membayar pendapatan konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan pengusahaan di area konsesi setiap 3 bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.
 - Perusahaan wajib melaksanakan audit laporan keuangan tahunan secara menyeluruh dengan auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.
 - Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan berhak di antaranya menetapkan dan memungut tarif pelayanan jasa di area konsesi serta melakukan kerja sama dengan pihak lain.
 - Lahan dan aset di dalam area konsesi yang telah berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap sebagai hak pengelolaan dan/atau aset Perusahaan.
 - Apabila Perusahaan telah melakukan kerja sama operasi dengan mitra kerja sama sebelum Perjanjian Konsesi ditandatangani, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Kegiatan pengusahaan dari perjanjian kerja sama tersebut diperhitungkan sebagai komponen pendapatan konsesi dengan mekanisme yang disepakati dan diatur sendiri antara Perusahaan dan mitra kerja sama.

41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

- 3) Concession Agreement in the port operated by the Company (continued)
- The Concession Agreement is valid for 30 years since the signing of the Concession Agreement and is extended as long as the concession areas are still operated by the Company in accordance with the applicable regulations.
 - The Company is required to pay concession revenue amounting to 2.5% of the commercial port utilization activities' gross revenue obtained from the concession area every 3 months, no later than the 15th of the first month of each quarter.
 - The Company is required to carry out annual financial statement audits with independent auditors appointed by the Company.
 - Based on the Concession Agreement, the Company has the right to determine and collect the service fee in the concession area and to cooperate with other parties.
 - The land and assets within the concession area whose utilization rights and/or ownerships are under the Company's name remain as the Company's utilization rights and/or assets.
 - If the Company had entered into cooperation agreements before the Concession Agreement was signed, the cooperation agreements are still valid until their expiration date. The cooperation agreements' commercial activities are to be included as concession revenue components with mechanisms agreed and regulated by the Company and the cooperation partners.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

a) Perjanjian Konsesi (lanjutan)

- 4) Berdasarkan Perjanjian Konsesi No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, BMS dan Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan Kelas II Gresik mengikatkan diri dalam perjanjian konsesi tentang kegiatan perusahaan jasa kepelabuhan terminal manyar di pelabuhan Gresik dengan jangka waktu selama 76 tahun terhitung dari sejak tanggal ditandatangani perjanjian. Pendapatan konsesi pada area konsesi Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sebesar 2,75% dari pendapatan kotor pelaksanaan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi.
- 5) Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan sedang dalam proses pengajuan permohonan hak konsesi atas Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar. Perusahaan memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang Rencana Kegiatan Pengembangan TPGML berdasarkan keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 tanggal 11 Mei 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP, No.LR860/PW13/2/2017 tanggal 2 November 2017, jangka waktu konsesi diusulkan selama 59 tahun.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

a) Concession Agreement (continued)

- 4) Based on the Concession Agreement No. 02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 dated December 15, 2017, BMS and the Class II of Gresik Port Authority and Authority Office bind themselves in a concession agreement concerning the activities of port terminal services in the port of Gresik for a period of 76 years from the date of the signing of the agreement. The concession revenue of Terminal Manyar in Gresik Port is 2.75% of the gross revenue of port service operations in the concession area.
- 5) As at the date of the financial report, the Company is still in the process of requesting the concession rights for Terminal Gilimas in Lembar Port. The Company obtained an Utilization Permit for Development Activity Plan TPGML based on the decision of the West Nusa Tenggara Investment Coordinating Board for Integrated Investment and Licensing Agency No. 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/2016 dated May 11, 2016. Based on BPKP Report of Review No. LR860/PW13/2/2017 dated November 2, 2017, the concession period was proposed for 59 years.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b) Kontrak Pembelian

- 1) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.16/HK.0502/P.III/2018 tanggal 5 Februari 2018 dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk pekerjaan desain dan pembangunan aksesibilitas darat (*flyover* dan *tapper*) di Terminal Teluk Lamong sebesar Rp1.309.892.657. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 83,90%.
- 2) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.113/HK.0502/P.III-2018 tanggal 10 April 2018 dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk pekerjaan pembangunan lanjutan *Container Yard* Terminal Teluk Lamong sebesar Rp399.950.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 88,17%.
- 3) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.44/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk pekerjaan pembangunan kantor *Tower Pelindo*. Namun pada tanggal 11 Desember 2018, Perusahaan dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) No. SP2.430.1/HK.0502/P.III-2018 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai nilai kontrak yang semula sebesar Rp466.965.400 menjadi Rp467.094.180. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 80%.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

b) Purchase Contract

- 1) The Company entered into contract No. SP2.16/HK.0502/P.III/2018 dated February 5, 2018 with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the design and construction for land accessibility work (*flyover* and *tapper*) at Terminal Teluk Lamong amounting to Rp1,309,892,657. As of December 31, 2019 the work progress has reached 83.90% completion rate.
- 2) The Company entered into contract No. SP2.113/HK.0502/P.III-2018 dated April 10, 2018 with PT Nindya Karya (Persero) for the construction of *Container Yard* holdings in Terminal Teluk Lamong amounting to Rp399,950,000. As of December 31, 2019 the work progress has reached 88.17% completion rate.
- 3) The Company entered into contract No. SP2.44/HK.0502/P.III-2018 dated February 21, 2018 with PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the construction of *Pelindo Office Tower*. However on December 11, 2018, the Company and PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk agreed to make *Additional Agreement (Addendum)* No. SP2.430.1/HK.0502/P.III-2018 which changed among others about the value of agreement which was amounting to Rp466,965,400 into Rp467,094,180. As of December 31, 2019 the work progress has reached 80% completion rate.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b) Kontrak Pembelian (lanjutan)

- 4) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.42/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 yang terakhir telah diperbarui dengan *Addendum I* No. SP2.333.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 3 September 2018 dengan PT Van Oord Indonesia untuk pekerjaan pengerukan kolam dan alur pelayaran Pelabuhan Cabang Benoa sebesar Rp541.219.237. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 98,44%.
- 5) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.249.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan design dan konstruksi pengembangan terminal Kalibaru pelabuhan Tanjung Emas sebesar Rp524.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut belum dimulai.
- 6) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.131/HK.0502/P.III-2018 tanggal 26 April 2018 dengan PT Utama Karya (Persero) untuk pekerjaan design dan pembangunan perkuatan dermaga Samudera pelabuhan Tanjung Emas. Namun pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan dan PT Utama Karya (Persero) sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) No. SP2.88.1/HK.0502/P.III-2019 dimana mengatur perubahan diantaranya mengenai nilai kontrak yang semula sebesar Rp297.990.000 menjadi Rp259.379.017. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 48,06%.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

b) Purchase Contract (continued)

- 4) The Company entered into contract No. SP2.42/HK.0502/P.III-2018 dated February 21, 2018 which was last updated with *Addendum I* No. SP2.333.1/HK.0502/P.III-2018 dated September 3, 2018 with PT Van Oord Indonesia for dredging of basin and shipping track in Benoa Port amounting to Rp541,219,237. As of December 31, 2019 the work progress has reached 98.44% completion rate.
- 5) The Company entered into contract No. SP2.249.1/HK.0502/P.III-2018 dated July 27, 2018 with PT Wijaya Karya (Persero) for design and construction of expansion of Kalibaru terminal of Tanjung Emas port amounting to Rp524,000,000. As of December 31, 2019 the work progress has not yet to begin.
- 6) The Company entered into contract No. SP2.131/HK.0502/P.III-2018 dated April 26, 2018 with PT Utama Karya (Persero) for the design of and building reinforcement of Samudera dock at Tanjung Emas port. However on April 29, 2019, the Company and PT Utama Karya (Persero) agreed to make *Additional Agreement (Addendum)* No. SP2.88.1/HK.0502/P.III-2019 which changed among others about the value of agreement which was amounting to Rp297,990,000 into Rp259,379,017. As of December 31, 2019 the work progress has reached 48.06% completion rate.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

b) Kontrak Pembelian (lanjutan)

- 7) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.43/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk pekerjaan design dan pembangunan dermaga *cruise* dan petikemas terminal Gilimas pelabuhan cabang Lembar. Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan addendum No. SP2.47.1/HK.0502/P.III-2019 dengan nilai perjanjian sebesar Rp288.871.116. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 98,62%.
- 8) Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan No. SP2.192/HK.0502/P.III-2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pekerjaan *design* dan pembangunan perkerasan lapangan penumpukan ex. Semen Tonasa pelabuhan cabang Banjarmasin sebesar Rp149.325.000. Pada tanggal 31 Desember 2019 progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 30,12%.

c) Informasi Penting Lainnya

- 1) Berkaitan dengan penggunaan tanah HPL milik Perusahaan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena oleh PT JBT (Entitas Asosiasi), Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena (TPT) menyampaikan surat ke Kasubdit Pengadaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum mengenai hal pendataan sebagai berikut:

Pemilik/ Landowners	Luas/ Land area	NJOP	Appraisal	Keterangan/ Information
Perusahaan (darat/land)	522 m2/sqm	1.227.744.000	2.589.120.000	-
Perusahaan (perairan/waters)	41.490 m2/sqm	-	-	Dalam proses P2T/ In the process P2T

Sampai dengan tanggal Laporan ini, keputusan uang ganti rugi terhadap HPL milik Perusahaan tersebut masih dalam proses menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

b) Purchase Contract (continued)

- 7) The Company entered into contract No. SP2.43/HK.0502/P.III-2018 dated February 21, 2018 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) for the design of and building cruise dock and Gilimas container terminal at port of Lembar region. This agreement has been amended several times, most recently based on addendum No. SP2.47.1/HK.0502/P.III-2019 with the value of agreement amounting to Rp288,871,116. As of December 31, 2019 the work progress has reached 98.62% completion rate.
- 8) The Company entered into contract No. SP2.192/HK.0502/P.III-2019 dated July 30, 2019 with PT Brantas Abipraya (Persero) for the design of and building stacking yard pavement ex. Semen Tonasa port of Banjarmasin region amounting to Rp149,325,000. As of December 31, 2019 the work progress has reached 30.12% completion rate.

c) Other Important Information

- 1) In connection with the Company's use of HPL land right for the construction of Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena highways by PT JBT (Associate), Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena (TPT) delivered a letter to the Head of Sub Directorate Land Acquisition Department of Public Works regarding the data collection as follows:

As of the date of this Report, the decision of compensation for the HPL of the Company is still in the process of awaiting direction from the Directorate General of Highways Ministry of Public Works and Public Housing.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 2) Pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS

P&O Dover (*Holdings*) Ltd dan Perusahaan telah menyepakati proses pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS, yang hasilnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Poin penting yang disepakati adalah bahwa pada tanggal 28 April 2019 telah dilakukan pengambil alihan saham P&O Dover (*Holdings*) Ltd oleh Perusahaan. Perusahaan sudah mendapat Persetujuan Menteri Negara BUMN dan telah menyepakati Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Perjanjian Penyelesaian dengan P&O Dover (*Holdings*) Ltd.

- 3) HPL Perusahaan seluas 12,8 hektar di Pelabuhan Cabang Tanjung Emas Semarang juga dicatat sebagai aset PT Pertamina UPPDN IV Semarang. Sampai tanggal laporan keuangan, belum ada penyelesaian atas penguasaan HPL yang tumpang tindih ini.

- 4) Pengangkatan kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera

Perusahaan menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 pada tanggal 4 Februari 2016 tentang penugasan penyingkiran kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya.

Perusahaan telah menyingkirkan kerangka KMP Wihan Sejahtera, atas penugasan tersebut Perusahaan membukukan biaya sebesar Rp58.678.059 dan berharap biaya tersebut dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh Perusahaan sehingga proses kompensasi dapat dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

c) Other Important Information (continued)

- 2) Termination of the cooperation on PT TPS operation

P&O Dover (*Holdings*) Ltd and the Company have agreed to terminate the cooperation on PT TPS operation, which agreement has been supported by the Company's Board of Commissioners. The important points on this termination process include the transfer of PT TPS' shares from P&O Dover (*Holdings*) Ltd on April 28, 2019. The Company has obtained the approval from the Minister of State-Owned Enterprises (MSOE) and have agreed on the Settlement Agreement and Conditional Agreement of Sales and Purchase of Share by the Company and P&O Dover (*Holdings*) Ltd.

- 3) The Company's 12.8 hectares HPL in Semarang's Tanjung Emas Branch Port are also recorded as PT Pertamina UPPDN IV's asset. Until the date financial statements authorization date, this overlapping HPL haven't been resolved.

- 4) Removal of KMP Wihan Sejahtera ship wreckage

The Company received a Decision letter of the head of Harbourmaster Main Office Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 dated February 4, 2016 regarding the assignment to remove the ship frame and the cargo of KMP Wihan Sejahtera.

The Company had removed ship frame of KMP Wihan Sejahtera, upon the assignment the Company incurred costs amounting to Rp58,678,059 and expected that the costs can be compensated with the concession received by the Company. Therefore, the compensation process can be executed by the Authority of Main Port of Tanjung Perak.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 4) Pengangkatan kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera (lanjutan)

Tagihan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sebesar Rp49.445.203 dicatat sebagai piutang lain-lain jangka panjang.

Atas tagihan tersebut, Perusahaan telah mencadangkan seluruhnya per 31 Desember 2019.

- 5) Penggunaan tanah HPL oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Perusahaan menyerahkan penggunaan bagian tanah HPL pelabuhan Cabang Gresik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dengan perjanjian No PGSK.30/662/1982 tanggal 11 Desember 1982 dengan luas wilayah sebesar 179.450m² berlaku mulai tanggal 1 April 1981 sampai dengan tanggal 31 Maret 1996. Sementara itu, Perusahaan memperoleh hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur pada tanggal 22 November 1993 dengan hasil luas 280.287m² untuk penggunaan tanah pelabuhan dengan perjanjian No PGSK.30/662/1982. terdapat selisih sebesar 100.837m² dikarenakan adanya perairan yang telah berubah menjadi daratan.

Perusahaan mengadakan rapat dengan PT PLN PJB II pada tanggal 26 Februari 2015 dan disepakati bahwa Perusahaan dan PT PLN PJB II akan menelaah biaya kompensasi reklamasi untuk lahan seluas 280.287m² terhitung sejak 1996 sampai Desember 2015 dan PT PLN PJB II masih berpedoman pada UU No 30 Tahun 2009 Pasal 30 penggunaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik menggunakan ganti rugi atau kompensasi.

**41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

The Company (continued)

c) Other Important Information (continued)

- 4) Removal of KMP Wihan Sejahtera ship wreckage (continued)

Receivables to the head of Harbourmaster Main Office Tanjung Perak amounting to Rp49,445,203 was recorded as part of other long-term receivables.

For the claim, the Company has reserved all of the amount outstanding as of December 31, 2019.

- 5) HPL utilization by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

The Company handed over the utilization of HPL on branch port of Gresik to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) with agreement No PGSK.30/662/1982 dated December 11, 1982 with an area of 179,450m² effective from April 1, 1981 until March 31, 1996. Meanwhile, The Company obtained the result of measurement from the National Land Agency region of East Java on November 22, 1993 with the results of 280,287m² for the right to use a part of the land in Port with Agreement no PGSK.30/662/1982. There is a difference amounting to 100,837m² due to changes of sea area which have become land.

The Company held a meeting with PT PLN PJB II dated February 26, 2015 and agreed that the Company and PT PLN PJB II will examine the cost of compensation for reclamation for land covering 280,287m² counted since 1996 to December 2015 and PT PLN PJB II was still referring to Law no 30 Year 2009 article 30 that the use of the land for the provision of electric power using the indemnity or compensation.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. IKHTISAR PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

c) Informasi Penting Lainnya (lanjutan)

- 5) Penggunaan tanah HPL oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)

Perusahaan mengirimkan surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 29 Januari 2018 untuk permohonan mediasi terhadap permasalahan penggunaan tanah HPL oleh perusahaan BUMN di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan telah menerima hasil opini dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya No. 05/BO-ARB/BANI-SBY/VII/2019 tanggal 27 September 2019 yang berisikan bahwa Perusahaan berkewajiban mengembalikan atau melepaskan HPL No. 8 untuk diproses lebih lanjut oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN). Oleh karenanya, Perusahaan telah mencadangkan tagihan yang sudah dibukukan sebelumnya sebesar Rp68.136.847 per 31 Desember 2019.

Entitas anak

TTL

- 1) Perjanjian Kerjasama

Pada tanggal 23 Desember 2014, PT TTL membuat perjanjian kerjasama dengan PT Nusa Prima Logistik (NPL) terkait pelayanan pada terminal curah kering berupa pembangunan, pengoperasian dan pengadaan gudang transit komoditi curah kering. Periode perjanjian adalah 30 tahun sejak terminal curah kering tersebut beroperasi dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak. TTL telah mendapatkan izin pengoperasian terminal curah kering pada tanggal 28 Desember 2018 dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga periode perjanjian efektif dimulai tanggal 1 Januari 2019.

41. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

c) Other Important Information (continued)

- 5) HPL utilization by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (continued)

The Company sent a letter to the Audit Board of the Republic Indonesia dated January 29, 2018 requesting for mediation against the issues of using the HPL land by another State-owned enterprises on the Company area.

The company has received the opinion results from the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya Representative No. 05 / BO-ARB / BANI-SBY / VII / 2019 dated September 27, 2019 which contains that the Company is obliged to return or release HPL No. 8 for further processing by the National Defense Agency (BPN). Therefore, the Company has made a provision for a previously recorded receivables amounting to Rp.68,136,847 as of December 31, 2019.

Subsidiary

TTL

- 1) Partnership Agreement

On December 23, 2014, PT TTL entered into a cooperation agreement with PT Nusa Prima Logistik (NPL) related to the dry bulk terminal services such as construction, operation and procurements of dry bulk commodities transit warehouse. The agreement period is 30 years from dry bulk terminal commenced its commercial operations and could be extended with terms and conditions which were agreed by all parties. PT TTL has received the permit for operating the dry bulk terminal on December 28, 2018 from Director General of Sea Transportation, therefore the effective agreement period starts on January 1, 2019.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM

Perusahaan

- a) Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara dengan No. Perkara 196/Pdt.G/2009/PN.Sby.

Pada tanggal 18 Desember 2002, Perusahaan dan PT Timur Nusantara menandatangani perjanjian kerjasama No. HK 0501/36/P/III-2002 tentang pengelolaan fasilitas terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Wangi, yang seluruh asetnya merupakan aset milik Perusahaan, untuk jangka waktu yang berakhir pada 18 Januari 2004. Namun, setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, PT Timur Nusantara tidak mengembalikan dan tetap menguasai objek perjanjian tersebut. Perusahaan telah menyampaikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada PT Timur Nusantara untuk meninggalkan dan mengembalikan objek tersebut.

Pada 20 Maret 2009, Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara melalui Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengembalikan objek perjanjian tersebut dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.855.286. Perusahaan memenangkan gugatan ini.

Putusan serupa juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI sesuai relas putusan Mahkamah Agung RI No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2012, yang memenangkan Perusahaan dan menolak permohonan kasasi dari PT Timur Nusantara. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut Perusahaan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Timur Nusantara dan Perusahaan berpotensi memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset dan potensi memperoleh pendapatan serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.855.286 dari PT Timur Nusantara.

Perusahaan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta penjelasan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah dikirimkan kepada PT Timur Nusantara atau Kuasa Hukumnya sesuai surat Direksi No. HK.10/01/P.III-2014 tanggal 13 Januari 2014 dan surat No. HK.01/06/P.III-2014 tanggal 18 Februari 2014.

42. LAWSUIT

The Company

- a) The Company filed a lawsuit against PT Timur Nusantara with Case No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby.

On December 18, 2002, the Company and PT Timur Nusantara signed a cooperation agreement No. HK 0501/36/P/III-2002 concerning the management of container terminal facilities at the Port of Tanjung Wangi, whose assets are all owned by the Company, for a period ending on January 18, 2004. However, after the expiration of the agreement, PT Timur Nusantara retained the control and didn't return the object of the agreement. The Company had submitted legal warning letters for three times reminding PT Timur Nusantara to leave and return the object.

On March 20, 2009, the Company filed a lawsuit against PT Timur Nusantara through Surabaya District Court to return the agreement object and pay a compensation amounting to Rp1,855,286. The Company won this lawsuit.

A similar verdict was handed down by High Court Judge in East Java and the Indonesian Supreme Court through the decision statement No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 24, 2012, which declared that the Company won and rejected the request for a cassation from PT Timur Nusantara. With regards to the Supreme Court's decision, the Company made a notification to PT Timur Nusantara and the Company had potential gain in the form of the returned asset and compensation amounting to Rp1,855,286 from PT Timur Nusantara.

The Company had sent a letter to the Surabaya District Court to clarify that the Supreme Court Cassation Decision had been sent to PT Timur Nusantara or the corresponding legal counsel in accordance with the Board of Directors' letter No. HK.10/01/P.III-2014 dated January 13, 2014 and letter No.HK.01/06/P.III-2014 dated February 18, 2014.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- a) Perusahaan menggugat PT Timur Nusantara dengan No. Perkara 196/Pdt.G/2009/PN.Sby. (lanjutan)

Perusahaan telah memberikan peringatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi PT Timur Nusantara tetap menolak untuk melaksanakan putusan. Karenanya Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi (sebagai delegasi dari Pengadilan Negeri Surabaya di wilayah tempat objek eksekusi) menerbitkan Penetapan No. 06/PEN.Eks/2018/PN.Sby Jo. No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2018 yang berisikan perintah untuk melakukan sita eksekusi atas objek sengketa berupa 1 unit *Reach Stacker* milik PT Timur Nusantara.

Atas Penetapan tersebut telah dilakukan sita eksekusi terhadap alat tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018 bertempat di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 06/PEN.EKS/2018/PN.Sby tanggal 10 Oktober 2018. Perusahaan menunggu hasil proses pelelangan tersebut yang akan di sampaikan kepada Perusahaan.

- b) Perusahaan menggugat PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") dengan No. Perkara. 662/Pdt.G/2009/PN.SBY.

Pada tanggal 29 April 1997, Perusahaan dan PT WAL menandatangani perjanjian sewa HPL Cabang Tanjung Perak seluas 27.393m² untuk kepentingan PT WAL membangun pabrik minyak nabati cair (*refinery*) dan gudang penimbunan dengan jangka waktu 20 tahun. Hingga akhir masa perjanjian, PT WAL tidak melakukan pembangunan dan hanya melakukan pembangunan tembok pembatas. Karena PT WAL tidak segera melakukan pembangunan maka Perusahaan berupaya untuk mengembalikan atau menarik kembali tanah yang dikerjasamakan. Atas tindakan Perusahaan tersebut PT WAL melakukan gugatan kepada Perusahaan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan di pengadilan tingkat pertama ini dimenangkan oleh Perusahaan.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- a) The Company filed lawsuit against PT Timur Nusantara with Case Number 196/Pdt.G/2009/PN.Sby. (continued)

The Company has sent a warning through the Surabaya District Court, but PT Timur Nusantara still refused to carry out the verdict. Therefore, the head of Banyuwangi District Court (as a delegation of Surabaya District Court at the place of execution) issued Decision No. 06/PEN.Eks/2018/PN/Sby Jo. No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 5, 2018 stating an order to seize the object of the dispute in the form of 1 unit *Reach Stacker* belonging to PT Timur Nusantara.

Based on the decision above, the seizure was done on October 10, 2018 at the Port of Tanjung Wangi Banyuwangi as stated in the Seizure Memo No. 06/PEN.EKS/2018/PN.Sby dated October 10, 2018. The Company is waiting for the result of the auction process which will be notified to the Company by the High Court of Surabaya.

- b) The Company filed lawsuit against PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") Case number 662/Pdt.G/2009/PN.SBY.

On April 29, 1997, the Company and PT WAL signed Tanjung Perak Branch HPL lease agreement covering 27,393m² for 20 years for PT WAL's construction of vegetable oil refinery and stockpiling warehouse. Until the end of the agreement period, PT WAL hasn't done any construction and has only built the retaining wall. Since PT WAL didn't immediately carry out the development, the Company sought to have the leased land returned or withdrawn. For the Company's action, PT WAL filed a lawsuit against the Company to Surabaya District Court. The lawsuit in the first court was won by the Company.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- b) Perusahaan menggugat PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") dengan No. Perkara. 662/Pdt.G/2009/PN.SBY. (lanjutan)

Upaya hukum lanjutan telah dilakukan beberapa kali, yang terakhir dengan hasil Putusan Peninjauan Kembali dengan *register* No. 470 PK/PDT/2012 tanggal 23 Oktober 2013 yang mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT WAL dari situs Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perusahaan telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, yang terakhir dengan mengundang PT WAL melalui media massa Koran Nasional, namun PT WAL tidak pernah menghadiri undangan pertemuan tersebut. Karena tidak adanya respon dari PT WAL, pada tanggal laporan keuangan tanah tersebut disewakan Perusahaan kepada PT Nilam Utara.

- c) Perusahaan mengundurkan diri dari keikutsertaan kepemilikan PT Lamin Aspalindo Tiga ("Lamin").

PT Lamin merupakan ventura bersama antara PT Lamindo Sakti Inti dan Perusahaan. Namun, Lamin baru melakukan satu transaksi penjualan sejak pendiriannya. Melalui konsultan hukum Zaidun & Partners, Perusahaan telah melakukan uji tuntas dari segi hukum (*Legal Due Diligence*). Berdasarkan hasil uji tuntas tersebut, Perusahaan telah menerbitkan Surat Kuasa No. KP.0503/166/HOFC-2018 tanggal 17 Desember 2018 dan No. SP.0835/KP.0503/HOFC-2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang pembubaran Lamin. Sampai tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu jawaban dan kehadiran PT Lamindo Sakti Inti untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pelepasan kepemilikan Perusahaan atas PT Lamin.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- b) The Company filed lawsuit against PT Wahana Artha Luhur ("PT WAL") Case number 662/Pdt.G/2009/PN.SBY. (continued)

Following that, several legal efforts have been made, with the latest result being the Judicial Review Decision with register No. 470 PK/PDT/2012 dated October 23, 2013 which granted the Judicial Review proposed by PT WAL as stated in the Supreme Court of Indonesia's Website.

The Company has attempted to resolve the lawsuit, with the latest effort by inviting PT WAL through advertisements in national newspapers. However, PT WAL had not responded to any of the meeting invitations. As there's no response from PT WAL, at the financial report date the Company leased the land to PT Nilam Utara.

- c) The Company withdrew from the ownership of PT Lamin Aspalindo Tiga ("Lamin").

PT Lamin is a joint venture between PT Lamindo Sakti Inti and the Company. However, Lamin has only made one sales transaction since its establishment. Through Zaidun & Partners as the legal consultant, the Company has conducted Legal Due Diligence. Based on the results of the Due Diligence, the Company issued Power of attorney No. KP.0503/166/HOFC-2018 dated December 17, 2018 and No. SP.0835/KP.0503/HOFC-2018 dated December 17, 2018 on the dissolution of Lamin. Until the date of the financial statements, the Company is still waiting for PT Lamindo Sakti Inti's response and presence to carry out the General Meeting of Shareholders in order to release the Company's ownership of PT Lamin.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- d) Perusahaan (turut tergugat) dan Sdri. Widji (tergugat) digugat oleh Sdr. Yusuf Efendi dengan Perkara No. 13/Pdt.G/2013/PN.Sby.

Saudara Yusuf Efendi, sebagai Penggugat, mengaku sebagai ahli waris yang sah atas bangunan di Jalan Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya yang berdiri di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pelabuhan. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menempati objek sengketa tanpa izin Penggugat, dan meminta kepada Perusahaan untuk mengubah izin penggunaan tanah yang sebelumnya atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat. Berdasarkan keputusan No. Pdt.G.13/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2013, Pengadilan Negeri Surabaya menerima sebagian tuntutan Penggugat.

Perusahaan telah mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengajuan banding Perusahaan diterima dan dikabulkan berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 279/PDT/2017/PT.Sby tanggal 9 Februari 2018, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Pdt.G.13/PN.Sby dibatalkan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Relas Pemberitahuan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 5 Juli 2018. Sampai tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih dalam proses pengajuan Kontra Memori Kasasi atas perkara ini.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- d) *The Company (co-defendant) and Widji (defendant) were sued by Yusuf Efendi with Case No. 13/Pdt.G/2013/PN.Sby.*

Yusuf Efendi, as the Plaintiff, claimed to be the rightful heir of the building on Jalan Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya which stands on Port Management Rights (HPL). The Plaintiff stated that the Defendant has occupied the object of the dispute without the Plaintiff's permission, and requested the Company to change the previous land use permit on behalf of the Defendant to be on behalf of the Plaintiff. Based on the decision No. Pdt.G.13/PN.Sby August 28, 2013, the Surabaya District Court granted a portion of the Plaintiff's demands.

The Company had appealed the decision to the Surabaya High Court. The Company's appeal was accepted and granted based on the Appeal Decision Notice Statement Number 279/PDT/2017/PT.Sby dated February 9, 2018, thus cancelling Surabaya District Court Decision Number Pdt.G.13/PN.Sby.

Upon the Surabaya High Court's decision, the Plaintiff filed an appeal to the Indonesian Supreme Court through Surabaya District Court with the Credential Declaration Statement Number 13/Pdt.G/2013/PN.Sby dated July 5, 2018. Until the date of the financial statements, the Company is still in the process of submitting the Cassation Memorandum Contra for the matter.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- e) Perusahaan digugat oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) dalam Perkara Perdata No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

YLPK mendalilkan Perusahaan melakukan kebohongan dengan mencantumkan lingkup bisnis sebagai penyedia jasa air kapal pada *Annual Report* Tahun 2011. Atas dalil tersebut, YLPK tidak menuntut Perusahaan untuk membayar, namun untuk meminta maaf melalui media massa. Setelah melalui pemeriksaan di persidangan, atas gugatan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan YLPK untuk seluruhnya.

YLPK menyatakan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Surabaya pada 10 Maret 2015. Atas pengajuan banding tersebut Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2015 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan surat Pengadilan Tinggi Surabaya No. 126/PDT/2016/PT.Sby Jo. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby, pada pokoknya memberi putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih belum menerima Relas Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

- f) Perusahaan (tergugat II) bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (Tergugat I) digugat oleh Masyarakat Korban Pengusuran di sekitar stasiun Kalimas dengan perkara No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.
- (a). Abdullah/Dewi Nasiroh, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- e) The Company was sued by Consumer protection Foundation (YPLK) in Civil Case No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

YLPK sued the Company for lying by stating that the scope of the business is as water services provider for ships in the 2011 Annual Report. For the lawsuit, YLPK didn't demand any payment from the Company, but an apology through the mass media. After the examination process in the court, the Surabaya District Court judges basically ruled that YLPK's claim was rejected in full.

YLPK filed an appeal on the decision to the Surabaya High Court on March 10, 2015. In response to that appeal, the Company submitted the Counter Memory of Appeal on June 29, 2015 with Receipt of Counter Memory of Appeal No. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby.

The Surabaya High Court's Panel of Judges, with Letter of Surabaya High Court No. 126/PDT/2016/PT.Sby Jo. 807/Pdt.G/2014/PN.Sby, basically ruled a verdict that strengthened the decision of the Surabaya District Court. Until the date of the financial statements, the Company still hasn't received formal verdict statement from the Surabaya District Court.

- f) The Company (Defendant II) along with PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (Defendant I) were sued by the Victims of eviction near Kalimas station with case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.
- (a). Abdullah/Dewi Nasiroh, et al as the Plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby;

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- f) Perusahaan (tergugat II) bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (tergugat I) digugat oleh Masyarakat Korban Penggusuran di sekitar stasiun Kalimas dengan perkara No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (lanjutan)

- (b). Kadarwati alias Ibu Baginda selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;

- (c). Maslichah dan Soeselo, dkk selaku Penggugat melawan PT KAI Daops VIII Surabaya selaku Tergugat I dan Perusahaan selaku Tergugat II dalam perkara perdata No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Para penggugat dalam *register* perkara No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby merupakan korban penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI Daops VIII di sekitar Stasiun Kalimas, Surabaya. Lokasi penggusuran tersebut rencananya akan digunakan dalam rangka kerjasama usaha pengangkutan petikemas melalui sarana kereta api antara PT KAI dengan Perusahaan. Atas gugatan tersebut dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas permohonan banding dari Para Penggugat *register* perkara No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby sebagaimana relaas No. 67/Pdt/2016/PT.Sby tanggal 13 April 2016. Perusahaan masih menunggu surat No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- f) The Company (Defendant II) along with PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PT KAI") (Defendant I) were sued by the Victim of eviction near Kalimas station with case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (continued)

- (b). Kadarwati aka Mrs. Baginda as plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as the second defendant in the civil case No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby;

- (c). Maslichah and Soeselo, et al as the Plaintiff against PT KAI Daops VIII Surabaya as Defendant I and the Company as Defendant II in the civil case No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

The plaintiffs in the case register No. 901-903/Pdt.G/2014/PN.Sby are victims of eviction conducted by PT KAI Daops VIII around Kalimas Station Surabaya. Location of eviction is planned to be used in the framework of cooperation by means of hauling container trains between PT KAI and the Company. Based on the lawsuit and through the inspection and checking in the court proceeding, the Panel Judge ruled the verdict which rejected all the plaintiffs' lawsuit.

At the request for appeal from Plaintiffs with registered case No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, Surabaya High Court Judge has ruled with the verdict substantially strengthening the Surabaya District Court decision No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby with letter No. 67/Pdt/2016/PT.Sby dated April 13, 2016. The Company is awaiting the verdict through letter No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- f) Perusahaan (tergugat II) bersama dengan PT KAI (tergugat I) digugat oleh Masyarakat Korban Pengrusakan di sekitar stasiun Kalimas dengan perkara No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, dan No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (lanjutan)

Menurut informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya ketiga perkara tersebut telah diputus dalam tingkat banding dengan amar putusan menguatkan putusan PN Surabaya tersebut. Pada tanggal laporan keuangan, perusahaan masih belum menerima Relas Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

- g) Perusahaan digugat Ang Agus dengan perkara No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Ang Agus menggugat Perusahaan terkait sengketa perdata revitalisasi tanah di Jalan Kalimas No. 138, 158, dan 158A yang merupakan tanah HPL Perusahaan. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan tanah tersebut sebagai tanah HPL Perusahaan.

Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No. W14U/636/HK.02/01/2017 tanggal 18 Januari 2018, dengan hasil putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Perusahaan telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 September 2018 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Kasasi No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 14 September 2018. Saat tanggal laporan keuangan, perkara sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.

- h) Perusahaan menggugat Sdr. Wawan Syarwhani dengan perkara No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Wawan Syarwhani, sebagai tergugat, merupakan pensiunan pegawai Perusahaan yang mendiami beberapa rumah tinggal di Jalan Teluk Kumai, Surabaya, yang berdiri di atas tanah HPL Pelabuhan.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- f) The Company (Defendant II) along with PT KAI (Defendant I) were sued by the Victim of eviction near Kalimas station with case No. 901/Pdt.G/2014/PN.Sby, No. 902/Pdt.G/2014/PN.Sby, and No. 903/Pdt.G/2014/PN.Sby. (continued)

Based on the Information System Tracking Lawsuit of Surabaya District Court (SIPP), The 3 registered cases have been ruled in the level of appeal with ruling that strengthened the decision of the Surabaya District Court. As at the reporting date, the Company has not received the formal letter from District Court of Surabaya.

- g) The Company was sued by Ang Agus case No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Ang Agus sued the Company related to civil disputes for revitalization of land on Kalimas Road No. 138, 158, and 158A which lies on the Company's HPL Land. The Surabaya District Court granted that part of the lawsuit from the Plaintiff and stated that the HPL Land belongs to the Company.

The Plaintiff appealed to the High Court Surabaya with case No. W14U/636/HK.02/01/2017 dated January 18, 2018 with verdict that in principle strengthened the decision of Surabaya District Court.

The Plaintiff appealed to the Supreme Court through Surabaya District Court. The Company submitted contra memory cassation dated September 14, 2018 with receipt of counter motion No. 808/Pdt.G/2016/PN.Sby dated September 14, 2018. At the reporting date, the cassation document is still in the process of checking by the Supreme Court of Republic Indonesia.

- h) The Company filed a Lawsuit against Wawan Syarwhani with case No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Wawan Syarwhani, the defendant, is a retired employee of the Company who lives in several houses on Jalan Teluk Kumai, Surabaya, which are situated on the Port's HPL land.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- h) Perusahaan menggugat Sdr. Wawan Syarwhani dengan perkara No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby. (lanjutan)

Tergugat menolak untuk membayar uang pemasukan kepada Perusahaan dengan alasan Perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan uang tersebut karena kewenangan atas HPL telah dialihkan kepada Otoritas Pelabuhan. Atas penolakan ini, Perusahaan menyampaikan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar Wawan Syarwhani membayarkan ganti rugi material sejumlah Rp33.485 dan ganti rugi immaterial sejumlah Rp193.809. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan Perusahaan.

Atas putusan tersebut, Perusahaan telah menyatakan banding, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 19 September 2018. Memori Banding atas perkara tersebut sudah dikirimkan oleh Biro Hukum Perusahaan selaku kuasa hukum Perusahaan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 18 Januari 2019.

Pada tanggal 26 Juni 2019, Perusahaan telah menerima Memori Banding dari kuasa hukum Wawan Syarwhani sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding perkara nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby. Dengan demikian sampai tanggal laporan keuangan kedua belah pihak masih mengajukan upaya hukum banding dan atas memori banding tersebut.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- h) The Company filed a Lawsuit against Wawan Syarwhani with case No. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby. (continued)

The Defendant refused to pay the obligatory fee to the Company, reasoning that the Company didn't have the authority to levy the money as the authority over the HPL has been transferred to the Port Authority. Responding to the refusal, the Company submitted a lawsuit to the Surabaya District Court for Wawan Syarwhani to pay the Rp33,485 material compensation and the Rp193,809 immaterial compensation. Based on the results of the examination in the trial, the Surabaya District Court rejected the Company's lawsuit.

In response to the decision, the Company filed an appeal in accordance with the Deed of Appeal Number 865/Pdt.G/2017/PN.Sby dated September 19, 2018. The memory of appeal upon the matter had been sent to the Company's legal counsel which acted as the Company's Attorney to the High Court of Surabaya through the District Court of Surabaya with Memory Appeal Receipt Number 865/Pdt.G/2017/PN.Sby dated January 18, 2019.

On June 26, 2019, the Company received an Appeal of Memory from Wawan Syarwhani's attorney in accordance with Case Notification/Submission of Appeal Memory Case number 865/Pdt.G/2017/PN.Sby. Accordingly, as of the date of the financial statements, both parties had a legal effort to file an appeal and the memorandum of the appeal.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- i) Perusahaan, Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digugat oleh Sdr. Ardiansyah dkk dengan perkara No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby.

Para Penggugat mengaku sebagai pemilik bekas rumah dinas di Jalan Teluk Tomini, Jalan Teluk Buli, dan Jalan Tanjung Layar, Surabaya, yang berdiri di atas tanah HPL Perusahaan yang bernilai Rp1.000.000. Para Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak milik kepada Penggugat maupun memberikan rekomendasi peralihan tanah HPL menjadi hak milik.

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap sidang dengan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hasil persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan ditolak karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena perkara merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela Nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 6 November 2018.

Berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan telah teregistrasi pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya nomor W14-U/2845/HK.02/04/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding PN Surabaya No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- i) The Company, National Land Agency of Surabaya (Land Office II), and Minister of Public Works and Human Settlements (PUPR) were sued by Ardiansyah, et al with Case No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby.

The Plaintiffs claimed to be the owners of the former official residences on Teluk Tomini Street, Teluk Buli Street, and Tanjung Layar Street, Surabaya, standing on the Company's HPL land which value was Rp1,000,000. The Plaintiffs sued the Company for committing an unlawful act by neither granting the land's ownership to the Plaintiffs nor recommending the transfer of the land's ownership from HPL freehold land.

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. The case was then raised to a trial in Surabaya District Court.

Based on the result of the trial, the Panel of Judges concluded that the Surabaya District Court was not authorized to examine and rule the case, as the case was the absolute competence of the State Administrative Court (PTUN). In response to the decision, the Plaintiffs filed an appeal through their attorney in accordance with the Notice of Appeal Against Interlocutory Decision Statement Number 315/Pdt.G/2018/PN.Sby dated November 6, 2018.

Case files have been sent to the Surabaya High Court and were registered on April 4, 2019 as stated by the Surabaya Civil Court High Court Registrar number W14-U / 2845 / HK.02 / 04/2019 on April 8, 2019 concerning Reception and Registration of PN Appeal Case Files Surabaya No. 315 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- i) Perusahaan, Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digugat oleh Sdr. Ardiansyah dkk dengan perkara No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby. (lanjutan)

Pada 29 Mei 2019, Perusahaan telah menerima Surat Pengadilan Tinggi Surabaya nomor W14-U/4582/HK.02/05/2019 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara PN Surabaya No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby, yang menginformasikan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tingkat banding. Atas surat tersebut, Biro Hukum Perusahaan melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya dan didapat informasi bahwa putusan perkara tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan banding. Perusahaan saat ini menunggu Salinan resmi putusan perkara tersebut dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk ditindaklanjuti.

- j) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh Ir. H. Irmain dengan perkara No. 553/Pdt.G/2018/PN.

Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada Penggugat dan memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL di Jalan Perak Timur, Surabaya senilai Rp1.000.000 oleh Penggugat.

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan perkara tersebut dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- i) The Company, National Land Agency of Surabaya (Land Office II), and Minister of Public Works and Human Settlements (PUPR) were sued by Ardiansyah, et al with Case No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby. (continued)

On May 29, 2019, the Company had received the Surabaya High Court Letter number W14-U/4582/HK.02/05/2019 regarding the Submission of Case File on Surabaya District Court with No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby which informed that the case had been decided by the Surabaya High Court on appeal. Upon this letter, the Company's Legal Bureau conducted a search through the Surabaya District Court's Case Tracking Information System (SIPP) and obtained information that the case decision strengthened the Surabaya District Court's decision number 315/Pdt.G/2018/PN.Sby for which an appeal was submitted. The company is currently waiting for an official copy of the case decision from the Surabaya District Court to be followed up.

- j) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by Ir. H. Irmain with case No. 553/Pdt.G/2018/PN.

The Plaintiff sued the Company for committing unlawful acts by not granting the land's ownership (freehold title) to the Plaintiff and levying an obligatory fee for the Plaintiff's use of HPL land on Perak Timur Street, Surabaya which value was Rp1,000,000.

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. The case was then raised to a trial stage. The Panel of Judges of Surabaya District Court handed down the verdict with the verdict statement that the Plaintiff's claim could not be accepted.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- j) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh Ir. H. Irmain dengan perkara No. 553/Pdt.G/2018/PN. (lanjutan)

Atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding pada tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 121/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Sby jo Nomor 553/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 27 Mei 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 481/PDT/2019/PT SBY menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Atas putusan ini, Ir. H. Irmain mengajukan proses Kasasi dan mengajukan Memori Kasasi, melalui Relaa Pemberitahuan Kasasi Nomor 553/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Nomor 481/PDT/2019/PT SBY tanggal 13 Desember 2019. Sampai tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu proses Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- k) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh PT Surya Segara Safety dengan perkara No. 599/Pdt.G/2018/PN.

Penggugat berdalil bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada Penggugat dan memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL senilai Rp500.000.000 oleh Penggugat.

Mediasi telah dilakukan atas perkara, namun mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Perkara kemudian dilanjutkan ke tahap sidang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan perkara tersebut dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- j) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by Ir. H. Irmain with case No. 553/Pdt.G/2018/PN. (continued)

Upon the decision, the Plaintiff through his attorney stated an appeal on May 8, 2019 as the Relevant Notification of the Declaration of Appeal Number 121/Deed.Pdt.Banding/2019/PN.Sby jo Number 553/Pdt.G/2018/PN.Sby on May 27 2019.

Surabaya High Court's Decision Number 481/PDT/2019/PT SBY upheld the Surabaya District Court's Decision stating that the Plaintiff's claim was unacceptable. Based on this decision, Ir. H. Irmain filed the Cassation process and filed a Cassation Memory, through the Appeal of Cassation Notification Number 553/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Number 481/PDT/2019/PT SBY dated December 13, 2019. Until the financial statement date, the Company is still waiting the cassation process to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

- k) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by PT Surya Segara Safety with case No. 599/Pdt.G/2018/PN.

The Plaintiff sued the Company for committing unlawful acts by not granting the land's ownership to the Plaintiff and levying an obligatory fee for the Plaintiff's use of HPL land, which HPL value was Rp500,000,000.

Mediation was carried out on the case, however the mediation was declared failed by the Mediator Judge. The case was then raised to a trial stage. The Panel of Judges of Surabaya District Court handed down the verdict with the verdict statement that the Plaintiff's claim could not be accepted.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- k) Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional Surabaya (Kantor Pertanahan II) digugat oleh PT Surya Segara Safety dengan perkara No. 599/Pdt.G/2018/PN. (lanjutan)

Atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 5 Maret 2019. Dalam Putusan Nomor 347/pdt/2019/PT SBY, majelis hakim memutus sebagai berikut; a. Menerima permohonan banding dari para pembeding semula penggugat; b. menguatkan putusan pada tanggal 21 Februari 2019 Nomor 599/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut.

Terhadap putusan banding tersebut, PT Surya Segara melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya kasasi dan memori kasasi ke Mahkamah Agung dimana, atas memori kasasi tersebut, Biro Hukum Perusahaan telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Desember 2018.

- l) Perusahaan dan PT Pro Energy mengajukan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri.

PT Pro Energy dan Perusahaan adalah kreditur dari PT Dinar Putra Mandiri yang berencana melakukan gugatan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT Dinar Putra Mandiri, di mana PT Dinar Putra Mandiri berutang sebesar Rp878.158.

Berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa gugatan kepailitan dapat dikabulkan apabila terdapat minimal 2 kreditur dan salah satunya telah jatuh tempo. Atas dasar aturan tersebut, maka PT Pro Energy bekerja sama dengan Perusahaan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk mengajukan gugatan pailit terhadap PT Dinar Putra Mandiri.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- k) The Company and the National Land Agency of Surabaya (Land Office II) were sued by PT Surya Segara Safety with case No. 599/Pdt.G/2018/PN. (continued)

Upon the decision, the Plaintiff through their attorney stated an appeal on March 5, 2019. In Decision Number 347 / pdt / 2019 / PT SBY, the panel of judges decided as follows; a. accepting the appeals from appellants who was previously the original plaintiff; b. Confirming the decision on February 21, 2019 Number 599 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby for the appeal was submitted.

Regarding the appeal decision, PT Surya Segara through its attorney has filed an appeal and cassation memory effort to the Supreme Court where, based on this appeal, the Company's Legal Bureau has filed a counter appeal to the appeal on December 30, 2018.

- l) The Company and PT Pro Energy filed a Subpoena to PT Dinar Putra Mandiri.

PT Pro Energy and the Company are creditors of PT Dinar Putra Mandiri that planned to file a bankruptcy and/or suspension of obligation for payment of debts, for which PT Dinar Putra Mandiri owed Rp878,158.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payments of Debts, it is stated that bankruptcy lawsuits can be granted if there are at least 2 creditors and one of them is due. On the basis of this law, PT Pro Energy cooperates with the Company at Tanjung Emas Port Semarang to file a bankruptcy lawsuit against PT Dinar Putra Mandiri.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- l) Perusahaan dan PT Pro Energy mengajukan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri. (lanjutan)

Perusahaan telah memberikan kuasa kepada Muhammad Tri Shaoky, SH dan rekan untuk mewakili kepentingan Perusahaan dalam perkara tersebut. Kuasa hukum perusahaan telah mengajukan somasi kepada PT Dinar Putra Mandiri. Perkara ini telah diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 101/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga Jakarta Pusat.

Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan PKPU.

- m) Perusahaan mengajukan gugatan intervensi kepada PT Sinar Centra Cipta atas perkara No. 273/G/2017/PTUN-JKT.

PT Sinar Centra Cipta menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas rencana reklamasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang diduga memakai sebagian lahan Penggugat. Atas gugatan tersebut, Perusahaan mengajukan gugatan intervensi terhadap PT Sinar Centra Cipta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Januari 2018 karena lokasi kegiatan dan pengembangan pelabuhan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di bawah pengelolaan Perusahaan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan PT Sinar Centra Cipta tidak dapat diterima karena PT Sinar Centra Cipta tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut. Atas putusan tersebut, PT Sinar Centra Cipta mengajukan upaya banding pada 1 Oktober 2018.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- l) The Company and PT Pro Energy filed a Subpoena to PT Dinar Putra Mandiri. (continued)

The Company has authorized Muhammad Tri Shaoky, SH and partners to represent the Company in the case. The company's legal counsel has filed a subpoena to PT Dinar Putra Mandiri. This case has been examined at the Central Jakarta District Court with the registration number 101 / Pdt. Sus-PKPU / PN. Niaga Central Jakarta.

After the trial examination, the Commercial Court Judge Panel handed down a verdict which essentially rejected the PKPU lawsuit.

- m) The Company filed an intervention lawsuit against PT Sinar Centra Cipta ("SCC") for Case No. 273/G/2017/PTUN-JKT.

PT Sinar Centra Cipta ("SCC") sued the Ministry of Environment and Forestry for the reclamation plan at the Tanjung Emas Port in Semarang which allegedly used some of the Plaintiff's land. In response to this lawsuit, the Company filed an intervention lawsuit against PT Sinar Centra Cipta and the Ministry of Environment and Forestry through the Jakarta State Administrative Court on January 31, 2018 considering that the location of port activities and development stipulated in the State Administrative Decree was under the Company's jurisdiction.

The Panel of Judges ruled that the lawsuit filed by PT Sinar Centra Cipta was rejected because PT Sinar Centra Cipta did not have a legal standing to file the lawsuit. On this decision, PT Sinar Centra Cipta submitted an appeal on October 1, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- m) Perusahaan mengajukan gugatan intervensi kepada PT Sinar Centra Cipta atas perkara No. 273/G/2017/PTUN-JKT (lanjutan)

Atas putusan banding tersebut, PT SCC menyatakan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019. Perusahaan telah mengajukan kontra memori kasasi melalui kuasa hukumnya, Siregar Setiawan Manalu Partnership, atas perkara 273/G/LH/2018/PTUN-JKT tanggal 22 Maret 2019. Perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan nomor perkara 283K/TUN/LH/2019 tanggal 24 Juli 2019. Namun sampai tanggal laporan keuangan, Subdit Legal sebagai Kuasa Hukum Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali pada awal bulan Januari 2020.

- n) Perusahaan digugat oleh Sdr. Tjokro Herwanto Teddy atas perkara No. 823/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Penggugat merupakan pengguna tanah Pelindo III di Jalan Kalimas Baru Nomor 117 Surabaya. Perjanjian Penyerahan Penggunaan bagian tanah HPL antara Penggugat dan Pelindo III (Tergugat) telah berakhir. Namun, Penggugat tidak bersedia mengembalikan tanah milik Tergugat (Pelindo III). Karena penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Pelindo III, maka Pelindo III melakukan pembongkaran bangunan sebagai tindak lanjut dalam perjanjian apabila perjanjian telah berakhir. Tanah tersebut saat ini telah digunakan oleh polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Saat ini sudah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 823/Pdt.G/2017/PN.Sby, yang diputus pada tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Pelindo III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- m) The Company filed an intervention lawsuit against PT Sinar Centra Cipta for Case No. 273/G/2017/PTUN-JKT (continued)

In response to the appeal decision, PT SCC declared a cassation on February 26, 2019. The Company filed a cassation memorandum contra through their attorney, Siregar Setiawan Manalu Partnership, for Case 273/G/LH/2018/PTUN-JKT on March 22, 2019. This case has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia at the cassation level with case number 283K/TUN/LH/2019 dated July 24, 2019. However, until the date of the financial statements, the Legal Sub-Directorate as Legal Counsel of the Company has filed a Judicial Review in early January 2020.

- n) The company was sued by Br. Tjokro Herwanto Teddy on case No. 823 / Pdt. G / 2017 / PN. Sby.

The Plaintiff is a land user of Pelindo III on Jalan Kalimas Baru Number 117 Surabaya. The Handover Agreement for the use of HPL land between the Plaintiff and Pelindo III (Defendant) has expired. However, the Plaintiff is not willing to return the land owned by the Defendant (Pelindo III). Because the plaintiff did not fulfill his obligation to surrender land in an empty condition to Pelindo III, Pelindo III undertook demolition of the building as a follow-up to the agreement if the agreement had ended. The land is currently being used by Tanjung Perak Harbor police.

Currently there is a Surabaya District Court Decision No. 823 / Pdt. G / 2017 / PN. Sby, which was decided on May 9, 2018 with the decision of the Surabaya District Court Refusing the Plaintiff's Lawsuit in its entirety and Stating Pelindo III did not commit an acts against the law.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- n) Perusahaan digugat oleh Sdr. Tjokro Herwanto Teddy atas perkara no. 823/Pdt.G/2017/PN.Sby. (lanjutan)

Atas putusan tersebut Sdr. Tjokro Herwanto Teddy mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor register 658/PDT/2018/PT.Sby., dan atas pengajuan tersebut Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan banding tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, antara lain menyatakan PT Pelindo III melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib melakukan penggantian sebesar Rp10.000.000.

Atas putusan tersebut Biro Hukum Perusahaan telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana Akta Permohonan Kasasi 823/Pdt.G/2017/PN.Sby Jo. 658/PDT/2018/PT.Sby tanggal 2 April 2019. Perkara saat ini belum diberikan salinan putusan kasasi, namun Biro Hukum Perusahaan telah mendapat info melalui SIPP bahwa Perusahaan dinyatakan menang dalam Perkara ini dan dapat dinyatakan *inkracht*.

- o) Perusahaan digugat oleh Ang Shuantie John dan PT Upaya Eksport atas Perkara nomor 1223/Pdt.G/2018/PN.SBY.

Dalam gugatannya, para Penggugat mendalilkan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sewenang-wenang melakukan perencanaan pengosongan gudang miliknya di Jalan Kalimas Baru No.128 dan 140, Surabaya.

Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya mengakui bahwa gudang tersebut adalah miliknya dan menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam amar Putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan ini Tidak Dapat Diterima dengan Alasan Nebis in Idem dengan Perkara Nomor No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby. yang telah berkekuatan hukum tetap.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- n. The company was sued by Br. Tjokro Herwanto Teddy on case no. 823 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby. (continued)

For the decision, Sdr. Tjokro Herwanto Teddy filed an appeal to the Surabaya High Court with the registration number 658 / PDT / 2018 / PT.Sby., And for the submission, the Surabaya High Court handed down the verdict which essentially canceled the decision of the Surabaya District Court being appealed and granted the Plaintiff's claim for some, among others, stating that PT Pelindo III committed an illegal act and was required to make a compensation of Rp10,000,000.

Based on this decision, the Company's Legal Bureau has filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia in accordance with the Deed of Cassation Application 823 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby Jo. 658 / PDT / 2018 / PT.Sby dated April 2, 2019. The case has not yet been given a copy of the cassation decision, but the Company's Legal Bureau has received information through SIPP that the Company has been declared victorious in this Case and can be declared final and legally binding.

- o) The company was sued by Ang Shuantie John and PT Usaha Eksport for Case number 1223 / Pdt.G / 2018 / PN.SBY.

In their lawsuit, the Plaintiffs argued that the Company had committed an illegal act by arbitrarily carrying out an emptying of a warehouse that belongs to them at Jalan Kalimas Baru No.128 and 140, Surabaya.

The Plaintiffs requested that the Surabaya District Court recognize that the warehouse was his property and stated that the Company had committed an illegal act.

In its ruling, the Panel of Judges ruled that this lawsuit could not be accepted on the grounds of Nebis in Idem with Case No.507 / Pdt.G / 2016 / PN.Sby. which has permanent legal force.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- o) Perusahaan digugat oleh Ang Shuantie John dan PT Upaya Ekspor atas Perkara nomor 1223/Pdt.G/2018/PN.SBY. (lanjutan)

Terhadap putusan ini, Penggugat melakukan upaya hukum banding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 259/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Niaga Jo. Nomor 1223/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 25 September 2019 dan telah menyampaikan memori bandingnya.

- p) Perkara Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2018.

Guna meningkatkan produktivitas bongkar muat petikemas di Terminal Multipurpose L Say Maumere, terhitung sejak tahun 2017, Pelindo 3 telah menetapkan kebijakan stack 100%. Akan tetapi, kebijakan tersebut dianggap sebagai aktivitas monopoli oleh Investigator KPPU.

Dalam laporannya, Investigator KPPU menganggap bahwa kebijakan stack 100% yang diterapkan oleh Pelindo 3 melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 19 huruf a dan b UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menindaklanjuti putusan KPPU, Pelindo 3 telah mengajukan upaya keberatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Terhadap keberatan tersebut, dalam Putusan 905/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Sby Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar lengkap yaitu Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, serta Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 15/KPPU-L/2018 tanggal 23 Agustus 2018.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, KPPU telah menyatakan kasasi namun hingga saat ini Biro Hukum Perusahaan belum menerima salinan memori kasasi.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- o) *The company was sued by Ang Shuantie John and PT Usaha Ekspor for Case number 1223 / Pdt.G / 2018 / PN.SBY.Sby. (continued)*

With respect to this decision, the Plaintiff undertook an appeal in accordance with the Notification of the Declaration of Appeal Number: 259 / Deed.Pdt.Banding / 2019 / PN.Niaga Jo. Number 1223 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby dated September 25, 2019 and has submitted its appeal memory.

- p) *Business Competition Case Number 15 / KPPU-L / 2018.*

To increase container loading and unloading productivity at L Say Maumere's Multipurpose Terminal, starting from 2017, Pelindo 3 has set a stack policy of 100%. However, the policy is considered a monopoly activity by KPPU Investigators.

In its report, KPPU Investigators consider that the 100% stack policy implemented by Pelindo 3 violates the provisions of Article 17 paragraph (1), Article 17 paragraph (2) letter b, Article 19 letter a and b of Law 5/1999 concerning Prohibition of Monopolistic and Unfair Business Competition.

Following on the KPPU's decision, Pelindo 3 has filed an objection through the Surabaya District Court. Against this objection, in Decision 905 / Pdt.Sus-KPPU / 2019 / PN.Sby, the Judge of the Surabaya District Court handed down the verdict in complete terms, namely Receiving and granting all objections filed by the Petitioners' Objection, and canceling all Decisions of the Business Competition Supervisory Commission No. 15 / KPPU-L / 2018 dated August 23, 2018.

With regard to the decision of the district court, the KPPU has declared an appeal but to date the Company's Legal Bureau has not yet received a copy of the cassation memory.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- q) Perusahaan digugat oleh Liliyana Poernama Wijaya dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2019/PN.Bjm.

Penggugat mendalilkan menguasai sebidang tanah seluas 2.819 m2 yang terletak di Jl. RE Martadinata, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang didasarkan pada kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.127/Telawang tanggal 12 April 2011, surat ukur Nomor 16/TLWG/G/2001. Berdasarkan hasil pengukuran bersama diketahui bahwa tanah Penggugat berada didalam wilayah tanah Hak Pengelolaan PT Pelindo III berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tanggal 10 September 1996.

Dalam gugatannya, penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bangunan dan tanah, menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mendirikan pagar diatas tanah objek sengketa.

Putusan dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan bahwa Pelindo III menang yang pada pokoknya Status HGB nomor 4 tanggal 28 Juli 1965 hapus demi hukum dan status kembali milik negara atau pemilik tanah yaitu PT Pelindo III (Persero), serta Menyatakan HGB No. 127/Telawang tanggal 12 April 2001 cacat hukum dan tdk mempunyai kekuatan hukum.

Pelindo III dinyatakan menang pada tingkat banding dan saat ini Liliyana telah mengajukan Kasasi.

- r) Perusahaan digugat oleh Sopian Nomor Register Perkara 250/Pdt.G/2017/PN.Mtr.

Terdapat klaim dari Sopian atas sebagian area di Gilimas, yakni seluas kurang lebih 8000 m2. Sopian mengaku telah menguasai dan mengelola area tersebut sejak lama, dan mengajukan bukti bayar SPPT-PBB dan juga sporadik dari pejabat setempat.

Adapun area tersebut saat gugatan diajukan ke Pengadilan sudah berupa daratan hasil reklamasi yang dilakukan Pelindo.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- q) The company was sued by Liliyana Poernama Wijaya with Case Register Number 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Bjm.

The Plaintiff argues that she controlled a plot of land of 2,819 m2 located on Jl. RE Martadinata, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin based on ownership of Building Rights Certificate No. 127 / Telawang dated April 12, 2011, letter of measurement Number 16 / TLWG / G / 2001. Based on the results of the joint measurements it is known that the Plaintiff's land is located within the territory of PT Pelindo III's Management Rights (HPL) based on Management Right Certificate Number 1 dated September 10, 1996.

In their lawsuit, the plaintiff requested that the Banjarmasin District Court decide that the Plaintiff is the rightful owner of the building and the land, stating that the Defendant committed Unlawful Acts because she had erected a fence on the disputed object's land.

The verdict of the Banjarmasin High Court stated that Pelindo III won, in essence, HGB Status number 4 dated July 28, 1965, voided by law and regained state or landowner status, namely PT Pelindo III (Persero), and Declared HGB No. 127 / Telawang dated April 12, 2001 was legally flawed and had no legal force.

Pelindo III was declared victorious at the appeal level and currently Liliyana has submitted an appeal.

- r) The Company is sued by Sopian on Register Case 250/Pdt.G/2017/PN.Mtr.

There are claims from Sopian for a portion of the area in Gilimas, which covers an area of approximately 8000 m2. Sopian claimed to have controlled and managed the area for a long time, and submitted proof of payment of SPPT-PBB and also sporadic from local officials.

The area when the lawsuit was submitted to the Court was in the form of land reclamation by Pelindo.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- r) Perusahaan digugat oleh Sopian Nomor Register Perkara 250/Pdt.G/2017/PN.Mtr. (lanjutan)

Dalam perspektif PT Pelindo III, area yang di klaim oleh Sopian dahulu merupakan perairan (sudah pernah dirapatkan dan tinjau lapangan bersama antara Sopian, Pelindo 3, BPN dan KSOP setempat), dimana area perairan tersebut tidak dapat dilakukan penggantian.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, memutus bahwa Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

PT Pelindo III (Persero) yang bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi NTB telah mengajukan upaya hukum Banding. Namun Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, PT Pelindo III telah mengajukan upaya hukum Kasasi yang amar putusannya ialah Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III, serta Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 154/Pdt/2018/pt MTR tanggal 07 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 250/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 06 Juni 2018.

Pelindo III dinyatakan menang dan Perkara dinyatakan *inkracht*.

42. LAWSUIT (continued)

The Company (continued)

- r) *The Company are sued by Sopian on Register Case 250/Pdt.G/2017/PN.Mtr. (continued)*

In the perspective of PT Pelindo III, the area claimed by Sopian was a water area (had been discussed and visited by Sopian, Pelindo 3, BPN and the local KSOP), where could not be given compensation for the water area.

The Panel of Judges at the Mataram District Court, decided that the Panel of Judges granted the Plaintiff's claim in part.

PT Pelindo III (Persero) in collaboration with the State Attorney at the NTB High Prosecutor's Office has filed an appeal. However, the West Nusa Tenggara High Court decided to uphold the District Court's Decision.

With regard to the decision of the Court of Appeal, PT Pelindo III has filed for a cassation whose decision was to grant an appeal by the President Director of PT Pelabuhan Indonesia III, and cancelled the Decision of the Mataram High Court Number: 154 / Pdt / 2018 / pt MTR dated November 7 2018 which corroborates the Decision of the Mataram District Court Number 250 / Pdt.G / 2017 / PN Mtr dated June 6, 2018.

Pelindo III was declared victorious and Case was declared final and legally binding.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

42. PERKARA HUKUM (lanjutan)

Entitas Anak

TPS

Mulai Desember 2018, Perusahaan sedang menjalani kasus hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus tindak pidana pencucian uang. Kasus ini melibatkan dana sebesar Rp14.640.000 yang telah disita oleh kejaksaan. Pada 31 Desember 2019 kasus ini masih berjalan. Perusahaan telah mencadangkan dana sebesar Rp14.640.000 milyar yang disajikan pada "Piutang lain-lain" (Catatan 8). Perusahaan telah memprovisikan piutang ini seluruhnya,

Pada tanggal 4 November 2019, terdapat putusan bahwa Perusahaan tidak bersalah. Namun, Kejaksaan sedang mengajukan kasasi atas kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kasus ini masih berjalan.

42. LAWSUIT (continued)

Subsidiary

TPS

Starting December 2018, the Company was alleged with money laundering corporate crime which case is being registered at Surabaya District Court. The case involves a total fund of Rp14,640,000 which was confiscated by the Prosecutor. As of December 31, 2019, the case is still on going. The Company recorded a provision for the Rp14,640,000 that were presented at "Other Receivables" (Note 8). The Company already made a full provision for this receivable.

On November 4, 2019, there is verdict awarded to the Company that it is not guilty. However, the Prosecutor appealed for cassation for the case to Supreme Court. As of December 31, 2019, the case is still on going.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

43. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019

	Operasi kepelabuhanan/ Port operation	Jasa lainnya/ Other services	Total sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	8.283.187.215	2.363.975.776	10.647.162.991	-	10.647.162.991	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	1.171.828.409	2.109.914.940	3.281.743.349	(3.281.743.349)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	9.455.015.624	3.602.535.922	13.057.551.546	(3.281.743.349)	10.647.162.991	Total segment operating revenues
Beban operasi	(9.496.002.035)	(1.690.548.342)	(11.186.550.377)	3.280.571.379	(7.905.978.998)	Operating expenses
Beban operasi lainnya - neto	481.194.669	(725.571)	480.469.098	207.478	480.676.576	Other operating expenses - net
Laba usaha					3.221.860.569	Operating income
Pendapatan keuangan	278.970.587	1.264.671	280.235.258	(132.617.733)	147.617.525	Finance income
Beban keuangan	(844.009.673)	(3.535.484)	(847.545.157)	132.606.071	(714.939.086)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.560.437.110	27.026.292	1.587.463.402	(1.582.381.982)	5.081.420	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					2.659.620.428	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(64.994.112)	(6.689)	(65.000.801)	-	(65.000.801)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					2.594.619.627	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(524.814.705)	(20.920.832)	(545.735.537)	-	(545.735.537)	Current
Tangguhan	74.815.861	5.313.525	80.129.386	-	80.129.386	Deferred
Laba tahun berjalan					2.129.013.476	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	37.278.619.769	563.687.490	37.842.307.259	(7.086.392.686)	30.755.914.573	Segment assets
Liabilitas segmen	21.954.511.186	254.884.487	22.209.395.673	(2.500.344.601)	19.709.051.072	Segment liabilities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

43. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

43. SEGMENT INFORMATION (continued)

31 Desember 2018/December 31, 2018

	Operasi kepelabuhanan/ Port operation	Jasa lainnya/ Other services	Total sebelum eliminasi/ Total before elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	9.860.876.991	917.896.425	10.778.773.416	-	10.778.773.416	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	2.463.187.961	403.615.560	2.866.803.521	(2.866.803.521)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	12.324.064.952	1.321.511.985	13.645.576.937	(2.866.803.521)	10.778.773.416	Total segment operating revenues
Beban operasi	(9.062.101.697)	(1.280.769.084)	(10.342.870.781)	2.866.263.849	(7.476.606.932)	Operating expenses
Beban operasi lainnya - neto	(737.961.988)	209.058	(737.752.930)	3.829.292	(733.923.638)	Other operating expenses - net
Laba usaha					2.568.242.846	Operating income
Pendapatan keuangan	278.679.346	1.331.792	280.011.138	(136.817.527)	143.193.611	Finance income
Beban keuangan	(946.280.735)	(2.036.161)	(948.316.896)	139.906.778	(808.410.118)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	1.099.345.431	-	1.099.345.431	(1.130.321.880)	(30.976.449)	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					1.872.049.890	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(48.544.590)	-	(48.544.590)	-	(48.544.590)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					1.823.505.300	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(583.254.015)	(13.958.157)	(597.212.172)	-	(597.212.172)	Current
Tangguhan	156.101.167	3.008.252	159.109.419	-	159.109.419	Deferred
Laba tahun berjalan					1.385.402.547	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	36.273.733.897	417.979.390	36.691.713.287	(6.185.997.700)	30.505.715.587	Segment assets
Liabilitas segmen	22.555.853.166	148.603.745	22.704.456.911	(2.554.055.121)	20.150.401.790	Segment liabilities

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019 and
for The Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

44. PERUBAHAN PADA LIABILITAS

44. CHANGES IN LIABILITIES

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flows	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Perubahan pada nilai wajar/ Change in fair value	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	14.937.140.900	(353.295.614)	557.813.117	2.310.620	14.028.342.789	Bank loans and other financial institution obligation under finance lease
Utang sewa pembiayaan	62.813.193	(62.813.193)	-	-	-	
	1 Januari 2018/ January 1, 2018	Arus kas/ Cash flows	Mutasi selisih kurs/ Foreign exchange movement	Perubahan pada nilai wajar/ Change in fair value	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	11.302.711.758	2.861.382.374	769.080.630	3.966.138	14.937.140.900	Bank loans and other financial institution obligation under finance lease
Utang sewa pembiayaan	63.257.235	(444.042)	-	-	62.813.193	

45. AKTIVITAS NON-KAS

45. NON-CASH ACTIVITIES

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas pada setiap tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Non-cash activities supporting the cash flows at each reporting dates are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	-	(444.042)	Acquisitions of fixed assets through finance lease
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	91.199.135	301.569.459	Acquisitions of fixed assets through addition on payable
Penambahan aset tetap melalui uang muka	270.262.947	479.006.089	Acquisitions of fixed assets through advance

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

46. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Operasi Kelompok Usaha telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang telah menyebar ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Efek masa depan dari wabah virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran wabah yang berkepanjangan dapat berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan Kelompok Usaha secara khusus. Namun, dampak di masa depan juga akan tergantung pada efektivitas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The Company operation has and may continue to be The Group operation has and may continue to be adversely impacted by the outbreak of Covid-19 that has since spread to many countries including Indonesia. The effects of Covid-19 to the global and Indonesian economy include adverse effect to economic growth, decline in capital markets, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operations. The future effects of the outbreak of Covid-19 to Indonesia and the Group are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 infections or prolongation of the outbreak could have severe impact on Indonesian economy and the Group in particular. However, future effects will also depend on the effectiveness of policy responses issued by the Government of the Republic of Indonesia.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) ENTITAS INDUK LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PARENT ENTITY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION December 31, 2019 (Expressed in Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.451.531.825	3.157.211.565	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	14.000.000	47.202.500	Short-term investment
Piutang usaha – neto			Trade receivables – net
Pihak ketiga	218.389.474	217.557.584	Third parties
Pihak berelasi	554.404.005	681.642.438	Related parties
Piutang lain-lain - neto			Other receivables – net
Pihak ketiga	25.675.393	20.997.759	Third parties
Pihak berelasi	146.309.770	175.067.434	Related parties
Pendapatan masih akan diterima	82.432.788	187.727.487	Accrued revenues
Persediaan		233.097	Inventories
Pajak dibayar dimuka	4.693.914	19.315.010	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	61.551.910	85.179.016	Prepaid expense
Aset lancar lainnya	33.691.709	1.938.172	Other current assets
TOTAL ASET LANCAR	3.592.680.788	4.594.072.062	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Investasi saham	1.971.804.934	1.859.141.746	Investment in shares of stock
Investasi lain-lain	24.081.576	10.141.595	Other investments
Properti investasi - neto	98.658.789	98.762.702	Investment properties – net
Aset tetap - neto	13.922.978.426	13.292.164.365	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan	380.410.549	226.738.463	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	5.162.785.112	4.366.423.950	Intangible assets - net
Estimasi tagihan pajak	139.314.816	309.041.239	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	1.517.413.907	2.029.820.476	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	23.217.448.109	22.192.234.536	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	26.810.128.897	26.786.306.598	TOTAL ASSETS

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) ENTITAS INDUK LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PARENT ENTITY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) December 31, 2019 (Expressed in Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	524.903.182	793.638.634	Third parties
Pihak berelasi	717.826.563	580.980.458	Related parties
Utang lain-lain			Other payables
Pihak ketiga	27.726.862	39.302.757	Third parties
Pihak berelasi	639.302.503	414.615.398	Related parties
Utang pajak	95.892.797	88.213.757	Tax payables
Beban akrual	648.992.514	567.647.069	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka jangka pendek	261.727.516	280.565.487	Short-term unearned revenue
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:			Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	162.163.278	351.140.707	Bank loans
Liabilitas jangka pendek lainnya	2.429.816	4.138.896	Other current liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.080.965.031	3.120.243.163	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar:			Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	81.764.281	256.387.236	Bank loans
Surat berharga yang diterbitkan	13.784.415.230	14.329.612.957	Securities issued
Liabilitas imbalan kerja	2.041.865.964	1.489.465.781	Employee benefits liabilities
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	324.273.918	320.024.091	Long-term unearned revenue
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.695.790	1.702.004	Other non-current liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	16.234.015.183	16.397.192.069	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	19.314.980.214	19.517.435.232	TOTAL LIABILITIES

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) ENTITAS INDUK LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)	31 Desember/ December 31, 2019	31 Desember/ December 31, 2018	PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PARENT ENTITY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) December 31, 2019 (Expressed in Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
TOTAL LIABILITAS (pindahan)	19.314.980.214	19.517.435.232	TOTAL LIABILITIES (brought forward)
EKUITAS			EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham			Share capital - par value Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal dasar - 3.200.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 1.018.953 saham	1.018.953.000	1.018.953.000	Authorized capital - 3,200,000 shares, subscribed and paid up amounting to 1,018,953 shares
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(490.957.156)	23.856.830	Difference from changes in equity in subsidiaries and effects of transaction with non- controlling interest
Saldo laba:			Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya	6.984.070.440	6.452.323.112	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(1.156.060.178)	(1.633.477.739)	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	1.139.142.577	1.407.216.163	Other comprehensive income
TOTAL EKUITAS	7.495.148.683	7.268.871.366	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	26.810.128.897	26.786.306.598	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) ENTITAS INDUK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PARENT ENTITY STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2019 (Expressed in Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
	2019	2018	
Pendapatan operasi	6.359.834.842	6.176.468.648	Operating revenue
Pendapatan konstruksi	744.691.217	595.966.568	Construction revenues
Beban operasi	(5.803.612.661)	(5.334.969.587)	Operating expenses
Beban konstruksi	(744.691.217)	(584.410.625)	Construction expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	1.178.884.819	150.935.652	Other operating income - net
LABA USAHA	1.735.107.000	1.003.990.656	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	205.087.141	220.270.853	Finance income
Beban keuangan	(713.716.476)	(810.225.158)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.226.477.665	414.036.351	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(53.735.288)	(39.029.899)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.172.742.377	375.006.452	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN			CORPORATE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	-	-	Current
Tangguhan	64.314.224	148.531.783	Deferred
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BADAN	64.314.224	148.531.783	CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	1.237.056.601	523.538.235	INCOME FOR THE YEAR

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) ENTITAS INDUK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PARENT ENTITY STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2019 (Expressed in Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
	2019	2018	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbangan pasti	(423.033.977)	909.231.030	<i>Remeasurements of defined benefit plans</i>
Efek pajak tangguhan pengukuran kembali program imbangan pasti	105.758.494	(227.307.758)	<i>Deferred tax effect - remeasurement of defined benefit plans</i>
Perubahan cadangan aset revaluasi	65.602.530	82.618.580	<i>Changes in asset revaluation reserves</i>
Efek pajak tangguhan - perubahan cadangan aset revaluasi	(16.400.633)	(20.654.645)	<i>Deferred tax effect - changes in asset revaluation reserves</i>
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(268.073.586)	743.887.207	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	968.983.015	1.267.425.442	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
For the Year Ended December 31, 2019

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Saldo labai/Retained earnings	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Total ekuitas/ Total Equity
Saldo per 31 Desember 2017 (sebelum disajikan kembali) Efek perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan	23.856.830	1.097.156.060	6.442.592.991
Saldo per 31 Desember 2017 (disajikan kembali)	23.856.830	1.097.156.060	6.442.592.991
Labai tahun berjalan	(686.525.748)	-	523.538.235
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	681.923.273
Pengukuran kembali revaluasi aset tetap	-	61.963.935	61.963.935
Pembentukan cadangan umum	(1.029.343.158)	-	(441.147.066)
Saldo per 31 Desember 2018	6.452.323.112	1.159.119.995	7.268.871.366
Labai tahun berjalan	(1.633.477.739)	-	1.237.056.601
Disagio saham TPS	1.237.056.601	-	(514.813.986)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(317.275.483)
Pengukuran kembali revaluasi aset tetap	-	49.201.897	49.201.897
Dividen tunai	(227.891.712)	-	(227.891.712)
Pembentukan cadangan umum	531.747.328	-	-
Saldo per 31 Desember 2019	6.984.070.440	1.208.321.892	7.495.148.883

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) ENTITAS INDUK LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PARENT ENTITY STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2019 (Expressed in Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan dan non-pelanggan	6.657.973.660	6.051.453.560	Cash received from customers and non-customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(3.233.184.875)	(3.361.570.134)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1.163.214.570)	(896.877.766)	Payment to employees
Penghasilan bunga	205.087.141	220.270.853	Interest received
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.466.661.356	2.013.276.513	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	713.024.318	880.451.063	Receipt of dividend
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(2.403.542.740)	(3.177.540.832)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penerimaan dari penjualan aset tetap	3.193.977	2.176.449	Proceed from sales of fixed assets
Penempatan investasi jangka pendek	(27.939.981)	(44.202.500)	Placement of short-term investments
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.715.264.426)	(2.339.115.820)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	500.000.000	6.901.500.000	Receipt of loans
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(853.295.614)	(4.040.117.626)	Payment of bank loans and other financial institution
Pembayaran beban bunga	(759.863.245)	(688.661.642)	Payment of interest
Pembayaran dividen	(227.891.712)	(441.147.068)	Payment of dividend
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(1.341.050.571)	1.731.573.664	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(589.653.641)	1.405.734.357	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(116.026.099)	70.337.709	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.157.211.565	1.681.139.499	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.451.531.825	3.157.211.565	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

*The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.*

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada Entitas Anak berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2013), Entitas Induk mencatat penyertaan pada Entitas Anak dengan menggunakan metode biaya. Entitas Induk juga mengakui dividen dari Entitas Anak pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the separate financial statements of the Parent Entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 4 (Revised 2013), "Consolidated and Separate Financial Statements".

PSAK No. 4 (Revised 2013) regulates that when an entity elected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a Parent Entity, in which the investments are accounted for on the basis of the directly owned interest rather than on the basis of the reports result and net assets of the investee.

Accounting policies adopted in the preparation of the Parent Entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in Subsidiaries.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2013), the Parent Entity recorded the investments in Subsidiaries using cost method. The Parent Entity also recognizes dividends from Subsidiaries in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. INVESTASI SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perubahan investasi pada entitas anak dan asosiasi adalah sebagai berikut:

2. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK

As of December 31, 2019 and 2018, The movements of investments in childs and associates are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan 1 Januari/ Acquisition cost January 1	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Nilai tercatat 31 Desember/ Carrying value December 31	
Entitas Anak						Subsidiary
PT TPS	99,50%	64.581.449	62.663.188	-	127.244.637	PT TPS
PT BJTI	96,84%	1.079.138.000	-	-	1.079.138.000	PT BJTI
PT PMS	98,23%	255.000.000	50.000.000	-	305.000.000	PT PMS
PT PHC	98,73%	140.200.000	-	-	140.200.000	PT PHC
PT PDS	90,00%	15.750.000	-	-	15.750.000	PT PDS
PT TTL	99,50%	134.325.000	-	-	134.325.000	PT TTL
Entitas Asosiasi						Associates
PT JBT	17,58%	131.047.297	-	-	131.047.297	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	-	-	37.500.000	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	1.600.000	-	-	1.600.000	PT Ambapers
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	-	(2.670.500)	-	PT Portek Indonesia
Total		1.861.812.246	112.663.188	(2.670.500)	1.971.804.934	Total

31 Desember 2018/December 31, 2018

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan 1 Januari/ Acquisition cost January 1	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Nilai tercatat 31 Desember/ Carrying value December 31	
Entitas Anak						Subsidiary
PT TPS	50,50%	64.581.449	-	-	64.581.449	PT TPS
PT BJTI	96,84%	1.079.138.000	-	-	1.079.138.000	PT BJTI
PT PMS	97,89%	255.000.000	-	-	255.000.000	PT PMS
PT PHC	98,73%	140.200.000	-	-	140.200.000	PT PHC
PT PDS	90,00%	15.750.000	-	-	15.750.000	PT PDS
PT TTL	99,50%	134.325.000	-	-	134.325.000	PT TTL
Entitas Asosiasi						Associates
PT JBT	17,58%	131.047.297	-	-	131.047.297	PT JBT
PT TPI	25,00%	37.500.000	-	-	37.500.000	PT TPI
PT Ambapers	40,00%	1.600.000	-	-	1.600.000	PT Ambapers
PT Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	-	(2.670.500)	-	PT Portek Indonesia
Total		1.861.812.246	-	(2.670.500)	1.859.141.746	Total

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. Transaksi dengan pihak berelasi

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (entitas anak, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

a. Kas dan setara kas

3. Transactions with related parties

Details of significant accounts with related parties (subsidiaries, state owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Cash and cash equivalent

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Bank			Bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	77.533.188	89.882.583	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.617.679	10.680.203	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.885.719	27.587.256	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	141.036.586	128.150.042	Total
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Syariah Mandiri			PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.489.799	129.290	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	731.355	2.364.628	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37.483	2.878.370	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	2.258.637	5.372.288	Total
Deposito			Deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.000.000	8.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	14.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19.000.000	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk	-	10.000.000	PT Bank Tabungan Negara Tbk
Total	36.000.000	32.000.000	Total

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

3. Transactions with related parties (continued)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

a. Cash and cash equivalent (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.398.600.462	1.787.880.374	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.901.000	543.037.500	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	797.523.251	515.929.068	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total	2.210.024.713	2.846.846.942	Total

b. Piutang usaha

b. Trade receivables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	91.145.385	68.136.847	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	86.568.472	72.145.981	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Pertamina (Persero)	44.932.795	39.039.566	PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	43.610.754	28.866.206	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Petrokimia Gresik	35.995.746	27.452.070	PT Petrokimia Gresik
PT Bahtera Adhiguna	11.163.377	10.859.277	PT Bahtera Adhiguna
PT Perikanan Nusantara (Persero)	9.373.897	6.920.612	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	9.314.629	6.311.709	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	377.536.370	421.910.170	Others (each below Rp5 billion)
Subtotal	709.641.425	681.642.438	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(145.923.637)	-	Less: Allowance for impairment
Total	563.717.788	681.642.438	Total

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

3. Transactions with related parties (continued)

c. Piutang lain-lain

c. Other receivables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	52.267.802	52.267.802	Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation
PT Pengerukan Indonesia (Persero)	26.576.794	29.330.404	PT Pengerukan Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	120.710.558	93.469.228	Others (each below Rp5 billion)
Subtotal	199.555.154	175.067.434	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(53.245.384)	-	Less: Allowance for impairment
Total	146.309.770	175.067.434	Total

d. Utang usaha

d. Trade payables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT Pelindo Marine Service	219.324.084	84.732.106	PT Pelindo Marine Service
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	160.693.805	85.397.010	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Nindya Karya (Persero)	79.548.563	108.231.555	PT Nindya Karya (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera	68.642.100	70.345.153	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	63.429.111	39.749.150	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Terminal Teluk Lamong	34.436.376	24.733.025	PT Terminal Teluk Lamong
PT Berkah Industri Mesin Angkat	22.960.888	37.720.650	PT Berkah Industri Mesin Angkat
Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	17.512.404	15.878.580	Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	14.637.235	14.637.235	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	6.254.940	23.695.321	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Pelindo Energi Logistik	5.054.575	11.340.036	PT Pelindo Energi Logistik
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	89.764	34.392.785	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp8 miliar)	25.242.718	30.127.852	Others (each below Rp8 billion)
Total	717.826.563	580.980.458	Total

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
ENTITAS INDUK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
PARENT ENTITY
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2019 and
For the Year then Ended
(Expressed in Thousand of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

3. Transactions with related parties (continued)

e. Utang lain-lain

e. Other payables

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
PT TTL	314.667.012	134.825.052	PT TTL
PT APBS	282.958.064	268.192.341	PT APBS
PT PHC	28.306.516	3.027.473	PT PHC
PT BIMA	11.585.278	4.826.043	PT BIMA
PT TCS	-	2.618.524	PT TCS
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1.785.633	1.125.965	Others (each below Rp1 billion)
Total	639.302.503	414.615.398	Total

g. Pendapatan diterima dimuka jangka pendek

g. Short-term unearned revenue

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	
Uang panjar pelanggan	6.128.372	12.662.640	Advances from customer
Uang titipan	31.318.219	18.262.220	Fund retained
Total	37.446.591	30.924.860	Total

2019

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT



PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia
Telp. | Ph. +62 31 3298631-37
Faks. | Fax. +62 31 3295204, 3295207

www.pelindo.co.id